20 TAHUN INDONESIA MERDEKA

20 TAHUN INDONESIA MERDEKA

IV

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

DJILID I.

1. Kata-pengantar Presiden.
2. Kata-kata pengantar Panitia Penjusun Naskah Buku 20 Tahun Indonesia Merdeka.
3. Lembaga-lembaga Negara Tertinggi.
4. Penduduk.

DJILID II.

1. Kompartimen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
2. Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri.
3. Kompartimen Keuangan.

DJILID III.

Kompartimen Pertahanan/Keamanan/Kasab

DJILID IV.

1. Kompartimen Pembangunan.
2. Kompartimen Perindustrian Rakjat.

DJILID V.

1. Kompartimen Pertanian dan Agraria.
2. Kompartimen Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

DJILID VI.

Kompartimen Distribusi.

DJILID VII.

1. Kompartimen Maritim.
2. Kompartimen Kesedjahteraan.
3. Kompartimen Urusan Agama.

DJILID VIII.

Kompartimen Pendidikan/Kebudajaan.

DJILID IX.

1. Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat.
2. Kepartaian.

ISI :

Halaman

KOMPARTIMEN PEMBANGUNAN.

DEPARTEMEN URUSAN PENERTIBAN BANK DAN MODAL SWASTA.

DEPARTEMEN PERBURUHAN.

DEPARTEMEN URUSAN RESEARCH NASIONAL.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DASAR DAN PERTAMBANGAN.

DEPARTEMEN URUSAN VETERAN DAN DEMOBILISAN.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RAKJAT.

KOMPARTIMEN PEMBANGUNAN

- ★ DEPARTEMEN URUSAN BANK & MODAL SWASTA
- ★ DEPARTEMEN PERBURUHAN
- ★ DEPARTEMEN URUSAN RESEARCH NASIONAL
- ★ DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DASAR & PERTAMBANGAN
- ★ DEPARTEMEN URUSAN VETERAN & DEMOBILISAN
- ★ KOMPARTIMEN PERINDUSTRIAN RAKJAT

KOMPARTIMEN PEMBANGUNAN

PENDAHULUAN.

Dalam sedjarah pertumbuhan Republik Proklamasi 17 Agustus-1945 sebagai akibat politik devide et impera kolonial Belanda jang bertjokol ± 350 tahun, pada awal revolusi banjak hal dan rupa-rupa peristiwa silih berganti timbul ditengah-tengah menggelora dan membaranja semangat djuang 80 djuta Rakjat Indonesia mengganjang Kolonialisme Belanda.

Peristiwa besar-ketjil dari tahun ke-tahun merupakan tanaman subur pada awal Revolusi '45-'48 jang telah dipelihara setjara njata dan teratur oleh pihak kolonialis untuk memetjah semangat djuang Bangsa Indonesia. Namun demikian tipu muslihat dan akal bulus mereka tak dapat menghambat arus semangat Revolusioner Bangsa Indonesia jang benar-benar telah haus akan kebebasan dan kemerdekaan.

Bahkan silih-bergantinja peristiwa-peristiwa itu merupakan pupuk dan gemblengan physik/mental untuk bertjantjut-taliwondo menjelesaikan Revolusi dengan semangat patriotik pantang mundur. Sedjarah telah mentjatat, bukan sadja Nasional-tetapi djustru Internasional, chususnja bangsa-bangsa Asia dan Afrika jang setjara titdak langsung mengakui, bahwa Revolusi Indonesia adalah „Pola" Revolusi dan Kemerdekaan bangsa-bangsa terdjadjah, chususnja Negara-negara di Asia dan Afrika.

Begitulah seterusnja perkembangan dan pertumbuhan Revolusi kian membesar dengan gerak tjepat, sambil mengkonsolidasikan diri dan menjempurnakan segala aparaturnja dari tingkat terbawah sampai teratas jang disesuaikan dengan derap-iramanja serta kebutuhan Revolusi itu sendiri. Puntjak dari pada tuntutan Revolusi itu ialah „penguburan sistim Libralisme di-bumi Indonesia jang merupakan barikade kolot dan penghambat terhadap tudjuan Revolusi Indonesia. Maka dengan Dekrit P.J.M. Presiden kembali ke-Undang-undang 1945 pada tanggal 5 Djuli 1959 dan sekali gus berlakunja sistim Demokrati Terpimpin di-bumi Indonesia merupakan tiang-pantjang badja dan merupakan „Titik Garis Awal" untuk merumuskan taktik baru setjara frontal mengadakan koreksi/penilaian-penilaian.

Salah satu hasil dari pada koreksi/penilaian ini ialah adanja penjusunan organ pembantu Presiden jang lebih ter-arah

untuk meningkatkan dan mengisi daya tahan Revolusi dan jang merupakan dasar dari pada „Politik" mentjapai „Sosialisme Pantjasila", dimana warganegara Indonesia, Sukarno berhasil membentuk kabinet jang dikenal dengan sebutan „Kabinet Karya" dan kemudian memperoleh penjempurnaan kembali jang terkenal dengan istilah Re-grouping Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962.

Mulai saat inilah peluru-peluru Revolusi lebih ter-arah sasarannja, dimana konsepsi-konsepsi Demokrasi Terpimpin mulai njata dilaksanakan dan dikembangkan, chususnja jang menjangkut perentjanaan pembangunan dimana suatu Dewan Chusus dibentuk pada tanggal 15-Agustus-1956 (Depernas) dan kemudian pada achir tahun 1963 disempurnakan kembali fungsi dan tugasnja mendjadi Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Kompartimen Pembangun sebagai Koordinatornja.

I. PERKEMBANGAN ORGANISASI.

A. PERIODE REVOLUSI PHYSIK (1945-1950).

Manifestasi tjetusan tekad nasional Bangsa Indonesia adalah hekekat dari pada Revolusi Agustus '45 untuk mendirikan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang bebas merdeka, bersatu, berdaulat, adil makmur berdasarkan Pantjasila. Untuk mempertahankan Republik Proklamasi itu seluruh funds and forces terpusatkan kepada perlawanan semesta untuk mempertahankan dan menjelamatkan Republik Proklamasi 17-8-1945.

Dibawah kibaran Sang Saka Merah Putih situasi perdjuangan phisik dari hari kehari semakin menghebat, satu demi satu sisa-sisa kekuasaan Djepang direbut oleh barisan-barisan pemuda, buruh-tani dan rakjat Marhaen jang kesemuanja bergerak satu irama dan nada disertai dengungan pekik nasional „Merdeka". Dilain pihak Panitia Kemerdekaan sibuk menjusun aparatur pemerintahan dari tingkat Kabinet, Dewan Lembaga sampai Daerah dan Tjabang.

Tiap unsur Lembaga-lembaga Negara, Dewan-dewan dan Badan-badan bekerdja keras, pada saat mana usaha pembangunan materiil sangat terbatas dapat dilaksanakan, walaupun demikian dalam keadaan jang serba sukar dan sulit setjara chusus dan terpisah-pisah beberapa sektor pembangunan idiil dapat dibina dan dilaksanakan, sebagai misal pembangunan dalam bidang Angkatan Perang dimana di Jogjakarta dan Tangerang didirikan Akademi-akademi Militer, begitu pula dalam lapangan pendidikan dan kebudajaan. Problema pokok pada saat itu ialah kesulitan dalam bidang Infra-struktur (Darat) dan telekomunikasi sebagai akibat politik bumi hangus jang dilakukan fihak kolonial Belanda. Masa-masa suram ini diachiri mendjelang pengakuan kedaulatan ditahun 1949 dimana para ahli-ahli pikir, ahli-ahli teknik, ahli-ahli Riset Ilmiah dan ahli politik Ke-Negaraan dapat meng-istirahatkan popor bedilnja dan memulai perhatiannja dalam bidangnja masing-masing. sekalipun belum menghasilkan sesuai dengan kebutuhan Revolusi.

Sekalipun pembangunan materiil terhambat, statistik dan grafik perdjuangan menandjak tinggi dimana hak hidup apa jang dinamakan Negara-negara Bagian a la R.I.S. terkubur dan „Negara Kesatuan Republik Indonesia" berdiri kembali (17-8-1950).

B. PERIODE SURVIVAL (1950 — 1955).

Setelah babak Revolusi physik berachir dan Republik Proklamasi memasuki tahap baru, gemblengan semangat Bangsa Indonesia makin menebal, dimana para ahli riset ilmiah, perentjana, teknik dan lain-lain mulai mengadakan konsultasi dan diskusi-diskusi. Masjarakat tjendikiawan mulai melihat djauh kedepan dengan suatu kejakinan bahwa saatnja telah tiba untuk bertjantjut-taliwondo mengedjar ketinggalan dalam bidang ilmu dan pembangunan Negara.

Para penjusun dan perumus konsepsi pembangunan giat mengadakan eksperimen-eksperimen dan riset setjara meluas sehingga mengalami perobahan dan kemadjuan-kemadjuan jang menggembirakan, chususnja dalam pola-pola pembangunan. Suatu hal jang patut dinilai ialah kemadjuan-kemadjuan dalam bidang riset dan ilmu pengetahuan, dimana pada tahun 1961 dibentuk „Madjelis Ilmu Pengetahuan Nasional" ini adalah salah satu djawaban konkrit terhadap Amanat Negara P.J.M. Presiden jang berdjudul „Hidup atau Mati" dalam mana tegas adjakan P.J.M. Presiden untuk menjempurnakan dan melengkapkan aparatur Negara disegala bidang. Memang benar, tanpa sesuatu ilmu pengetahuan jang tjukup tidaklah mungkin membangun Masjarakat dan Negara jang modern.

C. PERIODE CHALLENGE DAN RESPONSE TERHADAP DEMOKRASI TERPIMPIN (1955 — 1959).

Awal tahun 1956 dan berikutnja dapatlah dikatakan merupakan permulaan lembaran sedjarah baru bagi peri-kehidupan Republik Proklamasi, dimana pada tahap ini pertumbuhan aparatur jang bergerak dan bertugas dalam bidang perentjanaan pembangunan mulai menaruh perhatian setjara chusus, sekalipun hasil karya Biro Perantjang Negara, jaitu Rentjana Pembangunan 5 tahun (1955—1960) jang telah disahkan oleh D.P.R. dalam tahun 1958 tertunda pelaksanaannja, disebabkan kewewenangnja tidak diberikan setjukupnja. Hal tersebut tidaklah terlepas dari pada hasil keputusan Musjawarah Pembangunan tahun 1957, dimana diandjurkan perlunja dibentuk Dewan Perantjang Nasional (Depernas).

Sedjalan dengan keluarnja Dekrit Presiden kembali ke-Undang-undang 1945 (Dekrit 5 Djuli 1959) dan menjusul lahirnja Manipol/Usdek, maka pemikiran dan usul-usul pembentukan „Depernas" di-intensipkan, kemudian dengan direalisirnja Un-

dang-undang No. 80 tahun 1958, idaman pembentukan „DEPERNAS" lahir pada tanggal 15 Agustus 1959 dengan susunan dan tugas sebagai berikut :

— Pimpinan:

Dewan ini dipimpin oleh seorang Wakil Menteri Pertama dan beranggotakan 80 orang wakil golongan masjarakat dan daerah.

— Organisasi:

Dewan ini berstatus Lembaga Tertinggi dan berdiri disamping Kabinet.

— Tugas:

Dewan ini bertugas merentjanakan, mengawasi dan menilai aktivitas pembangunan-pembangunan.

Sekalipun demikian Dewan inipun belumlah bekerdja sebagai diharapkan, satu dan lain hal karena terlalu banjak dipengaruhi oleh fakttor-faktor politis.

Disamping aktivitas bidang Perentjanaan Pembangunan Pemerintah bekerdja keras melaksanakan Tri-Programnja sebagai hasil revisi Kabinet sebelumnja (Kabinet Djuanda ke II), chussusnja jang mengangkut bidang pangan. Untuk tertjapainja tudjuan ini, berdasarkan instruksi Presiden/Panglima Tertinggi No. : 1/1959, tanggal 8 Desember 1959 dibentuk „Komando Operasi Gerakan Makmur" dengan tugas utama:

a. Mengadakan suatu kegiatan luar biasa dengan koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur Pemerintah berdasar suatu rentjana bersama dan mengikut-sertakan potensi buruh-tani dan rakjat Marhaen dalam gerakan massal, dibawah suatu pimpinan jang tegas-berani dan kuat, guna mentjapai tambahan produksi Pangan, terutama „beras" sehingga dalam waktu 3 tahun (1959 — 1962) telah tertjapai „self-supporting".

b. Disamping usaha selfsupport dalam bidang beras, dilakukan peningkatan produksi djug a dalam bahan pangan lain, seperti djenis padi-padian, djagung, kehewanan/penternakan, perikanan darat/laut.

c. Seirama dengan gerakan massal dalam bidang pangan dibentuk pula gerakan „Selfsupporting" dalam bidang sandang jang dikenal dengan nama „Depertek" dan badan pelaksananja „Buppertek" dimana tugas utamanja ialah meningkatkan produksi dalam lapang pertekstilan/sandang.

d. Meningkatkan hasil bahan export bidang perkebunan, kehutanan, dan bahan-bahan hasil pertambangan dan industri Rakjat.

D. PERIODE PANTJA WARSA MANIPOL (1959-1964).

Tahun 1959 benar-benar merupakan tahun tantangan (challenge) bagi usaha peningkatan produksi nasional, baik sandang pangan maupun bahan-bahan penghasil devisa. Disamping itu masih ada „challenge" ialah menghantjurkan kontra Revolusi. kaum pentjoleng dan Pantjasila-Manipol munafik jang mengchianati Republik Proklamasi 17-Agustus-1945. Sendjata ampuh **„Pantjasila" „U.U.D.-1945", „Manipol/Usdek" dan „Dekon"** adalah pegangan maha kuat untuk membawa arah kegiatan nasional kita untuk „Berproduksi" dan „Berselfsupporting".

Sedjalan dengan garis politik baru setelah dekrit 5 Djuli 1959, maka organ pembantu Presiden disempurnakan dimana Kabinet Kerdja ke I direvisi kembali berdasarkan Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 (Regrouping) demi diperolehnja team pembantu Presiden jang baik dan tertjapainja effisiensi kerdja dan karya setjara maksimal dan dihapusnja institut „Menteri Inti" dan di-introdusir mendjadi institut, „Wakil Menteri Pertama" dimana diharapkan dengan susunan baru ini dapat tjepat dipetjahkan segala persoalan dan masalah-masalah, baik politis, militer, sosial kulturil, sosial ekonomis dan lain-lain hal jang prinsipiil.

Diantara 8 (delapan) Wakil Menteri Pertama itu terdapat Wakil Menteri Pertama jang mengurus „Bidang Produksi" dan salah satu pelaku utama jang harus menanggulangi „Programpertama" Kabinet ini ialah:

Sandang Pangan.

Disamping tugas-tugas pembangunan lainnja jang perlu pula memperoleh perhatian chusus adalah „Projek Serba Guna Djatiluhur" dan lain-lain sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. I dan II tahun 1960 dalam bidang produksi.

Dalam tugas dan pimpinannja Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi aktip mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dalam segi kebidjaksanaan, perentjanaan, pelaksanaan dan pengawasan jang meliputi bidang-bidang:

1. Perindustrian Dasar dan Pertambangan.
2. Perindustrian Rakjat,

3. Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
4. Perburuhan,
5. Pertanian Agraria dan
6. Research Nasional.

Disamping tugas tambahan jang bersifat chusus seperti: Gerakan Operasi Makmur, Badan Pertekstilan dan lain-lain.

Penutup tahun 1963 berdasarkan keputusan P.J.M. Presiden No. 232 tahun 1963 diadakan revisi kembali Kabinet Kerdja ke II, dengan tudjuan untuk lebih meningkatkan „Daya Tempurnja" sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Revolusi dalam rangka konfrontasi terhadap projek Nekolim Malaysia. Kabinet ini dikenal dengan istilah „Kabinet Kerdja Gaja Baru".

Tjiri chas dari pada reshuffle Kabinet ini bukanlah hanja terbatas pada status kementerian-kementerian Negara, tetapi djustru turut dirombak dan diintegrasikannja Lembaga, Dewan dan Badan-badan legislatif kedalam kekuasaan Eksekutif seperti: D.P.R.-G.R., D.P.A., M.P.R.S. termasuk Dewan Perantjang Nasional; kini merupakan pertanda permulaan „Pembantingan Stir" sebagai diamanatkan oleh P.J.M. Presiden pada Amanat Negaranja „Tahun Vivere Pericoloso".

Kesemuanja ini diambil berdasar pada pertimbangan dan penjesuaian tingkatan Revolusi Bangsa Indonesia dimasa sekarang, oleh karenanja dalam penjusunan mengalami perobahan-perobahan dimana institut „Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama" dihapus dan diganti dengan institut „Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Menko-menko". Diantara ketiga Wakil Perdana Menteri, Wakil ke III (W.P.M.-III) disamping kedudukannja merangkap pula Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan dan „Pintu Gerbang" menudju kedjalan „Sosialisme" termasuk dalam bidang tanggung-djawabnja.

Atas dasar inilah maka dalam program Kabinet Kerdja Gaja Baru ada 3 pasal; jaitu:

1. Sandang-pangan,
1. Pengganjangan „Malaysia" dan
3. Melandjutkan pembangunan.

Tampaklah djelas bahwa ketiga pasal jang sederhana tadi meliputi persoalan ekonomi dan perdagangan, penambahan produksi dan kelantjaran usaha peningkatan aktivitas perdagangan baik didalam negeri dan antar pulau maupun antar negara (perdagangan luar negeri).

Ketiga pasal program Kabinet tadi djuga erat tali-temalinja dalam rangka peningkatan dan penjempurnaan infra-struktur dari pada alat-alat perekonomian, infra-struktur dari pada hubungan-hubungan antar kota, daerah dan antar pulau jang mempunjai arti strategis dalam bidang ekonomi keluar dan kedalam. Sesuai dengan djiwa dan tudjuannja, maka penjusunan struktur organisasi Kompartimen Pembangunan diarahkan kepada tudjuan dan sasaran pokoknja, dimana berdasar surat Keputusan W.P.M. III/Menko Pembangunan No.: Kpts/001/Menko. Pemb./1964, tanggal 19 Pebruari 1964 tegas digariskan suatu kebidjaksanaan jang mentjakup bidang-bidang aktivitas dan tugas sebagai berikut:

1. Menteri Kompartimen Pembangunan sebagai salah satu unsur dalam Kesatuan Team Pembantu Presiden jang bertugas meng-koordinir dan meng-sinkronisir kegiatan-kegiatan dari Departemen/Instansi-instansi dalam lingkungan Kompartimen Pembangunan untuk didjuruskan kearah tertjapainja tudjuan Revolusi, jaitu pembangunan masjarakat sosialis Pantja Sila.
2. Untuk tertjapainja tudjuan dan tugas pokok, Kompartimen Pembangunan bergerak dan bertugas menegakkan tulang punggung dari pada Ekonomi Sosialis Indonesia jang meliputi:
   a. Infra - struktur.
   b. Infra - Tani.
   c. Industri Dasar/Pertambangan dan Perminjakan.
   d. Sumber-sumber tenaga kerdja.
   e. Industri Rakjat dan
   f. Projek Research Nasional dan lain-lain jang terlingkung dalam Kompartimen Pembangunan.
3. Disamping tugas-tugas pokok terdapat pula tugas dan projek-projek chusus diantaranja:
   1) Penerbitan „Berita Kompartimen Pembangunan dan Madjalah Mimbanr Pembangunan".
   2) Projek Angkutan Tavip.
   3) Production Sharing.
   4) Koordinasi Pameran-pameran Pembangunan, Research, Leppri dan lain-lain.
   5) Koordinasi Angkutan Darat, Laut bagi kepentingan pembangunan nasional.

6) Koordinasi dalam panitia kredit luar negeri, bahan-bahan baku vital, hasil industri keradjinan Rakjat dan lain-lain.

Dalam usaha merealisir garis kebidjaksanaan Menteri koordinator Kompartimen Pembangunan lebih banjak dititik-beratkan pada sistim kolektivitas dalam arti musjawarah untuk mufakat diantara Pedjabat-pedjabat Departemen lingkungan Kompartimen Pembangunan, sehingga tertjapainja makna „Pembantingan Stir" dibidang mental, tjara berfikir, tjara kerdja, sehingga praktek "Hukum Relation" dan "Human Approach" dapat menjertainja setjara zakelijk. Namun demikian pada echelon bawahan diutamakan berlakunja azas spesialisasi dan kontinuitas sebagai salah satu unsur insentif dalam kerdja, demi tertjapainja effisiensi semaksimal-maksimalnja.

Mendjelang usia Kabinet ini satu tahun jaitu dari Nopember 1963 s/d Agustus 1964, projek/gefakan „Komando/Operasi Makmur" dilikwidir dan drobah statusnja mendjadi „Dewan Produksi Nasional" berdasar Peraturan Presiden No. 4 tahun 1964, kemudian menjusul pembubaran „Kabinet Kerdja Gaja Baru" pada tanggal 27 Agustus 1964 dengan Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964.

Reshuffle Kabinet ini meliputi pemetjahan Departemen Pertanian/Agraria dari „Kelompok Kompartimen Pembangunan" sehingga tugas dan kewewenangan koordinasi bidang pertanian/agraria (Infra-Tani) dihapus dalam struktur organisasi Kompartimen Pembangunan, Kebidjaksanaan ini didasarkan dan disesuaikan dengan „Kiprah-Tekadnja"Revolusi Bangsa Indonesia jang terus bertumbuh, dan ber-selfpropelling growth dalam konsepsi-konsepsi sesuai dengan tuntutan djaman, tuntutan „Ampera" dan bahkan sesuai dengan tuntutan „The Universal Revolution of Man" tjuplikan pidato Presiden pada Tavip).

Pemetjahan dan peningkatan Departemen Pertanian/Agraria ini disesuaikan pula dengan konsepsi „Pembantingan Stir" dan pembagian „Arah" dalam bidang ekonomi terpimpin (Ekonomi Sosialis) jang sesuai dengan derap-iramanja „Pendjebolan dan Pembangunan" ekonomi pada tahap sekarang, jaitu:

1. Peningkatan kwalitas dan kwantitas produksi penghasil devisa,

2. Peningkatan Produksi bahan-bahan sebagai salah satu sjarat „Berdikari" (penghapusan impor beras) disamping pendjebolan dan pembangunan-pembangunan pada sektor jang lain. (Garis Umum „Banting Stir" dalam kebidjaksanaan dan pelaksanaan Ekonomi dan Pembangunan, pasal 1 dan 2 Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965).

E. PERIODE MENDJELANG „BERDIKARI" (1965).

Ulang tahun ke-V lahirnja „Manifesto/Politik Republik Indonesia" (Manipol) jang bertepatan dengan Amanat Negara P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersentus 1959 s/d 17 Agustus 1964) jang berdjudul „Tahun Vivere Pericoloso" merupakan „Sendjata Penggugah Dan Landasan Baru" untuk mendalami dasar tudjuan Revolusi sebagai diamanatkan dalam „Tavip" jang dikenal dalam pengertian istilah: Romantika, Dinamika dan Dialektika-nja Revolusi Indonesia.

Sesuai dengan perkembangan Revolusi, maka konsepsi-konsepsi pembangunan nasional pada umumnja, dan chususnja ngunan disesuaikan dengan arah dan sasaran pokoknja, jaitu Amanat Politik P.J.M. Presiden Panglima Tertinggi Abri/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dalam sidang umum ke-III M.P.R.S. tahun 1965 dengan berpegang teguh pada prinsip: Tri Sakti Sukarno jaitu:

a. Berdaulat dalam bidang Politik.
b. Berdikari dalam bidang Ekonomi.
c. Berkepribadian dalam bidang Kebudajaan.

II. PERKEMBANGAN DAN USAHA-USAHA.

A. BIDANG ROUTINE.

1. **Anggaran Belandja.**

Mengingat sifat tugas dari pada Kompartimen Pembangunan hanja bersifat koordinatif-administratif, maka dalam bidang Anggaran Belandja Departemen-departemen diurus oleh Departemen-departemen bersangkutan jang dalam penjusunan dan realisasinja bekerdja-sama antara Kompartimen Pembangunan, Baperdep dan pedjabat jang berwenang dalam soal Anggaran Belandja.

Chusus untuk anggaran Sekretariat dapat dilaporkan sebagai perintjian dibawah ini:

Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Tahun Dinas 1965

BG. 5A.

Sekretariat Menko Pembangunan

No.	Djenis pengeluaran	A.B. 1964 Induk + tambahan	Anggaran Belandja 1965	
			Usul Departemen	Anggaran Belandja
	Anggaran biasa			
1.	Belandja pegawai	2.284,5	40.499,50	27.175,—
2.	Pensiun dan sebagainja	—	—	—
3.	Belandja barang	50.400,75	126.372,—	37.000,—
4.	Belandja pemeliharaan	—	3.000,—	1.000,—
5.	Ongkos perdjalanan dinas	3.000,—	4.500,—	2.000,—
6.	Pembagian penerimaan Negara	—	—	—
7.	Subsidi, bantuan, hadiah	—	—	—
8.	Bunga tjitjilan	—	—	—
	Djumlah anggaran biasa	55.685,25	174.371,50	67.175,—
9.	Anggaran Pembangunan non development	91.000,—	220.000,—	50.000,—
10.	Anggaran perusahaan...	—	—	—
11.	Anggaran perhitungan...	—	—	—
	Djumlah seluruhnja	146.685,25	394.371.50	117.175,—

a. **Perintjiam Belandja Barang:**

Ongkos kantor	Rp.	10.000.000,—		
Pembelian inventaris	„	4.000.000,—		
Ongkos eksploitasi kendaraan ...	„	5.000.000,—		
Ongkos kesedjahteraan pegawai	„	400.000,—		
Sokongan pegawai dihotel/mess	„	100.000,—		
Keperluan Panitya/Badan jang dibentuk Menko Pembangunan	„	2.000.000,—		
Ongkos penggantian pengobatan	„	500.000,—		
Biaja pengeluaran lain-lain Menko Pembangunan	„	2.000.000,—		
Keperluan Buperteng	„	5.000.000,—		
Public Relations	„	8.000.000,—		
			Rp.	37.000.000,—

b. **Beladjar Pemeliharaan:**

Pemeliharaan gedung kantor ...	„	700.000,—		
Pemeliharaan inventaris	„	300.000,—		
			„	1.000.000,—

Ongkos perdjalanan dinas:

Perdjalanan pegawai sipil/pedjabat dalam Negeri	„	2.000.000,—		
			„	2.000.000,—

Anggaran pembangunan non development:

Kendaraan pengangkutan pegawai	„	15.000.000,—		
Perbaikan berat/perluasan gedung kantor	„	35.000.000,—		
			„	50.000.000,—

c. **Perintjian Belandja Pegawai:**

1. Belandja pegawai Anggaran Induk 1964	„	2.284.500,—		
ditambah dengan tundjangan pengabdian dan lauk-pauk jang setjara keseluruhan adalah l.k. 83% × 2.284.500,—	„	1.896.135,—		
			„	4.180.635,—
Acres untuk kenaikan gadji tahun 1965 (5%)	„	209.031,75		
			„	209.031,75
2. Djumlah pegawai 155 orang:				
Beras/djagung = 5×8×12×155×Rp 300,— =	„	22.320.000,—		
G u l a = 5×½×12×155×Rp. 100,— =	„	465.000,—		
			„	22.785.000,—
D j u m l a h:			Rp.	27.174.666,75
Dibulatkan :			„	27.175.000,—

2. Kepegawaian.

Perkembangan kepegawaian djuga terbatas pada sekretariat Kompartimen Pembangunan.

Tahun	Lingkungan	Golongan/Tingkat							Djumlah
		A	B	C	D	E	F		
							Sipil	milt	
1965	Sekretariat Kompartimen Pembangunan	16	16	7	9	7	17	—	72
	idem	—	—	—	—	—	—	3	3
Djumlah besar		16	16	7	9	7	17	3	75

3. Bidang pendidikan/publikasi.

Chusus dalam bidang pendidikan Kompartimen Pembangunan sedang giat menjusun konsepsi-konsepsi baru untuk kemungkinannja mengadakan sistim pendidikan, indoktrinasi, tjeramah-tjeramah setjara kolektif-menjeluruh meliputi Departemen-departemen dalam lingkungan Kompartimen Pembangunan, chususnja jang menjangkut up-grading dalam bidang skill dan sebagainja.

Bidang publikasi pembangunan telah dirintis selangkah madju dimana diterbitkan „Berita Kompartimen Pembangunan" dan madjalah „Mimbar Pembangunan" jang tenaga-tenaganja terdiri dari wakil-wakil Humas Departemen lingkungan Kompartimen Pembangunan.

4. Bidang Pembangunan Idiil/Materiil.

Dalam bidang ini untuk tidak mengurangi azas/tudjuan spesialisasi dan pembidangan tugas Depatemen-departemen bersangkutan, maka kewewenangan Kompartimen Pembangunan bersifat memberi bimbingan dalam tingkatan „Koordinatif".

Chusus dalam "Physical Progress Report" dapat dilihat pada lampiran mengenai projek-projek Departemen lingkungan Kompartimen Pembangunan, terlampir dibelakang ini.

B. KESIMPULAN-KESIMPULAN SEGI OPERASIONIL.

1. Pada umumnja tugas chusus dalam bidang „Pembangunan" apabila ditarik dari dasar „Strategi Politis" menundjukkan suatu grafik tandjakan jang „Terdjal" sesuai dengan derap-langkahnja Revolusi Indonesia.
2. Dalam „Inzet Teknis" mengalami beberapa „Kelambanan", satu dan lain hal tidaklah terlepas dari faktor politis dalam arti keseluruhan, namun, demikian sampai babak „Berdikari" menundjukkan hasil-hasil jang tjukup memberi harapan, jaitu telah tertjapainja target penjelesaian 55 — 100% dari pada apa jang telah ditetapkan oleh Ketetapan M.P.R.S. tahun 1960.

⁂

PHYSICAL PROGRESS REPORT PROJEK-PROJEK DEPARTEMEN-DEPARTEMEN LINGKUNGAN KOMPARTIMEN PEMBANGUNAN

I. DEPARTEMEN PERBURUHAN.

1. PROJEK: **Research mengenai sjarat-sjarat perburuhan** s/d achir tahun 1963.

— Penjelidikan mengenai sjarat-sjarat kerdja	25	%
Penjelesaian keseluruhan	...	%

2. PROJEK: **Institut Daya Guna** s/d achir tahun 1963.

— Informasi	100	%
— Publikasi	80	%
— Indoktrinasi	100	%
— Pembinaan dalam azas-azas management	78	%
— Pembinaan dalam "Work Study"	60	%
— Pembinaan T.W.I. Trainers	114	%
— Pembinaan T.W.I. Bagi Supervisors	131, 5	%
— Survey dan Konsultasi	100	%
— Seminar management	80	%
— Pendirian Kantor-kantor Perwakilan	100	%
Penjelesaian keseluruhan	94, 4	%

3. PROJEK: **Penelitian Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerdja** s/d achir tahun 1963.

— Latihan para Surveyors, Wakil-wakil Pengusaha dan para petugas perusahaan	75	%
Penjelesaian keseluruhan	...	%

4. PROJEK: **Lembaga Kesehatan Buruh**
s/d achir tahun 1963.

— Pemeriksaan badan buruh	...	%
— Pekerdjaan djuru rawat dalam Perusahaan	...	%
— Ruangan kerdja dalam perusahaan	...	%
— Sebab-sebab ketjelakaan dalam perusahaan	...	%
Penjelesaian keseluruhan	...	%

5. PROJEK: **Bagian Djaminan Sosial Buruh**
s/d achir tahun 1963.

— Pendirian Kantor Tjabang Tandjung Priok	30	%
— Pendirian Kantor Perwakilan Semarang	50	%
—Pembukaan Poliklinik Surabaja	25	%
Penjelesaian keseluruhan	...	%

6. PROJEK: **Usaha relation dalam hubungan penjelenggaraan kegotong-rojongan dalam sjarat-sjarat produksi**
s/d achir tahun 1963.

T a r g e t :

a. Penjelenggaraan Konperensi Pendahuluan K.B.A.A.
Hasil: — Materi 100%
— Partisipasi 60%

b. Penjelenggaraan Konperensi Sekretariat Bersama Daswati I Djawa Tengah.
Hasil: — Materi 100%
Hasil: — Materi 90%

c. Penanda-tanganan Joint Statement menentang „Malaysia".
Hasil: sepuluh organisasi Perburuhan di Philipina, Djepang, Mali, R.D. Vietnam, R.R.T.

7. PROJEK: **Training Centre**
s/d achir tahun 1963.
Prosen penjelesaian seluruhnja ± 70%.

II. — DEPARTEMEN RESEARCH NASIONAL.

1. PROJEK: **Lembaga Kimia Nasional**
   s/d Triwulan I/1964.

— Tanah	20 %
— Gedung, pabrik, Kantor, gudang	0,33%
— Perumahan pegawai	7 %
— Pengangkutan	22 %
— Training	23 %
Penjelesaian keseluruhan	10,50%

2. PROJEK: **Lembaga Fisika Nasional**
   s/d Triwulan I/1964.

— Tanah	20 %
— Perumahan pegawai	7 %
— Pengangkutan	22 %
— Gedung, pabrik, kantor, gudang	0,33%
— Mesin dan listrik	-- %
— Djalan-djalan	— %
— Training	23 %
Penjelesaian keseluruhan	10,50%

3. PROJEK: **Lembaga Ekonomi & Kemasjarakatan Nasional**
   s/d Triwulan I/1964.

— Tanah	20 %
— Gedung, pabrik, kantor, gudang	0,33%
— Mesin & listrik	— %
— Perumahan pegawai	7 %
— Pengangkutan	22 %
— Djalan-djalan	— %
— Training	23 %
Penjelesaian keseluruhan	10,50%

4. PROJEK: **Lembaga Metalurgi**
   s/d Triwulan I/1964.

— Tanah	20 %
— Gedung, pabrik, kantor, gudang	0,33%
— Mesin & listrik	— %
— Perumahan pegawai	7 %
— Pengangkutan	22 %

— Djalan-djalan	—	%
— Training	23	%
Penjelesaian keseluruhan	10,50	%

5. PROJEK: **Lembaga Elektronika Nasional**
s/d Triwulan I/1964.

— Tanah	20	%
— Gedung, kantor, gudang, pabrik	0,33	%
— **Mesin & Listrik**	—	%
— Rumah-rumah pegawai	7	%
— Pengangkutan	22	%
— Djalan-djalan	—	%
— Training	23	%
Penjelesaian keseluruhan	10,50	%

6. PROJEK: **Lembaga Biologi Nasional**
s/d TriwulanI/1964.

— Tanah	10	%
— Gedung, pabrik, kantor, gudang	4	%
— Mesin & listrik	—	%
— Perumahan pegawai	12,50	%
— Djalan-djalan	—	%
— Training	9	%
Penjelesaian keseluruhan	9	%

7. PROJEK: **Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional**
s/d Triwulan I/1964.

— Tanah	60	%
— Gedung, pabrik, kantor, gudang	12	%
— Mesin & Listrik	—	%
— Perumahan pegawai	12	%
— Pengangkutan	16	%
— Djalan-djalan	16	%
— Training	5	%
Penjelesaian keseluruhan	15	%

III. DEPARTEMEN PERTANIAN/AGRARIA.

1. PROJEK: **Perikanan Laut (code B3)**
   s/d achir tahun 1963.

a. Projek B di Djakarta B.P.U. Perikani Prosentase penjelesaian keseluruhan Sub Projek	80	%
b. Projek B di Aertembaga Prosentase penjelesaian keseluruhan Sub Projek	15	%
c. Projek A di Djakarta Prosentase penjelesaian keseluruhan Sub Projek	60	%
d. Projek A di Semarang Prosentase penjelesaian keseluruhan Sub Projek	15	%
e. Projek A di Surabaja Prosentase penjelesaian keseluruhan Sub Projek	80	%
f. Projek A di Kotabaru Prosentase penjelesaian keseluruhan Sub Projek	25	%
g. Projek A di Ambon Prosentase penjelesaian keseluruhan Sub Projek	20	%
h. Projek Cannery di Ambon Prosentase penjelesaian keseluruhan Sub Projek	75	%
i. Projek A di Pulau Berajan Prosentase penjelesaian seluruhnja	90	%
j. Projek A di Tandjung Balai Prosentase penjelesaian keseluruhan Sub Projek	80	%
Prosentase penjelesaian seluruhnja	...	%

2. PROJEK: **Penelitian Ubi-ubian dan Katjang-katjangan**
   s/d achir tahun 1963.

— Mendirikan gudang bibit di Kebun Pertjobaan Djakenan dekat Djuana, Djawa Tengah	40	%
Prosentase penjelesaian seluruhnja	...	%

3. PROJEK: **Penelitian Penjakit Hewan**
s/d achir tahun 1963.

a. Peremadjaan rumput kultur di kebun Tjimanglid Kiaralawang.
Laporan hanja berupa rangkaian tjerita pelaksanaan sehingga sulit digambarkan dalam prosentase.
Prosentase penjelesaian seluruhnja ... %

IV. DEPARTEMEN PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA.

1. PROJEK: **P.L.T.A. Sigura-gura**
s/d achir tahun 1963.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 12,5 %

2. PROJEK: **P.L.T.A. Batang Agam**
s/d achir tahun 1963.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 32 %

3. PROJEK: **P.L.T.A. Palembang**
s/d achir tahun 1963.
Prosentase penjelesaian seluruhnja ... %

4. PROJEK: **P.L.T.A. Djatiluhur**
s/d Semester I tahun 1964.

— Bendungan Utama 74 %
— Menara 98 %
— Tanggul-tanggul 0 %

Prosentase penjelesaian seluruhnja ... %
Diharapkan selesai seluruhnja achir tahun 1965

5. PROJEK: **P.L.T.U. Tandjung Priok**
s/d achir tahun 1963.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 68 %

6. PROJEK: **P.L.T.U. Semarang**
s/d achir tahun 1963.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 15 %

7. PROJEK: **Perkuatan/Pengaspalan Djalan Kerikil Negara di Sulawesi Tenggara**
s/d achir tahun 1963.

Target: Djalan 214 Km.
Djembatan 10 buah

Prosentase penjelesaian seluruhnja 85 %

8. PROJEK: **Perkuatan/Pengaspalan Djalan Krikil Negara di Sulawesi Utara Tengah.**
s/d achir tahun 1963.
Target: Djalan 135 Km.
Djembatan 8 buah
Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %

9. PROJEK: **Perkuatam/Pengaspalan Djalan Kerikil Negara di Bali.**
s/d achir tahun 1963.
Target: Djalan 21 Km.
Djembatan 2 buah
Prosentase penjelesaian seluruhnja 100 %

10. PROJEK: **Perkuatan/Pengaspalan Djalan Kerikil Negara di Nusatenggara Timur.**
s/d achir tahun 1963.
Target: Djalan 11 Km.
Djembatan 21 buah
Prosentase penjelesaian seluruhnja 65 %

11. PROJEK: **Perkuatan/Pengaspalan Djalan Kerikil Negara di Nusantenggaran Timur.**
s/d Semester 1 tahun 1964.
Target: Djalan 50 Km.
Djembatan 6 buah
Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %

12. PROJEK: **Perkuatan/Pengaspalan Djalan Kerikil Negara di Djawa Tengah.**
s/d achir tahun 1963.
Target: Djalan 45 Km.
Djembatan —
Prosentase penjelesaian seluruhnja 100 %

13. PROJEK: **Djalan Baru Djakarta By Pass.**
e/d Semester 1 tahun 1964.
a. Spur I (Sunter Senen)
— pos I 15,33 %
— pos II 29,90 %
— pos III 44,36 %
b. Spur II (Rawasari Matraman) 6,60 %
c. Spur III (Bekasi Timur — Djatinegara) 0 %

d. Toll-Gate (2 tempat Tjawang Tandjung Priok) 40 %
Prosentase penjelesaian seluruhnja ... %

14. PROJEK: **Djalan Baru Kalimantan.**
s/d Semester I tahun 1964.

a. Palangkaraja — Tangkiling (Kalimantan Tengah) 54 %
b. Balikpapan — Samarinda (Kalimantan Timur) 37 %
c. Tandjung — Kuraro (Kalimantan Selatan/Timur 28 %
d. Kintap — Pleihari (Kalimantan Selatan) 19 %
Prosentase penjelesaian seluruhnja ... %

15. PROJEK: **Djembatan Musi Palembang.**
s/d Semester I tahun 1964.
Scope pekerdjaan.

— Survey	100	%
— Pembebasan pembelian tanah	90	%
— Pemindahan	90	%
— Design	90	%
— Sroperation work	100	%
— Bridge piers	95	%
— Delivery of superstructure	100	%
— Abutment A-1	...	%
— Erection of Superstructure	40	%
— Mech. & elect. Installation	...	%
— Dolpkine	...	%
— Surfacing	5	%
— Abutment A-2	20	%
— Foreland bridge	20	%
— Supply of equipments & materials	95	%
Prosentase penjelesaian seluruhnja	...	%

16. PROJEK: **Pentjutjian Pasir Kerikil Tanggerang**
s/d achir tahun 1963.

— Djalan		
— Bangunan	50	%
— Montage alat-alat besar		
Prosentase penjelesaian seluruhnja	50	%

17. PROJEK: **Air Port Internasional Tuban Bali**
s/d Semester I tahun 1964.

— Survey & Design	61	%
— Pekerdjaan persiapan	52	%
— Membeli, mendatangkan alat-alat besar	67	%
— Montage alat besar	35	%
— Reclamation Area	4	%
— Taxi way	8	%
— Run-way	—	%
— Apron	—	%
— Djaring-djaring djalan	—	%
— Station building	—	%
— Installation		
Prosentase penjelesaian seluruhnja	...	%

18. PROJEK: **Djalan Raja Lintas Sumatera**
s/d Semester I Tahun 1964.

— Survey	1	%
— Perumahan pegawai	1	%
Prosentase penjelesaian seluruhnja	0,25	%

19. PROJEK: **Kanalisasi/Perluasan Areal se Indonesia**
s/d
a. Kalimantan Selatan.

— A. Marabahan VI	74	%
— A. Tamban	95	%
— Sei Puntik (Balandean)	98	%
— Bandjarmasin Kandangan	13	%
— Raai 17 Balandean	5	%
— Sei Tuan Martapura	100	%
b. Kalimantan Tengah.		
— A. Besarang (Milono)	84	%
— A. Mintim-Sebangan	22	%
c. Kalimantan Barat.		
— Sei Kapuas-Sei Pungur Besar	20	%
— Sei Kapuas-Sei Ambawang	15	%
d. Sumatera Selatan.		
— Pulau Barang-Kenten	100	%
— Tjintamanis-Sibokor	71	%
— Ogan Karamasan I	67	%
Prosentase penjelesaian seluruhnja	......	%

20. PROJEK: **Polder Kalimantan**
s/d Semester I tahun 1964.

a. Kalimantan Selatan.
— Objek Sei Makar (Polder Alabio) 50 %
b. Kalimantan Tengah.
— Objek Mantaran 60 %
Prosentase penjelesaian seluruhnja ...... %

21. PROJEK: **Pengairan Djatiluhur**
s/d Triwulan I tahun 1964.

— Pekerdjaan persiapan (routine)	—	%
— pekerdjaan saluran induk: galian timbun	70	%
timbun	50,5	%
— Pembangunan bendungan: galian	100	%
pemasangan batu	97	%
pemasangan beton	40	%
coupure	70	%
— Pekerdjaan diatas/dibawah saluran:		
galian	98	%
pemasangan batu	45	%
pemasangan beton	30	%
Prosentase penjelesaian seluruhnja	......	%

22. PROJEK: **Pentjegah Bahaja Bandjir**
s/d achir tahun 1963.

a. **Irigasi Karangkates.**
— Survey: Present Land use)
Land Rezoning) 71,4 %
Tingkat kerusakan tanah)
Social economy)
Prosentase penjelesaian Sub Projek — %
Prosentase penjelesaian seluruhnja ...... %

23. PROJEK: **Sekolah Teknik (A.T.P.U.T.)**
s/d achir tahun 1964.

— 2 buah ruang kuliah type H dan I	100	%
— Auditorium	40	%
— Asrama type B	30	%
Prosentase penjelesaian seluruhnja	......	%

24. PROJEK: **Aspal Negara**
s/d Semester I tahun 1964.

a. Sulawesi Selatan Tenggara.

— Rabungka 60 %
— Banabungi 47 %
Prosentase penjelesaian Sub Projek ...... %

b. **Makassar** 2 %
c. Bandung/Djakarta 38 %
d. Surabaja 7 %

Prosentase penjelesaian seluruhnja ...... %

25. PROJEK: **Pertjobaan Perumahan (U.N.S.F.).**
s/d achir tahun 1963.

— Pembangunan gedung laboratorium penjelidikan bahan bangunan diperkirakan selesai tahun 1965 74 %
— Pembangunan rumah pertjobaan diperkirakan selesai tahun 1970 3,5 %

Prosentase penjelesaian seluruhnja ...... %

26 PROJEK:**P.L.T.A. TIMO**
s/d Semester I tahun 1964.

— Survey 100 %
— Design 100 %
— Pekerdjaan persiapan 100 %
— Pekerdjaan sipil 100 %
— Pekerdjaan mesin 100 %
— Pekerdjaan listrik 100 %

Prosentase penjelesaian seluruhnja 100 %

27. PROJEK: **P.L.T.A. Ngebel**
s/d Semester I tahun 1964.

— Survey 100 %
— Design 100 %
— Pekerdjaan persiapan 100 %
— Pekerdjaan sipil 95 %
— Pekerdjaan mesin — %
— Pekerdjaan listrik — %

Prosentase penjelesaian seluruhnja 65 %

28. PROJEK: **P.L.T.A. Gerung**
s/d Semester I tahun 1964.

— Survey 90 %
— Design 15 %
— Pekerdjaan persiapan 45 %
— Pekerdjaan sipil — %
— Pekerdjaan mesin — %

— Pekerdjaan listrik — %
Prosentase penjelesaian seluruhnja 25 %

29. PROJEK: **P.L.T.A. Riam Kanan**
s/d Semester I tahun 1964.
Prosentase penjelesaian seluruhnja (sampai penjelesaian bendungan dan pemberian aliran listrik sebesar installed capacity 20.000 Kw.) diperkirakan akan selesai tahun 1969. 5 %

30. PROJEK: **Djalan Baru Tjililitan-Puntjak**
s/d Semester I tahun 1964.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 9 %

31. PROJEK: **Perbaikan Berat/Pemugaran Djalan dalam rangka Colombo Plan di Nusatenggara**
s/d Semester I tahun 1964.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 12 %

32. PROJEK: **Perbaikan Djalan Lho Seumawe — Beureun — Takengon dalam rangka Kredit Djerman Barat**
s/d achir Semester I/1964.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 10 %

33. PROJEK: **Pembangunan Chusus Ibu Kota Propinsi**

a. P.C. Pakanbaru
s/d achir tahun 1963.

— Survey	100	%
— Tanah	100	%
— Bangunan	60	%
— Mesin & Listrik	100	%
— Perumahan pegawai	100	%
— Djalan-djalan	70	%
Prosentase penjelesaian keseluruhan Sub Projek.	75	%

b. P.C. Palangkaraja
s/d achir tahun 1963.
Tahapan ke I.

— Survey	100	%
— Tanah	100	%
— Bangunan	40	%
— Mesin & Listrik	—	%
— Perumahan pegawai	37	%
— Pengangkutan	100	%
— Djalan-djalan	60	%

	Prosentase penjelesaian keseluruhan Sub Projek	43	%
34.	PROJEK: **Pembangunan Gedung Kangor A.I.D.**		
	s/d achir tahun 1963.		
	Prosentase penjelesaian seluruhnja	100	%
35.	PROJEK: **P.L.T.A. Karang kates**		
	s/d Semester I tahun 1964.		
	— Construction facilities	40	%
	— Diversion tunnel	95	%
	— Cofferdam	70	%
	— Quarry road	20	%
	— Pemindahan djalan K.A.	0	%
	— Main dam	0	%
	— Spillway	0	%
	— Instake and headrace tunnel	0	%
	— Connection tunnel & waterway for irigation	0	%
	— Pembelian tanah	2	%
	— Power generation	—	%
	Prosentase penjelesaian seluruhnja	19,2	%
36.	PROJEK: **P.L.T.A. Tonsea Lama**		
	s/d achir tahun 1963.		
	— Survey	100	%
	— Design	100	%
	— Pekerdjaan persiapan	100	%
	— Pekerdjaan sipil	100	%
	— Pekerdjaan mesin	90	%
	— Pekerdjaan listrik	60	%
	Prosentase penjelesaian seluruhnja	75	%
37.	PROJEK:**P.L.T.U. Makassar**		
	s/d achir tahun 1963.		
	Prosentase penjelesaian seluruhnja	5	%
38.	PROJEK: **P.L.T.U. Perak**		
	s/d Semester I tahun 1964.		
	— Survey	100	%
	— Tanah	100	%
	— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	90	%
	— Mesin, Listrik	90	%
	— Perumahan pegawai	90	%
	— Pengangkutan	40	%

— Djalan-djalan 50 %
— Training 25 %
Prosentase penjelesaian ...... %
tetapi telah produsir aliran listrik
sebanjak 20.000 K.W.

39. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Atjeh**
s/d achir tahun 1963.
Target: Djalan 83 Km.
Djembatan 25 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %

40. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Sumatera Utara**
s/d achir tahun 1963.
Target: Djalan 68 Km.
Djembatan 14 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %

41. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Sumatera Tengah**
s/d achir tahun 1963.
a. Sumatera Barat.
Target: Djalan 54 Km.
Djembatan 2 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %
b. Djambi.
Target: Djalan 52 Km.
Djembatan 3 buah.
Prosentase seluruhnja 30 %
c. Riau.
Target: Djalan 59 Km.
Djembatan 16 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %

42. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Sumatera Selatan**
s/d achir tahun 1963.
Target: Djalan 48 Km.
Djembatan 22 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 65 %

43. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Kalimantan Selatan**
s/d achir tahun 1963.
Target: Djalan 82 Km.
Djembatan 5 buah.

Prosentase penjelasaian seluruhnja 100 %

44. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Kalimantan Timur**
s/d achir tahun 1963.
Target: Djalan 109 Km.
Djembatan 4 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %

45. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Kalimantan Barat**
s/d achir tahun 1963.
Target: Djalan 25 Km.
Djembatan 6 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 100 %

46. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Kalimantan Tengah**
s/d achir tahun 1963.
Target: Djalan 6 Km.
Djembatan 5 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %

47. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Sulawesi Selatan/Tenggara**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 194 Km.
Djembatan 9 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 100 %

48. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Sulawesi Utara/Tengah**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 30 Km.
Djembatan 6 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 65 %

49. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Maluku/ I. Barat**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 3 Km.
Djembatan 9 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 100 %

50. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Bali**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 9 Km.
Djembatan 1 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 100 %

51. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Nusa Tenggara/Timur**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 56 Km.
Djembatan 1 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja **30 %**

52. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Djawa Barat**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 10 Km.
Djembatan 16 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja **90 %**

53. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Djawa Tengah**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 39 Km.
Djembatan 2 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja **35 %**

54. PROJEK: **Perkuatan Djalan Kerikil Propinsi Djawa Timur**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 94 Km.
Djembatan 5 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja **70 %**

55. PROJEK: **Perkuatan Djalan Aspal Negara Atjeh**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 17 Km.
Djembatan 14 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja **30 %**

56. PROJEK: **Modernisasi Djalan Aspal Negara Sumatera Utara**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 98 Km.
Djembatan 10 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja **30 %**

57. PROJEK: **Modernisasi Djalan Aspal Negara Sumatera Tengah**
s/d achir tahun 1963.
a. Sumatera Barat.
Target : Djalan 61 Km.
Djembatan 8 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja **30 %**

b. Djambi

Target : Djalan 59 Km.

Prosentase penjelesaian 30 %

c. Riau.

Target : Djalan 30 Km.

Prosentase penjelesaian 30 %

58. PROJEK: **Modernisasi Djalan Aspal Negara Sumatera Selatan**

s/d achir tahun 1963.

Target : Djalan 57 Km.
Djembatan 12 buah.

Prosentase penjelesaian seluruhnja 65 %

59. PROJEK: **Modernisasi djalan aspal Negara di Kalimantan Selatan**

s/d achir tahun 1963.

Target : Djalan 69 Km.
Djembatan 2 buah.

Prosentase penjelesaian seluruhnja 100 %

60. PROJEK: **Modernisasi djalan aspal Negara di Kalimantan Timur**

s/d achir tahun 1963.

Target : Djalan 33 Km.
Djembatan 7 buah.

Prosentase penjelesaian seluruhnja 100 %

61. PROJEK: **Modernisasi djalan aspal Negara di Kalimantan Barat**

s/d achir tahun 1963.

Target : Djalan 54 Km.
Djembatan 20 buah.

Prosentase penjelesaian seluruhnja 75 %

62. PROJEK: **Modernisasi djalan aspal Negara Kalimantan Tengah**

s/d achir tahun 1963.

Target : Djalan — Km.
Djembatan 3 buah.

Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %

63. PROJEK: **Modernisasi djalan aspal Negara di Sulawesi Selatan Tenggara**

s/d achir tahun 1963.

Target : Djalan 116 Km.
Djembatan 11 buah.

Prosentase penjelesaian seluruhnja 95 %

64. PROJEK: **Modernisasi djalan aspal Negara di Sulawesi Utara Tengah**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 23 Km.
Djembatan 12 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 65 %

65. PROJEK: **Modernisasi djalan aspal Negara di Maluku**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 29 Km.
Djembatan 5 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 80 %

66. PROJEK: **Modernisasi djalan aspal Negara di Bali**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 58 Km.
Djembatan 1 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 90 %

67. PROJEK: **Modernisasi djalan aspal Negara di Nusa Tenggara Barat**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 7 Km.
Djembatan —
Prosentase penjelesaian seluruhnja 15 %

68. PROJEK: **Modernisasi djalan aspal Negara di Djawa Barat.**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 16 Km.
Djembatan 8 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 90 %

69. PROJEK: **Modernisasi djalan aspal Negara di Djawa Timur**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 28 Km.
Djembatan 5 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 65 %

70. PROJEK: **Modernisasi djalan aspal Negara di Daerah Istimewa Jogjakarta**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 8 Km.
Djembatan 2 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 95 %

71. PROJEK: **Perkuatan/pengaspalan djalan kerikil Negara di Atjeh**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 42 Km.
Djembatan 27 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %

72. PROJEK: **Perkuatan/pengaspalan djalan kerikil Negara di Sumatera Utara**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 47 Km.
Djembatan 2 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %

73. PROJEK: **Perkuatan/pengaspalan djalan kerikil Negara di Sumatera Tengah**
s/d achir tahun 1963.
a. Di Sumatera Barat
Target : Djalan 57 Km.
Djembatan 4 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %
b. Di Djambi
Target : Djalan 142 Km.
Djembatan 9 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %
c. Di Riau
Target : Djalan 6 Km.
Djembatan — buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %

74. PROJEK: **Perkuatan/pengaspalan djalan kerikil Negara di Kal. Selatan**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 110 Km.
Djembatan 8 buah.
Prosentase penjelesaian seluruhnja 100 %

75. PROJEK: **Perkuatan/pengaspalan djalan kerikil Negara di Kal. Timur**
s/d achir tahun 1963.
Target : Djalan 81 Km.
Djembatan 2 buah
Prosentase penjelesaian seluruhnja 30 %

76. PROJEK: **Perkuatan/pengaspalan djalan kerikil Negara di Kal. Barat**
s/d achir tahun 1963.

Target : Djalan	79 Km.		
Djembatan	8 buah.		
Prosentase penjelesaian seluruhnja		100	%

77. PROJEK: **Perkuatan/Pengaspalan Djalan Kerikil Negara di Kal. Tengah**

s/d achir tahun 1963.

Target : Djalan	81 Km.		
Djembatan	2 buah.		
Prosentase penjelesaian seluruhnja		30	%

V. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DASAR & PERTAMBANGAN.

1. PROJEK: **Galangan Kapal Makassar**

s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	75 %
— Tanah	50 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	22,5 %
— Mesin & Listrik	0 %
— Perumahan pegawai	5 %
— Pengangkutan	20 %
— Djalan-djalan	10 %
— Training	10 %
Penjelesaian keseluruhan	24,10%

2. PROJEK: **Galangan Kapal Gresik**

s/d Triwulan I/1964.

— Ground leveling	60 %
— Gudang sementara	20 %
— Djalan-djalan	19 %
— Perumahan pegawai	1 %
— Mesin-mesin & Alat-alat jang tiba	39 %
Penjelesaian keseluruhan	.... %

3. PROJEK: **Galangan Kapal Bitung**

s/d Triwulan I/1964.

— Land acquirement	50 %
— Perumahan Sementara	65 %
— Perumahan sementara	50 %
— Site clearing	20 %
— Listrik sementara	65 %
— Penerimaan mesin-mesin	21,5 %
Penjelesaian keseluruhan	.... %

4. **PROJEK:** **Galangan Kapal Padang**
s/d Triwulan I/1964.

— Djalan Plant Site	13,3 %
— Luar Plant Site	31,2 %
Penjelesaian keseluruhan	.... %

5. **PROJEK:** **Kertas Martapura**
s/d Triwulan I/1964.

— Penelitian	100 %
— Persiapan	85 %
— Objek tetap	41 %
— Perumahan & Perkampungan	60,2 %
— Djalan-djalan	20 %
— Pelabuhan	50 %
— Water Supply	16,6 %
— Mesin-mesin & Alat-alat jang telah tiba	100 %
Penjelesaian keseluruhan	75 %

6. **PROJEK:** **Kertas Goa Makassar**
s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	100 %
— Tanah	100 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	50 %
— Mesin-mesin & Alat-alat Listrik	0 %
— Perumahan pegawai	20 %
— Pengangkutan	40 %
— Djalan-djalan	80 %
— Training	90 %
Penjelesaian keseluruhan	59,4 %

7. **PROJEK:** **Kertas Banjuwangi**
s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	90 %
— Tanah	90 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	0 %
— Mesin-mesin/Listrik	0 %
— Pengangkutan	5 %
— Djalan-djalan	5 %
— Training	0 %
Penjelesaian keseluruhan	22,5 %

8. PROJEK: **Kertas Notog**
s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	75 %
— Tanah	30 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	0 %
— Mesin-mesin/Listrik	0 %
— Pengangkutan	0 %
— Djalan-djalan	0 %
— Training	0 %
Penjelesaian keseluruhan	13,1 %

9. PROJEK: **Kertas Sampit**
s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	20 %
— Tanah	0 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	0 %
— Mesin-mesin/Listrik	0 %
— Perumahan pegawai	0 %
— Pengangkutan	0 %
— Djalan-djalan	0 %
— Training	0 %
Penjelesaian keseluruhan	2,5 %

10. PROJEK: **Kertas Takengon**
s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	100 %
— Tanah	35 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	10 %
— Mesin-mesin/Listrik	0 %
— Perumahan pegawai	0 %
— Pengangkutan	10 %
— Djalan-djalan	45 %
— Training	0 %
Penjelesaian keseluruhan	25 %

11. **PROJEK: Pilot Rayon Bandung**
s/d Triwulan I/1964.

— Bangunan sementara & Site preparation	100	%
— Gudang permanen	60	%
— Perataan tanah & pembuatan djalan sementara	100	%
— Perumahan pegawai Menengah	50	%
— Mesin-mesin/Alat-alat jang tiba	0	%
Penjelesaian keseluruhan	......	%

12. **PROJEK: Rayon Palembang**
s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	85	%
— Tanah	0	%
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	0	%
— Mesin-mesin & Listrik	0	%
— Perumahan pegawai	0	%
— Pengangkutan	0	%
— Djalan-djalan	0	%
— Training	0	%
Penjelesaian keseluruhan	10,63	%

13. **PROJEK: Superfosfat Tjilatjap**
s/d Triwulan I/1964.

— Repair machine shop	90	%
— Equipment & material storage	96	%
— Main switch gear	71	%
— Main building dari Thermal Power st.	45	%
— Water drain open channals	85	%
— Complementary building	100	%
— Kade Pelabuhan Tjilatjap	50	%
— Djalan Raya	90	%
— Djalan Kereta Api	75	%
— Perumahan	87	%
— Alat-alat & Mesin-mesin jang tiba	50	%
Penjelesaian keseluruhan	......	%

14. **PROJEK: Industri Ban Palembang**
s/d Triwulan I/1964.

— Penelitian	85 %
— Persiapan	84,2 %
— Objek tetap	30 %
— Diluar Plant Site	63,8 %
Penjelesaian keseluruhan	45 %

15. **PROJEK: Semen Tonasa**
s/d Triwulan I/1964.

— Penelitian	100 %
— Persiapan	98,2 %
— Objek tetap	4,7 %
— Alat-alat & Mesin-mesin jang tiba	98,8 %
Penjelesaian keseluruhan	%

16. **PROJEK: Semen Bahorok**
s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	60 %
— Tanah	0 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	0 %
— Mesin-mesin & Listrik	0 %
— Perumahan pegawai	0 %
— Pengangkutan	0 %
— Djalan-djalan	0 %
— Training	0 %
Penjelesaian keseluruhan	7,5 %

17. **PROJEK: Soda Abu**
s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	100 %
— Tanah	0 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	0 %
— Mesin-mesin & Listrik	0 %
— Perumahan pegawai	0 %
— Pengangkutan	0 %
— Djalan-djalan	0 %
— Training	0 %
Penjelesaian keseluruhan	12,5 %

18. PROJEK: **Karbit**
s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	50 %
— Tanah	10 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	0 %
— Mesin-mesin & Listrik	0 %
— Perumahan pegawai	0 %
— Pengangkutan	0 %
— Djalan-djalan	0 %
— Training	0 %
Penjelesaian keseluruhan	7,5 %

19. PROJEK: **Petro Kimia**
s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	90 %
— Tanah	95 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	1 %
— Mesin-mesin & Listrik	0 %
— Perumahan pegawai	0 %
— Pengangkutan	0 %
— Djalan-djalan	0 %
— Training	0,5 %
Penjelesaian keseluruhan	23,2 %

20. PROJEK: **Katja Djendela**
s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	90 %
— Tanah	100 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	0 %
— Mesin & Listrik	0 %
— Perumahan pegawai	0 %
— Pengangkutan	10 %
— Djalan-djalan	40 %
— Training	0 %
Penjelesaian keseluruhan	30 %

21. PROJEK: **Aluminium**
s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	100 %
— Tanah	0 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	0 %
— Mesin & Listrik	0 %
— Perumahan pegawai	0 %
— Pengangkutan	0 %
— Djalan-djalan	0 %
— Training	0 %
Penjelesaian keseluruhan	12,5 %

22. PROJEK: **Besi Badja Lampung**
s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	80 %
— Tanah	40 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	25 %
— Mesin & Listrik	40 %
— Perumahan pegawai	25 %
— Pengangkutan	30 %
— Djalan-djalan	15 %
— Training	15 %
Penjelesaian keseluruhan	31,9 %

23. PROJEK: **Besi Badja Kalimantan**
s/d Triwulan IV/1963.

— Survey	55 %
— Tanah	2 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	80 %
— Mesin & Listrik	90 %
— Perumahan pegawai	87 %
— Pengangkutan	80 %
— Djalan-djalan	25 %
— Training	0 %
Penjelesaian keseluruhan	52 %

24. PROJEK: **Besi Badja Trikora**
s/d Triwulan I/1964.

— Therminal Power Station	95,6 %
— Steel Plant	46,7 %
— Waduk	65 %
— Pipa pesat 40 km.	64 %
— Perkampungan fase I	84,6 %
— Pelabuhan	38,3 %
— Mesin-mesin & Alat-alat jang telah tiba	25 %
Penjelesaian keseluruhan	...... %

25. PROJEK: **Bulb Manufacture Semarang**
s/d achir tahun 1963.

Perintjian pekerdjaan:

— Survey	95 %
— Tanah	100 %
— Gudang, Pabrik	15 %
— Mesin Listrik	0 %
— Personalia	15 %
— Pengangkutan	30 %
— Djalan-djalan	25 %
— Transpor	20 %
Prosentase penjelesaian seluruhnja	37,5 %

26. PROJEK: **Peleburan Timah Muntok**
s/d achir tahun 1963.

Perintjian pekerdjaan:

— Survey	100 %
— Tanah	10 %
— Gedung Laboratorium	0 %
— Bengkel	40 %
— Ps. Station	45 %
— Mess	40 %
— Pabrik Pondasi I	100 %
— Pondasi II	60 %
— Konstruksi Besi	90 %
— Kantor	0 %
— Gudang	5 %
— Mesin & Listrik jang datang	90 %
— Perumahan pegawai	40 %
— Pengangkutan	73 %

— Djalan-djalan	40	%
— Training	0	%
Prosentase penjelesaian seluruhnja	40	%

27. PROJEK: **Pupuk Urea I Palembang**
s/d Semester I tahun 1964.

Perintjian pekerdjaan:

— Survey	100	%
— Tanah	100	%
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	100	%
— Mesin dan Listrik	100	%
— Perumahan pegawai	50	%
— Pengangkutan	100	%
— Djalan-djalan	80	%
— Training	100	%
Prosentase penjelesaian seluruhnja; telah produsir sedjak achir tahun 1963	......	%

28. PROJEK: **Tambang Mas Logam**
s/d Semester I tahun 1964.

— Laporan berupa rangkaian tjerita kedjadian jang sedang dilaksanakan dalam masa s/d Djuni 1964.

— Sukar digambarkan dalam prosentase.

29. PROJEK: **Pasir Besi, Tjilatjap**
s/d Semester I tahun 1964.

— Laporan berupa rangkaian tjerita kedjadian jang sedang dilaksanakan dalam masa s/d Djuni 1964.

— Sukar digambarkan dalam prosentase.

30. PROJEK: **Penelitian Pertambangan**
s/d Semester I/1964.

— Laporan berupa rangkaian tjerita kedjadian jang sedang dilaksanakan dalam masa s/d Djuni 1964.

— Sukar digambarkan dalam prosentase.

31. PROJEK: **Rehabilitasi Tambang Batu Bara Ombilin**
s/d Semester I tahun 1964.

Perintjian pekerdjaan:

— Survey	74	%
— Tanah	90	%
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	20	%
— Mesin dan Listrik	50	%
— Perumahan pegawai	43	%
— Kendaraan	41	%
— Djalan-djalan	39	%
— Training	43	%
Prosentase penjelesaian seluruhnja	50	%

32. PROJEK: **Gerbong Batu Bara dan Tangki dari Rumania**
s/d Semester I tahun 1964.
— Assembling: 400 gerbong Batu Bara dan
330 gerbong Tangki
Diperkirakan selesai seluruhnja Maret 1966

33. PROJEK: **Gerbong Penumpang**
s/d Semester I tahun 1964.

Perintjian pekerdjaan:

— Survey	100	%
— Tanah	100	%
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	20	%
— Mesin dan Listrik	10	%
— Perumahan pegawai	30	%
— Pengangkutan	30	%
— Djalan-djalan	40	%
— Training	0	%
Prosentase penjelesaian seluruhnja	15	%

34. PROJEK: **Motor Bensin**
s/d Semester I tahun 1964.

Perintjian pekerdjaan:

— Survey	100	%
— Tanah	50	%
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	15	%
— Mesin dan Listrik	15	%
— Perumahan pegawai	0	%
— Pengangkutan	45	%

— Djalan-djalan	15 %
— Training	10 %
Prosentase penjelesaian seluruhnja	18,31%

VI. DEPARTEMEN PERINDRA.

1. PROJEK: **Pemintalan Sumpruk di Djakarta**
s/d achir Semester I/tahun 1964.

— Survey	100 %
— Tanah	97, 5%
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	25 %
— Mesin dan Listrik	55 %
— Perumahan pegawai	6 %
— Pengangkutan	18 %
— Djalan-djalan	55 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 100 %
Penjelesaian keseluruhan	52,89%

Diperkirakan akan selesai tahun 1965

2. PROJEK: **Pemintalan Lawang di Malang**
s/d achir Semester I/64.

— Survey	100 %
— Tanah	90 %
— Gedung, Pabrik, Kantor, Gudang	55 %
— Mesin dan Listrik	50% & 10 %
— Perumahan pegawai	20 %
— Pengangkutan	81 %
— Djalan-djalan	40 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 100 %
Penjelesaian keseluruhan	43, 5%

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

3. PROJEK: **Pemintalan Tohpati di Denpasar**
s/d achir Semester I/64.

— Survey	100 %
— Tanah	95 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	50 %
— Mesin dan Listrik	50% & 15 %
— Perumahan pegawai	25 %
— Pengangkutan	60 %
— Djalan-djalan	40 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 100 %
Penjelesaian keseluruhan	42,37%

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

4. PROJEK: **Pemintalan Tjipadung di Bandung**
s/d achir Semester I/64.

— Survey	100	%
— Tanah	95	%
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	72	%
— Mesin dan Listrik	55% & 60	%
— Perumahan pegawai	30	%
— Pengangkutan	14	%
— Djalan-djalan	66	%
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 100	%
Penjelesaian keseluruhan	59,43	%

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

5. PROJEK: **Pemintalan Setjang di Magelang**
s/d Semester I/1964.

— Survey	100	%
— Tanah	95	%
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	35	%
— Mesin dan Listrik	50% & 15	%
— Perumahan pegawai	20	%
— Pengangkutan	19, 5	%
— Djalan-djalan	43	%
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 100	%
Penjelesaian keseluruhan	36,43	%

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

6. PROJEK: **Pemintalan Grati Pasuruan**
s/d Semester I/1964.

— Survey	100	%
— Tanah	100	%
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	95	%
— Mesin dan Listrik	90 & 85	%
— Perumahan pegawai	60	%
— Pengangkutan	15	%
— Djalan-djalan	85	%
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 100	%
Penjelesaian keseluruhan	83	%

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

7. PROJEK: **Pemintalan Tjilatjap II di Tjilatjap**
s/d Semester II/1963.

— Survey	100 %
— Tanah	100 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	100 %
— Mesin dan Listrik	100 %
— Perumahan pegawai	90 %
— Pengangkutan	95 %
— Djalan-djalan	95 %
— Training	95 %
Penjelesaian keseluruhan	98 %

Diperkirakan akan selesai achir tahun 1965.

8. PROJEK: **Pemintalan Bandjaran di Djawa Barat**
s/d Semester II/1964.

— Survey	100 %
— Tanah	80 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	0 %
— Mesin dan Listrik	30% & 0 %
— Perumahan pegawai	0 %
— Pengangkutan	0 %
— Djalan-djalan	0 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 0 %
Penjelesaian keseluruhan	12 %

Diperkirakan akan selesai tahun 1968.

9. PROJEK: **Pertenunan Makassar**
s/d achir Semester I/1964.

— Survey	100 %
— Tanah	100 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	100 %
— Mesin dan Listrik	97,5% & 95 %
— Perumahan pegawai	85 %
— Pengangkutan	27 %
— Djalan-djalan	85 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 0 %
Penjelesaian keseluruhan	90,65%

Diperkirakan akan selesai sudah mulai memprodusir.

10. PROJEK: **Pertenunan Kamal di Madura**
s/d achir Semester I/1964.

— Survey	100 %
— Tanah	100 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	80 %
— Mesin dan Listrik	50% & 25 %
— Perumahan pegawai	95 %
— Pengangkutan	25 %
— Djalan-djalan	95 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 0 %
Penjelesaian keseluruhan	66,25%

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

11. PROJEK: **Plywood di Kotabaru Kal. Sel.**
s/d achir Semester I/1964.

— Survey	100 %
— Tanah	95 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	47,25%
— Mesin dan Listrik	40% & 2 %
— Perumahan pegawai	17, 5%
— Pengangkutan	14 %
— Djalan-djalan	1, 5%
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 60 %
Penjelesaian keseluruhan	32, 8%

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

12. PROJEK: **Redrying Tobacco di Bodjonegoro**
s/d achir Semester I/1964.

— Survey	100 %
— Tanah	99, 9%
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	11,25%
— Mesin dan Listrik	60% & 20 %
— Perumahan pegawai	40 %
— Pengangkutan	0 %
— Djalan-djalan	33 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 0 %
Penjelesaian keseluruhan	30, 1%

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

13. PROJEK: **Pengerdjaan Batu-Pualam di Tulung Agung** s/d achir Semester I/1964.

— Survey	100 %
— Tanah	95 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	43 %
— Mesin dan Listrik	100% & 70 %
— Perumahan pegawai	20 %
— Pengangkutan	48, 5%
— Djalan-djalan	60 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 0 %
Penjelesaian keseluruhan	79,30%

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

14. PROJEK: **Batu Batery di Tjiawi Bogor** s/d achir Semester I/1964.

— Survey	100 %
— Tanah	100 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	70 %
— Mesin dan Listrik	70% & 45 %
— Perumahan pegawai	50 %
— Pengangkutan	50 %
— Djalan-djalan	52 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 100 %
Penjelesaian keseluruhan	61, 2%

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

15. PROJEK: **Bata/Genteng di Dumai Riau** s/d achir Semester I/1964.

— Survey	100 %
— Tanah	100 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	92 %
— Mesin dan Listrik	92,5% & 92 %
— Perumahan pegawai	90 %
— Pengangkutan	12 %
— Djalan-djalan	95 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 0 %
Penjelesaian keseluruhan	89,7 %

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

16. PROJEK: **Bata/Genteng di Gorontalo**
s/d achir Semester I/1964.

— Survey	100 %
— Tanah	95 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	85 %
— Mesin dan Listrik	90% & 11, 7%
— Perumahan pegawai	70 %
— Pengangkutan	0 %
— Djalan-djalan	25 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 0 %
Penjelesaian keseluruhan	65 %

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

17. PROJEK: **Bata/Genteng Akehuda Maluku**
s/d achir Semester I/1964.

— Survey	100 %
— Tanah	95 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	100 %
— Mesin dan Listrik	95% & 91, 6%
— Perumahan pegawai	86 %
— Pengangkutan	12 %
— Djalan-djalan	92, 5%
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 0 %
Penjelesaian keseluruhan	90 %

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

18. PROJEK: **Bata/Genteng di Serang Djawa Barat**
s/d achir Semester I/1964.

— Survey	100 %
— Tanah	100 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	90 %
— Perumahan pegawai	90 %
— Mesin dan Listrik	90% & 70 %
— Pengangkutan	20 %
— Djalan-djalan	85 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 0 %
Penjelesaian keseluruhan	84,6 %

Diperkirakan akan selesai tahun 1965,
sudah mulai memprodusir.

19. PROJEK: **Sabut kelapa di Wani Sulawesi Tenggara**
s/d achir Semester I/1964.

— Survey		100 %
— Tanah		95 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang		91,75%
— Mesin dan Listrik	85% &	86 %
— Perumahan pegawai		91,75%
— Pengangkutan		23 %
— Djalan-djalan		67,5 %
— Training	0% &	0 %
Penjelesaian keseluruhan		85,05%

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

20. PROJEK: **Pengerdjaan Bambu di Jogjakarta**
s/d achir Semester I/1964.

— Survey		100 %
— Tanah		100 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang		100 %
— Mesin dan Listrik	95% &	95 %
— Perumahan pegawai		100 %
— Pengangkutan		0 %
— Djalan-djalan		95 %
— Training	0% &	0 %
Penjelesaian keseluruhan		92,25%

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

21. PROJEK: **Pengerdjaan Bambu di Tasikmalaja**
s/d achir Semester I/1964.

— Survey		100 %
— Tanah		100 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang		100 %
— Mesin dan Listrik	100% &	100 %
— Perumahan pegawai		100 %
— Pengangkutan		0 %
— Djalan-djalan		100 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% &	20 %
Penjelesaian keseluruhan		95 %

Diperkirakan akan selesai tahun 1962, .
trial running.

22. PROJEK: **Tapioka di Samarinda Kalimantan Timur**
s/d achir Semester I/1964.

— Survey	100 %
— Tanah	95 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	96 %
— Mesin dan Listrik	89% & 93,3 %
— Perumahan pegawai	35 %
— Pengangkutan	0 %
— Djalan-djalan	97 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 0 %
Penjelesaian keseluruhan	90 %

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

23. PROJEK: **Minjak Kelapa di Gorontalo**
s/d achir Semester I/1964.

— Survey	100 %
— Tanah	95 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	61,6 %
— Mesin dan Listrik	40% & 13,3 %
— Perumahan pegawai	15 %
— Pengangkutan	0 %
— Djalan-djalan	42 %
— Training	0% & 30 %
Penjelesaian keseluruhan	45 %

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

24. PROJEK: **Kapur di Gorontalo, Sulawesi Tengah**
s/d achir Semester I/1964.

— Survey	100 %
— Tanah	95 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang	30,8 %
— Mesin dan Listrik	0% & 0 %
— Perumahan pegawai	75 %
— Pengangkutan	0 %
— Djalan-djalan	46 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% & 0 %
Penjelesaian keseluruhan	40 %

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

25. PROJEK: **Tapioka Andjungan di Pontianak**

s/d achir Semester I/1964.

— Survey		100 %
— Tanah		95 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang		42,8 %
— Mesin dan Listrik	61% &	6 %
— Perumahan pegawai		17,6 %
— Pengangkutan		0 %
— Djalan-djalan		42,5 %
— Training	0% &	0 %
Penjelesaian keseluruhan		45 %

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

26. PROJEK: **Redryng Tobacco di Tandjung Tirto Jogja**

s/d achir Semester I/1964.

— Survey		100 %
— Tanah		95 %
— Gedung Pabrik, Kantor, Gudang		100 %
— Mesin dan Listrik	100% &	100 %
— Perumahan pegawai		100 %
— Pengangkutan		30 %
— Djalan-djalan		100 %
— Training (D.N. & L.N.)	0% &	0 %
Penjelesaian keseluruhan		96 %

Diperkirakan akan selesai tahun 1965.

27. PROJEK: **Industrial Technical Centre**

s/d Semester I/1964.

Penjelesaian keseluruhan 2,84%

28. PROJEK: **Penelitian/Pertjobaan**

s/d achir 1963.

a. Pemasangan dan melengkapi mesin-mesin asal: I.C.A. 80%

b. B.P. Industri di Djakarta:

— Penelitian minjak dari bidji kapok (63) 100%

— Isolasi Resorpin dari Rouwalfia gerfentina (61) 70%

c. B.P. Kimia di Bogor:

— Penelitian tjengkeh untuk Rokok Kretek (1959) 95%

d. B.P. Bahan-bahan di Bandung:

— Penelitian MnO_2 untuk betrekering (63) 40%
— Minjak Djarak DCO (tahun 1961) 70%
— Diesel Prototype (1958) 50%
— Deteriprosi bahan-bahan teknis (1963) 20%

e. B.P. Tekstil di Bandung:

— Penelitian tentang pemintalan serat-serat tjampuran (1962) 100%
— Penelitian sutera asli Indonesia (1961) 20%
— Penelitian pengolahan Cotton waste (6) 100%
— Penelitian serat-serat Kapas dari areal baru (1962) 100%
— Penjusunan textes standard 60%

f. B.P. Keramik di Bandung:

— Pembuatan alat-alat tehnik/laboratorium dari keramik (62) 30%
— Pembuatan tegel tembok (1963) 20%
— Pembuatan barang-barang senitair 60%
— Pantjang segar (1963) 70%
— Glosir dan pewarna keramik (1963) 40%
— Batu tahan api (1963) 20%
— Pemurnian kaolin dari Bangka —%
— Pembuatan gips (1963) 70%

g. B.P. Kulit di Jogjakarta:

— Penggunaan garam antara lain untuk penjempurnaan penjamakan kulit putih (1963) 70%
— Dochroning bahan sisa serutan kulit ('63) 80%
— Ekonomi penggunaan bahan penjamak chrone (1963) 40%
— Shellock sebagai bahan pengkilat top finishing (1963) 70%
— Impregnasi kulit mentah dengan surface acktive agent ('63) 20%
— Kulit oplit untuk upper leather (1963) 20%
— Ochter untuk pigment finish (1963) 20%

h. **B.P. Batik di Jogjakarta:**

— Pembuatan soge bubuk dari dum teh ('63)	60%
— Pembuatan indigo alam (1963)	60%
— Pembuatan zat warna batik sintetis ('63)	60%
— Penjelesaian keseluruhan projek	.. %

i. Gedung-gedung, laboratorium, kantor, perumahan s/d achir tahun 1963

Pendirian B.P. Daerah:

— B.P. Kimia Semarang	40%
— B.P. Kimia Medan	1%
— B.P. Kimia Bandjarmasin	2%
— B.P. Kimia Menado	2%

j. B.P. Kimia Bogor:

k. B.P. Tekstil di Bandung	20%
l. B.P. Bahan-bahan di Bandung	40%
m. B.P. Kulit di Jogjakarta	30%
n. B.P. Kimia di Surabaja	30%
o. B.P. Djaja Guna di Djakarta	100%
p. Cotton Spinning Mill, dari Pampasan Djepang, di Bandung (1958) s/d achir 1963. Penjelesaian keseluruhan	100%

29. PROJEK: **Bata Genteng, Plered**
s/d achir 1963.

— Survey	100%
— Tanah	100%
— Gedung Pabrik, Kantor, Laboratorium, Sekolah, Gudang	30%
— Mesin dan Inpentaris	50%
— Instalasi	—%
— Perumahan pegawai	10%
— Pengangkutan	—%
— Djalan-djalan	—%
— Spare Parts	—%
— Pemeriksaan & Pertjobaan	—%
Penjelesaian keseluruhan	20%

DEPARTEMEN
URUSAN BANK & MODAL SWASTA

PENDAHULUAN.

Sebagaimana diketahui, dengan tersusunnja Kabinet Kerdja pada bulan Nopember 1963, terbentuklah Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta, sebagai salah suatu urusan baru jang dimaksudkan pemerintah sebagai salah suatu langkah jang harus diambil dalam rangka peningkatan segala usaha untuk mensukseskan program kerdja jang terkenal sebagai Triprogram pemerintah, jaitu:

1. mentjukupi sandang pangan
2. mengganjang „Malaysia"
3. melandjutkan pembangunan.

Dalam melaksanakan Triprogram pemerintah tersebut maka termasuk masalah-masalah penting jang kita hadapi adalah masalah perekonomian. Selandjutnja didalam menghadapi dan memetjahkan masalah-masalah perekonomian Indonesia, mobilisasi segala potensi nasional adalah suatu hal jang mutlak. Perihal bidang swasta pada umumnja, pemerintah berpendapat bahwa seluruh potensi swasta nasional jang demokratis perlu dikerahkan dan diturut-sertakan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan; sedangkan mengenai bidang perbankan swasta Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 menjatakan, bahwa kedudukan bank-bank nasional swasta sebagai alat pelengkap daripada Bank-bank pemerintah dan Bank-bank Nasional swasta perlu dibina agar dapat bergerak seirama dengan tahap dan tuntutan Revolusi untuk dapat menunaikan kewadjibannja sebagai alat Revolusi dengan mendjalankan funksinja sebagai:

a. alat untuk melantjarkan usaha-usaha memenuhi kebutuhan Rakjat banjak,
b. alat pelantjar program-program serta kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pemerintah pada umumnja dan pembangunan pada chususnja, dan
c. alat moneter.

Selandjutnja, Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta jang dilahirkan ditengah-tengah bergeloranja semangat mendjebol dan membangun diharapkan dan diminta, agar dapat melakukan perombakan institusionil dan mental jang masih bersifat liberalistis, dengan djalan merubah dan mengarahkan

penggunaan dana-dana swasta kebidang-bidang produksi dan pembangunan ekonomi Negara pada umumnja dan dengan demikian merintis djalan serta norma-norma baru sesuai dengan alam kemerdekaan menudju kesistim ekonomi sosialis Indonesia, jaitu terlaksananja sistim Ekonomi Terpimpin.

Lebih-lebih dalam hubungannja dengan pelaksanaan program pemerintah dalam melakukan peningkatan konfrontasi chususnja dibidang ekonomi terhadap projek nekolim „Malaysia" dan waspada sepenuhnja bahwa abad ini adalah abad intervensi, penetrasi dan subversi dari kaum imperialis dan nekolim, maka Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta mempunjai tugas kewadjiban jang berat untuk mendjaga agar modal swasta, baik jang berada dibidang perbankan maupun jang bergerak dibidang-bidang lainnja, tidak akan diperalat setjara langsung atau tidak langsung oleh gerakan subversif jang bermaksud mengatjaukan ekonomi/keuangan Negara dan Rakjat Indonesia.

Tidak boleh pula dilupakan bahwa setjara tehnis-ekonomis penertiban bidang-bidang modal dan perbankan swasta adalah inherent dengan pembangunan ekonomi suatu Negara jang sedang berkembang, lebih-lebih di Indonesia dimana struktur ekonominja menundjukkan betapa pentingnja dan besarnja peranan kaum pemilik-pemilik modal dan pengusaha-pengusaha didalam masjarakat.

I. PERKEMBANGAN ORGANISASI/APARATUR.

1. Umum.

Berdasarkan landasan-landasan idiil sebagaimana diuraikan dalam **Pendahuluan** diatas, dan untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan Keputusan Presiden No. 232/1963 tentang susunan Kabinet Kerdja, maka Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dimasukkan dalam lingkungan Kompartimen Keuangan.

Memang dapat dimengerti bahwa mengingat sifat daripada tugas-tugasnja dalam penertiban bank dan modal swasta itu, Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dengan bekerdja-sama terutama dengan Menteri-menteri dalam lingkungan Kompartimen Keuangan, banjak melakukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan jang bersifat moneter-teknis.

Kerdja-sama ini penting sekali artinja bagi tertjiptanja keserasian pendapat serta kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang perlu sekali terdapat dalam bidang ekonomi-moneter pada waktu ini, sehingga hal-hal jang menimbulkan kesimpangsiuran bagi para pelaksana dan seluruh masjarakat dapat dihilangkan serta dibatasi seminimal mungkin. Dengan mengingat tugas-tugasnja itu maka Menko Keuangan dengan Surat Keputusannja telah menetapkan seluruh aparatur Bank Indonesia, dengan tidak mengurangi funksinja sebagai aparat Menteri Urusan Bank Sentral, djuga mendjadi aparat utama Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta untuk bidang penertiban bank-bank swasta, jakni dengan melaksanakan penertiban-penertiban atas bank-bank swasta agar melakukan usaha-usaha serta kegiatan-kegiatannja setjara sehat. Disamping itu, dengan sebuah aparat chusus dilakukan penelitian atas modal swasta pada umumnja dan modal jang diperkirakan mempunjai hubungan erat dengan oknum-oknum asing pada chususnja jang akan mengatjaukan situasi ekonomi/keuangan Negara kita, dan selandjutnja berdasarkan hasil penelitian ini diadjukan saran-saran untuk mengambil tindakan-tindakan dan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang dipandang perlu.

Setelah bekerdja selama kurang lebih 9 bulan, maka dengan terbentuknja Kabinet Dwikora pada tanggal 27 Agustus 1964 sebagai kelandjutan daripada Amanat TAVIP Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta

dipindahkan dari Kompartimen Keuangan ke Kompartimen Pembangunan. Dengan demikian berarti bahwa titik berat dari tugas Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta didalam rangka realisasi daripada Ekonomi Terpimpin, diletakkan pada pengalihan gerak dan kegiatan modal swasta dari bidang-bidang jang sukar diawasi kearah bidang pembangunan dalam arti jang seluas-luasnja. Hal ini lebih mempertegas lagi bahwa bank-bank swasta harus dibimbing agar supaja melakukan kegiatan-kegiatannja sedemikian, hingga dapat mendjadi alat pemupuk dan penjalur dana-dana swasta kearah bidang-bidang pembangunan. Demikian pula terhadap modal swasta, ketjuali dilakukan tindakan-tindakan moneter-teknis jang bersifat tidak-langsung sebagaimana tersebut diatas, djuga dilakukan tindakan-tindakan jang berupa pembinaan atas usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan dari pemilik-pemiliknja sedemikian, hingga dana-dana itu dapat bermanfaat sebesar-besarnja bagi pembangunan.

2. **Organisasi aparat Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta.**

Mengingat makin meluasnja tugas-tugas jang harus dilaksanakannja, maka Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta setelah bekerdja selama kurang lebih 1½ tahun ini telah berkembang dengan mendapatkan bentuk organisasinja sebagai berikut:

a. Urusan Perbankan Swasta
b. Sekretaris/Biro Menteri
c. Urusan Modal Swasta.

Urusan Perbankan Swasta.

1) Melakukan penertiban perbankan swasta chususnja dibidang institusionil, dengan bekerdja-sama sebaik-baiknja dengan Menteri Urusan Bank Sentral.
2) Aparatur jang menjelenggarakan tugas Urusan Perbankan Swasta adalah Bank Indonesia, jang dikoordinir oleh seorang Koordinator ex-officio, jakni Gubernur Pengganti Bank Indonesia.

Sekretaris/Biro Menteri.

1) Melakukan tugas-tugas sehari-hari jang bersangkutan dengan policy umum Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta, baik untuk bidang perbankan swasta maupun untuk bidang modal swasta.

2) Melakukan tugas-tugas tata usaha, tata djasa, urusan pegawai, urusan keuangan, hubungan dengan instansi, dokumentasi chusus dan penugasan-penugasan chusus.
3) Memimpin bagian-bagian jang ada dibawahnja.
4) Bagian-bagian Biro Menteri.

(a) Sekretariat:

Menjelenggarakan segala tata usaha Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta.

(b) Pegawai/tata djasa:

Melakukan segala tugas dalam bidang kepegawaian dan tata djasa pada Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta.

(c) Keuangan:

Melakukan segala pengurusan keuangan Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta.

(d) Penghubung dengan instansi-instansi lain:

Melakukan tugas sebagai penghubung Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dengan semua instansi jang dipandang perlu.

(e) Dokumentasi chusus:

Sedjauh mungkin menjelenggarakan "filing" dan dokumentasi dari unsur-unsur jang bergerak dalam perbankan dan modal swasta.

(f) Chusus:

Melakukan tugas-tugas chusus dalam mengumpulkan data-data untuk keperluan bagian dokumentasi chususnja.

Urusan Modal Swasta.

1) Melaksanakan segala tugas Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dibidang modal swasta dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi dengan BAMUNAS dan Departemen-departmen lain, guna merumuskan, merentjanakan serta melakukan penertiban gerak dan pengarahan Modal Swasta.
2) Pelaksanaan tugas tersebut dalam (1) dilakukan oleh Asisten-asisten Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta, dan seorang diantaranja bertindak sebagai koordinator.

3) Koordinator Urusan Modal Swasta.

Memelihara koordinasi/sinkronisasi daripada hal-hal jang bersangkutan dengan kebidjaksanaan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dibidang modal swasta dengan BAMUNAS dan Departemen-departemen lain.

4) Asisten Research dan Perentjanaan.

Melakukan research dan perentjanaan guna pelaksanaan inventarisasi dan penertiban gerak dan pengarahan modal swasta dalam rangka:

— perkreditan
— investasi

5) Asisten Pembinaan.

Membina projek-projek sebagai pelaksanaan kebidjaksanaan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dalam rangka penertiban gerak dan pengerahan modal swasta dengan bekerdja-sama sebaik-baiknja dengan Menteri-mente teri jang bersangkutan.

6) Asisten Chusus.

Melakukan tugas-tugas chusus jang diberikan langsung oleh Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta.

Adapun bagan dari susunan organisasi Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dapat dilihat dalam lampiran (Lmp. 1).

3. **O.P.S.-PERBANAS.**

Sebagai satu-satunja Badan/Organisasi jang meliputi seluruh perusahaan-perusahaan bank-bank nasional swasta, jaitu: bank-bank umum, bank-bank tabungan, bank-bank desa, dan bank-bank pasar, bank-bank pegawai, maka O.P.S.-Perbanas dibentuk dan disahkan oleh Menteri Urusan Penertiban Bank Modal Swasta pada tanggal 2 Mei 1964.

Perlu diketahui bahwa O.P.S. ini dibentuk dengan berintikan PERBANA (Perhimpunan Bank-bank Nasional Indonesia) jang didirikan pada tahun 1952. Meskipun setjara formil-organisatoris O.P.S.-Perbanas tidak mendjadi aparat Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta, tetapi in concreto O.P.S. ini dapat dikatakan merupakan suatu „verleng-stuk" daripada aparat Menteri, jakni mendjadi penghubung jang dinamis-konstruktif antara Menteri dan seluruh bank-bank swasta setjara timbal balik, sedemikian hingga terdjadi "two ways traffic" jang funksionil untuk memelihara saling pengertian

antara Pemerintah dan masjarakat, cq. fihak-fihak jang bersangkutan. O.P.S. dengan demikian merupakan suatu forum dimana seluruh masjarakat mempertumbuhkan social control, serta social participation dari Pemerintah. Adapun susunan organisasi daripada O.P.S. Perbanas Pusat terdiri atas Pengurus Pleno (Pengurus Harian ditambah wakil-wakil Komisariat-komisariat); Pengurus Harian terdiri sekurang-kurangnja dari 7 orang dengan susunan: Ketua dan wakilnja, Sekdjen dan wakilnja, Bendahara dan Anggauta.

Sedang ditiap-tiap/beberapa Daswati I dibentuk Komisariat-komisariat O.P.S.Perbanas, jang sampai saat ini telah terbentuk di-13 tempat, jaitu di Djakarta (untuk lingkungan Djakarta Raya), Bandung (Djawa Barat), Semarang (Djawa Tengah dan D. I. Jogjakarta), Surabaja (Djawa Timur), Palembang (Sumatra Selatan dan Lampung), Makassar (Sulawesi Selatan dan Tenggara), Bandjarmasin (Kalimantan Selatan), Samarinda (Kalimantan Timur), Pontianak (Kalimantan Barat).

II. KEADAAN PERBANKAN DAN MODAL SWASTA DEWASA INI.

1. Umum.

a. Pertama-tama sebelum diberikan gambaran dan data-data tentang perbankan dan modal swasta dewasa ini, lebih dulu akan dikemukakan sedikit sedjarah pertumbuhan perbankan swasta.

Sebagaimana kita telah maklum, pada masa pendjadjahan bank-bank nasional swasta dengan keinsjafannja sendiri dan dengan dipelopori oleh tokoh-tokoh perintis kemerdekaan kita telah turut serta merintis perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Meskipun dengan perlengkapan dan fasilitas-fasilitas jang serba kurang lengkap, perintis-perintis dibidang perbankan nasional swasta ini telah berusaha sekuat-kuatnja untuk mengisi bidang perbankan di Indonesia dengan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan jang dilakukan sendiri oleh bangsa Indonesia, karena menjadari sepenuhnja bahwa bidang perbankan merupakan sebagai salah satu kuntji penting dalam penguasaan bidang ekonomi dan perdagangan. Beberapa nama bank-bank perintis jang terkemuka ialah:

BANK NASIONAL di Surabaja jang didirikan pada kurang lebih tahun 1925, dengan tokohnja Dr. Soetomo, dan lain-lain, sedang pada beberapa tahun kemudian disusul dengan didirikannja sebuah BANK NASIONAL di Bukittinggi; kemudian disekitar tahun 1938 di Djakarta berdiri Bank BOEMI I.M.A.

Setelah Proklamasi, pada masa menghebatnja perlawanan physik terhadap musuh-musuh kemerdekaan kita, perdjoangan tersebut dikobarkan terus oleh para aktivis perbankan nasional swasta dengan memberikan bantuan jang ada, chususnja berupa pembiajaan-pembiajaan kepada para pedjoang kita jang pada saat itu tersebar diseluruh pelosok untuk mempertahankan mati-matian setiap djengkal tanah air kita.

Bank-bank swasta jang muntjul dalam periode Revolusi physik ini, jang ditudjukan terutama untuk mengoper peranan bank-bank asing ialah:

BANK SURAKARTA I.M.A., INDONESIAN BANKING CORP., BANK DAGANG NASIONAL INDONESIA.

Kemudian setelah selesainja perdjoangan physik ini, maka sesuai dengan tugasnja sebagai patriot jang tidak pernah terpi-

sahkan dari tiap-tiap fase perdjoangan kita, kegiatan para aktivist perbankan nasional swasta berfunksi membantu rehabilitasi daripada pengusaha-pengusaha nasional jang sebagian besar telah kehilangan segala modalnja selama Revolusi Physik jang baru lampau itu.

Selandjutnja pada periode Survival jang disusul dengan periode Challenge dan response terhadap Demokrasi Terpimpin, perbankan nasional swasta telah bekerdja terus meskipun tidak dapat dihindari tentang adanja refleksi dari masjarakat pada waktu itu dimana timbul gedjala-gedjala, pandangan-pandangan dan praktek-praktek liberalistis dan a-sosial pada sementara kalangan dan oknum-oknum.

Achirnja, dengan didekritkannja Manipol oleh Presiden, dengan dilandasi oleh kesadaran sebagai bagian jang tidak terpisahkan dari masjarakat jang sedang ber-revolusi, maka perbankan nasional swasta mengambil funksi sebagai peserta jang aktip didalam bidang pembangunan Negara dan masjarakat dalam arti kata jang seluas-luasnja, dimana dilakukan perombakan atas norma-norma jang sudah usang dan sekaligus dilakukan peletakan dasar-dasar demokratis dalam menudju kepada susunan ekonomi Sosialis Indonesia.

Dengan demikian disadari sepenuhnja oleh perbankan nasional swasta bahwa masalah penertiban, pembimbingan dan pembinaan perbankan dan modal swasta adalah "rising demand" jang memang perlu dan penting sekali sesuai dengan madjunja kebutuhan Revolusi.

b. Sebelum kita menindjau keadaan perbankan swasta pada umumnja, maka kiranja perlu didjelaskan terlebih dahulu matjam-matjam perbankan swasta di Indonesia.

Menurut tjatatan-tjatatan pada achir Desember 1964 di Indonesia terdapat:

1) Bank-bank umum swasta, bank-bank mana pada umumnja bergerak dibidang perkreditan djangka pendek;
2) Bank-bank tabungan swasta jang pada umumnja bergerak pada penarikan simpanan-simpanan dengan djumlah-djumlah jang ketjil;
3) Bank pasar/Bank desa/Bank pegawai;
   Pendirian daripada bank-bank sematjam ini dilakukan oleh fihak swasta dan usahanja adalah sama atau mirip dengan usaha-usaha perkreditan desa, pasar dan perkreditan jang chusus ditudjukan kepada para pegawai;

4) Bank desa (berdasarkan Ordonansi jang dimuat dalam Staatsblad 1929 No. 357 jo Keputusan Gubernur Djenderal jang dimuat dalam Staatsblad 1931 No. 182 jang kemudian dirubah dengan Ordonansi tanggal 19 Pebruari 1934 jang dimuat dalam Staatsblad 1934 No. 82 tentang penghapusan Centrale Kas dan tentang pendirian Algemene Volkscredietbank untuk seluruh Hindia Belanda);

5) Bank-bank Koperasi (Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi) jang chusus bergerak untuk melajani anggauta-anggauta Koperasi.

6) Bank Pembangunan Swasta jang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1962, bank mana chusus bergerak dibidang investasi;

7) Bank-bank Pembangunan Daerah jang saham-sahamnja dimiliki oleh Daerah Swatantra dan Swasta sedang pelaksanaannja dikuasai oleh daerah.

Bank Umum Swasta, Bank-bank Tabungan Swasta dan Bank-bank Pasar/Pegawai/Desa berada langsung dibawah pengawasan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta cq. Bank Indonesia; Bank Pembangunan Swasta dan Bank Pembangunan Daerah berada dibawah pengawasan Menteri Urusan Bank Sentral cq. Bank Indonesia serta Bank Desa dan Bank Koperasi masing-masing dibawah pengawasan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

2. Bank Umum Swasta.

a. Djumlah.

Djumlah bank umum swasta pada awal tahun 1963 ada sebanjak 90 bank, dengan perintjian sebagai berikut:

Bank Umum Swasta pada awal tahun 1963.

Bank Devisa			Bukan Bank Devisa			
Nasional		Asing	Nasional		Asing	
Pusat	Tjabang		Pusat	Tjabang	Pusat	Tjabang
3	11	4	83	79	—	—

Dalam tahun 1963 telah ditjabut 2 izin usaha bank, terdiri dari satu bank asing jaitu Oversea Chinese Banking Corp. dan satu lagi jaitu Bank Kultur.

Dengan demikian, maka pada achir tahun 1964 djumlah bank umum swasta tinggal sebanjak 88 bank, karena selama dalam tahun tersebut tidak ada tambahan bank-bank baru. Kemudian dalam tahun 1964 bank asing jaitu Bank of China dan The Hongkong and Shanghai Banking Corp., telah menghentikan usahanja dan 3 bank nasional jaitu Bank Benteng Republik Indonesia, Bank Menengah dan Bank Usaha Nasional telah ditjabut izin usahanja. Selain daripada itu pada achir tahun 1964, dalam rangka pengganjangan projek Nekolim Malaysia, pemerintah cq. Bank Indonesia telah mengambil alih pengurusan dan pengawasan dari satu bank asing milik Inggeris, jaitu The Chartered Bank. Kemudian pada awal tahun 1965 usaha bank tersebut dilebur/digabungkan dengan salah satu bank pemerintah jaitu Bank Umum Negara. Selain daripada itu dalam tahun tersebut telah diizinkan pendirian suatu bank baru, jaitu Bank Mekar Nugraha, sehingga pada achir Desember 1964 keadaan dan djumlah bank umum swasta mendjadi sebagai berikut:

Bank Umum Swasta pada achir Desember 1964.

Bank Devisa			Bukan Bank Devisa			
Nasional		Asing	Nasional		Asing	
Pusat	Tjabang		Pusat	Tjabang	Pusat	Tjabang
3	13	—	80	78	—	—

Sedjak achir Desember 1964 sudah tidak ada lagi bank umum swasta asing.

Daftar Bank-bank Umum Swasta, periksa Lampiran-lampiran.

b. **Penjebaran Bank-bank.**

Pembagian bank-bank umum swasta menurut wilajah adalah sebagai berikut:

Keadaan pada awal tahun 1963 dan achir tahun 1964.

No.	Wilajah	Pusat		Tjabang		Perwakilan		Djumlah	
		awal 1963 *)	achir 1964	awal 1963	achir 1964	awal 1963	achir 1964	awal 1963	achir 1964
1.	Djakarta Raya	52	45	16	15	7	5	75	65
2.	Djawa Barat	5	5	5	6	2	1	12	12
3.	Djawa Tengah	6	6	13	14	10	9	29	29
4.	Djawa Timur	3	3	20	20	3	3	26	26
5.	Sumatera	11	11	23	22	8	7	42	40
6.	Kalimantan	5	5	8	7	7	7	20	19
7.	Sulawesi	7	7	4	6	7	6	18	19
8.	Nusa Tenggara	1	1	1	1	1	1	3	3
9.	Maluku	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	Irian Barat	—	—	—	—	—	—	—	—
		90	83	90	91	45	39	225	213

*) termasuk tjabang bank asing.

Pada awal tahun 1964 keadaannja tidak berobah ketjuali untuk djumlah kantor pusat jang di Djakarta Raya, jaitu berkurang 2 (dua) buah (penutupan Oversea Chinese Banking Corp. dan Bank Kultur).

c. **Permodalan dan Tjadangan.**

Pada awal tahun 1963, dimana permodalan bank-bank umum swasta masih mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 1/1955 jang menetapkan bahwa modal disetor bagi suatu bank umum swasta minimum Rp. 2.500.000,— dan bagi pembukaan suatu tjabang harus ada modal disetor/tjadangan bebas sebesar Rp. 500.000,—, maka keadaan permodalan dan tjadangan bank umum swasta adalah sebagai berikut:

Tahun	Djumlah Bank		Modal dasar (dalam djutaan rupiah)	Modal disetor (dalam djutaan rupiah)	Tjadangan (dalam djutaan rupiah)
	Pusat	Tjabang			
achir 1962	90	90	1.683	477	530
„ 1963	88	90	1.658	766	677
„ 1964	83	91	3.965 *)	1.550 *)	371 **)

Sumber: Laporan neratja bulanan/triwulan jang disampaikan oleh bank-bank umum swasta.

*) Dalam tahun 1964 dikeluarkan P.P. No. 19/1964 jang berlaku mulai 1 Mei 1964. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditekankan bahwa modal disetor daripada suatu bank umum swasta minimum Rp. 25.000.000,— sedangkan untuk suatu tjabang diharuskan ada tambahan modal disetor/tjadangan bebas jang bergerak antara Rp. 25.000.000,— dan Rp. 5.000.000,— menurut letak kantor tjabang bersangkutan.
Kenaikan djumlah-djumlah tersebut disebabkan bank-bank sebagian telah menjesuaikan dengan ketentuan dalam P.P. No. 19/1964.

**) Hanja djumlah tjadangan bebas, tidak termasuk tjadangan-tjadangan lainnja.

d. Penarikan Dana dari masjarakat.

Hasil penarikan dana dari masjarakat oleh bank-bank umum swasta dapat terlihat dari daftar dibawah ini:

Djumlah Giro dan Deposito Berdjangka.

Tahun	Djumlah Bank		Giro (dalam djutaan rupiah)	Deposito (dalam djutaan rupiah)
	Pusat	Tjabang		
achir 1962	90	90	7.811	1.220
„ 1963	88	90	22.524	3.208
„ 1964	83	91	32.746	8.394

Sumber: Laporan neratja bulanan/triwulan jang disampaikan oleh bank-bank umum swasta.

e. Perkreditan.

Salah satu faktor jang penting jang mempengaruhi stabilisasi moneter/ekonomi adalah perkreditan bank-bank, oleh karena dengan perkreditan tersebut bank-bank umum mempunjai ke-

mampuan untuk mentjiptakan uang giral, sehingga dengan demikian dapat menambah volume uang jang beredar.

Berhubung dengan itu, agar perkreditan dari bank-bank tersebut dapat dipimpin dan disalurkan menurut garis-garis pokok jang telah dilandaskan oleh Pemerintah, maka Pemerintah mengangggap perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap perkreditan jang dilakukan oleh bank-bank.

Dengan pengawasan tersebut maka perkreditan dari bank-bank, diatur dan disalurkan menurut politik moneter dan ekonomi Pemerintah serta Rentjana Pembangunan Semesta jang telah ditetapkan.

Disamping itu dengan pengawasan perkreditan tersebut Pemerintah bermaksud untuk lebih memberikan djaminan kepada para kreditur bank-bank tentang keamanan dari simpanan-simpanannja.

Disamping pengaturan perkreditan setjara kwantitatif berdasarkan cash-ratio dan giro-wadjib pada Bank Indonesia, maka bagi bank-bank umum swasta pada dasarnja berlaku pula pengaturan perkreditan setjara kwalitatif bagi bank-bank Pemerintah termaksud, jaitu ketentuan-ketentuan mengenai:

a. volume kredit, bahwa sekurang-kurangnja 50% harus disalurkan kesektor Produksi dan sekurang-kurangnja 20% kesektor Ekspor;

b. pemberian kredit setjara komersiil dan zakelijk;

c. larangan untuk memberikan kredit/overdracht facilit antar bank-bank umum swasta;

d. pemberian kredit/overdracht facilit dari bank kepada nonbank hanja diizinkan untuk sektor-sektor jang tidak dilarang oleh peraturan kredit kwalitatif ini.

Ketentuan mengenai kewadjiban untuk menjalurkan kredit kepada sektor Pemerintah dan mengenai pembatasan pemberian kredit menurut djaminan, tidak berlaku bagi bank-bank umum swasta. Mengenai bantuan likwiditas dari Bank Indonesia, maka dalam keadaan sekarang kemungkinan untuk memperolehnja hanja dalam suatu hal bank swasta dihadapkan kepada keadaan terpaksa (force majeur) jang ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan diluar kemampuannja. Dalam hal demikian itu, bantuan likwiditas dapat diberikan berdasarkan herbelening dan lain-lain jang disetudjui oleh Bank Indonesia.

Untuk sekedar ilustrasi, dibawah ini diberikan data-data tentang perkreditan, sebagai berikut:

(1) Djumlah pemberian kredit.

Tahun	Djumlah Bank		Kredit jang diberikan (dalam djutaan rupiah)
	Pusat	Tjabang	
achir 1962	90	90	7.872
„ 1963	88	90	14.848
„ 1964	83	91	27.510

Sumber: Laporan neratja bulanan/triwulan jang disampaikan oleh bank-bank umum swasta.

(2) Tudjuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

Tudjuan pemberian kredit bank-bank swasta (devisa dan bukan devisa).

Tahun	Bank Dev. Swasta		Bank Swasta bukan Bank Dev.	
	Bidang Prod.	Bidang Eks.	Bidang Prod.	Eks.
	%	%	%	%
Desb. 1963	59,6	16,6	50,4	9,5
Nop. 1964	58,8	10,9	48,8	7,0

Sumber: Laporan perintjian pemberian kredit Bank-bank.

Tjatatan: Menurut persjaratan kwalitatif pemberian kredit bank, dibidang produksi harus sedikit-dikitnja mendapat 50%, dan bidang ekspor sedikit-dikitnja 20%.

f. Pembatasan perkreditan setjara kwantitatif.

Dengan dikeluarkannja Peraturan Menteri Keuangan No. 5/1960 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan No. 3 tanggal 10 April 1960, maka kepada bank umum swasta dikenakan kewadjiban untuk memelihara dasar perbandingan minimum antara alat-alat likwid jang dikuasai dengan djumlah kewadjiban-kewadjiban jang segera dapat ditagih (cash-ratio) sebesar 30%.

Lebih landjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 5/ 1960 itu ditetapkan pula bahwa bank umum swasta diwadjibkan untuk menjimpan 10% dari djumlah kewadjiban-kewadjiban jang segera dapat ditagih pada Bank Indonesia. Djadi dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 5/1960 ini terdapat dua pokok kewadjiban bank-bank umum swasta, jaitu:

1). memelihara cash-ratio sebesar minimum 30%,
2). menjimpan 10% dari kewadjiban jang segera dapat ditagih pada Bank Indonesia.

Pada kenjataannja ketentuan tersebut diatas adakalanja dilanggar. Terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut didjatuhkan sanksi-sanksi administratif berupa denda, sebesar prosentase tertentu.

3. Bank Tabungan Swasta.

a. Umum.

Sebagai diketahui bank tabungan adalah suatu lembaga jang lapangan usahanja mengumpulkan tabungan dari masjarakat dan menanam tabungan itu dalam effek-effek, hipotik dan perkreditan kepada badan-badan pemerintah. Tabungan dari masjarakat pada hakekatnja adalah uang dari masjarakat jang untuk sementara waktu tidak hendak dipergunakan oleh jang punja. Uang itu disimpan sebagai tjadangan untuk menghadapi kemungkinan masa sulit, untuk hari tua atau uang itu ditabung dengan maksud untuk dapat membeli sesuatu barang dikemudian hari atau membajar suatu tudjuan apabila djumlah jang dibutuhkan telah dapat terkumpul. Kita mengetahui bagaimana tjara-tjara masjarakat kita menabung didjaman dulu, jaitu uang disimpan dalam bumbung, dibawah tempat tidur dan sebagainja. Tabungan jang dilakukan demikian, selain mengandung unsur-unsur risiko pentjurian, kebakaran dan sebagainja jang sepenuhnja harus ditanggung oleh penabung sendiri, djuga tidak mempunjai fungsi sosial, oleh karena jang dapat menikmati tabungan itu hanja sipenabung sendiri. Tabungan masjarakat jang dilakukan melalui bank tabungan atau lembaga simpan-pindjam lainnja mempunjai fungsi sosial, oleh karena masjarakat luas dapat ikut mengetjap faedah dari adanja tabungan itu dengan kredit-kredit jang diberikan oleh bank tabungan tersebut.

Sifat dari tabungan pada bank adalah setiap waktu dapat diminta kembali oleh sipenabung. Berhubung dengan itu bank

harus dapat mengatur penanaman uangnja pada bidang jang likwid, jaitu bentuk-bentuk penanaman jang dapat segera di-tjairkan tanpa menimbulkan kerugian. Dalam praktek ada suatu bagian tertentu dari djumlah uang tabungan jang senantiasa tersimpan pada bank, artinja tidak ditarik oleh sipenabung. Berhubung dengan kenjataan tersebut bank tabungan mampu menanam uang tersebut dalam djangka pandjang.

Dari segi sumber keuangan dari suatu bank, dana-dana jang diperoleh dari tabungan masjarakat merupakan salah satu sumber keuangan jang diperoleh oleh bank dengan biaja (cost of money) jang rendah. Dari segi masjarakat, tabungan merupakan salah satu alat pembiajaan jang tidak inflatoir sifatnja dan merupakan suatu bidang jang idiil untuk mempraktekkan azas kegotong-rojongan dalam bidang keuangan. Pengumpulan dana dengan tabungan tidak ketjil artinja dalam membantu Negara dalam membiajai lapangan-lapangan pembangunan.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, jaitu tabungan adalah sumber keuangan dengan "cost of money" jang rendah dan dari segi masjarakat mengandung unsur jang idiil, maka bukan hanja bank tabungan sadja jang melakukan usaha penarikan tabungan dari masjarakat, tetapi djuga bank-bank umum dan lembaga-lembaga lain ikut berketjimpung dalam lapangan ini.

Tabungan lazimnja dilakukan oleh rakjat ketjil, pegawai, anak sekolah dan sebagainja dan bukan dilakukan oleh orang-orang kaja, radja-radja uang atau kapitalis-kapitalis. Dengan uang jang sedikit demi sedikit dikumpulkan, dipandang dari segi masjarakat dapat terkumpul dana jang tjukup besar untuk dapat dipakai sebagai sumbangan jang berharga bagi pembiajaan pembangunan.

Djustru karena tabungan merupakan uang-uang kepunjaan „rakjat ketjil" maka pemerintah mempunjai tanggung djawab moril jang lebih besar untuk melindungi kreditur-kreditur dari bank tabungan dan badan-badan lain jang menjelenggarakan usaha tabungan.

Hak dan kepentingan rakjat ketjil jang menabung itu harus dilindungi, djangan sampai uang-uang jang dipertjajakan kepada bank disalah-gunakan jang dapat merugikan para penabung.

Di Indonesia kita mengenal adanja 3 matjam badan jang menjelenggarakan tabungan jaitu:

1. Bank tabungan, jang mempunjai sifat usaha penarikan tabungan dari umum;

2. Badan tabungan jang lazimnja tidak menggunakan istilah „Bank" jaitu perkumpulan simpan pindjam dari anggauta dan untuk anggauta (mutual-savingbank);
3. Koperasi simpan pindjam, jang usahanja mirip ad. 2 diatas, hanja bentuk hukumnja mendasarkan pada Undang-undang Koperasi.

b. **Perkembangan bank tabungan.**

Di Indonesia sekarang terdapat beberapa bank tabungan. Perkembangan daripadanja dapat dikatakan masih kurang pesat djika dibandingkan dengan bank-bank umum.

Disamping Bank Tabungan Negara ada terdapat beberapa Bank Tabungan Swasta. Sebagaimana diketahui unsur swasta dalam negara kita tetap diikut sertakan didalam pembangunan negara. Swasta disamping unsur jang lain, tegak bahu-membahu dalam mendajungkan roda Revolusi kita. Karena itu sudah sepatutnjalah Bank Tabungan swasta harus mendapat perhatian dan bimbingan serta pengawasan dari Pemerintah.

Dan oleh pemerintah, Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta telah ditundjuk untuk bersama-sama lembaga-lembaga negara jang lain guna mendjalankan tugas diatas.

Bank Tabungan Swasta jang ada sekarang sebagian sudah didirikan sedjak sebelum perang dunia kedua dan sebagian lagi didirikan setelah perang dunia kedua.

Bank Tabungan Swasta jang didirikan sebelum Perang Dunia Kedua ialah:

(1) Bank Tabungan Bandung
(d/h Spaarbank te Bandung)
(2) Bank Tabungan Makassar
(d/h Spaarbank van Makassar)
(3) Bank Tabungan Minahasa
(d/h Spaarbank Minahasa)
(4) Bank Tabungan Semarang
(d/h De Spaarbank te Semarang)
(5) Bank Tabungan Sumatera Barat
(d/h Padangsche Spaarbank)
(6) Bank Tabungan untuk Umum atau Perserikatan „Maskapai Guna Kepentingan Umum" (d/h Nuts Spaarbank Surabaja).
(7) Bank Simpan Pindjam „Atmo Setyo Utomo" di Bogor.

(8) Perkumpulan „Himpunan Saudara" di Bandung.
Sedang Bank-bank Tabungan lainnja didirikan setelah Perang Dunia Kedua seperti:

(9) Bank Tabungan „Dana Mulia" di Solo
(10) Bank Tabungan „Manfaat" di Wedi — Klaten
(11) Bank Tabungan NISP di Bandung.
(12) Bank Tabungan Perintis di Bandung
(13) Perhimpunan Studiebank di Bandung
(14) Bank Tabungan Utama di Malang

Bank-bank Tabungan Swasta diatas djuga mempunjai 6 buah kantor tjabang serta 65 kantor perwakilannja diseluruh Indonesia.

4. Bank Desa.

a. (1) Badan Kredit Desa (B.K.D.) jang didalam bentuknja dikenal sebagai Lumbung Desa dan Bank Desa, adalah suatu badan perkreditan milik desa.

Untuk pertama kalinja Lumbung Desa didirikan pada tahun 1897. Semula badan perkreditan ini dimaksudkan oleh para pendirinja untuk dapat berbentuk Koperasi, tetapi ternjata didalam pertumbuhannja telah mendapatkan bentuknja tersendiri, baik dalam hal organisasi, administrasi maupun tata-kerdjanja.

De Wolf van Westerrode sebagai pentjiptanja B.K.D. dengan penuh kejakinan ingin agar B.K.D. mentjontohi sistim Raiffeisen, suatu sistim dimana badan itu diselenggarakan oleh modal jang terdapat didesa itu sendiri.

(2) Dasar hukum dari B.K.D. adalah organisasi desa untuk Djawa dan Madura, diluar daerah Kotapradja (I.G.O.). Dalam penjelenggaraannja telah keluar sebuah Ordonansi I.G.C.I. Stb. 1929 No. 357 jang merupakan Undang-undang Pokok bagi B.K.D. Oleh karena banjak ketentuan-ketentuan jang sudah tidak sesuai lagi dengan djiwa dan alam kemerdekaan, maka fihak pemerintah telah melakukan usaha-usaha untuk merubah dan memikirkan masalah B.K.D. ini setjara mendalam. Pemerintah berkejakinan bahwa usaha-usaha tersebut pasti dapat terlaksana dengan hasil jang memuaskan.

(3) Mengingat adanja manfaat B.K.D. bagi masjarakat pada zaman jang sudah-sudah dan ternjata masih sukarnja membentuk badan-badan baru sebagai penggantinja, jang memenuhi tuntutan masjarakat sedang ber-revolusi menudju ter-

bentuknja Sosialisme Indonesia, maka diperlukan penindjauan dari segala segi, ja'ni segi-segi politik, ekonomi, sosial, juridis, dan sebagainja, dengan penelitian jang seksama, sehingga akan diperoleh pemetjahan jang setepat-tepatnja.

b. **Organisasi dan Tata-kerdja B.K.D.**

(1) B.K.D. adalah badan perkreditan (perusahaan) milik desa, jang didirikan atas kemauan penduduk desa bersangkutan. Putusan pendiriannja memerlukan pengesahan oleh D.P.R.-D. Dati II.

(2) Modal usaha berasal dari:

a. memindjam Kas Desa,
b. memindjam B.K.T.N., dengan pengesahan dari Kabupaten menurut ketentuan I.G.O.
c. simpanan wadjib/sukarela dari setiap anggautanja.

(3) Pelaksanaan bekerdjanja.

a). Administrasi.

Pembukuan dikerdjakan oleh pegawai B.K.D.; mereka ini bukan pegawai desa, pegawai B.K.T.N., ataupun pegawai daerah otonoom.
Kedudukan mereka sebagai pegawai perusahaan desa diatur dalam Stbl. 1929 — 357 dan putusan Gubernur, sedangkan gadji mereka dibajar oleh dana usaha B.K.D. jang dibentuk dari sumbangan masing-masing B.K.D. dalam Kabupaten. Administrasi diselenggarakan menurut tjara dan petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh pengurus B.K.D.

b). Pengurusan.

Kebidjaksanaan pengurusan dan kredit diselenggarakan oleh pengurus jang disebut Komisi Bank jang terdiri dari sekurang-kurangnja 3 orang; kepala desa mendjabat Ketua ex-officio. Komisi B.K.D. tidak mendapat gadji tetap tetapi honorarium jang ditetapkan berdasarkan atas prosentase dari djumlah angsuran pindjaman dan bunga jang diterima tiap bulan dari para pemindjam.

c). Pengawasan.

Tugas pengawasan diserahkan kepada B.K.T.N. atau badan lain jang dibentuk oleh B.K.T.N. dengan diberikan penggantian ongkos jang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas itu.

d). Susunan organisasi.

B.K.D. dimasing-masing desa berdiri sendiri, sehingga setjara strukturil tidak mempunjai ikatan vertikal.
Dalam hubungannja dengan Pemerintah setempat, B.K.D. tunduk kepada peraturan-peraturan Kepala Daerah Tingkat II.

c. **Persoalan-persoalan B.K.D.**

Karena adanja berbagai instansi jang ikut memegang wewenang dalam memberi pengaturan atas B.K.D., maka akibatnja sulit untuk mengikuti struktur dan organisasi B.K.D. Misalnja:

1) penentuan batas maksimum pindjaman jang dapat diberikan kepada para anggota memerlukan pengesahan dari pengawas B.K.D.;
2) pengangkatan dan pemberhentian pegawai B.K.D. dilakukan oleh Bupati atas usul pengawas B.K.D.;
3) Biaja umum pengawasan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah;
4) bimbingan dan pengawasan diselenggarakan oleh B.K.T.N.;
5) desa sebagai pemilik hampir tidak mempunjai wewenang apa-apa, selain hak mengadjukan usul;
6) dalam B.K.D. ada unsur koperasi (mempunjai anggota), tetapi anggota tidak berhak atas sebagian dari keuntungan dan tidak bertanggung djawab atas kerugian B.K.D.

d. **Tindjauan Ekonomis.**

Strukturil, dalam masjarakat kita ada sematjam batas antara sektor jang sudah organized dengan sektor jang belum, jaitu sektor "unorganized". Sektor unorganized dapat dikatakan merupakan suatu sektor dimana satuan-satuan ekonomi berbentuk ketjil, bagaikan atom-atom, dalam berbagai ukuran dan bentuknja, jang tersebar diseluruh pelosok tanah air.

Sebagian besar mereka itu belum tergabung ataupun terorganisir, maka oleh karena itu tidak mempunjai kekuatan melawan sektor jang lain, ja'ni sektor organized, jang terdiri dari perusahaan-perusahaan menengah dan besar, warisan djaman pendjadjahan.

Jang mendjadi „linkage" antara kedua sektor tersebut adalah para pedagang perantara. Pedagang-pedagang ini dapat melakukan peranan tersebut disebabkan karena adanja "incentives", jaitu adanja kenjataan bahwa sektor rural (unorganiz-

ed) itu memerlukan "service", dan masih belum berkembangnja keadaan infrastruktur. Keadaan pengangkutan, perhubungan, alat-alat komunikasi, fasilitas-fasilitas lembaga keuangan jang serba kurang itu merupakan suatu pendorong bagi para perantara untuk mengisi „link" tersebut.

Sebagai hasil dari ketekunan dan keuletannja, mereka ini memegang kehidupan ekonomi didesa-desa.

Sebab itu Pemerintah jakin bahwa lahirnja B.K.D. merupakan usaha jang baik sekali sebagai salah satu djalan untuk menghilangkan/mengurangi penguasaan para perantara atas kehidupan desa jang tidak djarang terasa sebagai tekanan-tekanan jang tak dapat dihindarkan oleh masjarakat setempat.

e. **Keadaam kwantitatif.**

1) Pada tahun 1940 di Djawa dan Madura terdapat 6.923 buah bank desa, dan 5.451 bank lumbung desa.
Pada waktu tersebut di Indonesia baru terdapat 478 buah koperasi kredit, 53 buah koperasi desa, 19 buah koperasi lumbung, dan 468 buah pegadaian negara. Nampak B.K.D. memegang peranan dalam menjelenggarakan kredit untuk desa.

2) Pada tahun 1952, B.K.D. mulai mengalami pemulihan dan mnedapatkan bantuan modal dari pemerintah. Pada waktu itu terdapat:

— koperasi kredit	:	2.390
— „ desa	:	2.683
— „ lumbung	:	633

3) Pada tahun 1961, terdapat perubahan-perubahan :

— bank desa	:	4.321
— lumbung desa	:	3.160
sedangkan,		
— koperasi kredit	:	8.573
— „ lumbung	:	2.712
— „ desa	:	14.843
— pegadaian negara	:	443.

Djadi ternjata bahwa peranan B.K.D. relatif mendjadi lebih ketjil.

f. **Keadaan kwalitif.**

1) melihat besarnja pemindjaman jang berupa uang dari B.K.D. maka besarnja rata-rata pemindjaman sedjak ada-

nja pemulihan hingga sekarang ternjata bahwa kenaikannja sangatlah ketjil.

2) besarnja maksimum kredit jang dapat diberikan walaupn naik, tetapi masih belum dapat mengikuti naiknja kebutuhan-kebutuhan jang harus ditutup oleh kredit ini, baik untuk modal usaha, maupun untuk konsumsi.

3) lebih-lebih bila dibandingkan dengan angka-angka index harga-harga untuk 12 bahan makanan didaerah pedusunan, jang sedjak 1960 terdapat kenaikan, maka ternjata bahwa kredit dari B.K.D. masih perlu dikembangkan untuk mengimbangi rising demands dari masjarakat desa.

4) sehubungan dengan angka (3) diatas diharapkan bahwa Koperasi Desa jang ada pada waktu sekarang bersama-sama B.K.D. dengan bimbingan jang lebih intensif dari pemerintah akan dapat meningkatkan usaha-usaha desa sebagai keseluruhan sesuai dengan irama dan gerak dinamikanja Revolusi pada dewasa ini.

5. Bank Pasar.

Sebagai hasil survey dari Team Interdepartemental jang telah dibentuk oleh Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta pada bulan Maret 1964 jang lalu, dapat dikumpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Pada umumnja kegiatan usaha bank pasar ialah memberi bantuan keuangan berupa pindjaman untuk keperluan usaha dagang kepada pedagang-pedagang ketjil, biasanja jang berusaha didalam pasar. Melihat dari siapa pengusahanja, bank pasar ada 2 matjam:

— Jang diusahakan oleh Kotapradja dan
— oleh Swasta.

Dapat diduga bahwa pada bank pasar swasta motif mentjari „untung" lebih kuat.

Sedangkan bank pasar Kotapradja biasanja kurang mampu dalam:

— penjelenggaraan
— permodalan
— bank teknis.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan bank pasar Kotapradja dilakukan dengan „sambil lalu" oleh pegawai-pegawai jang terdiri dari mantri-mantri pasar.

Faktor-faktor jang mempengaruhi tempat kedudukan suatu bank pasar, adalah:

— sasaran dari operasinja
— peraturan-peraturan pemerintah Daerah
— kebiasaan-kebiasaan setempat dan sedjarahnja.

Di Jogja dan Sala, karena pendiri-pendirinja adalah dari kalangan perbankan umum, maka bank pasar didaerah ini banjak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan lama jaitu bahwa bank mereka ditudjukan untuk melajani langganan-langganan mereka. Dengan demikian kantor bank pasar ini tidak perlu berada disekitar pasar.
Sedangkan di Surabaja, karena ada ketentuan pemerintah Daerah jang melarang bank-bank pasar swasta bertempat kedudukan didalam pasar, maka kedudukannja berada diluar pasar.
Di Bali atau tempat-tempat lainnja, dimana faktor-faktor jang seperti dihadapi oleh bank-bank pasar di Jogja, Sala, Surabaja, tersebut diatas tidak ada, maka kedudukan bank-bank pasar disini dipilih se-ekonomis mungkin, jaitu didalam pasar.

b. Kegiatan bank pasar dapat dilihat dari:

1) Sumber keuangannja.

Pertama-tama, sumber keuangan berasal dari pemilik bank pasar jang bersangkutan sebagai sumber keuangan jang utama. Disamping itu sumber keuangan djuga berasal dari modal saham dan simpanan dari fihak ketiga. Dibawah ini diberikan sedikit gambaran tentang sumber-sumber keuangan bank pasar dibeberapa tempat, berdasarkan neratja bank-bank jang bersangkutan per achir 1963.

	N a m a	Modal saham		Sumber keuangan		
				Nama pos	Djumlah	
1.	Bank Pasar Masjarakat Jogja P.T.	Rp.	1.000.000,—	Tabungan Kredit	Rp. „	323.078,98 359.490,61
2.	P.T. Bank Pasar Sapta Daja, Sala	„	288.000,—	Tabungan Deposito	„ „	250.355,95 598.000,—
3.	P.T. Bank Pasar Sukadana, Sala	„	2.500.000,—	Tabungan Deposito	„ „	233.600,54 1.536.159,50
4.	M.A.I. Bank Pasar Tabanan, Bali	„	75.000,—	Tabungan Hutang	„ „	1.052.278,38 145.147,75
5.	M.A.I. Bank Pasar Badjera, Bali.	„	50.000,—	Giro Deposito	„ „	71.827,— 316.500,—

2) Usaha perkreditannja.

Di Bali, pemberian kredit didasarkan atas sjarat-sjarat :

— penduduk jang dikenal oleh Pengurus Bank.

— mempunjai tempat berusaha jang tetap

— mempunjai penghasilan jang tjukup untuk melakukan angsuran

— mempunjai milik jang dapat dipergunakan sebagai djaminan.

Maksimum pindjaman sebesar Rp. 5.000,—

Bunga jang dipungut sekitar 2% sebulan.

Di Surabaja, sjarat-sjarat sama, hanja tidak ada djaminan jang diminta oleh bank. Tapi untuk mengurangi risiko, maka dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

— mewadjibkan debitur menjimpan 10% dari pindjamannja, dan waktu melakukan angsuran debitur-debitur wadjib menjetor simpanan hari raja, jang apabila simpanannja lunas, simpanan wadjib hari raja akan berdjumlah 4% atau 5% daripada pindjaman.

— penagihan dilakukan tiap hari oleh mantri-mantri pasar.

Maksimum pindjaman Rp. 50.000,— setiap debitur.
Di Sala dan Jogja, sjarat-sjarat pemberian kredit ialah:

Tjalon debitur harus penduduk jang terang identifikasinja.

— mempunjai milik barang jang dapat digunakan sebagai djaminan, berupa perhiasan dan lain-lannja.

Karenanja pindjaman-pindjaman jang diberikan ternjata bersifat konsumtif pula, dan dibeberapa tempat bersifat gadai, karena adanja kemungkinan pendjualan barang djaminan.

Pindjaman maksimum sebesar Rp. 25.000,— kadang-kadang dilampaui dengan tjara memberikan beberapa buah pindjaman pada seorang debitur.

3) Tingkat bunga/privisi jang dipungut oleh beberapa bank pasar.

DAFTAR PUNGUTAN JANG DIKENAKAN OLEH BANK² PASAR ATAS PINDJAMAN JANG DIBERIKAN.

	Djangka waktu pindjaman	Bunga		Provisi/ ongkos² lain	Djumlah bunga dan provisi selama masa pindjaman	Besarnja bunga provisi dan ongkos² lain setiap bulan
		Setiap bl.	Djumlah selama djangka waktu pindjaman			
	a	b	$c = a \times b$	d	$e = c + d$	$f = \frac{e}{a}$
1. Bank Pasar Masjarakat Jogja-karta	12 bulan	5%	60%	—	60%	5%
2. Bank Pasar Sapta Daja	2 bulan	1%	2%	1%	3%	1½%
3. Bank Pasar Sukadana	1 bulan	3%	3%	2%	5%	5%
4. Bank Pasar Bumi Asli	4 bulan	2%	8%	16%	24%	6%
5. Bank Pasar Bangun Hardja..	2 bulan	5%	10%	4%	14%	7%
6. Bank Pasar Surabaja	2 bulan	8%	16 %	—	16%	8%
7. Bank Dagang Surabaja	2 bulan	6%	12%	10%	22%	11%
8. Bank Pasar Tabanan	2 bulan	2%	4%	4%	8%	4%
9. Bank Pasar Badjera	2 bulan	2%	4%	1%	5%	2½%
10. Bank Pasar Ubud	1 bulan	4%	4%	—	4%	4%

6. Kesimpulan.

Keadaan bank-bank umum swasta dan bank-bank tabungan swasta.

Disamping terdapatnja hal-hal jang menggembirakan dilapangan perkembangan bank-bank umum swasta dan bank-bank tabungan swasta, maka berdasarkan hal-hal jang telah dikemukakan diatas keadaan bank-bank umum swasta serta bank-bank tabungan swasta pada dewasa ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 pengawasan atas bank-bank umum swasta dan bank tabungan swasta dilakukan oleh Bank Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pengawasan atas bank-bank tersebut dilakukan setjara pasif jaitu dengan djalan memeriksa dan meneliti laporan-laporan jang masuk dan setjara aktif dengan djalan mengadakan pemeriksaan langsung terhadap bank-bank jang bersangkutan.

Dari pemeriksaan jang telah dilakukan atas bank-bank tersebut sedjak tahun 1957 dapat dikemukakan:

1. telah ditjabut izin untuk melakukan usaha bank umum dari sedjumlah 19 buah bank;
2. telah menghentikan usahanja atas permintaan sendiri sebanjak 2 bank;
3. telah ditjabut izin untuk melakukan usaha bank tabungan dari sedjumlah 5 buah bank.

Disamping itu masih ada diantara bank-bank umum swasta jang belum dapat memenuhi ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dibidang moneter, chususnja jang bertalian dengan ketentuan-ketentuan mengenai cash-ratio dan kewadjiban memelihara suatu saldo pada Bank Indonesia.

Selandjutnja terdapat pula bank-bank jang dari hasil pemeriksaan itu ternjata menundjukkan suatu perkembangan jang kurang sehat baik dilihat dari sudut organisasi administrasi maupun dilihat dari sudut kebidjaksanaan dibidang perkreditan. Dalam pada itu timbul gedjala-gedjala jang kurang sehat pada beberapa buah bank jang dapat menimbulkan berkurangnja kepertjajaan masjarakat terhadap perbankan, jang sebab-sebabnja adalah seperti berikut:

a. **Dibidang organisasi:**

— tidak terdjaminnja kontinuitas pimpinan;
— pertikaian antara pengurus;
— penempatan orang-orang sebagai pengurus jang dalam prakteknja ternjata hanja namanja sadja jang disebut, sedangkan dalam kenjataan tugas tersebut dilakukan oleh orang-orang lain, bahkan ada kalanja oleh orang-orang diluar susunan pengurus bank jang bersangkutan;
— pemilikan dan/atau pengurusan dari pada bank diantaranja ada ditangan orang, dilihat dari segi extramural, tidak bertanggung-djawab, sehingga dalam gerak dan usaha bank kadang-kadang terlihat adanja gedjala-gedjala penjelewangan, pengatjauan dan subversif.

b. **Dibidang administrasi:**

— tidak dapat menjelenggarakan administrasi jang dapat menggambarkan keadaan jang up to date mengenai usahanja;
— administrasinja hanja memenuhi funksi sebagai alat pentjatat belaka dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat kontrole dan management.

c. **Dibidang kebidjaksanaan perkreditan:**

Pemberian kreditnja tidak sehat dalam arti:

— setjara bank teknis kurang dapat dipertanggung-djawabkan;
— diversitasnja kurang baik sehingga tidak terdapat penjebaran risiko jang sempurna;
— tidak memenuhi sjarat-sjarat mengenai tudjuan pemberian kredit sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah cq. Bank Indonesia.

Keadaan bank-bank desa, pasar, pegawai.

Untuk dapat menentukan kebidjaksanaan tentang Bank Pasar/Pegawai/Desa, jang dibentuk berdasarkan pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955, maka telah dibentuk suatu team untuk melakukan survey mengenai kedudukan, kegiatan dan kebutuhan masjarakat akan lembaga-lembaga tersebut, team mana pada waktu ini telah selesai dengan tugas surveynja.

Dalam laporannja antara lain telah dikemukakan data-data, pendapat-pendapat serta saran-saran jang dalam garis besarnja menjatakan bahwa:

1. Usaha-usaha jang kini dilakukan oleh bank-bank pasar dan bank-bank desa ternjata bermanfaat bagi pedagang-pedagang/pengusaha-pengusaha ketjil serta masjarakat desa.
2. Mengingat bahwa dalam prakteknja bank-bank pasar memberikan djuga djasa-djasanja kepada para pedagang/pengusaha-pengusaha ketjil jang bergerak diluar pasar bahkan djuga kepada pedagang-pedagang/pengusaha-pengusaha ketjil serta para petani ketjil didesa-desa, maka dianggap tidak perlu untuk mengadakan perbedaan antara bank pasar dan bank desa.
3. Mengingat bahwa pedagang-pedagang/pengusaha-pengusaha ketjil jang menerima bantuan dari bank-bank tersebut pada umumnja terdiri atas penduduk asli, maka untuk mendjamin dimiliki dan diurusnja bank-bank jang bersangkutan oleh kalangan masjarakat itu sendiri, maka bentuk hukum dari badan-badan tersebut sebaiknja berupa M.A.I.
4. Untuk mendjamin agar usaha bank-bank tersebut betul-betul ditudjukan untuk membantu para pedagang/pengusaha ketjil-ketjil itu dan bukan jang dapat merugikan lingkungan masjarakat jang bersangkutan, maka diperlukan adanja pengawasan jang teratur dari Bank Indonesia. Walaupun Bank Indonesia hingga kini sudah melakukan pengawasan terhadap beberapa buah bank desa dan bank pasar jang pendiriannja didasarkan kepada beslit kwalifikasi jang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955, namun peraturan tertentu jang memuat ketentuan-ketentuan umum mengenai pendirian, batas-batas usaha serta pengawasan atas bank-bank tersebut dan lain-lain, hingga kini belum dikeluarkan.
5. Bank-bank jang dewasa ini telah berusaha dan bergerak dalam lapangan ini diwadjibkan agar segera menjesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan jang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai badan-badan tersebut.

Hal-hal jang dikemukakan dalam laporan tersebut pada waktu ini sedang dibahas dan peraturan mengenai hal jang bersangkutan akan disusun dan dikeluarkan pada waktunja. Mengenai bank-bank pegawai, sedang diadakan penindjauan tersendiri mengenai kemungkinan dirubahnja status bank-bank tersebut mendjadi suatu Koperasi.

Demikian pula mengenai Bank desa berdasarkan Staatsblad 1929 No. 357 dan sebagainja kini telah dibentuk suatu team

survey jang terdiri dari wakil-wakil Departemen Dalam Negeri, Bank Koperasi Tani dan Nelajan dan Bank Indonesia jang bertugas untuk dalam waktu jang singkat menjelidiki dan menjarankan kedudukan dari bank-bank tersebut untuk selandjutnja.

Modal Swasta.

Pada masa pendjadjahan Belanda segala aktivitas perdagangan dan industri di Indonesia dikuasai oleh modal swasta Belanda, jang didjalankan oleh perusahaan Belanda jang terkenal dengan nama the big five. Dan mereka ini mendapat backing financiering dari bank-bank Belanda (NHM, NHB, Escompto).

Karena perusahaan Belanda mempunjai organisasi jang luas setjara vertikal dan horizontal, maka boleh dikatakan segala aktivitas perdagangan dan industri dikuasai oleh modal swasta Belanda.

Tetapi lama-kelamaan keadaan mulai berobah terutama dalam bidang pengumpulan hasil-pasil ekspor, mulai muntjul pedagang-pedagang bangsa Tionghoa, dan djuga sebagai pedagang perantara dalam bidang penjaluran kebutuhan masjarakat.

Karena orang-orang Tionghoa organisasi kerdjanja terlepas dari perusahaan-perusahaan Belanda, tentu mereka mentjari backing financiering jang lain, dan dalam hal ini mereka meminta bantuan kepada pedagang-pedagang Singapura. Dengan demikian usaha mereka mendjadi makin besar sehingga pada saat itu, mereka sudah sanggup mendjual sendiri barang-barang ekspor Indonesia dan mendapatkan barang-barang dari luar negeri melalui Singapura.

Dengan demikian dalam pasar modal di Indonesia sudah terbentuk disatu fihak organized money market (NHB, NHM, Escompto, Javasche Bank), dan dilain fihak unorganized money market jaitu jang didalangi pedagang-pedagang Tionghoa Singapura.

Perusahaan-perusahaan Tionghoa di Indonesia makin berkembang pesat sehingga pedagang-pedagang itu sudah dapat meng-akumulasikan modal jang tjukup besar, sehingga unorganized money market makin memegang peranan dalam pasar modal di Indonesia.

Sedang modal swasta dari orang Indonesia hanja sedikit jang berkembang, ini terbukti dengan masih sedikitnja perusahaan-perusahaan nasional jang besar, seperti Dasaad Musim Concern, Rachman Tamin, Sidi Tando dan sebagainja.

Pada zaman kemerdekaan, adanja struktur 2 matjam pasar modal jaitu, organized dan unorganized money market tersebut masih tetap ada dan berlangsung terus. Hanja ada perobahan dalam sektor organized money market dimana bank-bank swasta Belanda jang beroperasi di Indonesia semuanja dinasionalisir mendjadi bank-bank kepunjaan negara (jaitu BUNEG, BDN, BKTN), ditambah dengan BNI, bank jang didirikan oleh R.I. Jogja.

Dan selandjutnja atas kebidjaksanaan Pemerintah, maka mulailah djuga diperkembangkan adanja bank-bank umum swasta. Dengan demikian dalam organized money market terdapat bank-bank kepunjaan negara dan bank-bank swasta.

Meskipun organized money market dapat dikuasai oleh negara namun karena kenjataan modal-modal jang tergolong dalam unorganized money market itu besar, maka unorganized money market tetap memegang peranan penting dalam aktivitas perekonomian/perdagangan dinegara kita. Dan karena modal-modal dalam unorganized money market itu hanja mereka arahkan kepada usaha-usaha jang mudah, tjepat, dan besar keuntungannja, maka akibatnja volume dan perkembangan modal dalam unorganized money market itu djauh lebih tjepat dibandingkan dengan organized money market.

Dengan demikian berarti makin sulitnja bagi negara untuk mengarahkan segala funds jang ada dalam masjarakat kearah usaha-usaha jang produktif sesuai dengan program-program Pemerintah dalam rangka peningkatan produksi dan pembangunan pada umumnja.

Begitu pula pengusaha-pengusaha bangsa Indonesia jang makin hari makin mengembangkan usahanja dan kegiatan-kegiatannja oleh karena tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas financiering jang mentjukupi dari organized money market, maka mau tidak mau mereka lari ke unorganized money market djuga, lebih-lebih bila diingat bahwa pengusaha-pengusaha pada umumnja banjak tertarik kepada usaha-usaha jang "quick yielding".

Dalam hubungannja dengan bank-bank swasta, sebagai lembaga jang legal dalam pasar modal dinegara kita, maka tidak dapat diingkari adanja kenjataan bahwa bank-bank ini oleh unorganized money market didjadikan alat penjaluran modal-modal tersebut.

Achirnja sebagai kesimpulan dari uraian tersebut diatas dapat diutarakan disini, bahwa:

1. di Indonesia sekarang masih terdapat adanja organized dan unorganized money market,
2. sebagian besar dari modal-modal swasta masih beroperasi dalam bidang usaha-usaha jang lukratif spekulatif sadja,
3. pada saat ini organized money market perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatannja untuk dapat menampung segala aktivitas dibidang ekonomi/perdagangan dinegara kita.

***

III. PERKEMBANGAN USAHA-USAHA SERTA KEBIDJAKSANAAN-KEBIDJAKSANAAN

Umum.

Berdasarkan atas fakta-fakta dan data-data mengenai bank-bank dan modal swasta sebagaimana disadjikan dalam bab II diatas, maka kesemuannja itu merupakan challenge bagi Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta untuk melakukan penertiban dan mengambil langkah-langkah serta tindakan-tindakan sehingga potensi masjarakat jang berupa modal dan fasilitas perbankan swasta itu dapat dibimbing, diarahkan serta dimanfaatkan untuk mengabdi kepada tudjuan Revolusi.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pokok-pokok dan pelaksanaan-pelaksanaan daripada kebidjaksanaan tentang tugas penertiban dan pembinaan tersebut.

Untuk melaksanakan tugas penertiban dan pembinaan bank-bank dan modal swasta, langkah-langkah dan aktivitas jang telah diambil dapat digolong-golongkan dalam pokok-pokok tersebut dibawah ini.

Mengadakan sjarat-sjarat dan ketentuan-ketentuan baru bagi bank umum swasta.

Untuk dapat lebih mendjamin kenasionalan, mengurangi usaha-usaha/kegiatan-kegiatan jang tidak sehat serta mendorong adanja penjebaran daripada kegiatan bank-bank swasta diseluruh wilajah Indonesia, maka diadakan sjarat-sjarat dan ketentuan-ketentuan jang tertjakup didalam peraturan-peraturan/masalah-masalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah 19 tahun 1964 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 1 tahun 1955 mengenai Pengawasan Urusan Kredit.

Pada pokoknja dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bagi perbankan swasta ketentuan-ketentuan baru jang berazaskan kegotong-rongan antara Pemerintah dan Rakjat, bertudjuan merealisir pelaksanaan Ekonomi Terpimpin, dengan djalan membimbing dan menjalurkan potensi Rakjat tersebut baik untuk segera memanfaatkan semaksimal-maksimalnja perbankan swasta dalam usaha Pemerintah mensukseskan politik ekonomi djangka pendek dan mengikut sertakannja dalam

pembangunan semesta djangka pandjang, maupun untuk meletakkan landasan-landasan jang kuat dan sehat bagi perkembangan perbankan selandjutnja. Perihal ketentuan-ketentuan baru dalam P.P. 19/1964 beserta keterangan-keterangan pelaksanaannja dapat diikuti dalam uraian-uraian berikut tentang tiap-tiap masaalah jang bersangkutan.

2. Masaalah modal.

Untuk mendapatkan izin mendirikan bank, harus tersedia modal disetor penuh sekurang-kurangnja sebesar Rp. 25,— djuta.

Dalam hal ini sudah dipertimbangkan oleh pemerintah bahwa djumlah modal ini setjara riil adalah minimal sekali, lebih-lebih bila diingat bahwa dengan modal tersebut masih harus disediakan untuk membiajai persiapan-persiapan fasilitas bank jang berupa gedung jang tjukup representatif dan memenuhi sjarat funksionil, peralatan kantor, transpor dan lain sebagainja.

Dalam hubungan ini, untuk mendjaga supaja modal jang dipersjaratkan tersebut djangan sampai seluruhnja atau sebahagian besar dipergunakan untuk pembiajaan-pembiajaan fasilitas-fasilitas tersebut sehingga pada waktu bank mulai bekerdja tidak terdjamin tersedia modal kerdja jang mentjukupi, maka diambil kebidjaksanaan untuk menetapkan ketentuan bahwa sekurang-kurangnja sebanjak 60% dari djumlah modal jang telah disetor penuh tersebut diatas, harus mutlak tersedia untuk modal kerdja bank.

Selandjutnja ditentukan bahwa uang jang diperlukan untuk penjetoran tersebut tidak boleh berasal dari uang jang dipindjam dari bank jang bersangkutan sendiri.

Penambahan modal dengan djalan menilai kembali lebih tinggi harta tetap atau harta bergerak dari bank ataupun dengan tjara-tjara lain tidak diperkenankan, ketjuali dengan tjara seperti tersebut dibawah ini.

Apabila bank telah memupuk sedjumlah tjadangan bebas jakni tjadangan jang dipupuk dari keuntungan-keuntungan bank sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnja, maka djumlah tjadangan bebas itu dapat dianggap sebagai tambahan modal termaksud diatas, dengan ketentuan bahwa djumlah tjadangan bebas jang dianggap sebagai tambahan modal tersebut harus dipindahkan kedalam rekening chusus „Tjadangan Modal".

Selandjutnja ditetapkan bahwa bank-bank diwadjibkan dalam waktu setahun setelah berlakunja Peraturan Pemerintah 19 tahun 1964 (2 Mei 1965) telah memenuhi penambahan modal sebagaimana termaksud diatas.

Mengenai sjarat-sjarat dan ketentuan-ketentuan lainnja tentang modal dari tjabang-tjabang bank akan diuraikan dalam bab mengenai masaalah „Tjadangan Bank", untuk lebih memudahkan sistimatiknja.

3. Masalah kenasionalan daripada pemilikan dan pengurusan bank.

Pendirian bank umum swasta hanja dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan-badan hukum jang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan jang saham-sahamnja dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Untuk mendjamin dimilikinja sjarat ini dan untuk memudahkan segi pengawasannja, maka selandjutnja ditentukan bahwa saham-saham jang dikeluarkan oleh bank hanja dapat dikeluarkan „atas nama".

Pemenuhan atas ketentuan-ketentuan tersebut diatas diwadjibkan untuk dalam waktu 6 bulan setelah berlakunja Peraturan Pemerintah 19/1964 sudah dilaksanakan.

Setiap pemindah-tanganan saham-saham dan pengeluaran saham-saham baru hanja dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan persetudjuan Pemerintah, c.q. Bank Indonesia.

Mengenai pengurus dan pegawai ditentukan bahwa dalam djangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunja Peraturan Pemerintah 19/1964 semua anggauta-anggauta Dewan Komisaris, anggauta-anggauta Direksi serta pegawai-pegawai bank umum swasta harus terdiri atas warga negara Indonesia.

Pemenuhan atas ketentuan-ketentuan mengenai pemilikan dan pengurusan bank swasta tersebut diatas ketjuali dinilai setjara formil, djuga terutama dinilai setjara materiil, jang mana berarti bahwa baik nama-nama jang dikirimkan kepada Pemerintah maupun orang-orang jang memiliki dan mengurusi bank itu sungguh-sungguh warga negara Indonesia.

Pengetjualian mengenai penggunaan tenaga asing tersebut diatas hanja diperkenankan apabila telah diperoleh izin tertulis dari Bank Indonesia, jakni dengan tjara mengadjukan permohonan tertulis berikut keterangan-keterangan mengenai alasan mengapa tenaga asing itu masih diperlukan, daftar riwajat

hidup, dan bukti kartu Izin Masuk/Surat Keterangan kependudukan sementara.

Selandjutnja ditentukan bahwa anggauta-anggauta Direksi bank harus terdiri atas orang-orang jang dapat mentjurahkan tenaga sepenuhnja pada bank dan tidak diperkenankan untuk merangkap tugasnja itu dengan tugas-tugas/djabatan-djabatan lain diluar bank.

Mereka ini diharuskan bertempat tinggal ditempat kedudukan bank. Untuk mendjamin agar bank dapat berkembang setjara wadjar dan setjara efektif dapat melaksanakan fungsinja sebagai alat Revolusi, maka anggota Dewan Komisaris, anggauta Direksi serta pegawai bank tidak boleh terdiri atas orang-orang jang menurut penilaian Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta pernah, sedang dan/atau dianggap melakukan tindakan-tindakan/kegiatan-kegiatan jang tidak sesuai dengan program-program serta kebidjaksanaan-kebidjaksanaan Pemerintah, dan/atau pembinaan maupun pengurusan setjara sehat.

Bila terdapat hal jang demikian maka atas perintah Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta bank jang bersangkutan diwadjibkan untuk memberhentikan anggauta pimpinan atau pegawainja itu.
Sedang akibat jang timbul daripada memberhentikan tersebut (antara lain uang pesangon, kewadjiban memberikan pendjelasan-pendjelasan kepada Menteri Perburuhan, dan lain-lain) mendjadi beban bank jang bersangkutan.

Perlu disebutkan disini, bahwa berhubung dengan adanja ketentuan-ketentuan persjaratan-persjaratan baru atas bank sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah 19/1964 jaitu mengenai masaalah modal dan masaalah kenasionalan daripada pemilikan serta pengurusan bank, maka ditentukan pula dalam Peraturan Pemerintah tersebut izin-izin tetap untuk melakukan usaha bank umum jang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah 1/1955, ditetapkan sebagai izin sementara jang mempunjai djangka waktu satu tahun terhitung mulai tanggal berlakunja Peraturan Pemerintah 19/1964.

Kepada bank-bank jang dalam djangka waktu satu tahun tersebut telah dapat memenuhi ketentuan-ketentuan termaksud diatas, dapat diberikan izin tetap jang baru.

Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dapat memperpandjang djangka waktu izin sementara bank jang da-

lam waktu 1 tahun tersebut belum dapat memenuhi ketentuan-ketentuan jang dimaksudkan.

4. **Masaalah tjabang/perwakilan bank umum.**

Tjabang-tjabang bank umum jang telah ada maupun jang akan dibuka dipersjaratkan untuk memenuhi tambahan modal dibajarkan dan/atau tjadangan bebas sebesar Rp. 25 djuta untuk kota Djakarta, Rp. 15 djuta untuk kota-kota Semarang, Medan, Palembang dan Makassar, dan Rp. 5 djuta untuk kota-kota lainnja.

30% dari djumlah tersebut harus ditanam menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan. Selandjutnja dipersjaratkan bahwa kantor pusat bank jang bersangkutan harus telah memenuhi setjara teratur ketentuan-ketentuan dibidang moneter dan telah menundjukkan perkembangan jang sehat.

Selandjutnja ditetapkan bahwa tjabang bank, dilihat dari sudut organisasi, pemilikan maupun pengurusannja, tidak boleh merupakan organisasi jang terpisah dari kantor pusatnja.

5. **Masaalah bank asing.**

Dalam rangka penertiban perbankan, ketentuan-ketentuan pokok tentang bank asing dikeluarkan oleh Menko Keuangan dengan Surat Keputusannja tertanggal 18 Mei 1964, dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan oleh Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta/Menteri Urusan Bank Sentral.

Dasar pemikiran jang diambil ialah bahwa kedudukan bank asing di Indonesia tidak dapat lagi disamakan dengan bank nasional swasta dan dengan demikian, maka terhadap bank asing di Indonesia diadakan pembatasan-pembatasan setjara tegas jang meliputi:

a. izin untuk melakukan usaha bank umum hanja diberikan untuk djangka waktu tertentu menurut kebutuhan jang dirasakan oleh Pemerintah dalam rangka kerdja sama ekonomi dan keuangan antara Republik Indonesia dan negara jang bersangkutan;

b. bank asing hanja diperbolehkan melakukan usahanja di Djakarta;

c. hanja diperbolehkan untuk melakukan usahanja dengan memakai sumber keuangannja sendiri jang berasal dari transfer kantor pusatnja (minimum U.S. $ 300.000.—) dan tidak diperbolehkan menarik dana-dana dari masjarakat, baik berupa giro maupun deposito;

d. Harus merupakan tjabang bank jang kantor pusatnja berkedudukan diluar wilajah Indonesia.

Berdasarkan ketentuan sub. b diatas maka tjabang bank asing jang berkantor diluar kota Djakarta diwadjibkan menghentikan segala usaha dan kegiatannja dalam waktu 6 bulan setelah berlakunja Keputusan Menko Keuangan termaksud.

Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta/Menteri Urusan Bank Sentral dapat menetapkan ketentuan-ketentuan lebih landjut mengenai bidang usaha jang boleh dilakukan oleh tjabang-tjabang bank asing. Djadi djelaslah bahwa bank asing di Indonesia sangat dibatasi keleluasaannja tentang strukturnja, lokasinja maupun operasinja.

Selandjutnja perlu ditambahkan disini bahwa bank umum jang telah didirikan berdasarkan hukum Indonesia dikwalifisir sebagai bank asing sepandjang belum dapat memenuhi sjarat-sjarat tentang pemilikan saham dalam djangka waktu 6 bulan setelah berlakunja Peraturan Pemerintah No. 19/1964.

Ini berarti bahwa bagi bank tersebut berlaku sepenuhnja ketentuan-ketentuan jang ditetapkan bagi bank asing.

Perlu kiranja diketahui bahwa di Indonesia pada waktu ini satu-satunja bank jang dikwalifisir sebagai bank asing ialah Bank Perdana, suatu bank tjampuran Djepang-Indonesia baik dalam pemilikan maupun pengurusannja.

Pada dewasa ini penentuan mengenai status daripada bank ini dalam penjesuaiannja dengan ketentuan-ketentuan P.P. 19/1964, Surat Keputusan Menko Keuangan tanggal 18 Mei 1964 beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannja sedang dalam taraf penjelesaian.

6. Masaalah penebaran bank.

Masalah penebaran bank merupakan hal jang mendapat perhatian chusus dari Pemerintah, mengingat adanja kenjataan di Indonesia dewasa ini bahwa disatu fihak bank-bank bercongesti di kota-kota "money pockets", sedangkan dilain pihak masih sangat kurang adanja bank-bank dikota-kota/daerah-daerah lainnja jang djustru sangat membutuhkan pelajanan perbankan untuk perkembangan perekonomian daerah serta kemadjuan tingkat hidup penduduknja.

Inilah terutama jang mendjadi dasar pertimbangan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta mengapa "money pockets" itu sementara waktu dinjatakan sebagai kota-kota tertutup untuk pendirian bank-bank baru (jaitu Djakarta, Sura-

baja, Medan, Palembang, Bandung, Makassar, Semarang) dan tjabang-tjabang baru (kota-kota tersebut ketjuali Bandung).

Sebaliknja, adalah mendjadi pemikiran pemerintah tjara untuk menarik perhatian masjarakat agar mendirikan bank-bank dikota-dikota ketjil serta daerah-daerah pedalaman.

Kebidjaksanaan membajar setjara giral.

Di Indonesia, sebagian terbesar uang kartal jang beredar berada dalam tangan masjarakat dan hanja sebagian ketjil sadja berada dalam simpanan bank-bank baik berupa rekening-rekening (call deposit) maupun berupa deposito berdjangka (time deposit).

Keadaan ini mempunjai akibat-akibat serius sebagai berikut:

1. Transaksi dalam masjarakat berdjalan untuk bagian terbesar dengan menggunakan uang kartal, dan keadaan ini tidak bisa diawasi oleh pemerintah karena tidak adanja rekening-rekening bank jang ikut mentjatat kegiatan masjarakat ini.
2. Tiadanja pengawasan terhadap transaksi masjarakat dengan uang kartal ini mempunjai akibat jang negatif, jaitu antara lain:
   a. timbulnja berbagai spekulasi dan manipulasi, bahkan penipuan disana-sini,
   b. adanja gedjala bahwa achirnja uang kartal jang beredar dalam masjarakat itu akan terkumpul dalam tangan beberapa orang sadja, jang akan menggunakan untuk lebih menggendutkan kantongnja sendiri dengan kerugian bagi masjarakat, bahkan tidak disangsikan lagi adanja penggunaan uang itu untuk tudjuan subversif.

Keadaan sematjam itu sudah barang tentu tidak dikehendaki baik oleh Pemerintah maupun oleh masjarakat sebagai keseluruhan.

Hal ini hanja bisa diatasi dengan djalan mengubah kebiasaan masjarakat dalam membajar transaksi-transaksinja, jaitu dari uang kartal ke-giral. Sudah barang tentu transaksi-transaksi masjarakat dalam djumlah-djumlah jang ketjil seperti halnja dalam pasar-pasar dan tokok-toko, untuk sementara ini kebiasaan tersebut belum bisa diharapkan berlaku.

Disamping andjuran terhadap masjarakat untuk melakukan pembajaran dengan giral, Pemerintah sendiri kedalam telah

melakukan penertiban-penertiban dan mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden No. 470 tahun 1961, jang menetapkan antara lain sebagai berikut:

   Memberi kuasa kepada Menteri Keuangan untuk berturut-turut mengambil tindakan-tindakan jang bertudjuan melaksanakan perubahan lalu-lintas pembajaran jang dewasa ini untuk bagian jang terbesar menggunakan uang kartal, mendjadi lalu-lintas giral.

2. Keputusan Menteri Keuangan No. B.U.M. 18-143-9/II tanggal 27 Desember 1961, jang pada pokoknja berisi ketetapan jang mengharuskan agar semua badan/perusahaan-perusahaan Pemerintah dan/atau semi Pemerintah, sipil maupun militer agar mempunjai rekening pada bank-bank Pemerintah dan melakukan pembajaran dengan pemindahbukuan.
   Didalam bidang tugasnja, Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta telah mengandjurkan kepada bank-bank swasta agar bersedia membantu usaha Pemerintah ini dengan djalan agar sedjauh mungkin pembajaran antara nasabah-nasabah bank-bank jang bersangkutan dilakukan dengan giral.

Undang-undang tentang larangan penarikan Tjek Kosong.

Dengan pesatnja kemadjuan perekonomian Indonesia maka dalam masjarakat kita chususnja dikalangan pedagang/pengusaha-pengusaha telah berkembang kebiasaan mempergunakan tjara pembajaran dengan tjek. Betapa pentingnja tjara pembajaran dengan tjek tersebut kita ketahui semua dari hasrat Pemerintah agar di Indonesia didirikan bank-bank sebanjak-banjaknja guna antara lain melajani tjara pembajaran tersebut dengan sebaik-baiknja.

Dalam pada itu dapat diketahui bahwa bersamaan dengan kemadjuan tersebut, timbul praktek-praktek negatif dalam masjarakat jang pada garis besarnja berkisar pada penggunaan tjek untuk maksud-maksud manipulasi, ialah dengan djalan menarik tjek kosong. Dalam hubungan ini perlu didjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Mengingat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Dagang hanja mewadjibkan seseorang jang menarik tjek untuk me-

njediakan dana jang tjukup pada bank atas nama tjek ditarik pada hari tjek itu diadjukan kepada bank guna pembajarannja, maka orang merasa tidak perlu untuk menjediakan dana jang diperlukan itu sebelum tjek tersebut diadjukan kepada bank jang bersangkutan guna diminta pembajarannja.

Mengingat adanja selisih waktu jang tjukup antara saat tjek itu ditarik dan saat tjek itu diadjukan pada bank guna diminta pembajarannja, dalam waktu mana tjek itu dapat dipindah dari tangan ketangan sebagai alat pembajaran, maka timbullah nafsu orang-orang jang tidak bertanggung djawab untuk mempergunakan kesempatan itu guna tudjuan-tudjuan manipulasi.

Dengan demikian, dalam rangka pengamanan usaha-usaha mentjapai tudjuan Revolusi pada umumnja, perlu sekali diadakan perubahan atas ketentuan-ketentuan mengenai masaalah tjek dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang jang notabene sebagai Kitab Undang-undang warisan djaman pendjadjahan semata-mata bagi kita sekarang hanja merupakan kitab hukum jang berfunksi sebagai pedoman sadja.

Maka setjara konkritnja demi tertjapainja stabilisasi/perbaikan-perbaikan dalam bidang moneter serta untuk mentjegah hilangnja kepertjajaan masjarakat terhadap lalu-lintas pembajaran dengan tjek dan perbankan pada umumnja, sudah selajaknja Pemerintah memandang perlu segera memberikan ketentuan-ketentuan baru mengenai masalah ini, jaitu berupa Undang-undang No. 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan tjek kosong (26 September 1964), lazim disingkat Undang-undang Tjek Kosong.

Adapun pokok-pokok ketentuannja ialah:

1. Penarik tjek harus menjediakan dana jang tjukup pada bank atas mana tjek itu ditarik semendjak saat penarikan tjek itu.

2. Pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas (penarikan tjek kosong) dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pendjara sementara maksimum 20 tahun dan denda maksimum empat kali djumlah jang ditulis dalam tjek tersebut.

3. Disamping orang jang melakukan penarikan tjek kosong, djuga badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau Jajasan jang olehnja/atas namanja tjek kosong itu ditarik, harus bertanggung djawab atas tuntutan-pidana dan pidana baik sendiri-sendiri maupun kedua-duanja.

4. Penarikan tjek kosong dinjatakan sebagai kedjahatan/ tindak pidana ekonomi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Tjek Kosong ini Pemerintah, setjara terkoordinir dengan sebaik-baiknja antara berbagai instansi-instansi jang bersangkutan, telah menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan sedemikian rupa hingga memungkinkan dilaksanakannja ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut setjara konsekwen, akan tetapi djuga tanpa melupakan segi-segi jang perlu diperhatikan dalam memperkembangkan usaha perbankan dan moneter pada umumnja.

Dengan berpedoman pada hal-hal tersebut diatas, maka tertjantum ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan penarikan tjek kosong, maka setiap tjek kosong jang diadjukan kepada bank, harus ditahan oleh bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
2. Apabila seorang pemegang rekening dikenakan pidana berdasarkan Undang-undang No. 17/1964, maka namanja akan ditjantumkan dalam suatu black-list dan tidak diperkenankan lagi mengadakan hubungan rekening koran dengan bank-bank di Indonesia.

   Ia baru dapat mengadjukan permohonan untuk dapat mendjalankan pidana jang bersangkutan dan kewadjiban membajarnja pada pemegang tjek telah dilaksanakannja dengan baik.
3. Apabila pemegang rekening jang menarik tjek kosong tidak atau belum dikenakan hukuman pidana berdasarkan Undang-undang No. 17/1964, maka ia masih dapat melandjutkan hubungan rekeningnja dengan baik, apabila ia dalam waktu 4 (empat) hari kerdja setelah tanggal penolakan atas tjeknja itu dapat menjetorkan pada bank djumlah kekurangan saldonja itu.

   Bertalian dengan penarikan tjek kosong itu ia akan menerima surat peringatan dari bank jang bersangkutan. Kesempatan demikian itu hanja dapat diberikan dua kali kepadanja, sehingga apabila setelah 2 × menerima surat peringatan termaksud ia menarik lagi tjek kosong untuk ketiga kalinja, maka tanpa memperhatikan apakah ia dikenakan hukuman pidana atau tidak, bank harus segera mengachiri hubungan rekening koran dengan nasabah jang

bersangkutan dan memasukkan nama nasabah tersebut kedalam black-list.

Apabila pemegang rekening jang bersangkutan tetap tidak dikenakan pidana setelah hubungan rekening korannja dengan bank diputuskan, maka ia baru dapat mengadjukan permohonan untuk mendapat rehabilitasi, setelah lewat masa 6 bulan terhitung mulai tanggal hubungan rekeningnja diputuskan oleh bank.

Dari ketentuan-ketentuan pokok tersebut diatas djelas terlihat adanja usaha-usaha untuk membedakan antara mereka jang memang sudah ternjata bersalah sengadja menarik tjek kosong dan mereka jang belum dinjatakan bersalah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada para langganan bank jang baik bahwa tidak ada alasan untuk merasa chawatir bahwa Undang-undang No. 17/1964 akan membawa kesukaran bagi mereka, selama mereka itu memang bukan spekulan jang melakukan penarikan tjek-tjek kosong dengan sengadja.

Dengan demikian dapatlah diharapkan bahwa Undang-undang No. 17/1964 akan menambah kepertjajaan masjarakat terhadap lembaga perbankan pada umumnja dan tjek pada chususnja, sehingga usaha-usaha perbankan akan dapat berkembang dengan sebaik-baiknja menudju kepada kestabilan moneter jang kita harapkan.

Tjukup menggembirakan bahwa sebagai hasil positif daripada usaha penerbitan manipulasi tjek kosong tersebut, ja'ni adanja Undang-undang No. 17/1964 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannja, maka djumlah penarikan tjek kosong mulai berkurang. Diharapkan bahwa untuk selandjutnja volumenjapun akan menurun pula.

Sehubungan dengan tindakan-tindakan Pemerintah terhadap tjek kosong, dan dalam rangka memperteguh kepertjajaan masjarakat terhadap lembaga tjek dan usaha perbankan pada umumnja, Pemerintah telah pula menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai praktek dalam masjarakat jang berupa penarikan tjek jang diberi tanggal lebih kemudian daripada tanggal penarikannja (post-dated cheque). Dengan berbentuk keputusan Presidium Kabinet R.I. tertanggal 2 Oktober 1964, ditetapkan bahwa "post-dated cheque" tidak mempunjai arti lain daripada sebuah tjek pada umumnja bagi bank atas mana tjek ditarik, dan dengan demikian

tjek tersebut dapat diadjukan kepada bank tersebut setiap saat tanpa memperhatikan bahwa tanggal jang tertjantum didalamnja belum djatuh tempo. Ini berarti bahwa sebuah tjek jang post-dated, apabila diadjukan kepada bank atas mana tjek ditarik dan ditolak karena untuknja tidak tersedia dana jang tjukup, dianggap sebagai tjek kosong.

Intensifikasi pengawasan dan pembimbingan bank-bank swasta.

Tidak perlu disebutkan disini betapa pentingnja segi pengawasan dan kontrole terhadap bank-bank terutama bank umum, atas ketaatannja didalam memenuhi ketentuan-ketentuan jang telah ditetapkan Pemerintah dalam rangka penertiban bank.

Pengawasan dan pembimbingan bank setjara pasif maupun setjara aktif selalu diintensifir sehingga perkembangan per bankan jang lebih sehat dapat terlaksana dengan tjepat.

Pengawasan pasif berupa ketentuan-ketentuan kepada bank-bank swasta untuk menjampaikan laporan-laporan kepada Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta perihal perkembangan dan djalannja kegiatan bank, baik periodik maupun insidentil.

Pengawasan aktif ialah pengawasan setjara langsung atas bank jang dilakukan oleh para pemeriksa bank.

Dalam hubungan ini perlu ditjatat bahwa Bank Indonesia, untuk dapat menampung luasnja pekerdjaan-pekerdjaan dalam rangka perkembangan Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta telah mengadakan penjempurnaan organisasinja termasuk perluasan djumlah serta peningkatan mutu keahlian daripada pemeriksa-pemeriksa bank.

Adapun tindakan-tindakan untuk intensifikasi pengawasan dan pembimbingan bank-bank jang telah dan sedang dilakukan ialah antara lain:

1. Pengawasan jang teliti dilakukan atas pemilikan dan pengurusan bank pada umumnja termasuk hal ini ialah: pentjegahan atas dimilikinja bank oleh beberapa gelintir orang, dan dipenuhinja faktor kenasionalan pemegang saham, pengurus dan pegawai (lihat sub. 3 diatas) dan penjebaran bank-bank.
2. Telah diinstruksikan kepada setiap bank-bank umum swasta untuk ikut dalam clearing, sehingga dapat lebih terdjamin lantjarnja lalu-lintas giral. Perlu pula ditjatat bahwa dengan

adanja kewadjiban clearing ini, maka penarikan-penarikan tjek kosong dapat diketahui dengan lebih tjepat.

3. Disamping keharusan menjampaikan laporan tahunan, tri-wulan, bulanan, dan laporan-laporan likwiditas tiap 2 (dua) minggu, maka bank-bank diwadjibkan menjampaikan laporan neratja hariannja kepada Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta sekali seminggu.

4. Didalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden No. 01 tahun 1964 tentang mreobah kebiasaan membajar setjara kartal mendjadi kebiasaan membajar setjara giral, maka telah dikeluarkan andjuran kepada bank-bank swasta untuk membatasi dikeluarkannja uang-uang kertas bank setjara besar-besaran jang dapat berakibat buruk kepada stabilisasi/perbaikan keadaan moneter dan harga-harga pada umumnja.

5. Untuk memperbaiki bidang administrasi daripada bank dan mentjegah hal-hal jang tidak diinginkan, maka telah dikeluarkan Instruksi: supaja uang jang dengan alasan apapun dititipkan pada bank ditata-usahakan dan adanja titipan itu dinjatakan dalam neratja harian bank, cq. daftar harian bank mengenai perobahan-perobahan jang terdjadi dalam hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban ialah aktiva dan passiva bank termasuk djaminan-djaminan dan garansi-garansi dalam bentuk apapun.

6. Untuk mempertebal rasa kenasionalan serta untuk membimbing dipakainja kesatuan bahasa dan maknanja, maka kepada bank-bank telah diinstruksikan pula agar menjelenggarakan penata-usahanja beserta korespondensinja dengan nasabah-nasabah didalam negeri dengan mempergunakan tulisan dan bahasa Indonesia.

Perlu ditambahkan keterangan disini bahwa bentuk umum daripada tindakan-tindakan jang dilakukan terhadap bank-bank jang kurang sehat adalah:

1. Memberikan nasehat-nasehat dan petundjuk-petundjuk mengenai perbaikan-perbaikan daripada kekurangan-kekurangan jang terlihat dalam segi-segi: organisasi, administrasi, likwidasi, perkreditan dan pemenuhan terhadap peraturan-peraturan jang berlaku.

2. Memberi teguran-teguran apabila nasehat-nasehat dan petundjuk jang telah diberikan ternjata tidak dilaksanakan.

3. Membantu menjelesaikan suatu pertikaian antara anggauta pengurus bank apabila ternjata bahwa pertikaian itu akan mengakibatkan kerugian-kerugian fihak ketiga dan mengurangi kepertjajaan masjarakat terhadap bank-bank.
4. Menjarankan kepada bank-bank untuk merobah sifat usahanja sesuai dengan kemampuan dan keadaannja — misalnja kepada bank umum disarankan agar mendjadi „bank pasar", apabila jang bersangkutan ternjata tidak mampu memenuhi sjarat bagi bank umum atau bank tabungan.
5. Menempatkan seorang/sebuah team Pengawas untuk sementara waktu dengan tugas untuk setjara aktif melakukan pengawasan atas sesuatu bank jang menundjukkan gedjala-gedjala kurang sehat, terutama adanja kekusutan serta kemungkinan manipulasi dalam bank tersebut.
6. Mempertimbangkan penutupan/pentjabutan izin usaha bank jang bersangkutan apabila ternjata bahwa bank tersebut tidak dapat diharapkan lagi untuk memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dan/atau berkembang dengan wadjar dan sehat.
7. Selain tindakan-tindakan jang dapat diambil sebagaimana tersebut diatas, djuga ada kemungkinan tindakan berupa mengumumkan nasehat kepada sesuatu bank didalam Berita-Negara, setelah bank jang bersangkutan diberi kesempatan untuk didengar pendapatnja. Tindakan sematjam ini dapat dilakukan bilamana sesuatu nasehat jang telah diberikan kepada bank tidak dituruti dalam waktu jang telah ditetapkan, ataupun tidak diterima suatu djawaban jang memuaskan.

   Perlu didjelaskan disini, bahwa tindakan sematjam ini sampai sekarang tidak pernah diambil, oleh karena akan menimbulkan keberatan-keberatan dari segi praktis-teleologis, jaitu akan sangat merugikan reputasi bank jang bersangkutan dimata masjarakat, sehingga pada hakekatnja berarti tidak memberi kesempatan lagi kepada bank untuk terus hidup; dan dengan demikian tudjuan pemerintah untuk memberikan didikan/bimbingan kepada bank tidak terpenuhi.

Musjawarah Bank-bank Nasional Swasta dan O.P.S.-PERBANAS.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnja dibidang penertiban dan pembimbingan bank-bank dan modal swasta dalam arti jang

seluas-luasnja, Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta mengambil langkah-langkah untuk terselenggaranja suatu Musjawarah jang meliputi seluruh perbankan swasta untuk efektif mengikut sertakan segala potensi bank-bank nasional swasta, baik modal maupun pengalaman, pikiran dan lain sebagainja dalam usaha realisasi program Pemerintah, dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Musjawarah jang mendapat dukungan setjara bulat oleh seluruh perbankan nasional swasta di Indonesia ini, diadakan pada bulan Maret 1964 dan bertudjuan untuk:

1. Merumuskan kedudukan bank swasta sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. dan Deklarasi Ekonomi dalam rangka Pembangunan Semesta Berentjana;
2. Memikirkan dan merumuskan pembinaan perbankan swasta untuk berkembang setjara sehat berlandaskan politik Pemerintah tentang perbankan;
3. Memberikan usul dan saran-saran kepada Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta mengenai persoalan-persoalan jang berhubungan dengan bidang ekonomi dan moneter pada umumnja dan bidang perbankan pada chususnja.

Dengan penuh perhatian para peserta Musjawarah jang mewakili 82 bank-bank nasional swasta itu telah mendengarkan prasaran-prasaran dari Wakil Perdana Menteri III Chairul Saleh, Menko Keuangan Sumarno S.H., Menteri Funds & Forces Notohamiprodjo, Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta Dr Soeharto, dan wakil PERBANA Goemoeljo Wreksoatmodjo S.H.

Setelah diadakan pemandangan umum, usul-usul, saran-saran serta pertukaran fikiran jang mendalam dari para peserta, jang didjiwai oleh azas gotong-rojong dan hikmah kebidjaksanaan permusjawaratan itu dengan mufakat bulat telah menghasilkan beberapa keputusan-keputusan, pernjataan-pernjataan dan resolusi-resolusi.

Hasil-hasil Musjawarah jang akan mendjadi landasan bagi sikap dan gerak perbankan nasional swasta di Indonesia tersebut mentjakupi pokok-pokok:

1. Menjadari sebagai salah satu soko-guru perdjuangan kemerdekaan ekonomi;

2. Menjadari sebagai alat pelengkap bank-bank Pemerintah, jang sifatnja lengkap-melengkapi satu sama lain;
3. Menginsjafi sebagai salah satu alat penggerak jang dinamis dari seluruh kegiatan swasta;
4. Menjetudjui adanja sebuah organisasi perusahaan sedjenis jang meliputi seluruh perbankan nasional swasta;
5. Mendesak Pemerintah supaja menetapkan suatu politik perbankan jang akan mendjadi landasan kerdja bagi perbankan nasional swasta;
6. Memutuskan tentang hal-hal pokok dalam bidang-bidang perbankan, produksi (industri dan agraris), distribusi (impor dan ekspor, transpor), pengendalian harga dan tarip, penjempurnaan aparatur distribusi, dan lain-lain.
7. Bertekad-bulat berdiri dibelakang Pemerintah untuk terus berkonfrontasi dengan „Malaysia";
8. Dalam melaksanakan pengganjangan Malaysia, bekerdjasama dengan Pemerintah dan Rakjat untuk berusaha keras dan konsekwen membasmi segala gerakan subversif ekonomi/keuangan, baik jang sedang beroperasi dikalangan perbankan nasional swasta chususnja, maupun dikalangan masjarakat pada umumnja;
9. Mendukung penuh terbentuknja BAMUNAS oleh P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, jang merupakan lembaga pelengkap bagi Negara, dimana wakil-wakil pengusaha nasional swasta dapat berhimpun diri untuk mendharma baktikan dana, daja dan tenaganja bagi penjelesaian Revolusi Indonesia.
10. Menetapkan Pantja Etika bagi semua pengusaha bank nasional swasta sebagai pegangan idiil untuk melaksanakan tugas kewadjiban sehari-hari, baik tugas-tugas perusahaan, maupun tugas-tugas Revolusi. Sebagai pelaksanaan salah satu hasil daripada Musjawarah tersebut jang penting sekali artinja ialah, terbentuknja Organisasi Perusahaan Sedjenis Perbankan Nasional Swasta disingkat OPS-PERBANAS dengan Keputusan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta tanggal 2 Mei 1964.

Sedjalan dengan maksud tudjuannja, maka organisasi ini dalam perkembangannja selama kurang lebih 1 tahun ini telah/sedang mengadakan usaha-usaha antara lain:

a. Menjelenggarakan kerdjasama dan koordinasi jang baik antara bank-bank nasional swasta dan antara bank-bank nasional swasta dengan bank-bank Pemerintah.
b. Mengadakan research serta merumuskan dan menjusun konsepsi-konsepsi dalam bidang ekonomi dan keuangan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah.
c. Memberikan naskah-naskah, penerangan, seminar-seminar, tjeramah-tjeramah, madjalah.
d. Mengadakan pendidikan ahli-ahli perbankan.

Chusus mengenai hal tersebut terachir ini dapat dikemukakan disini bahwa OPS-Perbanas telah menjelenggarakan Kursus Ketatalaksanaan Perbankan di Djakarta mulai Desember 1964 untuk selama 3 bulan, dan diikuti kurang lebih 50 peserta bertingkat Direksi, Komisaris, dan Staf dari berbagai bank. Pada bulan April 1965 telah dibuka angkatan kedua, kursus upgrading ini. Untuk menjambut dan melaksanakan Gerakan Kebaktian Revolusi (Gekerev), seluruh bank-bank swasta melalui OPS telah dapat menjerahkan sumbangan sebesar Rp. 53,2 djuta jakni 50% dari seluruh djumlah pemberian kredit dalam tahun 1963.

Dengan adanja Peraturan Presiden No. 2 tahun 1955 tentang Peraturan Pokok OPS, maka OPS-Perbanas setjara organisatoris dan administratif ada dibawah Menteri/Ketua Umum BAMUNAS, sedang taktis dan operatif tetap dibawah Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta.

Dengan demikian ketentuan tersebut dimaksudkan untuk lebih mendjamin adanja sinkronisasi kebidjaksanaan-kebidjaksanaan Pemerintah dan koordinasi perusahaan-perusahaan swasta dalam rangka pengerahan funds and forces swasta disegala bidang usaha.

Bank Tabungan.

Seperti telah diterangkan diatas, tugas utama daripada Bank Tabungan adalah disatu fihak mengumpulkan funds dari masjarakat dan dilain fihak menjalurkan funds itu kembali kepada projek-projek jang produktif.

Mengingat pentingnja funksi Bank Tabungan diatas, maka dipandang perlu oleh Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta untuk mengatur kembali Bank-bank Tabungan Swasta jang sebelumnja hanja diatur oleh Peraturan Pemerintah 1/1955.

Guna lebih mempergiat aktivitas Bank Tabungan Swasta dan guna lebih disesuaikan dengan keadaan sekarang oleh Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta telah dikeluarkan peraturan menetapkan persjaratan-persjaratan baru bagi sebuah Bank Tabungan Swasta jang beroperasi dinegara kita, dengan Surat Keputusannja No. 35/64/KEP/MUPBMS.

Dalam surat keputusan itu telah ditetapkan sjarat-sjarat jaitu:

Pertama-tama mengenai permodalan. Modal ditetapkan paling sedikit Rp. 10.000.000,—. Hal ini mengingat bahwa suatu Bank Tabungan Swasta untuk dapat beroperasi harus mempunjai modal jang tjukup untuk dapat memenuhi biaja-biaja administrasi, penerangan-penerangan jang kesemuanja ditudjukan untuk menanamkan kepertjajaan para penabung kepada Bank Tabungan jang bersangkutan.

Disamping itu dalam surat keputusan tersebut djuga ditetapkan bahwa semua pendiri, pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan pegawai-pegawai harus warganegara Indonesia.

Ini penting artinja bagi maksud untuk memobilisasi semua funds and forces negara kita, dan sesuai dengan gagasan kita untuk berdiri diatas kaki sendiri.

Djuga ditetapkan bahwa jang dapat mendjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris haruslah orang jang menurut penilaian Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta tidak pernah, sedang dan/atau dianggap melakukan tindakan-tindakan/kegiatan-kegiatan jang tidak sesuai dengan kebidjaksanaan dan program pemerintah dan/atau pembinaan/pengurusan bank setjara sehat.

Hal ini penting karena dikehendaki agar Bank Tabungan Swasta benar-benar dipimpin dan didjalankan oleh tenaga-tenaga jang benar-benar mempunjai loyalitas jang tjukup tinggi terhadap negara.

Dengan demikian agar dapat diharapkan perkembangan jang lebih madju, dan betul-betul bermanfaat bagi bangsa dan negara dari Bank Tabungan Swasta.

Para pendiri dari Bank Tabungan Swasta harus mengadjukan alasan-alasan jang dapat diterima Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta tentang maksud mereka untuk mendirikan suatu Bank Tabungan Swasta. Dengan demikian akan benar-benar dapat diteliti apakah Bank Tabungan Swasta jang

akan didirikan benar-benar dibutuhkan pada tempatnja, djangan sampai hanja mendjadi alat bagi beberapa oknum jang tidak bertanggung djawab guna kepentingan sendiri sadja.

Dan kepada Bank-bank Tabungan Swasta jang telah ada sebelum adanja Surat Keputusan oleh Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swastapun, diwadjibkan untuk menjesuaikan diri dengan persjaratan-persjaratan baru diatas. Hal ini telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta No. 36/64/KEP/MUPBMS.

Dengan segala kebidjaksanaan diatas, dan kebidjaksanaan lain jang akan menjusul, kiranja dapat diharapkan perkembangan Bank Tabungan Swasta jang lebih madju dan sehat serta berguna bagi masjarakat dan negara.

Untuk masa selandjutnja dalam waktu singkat perlu diadakan gagasan/pemikiran jang mendalam mengenai:

a. tingkat bunga jang diberikan kepada para penabung ditetapkan sedemikian rupa hingga menarik dan merangsang penabung, lebih-lebih pada masa inflasi seperti sekarang ini. Salah satu tjara untuk memberikan incentive ialah memberikan prosentase tertentu dari keuntungan bank kepada para penabung setiap tahun;

b. ditetapkan prosentase tertentu dari penanaman uang tabungan jang telah dapat dihimpun oleh Bank Tabungan Swasta agar funds tersebut benar-benar dapat disalurkan kebidang jang sesuai dengan program dan kebidjaksanaan moneter/pembangunan dari pemerintah.

Bank Pasar, Bank Desa, Bank Pegawai, dan lain-lain.

Pemberian izin usaha bank pasar lazim disebut: beslit kwalifikasi diberikan oleh Menteri Keuangan atas pertimbangan dari Bank Indonesia.

Kemudian pada achir tahun 1963 berhubung adanja perkembangan-perkembangan dalam masjarakat, dipandang perlu oleh Pemerintah untuk sementara tidak mempertimbangkan permohonan-permohonan pendirian bank-bank pasar baru, sampai adanja pengaturan-pengaturan lebih landjut.

Pada dewasa ini Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dengan bekerdja-sama dengan instansi-instansi/fihak-fihak jang bersangkutan harus mengadakan penggagasan/pembitjaraan-pembitjaraan jang mendalam untuk mentjapai terbentuknja satu perundang-undangan pokok tentang lembaga-lembaga moneter, jang langsung melajani kebutuhan rakjat

ketjil, termasuk bank pasar, bank desa, bank-bank pegawai dan lain-lain.

I. **Modal Swasta.**

Dalam rangka menertibkan gerak dan mengarahkan modal swasta kepada kepentingan-kepentingan untuk pembangunan umumnja dan peningkatan produksi chususnja, maka Pemerintah pada dasarnja tetap menertibkan bank-bank swasta demikian sehingga dapat tjukup merupakan fasilitas-fasilitas moneter sehat untuk penjaluran modal-modal swasta kepada djurusan pembangunan jang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri, untuk kemudian membawa posisi negara kita dari agrarisch-industrieel kearah industrieel-agrarisch.

Dalam hubungan ini perbankan swasta turut membina adanja pertumbuhan jang seimbang antara kedua sektor tadi, sehingga peningkatan produksi kedua belah pihak dapat menguntungkan satu sama lain, oleh karena kedua sektor tadi satu sama lain dapat memberi hasil produksinja, dikarenakan pada masing-masing sektor terdapat daja beli „rieel" jang tjukup.

Dengan demikian maka diharapkan arus barang akan mulai mengimbangi tekanan inflasi dan akan terselenggara kondisi-kondisi untuk mendapatkan pasaran dalam negeri jang kuat jang dapat mengurangi tekanan-tekanan pengusaha-pengusaha luar negeri dibidang perekonomian.

Dalam hubungan ini Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta antara lain sedang mengarahkan tudjuannja kepada bidang ekspor dalam rangka „export-drive", serta kepada projek-projek pangan (delta-project dan project penggilingan padi).

Dengan penjelenggaraan projek-projek tersebut diharapkan terdapatnja kondisi-kondisi untuk membuka lapangan berusaha untuk modal-modal swasta. Dengan tudjuan usaha sebagaimana diuraikan diatas itu, maka dengan hasil peningkatan ekspor diharapkan menambah devisa untuk permodalan alat-alat kepabrikan, dan dengan projek-projek delta dan penggilingan padi diharapkan disatu fihak areal produksi pangan akan tambah, sedangkan dilain fihak penggilingan padi jang menduduki tempat jang vital antara produsen dan konsumen dapat didjamin kelangsungannja (kontinuitasnja), hal mana akan mempengaruhi adanja persediaan beras jang tjukup dipasaran, sehingga setjara tidak langsung dapat mengimbangi harga beras chususnja dan harga-harga pangan lainnja pada umumnja.

Dalam hubungan ini untuk pelaksanaannja perlu ada tindakan-tindakan mengenai soal sebagai berikut:

1. penjusunan rentjana investasi sektor swasta sebagai pelengkap pembantu sektor pemerintah, jang didasarkan atas prioritas jang lebih terarah lagi untuk menjusun Program Ekonomi Perdjoangan.
2. penjusunan rentjana untuk penjaluran kredit setjara lebih terpimpin lagi dalam rangka menjusun Program Ekonomi Perdjoangan.

Mengenai hal pertama, misalnja bank-bank swasta dapat lebih banjak lagi memperhatikan projek-projek pertanian dan industri ketjil.

Mengenai hal kedua, misalnja bank-bank swasta mengambil inisiatif untuk menarik atau mengumpulkan modal jang tjukup besar, dan kemudian dalam bentuk suatu „consortium", membiajai bersama-sama dengan Pemerintah, pembelian padi semasa panen jang dihadapinja melalui „accunmulatie centra" dimana terdapat penggilingan-penggilingan padi.

Untuk melaksanakannja perlu ada pengawasan physik jang aktif (physical control) dan perbankan swasta harus dapat menilai apakah projek jang akan dilaksanakan oleh seorang „client" itu, betul-betul akan meningkatkan produksi sesuai rentjana investasi pembangunan dan peningkatan produksi.

„Physical control" jang aktif memang dalam hal ini perlu sekali, oleh karena disamping permintaan kredit untuk sesuatu projek-peningkatan produksi jang sesuai dengan rentjana investasi itu, masih ada kemungkinan bahwa „client" tersebut menggunakan atau meloloskan modal reserve jang ada padanja untuk investasi jang menjeleweng, hal ini tentu harus ditjegah.

Dengan demikian diharapkan bahwa investasi projek-projek jang betul-betul bermanfaat untuk pembangunan dan peningkatan produksi dalam rangka Program Ekonomi Perdjoangan, berangsur-angsur dapat dilaksanakan, sehingga achirnja permodalan swasta setjara njata turut membantu merealisasikan dasar-prinsip „berdiri diatas kaki sendiri".

*
* *

IV. PENUTUP.

Sebagai keseluruhan daripada semua uraian mengenai Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta tersebut dimuka, dapatlah kiranja ditarik suatu kesimpulan umum sebagai berikut:

1. Adanja dan hak hidup daripada bank-bank dan modal swasta oleh Pemerintah telah diakui dengan djelas dan tegas. Pengakuan sematjam ini adalah mutlak perlu untuk menghilangkan keragu-raguan dan mendjamin kelangsungan hidup bank dan modal swasta dibumi Indonesia.

2. Pengakuan Pemerintah atas adanja dan hak hidup daripada bank-bank dan modal swasta tidaklah banjak artinja bagi Revolusi Indonesia apabila bank-bank dan modal swasta itu tidak bergerak dan berkembang seirama dengan derap dan langkah Revolusi itu sendiri.
   Oleh karena itu sebagai konsekwensinja, Pemerintah cq. Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta berhak dan berkewadjiban penuh untuk memberikan bimbingan setjara aktif agar bank dan modal swasta benar-benar memberikan sumbangan jang riil dan konstruktif terhadap Revolusi.
   Hak hidup mereka dibumi Indonesia tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan beberapa gelintir manusia sadja. Sebagai salah satu soko-guru Revolusi bank-bank dan modal swasta harus benar-benar dapat mewudjudkan sumbangannja jang dapat dinikmati oleh seluruh rakjat Indonesia.

3. Dalam pembinaan bank-bank swasta Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta telah menggunakan OPS-PERBANAS sebagai media jang sangat efektif. Kontak jang kontinu dan hubungan jang dinamis dan konstruktif antara Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dengan OPS-PERBANAS sebagaimana sekarang telah dilakukan, akan terus dikembangkan dalam bentuk kerdja-sama jang lebih erat, hingga diperoleh suasana saling bantu dan saling pengertian antara Pemerintah dan swasta dalam rangka mempertumbuhkan social control dan social participation.

4. Berkenaan dengan meningkatnja kebutuhan masjarakat didaerah-daerah, Pemerintah cq. Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta telah mengandjurkan kepada bank-bank swasta agar menjebarkan usaha-usaha mereka kedaerah-daerah.

Andjuran ini mengingat bahwa disamping kota-kota besar dimana bank-bank swasta beroperasi, didaerah-daerahpun kebutuhan akan adanja bank-bank itu sangat terasa, karena:

a. djumlah dana-dana jang potensiil ada terbenam didaerah-daerah tjukup besar akan tetapi sulit untuk diaktifir kearah usaha-usaha produktif, bila tidak melalui bank;
b. tersebarnja usaha-usaha pembangunan membutuhkan tersebarnja fasilitas perbankan; sebaliknja tersebarnja fasilitas perbankan akan memperbesar kemungkinan tersebarnja usaha-usaha pembangunan. Djadi djelas bahwa antara penjebaran usaha perbankan dan penjebaran usaha pembangunan terdapat suatu djalinan erat satu sama lain,
c. last but not least, andjuran penjebaran usaha perbankan ini adalah seirama dengan usaha dan andjuran Pemerintah agar masjarakat mendjadi bank-minded dan giro-minded.

5. Manipulasi dan spekulasi dalam berbagai bentuk dan manifestasinja jang sering terdjadi dalam kalangan perbankan swasta, adalah suatu hal jang mutlak harus diberantas.
   Pemerintah tidak akan segan-segan untuk mendjatuhkan hukuman terberat terhadap para spekulator dan manipulator ini.
   Pemerintah sangat mengharapkan pengertian dan bantuan jang sebesar-besarnja dari masjarakat atas usaha pengikisan sampai keakar-akarnja terhadap usaha-usaha/oknum-oknum jang sangat merugikan itu.
6. Disamping bank-bank sebagai wadah daripada organized — money market, maka tak dapat disangkal pula adanja unorganized money market, jang djumlahnja tjukup besar dalam masjarakat. Ini dapat dibuktikan dengan adanja kenjataan, bahwa di Indonesia djumlah uang jang beredar dalam masjarakat djauh lebih besar daripada jang berada dalam simpanan bank-bank.
   Keadaan sematjam ini tidak boleh dibiarkan terus. Sebab unorganized money market inilah salah satu sumber dan alat untuk mendjalankan spekulasi dan manipulasi.
   Untuk merubah unorganized mendjadi organized, jaitu kedalam simpanan bank-bank, maka harus diusahakan agar masjarakat betul-betul mendjadi bank-minded. Bank mindedness masjarakat akan banjak tergantung kepada:

a. kemampuan
b. kemauan
c. kelantjaran
d. besarnja fasilitas-fasilitas jang diberikan oleh bank terhadap masjarakat.

Disinilah tantangan jang harus dihadapi dan segera harus didjawab oleh bank-bank swasta. Untuk ini bank-bank swasta harus berani mengadakan koreksi dan introspeksi, baik organisatoris maupun mental, agar pengakuan dan kepertjajaan jang diberikan oleh masjarakat dan Pemerintah kepada mereka tidak akan tersia-sia. Dalam hal ini Pemerintah cq. Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta akan memberikan bimbingan dan bantuannja semaksimum mungkin.

7. Achirulkalam, kita semua berkejakinan bahwa hari depan bank dan modal swasta adalah hari depan jang terang. Bilamana disana sini masih tampak awan hitam menutupi langit, maka hal ini djustru merupakan tantangan bagi kita semua, baik Pemerintah maupun masjarakat pada umumnja, serta kalangan perbankan dan modal swasta pada chususnja untuk melaksanakan amanat Presiden/Pemimpin Besar Revolusi guna merealisir politik banting stir, sehingga dalam tempo jang setjepat-tjepatnja dan dengan kebidjaksanaan jang setepat-tepatnja seluruh potensi swasta jang tidak ketjil itu dapat memenuhi funksinja sebagai suatu kekuatan progresif revolusioner jang sepenuhnja berdharma bakti kepada Revolusi menudju tertjapainja Masjarakat Sosialis Indonesia jang adil dan makmur.

Lampiran 1.

BAGAN ORGANISASI MENTERI URUSAN PENERTIBAN BANK DAN MODAL SWASTA

DAFTAR BANK² UMUM SWASTA DI DJAKRATA.

No.	Wilajah kerdja	Nama Bank	Alamat	P/T/p
	KANTOR PUSAT.			
	1. Djakarta	1. Asia Africa Banking Corp.	Djl. Pintu Besar Selatan 30	P
		2. Bank Banten M.A.I.	„ Pasar Pagi 45	T
		3. Berdjabat Banking Corp.	„ Petjenongan 84	P
		4. Bank Buana Indonesia.	„ Asemka 34	P
		5. Bank Centraal Asia.	„ Asemka 24	P
		6. Central Comm. Bank Ltd.	„ Kopi No. 12	P
		7. Bank Dagang Indonesia.	„ Kali Besar Timur No. 17	T
		8. Bank Dagang Nas. Indon.*)	„ Kali Besar Timur No. 27	T
		9. Bank Dhirgahayu.	„ Pintu Besar Selatan 75	P
		10. Bank Djakarta.	„ Asemka 22-23	P
		11. Bank Djaya Raya.	„ Pintu Besar Selatan 74-D	P
		12. Bank Ekonomi Indonesia.	„ Kopi No. 29	T
		13. Bank Ekonomi Nasional.	„ Krekot No. 21	T
		14. Bank Gadjah Mada.	„ Pasar Pagi 104-106	P
		15. Bank Hadji Indonesia.	„ Nusantara 27-A	P
		16. The Hongkong and Shanghai Banking Corp.	„ Goa 9, Kebajoran Baru	p
		17. Bank Amerta (d/h Indonesian Banking Corp. Limited.	„ Roa Malaka Selatan 12-14	P
			„ Menteng Raya 24	T
			„ Sultan Hasanuddin 9, Kebajoran Baru	p

No.	Wilajah kerdja	Nama Bank	Alamat	P/T/p.
		18. Bank Indonesia Raya.	Djl. Kopi 3-A	P
		19. Bank Industri dan Dagang Indonesia.	„ Pintu Besar Selatan No. 71	P
		20. Bank Industri Nasional.	„ Asemka No. 35	P
		21. Bank Internasional Indonesia.	„ Kali Besar Barat No. 18/19	P
		22. Bank Kemakmuran.	„ Kopi 52	P
		23. Bankap P.T.	„ Tiang Bendera 2	P
			„ Kijai Madja 13-A Kebajoran Baru	p
		24. Bank Kredit Umum Indonesia.	„ PintuBesar Selatan 83	P
		25. Bank Merdeka.	„ Tanah Abang Barat 70-A	P
			„ Kali Besar Timur 21-A	T
		26. Bank Niaga.	„ Roa Malaka Utara No. 21	P
			„ Roa Malaka Selatan No. 5	T
		27. Bank Nusantara.	„ Gn. Sahari 82	P
			„ Tanah Abang Bukit No. 58	T
		28. Bank Pasifik.	„ Tiang Pend. 52	P
		29. Bank Patriot.	„ Pintu Ketjil No. 45-46	P
			„ Perniagaan Barat No. 49	T
		30. Bank Pengajoman.	„ Pintu Ketjil 30-32	P
		31. Bank Pembangunan Nas.	„ Orpa No. 50	P
		32. Bank Pembangunan Ekon.	„ Kopi Nc. 10	P
		33. Bank Pengangkutan Nasional Indonesia	„ Asemka No. 32	P
			„ Asemka No. 32	T
		34. Bank Perdag., Perind. + Pembangunan.	„ Melawai III/20	P
		35. Bank Perdania.	„ Raya Mangga Besar No. 7-9	P
		36. Bank Perhubungan Nas.	„ Pintu Ketjil 58	P
		37. Bank Perkembangan Ekon.	„ Gadjah Mada 162-A	P

No.	Wilajah kerdja	Nama Bank	Alamat	P/T/p.
		38. Bank Perkembangan Ekonomi Indonesia.	Djl. Asemka 168-C	P
		39. Bank. Perkembangan Industri.	„ Sawah Besar 63	P
		40. Bank Perkembangan Pelajaran Indonesia.	„ Segara III/5-B	P
		41. Bank Perniagaan Indonesia.	„ Kebon Sirih 33	P
		42. Bank Persatuan Dag. Indonesia.	„ Pasar Pagi 24	P
		43. Bank Persatuan Nasional.	„ Malaka 5	P
		44. Bank Pertiwi.	„ Pintu Ketjil 31	P
		45. Sedjahtera Bank Umum.	„ Tiang Bendera 15	T
		46. Bank Selat Bangka.	„ Asemka 168	P
		47. Bank Siliwangi	„ H. Wuruk 125	P
			„ Kopi 4	T
		48. South East Asia Bank Ltd.	„ Asemka No. 5	T
		49. Bank Sukapura.	„ Menteng Raya 7-B	P
		50. „ Of Sumatera.	„ Pintu Air 29-A	p
		51. Bank Surakarta M.A.I.	„ Asemka	T
		52. Bank Tani Nasional.	„ Roa Malaka Selatan No. 67	P
		53. Bank Timur.	„ Pintu Besar Selatan No. 52-A	P
		54. Bank Umum Nasional.	„ Kali Besar Barat No. 20	P
			„ Asemka 20	T
			„ Krekot Bunder 4	T
	Lebak	55. Bank Banten M.A.I.........	„ Tarman 6	p
	Pandeglang	56. Bank Banten M.A.I.	„ Bank Banten 3	P
	Sukabumi	57. Bank Aman Makmur.	„ Raya 211	P
		58. Bankap.	„ —	p

Keterangan:

*). = Bank Devisa.
P = Kantor Pusat.
T = „ Tjabang.
p = „ Perwakilan.

Djakarta, 30 April 1965.

BAGIAN PENGAWASAN BANK² SWASTA
BANK INDONESIA.

No.	Wilajah Tjab. B.I.	Nama Bank	Alamat	P/T/p
1.	AMBON.	—	—	—
2.	AMPENAN.	—	—	—
3.	BANDA ATJEH.	1. Bank of Sumatera.	Djl. Singamangaradja 42	T
		2. Bank Dagang Nas. Indonesia.		T
4.	BANDJARMASIN.			
	1. Bandjarmasin	1. Bank Dagang Indonesia.	„ Ps. Baru 15-16	P
		2. Bank Hasil Bumi.	„ Sudimara 37 Atas	P
		3. Bank Kalimantan Tengah.	„ Niaga Timur 40	P
		4. Bank Swasta Indonesia.	„ Pasar Baru 11	P
	2. Balikpapan	5. Bank Kalimantan.	„ Pasir Timur	T
	3. Kotabaru	6. Bank Kalimantan.	„ Pelabuhan	T
	4. Sampit	7. Bank Kalimantan.	„ Patih Rumbih	T
		8. Bank Kalimantan Tengah.	„ Bioskop VI/43	T
	5. Tarakan	9. Bank Kalimantan.	„ Lingkas	T
	6. Tanahgerogot..	10. Bank Kalimantan.	„ Lalo 5-III/59	p
	7. Tandjungredeb	11. Bank Kalimantan.	„ Pelabuhan	p
	8. Buntok	12. Bank Kalimantan Tengah.		p
	9. Kuala Kapuas	13. Bank Kalimantan Tengah.		p
	10. Muara Teweh	14. Bank Kalimantan Tengah.		p
	11. Palangka Raya	15. Bank Kalimantan Tengah.		p
	12. Pangkalanbun..	16. Bank Kalimantan Tengah.		p
5.	BANDUNG.			
	1. Bandung	1. Bank Banten M.A.I.	„ Oto Iskandar 166	T
		2. Commercial Bank.	„ Suniaradja Timur 19	P
		3. Bank Dagang Umum.	„ Naripan 18	P
		4. Bank Ekonomi Nasional.	„ Asia Afrika 123	P
		5. Bankap P.T.	„ Braga 51-B	T
		6. Bank Pembina Nasional.	„ Asia Afrika 104	P

No.	Wilajah Tjab. B.I.	Nama Bank	Alamat	P/T/p.
		7. Sedjahtera Bank Umum.	Djl. Suniaradja 5-A	P
		8. Bank Sukapura.	„ Braga 71 Atas	T
		9. Bank Umum Nasional.	„ Braga 35	T
		10. Bank Perniagaan Indonesia.	„ Braga 64-c Atas	T
	2. Tasikmalaja ..	11. Bank Pembina Nasional.	„ Djadjawai 9	T
6.	BIAK.	—	—	—
7.	DJEMBER.	—	—	—
8.	JOGJAKARTA.			
	1. Jogjakarta	1. Indonesian Banking Corp.	„ Margomuljo 83	T
		2. Bank Nusantara.	„ Tugu Kidul 27	T
		3. Bank Umum Pers. Tenaga Ekonomi.	„ Bedji 4	P
	2. Magelang	4. Bank Anatara.	„ Bajeman 8	T
		5. Bank Umum Nasional.	„ Raya Pontjol 61	P
9.	KEDIRI.	—	—	—
10.	KUPANG.	—	—	—
11.	MAKASSAR.			
	1. Makassar......	1. Bank Antar Indonesia.	„ Siau 4	P
		2. Bank Masjarakat.	„ Nusantara 15	P
		3. Bank Pemb. Sulawesi	„ Nusantara 99	P
		4. Bank Persatuan Nasional.	„ Nusantara 38-40	T
		5. Bank Rakjat Sulawesi.	„ Nusantara 236	P
		6. Bank Sukapura.	„ Pelabuhan 10	T
	2. Pare-pare	7. Bank Antar Indonesia.	„ Sultan Hasanuddin 41	T
		8. Bank Masjarakat.	„ Sultan Hasanuddin 73	T
	3. Kendari	9. Bank Antar Indonesia.	„ Merdeka 15	T
12.	MALANG.			
	1. Malang	1. Bank Central Asia.	„ Kajutangan 14B	T
		2. Bank Perdag. Indonesia.	„ —	T

No.	Wilajah Tjab. B.I.	Nama Bank	Alamat	P/T/p
		3. Bank Perkembangan Ekonomi Indonesia.	Djl. Bromo 25	T
		4. Bank Surakarta.	„ Kajutangan	T
13.	MANUKWARI.	—	—	—
14.	MEDAN.			
	1. Medan........	1. Bank Chunghwa Shangyeh.	„ Kesawan 74	P
		2. Bank Dagang Nas. Indonesia.	„ Balai Kota 2A	P
		3. Bank Dagang Nas. Indonesia.	„ Belawan	p
		4. Bank Gadjah Mada.	„ Kesawan 11A	T
		5. Bank Indonesia Raya.	„ Sutomo 468	T
		6. Indaco Bank Ltd.	„ Pemuda 18A	P
		7. Bank Keradj. Pedj. Kemerdekaan.	„ Sambu 55-57	P
		8. Bank Mestika Dharma.	„ Sutomo 410-414	P
		9. Bank Peng. Nasional Indonesia.	„ Pemuda 21A	T
		10. Bank Perdag. Indonesia.	„ —	T
		11. Bank Perdag. Perindustrian & Pembangunan.	„ Bulan 50	T
		12. Bank Persatuan Dag. Indonesia.	„ Kesawan 10	T
		13. South East Asia Bank.	„ Pemuda 10	P
		14. Bank of Sumatera.	„ Pemuda 18F	P
	2. Langsa	15. Bank Dagang Nas. Indonesia.	„ T. Tjik Ditiro	T
	3. Lho Seumawe	16. Bank Dagang Nas. Indonesia.	„ Pendidikan	T
	4. Pematang Siantar	17. Bank Dagang Nas. Indonesia.	„ —	T
		18. Bank Sarma.	„ Sutomo 7	P
15.	MENADO.			
	1. Menado	1. Bank Rakjat Tonsea	„ —	T
		2. Bank Sulawesi.	„ —	P
		3. Bank Antar Indonesia.	„ Pasar 9	T
	2. Airmadidi	4. Bank Rakjat Tonsea.	„ —	P

No.	Wilajah Tjab. B.I.	Nama Bank	Alamat	P/T/p.
	3. Amurang......	5. Bank Rakjat Tonsea.	Djl. Pasar 9	P
	4. Bitung	6. Bank Rakjat Tonsea.	„ —	p
	5. Kawangkoang..	7. Bank Rakjat Tonsea.	„ —	p
	6. Tatelu	8. Bank Rakjat Tonsea.	„ —	p
	7. Tondano	9. Bank Rakjat Tonsea.	„ —	p
	8. Tahuna	10. Bank Usaha.	„ —	P
16.	MERAUKE.	—	—	—
17.	PADANG.		„	
	1. Padang	1. Bank Nasional.	„ Bundokandung	T
	2. Batusangkar ..	2. Bank Nasional.	„ Toko Tinggi	p
	3. Bukittinggi ..	3. Bank Nasional.	„ Tembok	P
	4. Pajakumbuh ..	4. Bank Nasional.	„ Toko Baru	p
	5. Pakanbaru	5. Bank Industri & Dagang Indonesia.	„ Asia	T
	6. Rengat........	6. Bank Industri & Dagang Indonesia.	„ —	p
	7. Solok	7. Bank Nasional.	„ Air Mati	p
18	PALEMBANG.			
	1. Palembang	1 Bank Ekonomi Indonesia.	„ Djend. Sudirman 436	P
		2. Bank Pengajoman.	„ Tanggabatu 16 Ilir	T
		3. Bank Persatuan Nasional.	„ Pd. Nangling 8	T
		4. Bank Sriwidjaja Ray .	„ Tengkuruk 124 Atas	P
		5. Bank Pers Dag. Indonesia.	„ Djend. Sudirman 560	T
	2. Djambi	6. Bank Pers. Nas.	„ Dr. Tjipto 30	T
	3. Pangkalpinang	7. Bank Pers. Nas	„ Tn. Rendah 4	T
19.	PAKANBARU.	—	—	—
20.	PONTIANAK.			
	1. Pontianak	1 Bank Dagang Indonesia	„ Sei Paut Besar 49	T
		2. Bank Umum Nasional.	„ Ps. Ikan 36/38	T
21.	SABANG.	—	—	—

No.	Wilajah Tjab. B.I.	Nama Bank	Alamat	P/T/p
22.	SALA.			
	1. Sala	1. Bank Antara.	Djl. Pasar Legi 98	P
		2. Bank Djaya Raya.	„ Overste Sudiarto 480	P
		3. Indonesian Banking Corp.	„ Kapt. Muljadi 8	T
		4. Bankap P.T.	„ Sragen 51	P
		5. Bank Lingga Harta.	„ Slamet Rijadi 59	T
		6. Bank Surakarta.	„ Slamet Rijadi 272	P
		7. Bank Mekar Nugraha.	„ Tjojudan 147	P
		8. Bank Agung.	„ Slamet Rijadi 338	P
	2. Klaten	9. Bank Antara.	„ Raya 61	T
		10. Bank Lingga Harta.	„ Raya Sel. 101	P
	3. Sragen	11. Bank Pembangunan Ekonomi.	„ Raya Sukowati	P
23.	SAMARINDA.			
	1. Samarinda	1. Bank Kalimantan.	„ Niaga 24	P
24.	SEMARANG.			
	1. Semarang	1. Bank Djaya Raya.	„ Kepodang 19	P
		2. Bank Gadjah Mada.	„ Gg. Tengah 75	T
		3. Bank Pengajoman.	„ Plampitan 64	P
		4. Indonesian Banking Corp.	„ Perkutut 6	T
		5. Bank Kesedjahteraan Masj.	„ Gg. Tengah 16	P
		6. Bank Masjarakat.	„ Kepodang 18	T
		7. Bank Nusantara	„ Suari 17 A	T
		8. Bank Perkem. Ekon. Indonesia	„ Kalibaru Timur 2	T
		9. Bank Surakarta	„ Pemuda 37	T
		10. Bank Timur	„ Seram 18	T
		11. Bank Umum Nas.	„ Kepodang 35	T
	2. Kudus	12. Indonesian Banking Corp.	„ —	P
	3. Pekalongan ..	13. Bank Umum Nas.	„ Sultan Agung	T

No.	Wilajah Tjab. B.I.	Nama Bank	Alamat	P/T/p
25.	SORONG.	—	—	—
26.	SUKARNAPURA.	—	—	—
27.	SURABAJA.			
	1. Surabaja	1. Bank Pers. Dag. Ind.	Djl. Slompretan 38/40	T
		2. Bank Umum Nas.	„ Alun² Tjontong 3	T
		3. Bank Antar Daerah	„ Kembang Djepun 174	P
		4. Bank Central Asia	„ Slompretan 43	T
		5. Bank Dagang Ind.	„ Petjinan Kulon 21	T
		6. Indonesian Banking Corporation	„ Pemuda 4	T
		7. Bankap	„ Sedap Malam 7	P
		8. Bank Masjarakat	„ Petjinan Kulon 96/98	T
		9. Bank Merdeka	„ Petjinan Kulon 71	T
		10. Bank Niaga	„ Tepekong 17	T
		11. Bank Nusantara	„ Radjawali 25-27	T
		12. Bank Patriot	„ Slompretan 57	T
		13. Bank Perdag. Ind.	„ Radjawali 12	P
		14. Bank Swasta Ind.	„ Panggung 9	T
		15. Bank Perniagaan Umum	„ Indrapura 35	P
		16. Sedjahtera Bank Umum	„ Slompretan 62	T
		17. Bank Siliwangi	„ Petjinan Kulon 62	P
		18. South East Asia Bank	„ Bongkaran 44	T
		19. Super Banking Corp.	„ Petjinan Kulon 64	P
		20. Bank Surakarta	„ Brandjangan 25	T
		21. Bank Timur	„ Tundjungan 51	T
		22. Bank Hasil Bumi	—	—
	2. Singaradja	23. Bank Perniagaan Umum	„ Walimki	P
	3. Den Pasar	24. Bank Perniagaan Umum	„ „	T
	4. Klungkung ..	25. Bank Perniagaan Umum	„ —	P

No.	Wilajah Tjab. B.I.	Nama Bank	Alamat	P/T/p
28.	TELUK BETUNG			
	1. Teluk Betung	1. Bank Ekon Ind.	Djl. Kupang II/47	T
		2. Bank Pers Nas.	„ Laut	T
		3. Bank Sriwidjaja Raya	„ Samosir Petak A	T
29.	TJIREBON.			
	1. Tjirebon	1. Bank Siliwangi	—	T

Keterangan:

P = Kantor Pusat
T = „ Tjabang
p = „ Perwakilan

BAGIAN PENGAWASAN BANK² SWASTA

DEPARTEMEN PERBURUHAN

I. MASALAH PERBURUHAN DIMASA PENDJADJAHAN.

Indonesia dengan kekajaan alamnja jang berlimpah-limpah, pada masa pendjadjahan merupakan sumber penghasilan penting bagi Negeri Belanda dan negeri-negeri penanam modal lainnja. Karena keuntungan-keuntungan luar biasa jang diperolehnja dari usaha-usaha pendjadjahan itu Negeri Belanda berhasil membangun industrinja dalam abad ke 19 dan abad ke 20. Pada waktu itu Negeri Belanda berhasil mendjadi salah satu negeri dagang dan pengekspor modal terpenting didunia.

Bagi Negeri Belanda dan negeri-negeri kolonialis-kapitalis lainnja Indonesia mempunjai peranan sebagai berikut :

1. Indonesia sebagai tempat penanaman modal.

   Kapitalisme jang dalam perkembangannja dari kapitalisme industri telah meningkat mendjadi monopoli "finanz kapital" menguasai sumber-sumber kekajaan alam, jaitu perkebunan, pertambangan, dan lain-lain untuk dipergunakan sebagai tempat penanaman modal mereka. Dengan bantuan pemerintah kolonial, golongan feodal dan tuan-tuan tanah mengeruk keuntungan sebesar-besarnja dari usaha-usaha mereka di Indonesia. Kekedjaman kerdja-paksa dan „poenale sanctie" misalnja menimbulkan reaksi hebat tidak sadja di Indonesia, tetapi djuga diseluruh dunia.
2. Indonesia sebagai sumber bahan-bahan mentah.
   Indonesia merupakan sumber penting keperluan bahan-bahan pertambangan. Industri di Negeri Belanda banjak tergantung pada bahan-bahan jang dihasilkan Indonesia seperti rempah-rempah, karet, kopra, tjoklat, teh, gula, kopi kelapa sawit, timah, boksit, dan sebagainja. Untuk mempertahankan agar bahan-bahan mentah tersebut diperolehnja dengan harga jang rendah maka pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan-peraturan jang membantu usaha-usaha itu.

   Dalam perundang-undangan perburuhan kolonial dikenal periodisasi sebagai berikut :

   1816—1880 — Slaverijwetgeving (perundang-undangan perbudakan).
   Dalam periode ini termasuk pula masa „cultuurstelsel" dengan kerdja-paksanja.

   1880—1940 — Koelieordonnantie (peraturan kuli dan kerdjapaksa).

Dalam masa-masa tersebut kaum buruh diharuskan kerdja keras dengan upah jang sangat rendah tanpa mendapat perlindungan jang berarti.

3. Indonesia sebagai pasaran barang negeri-negeri kapitalis. Dengan penduduknja jang berdjumlah 60 djuta orang, Indonesia merupakan pasaran penting bagi hasil-hasil industri negeri-negeri kapitalis, terutama Belanda. Tidak kurang dari 35% dari hasil-hasil produksi industri tekstil Belanda diekspor ke Indonesia, disamping makanan-makanan kaleng, mesin-mesin, dan sebagainja. Untuk melindungi hasil-hasil industri itu, maka industri di Indonesia sendiri dihalang-halangi kemadjuannja agar supaja djangan sampai menjaingi Negeri Belanda. Dihembuskan kepada orang-orang Indonesia rasa kurang pertjaja pada diri sendiri untuk dapat berusaha membangun industri sendiri dengan daja dan kemampuan sendiri.

4. Indonesia sebagai pasaran tenaga kolonial. Untuk menegakkan dan mempertahankan kekuasaannja di Indonesia, pemerintah dan kekuatan kolonialis-kapitalis memerlukan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli jang terlatih. Untuk keperluan itu didatangkan tenaga-tenaga dari Negeri Belanda dan tenaga-tenaga asing lainnja. Anak negeri sendiri kurang mendapat kepertjajaan untuk mendjabat pekerdjaan-pekerdjaan penting. Dengan demikian Indonesia mendjadi pasar tenaga kerdja bagi orang-orang Belanda dan orang-orang asing lainnja. Menurut statistik tahun 1940, 19,9 persen dari pegawai pemerintah terdiri atas orang-orang Belanda. 92,7 persen dari pimpinan diduduki oleh tenaga-tenaga Belanda dan dari mereka itu hanja 0,7 persen jang bekerdja sebagai pegawai rendahan. Keadaan diperusahaan-perusahaan memberi gambaran jang serupa. Pada waktu itu sering terdengar pendapat dikalangan pemerintah kolonial bahwa orang Indonesia „tidak atau belum tjakap memerintah sendiri dan mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan teknis tertentu". Sebaliknja segala usaha pendidikan baik jang bertudjuan untuk meningkatkan taraf pengetahuan maupun untuk meningkatkan taraf keahlian dan kedjuruan teknis sengadja diperlambat dengan peraturan-peraturan diskriminatif. Misalnja, sesuatu matjam pendidikan dinjatakan hanja untuk orang Belanda atau mereka jang disamakan dengan itu atau untuk orang-orang keturunan feodal, atau untuk orang-orang jang tinggi badannja sama dengan ukuran tinggi orang Belanda, dan sebagainja.

5. Indonesia sebagai pasaran tenaga kerdja murah.
   Peraturan-peraturan dibidang agraria jang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial memungkinkan tuan-tuan tanah untuk makin berkuasa jang menjebabkan bertambahnja buruh-buruh tani. Mereka ini karena kurang pekerdjaan lalu mendjadi barisan tenaga setengah penganggur dan sumber tenaga kerdja murah bagi perusahaan-perusahaan dan industri kolonialis-kapitalis. Beratus-ratus ribu dari „tenaga kelebihan" dibidang pertanian itu banjak diangkut sebagai „kuli kontrak" murah kedaerah-daerah lain di Indonesia bahkan djuga keluar negeri (Suriname dan New Caledonia).

Dimasa pendjadjahan Belanda masalah perburuhan bertjorak sebagai ekses-ekses daripada eksploitasi (sistim kolonialis-kapitalis) atas manusia jang bekerdja di Indonesia.

Penderitaan tenaga kerdja Indonesia jang telah berlangsung berabad-abad lamanja itu diperbesar dengan masa pendudukan Djepang dimana beratus-ratus ribu orang laki-laki Indonesia dikota-kota dan desa-desa dikerahkan dan diangkut ketempat-tempat didalam dan diluar wilajah Indonesia untuk dikerdjapaksakan pada tempat-tempat pertahanan Djepang.

Pemerintah pendudukan Djepang tidak menetapkan peraturan-peraturan perlindungan bagi pekerdja-pekerdja jang dikerahkannja .Upah ditetapkan dengan tjara sewenang-wenang. Peraturan djaminan ketjelakaan ditetapkan dengan djaminan-djaminan jang lebih rendah daripada jang telah ditetapkan dalam Peraturan Ketjelakaan 1939 dari Pemerintah Hindia Belanda. Peraturan-peraturan pendudukan militer Djepang jang berlaku pada waktu itu tidak memberi kemungkinan kepada Rakjat Indonesia untuk mengadjukan tuntutan-tuntutan perbaikan. Sampai sekarang belum dapat dilupakan seluruhnja penderitaan romusha-romusha (tengkorak hidup) dengan tjelana karung jang pada waktu itu tampak berkeliaran dimana-mana dan jang merupakan pemandangan sehari-hari jang „biasa". Beratus-ratus ribu meninggal ditempat-tempat pekerdjaan mereka didalam wilajah Indonesia dan bagian besar lainnja diluar Indonesia, di Birma, sebagai orang-orang jang tidak dikenal. Hanja bagian ketjil dari „romusha" tersebut berhasil kembali kekampung-halamannja ,setelah bertahun-tahun lamanja mengalami penderitaan diluar batas perikemanusiaan. Dalam keadaan demikian itu rakjat hanja mempunjai satu angan-angan, jaitu datangnja keadilan.

II. PERIODE REVOLUSI PHYSIK (1945 — 1950).

Setelah Indonesia diproklamasikan sebagai suatu negara jang merdeka dan berdaulat penuh, maka Pemerintah Republik Indonesia jang baru lahir itu dihadapkan pada masalah perburuhan sebagai berikut :

1. Rakjat pada umumnja dan tenaga kerdja chususnja masih mengalami banjak penderitaan sebagai warisan dari masa pendjadjahan jang berlangsung selama tiga setengah abad dan masa pendudukan militer Djepang selama tiga setengah tahun.
2. Banjaknja perusahaan nasional dan asing jang rusak dan terbengkalai selama pendudukan Djepang.
3. Sangat kurangnja tenaga-tenaga ahli perburuhan, tenaga-tenaga pengusaha serta tenaga-tenaga kerdja jang terlatih.
4. Situasi perdjoangan physik jang makin lama makin memuntjak, terpisahnja bagian-bagian tanah-air satu dengan lain karena pendudukan Belanda serta blokade total jang dilakukan oleh Belanda terhadap daerah-daerah de fakto Republik Indonesia.
5. Tidak adanja perundang-undangan dan peraturan-peraturan perburuhan jang sesuai dengan djiwa Undang-undang Dasar 1945.
6. Belum terbentuknja serikat-serikat buruh.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan ditjetuskan, pemuda, buruh dan rakjat seluruhnja berlomba-lomba dibawah pimpinan Pemerintah menegakkan kekuasaan Negara Indonesia jang baru lahir itu. Serentak direbutnja kekuasaan djawaban-djawaban, kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan dari tangan Djepang. Arus revolusi pada saat itu mengalir terus bagaikan air bah, menggelora.

Soal-soal perburuhan diurus oleh Bagian Perburuhan pada Kementerian Sosial jang mula-mula berkedudukan di Djakarta dan kemudian pada tanggal 10 Djanuari 1946 dipindahkan ke Jogjakarta.

Setelah ternjata bahwa masalah perburuhan makin lama makin luas bidangnja maka urusan perburuhan pada atnggal 1 Djuli 1947 dipusatkan pada satu Djawatan Perburuhan jang berdiri sendiri dan terdiri atas:

1. Bagian Perburuhan Umum dengan kantor-kantor perwakilan didaerah-daerah keresidenan,
2. Kantor Pengawasan Perburuhan dengan tjabangnja ditiap propinsi,
3. Kantor Pengawasan Keselamatan Kerdja dengan tjabangnja di Tjirebon.

Pada tanggal 3 Djuli 1947 dengan terbentuknja Kabinet Amir Sjarifuddin terbentuklah Kementerian Perburuhan jang pertama dengan Nj. S. K. Trimurty sebagai Menteri Perburuhan jang pertama dan Mr. Wilopo sebagai Menteri Muda Perburuhan.

Pemerintah pada waktu itu menerangkan bahwa politik sosial ditudjukan kepada :

1. Penghidupan jang lajak bagi rakjat umumnja dan kaum tani serta buruh tani chususnja.
2. Penjusunan hukum sosial dan hukum perburuhan jang mengandung peraturan antara lain tentang upah minimum, waktu bekerdja, waktu istirahat (liburan), bantuan dalam ketjelakaan, bantuan buat hari kemudian, perburuhan kanak-kanak, perburuhan wanita, perdjandjian kerdja dan penempatan tenaga.

Selandjutnja diterangkan pula bahwa politik perburuhan itu akan menempatkan kaum buruh pada tempat jang sewadjarnja dan pengakuan bahwa kaum buruh adalah merupakan golongan manusia jang mempunjai kebutuhan jang bersifat djasmani dan rohani. Untuk melaksanakan politik perburuhan itu jang harus disesuaikan dengan dasar-dasar demokrasi diperlukan 3 sjarat pokok, jaitu :

1. Aparat Pemerintah jang sesuai dengan tugasnja.
2. Peraturan-peraturan jang progresif.
3. Organisasi jang sempurna.

Tugas penting Kementerian Perburuhan dalam masa Revolusi Physik jalah membantu terbentuknja serikat-serikat buruh jang aktif berdjoang mempertahankan Negara Republik Indonesia. Revolusi total mempertahankan negara dilakukan bersama-sama Angkatan Perang dan pemuda diseluruh Indonesia. Suasana perdjoangan itu memberi tjorak tertentu pada tjorak dan perkembangan masalah perburuhan pada waktu itu. Soal-soal perbaikan sjarat-sjarat kerdja, dan perselisihan perburuhan merupakan soal sekunder dan tidak mendjadi pusat perhatian kaum buruh. Pemogokan Delanggu jang terdjadi

dalam tahun 1948 lebih banjak disebabkan karena perbedaan faham siasat perdjoangan daripada bersifat perbaikan sjarat-sjarat kerdja.

Disamping aktivitas jang ditudjukan pada perkembangan gerakan buruh itu, maka Kantor Pengawasan Perburuhan terus berusaha mengadakan inspeksi pada perusahaan-perusahaan untuk mengawasi pelaksanaan norma-norma perburuhan (labour standards) berdasarkan atas peraturan-peraturan jang berlaku. Demikian pula Kantor Pengawasan Keselamatan Kerdja tetap mengadakan pemeriksaan pada mesin-mesin (ketel-ketel dan sebagainja) diperusahaan-perusahaan jang masih dapat berdjalan, segala sesuatu untuk menghindarkan timbulnja ketjelakaan-ketjelakaan karena alat-alat produksi pada waktu itu telah tua, lagi pula kurang terpelihara. Karena adanja blokade oleh pihak Belanda maka tidak ada alat-alat produksi baru jang dapat masuk kedalam daerah de fakto Republik Indonesia.

Oleh karena soal-soal teknis perburuhan masih merupakan soal baru, baik bagi instansi-instansi Pemerintah maupun bagi kaum buruh, maka tugas penting lainnja dari Kementerian Perburuhan adalah menanam pengertian perburuhan dalam masjarakat Indonesia.

Pada achir tahun 1947 Kementerian Perburuhan melaporkan bahwa berhubung dengan :

(a) Suasana perang.
(b) Kementerian Perburuhan baru dibentuk mulai tanggal 3 Djuli 1947.
(c) Kekurangan tenaga ahli dan jang berpengalaman dan ditambah pula dengan
(d) Kekurangan alat-alat dan sebagainja, maka penjelenggaraan tugas kewadjiban kewadjiban kementerian masih dalam tingkat permulaan dan memerlukan banjak sekali perbaikan.

Walaupun dalam keadaan serba sukar namun periode Revolusi Physik 1945—1950 telah berhasil meletakkan dasar-dasar baru jang progresif bagi pemetjahan masalah perburuhan di Indonesia, jang terbukti dengan ditjiptakannja Undang-undang Ketjelakaan tahun 1947 No. 33, Undang-undang Kerdja tahun 1948 No. 12 dan Undang-undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No. 23. Undang-undang ini disusun berdasarkan atas prinsip-prinsip baru jang lebih modern dan lebih sesuai dengan

alam kemerdekaan, dan djauh berbeda dengan peraturan-peraturan perburuhan warisan zaman pendjadjahan. Selandjutnja mengenai politik perburuhan dirumuskan :

(a) Buruh adalah tenaga manusia dalam lapangan produksi, peserta produksi dengan kedudukan jang sama dengan kaum pengusaha, karena itu harus diberi hak suara (medezeggingschap) sebagai peserta produksi (bedrijfs-genoten).

(b) Buruh harus mendapat perlindungan dalam arti djasmani dan rochani, agar dapat mengembangkan daja gunanja.

(c) Buruh tidak boleh diperas tenaganja.

(d) Buruh harus mendapat penghidupan jang lajak.

(e) Hak-hak demokrasi kaum buruh didjamin dengan mendjalankan politik membimbing dan menuntun gerakan buruh.

(f) Penggunaan tenaga kerdja jang sebaik-baiknja, dengan distribusi tenaga kerdja jang sebaik-baiknja.

Dalam bidang organisasi dan administrasi Kementerian Perburuhan mengalami perobahan-perobahan jang disesuaikan dengan djalannja revolusi. Dalam bulan Pebruari 1948 dalam Kabinet Presidentil, Kementerian Perburuhan dan Kementerian Sosial digabungkan mendjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial. Setelah Negara Indonesia Serikat terbentuk, maka dalam Kabinet Republik Indonesia jang berpusat di Jogjakarta, Kementerian Perburuhan tetap diadakan.

Mula-mula Republik Indonesia jang berpusat di Jogja wewenangnja hanja meliputi „Daerah Renville", akan tetapi arus Revolusi Indonesia mendorong negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat untuk menggabungkan diri pada Republik Indonesia, sehingga achirnja tamatlah hak hidup R.I.S. Dengan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia berachirlah periode Revolusi Physik dalam perdjoangan Rakjat Indonesia.

III. PERIODE SURVIVAL (1950-1955).

Setelah Revolusi Physik selesai, maka dengan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia jang diakui oleh dunia, negara kita dihadapkan pada masalah-masalah baru disegala bidang, termasuk bidang Perburuhan, antara lain:

1. Adanja pengangguran dimana-mana karena:
   a. beribu-ribu pegawai negeri dan anggota-anggota badan perdjoangan belum dapat dipekerdjakan kembali.
   b. perusahaan-perusahaan besar ketjil belum dapat segera dibuka kembali.
2. Mulai dikembalikannja perusahaan-perusahaan asing kepada pemiliknja; buruh Indonesia jang selama Revolusi Physik hanja berhadapan dengan pengusaha Indonesia kini mulai berhadapan dengan pengusaha/kapitalis asing.

Beberapa faktor mempengaruhi perekonomian kita pada waktu itu, antaranja akibat-akibat Perang Dunia II, Revolusi Physik dengan bumi hangusnja serta sistim ekonomi jang masih liberal. Disamping itu masih banjak perusahaan-perusahaan asing jang bekerdja di Indonesia disektor-sektor perekonomian, pertanian, perindustrian, transpor, pertambangan, distribusi dan sebagainja. Pada hakekatnja tidak ada "commanding position" daripada sektor Pemerintah.

Dalam periode jang sematjam itu dimana seolah-olah masih berlaku "free fight liberalism", berhadapanlah kaum buruh Indonesia jang makin lama makin terorganisasi dan militan dengan kekuatan perusahaan-perusahaan modal asing. Oleh karena itu tjiri-tjiri terpenting dari pada periode ini antara lain jalah memuntjaknja perselisihan-perselisihan perburuhan, pemogokan-pemogokan dan pemetjatan-pemetjatan (massa-onstslagen).

Dibidang teknis mulailah diletakkan dasar-dasar kearah perkembangan-perkembangan selandjutnja: hubungan perburuhan, pemetjahan masalah tenaga kerdja norma-norma perburuhan, djaminan sosial dan kesedjahteraan buruh, perundang-undangan dan lain-lain sesuai dengan dasar-dasar daripada suatu negara jang merdeka dan berdaulat.

Untuk memperkuat kedudukan dan suara Indonesia dibidang internasional, Indonesiapun mendjadi anggota daripada Organisasi Perburuhan Internasional (I.L.O.) dalam tahun 1950.

1. Tenaga Kerdja di Indonesia.

Pada waktu dalam tahun 1950 Bangsa Indonesia kembali memegang kemudi Pemerintahan setjara de fakto dan de jure atas wilajah Indonesia setelah berabad-abad lamanja meringkuk dalam pendjadjahan, maka beberapa warisan jang diterimanja antara lain ialah:

(1) Penduduk jang bekerdja disektor pertanian tidak tjukup mendapat pekerdjaan dan penghasilan jang memungkinkan mereka hidup setjara lajak. Artinja dalam sektor pertanian terdapat kelebihan tenaga kerdja atau pengangguran jang kentara dan tidak kentara. Mungkin keadaan itu sengadja dibiarkan berkembang demikian agar supaja industri kapitalis dapat memperoleh tenaga murah.

(2) Keadaan disektor perindustrianpun menundjukkan gambaran jang hampir serupa. Industri besar jang sekalian dapat menampung tenaga kerdja dibatasi pertumbuhannja untuk tidak menjaingi pasaran hasil industri negeri pendjadjah, sedangkan industri rakjat jang djuga dapat merupakan suatu lapangan kerdja tidak mendapat bantuan sebagaimana mestinja. Akibatnja, djuga sektor industri tidak tjukup dapat menampung pentjari kerdja.

(3) Lebih dari 90 persen dari penduduk masih buta huruf. Keadaan jang menjedihkan ini tergambar dan terasa dalam sektor tenaga kerdja. Sedikit sekali pekerdja jang mempunjai keahlian jang dapat menduduki tempat-tempat penting dalam pemerintahan dan dalam perindustrian.

Bagian terbesar tenaga kerdja Indonesia pada waktu itu termasuk golongan rendahan. Sebaliknja orang-orang asinglah selalu jang merupakan tenaga pimpinan dimana-mana.

(4) Warisan lain jang ditinggalkan oleh pendjadjah ialah penjebaran penduduk dan tenaga kerdja jang tidak merata didaerah-daerah. Dipulau Djawa sadja jang luasnja kurang dari 1/10 dari wilajah Indonesia, dalam tahun 1950 mempunjai penduduk 50 djuta atau kurang-lebih 60 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Untuk bagian penduduk jang hidup disektor pertanian menurut perhitungan hanja tersedia 3,3 djuta ha. sawah dan 4,5 djuta ha. tanah kering.

Keadaan jang demikian itu menimbulkan kekurangan kesempatan kerdja (underemployment). Masalah itu diperbesar dengan bertambahnja penduduk sebanjak kurang lebih 1.200.000 djiwa setahun.

Sebagian dari mereka itu sebanjak 450.000 setiap tahunnja akan memasuki masjarakat kerdja. Ini berarti bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan sedemikian rupa, hingga sedikitnja dapat mentjiptakan setengah djuta kesempatan kerdja baru, djika kita hendak mempertahankan tingkat kemakmuran jang telah dapat ditjapai sekarang dan mengadakan pembangunan jang lebih hebat lagi apabila kita hendaknja meningkatkan taraf kemakmuran rakjat setjara menjeluruh.

Dalam usaha untuk memetjahkan masalah Tenaga Kerdja itu Pemerintah berpedoman kepada pasal 27 ajat 2 Undang-undang Dasar jang berbunji:

„Tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan". Hal ini berarti bahwa Pemerintah bermaksud untuk menudju kepada „full employment" jaitu kesempatan kerdja penuh bagi setiap orang jang telah mampu untuk bekerdja. Tudjuan itupun sesuai dengan suatu dalil bahwa „Human beings are the source and end of all economic activity". Manusia adalah sumber dan tudjuan dari semua aktivitas ekonomi.

Pada hakekatnja tenaga manusia merupakan sumber utama dari tiap-tiap kegiatan ekonomi. Tidak dapat kita memikirkan adanja suatu kegiatan ekonomi tanpa menusia sebagai tenaga kerdja. Sekalipun misalnja otomatis telah dapat melaksanakan segala gerak permesinan, tenaga manusia tetap diperlukan untuk mentjiptakannja dan mengawasinja.

Kita membangun dan melaksanakan produksi tidak lain daripada untuk keperluan masjarakat. Karena itu achirnja manusialah jang harus mendapat manfaat dan karena itu merupakan tudjuan dari kegiatan ekonomi itu. Maka dari itu objek atau tudjuan kita dalam memetjahkan masalah perburuhan ialah: manusia, baik sebelum bekerdja untuk memasuki lapang pekerdjaan, maupun selama dalam pekerdjaan dan sesudah bekerdja, selama tidak mampu bekerdja, atau pada waktu tidak mampu lagi untuk bekerdja. Pada hakekatnja tudjuan ini merupakan inti daripada tudjuan Sosialisme Indonesia jang berdasarkan Pantjasila itu.

Mengingat warisan-warisan kolonial jang ditinggalkan kepada kita tersebut tadi, maka tudjuan „full employment" ini hanja akan dapat ditjapai dengan tjara pembangunan ekonomi setjara besar-besaran.

Kesempatan kerdja penuh itu selainnja merupakan suatu tudjuan, adalah pula merupakan suatu akibat daripada adanja lapangan kerdja jang luas, artinja telah berdirinja tjabang-tjabang industri, distribusi, pertanian, transpor serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnja jang dalam keseluruhan dapat memberi pekerdjaan kepada semua orang jang membutuhkannja dengan penghasilan jang lajak untuk hidup. Djadi „full employment" terdjalin rapat dengan aktivitas-aktivitas jang terdapat disegala sektor pemerintahan maupun swasta.

Untuk mempermudah djalan kearah pembangunan ekonomi jang luas dan „full employment" sebagai sjarat pertama, perlu didjamin susunan pasar kerdja jang sebaik-baiknja dalam arti dipertemukannja permintaan dan penawaran tenaga kerdja, sebagai bagian jang tidak dapat dipisah-pisahkan dari usaha pembangunan nasional.

Guna melaksanakan pembangunan sedikitnja diperlukan 3 unsur pokok, jaitu modal-peralatan, sumber kekajaan alam dan manusia untuk memimpin dan mengerdjakannja. Untuk mempermudah masuknja tenaga manusia dalam usaha pembangunan diperlukan pengaturan pasar kerdja dimana dipertemukan penawaran dengan permintaan tenaga kerdja serta sjarat-sjarat kwantitas dan kwalitas jang diperlukannja. Tanpa pasar kerdja jang terorganisasi baik, sekalipun manusia dan materiil tersedia melimpah-limpah, pada satu pihak akan tetap dirasakan kekurangan tenaga kerdja serta adanja pengangguran dilain pihak, karena tidak adanja pertemuan mengenai sjarat-sjarat kwantitas dan kwalitas.

Untuk menjesuaikan kwantitas dan kwalitas jang tersedia dengan jang dibutuhkannja atau dengan perkataan lain untuk mendjamin susunan pasar kerdja jang sebaik-baiknja, Pemerintah mendjalankan usaha-usaha tertentu, jaitu:

a. Antar Kerdja.

Antar kerdja dimaksudkan untuk menolong kaum buruh jang mentjari pekerdjaan untuk mendapatkan pekerdjaan sesuai dengan bakat pendidikan dan ketjakapannja dan menolong pengusaha untuk mendapatkan tenaga jang dibutuhkannja.

Berhubung dengan perkembangan masjarakat pendjadjahan jang telah berlangsung berabad-abad lamanja, maka perbedaan antara permintaan dan penawaran mengenai kwantitas dan kwalitas sangatlah menjolok. Tidak adanja keseimbangan itu tergambar pada sukarnja kaum buruh untuk segera menemukan lowongan jang ditjarinja, demikian pula sukarnja pengusaha untuk mendapatkan tenaga dengan keterampilan (skill) jang dibutuhkan. Maka dari itu diusahakan pelajanan agar sipentjari kerdja dengan tjepat dan tepat dapat menemui lowongan, demikian pula agar sipengusaha dengan tjepat dan tepat pula mendapat tenaga dengan sjarat-sjarat jang dibutuhkannja.

Di Indonesia Antar Kerdja jang tjepat dan tepat harus dapat memberantas dan mengganti peranan mandor-mandor, werkbaas-werkbaas dan makelar buruh, serta Kantor-kantor Antar Kerdja partikelir jang sering merugikan buruh.

Pekerdjaan Antar Kerdja mempunjai segi-segi teknis jang memerlukan keahlian teknis pula. Tehnik intervieuw misalnja dilakukan sedemikian rupa, hingga diperoleh gambaran jang djelas tentang bakat, pendidikan, pengalaman dan keinginan sipentjari kerdja. Petugas pengantar kerdja harus mempunjai pengetahuan jang luas dan mendalam tentang pelbagai djabatan dan sjarat-sjarat. Sebab tudjuan ialah menempatkan tenaga pada lowongan jang tepat.

Dari tahun 1950 sampai dengan 1955 angka-angka pendaftaran dan penempatan tenaga kerdja adalah sebagai berikut:

Tahun	Pentjari kerdja terdaftar	Pentjari kerdja ditempatkan	%
1950	158.818	20.410	12,8
1951	169.801	26.006	15,3
1952	182.202	35.483	19,5
1953	151.029	22.223	14,7
1954	150.387	19.610	13,2
1955	164.230	20.154	13

Mengingat bahwa setiap tahunnja menurut taksiran lebih dari setengah djuta orang tenaga kerdja baru terdjun dalam pasarkerdja, belum terhitung djumlah penganggur jang kentara serta setengah penganggur (Biro Perantjangan Negara menaksir djumlah setengah penganggur antara 9 dan 12 djuta atau

30 - 40% dari djumlah tenaga kerdja jang ditaksir berdjumlah 33 djuta atau 40% dari penduduk seluruhnja), maka angka-angka antar kerdja hanja meliputi bagian amat ketjil dari djumlah jang sebenarnja. Ini antara lain disebabkan karena lowongan kerdja jang tersedia adalah djauh lebih ketjil dibandingkan dengan djumlah pelamar kerdja jang memerlukannja, hal mana mempengaruhi kepertjajaan masjarakat terhadap instansi dari Pemerintah (Djawatan Penempatan Tenaga) jang mengurusnja.

Apabila kwalitas pentjari kerdja itu diteliti, terbuktilah bahwa lebih dari seperdua dari mereka itu terdiri dari tenaga-tenaga tidak terlatih. Persentase itu akan berkurang setjara berangsur-angsur seimbang dengan bertambahnja taraf pendidikan umum serta latihan-latihan kerdja/ kedjuruan jang akan menambah tingkat keterampilan pada tenaga kerdja.

Analisa lebih landjut menundjukkan pula bahwa dalam tahun 1951/1952 sebagian besar dari pendaftaran (94,2%) terdiri dari tenaga jang tidak atau hampir tidak pernah bersekolah (41,9%) dan tenaga tamatan sekolah dasar (52,3%). Selandjutnja 5,5% terdiri dari tamatan sekolah menengah dan 0,3% terdiri dari tamatan SMA, sekolah tehnik/vak serta sekolah-sekolah lainnja jang lebih tinggi.

Angka-angka tersebut menggambarkan dengan djelas kwalitas tenaga kerdja jang memerlukan pekerdjaan pada waktu itu.

b. Antar Kerdja Antar Daerah.

Suatu masalah jang bersifat chas Indonesia, ialah penjebaran penduduk jang tidak merata didaerah-daerah. Didaerah pulau Djawa sangat padat penduduknja sedangkan didaerah-daerah lainnja kekurangan penduduk; akibatnja ialah, bahwa dipulau Djawa terdapat kelebihan tenaga kerdja hingga kekurangan kesempatan kerdja, sedangkan didaerah-daerah jang kekurangan penduduknja menderita kekurangan tenaga kerdja. Masalah ini menjebabkan timbulnja kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerdja dalam melaksanakan pembangunan didaerah-daerah diluar Djawa. Ini merupakan salah satu sebab daripada terpusatnja usaha-usaha pembangunan dipulau Djawa dan kurang tersebar merata kedaerah-daerah.

Penjebaran penduduk dan tenaga kerdja kedaerah-daerah hingga mendjadi lebih merata, merupakan suatu usaha jang tidak mudah dan hanja dapat ditjapai dalam waktu djangka pandjang. Daerah Djawa dengan penduduknja sebesar 50 djuta

djiwa pada waktu itu menurut perhitungan tersedianja tanah pertanian sejogianja hanja berpenduduk 30 djuta. Dengan djumlah penduduk 30 djuta orang itu, maka dengan peraturan landreform jang progresif, petani dengan tanahnja masing-masing akan dapat hidup dengan lajak. Kelebihannja sebanjak 20 djuta orang, perlu disebar setjara merata kedaerah-daerah lainnja, jang djuga tidak kurang suburnja djika dibandingkan dengan pulau Djawa.

Masalah penjebaran penduduk dan tenaga kerdja jang kurang merata itu, dalam garis besarnja dapat dipetjahkan melalui 2 djalan: pertama, dengan djalan transmigrasi setjara besar-besaran, baik transmigrasi setjara berentjana maupun transmigrasi bebas(sukarela) dan kedua, dengan djalan pemindahan tenaga kerdja pada projek-projek pembangunan jang sengadja dilaksanakan didaerah-daerah diluar Djawa.

Seperti diketahui, setiap daerah diluar Djawa mempunjai sumber kekajaan alam jang berbeda-beda. Pertama-tama, hampir setiap daerah diluar Djawa mempunjai tanah jang luas dan subur hingga dapat memenuhi sjarat pertama sebagai objek pemindahan penduduk dan tenaga kerdja guna meningkatkan produksi pangan. Jang kedua, jalah sumber kekajaan alam chusus seperti hutan dengan produksi kaju dan hasil hutannja, pertambangan, pelikan-pelikan dan lain-lainnja jang merupakan objek-objek untuk pembangunan. Projek-projek penggalian sumber kekajaan alam didaerah-daerah itu tentu memerlukan tenaga kerdja jang dapat didatangkan dari daerah-daerah jang mempunjai kelebihan tenaga kerdja, chususnja daerah Djawa. Projek-projek pembangunan itu merupakan usaha jang perlu dilaksanakan dalam djangka waktu pandjang.

Sebagai langkah pertama untuk membuka kemungkinan pemindahan tenaga kerdja keluar Djawa adalah memperhatikan permintaan akan tenaga kerdja jang diadjukan oleh perusahaan-perusahaan negara, swasta nasional dan swasta asing pada waktu itu.

Dizaman pendjadjahan, ada aturan pengerahan dan pemindahan (werving) tenaga kerdja jang ditjiptakan untuk melajani kepentingan modal asing diperkebunan dan perminjakan. Peraturan itu adalah „Wervingsordonnantie" (Stbl. 1936 No. 208 jo. No. 550), jang pada pokoknja menentukan:

a. memperkenankan pengerahan tenaga kerdja (werving) oleh orang atau badan partikelir, dibawah pengawasan pemerintah.
b. mengatur, mengawasi penerimaan, penginapan, pengiriman, dan pemeliharaan didjalan, jang harus memenuhi sjarat-sjarat tertentu.
c. mengawasi pembuatan surat-surat perdjandjian, sjarat-sjarat kerdja dan sjarat-sjarat lain.

Ketentuan-ketentuan itu terutama dalam sub a sering menimbulkan ekses-ekses jang tidak diinginkan, antara lain mendjadi pengerahan jang tidak lagi bersifat sukarela.

Dengan dikeluarkannja ketentuan-ketentuan baru oleh Pemerintah R.I., maka sistim pengerahan tenaga oleh badan-badan pengerah swasta/pengerah-pengerah perorangan dihentikan dan diganti dengan sistim antar kerdja antar daerah oleh badan Pemerintah, chususnja pada waktu itu Djawatan Penempatan Tenaga dengan Kantor-kantor Penempatan Tenaga Daerah.

Antar kerdja antar daerah ini didjalankan bersama-sama dengan instansi Pamong Pradja dengan djalan mengadakan pengumuman-pengumuman dan penerangan-penerangan ataupun lain matjam pemberitahuan kepada rakjat tentang kemungkinan untuk dapat bekerdja didaerah-daerah luar Djawa jang tertentu dengan sjarat-sjarat tertentu jang ditentukan oleh Menteri Perburuhan atau oleh Kepala Djawatan Penempatan Tenaga.

Langkah pertama jang dilakukan oleh Kementerian Perburuhan jalah mentjabut semua izin pengesjahan organisasi pengerahan dan surat-surat pengesjahan kepada tenaga-tenaga pengerah berdasarkan „wervingsordonnantie" tersebut pasal (1) ajat (2) dan (4). Adapun „wervingsorganisatie" harus dibatja dan difahamkan sebagai suatu organisasi dari pengusaha jang minta kerdja untuk menerima, mengurus penginapan, mengangkut dan lain-lain sebagainja.

Dengan sistim ini tidak diperkenankan lagi kepada organisasi-organisasi pengerah (swasta) untuk mengerahkan tenaga kerdja dengan berhubungan langsung dengan rakjat. Mereka jang bertindak demikian akan dapat dituntut dan dihukum.

Adapun sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh pengusaha peminta tenaga kerdja jang merupakan kewadjiban terhadap tenaga kerdja jalah:

(1) Rumah penginapan untuk tenaga kerdja jang dikerahkan harus lajak dan memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Kementerian Perburuhan.

(2) Selama pengangkutan dari tempat asalnja tenaga kerdja itu dikerahkan ketempat kerdjanja, organisasi pengusaha wadjib memberikan makanann jang lajak kepada tenaga kerdja dan keluarganja.

(3) Kepada tjalon tenaga kerdja harus diberikan uang saku dan uang muka.

(4) Organisasi pengusaha wadjib menjelenggarakan perawatan pada tjalon-tjalon tenaga kerdja jang sakit dirumah penginapan dan djikalau perlu mengirim mereka kerumah sakit.

(5) Pengusaha wadjib mendjaga bahwa selama ditempatkan dirumah penginapan, tenaga kerdja tersebut tidak dibatasi kemerdekaannja untuk bergerak.

(6) Pengusaha wadjib mendjaga, bahwa tjalon-tjalon tenaga kerdja jang diterima, diangkut dengan lajak dari tempat penerimaan jang pertama ketempat kerdjanja jang ditudju.

(7) Pengusaha wadjib membuat suatu perdjandjian kerdja tertulis dengan tjalon tenaga kerdja sebelum mereka diberangkatkan.

(8) Perdjandjian kerdja tidak boleh dibuat atau ditanda-tangani sebelum tjalon tenaga kerdja diperiksa kesehatannja dan dianggap mampu untuk mendjalankan pekerdjaan.

(9) Pengusaha wadjib mengembalikan tjalon-tjalon tenaga kerdja ketempat asalnja dengan memikul segala biajanja.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka pelaksanaan pengerahan/pemindahan tenaga kerdja ini ditudjukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerdja diperkebunan-perkebunan/perusahaan-perusahaan jang terletak di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, jaitu S.V.P.M. (Standard Vacuum Petroleum Maatschappij), Z.W.S.S. (Zuid West Sumatera Syndicaat), A.V.R.O.S. (Algemene Vereniging van Rubberplanters Oostkust van Sumatera), V.E.D.A. (Vrije Emigratie Deli Planters Vereniging), P.P.N. (Pusat Perkebunan Negara), dan sebagainja.

Selama 5 tahun sesudah 1950 angka-angka antar kerdja antar daerah adalah sebagai berikut:

Tenaga kerdja dan keluarganja jang dipindahkan
keluar Djawa

Tahun	1951	1952	1953	1954	1955
Tenaga kerdja	18.415	26.206	5.805	4.306	12.208

Seperti diterangkan diatas, maka penempatan tenaga keluar Djawa itu terbatas pada antar kerdja berdasarkan prinsip sukarela.

Sebagian besar dari tenaga-tenaga kerdja jang dipindahkan itu berasal dari daerah Surakarta, Kedu, Jogjakarta, Banjumas, Pekalongan, Madiun, Kediri dan Tjirebon.

c. Antar Kerdja Chusus.

Disamping antar kerdja sebagaimana diuraikan diatas dalam tahun 1955 telah dimulai dengan suatu antar kerdja jang bersifat chusus, satu diantaranja jalah mengusahakan penempatan bagi mereka jang telah disalurkan dari badan-badan perdjoangan.

Dalam tahun 1955 angka-angka memberi gambaran sebagai berikut:

Penjaluran bekas peladjar pedjoang
(Mei s/d Desember 1955)

Pendaftaran	895	orang
Penempatan		
Sebagai pegawai	99	„
Sebagai kursis	50	„
Penghapusan	142	„

Kesukaran dalam penjaluran bekas peladjar pedjoang kekantor-kantor didaerah disebabkan karena masih belum djelasnja formasi kepegawaian kantor-kantor tersebut. Dalam hal kantor daerah bersedia menerimanja masih harus diatasi birokrasi karena masih harus diperoleh izin dari pusatnja masing-masing. Kesukaran lainnja jalah keseganan dari kantor-kantor tersebut untuk menerima bekas pedjoang sebagai pegawai hingga diadjukanlah sjarat-sjarat jang berat antara lain angka-angka peladjaran rata-rata jang tinggi dan sjarat umur jang rendah. Djuga sering terdapat kekuatiran pada kantor-kantor tersebut, bahwa bekas peladjar pedjoang jang

umurnja rata-rata lebih dari 27 tahun itu kurang dapat menjesuaikan diri dengan suasana, peraturan kerdja dan disiplin pekerdjaan dikantor.

Pada pihak bekas peladjar pedjoang dirasa adanja persaingan penerimaan sebagai pegawai atau pengikut kursus jang datang dari tenaga-tenaga jang baru keluar dari sekolah. Hal ini dapat dimengerti karena pengetahuan sekolah jang dimiliki oleh golongan jang terachir ini masih segar, lagi pula mereka ini masih muda. Untuk mengatasi kesulitan ini oleh Kantor Penempatan Tenaga diusahakan alokasi tempat dengan djumlah tertentu sebagai pengikut-pengikut kursus/pendidikan tertentu, jang antara lain diadakan di Djakarta, Bandung dan Bogor.

Dari angka-angka tersebut diatas ternjata, bahwa hasil penempatan bagi bekas peladjar pedjoang itu belum memuaskan karena hanja merupakan 25% dari pendaftaran. Kalau dikalangan pemerintahan sudah terdapat prasangka terhadap penerimaan bekas peladjar pedjoang, prasangka itu dikalangan swasta lebih besar lagi. Walaupun demikian, Kementerian Perburuhan pada waktu itu tetap berusaha sedapat-dapatnja untuk mengurangi prasangka tersebut hingga dapat memudahkan penerimaan bekas peladjar pedjoang sebagai tenaga kerdja, baik dikalangan Pemerintah maupun dibidang swasta.

Suatu matjam antar kerdja chusus lainnja jang rapat hubungannja dengan perkembangan dan tjita-tjita zaman jalah penempatan tenaga penderita tjatjat. Sesudah Perang Dunia II, sebagai akibat daripada penderitaan jang dialami oleh manusia selama itu, seluruh dunia mengemukakan tjita-tjita baru jang lebih madju jaitu pembentukan suatu "Welfare State" jang mentjita-tjitakan perluasan usaha sosial disegala lapangan, penegasan hak-hak azasi manusia dan bangsa-bangsa dan disamping itu sebagai imbangan, mentjita-tjitakan kenaikan produksi dan penghasilan pada tingkat perorangan, nasional dan internasional. Dalam hubungan perkembangan itu, maka soal penderita tjatjat sebagai warisan daripada Perang Dunia II mendapat perhatian baru jang lebih mendalam daripada dalam masa sebelum perang. Pemeliharaan penderita tjatjat, sekalipun akan merupakan beban tambahan bagi masjarakat adalah suatu langkah jang dapat dipertanggungdjawabkan.

Indonesia sebagai negara jang baru merdeka dan sebagai anak dari abad ke 20 sesudah Perang Dunia II pun mengidam-

idamkan suatu "Welfare State" jaitu dengan tudjuan membentuk suatu „masjarakat jang adil dan makmur", jang akan memungkinkan setiap warganegara menduduki tingkat kesedjahteraan jang lajak.

Untuk memperoleh pekerdjaan jang lajak sedikitnja diperlukan dua matjam sjarat, jaitu keadaan djasmani dan rohani jang memuaskan.

Berbeda dengan orang biasa jang tidak menderita suatu tjatjat, maka bagi sipenderita tjatjat jang karena tjatjatnja tidak mampu melakukan pekerdjaan jang membutuhkan ketjakapan djasmani dan rohani tertentu, djalan kearah memperoleh pekerdjaan jang lajak adalah lebih djauh lagi.

Oleh karena itu, terlebih dulu harus diatasi kesukaran-kesukaran jang bersifat medis dan psychologis dan setelah itu rintangan-rintangan jang terletak dalam lapangan rehabilitas.

Usaha antar kerdja jang dilakukan oleh Djawatan Penempatan Tenaga memberi gambaran sebagai berikut:

	Pendaftaran	Penempatan	
1954			
(Djuni/Desember)	76	39	(51%)
1955	148	29	(20%)

Angka-angka tersebut menjatakan, bahwa hasil penempatan mereka tidak memuaskan. Hampir semua jang mendaftarkan terdiri atas tenaga rendahan tidak terlatih. Djika tenaga tidak terlatih jang tidak menderita tjatjat umumnja sudah sukar untuk dapat disalurkan kedalam masjarakat kerdja, apabila dengan tenaga penderita tjatjat. Pada umumnja belum dapat diatasi adanja suatu prasangka pada pengusaha, bahwa tenaga penderita tjatjat tidak mampu lagi untuk bekerdja setjara wadjar serta memberikan prestasi jang tjukup memuaskan. Dalam hubungan ini, maka untuk menampung tenaga penderita tjatjat jang dianggap sukar disalurkan kedalam masjarakat kerdja biasa, di Solo telah didirikan "Jajasan Penampungan Penderita Tjatjat".

d. Penjuluhan Pemilihan Djabatan.

Didalam suatu masjarakat jang telah madju dimana terdapat diferensiasi dan spesialisasi setjara luas dalam lapangan kerdja maka dalam mempertemukan tenaga kerdja dengan

pekerdjaan, perlu diperhatikan adanja 2 faktor, jaitu pertama, manusia jang akan bekerdja tetapi jang masih berbeda dalam bakat, tjorak watak serta keinginannja. Faktor kedua jalah adanja pekerdjaan jang bermatjam ragam jang meminta sjarat-sjarat djasmani dan rochani serta sjarat pendidikan jang berbeda-beda pula dari manusia jang menjelenggarakannja.

Dalam masjarakat primitif jang sumber penghidupannja misalnja hanja terdiri atas berternak, bertani, berburu dan menangkap ikan, tugas Penjuluhan Pemilihan Djabatan tentu hanja sekedar untuk menjalurkan anggota-anggota masjarakat tersebut kedalam 4 matjam lapangan kerdja diatas sadja. Ini adalah berlainan halnja dengan masjarakat Indonesia sekarang ini dimana telah terdapat diferensiasi dan spesialisasi setjara luas disegala lapangan pekerdjaan.

Dalam hubungan itu, maka tudjuan Penjuluhan Pemilihan Djabatan ("vocational guidance" dan "employment counceling" atau "beroepskeuze voorlichting") jalah membantu seseorang didalam memilih djabatan jang sepadan dengan kemampuan-kemampuan djasmani dan rochani, serta tjorak-tjorak wataknja agar kemampuan itu dapat berkembang sebaik-baiknja dan daripadanja dapat dipungut hasil jang semaksimal-maksimalnja bagi orang itu sendiri maupun bagi masjarakat umumnja. Djelaslah, bahwa Penjuluhan Pemilihan Djabatan membawa keharusan untuk membentuk gambaran tentang seluruh kepribadian seseorang jang hendak dibantu itu dengan mempergunakan segala tjara dan bahan-bahan dari sumber-sumber jang dapat dipertjaja.

Penjuluhan pemilihan djabatan itu dilaksanakan dengan mempergunakan pelbagai test-psychology terhadap tenaga kerdja jang berkepentingan. Karena penjuluhan pemilihan djabatan, seperti tiap-tiap pekerdjaan penempatan tenaga, adalah suatu „proses pemaduan" dari orang dengan djabatan, disamping membentuk gambaran tentang kepribadian manusia tadi, petugas Penjuluhan Pemilihan Djabatan harus pula mempunjai pengetahuan jang mendalam tentang djabatan-djabatan dan keadaan djabatan-djabatn itu dilapangan kerdja. Maka sebagai alat pembantu diperlukan analisa dan penggolongan djabatan, serta analisa lapangan kerdja.

Berhubung dengan itu, maka mengenai penjuluhan pemilihan djabatan dalam Periode Survival ini pelaksanaannja masih dalam taraf persiapan. Dasar-dasar mulai diletakkan untuk

memetjahkan masalah penempatan tenaga kerdja dengan tjara-tjara jang lebih madju sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam hubungan ini, maka atas permintaan instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan jang memerlukannja diadakan seleksi tenaga kerdja dan tjalon-tjalon peladjar dengan mempergunakan test-psychology. Dalam tahun 1955 telah diseleksi sedjumlah 1162 orang tjalon tenaga kerdja/peladjar.

Dibidang penggolongan djabatan, antara 1952 - 1954 disusunlah Buku Inventarisasi Djabatan dalam rangka International Classification of Occupations for Migration and Placement. Untuk keperluan itu telah didaftar sedjumlah 317 djabatan jang kerap kali didjumpai oleh Kantor-kantor Penempatan Tenaga dalam mendjalankan antar kerdja sehari-hari. Maksudnja ialah bahwa djabatan-djabatan itu dengan pendjelasan singkat tentang isinja akan dipergunakan dalam mendjalankan antar kerdja.

c. Usaha perluasan kerdja bagi para penganggur.

Disamping penempatan tenaga pengangguran melalui antar-kerdja biasa, Djawatan Penempatan Tenaga mulai pertengahan tahun 1949 s/d 1954 mengadakan usaha-usaha lain untuk perluasan kerdja.

Usaha itu hanja merupakan usaha tambahan dan tidak boleh diartikan sebagai usaha pemetjahan masalah pengangguran setjara prinsipiil. Menurut riwajatnja biaja-biaja untuk usaha ini semula dikeluarkan sebagai sokongan pengangguran, akan tetapi usaha itu kemudian ditindjau kembali dengan alasan bahwa pemberian sokongan pengangguran sifatnja adalah konsumtif, karena tidak ada unsur menghasilkan produksi. Selain ketjil manfaatnja karena sokongan tersebut memang tidak banjak artinja, hanja bagian ketjil sadja dari ribuan penganggur jang memperolehnja.

Berhubung dengan itu dipandang lebih bidjaksana dan bermanfaat, apabila biaja-biaja jang dikeluarkan itu dikeluarkan sebagai pindjaman modal dan/atau bantuan modal jang banjak sedikitnja dapat berguna untuk menambah produksi atau djasa bagi masjarakat. Lagi pula uang Pemerintah jang dipergunakan untuk pemindjaman modal itu seluruhnja atau setidak-tidaknja sebagian dapat kembali. Karena itu, usaha pindjaman modal untuk keperluan perluasan kerdja itu haruslah lebih dilihat dari segi sosial. Dilihat dari segi ini usaha-usaha itu dapat dianggap

berhasil. Pindjaman modal diberikan kepada perusahaan-perusahaan baru dan perusahaan-perusahaan jang telah ada jang bermaksud memperluas usahanja, dengan perdjandjian bersedia menerima tenaga kerdja baru (penganggur) jang akan diatur oleh Djawatan Penempatan Tenaga.

Bantuan modal diberikan djuga kepada sekelompok kaum penganggur jang bermaksud mendirikan suatu perusahaan setjara kooperatif. Bantuan modal diberikan untuk membeli barang-barang modal, bahan-bahan serta upah untuk modal pertama (stootkapitaal) selama perusahaan belum dapat menghasilkan. Kalau perusahaan itu kemudian ternjata dapat berdjalan terus maka barang-barang tadi dihadiahkan kepada perusahaan-perusahaan. Dalam hal perusahaan jang ternjata tak dapat meneruskan pekerdjaannja dan terpaksa ditutup, maka barang-barang jang masih ada dilelang dan hasilnja dimasukkan dalam kas negeri.

Laporan menundjukkan gambaran sebagai berikut:

Pindjaman/bantuan modal kepada penganggur
1949-1954

Sifat bantuan	Djumlah jang diberikan	Djumlah Perusahaan	Penganggur jg ditempatkan
Pindjaman modal	Rp. 5.292.000	379	5707
Bantuan Modal	„ 2.940.963	167	2240

Pada permulaan tahun 1956 dari perusahaan-perusahaan jang mendapatkan pindjaman modal itu, 136 perusahaan telah membajar lunas pindjamannja dan sisa uang jang masih berada ditangan para pemindjam adalah Rp. 2.201.440,—. Djumlah bunga jang dibajar oleh para pemindjam adalah Rp. 740.000,— (tidak termasuk persentase bank).

Dari perusahaan-perusahaan jang mendapatkan bantuan modal pada permulaan 1956 itu, 115 perusahaan masih dapat berdjalan/dalam pengawasan sedangkan 52 perusahaan ditutup karena tidak dapat diharapkan kelangsungan hidupnja. Sisa kekajaan perusahaan-perusahaan jang telah ditutup itu sebagian telah dapat diselesaikan dalam arti sisa inventaris diserahkan kepada Kantor Lelang dan pendapatannja disetorkan kepada kas negeri. Penutupan itu pada umumnja disebabkan, karena mereka tidak dapat mengatasi kesulitan-kesulitan jang

dihadapinja, antara lain karena kesukaran pasaran bagi hasil produksinja dan sukarnja memperoleh bahan-bahan jang diperlukan.

f. Pemberian kerdja kepada penganggur/setengah penganggur.

Diatas telah diterangkan, bahwa usaha-usaha untuk menanggulangi soal-soal pengangguran, antara lain dengan antar kerdja biasa dan chusus, (bekas peladjar pedjoang dan penderita tjatjat) serta pemindjaman dan bantuan modal.

Bagi seseorang keadaan menganggur dan setengah menganggur biasanja berarti penderitaan djiwa dan tekanan bathin karena selalu ada perasaan, bahwa ia tidak berguna baig bagi keluarganja maupun bagi masjarakat pada umumnja.

Usaha pemberian kerdja dimaksudkan untuk mengurangi tekanan psychologis dan disamping itu mengikut-sertakan mereka dalam lapangan produksi dan djasa.

Tjara memberi kerdja kepada penganggur/setengah penganggur dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemberian kerdja darurat biasa, jaitu dengan djalan memperbantukan tenaga-tenaga tersebut pada kantor-kantor untuk menjelesaikan pekerdjaan jang tertimbun jang tidak merupakan pekerdjaan tetap hingga dapat diselesaikan oleh tenaga-tenaga darurat dalam waktu pendek. Sifat lainnja ialah mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan jang bermanfaat bagi masjarakat, seperti mengadjar dalam kursus-kursus pemberantasan buta huruf, dan sebagainja. Maksud pemberian kerdja darurat kepada tenaga bekas peladjar pedjoang ialah sekedar agar mereka dapat membiasakan diri pada suasana pekerdjaan-pekerdjaan dikantor-kantor Pemerintah dan sekaligus mereka dapat sekedar tertolong dalam penghidupannja.
Selama tahun 1955 telah dapat dipekerdjakan setjara darurat kepada kantor-kantor Pemerintah sedjumlah 308 orang dengan pengeluaran biaja Rp. 401.300,—. Dari 308 orang tersebut telah diangkat mendjadi pegawai negeri sebanjak 55 orang (8%).

2. Pemberian kerdja darurat istimewa.

Semendjak tahun 1952 diadakan usaha-usaha pemberian kerdja jang ditudjukan kepada kaum pengangguran musiman dan setengah pengangguran didaerah-daerah pertanian (pedesaan) jang lazimnja disebut pekerdjaan darurat istimewa.

Sebagai objek-objek dipilih pekerdjaan-pekerdjaan pengairan (membuat/memperbaiki saluran-saluran air, bendungan-bendungan) membuat/memperbaiki djembatan-djembatan/djalan-djalan dimana diperlukan banjak tenaga kerdja dan jang mana mendjadi tanggung-djawab desa.

Projek-projek tersebut pada umumnja tidak memerlukan tenaga-tenaga terlatih (skilled) sehingga mudah dilaksanakan dengan bantuan Pamong Pradja setempat.

Menurut kenjataan, desa-desa kurang mampu untuk membiajai usaha-usaha seperti tersebut diatas. Suatu kechususan daripada pekerdjaan darurat istimewa, ialah usaha tersebut merupakan perkawinan sistim gotong-rojong desa dengan usaha Pemerintah dengan bantuan keuangan (subsidi) dari Pemerintah. Dalam melaksanakan pekerdjaan-pekerdjaan itu instansi-instansi Pamong Pradja jang bersangkutan dan didesa-desa diminta usul-usulnja, persetudjuannja dan bantuannja. Administrasi dari penjelenggaraan pekerdjaan diserahkan kepada daerah tertentu jang bersangkutan.

Adapun pemberian kerdja darurat kepada penganggur/setengah penganggur memberikan hasil sebagai berikut:

Hasil pemberian kerdja darurat kepada
penganggur/setengah penganggur 1952/1955.

1.	Pembuatan saluran perairan	—	392.449 m.
2.	Memperbaiki dan memperdalam saluran-saluran air	—	236.780 m.
3.	Membuat bendungan air	—	77 buah.
4.	Membuka tanah kering untuk didjadikan persawahan	—	8.954 ha.
5.	Persawahan jang semula tidak mendapat perairan	—	53.450 ha.
6.	Membuat djembatan desa	—	128 buah.
7.	Perbaikan djalan-djalan desa	—	97.755 m.
8.	Waduk/kolam	—	101 buah.
9.	Pembuatan/penjelesaian gedung Sekolah Rakjat	—	9 buah.
10.	Gedung-gedung lain	—	47 buah.
11.	Balai desa	—	4 buah.
12.	Kantor Pemerintah/perumahan pegawai	—	43 buah.
13.	Djumlah subsidi jang dikeluarkan	—	Rp. 12.520.792,65
14.	Djumlah penganggur/setengah penganggur bekerdja	—	39.899 orang.

Untuk menggambarkan betapa besar hasil-hasil dan kemanfaatan sistim pekerdjaan darurat istimewa dalam tahun-tahun itu dibawah ini digambarkan suatu tjontoh objek jang telah dilaporkan selesai.

Pemberian kerdja darurat istimewa didaerah kabupaten Pati, untuk membuat tanggul 6000 X 6 X 0.75 m. dan 2 saluran pengairan masing-masing 2.000 × 5 ×3 m jang kesemuanja itu untuk merobah tanah rawa mendjadi persawahan; uang subsidi jang diberikan adalah Rp. 313.000,— dengan mempekerdjakan 600 orang selama 108-120 hari dengan uang tundjangan Rp. 4,50 seorang sehari.

Hasil dan manfaatnja pekerdjaan:

(1) dari tanah rawa 800 ha jang telah didjadikan sawah ada seluas 600 ha. dan telah menghasilkan padi 13.200 kwintal a Rp. 100 sekwintalnja, seluruhnja Rp. 1.320.000,—;
(2) dengan adanja tanggul jang dapat dipergunakan sebagai djalan, maka roda perekonomian rakjat disekitarnja telah mendjadi lantjar djalannja;
(3) sarang-sarang malaria terbasmi, sehingga kesehatan rakjat bertambah baik;
(4) memberi kesempatan kerdja dalam lapangan pertanian selama 190 hari (2 kali tanam) kepada tidak kurang dari 2X 600 X 30 orang, sama dengan 36.000 orang.

Dari laporan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian kerdja darurat ini menghasilkan dua matjam kemanfaatan, jaitu pekerdjaan bagi penganggur dan pembangunan serta peningkatan produksi bagi daerah bersangkutan dengan biaja rendah.

g. Latihan Kerdja.

Latihan kerdja merupakan suatu usaha jang sangat penting dalam rangka mendjamin susunan pasar kerdja jang sebaik-baiknja, artinja untuk mentjapai imbangan jang baik antara penawaran dan permintaan tenaga, terutama bagi Indonesia jang masih kekurangan tenaga terlatih (skilled labour).

Latihan kedjuruan dapat berbentuk:

1. pendidikan kedjuruan, biasanja buat orang muda disekolah-sekolah jang merupakan bagian dari pendidikan umum dan dimaksudkan untuk mendjamin mengalirnja tenaga terlatih tinggi, menengah dan rendah kemasjarakat kerdja, untuk djangka waktu pandjang.

2. latihan dalam perusahaan menurut sistim "apprenticeship" dengan maksud untuk mendjamin mengalirnja bibit-bibit tenaga terlatih dalam perusahaan.
3. Latihan kerdja jang praktis dalam pekerdjaan (on the job training).
4. Latihan kerdja dalam tempat-tempat latihan tertentu, misalnja dalam pusat-pusat latihan kerdja.

Bentuk latihan 1 dan 2 biasanja dipergunakan untuk orang muda dan berdjangka waktu agak pandjang, sedangkan latihan 3 dan 4 diatas diadakan untuk orang dewasa, bersifat praktis, berdjangka waktu pendek, serta dimaksudkan untuk memberi, menambah atau merobah ketjakapan/kedjuruan seorang tenaga kerdja sesuai dengan kebutuhan pasar kerdja.

Adapun latihan kerdja jang diselenggarakan oleh Kementerian Perburuhan Djawatan Latihan Kerdja adalah latihan kedjuruan kepada orang dewasa jang dipertjepat (accelerated training) chususnja dimaksudkan semula untuk menghadapi kebutuhan tenaga terlatih guna pembangunan negara.

Dalam Periode Survival 1950-1955, Kementerian Perburuhan mulai meletakkan dasar-dasar pokok mengenai latihan kerdja jang akan dilaksanakan di Indonesia untuk menghadapi perkembangan peningkatan kedjuruan tenaga kerdja buat masa jang akan datang.

Sebagai langkah pertama usaha latihan kerdja itu dibatasi pada djenis-djenis djabatan jang dianggap merupakan djabatan pokok (basic trades) jang dibutuhkan oleh pembangunan negara jaitu: bangunan, logam, montir, mobil dan diesel, listrik, radio, perdagangan pertanian dan keradjinan.

Latihan pertanian dimaksudkan untuk menahan kaum penganggur supaja tetap bekerdja dalam lapangan pertanian untuk kemudian ditransmigrasikan disamping mengefektifkan usaha-usaha pertanian sendiri, sedangkan keradjinan wanita dimaksudkan untuk memberi bekal hidup kepada kaum penganggur wanita. Dalam masa 1950-1956 Kementerian Perburuhan menjelenggarakan latihan dalam pusat-pusat latihan kerdja ditempat-tempat tersebut dibawah ini.

1. Bandung — Menjelenggarakan latihan instruktur dalam kedjuruan: bangunan, logam, mobil, listrik, radio dan perdagangan.

Disamping itu Pusat Latihan Kerdja Bandung memberi latihan kepada tenaga-tenaga pengawas dari perusahaan-perusahaan dalam kedjuruan bangunan, mobil, logam dan listrik, djuga diadakan latihan kedjuruan buat penganggur biasa, terutama tenaga veteran, dalam kedjuruan sopir mobil, tukang kaju bangunan, tukang besi bagian kikir dan mobil.

Jang melatih adalah tenaga-tenaga pelatih jang didatangkan dari luar negeri, antara lain dari Organisasi Perburuhan Internasional.

2. Djakarta (Pasarrebo) — Pusat Latihan Kerdja Djakarta menjelenggarakan latihan kerdja dalam kedjuruan: bangunan, logam, mobil/diesel, listrik/radio dan perdagangan dan sebagai permulaan diselenggarakan latihan dalam kedjuruan sopir mobil, tukang kaju bangunan, tukang besi bagian kikir dan perdagangan. Pusat Latihan Kerdja Pasarrebo didirikan dengan bantuan luar negeri (Australia) melalui Colombo-plan. Bantuan diberikan berupa alat-alat kerdja (mesin-mesin). Kalau kapasitas penuh Pasarrebo dapat melatih k.l. 250 orang.

3. Malang (Singosari) — Pusat Latihan Kerdja Singosari adalah sematjam Pasarrebo, didirikan dengan bantuan luar negeri (Selandia) berupa alat-alat kerdja dan gedung. Pada taraf permulaan diselenggarakan latihan sopir mobil, tukang kaju bangunan, tukang kaju perabot rumah tangga, tukang besi bagian kikir, pembantu montir mobil, tukang listrik, perdagangan dan pertanian.

4. Semarang — Pusat Latihan Kerdja Semarang menjelenggarakan latihan sopir mobil, tukang kaju bangunan, tukang besi bagian kikir dan montir mobil.

5. Jogjakarta — Latihan-latihan jang diselenggarakan di Pusat Latihan Kerdja Jogja jalah: tukang kaju bangunan, tukang besi bagian kikir, tukang besi bagian pelat dan sopir mobil. Selain itu Jogjakarta djuga menjelenggarakan: kursus memegang buku, steno tik, dan mengetik.

6. Surakarta — Pusat Latihan Kerdja Solo menjelenggarakan latihan tukang kaju bangunan, tukang besi bagian kikir dan keradjinan wanita (modevak).

7. Lembang — Pusat Latihan Kerdja ini menjelenggarakan latihan-latihan pertanian.

8. Klampok (Banjumas) — djuga Pusat Latihan Kerdja ini menjelenggarakan latihan-latihan pertanian.

Sampai achir tahun 1955 latihan-latihan kerdja jang diselenggarakan oleh Djawatan Latihan Kerdja Departemen Perburuhan memberikan hasil-hasil sebagai berikut:

Pengikut Kursus Latihan Kerdja Sampai
Achir 1955.

Kedjuruan pokok	Pengikut kursus
1. Administrasi Perdagangan	1.526 orang
2. Pengerdja kaju, bangunan batu dan saniter	792 „
3. Pengerdja logam	648 „
4. Permesinan	327 „
5. Perlistrikan, radio dan T.V.	230 „
6. Keradjinan dan djabatan bebas	911 „
7. Agraria dan mekanisasi	1.276 „
Djumlah pengikut kursus	5.710 orang

Angka-angka tersebut belumlah merupakan hasil kapasitas penuh dari pusat-pusat latihan kerdja tersebut diatas. Sebagian dari pusat-pusat latihan kerdja itu masih memerlukan alat-alat perlengkapan lebih sempurna untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnja dengan kapasitas penuh.

Faktor kedua jang masih harus diketahui lebih djelas lagi jalah kebutuhan masjarakat-masjarakat setempat akan tenaga-tenaga terlatih serta matjam kedjuruan jang diperlukan. Untuk memperoleh gambaran jang lebih tepat akan kebutuhan tenaga-tenaga terlatih diperlukan penelitian-penelitian (survey) dibidang tenaga kerdja.

2. Hubungan Perburuhan.

Hubungan perburuhan merupakan suatu kompleks masalah jang timbul karena adanja dua unsur dalam proses produksi, jaitu buruh dan pengusaha jang merupakan peserta-peserta aktif dalam setiap proses produksi.

Tjorak atau warna masalah hubungan perburuhan itu selalu sehubungan (inhaerent) dengan taraf perkembangan masjarakatnja, taraf pendjadjahan, taraf baru lepas dari pendjadjahan, taraf liberal, taraf nasional-demokrasi ataupun taraf sosi-

alisme. Karena dalam masing-masing taraf itu hubungan perburuhan mempunjai warna atau tjorak tersendiri dan karena taraf-taraf perkembangan masjarakat itu masing-masing berlainan warna atau tjoraknja maka masalah hubungan perburuhannja pun tidak selalu serupa. Sebaliknja sifat hubungan perburuhan jang selalu sama jalah bahwa masalah itu timbul karena sebab jang diuraikan diatas, jaitu karena adanja 2 unsur peserta dalam proses produksi, jaitu buruh dan pengusaha.

Dalam masa pendjadjahan tjorak chas jang ada pada waktu itu jalah: kekuasaan politik dan ekonomi dalam tangan kolonialis dan modal monopoli asing. Masalah hubungan perburuhannja timbul antara golongan jang mengeksploitasi dan kaum buruh jang dieksploitasi: pembatasan hak-hak azasi manusia, larangan berserikat buruh jang bertjorak perdjoangan nasional dan politis, diskriminasi dalam pemberian balas djasa (misalnja dalam hal pengupahan, djaminan sosial dan kesedjahteraan buruh) dan dalam hal kesempatan untuk memperoleh kemadjuan. Dalam keadaan jang demikian masalah jang timbul dalam hubungan antar pengusaha dan buruh selalu bersifat pertentangan (antagonistis).

Sedjak tahun 1950 kembalilah kekuasaan de fakto dan de jure kedalam tangan Bangsa Indonesia tetapi dalam pada itu mulai berlakulah salah satu ketentuan dari pada K.M.B., jaitu dikembalikannja perusahaan-perusahaan asing kepada pemiliknja jang semula. Seperti diketahui modal asing itu berkuasa dihampir semua sektor perekonomian Indonesia.

Pada mulanja Pemerintah Indonesia jang mulai bekerdja dengan „kas kosong" tidak banjak mempunjai kekuasaan ekonomi; sektor ekonomi jang dikuasai Pemerintah belum menduduki "commanding position" seperti sekarang ini.

Dalam keadaan demikian itu masalah hubungan perburuhan timbul sebagai akibat dari pada bergeraknja kekuatan-kekuatan dilapangan kerdja: kaum buruh jang makin lama makin tersusun baik dalam serikat-serikat buruh, golongan madjikan asing sebagai pemilik modal/perusahaan-perusahaan asing beroperasi dihampir semua sektor ekonomi, serta Pemerintah jang belum stabil dan belum seberapa kekuatan dan wewenangnja dalam ekonomi nasional.

Dalam Periode Survival itu, organisasi buruh mulai mempergunakan kekuatannja dan mengarahkan perhatiannja kearah

perbaikan nasib dan sjarat-sjarat kerdja bagi anggotanja serta perdjoangan hak-hak azasinja, antara lain untuk mendirikan serikat-serikat buruh diperusahaan-perusahaan dan untuk memperoleh pengakuan atas serikat-serikat buruh jang telah didirikannja.

Karena itu dalam periode ini masalah hubungan perburuhan ditandai dengan timbulnja tuntutan-tuntutan jang bertubi-tubi, perselisihan-perselisihan perburuhan dan pemogokan-pemogokan setjara bergelombang dari pihak kaum buruh. Sebaliknja pihak madjikan mendjawab aksi-aksi kaum buruh tersebut dengan penutupan-penutupan perusahaan dan pemetjatan-pemetjatan massal.

Dilihat dari segi perkembangan revolusi masalah-masalah dalam hubungan perburuhan itu memperlihatkan gerak jang tjukup dinamis dan jang menguntungkan djalannja revolusi kita, mengingat peranan kaum buruh dalam usaha peningkatan "commanding position" Pemerintah dibidang ekonomi nasional dimasa-masa berikutnja.

Perselisihan perburuhan.

Mengenai perselisihan perburuhan jang terdjadi selama Periode Survival 1950-1955 dapatlah dikemukakan laporan angka-angka sebagai berikut:

Statistik perselisihan perburuhan.

Tahun	banjaknja perselisihan	banjaknja buruh dalam perusahaan jang bersangkutan.
1951	2.754	—
1952	4.003	—
1953	1.800	1.268.000
1954	2.812	2.197.100
1955	3.697	3.488.700

Pemerintah, dalam hal ini Panitia Penjelesaian Pertikaian Perburuhan jang kemudian mendjadi Panitia Penjelesaian Perselisihan Perburuhan atau jang terkenal dengan nama P4P dengan P4D (Daerah-daerah)-nja berusaha menjelesaikan perselisihan-perselisihan perburuhan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam hal tidak tertjapai persetudjuan antara pihak-pihak buruh dan pengusaha sering terdjadi pemogokan-pemogokan dan penutupan-penutupan perusahaan-perusahaan.

Banjaknja perselisihan-perselisihan perburuhan jang berakibat pemogokan-pemogokan dapat dikemukakan sebagai berikut.

Statistik pemogokan

Tahun	Banjaknja pemogokan	Banjaknja buruh jang mogok	Djumlah djam-kerdja hilang
1950	144	490.539	7.784.300
1951	541	319.000	3.719.900
1952	349	133.000	6.152.000
1953	280	419.600	4.812.100
1954	319	157.600	2.365.700
1955	469	238.900	4.097.800

Perkebunan/pertanian merupakan lapangan ekonomi terpenting dimana sering terdjadi pemogokan-pemogokan. Dalam tahun 1955 dibidang ini terdjadi 267 pemogokan atau 57% dari djumlah pemogokan tahun itu. Djam-kerdja jang hilang tertjatat 2.202.000 djam atau 54% dari djumlah seluruhnja djam-kerdja.

Gambaran mengenai tuntutan-tuntutan kaum buruh sesuai dengan keputusan-keputusan P4P dari tahun 1952—1955 adalah sebagai berikut:

Tuntutan-tuntutan dalam perselisihan perburuhan
(dalam persentase)

Tuntutan	1952	1953	1954	1955	Putusan
Upah	23,44%	26,97%	25,78%	21,56%	290
Perdjandjian perburuhan	10,96	10,28	8,75	7,73	104
Pengakuan organisasi	0,68	0,64	0,37	—	—
Gratifikasi	11,13	0,99	10,04	9,59	129
Hadiah Lebaran	18,22	7,92	8,93	7,44	100
Djaminan Sosial	4,89	9,43	1,93	1,79	24
Pemetjahan	25,45	21,09	25,41	20,59	277
Pelaksanaan putusan	1,35	0,54	0,65	—	—
Bermatjam-matjam soal	3,88	14,14	18,14	31,30	421
	100 %	100 %	100 %	100 %	1.345

Dilihat dari sudut pemberian industri, maka keputusan-keputusan P4P tersebut memberi gambaran sebagai berikut:

Keputusan-keputusan P4P menurut industri (1952-1955)

Sektor industri	1952	1953	1954	1955	Putusan
Perkebunan	31,23%	32,44%	39,41%	43,57%	586
Pelabuhan	13,15	11,89	7,09	7,57	101
Perhubungan	7,24	8,03	5,34	4,31	143
Pertambangan	9,43	14,67	11,42	10,63	58
Perindustrian	18,04	10,66	10,22	8,91	120
Perusahaan lain-lain	20,91	12,31	26,52	25,06	337
	100 %	100 %	100 %	100 %	1.345

Dari angka-angka itu ternjata lagi, bahwa lebih dari 30% dari keputusan-keputusan P4P itu dikeluarkan untuk menjelesaikan perselisihan-perselisihan perburuhan dibidang pertanian/ perkebunan dengan memperlihatkan ketjenderungan naik prosentasenja.

Pada permulaan Periode Survival ini, perselisihan perburuhan dan pemogokan demikian meningkatnja, hingga Menteri Pertahanan sebagai Pemegang Kekuasaan Militer — pada waktu itu Indonesia masih dalam keadaan S.O.B. — merasa perlu untuk mengeluarkan peraturan jang melarang pemogokan diperusahaan-perusahaan dan djawatan-djawatan jang dianggap vital. Peraturan itu ditentang dengan keras oleh serikat-serikat buruh, jang sedang berdjoang memperbaiki kedudukannja oleh karena peraturan ini dipandang pengekangan terhadap hak-hak azasi buruh jang baru sadja diperoleh.

Sebaliknja madjikan, terutama madjikan asing, memandang peraturan ini sebagai tjampur tangan dalam urusan mereka sendiri. Kemudian Peraturan Kekuasaan Militer Pusat ini ditarik kembali dan diganti dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951 tentang penjelesaian pertikaian perburuhan. Dalam undang-undang ini pemogokan, baik diperusahaan vital maupun jang tidak vital, tidak dilarang. Hanja untuk melakukan pemogokan serikat buruh harus menempuh dulu suatu prosedur tertentu.

Dalam pada itu adanja perselisihan perburuhan atau pemogokan bukanlah semata-mata terletak pada larangan mengadakan pemogokan, bukan pula terletak pada tjara-tjara penjelesaian pertikaian perburuhan itu sendiri. Banjak atau tidaknja perselisihan perburuhan terutama tergantung pada keadaan

perekonomian dan keadaan perburuhan pada chususnja pada sesuatu waktu.

Walaupun demikian, Kementerian Perburuhan berhasil djuga menguasai keadaan, sehingga sungguhpun masih banjak timbul perselisihan perburuhan dan pemogokan, membatasi kerugian sampai batas-batas jang tidak merugikan perekonomian negara. Disamping itu lambat laun tersusun jurisprudensi dari putusan-putusan P4P jang mengisi kekosongan akan beberapa peraturan perburuhan dan dengan demikian mempermudah penjelesaian pertikaian perburuhan.

Perlu kiranja dikemukakan disini, bahwa walaupun angka-angka perselisihan perburuhan menundjukkan ketjenderungan untuk meningkat, namun ada peristiwa jang menekan kenaikan angka-angka tersebut.

Peristiwa jang dimaksudkan itu ialah diadakannja Konperensi Asia-Afrika I pada achir bulan April 1955 di Bandung. Atas kesadaran buruh dari semua golongan dan lapisan, maka mendjelang diadakannja dan selama konperensi itu sendiri berlangsung, seolah-olah ada „cease fire" buruh dan pengusaha. Ini terbukti tidak adanja satu pemogokanpun jang dilangsungkan selama bulan Maret dan April 1955, suatu kedjadian jang baru kali ini dialami semendjak terbentuknja Negara Kesatuan dalam tahun 1950.

Hal ini dinjatakan oleh Menteri Perburuhan pada sambutannja mendjelang Hari Kemenangan Buruh 1 Mei 1955 dimana beliau menjatakan terima kasih Pemerintah kepada semua buruh dalam memberikan sumbangannja jang tidak sedikit terhadap berlangsungnja Konperensi Asia-Afrika I itu.

3. Masalah Djaminan Sosial dan Kesedjahteraan Buruh.

Djaminan sosial adalah keseluruhan daripada usaha-usaha jang bertudjuan untuk mendjamin agar setiap orang, buruh chususnja, didjamin penghasilannja sewaktu-waktu ia tidak mampu bekerdja dan akan memperoleh perawatan pengobatan, termasuk obat-obatan, jang dibutuhkannja menurut keadaan kesehatannja. Pemeliharaan pengobatan ini meliputi semua anggota keluarga buruh. Dalam arti-kata jang lebih luas lagi djaminan sosial itu diberikan kepada seluruh rakjat.

Tjorak jang terpenting dari djaminan sosial ialah bahwa djaminan itu harus meliputi segala kemungkinan sosial dengan tiada ketjuali, sehingga merupakan djaminan sosial jang lengkap.

Maka djaminan sosial jang lengkap harus meliputi segala akibat daripada keadaan apabila seorang terpaksa tidak bekerdja, karena sebab-sebab diluar kemauannja dan karenanja menderita kekurangan penghasilan atau kekurangan kapasitas untuk menghasilkan. Karena itu djaminan sosial meliputi hal sakit, tidak pandang berapa lama, kelahiran anak, tjatjat, ketjelakaan perusahaan, hari-tua dan pengangguran.

Djika seorang pentjari nafkah meninggal dunia, peraturan-peraturan djaminan sosial seharusnja memberi kemungkinan kepada keluarga jang ditinggalkan untuk memperoleh tundjangan-tundjangan sedemikian rupa, hingga keluarga jang ditinggalkan tersebut tetap dapat hidup dengan lajak.

Peraturan-peraturan djaminan sosial memegang peranan penting dalam perkembangan peraturan-peraturan pentjegah baik jang mengenai sosial maupun jang mengenai kesehatan.

Mengenai ketjelakaan-ketjelakaan kerdja dalam perusahaan, djaminan sosial harus mengandung segala peraturan pentjegah untuk mengurangi ketjelakaan pada djumlah minimum.

Dalam hal terdjadi ketjelakaan diperusahaan, perlu dibajarkan penggantian kerugian penuh dan ditentukan tjara-tjara pemberian penggantian kerugian, baik jang mengenai pengobatan maupun pekerdjaan, bagi orang jang menderita ketjelakaan.

Djaminan sosial harus didasarkan atas pengakuan dari hak sosial jang pokok jang didjamin oleh undang-undang bagi tiap orang jang hidup dengan djalan memburuh.

Kesedjahteraan buruh adalah fasilitas-fasilitas jang diterima buruh disamping upah djaminan sosial dan meliputi antara lain: fasilitas makan (kantin) dan rekreasi (tempat dan alat-alat olah raga, tempat-tempat pertemuan), penitipan baji pada waktu hari dan djam kerdja, perumahan, asrama buruh wanita dan sebagainja.

Di Indonesia sedjak 1945 djaminan sosial dan kesedjahteraan buruh merupakan salah satu masalah perburuhan jang senantiasa mendapat perhatian, baik oleh kaum buruh, maupun oleh Pemerintah. Sesungguhnja suatu negara jang mempunjai tjita-tjita untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur, soal djaminan sosial dan kesedjahteraan buruh seharusnja merupakan usaha jang senantiasa harus ditingkatkan tarafnja.

Masalah djaminan sosial dan kesedjahteraan buruh tidaklah semata-mata bersegi sosial, tetapi djuga segi ekonomi (produk-

si)nja tidak ketjil artinja. Jang terang ialah, bahwa buruh jang tidak memperoleh djaminan sakit dan jang tidak memperoleh pemeliharaan pada waktu sakit tidak akan lekas dapat bekerdja, hal mana akan mempengaruhi prestasi kerdjanja. Demikian pula buruh jang meninggalkan keluarganja dirumah dalam keadaan sakit tanpa ada bantuan pengobatan, tentu tidak akan dapat tenang bekerdja dan memberikan prestasi sebagaimana mestinja. Ini semuanja tentu akan mempengaruhi tingkat produksi pada umumnja.

Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia jang mempunjai kedudukan keuangan kuat pada umumnja telah memberikan/ menjediakan fasilitas djaminan sosial dan kesedjahteraan buruh kepada buruh-buruh jang bekerdja pada perusahaannja.

Sebaliknja, diperusahaan-perusahaan jang kurang kuat kedudukan keuangannja, fasilitas-fasilitas itu sering merupakan tambahan biaja jang terletak diluar daja kemampuan keuangannja. Tetapi bagi buruh jang bekerdja, dimanapun ia bekerdja, pada suatu waktu ia tentu memerlukan djaminan itu, jaitu pada waktu ia sakit, isterinja melahirkan anak dan waktu ia sudah tua hingga tidak mampu untuk bekerdja lagi.

Karena itu soal pemupukan dana untuk menanggung pengeluaran biaja djaminan-djaminan sosial itu senantiasa merupakan soal penting dalam pemetjahan masalah perburuhan dan oleh karena pembiajaan itu mengenai daja kemampuan keuangan, hal itu rapat hubungannja dengan tingkat perkembangan perekonomian pada umumnja. Siapakah jang harus membiajai pengeluaran djaminan sosial itu?

Buruh sendirikah, Madjikankah, Gotong-rojongkah? Atau Pemerintahkah? Bagaimana tjara mengumpulkan dana itu? Dengan sistim pertanggungan atau asuransi (sukrela atau wadjib) atau hanja dari Anggaran Negara sadja?

Usaha pemupukan dan pengaturan dana djaminan sosial dan kesedjahteraan buruh itu sementjak tahun 1950 mulai didjalankan walaupun setjara insidentil dan ketjil-ketjilan.

Sampai tahun 1955, Kementerian Perburuhan telah memberikan subsidi sebesar Rp. 392.309,— kepada badan-badan penjelenggara dana-dana sakit, antara lain:

(1) Sentral Fonds Sakit Jogja.

(2) Dana Sakit untuk Buruh Bandung.

(3) Dana Sakit untuk Buruh Palembang.

Selainnja dana-dana sakit tersebut diatas, masih tertjatat pula adanja dana-dana sosial sebagai berikut (sampai achir 1955).

(1) Dana Sakit Buruh Harrison & Crossfleld, di Medan meliputi 231 buruh 400 anggota keluarganja.

(2) Dana Sakit Buruh Rokok Kretek di Kudus, meliputi 20.000 buruh jang bekerdja di 136 perusahaan rokok kretek.

(3) Dana Sosial Koperasi Batik di Solo jang didukung oleh 90 persen pengusaha batik di Solo.

(4) Dana Kesehatan Panglong di Riau, meliputi 2.000 buruh Panglong jang tersebar diseluruh kabupaten Riau.

Panglong jang tersebar diseluruh kabupaten Riau.

Undang-undang Ketjelakaan tahun 1947 menentukan, bahwa pengusaha diwadjibkan membajar ganti kerugian kepada buruh jang tertimpa suatu ketjelakaan dalam mendjalankan pekerdjaan (tundjangan ketjelakaan). Tidak semua perusahaan mampu membajar tundjangan tersebut. Dalam hal seperti itu Pemerintahlah jang harus menanggungnja (pasal 12 Undang-undang Ketjelakaan).

Tundjangan jang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pengusaha untuk keperluan itu ialah:

Tahun	Djumlah pengeluaran oleh Pengusaha	Djumlah pengeluaran oleh Pemerintah
1951	Rp. 746.678,06	Rp. 4.450,—
1952	„ 1.181.645,84	„ 5.450,—
1953	„ 1.346.759,67	„ 16.532,20
1954	„ 1.042.743,40	„ 13.143,60
1955	„ 1.154.626,76	„ 4.327,92

Dibidang Kesedjahteraan Buruh, Kementerian Perburuhan selama 1950 — 1955 telah mendirikan perumahan buruh :

Tempat	Djumlah rumah/gedung	Penghuni
Djakarta (Rawabadak)	110 rumah	869 orang
	2 toko	
	1 gedung pertemuan	
Tjirebon	30 rumah	128 orang
Bandung	22 rumah	203 orang
Semarang	68 rumah	520 orang
Surabaja	113 rumah	920 orang
	1 gedung pertemuan	
Jogjakarta	1 asrama buruh	

Rumah-rumah dan gedung-gedung pertemuan tersebut dimaksudkan djuga untuk mendjadi tjontoh pembuatan rumah buruh sehat tetapi murah.

Selain perumahan buruh, djuga telah didirikan „balai-balai istirahat buruh" dan Puntjak (1952), Kaliurang (1953), Tawangmanggu 1953) dan Berastagi dengan kepasitas 103 tempat tidur. Djumlah tundjangan jang telah dikeluarkan sampai acihr 1954 adalah sebesar Rp. 34.424,18.

IV. PERIODE CHALENGE DAN RESPONSE TERHADAP DEMOKRASI TERPIMPIN 1955 — 1959.

Perkembangan masalah Perburuhan dalam periode ini dipengaruhi oleh dua kedjadian penting; jang pertama adalah tindakan Pemerintah dalam bidang ekonomi, jaitu dikeluarkannja Peraturan Bukti Ekspor (B.E.) dan jang kedua jalah tindakan Pemerintah karena hendak menempuh „djalan lain" dalam usaha Rakjat Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Peraturan B.E. jang dikeluarkan dalam bulan Djuli 1957 itu dimaksudkan untuk mengadakan keseimbangan dalam penerimaan dan pengeluaran devisa, atau menghubungkan impor setjara otomatis dengan ekspor. Peraturan tersebut ternjata menimbulkan perkembangan baru dalam lapangan industri dalam negeri dan distribusi barang-barang baku serta barang-barang konsumsi, hal mana selandjutnja mempengaruhi pula situasi „lapangan kerdja dan pengupahan".

Peraturan B.E. itu pertama-tama terasa akibat-akibatnja pada industri dalam negeri jang bahan-bahan bakunja tergantung pada impor; akibat-akibat itu kemudian mendjalar pada industri-industri ketjil. Memang telah lama industri-industri ketjil itu mengalami bermatjam-matjam kesukaran, antara lain mengenai likwiditas, bahan-bahan untuk keperluan produksi, management, dan sebagainja. Menurut taksiran pada waktu itu dibidang industri ketjil ada sebanjak 15.600 perusahaan jang mempekerdjakan se-dikitnja 600.000 buruh. Dalam djumlah ini belum terhitung perusahaan-perusahaan jang mempunjai buruh kurang dari 10 orang setiap perusahaan.

Naiknja harga barang impor serta sukarnja pembuatan kalkulasi berhubung dengan belum stabilnja harga B.E. menjebabkan banjak pengusaha bersikap „menunggu" jang menjebabkan tambah seretnja peredaran barang. Akibat langsung jang dirasakan dalam bidang perusahaan jalah bahaja akan ditutupnja atau surutnja perusahaan-perusahaan tertentu.

Tampak gedjala-gedjala, bahwa kaum buruh tidak dipekerdjakan dengan penuh, hal mana berarti makin berkurangnja lapangan kesempatan kerdja. Akibat lainnja jalah melondjaknja harga barang-barang termasuk barang konsumsi. Gedjala-

gedjala tentang terasanja kenaikan-kenaikan harga itu terdengar dalam bentuk-bentuk pernjataan-pernjataan dari pusat-pusat organisasi-organisasi buruh.

Kemudian setelah dirundingkan dengan Menteri-menteri jang mendjadi anggota Panitia Pejelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (4), maka Pemerintah c.q. Menteri Perburuhan mengeluarkan surat andjuran agar kepada kaum buruh diberi tundjangan jang djumlahnja sampai 20% dari upah nominal berupa uang.

Perkembangan masalah perburuhan selandjutnja dipengaruhi oleh tindakan kaum buruh untuk mengadakan „Aksi tidak mogok kerdja" pada tanggal 2 Desember 1957 selama 24 djam pada semua perusahaan Belanda diseluruh Indonisia atas andjuran Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat, aksi mana pada umum nja dilakukan setjara tertib.

Aksi mogok kerdja itu kemudian disusul dengan rentetan kedjadian pengawasan, pengoperan dan pengambil-alihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh buruh-buruhnja jang dimulai dengan pengambil-alihan perusahaan perkapalan N.V. K.P.M. di Djakarta pada tanggal 3 Desember 1957. Sesudah itu, maka tindakan pengambil-alihan perusahaan-perusahaan Belanda itu terdjadi dimana-mana, djuga diluar kota Djakarta.

Aksi-aksi pengambil-alihan perusahaan-perusahaan Belanda itu ternjata mempunjai arti jang menentukan bagi djalannja revolusi kita, terutama dalam bidang peningkatan „commanding position" sektor ekonomi Pemerintah serta peningkatan militansi gerakan buruh Indonesia.

Sementara itu tindakan pengambil-alihan itu menghadapkan kita pada persoalan-persoalan sebagai berikut :

1. Terhentinja lalu-lintas kapal-kapal jang dahulu dilakukan oleh perusahaan perkapalan K.P.M. dan jang merupakan lebih dari seperdua dari kapasitas angkutan laut interinsuler di Indonesia.
2. Hilangnja setjara mendadak tenaga-tenaga ahli dari sebagian besar perusahaan-perusahaan Belanda jang telah diambil alih atau diawasi oleh instansi-instansi resmi.

Untuk menampung persoalan itu dibidang perburuhan ditentukan 3 garis kebidjaksanaan :

1. proses produksi dan pemberian djasa supaja dapat berdjalan terus, bahkan sedapat mungkin supaja lebih lantjar dari pada dalam waktu-waktu jang lampau.
2. tingkat kesempatan kerdja supaja dipertahankan.
3. sjarat-sjarat perburuhan supaja djangan sampai berkurang.

Tiga matjam ketentuan tersebut selandjutnja merupakan pedoman dalam menjelesaikan masalah perburuhan jang timbul dipusat dan didaerah-daerah pada waktu itu.

A. MASALAH TENAGA KERDJA.

1. Informasi Tenaga Kerdja.

Pada tahun 1955 Indonesia mulai menjusun rentjana „pembangunan ekonomi jang pertama (1955 — 1960)". Dalam penjusunan rentjana itu makin dirasakan pentingnja peranan tenaga kerdja. Sesungguhnja, suatu rentjana pembangunan tidak akan lengkap djika „inputnja" hanja terdiri atas alam, bahan mentah dan uang sadja, tanpa tenaga kerdja. Maka mulailah perhatian ditudjukan pada pengetahuan tentang persoalan tenaga kerdja. Untuk menjusun suatu rentjana pembangunan diperlukan pengetahuan tentang djenis tenaga jang tersedia, bagaimana umur dan kesanggupannja, faktor-faktor jang dapat merobah susunan tenaga kerdja, kejtepatan urbanisasi (arus dari desa pindah kekota).

Untuk memperoleh keterangan-keterangan jang benar-benar dapat dipertanggung-djawabkan setjara ilmiah guna kepentingan rentjana pembangunan tersebut mulailah diadakan pengumpulan keterangan-keterangan tentang tenaga kerdja, melalui survey-survey sebagai berikut :

1956 — Pertial Manpower survey seluruh Indonesia,

1956 — Pilot Project Employment Market Information Survey di Sukabumi,

1957 — Pilot Project Labour Force Sample Surveys wilajah Sukabumi (kota dan pedusunan),

1957 — Pilot Project Labour Force Sample Survey Bandung (kota),

1957 — Pilot Project Labour Force Sample Survey Wurjantoro (pedusunan),

1957 — Pilot Project Labour Sample Survey Kota Solo (kota),

1957 — Pilot Project Labour Force Surveys (kota — pedusunan),

1958 — Labour Force Sample Survey Djawa dan Madura (kota — pedusunan),

1959 — Labour Force Sample Survey Bali (kota — pedusunan),

1959 — Labour Force Sample Survey (kota — pedusunan),

1959 — Labour Force Sample Survey Sumatera Selatan (kota — pedusunan).

Survey jang diadakan itu mempunjai tudjuan utama untuk mempeladjari dan mentjoba metode-metode dan teknik-teknik, serta konsepsi-konsepsi jang tjotjok untuk dipergunakan dalam penjelidikan seperti itu.

2. Antar Kerdja.

Selama periode ini antar kerdja tidak menundjukkan kemadjuan djika dibandingkan dengan periode sebelumnja.

Tahun	Pentjari kerdja terdaftar	Pentjari kerdja ditempatkan	Prosentase penempatan
1956	170.278	18.030	10,6%
1957	151.957	20.154	13 %
1958	150.434	17.328	11,4%
1959	152.208	21.940	16,4%

3. Antar Kerdja Antar Daerah.

Djumlah tenaga kerdja jang dipindahkan keluar Djawa/Madura selama tahun 1956-1959 adalah:

Tahun	Djumlah tenaga kerdja
1956	3.082
1957	2.592
1958	752
1959	3.203

Dalam tahun-tahun itu djumlah pemindahan tenaga kerdja keluar Djawa/Madura tampak agak menurun. Hal ini antara lain disebabkan karena gangguan keamanan dan pemberontak-

an P.R.R.I./Permesta. Semendjak tahun 1959 setelah tertjapai keamanan djumlah itu mulai naik lagi.

4. Penjuluhan Pemilihan Djabatan.

Dalam periode 1950-1955 Djawatan Penempatan Tenaga telah meletakkan dasar-dasar penjelenggaraan penjuluhan pemilihan djabatan dengan tjara-tjara jang lebih madju sesuai dengan sjarat-sjarat jang diperlukan. Dalam periode 1956-1959 telah dapat dikemukakan hasil-hasil pekerdjaan sebagai berikut.

Penjelidikan djabatan.

1956-1957 penjelidikan djabatan 286 perusahaan meliputi 9086 djabatan.

1958-1959 penjelidikan djabatan 377 perusahaan meliputi 7843 djabatan.

Pelajanan test psychology.

Untuk mengetahui bakat jang sebenarnja dari pentjari kerdja maka sebelum disalurkan kemasjarakat kerdja kepada mereka itu dilakukan suatu test-psychology dengan metode tertentu. Laporan djumlah orang jang telah ditest adalah sebagai berikut :

Tahun	S.R.	S.L.P.	S.L.A.	Akademi/ P.T.	Djumlah	
1957	1.498	639	500	—	2.637	(untuk 10 perusahaan/ Instansi)
1958	949	823	475	—	2.247	(untuk 39 perusahaan/ Instansi)
1959	1.600	801	311	—	2.712	(untuk 53 perusahaan/ Instansi)

B. LATIHAN KERDJA.

Aktivitas latihan kerdja diperlukan untuk memberi kedjuruan kepada pentjari kerdja hingga lebih mudah mendapat pekerdjaan dalam masjarakat.

Latihan Kerdja 1956-1959	Pengikut Kursus
1. Administrasi dan Perdagangan	292 orang
2. Pengerdja kaju, bangunan, batu dan sanitair	573 „
3. Pengerdja logam	366 „
4. Permesinan	570 „
5. Perlistrikan, radio dan T.V.	313 „
6. Keradjinan dan djabatan bebas	139 „
7. Agraria dan mekanisasi	570 „
Djumlah:	2.773 orang

Tjara latihan kerdja ini adalah latihan jang dipertjepat (accelerated training).

Disamping latihan kerdja dengan tjara itu dalam periode ini mulai diselenggarakan apa jang dinamakan "training within industry" (T.W.I.) jang dimaksudkan melatih pengawas-pengawas (supervisors) didalam industri untuk mendjalankan pekerdjaan dengan tjara jang lebih efisien dan metodis. Untuk melaksanakan T.W.I., maka dalam tahun 1958 dilantik suatu Panitia Interdeparmental T.W.I. dengan tugas memberi saran-saran dan nasehat-nasehat kepada Kementerian Perburuhan, chususnnja Djawatann Latihan Kerdja dalam melaksanakan Projek T.W.I. T.W.I. mempunjai 3 djurusan jaitu:

1. latihan instruksi kerdja;
2. latihan hubungan kerdja dan
3. latihan tjara kerdja.

Selama tahun 1958 sampai dengan 1960 telah dilatih sedjumlah 278 orang Masters Trainers/Trainers dan 5221 pengawas terlatih (supervisors trained).

C. HUBUNGAN PERBURUHAN.

1. Perselisihan Perburuhan.

Pada umumnja dapat dikatakan bahwa banjak sedikitnja djumlah perselisihan perburuhan mentjerminkan keadaan sosial-ekonomis dari masjarakat jang bersangkutan pada sesuatu saat.

Dapat dikemukakan bahwa pada bagian pertama periode ini perselisihan perburuhan agak meningkat terutama dalam tahun 1957. Telah dikemukakan tadi bahwa dalam tahun itu dikeluarkan peraturan B.E. jang membawa banjak akibat dalam bidang perburuhan.

Angka-angka perselisihan perburuhan memberi gambaran sebagai berikut.

Statistik perselisihan perburuhan 1956-1959.

Tahun	Banjaknja perselisihan	Banjaknja buruh jang bekerdja
1955	3.896	3.488.700
1956	3.350	3.111.900
1957	4.131	5.057.500
1958	3.697	2.976.900
1959	2.825	1.956.500

Banjaknja perselisihan perburuhan itu ternjata tidak banjak mempengaruhi djalannja produksi karena tidak selalu diikuti dengan aksi-aksi pemogokan. Mengenai statistik pemogokan dapat dikemukakan angka-angka sebagai berikut.

Statistik pemogokan (1956-1959).

Tahun	Banjaknja pemogokan	Banjaknja buruh jang mogok	Djumlah djam kerdja hilang
1956	505	340.200	6.968.900
1957	151	62.000	863.300
1958	55	13.100	98.000
1959	70	26.600	219.200

Angka-angka tersebut menundjukkan bahwa djumlah pemogokan menundjukkan ketjenderungan untuk menurun. Hal ini disebabkan oleh antara lain:

1. Makin lama makin banjak perusahaan-perusahaan jang dikuasai oleh Pemerintah (Perusahaan-perusahaan Negara) dan banjak perusahaan-perusahaan ini antaranja jang dinjatakan vital.
2. Makin lama makin lengkap peraturan-peraturan jang berlaku untuk menjelesaikan perselisihan-perselisihan perburuhan.
3. Lembaga jang diserahi menjelesaikan perselisihan perburuhan (Panitia Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat makin lama makin berpengalaman hingga mampu menunaikan tugasnja dalam waktu lebih singkat.

Dalam tahun 1959 sebesar 36,55% dari seluruh perselisihan perburuhan adalah mengenai upah dan 23,11% diantaranja mengenai pemutusan hubungan kerdja (pemetjatan). Angka-angka ini menggambarkan situasi sosial-ekonomi kita pada waktu itu.

Sementara itu P4 Pusat telah berhasil menetapkan norma-norma untuk mengatasi perselisihan perburuhan jang dapat diterima oleh masjarakat, misalnja menjuruh mengerdjakan kembali seorang buruh jang dipetjat dengan tiada alasan oleh pengusaha, pemberian uang djasa, pemberian „shakehands" premie, peraturan pengobatan ,tjuti pendek, dan sebagainja.

Untuk memudahkan penentuan norma-norma baru itu oleh P4 Pusat (bentuk lama) telah dibentuk suatu panitia ad hoc terdiri dari wakil-wakil anggota ahli hukum untuk merumus-

kan segala sesuatu agar didjadikan pedoman dalam menjelesaikan perselisihan. Panitia ad hoc ini berhasil membuat perumusan mengenai:

1. pembajaran upah selama penutupan perusahaan/penolakan buruh untuk bekerdja;
2. penutupan perusahaan/penolakan buruh untuk bekerdja;
3. aksi go-slow dan slow-down;
4. pemberian uang pesangon dan uang djasa kepada buruh-buruh jang diberhentikan;
5. pemogokan untuk membantu serikat buruh lain menekan madjikan (pemogokan solider);
6. kewadjiban pengusaha terhadap buruhnja jang ditahan oleh alat kekuasaan negara;
7. soal borongan;
8. akibat-akibat dari pemindahan tangan suatu perusahaan atau bagian dari perusahaan bagi hubungan kerdja jang ada;
9. alasan mendesak jang merupakan "strafbaar feit";
10. putusan P4 Pusat jang bersifat mendesak;
11. kewadjiban pengusaha untuk membajar upah selama buruh harus melakukan kewadjibannja terhadap Pemerintah;
12. pesangon;
13. pembajaran ganti kerugian pada pemutusan hubungan kerdja.

Dalam amanat P.J.M. Presiden Republik Indonesia jang disampaikan kepada para anggota dan anggota-pengganti Panitia Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dikemukakan bahwa „menudju kenegara adil dan makmur" harus mendjadi pedoman bagi Panitia Penjelesaian Perselisihan Perburuhan dalam menjelesaikan tugasnja. Amanat itu hingga kini selalu mendjadi pedoman kerdja bagi P4 Pusat.

2. Kerdjasama Buruh dan Pimpinan Perusahaan.

Semendjak diambil alihnja perusahaan-perusahaan Belanda oleh Pemerintah Indonesia jang dipelopori oleh aksi-aksi pengoperan oleh kaum buruh mulai deraslah suara dan tuntutan kaum buruh untuk diikutsertakan dalam pengusahaan perusahaan-perusahaan negara tersebut. Mulailah ditjari bentuk-bentuk permusjawaratan antara buruh dan pimpinan perusahaan.

Bentuk kerdjasama antara pimpinan perusahaan, golongan funksionil dan Pemerintah itu antara lain mulai dilaksanakan

Pada umumnja diperusahaan-perusahaan jang besar dan sedang, pelaksanaan pasal waktu kerdja telah didjalankan dengan baik. Hanja untuk pekerdjaan jang menurut sifatnja sukar memenuhi waktu kerdja dan waktu istirahat dan pula merupakan perusahaan vital masih diberikan dispensasi.

Disamping masih ada kedjadian-kedjadian jang menjimpang dari pasal tersebut jang memang terpaksa harus diadakan, masih ada pekerdjaan-pekerdjaan jang bertimbun-timbun dan lekas harus diselesaikan jang tidak dapat diketahui sebelumnja. Hal itu terdapat diperusahaan pelabuhan, transpor didarat dan diair, pabrik-pabrik dimana ada kerusakan-kerusakan dibagian-bagian jang penting.

2. Kerdja anak.

Undang-undang kerdja 1948 menentukan anak-anak (14 tahun kebawah) tidak boleh mendjalankan pekerdjaan. Ketentuan itu menurut pemeriksaan Djawatan Pengawasan Perburuhan masih belum dapat dilaksanakan. Ternjata masih terdapat anak-anak umur 13 tahun bekerdja diperkebunan, diperusahaan sigaret, batik, perak, gelas, untuk memenuhi kebutuhan penghidupan orang tuanja sehari-hari.

3. Kerdja malam wanita.

Kerdja malam wanita pada umumnja telah ditaati peraturannja. Dalam pada itu perizinan oleh instansi jang berwenang telah diberikan kepada beberapa perusahaan tekstil. Izin kepada perusahaan-perusahaan ini diberikan dengan pengertian bahwa setjara berangsur-angsur harus dikurangi tanpa mengakibatkan pelepasan, misalnja dipindahkan kebagian siang hari dan diberi pekerdjaan lain sesuai dengan ketjakapan serta bakatnja masing-masing. Perizinan lain diberikan djuga kepada beberapa perusahaan perkebunan (serat).

4 Istirahat karena haidh, hamil dan melahirkan anak.

Pelaksanaan peraturan tentang ini pada umumnja masih menghadapi kesulitan-kesulitan, terutama jang mengenai haidh disebabkan karena antara lain adanja penjalahgunaan oleh buruh-buruh wanita jang berkepentingan.

Adapun jang mengenai istirahat hamil umumnja dapat dilaksanakan dengan memuaskan. Mengenai perhitungan 45 hari sebelum melahirkan anak, sering tidak dapat dipastikan, sekalipun mulainja hari istirahat itu ditentukan oleh bidan/dokter jang bersangkutan.

Mengenai pembajaran upah selama buruh istirahat hamil, terutama perusahaan-perusahaan ketjil, pengusaha pada umumnja paling banjak hanja dapat memenuhi 50% dari semestinja.

5. Istirahat mingguan.

Istirahat mingguan pada umumnja telah dilaksanakan diperkebunan dan perusahaan-perusahaan. Sebagian perusahaan memberikan istirahat mingguan setjara bergilir dan biasanja adalah hari minggu. Bagi pemeluk agama Islam diberikan kesempatan sepatutnja untuk melakukan ibadatnja pada hari Djum'at, pemeluk agama Kristen pada hari Minggu apabila mereka bekerdja.

6. Istirahat tahunan.

Peraturan tjuti tahunan bagi buruh telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinja dalam perusahaan-perusahaan besar.

Sebaliknja perusahaan-perusahaan ketjil/sedang banjak belum mampu memberikan tjuti tahunan. Keberatan itu dikemukakan oleh perusahaan-perusahaan jang banjak mempergunakan tenaga wanita atau jang kurang kuat kapitalnja.

7. Perumahan dan kesehatan/pengobatan.

Diperkebunan banjak dibangun perumahan baru tetapi djumlahnja masih belum mentjukupi kebutuhan. Untuk menampung kekurangan itu diadakan pondok-pondok pandjang jang hanja sedikit kerusakannja untuk dipergunakan sementara waktu.

Dipertambangan dan dibeberapa perusahaan remilling serta penggergadjian kaju didirikan perumahan baru sebagai ganti rumah-rumah jang sudah tua. Buruh jang belum dapat perumahan diberi tundjangan keuangan.

Perusahaan-perusahaan lainnja tidak menjediakan perumahan karena keuangan tidak mengizinkan. Buruh ini tinggal didesa/kota jang berdekatan dengan perusahaan tersebut.

Perusahaan-perusahaan batik di Jogja dan Solo telah mempunjai Balai Kesehatan Buruh.

Perkebunan umumnja mempunjai poliklinik sendiri jang dikepalai oleh djuru-rawat dan apabila buruhnja sakit berat dikirim kerumah sakit perkebunan.

di P.P.N. Baru, jaitu dengan dibentuknja „Badan Pertimbangan P.P.N.-Baru" Pusat dan daerah-daerah. Dalam badan ini duduk wakil-wakil Kementerian Perburuhan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, Buruh, Tani dan Direksi P.P.N. — Baru, dengan wakil Kementerian Perburuhan sebagai ketuanja.

Djuga didaerah-daerah Swatantra tingkat I dimana terdapat tjabang P.P.N. — Baru, didirikan badan sematjam itu dengan diketuai oleh seorang jang ditundjuk oleh kepala Daerah jang bersangkutan.

Badan tersebut bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan mengenai :

1. soal-soal kesedjahteraan buruh dan soal-soal jang menjangkut kepentingan tani;
2. soal-soal jang bersangkutan dengan produktivitas kerdja dalam perusahaan perkebunan kearah kelantjaran serta efisiensi djalannja perusahaan;
3. tjara-tjara penampungan serta penjelesaian keluhan-keluhan buruh dan tani.

Bersamaan dengan terbentuknja badan tersebut diandjurkan pula supaja diperkebunan-perkebunan, pada waktu-waktu tertentu, diadakan musjawarah antara pimpinan perkebunan dan pimpinan buruhnja.

Bentuk kerdjasama jang kedua dengan golongan-golongan funksionil terdapat dalam „Panitia Perkebunan", berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1957, dimana selain wakil-wakil Pemerintah, diikut sertakan pula wakil-wakil dari organisasi buruh, organisasi tani, golongan veteran, dan perusahaan perkebunan besar. Panitia tersebut selain dipusat djuga didirikan didaerah Daswati I Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Atjeh, dan daerah-daerah Swatantra Tingkat I lainnja jang ditundjuk oleh Menteri Pertanian. Panitia Perkebunan ini mempunjai tugas untuk melaksanakan Undang-undang no. 28 tahun 1956 tentang „Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan" dan Undang-undang No. 29 tahun 1956 tentang „Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah perkebunan".

Seperti diketahui perkebunan adalah sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Aksi-aksi Pembebasan Irian Barat dan perginja tenaga-tenaga ahli asing dari Indonesia setjara se-

rentak menimbulkan banjak soal jang perlu segera dipetjahkan. Dengan terbentuknja Badan/Panitia tersebut, Buruh dan Tani diikut-sertakan dalam usaha untuk melantjarkan djalannja perkebunan-perkebunan tersebut.

D. NORMA-NORMA PERBURUHAN (LABOUR STANDARDS).

Norma-norma perburuhan menetapkan ketentuan tentang : djam kerdja, waktu istirahat, kerdja anak-anak dan wanita, tempat kerdja, kesehatan dan keselamatan kerdja, perumahan buruh dan sebagainja sedikitnja mengenai sjarat-sjaratt minimumnja apabila hal itut mengenai sjarat-sjarat jang harus diadakan oleh pihak pengusaha dan sjarat-sjarat maksimumnja djika mengenai beban jang harus didjalankan oleh pihak buruh.

Oleh karena norma-norma perburuhan itu rapat hubungannja dengan daja kemampuan manusia maka penentuannja tidak lepas dari pengawasan internasional. Pada umumnja harus didjaga agar norma-norma perburuhan itu ditentukan dan dilaksanakan sesuai dengan martabat manusia.

1. Djam kerdja.

Dalam tahun 1937/1938 djam kerdja bagi buruh Indonesia ditentukan sebanjak 60 djam seminggu, dalam periode 1937/1949 diubah mendjadi 54 djam seminggu, kemudian setelah berlakunja Undang-undang Kerdja 1948 pada tahun 1951 bagi seluruh Indonesia, djam kerdja ditentukan 40 djam seminggu.

Tetapi hal itu bukanlah berarti bahwa pekerdjaan lebih dari 40 djam seminggu dilarang. Untuk kepentingan negara dan masjarakat pada umumnja instansi jang berwenang (Djawatan Pengawasan Perburuhan) dapat memberi izin penjimpangan. Pada umumnja izin penjimpangan itu paling banjak diberikan pada perusahaan-perusahaan jang memberi djasa, kemudian kepada industri bahan makanan, industri tekstil (dalam periode 1955 — 1959) dan kepada Perusahaan-perusahaan pertanian.

Selandjutnja ada ketentuan bahwa setelah mendjalankan pekerdjaan selama 4 djam terus-menerus, harus diadakan waktu istirahat sedikitnja ½ djam dan tiap minggu diadakan 1 hari istirahat.

Pada umumnja diperusahaan-perusahaan jang besar dan sedang, pelaksanaan pasal waktu kerdja telah didjalankan dengan baik. Hanja untuk pekerdjaan jang menurut sifatnja sukar memenuhi waktu kerdja dan waktu istirahat dan pula merupakan perusahaan vital masih diberikan dispensasi.

Disamping masih ada kedjadian-kedjadian jang menjimpang dari pasal tersebut jang memang terpaksa harus diadakan, masih ada pekerdjaan-pekerdjaan jang bertimbun-timbun dan lekas harus diselesaikan jang tidak dapat diketahui sebelumnja. Hal itu terdapat diperusahaan pelabuhan, transpor didarat dan diair, pabrik-pabrik dimana ada kerusakan-kerusakan dibagian-bagian jang penting.

2. Kerdja anak.

Undang-undang kerdja 1948 menentukan anak-anak (14 tahun kebawah) tidak boleh mendjalankan pekerdjaan. Ketentuan itu menurut pemeriksaan Djawatan Pengawasan Perburuhan masih belum dapat dilaksanakan. Ternjata masih terdapat anak-anak umur 13 tahun bekerdja diperkebunan, diperusahaan sigaret, batik, perak, gelas, untuk memenuhi kebutuhan penghidupan orang tuanja sehari-hari.

3. Kerdja malam wanita.

Kerdja malam wanita pada umumnja telah ditaati peraturannja. Dalam pada itu perizinan oleh instansi jang berwenang telah diberikan kepada beberapa perusahaan tekstil. Izin kepada perusahaan-perusahaan ini diberikan dengan pengertian bahwa setjara berangsur-angsur harus dikurangi tanpa mengakibatkan pelepasan, misalnja dipindahkan kebagian siang hari dan diberi pekerdjaan lain sesuai dengan ketjakapan serta bakatnja masing-masing. Perizinan lain diberikan djuga kepada beberapa perusahaan perkebunan (serat).

4 Istirahat karena haidh, hamil dan melahirkan anak.

Pelaksanaan peraturan tentang ini pada umumnja masih menghadapi kesulitan-kesulitan, terutama jang mengenai haidh disebabkan karena antara lain adanja penjalahgunaan oleh buruh-buruh wanita jang berkepentingan.

Adapun jang mengenai istirahat hamil umumnja dapat dilaksanakan dengan memuaskan. Mengenai perhitungan 45 hari sebelum melahirkan anak, sering tidak dapat dipastikan, sekalipun mulainja hari istirahat itu ditentukan oleh bidan/dokter jang bersangkutan.

Mengenai pembajaran upah selama buruh istirahat hamil, terutama perusahaan-perusahaan ketjil, pengusaha pada umumnja paling banjak hanja dapat memenuhi 50% dari semestinja.

5. Istirahat mingguan.

Istirahat mingguan pada umumnja telah dilaksanakan diperkebunan dan perusahaan-perusahaan. Sebagian perusahaan memberikan istirahat mingguan setjara bergilir dan biasanja adalah hari minggu. Bagi pemeluk agama Islam diberikan kesempatan sepatutnja untuk melakukan ibadatnja pada hari Djum'at, pemeluk agama Kristen pada hari Minggu apabila mereka bekerdja.

6. Istirahat tahunan.

Peraturan tjuti tahunan bagi buruh telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinja dalam perusahaan-perusahaan besar.

Sebaliknja perusahaan-perusahaan ketjil/sedang banjak belum mampu memberikan tjuti tahunan. Keberatan itu dikemukakan oleh perusahaan-perusahaan jang banjak mempergunakan tenaga wanita atau jang kurang kuat kapitalnja.

7. Perumahan dan kesehatan/pengobatan.

Diperkebunan banjak dibangun perumahan baru tetapi djumlahnja masih belum mentjukupi kebutuhan. Untuk menampung kekurangan itu diadakan pondok-pondok pandjang jang hanja sedikit kerusakannja untuk dipergunakan sementara waktu.

Dipertambangan dan dibeberapa perusahaan remilling serta penggergadjian kaju didirikan perumahan baru sebagai ganti rumah-rumah jang sudah tua. Buruh jang belum dapat perumahan diberi tundjangan keuangan.

Perusahaan-perusahaan lainnja tidak menjediakan perumahan karena keuangan tidak mengizinkan. Buruh ini tinggal didesa/kota jang berdekatan dengan perusahaan tersebut.

Perusahaan-perusahaan batik di Jogja dan Solo telah mempunjai Balai Kesehatan Buruh.

Perkebunan umumnja mempunjai poliklinik sendiri jang dikepalai oleh djuru-rawat dan apabila buruhnja sakit berat dikirim kerumah sakit perkebunan.

8. Pendidikan dan hiburan untuk buruh dan keluarganja.

Diperkebunan umumnja disediakan sekolah rendah dan pemberantasan-buta huruf. Dibeberapa perkebunan hal itu diusahakan oleh buruh sendiri.

Pada waktu-waktu tertentu perkebunan mendatangkan bioskop keliling. Kadang-kadang wajang-orang, ketoprak, ronggeng dan sebagainja, djuga diadakan olah-raga sepak-bola.

∴

V. PERIODE PANTJAWARSA MANIPOL (1959-1964).

Pada masa Revolusi Indonesia berada dalam periode Pantjawarsa Manipol tahun 1959-1964 itu banjaklah terdjadi peristiwa-peristiwa nasional jang sangat menentukan arah dan tjontoh perkembangan masalah perburuhan.

Disamping sanering uang dalam tahun 1959 jang akibatnja mengganggu ketenangan masjarakat perburuhan karena banjak perusahaan jang menderita kekurangan uang tunai untuk membajar gadji/upah buruh ditjetuskanlah: Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 untuk kembali kepada Undang-undang Dasar '45, dan Manifesto Politik jang mengembalikan perdjoangan Bangsa Indonesia kepada rel jang sebenarnja, Trikora pada achir tahun 1961 jang dapat mengembalikan Irian Barat kepangkuan Republik Indonesia, Konperensi Persiapan K.B.A.A. jang meletakkan dasar-dasar kerdjasama bagi buruh Afrika dan Asia, serta Dekon pada tanggal 28 Maret 1963 jang dipergunakan sebagai landasan perdjoangan ekonomi untuk menudju kepada masjarakat Sosialisme Indonesia. Achirnja, suatu peristiwa penting jang hasil-hasilnja dapat memberi gambaran jang njata mengenai tenaga kerdja di Indonesia setjara menjeluruh, jalah diselenggarakannja Sensus Penduduk dalam tahun 1961.

Dibanding dengan periode-periode sebelumnja dalam periode Pantjawarsa Manipol ini arah dan tudjuan Revolusi Indonesia mendjadi lebih djelas; djuga mendjadi lebih djelas bagi masing-masing dimana tempat mereka dalam perdjoangan untuk memperkuat ketahanan dan mempertjepat proses revolusi itu. Manifesto Politik menjatakan bahwa buruh adalah sokongan revolusi disamping tani. Dekon kemudian menentukan bahwa diantara 5 tindakan Pemerintah jang akan diambil untuk melaksanakan Dekon itu, satu diantaranja jalah: „Usaha penjempurnaan labour force harus terus-menerus dilakukan dengan menjempurnakan statistical, technical dan managerial skill, serta berbagai matjam job-training" (tindakan ke-empat).

Dalam periode-periode jang lampau perdjoangan untuk mensukseskan Revolusi Indonesia masih banjak dihinggapi salah pengertian, salah urus dan salah pimpinan hingga kekuatan nasional, sebagai akibat dari pada sistim liberal, dalam keadaan terpetjah belah. Situasi itu djuga tergambar dalam perkembang-

an masjarakat perburuhan, chususnja dalam perkembangan gerakan buruh.

Sebaliknja dalam periode Pantjawarsa Manipol ini keragu-raguan tentang arah-tudjuan revolusi makin berkurang, kepertjajaan pada diri sendiri makin lama makin menebal, makin djelaslah siapa lawan dan siapa kawan Revolusi, serta ide Nasakom makin lama makin banjak direalisasikan dimasjarakat perburuhan.

A. MASALAH TENAGA KERDJA.

Sampai permulaan periode Pantjawarsa Manipol ini djumlah tenaga kerdja di Indonesia belum dapat diperkirakan selajaknja.

Hasil-hasil sementara sensus tahun 1961 jang diperoleh dari pengolahan 1% sample dari sensus tersebut memberi gambaran lebih djelas hingga dapat didjadikan pegangan sementara untuk menjusun perkiraan-perkiraan selandjutnja.

Angkatan Kerdja (Labour force) seluruhnja berdjumlah 34.578.234 orang atau 35,9% dari seluruh penduduk. Menurut angka-angka ini djumlah penganggguran di Indonesia pada tahun 1961 ada 5,6% dari angkatan kerdja atau 1.869.620 orang.

Perintjian-perintjian angka tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut daerah.

Djawa dan Madura	1.270.886 orang	65 %
Daerah-daerah lainnja	598.734 „	35 „
Seluruh Indonesia	1.869.620 orang	100 %

Menurut kelamin.

Laki-laki	1.203.106 orang	64 %
Wanita	666.514 „	36 „
Seluruh pengangguran	1.869.620 orang	100 %

Menurut umur.	laki-laki	wanita	% dari djumlah pengangguran
10 — 14 tahun	233.115	187.169	22 %
15 — 19 „	431.294	206.071	34 „
20 — 24 „	243.859	82.546	17 „

1. Usaha penjaluran pengangguran.

Departemen Perburuhan c.q. Direktorat Penempatan Tenaga menjalurkan pengangguran melalui usaha-usaha antar kerdja, pemindahan tenaga, penjelenggaraan pekerdjaan-pekerdjaan umum/darurat jang dapat membuka kesempatan kerdja.

Antar Kerdja. Tahun	Pentjari kerdja terdaftar	Pentjari kerdja ditempatkan	
1960	156.668	32.662	(19,7 %)
1961	175.904	39.488	(22,4 „)
1962	162.956	54.347	(33,3 „)
1963	127.769	51.006	(40 „)
1964 (sementara)	98.021	35.571	(36 „)

Tenaga kerdja dipindahkan keluar Djawa/Madura.

Tahun	Djumlah tenaga kerdja
1960	13.592
1961	11.201
1962	12.380
1963	21.099
1964	15.174

Dalam djumlah tersebut tidak terhitung anggota keluarga jang ikut serta. Dengan keluarganja, sedjak tahun 1953 telah ada sebanjak 157.942 djiwa dipindahkan keluar Djawa/Madura.

Projek Padat Karya Indramaju.

Disamping usaha-usaha tersebut diatas serta pemberian pekerdjaan darurat istimewa kepada daerah pedesaan, Departemen Perburuhan menjelenggarakan usaha Padat Karya Indramaju.

Menurut "Labour Force sample survey" jang diadakan oleh Departemen Perburuhan dalam tahun 1958 untuk daerah Djawa dan Madura, didaerah pedesaan di Djawa dan Madura sebanjak 11.252,9 djuta djam kerdja hilang tidak bisa dipergunakan, karena kekurangan kesempatan kerdja.

Padat Karya Indramaju adalah pilot projek pentjegahan bandjir jang bersifat „labour intensive" hingga dengan mentjegah bandjir itu sekaligus kepada orang pedesaan diberi pekerdjaan untuk mengisi waktu jang menganggur (idle) dengan djalan membuat perbaikan-perbaikan tanggul-tanggul disungai-sungai didaerah Indramaju.

Sekalipun projek Padat Karya Indramaju itu belum merupakan penjelesaian masalah setengah pengangguran setjara menentukan, namun djika projek sematjam ini dilakukan setjara

besar-besaran dimana-mana, akan merupakan usaha jang berguna sekali bagi para petani setengah penganggur itu.

Projek Padat Karya Indramaju untuk pentjegahan bandjir itu dilaksanakan setjara gotong-rojong dengan instansi jang berkepentingan dengan pentjegahan bandjir:

1. Pamong Pradja, bertindak sebagai koordinator projek.
2. Departemen Perburuhan untuk pengerahan, seleksi tenaga kerdja, dan peningkatan produktivitas kerdja.
3. Pekerdjaan Umum dan Tenaga, sebagai unsur pengawas teknis dari projek.
4. Operasi Karya Angkatan Bersendjata jang membantu dengan pengangkutan, alat-alat besar dan fasilitas-fasilitas, serta
5. Front Nasional, untuk mendapatkan social support dan social control.

Pengupahan tidak dilaksanakan berupa uang tetapi berupa bahan, jaitu djagung pada masing-masing patjeklik. (3 kg ratarata sehari).

Hasil Padat Karya Indramaju selama tahun 1964 adalah:

1. Djumlah projek jang telah diselesaikan sebanjak 13 buah.
2. Djumlah hari kerdja seluruhnja jang dikerahkan adalah sebanjak 335.426 man-days.
3. Djumlah tanah jang dipindahkan guna pembuatan/perbaikan tanggul adalah sebanjak 667.153 m^3.

Dalam musim patjeklik projek di Losarang misalnja dapat diberikan pekerdjaan kepada tidak kurang dari 2.200 orang.

Perlu didjelaskan bahwa dengan pelaksanaan projek Padat Karya di Indramaju itu baru 10% dari rentjana keseluruhannja jang diselesaikan.

2. **Penjuluhan pemilihan Djabatan** (Vacational guidance).

Dalam periode ini telah dapat didjalankan testing psychology terhadap sedjumlah pentjari kerdja sebagai berikut:

Tahun	S.R.	S.L.P.	S.L.A.	Akademi/ P.T.	Djumlah	
1960	731	991	662	—	2.284	(42 perusahaan/ instansi
1961	2.040	891	402	—	4.118	(41 perusahaan/ instansi
1962	266	330	175	—	772	(38 perusahaan/ instansi
1963	560	299	241	—	1.100	(24 perusahaan/ instansi
1964	406	465	359	37	1.267	(32 perusahaan/ instansi

Dalam tahun 1960 dipakai performance test untuk mengetik: penilaian diolah dari sampling hasil dari daerah. Dalam tahun 1962 dipergunakan Wechsler Bellevue test (bagian verbaalnja), demikian pula ditjoba Progressive Matrices test (untuk mengukur berfikir lulusan S.M.A.). Dalam tahun mulai diterdjemahkan bagian 4 dari buku General Aptitude Test Battery untuk mengukur perbendaharaan kata (vocabulary). Dalam tahun 1963 dan 1964 mulai dipergunakan metode warit djawaban (employment counseling) bagi anak-anak S.M.A.

3. Latihan kerdja.

Latihan kerdja sebagai usaha meningkatkan keahlian/kedjuruan mentjari kerdja dalam periode ini adalah sebagai berikut (1960-1964).

Kedjuruan Pokok :	Pengikut kursus :
1. Administrasi perdagangan	197 orang
2. Pengerdja kaju, bangunan, batu dan saniter	373 „
3. Pengerdja logam	408 „
4. Permesinan	528 „
5. Perlistrikan radio dan TV	597 „
6. Keradjinan dan djabatan bebas	69 „
7. Agraria dan mekanisasi	1239 orang
Djumlah	7337 orang

Djumlah tersebut dalam periode 1955 -- 1959 adalah 2773 orang hingga hasil latihan kerdja naik mendjadi 264% dalam periode ini.

Mengenai latihan dalam djabatan (Training Within Industry) jang telah dimulai dalam periode 1955 — 1959, dalam periode 1959 — 1964 ini memberi gambaran sebagai berikut:

Kegiatan	1961	1962	1963	1964
Master Trainers dan Trainers	105	117	114	67
Pengawas terlatih	3.754	3.762	4.833	2.311

4. Meningkatkan usaha produktivitas nasional.

Salah satu usaha terpenting untuk menaikkan taraf kesedjahteraan rakjat ialah meningkatkan produksi nasional, baik mengenai djumlah (kwantitatif) maupun mengenai mutunja (kwalitatif). Dalam hal masjarakat sedang menghadapi keku-

rangan modal, devisa, dan tenaga terlatih, maka usaha meningkatkan produktivitas itu adalah tindakan paling tepat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut diatas.

Usaha mempertinggi produktivitas itu diarahkan kepada perluasan intensitas kerdja, jaitu dengan menitik-beratkan pada:

1. Mempertinggi mutu pengusahaan (management).
2. meningkatkan produktivitas mesin-mesin/alat-alat produksi dan bahan-bahan jang berarti pula penghematan devisa.
3. Penggunaan tenaga terlatih setjara efisien.
4. Mempergiat dan memperluas pendidikan dan latihan kerdja jang tidak terlatih.

Dengan usaha-usaha itu maka volume barang dan djasa dalam masjarakat bertambah, sedangkan tenaga, alat, dan bahan tidak perlu bertambah karena kurangnja modal dan devisa, maka harga dapat ditekan kenaikannja.

Untuk melaksanakan hal itu maka "Lembaga Produktivitas" (kini bernama „Lembaga Pembinaan Buruh dan Pimpinan Perusahaan") semendjak bulan Nopember 1958 sampai pertengahan 1959 telah mengadakan seminar produktivitas jang kemudian disusul dengan projek-projek demontrasi pada beberapa perusahaan pertjetakan, radio, transformer assembling, pabrik barang-barang pantji, perusahaan elektro impor dan pabrik badju kaos di Djakarta.

Projek demonstrasi produktivitas itu diselenggarakan dengan bantuan ahli-ahli luar negeri dan ditudjukan pada:

1. Perbaikan tataruang kerdja (plant layout).
2. Memperbaiki tjara mengangkat dan memindahkan (material handling).
3. Memperbaiki mutu (quality control).
4. Mengurangi pemborosan bahan-bahan.

Hasil-hasil jang ditjapai dalam projek demonstrasi produktivitas itu menundjukkan kenaikan produksi (output) sebesar 33½ — 90% perusahaan-perusahaan tersebut diatas.

Untuk dapat melaksanakan projek produktivitas tersebut setjara teratur maka „Lembaga Pembinaan Buruh dan Pimpinan Perusahaan" (dulu Lembaga Produktivitas) mengadakan latihan-latihan bagi buruh dan pimpinan perusahaan dengan hasil-hasil sebagai berikut:

Kegiatan	1958 s/d 1960	1961	1962	1963	1964	Djumlah
Pembinaan Work study						
a. Pembinaan Managers dalam Work Simplification	148	10	—	—	27	185
b. Ahli teknisi produktivitas	121	—	27	—	—	148
Pembinaan Azas-azas Management						
a. Masters Trainers/Trainers	—	—	12	—	8	20
b. Managers	—	—	164	635	536	1.335
Seminar Management						
Managers jang mengikuti	—	24	40	310	131	505
Djumlah	269	34	243	945	702	2.193

B. MASALAH HUBUNGAN PERBURUHAN.

1. Perselisihan Perburuhan.

Pentjetusan gagasan Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin dalam bulan-bulan pertama tahun 1959, disusul oleh Dekrit Presiden 5 Djuli untuk kembali pada Undang-undang Dasar '45 untuk kemudian disusun penegasannja dalam Manifesto Politik terasa dan terlihat pengaruhnja pada penjelesaian perselisihan perburuhan. Dengan penertiban-penertiban jang dilakukan dalam bidang keamanan dan perekonomian sistim ekonomi liberal lambat laun mendjurus kearah sistim ekonomi terpimpin.

Perselisihan perburuhan dalam periode 1959 — 1964 ini memberi gambaran sebagai berikut.

Perselisihan Perburuhan.
1960 — 1964)

Tahun	Perselisihan	Buruh bekerdja pada perusahaan jang bersangkutan
1960	1.096	833.200
1961	1.159	900.000
1962	914	672.300
1963	809	727.300
1964	341	349.800

Dari angka-angka tersebut ternjata, bahwa djumlah perselisihan-perselisihan perburuhan mendjadi djauh berkurang djika dibandingkan dengan periode-periode jang telah lalu. Selama masih ada buruh-buruh bekerdja, perselisihan perburuhan tetap akan ada hanja sadja penjelesaiannja akan ditjapai dengan tjepat bila pihak-pihak jang berselisih mengetahui fungsi masing-masing dalam perdjoangan menjelesaikan revolusi sekarang ini. Hal ini tampaknja makin diinsjafi oleh pihak-pihak jang bersangkutan.

Djika djumlah perselisihan dalam tahun 1959 adalah 100% maka djumlah perselisihan dalam tahun-tahun selandjutnja adalah sebagai berikut.

1959	1960	1961	1962	1963	1964
100%	36%	36,5%	32,2%	28,5%	12,1%

Adapun persoalan jang paling banjak mengakibatkan timbulnja perselisihan dalam periode ini jalah pemutusan hubungan kerdja (35 — 45%), upah (14 — 30%) dan djaminan sosial (4 — 22%).

Mengenai djumlah pemogokan, dalam tahun-tahun inipun tampak menurun.

Statistik pemogokan.
(1960 — 1964)

Tahun	Pemogokan	Buruh kerdja	Buruh mogok	Djam kerdja hilang
1960	64	108.000	14.600	306.500
1961	66	214.700	63.100	738.900
1962	34	68.300	12.200	164.000
1963	54	68.600	25.100	395.000
1964	18	5.700	5.700	68.700

Dalam periode, dimana sektor Pemerintah meliputi bagian besar dari kegiatan ekonomi perselisihan-perselisihan perburuhan dalam sektor-sektor tersebut tidak banjak mengakibatkan pemogokan-pemogokan, kaum buruh makin sadar, bahwa jang penting bukanlah mempertahankan dan mempergunakan hak mogok, tetapi jang lebih penting ialah mentjapai tudjuan mereka dengan tidak mengurangi produksi agar tidak menghambat djalannja revolusi. Djuga pihak pengusahapun menginsjafi akan tuntutan-tuntutan kaum buruh itu dan sikap bagaimana harus diambil dalam mentjapai penjelesaian jang sebaik-baiknja. Kedua belah pihak, buruh dan pengusaha sebagai peserta dalam pelaksanaan produksi bersedia setjara konsekwen melaksana-

kan Trikora jang dikeluarkan dalam tahun 1961 dan Dwikora jang ditjetuskan dalam tahun 1964. Saling pengertian antara buruh pengusaha itu berarti bahwa mereka benar-benar berusaha agar produksi tetap harus berdjalan lantjar dalam keadaan ekonomi jang bagaimana sukarnjapun demi suksesnja revolusi kita.

Dikeluarkannja Undang-undang No. 12 tahun 1964 tentang pemutusan Hubungan Kerdja diperusahaan swastapun tidak sedikit pengaruhnja pada ketenangan bekerdja. Sedjak 1950 kaum buruh menuntut supaja perundang-undangan kolonial diganti, hal mana diperkuat lagi dalam lampiran A daripada keputusan M.P.R.S. dimana dari Pemerintah diharap agar "Regeling Ontslagrecht voor bepaalde niet Europese arbeiders" (Stbl. 1941 No. 396) segera ditjabut dan diganti dengan undang-undang jang progresif. Peraturan ini semendjak dulu mendjadi sumber dari banjak perselisihan perburuhan. Karena untuk mengadakan pemutusan hubungan kerdja sekarang perlu mendapat izin dari Panitia Daerah atau Pusat, maka diharapkan bahwa ketegangan jang terdjadi karena pemutusan hubungan kerdja dapat dikurangi seminim-minimnja hal mana akan mempunjai pengaruh baik pada djalannja produksi.

2. Kerdjasama Buruh dan Pimpinan dalam Perusahaan.

Dalam periode 1956 — 1959 telah dilaporkan, bahwa disementara perusahaan-perusahaan negara, jaitu dikalangan P.P.N. Baru telah mulai dilaksanakan ide kerdjasama buruh dan pimpinan perusahaan dengan dibentuknja „Badan Pertimbangan P.P.N. Baru" dipusat dan daerah-daerah dengan tugas memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pimpinan perusahaan mengenai soal-soal kesedjahteraan buruh, produktivitas kerdja serta keluhan-keluhan buruh dan tani. Hal ini merupakan langkah pertama dalam merealisasi gagasan kegotongrojongan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi diperusahaan-perusahaan jang dikuasai oleh Pemerintah. Melihat perintjian tugas badan itu njatalah bahwa perkembangan kerdjasama buruh dan pimpinan dalam perusahaan masih dalam tingkat:

(1) Mengenai sebagian soal-soal jang mendjadi hak (kesedjahteraan dan keluhan-keluhan) dan kewadjiban (tingkat produktivitas) buruh. Ikut serta dalam penentuan hak dan kewadjiban pimpinan perusahaan belum disinggung-singgung.

(2) Sifatnja adalah tegas-tegas memberi pertimbangan, bukan ikut serta (participation) atau pengawasan (control).

(3) Baru dilaksanakan dalam perusahaan-perusahaan asing jang diambil-alih; diperusahaan-perusahaan negara lainnja belum.

Dalam tahun 1960, jaitu dalam Djarek Presiden/Pemimpin Besar Revolusi menjerukan supaja disemua perusahaan-perusahaan negara dibentuk dewan-dewan jang berkewadjiban membantu pimpinan perusahaan untuk mempertinggi kwantitas dan kwalitas produksi, serta untuk mengawasi kekajaan negara, seruan mana kemudian oleh Pemerintah dituang dalam bentuk Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 45 tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan.

Falsafah pembentukan dewan perusahaan ialah mengikutsertakan unsur-unsur didalam perusahaan dan unsur-unsur masjarakat disekitarnja kedalam perusahaan hingga perusahaan dengan segala kekajaannja jang mendjadi milik negara dan rakjat dapat aman dan berdjalan lantjar.

Masjarakat perlu ikut serta bertanggung djawab dan mengawasi djalannja perusahaan-perusahaan negara. Kata kwalitas berarti pengawasan intern tentang mutu produksi, sedangkan kwantitas berarti „targeting", jaitu mengusahakan agar rentjana jang telah dibuat itu benar-benar dapat ditjapai.

Tudjuan dewan perusahaan adalah menjelenggarakan ekonomi gotong-rojong atau ekonomi kolektif antara para peserta produksi dan masjarakat. Untuk dapat melaksanakan ini tentu diperlukan tjara pengusahaan terbuka (open management). Dalam dewan-dewan perusahaan itu pimpinan perusahaan harus dapat bertindak sebagai management Manipolis dan buruh benar-benar sebagai sokoguru revolusi. Untuk melaksanakan ini diperlukan adanja perasaan disiplin sosial atau tanggung djawab sosial dari semua fihak dalam dewan perusahaan itu. Djika dewan-dewan perusahaan sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan jang berlaku dapat berdjalan sebagaimana mestinja, maka akan tertjapailah adanja suatu pengusahaan (management) tanpa penindasan, dimana terdapat integrasi antara pimpinan dan para pekerdja sebagaimana dinjatakan dalam Dekon pasal 25.

Kesukaran-kesukaran jang dialami dalam periode pembentukan dewan-dewan perusahaan antara lain jalah:

(1) mengenai representativitas organisasi-organisasi buruh jang harus mengadjukan wakil-wakilnja;
(2) tentang kwalifikasi tjalon-tjalon jang harus memenuhi sjarat-sjarat teknis dan soal tertentu.

(3) psychologis, politis dan juridis. Sering dirasakas bahwa pimpinan masih kurang ichlas untuk memberi wewenang kepada pekerdjaannja.

Masih ada pula dipertahankan hubungan feodal seperti antara tuan dan pelajan (warisan kolonial).

Sampai achir tahun 1964 telah dapat dilaporkan terbentuknja 22 Dewan Perusahaan tingkat pusat serta 635 Dewan Perusahaan tingkat perusahaan negara dari 656 perusahaan negara jang ada sekarang (97%).

C. PERKEMBANGAN SINGKAT MASALAH PENGUPAHAN.

Perkembangan pengupahan di Indonesia dapat dibagi dalam 2 periode, jaitu periode sebelum dan periode sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

1. Periode pendjadjahan.

Dalam masa pendjadjahan pada umumnja berlakulah prinsip liberal kapitalistis, jaitu upah ditentukan dipasar kerdja berdasarkan atas permintaan dan penawaran. Oleh karena dalam pasar „bebas" itu pada hakekatnja golongan kapitalis jang berkuasa sedang pada pihak tenaga kerdja terdapat kelebihan penawaran karena adanja tenaga kerdja jang melimpah-limpah maka tingkat upah pada umumnja adalah rendah. Keadaan jang tidak menguntungkan itu ditambah dengan tidak adanja peraturan-peraturan jang melindungi golongan buruh serta tidak adanja kesempatan bagi kaum buruh untuk menjusun diri dalam gerakan buruh dan membela kepentingan anggota-anggotanja.

Ada peraturan-peraturan kolonial seperti jang dimuat dalam „Arbeidsregeling Nijverheidsbedrijven Stbl. 1941", akan tetapi peraturan ini baru dikeluarkan pada waktu pendjadjahan Belanda hampir menghadapi adjalnja hingga pengawasannja tidak didjalankan.

Selain penerimaan upah jang rendah itu buruh sering masih harus menjerahkan sebagian dari upahnja kepada mandor-mandor jang mempunjai kekuasaan dalam menentukan penerimaan upah.

Peraturan-peraturan jang dikeluarkan untuk mengatur pengupahan bersifat diskriminatif, karena selalu ada 2 matjam, jaitu peraturan-peraturan umum, jang biasanja hanja berlaku bagi golongan Eropah dan mereka jang disamakan dengan golongan itu serta peraturan-peraturan jang berlaku bagi buruh

Indonesia. Untuk jang terachir ini biasanja dibubuhi kata-kata tambahan „toepasselijkheidsverklaring", „voor bepaalde niet Europese arbeiders", „werving van Indonesiers", dan sebagainja.

Peraturan-peraturan pengupahan dizaman sebelum Perang Dunia II, baik jang berlaku bagi semua golongan ataupun jang berlaku bagi hanja segolongan, biasanja hanja bersifat juridis dan ditudjukan untuk menentukan hak buruh untuk mendapatkan serta kewadjiban pengusaha untuk membajar upah dalam rangka hubungan kerdja dan tidak mengenai djumlah atau besarnja upah itu sendiri.

Peraturan-peraturan itu meliputi soal-soal:

(1) djangka waktu pengupahan,
(2) tjara-tjara pembajaran upah pada waktu buruh tak dapat mendjalankan pekerdjaan (sakit, hamil, melahirkan anak dan sebagainja),
(3) tjara-tjara pembajaran sesuai dengan sifat upah (djam-djaman, harian, mingguan, bulanan, borongan, dan sebagainj),
(4) pembajaran denda oleh buruh kepada madjikan,
(5) pemotongan-pemotongan upah oleh madjikan,
(6) penggunaan upah oleh buruh.

Dari sifat peraturan sebelum Perang Dunia II itu ternjata, bahwa perhatian pada waktu itu dipusatkan pada soal-soal hukum, jaitu mengenai hak dan kawadjiban menerima dan membajar upah.

Tidak ada peraturan jang ditudjukan untuk meningkatkan nilai-nilai kehidupan (politik, ekonomi dan sosial) atau ditudjukan untuk meningkatkan martabat manusia. Sebaliknja dalam alam pendjadjahan pihak pendjadjah selalu berusaha menghalang-halangi tiap perobahan dan menentang tiap kemadjuan karena hal itu dianggap dapat menggojangkan kedudukkan pendjadjah. Tuntutan kaum buruh diluar, dan chususnja fraksi nasional didalam Dewan Rakjat (Volksraad) untuk peraturan upah minimum selalu gagal.

2. Periode sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

Revolusi Indonesia mentjiptakan nilai-nilai baru dalam segala bidang kehidupan masjarakat. Djuga bidang pengupahan dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan baru itu.

Semendjak Proklamasi Kemerdekaan penentuan pengupahan dipengaruhi oleh dua matjam perkembangan:

(1) Perkembangan idiil: peningkattan martabat manusia Indonesia kepada tingkat jang lebih lajak (Undang-undang Dasar pasal 27 ajat 2) hingga sesuai dengan kedudukan warganegara Indonesia jang merdeka dan berdaulat.

(2) Perkembangan physik: perobahan harga jang terus-menerus jang merupakan hambatan besar bagi usaha-usaha peningkatan tersebut dalam sub 1.

Aspirasi untuk meningkatkan martabat manusia Indonesia itu antara lain tertjermin dengan timbulnja kebiasaan mengadakan pembajaran-pembajaran pengupahan sebagai berikut:

(1) Tundjangan-tundjangan keluarga, meliputi semua lapisan dan golongan masjarakat tenaga kerdja; prinsip bahwa hanja kepala keluarga jang bekerdja sadjalah jang berhak menerima sesuatu pembajaran, makin lama makin dilepaskan.
(2) Pembajaran/tundjangan kepada buruh pada waktu sakit, haidh, melahirkan anak, pada waktu-waktu mana mereka berhalangan untuk bekerdja. Dengan demikian prinsip ,no work no pay" makin lama makin ditinggalkan. Pemberian tundjangan itut djuga meluas pada hari tua (pensiun).
(3) Keharusan pembajaran upah lembur sedikitnja 1½ á 2 kali upah waktu kerdja biasa bagi mereka jang mengerdjakan kerdja lembur.
(4) Keharusan pembajaran tundjangan/gratifikasi (Lebaran dan Natal) jang pada permulaannja hanja bersifat kerelaan („exgratia") pihak pengusaha.

Sementara itu timbul suatu perkembangan dalam sektor ekonomi jang banjak mempengaruhi tjara-tjara penentuan upah, jaitu inflasi jang tertjermin pada perobahan-perobahan tjepat dibidang harga dan biaja penghidupan. Dapatlah dikemukakan bahwa pada umumnja perobahan-perobahan harga itu dialami oleh seluruh dunia sesudah perang Dunia II, disatu negeri lebih tjepat atau lebih lambat dari pada dinegeri lainnja.

Djika diperhatikan angka-angka statistik jang diumumkan oleh Biro Pusat Statistik mengenai upah dan harga semendjak tahun 1950, baik angka-angka indeks upah maupun angka-angka indeks harga menundjukkan ketjenderungan untuk naik, tetapi kenaikan indeks harga adalah lebih tjepat dari pada kenaikan indeks upah. Perbedaan antara kenaikan indeks harga dan kenaikan indeks upah itu berarti bahwa daja beli upah makin lama makin berkurang.

Departemen Perburuhan semendjak tahun 1957 telah mengadakan penjelidikan-penjelidikan perkembangan biaja penghidupan atas dasar 83 bahan keperluan hidup di Djakarta dan di Surabaja sebagai langkah pertama. Penjelidikan-penjelidikan itu memberi gambaran sebagai berikut.

Perkembangan kenaikan indeks upah dan indeks 83 bahan keperluan hidup di Djakarta (tahun 1958 = 100).

Matjam indeks	1958	1959	1960	1961	1962	1963
Upah buruh rendahan terlatih	100	103	122	145	233	485
Biaja penghidupan berdasarkan 83 bahan	100	143	200	205	670	1.428

Perbandingan perkembangan 2 matjam indeks itupun menundjukkan bahwa kenaikan biaja penghidupan lebih tjepat djika dibandingkan dengan kenaikan upah hal mana berarti turunnja nilai riil atau daja beli upah.

Selandjutnja Departemen Perburuhan terus-menerus mengadakan penjelidikan-penjelidikan mengenai biaja hidup dan pengupahan jang antara lain memberi gambaran sebagai berikut:

(1) 19577/1958. Family Living Survey di Djakarta atas 1000 keluarga buruh untuk mendapatkan dasar-dasar pengeluaran dan seterusnja untuk menjusun indeks harga-harga untuk konsumen. Penjelidikan itu menundjukkan bahwa perbandingan pengeluaran untuk keperluan (a) makanan, (b) perumahan, (c) pakaian dan (d) lain-lain sama dengan 63,41 : 10,77 : 8,51 : 17,31.

(2) 1959. Family Living Survey di Surabaja atas 600 keluarga buruh.

Perbandingan pengeluaran-pengeluaran untuk (a) makanan, (b) perumahan, (c) pakaian dan (d) lain-lain adalah sama dengan 62,54 : 12,78 : 7,42 : 16,26.

(3) 1959. House Hold Living Survey di Wurjantoro (daerah Surakarta) atas 123 rumah tangga guna mengetahui kehidupan didaerah pedusunan.

Dari penjelidikan itu diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Rata-rata penghasilan tiap rumah tangga setahun sama dengan Rp. 5.269,— jang diperintji:

a. penghasilan bersih dari tanah: 71%.

b. penghasilan lain-lain: 29%.

Rata-rata pengeluaran tiap rumah setahun sama dengan Rp. 4.849,— Perbandingan pengeluaran unutk (a) makanan, (b) perumahan, (c) pakaian, dan (d) lain-lain sama dengan 54,93 : 17,54 : 8,85 : 18,68.

(4) 1960. Family Living Survey dikalangan pegawai-pegawai Departemen Perburuhan meliputi 200 keluarga, dengan kesimpulan:
— Rata-rata penghasilan sebulan sama dengan Rp. 1796,28.
— Rata-trata pengeluaran sebulan sama dengan Rp. 1805,—.
— Perbandingan pengeluaran untuk (a) makanan, (b) perumahan, (c) pakaian, (d) lain-lain adalah sama dengan 53,92 : 8,74 : 8,31 : 29,03.

(5) 1963. Family Living Survey dalam bulan Djanuari dan Djuni 1963 dikalangan (a) pegawai negeri, (b) buruh perusahaan, (c) pekerdja bebas, atas 50 keluarga.
Kesimpulan penjelidikan itu menundjukkan bahwa:
(a) Pegawai Negeri. Penghasilan pokok dari gadji (tidak termasuk usaha-usaha tambahan sendiri) sama dengan 38% dari pengeluaran.
(b) Buruh perusahaan. Penghasilan pokok dari upah (tidak termasuk usaha-usaha tambahan) sama dengan 71% dari pengeluaran.
(c) Pekerdja bebas. Penghasilan (tidak termasuk usaha-usaha tambahan) merupakan 90% dari pengeluaran.
Dengan keterangan bahwa mutu makanan dan lain-lain bagi ketiga golongan tersebut berlain-lainan.

Chusus mengenai penjelidikan-penjelidikan upah telah diadakan pada tahun-tahun:

(1) 1955/1956. Job Evaluation Survey pada Bank-bank untuk menentukan dasar-dasar penilaian djabatan dan dengan demikian sjarat-sjarat untuk menentukan tingkat upah.
(2) 1959/1960 Wage Survey untuk Djakarta dan Sukabumi. Survey di Djakarta diperlukan untuk menjusun indeks daja beli penghasilan (real earnings index).
(3) 1964. All Java Wage Survey, atas 1200 perusahaan di Djawa dan Madura, dihubungkan dengan masalah sandang pangan. Survey itu hingga sekarang belum selesai.

Penjelidikan-penjelidikan, chususnja jang mengenai kehidupan keluarga, semuanja menundjukkan bahwa penghasilan jang berasal dari upah/gadji, tidak dapat menutupi biaja pengeluaran penghidupan dan hanja meliputi 38-90% dari djumlah pe-

ngeluaran dalam tahun-tahun pada waktu mana diadakan penjelidikan-penjelidikan itu.

Ditindjau dari sudut perdjoangan, fakta-fakta ini menundjukkan besarnja pengorbanan jang diberikan oleh kaum buruh untuk mempertahankan dan mensukseskan Revolusi Indonesia selama ini.

3. Usaha-usaha memperbaiki tingkat upah.

Untuk mengatasi atau mengurangi merosotnja daja beli upah/gadji itu baik buruh, maupun Pemerintah telah mengadakan berbagai usaha dan tindakan.

Pertama-tama, setjara umum telah lazim dipergunakan sistim tundjangan kemahalan, jang kadang-kadang djumlahnja sampai 2 kali atau lebih, dari upah/gadji pokok. Tundjangan kemahalan, chususnja sesudah Perang Dunia II, merupakan bagian mutlak dari upah/gadji disemua lapangan kerdja, Pemerintah maupun swasta.

Jang kedua adalah, sebagian dari upah, diberikan dalam bentuk bahan-bahan keperluan rumah tangga, seperti beras, gula, sabun, minjak tanah, dan sebagainja. Bagian natura dari upah ini sangat mengurangi besarnja tekanan inflasi pada upah/gadji.

Jang ketiga jalah, penjesuaian nilai upah riil dengan kenaikan harga biaja penghidupan setjara periodik terus-menerus (sliding scale sistem). Tidak banjak perusahaan-perusahaan jang mampu membajar upah sematjam itu, jaitu hanja terbatas pada sektor perminjakan asing sadja.

Dalam hubungan ini maka kenaikan-kenaikan harga lebih landjut akan menimbulkan makin besarnja perbedaan pengupahan disektor-sektor jang kuat dan jang kurang kuat. Oleh karena itu maka masalah perbedaan upah (wage differentials) jang timbul dewasa ini pada hakekatnja adalah salah satu akibat dari pada inflasi jang djuga mentjerminkan perbedaan kekuatan keuangan sektor-sektor atau perusahaan-perusahaan jang bersangkutan.

Untuk meningkatkan upah setjara langsung, Menteri Perburuhan telah 2 kali memberi andjuran untuk menaikkan upah bagi buruh swasta, jaitu:

1. Tahun 1957, andjuran untuk menaikkan upah buruh sebesar 20% karena adanja kenaikan-kenaikan harga akibat dikeluarkannja Peraturan B.E. (Bukti Ekspor) pada waktu itu.

2. Tahun 1963, andjuran Menteri Perburuhan untuk memberi kenaikan upah sebesar 100% mulai 1 Mei 1963.

Walaupun andjuran-andjuran Menteri Perburuhan itu didjalankan namun tidak lama kemudian tingkat upah ketinggalan lagi oleh kenaikan tingkat harga.

Selain itu perbaikan upah/gadji chususnja bagi pegawai negeri dan perusahaan negara diadakan dengan djalan mengeluarkan peraturan-peraturan gadji dengan sistim tertentu.

Pada perusahaan-perusahaan negara jang pada mulanja mempunjai bermatjam-matjam Peraturan Gadji, diadakan keseragaman penggadjian (Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962) jang sekaligus mengadakan persesuaian dengan sistim penggadjian pegawai negeri. Disamping itu perusahaan-perusahaan negara masih ada kelonggaran untuk menentukan sendiri mengenai besarnja tundjangan beras, tundjangan perumahan, tundjangan pengangkutan, dan sebagainja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Untuk meningkatkan gadji pegawai negeri dalam tahun 1961 dikeluarkan Peraturan Gadji Pegawai Negeri jang baru (P.G.-P.N. 1961) dan sesuai dengan itu djuga dikeluarkan Peraturan Gadji Polisi, dan Peraturan Gadji Militer. Peraturan-peraturan Gadji ini mempergunakan pokok gadji minimum sebesar Rp. 200,— dan maksimum Rp. 4.000,—, disamping itu diberikan tundjangan keluarga dan tundjangan kemahalan umum. Mula-mula tundjangan kemahalan umum itu ditetapkan sebesar 30%; untuk mengikuti trend kenaikan biaja hidup tundjangan ini dinaikkan mendjadi 130%; (Penetapan Presiden No. 8 tahun 1963) untuk kemudian dinaikkan lagi mendjadi 300% (Peraturan Presiden No. 46 tahun 1964).

Disamping itu direntjanakan adanja distribusi beberapa bahan pokok keperluan rumah tangga (Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963), tetapi berhubung dengan beberapa hal, baru dapat terlaksana distribusi beras sadja.

Dalam tahun 1964 ditentukan pemberian tundjangan lauk-pauk sebesar Rp. 1.000,— dan tundjangan pengabdian 150% kepada pegawai negeri (Peraturan-peraturan Presiden No. 32 dan 33 tahun 1964); untuk anggota Angkatan Bersendjata ditentukan peraturan jang sedikit berlainan.

Pada achir tahun 1964 Pemerintah menugaskan kepada suatu team ahli Pemerintah untuk menjusun suatu konsep kebidjaksanaan ekonomi dimana terdapat keseimbangan antara

upah/gadji, harga dan penerimaan negara. Team tersebut antara lain mengusulkan dipergunakannja nilai harga beras 31,5 kilogram sebagai dasar upah minimum sebulan bagi seorang pegawai rendah tidak berkeluarga. Bagi jang berkeluarga ditentukan tundjangan sama dengan nilai 10 kilogram beras setiap anggota keluarganja.

Dengan dikemukakannja konsep upah minimum itu belum berarti masalah upah sudah terpetjahkan. Pelaksanaannja pada perusahaan-perusahaan tertentu masih perlu pemikiran. Mengharuskan pelaksanaannja setjara menjeluruh dapat mengakibatkan tutupnja banjak perusahaan ketjil dan bertambahnja pengangguran. Masalah pokok lainnja jalah mengendalikan inflasi jang merupakan sumber utama bagi timbulnja banjak perbedaan upah (wage differentials) jang tidak rasionil dewasa ini, jang membedakan tingkat upah diperusahaan-perusahaan jang kuat dan jang lemah untuk pekerdjaan jang sama nilai dan beratnja.

Kemudian masalah jang pokok lainnja jalah bagaimana mentjiptakan sistim upah perangsang (wage incentive sistem) jang dapat meningkatkan taraf produksi perseorangan dan nasional setjara terus-menerus, sedikitnja seimbang dengan ketjepatan proses revolusi kita disektor-sektor kehidupan lainnja.

Djalan kearah kesempurnaan masih djauh tetapi hal itu kita terima sebagai suatu tantangan nasional bagi suatu rakjat jang sedang berrevolusi.

D. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERDJA BAGI BURUH.

Suatu segi chusus dari masalah perburuhan dalam perusahaan jalah kesehatan dan keselamatan kerdja bagi buruh. Seperti diketahui untuk melaksanakan produksi diperusahaan-perusahaan, diperlukan :

(1) Tempat dan ruangan kerdja dengan fasilitas-fasilitasnja, seperti hawa, suhu, penerangan, air, dan sebagainja jang harus memenuhi sjarat-sjarat tertentu pada buruh jang harus mendjalankan pekerdjaan tertentu.

(2) Bahan-bahan mentah jang kadang-kadang mengandung zah kimia atau sinar jang berbahaja bagi manusia.

(3) Mesin-mesin dan alat-alat kerdja, jang tanpa disertai dengan alat-alat pelindung untuk keselamatan kerdja, pada waktu-waktu tertentu akan membahajakan buruh jang mempergunakannja.

Untuk menghindarkan kemungkinan timbulnja bahaja-bahaja tersebut maka Pemerintah c.q. Departemen Perburuhan dengan instansi-instansi jang bersangkutan dalam lingkungannja mengadakan peraturan-peraturan jang diarahkan kepada atara lain :

— Pentjegah pemakaian bahan bahaja, misalnja pelarangan pemakaian fosfor kuning dalam pabrik korek api.
— Pemakaian alat pelindung pada pekerdjaan tertentu seperti respirator dan pakaian pelindung.
— Perlindungan mesin untuk menghindarkan bahaja terhadap buruh.
— Penjehatan ruangan kerdja.
— Pengobatan buruh kalau sakit, baik jang diusahakan oleh madjikan sendiri atau bersama-sama dengan djalan mendirikan dana-dana sakit.
— Pengaturan djam kerdja dan waktu istirahat.
— Pemeriksaan badan setjara berkala pada pekerdjaan-pekerdjaan tertentu.
— Pelaporan penjakit djabatan oleh dokter-dokter.
— Penjimpanan bahan-bahan berbahaja.

Dari laporan-laporan jang diterima oleh Departemen Perburuhan ternjata bahwa dalam tahun 1950 — 1955 telah terdjadi sedjumlah 7101 ketjelakaan dengan korban 7449 orang, diantaranja 4% meninggal dunia, 26% luka berat dan 70% menderita luka ringan. Ketjelakaan-ketjelakaan tersebut akibatnja tentu merugikan, baik bagi manusia jang mendjadi korban maupun bagi produksi pada umumnja.

Untuk menghindarkan itu, maka banjak tindakan ditudjukan pada usaha-usaha jang bersifat preventif.

Dalam rangka ini kesehatan buruh merupakan salah satu tudjuan usaha jang terpenting, jang dipengaruhi oleh beberapa faktor, jaitu :

1. Keadaan ruangan kerdja,
2. Keadaan makanan,
3. Perumahan,
4. Pemeliharaan kesehatan jang harus memenuhi sjarat-sjarat jang telah ditetapkan.

Mengenai penjakit jang dapat timbul dalam perusahaan dapat dibagi dalam 2 golongan : penjakit biasa, jang tjara pentjegahannja harus didjelaskan kepada semua buruh jang berkepentingan, serta penjakit djabatan (occupational deseases) jang dapat ditjegah kalau buruh benar-benar mendjalankan instruksi-instruksi jang diberikan oleh pemimpin-pemimpinnja mengenai pekerdjaan-pekerdjaan jang berbahaja. Misalnja, buruh djangan sampai mengabaikan pemakaian alat keselamatan untuk buruh sendiri, umpamanja memakai katjamata waktu mengerdjakan pekerdjaan las dan untuk memakai masker pada waktu mengerdjakan pekerdjaan duco atau memakai masker pada pekerdjaan jang berdebu jang banjak mengandung silice.

Untuk mengetahui keadaan penjakit-penjakit djabatan itu, Departemen Perburuhan c.q. Lembaga Kesehatan Buruh telah mengadakan beberapa survey, antara lain:

(1) Tahun 1954.: Penjelidikan mengenai tjara pemeliharaan kesehatan pada 20.000 perusahaan. Dari penjelidikan ini ternjata bahwa 75% dari perusahaan-perusahaan ini memberi pemeliharaan kesehatan kepada buruh-buruhnja.

(2) Tahun 1963.: Survey tentang „minor injuries" pada industri; untuk keperluan itu telah diselidiki sedjumlah 500 ketjelakaan. Hasil penjelidikan itu menundjukkan bahwa 80-85% dari ketjelakaan itu disebabkan karena buruh kurang hati-hati, misalnja tidak mengikuti instruksi, tidak mau memakai alat-alat pelindung dan sebagainja.

(3) Tahun 1963.: Penjelidikan pada 976 buruh tambang di Tjikotok. Hasil penjelidikan menundjukkan bahwa 5 diantaranja menderita „silicosis" dan 23 orang menderita „pulmonary tuberculosis".

(4) Tahun 1963.: Penjelidikan pada 111 buruh tekstil. Penjelidikan ini menundjukkan bahwa dalam pabrik tekstil penjakit „byssionosis" bukanlah merupakan masalah penting.

(5) Tahun 1964.: Penjelidikan mengenai poliklinik-poliklinik buruh. Hasil penjelidikan menundjukkan bahwa kebanjakan nurse dalam poliklinik-poliklinik ini tidak tjukup kapabel.

Untuk mengetahui sedjelas-djelasnja keadaan kesehatan kaum buruh diperusahaan-perusahaan dan kemudian membuat peraturan-peraturan jang benar-benar mengenai sasaran jang

ditudjukannja maka penjelidikan-penjelidikan/penelitian-penelitian sematjam itu dalam masa jang akan datang akan diperluas.

E. PERKEMBANGAN SINGKAT PERUNDANG-UNDANGAN PERBURUHAN.

Untuk mewudjudkan politik sosial Negara Republik Indonesia mengenai pekerdjaan buruh, jaitu mendjamin pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi buruh, sesuai dengan pasal 27 ajat (2) Undang-undang Dasar, maka sebagai langkah pertama telah ditetapkan :

(1) Undang-undang Ketjelakaan Tahun 1947 No. 12 jang mengatur pembajaran ganti kerugian kepada buruh jang mendapat ketjelakaan berhubung dengan hubungan kerdja.

(2) Undang-undang Kerdja Tahun 1948 No. 12 jang memuat aturan-aturan dasar tentang pekerdjaan anak, orang muda dan wanita, waktu kerdja, waktu istirahat dan tempat kerdja. Dalam undang-undang ini dimasukkan djuga aturan pangkal mengenai perumahan buruh jang disediakan oleh madjikan.

(3) Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1946 No. 23.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk:

a. mengawasi berlakunja undang-undang dan peraturan perburuhan dengan djalan memberi penerangan kepada buruh, serekat buruh dan madjikan djika perlu dengan mengusut hal-hal jang dapat dikenakan hukuman oleh undang-undang atau peraturan itu;

b. mengetahui dan menjelami keinginan dan kebutuhan masjarakat akan peraturan dalam bidang tertentu.

(4) mengumpulkan bahan-bahan keterangan agar dapat mengadakan undang-undang dan peraturan-peraturan setepat-tepatnja.

Sebelum Negara Kesatuan terbentuk kaum buruh dan organisasi buruh serta seluruh potensi rakjat mentjurahkan tenaga dan perhatiannja kepada perdjoangan physik dan politis mengusir pendjadjah dari bumi Indonesia.

Setelah Negara Kesatuan terbentuk kaum buruh mulai menundjukkan perhatiannja kearah perdjoangan dalam bidang

sosial dan ekonomi, terutama menghadapi madjikan-madjikan asing jang sesuai dengan ketentuan K.M.B. — telah kembali ke Indonesia untuk membuka kembali perusahaan-perusahaan miliknja.

Adanja pengusaha asing jang masih menguasai sebagian besar perusahaan dan jang tidak mengikuti aspirasi buruh dalam Negara Indonesia Merdeka, dengan latar belakang imperialisme dan sistim ekonomi liberal jang didjalankan di Indonesia pada waktu itu, memungkinkan berlangsungnja adu kekuatan antara buruh dan madjikan jang mengakibatkan timbulnja perselisihan-perselisihan perburuhan disertai dengan pemogokan-pemogokan jang tidak dapat dihindarkan.

Karena itu dianggap perlu untuk menetapkan peraturan tentang penjelesaian perselisihan perburuhan, jaitu Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1961 jang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penjelesaian Perselisihan Perburuhan.

Dalam kedua undang-undang ini dianut sebagai pokok, bahwa perselisihan antara buruh dan pengusaha diselesaikan dengan sebaik-baiknja atas dasar musjawarah. Bila dengan djalan ini tidak tertjapai penjelesaian, baru Pemerintah tjampur tangan dengan memberi keputusan jang mengikat.

Untuk dapat melaksanakan pengawasan perburuhan setjara efektif, pertama-tama harus diketahui, dimana letaknja perusahaan. Berhubung dengan itu undang-undang tentang kewadjiban melaporkan perusahaan, (jaitu Undang-undang No. 23 Tahun 1953) membebankan kewadjiban pada madjikan untuk memberi laporan tentang perusahaannja.

Mentjegah perselisihan adalah usaha jang lebih baik daripada menjelesaikan perselisihan perburuhan. Salah satu tjara untuk mentjegah perselisihan perburuhan ialah diadakannja perdjandjian perburuhan antara serikat buruh dan madjikan jang diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1954.

Baik untuk mendjamin bagian jang lajak dari kesempatan kerdja bagi warga negara Indonesia, maupun untuk memenuhi hasrat Bangsa Indonesia untuk menduduki tempat jang lajak dalam pelbagai lapangan kerdja, jang pada waktu itu masih diduduki oleh orang asing, ditetapkan Undang-undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing jang mensjaratkan izin terlebih dulu dari Pemerintah untuk mempekerdjakan tiap orang asing.

Sebagai perintis djalan kearah pertanggungan sosial jang memberikan hak kepada buruh atas djaminan penghasilan, kesehatan dan kesedjahteraan bagi dirinja beserta keluarganja terhadap peristiwa sakit, hamil, bersalin, kematian, ketjelakaan, umur landjut, tjatjat dan pengangguran, dalam tahun 1957 oleh Menteri Perburuhan 'ditetapkan Peraturan Menteri Perburuhan No. 15 tentang Pemberian Bantuan/Tundjangan kepada Buruh dan Keluarganjan dalam hal sakit, hamil, bersalin atau meninggal dunia. Peraturan Menteri ini menentukan suatu pertanggungan jang bersifat sukarela untuk memperoleh pengalaman terlebih dulu.

Dalam sistim Sososialisme Indonesia, ekonomi diselenggarakan dengan gotong-rojong, mengikut-sertakan seuma peserta produksi dan masjarakat dalam perentjanaan, pelaksanaan dan pengawasan produksi dan distribusi, termasuk kaum buruh sebagai sokoguuru revolusi. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 45 Tahun 1960 jang berkewadjiban membantu pimpinan perusahaan untuk mempertinggi kwalitas dan kwantitas produksi dan mengawasi serta mengamankan kekajaan negara.

Guna lebih mendjamin ketenteraman serta kepastian bekerdja bagi kaum buruh, maka pada tahun 1964 dikeluarkan Undang-undang No. 12 tentang Pemutusan Hubungan Kerdja diperusahaan Swasta. Undang-undang ini menentukan bahwa untuk tiap-tiap pemutusan hubungan kerdja oleh pengusaha terlebih dulu diperlukan izin dari instansi jang bersangkutan (pengawas preventif).

VI. PERIODE 1965.

Keluarnja Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan internasional jang merupakan badan-badan chusus dari pada P.B.B. segera diikuti dengan politik „Banting Stir" dan „Berdikari" jang berarti bahwa Bangsa Indonesia bertekad untuk memetjahkan dan menjelesaikan masalah-masalah teknis nasional dengan kemampuan sendiri tanpa menggantungkan diri pada bantuan P.B.B. dan badan-badan internasional lainnja.

Semendjak tahun 1950 Indonesia mendjadi anggota daripada salah satu badan chusus P.B.B., jaitu Organisasi Perburuhan Internasional, jang chusus bergerak dalam bidang-bidang teknis perburuhan; dalam rangka keluar dari P.B.B. itu Indonesia dalam bulan Maret tahun 1965 telah menjatakan keluar dari Organisasi Perburuhan Internasional.

Politik Banting Stir kearah Berdikari itu mengharuskan Bangsa Indonesia untuk menggunakan sumber kekajaan tenaga kerdja dan sumber kekajaan alam kita dengan semangat dan dengan tjara jang lebih baik daripada dalam waktu-waktu jang lampau, sekalipun kini harus dikerdjakan tanpa bantuan asing.

Tenaga kerdja jang melimpah-limpah dan terus bertambah merupakan beban berat bagi bangsa dan negara, apabila tidak diimbangi oleh kesempatan kerdja jang seimbang djumlahnja dan terus bertambah. Sebaliknja untuk dapat melaksanakan usaha pembangunan nasional, adanja tenaga kerdja jang melimpah-limpah djumlahnja merupakan suatu modal ("asset") potensiil untuk mengembangkan produksi nasional. Dengan tersedianja tenaga kerdja nasional, tidak perlu diimpor tenaga kerdja dari negeri lain.

Dalam rangka pelaksanaan politik Banting Stir kearah Berdikari dibidang perburuhan, dalam tahun 1965 dan seterusnja untuk djangka waktu pandjang, diadakan pelbagai penelitian (research) setjara sistimatis untuk lebih mengenal keadaan dan perkembangan tenaga kerdja dan gerakan buruh di Indonesia dengan segala aspeknja, hingga dengan mengenal itu tenaga kerdja dan gerakan buruh Indonesia sebagai faktor ekonomi dan sebagai tenaga revolusi lebih dapat dimanfaatkan perdjoangannja bagi Revolusi Indonesia.

Untuk pembangunan nasional dan penjelesaian revolusi nasional selandjutnja, maka pada pertengahan tahun 1965 ini dapat ditjatat disini beberapa hal jang dapat dianggap sebagai modal perdjoangan sebagai berikut:

P e r t a m a : Buruh dan gerakan buruh Indonesia jang telah bersatu, mempunjai kesadaran politik jang tinggi, militan dan revolusioner jang merupakan kekuatan sosial atau politik (social atau political force) dalam penjelesaian revolusi nasional demokratis jang menudju kearah Sosialisme Indonesia.

Disamping kesadaran politik buruh Indonesia djuga telah menginsjafi peranan dan tugasnja dalam bidang produksi untuk meningkatkan produksi, ikut serta aktif dalam penjelenggaraan produksi serta mengadakan social control chususnja dalam perusahaan negara dalam wadah dewan perusahaan. Dengan demikian kaum buruh Indonesia telah menundjukkan rasa tanggung djawabnja atas djalannja produksi.

Unsur-unsur korup, penjelewengan dan penghambat produksi seperti jang mereka namakan kaum kapitalis birokrat diekspose dan dituntut penjingkirannja.

Walaupun upah, djaminan sosial dan lain sebagainja dapat dikatakan kurang memadai, namun tuntutan-tuntutan perbaikan nasib tidak dianggap sebagai hal jang diutamakan dalam perdjoangan buruh pada tahap revolusi sekarang.

K e d u a : Mulai diselenggarakannja penjebaran tenaga kerdja setjara besar-besaran untuk mensuply daerah-daerah dan projek-projek pembangunan dengan tenaga kerdja jang diperlukan dan dengan demikian mengurangi tekanan penduduk pengangguran dan setengah pengangguran didaerah-daerah lain melalui usaha-usaha transmigrasi dan antar kerdja antar daerah.

K e t i g a : Mulai diselenggarakannja dan akan terus diperhebat usaha pengerahan tenaga rakjat, chususnja jang menganggur dan setengah menganggur didaerah-daerah pertanian jang padat penduduknja untuk pelaksanaan berbagai projek pembangunan, chususnja pembangunan/perbaikan saluran irigasi, djalan-djalan dan lain sebagainja jang tidak memerlukan sjarat modal dan keterampilan jang tinggi.

K e e m p a t : Diintensifkannja usaha latihan kedjuruan dan akan diselenggarakannja setjara nasional suatu sistim latihan kedjuruan, baik jang diselenggarakan ditempat-tempat latihan kedjuruan chusus seperti „dipusat-pusat latihan kerdja"

maupun dalam perusahaan-perusahaan (in plant training) dan pekerdjaan (on the job training) untuk meningkatkan mutu keterampilan (skill) tenaga kerdja dan dengan demikian memperbesar produktivitas kerdjanja.

K e l i m a : Diperluas dan disempurnakannja usaha pendidikan dan latihan kepemimpinan — perusahaan (management) dalam Seminar Industrial Management dan Business Administration (Simba) di Bandung dan lain-lain tempat latihan jang disebut Training Within Industries for Supervisors dan latihan-latihan mengenai pokok management (management fundamentals training), achirnja tidak boleh dilupakan kesadaran dan ketekadan kaum buruh Indonesia untuk membangun jang terus bertambah ("increasing consciousness and will to develop").

Modal physik dan mental kaum buruh Indonesia itu terang merupakan unsur-unsur positif — menguntungkan bagi suatu bangsa jang sedang berdjoang dan berrevolusi untuk mentjapai tjita-tjitanja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Masalah-masalah tenaga kerdja dan perburuhan dan tindakan jang telah dan akan diambil oleh Pemerintah dapat diuraikan setjara lebih terperintji sebagai berikut:

1. Tenaga Kerdja.

Dalam tahun 1965 Negara dihadapkan pada masalah bahwa tambahnja penduduk akan berakibat dengan tambahnja tenaga kerdja jang membutuhkan lapangan kerdja baru.

Sensus tahun 1961 menundjukkan bahwa Angkatan Kerdja (labour force) di Indonesia meliputi 35,9% dari djumlah penduduk. Pengangguran pada waktu itu meliputi 5,6% dari Angkatan Kerdja. Penduduk Indonesia setiap tahun bertambah 2,3%.

Dengan angka-angka perbandingan (ratio) ini penduduk dan Angkatan Kerdja di Indonesia menundjukkan gambaran sebagai berikut:

Perkembangan Penduduk dan Angkatan Kerdja.

	1961	1962	1963	1964	1965
1. Penduduk Indonesia.	97.018.829	99.250.262	101.533.010	103.868.277	106.257.247
2. Tenaga Kerdja.	34.829.759	35.630.884	36.450.353	37.288.710	38.146.351
3. Pengangguran.	1.950.466	1.995.327	2.041.219	2.088.167	2.136.195

Angka-angka tersebut menundjukkan perkiraan-perkiraan djika perbandingan (ratio) jang diperoleh dari Sensus 1961 tetap (constant), demikian pula djika angka-angka perbandingan antara bertambahnja Angkatan Kerdja dan Kesempatan Kerdja (diperindustrian, pertanian, dan sebagainja) masih tetap.

Selandjutnja gambaran tentang pertambahan-pertambahan dalam bidang penduduk dan Angkatan Kerdja dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertambahan penduduk dan Angkatan Kerdja setiap tahun.

	1961-1962	1962-1963	1963-1964	1964-1965
1. Pertambahan penduduk.	2.231.433	2.282.756	2.335.259	2.388.970
2. Pertambahan Angkatan Kerdja.	801.125	819.469	838.357	857.641

Berhubung dengan bertambahnja penduduk sebesar 2.388.970 orang dan karena itu bertambahnja Angkatan Kerdja sebesar 857.641 orang dalam tahun 1965 ini sedikitnja harus ditjiptakan 857.641 kesempatan kerdja baru untuk dapat mempertahankan tingkat penggunaan tenaga kerdja (employment) sekarang. Djika kita hendak mengurangi djumlah pengangguran jang ada serta meningkatkan taraf kesedjahteraan sekarang, haruslah dapat ditjiptakam kesempatan kerdja lebih daripada itu.

Disamping soal-soal pertambahan tenaga kerdja baru setiap tahunnja, masih terdapat soal setengah pengangguran terutama disektor pedesaan (rural) jang rapat hubungannja dengan tersedianja tanah pertanian sebagai kesempatan kerdja. Perbandingan antara tanah pertanian dengan orang jang mengerdjakannja (land-man ratio) tidak menguntungkan, chususnja dipulau Djawa, walaupun ditindjau dari sudut Indonesia dalam keseluruhan "land-man ratio" ini lebih dari lajak untuk mendjamin kesempatan kerdja penuh dan penghidupan lajak kepada orang-orang jang bekerdja disektor pertanian.

Untuk menghadapi masalah pengangguran dan setengah pengangguran ini perlu diadakan tindakan-tindakan dibidang tenaga kerdja sebagai berikut:

a. Memperbesar mobilitas tenaga kerdja dalam arti pemindahan tenaga kerdja kedaerah-daerah lain jang kekurangan tenaga kerdja untuk memenuhi kebutuhan projek-projek pembangunan, teristimewa jang ada diluar Djawa/Madura.

Projek „Sumatra Highway", Asahan, projek-projek transmigrasi dan sebagainja jang akan dilaksanakan didaerah-daerah akan meningkatkan mobilitas dan penjebaran tenaga kerdja dari Djawa/Madura kedaerah-daerah lain. Seperti dalam tahun-tahun jang lampau Departemen Perburuhan (Direktorat Tenaga Kerdja) telah pula mengusahakan pemindahan tenaga kerdja kedaerah-daerah diluar Djawa/Madura, tetapi usaha tersebut masih sangat kurang memadai djika dibandingkan dengan tambahnja tenaga kerdja dipulau Djawa setiap tahunnja dan besarnja djumlah „kelebihan" jang harus disebarkan kedaerah-daerah lain diluar Djawa/Madura. Dalam hubungan ini transmigrasi gaja baru memberi harapan-harapan jang besar. Projek Pemindahan tenaga kerdja ini tentu sadja merupakan pekerdjaan jang bersifat djangka pandjang dan tidak mungkin diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun sadja dan suksesnja banjak tergantung dari dana-dana jang tersedia serta kemadjuan-kemadjuan dalam bidang prasarana (infrastruktur), chususnja pengangkutan darat dan laut.

b. Menjempurnakan susunan pasar kerdja dalam arti mempertemukan pentjari kerdja dengan kesempatan kerdja jang ada. Usaha antar kerdja jang diselenggarakan oleh Direktorat Tenaga Kerdja Departemen Perburuhan dalam awal tahun 1965 ini menundjukkan bahwa dari bulan Djanuari s/d Maret telah mendaftarkan pentjari kerdja sebanjak 18.841 orang. Dari djumlah tersebut sebanjak 5.880 orang atau 31,5 persen dapat ditempatkan. Angka-angka ini belum menggambarkan keadaan jang sebenarnja karena antara lain:
   (a) Sistim pendaftaran pentjari kerdja masih bersifat sukarela.
   (b) Banjak lembaga-lembaga Pemerintah lainnja (Angkatan Bersendjata, Departemen-departemen dan ain sebagai-dan perusahaan-perusahaan swasta mempunjai bagian-bagian penempatan tenaga jang hasil pekerdjaannja tidak diketahui oleh Direkorat Penempatan Tenaga.
   (c) Belum sempurna peralatan Direktorat Tenaga Kerdja jang memungkinkan mereka mendatangi lembaga-lembaga Pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta jang memerlukan tenaga tertentu.

Untuk menghadapi masalah ini maka usaha Antar Kerdja perlu ditingkatkan pada taraf nasional dan peralatan

Direktorat Tenaga Kerdja perlu disempurnakan. Ketjuali itu sistim antar kerdja sukarela, harus ditingkatkan mendjadi pengaturan (ordening) penjediaan dan permintaan tenaga kerdja.

c. Laporan periode Pantjawarsa Manipol (lihat Projek Padat Karya Indramaju) mengemukakan, bahwa menurut "Labour Force Sample Survey" Djawa dan Madura tahun 1958 dalam tahun itu sebanjak 11.252,9 djuta djam kerdja (manhours) hilang (idle) tidak dipergunakan. Djam kerdja hilang ini ditimbulkan karena sifat pertanian musiman jang mengakibatkan adanja setengah penganggur kentara (visible underemployment) dan setengah pengangguran jang tidak kentara (disguised underemployment). Adanja setengah pengangguran disektor pertanian itu mengakibatkan:
   - Semakin turunnja tingkat kemakmuran desa karena penghasilan kurang tjepat bertambah djika dibandingkan dengan tambahnja penduduk.
   - Timbulnja masalah-masalah keamanan karena menurunnja tingkat kemakmuran.
   - Timbulnja gerakan perpindahan kekota-kota besar untuk mentjari lapangan pekerdjaan baru (urbanisasi).

   Dalam tahun 1965 ini Projek Padat Karya untuk mempekerdjakan setengah pengangguran itu seperti jang telah didjalankan di Indramaju dengan sukses akan ditingkatkan pelaksanaannja pada tingkat nasional dengan memusatkan aktivitas-aktivitas pada:
   (1) Projek-projek jang membantu meningkatkan produksi, seperti membuat irigasi, membuat tanggul-tanggul pentjegah bandjir, membuat sumur-sumur bor didaerah-daerah jang kering, memperluas areal sawah untuk ditanami padi atau djagung, reboisasi, membuat empang-empang ikan, dan lain-lain.
   (2) Projek-projek pedesaan jang bersifat kemakmuran sosial, seperti pembuatan lapangan olahraga, balai desa, sekolah-sekolah desa, memperbaiki pasar-pasar, kantor-kantor desa dan lain-lain. Projek-projek ini sifatnja lebih banjak menambah kemakmuran desa dari pada tjiptaan kesempatan kerdja setjara desa.

Projek-projek tersebut diatas semuanja terletak dibidang jang tidak banjak memerlukan keterampilan (skill), jaitu sekedan keterampilan penggarapan tanah dengan mempergunakan alat-alat patjul dan pemindahan tanah sederhana.

Dengan melaksanakan Projek Padat Karya itu djumlah djam kerdja jang tidak dipergunakan disektor pertanian diharapkan dapat berkurang mendjadi djumlah jang seketjil-ketjilnja.

2. Gerakan Buruh dan Hubungan Perburuhan.

a. Buruh sebagai kekuatan Politik.

Sedjarah Revolusi Indonesia membuktikan adanja kenjataan bahwa buruh di Indonesia ini mempunjai peranan jang chusus dalam proses kearah pelaksanaan sosialisme di Indonesia. Dalam bulan Februari dan Maret 1965 ini kaum buruh pada perusahaan-perusahaan perkebunan Amerika Serikat di Sumatera Utara mengadakan tindakan-tindakan pengambil-alihan terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah. Tindakan sematjam itu dalam bulan Maret dilakukan pula terhadap perusahaan minjak asing dan perusahaan-perusahaan lainnja semuanja milik Amerika Serikat jang kemudian dioper oleh Pemerintah.

Berdasarkan atas prinsip bahwa revolusi kearah tertjapainja masjarakat Sosialis Indonesia memerlukan adanja ekonomi jang bebas, dalam arti tidak ada modal asing jang berkuasa di Indonesia dan mempengaruhi perkembangannja, kemudian dikeluarkan suatu Penetapan Presiden jang menentukan, bahwa semua perusahaan-perusahaan asing jang tidak bersifat domestik harus berada dibawah penguasaan Pemerintah (Penpres No. 6 tahun 1965 tertanggal 24 April 1965). Dalam Penetapan Presiden itu perusahaan-perusahaan asing jang bersifat domestik tidak dikenakan tindakan-tindakan penguasaan-penguasaan.

Tindakan-tindakan kaum buruh jang memelopori tindakan Pemerintah untuk memerdekakan ekonomi Indonesia dari pengaruh modal asing itu membuktikan bahwa kaum buruh Indonesia benar-benar merupakan suatu kelas revolusioner dan suatu kekuatan politik dengan kesadaran politik jang tinggi.

Demi suksesnja revolusi kita kesadaran itu perlu dipupuk dan ditingkatkan. Pada taraf nasional kesadaran politik kaum buruh supaja dapat membina persatuan kaum buruh revolusioner berporoskan Nasakom jang senantiasa berusaha dan bertindak untuk melawan dan meniadakan musuh-musuh revolusi disegala bidang, terutama dibidang ekonomi.

Garis kesadaran itu perlu ditingkatkan terus pada tingkat internasional. Pada tingkat ini aktivitas kaum buruh perlu diintegrasikan dengan usaha Presiden/Pemimpin Besar Revolusi

Bung Karno untuk mempersatukan golongan rakjat-rakjat progresif-revolusioner pada tingkat internasional jang berporoskan Nasakom dalam perdjoangan untuk membebaskan rakjat-rakjat Asia, Afrika dan Amerika Latin dari belenggu imperialisme. Disinilah tugas penting kaum buruh Indonesia dalam menjelenggarakan Konperensi Buruh Asia Afrika kelak, jang persiapannja telah diselenggarakan di Indonesia dalam bulan Oktober 1963 jang lalu (batja laporan: Konperensi Pendahuluan Konperensi Buruh Asia Afrika). Kesadaran politik jang tinggi kaum buruh Indonesia jang telah ditundjukkan selama ini harus pula dapat mendorong Konperensi Buruh Asia Afrika kelak untuk memelopori terbentuknja Nasakom internasional guna membentuk dunia baru jang adil dan makmur, bebas dari segala penghisapan dan pendjadjahan.

b. Buruh sebagai unsur produksi.

Ekonomi gotong-rojong dilakukan disegala tingkat, baik tingkat nasional maupun tingkat unit-unit produksi (perusahaan). Hubungan antara buruh dan pimpinan perusahaan terutama pada perusahaan-perusahaan negara perlu diusahakan supaja berlangsung sebaik-baiknja. Buruh dan pimpinan perusahaan (management) adalah peserta-peserta produksi, pelaksana ekonomi gotong-rojong, jang mempunjai tugas mendorong Revolusi Indonesia kearah Sosialisme Indonesia.

Pengikut-sertaan setjara positif buruh dalam pembinaan perusahaan dilaksanakan melalui dewan-dewan perusahaan jang merupakan wadah untuk melaksanakan prinsip social control dan social participation setjara efektif. Dewan perusahaan adalah merupakan bentuk integrasi antara pekerdja dan pimpinan perusahaan, jang buat kesekian kalinja dikomandokan lagi oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam amanat Berdikari baru-baru ini.

Dalam tahun 1965 ini tjara bekerdja dewan perusahaan akan lebih disempurnakan antara lain dengan djalan meningkatkan keterampilan (skill) dan daja kemampuan segala unsur anggotanja, agar mereka itu dapat memetjahkan soal-soal jang mereka hadapi dalam perusahaan-perusahaan mereka masing-masing dengan tjara jang lebih efisien.

c. Perselisihan Perburuhan.

Dalam 4 bulan jang pertama (Djanuari s/d April) 1965 Panitia Penjelesaian Perburuhan Pusat telah mengeluarkan seba-

njak 69 keputusan (tahun 1964 seluruhnja: 341 keputusan). 31.88% diantaranja mengenai perkebunan, 26,09% mengenai pertambangan, 40,58% mengenai industri dan 1,45% mengenai pengangkutan. Djumlah tersebut menurun djika dibandingkan dengan waktu jang sama dalam tahun 1964.

Ada sedjumlah 37 soal jang diperselisihkan, antara lain jang terpenting jalah: 53,62% mengenai pemutusan hubungan kerdja perseorangan, 10,14% mengenai pemetjatan 10 orang keatas, 7,25% mengenai upah, 5,8% mengenai djaminan sosial, 4,35% mengenai pensiun, 4,35% mengenai perdjandjian perburuhan dan 5,8% mengenai hadiah lebaran.

Dari perselisihan-perselisihan perburuhan jang tertjatat hanja 2 diantaranja jang berakibatkan pemogokan, jaitu 1 kali diperusahaan keramik, dan 1 kali lainnja diperusahaan minjak.

Departemen Perburuhan senantiasa mengusahakan agar perselisihan perburuhan dapat diselesaikan setjara tjepat dan tepat.

3. Masalah pengupahan.

Struktur pengupahan dewasa ini sangat beraneka ragam sifatnja dan tinggi-rendahnja. Penentuannja tidak selalu didasarkan atas sifat atau berat-ringannja pekerdjaan jang harus dikerdjakan (prestasi jang diberikan) tetapi lebih banjak didasarkan atas daja kemampuan keuangan pihak jang menetapkannja. Maka karena itu terdapatlah banjak perbedaan upah antara sektor Pemerintah dan sektor swasta, bahkan antara swasta dan swasta dan dikalangan perusahaan-perusahaan Pemerintah sendiri. Dikalangan perusahaan-perusahaan Pemerintah perbedaan penerimaan upah banjak tergantung daripada tersedianja dana-dana untuk membajar tundjangan-tundjangan tertentu disamping upah/gadji pokok. Dikalangan swasta terutama, kedudukan ekonomi dan kekuatan keuangan jang menentukan. Ditambah dengan perobahan-perobahan jang tjepat dibidang harga (inflasi) maka pengupahan jang penentuannja terutama didasarkan atas kekuatan keuangan itu mengakibatkan timbulnja perbedaan-perbedaan upah jang sangat menjolok. Selainnja tidak adil bagi buruh-buruh jang harus mendjalankan pekerdjaan jang sama beratnja diperusahaan-perusahaan jang tidak kuat kedudukan keuangannja, perbedaan-perbedaan upah itupun mengakibatkan berkurangnja perangsang („desincentive") diperusahaan-perusahaan ini dan dengan sendirinja djuga makin berkurangnja produksi.

Berhubung dengan keadaan jang tidak menguntungkan itu maka struktur pengupahan jang ada dewasa ini harus dirombak dan disesuaikan dengan arah dari pada pola pembangunan kita serta dengan pertambahan produktivitas ekonomi nasional kita. Perombakan struktur pengupahan antara lain harus memungkinkan:

a. setjara berentjana dan teratur upah harus berkembang kearah tingkat penghidupan jang lajak bagi buruh beserta keluarganja,

b. harus mendorong kearah penjebaran tenaga kerdja jang lebih merata kedaerah-daerah serta kepada projek-projek pembangunan jang memerlukannja,

c. harus dapat menimbulkan perangsang bagi semua jang menerimanja, djuga diperusahaan-perusahaan jang lemah kedudukan keuangannja, tetapi jang produksi dan djasa-djasanja diperlukan oleh masjarakat,

d. harus menimbulkan perangsang kearah penambahan keterampilan,

e. harus mentjerminkan pembagian penghasilan nasional (redistribution of national income) jang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Sosialisme Indonesia).

Untuk melaksanakan tudjuan itu, Pemerintah sedang merentjanakan suatu tjara pengaturan dan pemetjahan masalah pengupahan setjara pusat jang akan diintegrasikan dengan tjara pemetjahan dan pengaturan disektor-sektor ekonomi lainnja.

4. Norma-norma Perburuhan.

Perundang-undangan dan peraturan-peraturan perburuhan telah menetapkan norma-norma (standards) tertentu dibidang djam kerdja, kerdja lembur, waktu istirahat, kerdja wanita pada waktu malam, kerdja anak-anak, serta kesehatan dan keselamatan buruh diperusahaan-perusahaan jang sesuai dengan kondisi-kondisi di Indonesia.

Sebagai langkah pertama tindakan-tindakan akan dipusatkan pada kesehatan dan keselamatan buruh diperusahaan-perusahaan. Selain untuk meningkatkan daja kerdja dan martabat buruh jang bekerdja, kesehatan dan keselamatan kerdja mempengaruhi tingkat produksi perusahaan-perusahaan.

Untuk keperluan itu direntjanakan adanja:

a. Gerakan Nasional kesehatan dan keselamatan buruh di-perusahaan-perusahaan dengan djalan mengikutsertakan kaum buruh, organisasi-organisasi massa, pengusaha dan masjarakat sendiri kedalam gerakan itu. Tudjuan dari pada gerakan ini jalah:

   „Buruh harus mampu mendjaga diri dalam lapangan kerdja mereka masing-masing".

b. Mengadakan research (penelitian-penelitian) dibidang ini guna lebih landjut dituangkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan baru, dan untuk dipergunakan sebagai bahan-bahan indoktrinasi.

5. Bidang Djaminan Sosial.

Sistim djaminan sosial (sakit, hamil, melahirkan anak, hari tua) pada dewasa ini masih bersifat sukarela dan tergantung pada daja kemampuan keuangan dan kesediaan perusahaan-perusahaan jang bersangkutan.

Pada waktu ini sedang direntjanakan suatu tjara penjusunan dana djaminan sosial kearah sistim pertanggungan sosial wa-djib, segala sesuatu dengan memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan dan daja kemampuan parusahaan jang diwadjib kan.

6. Perundang-undangan Perburuhan.

Departemen Perburuhan telah selesai menjusun 4 (empat) matjam rantjangan Undang-undang, jaitu:

a. Undang-undang Pokok Perburuhan, memuat ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewadjiban kaum buruh Indonesia.

b. Undang-undang tentang Penggunaan Tenaga Kerdja, memuat ketentuan-ketentuan tentang tjara-tjara penggunaan tenaga kerdja.

c. Undang-undang Latihan Kedjuruan, mengenai tugas Pemerintah untuk mengusahakan, membina serta mengatur usaha-usaha latihan kerdja hingga memenuhi kebutuhan masjarakat.

d. Undang-undang tentang Djaminan Sosial dan Kesedjahteraan bagi buruh beserta keluarganja, jang akan melaksanakan sistim djaminan sosial dari tjara sukarela sekarang mendjadi pertanggungan sosial wadjib selangkah demi selangkah.

Rantjangan-rantjangan undang-undang tersebut sekarang telah disampaikan kepada lembaga-lembaga Pemerintah jang berkepentingan dan diharapkan dapat disahkan dan dilaksanakan dalam tahun 1965 ini djuga.

7. Research (Penelitian) dibidang Perburuhan.

Untuk mendapatkan landasan jang tepat guna penentuan kebidjaksanaan, perentjanaan dan pelaksanaan dalam bidang perburuhan, diperlukan gambaran tentang keadaan jang sebenarnja. Untuk itu diperlukan keterangan-keterangan kwantitatif berupa angka-angka statistik dan keterangan kwalitatif jang diperoleh dengan djalan mengadakan penelitian (research) dibidang-bidang perburuhan jang diperlukan.

Objek-objek penelitian perburuhan itu meliputi:

a. Segi sosial-politis (buruh sebagai sokoguru revolusi): gerakan buruh, sedjarah, organisasi dan aspirasinja dalam Revolusi Indonesia dan hubungan perburuhan, termasuk pembinaan dewan-dewan perusahaan.

b. Segi sosial-ekonomis (buruh sebagai faktor produksi): penduduk, angkatan kerdja (labour force), penggunaan tenaga kerdja (employment), pengangguran (unemployment), labour turnover, absensi, djam dan waktu kerdja, upah, latihan kerdja, dan lain-lain.

c. Segi sosial: djaminan sosial, kesedjahteraan, kesehatan dan keselamatan buruh.

d. Segi hukum, organisasi dan administrasi: soal-soal dan sjarat-sjarat untuk memperkembangkan peraturan-peraturan serta mengintensifkan pelaksanaannja dalam masjarakat.

Untuk memperoleh hasil penelitian dengan mutu jang setinggi-tingginja, maka Departemen Perburuhan akan mengadakan kerdja-sama dengan Universitas-universitas dan lembaga-lembaga ilmiah lainnja. Sebagai langkah pertama telah dibentuk Lembaga Penelitian Perburuhan, berdasarkan atas Keputusan Bersama Menteri Perburuhan R.I. dan Rektor Universitas Gadjah Mada tertanggal 18 Maret No. Deperbu/865/65-59/Kab/M 1965 (No. U.G.M./Br/K/-14/12). Djuga dengan Lembaga Penjelidikan Ekonomi dan Masjarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia serta dengan Akademi Ilmu Sosial „Aliarcham" oleh Departemen Perburuhan sedang diadakan perundingan untuk mengadakan kerdja-sama penelitian-penelitian.

8. Peningkatan aktivitas untuk mensukseskan Berdikari.

Amanat Berdikari Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno antara lain menentukan:

a. melaksanakan pembangunan nasional smeesta berentjana dalam masa 3 tahun.

b. Pertanian dan perkebunan didjadikan dasar perekonomian negara, dan industri sebagai tulang punggung perekonomian negara akan dikembangkan.

c. Prioritas djangka pendek untuk pembangunan meliputi: nation dan character building, sandang pangan, keamanan/ pertahanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, pertambangan, industri, tenaga listrik, industri pengolahan bahan-bahan mentah, transmigrasi gaja baru, penelitian dibidang teknologi.

d. Rehabilitasi semua alat-alat produksi, stabilisasi harga dan pemberantasan inflasi ditetapkan untuk mentjiptakan iklim ekonomi sesuai dengan kebutuhan perdjoangan.

Garis-garis kebidjaksanaan ini telah disahkan oleh M.P.R.S. dalam sidang paripurna III pertengahan bulan April jang lalu di Bandung.

Untuk mensukseskan pelaksanaan Berdikari, dibidang perburuhan perlu diadakan tindakan-tindakan peningkatan daja tahan mental, penggunaan tenaga ahli, peningkatan keahlian/ keterampilan dan pemberian djasa-djasa oleh unsur-unsur perburuhan jang terutama ditudjukan kepada projek-projek prioritas tersebut diatas:

(1) Aktivitas kaum buruh sebagai kekuatan massa dan kekuatan politik dalam projek-projek tersebut perlu ditingkatkan dan ditudjukan untuk menghilangkan penghambat-penghambat pelaksanaan, dan pemborosan-pemborosan material dan tenaga. Dewan-dewan perusahaan dalam projek-projek prioritas itu perlu diintensifkan pekerdjaannja, baik dalam arti pengintegrasiannja antara buruh pimpinan perusahaan, maupun kemampuannja untuk memetjahkan soal-soal teknis perusahaan.

(2) Penggunaan dan penjebaran tenaga ahli jang ada perlu diintensifkan. Karena itu pembentukan pasar kerdja, jaitu usaha mempertemukan pentjari kerdja dengan pentjari tenaga kerdja, perlu disampurnakan.

Karena itu peralatan dan dana-dana lembaga-lembaga penempatan tenaga (Direktorat Tenaga) Kerdja) perlu di-

sempurnakan hingga lembaga ini mampu mendjalankan tugasnja lebih giat. Dengan demikian tenaga ahli jang ada dapat semuanja diikut sertakan dalam pembangunan sebagaimana mestinja (fuller employment) dan penjebarannja keprojek-projek prioritas lebih terdjamin.

(3) Keahlian dan keterampilan tenaga kerdja dan pimpinan perusahaan perlu ditingkatkan. Dalam hubungan ini latihan-latihan kerdja, baik jang bersifat latihan-latihan dasar (institutional training) maupun jang bersifat latihan-latihan tambahan dalam perusahaan (in plant/on the job training) perlu disempurnakan. Peningkatan keahlian ini djuga diperlukan bagi tenaga-tenaga pimpinan perusahaan (management development training). Peningkatan keahlian buruh dan pimpinan perusahaan setjara terus-menerus diprojek-projek prioritas itu tentu akan menaikkan produktivitas dan efisiensi kerdjanja serta lebih mendjamin tertjapainja tudjuannja (target). Djuga untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu diperlukan peralatan dan dana-dana lebih besar.

(4) Peningkatan pemberian djasa-djasa. Dalam rangka pelaksanaan Berdikari ini, Departemen Perburuhan dewasa ini sedang menjusun Gerakan Turun Ke Perusahaan (Gertuper) jang dilaksanakan sesuai dengan berkembangnja perekonomian jang sedang tumbuh (expanding economy). Pembinaannja dimulai dengan mengembangkan kapasitas-kapasitas produksi jang ada dengan tudjuan meningkatkan daja guna pada chususnja dan menghilangkan rintangan-rintangan jang menghambat kelantjaran perusahaan pada umumnja. Untuk keperluan itu telah dibentuk team-team kerdja dibeberapa ibukota propinsi jang terdiri atas ahli-ahli dalam soal-soal:

a. manpower budgeting dan penjederhanaan tjara kerdja.
b. latihan kerdja (job-skill training).
c. keselamatan kerdja dan kesehatan buruh.
d. gerakan buruh dan dewan perusahaan.
e. upah dan sjarat-sjarat kerdja.

Sifat tugas dari team-team tersebut diatas adalah konsultasi perusahaan (management consultation), untuk bersama-sama dengan B.P.U. dan/atau direksi perusahaan jang bersangkutan „mengidentifisir" hal-hal jang perlu dan mungkin diperbaiki

untuk kelantjaran dan kemadjuan perusahaan pada umumnja. Sebagai langkah pertama Departemen Perburuhan menundjuk sebagai projek pertjobaan (pilot project) enam perusahaan:

(1) P.N. Bangunan Negara, Djakarta.
(2) P.N. Kereta Api, Bandung.
(3) P.N. Karung Delanggu, Djawa Tengah.
(4) P.P.N. Pabrik Gula Kebon Agung, Malang.
(5) Remilling, Palembang, dan
(6) Pemintalan, Medan.

Untuk langkah selandjutnja aktivitas akan ditudjukan pada projek-projek prioritas Berdikari lainnja dengan mempergunakan pengalaman-pengalaman jang akan diperoleh dari enam perusahaan jang pertama tersebut diatas.

Dengan melaksanakan tindakan-tindakan peningkatan daja tahan mental, penggunaan tenaga ahli, peningkatan keahlian/keterampilan dan memperbesar pemberian djasa-djasa itu, maka aktivitas unsur-unsur perburuhan diintegrasikan dengan gerakan nasional untuk mensukseskan pelaksanaan Berdikari dibidang ekonomi dan bidang-bidang lainnja.

9. Perkembangan Organisasi Departemen Perburuhan.

Dalam masa pendjadjahan Belanda dahulu, kaum buruh tidak mendapat perhatian, perkembangan gerakan buruh dirintangi dan ditindas dengan mengadakan pelbagai matjam peraturan jang menjangkut kedudukan Bangsa Indonesia, sedang djaminan sosial bagi kaum buruh tidak atau sedikit sekali diperhatikan oleh si-pendjadjah.

Pada waktu Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannja pada tanggal 17 Agustus 1945, dibentuklah Kementerian Sosial jang berkedudukan di Djakarta jang mengurus pula soal-soal perburuhan.

Setelah tentera kolonial Inggris menduduki kota Djakarta dan suasana mendjadi genting, maka pada tanggal 10 Djanuari 1946 Kementerian Sosial dipindahkan ke Jogjakarta. Dari Jogjakarta inilah, Kementerian Sosial mulai mendjalankan tugasnja sebagai tertjantum dalam pasal 27 ajat 2, pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang Dasar 1945.

Adapun soal-soal jang bersangkut-paut dengan perburuhan diselenggarakan oleh:

a. Bagian Perburuhan dari Kementerian Sosial.
b. Kantor Pusat Pengawasan Perburuhan dengan tjabang-tjabangnja di Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur.

c. Kantor Pusat Keselamatan Kerdja dengan tjabangnja di Tjirebon.

Setelah ternjata bahwa masalah perburuhan makin lama makin luas dan kompleks, maka pada tanggal 1 Djuli 1947 Bagian Perburuhan dipisahkan dari Kantor Pusat Kementerian Sosial dan didjadikan Djawatan Perburuhan jang berdiri sendiri dalam lingkungan Kementerian Sosial.

Djawatan Perburuhan ini terdiri atas:

a. Bagian Perburuhan Umum dengan Kantor Perwakilan didaerah-daerah Keresidenan.
b. Kantor Pengawasan Perburuhan ditiap Propinsi.
c. Kantor Pengawasan Keselamatan Kerdja dengan tjabangnja di Tjirebon.

Pada tanggal 3 Djuli 1947 dengan terbentuknja Kabinet Amir Sjarifudin, terbentuklah pula Kementerian Perburuhan jang pertama, dengan S.K. Trimurty sebagai Menterinja.

Penggabungan kembali dari Kementerian Sosial dengan Kementerian Perburuhan mendjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial dalam Kabinet Presidentil dalam bulan Pebruari 1948, didasarkan atas alasan-alasan rasionil.

Setelah Negara Indonesia Serikat terbentuk, maka dalam Kabinet Republik Indonesia jang berpusat di Jogjakarta, Kementerian Perburuhan diadakan lagi dengan Dr. Maas sebagai Menteri Perburuhan, sedang sebagai Menteri Perburuhan Republik Indonesia Serikat (R.I.S.) diangkat Wilopo S.H. dan dengan lahirnja Negara Kesatuan, maka mulai tanggal 19 September 1950, R.P. Suroso diangkat sebagai Menteri Perburuhan.

Kalau kita meneropong usaha-usaha dalam lapangan perburuhan pada waktu „periode Jogja" jang mengalami pelbagai tjorak kesukaran, dapatlah dikatakan, bahwa Kementerian Perburuhan telah berhasil meletakkan dasar-dasar jang progresif bagi pemetjahan masalah perburuhan di Indonesia dan perkembangan perburuhan pada umumnja jakni:

a. tertjiptanja Undang-undang Ketjelakaan dalam tahun 1947, Undang-undang Kerdja dalam tahun 1948, serta Undang-undang Pengawasan Perburuhan dalam tahun 1948 pula.
b. menanam pengertian-pengertian dalam masjarakat Indonesia, chususnja dengan menghubung-hubungkan usaha-usahanja dengan tudjuan Rakjat Indonesia pada umumnja jaitu mempertahankan dan menjelamatkan Negara Republik Indonesia.

Pengakuan Kedaulatan Negara Republik Indonesia pada achir Desember 1949 dan terbentuknja Negara Kesatuan pada bulan September 1950 mendorong Kementerian Perburuhan untuk dapat lebih njata mentraceer usaha-usahanja dan mempergiat aparat-aparatnja jakni:

a. Djawatan Penempatan Tenaga untuk menghadapi soal-soal penempatan tenaga kerdja termasuk penjelenggaraan latihan-latihan kerdja.
b. Kantor-kantor Penjuluh Perburuhan Daerah untuk soal-soal jang berkenaan dengan hubungan perburuhan.
c. Djawatan Pengawasan Perburuhan untuk mengawasi berlakunja undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan serta mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerdja dan keadaan perburuhan dalam arti jang seluas-luasnja.
d. Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja untuk mengawasi peraturan-peraturan perburuhan jang berkenaan dengan keselamatan buruh.
e. Kantor Urusan Perselisihan Perburuhan jang mengusahakan penjelesaian perselisihan perburuhan antara buruh dan madjikan.

Berhubung dengan keinginan dan hasrat daerah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah-tangga sendiri seluas-luasnja, maka dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1958 urusan-urusan kesedjahteraan buruh, kesedjahteraan penganggur dan pemberian kerdja kepada penganggur diserahkan kepada Daerah-daerah Tingkat I.

Penjerahan kekuasaan mengenai hal tersebut dilaksanakan daerah demi daerah dan dilakukan setelah daerah jang bersangkutan menjatakan kesediaannja untuk menerima penjerahannja. Hingga sekarang ini baru ada 6 Daerah Tingkat I jang telah menerima penjerahan tersebut, namun demikian, Departemen Perburuhan masih tetap memberikan djasa-djasanja kepada Kantor Dinas Perburuhan Daerah Tingkat I kalau diminta.

Pada bulan Mei 1958 Kementerian Perburuhan telah mengirimkan team ke Palembang, Medan dan Padang untuk merehabilitir, menormalisir dan mengkonsolidir Kantor-kantor Perburuhan jang telah dikatjaukan oleh P.R.R.I.

Dengan meningkatnja perdjoangan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan menjelamatkan Negara Republik Indo-

nesia dan perkembangan perburuhan chususnja, serta pengumuman Dekrit Presiden kembali ke Undang-undang Dasar 1945 jang diberkahi pula dengan lahirnja Manifesto Politik R.I. tanggal 17 Agustus 1959, maka Departemen Perburuhan terus berusaha menjempurnakan organisasi dan aparat-aparatnja, (jang terachir dengan Peraturan Menteri Perburuhan No. 8 tertanggal 12 September 1964 jo No. 13 tahun 1964 tertanggal 27 Nopember 1964), sehingga pada tanggal 1 April 1965 Departemen Perburuhan telah mempunjai kantor-kantor sebagai berikut:

1. Kantor Pusat Departemen Perburuhan dengan 19 Biro serta Kabinet Menteri.
2. Direktotrat:
   a) Hubungan Perburuhan
   b) Pengawasan Perburuhan
   c) Pengawasan Keselamatan Kerdja
   d) Penempatan Tenaga Kerdja
   e) Latihan Kerdja beserta kantor-kantornja didaerah-daerah.
3. Lembaga:
   a) Keselamatan dan Kesehatan Buruh
   b) Pembinaan Buruh dan Pimpinan Perusahaan.
4. Jajasan:
   a) Usaha Karya Samudra-Pura (J.U.K.S.) jang mempunjai tugas membantu melantjarkan pekerdjaan lalu-lintas barang dipelabuhan-dipelabuhan, chususnja dalam usaha pengganjangan negara boneka Malaysia serta mengadakan usaha dalam bidang kesedjahteraan buruh.
   b) Penampungan Penderita Tjatjat.
5. Dana Djaminan Sosial.
6. Kantor Perburuhan Irian Barat (Peraturan Menteri Perburuhan No. 3 tahun 1962).

Selandjutnja dalam rangka organisasi dan tugas Departemen Perburuhan:

1. Dengan Keputusan Menteri Perburuhan No. 25 tahun 1965, di-ketudjuhbelas ibukota Daerah Tingkat I per 1 April 1965 telah dibentuk:

Badan Koordinasi Perburuhan Daerah (disingkat Bakorda) jang anggotanja terdiri dari Kepala-kepala Kantor Daerah dari masing-masing Direktorat serta wakil dari Lembaga Pembinaan Buruh dan Pimpinan Perusahaan dan Dana Djaminan Sosial setempat. Tugas Bakorda ialah:

Keluar:

a) Mewakili Departemen Perburuhan dalam menghadapi Pemerintah/Instansi Daerah.
b) Membantu/mendampingi Gubernur/Kepala Daerah dalam menghadapi soal-soal perburuhan didaerahnja masing-masing.

Kedalam:

Mengusahakan koordinasi agar tertjapai efisiensi dan kesatuan dalam mendjalankan kebidjaksanaan perburuhan.

2. Dengan Peraturan Menteri Perburuhan No. 3 tahun 1965 dibentuk Kantor-kantor Perburuhan Daerah (Kaperbda) di Den Pasar, Mataram, Kupang dan Djambi, disamping Kantor Perburuhan Daerah di Palangka Raya dan Tandjung Priok jang telah ada. Tugas dari Kaperbda ialah meliputi semua bidang tugas Departemen Perburuhan.

Untuk mewudjudkan adanja social participation, social control dan social support dalam tubuh Departemen Perburuhan di Pusat dan di Daerah diadakan Dewan Pertimbangan Pegawai.

Achirulkalam, dibawah ini tertjatat sebuah ichtisar mengenai perkembangan organisasi Departemen Perburuhan dengan djumlah Kantor-kantornja.

Dalam tahun 1945/1946:

	Djumlah Kantor
1. Kantor Pusat Kementerian Sosial dengan Bagian Perburuhan	1
2. Kantor Pusat Pengawasan Perburuhan dengan 3 tjabangnja di Djawa Barat/Tengah/Timur	4
3. Kantor Pusat Keselamatan Kerdja dengan tjabangnja di Tjirebon	2
Djumlah seluruhnja	7

Dalam tahun 1955:

1.	Kementerian: Kantor Pusat dengan 11 Bagian dan 2 Biro	1
2.	Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan	1
2.	Djawatan Hubungan Perburuhan:	
	Kantor Pusat	1
	Kantor Daerah	8
	Kantor Resort	38
4.	Djawatan Pengawasan Perburuhan:	
	Kantor Pusat	1
	Kantor Daerah	8
	Kantor Resort	28
5.	Djawatan Penempatan Tenaga:	
	Kantor Pusat	1
	Kantor Inspeksi	5
	Kantor Daerah	37
	Kantor Tjabang	46
6.	Panitia Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat	1
	Panitia Daerah	9
	Djumlah seluruhnja	185

Dalam tahun 1965 (per 1-4-1965)

1.	Departemen: Kantor Pusat dengan 19 biro serta Kabinet Menteri	1
2.	Direktorat: Kantor Pusat	5
3.	Lembaga	2
4.	Jajasan	2
5.	Dana	1
6.	Kantor Perburuhan Irian Barat di Sukarnapura	1
7.	Kantor Daerah Direktorat Hubungan Perburuhan	9
	Kantor Resort	4
	Kantor Tjabang	3
8.	Kantor Daerah Direktorat Pengawasan Perburuhan	8
	Kantor Resort	32

9.	Kantor Daerah Direktorat Pengawasan Keselamatan Kerdja	8
	Kantor Resort	3
10.	Kantor Daerah Direktorat Penempatan Tenaga Kerdja	6
	Kantor Kerdja	37
	Kantor Tjabang	49
11.	Pusat Latihan Kerdja	9
	Sedang dibangun (Palembang)	1
12.	Badan Koordinasi Perburuhan Daerah (Bakorpda)	17
13.	Kantor Perburuhan Daerah (Kaperbda)	6
	Djumlah seluruhnja	265 Kantor.

Departemen Perburuhan masih terus berusaha untuk memperkembangkan organisasinja dengan antara lain membentuk Kantor-kantor Daerah dari masing-masing Direktorat ditiap ibukota Daerah Tingkat I, jang wilajahnja sama dengan Daerah Tingkat I jang bersangkutan.

10. Penutup.

Demikianlah laporan Departemen Perburuhan mengenai masalah-masalah dan aktivitas-aktivitas jang berkembang dibidang perburuhan dalam proses Revolusi Indonesia selama 20 tahun ini.

Dari laporan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, jaitu:

pertama: kesadaran politik kaum buruh jang tinggi selama Revolusi ini, demikian pula pengorbanan-pengorbanan jang telah diberikan selama ini;

kedua : masalah perburuhan dengan segala seginja jang makin lama makin berkembang dan bersifat kompleks;

ketiga : usaha-usaha organisasi dan lembaga-lembaga perburuhan untuk memetjahkan persoalan-persoalan itu dan menjesuaikannja dengan irama revolusi, walaupun peralatan dan dana-dananja djauh dari mentjukupi, dan

keempat: walaupun demikian, tetap didjundjung tinggi daja tahan, semangat kerdja dan perdjoangan serta rasa optimisme untuk mensukseskan Dwikora dan revolusi.

PERBURUHAN DI IRIAN BARAT.

1. Tugas dan organisasi.

Masa Pemerintahan Belanda:

Persoalan perburuhan di Irian Barat baru mendapat perhatian jang agak mendalam setelah mulai dipekerdjakannja seorang pengawas perburuhan (arbeidinspecteur) pada tahun 1953 jang diserahi tugas-tugas penjelidikan dan persiapan dari pembentukan suatu instansi perburuhan dalam pemerintahan „Nederlands Nieuw Guinea".

Setelah mengalami pelbagai matjam perobahan dan perkembangan, achirnja instansi perburuhan didjadikan suatu bagian jang chusus dari Dinas Urusan Sosial dan Kehakiman dengan tugas kewadjiban jang ditetapkan dalam Gouvernments Blad van NNG. 1959 No. 28, pasal 4 ajat *f* dan *g* sebagai berikut:

(1) memadjukan dan memperkembangkan perundang-undangan perburuhan dengan djalan mengurus segala persoalan perburuhan jang telah ditentukan oleh Organisasi Perburuhan Internasional termasuk urusan-urusan penempatan tenaga, sjarat-sjarat perburuhan, pekerdjaan orang-orang muda dan wanita, kesehatan, keselamatan dan kesedjahteraan buruh, djaminan sosial buruh, hubungan perburuhan, perburuhan dilaut, persoalan perburuhan menjangkut orang-orang jang berada diluar negaranja sendiri, perpindahan buruh dan statistik perburuhan.

(2) melaksanakan dan mengawasi didjalankannja peraturan-peraturan perburuhan dan ketjelakaan dan mengawasi penjelesaian perburuhan.

Diseluruh Irian Barat terdapat 2 Kantor Tjabang Pengawas Perburuhan ialah di Kota Baru dan di Manokwari.

Soal-soal mengenai keselamatan kerdja diurus oleh Kantor Tjabang Tunggal Pengawasan Keselamatan Kerdja di Kotabaru. Disamping kantor-kantor tjabang tersebut terdapat satu Kantor Penempatan Tenaga jang sedang dipersiapkan mendjadi suatu bagian tersendiri (Bagian Penempatan Tenaga) dari Dinas Urusan Sosial dan Kehakiman.

Pada Bagian Urusan Perburuhan dipersiapkan untuk dirobah sedemikian rupa sehingga tenaga-tenaga akademi (sardjana) diganti oleh tenaga-tenaga menengah jang terdidik. Untuk keperluan itu sedjak Agustus 1962 telah diadakan pengangkatan untuk djabatan Pengawas Perburuhan, Penilik Perburuhan dan

Penilik Keselamatan Kerdja orang-orang penduduk aseli jang pada umumnja belum memenuhi sjarat.

Masa Pemerintahan UNTEA:

Pada saat pengambil-alihan hanja tinggal dua orang tenaga akademis teknis Belanda jang berutgas berturut-turut sebagai Sekertaris dan Kepala Dinas Urusan Sosial dan Kehakiman. Bagian Urusan Perburuhan mengalami kesukaran karena pegawai-pegawai jang masih tinggal terdiri dari tenaga-tenaga penduduk aseli jang belum berpengalaman dan tidak terlatih sama sekali.

Untea diminta dua orang tenaga ahli keselamatan kerdja dari Pemerintah R.I. Berhubung persoalan-persoalan perburuhan makin bertambah ruwet, maka dimintakan lagi seorang tenaga ahli perburuhan dari Pemerintah R.I. jang diserahi pimpinan dari Bagian Urusan Perburuhan. Disamping itu, pada Bagian Urusan Perburuhan ditambah dengan seorang tenaga harian ialah sardjana hukum untuk urusan-urusan statistik dan administrasi.

Reorganisasi dan usaha-usaha selandjutnja:

Persiapan-persiapan diadakan kearah pembentukan Kantor Perburuhan Irian Barat berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan R.I. No. 3 tahun 1962. Tjabang-tjabang Kantor Perburuhan di Kotabaru dan Manokwari dibentuk dan Bagian Urusan Perburuhan telah dipersiapkan untuk mendjadi Kantor Perburuhan Irian Barat terlepas dari Dinas Urusan Sosial dan Kehakiman.

Direntjanakan pembentukan Kantor-kantor Tjabang di Biak, Sorong dan Merauke.

Susunan organisasi dari Dinas Perburuhan disesuaikan dengan djawatan-djawatan perburuhan jang ada dalam lingkungan Departemen Perburuhan.

Tugas kewadjiban dan wewenang dari Dinas Perburuhan adalah mengurus semua persoalan perburuhan di Propinsi Irian Barat.

2. Politik Perburuhan.

Politik Perburuhan dizaman pemerintahan Belanda, sedjalan dengan kebidjaksanaan umum pemerintah di Irian Barat ditudjukan kepada usaha-usaha mendjaga serta memelihara keseimbangan sosial ekonomi antara kota-kota dan daerah-daerah

pedalaman. Pada pihak satu diusahakan supaja penduduk diturut sertakan dalam alat-alat pemerintahan dan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan swasta jang terutama terdapat dipusat-pusat kota atau sekitarnja dan pada pihak jang lain supaja tenaga-tenaga lelaki jang sanggup bekerdja tidak terlalu banjak ditarik dari pedalaman hal mana akan dapat mengganggu keadaan sosial ekonomis dan menghalangi kemadjuan pembangunan didaerah pedalaman.

3. Penggunaan Tenaga Kerdja.

Dalam tahun 1960 semasa Pemerintah Belanda, djumlah pegawai/buruh Pemerintah diseluruh Irian Barat, ada kurang lebih 8.700 orang, ialah 52% penduduk aseli dan 48% orang Belanda. Pada tahun itu terdapat 15.910 orang buruh penduduk aseli Irian Barat, 44% atau 7.040 berasal dari daerah daerah pedalaman. Lebih dari setengah dari djumlah buruh seluruhnja di Irian Barat (64% atau 10.221 orang) berpusat dikota-kota seperti Kotabaru, Biak, Manokwari, Sorong dan Merauke sedang selebihnja ialah 36% atau 5.689 orang bekerdja ditempat-tempat lain. Dalam tahun 1960 33% atau 5.256 orang dari seluruh djumlah buruh terdapat dalam sektor „bangunan" dan selebihnja ialah 67% atau 10.654 orang bekerdja disektor-sektor lainnja. Dari padanja 999 orang atau 6,3% terdiri dari kaum wanita.

Dalam tahun 1962 penduduk Irian Barat ditaksir berdjumlah 700.000 orang diantaranja 400.000 orang jang sudah hidup dalam suasana „kota" dan mendjalankan kegiatan dalam masjarakat kota, sedangkan lainnja belum terlepas dari kehidupan dalam masjarakat primitif jang terpentjil.

Dalam pertengahan tahun 1962 setelah ada persetudjuan antara Indonesia dan Belanda, djumlah orang-orang jang bekerdja menurun sebagai akibat dari dihentikannja usaha-usaha dilapangan pembangunan. Menurut tjatatan pada achir Desember 1962 terdapat 3.681 orang jang menganggur. Untuk menampung persoalan ini oleh UNTEA telah disediakan biaja sebesar Fl. 580.000 untuk usaha-usaha pemberian kerdja dan pemulangan mereka dengan keluarganja ketempat-tempat asalnja.

Djumlah penganggur pada achir Desember 1963 ditaksir 5.000 orang, kebanjakan terdiri dari pekerdja-pekerdja bangunan.

Antar kerdja:

Pada tahun 1960 di Kotabaru dan Manokwari tertjatat 611 orang penganggur jang mendaftarkan diri dan 40% dari djumlah ini dapat ditempatkan. Hasil-hasil antar kerdja dari Bagian Urusan Perburuhan di Kotabaru dan Manokwari selama tahun 1963 ialah: pendaftaran pentjari kerdja: 1.810 orang, ditempatkan 683 orang, sisa pentjari kerdja 1.127 orang.

Pemberian Kerdja:

Usaha-usaha pemberian kerdja kepada 25 orang di Manokwari dan 11 orang di Kotabaru dengan djalan memberikan bantuan modal kepada usaha-usaha pertukangan kaju, sebesar Irian Barat Rp. 5.000 selama 1963.

Latihan Kerdja:

Pada achir 1960 di Irian Barat tertjatat 13 buah/matjam kursus dinas untuk pendidikan dalam djabatan-djabatan pemerintahan, kepolisian, kesehatan, keuangan, kadaster, topografi, P.T.T., pertanian, perikanan, kehewanan, kehutanan dan pelajaran rendah dengan djumlah pengikut kira-kira 1.000 orang. Lamanja pendidikan berkisar pada 3 bulan sampai 5 tahun. Didalam rangka pendidikan ini, Pemerintah Belanda telah mengusahakan pengiriman tjalonnja keluar daerah (negeri), diantaranja tudjuh orang ke Medical School di Port Moresby dan dua orang di Suva. Selandjutnja enam orang telah dikirimkan pula ke Technical Training College di Port Moresby untuk pendidikan tjalon ahli-ahli P.T.T.; di Nederland pada tahun 1960 tertjatat 35 orang penduduk aseli Irian Barat jang sedang mengikuti pendidikan teori dan praktek. Diantaranja terdapat tiga belas orang wanita.

Untuk mentjukupi akan tenaga-tenaga terlatih di Irian Barat, maka selama pertengahan kedua dari tahun 1963 telah disiapkan adanja Pusat Latihan Kerdja di Kotabaru jang akan mendidik tjalon-tjalon djurutik, pegawai administrasi ringan, tukang kaju, tukang besi (bubut, pelat dsb.) dan pembantu montir mobil dsb. Tjalon-tjalon jang terdaftar diseluruh Irian Barat berdjumlah 188 orang. Diharapkan Pusat Latihan Kerdja tersebut akan dapat dimulai permulaan tahun 1964.

4. Hubungan Perburuhan.

Diseluruh Irian Barat terdapat 2 organisasi buruh ialah: Persekding (Persatuan Sekerdja Kristen Irian Barat) beranggotakan 3.000 orang, dan S.P.K. (Serekat Pekerdja Katolik) beranggotakan 1.100 orang.

Selama 1960 di Irian Barat telah hilang 1.433, 5 hari kerdja akibat perselisihan perburuhan. Selama th. 1963 tertjatat 14 perselisihan perburuhan.

5. Pengawasan Perburuhan (Perundang-undangan).

Mengenai perundang-undangan tidak banjak diketahui, ketjuali beberapa jang berhubungan dengan persoalan pengerahan tenaga kerdja. Pada th. 1960 sedang dipersiapkan rentjana undang-undang kerdja jang baru jang akan diberlakukan pada th. 1961. Dalam th. 1963 setapak demi setapak telah dimulai diberlakukan beberapa perundang-undangan Perburuhan R.I. diseluruh Irian Barat a.l.: (1) Peraturan Menteri Perburuhan No. 90 tahun 1955 (pendaftaran Serikat Buruh), (2) Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1954 (tjara membuat dan mengatur perdjandjian perburuhan) (3) Undang-undang No. 23 tahun 1953 tentang „Kewadjiban melaporkan perusahaan", (4) Undang-undang No. 3 tahun 1958 tentang „Penempatan Tenaga Asing" dan (5) sebagian dari Undang-undang Kerdja 1948.

Perusahaan jang terdaftar selama tahun 1963 berdjumlah 54 buah diseluruh Irian Barat.

Pelaksanaan dari Undang-undang mengenai penempatan tenaga asing, baru didjalankan di Kotabaru, Manokwari, Sorong dan Merauke. Djumlah tenaga asing jang telah diberikan izin bekerdja ada 370 orang.

Selama 1963 telah diadakan pemeriksaan kepada 50 buah perusahaan diseluruh Irian Barat, sebagian besar terletak dikota-kota besar seperti Kotabaru, Manokwari. Sorong dan Merauke.

6. Pengawasan Keselamatan Kerdja.

Dalam tahun 1960 diseluruh Irian Barat terdjadi 84 kali ketjelakaan perusahaan jang mengakibatkan 58 orang buruh luka-luka ringan, 21 orang luka-luka berat dan 5 orang meninggal.

Dalam tahun 1963 djumlah perusahaan-perusahaan jang diperiksa ada 23 buah. Djumlah ketjelakaan selama 1963 ada 10 kali untuk seluruh Irian Barat.

7. Produktitvitas Kerdja.

Oleh Pemerintah Belanda bersama-sama dengan pengusaha-pengusaha dan organisasi buruh serta instansi-instansi keagamaan telah diadakan usaha-usaha kearah mempertinggi dajaguna dan disiplin kerdja dengan djalan mengadakan penerangan, pendidikan dan latihan-latihan djabatan.

Pemerintah Republik Indonesia, dibidang produktivitas kerdja, mengadakan usaha-usaha jang lebih bersifat penjelidikan. Produktivitas kerdja buruh penduduk asli pada umumnja masih rendah, disebabkan masih singkat waktunja mengindjak bidang perburuhan, rasa tanggung djawab, ketekunan dan disiplin belum dikenal.

Berhubung dengan itu maka dalam tahun 1964 gerakan dajaguna tidak hanja akan membatasi kegiatan dalam bidang penjelidikan dan konsultasi perusahaan, akan tetapi perlu ditjurahkan perhatian kepada usaha-usaha penjaluran langsung, penerangan dan pengjakinan setjara umum.

*
**

LAMPIRAN B.

KONPERENSI PENDAHULUAN KONPERENSI BURUH ASIA-AFRIKA.

1. Perkembangan Gagasan K.B.A.A.

Semendjak berhasilnja K.A.A. di Bandung pada tahun 1955 maka terasa perlu untuk mengadakan pula konperensi-konperensi A-A bagi lain-lain golongan, agar dapat diketemukan rentjana-rentjana dan tjara-tjara guna mengadakan tindakan jang seragam dan terkombinasi, dengan tudjuan untuk memetjahkan serta menjelesaikan masalah-masalah bersama jang timbul dinegeri-negeri baru di Asia dan Afrika.

Tjita-tjita untuk mengembangkan tindakan jang seragam dan terkombinasi telah direalisasikan dengan adanja:

— Konperensi Mahasiswa A-A di Bandung (th. 1956).
— Konperensi Wartawan A-A di Tokyo (th. 1956).
— Konperensi Ahli Hukum A-A di New Delhi (th. 1957).
— Konperensi Solidaritas Rakjat A-A (th. 1958).
— Konperensi Ahli Hukum A-A di Conackry (th. 1961).
— Konperensi Solidaritas Rakjat A-A di Moshi (th. 1963).
— Konperensi Wartawan A-A di Djakarta (th. 1963).

Djuga dikalangan buruh dirasakan pentingnja untuk mengadakan pertemuan antara Serikat-serikat Buruh A-A.

Di Indonesia sendiri S.B.-S.B. telah mempunjai gagasan itu sedjak 1954. Tetapi berhubung dengan kesukaran serta keadaan umum didunia, baru pada tahun 1962 gagasan K.B.A.A. mendapat bentuk-bentuk jang lebih njata.

2. Latar belakang politik.

Dalam waktu kurang lebih 20 tahun setelah Perang Dunia II telah lahir lebih dari 30 negara merdeka, jang terus menerus berusaha untuk membebaskan diri dari sisa-sisa terachir daripada imperialisme dan kolonialisme. Disamping itu rakjat-rakjat dibanjak daerah A-A terus berdjoang untuk mendapatkan kemerdekaannja serta membebaskan diri dari belenggu imperialisme dan kolonialisme.

Walaupun imperialisme dan kolonialisme telah mendapat pukulan-pukulan hebat, namun mereka masih berusaha untuk mempertahankan diri dan ingin berkuasa kembali.

Mereka menimbulkan ketegangan-ketegangan diantara rakjat-rakjat A-A, dengan segala tjara merintangi tumbuhnja kekuatan bangsa-bangsa A-A jang baru, serta dengan sekuat tenaga menghalang-halangi perkembangan dan menambah beban derita rakjat A-A. Untuk mentjapai tudjuan djahatnja itu dilahirkanlah neokolonialisme jang sebenarnja merupakan dominasi tak langsung dibidang politik, ekonomi, sosial, kebudajaan, militer dan teknik.

Oleh karena itu, tanpa membebaskan diri dari pendjadjahan dan kekuasaan imperialis serta kolonialis dan djuga tanpa menghapuskan kekuatan asing sampai keakar-akarnja, tidaklah mungkin bagi rakjat-rakjat jang bersangkutan dan terutama bagi buruh untuk menikmati makna sebenarnja daripada kemerdekaan mereka. Inilah sebabnja, buruh dan rakjat-rakjat A-A mempunjai kewadjiban jang bersamaan untuk melandjutkan perdjoangan mereka melawan imperialisme, kolonialisme serta mengadakan konsolidasi kemerdekaan nasional dan mengembangkan ekonomi nasionalnja menudju kemakmuran jang merata.

Berhubung dengan kesedaran politik jang selalu bertambah, maka para buruh dan S.B.-S.B. A-A dapat mengembangkan keinsjafan untuk kerdjasama serta saling bantu-membantu dalam perdjoangan mereka terhadap penindas-penindas mereka, tidak sadja dalam rangka nasional, tetapi djuga dalam rangka solidaritas internasional.

Sebagai akibat daripada penguasaan kolonial tingkat penghidupan rakjat dan buruh adalah sangat rendah. Sumber alam jang berlimpah-limpah telah dieksploitir dan diangkut pergi sedangkan buruh serta rakjat di A-A tinggal miskin dan terkebelakang. Perdjoangan untuk memperbaiki keadaan jang mendesak ini tidak dapat dilepaskan daripada perdjoangan melawan imperialis, kolonialis dan neo-kolonialis. Tetapi pemutusan belenggu-belenggu itu sadja tidak dapat memperbaiki keadaan jang sangat melarat dinegerinja sendiri.

Masalah-masalah upah rendah, pendapatan nasional jang tak merata, diskriminasi upah antara buruh laki dan wanita, keadaan kesehatan dan sjarat-sjarat kerdja jang buruk, dan sebagainja, masih harus dihadapi bersama-sama oleh buruh-buruh A-A.

Disamping itu sebagai akibat daripada penindasan kolonialis perkembangan tingkat kebudajaan rakjat serta kebudajaan

nasional djuga dimatikan, sedangkan kerdjasama dibidang kebudajaan sama sekali dipatahkannja.

Hanja setelah banjak negara A-A memperoleh kemerdekaannja dapat diusahakan kebangunan kebudajaan, jang merupakan pula salah satu tugas pokok daripada buruh dan S.B.-S.B.

Selandjutnja sumber utama daripada ketegangan-ketegangan jang membahajakan perdamaian dunia jang akan menghambat perkembangan negara dan rakjat jang baru merdeka adalah adanja imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme. Oleh karena itu hal jang pertama-tama harus dilaksanakan untuk mempertahankan perdamaian dunia adalah menghantjurkan kekuatan-kekuatan itu selekas mungkin, jang berarti akan terbukanja kemungkinan untuk membangun dunia baru bagi semua orang, dimana semua bangsa mempunjai hak untuk memilih dengan bebas sistim politik, ekonomi dan kepribadian mereka jang sesuai dengan aspirasi nasional masing-masing.

Salah suatu masalah terpenting dalam perdjoangan buruh dan rakjat seluruh dunia adalah untuk menghapuskan produksi, penimbunan, pertjobaan dan pemakaian sendjata-sendjata nuklir.

Imperialisme dan kolonialisme selalu mendjalankan diskriminasi terhadap bangsa-bangsa lain dengan tudjuan untuk menindas mereka sehingga tidak membahajakan kedudukan jang diperolehnja setjara tak adil. Diskriminasi ini dapat didasarkan pada pembedaan warna kulit atau agama jang bertentangan dengan segala perasaan keadilan dan hak-hak azasi serta persamaan, seperti jang diakui dalam piagam P.B.B.

Dengan demikian adalah kewadjiban rakjat A-A untuk menggabungkan serta mengkoordinasi segala tenaga mereka guna menghantjurkan setiap bentuk diskriminasi, jang merupakan salah suatu aspek penting daripada imperialisme.

3. Tudjuan K.B.A.A.

Guna mengatasi kesulitan jang dihadapi bersama di Asia dan Afrika, gabungan-gabungan S.B.-S.B. Asia dan Afrika merasa perlu mengadakan tukar-menukar fikiran dan pengalaman, berdasarkan prinsip saling bantu-membantu, kerdjasama jang bersahabat dan solidaritas antara semua gabungan S.B. diantara negara A-A, dengan tudjuan untuk mempertahankan kemerdekaan nasional jang penuh bagi semua negara dan rakjat di Asia-Afrika, untuk mempertahankan hak kebebasan demokrasi bagi buruh dan rakjat dan untuk perkembangan sosial serta perdamaian dunia.

Untuk inilah diperlukan K.B.A.A. dengan tudjuan seperti berikut :

Memperkuat kerdjasama berdasarkan persahabatan, meluaskan serta memperkokoh persatuan antara buruh A-A tanpa memandang idiologi, kepertjajaan dan afilasi masing-masing organisasi. Kerdjasama antara buruh A-A adalah penting, mengingat, bahwa mereka mempunjai kepentingan jang bersamaan, mengingat pula bahwa kepentingan-kepentingan buruh A-A pertama-tama harus diurus oleh mereka sendiri.

Kerdjasama tersebut djuga penting dalam melandjutkan perdjoangan melawan imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme serta memperoleh dan mengkonsolidasi kemerdekaan nasional mempertahankan hak-hak demokrasi serta mentjapai perkembangan sosial dan mempertahankan perdamaian dunia.

Memperkuat solidaritas internasional antara Buruh A-A ini adalah sesuai dengan prinsip-prinsip Bandung tahun 1955 serta konperensi-konperensi lainnja.

4. Persiapan K.B.A.A.

Setelah mengadakan penelitian jang seksama mengenai keadaan S.B.-S.B. Asia-Afrika, Sekretariat Bersama Gabungan-gabungan Serikat Buruh Indonesia membentuk sebuah panitia persiapan sementara pada tahun 1962, atas dasar pertimbangan bahwa situasinja sudah tjukup masak untuk mengambil langkah-langkah konkrit kearah penjelenggaraan suatu Konperensi Buruh A-A.

Pada achir tahun 1962, panitia persiapan sementara dibubarkan karena telah selesai dengan tugas-tugasnja, dan selandjutnja Sekretariat Bersama Gabungan-gabungan Serikat Buruh sendiri dengan seluruh kekuatannja menghadapi masalah persiapan K.B.A.A.

Seruan kepada semua Serikat Buruh A.A. jang dikeluarkan dalam triwulan terachir tahun 1962 segera disusul dengan dikeluarkannja sebuah garis umum dan garis-garis pokok bagi suatu K.B.A.A. pada permulaan tahun 1963, dengan menggunakan bahan-bahan K.A.A. ke-I, K.T.T. Beograd 1961 dan bahan-bahan lainnja jang sementara itu diadjukan oleh pelbagai Serikat Buruh A.A.

Dari Serikat-serikat Buruh A.A. diterima sambutan-sambutan hangat terhadap garis umum dan garis-garis pokok tersebut. Walaupun demikian untuk lebih membentangkan persoalannja, tiap kesempatan jang ada, oleh Sekretariat Bersama diguna-

kan untuk mengadakan hubungan-hubungan langsung dengan pelbagai Serikat Buruh A.A. guna mendiskusikan dokumen jang akan didjadikan dasar pembahasan masalah-masalah bersama dalam suatu konperensi internasional.

Mendjelang achir Oktober 1963 oleh Sekretariat Bersama diterima pernjataan-pernjataan dukungan dari 33 negara A.A. jang meliputi 77 organisasi buruh. Sementara itu pelbagai pernjataan bersama setjara bilateral telah diadakan oleh pelbagai Serikat Buruh mengenai dukungan dan sokongan terhadap terselenggaranja suatu K.B.A.A.

Berdasarkan kenjataan-kenjataan itulah, maka pada permulaan 1963 oleh Sekretariat Bersama dikeluarkan undangan kepada 17 negara sponsor untuk menghadiri suatu konperensi persiapan K.B.A.A. jang direntjanakan untuk diadakan dari 27 Oktober — 2 Nopember 1963.

5. Kehadiran pada Konperensi Pendahuluan K.B.A.A.

Tamu-tamu dari luar negeri jang mengikuti konperensi antara lain :

1 orang	dari Zenkenro	—	Djepang
2 orang	dari N.A.T.U.	—	Pilipina
1 orang	dari F.A.F.L.U.	—	„
2 orang	dari G.T.U.C.	—	Ghana
2 orang	dari U.N.T.M.	—	Mali
2 orang	dari U.M.T.	—	Maroko
2 orang	dari V.F.T.U.	—	Vietnam
11 orang	dari A.C.F.T.U.	—	R. R. T.
1 orang	dari C.F.L.	—	Sri Langka
2 orang	dari S.L.F.P.T.U.F.	—	„
1 orang	dari D.W.C.	—	„
1 orang	dari C.C. of C.T.U.	—	„
1 orang	dari C.T.U.F.	—	„
4 orang	dari A.U.C.C.T.U.	—	Uni Sovjet

6. Hasil konperensi.

Konperensi antara lain menghasilkan suatu seruan jang disebut seruan Djakarta. Seruan tersebut berbunji :

Sedjak berhasilnja Konperensi A.A. di Bandung pada tahun 1955, usaha jang besar telah dilakukan untuk merintis djalan bagi kerdjasama jang lebih erat dan untuk memperkokoh solidaritas A.A. Semangat Konperensi Bandung telah dilandjutkan dipelbagai konperensi dalam mana rakjat-rakjat A.A. meng-

ambil bagian, seperti misalnja Konperensi Beograd dalam tahun 1961. Konperensi Moshi — Pebruari 1963 dan baru-baru ini Konperensi Addis Abeba dalam bulan Mei 1963.

Dorongan bagi perkembangan ini bersumber pada kenjataan bahwa dikalangan negara-negara Asia-Afrika memang terdapat persamaan tjita-tjita dan kepentingan dalam masalah pokok jang mereka hadapi. Dalam usaha mengembangkan persatuan A.A., gerakan buruh Asia dan Afrika memegang peranan istimewa dan terkemuka. Dengan menjadari kenjataan ini, 71 Gabungan Serikat Buruh dari 32 negeri A.A. menjetudjui usul Sekretariat Bersama Gabungan Serikat-serikat Buruh Indonesia untuk menjelenggarakan suatu Konperensi Buruh A.A.

Selain daripada jang tersebut terdahulu, konperensi mentjapai kebulatan mengenai tiga pokok persoalan jaitu :

1. Bidang Politi kjang meliputi masalah:
   — perdjoangan, pembebasan nasional;
   — perdjoangan untuk kemerdekaan ekonomi;
   — perdjoangan untuk demokrasi dan kemadjuan sosial;
   — perdjoangan untuk perdamaian dunia;
   — perdjoangan untuk persatuan dan solidaritas internasional.

2. Bidang organisasi untuk menetapkan waktu, tempat, atjara, peserta dan pembentukan sebuah panitia kerdja bagi K.B.A.A.

3. Bidang Pembiajaan, jang akan didasarkan pada saling membantu dan tanggung-djawab bersama.

Menurut rentjana Konperensi Buruh Afrika-Asia akan diselenggarakan dalam pertengahan tahun 1965.

DEPARTEMEN
URUSAN RESEARCH NASIONAL

PENDAHULUAN.

Dalam abad modern ini kehidupan negara dan bangsa banjak djuga dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil-hasil riset jang gilang-gemilang ternjata dapat dikendalikan dan diamalkan demi peningkatan kehidupan politik, ekonomi dan sosial negara dan bangsa.

Merupakan kenjataan bahwa hasil-hasil riset tidak sadja mengakibatkan revolusi dalam ilmu pengetahuan dengan timbulnja dan berkembangnja teori-teori dan bidang-bidang/tjabang-tjabang ilmu pengetahuan baru, tetapi penetrapannja jang tepat telah memungkinkan kemadjuan-kemadjuan luar biasa dalam usaha-usaha meninggikan tingkat kehidupan rakjat, seperti dibidang industri, pertanian, kesehatan dan sebagainja.

Penetrapan hasil-hasil riset dalam bidang pertanian memungkinkan untuk menanam djenis-djenis tanaman jang lebih baik dengan produksi dalam kwantitas jang lebih besar. Dengan bantuan ilmu kimia misalnja, dapat diprodusir djenis-djenis pupuk jang menjuburkan tanah dan djenis-djenis insektisida jang dapat memberantas berbagai penjakit dan hama tanaman. Kemungkinan ini memberikan sumbangan besar bagi bertambahnja produksi dan perbaikan makanan untuk rakjat.

Penemuan-penemuan dalam bidang kedokteran memungkinkan untuk mentjegah dan memberantas berbagai penjakit, memelihara kesehatan manusia dan memperpandjang hidupnja.

Penemuan-penemuan teknologi baru jang didasarkan atas hasil-hasil riset dan perbaikan teknik-teknik lama jang ditetapkan dalam industri memungkinkan untuk mempergunakan sumber alam dengan lebih efektif dan produktif. Teknologi persendjataan mengalami kemadjuan-kemadjuan pesat dan luar biasa. Kemadjuan-kemadjuan teknologi seperti misalnja „automation" menuntut adanja tenaga-tenaga jang berpendidikan mutu tinggi.

Alat transport dan telekomunikasi modern antar tempat, antar daerah dan antar negara dapat antara lain saling mempengaruhi adat istiadat, kebiasaan dan kebudajaan masing-masing.

Pula sesudah Perang Dunia ke II usaha-usaha dibidang ilmu pengetahuan mentjapai kemadjuan-kemadjuan raksasa dibidang-bidang jang hingga beberapa tahun jang lalu masih

merupakan impian dan spekulasi belaka. Para ahli riset telah berhasil melampaui tjakrawala jang melingkari batas ilmu pengetahuan manusia dan telah mendjeladjahi alam ilmu nuklir dan ilmu ruang angkasa luar. Rahasia „nuclear fission" dan rahasia angkasa luar kian hari kian diketahui, dan kini manusia tidak sadja mengagumi alam semesta, akan tetapi telah beladjar pula menaklukkannja demi kesedjahteraan umatnja.

Dengan memberikan sekedar fakta tersebut diatas, djelaslah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan research ilmiah jang efektif dan produktif memberikan sumbangan jang tidak terhingga bagi perkembangan ekonomi negara dan bagi usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan rakjat. Kini hubungan antar negara dan peranan masing-masing negara memperhitungkan djuga dimensi kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan alat vital dalam pembangunan negara dan dalam peningkatan ketahanan nasional. Salah satu sjarat mutlak guna dapat memperkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah diselenggarakannja risetnja ilmiah jang produktif dan bermutu tinggi. Untuk meninggikan ketahanan nasional adalah tugas sesuatu negara untuk memperhatikan dan mengadakan segala usaha untuk memperkembangkan dan mengerahkan segala potensi riset dan menggairahkan segala aktivitas riset.

Dalam perentjanaan perkembangan nasional, maka problematik jang dihadapi negara tidak sadja menggairahkan ilmu pengetahuan, teknologi dan riset demi pertumbuhan ekonomi jang pesat dan progresif serta demi peningkatan ketahanan nasional, tetapi djuga bagaimana memperhebat kehidupan riset ilmiah sebagai alat pembantu untuk turut mengisi penjebaran dan peresapan idiologi negara.

Seirama dengan djalannja Revolusi, maka setelah diproklamirkannja kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, mulailah masjarakat dan dunia ilmu pengetahuan Indonesia memikirkan tentang usaha-usaha memperkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mempergunakannja guna kepentingan pembangunan negara.

Riset sebagai dasar dari pada segala usaha ilmiah sebenarnja telah mempunjai tradisi hampir 200 tahun lamanja di Indonesia. Tetapi sebagai pentjerminan daripada politik

kolonial, maka usaha-usaha riset dalam masa pendjadjahan pada dasarnja ditudjukan guna kepentingan politik tersebut. Riset dalam bidang pertanian misalnja, terutama ditudjukan pada usaha-usaha memperbaiki dan memperbanjak produksi hasil-hasil perkebunan Belanda dan asing untuk ekspor seperti teh, kopi, kina, karet dan sebagainja. Akan tetapi dibidang lainnja, seperti kesehatan, geologi, vulkanologi, dan ilmu purbakala terdapat djuga kemadjuan-kemadjuan riset jang memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan tentang sumber alam Indonesia.

Sebagai akibat daripada politik pendidikan kolonial, maka hampir seluruh kegiatan riset diselenggarakan oleh sardjana-sardjana Belanda dan asing. Hal ini terutama disebabkan karena hampir tidak adanja kesempatan bagi Bangsa Indonesia untuk memasuki Perguruan Tinggi. Sekolah tinggi jang pertama jaitu „Technische Hogeschool" di Bandung baru dibentuk dalam tahun 1920 jang kemudian disusul dengan didirikannja „Rechts Hogeschool" di Djakarta pada tahun 1924 dan „Geneeskundige Hogeschool" djuga di Djakarta pada tahun 1927.

Dalam daftar jang dimuat dalam „Science and Scientists in the Netherlands Indies" (1945) tertjantum 1320 nama ahli Belanda dan hanja 110 ahli Indonesia jang bekerdja dalam bidang riset sebelum masa pendudukan Djepang.

Akibat politik kolonial tersebut sangat mempengaruhi usaha-usaha riset jang diselenggarakan sesudah kemerdekaan. Dalam negara jang masih muda usianja jang menghadapi masalah-masalah sangat besar dan multikompleks dalam pembangunannja, maka riset sebagai suatu usaha nasional terpaksa diselenggarakan dalam keadaan dimana fasilitas-fasilitas riset — seperti tenaga ahli, alat-alat ilmiah dan dana — masih ada dalam serba kekurangan. Pemerintah jang memahami tentang besarnja peranan ilmu pengetahuan dan teknologi berpendapat bahwa untuk dapat mentjapai hasil-hasil riset jang bermutu tinggi, maka fasilitas-fasilitas jang terbatas itu harus dapat dikerahkan dan dikembangkan dengan efektif dan produktif.

Perhatian terutama harus diberikan kepada usaha-usaha memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli, alat-alat dan dana jang tjukup jang diperlukan untuk menggairahkan kegiatan-kegiatan riset dan memperkembangkan bidang-bidang/ tjabang-tjabang ilmu pengetahuan baru jang dihubungkan

dengan kepentingan nasional. Kesemuanja ini dapat didjalankan dengan sempurna apabila didasarkan atas suatu perentjanaan jang teliti dan menjeluruh sifatnja.

Untuk dapat menentukan kebidjaksanaan riset nasional, maka Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dibentuknja suatu badan pusat ilmiah nasional. Dalam tahun 1956, dengan Undang-undang No. 6 tahun 1956 lahirlah MADJELIS ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, jang bertugas untuk mengkoordinir dan menjelenggarakan usaha-usaha untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan jang meliputi ilmu-ilmu semesta alam dan ilmu-ilmu budaja dan sosial. Sedjak pembentukannja, M.I.P.I. sebagai badan ilmiah nasional telah menjelenggarakan berbagai usaha untuk menghidupkan kembali, memperkembangkan, dan menggairahkan usaha-usaha riset di Indonesia.

Akan tetapi perkembangan nasional umumnja dan ilmu pengetahuan chususnja menuntut adanja susunan prasarana (infrastruktur) riset jang lebih efisien dan efektif. Dalam rangka ini maka dibentuklah DEPARTEMEN URUSAN RESEARCH NASIONAL pada tahun 1962 dengan tugas:

> „......... mengkoordinir, menstimulir dan menjelenggarakan riset untuk kepentingan pembangunan negara baik dibidang ilmu pengetahuan semesta alam, maupun dibidang ilmu-ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan dengan memberikan prioritas kepada riset jang bertudjuan meninggikan produksi nasional".

I. PERKEMBANGAN ORGANISASI/APARATUR ILMIAH.

A. PHASE REVOLUSI PHYSIK (1945 - 1950).

Selama masa Revolusi Physik dalam mana terbakar semangat Rakjat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan jang telah diproklamirkannja, tidak banjak usaha riset jang dapat diselenggarakan. Dalam keadaan jang sangat sukar tersebut, hanja ada beberapa sardjana Indonesia jang tetap berusaha mengadakan kegiatan-kegiatan riset seperti misalnja dalam bidang kedokteran.

Didaerah pendudukan Belanda, fihak Belanda memulai lagi usaha-usaha riset seperti pada masa sebelum Perang Dunia ke II. Untuk dapat mengkoordinir dan memadjukan ilmu pengetahuan didaerah pendudukan Belanda, dalam tahun 1948 dibentuk „ORGANISATIE VOOR NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (O.N.O.)" jang kemudian pada tahun 1948 berganti nama mendjadi ORGANISASI PENJELIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (O.P.I.P.A.). Badan tersebut bertudjuan untuk mengkoordinir usaha-usaha riset dengan menempatkan lembaga-lembaga riset dalam lingkungan berbagai Departemen dibawah pimpinan dan pengawasan O.P.I.P.A., terutama mengenai hal perentjanaan program riset dan pengangkatan tenaga-tenaga ilmiah. Ternjata organisasi ini tidak pernah bekerdja dengan baik dan terutama tidak dapat diterima oleh sardjana-sardjana Indonesia berhubungan dengan: (i) organisasi tersebut dianggap tidak dapat mewakili hasrat Bangsa Indonesia dalam suatu negara jang merdeka, dan (ii) tjampur tangan O.P.I.P.A. dalam urusan intern berbagai lembaga dianggap oleh jang berkepentingan sebagai usaha jang bertentangan dengan otonomi dan kedaulatan lembaga-lembaga research. Oleh karena itu dalam tahun 1950 Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mempertimbangkan untuk mendirikan suatu „Academie van Wetenschappen", tetapi usaha ini tidak membawa hasil jang njata.

B. PHASE SURVIVAL (1950 - 1955).

Dengan memasuki tahun 1951 semakin teballah semangat Bangsa Indonesia untuk meningkatkan Revolusinja. Masjarakat

ilmu pengetahuan jang melihat djauh kedepan berkejakinan bahwa kini sudah tiba masanja bahwa Bangsa Indonesia harus menjusul ketinggalan-ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan. Mereka berkejakinan bahwa guna kepentingan pembangunan negara diperlukan bantuan dari ilmu pengetahuan dan riset. Riset tentang sumber alam Indonesia, tentang kebudajaan jang sedang mengalami perubahan karena semakin tebalnja semangat Kesatuan Indonesia dan sebagainja jang djelas akan memberikan sumbangan bagi pembangunan negara masih harus dihidupkan dan dilaksanakan dengan lebih intensif.

Pada tanggal 14 Djuli 1951, Menteri P.P. & K., Ali Sastroamidjojo S.H. meminta kepada Prof. Sarwono Prawirohardjo untuk menjusun suatu nota jang memberikan pertimbangan tentang usaha-usaha dalam lapangan ilmu pengetahuan jang perlu didjalankan untuk kepentingan negara. Djuga dimintakan saran-saran tentang perlunja mendirikan badan baru dengan tugas untuk memadjukan dan membimbing perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam bulan Agustus 1951, dengan Surat Keputusan Menteri P.P. & K. No. 2008/Kab. dibentuk suatu Panitia jang diberi nama Panitia Persiapan Pembentukan Madjelis Ilmu Pengetahuan Nasional. Sebagai Ketua Panitia ditundjuk Prof. Dr. Soepomo, Prof. Dr. Sardjito, dan M. Hadi S.H. sebagai Sekretaris ditundjuk Kusumadi S.H. dan Palenkahu S.H. Selama tahun 1952 - 1954 terdapat beberapa perubahan dan tambahan dalam keanggotaan Panitia tersebut. Selama masa bekerdja dan setelah mengadakan hubungan dengan masa masjarakat ilmu pengetahuan, maka oleh semua pihak diakui kebutuhan untuk mendirikan suatu badan nasional dengan tugas:

a. Keluar: membela dan memadjukan kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan kenjataan bahwa pembangunan masjarakat modern sangat tergantung dari hasil-hasil penjelidikan dalam lingkungan ilmu pengetahuan;

b. Kedalam: membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan mengusahakan kerdja-sama dan koordinasi mengenai usaha-usaha dalam lapangan tersebut.

Setelah dipertimbangkan dengan masak, maka pada tanggal 9 Oktober 1954 Panitia menjerahkan suatu Rentjana Undang-undang Pembentukan Madjelis Ilmu Pengetahuan Nasional kepada Pemerintah. Diantara keputusan-keputusan jang men-

djadikan bahan-bahan untuk membuat R.U.U. tersebut terdapat:

a. Madjelis hendaknja merupakan suatu badan pusat jang dalam pekerdjaannja meliputi kepentingan semua bidang ilmu pengetahuan, baik jang termasuk golongan ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan budaja dan masjarakat.
b. Madjelis hendaknja merupakan suatu badan hukum agar supaja dalam mendjalankan pekerdjaannja dapat bertindak otonom.
c. Untuk mendjamin kedudukan jang terhormat, maka Madjelis harus dibentuk dengan Undang-undang dan anggota-anggota Pengurus harus diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

Pada waktu Panitia menjusun R.U.U., O.P.I.P.A., walaupun tidak bekerdja lagi setjara aktif masih berdiri sebagai organisasi dengan pengurus dan pegawainja. Enquete jang pada waktu itu diadakan menundjukkan bahwa O.P.I.P.A. tidak lagi dikehendaki sebagai badan koordinasi usaha-usaha ilmiah di Indonesia. Tetapi enquete djuga menundjukkan perlu adanja kerdjasama jang erat atas dasar sukarela antara lembaga-lembaga research dalam lingkungan Kementerian-kementerian, Universitas-universitas maupun swasta.

Walaupun dalam keadaan jang serba sukar, disebabkan oleh karena terbatasnja fasilitas-fasilitas research, seperti tenaga dan alat ilmiah jang baik, namun lembaga-lembaga research jang ada pada waktu itu tetap berusaha agar kegiatan research tidak terhenti sama sekali.

C. PHASE CHALLENGE DAN RESPONSE TERHADAP DEMOKRASI TERPIMPIN (1955 - 1959).

Tahun 1956 dapat dikatakan sebagai permulaan sedjarah baru daripada organisasi ilmiah Indonesia setelah kemerdekaan. Pada tanggal 19 Maret 1956, dengan Undang-undang No. 6 tahun 1956 dibentuklah Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dengan adanja undang-undang ini maka hapuslah segala badan-badan ilmiah nasional warisan pemerintah kolonial jang lama.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1956 Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia bertugas untuk:

a. memadjukan dan membimbing dalam artikata seluas-luasnja usaha dan kehidupan pada lapangan ilmu pengetahuan, dengan berpedoman kepada kepentingan nasional pada chususnja dan kepentingan perdamaian dan umat manusia pada umumnja;
b. memberi pertimbangan-pertimbangan mengenai soal-soal rentjana-rentjana dan usaha-usaha jang bertalian dengan ilmu pengetahuan kepada Pemerintah, baik atas permintaan maupun atas kehendak sendiri.

Pembentukan M.I.P.I. ini merupakan penegasan daripada kehendak Pemerintah dan masjarakat ilmiah jang ingin memberikan wadjah jang wadjar bagi peranan ilmu pengetahuan dalam menjelesaikan Revolusi Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnja, memadjukan dan membimbing kehidupan ilmiah jang meliputi bidang-bidang ilmu pengetahuan semesta alam dan ilmu pengetahuan sosial dan kebudajaan, maka kepada M.I.P.I. diwadjibkan untuk:

a. memelihara sebaik-baiknja kepentingan ilmu pengetahuan pada umumnja dan penjelidikan ilmiah chususnja;
b. menjelenggarakan kerdjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, baik jang dimiliki oleh Pemerintah maupun jang dimiliki oleh pihak partikelir;
c. menjelenggarakan dan memberi bantuan kepada:
   1. usaha penjelidikan ilmiah;
   2. usaha penerbitan dalam lapangan ilmu pengetahuan;
   3. usaha penjebaran ilmu pengetahuan dalam masjarakat;
d. menjelenggarakan pendaftaran kepustakaan dan benda-benda lain jang berharga untuk ilmu pengetahuan jang terdapat di Indonesia;
e. mengurus lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan dana-dana untuk memadjukan ilmu pengetahuan jang dipertjajakan kepadanja;
f. menjelenggarakan perhubungan dengan badan-badan internasional dan badan-badan nasional dari negara-negara lain jang bekerdja pada lapangan ilmu pengetahuan;
g. memberi laporan tentang soal-soal, rentjana-rentjana dan usaha-usaha jang dimintakan pertimbangannja oleh Pemerintah dan mengadjukan usul-usul kepada Kementerian-kementerian tentang kepentingan ilmu pengetahuan atau kepentingan negara jang bertalian dengan ilmu pengetahuan;

h. menjelenggarakan usaha-usaha lain dalam lapangan ilmu pengetahuan jang tidak termasuk perintjian dan usaha-usaha tersebut.

Undang-undang tersebut djuga menjatakan bahwa MIPI berstatus badan hukum. Mengingat bahwa pada waktu itu Kementerian P.P.&K. memiliki alat-alat jang dapat melajani MIPI, maka pada waktu pembentukannja, MIPI ditempatkan dalam lingkungan Kementerian tersebut.

Pada tanggal 13 Agustus 1956, P.J.M. Presiden melantik Pengurus MIPI jang terdiri dari 9 orang:

Prof. Sarwono Prawirohardjo, sebagai Ketua.
Prof. Soediman Kartohadiprodjo, sebagai Panitera.
Prof. Koesnoto Setyodiwirjo, anggota.
Prof. H. Johannes, anggota.
Prof. Sardjito, anggota.
Prof. Soetedjo, anggota.
Prof. A.G. Pringgodigdo, anggota.
Prof. Notonagoro, anggota.
Prof. Poerbatjaraka, anggota.

MIPI dilahirkan dalam keadaan dimana riset sebagai suatu usaha nasional terpaksa diselenggarakan dengan fasilitas-fasilitas ilmiah jang serba kekurangan. Keadaan ini merupakan tantangan bagi MIPI untuk menjelenggarakan usaha-usaha menghidupkan dan menggairahkan kegiatan riset di Indonesia.

Dalam bulan Djanuari 1957 oleh MIPI diselenggarakan suatu pertemuan dengan pemimpin-pemimpin lembaga-lambaga riset Pemerintah dan swasta, wakil-wakil universitas-universitas, perkumpulan-perkumpulan ilmiah dan para sardjana terkemuka. Pertemuan tersebut adalah untuk meletakkan dasar kerdjasama antara MIPI dengan lembaga-lembaga ilmiah dan pula untuk mengadakan tindjauan dengan tjara bagaimana hasil-hasil ilmiah dapat digunakan sebaik-baiknja guna kepentingan pembangunan negara.

Pada pertengahan tahun 1958 maka MIPI telah memulai suatu tradisi jang merupakan keharusan dalam kehidupan ilmiah dengan menjelenggarakan KONGRES ILMU PENGETAHUAN NASIONAL I di Malang. Dalam Kongres itu telah diadakan stockopname dan neratja daripada kemadjuan-kemadjuan jang telah ditjapai dalam djangka waktu jang silam.

Keputusan-keputusan Kongres tersebut dipergunakan oleh MIPI untuk menjusun kebidjaksanaan selandjutnja dalam membimbing kehidupan ilmiah di Indonesia.

D. PHASE PANTJAWARSA MANIPOL (1959 - 1964).

Tahun 1959 merupakan tahun tantangan bagi Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, terutama dalam usahanja mentjiptakan suasana jang lebih menggairahkan bagi berkembangnja ilmu pengetahuan dan riset di Indonesia. Dekrit Presiden pada tanggal 5 Djuli 1959 untuk kembali ke U.U.D. 1945 jang disusul dengan lahirnja Manipol/Usdek sebagai haluan negara pada tanggal 17 Agustus 1959 jang bertudjuan membawa Masjarakat Indonesia kearah sosialisme, jakni kemasjarakat jang adil dan makmur, lebih menegaskan dasar dan arah nasional kegiatan ilmu pengetahuan dan riset di Indonesia.

Setelah diselenggarakannja Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional I di Malang dalam tahun 1958, dalam Kongres mana P.J.M. Presiden mengamanatkan bahwa: „Masjarakat jang adil dan makmur tak dapat diselenggarakan tanpa penggunaan jang tepat dari pada science", maka masjarakat dan dunia ilmu pengetahuan lebih mengharapkan dan memberikan kepertjajaan kepada MIPI. Sebagai badan pusat nasional diharapkan bahwa MIPI dapat memberikan bimbingan dan dorongan jang efektif pada usaha-usaha memperkembangkan ilmu pengetahuan dan riset di Indonesia. Kepertjajaan dan harapan ini dikemukakan pula dalam rapat jang diselenggarakan dalam tahun 1959 oleh MIPI dengan Departemen-departemen jang mempunjai lembaga-lembaga riset dalam lingkungannja dan universitas-universitas, jang mengharapkan agar MIPI bertindak pula sebagai badan koordinasi dari pada usaha-usaha riset di Indonesia. Usaha koordinasi ini dianggap penting, karena perlunja penggunaan fasilitas-fasilitas riset jang serba terbatas dengan lebih efektif dan produktif, sehingga dapat ditjapai hasil riset jang bermutu tinggi.

Tahun 1960 merupakan tahun perkembangan bagi MIPI, pada mana benih-benih jang ditanam sebelumnja mulai menundjukkan kuntjupnja. Hal ini terutama terlihat dengan bertambahnja usaha-usaha riset jang ingin dan perlu diselenggarakan, dan untuk itu dimintakan bantuannja dari MIPI. Untuk membantu Pengurus MIPI dalam menentukan "research policy" dan djuga bertindak sebagai "screening committee", pada tanggal 21 April

1960 telah dilantik 21 orang anggota Dewan Pertimbangan oleh Menteri P.P. & K. Prof. Dr. Prijono. Badan ini memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pengurus MIPI dalam menentukan prioritas daripada projek-projek riset jang perlu diselenggarakan untuk kepentingan pembangunan dan ekonomi negara, dan pula memberikan penilaian-penilaian tentang projek-projek riset jang dibantu oleh MIPI.

Achir tahun 1960 merupakan fase jang memberikan dasar haluan jang lebih menentukan bagi MIPI. Dikeluarkannja Rantjangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 8 tahun jang disusun oleh DEPERNAS dan disetudjui oleh M.P.R.S. dengan Ketetapan II/1960 memberikan dasar bagi rentjana usaha-usaha memperkembangkan ilmu pengetahuan dan research dalam Pembangunan Nasional Semesta. Pemerintah dan masjarakat jang lambat-laun lebih memahami tentang besarnja peranan ilmu pengetahuan dan riset bagi kehidupan negara dan bangsa, memasukkan riset sebagai bagian penting dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana. „Penelitian adalah penting sekali untuk Pembangunan Semesta Berentjana di Indonesia, karena penelitian jang luas dan intensif dipergunakan untuk menggali dan mengusahakan sumber-sumber kekajaan alam serta mengolah bahan-bahan jang diperoleh dari penggalian itu setjara sempurna. Penelitian-penelitian dibidang ekonomi, kemasjarakatan, kebudajaan, pengadjaran, pendidikan dan pemerintahan harus diselenggarakan setjukupnja sesuai dengan sifat Semesta dan Pembangunan. Untuk Pembangunan Semesta Berentjana diperlukan ketiga djenis penelitian, ialah (a) penelitian dasar (basic research), (b) penelitian terpakai (applied research), (c) penelitian perkembangan (developmental research).

Rantjangan Dasar Pembangunan Nasional Semesta djuga menentukan agar MIPI, disamping tugasnja sebagai badan koordinasi, bertindak pula sebagai Pusat Penelitian Nasional. Kepada MIPI ditugaskan untuk membentuk dan menjelenggarakan riset dalam 7 Lembaga Penelitian Nasional, jaitu:

1. Lembaga Kimia Nasional.
2. Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional.
3. Lembaga Metalurgi Nasional.
4. Lembaga Fisika Nasional.
5. Lembaga Elektroteknika Nasional.
6. Lembaga Biologi Nasional.
7. Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional.

Untuk dapat menjelenggarakan tugas koordinasi dengan lebih efektif disarankan pula agar MIPI dibawahkan pada badan eksekutif tertinggi organisasi pemerintahan, pada waktu itu adalah Perdana Menteri.

Tahun 1961 adalah tahun jang penting bagi perkembangan MIPI. Bukan sadja karena dalam tahun tersebut MIPI berusia 5 tahun, tetapi djuga karena dalam tahun 1961 terlihat adanja perluasan baik dalam djumlah maupun dalam intensitas dari pada usaha-usaha sedjenis jang diselenggarakan dalam tahun 1960.

Tahun 1961 adalah pula tahun pertama pada mana MIPI telah menjusun rentjana-rentjana konkrit dan mengambil langkah-langkah pertama kearah pembentukan Lembaga-lembaga Penelitian Nasional seperti ditugaskan dalam Rentjana Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.

Dalam tahun ini pula terdjadi perobahan besar dalam kedudukan MIPI. Sedjak saat berdirinja badan tersebut ditempatkan dalam lingkungan Kementerian P.P. & K. Dengan dibaginja Kementerian tersebut mendjadi dua, jakni: Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan dan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, timbul persoalan dalam Departemen mana MIPI akan dimasukkan. Keputusan adalah bahwa MIPI ditempatkan dibawah Menteri Pertama, karena dengan demikian fungsi koordinasi riset dapat diselenggarakan dengan lebih baik.

Tahun 1962 membuka lembaran baru bagi sedjarah perkembangan organisasi ilmu pengetahuan di Indonesia. Pemerintah dan masjarakat lebih banjak mengharapkan bantuan dan sumbangan dari ilmu pengetahuan dan riset bagi pembangunan dan bagi perkembangan ekonomi negara. Dirasakan bahwa bimbingan dan kehidupan ilmu pengetahuan dan riset perlu ditingkatkan pada taraf nasional dan merupakan unsur inhaerent dalam politik pembangunan negara. Berdasarkan pendapat ini dirasa bahwa untuk menjelenggarakan koordinasi dan perentjanaan riset dengan lebih efektif, perlu dibentuk suatu badan pusat ilmu pengetahuan pada tingkat Departemen.

Dengan Keputusan P.J.M. Presiden dalam bulan Maret 1962 dibentuk Departemen Urusan Research Nasional dalam Kabinet Kerdja dan digolongkan dalam Bidang Produksi, dan kemudian dalam Kompartemen Pembangunan.

Dengan dibentuknja Departemen dan ditundjuknja seorang Menteri Research Nasional jang pertama Dr. Sudjono D. Pus-

ponegoro, dalam sedjarah Republik Indonesia berarti bahwa ilmu pengetahuan dan riset dianggap sebagai alat vital dalam pembangunan negara.

Departemen Urusan Research Nasional bertugas:

„...... mengkoordinir, menstimulir dan menjelenggarakan riset untuk kepentingan pembangunan negara, baik dibidang ilmu-ilmu pengetahuan semesta alam, maupun dibidang ilmu-ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan, dengan memberikan prioritas kepada riset jang bertudjuan meninggikan produksi nasional".

Berdasarkan tugas tersebut diatas, maka usaha-usaha umum Departemen adalah:

a. Membimbing pada tingkat nasional seluruh kehidupan ilmu pengetahuan dan riset berlandasan pada Perentjanaan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Riset Nasional;
b. Memupuk iklim riset dengan mejakinkan Masjarakat Indonesia akan peranan riset dalam membawa negara ketaraf produktivitas nasional sebesar-besarnja.

Tugas Departemen dalam mengkoordinir, menstimulir dan menjelenggarakan riset direalisasikan dengan djalan:

a. mengkoordinir dan merantjangkan riset dengan melalui Dewan-dewan Riset Nasional, serta mengusahakan pelaksanaan projek-projek riset jang telah ditetapkan oleh Dewan-dewan tersebut;
b. menjelenggarakan riset dilembaga-lembaga jang berkedudukan dibawah Departemen;
c. melalui Departemen bersangkutan memelihara hubungan erat dengan lembaga-lembaga penelitian Departemen-departemen lain dan universitas-universitas didalam penjelenggaraan riset mereka; dalam hal ini, Departemen Urusan Research Nasional ikut-serta menstimulir riset itu dengan ikut mengusahakan menjediakan fasilitas-fasilitas riset;
d. mengkoordinir dan membantu segala usaha dilapangan pertukaran ilmiah (scientific exchange), jaitu penerbitan madjalah-madjalah ilmiah, penerbitan buku-buku ilmiah dan buku-buku peladjaran untuk perguruan tinggi, konperensi-konperensi ilmiah, seminar-seminar ilmiah dan sebagainja.
e. menjelenggarakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan manpower ilmiah nasional.

Struktur Departemen Urusan Research Nasional.

Guna menampung tudjuan dan usaha Departemen, maka struktur Departemen disusun sedemikian rupa sehingga kepentingan nasional dan kegairahan riset selalu dapat dipenuhi

Departemen dipimpin oleh Menteri Research Nasional dengan dibantu oleh 3 Pembantu Menteri:

1. Pembantu Menteri Research Nasional Urusan Policy.
2. Pembantu Menteri Research Nasional Urusan Eksekutif.
3. Pembantu Menteri Research Nasional Urusan Administrasi Ilmiah.

Aparatur Departemen dibagi dalam 3 kategori:

(1) a. Dewan-dewan Riset Nasional, b. Badan Koordinasi Badan Kerdja Dewan-dewan Research Nasional, (2) Badan-badan Riset Chusus, (3) Direktorat-direktorat dan Biro.

(1) a. Dewan-dewan Riset Nasional.

Sedjak bulan Agustus 1962 telah dibentuk 4 Dewan Research Nasional jang bersifat Badan Perentjanaan daripada Usaha Riset, berkedudukan langsung dibawah Menteri, dan beranggotakan ahli-ahli dari berbagai Departemen. Depernas (Bappenas), Perkumpulan-perkumpulan Karyawan Ilmiah, dan Perseorangan:

1. Dewan Riset Kedokteran
   meliputi bidang-bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kepharmasian.
2. Dewan Riset Pertanian
   meliputi bidang-bidang pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, kedokteran hewan, biologi dan sebagainja.
3. Dewan Riset Teknologi dan Industri
   meliputi bidang-bidang geologi, pertambangan, industri dan sebagainja.
4. Dewan Riset Ekonomi, Sosial dan Budaja
   meliputi bidang-bidang ekonomi, kemasjarakatan, kebudajaan dan sebagainja.

Dewan-dewan Riset Nasional bertugas:

a. menjusun projek-projek riset berdasarkan pengetahuan dan kesadaran tentang masalah-masalah penting dalam lapangan bersangkutan;
b. menerima projek-projek riset dari lembaga-lembaga penelitian, universitas dan perseorangan;

c. menentukan prioritas projek-projek riset sesuai dengan kepentingan negara, dengan keuangan dan dengan fasilitas lembaga-lembaga penelitian masing-masing;
d. menentukan alokasi projek (projek-projek) riset kepada fihak jang dianggap memenuhi sjarat-sjarat dan menentukan pula besarnja bantuan keuangan jang menjertai projek-projek riset;
e. mengevaluasi penjelenggaraan hasil projek-projek riset serta mengusahakan aplikasi hasilnja;
f. memelihara hubungan erat dengan industri.

Wakil Ketua dan anggota Dewan-dewan Riset Nasional diangkat oleh Menteri untuk djangka waktu 3 tahun dengan kemungkinan untuk diangkat kembali. Pada dewasa ini keempat Dewan Riset Nasional mempunjai 103 anggota.

b. Badan Koordinasi Dewan-dewan Riset Nasional.

Sedjak bulan September 1964 dibentuk Badan Koordinasi jang beranggotakan Badan Kerdja Dewan Riset Nasional masing-masing, untuk lebih mengintensifir tugas Dewan-dewan Riset dan untuk mengadakan hubungan lebih erat antara Pimpinan Departemen dan Dewan-dewan Riset.

Kedudukan, Peranan dan Tugas Badan Koordinasi adalah:

1. Badan Koordinasi berkedudukan langsung dibawah Menteri dan adalah badan jang (i) mengkoordinir, membina dan mengarahkan pekerdjaan Dewan-dewan, dan (ii) jang memberi pertimbangan kepada Menteri dalam melaksanakan tugas-tugas Departemen.
2. Badan Koordinasi mendjalankan peranan sebagai alat Dewan-dewan jang setjara konsepsionil memperkembangkan potensi ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang dan dihari depan, serta membina riset nasional jang dapat didjadikan dasar ilmiah untuk tertjapainja suatu produksi dan ketahanan nasional jang optimal.
3. Selain tugas Dewan-dewan Badan Koordinasi bertugas pula:
   a. Membantu Menteri untuk memetjahkan persoalan jang berprioritas tinggi;
   b. Mempertimbangkan kepada Menteri usaha-usaha lain jang bersifat nasional demi berkembangnja ilmu pengetahuan.

Badan Koordinasi mempunjai 22 anggota.

(2) Badan-badan Riset Chusus.

a. Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Dengan dibentuknja Departemen Urusan Research Nasional, maka M.I.P.I. dimasukkan didalamnja sebagai satu Badan Riset Chusus, jang bertugas antara lain:

a) mengurus pembangunan dan menjelenggarakan riset dilembaga-lembaga riset sesuai dengan Keputusan M.P.R.S. II/1960:
   1. Pusat Riset Nasional di Tjibinong, terdiri dari:
      — Lembaga Kimia Nasional.
      — Lembaga Physika Nasional.
      — Lembaga Metalurgi Nasional.
      — Lembaga Elektroteknika Nasional.
      — Pusat Pesawat-pesawat Ilmiah.
      — Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional.
   2. Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional di Bandung.
   3. Lembaga Biologi Nasional di Bogor, terdiri dari:
      — Kebun Raja dengan tjabang-tjabangnja di Tjibodas, Purwodadi, Bali, Sumatera Utara dan Sumatera Tengah.
      — Lembaga Penelitian Botani.
      — Herbarium Bogoriense.
      — Museum Zoologicum Bogoriense.
      — Lembaga Penelitian Laut.
   4. Lembaga Riset Kebudajaan Nasional di Djakarta.

b) mengurus Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional jang meliputi Dokumentasi dan Informasi Ilmiah;

c) mengurus dan menjelenggarakan penerbitan ilmiah;

d) mengurus pertjetakan ilmiah.

b. Lembaga Tenaga Atom.

Lembaga Tenaga Atom setjara teknis berada dibawah Departemen Urusan Research Nasional sebagai Badan Riset Chusus, dan setjara administratif dibawah Presidium Kabinet.

Lembaga Tenaga Atom bertugas untuk membangun reaktor-reaktor, alat-alat lain dan laboratoria guna pendidikan dan riset dalam bidang tenaga atom, disamping menjelenggarakan pendidikan para ahli didalam dan diluar negeri.

(3) Direktorat-direktorat dan Biro.

Untuk menjelenggarakan segala usaha bertalian dengan keperluan administrasi ilmiah dan administrasi umum, maka dibentuk:

a. Direktorat Dewan-dewan Riset Nasional.

b. Direktorat Administrasi Ilmiah.
c. Biro Administrasi Umum.

Disamping lembaga-lembaga riset tersebut diatas, maka Departemen telah membentuk djuga Lembaga Riset Kanker Nasional pada tahun 1965 jang menjelenggarakan research dasar dan riset klinik dibidang kanker.

Sebagai Departemen baru jang dibentuk pada bulan Maret 1962, maka usaha-usaha pertama ditudjukan kepada penjusunan organisasi dan aparatur Departemen jang kemudian dilandjutkan dengan penjempurnaan dan konsolidasinja. Dalam hal ini dapat dipergunakan pengalaman-pengalaman dan bahan-bahan jang diperoleh oleh Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia sedjak didirikannja pada tahun 1956.

Tugas MIPI disesuaikan dengan dimasukkannja dalam Departemen sebagai satu Badan Riset Chusus. Dengan Lembaga Tenaga Atom diadakan pembitjaraan mengenai kedudukannja dalam Departemen.

Dewan-dewan Riset Kedokteran, Pertanian, Teknologi/Industri dan Ekonomi/Sosial/Budaja tersebut diatas dibentuk pada bulan Agustus 1962 dengan menentukan tugas dan wewenangnja, Badan Koordinasi Dewan-dewan Riset Nasional dibentuk pada bulan September 1964.

Dewan Normalisasi Indonesia Bandung ditempatkan dibawah Departemen pada tahun 1962 dengan ditetapkan tugas dan wewenangnja.

Pembangunan Lembaga-lembaga Riset Nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS/II/1960 dan jang kemudian didjadikan Projek Mandataris mendapat perhatian chusus dari P.J.M. Presiden jang berkenan merestui ontwerp-ontwerp dan menundjuk tempat-tempat pembangunan gedung-gedung dan lembaga-lembaga:

(a) Tempat pembangunan Pusat Riset Nasional (National Research Centre) jang terdiri dari: Lembaga Kimia Nasional, Lembaga Physika Nasional, Lembaga Metalurgi Nasional, Lembaga Elektroteknika Nasional, Pusat Pesawat-pesawat Ilmiah Nasional dan Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional ditetapkan pada tahun 1963 di Tjibinong diatas tanah seluas ± 200 H.A.

(b) Tempat pembangunan Lembaga Biologi Nasional jang terdiri dari: Kebon Raya dan tjabang-tjabangnja, Lembaga Penelitian Botani, Herbarium Bogoriense, Museum Zoologicum

Bogoriense dan Lembaga Penelitian Laut ditetapkan pada tahun 1963 di Bogor diatas tanah seluas ± 18 H.A.

(c) Tempat pembangunan Lembaga Geologi/Pertambangan Nasional ditetapkan pada tahun 1963 di Bandung diatas tanah seluas ± 10 H.A.

(d) Tempat pembangunan Gedung Departemen, Gedung MIPI, Gedung Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional, Gedung Lembaga Penelitian Laut dan Science Museum ditetapkan pada tahun 1964 di Djl. Gatot Subroto Djakarta diatas tanah seluas ± 20 H.A.

Perkembangan pembangunan lembaga-lembaga tersebut sebagai infrastruktur riset nasional dan gedung-gedung lain antara tahun 1962-1965 adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Biologi Nasional didirikan pada bulan Djuni 1962 dengan menempati gedung-gedung dan laboratoria jang dioper dari Departemen Pertanian/Agraria. Perbaikan gedung-gedung dan laboratoria — sambil menunggu gedung-gedung baru — dan perluasan alat-alat ilmiah dan perpustakaan telah diadakan sehingga Lembaga Biologi Nasional dapat menunaikan tugasnja sebagai satu lembaga riset.

a. Lembaga Penelitian Laut, salah satu lembaga research dalam Lembaga Biologi Nasional, sekarang memiliki armada kapal penelitian untuk melakukan ekspedisi-ekspedisi penelitian Laut:
   - — Kapal R.I. Jalanidhi (746,47 ton, pandjang 53.90 meter), suatu kapal penelitian samudera jang modern dilengkapi dengan 5 laboratoria (lab. physical oceanography, chemical oceanography, marine biology, marine geology dan marine meteorology).
   - — K.M. Samudera 200 ton, pandjang 38 meter) dipergunakan untuk mengadakan ekspedisi antar pulau.
   - — Kapal ARIES (50 ton) dipergunakan untuk ekspedisi ilmiah djarak pendek. Kapal ini adalah hadiah dari Akademi Ilmu Pengetahuan URSS.
   - — Perahu Motor Mutiara II dipergunakan untuk keperluan mendapatkan dan mengangkut bahan-bahan aquarium dan pengamatan biologik di Teluk Djakarta.

b. Gedung Herbarium Bogoriense: P.J.M. Presiden berkenan memantjangkan tiang pertama daripada Gedung Herbarium di Bogor pada bulan Agustus 1963 jang dirantjangkan akan selesai pada tahun 1966.

Pusat Perpustakaan Pertanian jang hingga kini merupakan satu joint project dengan Departemen Pertanian dilengkapi.

Pembangunan gedung-gedung/laboratoria baru akan dimulai pada tahun 1965.

2. Pusat Riset Nasional di Tjibinong.

Pemantjangan tiang pertama dilakukan pada bulan September 1964 oleh J.M. Wakil Perdana Menteri III Dr. Chaerul Saleh sebagai Wakil P.J.M. Presiden. Dirantjangkan bahwa pada pertengahan tahun 1967 sudah dapat bekerdja pada lembaga-lembaga daripada Pusat Riset Nasional.

Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional — sambil menunggu gedungnja — telah didirikan pada bulan Maret 1963 dengan sementara ditempatkan di Djakarta. Kegiatan-kegiatan riset sudah dimulai sedjak didirikannja.

Lembaga Kimia Nasional dan Lembaga Elektroteknika Nasional mendjalankan sekedar aktivitas, oleh karena kekurangan alat-alat ilmiah, dengan sementara ditempatkan di Institut Teknologi Bandung.

3. Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional didirikan pada bulan Agustus 1963 dalam kerdja-sama dengan Institut Teknologi Bandung. Dengan sementara ditempatkan dilaboratoria darurat jang dibangun dikampus I.T.B., maka kegiatan-kegiatan pendidikan dan riset dibidang geologi, pertambangan dan teknik perminjakan sudah dapat didjalankan. „Field-camp" di Kebumen sebagai tempat praktek pendidikan telah selesai dan mulai dipergunakan pada bulan Pebruari 1965.

Pembangunan gedung-gedung dan laboratoria baru sudah dimulai pada tahun 1964.

4. Pembangunan Kompleks Departemen/MIPI di Djalan Gatot Subroto Djakarta sudah dimulai pada tahun 1965 dengan perumahan ahli dan pegawai.

Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional sebagai landjutan daripada usaha MIPI, dan dengan ditempatkan di Djakarta, sudah memberikan service kepada para karyawan research.
memberikan service kepada pada karyawan riset.

5. Lembaga Riset Kebudajaan Nasional jang didirikan risetnja.

6. Lembaga Riset Kanker Nasional didirikan pada bulan April 1965, sebagai landjutan daripada Panitia Persiapan Pendirian Lembaga Research Kanker, menjelenggarakan research dasar dan riset klinik dibidang kanker.

Dalam rangka tugas Departemen, maka koordinasi dan stimulasi daripada riset nasional ditudjukan djuga kepada Lembaga-lembaga Riset Departemen-departemen lain, Universitas-universitas/Fakultas-fakultas dan swasta dengan melalui Menteri bersangkutan.

Koordinasi dan stimulasi dilakukan dengan perantaraan Dewan-dewan Riset Nasional dan/atau langsung dengan lembaga-lembaga research/universitas-universitas/swasta.

E. PHASE MENDJELANG BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI.

Sedjak Departemen Urusan Research Nasional didirikan, selalu ditekankan bahwa prioritas daripada projek-projek riset jang diselenggarakan, baik oleh Lembaga-lembaga Departemen sendiri maupun oleh Lembaga-lembaga Departemen-departemen lain/Universitas-universitas/Swasta, harus ditudjukan terutama kepada meninggikan produksi nasional dan penggantian bahan-bahan impor dengan bahan-bahan Indonesia.

Pembagian daripada usaha-usaha riset antara lembaga riset masing-masing, jang dikoordinir oleh DURENAS, adalah kurang lebih sebagai berikut:

1. Lembaga-lembaga Riset DURENAS bertugas mengadakan research:
   a. perihal sumber-sumber daja alam dan manusia Indonesia untuk keperluan penggunaan dan pemeliharaan sumber-sumber tersebut dalam rangka pembangunan semesta;
   b. guna mengembangkan teknologi sebagai dasar pertumbuhan industri nasional.
2. Perguruan Tinggi bertugas untuk:
   a. membina pengertian dan hasrat terhadap research pada para mahasiswa dan sardjana muda;
   b. mempergunakan hasil-hasil riset sebagai landasan bagi pengadjaran;
   c. melakukan riset atas inisiatif sendiri dan/atau atas permintaan pihak lain dengan tetap dipelihara keseimbangan antara tugas pendidikan dan tugas riset.
3. Lembaga-lembaga Riset Departemen-departemen lain bertudjuan untuk mendjalankan riset dalam rangka produktivitas dibidang tugas Departemen masing-masing.

Berhubung dengan Amanat Politik P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. pada Sidang Pembukaan M.P.R.S. ke III dengan djudul: „Berdiri Diatas Kaki Sendiri" akan lebih mendorong untuk mempergiat dan memperluas usaha-usaha riset jang ditudjukan kearah berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi, bebas dibidang politik dan berkepribadian dibidang kebudajaan.

⁂

II. PERKEMBANGAN USAHA-USAHA.

A. BIDANG ROUTINE.

1. Anggaran Belandja.

Perkembangan anggaran belandja daripada Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Departemen Urusan Research Nasional sedjak berdirinja dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Anggaran Belandja Rutine.

Seksi ini dibagi dalam (i) pengeluaran rutine jang bersifat umum, (ii) bersifat ilmiah, dan iii) bersifat non-development.

Tahun/djenis pengeluaran	Keterangan	Djumlah
Tahun 1956 - 57	M.I.P.I.	
a. Rutine Umum		Rp. 613.805.38
b. Rutine Ilmiah		Rp. 177.824.05
	Djumlah	Rp. 791.629.13
Tahun 1958	M.I.P.I.	
a. Rutine Umum		Rp. 1.061.003,88
b. Rutine Ilmiah		,, 754.927,97
	Djumlah	Rp. 1.815.931,85
Tahun 1959	M.I.P.I.	
a. Rutine Umum		Rp. 1.746.612,71
b. Rutine Ilmiah		,, 2.562.094,68
	Djumlah	Rp. 4.308.707,39
Tahun 1960	M.I.P.I.	
a. Rutine Umum		Rp. 3.569.236,42
b. Rutine Ilmiah		,, 1.339.028,15
	Djumlah	Rp. 4.908.264,57
Tahun 1961	M.I.P.I.	
a. Rutine Umum		Rp. 4.870.000,—
b. Rutine Ilmiah		,, 4.330.000,—
	Djumlah	Rp. 9.200.000,—
Tahun 1962	Departemen termasuk M.I.P.I.	
a. Rutine Umum		Rp. 60.881.800,—
b. Rutine Ilmiah		,, 66.301.000,—
c. Rutine Non-development		,, 89.350.000,—
	Djumlah	Rp. 216.532.800,—
Tahun 1963	Departemen termasuk M.I.P.I.	
a. Rutine Umum		Rp. 119.263.400,—
b. Rutine Ilmiah		,, 189.048.000,—
c. Rutine Non-development		,, 119.500.000,—
	Djumlah	Rp. 427.811.400,—

Tahun/djenis pengeluaran	Keterangan		Djumlah
Tahun 1964	Departemen termasuk M.I.P.I.		
a. Rutine Umum		Rp.	229.525.000,—
b. Rutine Ilmiah		„	376.425.000,—
c. Rutine Non-development		„	144.000.000,—
	Djumlah	Rp.	749.950.000,—
Tahun 1965 (sementara)	Departemen termasuk M.I.P.I.		
a. Rutin Umum		Rp.	409.087.350,—
b. Rutin Ilmiah		„	205.771.000,—
c. Rutin Non-development		„	100.000.000,—
	Djumlah	Rp.	714.858.350,—

Jang dimaksud dengan biaja rutine umum, rutine ilmiah, dan routin non-development adalah:

a. rutine umum meliputi gadji pegawai, ongkos-ongkos kantor, eksploitasi kendaraan bermotor, perdjalanan dinas pegawai, pembelian inventaris/meubilair, mesin kantor, pemeliharaan gedung/rumah djabatan, dan sebagainja.
b. rutine ilmiah meliputi biaja publikasi ilmiah, pameran ilmiah, pembelian buku-buku untuk perpustakaan, penerbitan buku-buku/madjalah-madjalah ilmiah, pertemuan-pertemuan ilmiah, bantuan untuk survey/riset ilmiah dan sebagainja.
c. rutine non-development meliputi pembangunan gedung-gedung kantor, rumah-rumah pegawai, pembelian kendaraan dinas dan sebagainja.

Anggaran Belandja Pembangunan.

Mengenai seksi ini perkembangannja sedjak 1962 adalah seperti berikut:

Tahun	Rentjana A.B. Rp.	Diotorisir Rp.	Dikeluarkan Rp.	Sisa Rp.
1962	237.700.000,—	190.160.000,—	116.366.135,81	73.793.864,19
1963	682.500.000,—	682.500.000,—	674.744.860,20	7.755.139,80
1964	2.500.000.000,—	2.500.000.000,—	2.498.456.608,13	1.543.391,87
1965	4.802.000.000,— (sementara)			

2. Kepegawaian.

Perkembangan kepegawaian adalah sebagai berikut:

Tahun	Lingkungan	Golongan A	B	C	D	E	F bukan sardjana	F sardjana	Djumlah
1956	M.I.P.I.	10	7	3	4	6	—	1	31
1957	„	10	12	5	10	5	—	2	44
1958	„	11	12	8	14	7	—	5	62
1959	„	14	17	11	23	9	—	4	78
1960	„	12	21	11	21	9	1	5	81
1961	„	12	23	10	22	12	1	6	88
1962	Departemen termasuk M.I.P.I.	16	50	24	39	16	11	17	172
1963	„	13	73	37	53	20	21	23	289
1964	„	24	92	45	67	36	17	48	321
1965	(s/d Maret 1965)	39	92	45	76	39	28	55	374

3. Pendidikan Tenaga Riset.

Pendidikan tenaga riset meliputi dua golongan:

a. mahasiswa pada Universitas-universitas di Indonesia jang diberikan beasiswa oleh M.I.P.I. dan jang setelah selesai pendidikannja ditempatkan pada Lembaga-lembaga Riset. Kemudian mereka dikirim keluar negeri untuk lebih memperdalam pengetahuannja.

b. sardjana jang dikirim keluar negeri untuk lebih memperdalam pengetahuannja.

Keadaan Pendidikan Tenaga Riset Dalam Negeri Tiap Tahun

Djumlah	Tahun 1961	1962	1963	1964	1965 *)
1. Biologi	—	11	14	22	22
2. Ekonomi & Kemasjarakatan	—	3	3	3	3
3. Elektronika	—	5	6	6	6
4. Physika	12	22	23	23	23
5. Geologi & Pertambangan	—	6	6	17	17
6. Instrumentalia	9	21	21	21	42
7. Kimia	4	18	22	22	22
8. Metalurgi	—	—	—	—	—
Djumlah	25	84	95	114	135

*) sampai dengan Maret 1965.

Keadaan Pendidikan Tenaga Riset Diluar Negeri
Tiap Tahun

Djurusan	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965*)
	Tahun						
1. Administrasi Ilmiah	1	1	1	2	2	4	4
2. Dokumentasi & Perpustakaan	1	1	1	1	1	3	3
3. Penerbitan Ilmiah	—	—	—	1	1	1	1
4. Botani	1	1	1	4	8	8	8
5. Ekonomi & Kemasjarakatan	—	—	—	—	6	13	13
6. Elektronika	—	—	—	—	1	1	1
7. Physika	—	—	—	—	—	1	1
8. Instrumentalia	—	—	—	—	2	2	2
9. Kimia	—	—	—	—	2	2	3
10. Metalurgi	—	—	—	—	—	2	2
11. Oceanografi	—	—	1	2	2	2	2
12. Zoologi	—	—	—	—	3	4	4
Djumlah	3	3	3	9	29	42	43

*) sampai dengan Maret 1965.

B. BIDANG PEMBANGUNAN.

1. Pembangunan Idiil.

(a) Dikeluarkannja Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 untuk kembali ke U.U.D. 1945 jang disusul dengan lahirnja Manipol/Usdek sebagai haluan negara lebih mempertebal semangat para karyawan untuk bekerdja lebih giat dalam menjelesaikan Revolusi Indonesia. Indoktrinasi dikalangan para karyawan didjalankan sesuai dengan pedoman-pedoman jang diberikan oleh penguasa negara.

(b) Ditegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan riset sebagai dasarnja adalah alat revolusi jang vital djuga demi pembangunan negara dan demi meningkatkan ketahanan nasional.

(c) Riset nasional ditudjukan kearah berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi, bebas dibidang politik dan berkepribadian dibidang kebudajaan.

(d) Riset nasional, dengan menggali sumber-sumber alam dan Manusia Indonesia, ditudjukan kearah:

i) penggunaan dan pemeliharaan sumber-sumber tersebut dalam rangka pembangunan semesta;
ii) meninggikan produksi nasional, chususnja dibidang sandang pangan;
iii) mengembangkan teknologi sebagai dasar industri nasional;
iiii) mengganti bahan-bahan impor dengan bahan-bahan Indonesia.

(e) Menggairahkan kehidupan riset dikalangan para karyawan riset dengan ikut menjediakan fasilitas-fasilitas bagi risett.
(f) Membangkitkan keinsjafan dalam masjarakat luas tentang peranan ilmu pengetahuan.
(g) Mendidik dan membentuk Korps Karyawan Riset Nasional.

2. Pembangunan Materiil.

Persiapan-persiapan Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Mengenai Pembangunan Pusat Penelitian Nasional (NRC).

Tiada lama setelah P.J.M. Presiden mengajunkan tjangkul dimulainja Tahap Pertama Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, maka pada tanggal 4 Pebruari 1961 Ketua Dewan Pengurus M.I.P.I. menetapkan membentuk „Panitia Pembentukan Pembangunan Lembaga Physika Nasional dan Lembaga Kimia Nasional" (Annex Instruments Centre) dan mengangkat sebagai anggota-anggotanja:

1. Prof. Ir. H. Johannes — merangkap Ketua
2. Prof. Ir. Kusnoto Setyodiwirjo — merangkap Sekretaris
3. Prof. G.A. Siwabessy — anggota untuk bagian Fisika.
4. Prof. Dr. Ong Ping Hok
5. Ir. Mugiono
6. Prof. Dr. Ir. R.M. Soemantri
7. Ir. Adnan Kusumah
8. Letnan Kolonel Sriamin
9. Dr. Poey Seng Bouw

(4–9) anggota untuk bagian Kimia.

Para anggota tersebut ditugaskan untuk menjusun suatu rentjana pendahuluan bagi pembangunan Lembaga Physika Nasional dan Kimia Nasional dan dilantik oleh Ketua M.I.P.I. pada tanggal 6 Maret 1961 di Bandung.

Sementara itu Dewan Pengurus M.I.P.I. telah mengadakan penilaian dan penindjauan terhadap schedule dan urutan prioritas pembangunan jang ditetapkan oleh DEPERNAS. Untuk memungkinkan pembangunan lembaga-lembaga setjara rasionil, maka pada tanggal 10 Maret 1961 Ketua M.I.P.I. menjampaikan kepada J. M. Menteri Pertama sebuah Nota Pembangunan Lembaga-lembaga Penelitian Nasional jang berisikan usul penindjauan schedule anggaran tahun 1962, pendirian Scientific Instrument Centre dan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional.

Oleh Ketua M.I.P.I. selandjutnja dibentuk Panitia Kerdja Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional pada tanggal 2 Maret 1961 jang terdiri atas beberapa sardjana ilmu sosial dan ekonomi Indonesia jang terkemuka dan diketuai oleh Prof. Sudiman Kartohadiprodjo S.H.

Kemudian oleh Ketua M.I.P.I. dibentuk „Team Penasehat Pembangunan Lembaga Physika Nasional dan Lembaga Kimia Nasional" jang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. R. M. Soemantri. Adapun tugas team ini adalah membantu Ketua M.I.P.I. dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaan bangunan lembaga-lembaga tersebut. Dengan terbentuknja team ini maka „Panitia Penasehat Pembangunan Lembaga Physika Nasional dan Lembaga Kimia Nasional" dibubarkan. Tindakan ini diambil oleh Ketua M.I.P.I. untuk mendjamin daja guna kerdja dengan anggota jang tidak begitu banjak dengan kedudukan jang berdjauhan.

Selandjutnja oleh Ketua M.I.P.I. dibentuk pula Direktorium-direktorium projek jaitu untuk Lembaga Kimia Nasional (Annex Instruments Centre) diketuai oleh Prof. Dr. Ir. R. M. Soemantri, untuk Lembaga Physika Nasional diketuai oleh Prof. Dr. Ong Ping Hok, sedangkan sebagai Direktur Projek Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional kemudian diangkat Prof. M. Sadarjoen Siswomartojo.

Seiring dengan pembentukan team-team kerdja tersebut maka di Biro M.I.P.I. sendiri diadakan reorganisasi untuk menjesuaikannja dengan rentjana pembangunan M.I.P.I., Prof. Ir. Kusno Setyodiwirjo diangkat sebagai Pembantu Utama Ketua untuk Urusan Pembangunan.

Pada rapat Dewan Pengurus M.I.P.I. tanggal 20 Desember 1961 dirasakan perlu adanja suatu „Panitia Penasehat Pembangunan Pusat Penelitian Nasional" sebagai landjutan daripada pelaksanaan kearah pembentukan dan pembangunannja. Berdasarkan keputusan ini maka pada tanggal 25 Djanuari 1962

dilangsungkan rapat Direktur-direktur Projek beserta beberapa sardjana dibidang-bidang ilmu pengetahuan jang diperlukan oleh masing-masing dari ke 7 (tudjuh) Lembaga-lembaga Penelitian Nasional untuk chusus membitjarakan dan mempertimbangkan pembentukan panitia penasehat termaksud. Dalam rapat ini diambil sebagai pegangan "working-paper" jang telah dipersiapkan mengenai N.R.C.

Dengan memperhatikan saran-saran jang dikemukakan oleh sidang para Direktur Projek serta laporan Panitia Penasehat Pembangunan Lembaga Physika dan Lembaga Kimia Nasional (Annex Scientific Instruments Centre) dan Panitia Kerdja Persiapan Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional, maka pada tanggal 29 Djanuari 1962 dengan Keputusan Ketua M.I.P.I. No. 10/Ket/'62 telah dibentuk „Panitia Penasehat Pembangunan Pusat Penelitian Nasional jang beranggotakan:

1. Prof. Ir. Kusnoto Setyodiwirjo — merangkap Ketua.
2. Prof. M. Sadarjoen Siswomartojo — merangkap Panitera.
3. Dr. Selo Soemardjan
4. Prof. Dr. Ong Ping Hok.
5. Ir. Moegiono.
6. Semaun, M.Sc., E.E.
7. Prof. Ts. Mhd. Sulaiman, B.E. M.Sc., E.E.
8. Ir. Hadijanto Martosubroto, M.Sc.
9. Ir. Kodijat.
10. Prof. Dr. Ir. R.M. Soemantri.
11. Ir. Tjipto Utomo.
12. Dr. Gatot Rahardjo Junus.
13. Mr. Lars Midtun.

Oleh Panitia Penasehat tersebut telah dibentuk Subkomisi-subkomisi jang tersusun sebagai berikut:

1. Subkomisi Lembaga Kimia Nasional — diketuai oleh Prof. Dr. Ir. R.M. Soemantri.
2. Subkomisi Lembaga Physika Nasional (Annex Instruments Centre) diketuai oleh Prof. Dr. Ong Ping Hok.
3. Subkomisi Lembaga Elektroteknika Nasional — diketuai oleh Prof. T.M. Soelaiman M.Sc.
4. Subkomisi Lembaga Biologi Nasional — diketuai oleh Ir. Sadikin Sumintawikarta.
5. Subkomisi Lembaga Metallurgi Nasional — diketuai oleh Ir. Hadijanto Martosubroto.
6. Subkomisi Lembaga Penelitian Laut — diketuai oleh Dr. Gatot Rahardjo Junus.

7. Subkomisi Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional diketuai oleh Prof. M. Sadarjoen Siswomartojo.

Oleh tiap-tiap subkomisi telah dibuat untuk masing-masing lembaganja suatu rentjana urgensi pembangunan lima tahun untuk djangka waktu 1962 — 1966 mengenai:

a. Bagian-bagian apa jang akan diadakan pada masing-masing lembaga.
b. Luas lantai jang diperlukan untuk membangun masing-masing lembaga dan taksiran biaja pembangunan gedung-gedung.
c. Pemesanan alat-alat, madjalah-madjalah dan sebagainja menurut rentjana djangka pendek dan rentjana djangka pandjang.
d. Djumlah dan djenis tenaga-tenaga ilmiah dan teknis jang dibutuhkan sebagai minimum bezetting dari masing-masing lembaga, rentjana pemberian beasiswa serta rentjana pengiriman keluar negeri bagi mereka.

Direktur projek djuga telah menindjau kemungkinan tempat-tempat jang sebaiknja bagi Pusat Penelitian Nasional (NRC). Dalam taraf perentjanaan ini telah timbul gagasan untuk menghimpun beberapa lembaga dalam suatu tempat tertentu jang akan terdiri dari beberapa unit. Kemungkinan untuk menjebarkan tiap Lembaga Penelitian Nasional dipelbagai kota seperti Bogor, Bandung dan Djakarta pada pemikiran selandjutnja adalah tidak menguntungkan, baik dipandang dari sudut tenaga jang tersedia maupun badan-badan jang ada jang akan sanggup sebagai penanggung djawab bagi kelantjaran pembangunan ataupun karena alasan objektif lainnja. Setelah diadakan perbandingan dengan negara-negara jang telah madju dan menilai kemungkinan lembaga-lembaga jang akan dibentuk, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Lembaga Kimia Nasional
2. Lembaga Physika Nasional (Annex Instruments Centre)
3. Lembaga Metallurgi Nasional
4. Lembaga Elektroteknika Nasional
5. Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional

hendaknja merupakan suatu kelompok disuatu bidang tanah tertentu jang merupakan Pusat Penelitian Nasional atau National Research Centre(NRC). Sedangkan Lembaga Biologi Nasional jang terdiri atas Lembaga-lembaga Penelitian Alam jang merupakan pengalihan dari Departemen Pertanian dan Agraria kepada M.I.P.I. (melalui J.M. Menteri Research Nasio-

nal) pada tanggal 21 Djuni 1962, akan berpusat di Bogor dan salah sebuah lembaga diantaranja jaitu Lembaga Penelitian Laut jang kini terletak di Pasar Ikan — Djakarta akan mendapat tempat di Kompleks Gedung Departemen Urusan Researhc Nasional — Djakarta. Untuk menempatkan Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional telah ditetapkan untuk dibangun di Bandung sedjalan dengan rentjana „Projek Training Institute of Geology and Mining" jang diselenggarakan oleh ITB dengan memperoleh bantuan dari United Nation Specail Funds.

Dengan makin meningkatnja hasil-hasil jang telah ditjapai dalam mengerdjakan persiapan-persiapan kearah pembentukan Pusat Penelitian Nasional, maka pada tanggal 11 April 1962 oleh Ketua MIPI telah dibentuk 4 (empat) projek direktoria jang baru jang lebih lengkap dan sementara itu Pembantu Utama Ketua untuk Urusan Pembangunan telah diganti dengan sebutan Pd. Pemimpin Urusan Pembangunan serta dipangku oleh Prof. M. Sadarjoen Siswomartojo.

Adapun susunan Projek Direktoria jang baru itu adalah:

1.. Projek Direktorium Lembaga Kimia (Kpts. Ketua M.I.P.I. — No. 25/Ket/1962):
   a. Prof. Dr. Ir. R.M. Soemantri, sebagai Ketua.
   Ir. Tjipto Utomo, anggota.
   c. Ir. Sudarno, anggota.
2. Projek Direktorium Lembaga Physika (Annex Instruments Centre) (dengan surat Kpts. Ketua M.I.P.I. No. 26/Ket/ '62):
   a. Prof. Dr. Ong Pik Hok, sebagai Ketua.
   b. Prof. Ir. Go Pok Oen, anggota.
   c. Prof. Ir. Mugiono, anggota.
3. Projek Direktorium Lembaga Metallurgi (Kpts. Ketua M.I.P.I. No. 27/Ket/1962):
   a. Hadijanto Martosubroto, B.E., M.Sc., E.E. sebagai Ketua.
   b. Benito Kodijat, anggota.
   c. Wijono Kariaguna, anggota.
4. Projek Direktorium Lembaga Elektroteknika (Kpts. Ketua M.I.P.I. No. 28/Ket/1962):
   a. Prof. T.M. Soelaiman, B.E., M.Sc., E.E., sebagai Ketua.
   b. Samaun, M.Sc., anggota.
   c. Muhammadie, M.Sc., anggota.

Untuk mentjapai keselarasan persiapan dan perentjanaan, maka oleh Ketua M.I.P.I. dirasakan perlu untuk mengangkat seorang Koordinator Projek Direktoria tersebut dan dengan keputusannja tanggal 11 April 1962 No. 24/Ket/1962, maka Prof. Dr. Ir. R.M. Soemantri diangkat untuk djabatan tersebut.

Adapun bagi perentjanaan Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional, beberapa sardjana ilmu sosial dan ekonomi telah menjumbangkan tenaganja dibawah pimpinan Prof. M. Sadarjoen Siswomartojo dan terhitung mulai tanggal 1 September 1962 sardjana tersebut diresmikan oleh Ketua M.I.P.I. sebagai anggota-anggota Badan Pembina Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional dan mulai bekerdja di Djakarta.

Mereka ini adalah:

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Sadli
2. Prof. Dr. Kuntjaraningrat
3. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro
4. Dr. Selo Soemardjan
5. Dr. M. Makagiansar
6. Prof. Sarbini Sumawinata

Adalah merupakan suatu tradisi dalam proses perentjanaan ialah sambil terus melangkah kearah realisasinja, maka terus menerus diadakan penjempurnaan terhadap rentjana jang telah siap disusun itu. Penjempurnaan ini diadakan berdasarkan konsultasi dengan sardjana-sardjana asing jang telah berpengalaman, penindjauan kelembaga-lembaga dinegara-negara jang telah berkembang dan perbandingan-perbandingan dengan lembaga-lembaga dinegara-negara tersebut serta suatu hal jang sangat penting ialah berdasarkan urgensi kebutuhan Negara. Setelah melalui pertimbangan, perbandingan dan penjempurnaan, maka achirnja telah dapat disiapkan suatu rentjana overall jang menjimpang dari segala perentjanaan dalam **schedule, gedung, equipment, training** dan lain-lain.

Setelah diadakan pertemuan berkali-kali selama tahun 1963 dan tahun 1964 antara Jang Mulia Menteri Research Nasional dengan P.J.M. Presiden, maka achirnja pada tanggal 22 Pebruari 1964 outline lay-out pembangunan Pusat Penelitian Nasional (NRC) telah disjahkan oleh P.J.M. Presiden.

Sebagai hasil-hasil pembitjaraan selandjutnja dan sebagai hasil penindjauan jang dilakukan oleh P.J.M. Presiden jang disertai oleh J.M. Menteri Research Nasional dan Ketua M.I.P.I., maka achirnja P.J.M. Presiden telah menetapkan untuk mem-

bangun Kompleks Pusat Penelitian Nasional (N.R.C.) disebidang tanah didaerah Tjibinong jang terletak pada Km. 45 dari Djakarta kedjurusan Bogor dan menurut kebutuhan adalah 200 ha.

Demikian pula dari hasil-hasil pertemuan dengan P.J.M. Presiden telah disetudjui pula pembangunan Komplek Departemen Urusan Research Nasional termasuk didalamnja gedung Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia serta bangunan-bangunan lain di Djakarta.

Perentjanaan Pembangunan Physik.

Rentjana pelaksanaan pembangunan Physik projek-projek dalam lingkungan M.I.P.I. — Departemen Urusan Research Nasional dibagi dalam 4 (empat) bagian sesuai dengan situasi geografis daerah pembangunannja :

1. Kompleks Departemen Urusan Research Nasional dan M.I.P.I. di Djakarta.
2. Kompleks Pusat Riset Nasional (N.R.C.) di Tjibinong.
3. Kompleks Lembaga Biologi Nasional di Bogor.
4. Kompleks Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional di Bandung

Sesuatu jang chas dalam pembangunan projek-projek ini terletak dalam suatu tudjuan bahwa gedung-gedung jang akan djadi nanti akan berfungsi untuk menampung kerdja-kerdja keilmuan (riset).

Hal ini berarti bahwa gedung-gedung itu harus memenuhi sjarat-sjarat tertentu baik dalam hal bentuk, konstruksi maupun fasilitas-fasilitas, sehingga pekerdjaan-pekerdjaan dan alat-alat ilmiah dapat ditampung dalam gedung ini.

Oleh karenanja adalah suatu pekerdjaan jang memerlukan pengetahuan dan pengalaman chusus dari siperentjana untuk dapat menghasilkan perentjanaan jang sesuai.

Untuk setjara maksimal dapat menghasilkan pola-pola rentjana jang sempurna, maka beberapa „basic design" dari bangunan-bangunan laboratorium disusun oleh arsitek-arsitek jang sudah berpengalaman luas dalam penjusunan rentjana laboratorium-laboratorium taraf internastional, bekerdja sama dengan para sardjana dalam lingkungan Direktorat Lembaga-lembaga riset masing-masing.

Seorang Arsitek Australia jang tergabung dalam CSIRS bernama W.R. Ferguson jang telah sangat berpengalaman dalam

hal merentjanakan laboratorium-laboratorium dibanjak negara telah bekerdja pula untuk setjara bersama-sama dengan para arsitek dan para expert Indonesia lainnja untuk menjusun „basic design" dari N.R.C.-Tjibinong dan Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional. Selain dari pada itu djuga telah bekerdja A.M. Samarin beserta teamnja, sardjana-sardjana dari Uni Sovjet dan Tjekoslovakia.

Dalam penjusunan „basic design" dari Lembaga Biologi Nasional dapat dikemukakan seorang arsitek dari University of Hawaii: Dr. Maxwell Doty serta beberapa sardjana/arsitek jang kenamaan.

Maka sangat beralasan sekali seandainja perentjanaan selandjutnja dilakukan oleh instansi keilmuan seperti Institut Teknologi Bandung atau perentjana lainnja jang dianggap mempunjai kesangupan untuk menerima tugas dengan sjarat-sjarat seperti telah diuraikan terdahulu.

Perentjanaan Kompleks N.R.C. Tjibinong dilakukan oleh LembagaPenjelidikan Geologi dan Pertambangan Nasional dilakukan oleh Biro Pembangunan I.T.B.

Disamping itu Lembaga Biologi Nasional di Bogor dan Komplek Departemen Urusan Research Nasional di Djakarta dilakukan oleh Biro Arsitek Pola Raya ketjuali Gedung Dokumentasi Ilmiah Nasional dikerdjakan oleh Ir. Wahjono Pribadi seorang arsitek jang dianggap mempunjai pengetahuan dalam merentjanakan suatu gedung Dokumentasi dalam standard internasional.

Perlu dikemukakan, bahwa target selesainja pembangunan dalam situasi jang normal adalah achir daripada masa Pembungunan Nasional Semesta Berentjana Tahap Pertama (tahun 1969).

Oleh sebab itu dalam perentjanaan telah ditetapkan suatu kebidjaksanaan untuk mensinkronisir hasil-hasil perentjanaan dalam 4 (empat) bagian pekerdjaan sehingga dalam saat tersebut diatas seluruhnja telah lengkap untuk berdjalan :

1. perentjanaan pembangunan gedung-gedung
2. kebutuhan tenaga dan karyawan ilmiah
3. pengusahaan alat-alat kelengkapan ilmiah
4. penentuan dari projek-projek riset.

Oleh karenanja, pengaruh situasi kepada kemungkinan terdjadinja kelambatan terhadap salah satu dari keempat unsur tersebut diatas akan mempengaruhi terhadap unsur-unsur lainnja.

Pada umumnja pekerdjaan perentjanaan sudah dikatakan selesai, sehingga tahun 1965 sudah dapat dimulai dengan pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan gedung-gedung.

Kebidjaksanaan Pelaksanaan Pembangunan.

Pada kenjataannja lembaga-lembaga riset jang tergabung dalam Pusat Riset Nasional baik mengenai waktu pembentukannja maupun perkembangan fungsinja satu sama lain berbeda.

Lembaga Biologi Nasional merupakan lembaga riset jang sudah lama berdiri dan bekerdja, dibandingkan dengan lembaga-lembaga riset lainnja. Demikian pula Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional; walaupun waktu pembentukannja bersamaan dengan lembaga-lembaga riset baru lainnja, akan tetapi perkembangan pekerdjaannja sedemikian rupa keadaannja, sehingga walaupun tempat kerdja jang permanen belum ada, akan tetapi lembaga itu harus sudah mulai melakukan pekerdjaannja setjara intensif.

Oleh karenanja dalam pelaksanaannja, pembangunan dibagi dalam tiga tingkat :

1. Rehabilitasi, memperbaiki atau menjempurnakan fasilitas-fasilitas lembaga riset jang sudah ada, misalnja dalam lingkungan Lembaga Biologi Nasional.
2. Membangun gedung-gedung kantor dan atau laboratorium-laboratorium sementara sebelum jang permanen selesai, berhubung fungsi risetnja sudah harus dilaksanakan dengan intensif misalnja pada Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional di Bandung.
3. Mengadakan pembangunan baru.

Organisasi Pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan jang dimulai sedjak tahun 1964, telah dibentuk suatu aparatur jang chusus mengurus soal-soal pelaksanaan pembangunan dilapangan.

Aparatur ini bernama Badan Pimpinan Teknis Pembangunan (B.P.T.P.) untuk tingkat pusat dan pada tiap-tiap projek terdapat Team Penjelenggara Setempat (T.P.S.).

Aparatur pelaksanaan ini adalah konsekwensi daripada adanja Surat Keputusan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga No. 71 tahun 1964, dan karenanja dalam B.P.T.P. maupun

T.P.S. duduk wakil-wakil dari „bouwheer" (MIPI/DURENAS), Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga sebagai unsur teknis dan dari pihak perentjana.

B.P.T.P. setjara keseluruhan bertanggung djawab atas pengurusan dan kelantjaran djalannja pelaksanaan pembangunan kepada Menteri Research Nasional dan chusus mengenai soal-soal teknis kepada Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Adapun pembangunan-pembangunan atau pekerdjaan-pekerdjaan jang tidak diurus oleh B.P.T.P. (dalam hal ini pekerdjaan-pekerdjaan jang merupakan pekerdjaan ketjil dan insidentil seperti rehabilitasi perumahan pegawai dan sematjamnja) pelaksanaannja diurus oleh Urusan Pembangunan M.I.P.I. dengan aparatur-aparatur tersendiri.

T.P.S.-T.P.S. jang hingga sekarang telah dibentuk walaupun dalam sifat sementara adalah T.P.S.-T.P.S. di Tjibinong dan Bandung.

Prinsip penundjukan kontraktor-kontraktor dilakukan dengan djalan membagi :

(1) Gedung-gedung jang besar atau berfungsi chusus oleh Perusahaan-perusahaan Bangunan Negara dan
(2) Perumahan oleh kontraktor swasta jang kapabel.

Program Kerdja Sama.

Baik dalam taraf persiapan maupun dalam tingkat pelaksanaan pembangunan telah dirintis suatu kerdja sama jang sangat baik dan erat, diantaranja jang terpenting adalah :

1. Dengan I.T.B. jang telah berbentuk Piagam Kerdja Sama menentukan suatu program jang terutama dalam hal pembentukan karyawan ilmiah.
2. Dengan P.L.N. dalam hal ini P.L.N. Exploitasi XI di Djawa Barat djuga dalam bentuk Piagam Kerdja Sama, untuk pemenuhan kebutuhan elektrifikasi projek.
3. Dengan lain-lain instansi pemerintahan Daerah sedjak tingkat I sampai dengan pedjabat-pedjabat ditingkat Kewedanaan dan Kelurahan.

Situasi pelaksanaan pembangunan dewasa ini serta kemungkinan-kemungkinan pada tahun berikutnja.

Pada umumnja tanah bagi keperluan pembangunan projek-projek dalam garis besarnja telah tersedia. Kalaupun diperlukan luas tambahan tidaklah mendjadi rintangan bagi pemba-

ngunan dalam tahap pertama. Karena tanah kekurangannja kebanjakan akan dipergunakan kelak untuk perluasan lembaga atau perumahan para karyawan ilmiah.

Demikian djuga dibidang perentjanaan. Sambil menunggu hasil perentjanaan detail, sudah dapat dimulai dengan pelaksanaan pembangunan, misalnja Kompleks N.R.C. di Tjibinong dan Pusat Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional atau Institute of Geology and Mining (I.G.M.) di Bandung, djuga pembangunan Lembaga Biologi Nasional dan Kompleks Departemen Urusan Research Nasional.

Gambaran jang djelas dari pada situasi pembangunan projek demi projek serta harapan-harapan jang akan ditjapai pada tahun berikutnja dapat dikemukakan setjara terperintji sebagai berikut :

a. Kompleks Departemen Urusan Research Nasional di Djakarta.

Dengan Instruksi Presiden tanggal 11 April 1964 No. 05, maka Kompleks Departemen Urusan Research Nasional ditetapkan untuk dibangun didaerah djalan Djenderal Gatot Soebroto pada sebidang tanah seluas 31 hektar jang sedianja diperuntukkan L.E.P.P.R.I. (Lembaga Pameran dan Pekan Raya Internasional).

Dari luas tanah 30 hektar jang ditjadangkan untuk L.E.P.-P.R.I. telah dibebaskan seluas 19 hektar, dimana 11 hektar sudah merupakan tanah jang siap untuk bangunan. Dan tanah seluas terachir ini kemudian diserah-terimakan kepada Departemen Research Nasional sesuai dengan instruksi diatas.

Perentjanaan sementara menundjukkan, bahwa untuk menampung gedung-gedung dalam Kompleks Departemen Urusan Research Nasional diperlukan daerah seluas 18 sampai 20 hektar.

Situasi daerah jang dilalui sebuah kali ditengah-tengahnja mendjadikan luas daerah pembangunan berkurang, oleh sebab itu sudah sajogyanja diadakan penindjauan-penindjauan terhadap hasil perentjanaan pendahuluan dimana Komplek Departemen Urusan Research Nasional akan terdiri atas:

a. Gedung Departemen Urusan Research Nasional.
b. Gedung Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia.
c. Gedung Centre „Clearing House" dan Pertjetakan.
d. Gedung Lembaga Penelitian Laut.

e. Gedung Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional.
f. „Science Museum".
g. „Natuurhistorische Museum".
h. Perumahan para pegawai.
i. „Civic Centre" serta rumah-rumah pembangkitan tenaga listrik dan sebagainja.

Penjesuaian dengan luas tanah jang tersedia dilakukan dengan djalan pengurangan pembangunan jang belum diperlukan dalam tahap pertama seperti:

a. „Science Museum".
b. „Natuurhistorische Museum".
c. „Civic Centre".

Sebagai konsep perentjanaan telah selesai disusun suatu tata letak bangunan kompleks Departemen Urusan Research Nasional disertai dengan maquettennja.

Perantjanaan dari pada Kompleks Departemen Urusan Research Nasional telah dipertjajakan kepada Biro Perentjana P.T. „Pola Raya" di Djakarta, ketjuali Gedung Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional jang karena alasan seperti disebutkan dimuka dikerdjakan oleh Ir. Wahjono Pribadi.

Pekerdjaan-pekerdjaan pengukuran, pemetaan, penjelidikan tanah serta survey daerah telah dilakukan disamping telah diadakan persiapan-persiapan pendahuluan untuk membangun gedung kantor direksi lapangan.

Perentjanaan sampai dengan detail planning akan dapat diselesaikan sampai dengan bulan April tahun 1965 dimana pembangunan permulaan akan dimulai pada achir bulan April 1965.

Sesuai dengan penjediaan Anggaran Belandja Pembangunan 1965 serta luasnja tanah jang siap sebagai daerah pembangunan maka prioritas pembangunan Kompleks Departemen Urusan Research Nasional diatur sebagai berikut:

Tahun 1965;

1. Pematangan tanah.
2. Pelurusan kali, djaring djalan, penerangan kompleks.
3. Kantor-kantor dan fasilitas-fasilitas sementara.
4. Pembangunan (sampai selesai 30 sampai 40 unit perumahan berbagai ukuran, tudjuan seluruhnja adalah 200 unit).
5. Kemungkinan pembuatan phondasi dari gedung Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional bila ada perobahan anggaran belandja jang menguntungkan.

Tahun 1966;

1. Lndjutan pekerdjaan tahap 1965.
2. Mulai dengan Gedung Departemen.
3. Mulai dengan Gedung M.I.P.I.

Sedangkan gedung-gedung lainnja merupakan prioritas terachir mengingat disamping urgensinja djuga seperti Lembaga Penelitian Laut dewasa ini sudah mempunjai kantor jang dapat dipergunakan sampai ± 4 tahun lagi. Dalam komplek ini sedang diadakan usaha pembangunan tambahan dan penjempurnaan setjara menjeluruh.

Kompleks National Research Centre Tjibinong.

Pelaksanaan dari pada pembangunan N.R.C. Tjibinong dimulai.

Berdasarkan hasil konsultasi jang mendalam dan lengkap dengan arsitek W.R. Ferguson dan perentjananja pada kesempatan kundjungan disusun suatu tata letak bangunan lembaga-lembaga Riset N.R.C. jang dianggap paling tepat.

Disamping itu telah selesai pula dibuat gambar-gambar sketsa dari tiap-tiap laboratorium pada lembaga-lembaga riset tersebut.

Selain dari pada tata letak bangunan, P.J.M. Presiden telah berkenaan menjetudjui sketsa-sketsa gedung-gedung lembaga riset dengan saran mengadakan sedikit perobahan arsitektonis pada beberapa bagian gedung.

Mendjelang saat pemantjangan tiang pertama jang dilakukan pada tanggal 11 September 1964 telah dikerdjakan hal-hal sebagai berikut:

— djembatan kerdja, selesai.
— djalan-djalan kerdja.
— penjelidikan tanah detail, selesai.
— pembangunan ruangan-ruangan kantor untuk direksi lapangan, selesai.
— penerangan-penerangan kerdja disepandjang djalan kerdja.

Perlu diketahui bahwa selama ini untuk pekerdjaan lapangan di-area kantor Kewedanaan Tjibinong telah disediakan suatu ruangan kantor jang dinamakan „Kantor Perwakilan M.I.P.I. untuk pembangunan Projek N.R.C.", jang telah dipergunakan sedjak tanggal 1 April 1964.

Setelah pemantjangan tiang pertama dalam tahun 1964 ini direntjanakan untuk mengerdjakan hal-hal sebagai berikut:

— pengerdjaan fondasi seluruh gedung dikomplek Pusat lembaga setjara serentak.
— pembangunan pasanggrahan bagi menampung para teknisi jang harus bekerdja atau mengawasi pekerdjaan para kontraktor dilapangan.
— pembangunan djembatan masuk jang permanen.

Tahun berikutnja, 1965 diharapkan dapat dilaksanakan pekerdjaan-pekerdjaan sebagai berikut:

— fondasi, selesai dilandjutkan dengan pembangunan keatas.
— pasanggrahan.
— mulai dengan pembangunan perumahan dan „civic centre".
— djalan-djalan kerdja, selesai.
— mulai pembangunan instalasi pendjernihan air.
— membangun pusat pembangkitan tenaga listrik seluruh djaringan-djaringannja.

Menurut perhitungan pembangunan physik Pusat Riset Nasional akan selesai pada pertengahan tahun 1968.

Pada saat akan dimulainja pembangunan serentak ternjata bahwa penjediaan anggaran belandja jang direntjanakan tidak sesuai dengan perentjanaan biaja, sehingga untuk mengatasi pengurangan anggaran belandja dan kenaikkan harga bahan bangunan jang selalu bertendens menaik, dilakukan kebidjaksanaan untuk „melambatkan" pembangunan jang hasilnja adalah sebagai berikut:

Tahun 1965 disamping landjutan dari pada pekerdjaan-pekerdjaan jang sudah dimulai tahun 1964 dibangun:

— 1. Gedung-gedung Pusat Instrumentasi Nasional.
— 2. Gedung-gedung Lembaga Elektroteknika Nasional.
— 3. Pasanggrahan selesai mendjadi bulan Oktober 1965.
— 4. Lembaga Physika Nasional, bila ternjata terdjadi perobahan jang baik dalam situasi anggaran belandja.

Dasar pemilihan prioritas adalah bahwa:

1. Tenaga-tenaga ahli jang akan bekerdja telah tersedia pada waktunja.
2. Pengusahaan alat-alat ilmiah telah selesai pengurusannja.

Mengenai kompleks perumahan ternjata masih diperlukan penindjauan-penindjauan berhubung dengan adanja sjarat-sjarat keindahan dari fihak Projek Puntjak Indah.

Pusat Lembaga Biologi Nasional Bogor.

Seperti telah dikemukakan, Lembaga Biologi Nasional sebelum tergabung dalam M.I.P.I. ada dibawah lingkungan Departemen Pertanian dan Agraria. Dengan demikian adalah satu-satunja lembaga riset jang sudah ada dan sudah berdjalan dalam lingkungan M.I.P.I.

Karenanja maka pembangunan Lembaga Biologi Nasional terbagi dalam 2 (dua) kategori. Rehabilitasi dari pada lembaga-lembaga/bagian-bagian, dan pembangunan baru gedung-gedung kantor dan atau laboratorium.

Jang dimaksud dengan rehabilitasi, ialah perbaikan atau penjempurnaan dari pada gedung-gedung atau perlengkapan-perlengkapan jang sudah ada agar supaja dengan demikian pekerdjaan dari pada badan riset itu dapat dilandjutkan atau ditingkatkan kesempurnaannja. Rehabilitasi tersebut dilakukan terhadap:

— Gedung Biro Direktur Kebun Raya di Bogor dan Tjibodas.
— Laboratorium Botani Kebun Raya Bogor.
— Laboratorium dan Gudang-gudang serta perumahan pegawai di Lembaga Penelitian Laut di Pasar Ikan Djakarta.
— Rumah katja untuk tanaman djenis anggrek di Tjibodas.
— Station Observasi di Kandang Badak Tjibodas.
— Gedung Museum Zoologicum di Bogor.
— Perumahan pegawai di Kebon Raya Bogor.

Pembangunan gedung permanen jang baru telah dimulai dengan bagian Herbarium. Gedung jang direntjanakan akan bertingkat 8 (delapan) terletak di Djalan H. Ir. Djuanda Bogor, dewasa ini telah sampai dengan pembuatan lantai ketiga jang menurut rentjana akan selesai seluruhnja pada achir 1966.

Pemantjangan tiang pertama gedung ini dilakukan oleh P.J.M. Presiden pada tanggal 19 Agustus 1963.

Adapun Kompleks Pusat Lembaga Biologi Nasional akan terletak di Kompleks Institut Pertanian Bogor diatas tanah seluas

5,3 Ha. Tanah mana didapat atas Keputusan P.J.M. Presiden dengan menjerah terimakan tanah-tjadangan bagi keperluan perluasan Institut Pertanian Bogor.

Pembangunan Pusat Lembaga Biologi Nasional terdiri atas gedung-gedung:

1. Gedung Herbarium.
2. Gedung Museum dan Pameran Pengetahuan alam.
3. Gedung Perpustakaan.
4. Laboratorium Penelitian Botani (Treub).
5. Gedung Koleksi toologi.
6. Gedung Penelitian Zoologi.
7. "Workshop".
8. Perluasan Laboratorium dan lain-lain.

Selandjutnja masih ada bagian Lembaga Biologi Nasional jang terletak dikota Djakarta ialah Lembaga Penelitian Laut di Pasar Ikan jang menurut rentjana pembangunan komplek Departemen Urusan Research Nasional di Djalan Djenderal Gatot Soebroto akan dipindahkan kekomplek tanah tersebut.

Atas kerdjasama dengan Kotapradja Bogor, telah ditjadangkan sekitar timur dan selatan Pusat Lembaga Biologi Nasional tanah seluas ± 46 Ha jang kelak akan dipergunakan untuk keperluan perumahan para tenaga ahli Lembaga Biologi Nasional serta untuk keperluan perluasan Pusat Lembaga Biologi Nasional.

Seperti telah diketahui, perentjanaan induk Komplek Lembaga Biologi Nasional didasarkan atas hasil pemikiran team Dr. Maxwell Doty, dan arsitek-arsitek lain bersama dengan para ahli dari Lembaga Biologi Nasional dan arsitek-arsitek dari Team P.T. Pola Raya jang bertugas melakukan perentjanaan-perentjanaan berikutnja.

Tahun 1965 pembangunan Lembaga Biologi Nasional belum dapat dimulai berhubung adanja pengalihan anggaran belandja kesektor:

1. Penjelesaian Gedung Herbarium.
2. Rehabilitasi Gedung-gedung jang sangat mendesak.

d. Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional.

Pembangunan Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional semula didasarkan atas kerdja-sama dengan U.N. Special Fund

dimana Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional harus sudah selesai pada tahun 1966.

Pembangunan physik Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional atau Institute of Geology and Mining (I.G.M.) dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

Tahap pertama ialah membangun gedung-gedung kantor dan laboratorium permanen tetapi penggunaannja bersifat sementara. Tahap kedua ialah pembangunan kampus jang permanen dengan penggunaannja jang permanen pula. Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional harus dibangun berdekatan dengan lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Masalah-masalah jang timbul dalam pengusahaan tanah jang tjukup luas untuk lembaga ini djuga mendorong dilakukannja kebidjaksanaan membagi pembangunan mendjadi 2 (dua) taraf seperti termaksud diatas.

Perumahan pembangunan I.G.M. diperkokoh dengan adanja suatu kerdja-sama antara M.I.P.I. — Departemen Urusan Research Nasional dengan Institut Teknologi Bandung — Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Realisasi dari pada kerdja-sama ini ditandai dengan ikut sertanja Biro Pembangunan I.T.B. sebagai perentjana dari kompleks Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional.

Perentjanaan dari pada lembaga ini jang akan dibangun pada tanah seluas ± 4 Ha, didaerah Desa Tjisitu Djalan Sangkuriang Bandung, telah selesai dalam bulan Pebruari 1965 dan permulaan pembangunan sesungguhnja dimulai pada medio bulan Maret 1965. Walaupun demikian pekerdjaan pendahuluan seperti pembuatan djalan-djalan kerdja telah dimulai sedjak bulan Agustus 1964.

Pekerdjaan-pekerdjaan jang dimaksud dalam tahap pertama diatas, ditandai dengan selesainja perumahan para ahli I.G.M. sebanjak 12 (dua belas) buah dan kemudian akan ditambah 4 (empat) buah lagi di Tjiumbuleuit, Bandung, jang akan menampung sekelompok sardjana pertama.

Kemudian sebelumnja telah diselesaikan pembangunan kantor administrasi sementara I.G.M. jang terletak di Kampus I.T.B. jang berdekatan dengan kantor sementara ini sedang dibangun suatu laboratorium permanen jang akan dipergunakan oleh I.G.M. sampai gedung I.G.M. dibangun di Djalan Sangku-

riang selesai. Gedung laboratorium berlapis 2 (dua) ini akan selesai dan dipergunakan seluruhnja pada medio tahun 1965. Setelah tidak dipergunakan, gedung ini akan dipergunakan oleh Departemen Geologi dan I.T.B.

Wali Kota/Kepala Kotapradja Bandung telah memberikan kesanggupan-kesanggupan untuk mengusahakan tanah sekitar I.G.M. di Djalan Sangkuriang dikuasai oleh M.I.P.I. — Departemen Urusan Research Nasional bagi keperluan perluasan Lembaga dikemudian hari serta untuk keperluan tenaga ahli.

Untuk memungkinkan djalannja pekerdjaan riset dari I.G.M. ini, di Kebumen sedang dikerdjakan suatu Kampus lapangan akan berfungsi sebagai tempat latihan untuk keperluan penelitian geologis di Djawa Tengah.

e. Perumahan Mahasiswa di Tjiumbuleuit — Bandung.

Untuk mendapatkan tenaga-tenaga riset jang kelak akan bekerdja pada lembaga-lembaga penelitian dalam lingkungan M.I.P.I., dewasa ini terdapat mahasiswa-mahasiswa jang berikatan dinas dengan M.I.P.I. dan beladjar pada berbagai djurusan jang dibutuhkan oleh N.R.C. pada perguruan-perguruan tinggi di Bandung dan Jogjakarta serta beberapa sardjana jang memperdalam pengetahuannja diluar negeri.

Sedjumlah besar para mahasiswa jang berikatan dinas dengan M.I.P.I. bertempat tinggal dan menuntut peladjaran pada perguruan tinggi dikota Bandung.

Adalah suatu kenjataan bahwa pada umumnja pemondokan adalah masalah utama jang dihadapi para mahasiswa. Masalah ini amat besar pengaruhnja terhadap kepada kemadjuan peladjaran mereka.

Untuk memenuhi kebutuhan pemondokan para mahasiswa, dalam taraf pertama di Tjiumbuleuit Bandung telah dibangun 15 rumah jang dapat menampung lebih kurang 60 (enam puluh) mahasiswa dan sardjana jang tidak berkeluarga.

Dikandung maksud dalam tahun 1965, Kompleks perumahan mahasiswa di Tjiumbuleuit ini akan ditambah dengan 20 (dua puluh) buah rumah lagi ditambah dengan sebuah balai pertemuan mahasiswa.

Sebelum ada aliran listrik, sementara dipasang sebuah diesel agregaat jang setjara minimal memenuhi kebutuhan.

Ringkasan: Situasi Pekerdjaan pada Kompleks Departemen Urusan Research Nasional di Djakarta.

No. Urut	1964	1965	1966
1.	Persiapan perentjanaan	Dilandjutkan	—
2.	Perentjanaan	Dilandjutkan	—
3.	Pengusahaan tanah	Dilandjutkan	Dilandjutkan
4.	—	Pembangunan direksi keet	—
5.	—	Pemagaran	Dilandjutkan
6.	—	Pelurusan kali	—
7.	—	Selesai 30/40 unit rumah	Dilandjutkan
8.	—	Supply air, listrik	Dilandjutkan
9.	—	Kemungkinan fondasi Pusat Dok. Nasional	Dilandjutkan
10.	—	—	Ged. Departemen
11.	—	—	Ged. M.I.P.I.
12.	—	—	Ged. lain menurut prioritas

Ringkasan: Situasi Pekerdjaan pada Projek N.R.C. — Tjibinong.

No. Urut	1964	1965	1966
1.	Persiapan perentjanaan	—	—
2.	Perentjanaan	Dilandjutkan	—
3.	Pengusahaan tanah	—	—
4.	Kantor Perwakilan	—	—
5.	Djembatan Kerdja	—	—
6.	Djalan Kerdja	Dilandjutkan	—
7.	Direksi Keet	—	—
8.	Djembatan Utama	Dilandjutkan	—
9.	Guest House	Dilandjutkan	—
10.	Penerangan Sementara	Dilandjutkan	—
11.	—	Pusat Instrument Ilmiah Nasional	Dilandjutkan
12.	—	Lembaga Elektroteknika Nasional	Dilandjutkan
13.	—	Lembaga Physika Nasional	Dilandjutkan
14.	—	Perumahan	Dilandjutkan
15.	—	Instalasi Air-Minum	Dilandjutkan
16.	—	Elektrifikasi	Dilandjutkan
17.	—	—	Lembaga Kimia Nasional
18.	—	—	Lembaga Metalurgi Nasional
19.	—	—	Fasilitas-fasilitas lainnja

Ringkasan: Situasi Pekerdjaan pada Projek Lembaga Biologi Nasional di Bogor.

No. Urut	1964	1965	1966
1.	Rehabilitasi	Dilandjutkan	Dilandjutkan
2.	Persiapan perentjanaan	—	—
3.	Perentjanaan	Selesai	—
4.	Pengusahaan tanah I	Dilandjutkan II	Dilandjutkan III
5.	Pembangunan Herbarium	Dilandjutkan	Selesai
6.	Perumahan	—	Dilandjutkan
7.	—	—	Ged. Perpustakaan
8.	—	—	Lain-lain menurut prioritas

Ringkasan: Situasi Pekerdjaan Projek Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional di Bandung.

No. Urut	1964	1965	1966
1.	Persiapan perentjanaan	—	—
2.	Perentjanaan	Perentjanaan (achir)	—
3.	Pengusahaan tanah	Dilandjutkan	Dilandjutkan
4.	Persiapan Pembangunan	—	—
5.	Kantor Sementara	—	—
6.	Perumahan (selesai 18 rumah di Bukit Dago)	Dilandjutkan	—
7.	Laboratorium Sementara	—	—
8.	Pendjernihan Air di Bukit Dago	—	—
9.	Kampus lapangan Geologi di Kebumen	Dilandjutkan	—
10.	—	Laboratorium Perminjakan (selesai)	—
11.	—	—	Pembangunan berikutnja berdasarkan urgensi dan kesanggupan pembiajaan saat ini.

Pembangunan Ilmiah.

3. Pembangunan Ilmiah.

Sesuai dengan tugas Departemen, dengan memberikan prioriats kepada riset jang bertudjuan meninggikan produksi nasional, maka prioritas projek-projek riset ditetapkan sebagai berikut:

1. Bidang kedokteran:
   - riset dibidang makanan
   - riset dibidang penjakit-penjakit rakjat
   - riset dibidang kepharmasian.
2. Bidang Pertanian:
   - riset kearah mempertinggi produksi dan kwalitas bahan makanan
   - riset kearah mempertinggi zat telur
   - riset kearah mempertinggi produksi bahan sandang.
3. Bidang Teknologi dan Industri:
   - riset mengenai masalah-masalah jang sekarang timbul dalam pelaksanaan industri
   - riset mengenai masalah dalam industri jang akan dibangun
   - riset mengenai bahan-bahan baku jang masih perlu diimport
   - riset mengenai masalah kekajaan sumber alam
   - riset dibidang sandang.
4. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaja:
   - riset dibidang aspek-aspek ekonomis, sosial dan budaja dalam pembangunan Negara Republik Indonesia kearah masjarakat Sosialis Indonesia.
   - riset dibidang aspek-aspek ekonomis dan sosial dalam pembangunan industri
   - riset dibidang masalah penduduk dan chusus masalah tenaga kerdja dalam pembangunan.

Dengan adanja prioritas-prioritas tersebut diatas, tentu kemungkinan-kemungkinan untuk menjelenggarakan projek-projek riset lain tetap terbuka.

b. Kegiatan Riset.

Dalam rangka tugas M.I.P.I. dan kemudian Departemen, maka usaha-usaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi jang ditudjukan kepada:

1) Lembaga-lembaga riset M.I.P.I., DURENAS;
2) Lembaga-lembaga Riset Departemen-departemen lain, universitas-universitas, swasta dan perseorangan meliputi:
   a). menjelenggarakan survey dan riset;

b). menjelenggarakan ekspedisi-ekspedisi ilimiah;

c). menerbitkan madjalah-madjalah ilmiah, ,buku-buku ilmiah, buku-buku peladjaran universitas, monografi-monografi ilmiah, disertasi-disertasi;

d). menjediakan perlengkapan riset (alat-alat ilmih, madjalah-madjalah ilmiah, buku-buku ilmiah, chemicalia);

e). menjelenggarakan kongres/seminah/symposion/pertetemuan ilmiah;

f). menghargai karya-karya ilmiah dengan memberikan uang djasa, hadiah, dan sebagainja.

Dalam melaksanakan usaha-usaha tersebut, disediakan anggaran belandja untuk Lembaga-lembaga Riset DURENAS dengan melalui M.I.P.I. dan untuk Lembaga-lembaga Riset diluar DURENAS diberikan bantuan langsung dari Departemen.

c. Bantuan untuk melaksanakan Riset.

Untuk melaksanakan usaha-usaha riset, M.I.P.I. dan kemudian Departemen Urusan Research Nasional memberikan sebagai berikut:

1). Program Bantuan 1956 - 1965:

Projek-projek Riset	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	Keterangan
a. Kedokteran	—	1	1	3	5	3	34	115	139	Djumlah projek
b. Pertanian	—	—	1	—	3	5	12	29	31	„
c. Teknologi & Industri	—	—	—	—	1	—	2	23	46	„
d. Ekonomi, Sosial, Budaja	—	1	—	—	4	5	11	26	37	„
Penerbitan Ilmiah	1	3	4	8	8	4	14	34	49	termasuk buku/madjalah/dll.
Pertemuan Ilmiah	—	—	—	—	—	—	4	8	11	
Disertasi	—	—	—	—	—	—	2	5	1	
Perlengkapan Penelitian	—	—	—	—	—	—	5	8	43	Djumlah lab. dari berbagai lembaga riset/pendidikan

2). **Bantuan untuk menjelenggarakan survey dan riset 1956 - 1965:**

Tahun	Bidang			
	Kedokteran (Rp.)	Pertanian (Rp.)	Tekn./Industri (Rp.)	Ekon./Sos./Bud. (Rp.)
1956	10.000,—			
1957	13.500,—			
1958	13.500,—	22.000,—		
1959	70.000,—	77.000,—	29.772,—	198.360,—
1960	10.800,—	73.073,—		161.122,—
1961	3.362.650,—	2.720.000,—	3.000.000,—	3.986.725,—
1962	17.361.527,—	13.936.000,—	36.275.000,—	15.598.882,—
1963	59.499.643,—	19.520.884,—	55.786.315,—	33.372.083,—
1964	1.379.000,—	5.750.000,—	5.500.000,—	23.000.000,—
1965 (sampai April 1965)				

3). **Bantuan untuk Penerbitan Ilmiah 1956 - 1965:**

Tahun	Djumlah
1956	Rp. 12.000,—
1957	„ 92.816,—
1958	„ 56.750,—
1959	„ 167.000,—
1960	„ 165.032,—
1961	„ 71.062,—
1962	„ 10.465.890,—
1963	„ 28.258.303,—
1964	„ 25.230.767,—
1965 (sampai April 1965)	„ 5.460.000,—

4). **Bantuan untuk Pertemuan-pertemuan Ilmiah 1960-1965:**

Tahun	Djumlah
1960	Rp. 30.335,—
1961	„ 29.000,—
1962	„ 456.000,—
1963	„ 7.750.000,—
1964	„ 40.596.490,—
1965 (sampai April 1965)	„ 150.000.—

5). Bantuan untuk Perlengkapan Riset 1962 - 1965:

Tahun	Djumlah	
1962	Rp. 5.541.500,—	
1963	„ 1.534.875,—	
1964	„ 22.605.000,—	US $ 263.200,—
1965 (sampai April 1965)	„ 30.000.000,—	

d. **Hasil-hasil kegiatan Riset.**

Hasil-hasil kegiatan Riset dari:

1) Lembaga-lembaga Riset dalam lingkungan M.I.P.I., DURENAS, jaitu:
   - — Pusat Riset Nasional
   - — Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional
   - — Lembaga Biologi Nasional
   - — Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional
   - — Lembaga Riset Kebudajaan Nasional

   dapat dibatja dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI.
2) Lembaga Riset Kanker Nasional dapat dibatja dalam Lampiran I dan VII
3) Lembaga-lembaga Riset diluar lingkungan DURENAS dapat dibatja dalam Lampiran I: „Ichtisar Perkembangan Riset 1962-1964".

Perlu diterangkan bahwa Lampiran I adalah hanja satu ichtisar perkembangan riset 1962-1964. Pada tanggal 17 Agustus 1965 akan terbit satu buku jang menggambarkan segala hasil riset dari tahun 1945-1965.

e. Pusat Dokumentasi Ilmiah.

Sebagai aparatur Departemen Urusan Research Nasional, maka M.I.P.I. telah membentuk suatu Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional jang dengan sendirinja masih perlu disempurnakan. Pusat ini bertindak sebagai "clearing centre" dan bertugas untuk:

1) memberi penerangan tentang kemadjuan-kemadjuan ilmiah didalam dan diluar negeri;
2) menjediakan perpustakaan, menjiapkan bibliografi-bibliografi, penterdjemahan karangan-karangan ilmiah, dan menjediakan reproduksi karangan-karangan ilmiah.

Pusat Dokumentasi Ilmiah dilengkapi djuga dengan buku-buku reference, literatur sekunder dari luar negeri dan "union catalog" daripada koleksi perpustakaan ilmiah dalam negeri.

f. Ekspedisi-ekspedisi ilmiah.

Salah satu program penting dalam rentjana kerdja M.I.P.I. chususnja, Departemen Urusan Research Nasional umumnja, ialah penjelenggaraan ekspedisi-ekspedisi ilmiah jang ditudjukan untuk memperoleh data-data baru mengenai alam Indonesia jang djelas akan memberikan sumbangan berharga tidak sadja

untuk menambah pengetahuan manusia tetapi djuga untuk pembangunan negara.

1) Dalam tahun 1961 telah diselenggarakan Ekspedisi Botani ke P. Sumbawa oleh Herbarium Bogoriense.
   Ekspedisi ini bertudjuan untuk menjelidiki komposisi dan ekologi hutan di P. Sumbawa dan menghasilkan diketemukannja dua species baru jaitu Heriteria Gigantea Kostern dan species dari keluarga Hildegardia jang sebelumnja hanja diketahui terdapat di Cuba, Afrika dan India.

2) Ekspedisi Zoologi ke P. Komodo jang diselenggarakan oleh Museum Zoologicum Bogoriense. Ekspedisi pertama dilakukan dalam tahun 1961 dan bertudjuan untuk mempeladjari ekologi daripada Varanus Komodoensis, suatu djenis biawak raksasa jang hanja terdapat di P. Komodo. Ekspedisi kedua diadakan dalam tahun 1962 jang bertudjuan untuk mempeladjari ekologi binatang-binatang tersebut dalam musim panas. Dalam ekspedisi ini turut serta 3 orang ahli biologi dari Uni Sovjet.

3) Dalam rangka memperoleh data tentang lautan serta unsur-unsur produktivitas lautan sekitar Kepulauan Indonesia, berbagai ekspedisi penelitian laut telah diselenggarakan. Sebagai negara bahari, baik untuk kepentingan keamanan negara maupun untuk kepentingan eksplorasi ekonomis, maka penelitian laut merupakan suatu hal jang mutlak perlu didjalankan. Demikianlah Departemen Urusan Research Nasional dalam kerdja-sama dengan A.L.R.I. dan badan-badan lain jang mempunjai kepentingan dalam penelitian laut turut serta dalam Ekspedisi Internasional Samudera Indonesia. Turut sertanja Indonesia dalam projek penelitian internasional jang diikuti oleh 19 negara lain, sangat besar artinja bagi security maritim kita oleh karena kita setjara langsung dapat menguasai dan mengawasi penelitian Samudera Indonesia jang berbatasan dengan Kepulauan Indonesia.

   Disamping turut serta dalam ekspedisi internasional, berbagai projek penelitian laut disekitar perairan Kepulauan Indonesia semakin dipergiat dan diintensifkan. Lembaga Penelitian Laut, Lembaga Biologi Nasional antara lain telah menjelenggarakan ekspedisi di Teluk Djakarta, P. Seribu dan daerah-daerah perairan lainnja. Telah banjak data-data jang dikumpulkan mengenai keadaan physik, kimiawi, meteorologi, dan jang terpenting ialah tentang produktivitas

lautan Indonesia dalam rangka mengeksplorasi lautan sebagai sumber bahan makanan bagi rakjat.

4) Lembaga Biologi Nasional telah melakukan ekspedisi keberbagai daerah untuk menambah data-data tentang sumber daja hajati Indonesia. Antara lain dapat disebut:

   Ekspedisi Botani ke Tandjung Radep Berau (Kalimantan Timur)

   Ekspedisi ke Udjung Kulon, Pulau Pantjing dan Pulau Krakatau

   Ekspedisi Ornitologi ke Irian Barat.

5) Dalam rangka kerdja-sama ilmiah antara Indonesia dan Uni Sovjet dalam tahun 1962 selama lebih kurang 8 bulan lamanja telah diselenggarakan ekspedisi vulkanologi bersama. Ekspedisi bersama meliputi wilajah vulkanologi di Djawa, Bali, Sulawesi Utara dan P. Kratau. Pihak Uni Sovjet mengikut-sertakan 6 orang ahli, sedangkan pihak M.I.P.I. jang bertindak sebagai koordinator menggerakkan tenaga-tenaga counterpart dari Institut Teknologi Bandung, Direktorat Geologi Deperdatam dan Universitas Gadjah Mada.

6) Lembaga Biologi Nasional ikut serta dengan Ekspedisi Tjendrawasih di Irian Barat dan Ekspedisi Baruna untuk mengeksplorir lautan Indonesia.

g. Penerbitan Ilmiah.

Penerbitan merupakan salah satu usaha untuk memberikan informasi luas kepada masjarakat dan kalangan ilmu pengetahuan mengenai aktivitas-aktivitas ilmiah didalam dan diluar negeri.

1). Madjalah-madjalah Ilmiah.

a). Sebagai aparatur Departemen maka M.I.P.I. bertugas untuk menerbitkan berbagai publikasi dengan sifat jang berlainan:

(1) Berita M.I.P.I., suatu madjalah triwulan dengan maksud memberi penerangan umum tentang aktivitas ilmiah didalam dan luar negeri serta mengemukakan "current scientific trends" jang bersifat penerangan dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan. Madjalah ini terbit sedjak tahun 1956. Berita M.I.P.I. disebarkan setjara tjuma-tjuma dan sebagai nomor pertukaran kepada lembaga-lembaga ilmiah, universitas-universitas dan instansi-instansi Pemerintah.

(2) Medan Ilmu Pengetahuan, suatu madjalah triwulan jang diterbitkan sedjak Oktober 1959 jang bertudjuan untuk menampung karangan-karangan ilmiah dalam bidang ilmu pasti/alam, sosial dan kebudajaan jang belum mendapat tempat untuk pengumumannja jang chusus dalam madjalah-madjalah ilmiah jang telah ada di Indonesia. Madjalah ini berhenti terbit dalam tahun 1963. Kebidjaksanaan ini diambil mengingat bahwa pada waktu itu telah lebih banjak madjalah ilmiah jang terbit dinegara kita.

(3) Indonesian Abstracts on current Scientific Literature, suatu madjalah triwulan berbahasa Inggeris jang memuat ichtisar karangan-karangan ilmiah jang dimuat dalam madjalah Indonesia. Madjalah ini terbit sedjak tahun 1958. Penjebaran dilakukan atas dasar tukar-menukar dan langganan. dilakukan atas dasar tukar-menukar dan langganan.

(4) Publications, seri penerbitan dalam bahasa Inggeris jang memuat karangan-karangan (monografi-monografi) berdasarkan penelitian orisinil dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan. Waktu penerbitan tidak tentu. Penerbitan ini disebarkan atas dasar pertukaran.

(3) Bulletin, penerbitan dalam bahasa Inggeris jang memuat masalah-masalah jang tidak chusus bersifat ilmiah tetapi banjak memberikan penerangan tentang kegiatan ilmu pengetahuan di Indonesia. Waktu penerbitan tidak tentu. Penjebaran didasarkan atas pertukaran.

b). Hasil-hasil riset daripada lembaga-lembaga dalam lingkungan Departemen Urusan Research Nasional diterbitkan dalam madjalah ilmiah dan/atau laporan ilmiah, baik jang diterbitkan sendiri maupun jang diterbitkan oleh badan-badan lain.

Lembaga Biologi Nasional menerbitkan madjalah-madjalah:

Annales Bogorienses
Treubia
Reinwardtia
Warta Penelitian Laut.

Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional menerbitkan:

Warta Leknas, suatu penerbitan jang memuat hasil-hasil workshop, seminar dan kegiatan riset lain.

c). Madjalah-madjalah ilmiah jang penerbitannja dibantu Madjalah Warta Karya Psikologi

Madjalah Insinjur Indonesia
Proceedings Institute Technology Bandung
Contribution of the Department of Geology, Institute Technology Bandung
Madjalah Ikatan Ahli Geologi Indonesia
Madjalah Masalah Bangunan
Communicationes Veterineriae
Hemera Zoa
Madjalah Kedokteran Indonesia
Pediatrica Indonesina
Berita Research Kedokteran
Madjalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia
Madjalah Sastra Indonesia
Madjalah Geografi Indonesia
Madjalah Warta Karja Psikologi
Madjalah Hukum Adat
Madjalah Ekonomi
Madjalah Ekonomi dan Keuangan
Bulletin Direktorat Geologi, Deperdatam
Research Papers Lembang Observatory
Media Pharmasi Indonesia.

2). Buku-buku Ilmiah, Buku-buku Peladjaran Universitas, Monografi-monografi Ilmiah.

Hingga kini telah diterbitkan dan sedang ditjetak dengan mendapat bantuan Departemen Urusan Research Nasional:

Patologi Chusus Veteriner	: Prof. Dr. A. A. Ressang.
Geologi	: Prof. Dr. J. A. Katili.
Indikasi untuk Pengobatan dengan sinar Rontgen	: Dr. Tan Tjin Joe.
Penduduk Irian Barat	: Prof. Dr. Koentjaraningrat.
Bibliographia Lauracea	: Prof. Dr. Achmad Kostermans.
Bacteriology Umum	: Prof. Dr. Sardjito.
Proceedings K.I.P.N. II	: M.I.P.I.
Alphabetical of Plant Species	: Kebon Raja.
Index Seminum Hortus Botanicus	: Kebon Raja.
Kimia untuk Fakultas Kedokteran	: Prof. Dr. James Warf.
Hubungan antar Bahasa Austronesia dan Daratan Asia I	: Prof. Dr. Slamet Muljana.

Hubungan antar Bahasa Austronesia dan Daratan Asia II	: Prof. Dr. Slamet Muljana.
Ilmu Semantik dengan Ilmu Makna Negara Kertagama	: Prof. Dr. Slamet Muljana.
Directory of Research Development Organization in the ECAFE Region	: Lembaga Penelitian Masalah Bangunan.
Tokoh-tokoh Anthropologi	: Prof. Dr. Koentjaraningrat
Ilmu Projeksi Peta	: Prof. Ir. S. Wongsotjitro
Ilmu Geodesi I	: Prof. Ir. S. Wongsotjitro
Kesehatan Lingkungan	: Prof. Karimudin.
Patologi	: Dr. M. Djojopranoto.
Anthropologi Sosial	: Prof. Dr. Koentjaraningrat.
Ilmu Ukur dan Aldjabar Linear 1	: Prof. Ir. Goenarso.
Seminar Ekonomi H.S.I.	: Himpunan Sardjana Indonesia.
Monografi-monografi Daerah	: Deperdatam.
Monografi-monografi Ilmiah	: Direktorat Geologi, Deperdatam.
Serat Tjentini	: Prof. Notonegoro.
Penjakit Pertanaman Pertanian di Indonesia	: Ir. Harjono Semangun.

h. Perlengkapan Riset.

Mengingat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan riset tidak dapat dilakukan setjara pesat tanpa adanja fasilitas-fasilitas tjukup, maka dalam rangka tugas Departemen diberikan bantuan perlengkapan riset (alat-alat ilmiah, spareparts, madjalah-madjalah ilmiah, buku-buku dan chemicalia) kepada lembaga riset masing-masing.

Pada tahun 1962, 1963 dan 1964 diberikan bantuan sedemikian kepada lima puluh enam lembaga riset/universitas/fakultas diluar lingkungan Departemen Urusan Research Nasional.

i. Pertemuan-pertemuan Ilmiah.

Pertemuan-pertemuan ilmiah nasional dan internasional jang diselenggarakan oleh MIPI/DURENAS sendiri, atau jang diselenggarakan dengan bantuan MIPI/DURENAS adalah sebagai berikut :

1958 : 1. Kongres Ilmu Pengetahuan I di Malang.

Dalam Kongres I ini telah diadjukan 140 lembaran kerdja dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan dihadiri oleh 452 orang sardjana, ahli dan peminat. Salah satu keputusan daripada Kongres ini ialah bahwa 4 tahun sekali perlu diadakan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional. Adanja kongres-kongres sematjam ini memberi kesempatan kepada para sardjana dan ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk mengetahui tentang perkembangan bidangnja dan bidang-bidang lain, saling bertemu dan bertukar pendapat sehingga memungkinkan adanja kerdjasama dan komunikasi jang lebih baik. Diselenggarakannja Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional I ini djuga mempunjai arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, karena dengan kongres ini dapat diadakan stock opname daripada kemadjuan-kemadjuan jang ditjapai dimasa jang silam. Kepada para peserta djuga dimintakan saran-saran tentang projek-projek riset jang perlu diberikan prioritas untuk dilaksanakan guna kepentingan pembangunan negara.

Hasil-hasil kongres telah diterbitkan dalam 6 buku laporan.

2. Symposion on Humid Tropic Research.

Symposion ini mempertemukan dan dengan demikian mempererat hubungan kerdjasama antara ahli-ahli botani dinegara-negara Asia dan Asia Tenggara dan Ahli-ahli Indonesia.

1959 : First Regional Meeting of Representatives of National Research Organizations in Asia and South East Asia jang diselenggarakan di Bandung dalam bulan Desember 1959.

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala/Wakil dari berbagai badan ilmiah nasional dari negara-negara Asia dan Asia Tenggara.

1960 : 1. Simposium Sastra dan Budaja Nasional.
2. Simposium Psikologi.
3. Seminar Teknik Tenaga Listrik.

1961 : 1. Kongres Ilmu Tanah Nasional I.
2. Seminar Biokimia.
3. Seminar Front Ilmiah dalam Pembangunan Semesta.

Dalam bulan Agustus 1961 telah diselenggarakan Seminar jang berdjudul "Front Ilmiah dalam Pembangunan Semesta" bertempat di Bogor. Lebih dari 300 orang sardjana dari berbagai bidang ilmu pengetahuan mengambil bagian dalam seminar tersebut dan mentjurahkan pandangannja tentang peranan ilmu pengetahuan, para sardjana dan ahli dalam pembangunan semesta. Seminar tersebut telah mendapat sambutan jang hangat dari pers, dengan dimuatnja hasil-hasil diskusi daripada sidang-sidang seminar dalam berbagai harian.

1962 : 1. Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional II diselenggarakan dalam bulan Oktober 1963 di Jogjakarta.

Djumlah lembaran kerdja jang diadjukan meningkat mendjadi 237 dan Kongres II ini dihadiri oleh 1152 orang sardjana, ahli dan peminat-peminat lainnja. Hasil-hasil Kongres ini untuk sebagian besar telah diterbitkan dan merupakan suatu dokumentasi jang sangat berharga tentang kemadjuan ilmiah jang ditjapai di Indonesia.

2. Seminar Pertanian.
3. Seminar Dewan Normalisasi Indonesia.
4. Simposium Astronomi Nasional.
5. Symposium on the Preservation of National Resources.

Simposium ini jang dihadiri oleh ahli biologi dan botani di Asia dan Asia Tenggara membitjarakan tjara-tjara dan usaha-usaha jang terbaik untuk melindungi tanaman, binatang dan sumber alam lain jang hampir musnah.

1963 : 1. Seminar Latihan Pembangunan Ketatalaksanaan
2. Simposium Vulkanologi I
3. Seminar Ikatan Sardjana Republik Indonesia
4. Seminar Gizi
5. General Conference, Association of South East Asian Institutions of Higher Learning

6. Seminar on Fine Arts
7. Advisory Committe on Humid Tropic Research

1964 :
1. Seminar Himpunan Sardjana Indonesia.
2. Rapat Kerdja Djagung sebagai Sumber Protein Nabati.
3. Rapat Kerdja Padi Tanah Kering.
4. Seminar Biologi.
5. Refresher Course Kriminologi II.
6. Seminar Management.
7. Seminar Kedokteran Hewan dan Peternakan.
8. Konperensi Nasional Ekonomi Pertanian I.
9. Seminar Nasional Wanita Rumah Tangga.
10. Seminar Nasional Penggalian Sumber Alam Indonesia untuk Pharmasi.
11. Konperensi Daerah dan Sumpah Peladjar.
12. 2nd Afro-Asian Pediatric Congress.
13. Asian Congress on Occupational Health.

Baik oleh M.I.P.I. maupun Departemen diselenggarakan banjak pertemuan dengan lembaga-lembaga riset diluar Departemen, universitas-universitas, golongan-golongan tertentu dari dunia ilmu pengetahuan untuk merundingkan follow-up daripada kongres, seminar, symposium dan organisasi daripada riset.

j. Pameran-pameran Ilmiah.

Untuk membangkitkan hasrat dan minat masjarakat pada umumnja dan angkatan muda kita pada chususnja terhadap usaha-usaha ilmiah maka salah satu usaha ialah diselenggarakannja pameran-pameran ilmiah.

a. Bertepatan dengan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional I di Malang, telah diadakan pameran ilmiah jang mendapat perhatian jang sangat besar dari kalangan masjarakat dan angkatan muda.
b. Dalam rangka peringatan Lustrum I M.I.P.I. dalam tahun 1961, diadakan pameran ilmiah bertempat di Kebajoran Baru, Djakarta. Pameran ini jang diselenggarakan atas dasar kerdjasama dengan berbagai instansi dan universitas telah mendapat kundjungan sebanjak 100.000 orang dalam waktu 2 minggu.
c. Pada tanggal 17 Agustus 1965 bertepatan dengan 20 tahun Kemerdekaan Indonesia, diinstruksikan oleh P.J.M. Presiden diselenggarakannja Pameran Hasil-hasil Riset oleh Departemen Urusan Research Nasional.

k. Panitia-panitia Ilmiah Nasional.

Berdasarkan kerdjasama dengan berbagai Departemen, maka dibentuk Panitia-panitia Ilmiah Nasional jang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Departemen Urusan Research Nasional dan M.I.P.I. mengenai bidang Panitia bersangkutan. Panitia-panitia ini adalah:

Panitia Nasional Geodasi dan Geophysika.
Panitia Nasional Hidrologi.
Panitia Nasional Penelitian Laut.
Panitia Nasional International Quiet Sun Year.
Badan Pertimbangan Penelitian Ilmiah untuk Irian Barat.

l. Hubungan Internasional.

Hubungan internasional diperlukan untuk lebih memperkenalkan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan riset demi pembangunan negara. Hubungan ini sangat diperlukan djuga untuk mendapat informasi tentang kemadjuan-kemadjuan jang ditjapai dinegara-negara lain jang dapat dipergunakan sesuai dengan keadaan dan kondisi alam dan Manusia Indonesia.

Indonesia melalui Departemen Urusan Research Nasional dan dalam pelaksanaannja dilakukan oleh MIPI mendjadi anggota dari berbagai badan ilmiah internasional jang bersifat non-governmental, jaitu:

a. International Council of Scientific Unions
b. International Federation of Documentation
c. International Union of Geodesy and Geophysics
d. International Geographical Union
e. International Institute for Refrigation
f. Pan Indonesian Ocean Science Association
g. Pacific Science Association

Dalam hubungan dengan keanggotaan pada badan-badan ilmiah internasional perlu disebut antara lain:

1) Dipilih/diangkatnja Prof. Sarwono Prawirohardjo, Pembantu Menteri Research Nasional/Ketua MIPI sebagai:
   Anggota Executive Board I.C.S.U.;
   Fellow Member World Academy for Arts and Sciences;
   Anggota Pugwash Conference on Science and World Affairs.
2) Atas ususl Menteri Research Nasional, diangkatnja Prof. Dr. Kuntjaraningrat, Gurubesar Universitas Indonesia, Direktur

Lembaga Riset Kebudajaan Nasional sebagai anggota kehormatan Akademi Ilmu Pengetahuan Rumania.

3) Atas usul Menteri Research Nasional, diangkatnja Prof. Dr. Ir. Sumantri, Rektor Universitas Indonesia dan anggota Dewan Riset Teknologi dan Industri sebagai corresponding member Akademi Ilmu Pengetahuan Rumania.

4) Selama Republik Indonesia masih mendjadi anggota UNESCO dan chususnja sedjak terbentuknja Departemen Urusan Research Nasional maka sesuai dengan kebidjaksanaan Departemen telah diusahakan supaja dalam UNESCO dapatlah dipupuk "impact" Indonesia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hubungan tersebut maka setjara aktif sekali Indonesia telah turut serta dalam berbagai konperensi internasional, regional meetings dan seminar baik jang mengenai bidang chusus ilmu pengetahuan maupun mengenai policy perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hasil usaha tersebut dapat terlihat dalam kenjataan-kenjataan bahwa (i) delegasi-delegasi ilmiah R.I. telah berhasil memegang peranan pimpinan dalam kebanjakan pertemuan jang diselenggarakan oleh Unesco baik dalam mendapatkan kedudukan pimpinan konperensi/meeting atau seminar maupun dalam peranan mengemukakan pemikiran ilmiah, (ii) inisiatif jang diambil oleh Indonesia dalam usaha-usaha internasional dalam lingkungan Unesco dengan menjediakan fasilitas/tempat untuk pertemuan-pertemuan ilmiah internasional atau regional maupun untuk pendidikan dan riset ahli-ahli luar negeri, dan (iii) lebih bertambah banjak tenaga ahli Indonesia diminta bertindak sebagai expert dimasing-masing bidang ilmiah dan djuga mengenai policy pada Unesco headquartes.

m. Kundjungan/Pertukaran Delegasi Ilmiah.

Berbagai negara menaruh perhatian jang besar terhadap kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha Indonesia dalam memadjukan ilmu pengetahuan. Berbagai delegasi ilmiah telah berkundjung ke Indonesia dan mengundang delegasi dari Indonesia untuk berkundjung kenegara bersangkutan.

1) Misi ilmiah Akademi Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat jang tiba di Indonesia dalam bulan Maret 1960 untuk melihat dari dekat tentang kemadjuan-kemadjuan jang ditjapai oleh negara kita dalam bidang ilmu pengetahuan.

2) Dalam rangka pelaksanaan Perdjandjian Kerdjasama Kebudajaan antara R.I. dan U.R.S.S., telah berkundjung ke Indonesia dalam bulan Pebruari 1961 suatu misi ilmiah dari Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Sovjet.
   Pada achir kundjungan selama kurang lebih 3 minggu lamanja, telah ditjapai persetudjuan tentang pelaksanaan konkrit daripada Perdjandjian Kerdjasama Kebudajaan dalam bidang ilmu pengetahuan untuk tahun 1961. Dalam pelaksanaannja beberapa ahli dari Uni Sovjet telah turut serta dalam berbagai ekpedisi ilmiah, antara lain ke P. Sumbawa untuk ekspedisi botani, ekspedisi zoologi ke P. Komodo, dan ekspedisi vulkanologi keberbagai tempat gunung berapi di Indonesia.
   Sebagai kundjungan balasan dalam bulan September 1961 telah berangkat delegasi ilmiah dari Indonesia untuk melihat kemadjuan-kemadjuan jang ditjapai oleh Uni Sovjet dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam delegasi ilmiah tersebut jang dipimpin oleh Prof. Soetedjo anggota Pengurus MIPI turut pula delegasi jang terdiri dari ahli-ahli geologi Indonesia jang dipimpin oleh Prof. Dr. J.A. Katili dari Institut Teknologi Bandung.
3) Dalam bulan Desember 1961 telah berkundjung ke Indonesia suatu delegasi ilmiah dari Republik Persatuan Arab.
4) Dalam bulan April — Mei 1962 Menteri Research Nasional dan Pembantu Menteri Research Nasional Prof. Sarwono Prawirohardjo mengundjungi Republik Persatuan Arab, Pakistatn dan India untuk mempeladjari organisasi riset dinegara-negara tersebut.
5) Pada bulan Maret 1963 Dr. M. Makagiansar. Pembantu Menteri Research Nasional mengundjungi Lembaga-lembaga Riset di Swedia atas undangan Pemerintah Swedia.
6) Pada bulan Nopember 1964 Dr. M. Makagiansar mengundjungi Akademi Ilmu Pengetahuan Tjekoslowakia dan Uni Sovjet.
7) Begitu pula Menteri Research Nasional disertai Prof. Dr. J.A. Katili mengundjungi Rumania pada bulan Nopember 1964 atas undangan Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Rumania.
8) Guna mempererat hubungan kerdjasama dengan negara-negara Nefos, dalam bulan April — Mei 1964 dibawah pimpinan Menteri Research Nasional telah berkundjung ke R.R.T. suatu delegasi ilmiah jang terdiri dari 10 orang.

Delegasi telah menindjau berbagai kemadjuan jang ditjapai oleh negara tersebut dalam waktu jang demikian pendeknja. Pada achir kundjungan telah dikeluarkan Komunike Bersama jang meletakkan dasar kerdjasama ilmiah antara kedua negara.

9) Sebagai kundjungan balasan, dalam bulan Pebruari — Maret 1965 telah tiba di Indonesia delegasi ilmiah dari R.R.T. Delegasi ilmiah tersebut jang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan Wu Heng terdiri dari 10 orang telah mengadakan kundjungan keberbagai lembaga ilmiah dan universitas di Djakarta, Bogor, Bandung, Jogjakarta, Surabaja dan Bali.
   Pada achir kundjungan telah ditandatangani „Persetudjuan Kerdjasama Ilmiah Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok".
   Persetudjuan kerdjasama ini memuat antara lain pasal-pasal tentang pertukaran sardjana, ahli teknologi dan teknisi, pertukaran publikasi-publikasi ilmiah, bahan-bahan, data-data termasuk benda-benda jang ada hubungannja dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, benih-benih, tumbuh-tumbuhan, sample-sample dan sebagainja.
   Persetudjuan ini berlaku untuk djangka waktu 5 tahun dan tiap tahun akan disusun suatu rentjana kerdja tahunan oleh kedua belah pihak.

n. Konperensi-konperensi ilmiah internasional.

Kemadjuan-kemadjuan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih dikenal oleh dunia ilmiah internasional dengan diadjukannja hasil-hasil karya Indonesia pada konperensi-konperensi ilmiah internasional/regional. Kegiatan-kegiatan dalam bidang ini ialah antara lain:

1) Dalam bulan Nopember 1960 delegasi Indonesia jang terdiri dari 3 orang telah menghadiri Kongres Pan Indonesian Ocean Association di Karachi, Pakistan. Dalam perdjalanan pulang delegasi mengadakan kundjungan ke India untuk mengundjungi lembaga-lembaga ilmiah dinegara tersebut dan mempererat hubungan kerdjasama ilmiah antara kedua negara.
2) Dalama tahun 1961 Indonesia telah mengirim delegasi jang terdiri dari 25 orang sardjana untuk menghadiri Pacific Science Congress ke-10 di Honolulu, Hawaii. Dengan diadjukannja demikian banjaknja lembaran kerdja dalam ber-

bagai bidang ilmu pengetahuan menghasilkan lebih dikenalnja Indonesia dalam dunia ilmiah internasional.

3) Indonesia telah pula mengiirm delegasi tjukup kuat untuk menghadiri Conference on Science and Technology for the Benefit of Less Developed Areas dalam tahun 1963 di Geneva. Delegasi tersebut dipimpin oleh Menteri Research Nasional.
4) Pada tahun 1963 Dr. M. Makagiansar mewakili Indonesia pada XI General Conference I.C.S.U. di Wina.
5) Djuga telah dihadiri berbagai konperensi ilmiah internasional lainnja seperti antara lain: Second and Third Regional Meeting Representatives of National Research Organizations in South and South East Asia, di Hongkong dan Canberra dalam tahun 1962 dan 1964, dan Symposion on Science and the Nation di New Delhi, India pada tahun 1964.
6) Suatu delegasi terdiri dari 3 orang dokter telah menghadiri Symposium Kyungrak di Pyongyang dalam bulan Maret 1965. Dalam perdjalanan pulang delegasi singgah di Peking untuk melihat perkembangan ilmu kedokteran dinegara tersebut.
7) Indonesia, dengan diwakili oleh Dr. M. Makagiansar dan Dr. W.P. Napitupulu turut serta dalam konperensi internasional jang memperbintjangkan pembentukan suatu pusat (kota) ilmu pengetahuan internasional untuk Riset, produksi dan penggunaan media visuil modern. jang diselenggarakan di Roma dalam bulan Maret 1965. Dalam konperensi ini wakil-wakil Indonesia telah dipilih untuk duduk dalam pimpinan 2 buah komisi.
8) Prof. Sarwono Prawirohardjo menghadiri Pugwash Confenrence on Science and World Affairs di Venetia pada bulan April 1965.

o. Hubungan Internasional Ilmiah lain.

Dengan badan-badan ilmiah nasional dari berbagai negara telah diadakan djuga pertukaran penerbitan-penerbitan ilmiah.

ICHTISAR PERKEMBANGAN RISET 1962 — 1964.

Diutamakan hanja beberapa masalah. Laporan lengkap mengenai riset dibidang/masalah masing-masing akan diterbitkan dalam satu buku tersendiri.

A. RISET BIDANG KEDOKTERAN.

1. Makanan Rakjat.

Tudjuan daripada riset dibidang makanan rakjat adalah mentjari pengetahuan tentang makanan jang optimal bagi Rakjat Indonesia menurut golongan umur, djenis kelamin, keadaan physiologis, djenis pekerdjaan, dan pengetahuan akan food balance sheet. Berdasarkan pengetahuan ini dapat disusun rentjana positif djangka pendek dan djangka pandjang untuk mempertinggi produksi dan kwalitas bahan makanan masing-masing.

Berlainan dengan konsepsi lama, maka harus ditjapai keadaan sedemikian rupa sehingga tidaklah lagi makanan rakjat didasarkan atas produksi pangan, akan tetapi produksi pangan harus disesuaikan dengan keperluan-keperluan optimal makanan rakjat.

Untuk membahas persoalan makanan setjara integral dan terkoordinasi, maka oleh Departemen Urusan Research Nasional diselenggarakan Seminar Gizi pada bulan Mei 1963 jang diikuti oleh instansi-instansi Pemerintah jang mempunjai sangkut paut dengan persoalan gizi. Peserta adalah ahli-ahli kedokteran, gizi, pertanian, peternakan, perikanan, ekonomi, teknologi, industri, pendidikan dan sebagainja.

Seminar Gizi menghasilkan:

(a) penentuan keperluan protein dan kalori untuk penduduk Indonesia;
(b) food balance sheet;
(c) penjusunan menu pedoman.

Menu Pedoman Rata-rata Orang Indonesia jang disusun adalah sebagai berikut:

	edible portion/ seorang/sehari
beras	225 gram
djagung	125 gram

ubi-ubian	150 gram
gula	25 gram
katjang-katjangan (kering)	30 gram
daging (segar)	15 gram
ikan (segar)	50 gram
telur	5 gram
minjak	20 gram
sajuran daun hidjau	50 gram
sajuran buah-buah kuning	50 gram
sajuran lain	50 gram
buah-buahan	50 gram
susu sapi (segar)	5 gram

Djumlah kalori adalah 1.975 jang berasal dari 50,4 gram zat telur, 34,8 gram lemak dan 367,6 gram hidrat arang; zat telur terdiri dari 12 gram zat telur hewani dan 38,4 gram zat telur nabati.

Protein score	:	80,0
Vit A activity	:	6648,0 IU
Vit B_1	:	1,4 mg
Vit C	:	98,0 mg
Calcium	:	236,0 mg

Dengan menu pedoman diperoleh satu menu seimbang jang berarti memberikan tjukup zat-zat gizi sebagai sumber tenaga (kalori), sumber pembangunan (zat telur, mineral) dan sumber pengatur (zat telur, lemak, mineral, vitamin, dan sebagainja).

Menu pedoman tidak dipusatkan pada bahan-bahan makanan pokok tertentu; dalam penjusunan menu pedoman diperhatikan bahan-bahan makanan jang tersedia di Indonesia dan jang dengan mudah dapat dipertinggi produksinja.

Didalam menu pedoman terdapat bahan-bahan makanan seperti beras, djagung dan ubi-ubian akan tetapi didalam djenis dan djumlah bahan-bahan makanan ini dapat diadakan variasi, misalnja: djagung dapat mengganti beras (nilai gizi sama); sagu dan ubi-ubian dapat mengganti beras dan djagung, asal keperluan gizi seluruhnja dipenuhi (nilai gizi tidak sama).

Susu sapi (segar) 5 gram sehari dimaksudkan untuk keperluan baji jang tidak/kurang mendapat air susu ibu.

Menu pedoman perlu ditindjau tiap 4 - 5 tahun, berhubung dengan: perkembangan ilmu gizi, perkembangan komposisi dan physik penduduk, dan perkembangan sosial ekonomis.

Dalam pembahasan di Seminar Gizi terbukti adanja beberapa kekurangan data-data jang diperlukan untuk menjusun suatu Basic Menu jang sebaik-baiknja. Kekurangan-kekurangan ini didjadikan bahan-bahan untuk mengadakan riset selandjutnja mengenai misalnja:

(a) kekurangan data daripada sensus penduduk;
(b) kekurangan-kekurangan daripada food balance sheet;
(c) keperluan akan susu untuk baji;
(d) storage & marketing dan nilai gizi daripada beberapa bahan makanan;
(e) data-data tentang tinggi/berat badan Manusia Indonesia;
(f) produksi dan distribusi pangan, chususnja beras dan djagung.

Disamping hal-hal jang disebut diatas, telah/sedang dan akan diadakan riset dalam berbagai bidang/golongan seperti:

(a) penjakit jang ada hubungannja dengan menu pattern dan kekurangan-kekurangan pada menu pattern ini;
(b) susunan menu di Indonesia;
(c) produksi bahan makanan dan tersedianja bagi penduduk.

2. Penjakit rakjat.

a. Serum dan vaksin.

(a) memperbaiki mutu serum dan vaksin hingga setidak-tidaknja menjamai produk luar negeri;
(b) memperbesar hasil produksi serum dan vaksin, dan dibuatnja tahan lebih lama sehingga dapat digunakan dan didistribusikan kepelosok-pelosok.

b. Dalam rangka pemberantasan malaria setelah eksperimen-eksprimen jang dilakukan dalam tahun 1950 berhasil menurunkan density vector, index hama dan absensi para pekerdja. maka mulai tahun 1952 diadakan penjemprotan rumah-rumah setjara besar-besaran dengan insecticida. Mengingat antara lain bahwa Control Program tidak akan memberikan hasil sebesar seperti diperlukan berhubung dengan pembangunan negara dan memerlukan biaja sangat tinggi, oleh sebab harus terus-menerus diselenggarakan pun karena telah timbulnja resistensi vector-vector jang penting terhadap insecticida, maka pada tahun 1958 Pemerintah memutuskan untuk beralih kepada Eradication Program. Sehubungan dengan ini telah disusun suatu rentjana kerdja dengan tudjuan untuk melenjapkan penjakit malaria dari seluruh Indonesia dalam djangka waktu 10 tahun, mulai dari tahun 1959. Sampai dewasa ini seluruh

daerah Djawa, Bali dan Lampung telah berada dalam phase penjemprotan atau consolidation. Dengan demikian maka 70.358.000 orang atau 2/3 dari penduduk seluruh Indonesia telah dapat dilindungi dari bahaja malaria. Penelitian reaksi vector-vector terhadap insecticida terus-menerus dilakukan Dibeberapa daerah di Pulau Djawa telah terdapat dua vector jang terpenting jang menundjukkan resistensi, bahkan double resistence terhadap insecticida-insecticida jang dipakai. Dalam hal ini terdapat petundjuk-petundjuk bahwa resistensi ini sebagian disebabkan oleh pemakaian insecticida oleh Djawatan Pertanian.

c. Selandjutnja dalam bidang penjakit rakjat perlu dikemukakan usaha-usaha jang senantiasa dilakukan mengenai pemberantasan penjakit patek dengan hasil-hasil sangat baik.

I.3. Kepharmasian.

a. Inventarisasasi Materi Medica Indonesia.

Reset diadakan oleh team-team dari berbagai lembaga ilmiah dan telah mengahsilkan:

(a) penjusunan daftar maksimal, koleksi herbarium dan simplicia, tjontoh pelikan untuk pharmasi;
(b) penjusunan monografi djenis-djenis nabati;
(c) penjusunan data pelikan.

Dalam rangka ini djuga direntjanakan mengadakan ekspedisi gabungan ke Irian Barat, Maluku dan Kalimantan oleh berbagai instansi/lembaga ilmiah.

b. Reset obot-abatan nabati hewani, antara lain:

(a) Jang mempunjai chasiat (nabati):
hipoclycaemik
anti hypertensi
diuretik
anti histaminik
anti pyretik
tranquilizer
bagi penjakit kentjing batu
belladonna
hyosiamin
atropin
Vitamin A
obat tjatjing
tonicum

(b) Jang mempunjai chasiat (hewani)
Vitamin A

Hormon
extr. hepatis

(c) Dalam rangka menemukan/menghasilkan obat-obatan, disamping reset jang telah dan sedang dikerdjakan telah diselenggarakan Seminar Penggalian Sumber Alam Indonesia untuk Pharmasi pada achir bulan Nopember 1964 jang disponsori oleh:

Departemen Urusan Research Nasional
Departemen Kesehatan
Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
Departemen Pertanian
Departemen Perikanan
Departemen Kehutanan
Departemen Perkebunan

Tudjuan daripada Seminar ini adalah: Mentjari djalan serta memberikan dasar ilmiah pada intensifikasi dan produksi obat-obatan dengan bahan-bahan dari sumber alam Indonesia serta memberikan rangsang untuk penelitian setjara sungguh-sungguh mengenai penggalian, pengusahaan bahan-bahan obat dari sumber alam Indonesia. Dibahas pula penggunaan „waste-material" untuk keperluan obat-obatan. Soal djamu-djamuan mendjadi atjara penting djuga.

4. **Lain-lain.**

Oleh berbagai fakultas kedokteran/lembaga riset chususnja Fak. Kedokteran Universitas Indonesia telah/sedang diadakan rupa-rupa riset dibidang kedokteran jang amat berguna bagi perkembangan ilmu kedokteran, antara lain:

a. Telah diadakan riset jang berhasil menghidupkan tumor pada mentjit setjara terus-menerus dengan tjara transplantasi berturut-turut. Binatang-binatang ini dapat digunakan misalnja untuk meneliti obat-obatan jang dipandang berchasiat anti kanker.

b. Dalam bidang Ilmu Sinar telah dikumpulkan data-data tentang kelainan-kelainan rontgenologik pada tulang-tulang pada penjakit darah anaemia hemolitik dan kelainan rontgenologik pada alat kandungan wanita pada Choriocarcinoma.

c. Dalam bidang Ilmu Penjakit Djiwa diadakan pilot projek Psikiatri jang antara lain menjelidiki kemungkinan pengobatan kasus-kasus psikosis setjara poliklinik dan menghindari perawatan penderita. Keuntungan daripada tjara ini adalah bahwa perawatan dalam rumah sakit dapat dikurangi dan penderita dapat tetap tinggal dilingkungan keluarga sendiri.

d. Dalam bidang Ilmu Bedah telah dilakukan pertjobaan pembedahan djantung dengan "extracorporal circulation". Dengan bahan-bahan dalam negeri telah dibuat suatu "heart-lung machine" jang meskipun belum sempurna telah digunakan pada pembedahan eksperimentil pada andjing dengan memuaskan.

e. Dalam bidang Ilmu Parasit telah diperoleh hasil-hasil jang sangat berguna bagi klinik tentang tjatjing Echinostomia, Filariasis, Trichomonas vaginalis, Toxoplasmosis, Trichinellosis.

f. Dalam bidang Ilmu Penjakit Mata telah diperoleh kemadjuan-kemadjuan antara lain penelitian kelainan mata pada penjakit tjatjar, penjelidikan vaksin anti trachoma, penjempurnaan beberapa djenis pembedahan mata, retinografi, diagnosa defisiensi Vitamin A, bank mata.

g. Dalam bidang Ilmu Kesehatan Anak telah/sedang dilakukan riset tentang makanan baji dan anak dengan bahan-bahan jang mudah diperoleh di Indonesia, susu kedele, tepung ikan, penjempurnaan pengobatan berbagai penjakit, pentjegahan berbagai penjakit, berat badan/pandjang baji, anak ketjil dan anak sekolah, norma-norma darah, penjakit darah.

h. Lembaga Makanan Rakjat telah menjelesaikan analisa bahan makanan Indonesia masing-masing. Sedang dilandjutkan antara lain penelitian Protein Efficiency Ratio katjang-katjangan. Sedang berdjalan Pilot Project mengenai pentjegah-defisiensi Vitamin A pada anak dengan mempergunakan minjak kelapa sawit. Dilakukan pula penjelidikan dilapangan mengenai keadaan gizi berbagai golongan masjarakat sesuai dengan umur, pekerdjaan, dan sebagainja.

i. Dibidang Kanker selain dari penelitian dibidang klinik, patologi, sedang dilakukan pula penelitian mengenai obat-obatan kanker jang dibuat dari tumbuh-tumbuhan.

j. Terdapat pula riset dibidang biologi kedokteran (antara lain sterility, biogenic stimulator) dan dibidang anatomi (antara lain pengukuran capasitas tengkorak, pengukuran panggul, dermatoglifi).

k. Dibidang virologi dan mikrobiologi terdapat antara lain riset Q fever, influenza, arthropode borne virus, poliomyelitis, t.b.c., cholera el tor.

l. Pemberantasan penjakit t.b.c. dilandjutkan.

B. RISET BIDANG PERTANIAN.

1. Penelitian tentang bahan makanan nabati.

a. Hasil rata-rata kebun pertjobaan.

Dalam rangka pemuliaan tanaman pangan, maka sebagai hasil penelitian dapat disadjikan hasil rata-rata beberapa tanaman pokok dibidang pangan berdasarkan keadaan dikebun pertjobaan dibandingkan dengan hasil rata-rata dipertanaman petani :

Matjam tanaman	Tanah petani	Kebun pertjobaan	Perbandingan
(a) Padi	20-25 kw/ha (gabah kering)	40 kw/ha (gabah kering)	100 : 177
(b) Djagung	9 kw/ha (pipilan kering)	40 kw/ha (pilihan kering)	100 : 440
(c) Kedele	6-8 kw/ha	8-10 kw/ha	100 : 132,4
(d) Katjang tanah	6-8 kw/ha	10-15 kw/ha	100 : 178,6
(e) Ubi kaju	10-15 ton/ha	20 ton/ha	100 : 162,4
(f) Ubi djalar	10 ton/ha	10-15 ton/ha	100 : 173
(g) Kelapa	40 bidji/ph/th	150 bidji/ph/th (pohon induk) 200-250 bd/ph/th (perkawinan)	100 : 365
(h) Widjen	2-3 kw/ha	6-7 kw/ha	100 : 260
(i) Bunga matahari	10 ton/ha	20 kw/ha	100 : 200

Hasil rata-rata dikebun pertjobaan tersebut diatas memberikan harapan jang sangat optimistis dalam rangka usaha meningkatkan produksi pangan tanpa menambah areal. Namun demikian, masih banjak masalah jang perlu mendapat perhatian, misalnja soal pupuk, pengairan, dan sebagainja untuk memungkinkan hasil tanah-tanah petani mendekati hasil dikebun-kebun pertjobaan.

b. Padi.

1). Disamping varietas-varietas padi sawah jang sudah direlease lebih dahulu seperti Bengawan, Si Gadis, Remadja, Djelita, Dara dan Sinta, pada bulan Mei 1964 telah dilepaskan lagi varietas padi unggul baru dengan nama „Dewi Tara".

2). Lebih dahulu telah direlease djuga varietas-varietas Gadjahwangi (umur 120-123 hari), Sri Muljo, Sri Dono, Sri Landung, kemudian Sri Hanung (umur 120-123 hari), Sri Panggung (umur 120-123 hari), Rodjolele Baru.

3). Pertjobaan-pertjobaan pemupukan untuk meneliti chasiat N berasal dari Urea, ZA, NH_4CL, ASN dan $CaCN_2$

dengan/tanpa P_2O5 berasal dari DS, ES dan FMP terus dilandjutkan. Demikian pula penelitian perbandingan bermatjam-matjam pupuk P_2O_5 (DS, FMP, ES) dengan/tanpa Urea. Berdasarkan hasil pertjobaan-pertjobaan tersebut dan pertjobaan tentang pengaruh berbagai matjam tingkatan pemupukan N telah disusun rekomendasi-rekomendasi pemupukan padi sawah.

4). Penelitian biologi dan parasit hama Gandjur pada padi sawah mendekati penjelesaian. Penelitian tentang penjempurnaan pemberantasan tikus mendapat perhatian penuh.

5). Telah dilakukan pertjobaan pembuatan beras parboil (beras vitamin) jang warnanja menarik agar dapat diterima oleh konsumen. Ditjoba djuga pembuatan „instant rice" dengan menggunakan alat-alat sederhana jang terdapat dalam rumah tangga, hingga waktu pemasakan dapat dikurangi sampai 1/3 daripada pemasakan beras biasa.

c. Padi Gogo.

Disamping varietas-varietas padi gogo jang telah diandjurkan seperti si Budjang, Seratus Malam dan Kartuna, varietas padi sawah Sinta dan Dewi Tara menundjukkan hasil jang baik pula bila ditanam sebagai padi gogo. Pengudjian ketahanan 300 varietas padi gogo dan padi sawah Indonesia terhadap penjakit Piricularia oryzae menghasilkan beberapa varietas padi gogo jang tahan sekali. Pengudjian ketahanan terhadap Piricularia daripada 200 varietas jang berasal dari berbagai negara, dalam rangka kerdja-sama internasional tentang penelitian ketahanan varietas terhadap penjakit tersebut menghasilkan terpilihnja 30 varietas jang tahan sekali.

1). Telah direlease djuga bibit-bibit Bimopakso, Bimokurdo, Retnodumilah, Bintangladang.

2). Telah diadakan beberapa kombinasi persilangan untuk menghasilkan varietas-varietas jang mempunjai daja hasil tinggi, sesuai untuk pertanaman setjara mekanis, tahan terhadap Piricularia dan berumur gendjah.

3). Dalam rangka usaha memberantas rumput-rumput pada tanaman padi gogo dibandingkan dengan penjiangan biasa, telah ditjoba bermatjam-matjam herbisida luar negeri. Ternjata bahwa Stam F34 dan Santobrite memberi harapan jang baik dan dapat menjamai/menggantikan penjiangan setjara biasa.

4). Penelitian-penelitian lainnja untuk memperbaiki varietas-varietas padi meliputi :

(a) usaha untuk mendapatkan varietas jang serasi untuk daerah pasang-surut;

(b) penelitian sifat-sifat agronomis daripada zuriat-zuriat hasil radiasi dengan Cobalt 60;

(c) usaha untuk mendapatkan varietas jang resisten terhadap Piricularia oryzae untuk dipergunakan sebagai salah satu induk dalam persilangan-persilangan untuk memperbaiki ketahanan (kekebalan) varietas-varietas Indonesia terhadap penjakit ini;

(d) penelitian kedjurusan perbaikan „plant-type" dari varietas-varietas jang mampu menggunakan pupuk dalam dosis jang tinggi.

d. Djagung.

1). Hasil terachir dalam penelitian pemuliaan djagung ialah direleasenja varietas baru HARAPAN. Keistimewaannja dibandingkan dengan varietas lain (Malin, Metro dan Perta) ialah sifatnja jang mampu untuk mempergunakan pupuk dalam dosis jang tinggi (6 — 10 kw/ha). Dengan pemupukan ini varietas Harapan dapat memberi hasil jang berkisar antara 5 — 6 ton pipilan kering, dalam arti bahwa disamping pemberian pupuk jang tinggi itu, pantja usaha lainnja diikut-sertakan.

2). Mula-mula hasil djagung sebesar 5 ton pipilan kering per hektar diusahakan dengan pemupukan 180 kg/N/ha, 180 kg $P_2 0_5$/ha dan 180 kg $K_2 0$/ha. Pertjobaan pada tanah latosol di Bogor dengan pH tanah 5,5 menundjukkan bahwa untuk mentjapai hasil tersebut, pemupukannja tjukup dengan N antara 80 — 180 kg/ha, $P_2 0_5$ 80 kg/ha, sedangkan pemberian $K_2 0$ tidak ada pengaruhnja.

3). Berbagai pertjobaan pembuatan beras djagung dilakukan baik dengan mesin Noramgrek dari Amerika Serikat, maupun dengan alat penggiling padi dan alat penggiling djagung sederhana. Tjara-tjara pemasakan beras djagung telah dipopulerkan melalui radio, televisi, pameran-pameran, koran-koran dan demonstrasi-demonstrasi kepada kaum ibu dan organisasi-organisasi wanita.

e. Gandrung (tjantel).

2). Pertjobaan-pertjobaan tentang pemupukan dan pem-(tjantel) telah berhasil dengan diandjurkannja 3 varietas baru, jaitu: (a) varietas Tahanburung berasal dari Afrika Selatan, (b) varietas Katenggu berasal dari Afrika Selatan, dan (c) varietas Tjempaka hasil seleksi daripada nomor silsilah 325 ber-

asal dari Afrika Selatan. Diharapkan bahwa areal gandrung jang ditaksir kurang-lebih 18.000 ha diseluruh Indonesia akan bertambah luas dengan diintroduksikannja varietas-varietas ini.

II.1.5.2. Pertjobaan-pertjobaan tentang pemupukan dan pemberantasan hama penjakit pada gandrung terus dilakukan.

3). Bidji gandrung sukar dikupas. Penumbukan dalam lesung dengan alu membutuhkan tenaga jang banjak. Untuk mempermudah pengolahannja telah ditjoba alat penggilingan padi berupa mesin slip dengan hasil jang memuaskan.

f. Ubi-ubian.

1). Produksi ubi-ubian untuk beberapa tahun jang akan datang dapat dipertahankan pada tingkat produksi sekarang dan tjukup memenuhi kebutuhan. Penelitian ditudjukan kepada usaha meningkatkan hasil per hektar, antara lain dengan mempergunakan klon-klon unggul dan pemupukan, sehingga areal pertanaman ubi-ubian dapat dikurangi tanpa menurunkan produksi keseluruhan. Selisih areal pertanaman dapat dipakai untuk memperluas tanaman pangan lainnja.

2). Inventarisasi ubi kaju di Djawa dan Madura jang telah menghasilkan 151 klon dilandjutkan dengan penelitian sifat-sifat agronominja. Sudah dimulai pada pengudjian klon-klon baru dipelbagai daerah pertanaman ubi kaju.

3). Pertjobaan-pertjobaan sedang berdjalan untuk memperbaiki bentuk makanan dari ubi kaju jang telah ada jaitu: eje, tiwul, gatot dan oje. Telah pula dihasilkan „beras singkong" berbentuk butir-butiran jang tahan disimpan dan mudah dimasak karena mengalami pre-cooking.

g. Katjang-katjangan.

1). Dalam usaha penambahan produksi katjang-katjangan, pengluasan areal pertanaman kedele lebih memberi harapan daripada meningkatkan hasil kedele per hektar. Dari tahun 1930 — 1940 areal kedele meningkat 101% dan dari tahun 1950 — 1960 areal itu meningkat 75%.

Pengluasan areal pertanaman kedele dilakukan sedjalan dengan rentjana pengluasan penanaman djagung. Bertalian dengan ini penelitian dilakukan tentang daja susul pemupukan berat pada djagung terhadap kedele.

2). Introduksi varietas-varietas kedele dari luar negeri sedjak tahun 1961 sebanjak 67 varietas menundjukkan adanja beberapa varietas jang mempunjai harapan baik untuk Indonesia, antara lain nomor silsilah 945 dan 831 jang mungkin bisa

menandingi atau melebihi kedele No. 27, No. 29 dan varietas-varietas unggul kedele lainnja. Dalam rangka intensifikasi penanaman kedele diadakan pertjobaan-pertjobaan pemupukan dan pengapuran serta pemberantasan hama-hama terutama hama Phoedonia.

3). Pembuatan tempe berasal dari bermatjam-matjam djenis kedele dan dengan mempergunakan djamur-djamur tempe jang berlainan telah ditjoba dengan mendapatkan tempe bernilai protein tinggi dan mempunjai rasa enak. Diusahakan pula pembuatan ragi tempe jang lebih praktis sehingga dapat dibuat dalam tiap rumah tangga.

4). Telah diintroduksikan 40 varietas katjang tanah dari luar negeri, tapi pada umumnja varietas tersebut tidak tahan penjakit laju. Introduksi katjang hidjau dari luar negeri jang dilandjutkan dengan seleksi di Bogor telah menghasilkan varietas jang dapat dipanen serempak. Sampai sekarang jang merupakan keberatan utama bagi para penanam katjang hidjau ialah bahwa hasilnja dipungut 3 sampai 4 kali berturut-turut.

h. Sagu.

Telah dilakukan inventarisasi dari resep-resep masakan sagu dan diusahakan perbaikan-perbaikannja dengan tudjuan mempermudah pengolahan, mempertinggi mutu dan nilai gizi dengan enrichment.

i. Bunga Matahari.

Dalam rangka mempertinggi produksi lemak nabati telah diusahakan pertjobaan-pertjobaan pemupukan pada beberapa varietas bunga matahari, baik jang sudah lama dikenal maupun jang dari luar negeri.

j. Buah-buahan.

1). Koleksi djeruk, mangga, rambutan, kapulasan, duren, adpokat, sawo, djambu bidji, salak, pisang, papaja, anggur, appel, persik, loquat terus dipelihara. Seleksi massa jang dilakukan pada adpokat, rambutan, anggur untuk mendapatkan djenis-djenis unggul untuk Indonesia menghasilkan beberapa nomor adpokat dan rambutan jang memperlihatkan pembuahan dan kwalitas jang baik.

2). Penjakit cholorose pada djeruk mendapat perhatian chusus.

k. Sajur-majur.

1). Disamping memelihara koleksi kubis-telur, kubis-bunga, petsai, sawi, tomat, kentang, ketimun, lombok dan te-

rong didatangkan pula djenis-djenis kubis dan kentang baru dari luar negeri.

2). Usaha seleksi tentang kubis, lombok besar, tjabe rawit, terong, ketimun dan katjang pandjang sudah mentjapai tingkat pemurnian djenis.

l. Tebu.

Penelitian tentang tebu meliputi:

(a) usaha mendapatkan djenis-djenis unggul jang tahan terhadap keadaan kering dan basah, serta dapat ditahan untuk potongan kedua dan seterusnja;
(b) penelitian kesuburan tanah djuga diluar daerah areal pertanaman tebu sekarang, dan pertjobaan-pertjobaan pemupukan membandingkan Urea lawan ZA;
(c) penelitian teknik dan mekanisasi bertjotjok tanam;
(d) penelitian hama penjakit seperti hama penggerek batang dan penggerek putjuk;
(e) survey-survey dan penelitian wilajah diluar Djawa untuk pembangunan pabrik-pabrik gula baru.

m. Kelapa.

1). Dibidang penelitian kelapa didapatkan bibit-bibit unggul jang hasilnja rata-rata 20 kg kopra/pohon/tahun dibanding dengan hasil rata-rata tanaman kelapa di Indonesia sebanjak 7 kg kopra/pohon/tahun. Masalahnja ialah bagaimana menjebarkan bibit ini keseluruh pelosok Indonesia. Pertjobaan-pertjobaan pemupukan menundjukkan bahwa pemupukan lengkap NPK memberi kenaikan produksi jang sangat memuaskan.

2). Pengeringan kopra dalam kiln api memberi hasil lebih baik daripada dipanas matahari:

(a) kwalitas naik merata;
(b) serangan hama penjakit kurang;
(c) kerusakan oleh djamur dalam pengangkutan kedaerah konsumsi tertjegah;
(d) claim oleh pembeli dapat dihindarkan.

2. Penelitian bahan makanan hewani.

a. Hewan ternak.

1). Hewan ternak hanja dapat memberi hasil (daging, susu, telur) jang wadjar, apabila hewan-hewan itu memperoleh tjukup makanan jang adekwat. Oleh karena itu penelitian-penelitian terutama dipusatkan pada perbaikan dan penjederhanaan makanan untuk ternak.

Penelitian perbaikan makanan ternak (chusus bagi kepentingan ternak besar) dilakukan melalui Projek Pembibitan Tanaman Hidjauan Makanan Ternak. Tudjuannja ialah untuk mentjari dan memperbaiki bibit-bibit unggul rumput dan leguminosa untuk makanan ternak, jang dapat diperkembangkan dengan bidji (generatif) ataupun dengan stek (vegetatif).

Penelitian penjederhanaan makanan ternak ditudjukan untuk mengurangi sebanjak mungkin pemakaian bahan-bahan makanan untuk ternak jaitu bahan-bahan makanan jang terutama dibutuhkan manusia sendiri, misalnja rupa-rupa katjang, ikan, dsb. Penelitian ini terdiri dari:

(a) "all green feeding" pada sapi-perah;

(b) penjederhanaan ransum makanan ternak ajam.

Penelitian "all green feeding" pada sapi-perah ditudjukan untuk melenjapkan pemakaian makanan konsentrasi, sehingga makanan sapi itu hanja terdiri atas rumput dan hidjauan lain sadja. Penelitian ini mengandung banjak harapan, akan tetapi mengalami banjak kematjetan oleh karena belum tersedianja tanah jang dibutuhkan bagi penanaman makanan ternak.

2). Penjelidikan tentang penjederhanaan ransum makanan ternak ajam ditudjukan untuk sebanjak mungkin mengurangi pemakaian tepung ikan, katjang kedele, katjang hidjau, beras dan djagung didalam makanan ajam. Sebagai penggantinja ditjoba tepung hidjauan leguminosa dan hasil-hasil ikutan dari katjang-katjangan. Penelitian ini mengandung banjak prespektif, walaupun penelitian sering kali terpaksa dibatalkan, disebabkan tidak ada biaja jang dibutuhkan untuk penelitian jang wadjar.

3). Disamping penelitian-penelitian diatas dapat dikemukakan pula:

(a) Projek pembuatan diluter bagi inseminasi-tiruan (pada sapi) dengan tudjuan menjediakan diluter untuk memenuhi permintaan daerah-daerah bagi keperluan inseminasi-tiruan dalam rangka perbaikan mutu ternak sapi rakjat. Kwalitas diluter jang dibuat Lembaga Penelitian Peternakan memuaskan, akan tetapi produksi diluter sangat terbatas, disebabkan keuangan tidak mengizinkan.

(b) Projek penetasan dan membesarkan anak-anak ajam di Klepu dengan tudjuan memperbaiki ternak ajam rakjat daerah Ungaran hasilnja tidak memuaskan oleh karena perbelandjaan kurang.

(c) Vaksin NCD telah diperkembangkan dengan baik.
(d) Sedang diselidiki pentjegahan kematian anak ajam pada umur muda.

b. Perikanan Darat/Laut.

1). Penelitian-penelitian Perikanan Darat meliputi:

(a) Survey perairan Kalimantan, 1 kali dalam tahun 1962 dan 1 kali dalam tahun 1963 masing-masing oleh 4 team dengan tudjuan untuk menjelidiki dan menarik keuntungan tentang keadaan ikan didaerah tersebut;
(b) pertjobaan pemupukan kolam di Depok, Sukabumi dan Kamal;
(c) pertjobaan transpor nener dari Makasar ke Djawa, karena nener di Makassar banjak dan murah;
(d) introduksi ikan-ikan dari luar Djawa untuk mendapatkan djenis-djenis ikan jang baru jang dapat dipelihara di Djawa dengan produksi jang lebih tinggi.

2). Mengenai penelitian Perikanan Laut jang telah dilakukan meliputi imigrasi ikan kembung dan sardinella untuk memungkinkan usaha penangkapan jang lebih efisien.

3. Penelitian dibidang tanaman ekspor dan tanaman industri.

a. Kelapa Sawit.

1). Pemuliaan kelapa sawit merupakan salah sat bagian terpenting dari usaha penelitian kultur kelapa sawit. Usaha untuk mendapatkan djenis-djenis unggul terus dilaksanakan.

2). Selain itu dilakukan pula:

(a) pertjobaan pemupukan untuk mempeladjari keutuhan bibit kelapa sawit dipesemaian, kebutuhan pupuk bagi tanaman muda dan tanaman dewasa;
(b) pertjobaan perketjambahan dengan benih-benih kelapa sawit jang dirawat dengan Ceresan dan tanpa dirawat dan disimpan dalam waktu jang berbeda-beda dengan kadar air jang tertentu, dengan maksud untuk memperbaiki perketjambahan benih kelapa sawit.

b. Karet.

Penjerbukan antara klon-klon karet modern dan usaha-usaha seleksi baik melalui tjara seleksi semaian maupun melalui tjara seleksi pohon induk dewasa ini terus dilaksanakan untuk mendapatkan klon-klon unggul. Penelitian-penelitian mengenai batang bawah jang resisten terhadap penjakit akar terus diperhatikan. Pertjobaan-pertjobaan dalam usaha memperbanjak setjara vegetatik „green building" diintensifkan.

c. Serat.

Penelitian tentang tanaman-tanaman serat terutama ditekankan pada penelitian-penelitian agronomi dan pemberantasan hama penjakit daripada kapas rosella, Hibiscus cannabinus, Corchorus capsularis dan rami.

d. Tembakau.

Usaha untuk mendapatkan tembakau virginia jang berkwalitas tinggi dan tahan penjakit Phytophthora nicotianae pada tahun 1962 telah menghasilkan 2 galur unggul, jang setelah melalui berbagai pengudjian diandjurkan pada tahun ini sebagai varietas baru dengan nama S. 169 Talun dan S. 287 LP. Seleksi dan pemurnian pada varietas luar negeri telah menghasilkan pula suatu varietas jang dikenal dengan nama S. 55 Si Tjantik. Varietas ini resisten terhadap penjakit Phytophthora nicotianae, tahan kebandjiran dan mempunjai kwalitas jang sesuai bagi daerah Bodjonegoro. Inventarisasi tembakau Vorstenland jang dimulai semendjak 1963 dilandjutkan dengan penanaman galur-galur jang berasal dari tanaman-tanaman terpilih.

Penelitian setjara intensif telah dimulai terhadap produksi dan kwalitas, demikian pula terhadap tembakau Orient.

Pertjobaan-pertjobaan pemupukan pada tembakau Vorstenland dilakukan untuk menindjau kemungkinan penggantian pupuk impor jang mahal dengan pupuk murah, dan pupuk jang dibuat didalam negeri.

e. Kapas.

1). Untuk mendapatkan varietas unggul kapas jang tjotjok untuk Indonesia telah ditjoba sedjumlah varietas dari luar negeri.

Ternjata bahwa Rex, Deltapine mempunjai harapan baik untuk daerah Asembagus, Djawa Timur. Pandjang stapelnja daripada Deltapine sudah mentjapai 27 mm, sedangkan kekuatan dan kedewasaan serta kehalusannja baik. Sifat-sifat tersebut dapat mendjamin, bahwa kapas Deltapine dari Asembagus dapat dipintal mendjadi benang nomor 40/S. Ini berarti bahwa benang-benang nomor 20 S, 30 S, 40 S, dan 42/2 jang banjak dibutuhkan oleh industri sandang di Indonesia setjara kwalitatif dapat dipenuhi.

Djenis kapas Deltapine jang rusak warnanja, setelah diadakan penelitian, kemunduran sifat-sifat physisnja praktis tidak berarti, sehingga masih dapat dibuat benang nomor 30.

2). Mengenai warnanja jang kurang baik dapat diatasi dengan memberi penjempurnaan jang chusus pada kain djadinja. Rex dan Dixie King memberi hasil baik di Demak, Pati dan Brebes.

3). Hama-hama kapas merupakan faktor penghambat penting. Pertjobaan-pertjobaan dilakukan untuk menggunakan berbagai insektisida sebagai pemberantas.

f. Tanaman Obat-obatan.

Perhatian terutama ditudjukan pada penelitian dibidang seleksi dan agronomi daripada Abrus precatorius, Cephaelis ipecacuanha, Clausena anisata, Coca cola, Foeniculum vulgare, Mentha, Rauwolfia serpentina, Thymus vulgaris. Dari tanaman-tanaman tersebut telah ada beberapa jang dapat diandjurkan untuk beberapa daerah, antara lain Abrus precatorius, Clausena anisata, Coca cola dan Mentha. Mengenai tanaman obat-obatan untuk pemberantasan hama telah dilangsungkan pertjobaan-pertjobaan varietas dan agronomi pada Derris dan Pyrethrum.

4. Penelitian Hutan dan Hasil Hutan.

a. Usaha penelitan hutan dan hasil hutan ditudjukan:

(a) untuk mendapatkan hasil maksimal dan kekal dari hutan-hutan di Indonesia;

(b) untuk memperbaiki efisiensi kerdja hutan agar mendapatkan hasil kerdja rasionil;

(c) supaja penggunaan hasil hutan dilakukan lebih tepat dan hemat dan supaja kemungkinan penggunaannja bertambah luas.

b. Ditahun 1963 telah dilaksanakan eksplorasi hutan Kalimantan Timur dan sebagian daripada hutan Irian Barat. Selain itu telah diterbitkan monografi-monografi daripada beberapa genus pohon-pohonan dan telah dimulai penjusunan satu vademecum jang memuat keterangan-keterangan mengenai 400 djenis kaju terpenting di Indonesia; sudah diterbitkan seri pertama (bagian Botani).

c. Telah dimulai penelitan tentang penanaman, penebangan dan eksploitasi djenis-djenis kaju industri jang tjepat tumbuh dan djenis-djenis bambu. Penelitian hama penjakit hutan terutama ditudjukan pada hama „boktor" pada Albizzia dan hama penjakit Pinus.

Hasil-hasil penelitian dibidang kehutanan sudah banjak dipergunakan bagi perentjanaan pembangunan dibidang industri,

antara lain pendirian pabrik kertas, kaju lapis, pabrik korek api dan untuk penjempurnaan tatalaksana hutan.

C. RISET BIDANG TEKNOLOGI DAN INDUSTRI.

1. Ilmu Pengetahuan.

Kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha riset serta perkembangannja pada bidang ilmu pengetahuan ini di Indonesia dapat dikatakan masih sedikit sekali dan fragmentaris. Fundamental research adalah sangat perlu, chususnja dibidang-bidang physika, kimia dan biologi, sendikitnja dengan maksud agar para sardjana kita tetap dapat mengikuti perkembangan-perkembangan dibidang tersebut serta mengenal teknik-teknik riset jang semakin rumit (complicated).

a. Usaha-usaha riset jang tengah berdjalan pada saat ini diantaranja dalam bidang Physika, ialah solid state Physics (physika zat dapat dan nuclear physics jang untuk keduanja banjak tergantung pada fasilitas reaktor TRIGA di Bandung. Disamping itu pula telah selesai dan mulai digunakan fasalitas-fasilitas subcritical assembly, reaktor-reaktor simulator, sumber radiasi Cobalt 60, laboratoria radio isotop. Dalam pembangunan adalah projek-projek laboratoria research bahan tenaga atom serta reaktor IRT-2000.

b. Dibidang Kimia terdapat usaha-usaha riset mengenai radio chemistry (activation analysis), organic chemistry (jang meliputi beberapa tjara sinthesa) dan bio chemistry (bongkrek acid).

c. Dibidang Biologi telah dan sedang dilakukan usaha-usaha riset jang meliputi:

(a) penentuan daerah-daerah ikan di Laut Djawa, Selat Sumatera, Perairan Maluku dan Indonesia Timur telah selesai;
(b) penelitian dibidang oceanography/marine biology (kadar garam, plankton, dan sebagainja);
(c) penelitian tentang arus laut diteluk Djakarta dan „offsetting daripada micro organisme" berhubung dengan pendirian Pusat Tenaga Listrik di Tandjung Priok;
(d) inventarisasi dan klasifikasi umum daripada flora dan fauna Indonesia;
(e) inventarisasi flora dan fauna Indonesia jang mempunjai nilai-nilai ekonomis, dan lain-lain;
(f) dengan ekspedisi Tjenderawasih dan Baruna.

d. Dibidang Astronomi oleh Lembang Observatory telah banjak dihasilkan karya-karya riset jang besar nilainja bagi Indonesia maupun dunia internasional, hal mana disebabkan antara lain oleh adanja peralatan jang telah tjukup memenuhi sjarat disamping adanja tenaga-tenaga scientist jang tjukup tjakap serta letak daripada observatorium ini jang unik (diselatan garis lintang katulistiwa).

2. Teknologi.

a. Chemical Engineering (Kimia Teknik).

1). Oils & Fats.

Riset dibidang ini untuk memperoleh edible oils lain dan minjak untuk industri adalah antara lain:

a). Bunga Matahari (sunflower); telah dan sedang dilakukan usaha-usaha riset baik mengenai chemical analysis, tjara-tjara processing dan extraction, analisa bungkilnja, sifat-sifat physis dan chemis daripada minjak tersebut serta storage properties. Hasil-hasil riset tersebut segera akan dipublikasikan mendjelang processing dan produksi minjak tersebut setjara besar-besaran.

Diadakan djuga pertjobaan-pertjobaan tentang pengunaan bidji bunga matahari sebagai minjak kulit dan bungkil sebagai makanan ternak dan kulit bidji sebagai bahan untuk kertas.

b). Minjak Widjen (sesam oil) merupakan bahan untuk pembuatan minjak goreng, disamping bungkilnja mengandung protein jang tinggi kadarnja.

c). Bidji Kapok merupakan bahan untuk minjak nabati. Kini diselidiki kemungkinan-kemungkinan pemakaian minjaknja sebagai sulfonated kapok oil, minjak kosmetik, pula limbahnja (waste) atas isolasi protein-protein untuk penggunaannja sebagai bahan makanan. Pertjobaan-pertjobaan pengepresan skala laboratorium telah selesai dilakukan.

d). Minjak Djarak

(a) dengan proses dehydration dihasilkan D.C.O. (dehydrated castor oil) sebagai drying oil dan bahan dasar pembuatan tjat;

(b) dihasilkan pula pembuatan Nylon 10-10 (bahan sandang) dengan melalui subaconitril, sebasic acid dan decamethylenediamine; sedang difikirkan sesuatu experimental pilot plant dan evaluasi ekonomisnja mendjelang produksi komersiil.

2). **Minjak, Gas Bumi & Petro Kimia.**

Dalam rangka mentjari substitusi barang-barang import, maka riset jang sedang dilakukan berkisar sekitar antara lain:

a). Lubricating oil (minjak pelumas) jang dibuat dari djenis masing-masing minjak bumi Indonesia.

b). Carbonblack daripada gas bumi atau oil fraction jang penting sekali untuk industri-industri ban, printing ink dan lain-lainnja.

c). Pvc-polyvinulchloride jakni plastic jang baik sekali untuk keperluan pembuatan insulator, alat-alat keperluan rumah tangga, piping dan lain-lainnja, dengan bahan dasar: ethylene dari kilang-kilang minjak dan chloor dari pabrik Soda Waru.

d). Formic acid (asam formiat) jang sangat penting untuk industri rubber dengan bahan dasar NaOH dan CO, dimana CO diperoleh dari gas bumi dan steam.

e). NH3 dari gas bumi (seperti Urea Plant Sriwidjaja) dimana dari oksidase NH3 dibuat asam nitrat (HNO3) jang merupakan bahan dasar untuk explosiva dalam pembuatan solid fuel (bahan bakar padat) untuk a.l. rockets.

3). Coal tar.

Pembuatan kokas dengan bahan batubara Indonesia guna industri besi badja, bilamana digunakan double-coking-process serta apabila tarnja digunakan sebagai binding agent, maka praktis tidak akan terdapat coal-tar sebagai by-product untuk industri kimia, seperti naftalene, zat-zat warna, creosote oil dan lain-lain.

Tetapi terlepas dari persoalan diatas, penjelidikan terhadap coal-tar jang meliputi analisa fraksi-fraksinja, isolasi produknja jang penting serta penggunaannja sebagai bahan dasar untuk sintesa zat-zat warna telah selesai dilakukan.

4). Rayon.

Rayon ialah semi-synthetic fibre jang bahan dasarnja sendiri adalah cellulose. Mengingat bahwa hutan-hutan Indonesia adalah sumber cellulose jang besar, dan dipasaran dunia rayon adalah lebih murah daripada cotton, maka dibidang rayon ini telah dilakukan survey-survey teknis maupun ekonomis baik oleh team-team dalam maupun luar negeri. Jang mendjadi persoalan pokok kini ialah:

(a) kaju matjam manakah jang akan dipergunakan, serta
(b) integrated/tidaknja plant tersebut.

Riset jang telah dilakukan sampai pada saat ini barulah terbatas pada segi pulping sadja, jakni menjelidiki proses conditions daripada pulping beberapa matjam kaju (terutama karet). Sehubungan dengan ini suatu rayon pilot plant untuk keperluan training dan riset dengan memperoleh bantuan dari Pemerintah Djerman Barat tengah dibangun di Bandung.

5). Selain daripada rayon, maka sandang dengan bahan dasar full synthetic fibres dari hasil proses-proses petrokimia, seperti poly-acrylonitrile atau orlon, polyester, dacron atau terlene/tetoron dengan bahan dasar jang berasal daripada kraak gassen dan fraksi-fraksi petroleum, perentjanaan penelitiannja tengah disiapkan.

6). Teknologi Makanan (Food-Technology).

Dalam hal ini, sebagai follow-up daripada hasil-hasil Seminar Gizi jang diselenggarakan oleh Departemen Urusan Research Nasional, sedang dilakukan riset seperti:

(a) Pengeringan ikan setjara besar-besaran, dengan mempergunakan dryingtunnel, sehingga pengeringan tidak hanja tergantung pada sinar matahari dan djuga untuk mengurangi penggaraman.
(b) Pengeringan daging dan tjara conservation jang murah.
(c) Pembuatan tepung ikan dan tepung telor.
(d) Pembuatan tempe jang lebih tjepat, hygienis dan setjara besar-besaran serta tjara-tjara conservationnja; disamping itu telah dilakukan penjelidikan chusus untuk menggantikan tempe bongkrek jang dapat menjebabkan peratjunan-peratjunan.
(e) Bibit murni djasad renik makanan untuk pengolahan bahan makanan dengan fermentasi. Saat ini telah selesai diadakan penelitian atas pemurnian dan pengudjian aktivitas bibit-bibit djamur-djamur makanan seperti djamur tempe, djamur ontjom, djamur tape, djamur ketjap serta pembuatan bibit murni untuk diindustrikan.
(f) Pembuatan yeast kering.
(g) Tjara-tjara penjimpanan djagung dalam djumlah besar.

7). Pengawetan kaju.

Pengawetan kaju dimaksudkan untuk mentjapai ekonomi pemakaian kaju jang lebih lama, terutama terhadap kaju-kaju jang digunakan untuk bangunan-bangunan. Penjelidikan ini

dilakukan terhadap djenis-djenis kaju jang banjak digunakan sebagai bahan bangunan dengan djalan mengawetkan dengan garam-garam super wolhman, pentachloor phenol, asam borat, Ascu dan lain-lain, dan mengudji ketahanannja terhadap pengaruh tjendawan, serangga, dan lain-lain.

8). Tjengkeh.

Dalam rangka mempertinggi kemanfaatan tjengkeh dimana tidak hanja „bunga tjengkeh" seperti jang dikenal sekarang dapat dipergunakan, tangkai-tangkai bunga dan bagian-bagian lainnja jang merupakan waste dapat djuga diolah (isolasi minjak tjengkeh), sehingga dengan demikian kebutuhan akan tjengkeh dapat terpenuhi chususnja untuk industri rokok kretek. Setjara laboratorium telah diperoleh hasil-hasil jang memuaskan jang masih perlu ditingkatkan ke skala semi-teknis.

9). Sutera Alam.

Pada masa sekarang riset dibidang ini baru berada pada taraf permulaan, jaitu menjelidiki kemungkinan-kemungkinan pengolahan sutera alam untuk didjadikan bahan sandang, industri (tali-temali, snaar, pajung, dan sebagainja) dan untuk keperluan Angkatan Bersendjata (parasut). Pada pokoknja sedang diselidiki tjara-tjara pemintalan dan penenunan bahan sutera ini. Telah berhasil penggunaan benang sutera dalam bidang pembedahan kedokteran.

10). Obat-obat Pewarnaan untuk Industri Batik.

Telah berhasil diisolasikan bahan pewarna (soga) untuk keperluan industri batik dari daun teh (jang tua dan jang tidak dipergunakan). Riset sedang dilandjutkan untuk lebih mengetahui tentang sifat-sifat dan mekanisme reaksi bahan pewarna tersebut.

Begitu pula telah berhasil dan sekarang sedang ditingkatkan sampai pembuatannja daripada zat-zat warna golongan Naphtol mulai dari intermediate sampai kepada base dan garam (Intermediate: p-nitroacetanilide, acetamilide. Base: p-bromaniline, m-nitroaniline. Garam: Echt Rot Salt GG, Echtscharlach Salt B, paratoluidin diazoniumsulfat). Sedang dilakukan pula pembuatan zat warna batik: Parazol Brown R.R., Diazo Black R Extra, Diamine Green.

11). Bahan-bahan Keramik.

Dalam bidang ini dapat disebut perbaikan mutu pembuatan refractories dan isolator listrik untuk tegangan tinggi frekwensi

tinggi/biasa dari bahan-bahan baku Indonesia sehingga memenuhi sjarat-sjarat.

12). Teknologi Perkulitan.

Dalam bidang ini dapat diadjukan antara lain berhasilnja pengolahan kulit tikus untuk dipergunakan bagi pembuatan shuttle cocks dengan memenuhi sjarat-sjarat.

Selain daripada itu pembuatan substitut obat-obat penjamak dengan mempergunakan bahan-bahan dalam negeri.

13). Tengah giat dilaksanakan riset pembuatan furfural dari sekam (kulit butir) padi dan bonggol djagung.

Begitu pula pembuatan dextrose dari kandji cassave dan ubi.

14). Teknologi Karet.

Dibidang teknologi karet telah dilaksanakan pertjobaan-pertjobaan sebagai berikut:

(a) pertjobaan membuat "chemically preserved airdried sheet";
(b) penelitian mengenai pengaruh "temporary preservation" dengan formalin kepada sifat karet mentah dan sifat centrifuged latex;
(c) pertjobaan membuat karet jang lekas kering setjara modifikasi daripada tjara-tjara/sistim-sistim jang dipakai diluar negeri, antara lain:
    — pertjobaan membuat "low ammoniated centrifuged latex" dengan bahan-bahan kimia tertentu;
    — pertjobaan pengolahan dan penggunaan latex-skim;
    — pertjobaan flokulasi latex dan pembuatan karet-serbuk dengan bahan-bahan kimia tertentu;
    — pertjobaan pembuatan karet „deproteinized" tertentu;
    — modifikasi rumah asap dan pengeringan;
    — pembuatan karet SP setjara Malaya dan Mealorup.

b. Electrical Engineering (Elektro Teknik).

1). Televisi.

Di Bandung telah berhasil didirikan sebuah relay station jang merelay siaran-siaran televisi dari Djakarta ke Bandung dan sekitarnja. Djuga sebuah studio T.V. Experimentil telah selesai dibangun di Bandung. Sedangkan relay station untuk Djawa Tengah dan Djawa Timur kini tengah dipersiapkan.

2). Telekomunikasi.

Penelitian dibidang ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

(a) Penelitian dalam bidang Pemantjar Radio, peralatan untuk pemantjar, carrier equipment dan alat-alat ukur electronis, sampai dewasa ini masih bersifat development work.

Hasil-hasil jang telah ditjapai diantaranja meliputi pembuatan:

— Pemantjar radio 40/25 Watt, 150/100 Watt dan 300/150 Watt telegraphy dan telephony.
— Frequency shift (double tone) untuk memodulir pemantjar telegraphy tertentu untuk services nasional dan internasional.
— RC-generator untuk pengukuran-pengukuran dalam bedrip. Precision Stabilized Laboratory, Power Supplies.

Disamping itu ada beberapa penelitian jang tengah berdjalan seperti:

— Telephone Carrier Systems for open wire lines (short distance).
— 1 Kw Single Sideband transmitter for telegraphy and telephony.
— Bermatjam-matjam alat ukur elektronis seperti: Transmission Measuring Set (AF) dan lain-lain.

(b) Penelitian dalam Propagasi Microwave jang berupa penelitian mengenai troposphere diatas bumi Indonesia untuk kemudian dirumuskan sebagai bahan teknis dalam line of Sight Microwaves Planning.

(c) Mengenai Semiconductors dan Quarts Crystals, telah dimulai pembuatan CDS untuk Solar-cell serta pertjobaan penjolderan pada lempeng Kwarsa (Quarts).

(d) Mengenai Satelite Communications (komunikasi ruang angkasa), telah dilaksanakan usaha-usaha penelitian dan persiapan-persiapan jang meliputi pembuatan beberapa matjam antena telemetering serta pemakaiannja untuk eksperimen-eksperimen pertama Space Radio Communication dengan satelit-satelit tjuatja TIROS & NIMBUS. Djuga tengah dipersiapkan pembuatan sebuah antena jang bergaris menengah 30 m serta perentjanaan suatu Parametric Amplifier jang akan digunakan untuk tiap Operational Ground Station.

3). Research statistics dan pula alat-alatnja untuk mempertinggi keamanan dan rehabilitas djala-djala listrik tegangan tinggi jang sering disambar oleh petir.

c. Civil & Construction Engineering (teknik sipil & konstruksi bangunan).

1). Mengenai batu apung sebagai bahan bangunan telah diselidiki kemampuan batu apung untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan Light Weight Concrete dan Light

Weight Bricks. Sebagai hasil penjelidikan ini didapatkan bahwa batu apung jang berasal dari Anjer dan Tjitjurug tjukup baik sebagai agregat ringan untuk kemudian dapat dibuat Hollow Blocks, Solid Blocks, Kubus Beton, Timber Concrete, Composite Decks, dan lain-lain. Pertjobaan pembuatan rumah bertingkat dan pembuatan tungku Singer daripada batu apung tengah dilaksanakan.

Penelitian mengenai Pozzelan Lime Cement (Pozzelan dan kapur) dan mengenai semen Rakjat (dengan procede sederhana) sedang berdjalan.

2). Survey Penggunaan Tanah, Hidrologi, dan lain-lain:

Hidrologi.

Telah dilakukan usaha-usaha pengukuran debiet dari sungai Tjimanuk, Bengawan Solo, Berantas di Pulau Djawa, sungai Asahan, Riam Kanan, Kiora dan Manindjau di Pulau Sumatera, serta sungai Larona di Sulawesi.

Usaha-usaha penelitian lainnja jang meliputi penelitian pengaruh matjam-matjam vegetasi terhadap intersepsi, transpirasi, evaporasi, runn-off dan infiltrasi telah dimulai.

Penelitian-penelitian dibidang survey penggunaan tanah, hidrologi, dan lain-lain jang telah berhasil dan diaplikasikan meliputi pembuatan-pembuatan:

(a) Pipa pesat jang dapat dibuat pada tempat pemakaiannja, sehingga mengurangi biaja pengangkutan bilamana dibandingkan dengan penggunaan pipa biasa.

(b) Fondasi sumuran chusus bagi daerah-daerah jang keadaan tanahnja lembek/berair, dimana pembuatan dan pemasukan sumuran dapat dilakukan setjara murah dan sederhana dengan tidak memerlukan pemantjangan-pemantjangan jang dalam.

(c) Turbin air untuk pusat listrik tenaga air jang ketjil, telah dapat dibuat tjukup sederhana, praktis dan ekonomis.

(d) Pompa hydrolis jang dapat memompa dengan tenaga sendiri.

3). Penjelidikan Masalah-masalah Bangunan.

Penjelidikan telah banjak menghasilkan karya-karya riset baik dibidang perentjanaan perumahan, bidang teknologi bangunan serta analisa perumahan, hasil-hasil mana telah disalurkan kepada masjarakat melalui penerbitan-penerbitan Lembaga jang berupa madjalah „Masalah Bangunan", brosur-

brosur teknik, dan lain-lain ataupun melalui pameran-pameran, demonstrasi-demonstrasi dan tjeramah-tjeramah serta dalam bentuk rumah-rumah pertjobaan, dan lain-lain.

d. Geologi dan Pertambangan.

1). Disamping survey-survey jang intensif dalam rangka pelaksanaan keputusan M.P.R.S. untuk Pembangunan Semesta Berentjana guna pembangunan-pembangunan industri logam dan lain-lainnja, maka usaha-usaha „Survey Pembangunan Industri Mineral Daerah Perbatasan" jang meliputi aerial survey dan explorasi mineral tengah dipersiapkan.

2). Perpetaan Geologi & Aerial Survey.

Bagi daerah-daerah jang padat penduduknja dan jang tengah dibangun industri-industri modern, maka peta geologi sangat diperlukan. Berdasarkan rentjana-rentjana industrialisasi jang telah tersusun, serta adanja indikasi potensi-potensi lain, misalnja rentjana irigasi, mineralisasi, pembukaan tanah dan pembuatan bendungan maka kini tengah dilaksanakan pemetaan geologi sistematis Pulau Djawa. Penjelidikan-penjelidikan dan pengukuran-pengukuran geologi terhadap sungai guna pembangunan pusat-pusat listrik tenaga air djuga tengah giat dilaksanakan di Djawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Disamping itu peta geoteknik dan peta metallogen modern untuk Indonesia tengah dipersiapkan. Sebuah rentjana aerial survey untuk memperkembangkan industri mineral bagi Indonesia djuga sedang dipersiapkan.

3). Vulkanologi.

Kegiatan dalam bidang ini meliputi pengamatan rutine dan pendjagaan tetap berbagai pos gunung api serta pemetaan daerah letusan gunung-gunung api. Disamping itu sebuah rentjana penelitian untuk perumusan peramalan erupsi gunung api tengah dipersiapkan.

4). Penelitian-penelitian lain.

Banjak basic research jang meliputi lapangan-lapangan struktur geologi, paleontologi, geomorfologi, petrollogi, dan lain-lain telah dipublikasikan dalam madjalah-madjalah dalam dan luar negeri, dan banjak pula jang telah dikemukakan pada pertemuan-pertemuan ilmiah internasional.

Disamping itu peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan geologi Indonesia oleh ekspedisi-ekspedisi Tjenderawasih dan Baruna baru-baru ini, merupakan sumbangan-sumbang-

an jang besar nilainja bagi kita dan dunia internasional umumnja, misalnja dalam lapangan geologi ekonomi, vulkanologi, sedimentologi, pengetahuan tentang koral dan lain-lainnja.

D. RISET BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAJA.

1. **Sensus Penduduk** jang dilaksanakan dalam bulan Oktober 1961 akan mengeluarkan seluruhnja 44 matjam data pokok tentang penduduk Indonesia, baik djumlahnja, susunan umur, tingkat pendidikan, lapangan pekerdjaan, karakteristik penduduk, dan lain-lain. Angka-angka ini akan memberikan gambaran untuk tiap propinsi dan tiap kabupaten. Sekarang telah tersedia 19 matjam tabel jang penting dari pengolahan 1% sample.

2. **Sample Survey Nasional.**

Sample Survey Nasional jang dilaksanakan pada achir tahun 1963 sampai Djanuari 1964 merupakan usaha nasional jang pertama kali. Dari survey ini akan keluar 61 tabel pokok mengenai kegiatan-kegiatan didaerah perdesaan maupun didaerah kota. Kota-kota besar Djakarta, Bandung dan Surabaja akan dimuat tersendiri, sedangkan lainnja akan dikeluarkan per daerah statistik dan jang untuk luar Djawa sama dengan satu pulau besar. Keterangan-keterangan jang akan keluar ialah mengenai perumahan dengan keadaan fasilitas-fasilitasnja seperti tempat mandi, listrik, dan sebagainja. Djuga pekerdjaan, orang pengangguran, pendidikan dan lain-lain. Budget rumah tangga djuga akan terlihat, jaitu besarnja pengeluaran untuk beras, untuk pangan, untuk sandang, untuk pendidikan anak, untuk padjak, untuk sewa, dan sebagainja. Didaerah pedesaan akan terlihat bagaimana susunan ongkos produksi petani dan berapa penghasilannja mereka itu. Achirnja djuga dikumpulkan keterangan-keterangan keadaan desa mengenai bangunan-bangunan, djalan-djalan, sekolah-sekolah, fasilitas air minum, mandi, dan lain-lain. Diharapkan sebelum achir tahun 1964 bagian terbesar dari tabel-tabel tersebut telah dapat dikeluarkan. Survey Nasional ini akan dilaksanakan tiap tahun, dan pada survey jang kedua akan dikumpulkan keterangan kesuburan wanita Indonesia dan capital formation oleh rumah-rumah tangga didaerah pedesaan.

3. **Survey Demografi Nasional.**

Survey ini telah didjalankan 2 tahun berturut-turut sedjak tahun 1962 berdasarkan angka-angka pokok pada sensus pendu-

duk 1961. Survey ini akan merupakan usaha tiap tahun untuk memperoleh data-data mengenai kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk sehingga dapat dihitung perkiraan penambahan tiap tahun.

4. Sensus Industri.

Sensus industri jang dilaksanakan dalam bulan September-Oktober 1964 merupakan usaha nasional jang pertama dalam bidang peridustrian. Sensus meliputi seluruh perusahaan industri besar, sedang dan ketjil dan djuga pertambangan, listrik dan gas.

Dari sensus ini akan keluar tabel-tabel sedjumlah 40 matjam tabel pokok dan 180 matjam tabel anak. Selain dari keterangan tentang djumlah dari tiap djenis perusahaan, akan terdapat djuga djumlah buruh, tingkat buruh, upah, sewa dan lain-lain biaja produksi. Djadi bermatjam-matjam input dapat dibandingkan dengan output-nja untuk tiap golongan djenis perusahaan.

Keterangan-keterangan tentang pengikut-sertaan modal asing djuga dikumpulkan. Dari tabel-tabel ini akan dapat disimpulkan djuga djumlah listrik jang dipergunakan oleh industri. Djuga capital formation dalam lapangan industri dapat dibatja dari tabel-tabel tadi.

Disamping ini selama 12 bulan tiap bulan diadakan survey industri ketjil sehingga dapat kelihatan pengaruh manusia pada kegiatan industri ketjil dipedesaan.

5. Perkiraan Pendapatan Nasional.

Hampir satu tahun telah dimulai diadakan perkiraan dan diduga sebelum achir tahun 1964 akan dapat dikeluarkan angka national income menurut sektor ekonomi untuk 5 tahun, jaitu tahun-tahun 1958, 1959, 1960, 1961 dan 1962.

6. Sensus Pertanian dan Perkebunan.

Usaha nasional ini merupakan jang pertama kali di Indonesia. Sensus ini akan mengeluarkan tabel-tabel pokok sebanjak 42 matjam untuk tiap propinsi dan tiap kabupaten. Akan keluar segera 3 tabel sangat penting (propinsi dan kabupaten) tentang luas tanah jang digarap oleh petani kita. Misalnja ditiap-tiap kabupaten berapa ribu petani jang menggarap kurang dari ½ ha. Djuga luas sawah dan luas tanah kering ditiap kabupaten dan djuga sapi, kerbau, kambing, dan sebagainja ditiap kabupaten.

Djumlah keterangan akan bertambah hingga achir 1964 ini akan siap 10 tabel dan kira-kira bulan Maret 1965 akan selesai 28 tabel, sedangkan semua 42 matjam tabel akan selesai pada pertengahan 1965.

Tabel-tabel ini antara lain akan memuat angka-angka tentang luas tanaman padi, djagung, ubi-ubian, tembakau, karet, kelapa, lada, kopi dan lain-lain tanaman jang penting. Djuga akan dimuat keterangan-keterangan mengenai rumah tangga petani itu sendiri, jakni tentang besarnja keluarga, lapangan pekerdjaan lain-lain, hubungannja dengan tanah, apakah dimiliki, disewa, dan sebagainja. Djuga akan memberikan gambaran tentang luas tanah jang dipupuk dengan matjam pupuk jang dipakai. Djuga akan diketahui berapa dari hasilnja jang dimakan sendiri dan berapa jang didjual dipasaran.

7. Survey Perdagangan Etjeran 1964 di Matraman.

Survey ini merupakan suatu pilot survey jang memberikan petundjuk lebih landjut bagi survey nasional mengenai lapangan perdagangan dan distribusi pada umumnja. Walaupun merupakan pilot survey, hasilnja tjukup menarik dan penting untuk dianalisa lebih landjut dan ditarik beberapa kesimpulan.

8. Indeks biaja hidup dibeberapa kota di Indonesia.

Setjara statistik dihasilkan indeks jang ditimbang dan meliputi beberapa djumlah dari masing-masing bahan jang dikonsumer oleh satu rumah tangga didalam satu djangka waktu tertentu.

9. Biaja hidup pegawai negeri Djakarta Raya.

Dihasilkan gambaran setjara menjeluruh mengenai besarnja biaja hidup jang diperlukan oleh berbagai golongan pegawai negeri di Djakarta.

10. Pelabuhan Tandjung Priok.

Riset/survey menghasilkan suatu saran untuk perbaikan, jakni supaja diadakan suatu organisasi-struktur jang biasanja dipakai untuk projek-projek jang telah dinjatakan genting (critical) dan jang dapat membawa harapan untuk perbaikan oleh sebab strukturnja dibuat sedemikian rupa sehingga semua pekerdjaan didalam lingkungannja ditempatkan dibawah satu komando (single management). Dengan adanja satu komando, birokrasi didalam lingkungannja sendiri setidak-tidaknja dapat diperketjil. Selain daripada itu hubungan ekstern diberi djaminan agar segala-galanja jang diperlukan oleh organisasi tersebut dengan mudah didapatnja dengan tidak terlalu banjak menghi-

raukan saluran-saluran biasa jang pada umumnja memakan waktu lama. Organisasi struktur jang disarankan disertai dengan operation plan jang dapat dipakai sebagai petundjuk untuk menggerakkan organisasi tersebut.

11. Paleo-Antropologi.

Hasil mengenai projek riset daripada paleo-antropologi dapat disimpulkan sebagai berikut:

(a) menemukan fossil Pithecanthropus jang penting artinja bagi Indonesia, karena merupakan fossil Pithecanthropus jang pertama jang disimpan di Indonesia;

(b) rangka manusia zaman perunggu dengan kebudajaan urnburial jang pertama kali ditemui di Bali akan memberikan pendjelasan mengenai migrasi penduduk dimasa protohistoris di Indonesia;

(c) diketemukan beberapa fossil jang belum selesai dipeladjari dan jang potensiil dalam memberi gagasan baru pada evolusi manusia;

(d) pentjagaran Sangiran adalah suatu langkah penting dalam membentuk monumen-monumen alam nasional.

12. Monegrafi Daerah.

Untuk mendapatkan bahan-bahan mengenai keterangan keadaan daerah guna pekerdjaan industri besar telah diadakan macro-survey dari semua daerah Dati I diluar Djawa jang meliputi pengumpulan keterangan-keterangan tentang: penduduk, perindustrian, pertambangan, pertanian, perkembangan, peternakan, perhubungan didarat/sungai/laut/udara, perdagangan, perbankan dan lain-lain.

Dewasa ini telah tersedia monografi mengenai daerah Dati-Dati I Sulawesi Selatan & Tengah, Maluku, Djambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Utara/Tenggara dan Dati-Dati II dari Tapanuli, Lampung, Palembang dan Bengkulu.

13. Administrasi, Organisasi.

Dalam bidang ini telah/sedang dilakukan berbagai projek riset seperti:

(a) Riset untuk evaluasi latihan djabatan jang bertudjuan untuk menaikkan daja guna; training jang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan umumnja dan lembaga-lembaga administrasi chususnja;

(b) Pengumpulan data-data untuk almanak organisasi Negara jang akan meliputi keterangan-keterangan mengenai orga-

nisasi, personalia, tugas kewadjiban, wewenang instansi-instansi Pemerintah;

(c) Riset organisasi tata-kerdja dengan tudjuan untuk menaikkan daja guna administrasi departemen-departemen;

(d) Riset klasifikasi karyawan ilmiah dengan tudjuan untuk menaikkan daja guna para sardjana, kwalitas dan kwantitasnja.

14. Selain daripada jang disebut diatas telah/sedang dilaksanakan projek-projek riset dibidang-bidang:

(a) tjara-tjara kerdja diperusahaan-perusahaan;
(b) management;
(c) perpadjakan;
(d) demografi;
(e) antropologi di Irian Barat;
(f) landreform di Sumatera Barat
(g) agama Islam didaerah Sumatera Utara dan Djakarta;
(h) naskah-naskah kuno;
(i) sedjarah Bali;
(j) tenaga kerdja (man-power), dan berbagai masalah dalam Dekon.

∴

PUSAT RISET NASIONAL DI TJIBINONG

(National Research Centre (N.R.C.).

1. Pusat Riset Nasional di Tjibinong terdiri dari:

   a. Lembaga Kimia Nasional.
   b. Lembaga Physika Nasional.
   c. Lembaga Metalurgi Nasional.
   d. Lembaga Elektroteknika Nasional.
   e. Pusat Pesawat-pesawat Ilmiah Nasional.
   f. Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional.

2. Untuk dapat memberikan uraian tentang Pusat Riset Nasional, maka kita harus kembali dalam sedjarah kira-kira 4 tahun jang lalu, jakni tahun 1961, lahirnja Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana jang mendjadi Ketetapan M.P.-R.S. II/1960. Dalam Pola tersebut ditjantumkan mengenai penelitian perlu dibentuknja Lembaga Kimia Nasional, Lembaga Physika Nasional, Lembaga Metalurgi Nasional, Lembaga Elektroteknika Nasional, Lembaga Geologi/Pertambangan Nasional, Lembaga Biologi Nasional dan Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional.

3. Oleh karena pembentukan lembaga-lembaga penelitian tersebut ditugaskan kepada M.I.P.I., maka untuk merealisasikannja, Ketua M.I.P.I. pada tahun 1961 telah membentuk Panitia Penasehat untuk pembentukan Lembaga Physika dan Lembaga Kimia Nasional dengan ahli-ahli dalam bidang tersebut sebagai anggota.

Dalam sidang Panitia tersebut di Bandung telah dapat dirumuskan konsep struktur dasar mengenai kedua lembaga; azas tudjuan (scope and aims), manpower planning, training program serta organisasi lembaga tersebut.

4. Hasil karya Panitia tersebut, setelah dibahas dan disetudjui oleh M.I.P.I. didjadikan dasar untuk tindakan-tindakan selandjutnja.

Dengan tjara jang sama, telah dapat pula tersusun konsepsi-konsepsi mengenai Lembaga Metalurgi dan Lembaga Elektronika oleh panitia-panitia jang dibentuk untuk keperluan tersebut oleh Ketua M.I.P.I.

5. Disamping keempat lembaga tersebut, masih terasa sekali perlu adanja suatu lembaga jang mengchususkan diri pada bidang alat-alat ilmiah (scientific instruments), baik untuk keperluan maintenance dan standardisasi equipment maupun untuk development dan produksi sendiri alat-alat ilmiah untuk keperluan Lembaga-lembaga Ilmu Pengetahuan/Teknologi di Indonesia. Untuk ini disusunlah konsepsi mengenai suatu Pusat Pesawat-pesawat Ilmiah Nasional (National Instruments Centre).

Karena ini belum termasuk dalam Pola, maka untuk sementara dimasukkan dalam Lembaga Physika Nasional.

6. Untuk lebih mengkonkritkan lagi usaha-usaha pendirian lembaga tersebut tadi maka oleh Ketua M.I.P.I., dengan persetudjuan dan bantuan dari I.T.B. diangkat pimpinan-pimpinan lembaga tersebut, berupa Direktorium bagi masing-masing lembaga dan suatu sub-Direktorium bagi National Instruments Centre. Dengan maksud untuk mengadakan koordinasi, baik dalam langkah-langkah pembentukan lembaga-lembaga, maupun pada bidang kegiatan-kegiatan penelitan, maka oleh Ketua M.I.P.I. telah diangkat pula Koordinator National Research Centre jang mentjakup semua lembaga tersebut diatas.

Tugas dari pada Direktorium-direktorium, dibawah koordinasi Koordinator N.R.C., adalah terutama:

a. perentjanaan physical facilities lembaga-lembaga (matjam laboratorium, bagian-bagian, equipment, apparatus dan lain-lainnja);
b. perentjanaan dan pembentukan kader-kader research workers dengan program beasiswa dan pembinaan tenaga-tenaga sardjana;
c. menjusun projek-projek riset dalam bidang tugas lembaga-lembaga dan melakukan projek-projek tersebut dengan menggunakan tenaga-tenaga lembaga dan tenaga-tenaga diluar lembaga;
d. mempersiapkan tenaga-tenaga teknis menengah dan djuga tenaga-tenaga administratip untuk keperluan lembaga-lembaga nantinja.

7. Perentjanaan physical facilities, dengan bantuan/kerdja sama dengan I.T.B. dalam hal ini Lembaga Affiliasi & Penjelidikan Industri, serta dibantu oleh consultant, Arsitek Ferguson dari C.S.I.R.O. Australia, telah dapat diselesaikan, dan

pemantjangan tiang pertama untuk kompleks N.R.C. telah dilakukan pada bulan September 1964 di Tjibinong.

8. Program beasiswa telah dimulai sedjak tahun 1961, dan terus dilaksanakan, sehingga pada saat ini N.R.C. telah mempunjai sardjana-sardjana tetap, terutama hasil beasiswa tersebut, ditambah dengan sardjana-sardjana jang telah menjelesaikan tugas beladjarnja diluar negeri, dan djuga beberapa sardjana lulusan Universitas-universitas di Indonesia. Dengan demikian tenaga inti sardjana telah terbentuk, jang dibina dengan menjertakan mereka dalam projek-projek penelitian, dan mengirim mereka keluar negeri untuk post-graduate study ataupun specialisasi dalam sesuatu tjabang serta mendapatkan taining dan pengalaman dalam riset.

9. Persiapan tenaga-tenaga teknis menengah jang telah dimulai pada tahun 1961 dilakukan dengan program beasiswa kepada siswa-siswa S.T.M., S.T., serta siswa-siswa Sekolah Ahli Instrumen dan Peniup Gelas, dan siswa-siswa Sekolah Analis, sedangkan persiapan tenaga-tenaga administratif akan dilakukan dengan telah diangkatnja seorang Sekretaris N.R.C.

10. Organisasi National Research Centre.

Pemikiran untuk menjusun lembaga-lembaga didalam suatu Centre didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

Karena letak lembaga-lembaga dalam suatu kompleks, serta mengingat bahwa djumlah tenaga research workers dinegara kita masih sangat terbatas, dan untuk mengadakan garis-garis jang tegas antara segi-segi penelitian dan segi-segi organisatoris/administratif, dan terutama dengan maksud agar riset jang dilakukan dilembaga-lembaga dalam N.R.C. adalah benar-benar policy-oriented, directed dan benefit suatu concerted effort maka timbullah konsepsi Research Centre tersebut diatas.

Didalam set-up organisasi ini, maka Direktur-direktur lembaga terutama merupakan pimpinan scientific, sedangkan hal-hal administratif/organisatoris diselesaikan oleh Direktur N.R.C. jang dalam hal ini dibantu oleh Sekretaris Umum N.R.C. dengan segenap aparatur administrasinja.

Direktur N.R.C. bersama dengan Direktur-direktur lembaga menetapkan program kerdja penelitian tahunan, sehingga dengan djalan ini dihindarkanlah divergensi arah penelitian, dapat diidentifisir problema-problema setjara luas, sehingga atas dasar itu dapat dilakukan penelitian-penelitian jang tertudju,

terkonsentrasi, dengan mengerahkan segala potensi dilembaga-lembaga. Organisasi Research Centre sematjam ini dapat kita djumpai misalnja di Republik Persatuan Arab (Kairo), dan dianggap tepat pula oleh konsultant-konsultant UNESCO (Academicien Samarin dan Dr. Ing. Hnedik) jang dalam tahun 1964 telah chusus diundang ke Indonesia untuk mempeladjari projek N.R.C. beserta lembaga-lembaganja.

11. Usaha-usaha Riset.

Mengingat masih sangat muda usianja N.R.C., terbatasnja djumlah sardjana serta dan terutama belum adanja fasilitas-fasilitas laboratorium, maka usaha-usaha penelitian terbatas pada beberapa projek sadja, jang dapat dilaksanakan dengan memakai fasilitas-fasilitas laboratorium di I.T.B. dan beberapa instansi lain.

Projek-projek penelitian jang kini sedang dilakukan adalah antara lain:

a. Pengkokasan batubara Indonesia/Bukit Asam, dengan bantuan fasilitas dari Pabrik Gas Bandung.

b. Radio Rakjat, dengan maksud untuk menggali potensi-potensi dalam negeri guna memproduksi radio murah.

c. Waste products, dengan maksud untuk menjelidiki kemungkinan pengambilan zat-zat berharga atau pembuatan bahan-bahan berharga, bersama dengan Lembaga Koordinasi Pengabdian Masjarakat, Departemen P.T.I.P.

12. Penutup.

a. Meskipun N.R.C. tetap berpegang pada prinsip berdiri diatas kaki sendiri, namun ini benar-benar diartikan bahwa dengan tidak merasa tergantung dari luar negeri, bantuan dari luar jang memang menguntungkan serta tidak mengikat, tetap dapat diterima terutama dalam bidang riset teknologi ini, oleh sebab pengalaman-pengalaman diluar negeri akan sangat menguntungkan kita serta memungkinkan kita untuk menutup "technological gap" kita dalam waktu jang tidak terlampau lama.

Dalam hubungan ini, maka kini sedang berlangsung pembitjaraan-pembitjaraan dengan fihak luar negeri:

untuk Lembaga Kimia Nasional dengan Tjekoslowakia
untuk Lembaga Physika Nasional dengan Nederland

untuk Lembaga Metalurgi Nasional dengan Uni Sovjet
untuk Lembaga Elektroteknika Nasional dengan Djepang
untuk Pusat Pesawat-pesawat Ilmiah dengan Nederland
semuanja dengan maksud untuk mengevaluasi bantuan apakah jang dapat diberikan oleh negara masing-masing untuk mempertjepat pertumbuhan lembaga-lembaga tersebut.

b. Untuk djuga dapat menggunakan teknik-teknik riset modern, baik dalam penjusunan designnja maupun mengatur dan menjimpulkan data-data serta hasil-hasil pertjobaan dengan tjepat, maka N.R.C. akan pula dilengkapi dengan suatu Computing Centre jang akan memberikan peladjaran kepada/melajani semua lembaga dalam N.R.C. dan lembaga-lembaga lain.

c. Djuga direntjanakan suatu Central Library, lengkap dengan reproduction-facilities, jang tidak hanja melajani keperluan lembaga-lembaga dalam N.R.C., melainkan akan pula memberikan servicenja kepada lembaga-lembaga serta universitas-universitas diluar N.R.C. guna ikut mendorong kegiatan-kegiatan riset.

d. Menurut rentjana, pembangunan lembaga-lembaga di Tjibinong akan selesai pada pertengahan tahun 1967, sedangkan pembentukan kader-kader research-workers djuga diharapkan dapat mentjapai targetnja pada waktu itu.

Dengan demikian, maka Insja Allah, National Research Centre akan dapat memulai tugasnja dua tahun lagi dengan "full sitting".

LEMBAGA EKONOMI DAN KEMASJARAKATAN NASIONAL.

1. Pembentukan Lembaga.

Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Research Nasional tanggal 3 Maret 1963, No. 56/M/Kpts/Str/63.

Direktur Lembaga ialah : Prof. Dr. Widjojo Nitisastro.

2. Tugas Lembaga.

Lembaga bertugas mengadakan riset dalam bidang ekonomi dan kemasjarakatan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional Berentjana.

3. Projek-projek Riset 1963-1964.

a. Mengingat kurangnja tenaga riset didalam lingkungan Leknas, maka pada tahap pembentukan Leknas ini usaha-usaha riset untuk sebagian besar dikontrakkan dengan kalangan akademisi di-universitas-universitas. Projek-projek jang dikontrakkan adalah umumnja projek-projek jang diusulkan oleh Dewan Riset Ekonomi, Sosial dan Budaja kepada J.M. Menteri Research Nasional dan jang telah disetudjui beliau.

b. Sungguhpun pelaksanaan projek-projek riset berada ditangan lembaga-lembaga penelitian universitas-universitas, namun sedjak dari penjusunan research-design sampai dengan penjusunan laporan terachir, tiap projek riset berada dibawah pengawasan penuh dari Lembaga, oleh karena pada taraf terachir pertanggungan-djawab terletak ditangan Lembaga.

c. Projek-projek riset jang diselenggarakan adalah:

1). Projek Penduduk dan Angkatan Kerdja di Indonesia jang pelaksanaannja diserahkan kepada Lembaga Penjelidikan Ekonomi dan Masjarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dengan pemimpin projek Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, dan diselenggarakan dalam phase 1963/1964.

2). Sjarat-sjarat minimum jang diperlukan untuk mengadakan dua atau tiga shift diperusahaan-perusahaan textiel, diselenggarakan oleh Biro Penelitian Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dengan pemimpin projek, Drs. Suratman Wirjosudarmo M.A. dan phase penjelenggaraan 1963.

3). Memperbaiki hubungan Institut Pendidikan dengan fihak produsen, diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Padjadjaran Bandung, dibawah pimpinan-projek Sorimuda Nasution M.A. untuk phase 1963/1964.

4). Pengangkutan interinsuler di Indonesia, diselenggarakan oleh Drs Wiweko Soepono dalam phase 1963.

5). Menudju Sosialisme Indonesia, diselenggarakan oleh R.A. Santoso Sastromidjojo M.Sc. (Ed) dan phase penjelenggaraan 1963/1964.

6). Koordinasi kebidjaksanaan, perentjanaan dan pelaksanaan transmigrasi di Indonesia, diselenggarakan oleh Lembaga Penjelidikan Ekonomi dan Masjarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan pemimpin-projek, Drs. Kartomo Wirosuhardjo, untuk phase 1963/1964.

7). Usaha pertanian bermekanisasi diatas tanah kering, penelitian mana diawasi oleh Prof. Kampto Utomo.

8). Masalah peraturan-peraturan daerah dibidang ekonomi dan masjarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dibawah pimpinan-projek, Dr. Widjojo Nitisastro untuk phase 1964.

9). Masalah pengaruh dari blok-blok ekonomi jang diskriminatoris terhadap Ekonomi dan Masjarakatan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM/FEUI), dibawah pemimpin-projek, Prof. Sarbini Sumawinata, untuk phase 1964.

10). Masalah pembentukan modal di Indonesia, diselenggarakan oleh LPEM/FEUI, dibawah pemimpin-projek, Drs. Marsudi Djojodipuro untuk phase 1964.

11). Masalah perpadjakan di Indonesia, diselenggarakan oleh LPEM/FEUI, dibawah pimpinan-projek Dr. Ali Wardhana untuk phase 1964.

12). Masalah dekonsentrasi management perusahaan-perusahaan Negara diselenggarakan oleh LPEM/FEUI dibawah pemimpin-projek Dr. Pang Ley Kim untuk phase 1964.

13). Masalah perangsang di Indonesia diselenggarakan oleh LPEM/FEUI dibawah pemimpin-projek Dr. Harun Zain untuk phase 1964.

14). Harga barang-barang kebutuhan hidup dibeberapa kota di Indonesia, diselenggarakan oleh Biro Pusat Statistik dibawah pemimpin-projek Drs. Azwar Rasjid untuk phase 1964.

15). Indeks biaja hidup pegawai negeri di Djakarta diselenggarakan oleh Biro Pusat Statistik dibawah pemimpin-projek Nugroho M.A. untuk phase 1964.

16). Perhubungan dan pengangkutan, diselenggarakan oleh Angkatan Pemuda Pembangunan Indonesia dibawah pemimpin-projek Sdr. Soetomo Martopradoto dan Arcundhata untuk phase 1964.

17). Leknas sendiri menjelenggarakan pilot survey „Pusaka Djiwa" dibawah pemimpin-projek Dr. Selo Soemardjan, untuk phase 1964.

18). Iron stock, diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dibawah pimpinan Sdr. Bambang Rianto.

19). Tjara-tjara menaikkan produksi dengan tjepat, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, dibawah pimpinan Drs. Jujun Wirasasmita.

4. Kegiatan Ilmiah lainnja.

a. Sedjalan dengan tugas dan tjita-tjita lembaga untuk ikut aktif membantu Pemerintah dalam memetjahkan masalah-masalah aktuil jang dihadapi Negara, maka diselenggarakan pula pelbagai kegiatan ilmiah lainnja, seperti workshop, seminar dan lain-lain. Workshop pertama diadakan dalam April 1963 dengan mengambil sebagai pokok masalah „Perpadjakan", jang dipimpin oleh Prof. Sarbini Sumawinata dan oleh kalangan sardjana dan ahli-ahli terkemuka. Thema workshop jang kedua djuga diambil dari dokumen Deklarasi Ekonomi jakni „Dekonsentrasi Management di PN2" jang diadakan dalam bulan Djuli 1963 dibawah pimpinan Prof. Sadli. Sebuah seminar mengenai „Inflasi dan Pembangunan Ekonomi" dibawah pimpinan Konsultan-Lembaga, Dr. Kurt Martin diselenggarakan dalam bulan September 1963. Dan untuk ikut serta memberi bahan-bahan pemikiran mengenai U.U. Pokok Transmigrasi maka dalam bulan September 1963 diselenggarakan seminar transmigrasi dibawah pimpinan Dr. Kampto Utomo.

b. Oleh Leknas diterbitkan pula setjara tidak berkala „Warta Leknas", jang memuat hasil-hasil workshop, seminar dan lain-lain hasil kegiatan ilmiah Leknas. Disamping penerbitan ini djuga dikeluarkan brosur-brosur dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk memperkenalkan Leknas kepada masjarakat dalam dan luar negeri.

c. Untuk keperluan riset telah pula dibangun bagian perpustakaan dan dokumentasi Leknas, masing-masing dipimpin sedjak September 1964 oleh sdr. Johny Rompas B.A. dan sdr. Frans Soeprapto B.A. Pada masa kini Leknas memiliki lebih kurang 710 buah buku-buku disamping satu set Encyclopedia of Social Sciences, buku-buku mana merupakan hadiah-hadiah dari „Harvard Advisory Development Service" jang disalurkan melalui Ford Foundation, pemberian-pemberian The Population Council, perpustakaan M.I.P.I., hadiah-hadiah perseorangan dan pembelian-pembelian diluar.

d. Disamping buku-buku djuga dikumpulkan oleh bagian perpustakaan dan dokumentasi ini madjalah-madjalah ilmiah baik dari dalam maupun luar negeri dan lain-lain surat-kabar. Dengan djalan exchange djuga diperoleh bulletin-bulletin riset dari lembaga-lembaga penelitian dalam dan luar negeri.

5. Phase September 1964 — 1965.

a. Proses Konsolidasi.

Mengingat semakin meningkatnja usaha pembangunan dilingkungan Departemen Urusan Research Nasional umumnja dan M.I.P.I. chususnja, maka tenaga Prof. Sadarjoen dibutuhkan sepenuhnja di Urusan Pembangunan M.I.P.I., sehingga sedjak bulan September 1964 pimpinan Leknas diserahkan kepada Direktur baru, Prof. Dr. Widjojo Nitisastro.

Dengan tenaga pimpinan jang baru maka Leknas mengindjak tahap konsolidasinja. Sedjak 1 Djanuari 1965 Leknas mendjadi lembaga jang otonom sehingga dibidang organisasi ichtiar utama adalah memungkinkan Leknas berdiri diatas kakinja sendiri, selaku lembaga jang penuh. Hingga 1 Djanuari 1965 Leknas tidak mempunjai formasi kepegawaian sendiri, tidak mempunjai inventarisasi sendiri ataupun anggaran-belandjanja sendiri. Semua ini adalah dibebankan kepada Urusan Pembangunan M.I.P.I. Sedjak 1 Djanuari 1965 hal ini berubah, dan organisasi Leknaspun disesuaikan dengan perkembangan Leknas ketaraf berstatus sendiri itu.

Dalam rangka reorganisasi ini sebagian dari tenaga administrasi dipertahankan dilingkungan Leknas, dan terdjadi pergeseran sekadarnja diantara tenaga research assisten. Setelah diadakan rasionalisasi maka staf kantor Leknas terdiri dari dua tenaga dengan golongan D/II, satu tenaga dengan golongan D/I, empat tenaga golongan C/I, satu tenaga golongan B/III, lima tenaga golongan B/II dan enam tenaga dari golongan

A/II. Staf kantor tersebut meliputi pekerdjaan administrasi kantor, sopir dan pesuruh-pesuruh.

Golongan staf dari E/II terdapat empat orang jang dikerdjakan pada perpustakaan, dokumentasi, urusan kepegawaian dan research assisten. Research assisten jang tinggal didalam negeri bergolongan F/II terdapat tiga orang. Seluruh tata-usaha dipegang oleh sardjana ekonomi (F/II).

Berhubung dengan kebidjaksanaan gaja baru untuk menitik-beratkan usaha riset oleh dan dari tenaga riset Leknas sendiri, maka sedjak September 1964 telah berlangsung recruitment tenaga-tenaga research associates sebanjak 9 orang, empat tenaga berpendidikan Ph. D. luar dan dalam negeri dibidang ekonomi (termasuk Direktur Leknas), satu tenaga berpendidikan Ph. D. dibidang sosiologi, satu doctor dibidang anthropologi, dan sardjana-sardjana jang berpendidikan didalam dan luar negeri dimasing-masing bidang ilmu politik, psychologi dan demographi.

Sementara itu proses recruiting tenaga-tenaga assisten baru masih berdjalan terus, dan proses upgrading baik tenaga assisten maupun tenaga administrasi lainnja berdjalan terus, baik dengan tjara pengiriman research assisten kelatihan perentjanaan jang diselenggarakan oleh Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional, maupun pengiriman tenaga-tenaga administrasi kelatihan-kelatihan kepegawaian jang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.

b. Projek Riset.

Dengan menitik-beratkan kegiatan riset pada usaha-usaha Leknas sendiri, maka setiap research associate bertanggung-djawab untuk lima projek research dibidang keachliannja masing-masing. Demikianlah untuk tahun 1965 telah direntjanakan projek-projek riset sebagai berikut:

1) Research associate Ali Wardana bertanggung-djawab untuk projek-projek:

   (i) Aspek-aspek perentjanaan keuangan
   (ii) Struktur perpadjakan di Indonesia
   (iii) Masalah padjak tidak langsung
   (iv) Masalah keuangan Pusat dan Daerah
   (v) Penggunaan keuangan untuk pembangunan.

2) Research associate Selo Soemardjan bertanggung-djawab untuk projek-projek:

(i) Pengaruh Partai-partai Politik & Organisasi Massa pada masjarakat pedesaan di Djawa
(ii) Landreform dan Bagi Hasil
(iii) Sentralisasi dan Desentralisasi pemerintahan
(iv) Dinamika Gotong Rojong
(v) Perkawinan dan Pertjeraian.

3) Research associate Mohamad Sadli bertanggung-djawab untuk projek-projek:
(i) Pandangan-pandangan Penilaian Umum Pembangunan Industri jang dilakukan dan didorong oleh Pemerintah, 1950-1964
(ii) Hubungan Pembangunan Industri dan Neratja Pembajaran; Apakah Indonesia sudah perlu mengembangkan industri jang dapat mengekspor
(iii) Masalah industri development planning dibidang industri dasar
(iv) Sumber-sumber pembiajaan untuk industri-indusrti Indonesia
(v) Masalah management didunia perusahaan Indonesia.

4) Research associate Sulaiman Sumardi bertanggung-djawab untuk projek-projek:
(i) Model-model teori dari pengembalian-keputusan
(ii) Pola idiil dari pengambilan keputusan dalam Decokrasi Terpimpin
(iii) Case study pengambilan keputusan didalam suatu Pantja Tunggal (disuatu daerah Djawa Barat)
(iv) Pengambilan Keputusan dalam Dewan Perusahaan atau Front Nasional dan D.P.R.-G.R.
(v) „Sesepuh" sebagai type kepemimpinan.

5) Research associate Tan Goan Tiang bertanggung-djawab untuk projek-projek:
(i) Trend dan komposisi penduduk Indonesia hingga tahun 1961
(ii) Projek Penduduk Indonesia hingga tahun 1984
(iii) Projeksi-projeksi penduduk dan faedahnja bagi penentuan angkatan-kerdja dihari kemudian
(iv) Labor supply dan penduduk Indonesia.

6) Research associate Fuad Hasan bertanggung-djawab untuk projek-projek:
(i) Analisa konseptuil tentang national identity
(ii) Analisa konseptuil tentang value system sebagai kerangka normatief dari ethos nasional

(iii) Analisa kultur-historis dari pada symbolik dalam masjarakat-masjarakat daerah di Indonesia.
(iv) Basic personality type dari pemuda (i) di Djakarta
(v) Basic personality type dari beberapa ethnic groups didaerah-daerah.

7) Research associate Emil Salim bertanggung-djawab untuk projek-projek:
(i) Teori sistim ekonomi dan ekonomi Indonesia
(ii) Masalah sentralisasi dan desentralisasi dalam ekonomi Indonesia
(iii) Masalah pangan dan ekonomi Indonesia
(iv) Strategi perentjanaan ekonomi disektor pertanian
(v) Strategi perentjanaan ekonomi disektor industri.

c. Kegitan-kegiatan Ilmiah lainnja.

Disamping kegiatan riset ini sedapat mungkin setiap Senin pagi dilangsungkan interdisiplinairy diskusi dengan thema pokok Strategi Pembangunan Indonesia, jang diharapkan dapat mendjelma mendjadi buku jang menjorot segi pembangunan Indonesia dari pelbagai sudut. Disamping pertemuan interdisipliner, maka pertemuan seminar, tjeramah-tjeramah sering dilakukan dengan tamu-tamu bangsa asing ataupun dari rekan-rekan dari lembaga penelitian Indonesia lainnja. Sebaliknja tidak djarang anggota staf riset Leknas diundang kepelbagai pertemuan, seminar dan lain-lainnja untuk memberikan tjeramah dan lain-lainnja.

Oleh Departemen-departemen sering pula diterima bantuan tenaga-tenaga riset Leknas dalam usaha-usaha Departemen-departemen. Demikianlah research-assisten Drs. Kamarulzaman telah diminta membantu Biro Industrialisasi dari DEPERDATAM dalam survey daerah-daerah; research-assisten Drs. Zulkifli Azzaino telah membantu Survey Team Komando Operasi Tertinggi (KOTI) dalam survey daja-tampung ekonomi didaerah-perbatasan Kalimantan Barat (1965); Research-associate Dr. Ali Wardhana diminta tenaganja dalam Panitia Pembiajaan Negara dari Bappenas (1965); Research-associate Dr. Sadli diminta tenaganja dalam Panitia Negara untuk Manpower Planning dari Bappenas; Research-associate Dr. Emil Salim diminta tenaganja dalam Team tenaga ahli „Economic Progress Report" Kompartimen Pembangunan. Ini barulah kegiatan dalam kwartal pertama 1965. Sementara itu

beberapa tenaga research-associate kerap pula menjertai J.M. Menteri Research Nasional dalam sidang-sidang Badan Ekonomi Keuangan.

Sementara itu segala projek-projek riset jang diperpandjang pelaksanaannja dan merupakan kelandjutan dari projek-projek riset tahun-tahun 1963/1964 berdjalan terus.

Djika semulanja kerdja-sama dalam lingkungan ECAFE sedianja akan berwudjud dengan pengiriman tenaga research assisten Leknas keprojek latihan perentjana-perentjana di Bangkok, maka dengan komando keluarnja Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa maka pengiriman tenaga tersebut dibatalkan.

Sedjalan dengan haluan kebidjaksanaan Pemerintah untuk mempererat kerdja-sama Indonesia dengan Republik Rakjat Tiongkok, maka dalam rangka joint agreement kedua negara tersebut direntjanakan bahwa Leknas mengirimkan dua tenaga associates dalam kundjungan-ilmiah ke R.R.T., pada pertengahan tahun 1965. Dalam bulan April 1965 dua tenaga research-associate lainnja, Dr. Selo Soemardjan dan Dr. Kuntjaraningrat telah pula dikirim menjertai rombongan Departemen Research ke R.R.T. Sedangkan Drs. Fuad Hasan djuga bepergian dalam bulan April 1965 kenegara-negara Korea Utara dan Tjechoslowakia.

Penutup.

1. Setjara operasionil Leknas meningkat dewasa ini pada tahun-kerdjanja jang ketiga. Dalam proses perkembangannja semakin djelas arah haluan perkembangan ichtiar risetnja. Djika semulanja masih mendjadi pertanjaan mengenai titikberat riset pada segi "basic" atau "applied research" pada „masalah-masalah jang bersifat djangka-pendek" ataupun „djangka pandjang" dan lain-lainnja, maka dewasa ini njatalah bahwa segi tindjauan serupa ini adalah tidak relevan. Setiap usaha riset bagaimanapun sifatnja senantiasa harus mengemban Amanat Penderitaan Rakjat jang mendjadi sumber inspirasinja.

2. Dalam hubungan inilah Leknas dalam tahap konsolidasinja mengarahkan kegiatannja pada masalah-masalah jang menjangkut proses pembinaan bangsa, seperti masalah "value system" sebagai kerangka normatif dari ethos nasional, masalah pola idiil dari pengambilan-keputusan dalam demokrasi

terpimpin, masalah sistim ekonomi Indonesia, masalah industrial development planning, projeksi penduduk, dinamika gotong rojong, struktur perpadjakan Indonesia, dan lain-lain. Akan tetapi disamping itu Leknas djuga terlibat dalam kegiatan-kegiatan jang ad-hoc jang menjangkut masalah-masalah djangka-pendek, seperti penelitian-penelitian untuk Departemen-departemen dan pelbagai Panitia-panitia Negara.

3. Usaha penelitian adalah relatif kegiatan jang baru ditanah-air kita. Dengan kurangnja tenaga ahli dan tradisi perguruan tinggi jang relatif muda, maka usaha riset merupakan usaha jang disatu fihak sudah harus didjalankan akan tetapi dilain fihak harus dibina dan dipupuk. Setjara simultan proses riset harus berdjalan seiring dengan proses mendidik tenaga-riset dan pekerdjaan-riset. Mendidi dan membina tenaga riset bukan sadja dalam pendidikan formilnja, akan tetapi djuga dengan menstimulir imaginasi-kreatif dan membimbing djiwa-mentjari dan mentjipta dari masjarakat bangsa kita.

4. Sehingga pada dirinja kegiatan riset itu sendiri merupakan tjiri penting jang perlu diperkembangkan dalam pembinaan watak Bangsa Indonesia. Chususnja bila diingat bahwa hukum Revolusi Indonesia mengenal hukum pendjebolan dan pembangunan, maka pada azasnja riset jang merupakan perwudjudan dari „djiwa-mentjari dan mentjipta" itu sudah sewadjarnja mengiringi proses pendjebolan dan pembangunan tersebut, guna memberikan landasan ilmiah pada simfoni destruksi dan konstruksi tersebut guna memungkinkan proses pembinaan bangsa dan negara setjara revolusioner dan ilmiah bertanggung-djawab.

5. Pertanggungan-djawab didirikannja Leknas bersumber pada Amanat Penderitaan Rakjat jang ditjetuskan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno, dalam sidang M.P.R.S. tahun 1961. Dengan bertolak dari sumber inspirasi inilah Leknas mendjalankan tugasnja untuk memberi sekedar sumbangan pada proses pembinaan bangsa dan negara. Dan sedjalan dengan irama revolusi sesuai dengan Amanat Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno pada Sidang M.P.R.S. April 1965, maka Leknaspun dewasa ini telah memberi isi pada komando untuk „Berdiri Diatas Kaki Sendiri" dan sepenuhnja dewasa ini bekerdja dengan tenaga-tenaga bangsa sendiri.

LEMBAGA BIOLOGI NASIONAL 1945-1965.

A. RIWAJAT SINGKAT.

Lembaga Biologi Nasional terdiri atas bagian-bagian Kebun Raja, Herbarium Bogoriense, Lembaga Penelitian Botani, Museum Zoologicum Bogoriense jang semuanja ada di Bogor dan Lembaga Penelitian Laut jang ada di Pasar Ikan, Djakarta. Kebun Raja mempunjai tjabang-tjabang di Purwodadi (Djawa Timur), Eka Karya (Bali), Tjibodas (Djawa Barat), Sibolangit (Sumatera Utara) dan Setya Mulia (Sumatera Barat).

Walaupun Lembaga Biologi Nasional berdiri sendiri, setjara resmi baru didirikan dalam bulan Djuni 1962, akan tetapi bagian-bagiannja telah mempunjai riwajat jang amat pandjang. Kebun Raja didirikan dalam tahun 1817, Herbarium Bogoriense dalam tahun 1844, Lembaga Penelitian Botani dalam tahun 1914, Museum Zoologicum Bogoriense dalam tahun 1894 dan Lembaga Penelitian Laut dalam tahun 1904.

Sebelum tahun 1949 Lembaga Biologi Nasional terkenal dengan nama s'Lands Plantentuin. Setelah penjerahan kedaulatan namanja diganti mendjadi **Lembaga Pusat Penjelidikan Alam** (Kebun Raja Indonesia) dan bernaung dibawah Kementerian Pertanian. Barulah dalam bulan Djuni 1962 Lembaga-lembaga dari Lembaga Pusat Penjelidikan Alam, ketjuali Bibliotheca Bogoriensis, dipindahkan dari Departemen Pertanian ke Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, Departemen Urusan Research Nasional dan disatukan mendjadi **Lembaga Biologi Nasional** (L.B.N.).

Setjara chronologis pimpinan dari Lembaga Biologi Nasional sedjak tahun 1945 adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan dari Lembaga Biologi Nasional sedjak 1945.

Tahun	Nama	Keterangan
1944 — 1946	T. Sakai	Pendudukan Djepang dan masa peralihan.
1946 — 1948	L.G.M. Baas Becking	Direktur s'Lands Plantentuin.
1948 — 1949	D.F. van Slooten	s.d.a.
1949 — 1959	Kusnoto Setyodiwirjo	Direktur Lembaga Pusat Penjelidikan Alam.
1959 — 1961	Sadikin Sumintawikarta	s.d.a.

1961 — 1962	—	Lembaga-lembaga berdiri sendiri-sendiri dibawah Biro Koordinasi dan Kerdjasama Lembaga-lembaga Penelitian Departemen Pertanian.
1962 — 1964	Soetomo Soerohaldoko	Ketua Badan Pimpinan Kollegial L.B.N.
1964 sekarang	Otto Soemarwoto	Direktur Lembaga Biologi Nasional.

2. Pimpinan dari bagian-bagian L.B.N. pada waktu sekarang.

Bagian	Nama Kepala
Kebun Raja.	Sudjana Kassan.
Herbarium Bogoriense.	Anwari Dilmy.
Lembaga Penelitian Botani.	Ir. Soetomo Soerohaldoko.
Museum Zoologicum Bogoriense.	Drs. Sampurno Kadarsan.
Lembaga Penelitian Laut.	Dr. Gatot Rahardjo Joenoes.

B. TUGAS LEMBAGA BIOLOGI NASIONAL.

Untuk dapat mengembangkan L.B.N. dengan sebaik-baiknja pertama-tama perlualah diingat, bahwa maksud mendirikan L.B.N. adalah untuk dapat digunakan sebagai alat dalam menjelesaikan Revolusi Indonesia. Oleh karena itu djelaslah, bahwa tugas Lembaga Biologi Nasional belumlah selesai djika hanja sekedar memadjukan ilmu. Memadjukan ilmu bukanlah tudjuan achir, melainkan hanjalah tjara (mean) untuk dapat menggunakan ilmu itu dalam penjelesaian dari Revolusi Indonesia menudju kemasjarakat Sosialis Indonesia jang adil dan makmur dan untuk membangun dunia baru. Berdasarkan atas hal tersebut tugas dari L.B.N. dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mentjari sumber-sumber djaja hajati dan menentukan dimana letaknja.
2. Mempeladjari proses pembentukan dari sumber-sumber djaja hajati itu dan.
3. Menjampaikan kepada masjarakat penemuan-penemuan baru untuk digunakan dalam pembangunan Negara.

Ketiga tugas ini merupakan suatu mata rantai jang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebelum kita menggali kekajaan hajati kita, haruslah kita ketahui dahulu apa jang kita

punjai dan dimana letaknja. Karena kita ingin mendirikan Negara Indonesia tidak untuk satu atau dua abad, melainkan kita tjita-tjitakan untuk sepandjang masa sampai achir zaman, maka merupakan sjarat mutlak, bahwa sumber djaja hajati kita tidak akan kita habiskan dalam satu atau dua generasi. Bahkan adalah suatu keharusan bahwa hasil sumber djaja hajati kita itu dapat diperlipat-gandakan tanpa menghabiskannja. Untuk dapat mentjapai tudjuan ini perlulah dipeladjari proses-proses pembentukan dari sumber-sumber tersebut. Achirnja penemuan-penemuan jang didapat oleh L.B.N. harus disampaikan kepada masjarakat untuk dapat digunakan dalam memadjukan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kedokteran dan lain-lain.

Tugas dari L.B.N. mempunjai arti penting dalam perdjoangan menjelesaikan Revolusi Indonesia, baik dari segi materiel maupun idiil.

1. Arti materiil.

Pemerintah telah menggariskan garis politik, bahwa kita harus dapat berdiri diatas kaki sendiri. Dalam hal ini L.B.N. dapat ikut turun dengan mentjari djalan untuk menaikkan produksi sandang-pangan dan industri. Ketjuali itu dapat menemukan bahan-bahan baru untuk melipat-gandakan produksi sandang-pangan dan industri.

2. Arti idiil.

Disamping keuntungan-keuntungan materiel pekerdjaan-pekerdjaan L.B.N. akan menghasilkan pula hal-hal jang penting dilihat dari segi idiil, antara lain ialah:

a. Koleksi-koleksi jang terdapat di L.B.N. (Kebun Raja, Herbarium dan Museum Zoologi) adalah koleksi-koleksi jang terbaik didaerah tropika dan mempunjai reputasi internasional jang tinggi. Karena itu kita harus dapat membuktikan, bahwa sardjana-sardjana kita mampu untuk memelihara dan memperkaja koleksi-koleksi tersebut, sehingga akan membantah keterangan-keterangan dari pihak Nekolim jang menjatakan, bahwa bangsa-bangsa Nefo adalah bangsa-bangsa jang bodoh jang tidak mempunjai minat dan kemampuan untuk pekerdjaan-pekerdjaan ilmiah.

b. Fasilitas-fasilitas jang amat baik dari L.B.N. memberi kemungkinan kepada kita untuk merebut dominasi ilmiah dari tangan bangsa-bangsa Oldefos, paling sedikit dalam lapangan biologi. Hal ini berarti, bahwa kita tidak sadja akan dapat berdiri sendiri dalam lapangan ilmiah, melainkan akan dapat ikut menentukan arah dari perkembangan ilmu pengetahuan jang hingga sekarang masih di monopoli oleh bangsa-bangsa Oldefo.

c. Ketjuali untuk keperluan-keperluan nasional, fasilitas-fasilitas di L.B.N. dapat pula digunakan untuk membantu mengembangkan ilmu pengetahuan biologi dinegara-negara Nefo, sehingga L.B.N. dengan njata dapat membantu memperkuat ketahanan dan solidaritas barisan bangsa-bangsa Nefo. Kenjataan menundjukkan, bahwa L.B.N. selalu dikundjungi oleh sardjana-sardjana jang ternama jang ingin menambah pengetahuan mereka di Bogor.

d. Hal-hal jang diuraikan diatas itu akan menambah harga diri dan rasa pertjaja pada diri sendiri dari bangsa-bangsa Nefo pada umumnja dan bangsa Indonesia pada chususnja jang berarti menambah kekuatan mental dari kita dan bangsa-bangsa Nefo lainnja.

C. STAF ILMIAH.

Sebagai suatu lembaga ilmu pengetahuan jang ingin berdiri diatas kaki sendiri adalah sjarat mutlak, bahwa tenaga staf ilmiah dapat terdiri dari sardjana-sardjana Indonesia.

Oleh karena itu L.B.N. mentjurahkan banjak tenaga dan fikiran untuk mentjari dan mendidik tenaga-tenaga ilmiah baru. Usaha ini dapat dibenarkan, djika diingat masih sangat kurangnja tenaga-tenaga ilmiah di L.B.N. Lagi pula perhatian dari pemuda-pemuda kita terhadap biologi sangat ketjil. Sardjana Indonesia jang pertama-tama mendjadi anggota staf ilmiah L.B.N. adalah Prof. Ir. Kusnoto, jaitu sebagai Direktur dari Lembaga Pusat Penjelidikan Alam, dalam tahun 1949. Kemudian disusul oleh Saudara A. Dilmy dalam tahun 1954 dan selandjutnja Saudara Ir. Soetomo dalam tahun 1956. Daftar 3 menundjukkan perkembangan tenaga ilmiah dari L.B.N. sedjak tahun 1945.

Djumlah tenaga ilmiah dari L.B.N. sedjak tahun 1945 *).

Tahun	Sardjana		Sardjana Muda	
	Asing	Indonesia	Asing	Indonesia
1945 — 1950	?	1	—	—
1951 — 1955	18	2	—	—
1955 — 1960	9	3	—	18
1961 — 1965	—	14	—	18

*) Tidak termasuk tenaga ilmiah dari Lembaga Penelitian Laut.

D. PEMBANGUNAN PHYSIK.

Ketjuali pembangunan dibidang tenaga ilmiah perlu pula difikirkan pembangunan dibidang physik dengan maksud a) menjelematkan koleksi-koleksi jang sangat berharga dan b) untuk dapat melakukan riset biologi modern, dimana diperlukan pula alat-alat modern. Pembangunan jang dilakukan adalah:

1. Rehabilitasi dari laboratorium botani dengan perbaikan ruangan-ruangan kerdja, pemasangan unit-unit window-airconditioners, dan pembuatan kamar dingin jang kesemuanja telah selesai. Perbaikan-perbaikan saluran gas, air dan listrik masih sedang dikerdjakan.
2. Rehabilitasi dari ruangan-ruangan koleksi Museum Zoologi dengan pemasangan mesin dehumidifier jang telah selesai dikerdjakan.
3. Pembuatan kas katja untuk pertjobaan-pertjobaan botani.
4. Pembangunan gedung Herbarium jang bertingkat 8 jang diharapkan akan selesai dalam tahun 1966.
5. Perentjanaan pola raya (master plan) untuk pembangunan kompleks baru L.B.N. di Baranangsiang Bogor, jang akan meliputi perpustakaan, ruangan-ruangan koleksi, ruangan pameran dan laboratoria serta perumahan karyawan L.B.N.

E. PROJEK-PROJEK RISET.

Walaupun L.B.N. masih kekurangan tenaga namun usaha-usaha keras tetap dilakukan agar riset dapat berdjalan terus. Kegiatan-kegiatan ilmiah jang banjak didjalankan adalah ekspedisi-ekspedisi keseluruh tanah air guna memperkaja

koleksi dari Kebun Raja, Herbarium dan Museum Zoologi, jaitu dalam rangka tugas inventarisasi dari sumber djaja hajati. Hasil-hasil karya ilmiah dari staf warga-negara Indonesia dalam bentuk publikasi dan prasaran-prasaran jang dikemukakan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah nasional/internasional tidak pula sedikit, jaitu 50 buah. Madjalah-madjalah jang diterbitkan oleh L.B.N. adalah berturut-turut Reinwardtia oleh Herbarium, Treubia oleh Museum Zoologi dan Annales Bogorienses oleh Lembaga Penelitian Botani.

Projek-projek penelitian jang sekarang sedang berdjalan adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi sumber djaja hajati.
2. Biologi tikus sawah sebagai dasar untuk pemberantasannja.
3. Biologi herba (onkruid) sebagai dasar untuk pengendaliannja didaerah-daerah pertanian jang dibuka oleh Mekatani, perkebunan-perkebunan, Kebun Raja dan park-park.
4. Isolasi galur-galur unggul Rhizobium dan penelitian-penelitian tentang penambatan N_2 sebagai dasar untuk menaikkan produksi kedele.
5. Physiologi penggerek padi putih sebagai dasar pemberantasannja.

F. HUBUNGAN INTERNASIONAL.

Oleh karena adanja koleksi-koleksi jang sangat berharga di L.B.N., maka L.B.N. mempunjai daja tarik jang kuat terhadap sardjana-sardjana diseluruh dunia. Djumlah ahli-ahli jang datang dari luar negeri di L.B.N. tidaklah sedikit sebagai terlihat dalam daftar berikut:

Tamu-tamu sardjana asing jang melakukan kundjungan ilmiah di L.B.N.

Tahun	Djumlah	Negeri asal
1945 — 1950	17	Djepang, Nederland, Inggris, Swedia, U.S.A.
1951 — 1955	32	India, R.R.T., Djepang, Inggris, Swedia, Nederland, Djerman Barat, Australia, U.S.A.
1956 — 1960	37	R.R.T., Sailan, India, Djepang, Kepulauan Fiji, U.S.S.R., Denmark, U.S.A.
1961 — 1965	40	India, Filipina, Djepang, U.S.S.R., Tjekoslowakia, Perantjis, Denmark, Nederland, Djerman Barat, U.S.A.

L.B.N. djuga mengadakan program tukar menukar jang sangat aktif dalam bidji-bidji, bahan penelitian ilmiah dan madjalah-madjalah ilmiah. Kebun Raja setiap tahunnja mengirimkan bahan penelitian sebanjak 200-250 djenis keluar negeri, sedang Herbarium sedjak serah terima dari Belanda telah memindjamkan bahan herbarium sebanjak 300.000 lembar dan memindjam 100.000 lembar. Banjak madjalah jang terdapat di Bibliotheca Bogoriensis didapat dengan djalan menukar madjalah-madjalah Reinwardtia, Annales Bogorienses dan Truebia.

G. BAGIAN-BAGIAN LEMBAGA BIOLOGI NASIONAL.

Setjara singkat dibawah ini adalah keterangan jang lebih terperintji mengenai Lembaga Penelitian Laut, L.B.N:

LEMBAGA PENELITIAN LAUT
(LEMBAGA BIOLOGI NASIONAL)

Pendahuluan.

Marine science adalah ilmu jang mempeladjari tentang seluruh keadaan, sifat-sifat dan kehidupan dilautan dalam arti kata seluas-luasnja. Dalam garis besarnja ilmu ini dapat dibagi atas: 1) Oceanografi physika, 2) Oceanografi kimia, 3) Biologi laut, 4) Meteorologi laut, 5) Geologi laut, dan dapat diterangkan sebagai berikut:

1) **Oceanografi physika.** Ilmu ini merupakan salah satu tjabang jang amat luas, meliputi segala sifat physika lautan seperti: pasang surut, arus, ombak/gelombang, suhu, ketjerahan air, dan sebagainja.
2) **Oceanografi kimia.** Ilmu ini mempeladjari tentang bermatjam-matjam senjawaan kimia dilaut dan penjebarannja. Analisa jang dilakukan dalam penentuan kadar-kadar beberapa senjawaan seperti: kadar garam, fosfat, nitrat, silikat, gas jang terlarut dalam air (oksigen, CO_2) memberikan bahan-bahan jang penting dalam menentukan gedjala-gedjala pergerakan air dan pengaruhnja terhadap kehidupan dilaut.
3) **Biologi laut.** Ilmu ini mempeladjari kehidupan dilaut baik tumbuhan maupun hewan meliputi djasad-djasad jang hidup didasar (benthos), berenang (nekton) atupun jang hidupnja mengambang atau melajang (plankton) dilaut.

i. koleksi biologi, antara lain ikan dan algae
ii. pembuatan peta isohaline permukaan setjara teratur setiap bulan jang didasarkan pada tjontoh-tjontoh air jang dikumpulkan oleh kapal-kapal niaga K.P.M.

b. Berhubung dengan kesulitan-kesulitan dalam peralatan maupun tenaga maka aktivitas-aktivitas sampai tahun 1963 sangat terbatas. Dalam tahun 1963, dengan bertambah lengkapnja alat peralatan riset, semakin luaslah bidang-bidang sasaran jang akan ditudju, dan beberapa projek pokokpun dapat dihadapi. Projek-projek pokok selama ini ada dua buah, jaitu:
i Projek Pulau Seribu
ii Projek Samudera Indonesia

Projek Pulau Seribu.

Pulau Seribu merupakan serangkaian pulau-pulau karang jang bertebaran di Teluk Djakarta. Karena daerah ini amat banjak mengandung persoalan jang menarik, dan mengingat letaknja jang amat mudah dikundjungi dari L.P.L. maka sedjak tahun 1963 telah didjadikan projek pokok. Diharapkan hasil penelitian didaerah ini akan banjak memberikan sumbangan dalam masalah perikanan terutama dalam menghadapi kebutuhan akan protein hewani penduduk Djakarta jang semakin meningkat itu. Atol didaerah Pulau Pari mendapat perhatian penting karena selain memiliki sifat-sifat jang chas, didaerah ini terdapat banjak agar-agar jang kini sedang dipeladjari sampai dimana kemungkinan-kemungkinannja untuk diusahakan dalam arti ekonomi.

Projek Samudera Indonesia.

Samudera Indonesia merupakan samudera jang paling sedikit dipeladjari selama ini, dan untuk mendjawab tantangan ini maka diadakanlah kerdja sama dalam bentuk internasional, jang diberi nama "International Indonesian Ocean Expedition", atau disingkat I.I.O.E. jang disponsori oleh SCOR (Special Committee for Oceanic Research) dan diikuti oleh 19 negara. Setjara resmi I.I.O.E. dinjatakan mulai 1 September 1959 dan akan berachir pada tanggal 31 Desember 1965. Tanggung djawab atas segi-segi administratif ekspedisi besar ini kemudian dipegang oleh I.O.C. (Inter governmental Oceanic Commission) sedjak tahun 1962.

Sedjak tahun 1960 Pemerintah R.I. telah menjetudjui untuk ikut serta mengambil bagian dalam I.I.O.E., akan tetapi dalam

pelaksanaannja kita baru aktif sedjak pertengahan tahun 1963 setelah dimilikinja kapal Jalanidhi. Selama tahun 1963 telah diadakan 4 cruise ke Samudera Indonesia sebelah barat Sumatera jang seluruhnja meliputi 43 setasiun utama. Tahap berikutnja ialah penelitian dilaut Djawa dan Samudera Indonesia sebelah selatan Djawa jang direntjanakan akan dikundjungi dalam setiap musim, sedikitnja empat kali dalam setahun. Tahap ini dimulai sedjak September 1964 meliputi sebanjak 55 setasiun utama, dimana dikerdjakan observasi-observasi mengenai oceaonografi, biologi dan meteorologi. Perobahan-perobahan musim didaerah ini akan memberikan sumbangan penting, mengingat bahwa studi sematjam ini didaerah tropis sangat kurang.

c. Projek-projek insidentil.

Disamping projek-projek pokok tersebut diatas telah dikerdjakan pula projek-projek jang sifatnja insidentil dan merupakan bantuan lembaga kepada instansi lain.

i. Projek P.L.T.U.

Untuk membuat saluran pembuangan air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (P.L.T.U.). Tandjung Priok telah meminta bantuan L.P.L. dimana telah diadakan survey dalam bidang sedimentasi, oceanografi, dan biologi terutama jang dapat mempengaruhi pembuatan-pembuatan saluran-saluran air dari dan kedalam laut.

ii. Projek Perikani.

Pengalengan ikan di Pulau Laut (Kalimantan Tenggara) oleh Perikani belakangan ini menundjukkan produksi jang menurun. Untuk mentjari latar belakang kemunduran ini L.P.L. membantu mengadakan dua kali survey kedaerah tersebut dalam tahun 1964, baik dengan kapal SAMUDERA maupun JALANIDHI.

iii. Baruna.

Suatu usaha nasional dalam penelitian laut diadakan dalam bulan Mei - Djuli 1964 jang terkenal dengan Operasi Baruna. Ekspedisi ini adalah kerdjasama dengan Djepang jang beroperasi terutama diperairan Indonesia bagian Timur. Praktis seluruh tenaga staf L.P.L. ikut serta mensukseskan operasi tersebut. Dalam ekspedisi ini antara lain dikerdjakan: Oceanografi, Biologi, Meteorologi dan Geologi.

d. Disamping projek-projek jang disebutkan diatas telah diadakan pula kerdjasama dengan lembaga-lembaga lain diluar negeri dengan ikut serta aktif dalam tugas-tugas ekspedisi jang diadakan-diperairan kita dan sekitarnja. Beberapa staf jang diikut-sertakan untuk tugas-tugas tersebut dengan demikian dapat pula memperoleh manfaat jang besar dengan memperoleh perbandingan tata-kerdja jang dilaksanakan oleh para ahli dari luar negeri dimana hasil-hasilnja jang positif jang diperoleh untuk ditrapkan pada kebutuhan-kebutuhan di Indonesia. Beberapa kapal ekspedisi luar negeri jang pernah mengikut sertakan staf L.P.L. antara lain: Te Vega Argo Pioneer (Amerika Serikat), Diamantina (Australia) dan Vityaz (Uni Sovjet).

e. Observasi jang dilakukan di Tandjung Djangkar, Djawa Timur, untuk membantu memberikan data-data jang diperlukan untuk pembangunan suatu projek Angkatan Laut.

L.P.L. telah pula membantu melengkapi data-data jang diperlukan untuk pembangunan air strip (Tuban) jang akan dibuat mendjorok kelaut.

Kedua pekerdjaan ini dilakukan sementara JALANIDHI melakukan Ekspedisi Keliling Djawa II dalam bulan Maret — April 1965.

f. Pada permulaan tahun 1965 Ekspedisi Pulau Seribu dan Ekspedisi Keliling Djawa II diadakan dalam waktu jang bersamaan karena pada masing-masing projek tersebut telah dikedjar oleh musim jang sebentar lagi akan berobah. Hasil sementara dari Ekspedisi Pulau Seribu jang menitik beratkan observasinja di Pulau Pari ialah bahwa didaerah atol itu ditemukan daerah karang mutiara (**Pintada margaretifera**) dalam djumlah jang banjak. Kini masih diselidiki sampai dimana kemungkinan selandjutnja bagi permutiaraan didaerah ini. Disamping itu agar-agar **Euchema** ditemukan dalam djumlah jang sangat banjak sehingga memberikan harapan kemungkinannja diolah untuk kepentingan ekonomi.

4. Pembangunan.

Dengan pertambahan staf ilmiah, penjempurnaan organisasi, dan banjaknja aktivitas jang didjalankan diperlukan pembangunan gedung-gedung dan laboratorium baru.

Pada tahun 1963 telah dibangun:

— Gedung untuk menjimpan alat-alat;

— Laboratorium plankton dan botani;

— Guest-house jang dimaksudkan untuk penginapan tamu-tamu asing dan para anggota staf jang akan mengerdjakan sesuatu pekerdjaan diluar djam kerdja.

Pada tahun 1964 telah dibangun suatu komplek perumahan jang bertingkat jang terdiri dari 21 petak. Selain daripada itu pada tahun itu djuga dibangun laboratorium untuk Bagian Productivity, ruang sidang dan kamar kerdja Kepala Lembaga.

Lampiran V.

LEMBAGA GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN NASIONAL

1. Pendirian Lembaga.

Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional didirikan pada bulan Agustus 1963 dengan Surat Keputusan Menteri Research Nasional No. 14/RN/KPPTS/63.

2. Tugas Lembaga.

Tugas lembaga adalah meliputi pendidikan dan riset. Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional turut serta membantu dalam pendidikan tjalon-tjalon ahli geologi, pertambangan dan teknik perminjakan untuk mengisi kekurangan jang sangat dirasakan akan ahli-ahli dalam bidang tersebut. Setjara berangsur dengan terpenuhinja kebutuhan akan ahli-ahli diatas, maka lembaga akan mendjadi pusat penelitian dengan riset sebagai tugas utama.. Tugas riset ini terutama ialah untuk membantu perkembangan industri mineral Indonesia. Perlu dikemukakan disini bahwa terutama dalam tugas pendidikan, lembaga akan memperoleh bantuan U.N. Special Fund sedjumlah $ 1.243. 300. untuk djangka waktu 5 tahun. Dengan keluarnja Indonesia dari P.B.B. untuk melaksanakan prinsip berdiri diatas kaki sendiri, maka bantuan tersebut ditolak dan segala usaha untuk penjempurnaan lembaga dilakukan sendiri oleh ahli-ahli Indonesia tanpa bantuan asing.

3. Organisasi.

Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional terdiri dari 3 bagian atau division, ialah:

a. Division of Geology;
b. Division of Mining Engineering;
c. Division of Petroleum Engineering.

Lembaga dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 3 orang Asisten Direktur.

Division of Geology terdiri dari 6 seksi dan 6 laboratorium; Division of Mining Engineering terdiri dari 2 seksi dan diperlengkapi dengan 5 buah laboratorium, dan Division of Petroleum Engineering terdiri dari 3 seksi dan 2 laboratorium.

Disamping itu Division of Geology mempunjai satu kampus lapangan dan Division of Mining Engineering suatu experimental mine.

4. Keadaan Staf riset dan Staf administrasi.

Djumlah staf riset tetap untuk Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional hingga kini adalah 6 orang, sedangkan djumlah staf riset dari I.T.B. jang diperbantukan pada Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional adalah 16 orang.

Keadaan staf administrasi adalah sebagai berikut:

Direktur Lembaga	:	Prof. Dr. J.A. Katili;
Ass. Direktur Division of Geology	:	Drs. Soekendar Asikin;
Ass. Direktur Division of Mining Engineering	:	Hadijanto Martosubroto, M.Sc.

Djumlah pegawai administrasi adalah 5 orang dan 4 sopir serta 9 pesuruh. Dalam tahun 1965 diharapkan staf riset tetap lembaga akan bertambah dengan 10 research workers, sehingga banjaknja research workers lembaga seluruhnja pada tahun 1965 ini akan berdjumlah 32 orang.

5. Keadaan beasiswa.

Djumlah mahasiswa jang mendapat beasiswa lembaga adalah 16 orang dan dapat dipastikan bahwa djumlah ini akan mendjadi dua kali lipat, setelah dilakukan seleksi sebaik-baiknja.

6. Keadaan bangunan.

Gedung tata-usaha serta laboratorium sementara dari lembaga jang terletak dikampus I.T.B. telah selesai seluruhnja. Djuga kampus lapangan geologi di Kebumen telah dapat dipakai pada permulaan Djuli '65 untuk melatih ± 50 mahasiswa-mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Dua belas perumahan untuk tenaga-tenaga riset telah selesai dan ditempati para ahli, sedang 10 rumah lagi akan selesai pada tahun ini. Pembangunan laboratorium-laboratorium permanen lembaga di Djl. Sangkuriang — Bandung telah dimulai dan diharapkan laboratorium Petroleum Engineering jang bertingkat tiga akan selesai dibangun tahun 1965 ini.

7. Kelengkapan dan perlengkapan.

Kelengkapan (furniture) gedung tata-usaha, laboratorium serta field camp berangsur-angsur telah selesai. Persoalan jang dihadapi ialah pemesanan research equipment jang belum dapat dibuat di Indonesia seperti seismic truck, X-Ray deffraction, alat-alat untuk laboratorium pertambangan dan teknik perminjakan. Rentjana dan daftar alat-alat tersebut telah ada. Selain dari lab. equipment maka L.G.P.N. sebagai lembaga jang mengadakan field study setjara intensif memerlukan dengan sangat beberapa field cars.

8. Perpustakaan dan publikasi.

Berangsur-angsur perpustakaan lembaga telah mulai disusun. Dalam tahun ini akan keluar 2 publikasi lembaga ialah tentang aktivita riset lembaga dan suatu "scientific communication", Brosur-brosur tentang penerangan lembaga telah dikeluarkan. Ahli-ahli dari lembaga telah banjak jang mempublisir hasil-hasil riset diluar negeri seperti di USA, Djepang, Negeri Belanda, Italia dan lain-lain.

9. Kegiatan Riset.

Basic philisophy research, Dasa (10) program riset serta rentjana lima tahun riset lembaga (1965 - 1969) dapat dilihat dari sub-lampiran I. Projek-projek riset untuk tahun 1964 bersama progress report dapat dilihat dari sub-lampiran II, sedangkan projek-projek riset untuk tahun 1965 dapat dilihat dari sub-lampiran III.

10. Hubungan internasional.

Hubungan internasional dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Sovjet, Akademi Ilmu Pengetahuan Tjekoslowakia, Akademi Ilmu Pengetahuan Rumania, Akademi Ilmu Pengetahuan R.R.T., dan hubungan-hubungan pribadi dengan ahli-ahli dari Amerika Serikat, Negeri Belanda, Djepang, Italia, Djerman, Perantjis dan lain-lain tetap dipeliharaa dengan baik. Beberapa top-experts telah mengundjungi lembaga dan berkenan memberikan tjeramah-tjeramah dan mengadakan tukar fikiran, antaranja dengan Prof. Hisashi Kuno, President of the Intern. Soc. of Volcanology, Prof. De Waard dari Syracuse University, Prof. Gorskov dari Uni Sovjet, Dr. Tazieff dari Belgia, Dr. Marinelli dari Italia, Dr. Maska dari Tjeko dan ahli-ahli geologi R.R.T. jang menjertai Menteri Wu Heng beberapa waktu jang lalu.

Beberapa universitas Amerika djuga telah menawarkan kerdjasama ilmiah antaranja dari Dartmouth College, California Institute of Technology, Iowa State University, Penn State University dan lain-lain.

11. Kesimpulan-kesimpulan dan harapan-harapan.

Jang sangat dirasakan kekurangan dalam melakukan riset jang terspesialisasi adalah tidak sempurnanja peralatan-peralatan modern. Jang dapat dibuat di Indonesia diusahakan sedapat-dapatnja untuk dipakai, akan tetapi alat-alat riset seperti electro micoscope, alat X-Ray deffraction dan lain-lain harus dipesan dari luar negeri.

Staf riset jang tjakap sukar didapat untuk lembaga dan biasanja memilih lapangan pekerdjaan jang dapat penghasilan besar, dan hal ini pun demikian untuk tenaga-tenaga administrasi. Tenaga administrasi jang dapat berbahasa asing serta tjakap dalam pekerdjaannja pada umumnja menuntut pembajaran jang tinggi. Perumahan jang tjukup untuk staf riset serta pegawai dapat membantu dalam menghadapi masalah pelik ini. Keadaan keuangan untuk riset meskipun djauh belum mentjukupi dapat dikatakan baik, hanja kesukaran-kesukaran dirasakan karena lambatnja uang djuga.

Keadaan mahasiswa L.G.P.N. dapat diperbaiki djikalau disamping beasiswa, mereka pun ditempatkan dalam asrama-asrama.

Kendaraan belum mentjukupi, bukan sadja untuk staf riset dan pegawai-pegawai jang sedang meningkat banjaknja, tetapi djuga untuk field-work.

Mengenai pekerdjaan riset sendiri dapat dikatakan bahwa para staf melakukannja dengan penuh enthousiasme. Projek-projek riset pada umumnja diarahkan kepada pembangunan, dengan prinsip berdiri diatas kaki sendiri, meskipun basic research djuga dilakukan.

Kerdjasama dengan instansi-instansi lain sedang dilakukan, sehingga lembaga dapat pula menolong instansi-instansi ini dalam memperkembangkan risetnja.

Djuga pada ahli-ahli lembaga terlebih-lebih jang masih muda harus ditanam "research mindedness".

Diharapkan dalam waktu dekat, lembaga telah dapat mengumumkan hasil risetnja dalam suatu publikasi ilmiah chusus.

Pedoman kerdja dari ahli L.G.P.N. adalah berdiri diatas kaki sendiri terlebih-lebih lagi karena pekerdjaan-pekerdjaan disini

menjangkut pentjarian dari inventarisasi kekajaan mineral Indonesia.

Bantuan teknik negara-negara sahabat baru akan diterima, setelah ahli-ahli kita mengadakan penelitian pendahuluan dan penindjauan semasak-masaknja apakah bantuan ini perlu atau tidak.

Sub-lampiran I.

PROGRAM KERDJA.

1. Tugas:

Walaupun pada mulanja dimaksudkan, supaja Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional mempunjai tugas chusus dalam bidang riset, namun kemudian mendjadi djelas bahwa usaha-usaha riset pada chususnja dan mengembangkan industri mineral pada umumnja tak dapat dilakukan dengan baik tanpa melipat gandakan sardjana-sardjana dalam bidang geologi, pertambangan dan teknik perminjakan, jang sekarang ada. Oleh sebab itu dirasa perlu untuk mengikut sertakan Lembaga Geologi dan Pertambangan dalam usaha-usaha pendidikan tenaga-tenaga tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk lembaga digariskan 2 tugas:

a. Tugas pendidikan,
b. Tugas riset.

2. Tugas pendidikan:

Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional ikut serta dalam pendidikan tjalon-tjalon ahli geologi ,pertambangan dan teknik perminjakan untuk membantu mengisi kekurangan-kekurangan jang menjolok akan ahli-ahli dalam bidang-bidang tersebut. Hal ini berarti, bahwa djika dikemudian hari kekurangan-kekurangan ini dapat diatasi oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi jang kini sedang berkembang, maka tugas pendidikan ini akan ditinggalkan oleh Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional dan research akan mendjadi tugas utama.

Untuk dapat melaksanakan tugas pendidikan ini, maka diadakan kerdjasama jang erat dengan Institut Teknologi Bandung. Telah tertjapai persetudjuan antara pihak pihak jang bersangkutan, bahwa untuk sementara waktu penjelenggaraan pekerdjaan lembaga dilakukan dibawah pimpinan I.T.B. dengan Dekan Departemen Teknologi Mineral I.T.B. se-

bagai Direktur lembaga. Dalam pada itu fasilitas-fasilitas lembaga dapat digunakan oleh I.T.B. untuk memperluas pendidikan dalam bidang geologi, pertambangan dan teknik perminjakan. Dengan djalan demikian direntjanakan untuk meningkatkan djumlah penerimaan mahasiswa dalam bidang teknologi mineral mendjadi dalam tahun 1964 : 125, dalam tahun 1965: 145 dan dalam tahun 1966: 165, dalam tahun 1967: 190, dalam tahun 1968: 210 dan dalam tahun 1969: 210.

3. Tugas riset:

Tugas Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional dalam bidang riset ialah dengan usaha-usahanja dalam bidang jang bersangkutan membantu perkembangan industri mineral di Indonesia. Dalam pada itu maka untuk menghindarkan „duplication of efforts" dipakai sebagai pedoman bahwa penelitian-penelitian harus „ahead" atau merupakan komplemen dari penelitian atau survey oleh instansi-instansi lain dalam geologi, pertambangan dan teknik perminjakan. Berdasarkan „basic philosophy" ini telah disusun: „Dasa Program Riset Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional".

4. Dasa (Sepuluh) Program riset (D.P.R.) Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional.

Untuk dapat melakukan penilikan dengan maksud mempertinggi produksi chususnja dan Pembangunan Semesta Berentjana umumnja, serta dapat mengerdjakan setjara teratur, sistematis dan terkoordinasi maka maksud dan tudjuan penelitian-penelitian harus digariskan dengan djelas sebelum menilai projek-projek riset jang diadjukan.

Penggarisan ini telah dilakukan oleh Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional dan dikenal Dasa (Sepuluh) Program Riset (D.P.R.) sebagaimana terkera dibawah ini:

1. Menemukan sumber-sumber bahan bakar baru seperti minjak bumi, gasbumi dan batubara.
2. Menemukan sumber-sumber mineral baru logam dan bukan logam.
3. Menemukan tempat-tempat untuk bendungan, irigasi, tanah pertanian, pelabuhan dan lain-lain.
4. Projek-projek hidrologi seperti penemuan sumber-sumber air biru untuk diminum, industri, pertanian dan lain-lain.
5. Menemukakan tjara-tjara baru untuk pengamatan dan peramalan bentjana-bentjana alam seperti gempabumi, gunungapi demi keselamatan penduduk.

6. Menemukan metode-metode penggalian mineral Indonesia jang hingga kini sedang dan belum diusahakan, sesuai dengan keadaan setempat dengan maksud mempertinggi produksi.
7. Menemukan metode-metode pengolahan mineral Indonesia jang hingga kini sedang dan belum diusahakan, sesuai dengan keadaan setempat dengan maksud mempertinggi produksi.
8. Eksplorasi serta evaluasi data-data minjak dan gasbumi Indonesia untuk menetapkan djumlah tjadangan serta tjara-tjara produksi jang seefisien-efisiennja.
9. Menjelidiki persoalan-persoalan produksi minjak dan gasbumi seperti pengangkutan, reparasi sumur-sumur minjak, secondery recovery dengan maksud menaikkan produksi.
10. Melakukan penelitian dasar dalam bidang-bidang geologi, pertambangan dan teknik perminjakan.

5. **Projek-projek penelitian lima tahun (1965-1969)** jang ditjantumkan dibawah ini didasarkan pada:
1. Dasa Program Riset Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional.
2. Scientific manpower jang ada pada L.G.P.N.
3. Keadaan peralatan jang ada dan jang akan tiba.
4. Keadaan laboratorium-laboratorium sementara dan permanen.

(a) BAGIAN GEOLOGI LEMBAGA GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN NASIONAL (1965 - 1969).

1. Tahun 1956-1966: Coastal acretion di Indonesia. Diperlukan bagi perentjanaan pelabuhan-pelabuhan baru, pemeliharaan pelabuhan-pelabuhan lama dan peramalan pemindahan muara-muara sungai. (3 dalam D.P.R.).
2. Tahun 1965-1966: Penelitian peramalan gempabumi dan peledakan gunungapi demi keselamatan manusia didaerah jang ada penduduknja (5 D.P.R.).
3. Tahun 1965 - 1966: Penelitian batuan sedimen pulau Djawa dan Sumatera.
   Pengetahuan mendalam batuan sedimen adalah sjarat mutlak untuk eksplorasi minjakbumi, batubara dan bidji-bidji sedimentair. (1.2. dan 10 dalam D.P.R.).

4. Tahun 1965 - 1966: Penelitian propinsi airtanah pulau Djawa. (4 dalam D.P.R.).
5. Tahun 1965 - 1966: Penelitian stratigrafi Mollusca (10 dalam D.P.R.).
6. Tahun 1965 - 1967: Penjusunan Peta Geotektonik Indonesia (1,2 dan 10 dalam D.P.R.).
7. Tahun 1965 - 1967: Penjusunan peta metallogen Indonesia, untuk peramalan endapan-endapan mineral jang mungkin akan ditemukan (1 dan 2 dalam D.P.R.).
8. Tahun 1965 - 1967: Penelitian penjebaran light-weight building material (2 dalam D.P.R.).
9. Tahun 1965 - 1968: Penelitian dan klasifikasi tanah longsor di Indonesia (daerah tropika). 3 dalam D.P.R.).
10. Tahun 1965 - 1969: Penelitian proses pelapukan tropika terutama berhubungan dengan teknik perpetaan, endapan mineral dan lain-lain (2 dan 10 dalam D.P.R.).
11. Tahun 1965 - 1969: Penelitian minerografika mineral bidjih Indonesia untuk indentifikasi dan determinasi kwantitatif (3 dan 10 dalam D.P.R.).
12. Tahun 1965 - 1969: Penentuan standar interpretasi foto-foto udara pada geologi Indonesia. Sjarat mutlak untuk aerial survey Indonesia (1, 2, 3, 4 dan 10 dalam D.P.R.).
13. Tahun 1965 - 1969: Penelitian batubara Indonesia klasifikasinja. (1 dalam D.P.R.).
14. Tahun 1965-1969: Penelitian tjekungan minjak dan menjusun petanja seluruh Indonesia (1 dalam D.P.R.).
15. Tahun 1965 - 1969: Penelitian metode-metode baru dalam perpetaan geologi daerah tropika (1, 2 dan 10 dalam D.P.R.).

(b) BAGIAN PERTAMBANGAN LEMBAGA GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN NASIONAL (1965 - 1969).

1. **Pertambangan.** (DASA PROGRAM RISET 6).

a. Penggunaan bahan peledak TNT: Bahan peledak ini diprodusir oleh Perindustrian Angkatan Darat. Pemakaiannja masih terbatas sekali hal mana terutama disebabkan oleh kurangnja pengalaman pemakaiannja disamping adanja kekurangan-kekurangan dalam bahan itu sendiri. Penelitian jang akan dilakukan dimulai dengan penggunaan untuk bantuan andesit kemudian diteruskan untuk batuan kapur. Hasil-hasilnja diha-

rapkan menjebabkan perluasan pasaran bahan peledak sendiri, penghematan impor bahan peledak, dan peningkatan produksi batu andesit sebagai bahan penting untuk pembuatan beton, batu kapur untuk bahan bangunan dan untuk pembuatan semen Portland.

Penelitian untuk jang tersebut dilakukan dalam dua tahun pertama. Setelah itu diperluas kepenggunaan-penggunaan untuk berbagai pertambangan (emas dan logam-logam lain, batubara, aspal Buton) dan untuk pekerdjaan-pekerdjaan pembangunan seperti pembukaan djalan baru, terowongan-terowongan bendungan dan sebagainja.

b. Pertambangan marmer: Penambangan marmer guna bahan bangunan dipikirkan untuk dapat dilakukan dengan lebih intensif dengan memakai bahan peledak. Ditjari tjara-tjara peledakan sehingga produksi lebih tjepat dan potongan marmer jang dihasilkan dapat berukuran besar. Penelitian dalam tahun-tahun 1965 dan 1966.

c. Sifat Batuan dan Bidji: Mulai tahun 1965 dilakukan penelitian terhadap bermatjam-matjam batuan dan bidji-bidji, jaitu dilakukan penentuan-penentuan jang luas mengenai sifat physik dan kimia dari batuan dan bidji. Data dari penelitian demikian akan merupakan dasar daripada berbagai penentuan-penentuan diantaranja:

— kekuatan lapisan batuan; diperlukan misalnja untuk penentuan sistim suppert terowongan.
— tjara-tjara penambangan dan peralatan-peralatan jang perlu.
— tjara-tjara pengolahan dan processing selandjutnja.

Penelitian ini bersifat djangka pandjang dan dimulai dengan batuan-batuan dan bidji-bidji jang kini sedang dieksploitir.

d. Penentuan Tjadangan Bidji: Dikeenal dua matjam tjara menentukan tjadangan bidji jang berbeda dalam hal tingkatan pengaruh data geologi terhadap penentuan satu tjadangan. Tjara pertama menghasilkan tiga kelas tjadangan jang satu dengan lainnja berhubungan setjara relatif, sedang tjara kedua menimbulkan kelas-kelas tjadangan jang lebih banjak jang saling berhubungan setjara multiplikasi.

Tjara jang mana jang sebaiknja untuk menentukan berbagai kekajaan bumi Indonesia diselidiki dalam penelitian ini jang dimulai pada tahun 1965 dan bersifat djangka pandjang.

e. Pola Peledakan: Untuk tiap matjam batuan diperlukan penjelidikan mengenai tjara meledaknja. Ditentukan letak-le-

tak lobang bor jang diisi bahan peledak, bentuk dan dalamnja lobang, djumlah dan matjam bahan peledak, urutan peledakan dan sebagainja guna mendapatkan efficiency sebesar-besarnja.

Dilakukan terhadap batu bara, batuan bidji emas Tjikotok dan batu aspal Buton dalam djangka waktu 1966 - 1968.

f. Kaju Tambang: Penelitian jang dimulai tahun 1967, akan mengenai penggunaan beberapa matjam kaju sebagai underground timber, konstruksi terbaik untuk kaju-kaju itu, kemungkinan pemakaian untuk roofbolting, kemungkinan-kemungkinan pengawetan.

g. Gunung Kelud: Penelitian mengenai tjara pengeluaran air kawah jang lain daripada tjara terowongan jang telah dipakai. Dimulai pada tahun 1967 penelitian ini diharapkan memberi hasil untuk usaha-usaha pengurangan bahaja bentjana alam.

h. Ventilasi Tambang: Penelitian mengenai pengaruh batuan dan bidjih serta sifat-sifat endapan terhadap keadaan tempat kerdja dalam tambang dan akibat-akibat selandjutnja terhadap prestasi kerdja buruh dan terhadap peralatan. Persoalan-persoalan akan mengenai temperatur, kelembaban, debu, gas-gas tambang dan sebagainja. Ditjarikan standard-standard kondisi tambang jang dibutuhkan untuk mendapat prestasi maksimum. Dimulai tahun 1967.

i. Penambahan Belerang: Mentjari tjara-tjara jang lebih produktif untuk penggalian endapan-endapan belerang dikawah gunung berapi. Menjelidiki pula soal-soal pengangkutan dari endapan, terutama dalam hal corrosi dari peralatan. Dimulai tahun 1968.

2. **Pengolahan Bahan Galian** (DASA PROGRAM RISET 7).

a. Bidji Mangan: Mengusahakan tjara-tjara untuk meninggikan kadar bidji mangan untuk keperluan ekspor. Diteruskan dengan penelitian mengenai tjara menghasilkan beberapa matjam bahan dari bidji tersebut seperti oksida mangan untuk bahan batu batere, untuk bahan-bahan kimia, paduan ferro-mangan jang diperlukan dalam pembuatan badja, dan lain-lain. Penelitian dimulai tahun 1965 dan diharapkan selesai dalam tahun 1968.

b. Bidji Belerang: Mengenai persoalan peninggian kadar belerang jang hingga kini dapat dihasilkan oleh perusahaan Talaga Bodas. Peninggian kadar mengakibatkan perluasan

pasaran jang sangat besar. Penelitian dilakukan dalam tahun 1965 - 1966.

c. Bidji Jorosit: Bidji ini belum dieksploitir karena merupakan bidji specific Indonesia dan tjara pengolahannja belum tjukup diselidiki. Hasil pengolahannja jang mungkin diantaranja dalam sulfat, bahan pupuk kalium dan fosfat, serta oksida besi untuk bahan tjat. Penelitian dalam tahun 1966-1967.

d. Jig Timah: Diperusahaan-perusahaan timah putih kini dipakai berbagai matjam jig untuk menghasilkan bidji timah. Akan diselidiki kemungkinan penjederhanaan sehingga dikurangi matjam-matjamnja alat tersebut. Hal mana dapat memberi penjederhanaan dalam produksi serta pemeliharaan alat ini. Diharapkan bahwa penelitian selesai dalam tahun 1965.

e. Cyclone Timah: Dalam menghasilkan konsentrat timah, alat cyclone dipakai sebagai apa jang disebut classifier jaitu pemisah sebagian dari air jang ada dalam lumpur (pulp) bidji timah. Dipikirkan untuk memakai cyclone djustru untuk memisahkan mineral timah putih dari kotoran-kotoran dalam bidji. Apabila berhasil akan memberikan penjederhanaan dan pengurangan biaja dari proses pengolahan jang tidak sedikit. Penelitian dalam tahun-tahun 1966 - 1968.

f. Bidji Fosfat: Diselidiki kemungkinan peninggian kadar fosfat Indonesia, untuk dapat dipakai sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk fosfat atau langsung sebagai pupuk alam jang lebih baik. Peninggian kadar jang dimaksud adalah dengan tjara-tjara mineral dressing. Penelitian dalam tahun-tahun 1966 dan 1967.

g. Bidji Timah Hitam dan Seng: Untuk bidji-bidji dari tambang emas Tjikotok diselidiki flowsheet (urutan pengolahan) jang sebaiknja berhubungan dengan penambahan pengolahan bidji Pb-Zn dalam pengolahan untuk emas dan perak. Hasil pengolahan dapat berbentuk konsentrat Pb dan konsentrat Zn atau konsentrat tjampuran Pb-Zn. Penjelidikan diteruskan kepengolahan konsentrat Pb dan konsentrat Zn, sedangkan pengolahan konsentrat tjampuran dengan tjara jang baru ditemukan akan disalurkan penelitiannja ke Lembaga Metallurgi kan akan disalurkan penelitiannja ke Lembaga Metalurgi milihan dari proses pengolahan konsentrat jang sebaiknja. Penelitian berlangsung dalam tahun-tahun 1966 - 1969.
Nasional. Bersama Lembaga Metalurgi akan ditindjau soal pe-
Muria dan dapat merupakan bahan baku untuk pembuatan pupuk Kalium. Akan diselidiki kemungkinan pemisahan mineral

Kalium dari mineral-mineral lainnja dan diteruskan kepenelitian mengenai pengolahan selandjutnja.

Penjelidikan dalam tahun-tahun 1967 - 1968.

i. Tailing Timah: Dalam pengolahan konsentrasi bidji timah didapat tailing jang masih mineral timah putih dan mineral-mineral lain jang berharga. Diselidiki kemungkinan pengambilan sisa mineral timah itu serta mineral-mineral berharga dari tailing dan kemudian diteruskan kepenjelidikan dari pengolahan mineral-mineral berharga untuk mendapatkan diantaranja logam wolfram, thorium, dan lain-lain. Penjelidikan dimulai tahun 1967.

j. Bidji besi Laterit: Bidji besi type ini jang diketemukan dalam djumlah besar di Indonesia pada umumnja mengandung kadar chrome dan nikel jang tjukup tinggi sehingga tidak dapat dioiah dengan tjara-tjara jang telah diketahui. Akan diselidiki kemungkinan pemisahan logam-logam tersebut dalam penelitian ini jang akan dimulai pada tahun 1968.

k. Refractories: Sedjalan dengan perkembangan industri metallurgi maka diperlukan penjelidikan jang mendalam mengenai kemungkinan pembuatan bahan-bahan tahan api guna keperluan industri tersebut, dari bahan-bahan baku jang terdapat di Indonesia. Penelitian dimulai pada tahun 1968 dan akan mengarahkan perhatian mula-mula kepada kebutuhan bahan api untuk pabrik badja Tjilegon dan pengetjoran badja jang ada di Djakarta dan Surabaja.

l. Flix: Dalam peleburan berbagai bidji dan logam dibutuhkan bermatjam-matjam bahan tambahan jang disebut flux dan jang mempunjai fungsi berlain-lainan, misalnja mentjarikan kotoran leburan (slag), mengikat dan memisahkan beberapa bagian atau unsur jang dikehendaki, dan sebagainja. Akan diselidiki kemungkinan pemakaian bahan-bahan dalam negeri sebagai flux.

Dimulai pada tahun 1969.

(c) BAGIAN TEKNIK PERMINJAKAN LEMBAGA GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN NASIONAL (1965 - 1969).

1. Inventarisasi lapangan-lapangan minjak (8 dalam D.P.R.).

Keterangan-keterangan mengenai djumlah produksi, keadaan tekanan, sifat-sifat batuan dan lain-lain jang bersangkutan

dari semua lapangan minjak dikumpulkan, untuk kemudian dipetakan. Dengan ini dapat ditentukan potensi minjak nasional (1965 - 1969).

2. **Core dan fluid analysis** (8 dalam D.P.R.).

Mengadakan core fluid analysis dari batuan-batuan reservoir dan benda-benda hydrocarbon untuk menentukan characteristic dari lapangan-lapangan dan minjaknja. Keterangan ini dipergunakan untuk mentjari tjara-tjara jang tepat untuk produksi hingga didapat hasil jang lebih tinggi. Disamping itu keterangan-keterangan ini dapat dipakai untuk menentukan djumlah tjadangan minjak nasional (1965 — djangka pandjang).

3. **Explorasi dan Evaluasi daerah-daerah prospektif** (8 dalam D.P.R.).

Hampir disemua pulau di Indonesia terdapat minjak. Penentuan tempat-tempat minjak tersebut memerlukan penelitian geologis dan geofisis. Dari keterangan ini dilakukan evaluasi untuk kemungkinan exploitasi dari lapangan tersebut.

Pekerdjaan ini bersifat mentjari kekajaan jang masih terpendam untuk dipersembahkan kepada masjarakat. Kepentingan penjelidikan ini adalah untuk hari depan, disamping memberikan sematjam garansi bagi kelandjutan industri perminjakan nasional. (1965 — djangka pandjang).

4. **Explorasi dan evaluasi daerah-daerah gas dalam jang prospektif** (8 dalam D.P.R.).

Achir-achir ini pemakaian gas alam sebagai sumber tenaga maupun bahan baku makin meningkat. Penemuan dan penilaian sumber-sumber gas alam di Indonesia akan mempertinggi kekajaan mineral nasional (1965 — djangka pandjang).

5. **Reservoir Study untuk lapangan-lapangan jang ditinggalkan untuk rehabilisasi** (9 dalam D.P.R.).

Sebagaian besar dari lapangan-lapangan minjak di Djawa, Ceram, Irian Barat dan sedikit di Sumatera dan tempat-tempat lainnja mengalami pengrusakan akibat Perang Dunia ke-II dan aksi militer Belanda. Untuk menghidupkan kembali produksi perlu diadakan penjelidikan reservoir jang mendalam. Dengan ini dapatlah direhabilisir sumber-sumber tadi untuk meningkatkan produksi minjak nasional (1965-1967).

6. **Oil Well Stimulation** (9 dalam D.P.R.).

Sebagian besar dari minjak Indonesia adalah paraffine base seringkali paraffine tersebut karena menurunnja tekanan da-

lam proses produksi membeku, baik dipipa-pipa maupun direservoir. Meneliti tjara-tjara preventif maupun menghilangkan endapan-endapan paraffine tersebut bila sudah terdjadi akan meningkatkan produksi nasional. Disamping itu soal pengendapan kapur dan pasir direservoir, maupun dalam pipa-pipa produksi menghambat kelantjaran produksi. Penelitian mengenai hal ini akan memungkinkan didapatnja tjara jang tepat sehingga produksi nasional dapat ditingkatkan. Tjara-tjara Well Stimulation jang lain adalah menghambat atau mengurangi bertambah tingginja produksi air jang diakibatkan oleh water coning atau water fingering, dapat memperketjil ongkos exploitasi dan meninggikan produksi (1965 — djangka pandjang).

7. **Oil-Water Emulsion** (9 dalam D.P.R.).

Dengan ikutnja air dalam produksi minjak, kerapkali terdjadi emulsi antara air dan minjak tersebut. Air jang sangat korosip itu harus dipisahkan sebelum minjak disuling. Penelitian akan tjara-tjara memetjahkan emulsi tersebut setjara efisien akan mengurangi biaja maintenance dari alat-alat produksi. (1965 - 1966).

8. **Transport Viscous Crude** (9 dalam D.P.R.).

Selain Sumatera Utara, pada umumnja minjak Indonesia termasuk dalam kategori minjak jang berat. Viscosity jang tinggi atjapkali menimbulkan soal pengangkutan jang chusus, seperti di Djambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tenggara dan di Djawa Tengah. Pemetjahan soal ini merupakan soal mutlak untuk memungkinkan menjalurkan minjak-minjak tersebut kepasaran. Suatu metode jang efisien akan banjak mengurangi biaja exploitasi. (1965 - djangka pandjang).

9. **Seconday Recovery** (9 dalam D.P.R.).

Pada tjara memprodusir seperti apa jang disebut Primary Production dimana pada saat ini taraf produksi minjak nasional adalah pada taraf primary production, kira-kira 30-35 persen sadja dari total minjak jang tersimpan direservoir dapat diprodusir. Besok atau lusa lapangan-lapangan minjak Indonesia harus diprodusir dengan tjara Secondary Recovery ini. Dengan tjara mana lebih dari 60 persen dari sisa minjak tersebut dapat dilakukan dari reservoir.

Penelitian ini merupakan projek nasional jang besar, mengingat masih banjak minjak jang dapat diprodusir dengan tjara kedua ini. (1966 - djangka pandjang).

10. Penjelidikan tekanan kapiler dan gaja-gaja lain jang menahan minjak direservoir (9 D.P.R.).

Reservoir adalah satu tempat penjimpanan minjak, jang lain sifatnja dari satu bak beton atau besi, dalam sifatnja jang berinter-reaksi dengan fluida jang ada didalamnja. Inter-reaksi ini, salah satunja tekanan kapiler, lebih bersifat menahan minjak pada tempatnja. Pengetahuan jang mendalam mengenai soal inter-reaksi ini dapat menolong untuk melepaskan minjak dari ikatan batuan ini, hingga produksi dapat ditingkatkan. Gedjala ini terdapat pada semua reservoir. Soal ini karenanja merupakan soal nasional jang urgent. (1966 - 1967).

11. Filtrate lost (8 D.P.R.).

Sebagian besar reservoir-reservoir di Indonesia ini terpetjah-petjah mendjadi beberapa bagian oleh adanja fault. Patokan tersebut merupakan tempat hilangnja lumpur bor waktu dilakukan drilling. Suatu tjara jang baik untuk menutup rekahan-rekahan tersebut akan banjak mengurangi biaja pemboran. (1965).

12. Persoalan-persoalan logging (8 D.P.R.).

Penilaian sifat-sifat formasi dengan tjara logging berdasarkan response atau radioaktif jang dibebankan padanja. Mengingat keadaan batuan itu adalah anisotropi dan tidak homogeen, disamping jang satu tidak identik dengan jang lain, maka terhadap hasil-hasil pengamatan perlu dilakukan koreksi-koreksi. Koreksi jang tepat harus diteliti. Chusus untuk lapangan-lapangan Indonesia, jang sudah tentu tidak akan sama sifatnja dengan koreksi-koreksi dimana alat tersebut dikaliber. (1965 - djangka pandjang).

13. Pemakaian hasil-hasil dalam negeri untuk perminjakan (8 dan 9 D.P.R.).

Dalam proses kegiatan Teknik Perminjakan, banjak material-material jang dipakai, jang selama ini diimpor. Meneliti kemungkinan pemakaian material jang ada didalam negeri untuk ini, seperti bentonite, belerang dan lain-lainnja akan mengurangi biaja impor jang harus dikeluarkan oleh Indonesia (1965 - djangka padjang).

14. Conservation of Energy (8 D.P.R.).

Untuk dapat memprodusir sebanjak-banjaknja minjak jang tersimpan direservoir, haruslah diadakan pengawasan jang chusus mengenai bagaimana tjaranja minjak tersebut diprodusir. Tjara jang terentu akan meningkatkan hasil untuk

djangka waktu dekat, tapi keseluruhan djumlah jang diprodusir untuk djangka waktu lama diperketjil, disamping sisa jang tretinggal mendjadi tinggi. Tjara-tjara ini harus dihindarkan.

Pengawasan harus dilakukan. Penelitian mengenai dasar dari pengawasan ini merupakan hal jang esensiil untuk mendjaga penghamburan dari kekajaan nasional. (1965 - 1966).

15. Pemikiran Hukum Perminjakan (8 dan 9 D.P.R.).

Sedjalan dengan pemikiran pada XIV, maka hukum Perminjakan jang progresif perlu untuk mendjamin terlaksananja pokok pemikiran bahwa minjak dan kekajaan alam nasional adalah hadjat orang banjak. Pemikiran ini selain memerlukan segi hukum sebagai hukum djuga memerlukan segi teknis perminjakan dilihat dari segi kontrole dan penilaian terhadap tindakan-tindakan kegiatan jang dapat dianggap menjimpang dari hukum tersebut (1965-1966).

Sub Lampiran II.

PROJEK-PROJEK RISET TAHUN 1965 LEMBAGA GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN NASIONAL.

No.	Nama Projek	Pemimpin Projek	Keterangan
1.	Penelitian peramalan kegiatan gunung berapi dan gempabumi di Indonesia	Drs. M.T. Zen	Penelitian dan penjusunan data-data phase dan frequency kegiatan gunung-gunung berapi dan gedjala-gedjala gempabumi. Data-data ini dapat didjadikan bahan analisa tentang peramalan kegiatan gunung berapi dan gempabumi didaerah jang padat penduduknja.
2.	Goastal Acretion di Indonesia	Drs. H.D. Tjia	Penelitian tentang pertumbuhan pantai, jang diperlukan bagi perentjanaan pelabuhan-pelabuhan baru, pemeliharaan pelabuhan lama dan pemindahan muara-muara sungai.
3.	Penelitian propinsi air tanah di Pulau	Dr. Sampurno	Penting untuk mengetahui penjebaran air tanah terlebih-lebih didaerah-daerah jang kekurangan air permukaan.
4.	Penelitian Stratigrafi Mollusca	Drs. Soejono Martodjojo, M.Sc.	Pembagian lapisan-lapisan dan penentuan umur lapisan dengan pertolongan mollusca.

PROGRESS REPORT I PROJEK-PROJEK PENELITIAN GEOLOGI UNTUK PHASE AGUSTUS 1964 S/D DJANUARI 1965 LEMBAGA GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN NASIONAL.

I. Kegiatan penelitian-penelitian ilmiah dalam phase Agustus 1964 s/d Djanuari 1965 atas biaja Departemen Urusan Research Nasional jang disalurkan Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional meliputi:

1. pekerdjaan lapangan;
2. pengumpulan data-data dari publikasi-publikasi dan arsip-arsip lama di perpustaan-perpustakaan berbagai instansi pemerintah;
3. pekerdjaan dan penelitian laboratorium.

II. Kegiatan-kegiatan lapangan meliputi:

1. untuk projek penelitian **„peramalan kegiatan gunung berapi dan gempabumi di Indonesia"** dibawah pimpinan Drs. M. T. Zen telah dilakukan pekerdjaan lapangan pendahuluan pada bulan-bulan Agustus dan September 1964, untuk menentukan „Weak Zones", „Zones of fracture dan lineaments", didaerah Ungaran dan Merapi Djawa Tengah;
2. untuk projek penelitian **„Coastal acretion"** dibawah pimpinan Drs. H. D. Tjia, penindjauan kedaerah sekitar muara Tjimanuk dan Teluk Tjiasem pantai utara Djawa Barat;
3. untuk projek penelitian **„Provinsi air tanah di Pulau Djawa"** dibawah pimpinan Dr. Sampurno; pengamatan air didaerah Pameungpeuk, Djawa Barat dan daerah Madiun jang meliputi daerah pegunungan Selatan Djawa Timur.

III. Ichtiar hasil-hasil sementara:

1. Penelitian Peramalan kegiatan Gunung berapi dan gempabumi di Indonesia
   Peneliti : Drs. M. T. Zen.

Dari data-data jang telah ada dan dihimpun mengenai phase dan frequency dari kegiatan gunung-gunung berapi di

Indonesia diantaranja Merapi — Semeru dan Krakatau, ternjata mereka memperlihatkan frequency jang tinggi. Dengan statistik dan „probability theory" akan ditjoba mendapatkan suatu „mathematical regularity" dari data-data tersebut diatas.

Djuga sedang dan masih terus dilandjutkan penjusunan data-data mengenai gedjala-gedjala gempa di Pulau Djawa, gempa jang menjertai kegiatan gunung Agung di Bali pada tahun 1963 dan gempa jang terdjadi di Sumatera.

Kesimpulan jang penting selama dilakukan pengumpulan dan pengolahan data-data diatas ialah bahwasanja kebanjakan laporan-laporan jang ada ternjata tidak memberikan fakta-fakta jang teliti tentang apa jang dilihat. Pada musim kemarau tahun 1965 akan dilandjutkan dengan kegiatan-kegiatan lapangan jang lebih intensif lagi terutama di Pulau Bali.

2. Penelitian „Coastal Acretion"
   Peneliti: Drs. H. D. Tjia
   Pembantu-pembantu: 1. Dr. R. Soeria Atamadja
   2. Drs. Soekendar.

Telah dibuat inventarisasi dari keterangan tentang djumlah acretion dan abrasion dari pantai-pantai Indonesia dari peta-peta dan arsip-arsip dari Direktorat Geologi dan Direktorat Topografi A.D. Penindjauan selama 5 hari jang dilakukan didaerah sekitar muara Tjimanuk dan Teluk Tjiasem dimaksudkan untuk melengkapkan data-data mengenai „off-shore conditions", prevaiting sea currents and winds dan sebagainja.

Penelitian masih dilakukan terus.

3. Penelitian „Provinsi air tanah di Pulau Djawa"
   Peneliti: Dr. Sampurno.

Penjebaran air tanah didaerah Pameungpeuk dapat disimpulkan sebagai berikut: dari daerah pegunungan, jang terdiri dari endapan tersier, sampai kepantai, jang terdiri dari endapan allubial, dialiri oleh sungai-sungai besar dan ketjil, dengan air asin dibagian muara-muaranja. Djadi dibagian pegunungan tersier terdapat air tawar, dalam endapan pasir pantai kebanjakan airnja sudah asin dan hanja beberapa jang masih tawar.

Penjebaran air tanah di Madiun:

Sungai-sungai didaerah ini bersumber dari pegunungan selatan Djawa Timur jang terdiri dari endapan-endapan tersier,

dan dari kompleks gunung-gunung Lawi dan Djobolarangan. Sebagai dari sungai-sungai ini mengalir kelautan Indonesia dan sebagian lagi mengairi dataran rendah Ponorogo-Madiun. Didataran rendah Ponorogo-Madiun, permukaan air tanahnja dalam, sehingga dibeberapa tempat menimbulkan masalah kekurangan air.

4. Penelitian Stratigrafi Mollusca
   Peneliti: Drs. Soejono Martodjojo M. Sc.

Telah dilakukan pengumpulan data-data jang telah ada tetapi tersebar, dari publikasi-publikasi dan korespondensi, kemudian, sedang dikerdjakan penjusunan sistim kartu dan fossil-fossil dari penjelidikan-penjelidikan jang lalu. 7.500 fossil jang ada sekarang masih harus ditjek kembali.

Sub Lampiran III.

PROJEK-PROJEK RISET TAHUN 1965 LEMBAGA GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN NASIONAL

No.	Nama Projek	Pimpinan Projek	Keterangan
1.	Inventarisasi kekajaan dan kegiatan industri minjak di Indonesia	Ir. Grufron	Mengumpulkan keterangan mengenai kekajaan dan kegiatan-kegiatan industri minjak, memberikan analisa teknis untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan jang dapat menolong pemetjahan persoalan-persoalan jang dihadapi industri minjak Indonesia.
2.	Penelitian Pemetjahan Emulsi Air dalam Grude-Oil	Ir. Purwanto	Pentjaharian suatu metode jang efisien setjara mekanis maupun kimiawi untuk memetjahkan emulsi dalam crude-oil. Penting untuk eksploitasi minjak di Indonesia.
3.	Penjelidikan bentonitic clay untuk bahan dasar dalam drilling mud.	Ir. Sismarjanto	Mentjari bahan bentonit di Indonesia dan menjelidiki kemungkinan pemakaiannja dalam industri minjak Indonesia. Penghematan devisen, karena bahan ini masih diimpor.
4.	Konservasi minjak dan gasbumi Indonesia	Ir. Madjedi Hassan	Mengadakan penelitian apakah konservasi (usaha jang dilakukan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnja dari sumber-sumber minjak) telah didjalankan sebaik-baiknja di Indonesia.

No.	Nama Projek	Pimpinan Projek	Keterangan
5.	Penjebaran basalt dalam hubungan dengan petrurgy industry di Indonesia	Drs. The Tjin Boen	Meneliti dimanakah di Indonesia terdapat batuan basalt jang memenuhi sjarat-sjarat untuk petrurgy industry, misalkan cast-basalt untuk pembuatan pipa-pipa dan lain-lain menggantikan pipa-pipa besi.
6.	Penelitian kepadatan aliran sungai di Indonesia	Drs. H.D. Tjia	Penting untuk pengendalian bandjir, soil conservation, pembuatan waduk dan lain-lain.
7.	Penelitian Bantam-tuff sebagai bahan dasar light-weight concrete	Drs. M.T. Zen	Untuk bahan bagi bangunan-bangunan bertingkat. Djuga mempunjai arti ilmiah dalam ilmu vulkanologi.
8.	Riset bahan peledak TNT buatan PINDAD	Ir. Soebedo	Meneliti apakah TNT jang diproduksi dalam negeri baik untuk eksploitasi pertambangan. Dapat mengganti bahan peledak impor.
9.	Penelitian bidji timbal Tambang Mas Tjikotok dengan proses flotasi	Ir. Komardi	Mengadakan penelitian apakah logam timbal di Tjikotok dapat dihasilkan sebagai produksi tambahan dengan tjara flotasi.
10.	Penelitian pemilihan tempat untuk tambang pertjobaan	Ir. Partanto	Untuk mendirikan experimental mine disuatu daerah diperlukan sjarat-sjarat tertentu, misalkan: keadaan geologi, mineralisasi dan lain-lain. Tanpa penelitian ini tambang pertjobaan susah untuk didirikan.

Lampiran VI.

LEMBAGA RISET KEBUDAJAAN NASIONAL.

A. RIWAJAT PEMBENTUKAN.

Dengan ketetapan no. II/MPRS/1960, Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.) memberi tugas kepada Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (M.I.P.I.) untuk membentuk National Research Centre (N.R.C.) jang meliputi tudjuh lembaga riset masing-masing dibidang 1) Kimia, 2) Physika termasuk Instruments Centre, 3) Elektronika, 4) Geologi dan Pertambangan, 5) Metalurgi, 6) Biologi dan 7) Ekonomi dan Kemasjarakatan. Tugas lembaga-lembaga riset ialah untuk mengerahkan riset dalam usaha Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, dan dengan demikian memungkinkan eksploitasi maksimal daripada kekajaan Indo-

nesia, baik didalam bidang alam maupun dibidang tenaga manusia, didalam proses merealisasikan tjita-tjita Bangsa Indonesia untuk membentuk masjarakat jang adil dan makmur atau masjarakat Sosialis Indonesia.

Usaha pembangunan setjara umum dapat dikatakan mempunjai dua aspek: aspek physik dan aspek mental. Pembangunan physik, jang kurang-lebih dapat disamakan dengan pembangun-ekonomi, bertugas terutama untuk mengganti masjarakat agraris jang bersifat feodal-kolonial jang kita warisi dari zaman dahulu, mendjadi masjarakat modern industriil jang merdeka dan dapat berdiri diatas kaki sendiri menudju Sosialisme Indonesia. Hal ini berarti bahwa supaja pembangunan physik bisa sukses, kita harus melantjarkan suatu pembaharuan dan perobahan jang amat sulit, karena harus merobah sistim nilai hidup dan adat-istiadat lama, jang sering masih tetap hidup dalam masjarakat Indonesia dewasa ini. Artinja kita harus mendjalankan retooling mental, suatu „Umwertung alter Werte", dan nilai-nilai hidup serta adat-istiadat jang berdasarkan kepada masjarakat agraris dan feodal-kolonial, harus diganti dengan nilai-nilai hidup serta adat-istiadat jang tjotjok untuk suatu masjarakat industriil jang modern dan merdeka.

Seperti jang telah berkali-kali dikemukakan oleh P.J.M. Presiden Sukarno, Revolusi Indonesia merupakan bagian integral daripada revolusi Ummat Manusia untuk membentuk Dunia Baru jang bersih dari exploitation de l'homme par l'homme, dan tidaklah merupakan suatu gerakan tersendiri. Hal ini ternjata djuga dalam Manifesto Politik, jang sebagai pedoman pelaksanaan program Revolusi Indonesia, dengan tegas mentjantumkan persahabatan internasional dalam kerangka ke-3 sebagai salah satu tudjuan utama Revolusi Indonesia. Sjarat mutlak untuk merealisasikan tudjuan Revolusi kita dibidang internasional itu ialah adanja komunikasi serta pengertian dan spresiasi jang sedalam-dalamnja antara Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain didunia ini, terutama bangsa-bangsa NEFOS di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Ini berarti bahwa harus dikembangkan usaha untuk mempeladjari bahasa-bahasa asing dan kebudajaan bangsa-bangsa lain, terutama nilai-nilai hidup jang mempengaruhi, menentukan dan menguasai tjara berfikir dan tjara bertindak mereka. Itulah sebabnja dirasakan perlu untuk melengkapi National Research Centre itu dengan suatu lembaga kebudajaan untuk penelitian daripada proses sosial jang berlangsung dalam hu-

bungan retooling mental dari manusia Indonesia itu dan penelitian setjara ilmiah dari kebudajaan-kebudajaan bangsa-bangsa lain didunia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan Surat Keputusan No. 57/M/Kpts/Str/64 tertanggal 20 April 1964, Menteri Research Nasional membentuk Lembaga Riset Kebudajaan Nasional jang selandjutnja ditempatkan dibawah Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tugas lembaga baru ini, seperti jang tertjantum dalam Surat Keputusan Menteri Research Nasional ini, ialah:

> „mengadakan dan menstimulir riset mengenai kebudajaan Indonesia pada chususnja dan kebudajaan dunia pada umumnja, dengan memusatkan perhatian pada nilai-nilai kebudajaan jang mempengaruhi, menentukan dan menguasai pandangan hidup serta tjara bertindak masjarakat".

B. SUSUNAN.

Berdasarkan alasan-alasan dan Keputusan Menteri Research Nasional seperti tertjantum diatas, maka susunan Lembaga Riset Kebudajaan Nasional meliputi dua pusat penelitian jaitu:

pusat penelitian Kebudajaan Indonesia dan pusat penelitian Kebudajaan Asing. Kedua pusat penelitian ini merupakan badan-badan jang pokok dari aparatur lembaga dalam hal melaksanakan segala aktivitas jang bersangkut paut dengan riset.

Aparatur lembaga djuga dilengkapi dengan suatu bagian untuk tata-usaha. Lembaga dipimpin oleh seorang direktur jang bertanggung-djawab atas policy dari lembaga serta pelaksanaan dari aktivitas ilmiah maupun rutine, dan jang dibantu oleh seorang pembantu direktur.

Direktur lembaga djuga dibantu oleh suatu dewan penasehat, jang terdiri dari sardjana-sardjana Indonesia jang terkemuka dalam bidang ilmu-ilmu sastra dan ilmu-ilmu kemasjarakatan.

C. BAGIAN-BAGIAN.

Lembaga terdiri dari dua pusat penelitian, jang masing-masing dibagi lagi dalam bagian-bagian dan menurut kebutuhan kedalam seksi-seksi jang lebih chusus. Kedua pusat penelitian adalah:

1. Pusat Penelitian Kebudajaan Indonesia.
2. Pusat Penelitian Kebudajaan Asing.

Pusat Penelitian Kebudajaan Indonesia dibagi menurut disiplin-disiplin ilmiah kedalam:

1. Bagian Sedjarah.
2. Bagian Antropologi.
3. Bagian Sosiologi.
4. Bagian Lingunistik.
5. Bagian Kesusasteraan.
6. Bagian Psikologi.

   Bagian Penelitian Kebudajaan Asing dibagi menurut daerah-daerah kedalam:
7. Bagian Asia Tenggara.
8. Bagian Islam.
9. Bagian Asia Timur.
10. Bagian Asia Selatan dan Asia Barat Daja.
11. Bagian Afrika.
12. Bagian Amerika Latin.
13. Bagian Uni Sovjet, dan Eropa Timur.
14. Bagian Ero-Amerika.

Pusat Penelitian Kebudajaan Indonesia jang bertugas dalam rangka pembangunan mental manusia Indonesia mendjalankan, mendorong dan membantu penelitian-penelitian mengenai kebudajaan Indonesia langsung dari sumber-sumber primer atau dari kehidupan masjarakat jang njata.

Pada chususnja:

1. Bagian sedjarah, mengenai perkembangan kebudajaan dan masjarakat dalam zaman kedjajaan Indonesia, dalam zaman kemunduran Negara Nusantara akibat perdjuangan dengan kekuasaan-kekuasaan imperialis dan pembinaan Bangsa Indonesia.
2. Bagian Anthroropologi, mengenai aneka warna adat-istiadat, sistim-sistim kemasjarakatan, kesenian, sistim religi dan sistim-sistim nilai dari rakjat ditingkat pedesaan diseluruh Indonesia pada masa sekarang.
3. Bagian Sosiologi, mengenai latar belakang sosial dari kebudajaan Indonesia dalam zaman kedjajaan Indonesia, dalam zaman kebangkitan kembali dan pembinaan Bangsa Indonesia.
4. Bagian Linguistik, mengenai Indonesia, bahasa-bahasa

Nusantara dan hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa Nusantra.

5. Bgian Kesusasteraan, mengenai perkembangan alam fikiran orang Indonesia dalam zaman kedjajaan Indonesia, dalam zaman kemunduran Negara-negara Nusantara dan dalam zaman kebangkitan kembali dan pembinaan Bangsa Indonesia, baik jang tertjantum didalam tulisan-tulisan maupun jang hidup setjara lisan.
6. Bagian Psikologi, mengenai kepribadian dan watak umum dari manusia Indonesia, dari semua suku bangsa maupun dari semua lapisan masjarakat.

Pusat Penelitian Kebudajaan Asing, jang bertugas dalam rangka pelaksanaan kerangka ke-3 dari Manifesto Politik mendjalankan, mendorong, dan membantu penelitian-penelitian mengenai kebudajaan-kebudajaan bangsa-bangsa didunia, sedapat mungkin dari sumber-sumber primer serta dari kehidupan masjarakat jang njata.

Pada chususnja:

7. Bagian Asia Tenggara, mengenai sedjarah, bahasa-bahasa, serta kehidupan kebudajaan-kebudajaan dan masjarakat bangsa-bangsa tetangga jang terdekat, ialah: Malaya, Kalimantan Utara, Philipina, Laos, Kambodja, Muang Thai dan Birma.
8. Bagian Islam, mengenai sedjarah, serta kehidupan kebudajaan dan masjarakat ummat Islam di Pakistan, di Asia Barat Daja, di Afrika Utara dan Barat, dan dilain-lain tempat didunia.
9. Bagian Asia Timur mengenai bahasa-bahasa, sedjarah serta kehidupan kebudajaan dan masjarakat Bangsa-bangsa Tionghoa, Djepang, Korea, Mongolia dan Vietnam.
10. Bagian Asia Selatan dan Asia Baraat Daja, mengenai bahasa-bahasa, sedjarah serta khidupan kebudajaan dan masjarakat Bangsa-bangsa Sri Langka, India, Iran, Turki dan Afghanistan.
11. Bagian Afrika, mengenai sedjarah, serta kehidupan kebudajaan dan masjarakat bangsa-bangsa dibenua Afrika.
12. Bagian Amerika Latin, mengenai sedjarah seeta kehidupan kebudajaan dan kemasjarakatan bangsa-bangsa di Amerika Tengah dan Selatan.
13. Bagian Ero-Amerika, mengenai sedjarah serta kehidupan kebudajaan dan masjarakat bangsa-bangsa di Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, dan Selandia Baru.

14. Bagian Uni Sovjet dan Eropa Timur, mengenai bahasa-bahasa Slavia, sedjarah serta kehidupan kebudajaan dan masjarakat Bangsa Uni Sovjet dan bangsa-bangsa di Eropa Timur.

Pusat Riset Kebudajaan Indonesia dengan menjebarkan hasil-hasil penelitiannja mengenai bahasa-bahasa, kebudajaan dan masjarakat Indonesia kepada dunia luar, membantu djuga dalam hal memperbesar pengertian dunia mengenai Indonesia, tetapi sebaliknja Pusaa Riset Kebudajaan Asing, djuga membantu memperhatikan usaha-usaha pembangunan jang telah atau sedang dilaksanakan oleh lain-lain bangsa guna dipakai sebagai bahan perbandingan

D. RENTJANA KEGIATAN.

1. Penelitian.

Dalam hal memilih projek-projek penelitian, Pimpinan Lembaga mempergunakan sebagai pedoman, Ketiga Kerangka Revolusi dalam Manipol, sehingga semua projek-projek itu dapat:

(A) ikut serta dalam pembinaan kesatuan bangsa dalam bidang kebudajaan;
(B) ikut serta merealisasi masjarakat Sosialis Indonesia;
(C) ikut serta mengembangkan pengertian antara bangsa-bangsa.

Disamping mendjalankan penelitian dengan tenaga-tenaga ahli sendiri lembaga bisa djuga mendjalankan penelitian-penelian dengan setjara kerdja-sama dengan lembaga-lembaga lain baga lain dan perguruan-perguruan tinggi dalam lapangan ilmu-ilmu sastra dan ilmu-ilmu sosial, atau dengan sardjana-sardjana ilmu-ilmu sastra dan ilmu-ilmu sosial setjara pribadi.

Projek-projek jang direntjanakan dibagi kedalam dua golongan, ialah projek djangka pendek, jang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun dan projek djangka pandjang, jang memakai waktu lebih dari satu tahun. Penelitian terhadap projek-projek dari kedua golongan tadi dalam kenjataan tentu dilaksanakan bersama-sama; bahkan sering kali ada bagian-bagian dari projek djangka pandjang jang karena urgensi, dilakukan dan didjalankan sebagai projek-projek djangka pendek.

Projek-projek djangka pendek jang direntjanakan dan jang sedang dilaksanakan untuk tahun 1965 ini meliputi:

a. Uraian-uraian dan alasan-alasan setjara ilmiah tentang dasar-dasar dan fungsi-fungsi dari bagian-bagian dari lembaga jang telah ada, serta masalah-masalah ilmiah jang bersangkut-paut dengan itu. (lihat seksi 5 d untuk djudul-djudul projek).
b. Penelitian-penelitian ketjil mengenai beberapa masalah ilmiah jang praktis dan penting berhubungan dengan keadaan sekarang di Indonesia (lihat seksi 5 d untuk djudul-djudul projek).
c. Bibliografi-bibliografi beranotasi mengenai projek-projek jang sedang dikerdjakan. (lihat seksi 5 d untuk djudul-djudul projek).
d. Penelitian mengenai **Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia** jang dilakukan dalam rangka kerdja-sama dengan team sedjarah dari Front Nasional Indonesia.

Projek-projek djangka pandjang jang sedapat mungkin akan dimulai dikerdjakan dalam tahun 1965 ini meliputi:

a. Penelitian mengenai faktor-faktor mental dan kebudajaan dalam pembangunan Ekonomi dan Masjarakat Indonesia modern.
b. Penjusunan Buku Sedjarah Umum Indonesia dara sumber-sumber primer.
c. Penulisan Etnografi baik berdasarkan field-work, maupun penelitian perpustakaan tentang daerah-daerah suku-suku bangsa dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
d. Penulisan Kamus Baku Bahasa Indonesia dalam rangka kerdja-sama dengan ahli-ahli bahasa dari Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan dari Departemen P.D. & K.
e. Penjusunan Atlas Bahasa-bahasa Nusantara dalam rangka kerdja-sama dengan ahli-ahli bahasa dari Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan dari Departemen P.D. & K.

2. Tenaga Ahli.

Lembaga bermaksud untuk mengerdjakan mahasiswa-mahasiswa tingkat doktoral jang menundjukkan bakat untuk riset, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelesaikan studi mereka disamping pekerdjaan mereka sebagai asisten dalam team-team penelitian dari lembaga. Adapun sardjna-sardjana jang dipekerdjakan kepada lembaga, sedapat mungkin akan diberi kesempatan untuk melakukan riset sedemikian rupa sehingga hasilnja sekalian djuga bisa dipakai sebagai bahan disertasi. Ketjuali itu dimana mungkin, mereka

akan diberi kesempatan untuk pergi keluar negeri, guna memperdalam pengetahuan mereka, untuk berspesialisasi, atau untuk promosi.

3. Pertemuan-pertemuan ilmiah.

Paling sedikit satu kali setahun lembaga akan mengusahakan pertemuan-pertemuan ilmiah antara ahli-ahli ilmu-ilmu sastra dan ilmu-ilmu kemasjarakatan dari seluruh Indonesia, untuk membahas masalah-masalah tertentu, setjara suatu simposium. Dalam hal ini masalah jang akan dibahas serta proses perubahannja direntjanakan lebih dahulu. Hasil-hasil simposium-simposium serupa itu, diadjukan kepada Pemerintah dan kalau dianggap perlu dapat pula diterbitkan.

Dalam tahun 1965 lembaga merentjanakan suatu simposium mengenai implikasi-implikasi „Area-studies" di Indonesia. Sedangkan dalam rangka K.I.P.N. ke III dalam tahun 1966 direntjanakan bersama dengan Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional suatu simposium mengenai „Faktor-faktor mental dan kebudajaan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia".

4. Publikasi.

Semua hasil penelitian projek djangka pendek, segera akan diterbitkan oleh lembaga dalam bentuk penerbitan-penerbitan tak berkala. Demikian pula hasil dan penelitian mengenai bagian-bagian dari projek-projek djangka pandjang jang telah mentjapai kebulatan, segera akan diterbitkan sebagai brosur-brosur tersebut.

Demikian dalam rangka memperkenalkan diri kepada chalajak ramai, lembaga merentjanakan untuk tahun 1965 itu, penerbitan-penerbitan dari brosur-brosur jang djudulnja tersebut dibawah ini:

- — Arti Sedjarah Nasional untuk Masjarakat dan Revolusi Indonesia.
- — Arti Linguistik dalam penelitian Bahasa-bahasa di Indonesia masa ini.
- — Arti Studie daerah Afrika untuk Indonesia masa ini.
- — Arti Studie daerah Asia Timur untuk Indonesia masa ini.
- — Arti Studie daerah Ero-Amerika untuk Indonesia masa ini.
- — Gagasan Revolusioner dalam Sedjarah Pergerakan Nasional.
- — Gagasan dan Konsepsi kearah Pembinaan Bangsa.
- — Interelasi Sistim Fonologi Bahasa-bahasa Daerah dengan Sistim Fonologi Indonesia.

— Perbedaan dan Persamaan antara Edjaan dan Fonologi Bahasa Indonesia.
— Peranan Mental dalam Modernisasi Tiongkok dan Djepang pada abad ke-19.
— Bibliografi Beranotasi tentang Imperialisme.
— Faktor-faktor Mental dalam Modernisasi Eropah.
— Ichtisar Sedjarah Negara-negara Besar di Afrika Barat sebelum zaman Imperialisme.
— Bibliografi Sedjarah Imu Pengetahuan (History of Science).

E. SUSUNAN LEMBAGA RISET KEBUDAJAAN NASIONAL.

Lampiran VII.
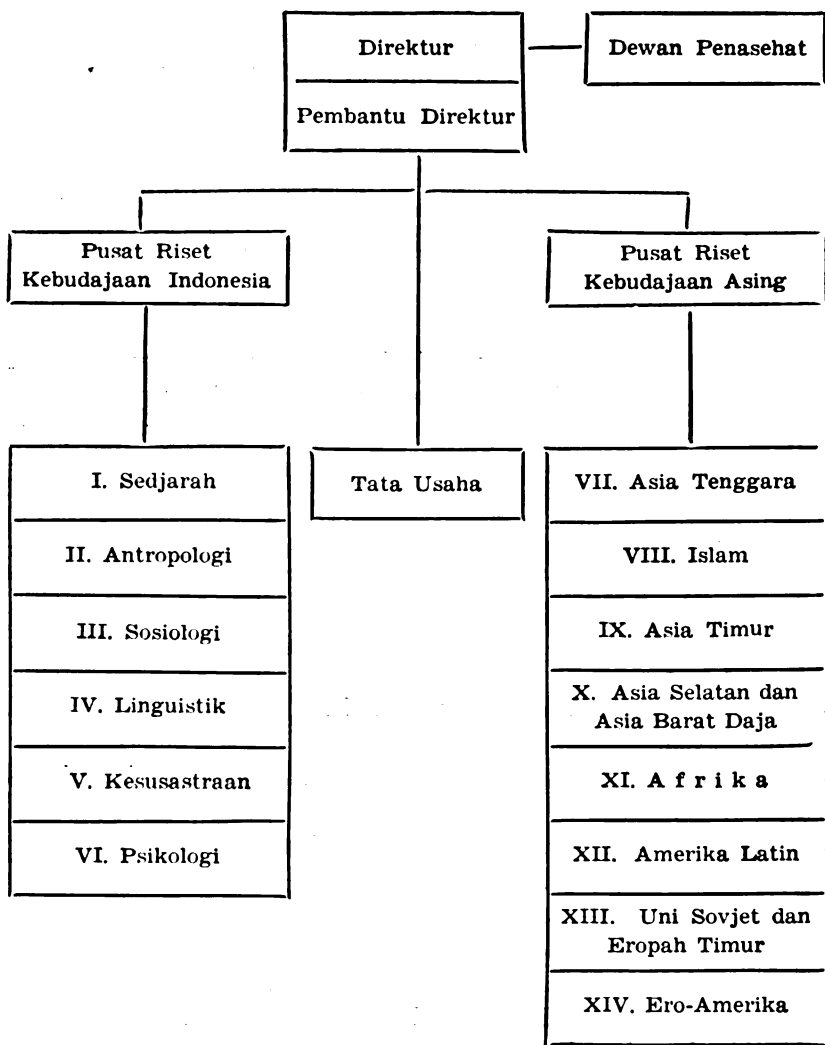
LEMBAGA RISET KANKER NASIONAL.

1. Lembaga Riset Kanker Nasional didirikan pada tahun 1965 (lihat Anggaran Dasar/Rumah Tangga).

2. Lembaga Riset Kanker Nasional didahului oleh Panitia Persiapan Pendirian Lembaga Riset Kanker jang didirikan pada bulan Nopember 1962 dengan susunan sebagai berikut:

Penasehat	:	Prof. Sutomo Tjokronegoro
		Prof. M. Sukarjo
		Prof. Sjahriar Rasad
		Kol. dr. Sjarif Thajeb
		Prof. Dr. I. Salim
		Prof. Dr. Gan Koen Han
		Let. Kol. dr. Djaka Sutadiwirja.
Pengurus	:	
Ketua	:	dr. Rukmono
Wk. Ketua	:	Prof. Djamaluddin
Sekr. I	:	dr. Sudarto Pringgoutomo
Sekr. II	:	R. P. Purnomo, B. Sc. Biol.
Anggota	:	dr. P.M. Alibasah (Djakarta)
		Kol. dr F. Pattiasina (Djakarta)
		Kol. dr. E. Soedewo (Djakarta)
		Dr. Muljono Djojopranoto (Surabaja)
		Prof. Dr. A.A. Ressang (Bogor)
		drs. Tjan Gwan Hien (Bogor)
		dr. Topo Harsono (Bandung)
		Prof. B. Sutarso (Djokjakarta).

3. **Tugas Panitia**: menginventarisasi, mengkoordinir dan memberi stimulans pada segala kegiatan riset dilapangan kanker jang dalam garis besar meliputi:

a pengumpulan data mengenai kanker baik jang berasal dari dalam maupun jang berasal dari luar negeri

b. memberi keterangan pada chalajak ramai dan karjawan medis untuk memperdalam kesadaran mereka mengenai kanker

c. riset kanker dibidang klinik

d. riset kanker eksperimentil dan riset dasar kanker.

4. Kegiatan Panitia :

a. mengadakan hubungan dengan instansi-instansi dan badan-badan jang kegiatannja ada hubungannja dengan kanker.
b. turut aktif dalam menjelenggarakan unsur-unsur jang dirasa perlu bagi pendirian satu pusat riset kanker.
c. menjalurkan keuangan jang disediakan oleh Departemen Urusan Research Nasional bagi projek-projek research jang telah disetudjui.

5. Projek-projek Riset 1963.

a. Registrasi tumor dan patologi geografi.
Penanggung djawab: dr. Rukmono, Djakarta
b. Biakan djaringan in vitro.
Penanggung djawab: dr. Sudarto Pringgoutomo, Djakarta
c. Projek Galli Mainini.
Penanggung djawab: Purnomo B.Sc., Djakarta
d. Projek Mousecolony.
Penanggung djawab: dr. Rukmono, Djakarta
e. Penelitian choriocarcinoma.
Penanggung djawab: Prof. Sutomo Tjokronegoro
f. Penelitian tumor mamma.
Penanggung djawab: dr. Rukmono, Djakarta
g. Cytologi keadaan ganas nasopharynx.
Penanggung djawab: dr. Oey Han Lee, Djakarta
h. Hubungan cyto-histo-klinik dari mola dan choriocarcinoma.
Penanggung djawab: Dr. Muljono Djojopranoto, Surabaja
i. Immunological patterns in tumors.
Prof. A.A. Ressang, Bogor
j. Seleksi tumbuh-tumbuhan terhadap pengobatan kanker.
Penanggung djawab: drs. Tjan Gwan Hien, Bogor
k. Histopatologi dan etiologi keadaan ganas nasopharynx.
Penanggung djawab: Dr. Muljono Djojopranoto, Surabaja

6. Projek-projek Riset 1964:

a. Mousecolony.
Penanggung djawab: dr. Rukmono, Djakarta
b. Penelitian leukemia pada mentjit c58.
Penanggung djawab: dr. Rukmono/dr Sudarto, Djakarta
c. Projek pertjobaan mengubah tumor solid mendjadi tumor ascites.
Penanggung djawab: D. Djuanda B. Sc., Djakarta

d. Projek pertjobaan transplantasi tumor "Harapan" pada selaput chorioallantois.
Penanggung djawab: Nj. Ratnaningsih B. Sc., Djakarta

e. Penjelidikan penjembuhan penempelan kulit pada mentjit.
Penanggung djawab: Njoman Gede Surjadhana, B. Sc., Djakarta

f. Projek pemeliharaan tumor.
Penanggung djawab: Gunardjono B. Sc.

ANGGARAN DASAR LEMBAGA RISET KANKER NASIONAL (DEPARTEMEN URUSAN RISET NASIONAL).

Mukadimah.

Sadar bahwa tiap Warganegara Indonesia berhak memper-pokok bagi pertumbuhan kehidupan bangsa serta mempunjai peranan penting dalam penjelesaian revolusi nasional;

Sadar bahwa tiap warga negara Indonesia berhak memperoleh deradjat kesehatan setinggi-tingginja;

Sadar bahwa Pemerintah perlu dibantu dalam tugasnja jang tertjantum dalam Bab II pasal 4 dan 12, Undang-undang Pokok Kesehatan;

Maka oleh karena itu perlu didirikan Lembaga Riset Kanker Nasional dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai tersebut dibawah ini:

ANGGARAN DASAR LEMBAGA RISET KANKER NASIONAL.

Pasal I: Nama dan kedudukan

Lembaga ini bernama Lembaga Riset Kanker Nasional, Departemen Urusan Research Nasional, berkedudukan di Ibu kota Republik Indonesia dan didirikan pada tanggal untuk waktu jang tidak ditentukan.

Pasal II: Dasar.

Lembaga berdasar Pantja Sila dan berhaluan Manifesto Poli-Republik Indonesia.

Pasal III: Tudjuan.

Mentjapai deradjat Kesehatan Rakjat setinggi-tingginja, terutama dibidang kanker.

Pasal IV: Organisasi.

Kebidjaksanaan Lembaga ditetapkan oleh satu Dewan. Penjelenggaraan kebidjaksanaan dan administrasi Lembaga dipertjajakan kepada dan dilaksanakan oleh Direktur dengan Stafnja.

Pasal V: Usaha.

Menjelenggarakan penjelidikan kanker dalam arti seluas-luasnja.

Pasal VI: Keuangan.

Keuangan Lembaga didapat dari Departemen Urusan Research Nasional dan usaha-usaha lain jang sjah.

Pasal VII: Perobahan Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar hanja dapat diubah dengan keputusan Menteri Research Nasional atas usul Dewan.

Pasal VIII: Penutup.

Hal-hal mengenai tugas dan penjelenggaraan Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA.

Pasal I, II dan III.

Tidak diperintji dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal IV: Organisasi.

A. Dewan:

1. Dewan terdiri dari ahli-ahli dan wakil-wakil badan jang bergerak dilapangan kanker jang berkedudukan di Indonesia.
2. Anggauta Dewan diangkat oleh Menteri Research Nasional.
3. Ketua Dewan ditundjuk oleh Menteri Research Nasional dari antara anggauta Dewan.
4. Tugas Dewan ialah menentukan kebidjaksanaan Lembaga sesuai dengan petundjuk Menteri Research Nasional.
5. Pengurus harian Dewan berkedudukan di Djakarta.
6. Putusan Dewan diambil dengan tjara musjawarah.
7. Rapat pleno Dewan diadakan sekurang-kurangnja satu kali setahun.

B. Lembaga:

1. Lembaga dipimpin oleh seorang Direktur jang diangkat oleh Menteri Research Nasional atas usul Dewan.

2. Tugas Direktur ialah memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi segala usaha Lembaga.
3. Direktur bertanggung-djawab kepada Dewan c.q. Menteri Research Nasional.
4. Direktur tiap tahun mengadjukan rentjana usaha dan keuangan kepada Dewan untuk dipertimbangkan.
5. Direktur setjara ex-officio mendjadi anggauta Dewan.
6. Pegawai Lembaga ialah pegawai Departemen Urusan Research Nasional dan/atau pegawai badan lain jang diperbantukan kepada Departemen Urusan Research Nasional.
7. Pegawai Lembaga diangkat oleh Menteri Research Nasional atas usul Direktur.

C. Peraturan perbedaan pendapat an ara Dewan dan Direktur. Menteri Research Nasional memutuskan dalam hal perbedaan pendapat antara Dewan dan Direktur.

Pasal V: Usaha.

A. Usaha Lembaga meliputi kegiatan dalam bidang research, pengobatan, pendidikan, pentjegahan, penerangan dan dokumentasi/statistik/perpustakaan kanker.
   1. Usaha riset meliputi riset dasar dan riset klinik.
   2. Usaha pengobatan meliputi mempertinggi mutu pengobatan jang lazim, disamping menjelidiki obat-obatan jang baru, baik jang modern maupun jang tradisionil.
   3. Usaha pendidikan ialah menjadarkan para karyawan kesehatan mengenai pengertian kanker jang lebih mendalam dengan tjara mengadakan kursus penjegaran, seminar dan penerbitan mengenai kanker.
   4. Usaha pentjegahan/penerangan meliputi penerangan umum mengenai tindakan-tindakan jang dapat dilakukan untuk mengurangi kedjadian kanker, untuk mengetahui adanja kanker sedini mungkin dan untuk memperbesar kemungkinan menjembuhkan kanker.
   5. Usaha dokumentasi/statistik dan perpustakaan meliputi mengumpulkan dan mengolah data mengenai kanker didalam maupun diluar negeri, serta mengadakan kepustakaan lengkap mengenai kanker.

B. Untuk melaksanakan usaha-usaha ini Lembaga terdiri dari:
   1. Bagian riset Dasar dengan seksi-seksi:
      Seksi biakan djaringan in vitro dan in vivo

Seksi phytokimia dan pengibatan kanker eksperimentil
Seksi isotop
Seksi biokimia
Seksi virologi
Seksi pharmacologi
Seksi binatang pertjobaan

2. Bagian Riset Klinik dengan eksi-seksi:

Seksi bedah
Seksi bedah saraf
Seksi genokologi
Seksi telinga, hidung dan tenggorokan
Seksi kulit
Seksi radiologi
Seksi saraf
Seksi mata
Seksi patologi klinik
Seksi anak
Seksi penjakit dalam
Seksi patologi dan geografi kanker
Seksi pentjegahan dan kesehatan masjarakat.

3. Bagian Dokumentasi/Statistik/Perpustakaan dengan seksi-seksi:

Seksi penerangan
Seksi statistik
Seksi pendidikan
Seksi perpustakaan.

Pasal VI: Keuangan.

a. keuangan Lembaga digunakan untuk:
1. Biaja penjelenggaraan Lembaga
2. Pemberian dana bagi projek-projek riset jang telah disetudjui oleh Dewan dan Direktur.

b. sjarat-sjarat pemberian dana:
1. Sjarat-sjarat pemberian dana bagi projek-projek riset diatur tersendiri dalam peraturan jang setelah dibuat bersama oleh Dewan, Direktur dan Kepala-kepala Bagian, disahkan oleh Menteri Research Nasional.

Pasal VII: Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dirumuskan oleh Dewan dan Direktur dan diadjukan kepada Menteri Riset Nasional untuk disjahkan.

DEPARTEMEN
PERINDUSTRIAN DASAR & PERTAMBANGAN

PENGANTAR.

Risalah „20 TAHUN JANG MENANDJAK" jang melukiskan setjara singkat perkembangan kegiatan Deperdatam bidang perindustrian dasar dan pertambangan ini disusun untuk bahan-bahan penjusunan buku „20 Tahun R.I." dibidang Perdatam, diperintahkan oleh J.M. Menteri Perdatam kepada Panitia Penjusunan Buku „20 Tahun R.I." bidang Perdatam.

Sebanjak mungkin diambil sistimatik jang diandjurkan oleh Sekretaris Menko Kompartimen Pembangunan, sedang dimana menurut sifat dan saatnja kurang ada persesuaian, maka diadakan penjimpangan dari sistimatik tersebut, walaupun pada garis besarnja senantiasa berpedoman kepadanja.

Didalam risalah ini sebagai Bab I ditjantumkan Pendahuluan jang merupakan pandangan singkat dari keseluruhan perkembangan, isi dan djiwa risalah.

Periodisasi, dibagi dalam tiga bagian, jaitu tahun 1945-1950, tahun 1950-1959 dan 1960 hingga sekarang. Ini disebabkan karena disaat-saat tertentu dimasa lalu perobahan-probahan diluar dugaan telah terdjadi dan penjusunan tak dapat dilandjutkan setjara mekanis dan otomatis. Disamping itu bahan-bahan mengenai dokumentasi terutama ditahun-tahun 1945-1950 tidak banjak jang tertinggal.

Mengenai isi pokok materinja pada periodisasi kesatu dan kedua (didalam periodisasi laporan Kompartimen, I, II dan III).

Perkembangan Organisasi/Apparatur dan Usaha-usaha disatukan, sedang periodisasi terachir mengambil bagian-bagian jang tersendiri. Hal ini adalah karena keadaan perkembangan dan kegiatan jang setjara kwantitatif merupakan suatu garis menandjak dan memerlukan lebih banjak penjorotan dan pembahasan jang lebih terperintji.

Dengan demikian, maka sistimatik risalah ini adalah sebagai berikut:

Pendahuluan.

I. Perkembangan Organisasi/Aparatur:

A. Periode Physik (1945-1950).

B. Periode Survival dan Periode Challenge & Response terhadap Demokrasi Terpimpin (1950-1959).

C. Periode Pantjawarsa Manipol dan mendjelang Berdikari (1959-1965).

II. Perkembangan Usaha-usaha:

A. Bidang Rutine.

B. Bidang Pembangunan.

***

PENDAHULUAN.

Sebagai kelandjutan dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka negara, dengan Rakjat Indonesia, ketjuali berdjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan jang sudah diproklamasikan itu, djuga memikirkan pengisian daripada kemerdekaan sebagai tjita-tjita revolusi kita jaitu suatu masjarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pantja Sila, jang adil dan makmur. Dalam perkembangan kearah usaha diatas, didirikan berbagai-bagai badan legislatif untuk usaha pembangunan masjarakat jang kita tjita-tjitakan itu. Kita mengenal kementerian-kementerian dengan probahan nama, sesuai dengan kebutuhan waktu, tapi pada hakekatnja usaha kerdja kementerian-kementerian jang berobah-obah nama itu, garisnja adalah satu, jaitu menudju masjarakat jang adil dan makmur.

Pendek kata, dalam hal usaha rakjat dan Pemerintah Indonesia menudju kearah tjita-tjita diatas, telah diadakan djuga kementerian-kementerian jang dikemudian hari disebut departemen-departemen, jang mengusahakan perkembangan-perkembangan organisasi dan strukturnja sesuai dengan kebutuhan revolusi kita. Usaha-usaha diatas adalah untuk memenuhi kebutuhan rakjat jang makin lama makin bertambah djumlahnja, dan jang makin lama makin menandjak tuntutannja, materil, dan kulturil, jaitu jang disebut oleh Pemimpin Besar Revolusi kita Bung Karno, rising demands dari Rakjat jang sedang berrevolusi.

Dibidang perindustrian dasar/pertambangan usaha-usaha dilaksanakan untuk achirnja mengikis habis sisa-sisa dari struktur dan sistim kolonial dan feodal serta meletakkan dasar-dasar baru jang bersifat nasional.

Usaha-usaha tersebut berdjalan madju sesuai dengan pasang surutnja revolusi kita. Dimasa Revolusi Physik (1945-1950) usaha masih berpusat pada mempertahankan kemerdekaan jang telah diproklamasikan 20 tahun jang lalu.

Sesudah pengakuan kedaulatan ditahun 1950 hingga 1955, mulailah ditetapkan dasar-dasar organisasi, jang pada hakekatnja mempertahankan dan melandjutkan kehidupan Negara dan Revolusi kita.

Tahun-tahun berikutnja (1955-1959) usaha-usaha mulai dilakukan dibidang pembangunan industri dan pertambangan dengan rentjana lima tahun (Biro Perantjang Negara).

Sistim pemerintah liberal jang merupakan challange terhadap Demokrasi Terpimpin kita, tidak memungkinkan usaha-usaha tersebut berdjalan lantjar, sehingga mengalami kegagalan.

Dengan Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 maka diletakkanlah dasar-dasar pembangunan berentjana dari masjarakat kita, jang dituangkan didalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahap I.

Dengan ditetapkannja Manipol/Usdek sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara, Resopim, Djarek dan lain-lain sebagai pedoman pelaksanaannja serta alat-alat revolusi lainnja maka terdapatlah sjarat-sjarat untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang setjara revolusioner.

Pidato Tavip tahun 1964 jang mengumumkan prinsip perdjoangan ekonomi kita, „berdiri diatas kaki sendiri", mendjadi pendorong dan merupakan mahkota bagi Perdatam dengan segala unit-unitnja untuk dengan sekuat tenaga ikut berusaha mentjapai prinsip berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi itu setjara maksimal.

Dibidang pertambangan dilaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Penjempurnaan usaha-usaha pertambangan jang sudah ada.
2. Mengembangkan usaha-usaha pertambangan jang baru mulai.
3. Mentjari bahan-bahan tambang jang sampai saat ini belum diketemukan dan telah diketahui banjak tersembunji dibumi tanah-air kita jang kaja-raja ini.

Dibidang industri dasar/berat usaha ini berbentuk:

1. Menanamkan dasar-dasar baru bagi perkembangan industri dasar/berat, jaitu mendirikan pabrik-pabrik baru setjara berentjana sesuai dengan Keputusan M.P.R.S., dengan mengadakan research jang mendalam.
2. Menjempurnakan pabrik-pabrik jang sudah ada dan mengembangkannja.
3. Mengusahakan substitut-substitut didalam negeri untuk melenjapkan ketergantungan dari luar negeri dalam usaha membangun pabrik-pabrik.

Apa jang diusahakan sekarang oleh Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan adalah mendjebol sistim-sistim lama dan membangun sistim-sistim baru dengan kreasi revolusioner untuk mengintegrasikan diri sepenuhnja dengan Rakjat dan Revolusi. Usaha Departemen Perindustrian Dasar/ Pertambangan ini adalah dengan menjadari sepenuhnja apa jang tersebut dalam Dekon, bahwa pertambangan adalah salah satu dasar daripada perekonomian kita sedang industrialisasi merupakan tulang punggungnja, jang kedua-duanja merupakan soal-soal jang esensiil bagi perkembangan revolusi kita dalam tahap Nasional Demokratis menudju kepada Sosial isme Indonesia.

I. PERKEMBANGAN ORGANISASI/APARATUR

A. PERIODE REVOLUSI PHYSIK (1945 — 1950).

Tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 maka Kementerian Kemakmuran mulai bekerdja dibawah pimpinan Menteri Kabinet (Presidentiil) jang pertama Ir. Surachman almarhum.

Dengan berkedudukan di Djalan Gadjah Mada No. 8, Djakarta, kementerian ini mulai menjusun aparatnja jang masih terserak-serak (pusat di Djalan Gadjah Mada), beberapa Djawatan di Djalan Merdeka Timur (gedung Departemen Perhubungan Laut jang sekarang), sebuah djawatan lagi di Pinangsia, bahkan ada jang di Bogor (instansi-instansi dalam lingkungan Djawatan Pertanian dan Kehutanan) dan Bandung (Djawatan Pertambangan dan Geologi).

Langkah penting pertama jang diambil oleh Kementerian Kemakmuran ialah meresmikan (dengan surat keputusan tanggal 1 Oktober 1945) pegawai-pegawai pemerintah Republik Indonesia, jaitu mereka jang dalam djangka waktu tertentu menggabungkan diri, menjatakan setia dan bekerdja aktif dalam lingkungan kementerian, sehingga tidak mungkin adanja interpretasi lain.

Dengan hanja bekal kesetiaan kepada negara, keberanian dan semangat kemerdekaaan jang berkobar-kobar, maka dimulailah perebutan kekuasaan dari tangan Djepang jang sudah menjerah kalah kepada Sekutu.

Pelaksanaan tugas tertentu belum dapat dikatakan ada. Hanja pekerdjaan rutine dilakukan sebagai warisan pemerintah Djepang, jang dalam garis besarnja djuga meneruskan pekerdjaan Departemen Perekonomian pemerintah Hindia Belanda dalam masa perang.

Pada bulan-bulan September dan Oktober 1945 keadaan Djakarta makin mendjadi panas, dengan mendaratnja tentara pendudukan Inggeris dengan „Rapwi"-nja jang dibontjengi oleh unsur-unsur tentara Belanda; insdien bersendjata makin sering terdjadi dan korban-korban djatuh.

Maka di Kementerian Kemakmuran lalu diambil dua buah tindakan penting ialah:

a. persiapan pengungsian kementerian kedaerah pedalaman,
b. mengadakan pertahanan pendjagaan kantor, selama kantor masih dapat dipertahankan.

Dengan menerobos pendjagaan tentara pendudukan Inggeris dibagian timur Djakarta (Klender), setjara berangsur-angsur dan terus-menerus dilakukan pengungsian alat-alat kelengkapan dan kekajaan kantor serta keluarga-keluarga pegawai, jang menurut rentjana akan masuk dalam formasi dipedalaman.

Satu-satunja alat pengangkutan jang masih dapat keluarmasuk Djakarta dengan gangguan jang paling minim waktu itu hanjalah kereta api, jang tinggal hanja 3 — 4 traksi sadja, diantaranja sebuah kereta ekspres malam, jang harus melajani seluruh kebutuhan pemerintah dan umum.

Dalam pelaksanaan pengungsian itu telah diambil tindakan-tindakan jang drastis sekali. Prioritas untuk diangkut, adalah alat-alat kelengkapan kantor dan harta kekajaan kementerian, sedangkan barang-barang prive dibatasi hanja paling banjak 5 (lima) koli per keluarga, termasuk didalamnja koper-koper pakaian, alat-alat dapur dan satu gulung kasur-bantal.

Achir Oktober 1945 berangkatlah rombongan terachir para pegawai jang termasuk formasi didaerah pedalaman dan tinggallah hanja Menteri dengan beberapa tenaga staf jang diperlukan dan para pegawai jang menetap di Djakarta.

Dengan demikian mulailah Kementerian Kemakmuran bekerdja di Magelang (Pusat), sebagian di Jogjakarta dan Surakarta ditengah-tengah alam merdeka, suasana merdeka dan bebas dari tekanan lahir maupun batin sehari-hari.

Beberapa hari kemudian disekitar permulaan Nopember 1945 gedung di Djalan Gadjah Mada No. 8 diduduki oleh tentara Nica. Sisa-sisa kementerian berkantor di Djalan Pegangsaan Barat dan sebagian lagi di Djl. Kramat Raya (gedung Markas Besar Palang Merah Indonesia jang sekarang) sampai achirnja gedung-gedung ini djatuh pula ketangan musuh.

KEMENTERIAN KEMAKMURAN, (periode Nopember 1945 sampai dengan 16 Djanuari 1950).

1. **Organisasi.**

Dengan menghadapi berbagai kesukaran besar dan ketjil, baik dibidang personil maupun dibidang materiil, Kemen-

terian Kemakmuran mulai mendjalankan pimpinan dalam perekonomian negara.

Karena kesulitan dalam mendapatkan gedung-gedung untuk kantor dan perumahan pegawai, maka bagian-bagian dari kementerian terpaksa berada ditempat-tempat jang djauh terpisah satu dengan jang lain.

Djarak itu lebih-lebih terasa disebabkan keadaan alat pengangkutan umum pada kala itu boleh dikata sangat menjedihkan. Bagian-bagian kementerian itu pada umumnja terpentjar ditiga buah kota, ialah: Magelang, Jogjakarta dan Surakarta.

Pusat Kementerian berkedudukan di Magelang dengan djawatan-djawatan jang mengurus produksi (pertanian, kehewanan, perikanan, perindustrian dan pertambangan) dan distribusi dalam negeri; Pimpinan Kementerian berkedudukan (Menteri dan pembantu-pembantu lainnja jang terdekat) di Jogjakarta dengan dinas jang mengurus perdagangan dan bahan pangan, sedangkan Djawatan Perkebunan berada di Surakarta. Ditiga tempat itu berkedudukan badan-badan „N" (negara) seperti: Badan Industri Negara (B.I.N.), Perusahaan Tambang Minjak Negara (B.T.M.N.), Badan Eksploitasi Tambang Negara (B.S.-T.N.), Badan Tekstil Negaran (B.T.N.), Badan Penjelenggara Perusahaan Gula Negara (B.P.P.G.N.), Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (B.P.R.I.) dan lain-lain.

Strukturil pada waktu itu Kementerian Kemakmuran dan dinas-dinasnja tidak banjak berbeda dengan apa jang kita djumpai dalam Departement van Economische Zaken dizaman Hindia Belanda dulu, dan achirnja untuk sebagian besar mendjelma mendjadi badan-badan „N" itu. Memang adalah tidak mungkin didalam masa pantjaroba dan didalam waktu jang sangat singkat itu untuk mengadakan perobahan-perobahan strukturil jang mendalam dan/atau menjeluruh, mengingat kepada tersedianja peralatan dan personil jang ada, jang pada umumnja masih terikat pada tjara kerdja jang tradisionil sedjak zaman Belanda dulu.

Djuga politis ketika itu amat sukar untuk mengadakan perobahan-perobahan tersebut. Ini disebabkan karena didalam kita mengemudikan bahtera negara jang baru lahir itu, ditjelah-tjelah randjau jang berbahaja, dalam garis besarnja kita mendjalankan politik perbaikan-perbaikan dengan negara-negara Barat, jang pada umumnja mempunjai vested interest

didalam Republik Indonesia. Dan jang amat penting pula ialah kita harus menghadapi agresi Belanda jang telah tampak semakin njata.

Setelah melampaui beberapa kali pergantian kabinet, struktur Kementerian Kemakmuran tidak banjak mengalami perobahan, hingga sampai waktunja kementerian itu dipetjah mendjadi dua kementerian ialah: Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Kementerian Pertanian, didalam Kabinet Halim (Djanuari-Agustus 1950).

2. Policy.

Dibidang policy pada saat itu kita masih belum dapat melepaskan diri dari hal-hal jang telah dilaksanakan oleh pemerintah-pemerintah jang terdahulu dengan adjustment sedjauh mungkin ditilik dari sudut kepentingan negara.

Dengan diakuinja semua milik asing jang sedjak dahulu berada dinegara kita da akan dikembalikannja semua /milik konsesi asing jang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, sebagai kelandjutan ("uitvloeisel") daripada Manifesto Politik bulan Uopember 1945, maka soal pengembalian hak ("rechtsherstel") merupakan masalah jang harus dipetjahkan dan dilaksanakan. Dengan begitu badan-badan „N" tersebut diatas, disamping aktivitas menagement dibidangnja masing-masing sebagai hasil kreasi sendiri atau oleh fihak pemerintah militer Djepang jang tidak ada sangkut-pautnja dengan milik asing sebelum perang, terutama berfungsi djuga sebagai "beheersinstituut". Pada umumnja sesuai peraturan-peratura njang dikeluarkan oleh Pemerintah-pemerintah jang telah dan akan dikeluarkan oleh Pemerintah R.I.

Policy kedalam, dengan sendirinja ditudjukan kepada mempertahankan dan mempertinggi kemakmuran Rakjat pada umumnja, disamping mempertinggi daja perang dan ketahanan revolusi menghadapi Belanda.

Mengingat bahwa projek jang dikuasai oleh badan-badan „N" dikala itu merupakan projek-projek industri dan pertanian/perkebunan jang besar-besar dan mempunjai peranan jang sangat penting didalam usaha mempertinggi kemakmuran rakjat dan ketahanan revolusi sebagai penghasil bahan-bahan dan barang barang ekspor jang dapat membeajai kebutuhan kita akan behan-bahan dan barang-barang impor, maka penjelenggaraan (hanteering) dari pada badan-badan „N" itu diintensifkan.

Untuk mengadakan koordinasi jang baik maka dalam badan-badan „N" itu dibentuk sebuah Panitia Koordinasi, dimana duduk masing-masing Direktur atau Wakil Direktur sebagai anggotanja. Panitia ini dengan nama: „Panitia Pertimbangan Agung Koordinasi Perusahaan" (P.P.K.P.P.), merupakan suatu braintrust, dimana diperbintjangkan persoalan-persoan perburuhan, produksi dan sebagainja. Kedudukannja ialah sebagai badan penasehat (advies-college) bagi pimpinan kementerian. Oleh karena persoalan sehari-hari jang dihadapi adalah hampir sama ditiap-tiap badan „N" itu, maka dengan adanja panitia tersebut banjak kesulitan-kesulitan dapat dipetjahkan bersama.

Sehabis clash ke-II, setelah Pemerintah R.I. kembali ke Jogjakarta dalam bulan Djuli 1949, perusahaan-perusahaan/projek projek jang dikuasai oleh badan-badan „N" itu banjak jang djatuh kembali ketangan pemiliknja semula didaerah pendudukan ataupun hantjur dibumi-hanguskan untuk sebagian atau seluruhnja, sehingga ada niatan untuk melikwidir badan-badan itu.

Hasil konsultasi antara pimpinan kementerian dengan para pimpinan badan-badan „N" itu achirnja sampai kepada suatu rumusan jang kemudian dituangkan dalam Surat-surat Keputusan Menteri Kemakmuran No. 2 dan 3/49 tertanggal 25 Agustus 1949. Badan-badan „N" itu dinjatakan non-aktif dan dibentuk „Panitia Pekerdja Pusat" dan Panitia-panitia Pekerdja-pekerdja Badan „N" untuk mengurusi sisa-sisa perusahaan jang berada didalam lingkungan badan masing-masing.

Tugas Panitia jang terpenting antara lain ialah:

a. mengadakan inventarisasi milik badan „N",
b. menghidupkan kembali perusahaan-perusahaan jang masih bisa didjalankan atas dasar pembiajaan sendiri (zelf-bedruipend). Dan diantara perusahaan-perusahaan tadi ada jang dapat bertahan terus sampai terbentuknja Perusahaan-perusahaan Negara berdasarkan P.P. No. 19 tahun 1960, dan dapat memberikan landasan serta pengalamannja didalam membentuk Perusahaan-perusahaan Negara itu.

Dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian tertanggal 22 Nopember 1950 No. 7998/BSD, panitia-panitia tersebut diatas kemudian dibubarkan dan dengan demikian habis pulalah riwajat badan-badan „N" itu.

3. Situasi dizaman R.I.S. dan pembentukan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.

Situasi dizaman R.I.S. djelasnja adalah sebagai berikut:

a. Setelah R.I. masuk kedalam R.I.S., maka turunlah nilai R.I. dari negara jang berdaulat mendjadi negara bagian jang pada hakekatnja juridis-formil kedudukannja berupa „propinsi otonom".
Sekalipun demikian R.I. tetap merupakan pusat perdjoangan, mengawasi dan mengkorisir tindakan dan politik induk negaranja jang berupa negara federasi R.I.S.

b. Didalam kedudukannja jang demikian ini R.I. membentuk aparatur baru, jang berupa Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, sebagai hasil pemetjahan Kementerian Kemakmuran dulu. Aparatur ini diwudjudkan agar lebih intensif mendjalankan ekonomi terpimpin kearah realisasi pasal 33 U.U.D. R.I. Disamping itu R.I. mengalami faktor baru jang njata, jakni mengalami blokade jang rapi jang dahulu dialami dan sekarang menghadapi hapusnja blokade itu dengan melihat bergeraknja kapital asing, asing, lebih-lebih didaerah pendudukan dahulu, dimana kapital asing itu telah dipupuk kembali oleh pemeritah prafederal.

c. Didalam keadaan demikian, Negara Bagian R.I. sebagai pelopor perdjoangan harus menentukan lapangan pekerdjaan dan kebidjaksanaan politik bagi kementerian jang baru.

d. Dalam melaksanakan program, kementerian kita telah bertindak setingkat demi setingkat dengan memperhitungkan kekuatan kita baik terhadap luar negeri maupun didalam negeri. Selain daripada singkatnja waktu (enam bulan), Kementerian Perdagangan/Perindustrian telah menghadapi berbagai-bagai kesukaran, baik didalam pelaksanaan pekerdjaan, dalam hubungannja dengan Pemerintah R.I.S., maupun dalam bezettingsformatie karena kurangnja tenaga ahli. Meskipun demikian kesukaran-kesukaran itu lambat laut dapat diatasi.

e. Dalam laporan-laporan kementerian/djawatan-djawatan hal-hal penting jang masih perlu dikemukakan ialah:

1). Kechawatiran jang semula diraskan oleh beberapa fihak, bahwa pemetjahan Kementerian Kemakmuran mendjadi dua akan mengakibatkan kurang efisiennja aparatur pemerintah, terbukti tidak beralasan.

2). Pengalaman-pengalaman dilapangan administrasi, organisasi, dan teknik jang telah didapat oleh kementerian/djawatan-djawatan selama mereka bekerdja dalam lingkungan Kementerian Perdagangan/Perindustrian adalah unik dalam sedjarah Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena kementerian tadi baru pertama (dan terachir) inilah mendjelma dalam susunnan pemerintahan.

Uraian tentang kebidjaksanaan politiknja Kementerian Perdagangan/Perindustrian didahului dengan keterangan singkat mengenai struktur ekonomi umum pada masa itu, berbunji sebagai berikut:

a. Di Indonesia pada umumnja struktur ekonomi belum mengalami perobahan penting daripada keadaan sebelum Perang Dunia.

   Perobahan-perobahan jang njata adalah baru bersifat bajangan dan eksperimen. Posisi dominan dari pertanian dan perkebunan masih tetap seperti sediakala dan kurang lebih 70% dari penduduk Indonesia masih hidup dalam lapangan penghasilan ini.

   Produksi jang berupa: karet, gula, lada, kopi, teh dan lain-lain, merupakan hasil eksploitasi penting dalam zaman pendjadjahan untuk bangsa asing, jang diberi kesempatan dengan adanja sistim ekonomi kolonial. Pendjualan barang-barang/bahan-bahan tersebut banjak tergantung pada kemungkinan-kemungkinan mengekspor keluar negeri. Maka ekonomi kita masih tetap peka terhadap konjunktur.

b. Modal asing masih tertanam dengan kuat dinegara kita. Hal ini minta perhatian penuh dalam pembangunan kita menudju kepada ekonomi nasional jang stabil.

c. Revolusi kita telah minta 1001 matjam pengorbanan. Lapangan ekonomipun tidak terhindar daripada matjam-matjam pengorbanan. Dan setelah clash kedua (II) berachir, terlihatlah bahwa penderitaan terpenting terdapat diantaranja dalam :

   1). komunikasi: djalan, transpor (kendaraan dan perkapalan), perhubungan pos dan lain sebagainja;

   2). produksi aparat: dalam lapangan perindustrian pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, kehewanan dan lain sebagainja;

3). perdagangan pada umumnja;
4). organisasi;
5). modal dan harta benda rakjat.

d. Selain menghadapi faktor ekonomis tersebut diatas, berhubung dengan status R.I. sebagai negara bagian karena hasil keputusan K.M.B., maka timbullah didalam lapangan ekonomi konsekwensi-konsekwensi seperti berikut :
    1). financieele verhouding jang mengikat antara R.I. dan R.I.S.;
    2). perdagangan luar negeri adalah kompetensi R.I.S.

e. Didalam usaha mengatasi rintangan-rintangan tadi dan pula guna mengintensivir/rekonstruksi dan rehabilitasi kerusakan-kerusakan itu, maka usaha-usaha kementerian tidaklah luput pula dari ketegangan-ketegangan jang disebabkan oleh social adjustment dan pergolakan politik jang masih bergelora sekarang ini.

Uraian daripada kebidjaksanaan politik Kementerian Perdagangan/Perindustrian dalam mendjalankan program pemerintah itu sendiri ditjantumkan seperti berikut:

a. Didalam kita mendjalankan kebidjaksanaan politik itu, kita pahamkan lebih dulu kedudukan R.I. sekarang sebagai negara bagian, dengan konsekwensi-konsekwensi didalam lapangan ekonomi jakni:
    1). perdagangan luar negeri adalah mendjadi kompetensi RIS;
    2). perindustrian banjak terikat ada beleid RIS sebpagai akibat sub. a dan perdjandjian K.M.B.;
    3). tambang mendjadi urusan R.I.S.;
    4). financiele verhouding jang mengikat R.I.S. dan R.I. sebagai negara bagian.

b. Dengan demikian mendjadi sempitlah lapangan bergerak bagi kita, chusus dilapangan perdagangan jang sekarang hanja mengenai perdagangan dalam negeri.
   Sekalipun demikian tjukup keleluasaan bagi kita di RI untuk mendjalankan usaha concretisering dilapangan ekonomi dengan aktif untuk melaksanakan pasal 33 U.U.D. 45.
   Jang langsung kita hadapi sekarang didalam hal ini ialah:
    1). penanaman modal asing dalam lapangan perindustrian/perdagangan, jang tjoraknja kapitalistis;
    2). perdagangan jang bersifat liberalistis dan jang berdjalan pesat.

Untuk menghadapi dua soal ini dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:

Keluar: memimpin perdagangan/perindustrian jang teratur dengan djalan licentiering, reglementering dan lain-lain; distribusi bahan-bahan kebutuhan hidup pokok untuk pengendalian harga dan djuga untuk memberikan waarde vastheid kepada mata uang.

Kedalam: Menjusun organisasi masjarakat atas dasar kooperatif dengan bantuan dari golongan-golongan partai-partai politik dan organisasi-organisasi Rakjat serta membimbing inisiatif dan kepentingan nasional kearah pembentukan kekajaan rakjat.

c. Selandjutnja penggiatan produksi diitudjukan kepada:

1). bahan-bahan kebutuhan hidup pokok;

2). barang-barang jang mengurangi impor;

3). barang-barang buat ekspor.

Sengadja dikatakan penggiatan produksi (bukan memperbesar), karena didalam hal ini pekerdjaan pembangunan dalam lapangan industri merupakan hal jang terpokok. Dari alat-alat produksi kira-kira 60% musnah karena siasat bumi-hangus, jang dipaksakan kepada kita oleh Belanda untuk menghadapi agresi mereka.

Pembangunan ini berkisar pada usaha-usaha:

1). memulihkan industri ketjil;

2). mulai memperbaiki industri pertengahan jang kerusakannja tidak begitu besar, termasuk tambang;

3). persiapan-persiapan untuk berdjenis-djenis pembangunan besar;

4). persiapan-persiapan untuk berdjenis-djenis pembangunan dalam industri/pertambangan dengan djalan research, projectering, kadervorming, dan lain-lain.

d. Achirnja segala usaha tadi tidak akan merupakan satu kebulatan djika dasarnja terlepas dari tangan kita ataupun kita sedikit-dikitnja tidak dapat turut tjampur.

Formil menurut U.U.D. Sementara R.I.S. memang politik perdagangan/perindustrian/tambang dan keuangan, demikian djuga levenstandaard/kesedjahteraan rakjat tergantung pada pemerintah R.I.S. Akan tetapi Pemerintah R.I. berusaha sekuat tenaga untuk memberi isi pada ketentuan formilnja dengan aktivitas-aktivitas jang telah

digambarkan diatas serta memperdjoangkan dasar-dasar jang telah diletakkan oleh Pemerintah R.I. dalam penetapan politik ekspor/impor dan harga.

Demikianlah dalam garis besarnja gambaran keadaan Kementerian Kemakmuran dalam periode tahun 1945 — 1950, ditambah dengan periode R.I. — R.I.S. dalam tahun 1956.

Dibawah ini setjara singkat beberapa keterangan mengenai bidang perindustrian dan pertambangan pada umumnja.

4. Pengchususan mengenai bidang pemerintah dan pertambangan.

Lapangan perindustrian dan pertambangan, sekarang ini telah mendjadi kompetensi terbatas pada Departemen Perdatam, karena departemen-departemen lain, jang tadinja merupakan petjahan daripada Kementerian Kemakmuran telah pula mempunjai stafnja masing-masing jang akan melakukan tugasnja sendiri. Untuk itu kita menindjau struktur, aparat, policy dan hasil-hasil jang telah ditjapai oleh aparat-aparat jang bersangkutan, ialah:

a. Djawatan Perindustrian dan Keradjinan, dan

b. Djawatan Tambang dan Geologi.

ad. a. Djawatan Perindustrian dan Keradjinan (1945-1947, 1947-1949 dan 1949-1950).

Titik berat daripada usaha dibidang perindustrian dan keradjinan pada ketika itu baru hanja meliputi bidang-bidang: industri, industri ketjil dan beberapa djenis industri menengah (menurut ukuran-ukuran kita pada ketika itu) serta keradjinan rakjat.

Kekurangan keahlian dan djumlah personil, kekurangan peralatan, kekurangan keterangan-keterangan (data), pendek kata kekurangan dalam segala-galanja memaksa kita bekerdja serba ketjil-ketjilan (op kleine-schaal)'.

Keadaan demikian terlihat, baik didalam struktur organisasi, policy maupun tjara kerdja daripada Djawatan tersebut. Djawatan Perindustrian dan Keradjinan dibagi dalam bagian bagian.

1). Bagian Penjuluhan,

2). Bagian Pengawasan,

3). Begian Penjelidikan Ekonomis/Teknologis.
4). Bagian Tekstil, dan
5). Bagian Tata Usaha.

Bentuknja sangat sederhana, bahkan didalam peralatannja masih djauh lebih sederhana daripada apa jang dimiliki oleh "Afdeeling Nijverheid" dizaman Hindia Belanda dulu, ataupun jang dimiliki oleh Kogyo Chu Zimusjo dizaman Djepang, karena peralatan dan personil jang bernaung dibawah bendera R.I. waktu itupun hanja sebagian sadja daripada jang dikuasai oleh instansil-instansi jang terdahulu itu.

Masa tahun 1945-1947 adalah masa penjusunan dan pengumpulan data-data disamping pekerdjaan rutine dan merupakan kelandjutan daripada pekerdjaan instansi-instansi jang mendahuluinja. Untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan masjarakat jang mendesak akan hasil perindustrian dan keradjinan, Balai-balai Penjelidikan (Keramik, Batik, Tekstil, Industri dan Kimia jang dapat diungsikan kepedalaman) diharapkan akan mendapatkan penemuan-penemuan atau prosedur-prosedur jang segera dapat dilaksanakan didalam masjarakat perindustrian dan keradjinan dengan menggunakan bahan-bahan jang terdapat didalam negeri.

Pada waktu itu salah satu penemuan jang penting dapat disebut: jaitu procedé memperoleh serat rami dari tanaman rami setjara micro-biologis, jang dapat membantu dibidang produksi bahan sandang; djuga procedé-procedé pengawetan makanan, dengan tjara jang sangat sederhana, tanpa mempergunakan kaleng dan lain-lain (alat pembungkus jang diimpor) jang dihasilkan oleh Balai Penjelidikan Industri pada waktu itu sangat membantu ketahanan anak-anak kita digaris depan.

Disamping itu petugas-petugas penjuluhan kita didaerah-daerah dengan Kantor Inspeksi dan Kantor Tjabang Djawatan Perindustrian dan Keradjinan sebagai pusat-pusat aktivitas memberikan bimbingan-bimbingan, baik teknis maupun organisatoris/administratif dan tidak djarang pula disertai dengan bantuan bahan-bahan pokok dibidang produksi, untuk mendjaga agar sekurang-kurangnja perusahaan-perusahaan ketjil dan terutama keradjinan rakjat bisa tetap berdjalan terus.

Penjerbuan Belanda pada 21 Djuli 1947 memaksa kita mengungsikan djawatan dari Magelang; Pimpinan Djawatan menggabungkan diri dengan Pimpinan Kementerian di Jogjakarta, sedangkan seluruh aparat jang dapat di-

ungsikan, dipindahkan ke Borobudur, dibawah naungan monumen jang bersedjarah itu. Sebagian dari staf dan pegawai djawatan jang tidak diperlukan untuk melangsungkan pekerdjaan-pekerdjaan sehari-hari (karena praktis berada dalam keadaan lumpuh), menggabungkan diri kedalam usaha-usaha untuk membantu perdjoangan digaris depan. Didalam hal ini Balai Penjelidikan Industri beserta seluruh stafnja menspesialisir diri dalam pembuatan makanan tahan lama atau membuat "Molotov cocktails" untuk kepentingan garis depan, sedangkan Balai Penjelidikan Kimia telah banjak pula memberikan djasa-djasanja dalam menghasilkan bahan-bahan untuk pertahanan negara, diantara lain bahan-bahan peledak (explosieven) untuk kepentingan pembuatan sendjata dan mesiu.

Tahun 1947-1948 adalah masa penjusunan kembali Djawatan Perindustrian dan Keradjinan di Jogjakarta hingga mentjapai taraf konsolidasi seperti jang ditjapainja di Magelang dulu, meskipun daerah operasinja telah diperketjil lagi mendjadi daerah sesudah perdjandjian Renville sadja.

Seperti halnja diterangkan diatas, maka revolusi kita telah meminta 1001 matjam pengorbanan. Pun lapangan perindustrian dan keradjinan ikut mengalami bentjana kehantjuran, bukan sadja didalam hal peralatan akan tetapi djuga didalam hal modal, jang menjebabkan perusahaan-perusahaan itu tidak mampu melandjutkan usahanja tanpa bantuan dari fihak ketiga.

Sebagai uluran tangan kearah memperingan beban jang harus dipikul perusahaan-perusahaan industri dan keradjinan jang tertimpa malapetaka sebagai korban revolusi itu, serta djuga untuk mengisi keluangan inisiatif partikelir jang kekurangan modal, maka dalam djawatan telah mulai timbul adanja ide untuk mengadakan dua matjam tindakan jang diharapkan dapat membantu untuk merehabilitasi aktivitas dibidang perindustrian ketjil dan keradjinan jang sangat menderita, jaitu: a. bantua npembiajaan (kredit) dan b. pendirian induk-induk perusahaan (centrales) dan perusahaan-perusahaan pelopor (pilot plants). Oleh Pemerintah cq. Djawatan Perindustrian dan Keradjinan, induk-induk perusahaan dan perusahaan-perusahaan pelopor (pilot plants ataupun model plants) itu tidak dimaksudkan untuk terus dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, akan tetapi pada waktunja akan diserahkan kepada organisasi dibidang perindustrian jang memenuhi sjarat untuk meneruskannja. Dibidang kredit pada masa-masa te-

rachir dari zaman R.I. telah dapat ditjiptakan suatu „Dana-Industri Ketjil", sedangkan dalam bidang pendirian induk-induk perusahaan dan perusahaan-perusahaan jang meliputi dan merupakan kelengkapan daripada usaha-usaha jang telah mempunjai histori dalam dunia perindustrian ketjil dan keradjinan rakjat daerah jang kita kuasai dulu, ialah: keramik (Jogjakarta), kulit (Magelang), pajung (Djuwiring) dan kulit (Magetan) serta sabut kelapa (Pengasih). Djuga bantuan mekanisasi telah dipikirkan dan direntjanakan. Sajang sekali bahwa karena keadaan dan suasana pada waktu itu ide-ide tersebut diatas baru dapat benar-benar direntjanakan dan dilaksanakan setelah Negara Kesatuan pulih kembali. Hal ini disebabkan djuga oleh karena terhalangnja pelaksanaan ide-ide itu karena terdjadinja clash ke-II, jang sekaligus telah pula membawa kehantjuran didalam kehidupan perindustrian dan keradjinan pada umumnja.

Akan tetapi lambat laun, pengorganisasian dan pikiran-pikiran baru sebanjak mungkin disesuaikan dengan perkembangan selama ini dan senantiasa diusahakan untuk menanggulangi kesukaran-kesukaran jang menimpa, sehingga dapat menimbulkan lagi perspektif-perspektif kemadjuan.

ad. b. **Djawatan Tambang dan Geologi.**

Dengan menjerahnja Djepang kepada Sekutu serta petjahnja perdjoangan bersendjata untuk perebutan Kemerdekaan Indonesia, maka terdjadi pula pengambi-alihan pimpinan „Chisitsu Chosajo" dari tangan orang-orang Djepang oleh Bangsa Indonesia dengan pimpinan almarhum Sdr. A.F. Lasut (jang dalam tahun 1949 telah gugur di Jogjakarta).

Nama djawatan diganti mendjadi „Pusat Djawatan Tambang dan Geologi" dibawah Kementerian Kemakmuran Republik Indonesia jang berkedudukan di Bandung. Setelah dimulai pertempuran-pertempuran melawan Nica terutama dibagiian utara kota Bandung, dan djuga karena kantor djawatan tersebut terletak disana, maka pimpinan djawatan berusaha memindahkannja kebagian selatan kota Bandung.

Tetapi arus perdjoangan kemerdekaan dalam tahun-tahun berikutnja telah memaksa kantor berpindah-pindah, mula-mula dari Bandung mengungsi ke Tasikmalaja, kemudian ke Magelang dan achirnja ke Jogjakarta. Sedang serombongan pegawai lainnja berkedudukan di Sala diperbantukan kepada Markas

Besar Tentara Republik Indonesia untuk mengusahkan tambang tembaga di Tirtomojo. Dapatlah dimengerti bahwa dalam suasana perdjoangan bersendjata ketika itu tidaklah mungkin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pertambangan dan geologi sebagaimana mestinja, ,namun demikian usaha-usaha konsolidasi kedalam telah mentjatat pula hasil-hasil jang njata.

Dalam pada itu pada tahun 1947 pemerintah federal dibawah kekuasaan Belanda mendirikan kembali "Dienst van de Mijnbouw" di Bandung. Tetapi tak lama kemudian pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 jang kemudian disusul dengan terbentuknja kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, telah memungkinkan pembentukan kembali sebuah Djawatan Pertambangan R.I. jang berkantor di Bandung, dengan geologi sebagai bagian didalamnja.

Aktivitas utama pada periode ini antara lain ialah:

1). menjelamatkan dokumen-dokumen, laporan-laporan dan peta-peta;
2). mengkoordinasi/mengawasi pertambangan-pertambangan;
3). mendidik kader-kader geologi dan pertambangan, dengan mendirikan Sekolah Pertambangan dan Geologi Menengah Pertama/Atas dan Akademi Geologi Pertambangan;
4). menterdjemahkan Mijn-ordonnantie, Mijnwet dan Mijn politie;
5). menjelidiki setjara geologis dan pertambangan diwilajah jang tidak diduduki Belanda.

Dibidang kegiatan penjelidikan lapangan tak banjak jang dapat dilakukan selama tahun-tahun perdjoangan bersendjata itu. Selain tenaga-tenaga ahli untuk melaksanakannja memang belum tersedia, kesulitan peralatan dan pengangkutan pada umumnja memaksa pekerdjaan hanja dapat terlaksana sekedarnja didaerah Djawa Tengah dan Djawa Timur.

Sementara itu, akibat agresi tentara Belanda daerah de fakto Republik Indonesia djuga mendjadi semakin sempit.

Dari laporan jang disusun almarhum Sdr. A.F. Lasut, Kepala Pusat Djawatan Tambang dan Geologi semasa tahun 1945 — 1948, ternjata bahwa banjak rentjana kerdja lapangan pada waktu itu terpaksa tidak dapat dilakukan sama sekali atau hanja untuk sebagian sadja terlaksana. Di Djawa jaitu didaerah

Djalen (Tulungagung) dan Tjikalong (Priangan Timur) masih sempat dilakukan penindjauan-penindjauan singkat atas endapan-endapan batu-bara jang terdapat disitu. Meskipun hasilnja tidak menundjukkan suatu kemungkinan ekonomi jang ebrarti, namun rakjat setempat mengadakan penggalian-penggalian djuga untuk sekedar memenuhi kekurangan bahan bakar dalam keadaan jang serba sulit pada waktu itu.

Dalam bidang penjelidikan geologi teknik, kegiatan jang dilakukan agak sedikit lebih banjak, meskipun sifatnja kebanjakan adalah penjelidikan-penjelidikan ketjil, diantaranja pemeriksaan tanah longsor, pemeriksaan sumber-sumber air, dan lain sebagainja. Disamping itu telah dapat dilaksanakan pula penjelidikan-penjelidikan pendahuluan atas projek bendungan Kali Sampean (Besuki) dan waduk Dawuhan (Madiun). Semua penjelidikan ini tidak sampai diselesaikan dengan baik karena keadaan tidak mengizinkan.

Akibat penjerbuan tentara Belanda ke Jogjakarta pada achir 1948 maka terhentilah untuk sementara waktu segala kegiatan penjelidikan geologi didaerah de fakto R.I.

Setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 terdapat dua djawatan jang mengurus soal-soal jang bertalian dengan pertambangan, jaitu:

a. Pusat Djawatan Pertambangan (R.I.S.) jang berkedudukan di Djakarta dibawah Kementerian Kemakmuran R.I.S.
b. Djawatan Tambang dan Geologi R.I. di Jogjakarta dibawah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian R.I.

Adapun tugas Djawatan Tambang dan Geologi R.I. ialah : pekerdjaan-pekerdjaan geologi dan pertambangan dibekas daerah „Renville" (Keresidenan Banten, Djawa Tengah, bagian tenggaran dan timur, Djawa Timur, Pulau Belitung, daerah-daerah sekitar Medan, Palembang dan Padang).

Suatu kedjadian diluar jang penting artinja untuk Djawatan adalah ditambahkannja bagian Geologi pada Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia (dahulu), di Bandung dalam bulan Agustus 1950 karena sebagian dari sardjana-sardjana lulusan pendidikan inilah jang merupakan staf ahli geologi djawatan sekarang dan dimasa depan.

Dengan terbentuknja kembali Negara Kesatuan R.I. pada tanggal 17 Agustus 1950 maka diadakan integrasi antara Djawatan Pertambangan R.I.S. jang berkedudukan di Djakarta dengan perwakilannja di Bandung, sedangkan bekas kantor

Djawatan Pertambangan di Jogjakarta merupakan Tjabang Djawatan Pertambangan jang berada dalam likwidasi.

Kegiatan dilapangan dalam djangka waktu ini meliputi ekspedisi ke Pulau Sumba (1949 — 1950), untuk pemetjahan soal-soal kekurangan akan air, penjelidikan-penjelidikan geologi, teknik, terutama di Djawa Barat mengenai tanah longsor, pengamatan vulkanologi terutama di Gunung Kelud jang meletus pada achir Agustus 1951.

B. PERIODE SURVIVAL DAN PERIODE CHALLENCE & RESPONSE TERHADAP DEMOKRASI TERPIMPIN (1950 — 1959).

1. Organisasi bidang perindustrian dasar.

Perkembangan organisasi bidang perindustrian dasar pada periode 1950-1959 merupakan proses jang terus-menerus mentjari penjempurnaan dan penjesuaian dengan tuntutan zaman dan revolusi.

Selama masa ini perkembangan organisasi dapat dibagi dalam dua bagian:

a. Bagian jang mengenai pemeliharaan industri jang sudah ada (existing industries).
b. Bagian jang meliputi projek-projek industri dan pembangunannja.

Adapun bahan-bahan jang mengenai pemeliharaan indusri-industri jang sudah ada, terutama berkisar sekitar pembagian djatah devisa untuk mengimpor bahan-bahan baku/penolong dan spareparts.

Aparatur pemerintah jang bertugas mengadakan pengamatan dan pengawasan terhadap industri/tambang pemerintah jang ada, terdiri atas Biro Urusan Industri (Bupin) dan Biro Urusan Tambang Negara (Buptan) jang kedua-duanja termasuk dalam lingkungan Kementerian Perindustrian.

Badan jang mengenai projek-projek industri dan pembangunannja berkisar sekitar projek-projek baru dan projek-projek perluasan projek industri jang dikerdjakan oleh pemerintah dan jang dilaksanakan oleh fihak swasta.

Selama masa 10 tahun ini kebidjaksanaan pemerintah terutama dititik beratkan kepada usaha-usaha organisasi dan kegiatan swasta, sedangkan projek-projek jang langsung dilaksanakan oleh pemerintah djumlahnja sangat terbatas.

Sebagian besar dari projek-projek dalam pembangunan lima tahun dimasa itu, seperti jang termaktub didalam „Rentjana dan perkembangan usaha-usaha bidang perindustrian dasar", dilaksanakan oleh Biro Perantjang Negara dan B.I.N.

Dapat dikatakan, bahwa projek-projek jang belum dapat dilaksanakan dalam masa 10 tahun ini, ditjantumkan didalam daftar projek-projek Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tahapan jang menjusulnja.

Dalam menghadapi pembebasan Irian Barat, maka sedjak tahun 1958, telah diambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda dan dimasukkan kedalam Bappit. Sebagian besar dari perusahaan-perusahaan tersebut kemudian didjadikan Perusahaan Negara, seperti perusahaan-perusahaan mesin, pabrik semen Padang, pemintalan Tegal, pabrik kertas Letjes dan Padalarang, dan sebagainja.

Mengenai Bappit, maka dalam rangka perdjoangan pengembalian kekuasaan wilajah Irian Barat dan berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 jo U.U. No. 79 tahun 1957, tentang pernjataan keadaan perang atas seluruh wilajah Republik Indonesia serta Surat-Perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer No. S.P./P.M./077/ 1957 tanggal 10 Desember 1957 tentang perintah kepada semua Penguasa Militer Angkatan Darat untuk mengambil oleh management semua perusahaan Belanda serta untuk mendjaga kelangsungan dan kelantjaran produksi dan djalannja perusahaan jang diambil alih, dibentuklah suatu badan dibawah Kementerian Perintdustrian jang diserahi tugas chusus untuk menjelenggarakan pimpinan disemua Perusahaan Industri dan Tambang Belanda. Badan ini disebut Badan Penjelenggaraan Perusahaan-perusahaan Industri-industri Tambang (Bappit).

Perkembangan selandjutnja ialah mempersatukan perusahaan-perusahaan B.I.N. dan ex Bappit mendjadi P.N.-P.N. dibawah lingkungan Deperdatam. Adapun perusahaan-perusahaan lainnja baik dari B.I.N. maupun dari ex Bappit dipetjah-petjah dalam penguasaan Kementerian-kementerian/Departemen-departemen jbs. menurut bidangnja masing-masing, termasuk djuga sekarang ini Deperindra.

2. Rentjana dan perkembangan bidang perindustrian dasar.

Rentjana-rentjana industrialisasi selama masa-masa diatas, ada tiga matjam:

a. rentjana Kasimo (landjutan pemikiran rentjana Jogjakarta hingga tahun 1952);
b. rentjana urgensi (1952-1955);
c. rentjana pembangunan lima tahun (1955-1960).

a. Rentjana Kasimo pada hakekatnja tidak banjak berbeda dengan pandangan-pandangan pemerintah federal jang termasuk dalam rentjana industrialisasi dari Drs. van Warmeloo. Titik beratnja ialah bahwa pemerintah menjediakan fasilitas-fasilitas penjuluhan, penelitian dan perentjanaan, ,sedangkan pelaksanaannja diserahkan kepada fihak-fihak jang menaruh minat dalam bidangnja masing-masing dalam hal ini terutama fihak swasta. Projek-projek industri diarahkan kepada produksi bahan-bahan baku dan penolong jang diperlukan untuk industri-industri lainnja (manufacturing) termasuk industri-industri rakjat, seperti pemintalan, cambrics, dsb. Dilihat dari sudut location dan penjebaran (verspreiding), maka diutamakan perkembangan industri di Pulau Djawa jang memiliki banjak tenaga, dekat pada pasaran dan social overheads jang agak lengkap. Sedangkan perkembangan industri diluar Djawa sama sekali belum diperhatikan.

b. Rentjana urgensi.

Rentjana urgensi ini mendasarkan pemikiran-pemikirannja atas landjutan rentjana Kasimo-Warmeloo dengan menitik beratkan kepada:

1). projek-projek bahan baku/penolong jang dilaksanakan oleh B.I.N.;
2). projek-projek induk (centrales);
3). projek-projek mekanisasi;
4). projek-projek pelopor (pilot projects);
5). balai-balai industri ketjil;
6). dana industri ketjil.

Jang termasuk dalam bidang perindustrian dasar ialah projek-projek jang dilaksanakan oleh B.I.N. sedangkan projek-projek lainnja jaitu projek-projek induk, projek-projek mekanisasi, pilot projects, balai-balai penelitian dan dana industri ketjil masuk bidang perindustrian rakjat. Pemerintah memberi pula segala fasilitas-fasilitas kepada pengusaha nasional untuk mendirikan perusahaan-perusahaan perindustrian.

c. Pembangunan lima tahun:

Rentjana ini dibagi dalam projek-projek jang akan diselenggarakan oleh negara, sedang untuk sektor-sektor swasta diberi petundjuk-petundjuk, peraturan-peraturan dan rekomendasi-rekomendasi sehingga tudjuannja dapat tertjapai.

Projek-projek itu terdiri dari:

1). projek-projek istimewa;
2). projek-projek pusat;
3). projek-projek daerah.

Jang termasuk bidang perindustrian dasar ialah projek-projek istimewa seperti projek Asahan, projek besi-badja, projek-projek industri kimia & pupuk, serta projek rayon; sedangkan projek-projek daerah meliputi projek kostik soda di Waru, pemintalan Tjilatjap, semen Gresik, kertas Blabag, botol Surabaja.

Sebagian besar dari projek-projek tersebut dilakukan oleh Biro Perantjang Negara dan B.I.N. Dapat dikatakan bahwa projek-projek tersebut dilaksanakan dalam masa 10 tahun ini, ditjantumkan dalam daftar projek-projek Pembangunan Nasional Semesta Berentjana jang menjusulnja.

Pembangunan projek-projek baru maupun perluasan perusahaan-perusahaan jang sudah berdjalan, dibidang swasta diatur dalam Bedrijfsreglementering Ordonnantie 1934 jang isi dasarnja mengatur perkembangan industri jang dianggap penting pada masa itu. Projek-projek ini meliputi bidang industri tekstil, pertjetakan, es, remilling, penggilingan padi, rokok-rokok putih, dan sebagainja. Dalam prakteknja peraturan ini mempertahankan fikiran kolonial Belanda jang hendak membatasi usaha-usaha nasional kearah perkembangan jang sehat, guna kepentingan mereka sendiri.

Semua rentjana diatas, jang djalan dan jang tidak djalan, lambat laun diatur menurut kebutuhan serta terpusat kepada aktivitas sentral daripada pemerintah dan pada umumnja berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

3. Keadaan industri, chususnja jang termasuk dibidang Deperdatam.

Setelah berachirnja periode Revolusi Phisik (1945-1950) dimulai Periode Survival.

Setelah berdjoang selama 5 tahun, dengan pengorbanan jang banjak, mulailah periode baru, dimana banjak pengusaha-

pengusaha industri chususnja didaerah R.I. mempunjai harapan, akan dapat memulai kembali usaha-usaha mereka jang telah hantjur sebagai akibat politik bumi-hangus, dengan mendapat fasilitas-fasilitas seperti jang didapat oleh pengusaha-pengusaha industri didaerah pendudukan Belanda diperiode sebelum tahun 1950.

Fasilitas-fasilitas jang diharapkan adalah berupa rehabilitasi dari perusahaan-perusahaan dan supply dari bahan-bahan serta spareparts jang teratur untuk kelandjutan perusahaan-perusahaan.

Tetapi ternjata bahwa harapan ini hanjalah berupa harapan, karena tidak lama setelah tahun 1950, pemerintah waktu itu telah menempuh kebidjaksanaan jang bersifat liberal, dan melepaskan kegiatan dibidang ekonomi termasuk perindustrian kepada aktivitas pengusaha-pengusaha.

Dengan kebidjaksanaan tersebut pembangunan perindustrian tidak mempunjai arah jang tegas bahwa kita akan mengindustrialisasi negara kita dalam arti jang sebenar-benarnja serta bertudjuan supaja kita dapat berdiri diatas kaki sendiri.

Tjiri selandjutnja dari kebidjaksanaan liberal waktu itu adalah pengimporan barang-barang setjara bebas, sehingga merupakan saingan jang berat bagi perusahaan-perusahaan dalam negeri, hal mana dengan sendirinja mengakibatkan kurangnja animo dari pengusaha-pengusaha untuk bergerak dibidang industri setjara sungguh-sungguh, melainkan mereka lebih suka bergerak dibidang impor.

Sebagai akibat dari kebidjaksanaan liberal, chususnja dibidang perdagangan dan perindustrian, seperti telah dikemukakan diatas, perusahaan-perusahaan industri dalam negeri mengalami nasib jang dapat dikatakan menjedihkan sebab:

a. djika keadaan devisa tjukup, bahan-bahan baku serta spareparts djuga dapat disediakan dengan tjukup, tetapi pengimporan barang djadi djuga dilakukan setjara leluasa, maka perusahaan dalam negeri mengalami saingan jang hebat;
b. djika keadaan devisa terbatas, bahan-bahan baku serta spareparts djuga hanja dapat diimport setjara terbatas, maka perusahaan-perusahaan industri hanja dapat bekerdja setjara terbatas.

Karena ternjata bahwa saingan terhadap berbagai hasil dalam negeri semakin hebat dan akan mengakibatkan

matinja industri jang bersangkutan, maka telah diambil tindakan untuk tidak memberi izin impor lagi untuk beberapa djenis barang seperti :

a. berbagai djenis tekstil seperti sarong, selendang dan sebagainja;
b. tjat-tjat djadi untuk bangunan dan mesin terketjuali tjat luar kapal dan tjat semprot;
c. buku-tulis;
d. bir;
e. battery kering;
f. kertas gosok (schuurpapier);
g. korek api;
h. beberapa barang lainnja.

Tindakan ini njata memberi harapan jang baik untuk perkembangan industri jang bersangkutan.

Seperti telah dikemukakan diatas, tambahan perusahaan-perusahaan industri hanja terdapat pada bidang-bidang industri jang ketjil, hal mana antara lain disebabkan karena:

a. pengusaha-pengusaha lebih suka bergerak dibidang perdagangan, chususnja impor, karena lebih besar kemungkinan untuk mendapat keuntungan;
b. pengusaha-pengusaha chawatir untuk menanamkan modal jang besar diindustri, karena belum jakin akan bersaingan dengan barang-barang impor;
c. pengusaha-pengusaha jang berminat untuk mendirikan industri jang agak besar umumnja kekurangan modal.

Bagaimanapun djuga industri-industri besar perlu didirikan, lebih-lebih industri-industri jang dapat mengobah bahan-bahan dalam negeri untuk didjadi barang-barang jang sangat diperlukan oleh umum. Maka pemerintah dengan perantaraan Bank Industri Negara telah mendirikan berbagai industri, antaranja jang dewasa ini termasuk bidang dan tugas wewenang Deperdatam jaitu:

1). Pabrik semen Gresik, dengan kapasitas mula-mula 250.000 ton setahun.

2). Pabrik ban Intirub, dengan kapasitas 195.000 buah ban luar & dalam setahun.

3). Pabrik kertas Blabag, dengan kapasitas 3.600 ton setahun.

4). Pabrik gelas Surabaja, dengan kapasitas 50 ton sehari.

5). P.T. Gaja Motor, dengan kapasitas 3.600 kendaraan bermotor setahun.

6). P.T. I.S.C., dengan kapasitas 3.600 kendaraan bermotor setahun.

Djika kita melihat perkembangan dari beberapa industri jang penting antara 1950 dan 1959 (sedjauh industri-industri tersebut termasuk bidang tugas Deperdatam kita akan mendapat gambaran sebagai berikut:

Djenis industri	Djumlah perusahaan		Produksi	
	1950	1959	1950 (taksiran)	1959
Industri ban mobil	1	2	± 145.000 buah	± 36.000 buah
Industri semen	1	2	± 137.000 ton	375.000 ton
Industri kertas	2	3	3.600 ton	10.100 ton
Industri gelas (mesin)	—	1	—	12.000 ton
Industri besi beton	—	1	—	1.900 ton
Industri lampu pidjar	1	3	1.610.000 buah	6.000.000 buah
Assembling mesin djahit	—	6	—	44.000 buah
Assembling radio	—	14	—	29.523 buah
Assembling accu	2	5	3.000 buah	70.432 buah

Demikian sekedar gambaran tentang keadaan industri antara 1950 sampai chususnja jang termasuk bidang Deperdatam.

Seperti jang telah diuraikan diatas (halaman 23) kegiatan dilapangan dalam djangka waktu ini meliputi pemetjahan soal-soal kekurangan akan air, penjelidikan-penjelidikan geologi teknik dan pengamatan vulkanologi.

Beberapa orang diantara ahli-ahli bangsa Belanda jang dulu bekerdja pada Dienst van de Mijnbouw kini melandjutkan perdjandjian-kerdjanja dengan Djawatan Pertambangan, dan mengadakan kerdjasama dengan tenaga-tenaga Indonesia.

Pulihnja keamanan disebagian besar wilajah Indonesia pada hakekatnja telah memungkinkan lagi kerdja lapangan, tetapi dalam masa peralihan ini ternjata banjak sekali waktu jang terpakai untuk membereskan susunan organisasi, melantjarkan tatatjara kerdja baru, dan mengatur kembali arsip-

arsip serta peralatan jang selama ini telah banjak bertjeteran.

Penjelidikan-penjelidikan lapangan jang dapat terus dilakukan tanpa banjak hambatan terutama sekali terletak dibidang geologi teknik meskipun kesemuanja itu hanja merupakan projek-projek ketjil sadja. Penjelidikan geologi teknik untuk Waduk Tjatjaban (Djawa Tengah) pada waktu itu merupakan suatu permulaan sadja daripada serangkaian penjelidikan jang berlangsung sampai tahun 1954.

Dibidang bahan galian, jang perlu ditjatat disini sebagai projek besar adalah penjelidikan geologi pendahuluan untuk Projek Pabrik Semen Gresik jang berlangsung dalam tahun 1950. Penjelidikan ini telah dapat menundjukkan tentang tersedianja bahan mentah semen, (batu-gamping, lempung, pasir dan sebagainja) dalam djumlah tjukup didaerah sekitar Gresik jang telah direntjanakan.

Pada tanggal 22 Pebruari 1952 Djawatan Pertambangan dibagi mendjadi dua, Djawatan Pertambangan dan Djawatan Geologi dalam lingkungan Direktorat Pertambangan Kementerian Perekonomian menurut Surat Keputusan Menteri Perekonomian R.I. No. 2370a/m. Maka timbullah se-olah-olah dorongan baru untuk segera meningkatkan kegiatan-kegiatan penjelidikan lapangan, ,baik dibidang pertambangan maupun dibidang geologi dan untuk menjempurnakan soal-soal jang menjangkut bidang-bidang administrasi, dan kurangnja tenaga ahli. Namun adanja kerdjasama dengan luar negeri telah menambah kemampuan Djawatan Pertambangan dan Djawatan Geologi.

Dengan terbaginja Djawatan Pertambangan R.I. mendjadi dua Djawatan maka dibawah ini diuraikan tugas/kegiatannja, dalam waktu antara tahun 1952-1959.

a. Djawatan Pertambangan.
b. Djawatan Geologi.

a. Djawatan Pertambangan:

Segala pekerdjaan jang dilakukan oleh Djawatan Pertambangan pada waktu itu, diantaranja adalah :

1. mengurus soal-soal pemberian idzin penambangan, pengolahan, dan kuasa pertambangan, termasuk minjak dan gas bumi;

2. mengurus soal-soal hukum pertambangan dan segala sesuatu jang berhubungan dengan pungutan-pungutan negara (Cijns) dalam bidang pertambangan;
3. mengawasi dan membimbing pembangunan-pembangunan/perusahaan-perusahaan pertambangan dengan memeriksa (membuat proses perbal) dari ketjelakaan-ketjelakaan jang terdjadi dalam perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut.

Undang-undang Pertambangan jang berlaku pada waktu itu sebagian besar diambil dari Indische Mijnwet (staatsblad 1899 No. 214) jang tidak sesuai lagi dengan alam Sosialisme Indonesia, karena undang-undang tersebut telah dibuat oleh pemerintah Belanda sendiri pada tahun 1899 dimana jang dipentingkan hanjalah keuntungan-keuntungan untuk fihak pendjadjah, dengan tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan ataupun kebutuhan-kebutuhan dari Rakjat Indonesia sendiri.

Dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959, kita telah kembali kepada U.U.D. 1945, sehingga segala sesuatunja haruslah pula disesuaikan dengan alam „kembali ke U.U.D. 45", dimana peraturan-peraturan lama sedapat mungkin diubah dengan peraturan-peraturan baru jang lebih menguntungkan Rakjat Indonesia.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1960 tentang pertambangan jang kemudian mendjadi Undang-undang No. 37 Perpu tahun 1960, maka sedjak 14 Oktober 1960 Indische Mijnwet (staatsblad 1899 No. 214) jang selama itu masih dipakai, tidak berlaku lagi dan pengaturan minjak dan gas bumi dipisahkan dengan suatu perundang-undangan sendiri ialah Undang-undang No. 44 Perpu tahun 1960 tentang pertambangan, minjak dan gas bumi.

Seperti tertjantum didalam pasal 2 Undang-undang No. 37 Perpu tahun 1960 tentang pertambangan, maka segala bahan bumi dalam wilajah hukum Indonesia, baik jang merupakan letakan-letakan atau timbangan-timbangan alam, adalah merupakan kekajaan nasional jang dikuasai oleh negara. Djelas, bahwa undang-undang tersebut diatas sudah lebih sesuai dengan perkembangan-perkembangan keadaan, karena pada hakekatnja ia tidak lagi mementingkan keuntungan pribadi atau sesuatu golongan ,akan tetapi undang-undang

ini telah menetapkan bahwa semuanja ditudjukan bagi kepentingan hadjat hidup seluruh masjarakat Indonesia.

Sebagai pelaksanaan undang-undang diatas, telah ditetapkan dalam P.P. No. 39/60 tentang penggolongan bahan-bahan galian sebagai berikut:

1. Bahan-bahan galian golongan strategis;
2. Bahan-bahan galian golongan vital;
3. Bahan-bahan galian jang tidak termasuk golongan-golongan 1 dan 2.

Mengingat kemadjuan-kemadjuan dibidang teknik pertambangan, perkembangan kegunaan bahan-bahan galian maka P.P. 39/60 dirobah (disempurnakan) mendjadi P.P. No. 25 tahun 1964. Perundang-undangan Pertambangan ini masih terus disempurnakan agar achirnja mentjapai kesempurnaannja.

b. Djawatan Geologi:

Djawatan Geologi menjelidiki segala matjam dan semua kekajaan alam didalam tanah diseluruh Indonesia selain minjak bumi, memberikan petundjuk kepada instansi-instansi jbs. serta mengedarkan laporan-laporan jang diperlukan oleh instansi tersebut serta mengadakan pengawasan gunung api.

Pada tanggal 30 Nopember 1957 Kementerian Perkonomian mendjadi Kementerian Perindustrian dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 4247 a/m; dalam Surat Keputusan tersebut ditjantumkan pula tugas Djawatan Geologi sebagai berikut:

1) Mengumpulkan keterangan-keterangan untuk dapat dipergunakan dalam menentukan kebidjaksanaan tentang pemakaian geologi.
2) Melaksanakan kebidjaksanaan Menteri dalam lapangan geologi.
3) Menjelenggarakan inventarisasi kekajaan mineral bumi Indonesia dengan menggunakan semua tjara berdasarkan ilmu pengetahuan geologi.
4) Menjelenggarakan penjelidikan-penjelidikan kekajaan mineral itu dan mempergunakan hasil-hasil penjelidikan itu untuk kepentingan negara dan dunia ilmu-pengetahuan pada umumnja, serta mengawasinja.
5) Memberi nasehat dalam lapangan geologi teknik untuk pekerdjaan sipil, tanah-tanah longsor dan lain-lain peristiwa-perintiwa alam jang bersifat geologis.

6) Mengadakan pengawasan atas pemakaian kekajaan air dalam tanah dan pemboran artesis untuk air minum dan untuk perusahaan.
7) Menjelenggarakan penjelidikan dan pendjagaan-pendjagaan gunung berapi jang dipandang perlu untuk kepentingan umum.

Dengan dibentuknja Kabinet Karya dalam bulan Djuli 1959 Djawatan Geologi masuk dalam Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan. Djawatan jang sebelum Perang Dunia II menitik-beratkan kegiatannja dalam penjelidikan bahan galian dan pertambangan untuk kepentingan kolonial, sekarang mengambil bagian penting dalam hampir semua projek pembangunan Indonesia.

Kegiatan Djawatan Geologi:

Penjelidikan-penjelidikan besar, disamping berbagai penjelidikan ketjil, jang telah dapat dilaksanakan antara tahun-tahun 1952-1959 dibidang bahan galian antara lain adalah:

Penjelidikan asbes di Halmahera (1953), penjelidikan endapan belerang dikawah Namora Ilangit, Tapanuli (1954), penjelidikan endapan pasir kwarsa dipantai Tuban (1956), penjelidikan bidji tembaga didaerah Timbulan (1956, 1957), penjelidikan endapan pasir titanomagnetit didaerah Tjilatjap (1956), penjelidikan air danau Kawah Idjen (1956-1957), penjelidikan Dolomit didaerah Sekapuk dan Gunung Kaklak, Djawa Timur (1956), penjelidikan bahan pengganti felspat didaerah Lodojo, Djawa Timur (1956), penjelidikan bahan tahan api didaerah Pamotan, Djawa Tengah (1956), penjelidikan mangaan di Djawa dan Kalimantan Barat (1959).

Disamping itu Biro Perantjang Negara (B.P.N.), jang sedang menjusun rantjangan untuk mendirikan Projek Besi-badja, mengadakan kerdjasama dengan Djawatan Geologi untuk mengadakan penjelidikan-penjelidikan geologi atas beberapa daerah endapan batubara dan bidji-besi di Sumatera, Kalimantan dan Djawa. Penjelidikan-penjelidikan jang berlangsung dalam tahun 1956 sebagai penjelidikan-penjelidikan pendahuluan, sebagian kemudian dilandjutkan lagi dalam tahun 1958. Dalam kegiatan-kegiatan ini B.P.N. telah meminta Westdeutsches Ingenieursburo (Wedexro) bertindak sebagai konsultan. Pekerdjaan-pekerdjaan gabungan jang dilakukan oleh Djawatan Geologi-B.P.N. dan Wedexro ini jang terpenting diantaranja

meliputi penjelidikan bidji-besi di Lampung, Sumatera Selatan (1965), penelidikan bidji-besi di Djampang Kulon, Djawa Barat (1956), penjelidikan bidji-besi di Gunung Kukusan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Tenggara (1956), penjelidikan bidjibesi didaerah Pleihari, Kalimantan Selatan (1956), penjelidikan batubara di Pulau Laut (1956, 1958) dan penjelidikan batubara di Pulau Sebuku (1956, 1958).

Dalam hubungan penjelidikan-penjelidikan ini patut kiranja ditjatat bahwa, apabila dalam kegiatan-kegiatan tahun 1956 masih banjak pekerdjaan-pekerdjaan pimpinan dan pengawasan dilapangan jang diserahkan kepada para ahli Wedexro, sebaliknja dalam kegiatan-kegiatan tahun 1958 itu pekerdjaan-pekerdjaan dilapangan seluruhnja telah dapat dilaksanakan oleh tenaga-tenaga Djawatan Geologi sendiri, sebab sedjak tahun 1956, para ahli dan asisten ahli geologi tamatan pendidikan didalam negeri, berangsur-angsur mulai menggabungkan diri pada dan memperkuat korps ahli Djawatan Geologi.

Selain pekerdjaan-pekerdjaan dibidang bahan galian tersebut diatas dalam masa 1952-1959 masih dilakukan pula beberapa penjelidikan besar dibidang geologi teknik dan geohidrologi, diantaranja jang terpenting ialah:

penjelidikan waduk Sempor, Djawa Tengah (berturut-turut mulai 1953), penjelidikan waduk Djatiluhur, Djawa Barat (berturut-turut mulai 1952), penjelidikan air bawan tanah didaerah Gunung Kidul, Djawa Tengah (1957), penjelidikan tanah longsor di Sibolga, Tapanuli (1957), penjelidikan air di Bali Selatan (1957), dan pemboran artetis disedjumlah kota di Djawa.

Dalam pada itu, segi pendidikanpun tidak dilupakan. Pada tahun 1953, Djawatan Geologi bersama-sama dengan Djawatan Pertambangan telah mendirikan Sekolah Ahli Pertambangan/Geologi jang dalam pelaksanaannja bekerdja sama dengan Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti/Alam Universitas Indonesia (dahulu).

***

C. PERIODE PANTJAWARSA MANIPOL DAN MENDJELANG BERDIKARI (1959-1965.)

1. Organisasi Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan.

Setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959, maka oleh Presiden dikeluarkan keputusan untuk membentuk kabinet baru jang disebut Kabinet Kerdja. Dengan keputusan tersebut maka Kementerian Perindustrian dipetjah mendjadi dua departemen ialah Departemen Perindustrian Rakjat dan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan.

Departemen Perindustrian Rakjat memimpin/membimbing industri nasional jang menurut penggolongannja termasuk didalam bidangnja. Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan memimpin/membimbing industri dan pertambangan jang menurut penggolongannja termasuk didalam lingkungannja.

Berbitjara chusus mengenai Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan bentuk dan susunan organisasinja ditetapkan oleh J.M. Menteri Perdatam sementara menunggu keputusan P.J.M. Presiden dan dalam hal itu mendjadi tampak menondjol bidang industri dasar/berat dan chusus pertambangan.

Pada awal periode Pantjawarsa Manipol, Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan (Deperdatam) kemudian menjesuaikan usaha-usahanja dengan Ketetapan M.P.R.S. No. II tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama tahun 1961-1969 dengan menjesuaikan organisasinja sebagaimana dimuat dalam S.K. No. 1599/M/Perdatam/61, jang pada dasarnja menjatakan, bahwa kegiatan daripada Departemen ini disamping memupuk kelangsungan hidup dan memperkembangkan industri-industri nasional jang telah ada dalam lingkungannja, djuga melaksanakan pembangunan projek-projek jang pada dasarnja telah digariskan pada Departemen dengan susunan organisasi jang disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas-tugas pelaksanaannja.

Dalam mendjalankan pimpinan umum Departemen, Menteri dibantu oleh seorang Sekretaris Djenderal.

Adapun lapangan kerdja dan tugas kekuasaan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan.

Mentjakup antara lain:

a. Perindustrian Dasar/Berat.
b. Pertambangan, termasuk Pertambangan Minjak dan Gas Bumi.
c. Perindustrian Perkapalan.
d. Lapangan-lapangan kerdja lain jang kemudian ditentukan oleh Pemerintah.

Tugas dan kekuasaan:

a. Kebidjaksanaan.
b. Penjelidikan.
c. Penjelenggaraan, perbengkelan dan perlengkapan.
d. Pembiajaan dan pelaksanaan.
e. Pemeliharaan, perkembangan, bimbingan dan pembinaan.
f. Pengaturan, perizinan.
g. Pemeriksaan dan pengawasan.

Susunan Pusat Departemen meliputi:

a. Dewan Penasehat.
b. Dewan Industrialisasi.
c. Pusat Tata Usaha/Sekretariat.
d. Biro Perusahaan Negara.
e. Biro Sekretariat Djenderal.

Sedangkan organ-organ eksekutif diluar pusat Deperdatam terdiri dari:

a. Biro Industrialisasi.
b. Djawatan Geologi.
c. Djawatan Pertambangan.
d. Djawatan Perindustrian Perkapalan.
e. Biro Minjak dan Gas Bumi.
f. Badan-badan Pimpinan Umum (B.P.U.) jang keseluruhan-nja ada tudjuh terdiri atas:

    1). B.P.U. Mesin/alat-alat Listrik.
    2). B.P.U. Industri Kimia.
    3). B.P.U. Industri Alat Pengangkutan.
    4). B.P.U. Perusahaan Batubara Negara.
    5). B.P.U. Perusahaan Tambang Timah Negara.
    6). B.P.U. Perusahaan Minjak dan aGs Bumi.
    7). B.P.U. Perusahaan Tambang Umum Negara.

Organisasi di Daerah:

a. Perwakilan-perwakilan Departemen Perindustrian Dasar/ Pertambangan.
b. Perusahaan-perusahaan Negara.

Suatu Badan dalam Pusat Departemen jang sifatnja eksekutif adalah Biro Perusahaan Negara jang bertugas sebagai berikut:

a. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan jang diperlukan oleh Menteri mengenai B.P.U.-B.P.U. dan Perusahaan-perusahaan Negara dalam lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan sesuai dengan U.U. No. 19 Prp. tahun 1960.
b. Memadjukan usul-usul kepada Menteri mengenai pelaksanaan djalannja Perusahaan-perusahaan Negara termaksud.
c. Melaksanakan usaha-usaha atas Instruksi Menteri guna kelantjarannja djalannja B.P.U.-B.P.U. dan Perusahaan-perusahaan Negara.

Tugas-tugas dari organ-organ eksekutif diluar pusat Deperdatam masing-masing adalah sebagai berikut:

Biro Industrialisasi.

a. Merentjanakan industrialisasi berdjangka, berdasarkan rentjana Pemerintah.
b. Mengumpulkan keterangan-keterangan dan bahan-bahan mengenai laporan industri dasar/berat baik dari dalam negeri, maupun luar negeri jang diperlukan serta membahasnja, guna merumuskan rentjana industrialisasi di Indonesia.
c. Mengumpulkan tawaran-tawaran kredit luar negeri mengenai projek-projek jang masuk dalam wewenang Biro Industrialisasi;
d. Membuat rentjana pembangunan projek-projek industri dasar/berat untuk memenuhi program Pemerintah.
e. Mengadakan hubungan dan pembitjaraan dengan badan-badan luar negeri untuk melaksanakan projek-projek industri dasar dan berat.
f. Menjiapkan segala sesuatu jang bertalian dengan pendirian projek-projek industri dasar/berat jang telah mendjadi program Departemen.
g. Melakukan penanda-tanganan kontrak-kontrak kredit luar negeri berdasarkan surat kuasa dari Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

h. Melaksanakan pendirian projek-projek jang telah disetudjui oleh Menteri Perdatam.

i. Mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan industri dasar/berat untuk disampaikan kepada Menteri guna menetapkan garis kebidjaksanaan Menteri Perdatam.

j. Melaksanakan kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Menteri Perdatam mengenai bidang perindustrian.

k. Mengatur perizinan pendirian industri-industri dalam bidang pengurusan Biro Industrialisasi.

l. Mengatur kebutuhan dan penggunaan devisa.

m. Memberi petundjuk, bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan projek-projek industri dasar/berat.

n. Mengusahakan hal-hal jang perlu untuk pemeliharaan dan perkembangan industri jang telah ada, baik milik Pemerintah maupun milik swasta.

o. Menjenggarakan pandidikan kader-kader, baik setjara tersendiri, maupun setjara terkoordininasi dengan unit-unit lain dalam Deperdatam.

p. Mengadakan penjuluhan tentang pembangunan industri, baik setjara siaran, publikasi maupun visuil.

Djawatan Geologi.

a. Mengadakan penjelidikan geologi diseluruh wilajah Indonesia untuk kepentingan pemakaiannja setjara praktis (applied geology) maupun untuk kepentingan perkembangan ilmiah.

b. Dalam bidang applied geology, mengadakan penjelidikan-penjelidikan untuk inventarisasi endapan mineral pada umumnja, disamping menjelenggarakan penjelidikan-penjelidikan chusus dalam rangka sesuatu perentjanaan projek pertambangan; melakukan penjelidikan, pengeboran, dan pengawasan, pemakaian air tanah, melakukan penjelidikan, memberikan nasehat-nasehat dan petundjuk-petundjuk mengenai geologi teknik dan perentjanaan pekerdjaan pembangunan teknik sipil, pentjegahan bahaja tanah longsor dan lain sebagainja.

Mengadakan pengamatan dan pendjagaan gunung-gunung berapi di Indonesia untuk keselamatan penduduk.

c. Dalam bidang ilmiah, mengadakan penjelidikan-penjelidikan geologi setjara teratur dalam arti seluas-luasnja antara lain meliputi tugas penjusunan peta-peta geologi Indonesia, jang

dilengkapi dengan penjelidikan-penjelidikan palaentologi, mineralogi, petrologi dan lain sebagainja, serta menjelenggarakan musium geologi.

d. Menjelenggarakan dokumentasi dan publikasi dari hasil penjelidikan jang dipandang perlu untuk kepentingan umum baik ditindjau dari sudut ekonomi maupun ilmiah.

e. Mengadakan pendidikan-pendidikan darurat djika perlu untuk memenuhi kekurangan tenaga ahli geologi.

Djawatan Pertambangan:

a. Merentjanakan kebidjaksanaan umum Pemerintah mengenai pertambangan, menjiapkan perundang-undangan dan peraturan-peraturan jang meliputi kegiatan-kegiatan dalam bidang pemanfaatan bahan-bahan galian, mengatur pemberian kuasa pertambangan, didalam meneliti, membimbing, mengawasi pelaksanaan kuasa pertambangan.

b. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan melakukan penelitian terhadap situasi bahan-bahan galian, baik di Indonesia maupun diluar negeri, demi kepentingan penentuan kebidjaksanaan negara dalam bidang pertambangan.

c. Melakukan penjelidikan-penjilidikan ilmiah tentang pemurnian, pengolahan serta penggunaan bahan-bahan galian, tentang pemakaian alat-alat dan mesin-mesin tambang dan tentang keamanan kerdja serta kesehatan pada pertambangan untuk dapat memberikan djaminan sebesar-besarnja mengenai daja guna bahan-bahan galian, daja kerdja alat-alat serta pemesinan, dan kesehatan serta keadaan kerdja pada perusahaan-perusahaan pertambangan.

d. Melakukan penjelidikan terhadap endapan bahan-bahan galian untuk menjiapkan rentjana guna mendorong dan mengusahakan kearah pembukaan usaha-usaha pertambangan baru, baik milik negara maupun swasta, dan untuk memperkembangkan pertambangan pada umumnja, termasuk djuga pertambangan rakjat dan koperasi-koperasi pertambangan.

e. Menjiapkan segala sesuatu jang bertalian dengan pendirian projek-projek pertambangan dan melaksanakan pendiriannja.

f. Mengadakan hubungan dengan pihak ketiga baik didalam maupun diluar negeri, guna merentjanakan dan melakukan projek-projek pertambangan dan dengan izin Menteri Perdatam melakukan kontrak kredit luar negeri.
g. Memberi petundjuk dan bimbingan serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan projek-projek pertambangan.
h. Mengurus pungutan-pungutan negara jang berdasarkan. atas kuasa pertambangan.
i. Mengurus kebutuhan dan penggunaan devisa untuk kepentingan pelaksanaan kuasa pertambangan.
j. Menjelenggarakan pendidikan kader, melakukan penjuluhan dan melaksanakan publikasi demi kepentingan dunia ilmu pengetahuan teknik pertambangan dan perekonomian pada umumnja.

Djawatan Perindustrian Perkapalan.

a. Menjelidiki, merentjanakan dan melaksanakan pembangunan/pemeliharaan kapal serta industri perkapalan.
b. Membimbing perindustrian perkapalan kearah kemadjuan teknik dan efisiensi kerdja.
c. Memberikan fasilitas, menkoordinasi dan mengawasi persediaan, pemakaian bahan-bahan pokok/pembantu serta alat-alat perlengkapan lainnja dari galangan.
d. Menjelenggarakan, menkoordinasi dan mengawasi perusahaan-perusahaan galangan negara.
e. Menjiapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan tentang industri perkapalan.
f. Melaksanakan kerdja sama dengan badan-badan internasional serta mengusahakan bantuan jang diperlukan.
g. Menjalurkan tenaga-tenaga dalam lingkungan perindustrian perkapalan untuk training dan lembaga-lembaga pendidikan keahlian dalam lingkungan ini.

Biro Minjak dan Gas Bumi.

a. Mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan-keterangan mengenai minjak dan gas bumi, baik jang dari dalam maupun luar negeri serta melakukan penelitian dan pembahasannja, bagi perentjanaan penentuan suatu kebidjaksanaan umum Pemerintah dibidang minjak dan gas bumi untuk disampaikan kepada Menteri, dan jang ke-

mudian pula melaksanakan kebidjaksanaan jang telah ditetapkan itu.

b. Mengumpulkan, menjiapkan dan merentjanakan perundang-undangan dan peraturan jang meliputi kegiatan-kegiatan dalam bidang pemanfaatan bahan-bahan galian minjak dan gas bumi dan jang bertalian dengan pengusahaan, pelaksanaan perindustrian/pertambangan minjak dan gas bumi.

c. Mengurus dan mengatur pemberian petundjuk-petundjuk batas-batas wilajah kuasa-kuasa pertambangan minjak dan gas bumi serta sjarat-sjaratnja, serta meneliti, mengawasi dan membimbing pelaksanaan kuasa-kuasa pertambangan minjak dan gas bumi;

d. Melakukan penjelidikan terhadap endapan bahan-bahan galian minjak dan gas bumi untuk menjiapkan rentjana guna mendorong dan mengusahakan kearah pembukaan dan pendirian usaha-usaha perindustrian/pertambangan minjak dan gas bumi baru, serta mengawasi perkembangannja.

e. Membuat peta-peta wilajah hukum pertambangan minjak/gas bumi pada umumnja dan wilajah kuasa pertambangan minjak dan gas bumi chususnja.

f. Melakukan penjelidikan ilmiah tentang penambangan, pemurnian, pengolahan serta penggunaan bahan-bahan galian minjak dan gas bumi, tentang pemakaian alat-alat dan mesin-mesin/industri/tambang dan tentang keamanan kerdja serta kesehatan pada pengusahaan perindustrian/pertambangan minjak dan gas bumi untuk dapat memberikan djaminan sebesar-besarnja mengenai daja guna bahan-bahan galian minjak dan gas bumi, daja kerdja alat-alat serta permesinan.

g. Mengadakan hubungan dengan pihak ketiga termasuk para kontraktor, baik didalam maupun diluar negeri, pula mengunmpulkan dan membahas penawaran-penawaran kredit/grant/training/bantuan teknik dari luar negeri serta mempersiapkan bahan-bahan jang diperlukan dalam penjelenggaraan dan pelaksanaan penjalurannja, chususnja jang langsung berhubungan dengan organisasi tjara kerdjasamanja, serta melakukan penanda-tanganan kontrak-kontrak dengan luar negeri berdasarkan instruksi, idzin dan/atau surat kuasa dari Menteri Perdatam.

h. Mengurus pungutan-pungutan negara jang berupa iuran-pasti, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembajaran lainnja jang berhubungan dengan pemberian kuasa pertambangan minjak dan gas bumi.

i. Mengurus keperluan serta kebutuhan dan penggunaan devisa untuk kepentingan pelaksanaan pengusahaan perindustrian/pertambangan minjak dan gas bumi, dan pelaksanaan kuasa pertambangan minjak dan gas bumi.

j. Merantjangkan kebidjaksanaan umum dalam penjelenggaraan perusahaan pertambangan minjak dan gas bumi.

k. Menentukan sjarat-sjarat dan idzin penetapan terhadap tenaga-tenaga ahli asing jang akan dipekerdjakan dalam perusahaan-perusahaan minjak dan gas bumi, dengan tidak mengurangi tugas dari lain djawatan/instansi.

l. Melakukan pengawasan atas pekerdjaan-pekerdjaan dan pelaksanaan usaha industri/pertambangan minjak dan gas bumi, pula memberi petundjuk dan bimbingan serta meneliti dan mengawasi penjelenggaraan perusahaan-perusahaan minjak dan gas bumi, baik sebagai kontraktor maupun sebagai perusahaan negara, termasuk administrasi dan pemeriksaan serta penelitian laba-ruginja perusahaan-perusahaan tersebut.

m. Membantu dan mengawasi penjelenggaraan dan pelaksanaan pendjualan hasil minjak dan gas bumi pada umumnja.

n. Menjelenggarakan pendidikan kader, melakukan penjuluhan dan mengeluarkan publikasi tentang minjak dan gas bumi, baik jang ditindjau dari sudut ekonomi maupun ilmiah untuk kepentingan umum serta kemadjuan-kemadjuan perusahaan perindustrian/pertambangan minjak dan gas bumi.

Badan Pimpinan Umum (B.P.U.).

a. menjelenggarakan pekerdjaan penguasa dan pengurusan perusahaan negara tertentu dan/atau
b. mendjalankan tugas direksi perusahaan negara tertentu, dan/atau
c. mengadakan kerdjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara, dan/atau
d. mengawasi pekerdjaan, menguasai dan mengurus perusahaan negara.

Demikian setjara lengkap lapangan kerdja dan tugas kekuasaan masing-masing berdasarkan surat keputusan serta sesuai dengan organisasi eksekutif diluar pusat Deperdatam.

Setelah organisasi ini berdjalan beberapa waktu, ternjata masih diperlukan badan-badan lagi untuk menjempurnakan pelaksanaan suatu tugas dibeberapa bidang, dan penjempurnaan ini ada jang antara lain berdasarkan pelaksanaan daripada suatu undang-undang.

Bidang Industrialisasi.

Untuk dapat lebih mengintensifkan pelaksanaan projek-projek tersebut dan untuk dapat memudahkan bimbingan dan pengawasan, maka dibentuklah badan koordinator dari pelaksanaan projek-projek Biro Industrialisasi jang telah dalam pelaksanaan. Badan ini disebut Badan Pengawasan Penjelenggaraan Projek-projek Industri disingkat B.P3.I. dan bertugas :

a. menjelenggarakan pengawasan teknis, finansiil, administratif organisatoris atas pelaksanaan pembangunan projek-projek industri dasar jang telah ditetapkan oleh Pemerintah c.q. Menteri Perdatam;
b. menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan persiapan projek-projek industri dasar jang telah ditetapkan oleh Menteri untuk dilaksanakan pembangunan;
c. menjelenggarakan semua pekerdjaan ang diperlukan, memberikan segala fasilitas serta menjarankan usaha-usaha jang tidak dapat dilakukan oleh projek-projek industri dasar baik dipusat maupun didaerah guna kelantjaran pembangunan tersebut agar dapat mentjapai taraf produksi seperti jang telah ditentukan dan menjarankannja kepada Pemerintah untuk kemudian diserahkan pengurusannja kepada B.P.U.-B.P.U. jang bersangkutan;
d. mengadakan penelitian dan penilaian atas pertanggungandjawab pelaksanaan pembangunan projek-projek industri dasar.

Dengan demikian pengaturan dari pelaksanaan beberapa projek dan bermatjam-matjam djenisnja itu dikoordinasi oleh badan tersebut.

Oleh karena sifat administrasi Biro Industrialisasi sebagai instansi Pemerintah (overheidsdienst) mempunjai tjiri-tjiri chusus dibandingkan dengan administrasi dibidang industri-industri seperti prosedur pengeluaran uang dan sebagainja, maka oleh B.P3.I. dirintis usaha untuk mendirikan sebuah

Perusahaan Negara dalam lingkungan Biro Industrialisasi. Usaha tersebut telah berhasil dengan dikeluarkannja P.P. No. 36 tahun 1962 Lembaran Negara tahun 1962 No. 34 dengan modal waktu berdiri (capital statuten) sebesar 5 miljard rupiah. Perusahaan Negara jang telah dibentuk ini bernama Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Projek-projek Industri Dasar, disingkat dengan P.N. Peprida.

Bidang Perusahaan Negara.

Sebagaimana telah dimaklumi dalam lingkungan Deperdatam terdapat tudjuh Badan Pimpinan Umum Minjak dan Gas Bumi dan kesemuanja dibentuk atas dasar Undang-undang No. 19 tahun 1960.

Para Direksinja masih bersifat sementara, walaupun pelantikan-pelantikan mereka untuk pertama kalinja oleh Menteri Perdatam dilangsungkan pada bulan Djuni 1961, sehingga sampai kini diantara mereka sudah ada jang telah mempunjai masa kerdja 3½ tahun mungkin pula telah mengalami „tour of duty/area".

Kedudukan sementara ini sebenarnja mempunjai keuntungan oleh karena Pimpinan Departemen Perdatam dapat mentjari komposisi direksi jang sekompak-kompaknja. Namun tak dapat disangkal pula adanja kelemahan seperti nampak adanja keragu-raguan dan perasaan tidak adanja ketentuan hukum bagi para direksi jang memang menurut penilaian pimpinan sudah memenuhi sjarat-sjarat kerdjasama jang harmonis sebagaimana diperlukan. Dalam pada itu soal personalia ini memang merupakan faktor penting dalam melaksanakan dan menggerakkan organisasi, karena manusialah jang achirnja menentukan.

Kalau ditindjau status daripada P.N. jang berbentuk badan hukum, maka nampaklah adanja ide desentralisasi sebagai salah satu pokok dalam pembinaan dan management daripada P.N. jang merupakan suatu unit ekonomi.

Tjiri-tjiri termaksud dapat dilihat dalam administrasi jang telah tersusun rapi baik P.N. jang berasal dari B.I.N. maupun jang berasal dari perusahaan-perusahaan ex-nasionalisasi.

Pembentukan Badan Pimpinan Umum dalam lingkungan Deperdatam mempunjai dua maksud jakni :

a. untuk memperoleh koordinasi/sinkronisasi dan pengawasan sebaik-baiknja;

b. untuk tugas chusus dalam arti meletakkan dasar-dasar spesialisasi dan pembinaan menudju pertumbuhan dari pada P.N.-P.N. dalam rangka industrialisasi.

Oleh karenanja P.N.-P.N. jang kini dalam lingkungan Deperdatam digolongkan dalam perusahaan sedjenis, sehingga pengelompokan tersebut meletakkan dasar pula untuk kerdjasama dalam bidang-bidang umum, produksi dan finansiil, maupun bidang-bidang lain-lain seperti skill, organisasi dan sebagainja.

Guna mentjarikan daja upaja agar P.N.-P.N. itu dapat dibina sebaik-mungkin demi mentjapai efisiensi kerdja jang maksimal sebagai termaktub dalam Undang-undang No. 19 Th. 1960, pasal 24 angka 1 menjebutkan bahwa:

„Menteri jang bersangkutan atau badan/orang jang ditundjuk olehnja dapat mengawasi pekerdjaan, tindakan jang dilakukan oleh B.P.U. dan mendjaga supaja ketentuan-ketentuan tertjantum didalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini serta dalam peraturan pelaksanaannja ditaati sebagaimana mestinja".

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Menteri Perdatam telah menundjuk Biro I/Bipen dalam lingkungan Deperdatam, untuk membantu Menteri dalam rangka pembinaan/pengurusan B.P.U./P.N. Deperdatam. Biro tersebut tidak sadja perlu bergerak kedalam, artinja terhadap B.P.U./P.N. tetapi djuga dan terutama sekali sebagai alat Menteri untuk merumuskan laporan keadaan jang merupakan suatu rekapitulasi menjeluruh jang sangat diperlukan dalam koordinasi/sinkronisasi interdepartemental.

2. **Usaha kearah penjempurnaan organisasi:**

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 1/M/63 tanggal 1 Djanuari 1963 diputuskan/ditetapkan empat orang pedjabat Pembantu Menteri Perdatam masing-masing untuk urusan:

a. Pertambangan,
b. Organisasi, Tata Usaha, Pengawasan Tenaga Kerdja, Penerangan dan Hubungan Masjarakat,
c. untuk urusan Perusahaan Negara, dan
d. Industrialisasi.

Sehubungan dengan keputusan diatas, mengingat perkembangan keadaan efisiensi kerdja dalam lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan, maka sambil menunggu Keputusan Presiden R.I., Menteri Perdatam telah me-

njempurnakan susunan organisasinja dengan S.K. No. 35/M/ Perdatam tanggal 16 Djanuari 1963, maka tugas Menteri sehari-hari dibantu oleh 4 (empat) Pembantu Menteri jang masing-masing membantu tugas Menteri dalam bidang-bidang Pertambangan, Perusahaan Tambang Negara, Perusahaan Industri-industri Negara, Organisasi dan Pengawasan, Industrialisasi dan Projek-projek Industri Dasar/Berat.

Organisasi jang telah disusun dirobah dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga mendjadi sebagai berikut:

a. Dewan Penasehat.

b. Pusat Departemen jang meliputi:
   1). Dewan Perantang;
   2). Kabinet Menteri;
   3). Biro I (Biro Urusan Perusahaan Negara);
   4). Biro II (Biro Urusan Chusus);
   5). Biro III (Biro Urusan Pertambangan);
   6). Biro IV (Biro Tata Usaha);
   7). Biro V (Biro Pengawasan);
   8). Biro VI (Biro Urusan Tenaga Kerdja);
   9). Biro VII (Biro Penerangan dan Hubungan Masjarakat);
   10). Biro VIII (Biro Urusan Industrialisasi).

c. Organisasi eksekutif diluar Pusat Deperdatam:
   1). Direktorat Perindustrian Dasar/Berat;
   2). Direkotrat Perindustrian Perkapalan;
   3). Direktorat Pertambangan;
   4). Direktorat Geologi;
   5). Direktorat Minjak dan Gas Bumi.

d. Organisasi didaerah dan luar negeri:
   1). Perwakilan-perwakilan Departemen Perdatam diluar negeri;
   2). Perwakilan-perwakilan Deperdatam didalam negeri.

e. Badan-badan Pelaksana Projek-projek dan Perusahaan Negara:
   1). P.N. Pelaksana Pembangunan Industri Dasar;
   2). Badan Pelaksana Projek-projek Pertambangan;
   3). B.P.U.-B.P.U. tudjuh buah beserta P.N.-nja.

Disamping badan-badan/P.N.-P.N. tersebut diatas, dibentuklah kemudian Dewan-dewan Perusahaan. Lembaga ini membantu pimpinan perusahaan dalam mempertinggi kwalitas dan kwantitas produksi, ikut mengawasi serta mengamankan kekajaan Negara.

Dewan tersebut dibentuk atas dasar Undang-undang No. 45 tahun 1960 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnja, di B.P.U./P.N. jang berbentuk badan hukum, dengan sebutan Dewan Perusahaan Pusat untuk B.P.U. dan Dewan Perusahaan untuk Perusahaan Negara.

Adapun komposisi anggotanja terdiri dari:

wakil-wakil pimpinan perusahaan seorang;

wakil buruh/karyawan lima/tiga orang.

Djumlah anggota D.P.P. maksimum tudjuh orang dan djumlah anggota D.P. maksimum lima orang. Diantara tiga golongan itu diharapkan akan terdjalin suatu kerdjasama jang bersifat kegotong-rojongan, oleh karenanja demi kemadjuan perusahaan semua persoalan-persoalan dapat diselesaikan setjara musjawarah atas dasar hikmah kebidjaksanaan.

II. PERKEMBANGAN USAHA-USAHA.

A. BIDANG ROUTINE.

Usaha Departemen dalam kelandjutan proses perdjoangan revolusi kita dibidang rutine terutama mengenai:

Perkembangan serta pemeliharaan unit-unit produksi jang telah ada dibidang pertambangan dan perindustrian dasar/berat, baik kepunjaan Pemerintah maupun milik swasta. Usaha dibidang rutine ini berkembang sedjalan dengan proses perdjoangan kita dengan memperhatikan semua faktor-faktor jang menguntungkan dan menanggulangi dengan sekuat tenaga semua kesukaran-kesukaran jang menghadangnja.

1. Pemeliharaan produksi:

Usaha dibidang ini antara lain ialah melengkapi atau mentjukupi unit-unit produksi, dengan spareparts dan alat-alat lainnja untuk mendjamin kelandjutan berproduksi dalam djangka waktu jang sepandjang mungkin. Hal ini merupakan soal penting, mengingat berbeda-bedanja alat produksi jang ada serta kesukaran-kesukaran jang dihadapi dibidang moneter.

Oleh sebab itu Departemen Perdatam berusaha sekuat tenaga dimana dan apabila dimungkinkan, untuk mengganti substitut-substitut dari pada unit-unit produksi sisa-sisa kolonialisme jang banjak tergantung dari impor luar negeri. Disamping itu diusahakan djuga pemakaian bahan-bahan baku jang terdapat ditanah air sendiri sehingga ini merupakan pula pengurangan pengeluaran devisa.

Dalam pemeliharaan produksi satu hal jang penting jang dilakukan oleh Departemen Perdatam adalah menjediakan fasilitas-fasilitas produksi lainnja, seperti pengangkutan berat dan ringan, pelabuhan, gudang dan lain-lain fasilitas jang semuanja dimaksudkan untuk memperlantjar dan mendjamin produksi sebaik-baiknja.

Usaha-usaha untuk pemeliharaan dan pengembangan unit-unit produksi, baik dibidang pertambangan maupun dibidang industri dilingkungan Deperdatam serta industri-industri swasta, kebidjaksanaannja dilakukan oleh unit-unit koordinatif dan unit-unit eksekutif, jaitu:

a. Biro Perusahaan Negara (Bipen) memberikan pedoman-pedoman kebidjaksanaan kepada Badan-badan Pimpin-

an Umum (B.P.U.), jang mengkoordinir P.N.-P.N. Industri. Kesemuanja itu berada dalam lingkungan wewenang Pembantu Menteri Urusan Perusahaan Negara.

b. Direktorat perindustrian Dasar/Berat, Direktorat perindustrian Perkapalan berada dilingkungan Pembantu Menteri Urusan Industrialisasi jang bertugas memelihara dan mengembangkan perindustrian dasar/berat, dan perindustrian perkapalan, baik milik Pemerintah, maupun swasta.

c. Direktorat Pertambangan, Direktorat Geologi dan Direktorat Minjak dan Gas Bumi berada dibawah wewenang Pembantu Menteri Urusan Pertambangan, jang bertugas memelihara dan mengembangkan P.N.-P.N. Pertambangan dan Perminjakan.

a. Biro Perusahaan Negara melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1). mengawasi pekerdjaan dan tindakan-tindakan jang dilakukan oleh Badan-badan Pimpinan Umum dalam lingkungan Deperdatam;

2). mendjaga agar ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 dan peraturan-peraturan pelaksanaannja ditaati sebagaimana mestinja oleh B.P.U./P.N. Perindustrian Dasar/Pertambangan;

3). membikin persetudjuan dalam beberapa hal tertentu jang dimintakan oleh B.P.U.

Dalam tugasnja sehari-hari Biro Perusahaan Negara mengumpulkan, menghimpun, mengolah, menganalisa serta menjimpulkan bahan-bahan keterangan jang diperlukan oleh Menteri guna menetapkan kebidjaksanaannja mengurus B.P.U./ P.N. Atas hal tersebut diatas Menteri menjusun instruksi-instruksi, petundjuk-petundjuk dan pedoman-pedoman bagi B.P.U./P.N. tersebut.

Dibawah ini ditjantumkan B.P.U.-B.P.U. beserta P.N.-P.N. jang berada dilingkungan koordinasinja, dengan usaha-usahanja sebagai berikut:

B.P.U. Mesin dan Alat-alat Listrik bertugas mengatur kerdjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Negara didalam lingkungannja dan meliputi lima perusahaan industri mesin, dan dua perusahaan jang berusaha dalam bidang industri alat-alat/listrik/telekomunikasi.

a. P.N. Indra, lapangan usahana meliputi pembuatan stoomwals, pompa-pompa, alat-alat mesin untuk keperluan pabrik gula, rumah-rumah pompa dan pelatzaus, tiang-tiang tegangan tinggi, djembatan-djembatan kereta api, konstruksi badja, konstruksi plat badja seperti tangki-tangki, membuat cylinder-kop untuk mesin-mesin disel, pompa-pompa, alat-alat pertanian/perkebunan;

b. P.N. Boma, lapangan usahanja meliputi:

Membuat segala matjam konstruksi badja:

1). bangunan konstruksi;
2). djembatan;
3). tiang tekanan tinggi;
4). menara air;
5). gerbong kereta api, dan lain-lain.

Membuat mesin-mesin dan alat-alat untuk keperluan:

1). mesin industri gula;
2). mesin perusahaan perkebunan;
3). mesin industri lainnja.

Membuat alat-alat dari plat untuk keperluan:

1). tangki penimbun;
2). tangki diatas kereta/truck;
3). barang plat untuk keperluan industri lainnja.

Membuat barang tuangan:

1). besi tjor;
2). logam lainnja.

Memberi djasa dalam pembangunan projek-projek industri: mesin dan konstruksi, reparasi serta pemeliharaannja.

P.N. Bisma, lapangan usahanja meliputi:

1). bangunan konstruksi besi antara lain bangunan kerangka besi untuk pabrik-pabrik/gudang-gudang dan djembatan;
2). mesin mengaduk beton dari berbagai djenis;
3). bagian-bagian untuk instalasi pabrik es;
4). mesin-mesin untuk perkebunan kopi;
5). tangki-tangki minjak diatas dan dibawah tanah maupun tangki minjak untuk pengangkutan;
6). gerbong minjak untuk P.N.K.A.;
7). kereta gandengan pada traktor-traktor untuk pengangkutan hasil-hasil perkebunan;
8). reparasi mesin-mesin dari matjam-matjam pabrik.

d. P.N. Sabang-Merauke, usahanja meliputi:

1). konstruksi: bangunan konstruksi besi, djembatan, tiang tekanan tinggi, menara air, gerbong kereta api dan lain-lain;
2). pelat: tangki penimbun, tangki diatas kereta/truck, barang-barang plat untuk keperluan industri dan lain-lain;
3). mesin: mesin-mesin industri gula, mesin-mesin perkebunan, beton molen, mesin gilas djalan-djalan dan lain sebagainja;
4). tjor: barang-barang tuangan dari besi, badja logam-logam lainnja.

e. P.N. Barata, lapangan usahanja meliputi:

1). membuat segala matjam konstruksi badja;
2). membuat mesin dan alat-alat untuk keperluan industri gula, perusahaan-perusahaan dan industri-industri lainnja;
3). membuat alat-alat dari plat untuk keperluan tangki-tangki minjak dan barang-barang plat lainnja;
4). membuat barang tuangan seperti besi tjor, badja tjor dan logam lainnja.

f. P.N. Ralin, larangan usahanja ialah:

1). membuat barang-barang listrik/alat-alat komunikasi dan lain-lain barang sedjenis;
2). memberi djasa dalam pembangunan projek industri/alat komunikasi reparasi dan pemeliharaan daripada barang listrik/alat-alat komunikasi.

g. P.N.Metrika, lapangan usahanja meliputi:

membuat transformator tekanan rendah, sikat arang dan lemari-lemari penghubung, merentjanakan serta menjelenggarakan instalasi listrik, mereparasi segala matjam alat-alat listrik tekanan rendah, pengawasan tiang listrik, bantalan rel dan kaju-kaju bangunan.

B.P.U. Industri Kimia, bertugas mengadakan kerdjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan negara didalam lingkungannja jang bekerdja dalam industri Kimia jang meliputi 12 Perusahaan-perusahaan Negara:

a. P.N. Asam Arang, lapangan usahanja meliputi:

1). memproduksi asam arang;

2). mereparasi dan mengetes matjam-matjam alat pemadam api dan reduccer-ventiel.

b. P.N. Blabag, dalam usahanja meliputi:

1). memproduksi kertas tulis;
2). djenis kertas jang dihasilkan: kertas tulis, kertas tjetak, kertas stensil, kertas gambar, kertas tik, kertas bungkus, kulit buku tulis.

c. P.N. Garam, lapangan usahanja meliputi:

1). memproduksi garam;
2). Gipsum (sen-bosen) dan tubes (tjepuk).

d. P.N. Gresik, lapangan usahanja meliputi:

1). memproduksi semen portland type A.S.T.M. (American Standard For Testing Materials);
2). kantong semen dari kertas kraft, untuk keperluan sendiri (pembungkus) semen;
3). hollow-bricks (bata semen untuk dinding bangunan) jang dibuat dari tjampuran pasir dan semen dengan perbandingan 3 : 1, dan berukuran 20 × 40 cm jang diberi lubang-lubang tiga buah.

Hasil ini chusus untuk melajani keperluan pembangunan Projek Listrik Tenaga Uap, Perak.

e. P.N. Iglas, lapangan usahanja meliputi:

1). membuat barang-barang gelas dalam arti kata seluas-luasnja;
2). memberi djasa dalam pembangunan projek industri gelas, reparasi dan pemeliharaan pada umumnja jang berhubungan dengan pekerdjaan tersebut diatas.

f. P.N. Intirub, lapangan usahanja meliputi:

membuat ban (mobil, truck) dan barang-barang karet lainnja.

g. P.N. Letjes, lapangan usahanja meliputi:
— memproduksi kertas halus.

i. P.N. Kertas Pematang Siantar, lapangan usahanja meliputi:
— memproduksi kertas koran dan kertas stensil.

j. P.N. Semen Padang, usahanja meliputi:
memproduksi semen portland.

k. P.N. Zatas, lapangan usahanja meliputi:

1). memperoduksi zat asam (O_2), dalam botol-botol badja a 40 liter tekanan 150 kg/cm^3;
2). zat asam biasa;
3). zat asam kering;
4). O_2-CO_2;
5). Sebagai hasil tambahan P.N. Zat Asam membuat djuga: zat lemas (N_2), dalam botol-botol badja a 40 liter dengan tekanan 150 kg/cm^3;
6). zat lemas biasa;
7). zat lemas kering; digunakan dalam pabrik-prabrik pharmasi, pembersihan pipa-pipa, mengisi ban-ban pesawat terbang, mengisi bola lampu dan sebagainja;
8). udara dengan tekanan, dalam botol-botol badja a 40 liter dengan tekanan 150 kg/cm^3.
9). udara tekanan biasa;
10). udara tekanan kering; digunakan untuk mesin diesel, perkembangan dan lain-lain.
11). gas ontwikkelaar, suatu zat jang dipakai untuk membuat gas acetyleen (dan carbide) jang dipergunakan pada waktu mengerdjakan pekerdjaan las.

1. P.N. Soda Waru, lapangan usahanja meliputi:

1). memperoduksi soda-kostik (40% NaOH);
2). serbuk kelantang — 30% daja chloor;
3). asam chorie — 35% HCL.

B. **B.P.U. Industri Alat Pengangkutan:**

Dengan tugas menjelesaikan alat-alat pengangkutan hasil industri, jang lapangan usahanja meliputi:

a. P.N. Pakin, tugas pekerdjaannja meliputi:

1). kapal pantai (coaster) dengan maksimum 700 WT;
2). kapal tunda dari berbagai kekuatan;
3). kapal pemadam kebakaran;
4). kapal pelabuhan;
5). kapal tangki (untuk mengangkut minjak dan air);
6). kapal penampung;
7). tongkang-tongkang lajar laut;
8). perahu lumpur;
9). kapal keruk (dregger);
10). dan lain-lain alat pengangkutan dilaut serta perlengkapannja.

Produksi tambahan (selain alat pengangkutan dilaut).

11). tangki air/bensin untuk dipasang dimobil;
12). tangki air/mobil (jang bersifat stationair);
13). noorducien dan lain-lain produksi jang bahan dasarnja terbuat dari badja/palt badja.

b. P.N. Perkapalan Alirmandjaja, lapangan usahanja meliputi:

1). membangun kapal-kapal/tongkang-tongkang dari badja dan kaju (dalam persiapan) atas pesanan;
2). reparasi/service atas kapal-kapal/tongkang dari badja/kaju dan pekerdjaan las (seperti pembuatan untuk remilling, pembuatan tangki air dan lain sebagainja).

c. P.N. Gaja Motor, lapangan usahanja meliputi:
Asembling kendaraan-kendaraan bermotor terutama untuk djenis truk dan bus.

ad. b. Direktorat Perindustrian Dasar/Berat, didalam usahanja memelihara dan mengembangkan industri-industri dasar/berat, baik milik Pemerintah maupun swasta, melakukan usaha rutine sebagai berikut:

1. Mengatur peridzinan perusahaan-perusahaan industri dasar/berat jang tidak termasuk dalam bidang pengurusan instansi-instansi lain (dalam lingkungan Departemen).
2. Mengatur kebutuhan dan penggunaan devisa industri.
3. Memberi petundjuk, bimbingan dalam pelaksanaan projek-projek industri dasar/berat.
4. Mengusahakan hal-hal jang perlu untuk pemeliharaan dan perkembangan industri jang telah ada, baik milik Pemerintah maupun milik swasta.
5. Membantu menjiapkan rentjana industrialisasi untuk sektor swasta dan Pemerintah.
6. Membantu mendokumentasikan data-data jang telah dikumpulkan untuk perentjanaan industrialisasi dasar/berat.
7. Melaksanakan pengawasan dalam penggunaan devisa, pengawasan teknis dari industri-industri jang masuk bidang pengurusannja.

Djenis-djenis industri jang termasuk bidang pengurusan Direktorat Perindustrian Dasar/Berat adalah sebagai berikut:

1.	Industri accu dengan djumlah	18	buah perusahaan.
2.	Industri batterij kering ,,	12	— ,, —

3.	Asembling radio	„	22	buah perusahaan
4.	Industri mesin/konstruksi	„	69	— „ —
5.	Asembling mobil/karos-seri	„ „	20	— „ —
6.	Asembling mesin djahit		22	— „ —
7.	Alat-alat listrik	„	19	— „ —
8.	Industri semen	„	2	— „ —
9.	Industri kertas	„	4	— „ —
10.	Industri ban mobil	„	3	— „ —
11.	Pertjetakan (milik Pemerintah)	„	36	— „ —
12.	Industri Kimia lainnja	„	7	— „ —

Direktorat Perindustrian Perkapalan didalam usahanja memelihara dan mengembangkan Perindustrian Perkapalan, baik milik Pemerintah maupun swasta, mempunjai tugas dan pekerdjaan sebagai berikut :

1. Menjiapkan dasar-dasar perentjanaan untuk perkembangan dan memelihara industri perkapalan.
2. Menjelenggarakan penelitian dibidang jang berhubungan dengan projek-projek industri perkapalan.
3. Melaksanakan aktif bimbingan dan pengawasan jang perlu untuk pemeliharaan dan perkembangan industri perkapalan dan bangunan kapal.
4. Mengatur penjediaan, penggunaan dan pengawasan dari devisa untuk industri perkapalan.
5. Mengatur peridzinan pendirian/perluasan perusahaan industri perkapalan.
6. Pemberian fasilitas, mengkoordinir dan mengawasi persesediaan, pemakaian bahan-bahan pokok/pembantu serta perlengkapan lainnja dari industri perkapalan.
7. Mengumpulan data-data dalam bidang industri perkapalan.
8. Menjiapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan, undang-undang industri perkapalan.

Dibidang pelajaran tudjuan utama ialah mempertinggi ketahanan daja hidup sektor pelajaran dan perkapalan Indonesia, dan meningkatkannja ketingkat selfsustaining growth, jaitu dengan tjara pemberian fasiltas terhadap:

1. Perkembangan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan dalam negeri.

2. Perkembangan produksi alat-alat terapung baru didalam negeri untuk memenuhi tuntutan kebutuhan teh rising-demand.
3. Perkembangan kebutuhan sektor industri pelengkap dan tjadangannja.

Pada Direktorat Perindustrian Perkapalan hingga kini terdaftar kurang lebih 50 galangan kapal diseluruh Nusantara mendapat idzin.

c. Direktorat Pertambangan:

Kegiatan Rutine.

1. Mengurus soal-soal pemberian idzin penambangan, pengolahan kuasa pertambangan.
2. Mengurus soal-soal hukum pertambangan dan jang berhubungan dengan pungutan Negara dalam bidang pertambangan.
3. Mengawasi dan membimbing penambangan-penambangan/peraturan-peraturan tambang sehingga keselamatan kerdja terdjamin.
4. Mengadakan inventarisasi dari bahan galian Indonesia.
5. Mengadakan riset (setjara ilmiah) tentang pemurnian pengolahan serta penggunaan bahan-bahan galian dengan penggunaan alat-alat jang tepat dan praktis.

Usaha-usaha:

Chusus mengenai inventarisasi bahan galian, Direktorat Pertambangan selalu ikut aktif terutama dalam penjelidikan landjutan (eksplorasi), pemetaan dan pemboran-pemboran.

Direktorat Minjak dan Gas Bumi:

1. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang minjak dan gas bumi dari dalam dan luar negeri untuk dasar-dasar penentuan kebidjaksanaan Pemerintah dibidang minjak dan gas bumi.
2. Merentjanakan undang-undang dalam bidang-bidang pertambangan minjak dan gas bumi dan membimbing pelaksanaan dari kuasa pertambangan minjak dan gas bumi.
3. Mengadakan inventarisasi dan pemetaan dalam bidang pembangunan pertambangan minjak dan gas bumi.
4. Melakukan penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak-kontrak kerdjasama antara perusahaan-perusahaan minjak Negara dan perusahaan-perusahaan minjak asing.

Dalam bidang internasional telah diadakan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Indonesia telah diterima mendjadi anggota Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), tahun 1963 dan tahun 1964 Indonesia telah mendjadi tuan rumah dari konperensi OPEC ke V di Djakarta.

b. Pertukaran tenaga-tenaga expert dengan negara-negara asing telah lama dilaksanakan.

Perobahan dalam bidang policy perminjakan antara lain adalah dengan dikeluarkannja Undang-undang No. 44 Prp. th. 1960 dan kemudian Peraturan Pemerintah No. 18 th. 1963 jang terkenal dengan nama Kontrak Karya.

B.P.U. Perusahaan Tambang Batu Bara Negara.

Badan ini bertugas mengadakan kerdjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan Negara didalam lingkungannja dan meliputi tiga Perusahaan Negara, jaitu:

a) P.N. Tambang Batubara Bukit Asam di Tandjung Enim Sumatera Selatan.
b) P.N. Tambang Batubara Ombilin di Sawahlunto Sumatera Barat.
c) P.N. Tambang Batubara Mahakam di Loakulu Kalimantan Timur.

B.P.U. Perusahaan Tambang Timah Negara.

Badan ini bertugas mengadakan kerdjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Negara didalam lingkungannja jang bekerdja dalam lapangan tambang timah dan meliputi tiga Perusahaan Negara:

a) P.N. Tambang Timah Bangka.
b) P.N. Tambang Timah Belitung.
c) P.N. Tambang Timah Singkep.

B.P.U. Perusahaan Tambang Umum Negara.

Badan ini bertugas mengadakan kerdjasama dengan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Negara didalam lingkungannja jang bekerdja dalam lapangan tambang umum dan meliputi tiga Perusahaan Negara :

a) P.N. Tambang Emas Tjikotok.
b) P.N. Tambang Bauksit.
c) P.N. Logam Mulia.

B.P.U. Perusahaan Minjak dan Gas Bumi.

Badan ini bertugas mengadakan kerdjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Negara didalam lingkungannja jang bekerdjasama dalam lapangan perminjakan dan gas bumi dan meliputi tiga Perusahaan Negara :

a) P.N. Pertamin jang mempunjai fungsi antara lain sebagai distributor minjak bumi serta hasil-hasil minjak lainnja untuk pasaran dalam negeri disamping fungsi-fungsi penambangan, refining dan lain-lainnja.

b) P.N. Permigan, sebagai gabungan dari dua perusahaan minjak Tjepu dan perusahaan minjak Sumatera Utara.

c) P.N. Permina mempunjai fungsi tambahan ialah melakukan pengangkutan minjak mentah dan hasil-hasil minjak lainnja termasuk membangun armada tangki disamping tugas penambangan, refining dan lain-lainnja.

Tjatatan :

Oleh masing-masing Perusahaan Negara seperti Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam, Tambang Batubara Tandjung Enim, Tambang-tambang Timah Bangka, Belitung Singkep, Tambang Emas Tjikotok, Tambang Bauksit diadakan djuga penjelidikan-penjelidikan eksplorasi disamping eksploitasi. Eksploitasi ini merupakan tugas rutine bagi setiap Perusahaan-perusahaan itu, karena dengan diketemukannja sumber-sumber tambang jang baru berarti kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut akan terdjamin.

Perlu ditambahkan disini, bahwa P.N. Tambang Mas Tjikotok menghasilkan djuga perak sebagai hasil tambahannja, sedangkan pemurnian dari emas dan perak itu dikerdjakan di P.N. Logam Mulia (Djakarta).

Daftar produksi dan ekspor dari masing-masing P.N. itu dapat dilihat dalam laporan berikutnja.

Direktorat Geologi :

Perkembangan usaha direktorat Geologi dapat dilihat dalam usaha-usaha penelitian terpakai (applied research) dibidang geologi dan vulkanologi, terutama dalam hubungannja dengan inventarisasi umum kekajaan mineral di Indonesia jang meliputi kegiatan pemetaan dan eksplorasi, penjelidikan dan penjediaan air bawah tanah, penjelidikan untuk projek-projek teknik sipil serta penjelidikan-penjelidikan dan pengawasan gunung api.

Segala kegiatan ini mempunjai segi-segi ekonomis jang terdjalin erat sekali dengan perkembangan sesuatu daerah dan kesemuanja termasuk tugas dan wewenang Direktorat Geologi.

Usaha-usaha jang dilakukan oleh Direktorat Geologi sesudah tahun 1959 memperlihatkan kemadjuan jang pesat. Hal ini disebabkan pertambahan tenaga ahli Bangsa Indonesia telah mulai memberikan kemantapan jang njata pada organisasi Direktorat (jang pada masa itu masih berstatus djawatan), dan sedjak permulaan tahun 1960 semua pimpinan bagian dalam Direktorat telah sepenuhnja berada dalam tangan tenaga-tenaga ahli Indonesia. Dalam pada itu djuga dapat dilaksanakan dua buah ekspedisi gabungan untuk pemetaan geologi, penjelidikan vulkanologi dan palaentologi didaerah Flores (1960) dan penjelidikan bidji besi didaerah Gunung Tanalang, Kalimantan (1960).

Dari pelaksanaan penjelidikan-penjelidikan besar ini dapat dibuktikan bahwa Direktorat Geologi pada achir masa perkembangan 1950-1960 telah mulai mentjapai tingkat pertumbuhan jang dapat disebut „dewasa", dan telah siap untuk menampung pekerdjaan jang lebih besar lagi dikemudian hari.

Meningkatnja kegiatan-kegiatan geologi sadja tahun 1961 terutama sekali tampak djelas pada bidang-bidang eksplorasi bahan gakian dan bidang penjelidikan geologi teknik. Kegiatan-kegiatan eksplorasi selain dilaksanakan untuk pembukaan projek baru, banjak pula jang harus dilakukan dalam hubungannja dengan rentjana rehabilitas ataupun perluasan tambang-tambang jang telah ada.

Adapun penjelidikan-penjelidikan geologi teknik pada umumnja meupakan penjelidikan-penjelidikan pendahuluan dalam angka pembangunan berbagai projek teknik sipil seperti pelabuhan-pelabuhan, pabrik-pabrik, bendungan-bendungan air dan sebagainja.

Eksplorasi bahan galian.

Kegiatan eksplorasi boleh dikatakan hampir meliputi segala djenis bahan galian jang ada di Indonesia. Diantaranja jang terpenting untuk dikemukakan disini adalah: penjelidikan batubara didaerah Ombilin, Sumatera Tengah (1962-1963); penjelidikan batubara didaerah Bukit Asam (Sumatera Selatan) (1961-1964): penjelidikan bidji besi pasir titanomagnetitdidpantai Tjilatjap, Djawa Tengah (1961-962); penjelidikan bidji limonit-goethit didaerah Tjipurut, Banten (1962); penjelidikan

bidji mangaan diseluruh Djawa (1961-1965), sebagai kelandjutan dari kegiatan tahun-tahun (1959-1960); penjelidikan asbes didaerah Wusia, Halmahera (1962); penjelidikan bidji nikkel di Pulau Maniang dan Lemo, Sulawesi Tenggara (1961); peninjauan daerah endapan nikkel disekitar Hulubalang-Malili Sulawesi Tengah (1962); penjelidikann endapan bauksit dikepulauan Riau (1961); penjelidikan endapan bauksit didaerah Singkawang, Kalimantan Barat (1960-1961); penjelidikan pendahuluan endapan bidji tembaga didaerah Sangkaropi, Sulawesi Tengah (1962 dan 1964); penjelidikan mineral-mineral radio aktif diberbagai daerah di Djawa, Bangka, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara (1960-1963); penjelidikan batu gamping dan lempung untuk Projek Semen Tonassa, Sulawesi Selatan (1960-1961); penjelidikan batugamping dan lempung untuk projek Semen Tjibadak, Djawa Barat (1963-1964); penjelidikan batu apung didaerah Tjitjurug, Djawa Barat (1963); penjelidikan belerang didaerah Dieng (Djawa Tengah), Telaga Bodas dan Kawah Putih (Djawa Barat, 1961-1963); penjelidikan batuan fosfat diberbagai daerah di Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (1961-1963) dan penjelidikan batu gamping untuk projek soda abu diberbagai daerah Djawa Tengah, Djawa Timur dan Madura (1961 dan 1963-1964).

Selain daripada itu semua, penjelidikan setjara besar-besaran telah dilakukan pula sedjak tahun 1962 didaerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dalam rangka survey projek tianur tinggi Kalimantan. Penjelidikan ini diperlengkapi dengan survey dari udara jang meliputi pekerdjaan pemotretan, pemetaan dan survey magnit. Adapun pekerdjaan lapangan antara lain meliputi:

Penjelidikan landjutan terhadap endapan bidji hematit dan magnetit didaerah Pleihari dan Gunung Tanalang, Kalimantan Selatan (1962-1964); penjelidikan bidji besi laterit dibagian utara Pulau Sekubu (1961-1962); penjelidikan batubara didaerah aliran Mahakam, Kalimantan Timur (1962-1964) dan penjelidikan kaolin, pasirkwarsa, kwarsit dan batu gamping diberbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (1962-1964).

Geologi teknik:

Penjelidikan-penjelidikan geologi teknik sangat diperlukan dalam setiap perentjanan pembangunan projek industri dan

teknik sipil dan demikian pula untuk tindakan-tindakan pengamanan terhadap bentjana-bentjana alam tertentu seperti misalnja bahaja tanah longsor, gempa bumi, bandjir dan lain-lain sebagainja.

Penjelidikan-penjelidikan besar antara lain telah dilakukan dalam hubungan dengan pemeriksaan pendahuluan untuk: projek-projek pelabuhan Ternate (1961), Ambon (1961), Tenau (1961), Dumai (1962), dan Belawan (1963); projek bendungan-bendungan Tjimanuk, Djawa Barat (1963-1964); projek bendungan Garuntang, Lampung (1963).

Penjelidikan untuk Kelara, Sulawesi Selatan (1964); penjelidikan tanah dasar untuk projek Aluminium di Mabar, Sumatera Utara (1964); penjelidikan geoteknik hidrologi dan pengukuran topografi projek gula Makariki; projek Semen (1964).

Penjelidikan air tanah:

Masalah air tanah dalam beberapa tahun terachir ini banjak mendapat perhatian, berhubung keperluan penjelidikan air untuk berbagai projek pembangunan industri, perkebunan, peternakan, pembangunan desa dibeberapa daerah tidak terkedjar lagi oleh pembangunan projek saluran air. Penjelidikan-penjelidikan geohidrologi jang dilakukan diberbagai daerah telah diperlengkapi pula dengan pengamatan-pengamatan geolistrik dengan hasil jang memuaskan.

Beberapa diantara penjelidikan air tanah jang dapat dikemukakan disini adalah: penjelidikan geohidrologi di Pulau Madura (1961); penjelidikan geohidrologi didaerah Bali Selatan (1961), penjelidikan air tanah untuk projek soda abu di Madura Timur (1963-1964); penjelidikan air tanah untuk projek Pupuk Superfosfat Tjilatjap, Djawa Tengah (1964); penjelidikan air tanah untuk perkebunan rakjat didaerah-daerah Ngandjuk dan Kendal (1963); penjelidikan air tanah untuk projek Pabrik Badja Tjilegon, Djawa Barat (1963 dan penjelidikan geohidrologi dibagian barat Pulau Sumba (1964).

Perpetaan geologi:

Dalam pentjatatan perkembangan kegiatan geologi beberapa tahun terachir ini, patut pula dikemukakan usaha-usaha penggiatan kembali pekerdjaan pemetaan geologi bersistim untuk Pulau Djawa.

Pelaksanaan pembangunan berbagai projek setjara besar-besaran dibeberapa bagian Pulau Djawa sedjak tahun 1961, setjara mutlak menimbulkan kembali kebutuhan akan keterangan

geologi jang bersifat umum, chususnja dalam hubungan dengan rentjana-rentjana industrialisasi, pertanian dan irigasi, pembukaan tanah, pembangunan bendungan dan waduk-waduk, usaha-usaha pertambangan rakjat dan lain sebagainja, jang hanja akan dapat terlajani dengan baik apabila peta-peta geologi detail-detail telah tersedia.

Dalam hubungan dengan kegiatan pemetaan ini, patut pula ditjatat ikut sertanja sebuah team Direktorat Geologi dalam Ekspedisi Tjendrawasih kedaerah Pegunungan Tengah, Irian Barat (1963-1964), jang telah berhasil pula memetakan daerah sepandjang route ekspedisi antara Enoratali, Beoga dan Puntjak Sukarno.

Selandjutnja masih dapat pula dikemukakan disini ikut sertanja beberapa orang ahli geologi Direktorat Geologi kedalam ekspedisi lautan „Operasi Baruna", jang antara lain telah mengadakan penjelidikan geologi, vulkanologi dan occeanografi diberbagai bagian laut Djawa, laut Flores dan laut Banda, serta kepulauan sekitarnja.

Vulkanologi:

Bidang kegiatan lainnja jang termasuk tugas Direktorat Geologi adalah penjelidikan vulkanologi jang terutama ditudjukan pada masalah gunung api dan pendjagaan bentjana letusan-letusannja.

Sedjak tahun 1959 ada 21 buah gunung api ditanah air kita jang telah meletus ataupun menundjukkan kegiatan-kegiatan jang meningkat.

Kegiatan gunung-gunung api ini menjebabkan meningkatnja kegiatan Direktorat Geologi untuk pengawasan dan pendjagaannja terutama gunung-gunung api didaerah jang padat penduduknja.

Tugas pengawasan pada pokoknja terdiri dari pengamatan-pengamatan tetap ataupun berkala terhadap sesuatu gunung api jang menundjukkan segala manifestasi kegiatannja. Hal ini dapat dilakukan dengan tjara pengamatan dengan mata biasa, pengukuran-pengukuran temperatur pada solfatara, fumarola dan mataair-mataair panas jang terdapah pada ataupun sekikitar gunung api itu, pentjatatan seisma-seisma (getaran-getaran bumi), jang diakibatkan oleh gerakan-gerakan perpindahan lava (magma) dalam tubuh gunung api jang sedang „gelisah" dan penjelidikan susunan kimiawi gas-gas gunung api jang sedang keluar dari solfstara dan fumarola. Tjara-tjara penje-

lidikan dengan metode-metode magnetik, grametrik dan geolistrik jang setjara teori sesungguhnja harus dapat pula mentjatat perobahan-perobahan dan gerakan-gerakan magma dalam tubuh gunung api jang sedang „gelisah" sampai sekarang ini baru beberapa kali sadja ditjoba di Indonesia, belum dapat memberikan hasil-hasil praktis jang diharapkan.

Adapun jang diharapkan daripada hasil-hasil pengawasan gunung api ialah ramalan tentang kegiatan-kegiatan/kemungkinan-kemungkinan terdjadi, agar pada waktunja dapat diberitahukan kepada penduduk dan Pemerintah setempat, agar setjara tjepat dapat diambil tindakan-tindakan pengamanan seperlunja.

Apabila terdjadi letusan gunung api, tugas selandjutnja jang harus dlaksanakan oleh petugas-petugas vulkanologi ialah mendjaga agar djangan terdjadi bentjana jang tidak diinginkan.

Keadaan kepundan dan morfologi tubuh gunung api sangat menentukan kemungkinan meluasnja bentjana jang dapat ditimbulkan oleh awan dan lahar, serta guguran-guguran jang mungkin terdjadi dari sumbat lava ataupun aliran lava jang keluar dari lobang kepundan.

Untuk tugas-tugas ini telah didirikan pos-pos pengawasan pada duabelas gunung-gunung berapi jang aktif diseluruh Indonesia.

Kini oleh Direktorat Geologi sedang diusahakan pelaksanaan pembangunan sebuah Pusat Penelitian Vulkanologi di Jogjakarta dengan perlengkapan peralatan jang modern. Pemilihan Jogjakarta sebagai pusat itu didasarkan kepada kemungkinan „penggunaan" Merapi sebagai objek pengamatan jang terus-menerus untuk mempeladjari masalah vulkanologi ditanah-air kita.

Didalam bidang rutine baik unit-unit jang merupakan instansi Pemerintah (overheidsdienst) jang menetapkan policy perindustrian pertambangan maupun unit-unit produksi sebagai badan pelaksana usaha-usahanja terutama ditudjukan untuk mengatasi masalah-masalah jang menjangkut baik pemeliharaan produksi maupun pengembangan produksi, disamping itu djuga perbaikan organisasinja dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar daripada unit-unit produksi (existing industries), dilingkungan Deperdatam, baik milik Pemerintah maupun milik swasta, adalah merupakan unit-unit

produksi warisan kolonialis Belanda jang mempunjai sifat ketergantungannja dari luar negeri.

Masalah-masalah pokok jang dihadapi oleh unit-unit tersebut terutama dalam usaha memelihara kelangsungan produksi adalah mendjamin spare-parts jang semula banjak tergantung dari luar negeri itu. Untuk ini oleh P.N.-P.N. dalam lingkungan Departdatam telah diusahakan dengan djalan mendirikan bengkel-bengkel jang dapat memprodusir beberapa bagian spare-parts jang penting-penting untuk kelangsungan berdjalannja pabrik-pabrik itu, baik jang berada dilingkungan Deperdatam, maupun jang berada diluarnja. Bahkan beberapa P.N. telah sanggup untuk membuat bagian-bagian daripada mesin dan oleh Direktorat Perindustrian Dasar/Berat telah dirintis djalan dengan membuat beberapa djenis untuk keperluan industri-industri. Dalam taraf pertama ini pembuatannja terbatas pada industri kertas dan akan menjul untuk industri semen. Dalam rangka ini sedang diadakan pertjobaan-pertjobaan:

1. pembikinan berbagai spare-parts mesin-mesin dalam negeri;
2. pembikinan berbagai mesin-mesin seperti tenun, gilingan karet, gilingan djagung, gilingan tjat, mesin gergadji, kompresor, mesin pembikinan gznteng, mesin gilingan padi dan kopi, beton molen dan sebagainja;
3. persiapan pembikinan elektromotor serta motor diesel.

P.N.-P.N. industri mesin telah dapat membuat beberapa djenis spare-parts untuk beberapa djenis mesin tertentu, dan bahkan telah dapat pula membuat beberapa djenis mesin.

P.N. Sabang Merauke, telah dapat membuat:

1. mesin industri gula,
2. mesin-mesin perkebunan,
3. mesin gilas djalan,
4. mesin tenun.

P.N. Indra telah dapat membuat:

cylinder-kop untuk mesin diesel.

P.N. Bisma telah dapat membuat:

1. mesin-mesin pengaduk beton,
2. bagian-bagian untuk instalasi pabrik es,
3. mesin-mesin untuk perkebunan kopi.

P.N. Barata telah dapat membuat:

1. mesin dan alat-alat untuk keperluan industri gula,
2. mesin/alat-alat untuk keperluan perkebunan,
3. mesin untuk industri-industri lainnja, dan mesin-mesin diesel,
4. spare-parts seperti ampas palt, ampas balk, suplus, melenronsel,
5. moerbout,
6. paku kling,
7. mesin diesel.

P.N. Boma, telah dapat membuat:

mesin-mesin dan alat-alat untuk keperluan industri gula dan lain-lainnja. P.N.-P.N. Industri alat listrik dan telekomunikasi telah pula membuat alat-alat listrik dan telekomunikasi dan spare-parts alat-alat tersebut.

P.N. Metrika, telah dapat membuat:

1. transformator tekanan rendah,
2. lemari-lemari penghubung.

P.N.-P.N. industri lainnja, jang tidak memprodusir mesin-mesin, untuk memenuhi spare-parts-nja djuga mendirikan bengkel-bengkel jang dapat membuat spare-parts jang mereka perlukan misalnja: P.N. industri semen, P.N.-P.N. industri ketas, P.N. industri pupuk, P.N. pertambangan dan P.N.-P.N. perminjakan.

Didalam usaha-usaha tersebut diatas termasuk djuga kegiatan industri-industri permesinan swasta jang berada dibawah pengawasan Perdatam. Semua usaha-usaha diatas, dikembalikan setjara intensif dan kreatif agar achirnja melepaskan diri sama sekali dari ketergantungan atas import spare-parts luar negeri.

Ketegantungan unit-unit produksi dalam lingkungan Departemen Perdatam tidak hanja terbatas pada spareparts sadja, akan tetapi djuga mengenai beberapa djenis bahan baku karena antara lain industri-industri warisan kolonialis Belanda tidak mendasarkan prosesing produksinja pada kekajaan bumi Indonesia.

Kesukaran itu dapat diatasi dengan djalan mengganti bahan-bahan baku/bahan-bahan penolong jang diimpor dengan bahan-bahan baku/bahan-bahan penolong dalam negeri. Usaha ini se-

djak beberapa lamanja telah dan sedang dikerdjakan, setjara nasional dan regional.

Usaha-usaha tersebut adalah:

1. Substitusi pasir norma untuk P.N. Semen Padang.

Pasir norma merupakan bahan penolong di P.N.-P.N. semen untuk testing kwalitas jang biasa diimpor. Survey jang telah diadakan menjimpulkan, bahwa dipulau Bangka ada pasir silika jang memenuhi sjarat kebutuhan, baik kwalita maupun kwantitanja. Dengan bekerdja sama dengan Balai Penelitian Bahan-bahan di Bandung telah berhasil diketemukan suatu faktor pasir norma Bangka sebagai pengganti pasir norma Belgia jang biasa dipakai oleh P.N. Semen Padang.

Kini sedang diusahakan untuk mempergunakan pasir norma Bangka dalam projek Semen Tonassa.

2. Substitusi gips untuk P.N.-P.N. semen.

Telah diadakan pertjobaan-pertjobaan mengenai kreaksi waste liquer soda Solvay dengan loog penggaraman. Taksiran dapat dihasilkan paling sedikit 30.000 ton/tahun gips kwalita baik, jang tjukup untuk mensupply kebutuhan gips dari P.N.-P.N. Semen Gresik, Padang dan projek Semen jang akan datang.

3. Substitusi topazine untuk P.N. Iglas.

Survey, penelitian maupun penggunaan substitusi topazine dalam skala pabrik P.N. Iglas telah selesai dilakukan.

4. Substitusi arpus untuk P.N.-P.N. kertas.

Arpus tidak diimpor lagi, karena bisa didapat dari Atjeh. Mengingat djauhnja maka telah selesai diadakan survey dan research pengolahan arpus dari pulau Djawa, sehingga harganja akan lebih murah.

5. Substitusi kaolin untuk P.N. Kertas dan Iglas.

Sumber kaolin telah diketemukan di Bangka dalam djumlah jang banjak. Umumnja kwalitasnja kurang baik, karena kadar besinja agak tinggi. Sedang diusahakan untuk memperbaiki mutunja.

6. Substitusi refractory (bata tahan api).

Sedang dalam taraf penelitian dan kerdjasama dengan Balai Penelitian Keramik Bandung untuk membuat bata tahan api. Bata tahan api dibutuhkan dalam djumlah beberapa ratus ribu tiap tahunnja untuk lapisan dapur pembakar industri semen,

keramik dan lain-lain. Bahan-bahan baku/bahan-bahan penolong jang terdapat di dalam negeri, beberapa diantaranja ternjata tidak dapat dipergunakan untuk pabrik-pabrik warisan kolonial jang sudah ada, oleh karena pabrik-pabrik itu mendasarkan prosesingnja seperti sudah diterangkan diatas melulu kepada bahan-bahan baku/bahan-bahan penolong impor. Kesukaran ini diatasi dengan djalan mengadakan perluasan dalam bentuk mendirikan pabrik-pabrik baru, dimana dapat dipergunakan bahan-bahan baku/bahan-bahan penolong dalam negeri.

Untuk pemeliharaan dan kelangsungan produksi daripada unit-unit produksi diperluas pula fasilitas produksi lainnja, seperti pergudangan pelabuhan, pengangkutan dan lain-lain. Untuk penjediaan fasilitas itu, P.N.-P.N. mengadakan sendiri fasilitas-fasilitas tersebut atau dengan kerdja sama dengan badan-badan lain dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebagai tjontoh dapat disebut disini, bahwa P.N. Semen Gresik memiliki sendiri gudang-gudang penjimpanan semen, pelabuhan chusus, sedang dalam fasilitas pengangkutan lainnja, dari Pemerintah maupun swasta. Demikian djuga P.N. Pupuk Sriwidjaja, P.N. Tambang Ombilin, P.N. Permina, dan P.N. Garam. Bahkan P.N. Garam memiliki armada pengangkutan sendiri.

2. Perkembangan produksi:

Usaha-usaha mengembangkan produksi dilakukan dengan perluasan/peningkatan produksinja. Hal ini perlu untuk memenuhi rising-demands daripada rakjat kita dewasa ini.

Ketjuali perluasan dan peningkatan djumlah produksi (kwantitas) perhatian ditudjukan pula kepada mempertinggi kwalitas produksi.

Oleh karena buruh serta pimpinan dalam kesatuan-kesatuan produksi merupakan faktor jang menghasilkan, maka perluasan san/peningkatan produksi setjara kwantitas dan kwalitas dibarengi pula dengan pemeliharaan kesedjahteraan physik dan mental up-grading daripada buruh dan pimpinan kesatuan-kesatuan tersebut.

Dalam hubungan ini diantara berbagai-bagai unit produksi Departemen diadakan kompetisi manipolis guna mempertinggi produksi setjara kwantitatif dan kwalitatif dengan memberikan berbagai incentive (imbangan-djasa) bagi mereka, sesuai dengan daja upaja mereka.

Unit-unit produksi disamping usahanja untuk memelihara kelangsungan produksi, harus djuga mengembangkan produksi dalam arti memperluas atau meningkatkan produksi. Usaha-usaha ini terutama dilakukan oleh P.N. baru jang tidak mengandung unsur-unsur warisan kolonial, sehingga dapat bebas mengatur produksinja menurut kebutuhan nasional kita. Pada P.N.-P.N. warisan kolonial Belanda, pada umumnja untuk peningkatan produksi setjara baik, sebelumnja perlu diadakan rehabilitasi.

Projek-projek perluasan:

Projek-projek perluasan merupakan usaha-usaha perluasan daripada P.N.-P.N. industri jang telah ada/berdjalan. Projek-projek tersebut umumnja merupakan projek-projek prioritas jang quick yielding, jang penjelesaiannja tidak memakan waktu dan didalam waktu satu dua tahun atau paling lambat tiga tahun sudah dapat mendatangkan hasil. Tudjuan daripada projek-projek perluasan ialah untuk meningkatkan produksi guna mentjukupi rising demands masjarakat akan hasil-hasil industri dalam negeri.

a. Projek-projek perluasan dalam lingkungan B.P.U. Mesin Alat-alat listrik:

Projek Bola Lampu Semarang: Projek ini direntjanakan akan selesai dalam dua tahap jaitu:

1. tahap pertama pada achir tahun 1966 akan selesai pembangunan pabrik gelas teknik vakum.
2. tahap kedua pada tahun 1967 akan selesai pembangunan pabrik manufacturing lampu T.L. lengkap.

dengan kapasitas produksi lampu pidjar 25 djuta bulb/tahun dan lampu T.L. 3 djutta/tahun.

Projek Alat Pengetjoran Logam Bandung.

Projek ini direntjakan akan selesai pada tahun 1967 dan akan memproduksi 3.000 tjor-tjoran termasuk 1.000 machine tools/ settiap tahun dan akan dapat menghemat devisa $ 0,4djuta tiap tahunnja.

Projek Gerbong Kereta Api I, II Pasuruan.

Projek ini direntjanakan akan selesai dalam tahun 1973 dengan dua tahap jaitu mengadakan asembling dan persiapan untuk manufacturing dengan kapasitas 2.000 buah gerbong per tahun, dan pada tahun 1965 direntjanakan asembling daripada

400 gerbong batubbara, 330 gerbong tangki, memperlengkapi mesin-mesin dan foundry serta lok lansir dua buah untuk emplasemen pabrik.

Projek Konstruksi Badja Bandung.

Projek ini direntjanakan akan selesai dalam tahun 1967 dan akan memproduksi 8.500 ton barang-barang konstruksi setiap tahun sehingga dapat menghemat devisa sebesar US $ 0,35 djuta setiap tahun.

Projek Motor Listrik Djakarta.

Projek ini direntjanakan akan selesai dalam tahun 1966 dan akan memproduksi 8.000 buah motor listrik setiap tahun dan 2.00 buah generator setiap tahun sehingga dapat menghemat devisa sebesar US $ 0,18 djuta setiap tahun.

Projek Gerbong Penumpang Pasuruan.

Projek ini direntjanakan akan selesai dalam tahun 1967 dan akan memproduksi 2.000 gerbong setiap tahun sehingga dapat menghemat devisa sebesar US $ 2,25 djuta setahun.

Projek Motor Bensin Pasuruan.

Projek ini direntjanakan akan selesai dalam tahun 1966 dan akan memproduksi 1.000 buah motor bensin type NR 100 setiap tahun.

Projek Kawat Las Djakarta.

Projek ini direntjanakan akan selesai dalam tahun 1967 dengan membangun suatu ARC Welding Electrode manufacturing plant dengan memproduksi 1.200 ton setiap tahun.

Projek Mesin Gilas Djalan (Road Rollers) Surabaja.

Projek ini direntjanakan akan selesai dalam tahun 1970/1971 dengan memproduksi 200 buah mesin penggilas djalan setiap tahun.

Projek Trafo Djakarta.

Projek ini direntjanakan akan selesai dalam tahun 1966 dengan memproduksi transformator.

b. Projek-projek perluasan dalam lingkungan B.P.U. Kimia.

Projek Areal Garam Pamekasan Madura.

Projek ini direntjanakan akan selesai dalam tahun 1970 dengan memproduksi 450.000 ton setiap tahun dari luas tanah pegaraman 6750 Ha. sehingga akan dapat menambah devisa negara dengan akan adanja ekspor garam keluar negeri.

Projek Ban Sepeda Djakarta.

Projek ini direntjanakan akan selesai pada achir tahun 1965 dengan memproduksi 1.300.000 pasang ban luar/dalam setiap tahun sehingga dapat menghemat devisa.

Projek Oxygen (Zatas).

Projek ini akan dibangun di Medan, Makassar dan Semarang, dan direntjanakan akan selesai dalam tahun 1965 dengan memproduksi 2.000.000 m³ zatas setiap tahun.

Projek perluasan P.N. Semen Gresik.

Projek ini direntjanakan akan selesai pada bulan Desember 1967. Perluasan semen Gresik ini bertujudan untuk meningkatkan produksi dari 125.000 ton setiap tahun (1964) mendjadi 500.000 ton setiap tahun sehingga dapat menghemat devisa.

Projek perluasan Semen Padang.

Projek ini direntjanakan akan selesai pada bulan Djuni 1968 dengan meningkatkan produksi mendjadi 300.000 ton setiap tahun.

Projek perluasan P.N. Kertas Letjes.

Projek ini direntjanakan akan selesai dalam tahun 1967 dengan meningkatkan produksi mendjadi 15 ton kertas sehari.

Projek perluasan P.N. Kertas Pematang Siantar.

Projek ini direntjankan akan selesai dalam tahun 1968 dengan meningkatkan produksi mendjadi 9.000 ton setiap tahun.

Projek Tjepuk Djakarta.

Projek ini direntjanakan akan selesai dalam tahun 1967 dengan meningkatkan produksi 200 djuta tube setiap tahun mendjadi 450 djuta tube setiap tahun.

Projek perluasan P.N. Kertas Padalarang.

Projek ini merupakan rentjana perluasan daripada pulp-plant jang akan memproduksi 9.000 ton setiap tahun dan paper plant jang akan memproduksi 8.000 ton setiap tahun kertas tulis dan tjetak.

c. Projek-projek perluasan dalam lingkungan B.P.U. Industri Alat Pengangkutan:

Projek Galangan Kapal Palembang.

Projek perluasan dari P.N. Perkapalan **Alir Mendjaja ini** rentjananja akan diselesaikan dalam dua tahap:

1. djangka pandjang jang direntjanakan **selesai tahun 1959** 1965 dan meliputi:
   a. pembongkaran/pembangunan kembali galangan IV dan V, termasuk replacement alat-alat produksi untuk mengimbangi naiknja kapasitas galangan.
   b. pembangunan galangan kapal kaju dan pembongkaran/ pembangunan kembali perbengkelan.
2. **djangka pandjang jang direntjanakan** selesai **tahun 1959** dan jang meliputi:
   a. **Pembangunan dok terapung (drijvende dok) (dengan kapasitas jang lebih besar) dari galangan I, II dan III.**
   b. Pembongkaran/pembangunan kembali kantor, gudang dan sebagainja dengan kapasitas:
      Graving dok: 1.000 ton.
      Galangan kapal IV dan V masing-masing 100 ton galangan kapal kaju 2 buah masing-masing 150 ton sehingga dapat menghemat devisa sebesar ± US $ 2 djuta setiap tahunnja.

Projek Galangan Peluntjuran Kapal Djakarta.

Projek perluasan ini direntjanakan akan selesai pada tahun 1968 dan akan terdiri dari dua bagian:

Pakin II : bangunan kapal baru (Tandjung Priok) dengan kapasitas 4.000 s/d 10.000 ton DWT; direntjanakan selesai dalam tahun 1968.

Pakin I : reparasi kapal-kapal baru (Pasar Ikan) dengan kapasitas 5.000 s/d 15.000 DWT.

Diperhitungkan akan dapat menghemat devisa sebesar US $ 5 djuta/tahunnja.

Projek perluasan P.N. Gaja Motor Djakarta.

Projek perluasan ini bertudjuan manufacturing dan asembling bus bodies dalam usaha swasembada akan kebutuhan alat-alat pengangkutan bermotor dalam rangka pembangunan industri permobilan di Indonesia.

Projek ini akan terdiri dari 4 bagian jaitu:

a. manufacturing plant,
b. engine rebuilding,

c. super service station,
d. rehabilitasi mesin-mesin.

d. Projek-projek perluasan dalam lingkungan BPU Tambang Batubara.

Projek ini direntjanakan akan selesai pada tahun 1969 dan meningkatkan produksi sampai 1.000.000 ton setiap tahun.

e. Projek perluasan dalam lingkungan BPU Tambang Mas. Projek peleburan Timah di Muntok:

Projek ini direntjanakan akan selesai pada bulan Desember 1965 dengan kapasitas produksi 25.000 ton timah metal setiap tahun sehingga dapat menambah devisa setiap tahunnja Rp. 37 djuta.

f. Projek perluasan Minjak dan Gas Bumi.

P.N. Permigan:

1. Perluasan/rehabilisasi tambang minjak Bongas.
2. Perluasan tambang minjak Tjepu.

P.N. Pertamin: Perdjandjian Karya antara Pertamin dengan Panam di Sumatera Tengah untuk eksplorasi/eksploitasi.

P.N. Pertamin: Perdjandjian explorasi/exploitasi Minjak didasar laut didaerah pantai Sumatera Timur dengan pihak Djepang.

Didalam usaha mengembangkan produksi, faktor tenaga kerdja, jaitu buruh dengan pimpinan unit-unit produksi mendapat perhatian, jaitu dengan djalan menambah tenaga-tenaga kerdja serta meningkatkan mutu kerdja mereka dengan memberikan pendidikan tambahan, latihan-latihan kerdja, dan untuk menambah kesetiaan dan kegembiraan kerdja diberikan bermatjam matjam incentive. Tentang hal ini akan diuraikan terperintji didalam bab lainnja.

***

B.P.U./P.N.	1960		1961	
	Produksi	Target	Produksi	Target
Per. BPU/Mesin/Listrik.				
P.N. RALIN:				
a. Radio	9.501 bh.	—	9.242 bh.	1.300 b
b. Lampu Pidjar	9.405.444	—	7.500.561	9.300
c. Lain-lain				
Lemari Badja	251	—	76	276
Step Upirato	—	—	30	—
Amplifier	191	—	80	210
Loudspeaker	4.329	—	6.171	4.761
Triller	—	—	1.998	—
Accu Charger	—	—	47	84
Tl. Almaturen	-	—	—	—
Televisi	—	—	—	—
Bakelit Onderdelen	—	—	—	—
Itralin	—	—	—	—
P.N. SABANG MERAU KE:	2.240 ton	—	1.816 ton	2.440 t
Kontruksi Bangunan	—	—	1.177	—
Konstruksi Djembatan	—	—	135	—
Tangki-tangki/ketel-ketel	—	—	245	—
Bagian-bagian mesin	—	—	67	—
Alat untuk Bangka/Belitung	—	—	70	—
Pengetjoran Perunggu	—	—	9	—
Pengetjoran Alumunium	—	—	0,42	—
Pengetjoran besi	—	—	113	—
Alat-alat mesin Pertambangan	—	—	—	—
P.N. BARATA:	2.100 ton	—	1.698.5 ton	2.400 t
Penggilas djalan	—	—	± 72	—
Mollen Rollen untuk pat gula	—	—	± 340	—
Rubbermengwals/mangel	—	—	36	—
Sheet batery	—	—	4	—
Rubber/Koprarollen	—	—	28	—
Tangki-tangkiair/minjak	—	—	42	—
Hoogspanning masten	—	—	32	—
Djasa pembuatan djembatan	—	—	140	—
Ponton Pontianak	—	—	65	—
Rupa-rupa konstruksi Plat	—	—	260	—
Rupa-rupa onderdil	—	—	± 500	—
Moerbouten	—	—	72,5	—
Paku keling/Tire fond	—	—	69	—
Djasa-djasa/lain-lain	—	—	23	—

UKSI

1962		1963		1964	
Produksi	Target	Produksi	Target	Produksi	Target
5.901 bh.	—	8.128 bh.	6.000 bh.	9.876 bh.	—
7.424.962	—	6.637.943	6.500.000	4.110.447	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
100	—	10.160	160	—	—
8.500	—	10.357	5.000	—	—
—	—	—	—	—	—
500	—	—	--	—	—
4.000	—	6.894	6.500	3.376	—
5.000	—	—	—	—	—
10.000	—	30.000	30.000	—	—
—	—	1.050	—	—	—
2.106.023 ton	—	1.734.471 ton	1.750 ton	1.157.235 ton	—
1.303.790	—	1.152.471	1.750	—	—
—	—	—	—	—	—
523.112	—	182.220	—	—	—
191.429	—	183.946	—	—	—
—	—	—	—	—	—
26.929	—	161.614	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	60.763	98.259	—	—
3.257 ton	—	3.633 ton	2.800 ton	2.850 ton	—
86	—	440.379	—	—	—
349	—	59.007	—	—	—
66	—	---	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
1.079	1.765,495,9	—	—	—	—
384	—	361.677,25	—	93.040,05	—
149	—	80.687,1	—	—	—
82	—	50.263,5	—	—	—
32	—	93.840,5	—	—	—

B.P.U./P.N.	1960		1961	
	Produksi	Target	Produksi	Target
P.N. BOMA.	675 ton	—	930 ton	750 ton
Rolling Stock.	—	—	1.124 bh.	—
Konstruksi Badja	—	—	228.443 kg.	—
Pekerdjaan Pelat	—	—	7.640	—
Alat-alat untuk pabrik gula	—	—	152.960	—
Alat untuk pabrik lain	—	—	540.853	—
Djasa² montage dll.	—	—	—	—
Embalage & transport	—	—	—	—
P.N. INDRA:	—	—	—	—
P.N. METRIKA:	—	—	—	—
Bidang Produksi Barang				
1. Koolborstels	22.732 bh.	—	31.861 bh.	24.995 bh.
2. Trafo	172 „	—	—	189 „
3. Kasten battery	20 unit	—	323 unit	22 unit
BIDANG PROD. DJASA				
1. Pembetulan	—	—	3.592	1.399
Kardos lain-lain	—	—	23	—
2. Pengawetan kaju	1.888 m3	—	5.091 m3	2.076 m3
3. Installasi	84 prk	—	192 prj	92 prk
II. PER. BPU. INDUSTRI KIMIA.				
a) P.N. Asam Arang	871.584 kg.	—	950.278 kg.	800.000 kg.
b) P.N. Iglas	12.727.682	—	14.000 kg.	10.342 kg.
c) P.N. Intirub	—	—	—	—
1. ban dalam	87.674 bdj	—	110.675 bdj	205.110 bh.
2. ban luar	89.522 bdj	—		189.100 „
3. Flaps 20	29.889 bdj	—	6.613 bdj	39.000 „
d) P.N. Semen Gresik	278.912	—	307.334,6	250.000
e) P.N. Semen Padang	107.695	—	138.433	120.000
f) P.N. Padalarang	5.592.496	·	3.388.862	3.300.000
g) P.N. Letjes	3.403.184	—	3.319.166	3.200.000
h) P.N. Blabag	—	—	1.572.230	1.400.000
i) P.N. P. Siantar	—	—	—	—
j) P.N. Soda			—	—
a. Kostik Soda	749.849	—	934.686	1.970.000
b. Asam Chlorida	397.357	—	955.957	990.000
c. Serbuk kelantang A + B	1.044.958	—	1.301.040	2.405
J. P.N. Garam				
1. Garam Dasar	197.736	—	448.927	335.000

1962		1963		1964	
Produksi	Target	Produksi	Target	Produksi	Target
—	—	—	—	—	—
5.073 bh	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
601,1 kg.	—	—	—	—	—
601,1	—	—	—	—	—
601,1	—	596.355 bh.	600	—	—
705	—	—	—	—	—
1.000.134	—	—	—	—	—
—	—	1.020.492 „	950	992.344 „	—
—	—	—	—	—	—
38.317 bh.	—	25.665 bh.	25.000 bh.	33.785 „	—
—	—	301 unit	150 „	120 „	—
488 unit	—	370 „	500 unit	474 „	—
—	—	2.461 bh.	1.400 bh.	2.537 „	—
32	—	—	—	—	—
—	—	1.846.592 m3	2.000 m3	—	—
—	—	515 prk	200 prk	387 prk	—
886,130,07 kg.	—	667.114,61 kg.	800.000 kg.	641.265,77 kg.	—
14.424,022	—	12.062.738	12.123.000	6.966.482 kg	—
—	—	—	—	—	—
115.221 bh.	—	73.817 bh.	94.377 bh.	63.285 bh.	—
89.002 „	—	44.038 „	66.744 „	84.798 „	—
8.760 „	—	5.552 „	36.000 „	5.552 „	—
390.091	—	331.669,6	330.000	315.147,3	—
120.598	—	97.830	120.000	123.500	—
3.450.214	—	3.137.756	3.000.000	3.142.581	—
3.416.233	—	3.645.161	3.000.000	3.644.026	—
3.157.065	—	2.730.472	2.700.000	1.748.188,8	—
520.295	—	1.652.748	2.400.000	—	—
—	—	—	—	—	—
881.653	—	614.982	1.000.000	685.862	—
872.428	—	592.909	9.000.000	782.828	—
947.015	764	764.105	1.100.000	544.749	—
255.785	—	448.942	250.000	53.000	—

B.P.U./P.N.	1960		1961	
	Produksi	Target	Produksi	Target
2. Garam Gandum	197.736	—	—	—
3. Giban bersih	1.350	—	2.500	6.500
4. Tjepuk	9.901.226	—	10.764.413	25.000.000
5. Peti	21.529	—	16.500	45.000
K. P.N. ZAT ASAM:				
1. Oxigen	2.149.455,5	—	2.192.434	2.225.000 m3
2. Zat Lemas	6.069,5 m3	—	6.504 m3	—
3. Udara	13.727,6	—	13.037 m3	—
4. M.C. (gas ontwikkela	—	—	—	—
II. PER. BPU INDUSTRI ALAT PENGANGKUTAN :				
Bangunan baru	941 bh.	—	1.958 bdj	3.000 bdj
a. P.N. Gaja Motor C.K.D.	48	—	53	80
C.K.B. (Commercial body building)	—	—	—	—
b. P.N. PAKIN.				
Reparasi	8.965 ton	—	17.190	—
Bangunan baru	1.452	—	1.618 ton	—
C. P.N. PERKAPALAN ALIR MENDJAJA.				
1. Perbaikan tongkang	31 bh.	—	38 bh.	—
2. Bangunan kapal	164	—	83	—
3. Bangunan baru	6	—	4	—
V. PER. BPU TAMBANG BATU BARA:				
1. PN. Tambang Bukit	549.781 ton	—	425.651 ton	461.000 ton
2. PN. Tambang Ombilin	77.606 „	—	103.709	120.000
3. Tambang Sebuku	32.719 „	—	31.709	28.200
V. PER. TAMBANG TIMAH NEGARA.				
1. P.N. Tambang Timah Bangka	127.041 kw.	—	113.200 kw.	122.450 kw
2. P.N. Tambang Timah Belitung	76.000 „	—	58.766 kw.	75.600,7
3. P:N. Tambang Timah	13.152 „	—	18.000	18.000
VI. PER. TAMBANG UMUM NEGARA.				
a. PN.Tambang Emas Tjikotok.				
1. Emas Murni.	1.623.470	—	168.6069	168 kg
2. Perak murni.	9.174.544	—	10.562.107	10.200

1962		1963		1964	
Produksi	Target	Produksi	Target	Produksi	Target
53.485	—	68.686	54.000	44.688 „	—
3.425.333	—	1.819 kg.	1.500 kg.	836 kg.	—
14.689.691	—	6.806.452	17.000.000	5.455.976	—
—	—	—	—	—	—
2.170.200	—	2.071.288	2.000.000	2.177.573	—
4.700 m3	—	7.202 m3	5.000 m3	5.562 m3	—
19.463,5	—	17.608 m3	10.000 m3	16.456.5 m3	—
775 bh.	—	27 bh.	300 bh.	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	593 unit	1.287 unit	1.283 bh.	—
192	—	115 unit	160	277	—
8.278 ton	—	4.180 ton	—	6.480 ton	—
2.230	4.250 ton	1.680	5.530 ton	1.160	—
90 bh.	—	72 bh.	—	680 bh.	—
90	—	72	—	12.413	—
3	—	1	—	40	—
351.080 ton	—	443.146 th	450.000 ton	307.408 ton	—
90.311 „	—	110.037	150.000	97.272	—
95.216 kw.	—	38.137	50.000	41.028	—
95.216 kw.	—	64.351 kw.	111.165 kw.	100.269 kw.	—
61.918.7	—	48.351	78.751	53.280,7	—
18736.58	—	18.704	17.240	12.512,61	—
139.4444 kg	—	1.380.227	150 kg.	695.347 kg.	—
7720.967 „	—	8.704.493	9.000 „	7.629.535 „	—

B.P.U./P.N.	1960		1961	
	Produksi	Target	Produksi	Target
b. PN. Bauksit Indo:				
1. Bauksit.	395.678 ton	—	441.166 ton	425.000 ton
2. Ekspor Bauksit.	—	—	—	—
PN. LOGAM MULIA				
Pemurnian.				
a. 1. Emas murni.	—	—	—	—
2. Tambang	—	—	—	—
3. Langganan lain	—	—	—	—
b. 1. Perak murni	—	—	—	—
2. Tambang.	—	—	—	—
3. Langganan lain	—	—	—	—
4. Platina	—	—	—	—
Hasil-hasil djasa pesan Industri.				
Emas dental	—	—	—	—
Perak matjam	—	—	—	—
P l a t i n a	—	—	—	—
Hasil Pembuatan/Peng-olahan.				
E m a s.	—	—	—	—
P e r a k.	—	—	—	—
P l a t i n a.	—	—	—	—
C. P.T. NIKKEL.				
1. Nikkel.	—	—	13.681 ton	36.000 ton
2. Ekspor Nikkel.	—	—	18.000	—
VII. PERUSAHAAN MINJAK BUMI.				
1. P.N Permina.	580.575.4 ton	—	823.552.3 ton	—
2. P.N. Pertamin.	1.444.654	—	1.252.116	—
3. P.N. Permigan.	35.908.8	—	31.235.0	—
Perusahaan Asing:				
4. Shell B.P.M.	4.520.502.0	—	4.482.14 ton	—
5. S.V.P.M. (Stanvac):	3.860.685.4	—	3.423.798,7	—
6. C.P.P.M. (Caltex):	10.156.426.5	—	11.461.660	—

1962		1963		1964	
Produksi	Target	Produksi	Target	Produksi	Target
491.298 ton	—	—	—	—	—
449.205	—	—	—	—	—
1.679 kg.	—	1.966.133 kg.	190 kg.	—	—
1.393	—	1.379.782	—	1.695.347 kg.	—
284	—	586.351	—	946.640	—
121.427	—	17.172.244	16.500 kg.	—	—
77.207	—	8.704.493	—	7.629.535 kg.	—
4.422	—	8.467.751	—	7.316.558	—
46	—	40.029	—	48.138	—
8.14 kg.	—	124.368 kg.	—	150.977	—
29.223	—	1.866.771	—	2.035.568	—
148	—	01.309	—	030.805	—
	—	185.388	—	182.634	—
606.690 kg.	—	948.393	—	256.730	—
	—	02.562	—	02.562	—
1.077.712 ton	—	—	—	—	—
12.000	37.500	—	—	—	—
11.343.191 ton	—	1.173.321 ton	—	1.395.176 ton	—
983.393,8	—	761.354	—	7.749.458	—
130.018,6	—	128.571,6	—	1.305.832	—
5.613.833	—	5.351.137	—	4.929.326	—
3.423.7987	—	3.272.060	—	32.119.936	—
11.461.660	—	11.533.900	—	16.409.577	—

B. BIDANG PEMBANGUNAN.

Perkembangan dibidang pembangunan jang mentjakup masaalah-masaalah jang bersifat idiil, materiil dan ilmiah merupakan usaha Departemen Perdatam jang senantiasa tidak dapat dipisahkan daripada kerdja rutine dan kerdja kreatif, untuk mendjawab tuntutan perdjoangan jang antara lain mendjadi landasan revolusi dan pembangunan masjarakat kita.

1. Pembangunan idiil.

Dalam tahap sekarang daripada revolusi kita jang bersifat mendjebol dan membangun, maka diadakanlah perobahan-perobahan dibidang jang dianggap perlu untuk menjesuaikan keadaan dengan perkembangan perdjoangan kita.

Diantara perobahan-perobahan terdapat perobahan dibidang organisasi, dibidang hukum formil dan dibidang management.

Sudah lama pengorganisasian didjalankan dengan perobahan-perobahan jang drastis atau sedikit demi sedikit, untuk mendapatkan hasil kerdja jang seefisien-efisiennja.

Tentang hukum-hukum formil serta perundang-undangan, maka sisa-sisa kolonialisme makin lama dikikis habis, sehingga dewasa ini hukum-hukum formil dan perundang-undangan diharapkan semuanja telah dapat memenuhi tuntutan revolusi.

Salah satu faktor penting jang diperhatikan sepenuhnja adalah tenaga manusia sebagai faktor tenaga produksi. Departemen Perdatam menjorot segi kehidupan manusia jang memproduksi dalam rangka revolusi kita. Untuk mengamankan revolusi kita Departemen Perdatam mempeladjari, menguasai dan mengamalkan adjara-adjaran Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno melalui „indoktrinasi-indoktrinasi" pada mereka.

Dalam memenuhi panggilan Dwikora, Departemen Perdatam menjusun bataljon-bataljon, brigade-brigade sukarelawan-sukarelawan jang senantiasa siap untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi melawan neo-kolonialisme „Malaysia". Kaum buruh dilingkungan Departemen Perdatam sebagai soko-guru revolusi mendapatkan tempat penting dalam usaha-usaha dan perhatian pimpinan.

Dalam pada itu diperhatikan pula segala sesuatu jang menjangkut kesedjahteraan, baik spirituil maupun materiil (olah raga, seni budaja, agama, pakaian) disamping pembinaan

kader-kader menurut kebutuhan kita dengan memberikan pendidikan tambahan dan pendidikan kedjuruan diluar dan didalam negeri.

Dari semua usaha dibidang mental ini Departemen Perdatam mengharapkan tumbuhnja kesetiaan kepada pekerdja, patriotisme dan daja kreasi sebanjak-banjaknja.

Bidang Pembangunan.

Didalam usaha pendjebolan hukum dan ketentuan-ketentuan formil untuk menghabiskan sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme titik berat diletakkan kepada bidang pertambangan, jaitu dengan djalan menghapuskan Indische Mijnwet Hindia Belanda dan menggantinja dengan Undang-undang Pertambangan Republik Indonesia jang baru jang sedapat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan perdjoangan revolusi kita. Dibidang perminjakan ditetapkanlah ketentuan-ketentuan formil jang makin lama makin mengurangi hak-hak dan dominasi modal asing untuk achirnja mengkikis habis pengaruh dan dominasi ini.

Dibidang organisasi telah dibentuk badan resmi begitu rupa susunan dan strukturnja, ,sehingga memenuhi prinsip ekonomi terpimpin dan memegang commanding position, misalnja Biro Perusahaan Negara, Direktorat Perindustrian Dasar/Berat, Direktorat Perindustrian Perkapalan, Direktorat Perindustrian Pertambangan, Direktorat Geologi, Direktorat Minjak dan Gas Bumi. Ini semuanja mentjakup wewenang, koordinasi dan policy dari unit-unit produksi chususnja, dan memegang commanding position daripada semua kegiatan perindustrian dasar/pertambangan pada umumnja.

Dibidang produksi maka struktur organisasi di PN-PN jang lambat laun merupakan kenjataan didalam masjarakat Indonesia jang memberikan persjaratan untuk dapat melaksanakannja sistim ekonomi terpimpin, dimana Pemerintah memegang commanding position disegala bidang kegiatan produksi, industri dasar/berat pertambangan dan peminjakan.

Dibidang management Pemerintah/Departemen Perdatam berusaha untuk menghilangkan (mendjebol) tjara-tjara lama dan konvensionil jang konservatif statis.

Dalam pada itu sedikit demi sedikit kepada para pekerdja ditanamkan ide-ide dan tjara jang revolusioner, penuh dengan daja kreasi untuk berani mengambil djalan jang inkonvensionil, dan madju sesuai dengan romantika, dinamika, dialektikanja

revolusi. Didalam unit-unit Departemen Perdatam perhatian penuh diberikan pada kaum buruh jang merupakan soko-guru revolusi kita jang merupakan pula eksponen daripada massa rakjat. Dalam masjarakat kita sekarang ini pada umumnja telah terdapat kehendak dan kenjataan daripada social control, social participation, social support, dan social responsibility.

Hal ini merupakan bukti adanja integrasi antara massa dan kegiatan produksi sebagai persjaratan bagi suatu open management jang pada hakekatnja merupakan realisasi daripada ekonomi terpimpin.

Dalam perusahaan-perusahaan Negara maka realisasi ini terwudjud dalam Dewan Perusahaan, dimana unsur-unsur jang mewakili kegiatan masjarakat, umpamanja buruh, pemerintah, wakil-wakil daerah dan lain-lainnja, turut serta didalam penjelenggaraan open management ini.

Memenuhi Pemerintah Pusat, maka semua P.N.-P.N. dan unit produksi dilingkungan Departemen Perdatam diseluruh Indonesia telah mempunjai Dewan Perusahaan jang pada umumnja mentjerminkan perwakilan-perwakilan dari golongan masjarakat revolusioner kita.

Pembangunan dibidang idiil dilakukan pula, tertudju pada faktor manusia sebagai faktor produksi, sesuai dengan tjita-tjita revolusi, jang berkali-kali digambarkan oleh Pemimpin Besar Revolusi kita Bung Karno.

Oleh sebab faktor manusia adalah suatu unsur mahapenting dalam produksi, maka ia perlu diberi kesempatan sepenuhnja untuk mempersiapkan dirinja mendjadi penghasil jang sesempurnanja, sesuai dengan tuntutan zaman. Departemen Perdatam dan unit-unitnja dalam hal ini telah mendjawab tantangan-tantangan revolusi dengan usaha pembentukan manusia baru ini dengan djalan:

a. memberikan indoktrinasi adjaran-adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, menjebarkannja, mengamalkannja dengan mentrapkannja dibidang perindustrian dan pertambangan;
b. pembentukan bataljon-bataljon dan brigade-brigade sukarelawan dan sukarelawati jang merupakan demontrasi daripada satunja manpower Departemen Perdatam dengan Pemerintah dan Rakjat dalam mentjapai tjita-tjita revolusi.
c. pemeliharaan kesedjahteraan ditiap unit, baik rohani dan djasmaninja, dengan mengusahakan pemberian bahan-

bahan sandang pangan dan segenap keperluan dan kebutuhan lain-lainnja, olah raga, rekreasi hingga kepada perawatan dokter, bila sakit dan lain-lain;

d. pemupukan djiwa demokrasi melalui organisasi buruh jang bergabung dalam vaksentral dan jang nonvaksentral; puntjak daripada kegiatan physik daripada tenaga manusia, dengan tertjetuskannja demontrasi-demontrasi jang mengambil-alih modal-modal asing (Amerika Serikat) dan memberikan djalan dengan dihukumnja pimpinan-pimpinan jang kontra-revolusioner serta antek-anteknja.

2. Pembangunan materiil:

Dibidang materiil ini, terutama dalam usaha sedapat mungkin memenuhi pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahap Pertama dibangun pabrik-pabrik diberbagai-bagai tempat di Indonesia, ketjuali untuk penjebaran jang bersifat nasional, djuga merupakan salah satu aksentuasi dari nation-building dan character-building.

Perdjoangan revolusi menuntut pula daja kreasi jang sebanjak-banjaknja dari pradjurit-pradjuritnja, sehingga dengan demikian dilakukanlah setjara intensif pentjarian dan penggalian sumber-sumber baru dibidang pertambangan, dan penemuan karya-karya baru dibidang industrialisasi. Sumber-sumber baru dan pendapatan-pendapatan baru ini usahanja didasarkan kepada kekajaan bumi Indonesia jang melimpah-ruah dan adjaran-adjaran serta pengalaman revolusi jang mentjiptakan manusia-manusia kreatif jang berkwalitas lebih baik daripada dimasa-masa sebelum revolusi.

Pembangunan projek-projek baru adalah berdasarkan keputusan M.P.R.S. Dibidang industri dasar dan Berat, perentjanaan dan pelaksanaannja dilakukan oleh Biro Urusan Industrialisasi, Badan Pengawasan dan Penjelenggaraan Pembangunan Projek-projek Industri (disingkat B.P3.I.) dan P.N. Peprida. Dibidang pertambangan pelaksanaan dan perentjanaannja dilakukan oleh Direktorat Pertambangan dan Direktorat Geologi, sedang dalam hal ini minjak dan gas bumi oleh Direktorat Minjak dan Gas Bumi.

Pada Departemen Perdatam dibebankan pelaksanaannja daripada pembangunan:

41 projek industri,
8 projek industri pangan dan
13 projek pertambangan.

Dari djumlah projek ini sedang dalam pelaksanaan dan persiapan jang direntjanakan dapat diselesaikan pada achir tahapan pertama ini ialah:

16 projek industri jang dalam taraf persiapan;
12 projek industri dalam taraf penelitian;
9 projek industri;
10 projek tambang;
5 projek tambang dalam taraf pelaksanaan dan 5 projek dalam taraf persiapan.

Ditindjau dari sudut target M.P.R.S., maka perbandingan antara beberapa djenis industri seperti berikut:

Target MPRS.		Dalam Pelaksanaan	Tjatatan
1) pupuk	500.000 ton	600.000 ton	melebihi target.
2) kertas	48.000 ton	100.000 ton	malahan direntjanakan. 500.000 ton.
3) semen	1.725.000 ton	900.000 ton	
4) badja	100.000 ton badja 18.000 ton non badja.	100.000 ton badja 70.000 ton badja (aluminium).	

Dibidang industri dasar/berat perentjanaan jang dilakukan oleh Biro Urusan Industrialisasi menjangkut perentjanaan pendirian-pendirian projek-projek industri dasar/berat termasuk industri perkapalan jang baru, baik jang telah tertjantum dalam Ketetapan No. II/MPRS 1960, maupun mengenai projek-projek jang tidak termasuk ditetapkan M.P.R.S. tersebut. Titik berat perentjanaan ini diletakkan pada industri-industri jang menjangkut bidang pangan, sandang, pembangunan dan beberapa bidang penting lainnja seperti:

a) pupuk,
b) rayon,
c) semen,
d) pulp dan kertas,
e) industri kimia dasar,
f) pemesinan.

Perentjanaan pembangunan di Indonesia setjara umum didasarkan atas hasil macro survey jang dilakukan diseluruh Indonesia. Unit jang ditugaskan menjelenggarakan dan mengkoordinir perentjanaan ini adalah Biro Urusan Industrialisasi dibidang pembangunan projek-projek baru industri dasar/berat.

Setelah perentjanaan projek-projek selesai masih perlu diadakan penelitian dan persiapan mengenai projek jang bersangkutan dan djika pembangunannja disetudjui oleh Pemerintah dimulailah dengan pelaksanaan projek jang bersangkutan.

Umumnja projek-projek tersebut dibangun dengan mempergunakan mesin-mesin jang didapat dari kredit luar negeri, sedangkan pelaksanaan pembangunan sendiri dilakukan oleh kontraktor-kontraktor dalam negeri.

Tugas pelaksanaan pembangunan projek-projek ini diserahkan kepada Badan Pengawas Penjelenggaraan Projek-projek Industri (B.P3.I.) dan P.N. Pembangunan projek-projek Industri Dasar (P.N. Peprida). Dan diantaranja jang sedang direntjanakan adalah sebanjak 12 buah projek. Untuk melaksanakan tugas berdiri diatas kaki sendiri seperti jang didjelaskan dalam Tavip, maka kebidjaksanaan pembangunan projek-projek industri perlulah ditudjukan kepada:

1. merombak industri-industri jang bersifat asembling dan membangun mendjadi industri manufacturing terutama industri-industri jang membuat barang-barang modal (capital goods);
2. mendahulukan pendirian projek-projek industri:
   a. jang dapat menghasilkan barang jang besar djumlahnja dan penting artinja dalam pertambahan pendapatan nasional;
   b. jang dapat menghemat atau menambah alat-alat pembajaran luar negeri sehingga turut memperbaiki balance of payment;
   c. jang dapat mengerahkan dan mempertinggi penggunaan semua potential resources jang terdapat dalam negeri agar tertjapai tudjuan swasembada disamping memperbesar ekspor;
   d. jang terutama mempergunakan tenaga buruh dalam negeri sendiri;
   e. jang dapat menghasilkan barang-barang jang sangat esensiil dan merupakan basis jang dapat menimbulkan "external economies" jang sebesar-besarnja bagi perkembangan ekonomi selandjutnja;
   f. jang dapat mentjiptakan daerah pusat (industrial centre).

Human investment disegala bidang pembangunan perlu dilakukan hingga sifat ketergantungan ekonomi, baik materiil maupun skill dapat dalam waktu singkat dihilangkan.

Pelaksanaan pembangunan ini memerlukan tenaga jang digerakkan oleh romantika, dinamika dan dialektikanja revolusi.

Masalah-masalah jang dihadapi didalam pelaksanaan pembangunan projek-projek baru ialah:

a. bidang penelitian;
b. bidang infra struktur atau bidang social overhead;
c. dibidang kekurangan tenaga ahli dan tenaga-tenaga kedjuruan diluar Djawa;
d. dibidang alat-alat pembajaran baik dalam negeri maupun luar negeri;
e. dibidang koordinasi/sinkronisasi kerdja baik antar Departemen maupun antara pusat dan daerah dimana projek akan dibangun;
f. dibidang organisasi/administrasi;
g. dibidang peraturan-peraturan jang pada hakekatnja sering menghambat lantjarnja pembangunan;
h. bidang hubungan dengan pihak luar negeri.

Bidang penelitian:

Ternjata bahwa data-data jang diperlukan untuk pembangunan projek-projek M.P.R.S. sangat kurang sekali. Karena itu oleh urusan industrialisasi bidang penelitian ini dianggap sebagai suatu tugas jang mendapat prioritas jang perlu segera dilaksanakan. Dapat dikemukakan bahwa dibidang penelitian telah dilaksanakan macro economic and technical survey of resources jang dapat dikerahkan untuk terlaksananja pembangunan projek-projek seperti jang telah ditetapkan dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, baik untuk tahapan pertama maupun tahapan-tahapan berikutnja. Penjelidikan-penjelidikan bidang teknologi harus pula dilaksanakan (Balai Rayon/Pilot Rayon).

Untuk bidang ini telah diadakan kerdja-sama dengan hampir seluruh universitas dan lembaga-lembaga jang ada di Indonesia.

Sebab lain penelitian tersebut diadakan ialah karena hampir semua keterangan-keterangan peta-peta, pendjelasan-pendjelasan mengenai kekajaan nasional jang telah diselidiki oleh Pemerintah kolonial jang lalu ikut lenjap waktu kolonialisme itu digulung roda revolusi.

Dengan terkumpulnja data-data ini, maka dapatlah ditjapai:

a. penjempurnaan rentjana dari Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama. Dengan revisi dan adjusment-adjusment pelaksanaan projek-projek tahapan pertama dapat dibenarkan dan disetudjui Pemerintah;
b. persiapan rentjana-rentjana untuk tahapan ke-II dan seterusnja;
c. persiapan rentjana-rentjana terperintji baik jang bersifat nasional maupun internasional hingga faktor ekonomi/pembangunan terpimpin dapat setjara konsekwen dilaksanakan jang pula dapat mentjegah pemborosan tenaga, uang dan waktu;
d. penetapan sentra-sentra industri diseluruh tanah-air jang men-sinkronisir rentjana-rentjana industri/pertanian perkebunan, pengangkutan dan transmigrasi.

Bidang infra-struktur.

Didalam persoalan infra-struktur jaitu djalan-djalan, sumber-sumber tenaga listrik, pelabuhan-pelabuhan, dam-dam, dan sematjamnja dizaman pemerintah kolonial dibangun bukan untuk mempersiapkan fasilitas-fasilitas untuk membangun industri tetapi diadakan semata-mata untuk kepentingan mengeruk dan membawa hasil eksploitasi kekajaan alam kita berupa hasil perkebunan, hasil pertanian rakjat, hasil hutan, hasil bahan-bahan galian industri untuk kepentingan industri dan perdagangan negara sipendjadjah.

Djalan-djalan raya jang dibangun disamping keperluan tersebut diatas lebih banjak ditudjukan untuk kepentingan mobilitas militer dalam menumpas gerakan perdjoangan kemerdekaan atau perdjoangan melawan kolonialisme dan imperialisme jang bertjokol, dengan lain perkataan ditudjukan memperkuat kedudukan sipemerintah kolonial seperti djalan raya Merak-Banjuwangi jang disebut djuga djalan Daendels.

Industri-industri jang ada hanja berupa bengkel-bengkel reparasi jang memperbaiki peralatan dan memberi services terhadap barang modal jang dipergunakan sipendjadjah dalam mengeruk kekajaan nasional.

Industri-industri rakjat jang ada hanja berupa keradjinan-keradjinan tangan jang tidak mempunjai arti dasar bagi perkembangan industri selandjutnja jang sangat dibatasi pula perkembangannja.

Umpamanja dibidang pertekstilan jang diperkembangkan dengan sangat terbatas pula hanja pada bidang penenunan dengan tangan. Bidang pertenunan mesin meskipun ada lebih banjak dimiliki oleh orang-orang Belanda/asing lainnja. Hal ini disebabkan bahwa telah ditetapkan bahwa daerah djadjahan harus merupakan pasaran bagi barang-barang industri negara jang mendjadjah.

Melihat keadaan tersebut diatas, maka demi melaksanakan pembangunan bidang infra-struktur haruslah dikerdjakan jang pada taraf pertama memang merupakan tambahan investasi overhead, tetapi dalam djangka pandjang ia akan dibiajai sendiri oleh perkembangan-perkembangan industri-industri lainnja akibat multiplier effect-nja.

Bidang kekurangan ahli dan tenaga kedjuruan diluar Djawa.

Pemerintah kolonial baru mulai membuka lapangan pendidikan baik berupa pendidikan umum, maupun pendidikan chusus vak, oleh karena adanja kebutuhan tenaga menengah bagi kepentingan projek-projek eksploitasi pemerintah kolonial. Orang-orang kita jang diberi pendidikan bukanlah untuk melahirkan manusia-manusia Indonesia baru jang sanggup melahirkan pikiran-pikiran, konsepsi-konsepsi baru atau orang-orang jang ahli untuk membangun sendiri maupun untuk kepentingan pembangunan ekonomi dikemudian hari.

Dewasa ini kekurangan-kekurangan tenaga-tenaga ahli ini harus dipenuhi dan dibina baik melalui pendidikan-pendidikan dalam/luar negeri, maupun melalui training-training dan pengalaman-pengalaman kerdja jang sedang dilaksanakan, dimana sedang pembangunan dilaksanakan. Pengisian-pengisian kekurangan ini harus diatasi dalam waktu singkat dengan djalan:

a. pendidikan training Within Industry, baik tenaga-tenaga post graduate maupun teknik/rendah dalam bengkel-bengkel dan pabrik-pabrik jang didirikan;

b. memberikan kesempatan seluas-luasnja bagi tenaga muda untuk mengikuti pengalaman praktis dalam pembangunan projek dengan penempatan mereka sebagai counter-partner jang aktif dan „uitbuiten" pengetahuan dan pengalaman ahli-ahli asing jang dikontrakkan untuk pembangunan tersebut;

c. mempergunakan sebanjak mungkin kesempatan luar negeri untuk memperdalam setjara praktis pengetahuan dan pengalaman kader diluar negeri;

d. membuka kursus management, kepemimpinan teknik administratif dalam waktu pendek jang kemudian ditempatkan pada projek dan kemudian di-upgrade kembali dipusat latihan.

Pengalaman menjatakan, bahwa dalam pembangunan projek-projek jang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi luar negeri sebagai kontraktor diperlukan pembiajaan antara 15 — 20% dari harga plant dalam valuta asing. Untuk ini didirikan harus telah dapat mengambil-alih pekerdjaan tersebut setjara berangsur-angsur dan setjara industrial sektor-gewijs, hingga setjara langsung akan menekan investasi.

Pekerdjaan ini meliputi antara lain:

1). survey;

2). designing;

3). konstruksi;

mobilitas militer dalam menumpas gerakan kolonialisme dan

4). trial produksi;

5). supervision;

6). maintenance.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga dalam maintenance dibentuklah suatu mobile control maintenance group jang high qualified jang sewaktu-waktu dapat dipanggil kepabrik jang mengalami kerusakan-kerusakan.

Didalam mengatasi kekurangan tenaga-tenaga kedjuruan dan kasar diluar Djawa perlu segera dilaksanakan transmigrasi daripada tenaga-tenaga produktif.

Bidang alat-alat pembajaran luar negeri dan rupiah financing.

Didalam merealisasikan projek-projek pembangunan ini, seperti telah dikemukakan diatas diketahui, bahwa kebutuhan akan alat-alat pembajaran luar negeri sangat besar jang harus tersedia, sedangkan sumber-sumber penghasil alat-alat pembajaran jang pertambahan hasil tidak sebanding dengan pertambahan kebutuhannja telah memaksa kita untuk mendapatkan pindjaman-pindjaman jang tidak mengikat sesuai dengan kebidjaksanaan politik luar negeri jang bebas dan aktif.

Suatu konsepsi baru telah dilahirkan untuk mengatasi bidang ini jaitu kredit production sharing, dimana pindjaman-pindjaman luar negeri dapat dibajar dengan hasil-hasil dimana kredit itu dipergunakan. Disamping itu penekanan dibidang pembiajaan valuta asing dilakukan dengan djalan:

a. mengambil-alih dalam waktu pendek pekerdjaan-pekerdjaan djasa-djasa dalam pembangunan dari konstruktor-konstruktor asing, hingga dapat kita kerdjakan sendiri. Untuk itu dibentuk konstruksi engineering organization jang diberi nama P.N. Peprida;
b. mulai membuat bagian-bagian mesin-mesin sendiri di Indonesia, dimana perlu atas dasar lisensibouw;
c. menjediakan/mengkoordinasikan alat-alat konstruksi hingga alat-alat ini mendjadi kepunjaan kita sendiri; dengan ini projek-projek jang akan datang dapat didirika ndengan alat-alat kita sendiri;
d. lebih mengutamakan pendidikan kader-kader pada pabrik jang telah ada di Indonesia, hingga lambat laun hanja untuk spesialisasi spesifik sadja perlu dikirimkan keluar negeri.

Penekanan pembiajaan rupiahnja dilakukan dengan djalan:

a) mendirikan gudang-gudang pabrik, perumahan jang sederhana sekali, tetapi dengan dasar konstruksi jang kuat, hingga kalau projek telah menghasilkan dapat dilakukan re-investment untuk bidang overhead ini.
b) menstandarisasikan menurut sektornja, hingga biaja mendjadi lebih murah.

Projek-projek industri dasar/berat jang berada dalam taraf pelaksanaan sebanjak 16 projek.

Projek industri dasar jang telah selesai:

Projek Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Projek ini telah selesai pembangunan konstruksinja pada tahun 1963 dan telah mulai berproduksi tahun 1964.

Projek ini telah memproduksi:

a. pupuk urea 100.000 ton/tahun,
b. amonia murni 6.600 ton/tahun,
c. oxygeen 237.600 m^3/tahun.

Segi positif projek:

a) Penghematan devisa: U.S. $ 4.600.000 tiap tahun.
b) Penghematan tenaga kerdja: 1.300 orang.
c) Lainylain multiplier effect:

1). Mempertinggi produksi pangan.
2). Industrialisasi Daerah Sumatera Selatan.
3). Exploitasi reserve gas alam.
4). Kadervorming bidang Petro Chemical Industry.

Ichtisal perkembangan pembangunan:

a. Tahun 1957 - 1959: Status penjelesaian projek, preliminary survey.
b. Tahun 1960: Status penjelesaian projek preliminary survey.
c. Tahun 1961:

   Status penjelesaian projek: 1.80%.
   Site investigation, spesifikasi perlengkapan/mesin.

   Pembukaan tanah, bangunan sementara 100%.
d. Tahun 1962:

   Status penjelesaian projek: 46.11%.

   Pembangunan pabrik, djalan-djalan, perumahan, kade, penerimaan mesin.
e. Tahun 1963:

   Status penjelesaian projek: 90%.
   16 September 1963 telah dilakukan trial run dan berhasil diproduksi urea pertama.
   Penjelesaian pembangunan pabrik (instalasi mesin, cid-test, trial run), perumahan, djalan dan objek-objek diluar pabrik.
   Performance test, 300 ton/hari urea berhasil dengan baik.
f. Triwulan II 1964:

   Status penjelesaian projek: 100%.
   Produksi 50% dengan teratur Pebruari 1964.
   Penjelesaian djalan-djalan dan permulaan.

Projek-projek industri dasar/berat jang dalam penjelesaian sebanjak 21 projek dengan perintjian sebagai berikut:

1). 4 buah projek jang akan selesai pada tahun 1965.
2). 6 buah projek jang akan selesai pada tahun 1966.
3). 4 buah projek jang akan selesai pada tahun 1967.
4). 5 buah projek jang akan selesai pada tahun 1968.
5). 2 buah projek jang akan selesai pada tahun 1969.

a. Projek-projek jang akan selesai pada tahun 1965.

Projek Kertas Gowa Makassar.

Projek ini direntjanakan selesai pada tahun 1965 (medio tahun).

(1)	Pabrik kertas akan memprodusir	: kertas tjetak/tulis 9.000 ton/tahun.
(2)	Bahan baku jang diperlukan	: bambu.
(3)	Bahan pembantu	: salt cake barium, chlorida, kapur, garam, soda kostik, alum dan lain-lain zat kimia.
(4)	Bahan bakar	: minjak bakar diesel.

Segi positif projek:

a)	Penghematan devisa	: US. $ 1,5 djuta tiap tahun.
b)	Penggunaan tenaga kerdja	: pabrik 600 orang, eksploitasi hutan 700 orang.
c)	Lain-lain multiplier effect	: Industrialisasi Daerah Sulawesi Selatan. Eksploitasi hutan bambu Borisalo. Perluasan fasilitas transpor daerah.

Ichtisar perkembangan pembangunan:

1).	1961 Status penjelesaian projek	: preliminary.
2).	1962 Status penjelesaian projek	: penjelesaian preliminary survey site investigation dan pembukaan tanah.
3).	1963 Status penjelesaian projek	: 19,32% perataan tanah, bangunan sementara, sentral listrik sementara bangunan tetap l.k. rata-rata 40%, penerimaan mesin-mesin l.k. 84%.
4).	Sampai dengan achir 1964	: Status penjelesaian projek — 68,70%.

Projek Pilot Rayon Bandung

Projek ini direntjanakan akan dapat selesai pada achir tahun 1965.

Projek ini apabila telah selesai akan memprodusir:

Staple fibre	:	500 kg/hari.
Tire cord	:	350 kg/hari.
Fillament	:	75 kg/hari.

Bahan baku jang diperlukan:

kaju	: 3 ton/hari.	C	:	100 kg/hari.
H_2Co_4	: 830 kg/hari.	S	:	300 kg/hari.
NaOH	: 450 kg/hari.	NaOH	:	850 kg/hari.
Na_2S	: 100 kg/hari.			

Segi positif projek:

Penghematan devisa	: penghematan devisa untuk research development/training.
Penggunaan tenaga kerdja	: Lapangan kerdja untuk 250 orang.
Lain-lain multiplier effect	: research/development/training untuk pabrik rayon jang besar No. MPRS. AH 99.

Ichtisar perkembangan pembangunan.

Sampai dengan achir tahun 1964 : 28,81% pembangunan selesai.

Projek Industri Perkapalan Makasar:

Projek ini direntjanakan untuk selesai pada tahun 1965/1966.

Industri perkapalan akan dapat memproduksi: 5 kapal/ukuran 1.000 dwt — 2.500 dwt (kapal badja dan kaju).

16 kapal/ukuran pandjang L — 11.00 m) }
12 kapal/ukuran pandjang L — 14.00 m) } kapal² kaju.
12 kapal/ukuran pandjang L — 25.00 m) }

Dan mereparasi :	15	kapal/ukuran	s d	300 dwt.)
	12	—,,—	s/d	700 dwt.)
	8	—,,—	s/d	1100 dwt.)
	6	—,,—	s/d	1700 dwt.)
	5	—,,—		2500 dwt.—5000 dwt.

Djumlah 62 kapal/ukuran berat s/d 5000 dwt.

Bahan baku jang diperlukan: kaju dan badja, motor kapal, bahan-bahan pembesian.

Segi positif projek:

1. Penghematan devisa : US $. 312.500 tiap tahun.
2. Penggunaan tenaga kerdja : 1.100 orang.
3. Lain-lain multiplier effect : Memperluas fasilitas transpor/distribusi, kadervorming industri perkapalan.

Ichtisar perkembangan pembangunan:

1959 Status penjelesaian Projek : Survey, permulaan.

1960 Status penjelesaian Projek : Survey, pemilihan lokasi. Spesifikasi perlengkapan.

1961 Status penjelesaian Projek : Pembukaan tanah, penimbunan/pengerukan 5%.

1962 Status penjelesaian Projek : Pemantjangan tiang pantjang untuk slipway, pembuatan rumah-rumah, pembuatan djalan-djalan menudju projek, tanggul penahan gelombang.

1963 Status penjelesaian Projek : Pengerukan/penimbunan 8%, pembuatan gudang sementara 30%, bangunan atas kade 5%, pemeliharaan mesin-mesin.

Sampai achir tahun 1964, penjelesaian projek 19%.

Projek Semen Tonassa:

Projek ini akan selesai pada tahun 1966.

1). Pabrik ini akan memproduksi Semen Portland Type A.S.T.M. : 120.000 ton/tahun.
2). Bahan baku jang diperlukan : Batu kapur, tanah liat, pasir kwarsa.
3). Bahan pembantu : Gypsun, craft paper.
4). Bahan bakar : Buntker oli, diesel.

Segi positif projek:

a) Penghematan devisa : US $ 2.750.000 tiap tahun.
b) Penggunaan tenaga kerdja: 800 orang.

c) **Lain-lain multiplier** : Industrialisasi Daerah Semen Sulawesi Selatan.

Perluasan fasilitas transpor setempat, self-supporting semen daerah Indonesia bagian Timur.

Ichtisar perkembangan pembangunan:

1) **1961** Penelitian dan survey permulaan.
2) **1962** Status penjelesaian projek: 1,1%.
   Site investigation specifikasi mesin, pembukaan tanah, penerimaan mesin 14%, pembuatan bangunan dan djalan sementara (sebagian).
3) **1963** Status penjelesaian projek: 8,1%.
   Penjelesaian site investigation, site preparation jaitu bangunan sementara, pembuatan djalan, perumahan, perataan tanah, penggalian pondasi bangunan pabrik. Sampai dengan achir 1964: Status penjelesaian Projek 36,75%.

b. Projek-projek jang akan selesai pada tahun 1966.

Projek Industri Kertas Banjuwangi:

Projek ini akan selesai pada tahun 1966.

Pabrik kertas ini kelak
akan memproduksi : kertas tjetak & tulis H.V.S. 9.000 ton/tahun.

Bahan baku jang diperlukan:

a) Bahan baku : bambu.
b) Bahan pembantu : chloor, soda kostik, kapur salt cake, alum, zat warna rein, china clay.
c) Bahan bakar : minjak bakar, minjak diesel.

Segi positif projek:

1) Penghematan devisa : US $ 1,5 djuta tiap tahun.
2) Penghematan tenaga kerdja : US $ 1,5 djuta tiap tahun.
3) Lain-lain multiplier effect : Eksploitasi hutan bambu. Penggunaan by product Pabrik Soda Waru jang berupa chloor.

Ichtisar perkembangan pembangunan:

a. 1960 Status penjelesaian Projek : Penelitian.
b. 1961 Status penjelesaian

Projek : Survey permulaan meliputi bahan mentah, bahan pembantu, pemilihan lokasi pabrik.

c. 1962 Status penjelesaian projek : Survey teknik, spesifikasi teknik perlengkapan/mesin, macro survey, penentuan lokasi pabrik survey transportasi.

d. 1963 Status penjelesaian projek : 1,65%.
— pembelian tanah, penggusuran tanah site preparation bangunan sementara, kegiatan physik mulai Nopember 1963.

e. Sampai achir tahun 1964 : status penjelesaian projek : 19,61%

Projek Industri Kertas Martapura Kalimantan Selatan:

Projek ini direntjanakan selesai pada tahun 1965.

1. Pabrik kertas ini akan memprodusir : kertas tulis/tjetak 4.000 ton.
2. Bahan baku jang diperlukan : kaju agatis borneonsis.
3. Bahan pembantu : Zat alum, minjak bakar, minjak diesel, soda ash.
4. Kerdjasama luar negeri : Djepang (sebagian dengan pampasan perang).

Segi positif projek:

a). Penghematan devisa : US $ 700.000 tiap tahun.
b). Penggunaan tenaga kerdja : Pabrik 400 orang, eksploitasi hutan 300 orang.
c). Lain-lain multiplier effect: Eksploitasi hutan agatis, industrialisasi daerah.

Ichtisar perkembangan pembangunan:

1). 1959 Status penjelesaian projek : Penelitian dan persiapan.
2). 1960 Status penjelesaian projek : Persiapan site, perataan tanah.
3). 1961 Status penjelesaian

projek : Pembangunan sementara dan sebagian bangunan tetap, djalan-djalan sementara.

4). 1962 Status penjelesaian projek : Pembangunan gedung pabrik, penerimaan mesin-mesin, pemasangan sebagian mesin.

5). 1963 Status penjelesaian projek : lebih kurang 50%.

Pembangunan rumah-rumah pegawai.

Bangunan pabrik, pemasangan mesin-mesin, pembuatan djalan sampai dengan achir tahun 1964, Status penjelesaian Projek 60%.

Projek Industri Perkapalan Gresik :

Projek ini direntjanakan selesai pada tahun 1966/1967. Industri perkapalan ini akan dapat memproduksi:

16 kapal/ukuran pandjang	L - 11.00 m	kapal-kapal kaju.
12 „ „ „	L - 14.00 m	
12 „ „ „	L - 25.00 m	
40 kapal		

Dan reparasi: 62 kapal/ukuran berat s/d 500 ton (kapal-kapal badja dan kapal-kapal kaju).

Bahan baku jang diperlukan : Kaju dan badja, motor kapal, bahan-bahan pembesian.

Segi positif projek:

a. Penghematan devisa : U.S. $ 375.000 per tahun.
b. Penggunaan tenaga kerdja : 950 orang.
c. Lain--lain multiplier effect : Memperluas fasilitas transpor/distribusi, kadervorming bidang perkapalan.

Ichtisar perkembangan pembangunan:

1). 1959 Status penjelesaian projek : Survey permulaan.

2). 1960 Status penjelesaian projek : Survey penelitian lokasi, spesifikasi perlengkapan.

3). 1961 Status penjelesaian projek : Perataan tanah, pembuatan gudang-gudang sementara, pembuatan sebagian ketjil rumah pekerdja sangat terbatas mengingat tidak adanja biaja.

4). 1963 Status penjelesaian projek : Perataan tanah 50% penerimaan mesin pemeliharaan (pekerdjaan sangat dibatasi oleh biaja jang disediakan).

5). Sampai dengan achir 1964: penjelesaian projek 6%.

Projek Industri Superfosfat Tjilatjap:

Projek ini direntjanakan akan selesai pada tahun 1966.
Pabrik Pupuk Superfosfat tersebut akan memprodusir:

a) Pupuk single Superfosfat 100.000 ton/tahun.
b) Asam sulfat 4.000 ton/tahun.
c) Bahan baku jang diperlukan : bantuan fosfat (atatit).
belerang murni.
batu kapur.
d) Bahan pembantu : kertas bungkus.
zat-zat kimia.
batubara.
minjak bakar.

Segi positif projek:

1). Penghematan devisa : $ 2.000.000 tiap tahun.
2). Penggunaan tenaga kerdja : 810 orang.
3). Lain-lain multiplier effect Eksploitasi endapan belerang Talaga Bodas mempertinggi pangan, penjelidikan kelebihan tenaga listrik, keperluan pelabuhan Tjilatjap.

Ichtisar perkembangan pembangunan:

Sampai achir tahun 1964 status penjelesaian Projek: 22,03%.

Projek Survey Besi Badja Kalimantan :

Tudjuannja memprodusir : Iron and steel plant merupakan projek jang disamping mengolah sendiri iron ore, tetapi

djuga harus mensupply iron ore kepada projek Besi Badja Lampung.

Dengan rentjana kapasitas 250.000 ton steel/tahun.

Tingkat pelaksanaan : 1. Topographic geodetic survey.
2. Aerophoto survey.
3. Aeromagnetic survey
4. Prospecting, Exploration and evaluation.

Projek Industri Ban Palembang :

Projek ini akan selesai pada tahun 1965/1966.

Pabrik Ban ini direntjanakan memprodusir: 180.000 pasang ban tiap tahun atau 4.000 ton/tahun.

1). **Bahan baku jang diper lukan** : Karet.

2). **Bahan pembantu** : Bahan-bahan kimia, steel wire, fabric cord, tyre valve.

3). **Bahan bahan** : minjak bakar.

Segi positif projek:

a) Penghematan devisa : U.S. $. 1.800.000 per tahun.

b) Penggunaan tenaga kerdja : 900 orang.

c) Lain-lain multiplier effect: Industrialisasi daerah Sumatera Selatan. self supporting sebagian kebutuhan ban di Indonesia.
Pelopor industri karet didaerah Sumatera Selatan.

Ichtisar perkembangan pembangunan:

1. 1959 Status penjelesaian pojek :
2. 1960 Status penjelesaian pojek :
3. 1961 Status penjelesaian pojek : Meneruskan pekerdjaan jang semula dilakukan Indorub, pemeliharaan mesin-mesin telah datang.

4. 1962 Status penjelesaian projek : Persiapan, pemeliharaan dan pemasangan 50% dari mesin jang telah datang, site investigation, perataan dan penimbunan tanah, perbaikan bangunan.

5. 1963 Status penjelesaian projek : Meneruskan perataan dan penimbunan tanah, pembuatan djalan menudju pabrik, pengetesan mesin-mesin dan pemeliharaan, pembuatan rumah pegawai 15%, pembuatan tanggul 90%.

Sampai dengan achir 1964
Status penjelesaian projek 60% Achir 1964 pabrik harus sudah dapat memprodusir camel back, mesin-mesin sebelumnja sudah harus selesai ditest seluruhnja.

c. Projek-projek diharapkan selesai pada tahun 1967.

Projek Pabrik Badja Trikora Tjilegon:

Pabrik ini apabila telah selesai (1966/1967) akan memiliki fasilitas-fasilitas sebagai berikut :

Pusat listrik tenaga uap didalam pabrik ini, didalam kompleksnja berkekuatan 3 kali 12 KW.

Waduk air di Krentjong, 1 km disebelah selatan pabrik dapat memuat 2 djuta m^3 air.

Pipa air 40 km, diperbuat dari pipa badja dilapisi beton dari rawa (Anjer Kidul) ke waduk.

Pelabuhan di Merak, disamping dipelabuhan jang sudah ada.

Perkampungan seluas l.k. 200 HA, disediakan untuk perumahan para pekerdja lengkap dengan taman-taman rekreasi, mesdjid, poliklinik dan sekolah.

Pabrik Badja ini akan memproduksi :

Dari open hearth furnace : 100.000 ton/tahun steel ingots.
Dari rolling mill:

a. round, squares, chexagons	51.000	ton/tahun ....
b. round, squares, chexagons	51.000	ton/tahun.
c. angles and channels	15.000	ton/tahun.
d. hoops	4.300	ton/tahun.
e. wire rod	15.000	ton/tahun.
	85.000	ton/tahun.
Dari wire drawing Mill	14.700	ton/tahun kawat badja.
D j u m l a h	100.000	ton/tahun.

Bahan baku dan bahan pembantu :

Dalam Negeri :

1). iron ore	:	4.500 ton/tahun.
2). bauxite	:	1.000 ton
3). fuel oil	:	40.000
4). lime stone	:	3.500
5). burnt dolomite	:	1.000
6). lime	:	1.500

Luar Negeri :

1. pig iron	:	34.000
2. ferro manganese	:	900
3. ferro silicon	:	150
4. aluminium	:	50
5. magnesite frouder	:	1.000
6. chronits	:	100
7. refractory brick	:	6.230
8. steel billiets untuk 1966/1967	:	40.000

Segi positif daripada projek ini:

Penghematan devisa	:	\$. 7.200.000 setahunnja.
Penggunaan tenaga kerdja	:	1.563 orang.
Lain-lain multiplier effect	:	self supporting bahan bangunan badja = 25% hari impor. kader industrialisasi daerah Banten, perluasan pelabuhan Merak.

Ichtisar perkembangan pembangunan:

Penjelesaian projek s/d. achir tahun 1964 l.k. 30%.

Projek Industri Perkapalan Bitung :

Projek ini direntjanakan selesai pada tahun 1966/1967..
Industri perkapalan ini akan dapat memproduksi:

16 kapal/ukuran pandjang L-11.00 m) kapal-kapal kaju.
12 „ „ L-14.00 m)
12 „ „ L-25.00 m)

Dan reparasi : 62 kapal/ukuran berat s/ 500 ton (kapal-kapal badja dan kaju).

Segi positif projek:

a) Penggunaan tenaga kerdja : 850 orang.
b) Penghematan devisa : US. $ 375.000/tahun.
c) Lain-lain multiplier effect : Menambah fasilitas transport/distribusi, kadervorming tenaga perkapalan, industrialisasi Daerah SulawesilUtara.

Ichtisar perkembangan projek:

1962 Status penjelesaian projek: (Kegiatan semula penelitian)
1960 Status penjelesaian projek: di Makasar, baru dalam tahun 1960.
1961 Status penjelesaian projek: pemindahan plant-site Bitung
1962 Status penjelesaian projek: survey, site investigation 100%, penerimaan mesin-
1959 Status penjelesaian projek: mesin (Surabaja).
Pengukuran & pemetaan tanah 100%, bangunan semen tara 65%, listrik 20%.

Sampai achir tahun 1964 penjelesaian projek : 6%.

Projek Balai Rayon Bandung :

Direntjanakan mulai memproduksi tahun 1966.

Tudjuan memproduksi bahan-bahan rayon (tekstil rayon, tire cord rayon staple fibre). Projek ini akan dibangun mendjadi projek cellulose sehingga dapat membantu penelitian dibidang projek-projek kertas, rayon, serat-serat nabati dan synthetis dan industri-industri kimia jang berhubungan dengan itu.

Kapasitas: 2.000 Kg/hari, bahan-bahan rayon (tekstil rayon), tire cord rayon, dan staple fibre.

Tingkat pelaksanaan (hasil realisasi) : Mesin-mesin datang: s/d achir tahun 1964 diharapkan l.k. 60%.

Projek Belerang Talaga Bodas Wanaredja Garut :

Projek ini direntjanakan akan selesai pada tahun 1966. Pabrik belerang ini akan memproduksi :

a. Belerang murni : 21.000 ton/tahun.
b. Bahan baku jang diperlukan : bidji belerang (sulfur ore). soda costik.
c. Bahan pembantu : methyl sebutil cabinel. (N.I.B.C).
d. Bahan bakar : solar.

Segi positif projek:

a. Penghematan devisa : Rp. 21.000 × 140.000 — Rp. 2.940.000.000,— per tahun atau kira-kira U.S. $ 900.000/ tahun.
b. Penggunaan tenaga : —
c. Lain-lain multiplier effect: pendidikan kader, dapat didirikan 2-3 pabrik belerang seluruh Indonesia. Diperhitungkan akan dapat didirikan 2 — 3 pabrik belerang lagi.

Dalam masa pembangunan telah diadakan operation. Produksi ditudjukan untuk :

1. Pabrik Asam Belerang Galih Sepandjang.
2. Vulkanisasi karet.

Projek Belerang Talaga Bodas (mining endapan bidjih belerang di Talaga Bodas; pemurniannja di Wanaredja), sebagai sub Projek Superfosfat Tjilatjap penjelesaiannja disinchronisasikan.

Ichtisar Perkembangan & Rentjana Kerdja :

1962 & 1963: Eksplorasi, menentukan letak endapan bidjih belerang dan menghitung besarnja endapan.

1964 : Persiapan, research processing pemurnian belarang, survey menentukan mining & transportasi bidjih belerang.

1965	: **Persiapan, survey landjutan design pabrik dan pembangunan physik design, shipment material & equipment.**
1966	: Pekerdjaan sipil & instalasi mesin listrik sampai selesai 100%.

d. Projek-projek jang diharapkan selesai pada tahun 1968:
Projek Industri Perkapalan Padang.

Projek ini direntjanakan selesai pada tahun 1966/1967.
Industri perkapalan ini akan memproduksi:

16	Kapal/ukuran pandjang		L-11.00 m.
12	„	„	L-14.00 m.
12	„	„	L-25.00 m.
40	kapal (kapal-kapal kaju).		

Bahan baku jang diperlukan kaju dan badja.

Segi positif projek:

1. Penghematan devisa : US. $ 312.500 /tahun.
2. Penggunaan tenaga kerdja: 690 orang.
3. Lain-lain multiplier : Memperluas fasilitas/distribusi, kadervorming tenaga industri perkapalan, industrialisasi Daerah Sumatera Barat.

Ichtisar perkembangan pembangunan:

a) 1959 Status penjelesaian projek : Survey penelitian.

b) 1960 Status penjelesaian projek : Survey penelitian lokasi, penjusun specifikasi.

c) 1961 Status penjelesaian projek : Site investigation, penelitian pembangunan.
Perataan penimbunan tanah, pembuatan rumah, sebagian ketjil pekerdjaan sangat dibatasi oleh pembiajaan.

d) 1963 Status penjelesaian projek : Pembuatan djalan 8%, gudang sementara 70%, kantor sementara pemagaran perumahan, perataan tanah 8%, pembukaan tanah 100%.

Sampai achir tahun 1964, penjelesaian projek 5%.

Projek Asam Semut Palembang.

Tingkat pekerdjaan : Survey telah selesai.
Akan memproduksi : Asam Semut.

Segi Psitif Projek:
Dapat melajani :
1. industri karet.
2. penjamakan kulit.
3. pabrik tekstil.
4. laboratorium.

Projek Perluasan Pabrik Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Pabrik pupuk ini memproduksi 100.000 ton tiap tahun + 50.000 ton/tahun.

Projek Kertas Takengon Atjeh:

Projek ini akan selesai pada tahun 1968.

Pabrik kertas ini kelak akan memproduksi: 115 ton kertas tulis/tjetak dan pulp.

Bahan baku jang diperlukan:
Kaju pinus merkusi dan bahan-bahan kimia lainnja.

Segi positif projek:
1. Penghematan devisa.
2. Penggunaan tenaga kerdja.
3. lain-lain multiplier effect.
4. Achir tahun 1964: survvey telah selesai.

Projek industri Petro Kimia Gresik:

Projek ini direntjanakan selesai pada tahun 1967/1968.
Pabrik ini akan menghasilkan pupuk-pupuk:

1. Urea dengan kapasitas 45.000 ton/tahun.
2. Amonium sulfat dengan kapasitas 15.000 ton/tahun.
3. Produksi tambahan seperti asam sulfat, zat asam, ozon dan amonia.

Bahan baku jang diperlukan ialah:
1. Minjak residu sebanjak 120.000 ton/tahun.
2. Belerang.

Dekat desa Podjok akan dibangun sebuah pier jang mendjorok sedjauh 800 meter kelaut untuk mentjapai kedalaman air sedalam 10 meter. Pier ini akan dihubungkan dengan plant-site sebuah djalan melintas diatas djalan Gresik-Sembajat. Pier ini perlu karena produksi pabrik sebesar 200.000 ton/tahun sebagian besar akan diangkut via laut.

Disamping itu plant-site akan djuga dihubungkan dengan station K.A. Gresik dengan djalan K.A., sehingga dengan demikian hasil produksi akan diangkut via laut, djalan K.A. dan djalan darat.

Keamanan pengangkutan ini penting sekali, karena pabrik ini adalah sebuah unit jang harus bekerdja setjara terus-menerus.

Keuntungan dari pendirian pabrik ini ialah:

1. Mengurangi impor pupuk jang berharga sekitar US. $ 13,5 djuta.
2. Meningkatkan produksi pangan.
3. Realisasi politik ekonomi perdjoangan Pemerintah untuk berdiri diatas kaki sendiri, dalam mengolah bahan baku dalam negeri, jaitu minjak residu kedalam hasil produksi jang langsung dapat dipakai oleh para petani untuk mempertinggi produksi pangan.
4. Pabrik ini dengan hasil-hasil tambahannja jang berupa-rupa dapat mendjadi inti dari suatu industri sentra dalam rangka perindustrian pada umumnja dan industri kimia pada chususnja, seperti pabrik plastik, bahan peledak synthetic, fibre dan sebagainja.
5. Penjediaan lapangan kerdja.
6. Pembangunan dalam lapangan human investment sektor industri kimia tingkat tinggi.

e. Projek-projek jang diharapkan selesai pada tahun 1969.

Projek Industri Besi Badja Lampung:

Pelaksanaan pembangunan belum dimulai.

Tudjuan:	Tahapan I: memproduksi	80.000 ton open hearth pig untuk Trikora. 20.000 ton foundrypig untuk bengkel-bengkel.
	Tahapan II:	100.000 rolled produksi untuk metal working stock.

Kepastian projek (target): 100.000 ton pig/tahun.

Tingkat pelaksanaan (hasil realisasi):

1. Pekerdjaan penelitian telah selesai.
2. 35 HA tanah plant-site telah dibeli (seluruhnja dibutuhkan l.k. 60 HA).

3. 22 rumah tinggal permanen selesai.
4. 24 unit rumah semi permanen selesai.
5. Direksi kit-work-kit telah ada diplant-site.

Projek Industri Truk:

Projek-projek persiapan dimana pekerdjaan survey telah selesai berdjumlah 11 projek.

Projek Industri Kertas Notog:

Pelaksanaan pembangunan belum dimulai.

Tudjuan:

1. produksi kertas pembungkus untuk semen & pupuk.
2. produksi kertas pembalut.
3. produksi terpentijn.

Dengan kapasitas: 15.000 ton/tahun atau 50 ton/hari.

Tingkat pelaksanaan (hasil realisasi):

1. Semua pekerdjaan penelitian telah selesai.
2. Tanah untuk plant-site telah dibeli.
3. Tanah untuk perumahan telah ada.
4. Kantor/mess darurat telah ada di-plant-site.
5. Gudang semi permanen sudah mulai dibangun.
6. Pembangunan djalan (2 km) sudah direntjanakan.
7. Bangunan gedung sekolah sudah dimulai.
8. Bahan-bahan bangunan mulai distock pile.
9. Alat-alat pengangkutan sudah dipesan dan dilunasi.

Projek Industri Kertas Sampit Kalimantan Tengah:

Status projek: dimulai Oktober 1960.

Pelaksanaan pembangunan belum dimulai.

Tudjuan:

1. produksi pulp.
2. produksi kertas tjetak/tulis.
3. mungkin djuga kertas koran.

Tingkat pelaksanaan (hasil realisasi):

1. Survey dimulai tahun 1962. Data penting jang belum terkumpul adalah data bahan baku. Ini harus dilakukan dengan aerial-survey, karena sangat luas sumber bahan baku (1.500.000 HA).

2. Pelaksanaan aerial-survey dikontrakkan dengan P.N. Aerial-Survey Departemen Angkatan Udara, dimulai tahun 1963 sampai sekarang belum selesai.
3. Sebagian photo-photo jang sudah djadi telah ditapsirkan oleh Lembaga Penapsiran Potret Udara Bogor.

Projek Industri Diesel Djakarta:

Direntjanakan selesainja Projek tahun 1967.

Tudjuan: Memprodusir mesin-mesin diesel, jang didahului dengan asembling. Dengan kapasitas projek (target): 7.000 mesin diesel/tahun dengan variasi daja 10 - 300 HP.

Tingkat pelaksanaan (hasil realisasi):

Sudah selesai: — survey plant-site.
— pembelian tanah plant-site 12 HA; perlu 15 HA.

Sedang diadakan persiapan-persiapan.

Projek Industri Semen Bohorok Sumatera Utara:

Tempat: Bohorok (Sumatera Utara).

Selesainja projek: direntjanakan achir Pembangunan Semesta tahapan I.

Tudjuan: memprodusir semen type memuat clasification A.S.T.M.

Dengan kapasitas projek (target): 400.000 ton semen.
Tahaapan I: 200.000 ton semen/tahun.
Tahapan II: 200.000 ton semen/tahun.

Tingkat pelaksanaan (hasil realisasi):

Sedang dilaksanakan survey geologi.
Telah diadakan survey ekonomi.
Sedang dilaksanakan survey geoteknik plant-site.
Telah dilaksanakan penetapan plant-site.
Telah diadakan ditetapkan/pengukuran trace djalan kereta api (perpandjangan antara Kuala-Bohorok).
Sedang dilaksanakan pekerdjaan penelitian/persiapan lainnja.

Projek Industri Semen Pamotan.

Projek Industri Karbid Padang:

Selesainja projek: tahun 1968.

Tudjuan: produksi karbid.
poly vinyl chloride.
vinyl acetate vibre.

Dengan kapasitas projek 20.000 karbid ton/tahun.
Tingkat ke II poly vinyl chloride 10.000 ton/tahun.
Tingkat ke III vinyl acetat fibre 20 ton/hari.

Tingkat pelaksanaan (hasil realisasi):

1. Telah diadakan preliminary survey.
2. Telah diadakan penelitian plant-site.
4. Dalam melaksanakan pekerdjaan persiapan.

Projek Industri Katja Djendela Kalibata Djakarta:

Rentjana selesainja projek 1967.

Tudjuan: memprodusir katja djendela (sheet-glass).

Dengan kapasitas: (target): 50 ton/hari atau 2.000.000 M^2/ tahun.

Tingkat pelaksanaan (hasil realisasi):

1. Penelitian bahan baku telah selesai.
2. Plant-site telah disiapkan.
3. Djalan sepandjang 500 m dalam plant site telah selesai.
4. Beberapa perumahan untuk staf inti projek telah selesai.
5. Tinggal tunggu konstruksinja sadja.

Projek Industri Alumunium Medan Sumatera Utara:

Rentjana selesainja projek: direntjanakan tahun 1970.

Tudjuan: produksi a. alumina.
b. alumunium.

Rentjana pembangunan projek:

1. Kapasitas projek (target):
   a. almunia 70.000 ton/tahun.
   b. alumunium 30.000 ton/tahun.

Tingkat pelaksanaan (hasil realisasi):

Seluruh investigation seperti: a. water analyses, b. nature of condition, c. analyses of raw materials, d. analyses of building, e. soil investigation and soil lab termasuk drilling & penetration, f. topographical maps, telah selesai dikerdjakan.

Tinggal tunggu mulai konstruksi.

Rentjana pembiajaan:

Devisa : Pembiajaan diambil dari kredit Uni Soviet ke-II. disediakan sebesar lebih kurang $ 60.000.000.

Rupiah : Sulit diramalkan.

Kesulitan-kesulitan dalam projek bersangkutan:

1. Kesulitan Rupiah.

2. Kesulitan karena projek masih dalam tarap "slow down" karena keuangan tidak mengizinkan.

Kesimpulan/saran-saran untuk projek jang bersangkutan:

a. Agar konttrak antara Republik Indonesia dengan U.S.S.R. segera dibitjarakan mengenai pembangunan projek.
b. Karena projek alumunium bergandengan dengan projek Asahan, maka realisasinja harus sincronis.
c. Agar pembiajaan Rupiah selalu terdjamin.

Projek Industri Soda Ash Medan.

Projek Industri Besi Badja Tjilatjap.

Projek Industri Rayon Palembang.

Projek-projek Penelitian/Survey dimana pekerdjaan dalam taraf survey/penelitian berdjumlah 18 projek:

1. Projek Bidji Tengkawang.
2. Projek Sulphur.
3. Projek Ban Mobil Sumatera Utara.
4. Projek Aluminium Sulfat.
5. Projek Semen Bali.
6. Projek Semen Atjeh.
7. Projek Semen Lampung.
8. Projek Semen Tjibadak.
9. Projek Kertas Bukittinggi.
10. Projek Pupuk Djabar.
11. Projek Pupuk Djateng.
12. Projek Pupuk Sumut.
13. Projek Pulp Kertas Irian Barat.
14. Projek Kertas Sulawesi Tengah.
15. Projek Kertas Ampas Tebu Djatim.
16. Projek Kertas Ampas Tebu Djateng.
17. Projek Kertas Sumatera Utara.
18. Projek-projek industri sentra untuk projek dasar/rakjat sebagai hasil dari macro survey.

Probable : 1.500.000 ton konsentrate.

Endapan pasir besi ini terdiri dari atas mineral-mineral, ilmenit, magnetik, haematit, butir silikat dan kotoran-kotoran lain dengan kadar besi (Fe) rata-rata antara 18 - 40%.

Penjelidikan endapan ini telah beberapa kali dilakukan ialah:

1. Dilakukan oleh Djawatan Geologi tahun 1956.
2. Dilakukan oleh Djawatan Pertambangan disertai ahli NKK. Djepang (landjutan I) tahun 1960.

3. Dilakukan oleh Direktorat Pertambangan dan Direktorat Geologi (landjutan II) tahun 1961.

Rentjana utama dari projek pasir besi ini antara lain penambangan, pentjutjian/konsentrasi dan djuga peleburan bidji besi ini hingga dihasilkan pig-iron/artificial serap iron.

Rentjana jang achir ini akan dilakukan dengan bekerdja sama dengan P.N. Peprida.

Selain daripada itu, mulai tahun 1963 telah djuga dilakukan penggalian setjara ketjil-ketjilan guna memenuhi P.N. Semen Gersik akan bahan pasir besi.

Produksi	1963	2.051 ton.
	1964	6.723 ton.
	1965 (s/d Pebruari) ...	1.765 ton.
		10.539 ton.

Selain daripada penggalian pada waktu ini projek pasir besi melakukan penjelidikan tentang tjara penambangan baik biaja eksploitasinja maupun biaja pentjutjian serta alat-alat mesinnja jang akan diperlukan kemudian. Pada tahun 1965 ini direntjanakan akan dilakukan penjelidikan dan pertjobaan-pertjobaan pembuatan besi setjara besar-besaran (pig-iron) dan penjelidikan lain jang berhubungan dengan pembuatan besi dari pasir besi tersebut dengan rentjana biaja Rp. 126. djuta. Pekerdjaan-pekerdjaan ini akan dilakukan bersama dengan Institut Teknologi Bandung.

Projek Besi Laterit Pulau Sebuku dan Pleihari:

Dalam rangka integrasi projek-projek besi badja di Indonesia, Direktorat Pertambangan setjara aktif melaksanakan mining evaluation, planning la-out dalam rangka pembukaan tambang-tambang besi Pulau Sebuku dengan rentjana produksi 80.000 ton/tahun. Projek Besi Badja Kalimantan adalah diluar projek ini, dan projek ini dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri.

Projek Belerang Telagabodas:

Direktorat Pertambangan setjara aktif mengadakan mining evalution dan rentjana lay-out dari pembukaan tambang dan pabrik pengolahan belerang di Telagabodas Wanaradja Djawa-Barat dengan rentjana produksi 70.000 ton/tahun.

Pembangunan tambang dan pabrik tersebut didasarkan atas kredit U.S.S.R. untuk memenuhi kebutuhan projek pabrik Superphospat Tjilatjap dan diharapkan selesai pada tahun 1968.

Projek Tembaga Sangkaropi Sulselra:

Melaksanakan pemotretan udara dan pemetaan photographi pada daerah seluas 50 - 100 Km^2 didaerah tanah Toradja, dalam rangka kerdjasama dengan Jugoslavia atas dasar production sharing.

Eksplorasi selama kurang lebih 1 tahun akan dilakukan setelah team Jugoslavia ini datang di Indonesia.

Projek-projek tambang dalam taraf persiapan umumnja masih dalam pekerdjaan penelitian.

Penjelidikan tambang tembaga ini (eksplorasi) dilakukan oleh Direktorat Pertambangan, bekerdja sama dengan Pemerintah Jugoslavia dalam rangka production sharing, jang kontraknja telah ditandatangani dalam bulan Djanuari 1964.

Dalam kontrak tersebut diantaranja disebutkan, bahwa penjelidikan pendahuluan pemotretan biasa dan dari udara dilakukan oleh pihak Indonesia (Direktorat Pertambangan) sedangkan penjelidikan-penjelidikan lainnja seperti: geological prospecting dan geological mapping, geophysical exploration, pemboran dan pemeriksaan laboratorium, dari hasil ini dilakukan oleh pihak Jugoslavia.

Daerah jang diselidiki meliputi 50 - 100 km^2. Dalam tahun 1964 Direktorat Pertambangan telah siap melakukan pemetaan (biasa dan dari udara), dan waktu ini sedang menjiapkan kedatangan team penjelidik dari Jugoslavia.

Projek Pembangunan Balai Pengolahan dan Penjelidikan Bahan-bahan Galian (B.P.B.G.).

Letaknja di Bandung (Djawa-Barat) dan telah dimulai sedjak tanggal 26 Desember 1962.

Projek Pembangunan B.P.B.G. ini meliputi pembangunan:

1. Bangunan Laboratorium Induk.
2. Bangunan Metalurgi.
3. Bangunan Konsentrasi Bidji.
4. Bangunan Penggerusan Bidji dan Bengkel.

Untuk tahap pertama dibangun Laboratorium Induk dan Laboratorium Metalurgi (lengkap dengan instalasi air, listrik dan gas, medja-medja laboratorium, zuurkasten dengan tjerobong-tjerobong pembuang zat asam dan lain-lain) dan pekerdjaan halaman (pemagaran halaman, saluran-saluran pembuangan dan lain-lain).

Hingga achir tahun 1964 telah diselesaikan seluruh bangunan Laboratorium Metalurgi (dengan semua perlengkapannja) dan 10% daripada rentjana bangunan Laboratorium Induk. Diharapkan dalam tahun 1965 dengan tersedianja biaja pembangunan, seperti jang telah direntjanakan, tahapan pertama daripada pembangunan bangunan B.P.B.G. akan siap seluruhnja.

Djumlah biaja jang telah dikeluarkan hingga achir tahun 1964 adalah sebesar Rp. 408.949.625,50. Sedang biaja jang masih diperlukan akan meliputi beberapa miljar rupiah.

Projek Survey Umum :

Disamping melakukan survey-survey (penjelidikan) bahan-bahan galian jang belum termasuk dalam projek-projek sebelumnja, projek ini djuga bertugas memberi penerangan-penerangan, penjuluhan dan mengadakan pameran jang berhubungan dengan bidang pertambangan dan bertudjuan mengerahkan funds & forces dibidang pertambangan dari masjarakat. Pameran/penjuluhan ini telah dilakukan dibeberapa tempat baik di Djawa-Barat, Djawa-Tengah, Djawa-Timur, Sulawesi (Makasar) dan pameran tetap di Gedung Pola Djakarta.

Dua projek lainnja dalam bidang penelitian adalah projek alat-alat penjelenggara penelitian pertambangan dan projek pembangunan ruang-ruang kerdja dan perlengkapan.

Jang pertama diselenggarakan guna melengkapi Direktorat Pertambangan dengan alat-alat penjelidikan seperti: bor-bor tanah, alat-alat ukur, alat-alat gambar, dan perlengkapan penjelidikan.

Jang kedua diselenggarakan guna menambah ruang-ruang kerdja bengkel-bengkel, gudang buat alat-alat penjelidikan/survey.

3. **Bidang ilmiah:**

Pendidikan Kader dalam Bidang-bidang Geologi dan Pertambangan:

Baik dibidang geologi maupun dibidang pertambangan telah lama diadakan sekolah-sekolah kedjuruan rendah, menengah atau tingkatan akademi seperti:

a. Kursus Pengamat Teknik Geologi.
b. Akademi Geologi Pertambangan.
c. Kursus Prospektor Geologi.
d. Pendidikan Djuru Ukur.

Disamping ini djuga beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa geologi dan tambang tingkat doktoral untuk menambah djumlah tenaga lulusan Universitas.

Untuk menaikkan taraf (upgrading) pegawai-pegawai diusahakan pula pendidikan tambahan atau/serta training baik didalam maupun diluar negeri, seperti untuk upgrading dibidang administrasi telah dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara. Mengenai perburuhan di Departemen Perburuhan dan lain-lain.

Sedangkan pendidikan diluar negeri dilaksanakan di Negara-negara jang sudah madju lapangan industri/pertambangan. Selain ini P.N. Batubara Bukit Asam dan P.N. Ombilin mengadakan djuga Sekolah Teknik dan Sekolah Teknik Menengah Pertambangan.

Kegiatan ilmiah dalam bidang pertambangan geologi.
Kegiatan dalam bidang itu dinjatakan dalam bentuk:

a. membuat penerbitan dan dokumentasi keilmuan.
b. ikut serta dengan pertemuan-pertemuan keilmuan dan internasional.
c. ikut serta dengan organisasi keilmuan dan kerdjasama Internasional;
d. ikut serta dengan ekspedisi-ekspedisi keilmuan: Ekspedisi Tjenderawasih dan ikut ekspedisi Baruna.
e. Riset pembuatan pig-iron dari pasir besi Tjilatjap.
f. Riset dalam lapangan metallurgi dan konsentasi bidji.

Kegiatan Ilmiah dibidang Industri:

a. Pendidikan kader industri dengan didirikan pusat pendidikan kader industri di Djakarta dan pusat-pusat latihan kerdja di projek-projek dan di P.N.-P.N. industri.
b. Pendidikan keluar negeri terutama untuk tenaga ahli dan tenaga menengah kedjuruan.
c. Balai-balai penjelidikan seperti balai penjelidikan rayon di Bandung serta laboratorium di projek-projek dan P.N.-P.N. industri.
d. Kerdjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga penjelidikan.
e. Mendirikan sekolah-sekolah kedjuruan oleh P.N.-P.N. industri.

DEPARTEMEN
URUSAN VETERAN & DEMOBILISASI

PENGANTAR.

„VETERAN, DJADILAH PATRIOT KOMPLIT!"

Pemerintah dan Negara Republik Indonesia mengadjak Bangsa Indonesia seluruhnja untuk menjelenggarakan „Peringatan Dwi Dasa-Warsa Kemerdekaan Indonesia".

Peringatan untuk mengenang „Perbuatan kepahlawanan Rakjat" terutama Pemuda-pemudanja pada masa Revolusi Physik, jang sekarang dikenal sebagai kaum Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

„Bangsa jang besar adalah Bangsa jang dapat menghargai pahlawannja", demikian utjapan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno.

Sebagai seorang jang kini diberi tugas oleh P.J.M. Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi Indonesia mendjadi pembimbing, pembina dan pengasuh para Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dan atas namanja mengutjap sjukur Alhamdulillah dan terima kasih sebesar-besarnja kepada Negara dan Bangsa Indonesia, akan diselenggarakannja peringatan itu.

Predikat Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, sebenarnja belum tjukup dikenal dikalangan masjarakat Bangsa Indonesia sendiri pada chususnja, bangsa lain didunia pada umumnja, meskipun pengurusan Veteran jang berbentuk Departemental sudah berusia hampir 8 tahun semendjak lahirnja Undang-undang No. 75/tahun 1957.

Publikasi-publikasi jang telah banjak disiarkan oleh instansi-instansi dan Lembaga-lembaga Pembina Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi termasuk Legiun Veteran Republik Indonesia dan semua Tjabang-tjabangnja tentang para Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia akan tidak ada artinja, apabila tidak diikuti setjara njata dengan sepak-terdjang dan tindak-tanduk dari kaum Veteran itu sendiri, sepak-terdjang dan tindak-tanduk jang sesuai dengan pedomannja jakni „Pantja Marga" terutama ajat 5 jang berbunji, bahwa Veteran Pedjoang Kemerdekaan itu adalah manusia teladan disamping kedudukannja sebagai Bhayangkara Negara dan Bangsa Indonesia.

Berbahagialah para putera-putera Indonesia jang mendapatkan predikat atau gelar Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, sebab gelar ini tidak dapat ditjapai oleh

kemampuan materiil apapun djuga, ketjuali oleh pengorbanan, penderitaan dan kehilangan dalam rangka „Dharma Bakti" kita masing-masing kepada Revolusi Indonesia sedjak Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sebagai rakjat dari satu Bangsa jang sedang berrevolusi dimana revolusi itu belum selesai, maka dari kaum Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang mempunjai andil besar pada periode Physical Revolution dahulu, tetap diharapkan peranan-peranannja dalam menghadapi setiap tantangan jang akan menghambat djalannja revolusi, mendjadi pelopor dan pelaksana inti-pengisi Tiga Kerangka-Revolusi Indonesia dan djangan hendaknja kaum Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia mendjadi "The forgotten generation of the nation".

Seperti kata pepatah bahwa pengalaman adalah merupakan guru besar bagi para pelaku-pelakunja, maka kaum Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang memiliki banjak pengalaman sehingga sering disebut djuga „Manusia Tiga Zaman", adalah seharusnja apabila membuat dirinja mampu sebagai pengambil peranan utama dalam penjelesaian Revolusi Indonesia jang ber-pantjamuka ini; dengan setia selalu mengikuti karya-karya Bung Karno sebagai Sesepuh Agungnja jang tertjinta, jang sekarang dipandang oleh Negara-negara Nefo's sebagai Kampiun Kemerdekaan Bangsa-bangsa di Dunia.

Jang dalam setiap kesempatan selalu mengandjurkan dan berseru: „Hai Veteran, djadikanlah dirimu patriot komplit", demikian harapan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno terhadap kita kaum Veteran.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa senantiasa memberkati taufiq dan hidajat kepada kita sekalian chususnja kita kaum Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia sehingga dapat memenuhi andjuran Sesepuh Agung kita itu dengan sebaik-baiknja.

A m i n!

Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi,
Major Djenderal M. SARBINI.

***

PENDAHULUAN.

1. Veteran dan pengertian hakikinja.

Sesungguhnja suatu kemunduran, bila sekarang ini kita masih membitjarakan tentang penjelesaian masalah Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, dimana bergeloranja semangat Rakjat Indonesia telah serempak berdjalan menudju kepenjusunan masjarakat dan dunia-baru. Satu masjarakat sosialis Indonesia dan satu dunia baru jang bersih dari penghisapan antara manusia atas manusia lainnja, penindasan antara bangsa atas bangsa lainnja.

Karena masalah Veteran sebagai subjek sebenarnja tidak lagi perlu dipersoalkan, masalahnja adalah merupakan bagian dari masalah umum, artinja masalahnja bangsa Indonesia pada umumnja.

Jang diperlukan sekarang ini, baik dari masjarakat kita umumnja, chususnja dari Pemerintah ialah mengambil langkah-langkah jang tepat untuk membuka kemungkinan agar Veteran Pedjoang Kemerdekaan dapat berdjoang terus dalam lapangan jang baru jakni lapangan non-militer.

Adalah suatu kedjanggalan, bila Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai anak kandung Revolusi Rakjat dan Bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai abdi revolusi jang setia, djustru pada saat sekarang dimana revolusi kita memuntjak masih bertanja-tanja:

„tentang dimana kedudukannja sekarang?"
„peranan apa jang harus dilakukannja?"
„langkah apa jang mesti dikerdjakannja?"

Pemimpin-pemimpin kita telah memberikan djalan jang tjukup tegas dan mudah difahami.

Misalnja kata-kata dari almarhum Mr. Mohammad Yamin dalam menjambut berdirinja Akademi Pembangunan Nasional (A.P.N.) Veteran di Jogjakarta pada tanggal 20 Februari 1959:

„Wahai Veteran djangan memilih, kuasailah perempatan djalan perdjoangan revolusi pada hari jang akan datang".

Dengan kata-kata kiasan ini djelaslah jang dimaksud, ialah agar para Veteran Pedjoang Kemerdekaan bersiap-siap untuk mengamankan djalannja revolusi kita jang multi komlek ini.

Dalam pada itu tegas pula isi Amanat Pemimpin Besar Revolusi Kita Bung Karno jang tertjinta, Sesepuh Agung Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, kepada Konferensi Kerdja Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia di Tjibogo-Bogor, pada tanggal 23 Maret 1965, bahwa:

> „Dalam bahasa Revolusi Indonesia, sebenarnja tidak ada „Veteran". Apa jang dinamakan „Veteran" harus tetap berdjoang, tetap mengabdi kepada Revolusi, sebab revolusi belum selesai.
>
> Dus, berdjoanglah terus, bekerdja terus, untuk revolusi". revolusi".

Kiranja tjukup djelas isi dari amanat ini, bahwa bagi Pedjoang Kemerdekaan, tak ada istilah berhenti berdjoang.

Dan marilah kita perhatikan kesan-kesan jang selalu diutjapkan oleh Djenderal A.H. Nasution, pelopor dalam usaha mentjari penjelesaian masalah Veteran setjara menjeluruh/integral;

> „Kita semua Pedjoang Kemerdekaan wadjib meneruskan tradisi pengorbanan kita".

Memang, tidak ada suatu perdjoangan tanpa pengorbanan. Bagi pedjoang pengorbanan adalah suatu resiko jang telah diperhitungkan dan disadari sedalam-dalamnja.

Djuga perlu mendapat perhatian kita, pesan-pesan jang selalu diberikan oleh Major Djenderal Sarbini, Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi, jang djuga berkedudukan sebagai Ketua/Komandan Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia, bahwa;

> „Veteran adalah pradjurit revolusi, manusia teladan jang harus selalu mengabdi kepada revolusi. Keperwiraan dan kesempurnaan pengabdian kita kepada tudjuan ini hendaknja meresap mendjadi watak kita jang mendarah daging".

Kiranja keseluruhan, baik Amanat Pemimpin Besar Revolusi maupun kesan-kesan jang kita terima dari Pemimpin Nasional lainnja adalah sangat tepat untuk mendjadi pegangan kita kaum Veteran seluruhnja. Karena pengertian tentang „Veteran" memang bukan „oudstrijders", bekas pedjoang, pensiunan ataupun kaum tua; melainkan suatu gelar atau predikat. Predikat bagi

pedjoang-pedjoang bersendjata jang berpengalaman dan telah berdjasa kepada tanah air dan bangsanja dengan segala pengorbanannja. Pada hakekatnja Veteran adalah gelar kehormatan jang diberikan oleh Negara kepada putera-puterinja jang telah berdjasa membela keselamatan Ibu Pertiwi, dan sekaligus merupakan sebutan bagi beralihnja tugas perdjoangan, dari perdjoangan bersendjata keperdjoangan jang non-militer atau perdjoangan pembangunan.

Dengan adanja garis demikian ini, maka kewadjiban bagi setiap Veteran untuk menjesuaikan diri pada lapangan baru, dengan tetap membawa bekal kepribadian, doktrine serta tradisi jang terbentuk selama perdjoangan bersendjata. Misalnja, corpsgeest, dicipline dan kode-kode kehormatan pradjurit. Oleh karenanja logika menundjukan bahwa „Veteran" adalah pedjoang jang tak bersendjata lagi, tetapi militant, corect dan pantas mendjadi teladan.

Pengertian jang hakiki ini, sama sekali tidak bertentangan dengan hukum jang berlaku, jang tertera dalam Undang-undang No. 75 tahun 1957, tentang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, Bab I pasal 1 ajat a, jang berbunji:

> Jang dimaksud dengan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Undang-undang ini ialah; Warga Negara Republik Indonesia jang dalam masa mulai 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut berdjoang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia didalam kesatuan bersendjata resmi atau kelasjkaran jang diakui oleh Pemerintah pada masa perdjoangan itu.

Kalau kita gali pengertian Veteran dari segi-segi predikat dan dasar hukumnja, tjita-tjita, watak serta perbuatan jang telah dibuktikan dalam Revolusi Physik, maka ia adalah pedjoang jang konsekwen, dan berarti pula mendjadi penganut terdepan dari adjaran-adjaran Pemimpin Besar Revolusi.

> „Veteran bukanlah hanja berdjoang untuk kemerdekaan semata-mata, tetapi ia adalah pedjoang Revolusi Indonesia. Dan revolusi ini belum selesai".

> „Kemerdekaan jang telah kita tjapai ini, hanja merupakan djembatan-emas untuk menudju ketjita-tjita revolusi".

> „Garis jang mendjadi landasan revolusi kita telah tegas, berdasarkan Pantja Sila, berhaluan Manipol/Usdek, bertudjuan membentuk masjarakat sosialis Indonesia, serta menjusun dunia-baru jang bersih dari penghisapan satu ma-

nusia atas manusia lainnja, penindasan satu bangsa atas bangsa lainnja".

Konsekwensi jang logis ialah, bahwa tidak seorangpun Veteran jang mau mundur karena adanja tantangan-tantangan; tidak seorang Veteranpun ingin mandek terpaksa karena tak mengetahui dimana kedudukannja dan apa jang harus dilakukannja; jang berarti pula akan melanggar kode kehormatannja sendiri jang berbunji:

Pantja Marga

1. Kami, Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, adalah Warga Negara Republik Indonesia, jang senantiasa siap sedia, mendjadi penegak dan pembela Negara, Proklamasi 17 Agustus 1945, jang berdasarkan Pantjasila.
2. Kami, Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, adalah patriot, petjinta tanah air, bangsa dan Bahasa Indonesia, sesuai dengan Sumpah Pemuda.
3. Kami, Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, memiliki sifat-sifat ksatria, djudjur dan menepati djandji.
4. Kami, Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, memiliki disiplin jang hidup, taat kepada organisasi, Undang-undang Negara, dan selalu memegang teguh rahasia-rahasia Negara.
5. Kami, Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, adalah manusia teladan, jang bertakwa kepada Tuhan Jang Maha Esa, dalam melakukan semua tanggung-djawab dan kewadjiban.

Djadi dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

„Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai manusia teladan, harus tetap mendjadi inti Pedjoang Revolusi Indonesia, dibidang apapun dan dimanapun".

2. **Veteran dengan problema-problemanja:**

Kiranja sangat membosankan bagi masjarakat dewasa ini, bila masih terdengar adanja masalah-masalah Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi untuk tidak terhindar dari adanja kenjataan-kenjataan, serta untuk mendudukkan persoalan kepada proporsi jang sewadjarnja, sajogyanja kita mendalami masalah itu dengan disertai fikiran-fikiran jang membangun. Fikiran-fikiran jang objektif.

Causal-gineties, adanja musabab karena adanja sebab. Kedjadian-kedjadian ini hari tak terlepas dari jang kemarin, dan langkah-langkah kita hari ini akan berpengaruh kepada esok.

Setelah penjerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, pada fase-fase pemikiran dan persiapan kearah alih-tugas bagi pedjoang-pedjoangnja, dari perdjoangan bersendjata keperdjoangan pembangunan, sering timbul kontradiksi-kontradiksi antara idee dan kenjataan.

Kata-kata alih-tugas adalah kata-kata baru, satu perumusan jang timbul sesudah seluruh Rakjat Indonesia menjadari kechilafan-kechilafan dan kesalahan-kesalahannja dan kembali kepada rel-rel Revolusi Indonesia jang sebenarnja. Perumusan terdahulu adalah pengembalian kemasjarakat. Dimana bagi para pedjoang sendiri menimbulkan asosiasi, bahwa perdjoangan telah selesai. Dimulai dengan pengertian jang keliru itu, kemudian ternjata menimbulkan ekses-ekses jang mendjadikan berlarut-larutnja usaha-usaha alih-tugas.

Mungkin oleh fihak konseptor hal ini tak disadari namun bagi Pedjoang Kemerdekaan telah mempengaruhi djalan fikirannja. Berarti satu pukulan mental-psikologis baginja, sehingga hampir semua pengertian mendjadi terbalik dari arti jang sebenarnja.

Kebiasaan berfikir untuk perdjoangan dengan tiada pamrih mendjadi berfikir untuk pribadi. Penghargaan Pemerintah mendjadi balas djasa. Pun pula pengertian satu taraf kemenangan jang ditjapai atas pengorbanannja, dianggap satu kemenangan mutlak baginja. Tetapi fakttor subjektif ini tak berdiri sendiri, sebab seandainja masjarakat jang ada pada waktu itu tidak berbau kolonial dan liberalistis, maka tak mendjadikan hal jang demikian djauhnja.

Bila masjarakat jang kita berada didalamnja telah bersih dari sisa-sisa kolonial, sisa-sisa feodal dan tidak liberalistis, maka kembali kemasjarakat berarti menerima kewadjiban baru sesuai dengan bakat kemampuan masing-masing, seperti kewadjiban anggota masjarakat lainnja.

Untuk memberikan gambaran tentang ini, sajogyanja kita menengok pedjoang-pedjoang di R.R.T. dan partisan di Jugoslavia. Kemenangan tentara R.R.T. (Tentara Merah) dan Yugoslavia (Partisan) langsung menguasai masjarakatnja, sehingga apapun formulasi jang timbul, apakah pengembalian kemasjarakat ataukah alih-tugas, tidaklah mendjadi masalah.

Bukan dimaksud dengan perbandingan ini, kita harus memaksakan masjarakat Indonesia sama dengan masjarakat asing. Tetapi dimaksud bahwa setiap masalah jang timbul itu tidak

berdiri sendiri. Begitu pula halnja dengan masalah Veteran Pedjoang Kemerdekaan R.I. Masalahnja timbul, bukan karena faktor subjektif semata-mata, tetapi tergantung pula kepada faktor jang ada ditengah-tengah masjarakat dimana ia berada atau faktor-faktor objektif. Memang diakui pada umumnja masih belum begitu matang dalam idee-idee revolusi, namun hal ini bukan pula milik monopoli pedjoang-pedjoang sendiri, tetapi masjarakat pada umumnja lebih buruk dalam hal ini. Tidak seorangpun dapat membantahnja, bahwa satu kemenangan jang ditjapai pada tanggal 27 Desember 1949, jaitu pengakuan kedaulatan via K.M.B. merupakan kemenangan jang tidak memuaskan. Dimana masjarakat jang ada seolah-olah masih ditangan asing. Sesungguhnja memang demikian halnja, terutama dibdidang perekonomian. Malah dapat dinjatakan, tjaratjara hidup jang kolonialistis masih berkembang dengan suburnja. Kontradiksi-kontradiksi antara idee dan fakta ini merupakan faktor jang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan djiwa/moril mereka.

Selain itu masjarakat jang liberalistis banjak menjeret mereka untuk terlepas dari ketabahan bathin. Timbulnja keinginan ikut bersaing, mendapat stimulasi dari liberalis-liberalis jang ingin menguasai potensi ini. Bantuan-bantuan jang seharusnja merupakan bekal untuk meneruskan perdjoangan, mempunjai resultat sebaliknja. Karena tjara-tjara jang dipakai tak terasa atau mempunjai tendens-tendens tertentu jang tak disadari bahwa hal ini sama sekali tidak mendidik. Dan seterusnja menimbulkan problema-problema jang tidak begitu gampang untuk mendapatkan pemetjahannja.

Usaha-usaha pengalihan tugas, seharusnja paralel dengan usaha-usaha lain jang menudju kepada satu titik achir dari revolusi kita. Tetapi baik usaha itu maupun haluan revolusi diwaktu itu tidak begitu djelas seperti sekarang ini, dimana kita telah kembali kerel-rel revolusi.

Djadi setjara logis, semua usaha tidak terarah. Berarti pula hampir seluruh langkah adalah perbuatan tambal-sulam. Ini bukan berarti usaha-usaha itu sama sekali tidak berhasil. Umpama; pengalihan tugas dari perdjoangan bersendjata kebangku sekolah. Dalam hal ini banjak membawa hasil-hasil positif, sekalipun pada umumnja mendapatkan handicap jang tjukup memusingkan. Dan kalau dalam hal ini tidak begitu banjak membawa hasil, tak lain disebabkan karena konstelasi masjarakat

diwaktu itu, serta masih adanja rongrongan dari luar terhadap kemerdekaan jang telah kita tjapai.

Periode Survival dari revolusi kita sangat mendapat rintangan dari sitsim liberalisme, serta rongrongan jang bertubi-tubi datangnja dari luar; sengadja untuk menghalang-halangi djalannja kemadjuan revolusi kita. Malang bagi para pedjoangnja, untung bagi imperialis jang ingin menghambat atau membelokkan djalannja revolusi kita, sehingga sempat untuk mempertahankan dominasinja dalam beberapa bidang, terutama bidang perekonomian.

Itu semua diakui oleh Pemimpin-pemimpin Nasional kita, bahwa dimana-mana berdjalan simpang-siur. Dimana-mana timbul krisis. Krisis moril, krisis mental, krisis gezag dan lain-lain. Hal ini dinjatakan oleh Pemimpin Beras Revolusi kita pada hari ulang tahun Kemerdekaan pada tahun 1957. Tahun 1958 dan pada waktu beliau memberikan amanat pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda ditahun itu djuga, bahwa kita telah menjimpang dari rel-rel revolusi jang sebenarnja. Ini merupakan bukti-bukti jang tak dapat diingkari.

Veteran Pedjoang Kemerdekaan R.I. hanja merupakan bagian dari Rakjat Indonesia, dan masalahnja djuga merupakan sebagian dari masalah rakjat seluruhnja. Sedang kita ketahui bahwa masjarakat Indonesia dalam Periode Survival anttara tahun 1950 sampai dengan tahun 1956 sedang mengalami berbagai-bagai krisis. Djadi bila terdapat problema-problema Veteran, maka itu bukan sadja datang atau ditimbulkan oleh Veteran sendiri, tetapi pengaruh jang datangnja dari luar jang umumnja lebih banjak membawa masalah itu sendiri mendjadi berlarut-larut, sehingga merupakan lingkaran-setan jang tak mengenal udjung dan pangkalnja.

Baru terdjadi langkah-langkah jang konstruktif, sekalipun belum sesempurna seperti jang diharapkan, pada tahun 1956 sampai dengan tahun 1957, dimana telah dirintis usaha-usaha dalam masalah ini setjara menjeluruh. Dimana telah diletakkan landasan hukum dengan lahirnja Undang-undang Nomor 75 tahun 1957.

Djika diwaktu-waktu jang lalu, usaha-usaha ini tidak berhasil maka kesimpulan kita, bahwa pengertian didalam masjarakat tentang hal ini belum ada. Masjarakat Veteran pada chususnja, masjarakat Indonesia pada umumnja, dan para pimpinannja. Karena pada hakekatnja, kesempurnaan penjelesaian masalah

Veteran Pedjoang Kemerdekaan R.I. ini akan ditentukan oleh tiga unsur tersebut. Veterannja sendiri, masjarakat pada umumnja, serta pengurusannja.

Dan dalam hal ini harus dimaklumi pula, bahwa Negara kita masih sangat muda dan baru, dalam pengalaman penjelesaian tentang masalah ini.

Tetapi kini garis revolusi kita telah membentang terang, dan tudjuan revolusi telah djelas-tegas. Kaum Veteran harus mendjadikan dirinja sebagai subjek jang menghadapi masalah-masalah masjarakat pada chususnja, masalah revolusi pada umumnja.

*
* *

1. ASAL MULA PEDJOANG KEMERDEKAAN R.I. PERIODE TAHUN 1945 S/D TAHUN 1949.

1. Bergeloranja semangat perdjoangan.

Hakekat hukum alam, bila machluk diindjak atau ditindas ia akan melawan. Apalagi manusia atau suatu bangsa, sedang tjatjingpun akan bergerak apabila diindjak. Demikian pernah dikatakan oleh Bung Karno.

Bangsa Indonesia bergerak, berdjoang sedjak ia merasakan pahit-getirnja hidup terdjadjah dan ditindas.

Didalam sedjarah pendjadjahan jang tiga abad lamanja, kita mengenal sikap melawan dan pemberontakan Bangsa Indonesia. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang bergelora laksana ombak samodra sepandjang masa. Perdjoangan terus bersambung dari angkatan jang satu keangkatan berikutnja tidak ada putusnja, dan tiada hentinja sebelum tjita-tjita tertjapai.

Pada mulanja perlawanan itu hanja merupakan pemberontakan lokal dengan gelombang ketjil, tetapi makin lama makin hebat. Laksana angin jang pada mulanja sepoi-sepoi basah mendjadi angin kentjang dan taufan jang mengobrak-abrik meluluh-lantakan segala jang merintanginja.

Klimaks perdjoangan kemerdekaan memuntjak pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulai saat itu kita menggunakan alat perdjoangan jang baru jaitu Negara. Bangsa Indonesia mulai berdjoang setjara teratur dan setjara terorganisasi. Didalam sedjarah Revolusi Physik ini kita melihat dinamika perdjoangan Bangsa Indonesia, bertempur sambil menjusun.

Perdjoangan untuk mempertahankan kemerdekaan tidaklah dapat hanja dengan menggunakan alat diplomasi dan berunding dan tidak pula dapat disandarkan kepada dasar-dasar etika dan moral.

Dasar kemanusiaan dan keadilan hanja mungkin ditegakkan dengan adanja dua kekuatan jang seimbang, kesutjian tjita jang diperdjoangkan hanja dapat dibela dengan ketangguhan kekuatan.

Hukum dan ketentuan ini pulalah jang dipakai sebagai pedoman oleh para Pedjoang Kemerdekaan, pengemudi dan pimpin-

an revolusi di Indonesia. Pikiran itu tergambar tegas didalam detik-detik peristiwa, jaitu lahirnja fikiran untuk membentuk Badan-badan Keamanan Rakjat, pada tanggal 22 Agustus 1945. Disamping Badan Keamanan Rakjat (B.K.R.) jang dikemudian hari mendjelma mendjadi Tentara Nasional Indonesia (T.N.I.) sebagai alat perdjoangan, dari Negara Republik Indonesia, berdirilah pula Kesatuan-kesatuan Kelasjkaran jang merupakan Badan Perdjoangan Rakjat diseluruh persada Tanah Air Indonesia, jang berdjoang setjara ichlas, suka-rela dengan tanpa pamrih dan hanja bertudjuan satu jaitu mempertahankan Negara Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 17-8-1945. Disini dapat dikemukakan Badan Kelasjkaran itu seperti:

Angkatan Pemuda Indonesia (A.P.I.)
Pemuda Puteri Indonesia (P.P.I.)
Kesatuan Rakjat Indonesia Sulawesi (K.R.I.S.)
Barisan Pemberontak Republik Indonesia (B.P.R.I.)
Hisbullah
Sabilillah
Barisan „Pelopor" — Barisan Banteng
Barisan Berani Mati
L a s j w i
Lasjkar Minjak
Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo)
Lasjkar Buruh
Pemuda Kereta Api
dan lain-lain,

jang semuanja itu mentjerminkan bergeloranja perdjoangan rakjat Indonesia. Meskipun berlainan organisasi dan badan-badan jang lahir, namun tekad semuanja itu telah tersimpul dalam satu sembojan „Merpertahankan Kedaulatan Negara Republik Indonesia".

Disini kita dapat mentjatat kedjadian-kedjadian bersedjarah jang memberikan kesan bergeloranja semangat perdjoangan dan kepahlawanan dari para Pedjoang Kemerdekaan R.I.

Di Djakarta rapat raksasa di Lapangan „Ikada" pada tanggal 19 September 1945, terantjam dan dikepung oleh pasukan Djepang dengan bersendjatakan berat dan ringan. Tapi sikap Djepang jang angkuh dan sombong ini mendjadikan semakin berkobarnja semangat pemuda-pemuda kita dan mendorongnja untuk mengambil tindakan-tindakan.

Insiden-insiden antara kita dengan serdadu Djepang mulai tumbuh dimana-mana, dan insiden-insiden itu sampailah dipuntjaknja tatkala perebutan kekuasaan mulai dilaksanakan dengan kekerasan. Orang-orang Djepang mulai diusir dari kantor-kantor jang didudukinja, sedangkan militer Djepang dilutjuti sendjatanja. Dengan tindakan-tindakan seperti ini dapatlah sedikit demi sedikit menguasai sendjata-sendjata api, sebagai potensi tambahan daripada sendjata-sendjata modal asal pengaman proklamasi jaitu bambu runtjing.

Dikota-kota hampir diseluruh Indonesia terdjadi peristiwa-peristiwa jang sematjam ini. Di Semarang, Surabaja, Jogjakarta, Sala, Bondowoso, dan dikota-kota besar lainnja.

Belum lagi selesai para pedjoang merebut kekuasaan dari tangan Pemerintah Balatentara Djepang, maka mendaratlah tentara Sekutu jang dipimpin oleh Inggeris, dikota-kota pelabuhan penting seperti Djakarta, Semarang, Surabaja dan lain-lain. Mereka memerintahkan kepada Djepang sebagai fihak jang kalah pada Perang Dunia ke-II untuk membatalkan berdirinja Negara Republik Indonesia dan mempertahankan kedudukan Indonesia sebagai inventarisnja. Hal ini djustru membuat kemarahan para pedjoang, sehingga dimana-mana berkobarlah pertempuran-perttempuran antara kesatuan-kesatutan rakjat dengan tentara Inggeris jang dibontjengi oleh tentara Belanda/ Nica, jang bermaksud mengembalikan pendjadjahan di tanah air kita.

Di Surabaja dimulai dengan insiden bendera di Hotel Oranje pada tanggal 19 September 1945 dan hilangnja Brig. Djen. Mallaby jang diikuti ultimatum Djen. Maj. Mansergh tanggal 9 Nopember 1946 jang terkenal itu.

Di Semarang pada tanggal 20 Nopember 1945 terdjadi pertempuran antara Pemuda-pemuda dengan tentara Inggeris jang mengakibatkan kota Semarang didjatuhi bom oleh pasukan udara Inggeris.

Dan di Ambarawa Tentara Keamanan Rakjat jang dipimpin oleh Kolonel Soedirman dapat memukul hantjur tentara Inggeris pada tanggal 25 Nopember 1945.

Di Djawa Barat, kota Bandung semendjak Proklamasi Kemerdekaan R.I. jang dimulai dengan adanja pertempuran rakjat dan tentara Djepang terdjadi pertempuran-pertempuran dimana rakjat dan pemuda-pemuda berusaha melutjuti Djepang. Lebih berkobar lagi semangat rakjat, waktu tentara Be-

landa datang di Bandung, sehingga kota Periangan ini mendjadi lautan api.

2. **Pengorganisasian Pedjoang Kemerdekaan R.I.**

Tanggal 31 September 1945 dianggap tibalah waktunja untuk mengkoordinir semua Badan-badan Perdjoangan jang telah tumbuh dengan suburnja itu, untuk dapat diatur guna menjatukan kekuatan dalam lapangan dan tindakan dibawah satu pimpinan dan satu komando, jang pada hari itu djuga lahirlah „Badan Koordinasi" daripada badan-badan perdjoangan tersebut. Suatu langkah pula menudju kearah penjempurnaan alat-alat perdjoangan, agar tenaga jang berharga itu dapat dipergunakan serta dialirkan pada djalan jang efisien. Perhitungan jang lebih teliti mulai didjalankan.

Kegentingan ibu kota Djakarta lebih memuntjak lagi dengan mendaratnja Marinir Belanda dipelabuhan Tandjungpriok jang untuk pertama-tama mereka membontjeng tentara Serikat Inggeris; pada waktu itu mereka mulai bergerak dengan setjara terang-terangan.

Negara Indonesia jang berusia masih muda itu membutuhkan kelengkapan pertahanan, berbentuk tentara disamping perdjoangan rakjat berbentuk badan-badan perdjoangan jang bertempur setjara patriotik, suka-rela dan ichlas itu.

Bekas Major Knil Urip Sumohardjo pada waktu itu diberi kepertjaan oleh Pemerintah dengan diangkatnja mendjadi Kepala Staaf Umum serta ditugaskan untuk membentuk tentara.

Dapatlah diikuti adanja maklumat-maklumat resmi jang mengantar kelahiran tentara pada waktu itu jang berbunji sebagai berikut:

1. MAKLUMAT PEMERINTAH.

Untuk memperkuat perasaan Keamanan umum, diadakan satu Tentara Keamanan Rakjat.

Djakarta, 6 Oktober 1945.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

2. MAKLUMAT PEMERINTAH.

Sebagai Menteri Keamanan Rakjat diangkat: S u p r i j a d i.

Djakarta, 5 Oktober 1945.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Pemerintah mengumumkan agar pemuda-pemuda, bekas Peta, Heiho, Kaigun-Heiho dan pemuda-pemuda dari Barisan Pelopor menjiapkan tenaganja untuk menentang kembalinja pendjadjahan.

Pemuda-pemuda jang masuk tentara kebangsaan itu dengan segera dilengkapi persendjataannja, agar dapat mempertahankan keamanan umum. (Djakarta, 7 Oktober 1945).

Pengumuman Pemerintah tersebut, diikuti dengan Pengumuman Komite Nasional Pusat; tentang Mobilisasi Tentara Keamanan Rakjat (Tanggal 9 Oktober 1945), jang ditandatangani oleh ketuanja ialah Mr. Kasman Singodimedjo.

Sebagai kelengkapan adanja Lembaga Negara, jang mengurusi T.K.R. ini, maka pada tanggal 14 Oktober 1945, Kementerian Keamanan Rakjat, mengangkat putjuk pimpinan T.K.R. sebagai berikut :

A. Menteri ad interim : Mohamad Suljadikusumo
B. Pimpinan Tertinggi : Suprijadi
C. Kepala Staf Umum : Major Urip Soemohardjo.

Pimpinan Tentara Keamanan Rakjat dalam melaksanakan tugasnja menghadapi kenjataan, bahwa begitu banjaknja Kelasjkaran-kelasjkaran Rakjat jang berdiri jang tidak mungkin untuk ditampung begitu sadja dalam Tentara Keamanan Rakjat (T.K.R.). Lagi pula mereka jang berdjoang setjara patriotik dapat tersinggung perasaannja dan terluka hatinja dengan berdirinja T.K.R. berikut dengan segala peraturan-peraturannja. Ditjari kebidjaksanaan, dengan tjara memberikan penerangan-penerangan kepada masjarakat, chususnja kepada Pimpinan Kelasjkaran-kelasjkaran, bahwasanja maksud Pemerintah Republik Indonesia mendirikan T.K.R. itu untuk melengkapi Negara Republik Indonesia dibidang Keamanan Umum dan Pertahanan Negara, sedangkan Badan-badan Kelasjkaran Rakjat jang telah mempunjai pimpinan dan susunan jang teratur, dapat tetap berdiri membantu T.K.R. dalam usaha mendjaga kesentausaan rakjat dan keamanan Negara.

Untuk kepentingan itu Markas Tertinggi T.K.R. mengeluarkan maklumat jang antara lain berbunji sebagai berikut :

a. T.K.R. adalah sebagian dari masjarakat jang diserahi kewadjiban untuk mempertahankan kesentausaan Republik Indonesia. Untuk sanggup memenuhi kewadjiban itu sebaiknja tentara dibebaskan dari pekerdjaan lain, ketjuali

pertahanan Negara dan hidupnja ditanggung oleh masjarakat. Djadi tentara bukan merupakan suatu golongan diluar masjarakat, bukan suatu kasta jang berdiri diatas masjarakat; tentara tidak lain dan tidak lebih, salah satu bagian masjarakat jang mempunjai kewadjiban jang tertentu seperti bagian-bagian lain jakni buruh, tani dan lain-lain djuga mempunjai tugas kewadjiban jang tertentu.

b. Hak dan kewadjiban untuk mempertahankan keamanan Negara keluar dan kedalam bukan monopoli tentara. Sesungguhnja dalam tiap usaha untuk mempertahankan negara, masjarakat seluruhnja jang berdjoang dengan tentaranja, tenaga-produksinja, tenaga-pengangkutnja dan kerelaannja, untuk berkorban.

   Tiap orang melakukan kewadjibannja pada tempatnja, turut serta dalam usaha ini.

c. Tetapi banjak diantara rakjat jang tidak merasa puas untuk melakukan pekerdjaannja jang biasa sehari-hari sadja, disamping pekerdjaannja itu, mereka membentuk lasjkar-lasjkar, barisan-barisan, gerakan-gerakan-perdjoangan, jang semuanja membuktikan kemauannja untuk turut serta dengan aktip dalam usaha mendjamin kesentausaan negara.

d. Hal ini menggembirakan dan memang pembentukan lasjkar-lasjkar rakjat tidak bertentangan dengan tugas-tugas T.K.R. Pun sedjarah dan kebiasaan internasional mengenal dan mengakui bangkitnja satu bangsa, seluruhnja mempertahankan negara.

   Kita tidak dalam keadaan perang, tetapi njata bahwa apabila kita harus menentang pendjadjahan, maka kita tidak tjukup dengan memadjukan tentara sadja, bahkan rakjat seluruhnja harus berdjoang, dengan tentara sebagai tulang punggungnja.

e. Tetapi berdjoang demikian akan meminta korban jang tidak perlu, apabila tidak diadakan persiapan jang sebaik-baiknja.

   Persiapan itu mengenai :

   — pembentukan barisan jang disiplin dan mempunjai pimpinan jang rapih;
   — latihan dan persendjataan;
   — rentjana perdjoangan dan

— koordinasi antara semua golongan-golongan jang berdjoang;
— lasjkar-lasjkar rakjat tetap merupakan organisasi-organisasi rakjat, T.K.R. tidak mentjampuri pemilihan pimpinan dan aturan rumah tangganja;

f. T.K.R. tidak akan melutjuti sendjata rakjat, malah kalau dapat mempersendjatainja sebagaimana tentara mempersendjatai barisan-barisan rakjat jang mau berdjoang untuk membela kedaulatan negaranja.
Latihan-latihan dapat diberikan oleh T.K R., dengan mengadakan perundingan-perundingan dengan Markas T.K.R. didaerah-daerah.

g. Kewadjiban Lasjkar Rakjat ialah membantu mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, jakni misalnja barisan tani, buruh untuk mempertahankan kampung/desa, fabrik, kantor dan sawahnja sendiri dan sebagai barisan penggempur mendjadi Lasjkar Tjadangan atau bantuan disamping T.K.R. Barisan-barisan rakjat seperti Hisbullah, Sabilillah dan lain-lain jang mempunjai tjorak sendiri sebagai tentara tjadangan atau bantuan disamping T.K.R., dapatlah dinamakan Lasjkar-lasjkar Rakjat istimewa. Terhadap mereka T.K.R., bersifat sama dengan terhadap Lasjkar-lasjkar Rakjat biasa, jaitu bekerdja bersama-sama dan memberi bantuan sedapat-dapatnja, bila perlu. Hanja sadja mengingat bahwa Lasjkar Rakjat biasa masih banjak kekurangan tenaga pimpinan, maka sebaiknjalah bilamana perkumpulan-perkumpulan pemuda tidak mengadakan barisan-barisan pemuda sendiri, tetapi mengandjurkan pemudanja (jang tetap mendjadi anggauta perkumpulannja) untuk menjeburkan diri kedalam Lasjkar-lasjkar Rakjat guna memberi dorongan dan pimpinan kepada rakjat. Hal ini lebih besar manfaatnja karena bilamana pemuda-pemuda itu menjusun dirinja dalam organisasi-organisasi sendiri, pasti karena sedikit djumlahnja, lebih mudah dihantjurkan musuh dari pada kalau mereka berdjoang bersama-sama rakjat jang sangat membutuhkan pimpinannja.

h. Dari sekarang hendaknja diantara golongan-golongan jang akan berdjoang diadakan badan jang akan merupakan „Pimpinan Perdjoangan Rakjat", didalam mana menjelenggarakan siasat pertempuran.

i. Lahir Lasjkar Rakjat adalah lahir untuk mendjaga kesentausaan Republik Indonesia, maka Lasjkar-lasjkar itu harus insjaf akan azas-azas dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Demikianlah maklumat Markas Tinggi T.K.R.

Teristimewa berhubung dengan perang fikiran dan urat sjaraf jang didjalankan musuh dengan pers, radio dan hasutan oleh mata-mata dan kaki tangannja, maka untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, anggauta-anggauta Lasjkar Rakjat bukan sadja harus mempunjai badan jang tegap-teguh dan semangat bertempur jang menjala-njala, tetapi harus pula dipersendjatai dengan kekuatan djiwa jang berisi, sehingga dapat mendjadi pembawa dan pelindung jang gagah-perkasa dari tjita-tjita Republik Indonesia; ialah tjita-tjita untuk mendatangkan kemakmuran dan keadilan bagi rakjat Indonesia seluruhnja.

Guna memetjahkan masalah-masalah ketentaraan, termasuk usaha-usaha konsolidasi-organisasi perdjoangan-bersendjata dan koordinasi-komando, untuk pertama kali pada tanggal 12 Nopember 1945 diadakan konperensi antar Panglima-panglima dan Komandan-komandan T.K.R.

Meskipun praktis jang hadir hanja panglima-panglima dan komandan-komandan jang berada di Djawa-Tengah, karena tak dapat hadirnja panglima dan komandan dari Surabaja dan Djawa-Barat, namun keputusan jang diambil telah mentjerminkan kehendak dari seluruh tentara dengan diputuskannja Kolonel Soedirman, Komandan Divisi V mendjadi Panglima Besar serta diusulkannja setjara definitief adanja Panitia Reorganisasi Ketentaraan.

Oleh pemerintah pada waktu itu, dipandang merupakan faktor pertimbangan jang prinsipiil, karenanja pada tanggal 18 Desember 1945 ditetapkan pengangkatan Kolonel Sudirman mendjadi Panglima Besar, dengan pangkat Djenderal dan Letnan-Djenderal Urip Sumohardjo sebagai Kepala Staf, serta ditetapkan adanja Panitia Besar Re-organisasi Ketentaraan.

Dengan pindahnja Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ke Jogjakarta pada tanggal 4 Djanuari 1946, maka Kementerian-kementerian termasuk Kementerian Keamanan turut pindah ke Jogjakarta.

Dari sini mulailah setapak demi setapak dengan rentjana jang tertentu, disusun Angkatan Perang jang kokoh kuat.

Pada tanggal 7 Djanuari 1946 digedung kediaman Presiden telah dilangsungkan rapat Kabinet. Ketjuali itupun telah menghadap kepada Presiden, Gubernur Djawa Timur Surjo dan Gubernur Penasehat Soetardjo Kartohadikusumo.

Dalam pada itu Presiden telah memutuskan beberapa putusan penting, antara lain:

— Nama Tentara Keamanan Rakjat diganti mendjadi Tentara Keselamatan Rakjat, disingkat T.K.R.

— Nama Kementerian Keamanan diganti dengan Kementerian Pertahanan.

— Sebagai Wakil Menteri Pertahanan diangkat K.R.T. Soegijono Josodiningrat, pegawai tinggi Pemerintah Kesultanan Jogjakarta.

Penetapan Pemerintah Nomor: 2/S.D. 1946, jang selengkapnja berbunji sebagai berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Mengingat : usul Menteri Keamanan.

Menetapkan :

a. Nama Tentara Keamanan Rakjat diganti mendjadi Tentara Keselamatan Rakjat, singkatnja T.K.R.

b. Nama Kementerian Keamanan diganti mendjadi Kementerian Pertahanan.

c. Didalam Undang-undang, Peraturan dan sebagainja, maka kata-kata „Tentara Keamanan Rakjat" diubah mendjadi „Tentara Keselamatan Rakjat" dan kata-kata „Kementerian Keamanan" diubah mendjadi „Kementerian Pertahanan".

Ditetapkan di Jogjakarta,
pada tanggal 1 Djanuari 1946.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Tak lama kemudian nama ini diubah lagi, dengan keluarnja Dekrit Presiden pada tanggal 25 Djanuari 1946, mendjadi Tentara Republik Indonesia (T.R.I.), jang selengkapnja berbunji:

MAKLUMAT PEMERINTAH.

Kami, Presiden Republik Indonesia, setelah mendengar nasehat dari Dewan Menteri jang berapat di Jogjakarta pada tanggal 24 Djanuari 1946;

Menimbang, bahwa didalam saat perdjoangan politik negara Republik Indonesia sekarang mesti diperhatikan kesatuan susunan ketentaraan;

M e n e t a p k a n :

a. Nama Tentara Keselamatan Rakjat, dahulu Tentara Keamanan Rakjat, dirobah djadi Tentara Republik Indonesia.

b. Tentara Republik Indonesia adalah satu-satunja Organisasi Militer Negara Republik Indonesia;

c. Tentara Republik Indonesia akan disusun atas dasar Militer Internasional.

d. Tentara Keselamatan Rakjat jang sekarang, jang mulai hari pengumuman maklumat ini disebut Tentara Republik Indonesia, akan diperbaiki susunannja atas dasar dan bentuk ketentaraan jang sempurna.

e. Untuk melaksanakan pekerdjaan jang disebut didalam pasal 4, maka oleh Pemerintah akan diangkat sebuah panitia, jang terdiri dari para ahli militer dan ahli lain jang dianggap perlu.

Jogjakarta, 25 Djanuari 1946.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Menteri Pertahanan,
Mr. AMIR SJARIFUDDIN.

Untuk melaksanakan pekerdjaan itu, Pemerintah mengeluarkan Maklumat untuk mengangkat sebuah Panitia terdiri atas para ahli militer dan ahli-ahli lain jang berhubungan dengan ketentaraan.

Panitia Besar ini diserahi menjusun peraturan-peraturan perihal bentuk Kementerian Pertahanan, bentuk ketentaraan kekuatan tentara, organisasi tentara, kedudukan lasjkar, lasjkar dan barisan-barisan bersendjata dari badan ketentaraan jang bukan badan Pemerintah dan lain-lain.

Dalam waktu jang sangat singkat dan dalam suasana genting pada waktu itu, panitia jang diharap-harapkan rakjat akan hasil usaha pekerdjaannja, telah berhasil menjusun tentara kita dengan sebaik-baiknja. Pekerdjaan jang maha besar itu dapat diselesaikan dengan semestinja.

Anggaran-anggaran panitia sesuai dengan Maklumat Pemerintah pasal 5 tersebut ialah:

— Letnan Djenderal R. Urip Sumohardjo.
— Djenderal Major Surjadarma.
— Djenderal Major Kartasasmita.
— Djenderal Major Mustopo.
— Kolonel Sutirto.
— Kolonel Sundjojo.
— Kolonel Holan Iskandar.
— Major Simatupang.
— Prof. Mr. Dr. Supomo.
— Prof. Ir. Rooseno.

Dan untuk pertama kali terdjadi pada tanggal 25 Mei 1946 diadakan pelantikan Tentara Republik Indonesia: 1 Djenderal, 1 Letnan Djenderal, 7 Divisi Komandan dengan pangkat Djenderal Major. 7 Kepala Staf dengan pangkat Letnan Kolonel, 3 Komandan Brigade dengan pangkat Kolonel, 10 Djenderal Major pada Kementerian Pertahanan, 3 Kolonel pada Kementerian Pertahanan, 4 Kolonel pada Markas Besar Umum, 2 Letnan Kolonel pada Markas Besar Umum dan 1 Major pada Markas Besar Umum, dimana Djenderal Sudirman mengutjapkan sumpah atas mereka tersebut dihadapan P.J.M. Presiden jang berbunji sebagai berikut:

Sumpah Anggota Pimpinan Tentara.

Atas nama Allah Jang Maha Murah, lagi Maha Asih.

Demi Allah, Kami Djenderal Sudirman, atas nama segenap anggauta Markas Besar Umum Tentara dan para Kepala Djawatan dan Bagian Tentara jang termasuk kedalam Kementerian Pertahanan serta Pemimpin Tentara dalam divisi seluruhnja, bersumpah:

> Sanggup mempertahankan kedaulatan dan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, jang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah jang penghabisan.

Sanggup taat dan tunduk pada Pemerintah Negara Republik Indonesia jang mendjalankan kewadjiban menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan sebulat-bulatnja.

Jogjakarta, 25 Mei 1946.

Panglima Besar Tentara,

ttd.

SUDIRMAN.

Setelah dilantik oleh Presiden Soekarno tanggal 25 Mei 1946.

Susunan baru Markas Besar Umum Tentara dan Kementerian Pertahanan Bagian Militer:

Nama	Djabatan	Pangkat
R. Sudirman	Panglima Besar	Djenderal
	MARKAS BESAR UMUM	
R. Urip Sumohardjo	Kepala Bagian Penjelidik	Letnan Djenderal
Dr. Sutjipto	Kepala Bagian Siasat/Kepala Markas Besar Umum	Letnan Djenderal
T.M. Simatupang	Militer	Kolonel
R. Holand Iskandar	Kepala Bagian Organisasi	Kolonel
R. Sutirto	Kepala Bagian Perintah	Kolonel
Sumardjono	Kepala Bagian Pengangkutan	Letnan Kolonel
Surjo	Kepala Bagian Sekretariat	Letnan Kolonel
Mahmud	Kepala Bagian Tata Usaha	Major
	KEMENTERIAN PERTAHANAN BAGIAN MILITER.	
Sudibjo	Direktur Djenderal	Djenderal Major
Mohammad	Kepala Staf di Kementerian	Djenderal Major
Sudjojo	Kepala Urusan Personalia	Kolonel
Mr. Kasman Singodimedjo	Kepala Urusan Kehakiman dan Mahkamah Tinggi	Djenderal Major
R. Suwardi	Kepala Bagian Pendidikan Ketentaraan	Djenderal Major
Suratman	Kepala Bagian Wadjib Militer	Djenderal Major
Rd. Kartasasmita	Kepala Bagian Infanteri	Djenderal Major
R.M.P.R. Surjosumarno	Kepala Bagian Artilleri	Letnan Kolonel
Ir. Soetomo Wongsotjitro	Kepala Bagian Topografi	Letnan Kolonel
Ir. Hudioro	Kepala Bagian Geni	Djenderal Major
R.M. Sutomo	Kepala Bagian Perlengkapan	Djenderal Major
Sudibjo	Kepala Bagian Tata Usaha/Bagian Perlengkapan	Djenderal Major
Partidjojo	Kepala Bagian Pengumpulan/Bagian Perlengkapan	Letnan Kolonel
Surjosularso	Kepala Persendjataan	Kolonel

Nama	Djabatan	Pangkat
Dr. Wirasmo	Kepala Bagian Kesehatan	Djenderal Major
Santoso	Kepala Polisi Tentara	Djenderal Major
Sunarjo	Wk. Kepala Polisi Tentara	Kolonel
	KEPALA DIVISI DAN KEPALA STAF.	
Divisi I	A.H. Nasution	Djenderal Major
	Askari	Letnan Kolonel
Divisi II	Abdul Kadir	Djenderal Major
	Bambang Sugeng	Letnan Kolonel
Divisi III	Sudarsono	Djenderal Major
	Umar Djoi	Letnan Kolonel
Divisi IV	Soediro	Djenderal Major
	Fadjar	Letnan Kolonel
Divisi V	Djatikusumo	Djenderal Major
	Wadijono	Letnan Kolonel
Divisi VI	Sungkono	Djenderal Major
	Marhadi	Letnan Kolonel
Divisi VII	Imam Sudjai	Djenderal Major
	Iskandar Sulaiman	Letnan Kolonel
Komandan Brigade	Sutarto	Kolonel
Komandan Brigade	H. Samun	Kolonel
Komandan Brigade	Gatot Subroto	Kolonel
Komandemen Sumatera	R. Suhardjo	Djenderal Major

— Reorganisasi itu diikuti pula oleh T.K.R. Bagian Angkatan Udara dengan Penetapan Pemerintah No. 6/S.D. 1946 tanggal 9 April 1946.

— a. Mengangkat Kepala Staf T.R.I./Angkatan Udara R. Surjadi Surjadarma dengan pangkat Komodor Udara (Djenderal Major);

b. Mengangkat Wakil Kepala Staf T.R.I./Angkatan Udara R. Sukarnen Martokusumo dengan pangkat Komodor Udara (Djenderal Major);

c. Mengangkat Wakil Staf (kedua) T.R.I./Angkatan Udara, Hadi Sutjipto dengan pangkat Komodor Muda Udara (Kolonel);

Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara sementara mempunjai 12 Divisi, beberapa Armada, 4 Divisi Tentara Laut dan persiapan-persiapan Resimen untuk perlawanan daerah jang telah diduduki oleh Belanda. Selain mengangkat Djenderal-djenderal Staf dan Komandan-komandan Divisi, ada terdapat Djenderal politik dari Pepolit, jaitu Djenderal Major Sukono Djojopratiknjo, Djenderal Major Wijono, Djenderal Major Anwar Tjokroaminoto, ditambah Laksamana Nazir, Ad-

madji dan Pardi, disamping Djenderal-djenderal Udara (Komodor) Surjadarma dan Soekarnen.

Diluar Organisasi Tentara/Markas Besar Umum Tentara masih berdiri kelasjkaran-kelasjkaran:

a. Lasjkar Rakjat, b. B.P.R.I., c. Barisan Banteng, d. Dewan Perdjoangan, e. Dewan Perdjoangan Djawa-Tengah, f. Dewan Perdjoangan Djawa-Timur, g. Markas Sabillillah, h. Markas Hisbullah, i. Lasjkar Tani, j. Lasjkar Buruh, k. Lasjkar Merah, l. Lasjkar Djakarta-Raya, m. Lasjkar P.R.D., n. Persatuan Perdjoangan bg. Ketentaraan, o. D.P.P.-R., p. G.P.I.I., q. K.R.I.S., v. Pesindo, z. Ketentaraan Peladjar, T.P., T.R.I.P.-C.P., dan lain-lain).

Asal dari Seberang: „Resimen 40.000 Divisi Pattimura", „Resimen Ngurah Rai".

Berkenaan dengan re-organisasi tentara, maka pada tanggal 10-6-1946 telah dikeluarkan maklumat tentang perubahan nama Markas Besar Umum sebagai berikut:

Nama: Markas Tertinggi Tentara dan Markas Besar Umum dihapuskan.

Nama-nama baru sebagai berikut:

a. Markas Besar Tentara terdiri atas Panglima Besar serta Kepala Staf Umum dengan bagian-bagiannja.
b. Staf Umum terdiri atas Kepala Staf Umum dan bagian-bagiannja.

Pemerintah dan Badan-badan Perdjoangan.

Dalam rapat Biro Perdjoangan jang dikundjungi oleh segenap wakil-wakil P.P. Badan Perdjoangan seluruh Djawa dan sekitarnja bertempat di Sekolah Guru Menengah Putri pada tanggal 10-6-1946, ketjuali merundingkan soal rumah tangga djuga memetjahkan soal-soal organisasi dengan hasil sangat memuaskan.

Rentjana pekerdja Biro Perdjoangan sebagaimana jang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan, sefaham dengan Badan-badan Perdjoangan adalah sebagai berikut:

— Usaha jang menudju kepada persatuan strategis, Komando dan Administrasi Perdjoangan (Tentara, Lasjkar-lasjkar) sebelum badan ini bersatu-padu merupakan satu tentara.

— Koordinasi segala tenaga perdjoangan, sehingga dapat diperlihatkan satu Staf Perdjoangan jang kokoh kuat dalam segala-galanja kearah tudjuan mempertahankan Kemerdekaan Negara.
— Rentjana-rentjana jang lain untuk menegakkan Negara kita baik di Djawa maupun didaerah-daerah Indonesia, diluar Djawa dengan badan perdjoangan.
— Menjokong dan turut membeajai badan perdjoangan jang sudah bungkam.

Selandjutnja ditundjuk oleh Kementerian Pertahanan sebagai Kepala Biro Perdjoangan, Djoko Soejono.

Selesai rapat Biro Perdjoangan, maka dilangsungkan rapat Putjuk Pimpinan Badan-badan Perdjoangan ditempat tersebut diatas jang dimpin oleh Djoko Soejono dan dapat mengambil putusan sebagai berikut:

> Mendesak kepada Pemerintah supaja di Dewan Pertahanan, baik di Pusat maupun di Daerah, turut duduk seorang wakil dari Badan-badan Perdjoangan. Wakil dari Badan-badan Perdjoangan untuk Dewan Perdjoangan Pusat akan dikirim dengan melalui Biro Perdjoangan.

Berhubung dengan keadaan jang genting dan telah diumumkannja Undang-undang „Keadaan Bahaja" maka pada tanggal 26 Djuni 1946 telah dibentuk; Dewan Militer, jang diketahui oleh Presiden Sukarno; sebagai Wakil Ketua I adalah Wakil Presiden; sebagai Wakil Ketua II adalah Meteri Pertahanan.

Adapun anggauta-anggautanja ialah:

— Panglima Besar
— P.U. Angkatan Laut R.I.
— Kepala Staf T.R.I.
— Kepala Staf Angkatan Laut R.I.
— Direktur Djenderal Kementerian Pertahanan.

Selandjutnja diputuskan pula bahwa Panglima Besar Sudirman diangkat mendjadi Pimpinan Tentara Darat, Laut dan Udara.

Kesatuan Pimpinan Militer.

Kami, Presiden Republik Indonesia;
Setelah mendengar nasehat Menteri Pertahanan;

Mengingat, bahwa untuk baiknja djalan pimpinan pembelaan Negara setjara militer harus diadakan kesatuan pimpinan;

M e m u t u s k a n :

Mengangkat Panglima Besar R. Sudirman mendjadi Pimpinan Tentara Darat, Laut dan Udara dengan ketentuan, bahwa tentang susunan pada tiap-tiap bagian tersebut jang bertanggung djawab ialah pimpinannja sendiri.

Jogjakarta, 26 Djuni 1946
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Menteri Pertahanan,
Mr. AMIR SJARIFUDDIN.

Selandjutnja dengan Ketetapan Menteri Pertahanan tanggal 16-7-'46 telah didirikan „Biro Urusan Sumatra", jaitu djawatan baru jang chusus mengurus segala hal jang mengenai ketenteraan di Sumatera. Biro tersebut adalah bagian dari Kementerian Pertahanan Bagian Militer, tetapi taktis berada dibawah Markas Besar Tentara Staf Umum III dan dipimpin oleh Letnan Kolonel R.A. Bustomi.

Pada tanggal 17-9-'46 malam Delegasi T.R.I. jang akan membitjarakan „trucks" dengan Tentara Serikat telah berangkat ke Djakarta dengan kereta-api istimewa dari stasiun Tugu (Jogjakarta), dengan diantar para pembesar. Diantara pembesar-pembesar jang turut mengantarkan kestasiun kelihatan antara lain Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima Besar, Kepala Staf Umum, Djuru Bitjara Tentara dan lain-lain.

Wakil Presiden menjampaikan sepatah dua patah kata kepada para utusan antara lain; „Inilah untuk pertama kalinja kita mengadakan perundingan perletakkan sendjata dengan Tentara Serikat setjara Internasional". Saja pertjaja akan kebidjaksanaan Saudara-saudara; Selamat djalan dan djagalah kehormatan bangsa kita!"

Rombongan tersebut terdiri dari 7 orang, 5 orang dari Djawa dan 2 orang dari Sumatera serta pimpinan delegasi adalah Djenderal Major Soedibjo.

Dengan adanja peristiwa „3 Djuli" oleh jang berwadjib telah ditetapkan sebagai Panglima Divisi III R. Susalit (putera al-

marhumah R.A. Kartini) bekas Komandan Brigade VII menggantikan Djenderal Major Sudarsono. Upatjara penjerahan pimpinan Divisi tersebut dilangsungkan pada tanggal 2-10-1946 oleh Wakil Markas Besar Tentara di Kantor Markas Divisi.

Atas keinginan dan keinsjafan rakjat sendiri terhadap pembelaan Tanah Air jang terantjam kemerdekaannja maka dimana-mana berdiri organisasi rakjat jang bersifat militer.

Badan-badan Perdjoangan ini sangatlah besar djasanja disegala medan perdjoangan. Mereka berdjoang semata-mata memenuhi panggilan nusa dan bangsa. Mereka tidak mengharapkan upah; tiap orang ingin berkorban. Tiap orang mendjadi pradjurit.

Inilah jang mengagumkan orang, tentang Revolusi Indonesia. Kagum akan keichlasan tiap putranja membeli kemerdekaan tanah airnja. Kita menghadapi musuh jang teratur segala-galanja dan lengkap persendjataannja, maka perlawanan kita harus diatur serapi-rapinja untuk dapat mengadakan pertahanan jang kuat, bulat (total) dan teratur; dan perlu diadakan peraturan chusus mengenai kelasjkaran dan barisan. Berkenaan dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 19 Jogjakarta 1946.

Hasil kekaryawanan Internasional jang dapat ditunaikan oleh Tentara Republik Indonesia (T.R.I.) dapat dikemukakan sebagai dibawah ini.

Pengangkutan Balatentara Djepang:

Pada tanggal 18-6-1946 tentara kita telah menjelesaikan tugasnja dengan mengangkut rombongan serdadu Djepang unpenghabisan dari pelabuhan Probolinggo menudju ketempat pengumpulan jang telah ditentukan.

Dengan demikian selesailah salah satu pekerdjaan penting jang diserahkan kepada Tentara kita menurut perdjandjian jang dibuat di Jogjakarta pada tanggal 1 dan 2 April 1946 antara Putjuk Pimpinan Tentara Indonesia dan Putjuk Pimpinan Tentara Serikat di Indonesia.

Sementara itu telah diangkut 35.545 serdadu Djepang ialah 7.711 dari Djawa Tengah termasuk djuga daerah Tjirebon dan 27.834 dari Djawa Timur. Wakil Staf Tentara Djepang pada tanggal 20-6-1946 telah menghadap dikantor penghubung Ten-

tara Indonesia untuk menjampaikan dengan resmi terima kasihnja, kepada Tentara dan Angkatan Laut kita.

Dalam pada itu pengangkutan kaum interniran bangsa Serikat (Apwi) oleh Tentara Republik Indonesia dengan bekerdja sama dengan Angkatan Udara Inggeris berdjalan terus dengan pesatnja.

3. Pedjoang Kemerdekaan R.I. sebagai Tentara Nasional Indonesia (T.N.I.).

Berhubung dengan telah tertjapainja persetudjuan diantara Delegasi Indonesia dan Komisi Djenderal di Djakarta pada tanggal 24-1-1947 tentang pelaksanaan gentjatan sendjata dan menetapkan garis demarkasi, maka Panglima Tertinggi telah memerintahkan untuk menghentikan tembak-menembak jang berlaku mulai tanggal 15 Pebruari 1947. Hal ini berlaku untuk beberapa saat sadja, maka tiba-tiba dengan alasan jang ditjari-tjari pada tanggal 21 Djuli 1947 Belanda menjerang dari segala djurusan, baik dari darat, laut dan udara.

Masa penuh rintangan dan djalan jang harus ditempuh, sebelum alat kekuasaan didalam pertumbuhannja, jang sungguh dapat didjadikan pegangan bagi Negara, Tentara Keamanan Rakjat dirobah mendjadi Tentara Keselamatan Rakjat, jang segera dirobah lagi mendjadi Tentara Republik Indonesia. Setelah ditimbang bahwa telah tiba waktunja untuk mempersatukan Lasjkar dan Tentara dalam satu organisasi Tentara Nasional Indonesia (T.N.I.), maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang R.I. telah mengeluarkan Penetapan jang isinja sebagai berikut:

> Dalam waktu jang sesingkat-singkatnja mempersatukan Tentara Republik Indonesia dan Lasjkar-lasjkar mendjadi satu organisasi Tentara.

Menjerahkan pelaksanaannja kepada suatu panitia jang diketahui sendiri oleh Presiden dan selandjutnja terdiri dari Wakil Ketua I; Wakil Presiden; Wakil Ketua II; Menteri Pertahanan; Wakil Ketua III; Panglima Besar dan anggota-anggota dari:

a. Kepala Staf Umum M.B.T.;
b. Direktur Djenderal Angkatan Darat;
c. Panglima Angkatan Laut;
d. Direktur Djenderal Angkatan Laut;

e. Panglima Angkatan Udara;
f. Kepala Staf Pendidikan Politik Tentara;
g. P.U. Biro Perdjoangan;
h. Panglima Divisi III/T.R.I.;
i. Kepala Staf Umum M.B.-A.L.;
j. Pimpinan Barisan Hisbullah;
k. Pimpinan Barisan Pesindo;
l. Pimpinan Barisan Lasjkar Rakjat;
m. Pimpinan Barisan Pemberontak (B.P.R.I.);
n. Menteri Negara Wikana;
o. P.B. Kongres Pemuda;
p. Pimpinan T.R.I. Peladjar.

Selandjutnja setelah Presiden menerima putusan panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, maka kemudian menetapkan bahwa mulai tanggal 3 Djuni 1947 Presiden mengesahkan berdirinja Tentara Nasional Indonesia.

Segenap anggota Angkatan Perang jang ada dan segenap anggota Lasjkar jang bersendjata, baik jang sudah atau jang tidak bergabung didalam Biro Perdjoangan. Mulai saat tersebut dimasukkan serentak kedalam Tentara Nasional Indonesia.

Pada tanggal 28 Djuni 1947 Presiden melantik anggota-anggota Putjuk Pimpinan Tentara Nasional Indonesia. Mereka itu adalah:

a. Djenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Seluruh Angkatan Perang Tentara Nasional Indonesia (T.N.I.);
b. Letnan Djenderal Urip Sumohardjo, Kepala Staf Umum T.N.I. diserahi tugas chusus Angkatan Darat;
c. Laksamana Muda Nazir, Panglima Angkatan Laut;
d. Komodor S. Surjadarma, Panglima Angkatan Udara;
e. Djenderal Major Djoko Sujono, bertugas mengawasi perintah dan hubungan antara Tentara dan Rakjat;
f. Djenderal Major Ir. Sakirman, bertugas mengurus Koordinator antara Badan-badan dan Djawatan-djawatan;
g. Djenderal Major Sutomo, bertugas mengurus perhubungan dan kerdja bersama antara seluruh Angkatan Perang.

Guna merealisir peleburan Lasjkar-lasjkar bersama T.R.I. kedalam wadah-wadah organisasi Tentara Nasional Indonesia, dan mengingat banjaknja djenis kesatuan Lasjkar dan masing-masing kesatuan mempunjai personalia jang berbeda-beda

djumlahnja, tersebab tidak adanja ketentuan-ketentuan umum jang berlaku untuk semua Badan-badan Kelasjkaran, maka Pemerintah bersama Putjuk Pimpinan T.N.I. mengusahakan djalan keluar dengan rasionalisasi; peraturan-peraturannja antara lain sebagai berikut:

a. Persjaratan bagi para pemimpin/komandan; adanja pendidikan dibidang kepemimpinan, ketata-negaraan dan ilmu kemiliteran;

b. Banjaknja sendjata berat, sendjata ringan dan persediaan amunisi.

Dengan demikian, maka banjak sekali para pedjoang Kemerdekaan jang telah njata-njata berbakti kepada Nusa dan Bangsa, berdiri diluar formasi setelah adanja Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. A/338/1947.

Dengan terbitnja Penetapan Pemerintah No. 3 tahun 1948, maka guna mengembalikan mereka kemasjarakat, maka mereka disalurkan ke Kementerian Pembangunan/Pemuda jang mendirikan perusahaan-perusahaan sebagai tempat atau penampungannja.

T.N.I. berdiri dengan kekuatan 5 Divisi ditambah beberapa kesatuan-kesatuan; jakni Kesatuan Reserve Umum X dan Kesatuan Reserve Umum W (K.R.U. „W") jang kemudian mendjadi T.N.I. Brigade 16 dan T.N.I. Brigade 17 jang terdiri dari Kesatuan-kesatuan Peladjar Pedjoang (Tentara Peladjar, G.T.P., Tentara Republik Indonesia Peladjar, Corp Mahasiswa, C.S.A. dan Bat. IMMA'M C.P.S., Perpis dan lain-lain).

4. Aksi Militer Belanda jang ke-I (pertama).

Pada waktu kita didalam fase perundingan Linggardjati dan telah tertjapai djuga hasilnja persetudjuan dengan pihak Belanda tanggal 25 Maret 1947, tiba-tiba pada tanggal 21 Djuli 1947 dengan alasan jang ditjari-tjari Belanda melintasi daerah status-kuo menjerang kita dari segala sudut, dari darat, laut dan udara. Persetudjuan Linggardjati dirobek-robek. Perang kolonial jang pertama meletus. Pesawat Dahkota dari India kepunjaan tuan Patnaik jang membawa obat-obatan, untuk Republik Indonesia, diatas kota Jogjakarta ditembak djatuh oleh pesawat pemburu Belanda. Gugur pada waktu itu djuga pedjoang-pedjoang Adi Soetjipto, Dr. Abdulrachman Saleh alias Pak Karbol, Hadi Soemarno dan lain-lain.

Didorong oleh semangat untuk membalas dendam, maka 2 orang pemuda kita jang bersemangat Gatotkatja membom kota Semarang, kota pendudukan Belanda. Sekalipun hanja dengan pesawat terbang sederhana bersajap dua.

Serbuan Belanda dimana-mana kita sambut dengan hangat. Tentara Belanda berhasil menguasai karesidenan-karesidenan: Semarang, Pekalongan, Banjumas. Dan mereka berhenti diperbatasan-perbatasan sampai ada perintah penghentian tembak-menembak dari Dewan Keamanan P.B.B. pada tanggal 1 Agustus 1947.

Sesuai dengan perintah itu Panglima Tertinggi kita memerintahkan kepada segenap Angkatan Perang Republik Indonesia untuk menghentikan segala permusuhan dan supaja masing-masing berada ditempat. Republik Indonesia dan Belanda kemudian mengadakan perundingan lagi dikapal Renville, diteluk Djakarta. Pada tanggal 7 Djanuari 1948 persetudjuan/perdjandjian Renville ditanda-tangani. Adapun isinja:

a. Persetudjuan gentjatan sendjata antara Belanda dan Republik Indonesia;
b. Enam prinsip tambahan untuk perundingan guna mentjapai penjelesaian politik.

Pada tanggal 2 Maret 1948 telah terdapat persetudjuan mengenai status-kuo. Kekuatan bersendjata dari Republik Indonesia jang berada dibelakang apa jang dinamakan „garis Van Mook" harus dihidjrahkan. Tentara jang masih mengantong didaerah-daerah Belanda itu harus ditarik. Daerah Republik Indonesia jang semakin sempit menghadapi keadaan jang paling sulit, dengan ditambahnja sedjumlah besar tentara jang berhidjrah itu. Kesulitan-kesulitan timbul dalam segi politik, ekonomi dan militer. Udjian berat semakin terasa bagi Tentara Nasional Indonesia. Ditinggalkannja daerah-daerah kantong, merupakan daerah vacuum dan ternjata dapat menjuburkan aliran-aliran jang ekstrim diantaranja jang terkenal ialah Gerakan Darul Islam „Kartosuwirjo". Disamping itu didaerah de fakto Republik Indonesia keadaan politik sangat panas dan timbullah peristiwa Madiun jang sangat kita sesalkan itu.

Peristiwa-peristiwa diluar Djawa sekitar Perang Kemerdekaan ke-I (Pertama).

a. Di Sumatera.

Belanda melantjarkan agresinja jang pertama pada tanggal 21 Djuli 1947. Para pedjoang kemerdekaan sebagai ketentaraan telah tersusun seluruh Sumatera-Tengah chususnja di Karesidenan Sumatera Barat dan Riau, karena karesidenan Djambi adalah masuk daerah ketentaraan Sumatera Selatan. Pun barisan-barisan telah bertindak menjusun formasinja masing-masing menurut susunan ketentaraan. Sebagai pendahuluan untuk bergabung dalam Tentara Nasional Indonesia.

Pada 21 Djuli 1947 itu Belanda bergerak keluar kota Padang dan dalam pertempuran selama duahari berturut-turut. Belanda dapat menduduki Indarung, sehingga pertahanan kita disusun dikampung Ladang Padi.

Pada tanggal 23 Djuli terdjadi pertempuran di Tanah Bengkok dan Lubuk Perahu dan pada tanggal 25 Belanda masuk di Air Sirah, tetapi dapat dipukul kembali di Indarung. Dalam pertempuran itu pasukan kita mendapat bantuan sepasukan Mobrig dari Bukittinggi.

Sesudah agresi Belanda pertama ini diachiri dengan cease fire dan daerah Republik Indonesia hanja tinggal sepertiga pulau Djawa dan empat-perlima Sumatera, maka diteruskan penjempurnaan menjusun T.N.I. dengan memasukkan barisan-barisan rakjat kedalam ketentaraan, sesuai dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Mei 1947. Maka dalam bulan Agustus 1947 di Sumatera dibentuk satu Kesatuan Lasjkar-lasjkar dengan nama Legiun Sjahid dengan koordinatornja Kolonel Sjarif Usman, jang didjalankan atas perintah Panglima T.N.I. Kekuatan Legiun Sjahid ini adalah satu resimen dengan bandingan 1 : 4, jaitu untuk satu sendjata api diterima dalam T.N.I. 4 orang. Penggabungan ini meliputi Hisbullah, Lasjmi, Barisan G.P.I.I., Sabilillah, Barisan Merah, Sjaifullah, Tentara Allah, Barisan Hulubalang, Barisan Istimewa dan lain-lain.

Pada bulan Nopember 1947, Panglima T.N.I. Komandemen Sumatera memerintahkan supaja nama Legiun Sjahid diganti nama mendjadi T.N.I. Resimen Istimewa Komandemen Sumatera.

Sebagaimana diketahui bahwasanja dalam rangka pembentukan ketentaraan di Sumatera, semendjak tanggal 5 Nopember 1945, Markas Tertinggi T.K.R. di Djawa mengangkat Dr. A.K. Gani sebagai Organisator dan Koordinator T.K.R. se Sumatera, jang dalam djabatan ini mengangkat pula Djenderal Major Soehardjo Hardjowardojo mendjadi Kepala Staf Umum

Markas Besar T.K.R. Sumatera/Panglima Tinggi Kepala Komandemen Tentara R.I. Sumatera.

Dari tahun 1945 sampai tahun 1948, selama 3 tahun para Pedjoangan Kemerdekaan R.I. tumbuh sebagai Badan-badan Kelasjkaran meningkat ketentaraan ialah Tentara Republik Indonesia dan achirnja menudju kekesempurnaan mendjadi Tentara Nasional Indonesia (T.N.I.). Komandemen Sumatera mendjadi T.N.I. Divisi Banteng, Komando Sumatera dengan Panglimanja Kolonel Ismael Lengah.

b. Di Sulawesi.

Selama perdjoangan kemerdekaan dengan sendjata-api dan lain-lain dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1948, tidak ada jang dinamakan Perang Kemerdekaan ke-I dan Perang ke-II. Dimulai dengan mendaratnja 500 orang Tentara Belanda (Knil), jang berasal dari Morotai, maka rakjat Sulawesi mulai bergerak untuk mempertahankan kedaulatan Negara R.I. dengan bentuk mendirikan badan-badan kelasjkaran dimana-mana tempat diseluruh Sulawesi. Mereka bertempur dan melawan Tentara Kolonial Belanda setjara bergerilja, terutama mereka beraksi dipedalaman Sulawesi Selatan.

Dengan meliwati dua konperensi, ialah Konperensi Malino tanggal 15 s/d 25-7-1946 dan Konperensi Denpasar tanggal 24-12-1946, maka pimpinan Nica Letn. Gubernur Djenderal Dr. H.J. van Mook dapat berhasil membentuk Negara Indonesia Timur. Bertepatan dengan terselenggaranja Konperensi Denpasar itu, maka tentara Belanda dibawah Kapten Westerling mengadakan gerakan pembunuhan besar-besaran didaerah Sulawesi Selatan jang meminta korban djiwa 40.000 pedjoang kemerdekaan, diantaranja seorang pemuda Pemimpin Pasukan bernama Robert Wolter Monginsidi.

Gerakan-gerakan Pemuda jang revolusioner terus djuga bergelora, terutama di Sulawesi Selatan disekitar Badjeng (Palombangkeng) pada daerah dimana Lasjkar Pemberontak Rakjat Indonesia (L.A.P.R.I.S.) berpusat, dibawah pimpinan Makkaraeng Daeng Mandjarienge.

Perlu diketahui bahwa organisasi Lapris jang sangat ditakuti oleh Belanda itu adalah terdiri dari 19 organisasi pemberontak, jakni:

— Lipan Badjeng, dibawah pimpinan Mappa Daeng Temba;
— P.P.N.I. Makasar, dibawah pimpinan Amin Muchlis;

— Kris Muda Mandar, dibawah pimpinan Muhd. Amin Daud;
— Pemuda Tanete, dibawah pimpinan Ali Maloka;
— Amris (Angkatan Muda R.I. Selajar) dibawah pimpinan Bonto;
— P.B.A.R. (Pemberontak Bulukumba Angkatan Rakjat) dibawah pimpinan Andi Sjamsuddin;
— P.P.I. (Penerdjang Pendjadjah Indonesia) Bonthain dibawah pimpinan A. Rasjid Faqih;
— Laptur (Lasjkar Pemberontak Turatea) Binamu dibawah pimpinan Muhd. Said Sila;
— Buka Limbung dibawah pimpinan Muhung.
— A.L.R. Makasar }
— B.P.I. „ } dibawah pimpinan Rd. Sukarta.
— K.P.S. „ }
— Pemuda Moras } dibawah pimpinan Baddara Daeng
— Pemuda Tjamba } Situdju.
— H.I. (Harimau Indonesia) Pangkadjene dibawah pimpinan Bohong;
— Laptur B Bongkala Taroang, dibawah pimpinan Kr. Kuning;
— Gaptis Soppeng dibawah pimpinan Abdullah;
— B.P.R.I. Pare-Pare dibawah pimpinan Andi Abdullah Bau-Masseppe;

c. Di Kalimantan.

Pertempuran jang pertama jang terdjadi di Kalimantan Barat antara Rakjat dan Tentara Nica ialah di Sambas pada tanggal 27 Oktober 1945, jaitu beberapa hari sebelumnja, rakjat dan pemuda mengadakan demonstrasi menuntut penurunan bendera Belanda.

Kedatangan tentara Nica di Bandjarmasin tanggal 27 September 1945 djuga disambut oleh rakjat setempat dengan perkelahian/perebutan sendjata. Demikian djuga lain tempat, ketjuali daerah Pangkalan Baru, Kotawaringin, Kumai, Pembrian; dan umumnja dalam kabupaten Kotawaringin Belanda belum berani masuk. Karena ditempat inilah terletak kekuatan rakjat jaitu gabungan dari rombongan bersendjata jang mengadakan infiltrasi ke Kalimantan.

Dalam menjelenggarakan perdjoangan itu amatlah besar sumbangan jang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia jaitu dengan mengizinkan berdirinja Biro Perdjoangan untuk daerah Seberang. A.L.R.I. Divisi Kalimantan jang mendapat

anggaran belandja sendiri. Sampai achir tahun 1946 djumlah kaum pedjoang kemerdekaan jang menjelundup ke Kalimantan ± 1500 orang pedjoang jang terbagi dalam beberapa angkatan. Pasukan-pasukan seperti Pesindo, A.L.R.I. Div. IV dan Biro Perdjoangan Seberang.

Pada tanggal 4 Oktober 1949 perdjoangan kemerdekaan Rakjat Kalimantan diakui resmi oleh Pemerintah Pusat R.I. dengan djalan meresmikan adanja A.L.R.I. Div. IV oleh Djend. Major Soehardjo, jang selandjutnja oleh Let. Kol. Suhanda Bratamenggala atas nama K.S.A.P. Republik Indonesia melebur mendjadi ALRI Dis. IV da nkemudian mendjadi satuan Angkatan Darat dan diberi nama T.N.I. Divisi Lambung Mangkurat dengan pimpinannja atau panglimanja Letn. Kolonel Hasan Baary.

d. Di Bali.

Dengan adanja perdjandjian Linggardjati antara Republik Indonesia dan Belanda, meskipun belum disjahkan oleh Badan Perwakilan kedua Negara jang bersangkutan, dasar-dasar perdjandjian tersebut didjadikan pedoman dalam konperensi Denpasar. Dalam fatsal-fatsal Linggardjati ini antara lain tertjantum pengakuan de fakto dari pihak Belanda terhadap R.I., sedangkan dalam fatsal lainnja R.I. menjetudjui susunan kenegaraan jang berbentuk federasi jang akan terdiri dari Negara R.I. (Djawa, Madura, Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Timur).

Perdjoangan bersendjata didaerah jang dikuasai oleh Belanda, antara lain Bali mengalami fase jang sangat berat, karena perbedaan pandangan serta hubungan jang tidak lantjar dengan pusat perdjoangan di Djawa. Sementara itu pimpinan perdjoangan seluruhnja praktis berada ditangan Let. Kolonel Ngurah Rai. Beliau ini berpendirian tetap tidak menjetudjui diadakannja perundingan-perundingan jang chusus mengenai Bali dan menjerahkan hal jang demikian kepada Pemerintah R.I. jang berkedudukan di Djawa. Hanja perintah jang dikeluarkan oleh Pemerintah R.I. sadjalah jang dapat diterima. Demikian pendirian Badan-badan jang bersendjata seluruhnja berdiri dibelakang Letnan Kolonel Ngurah Rai. Semangat perlawanan ini memuntjak ketika pada 20 Nopember 1946 terdjadi suatu pertempuran sengit antara pasukan jang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ngurah Rai sendiri dengan tentara Belanda jang mengakibatkan gugurnja sebagian besar para pimpinan termasuk Letnan Kolonel Ngurah Rai.

5. **Aksi Militer Belanda jang ke-II (kedua).**

Baru sadja peristiwa Madiun selesai, tiba-tiba pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda melantjarkan aksi militer jang kedua. Untuk kedua-kalinja Belanda melanggar djandji, naskah Renville dirobek-robeknja. Memang pengalaman agresi militer jang pertama telah memberikan keinsjafan kepada kita bahwa pada suatu saat Belanda akan melanggar djandji. Maka dari itu oleh putjuk pimpinan Angkatan Darat diadakan persiapan-persiapan jang saksama untuk menghadapi segala kemungkinan, dengan penjempurnaan taktik gerilja total. Berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam aksi militer jang pertama, maka diperintahkannja kepada semua aparaat Pemerintah untuk memperdalam dan memperluas sistim gerilja total. Sistim ini menaruhkan semuanja, tenaga manusia, tenaga alam, tenaga lain-lainnja; pendeknja apa sadja jang dapat menambah kuatnja potensi negara harus dikerahkan. Betapa nekadnja pasukan-pasukan gerilja di Solo, Jogja, Magelang, Purwokerto, Semarang, Pati, ja seluruh pelosok Djawa-Tengah ini, tidak perduli siang atau malam. Begitu sadja pasukan-pasukan gerilja ini menjekek leher serdadu-serdadu Belanda, bahkan dengan sten-gun sadja mereka pada waktu sore berani mendekati dan menebaki opsir-opsir Belanda jang berfoja-foja di harmoni-harmoni. Dan siapakah jang dapat melupakan serbuan umum di Jogjakarta pada tanggal 1 Maret 1949 jang kemudian terkenal dengan kisah enam djam di Jogja.

Agar supaja lebih luas lagi, disini dipaparkan pengalaman-pengalaman gerilja didaerah Jogjakarta. Pengalaman-pengalaman di Jogja ini dapatlah dianggap sebagai suatu tjontoh betapa hebatnja perlawanan-perlawanan jang diberikan oleh tentara kita dengan bantuan rakjat terhadap tentara kolonial Belanda itu.

Pada tanggal 19 Desember 1948 beratus-ratus pesawat terbang Belanda telah mengadakan pengeboman dan penggranatan diatas Ibukota Jogjakarta. Bombardemen dan mitraillemen didjalankan setjara kedjam oleh musuh. Semuanja dimulai pagi-pagi benar ± djam 05.15 sehingga membikin getarnja rakjat jang semula mengira, bahwa pesawat-pesawat terbang itu kepunjaan sendiri jang sedang mengadakan latihan-latihan. Sehari sebelumnja memang ada pengumuman, bahwa hari tanggal 19 Desember 1948 itu akan ada latihan besar-besaran.

Belanda mendarat dengan tentara pajung, kemudian dengan tjepat menguasai lapangan terbang Maguwo. Pendu-

duk Jogja jang mulanja atjuh tak atjuh terhadap pendaratan tersebut, tapi kemudian sadarlah bahwa perang kolonial telah dimulai. Kita sama sekali tak dapat membikin perlawanan jang berarti, karena serangan jang sangat mendadak itu. Rakjat mendjadi bingung. Aparat Pemerintah tak ada jang siap, karena semuanja dalam keadaan rahasia untuk mengadakan latihan. Sedang Divisi Siliwangi jang mempunjai tugas untuk Wingate ke Djawa Barat djuga telah berangkat. Selain itu memang telah direntjanakan untuk tidak mengadakan perlawanan setjara frontal. Kita hanja bersedia untuk mengadakan perlawanan setjara gerilja sepandjang masa. Perlawanan diadakan hanja untuk menghambat kemadjuan musuh sadja.

Setelah Belanda menduduki lapangan terbang Maguwo, mereka meneruskan gerakannja kekota jang djaraknja hanja 6 km. Malang bagi kita dan untung bagi Belanda karena kekuatan kita didalam kota pada waktu itu hanjalah 2 seksi sadja, sedangkan kekuatan lainnja berada djauh diluar kota. Alat perhubungan terputus. Kekuatan 2 seksi dari Be 10/III itu dibantu dengan 3 Sie C.P.M. dan Polisi Negara mengadakan perlawanan dengan frontbreedte jang pandjangnja 4 km. Kesatuan-kesatuan ini berhasil mengadakan penghambatan terhadap serbuan pasukan-pasukan musuh. Dengan demikian maka semua rentjana dikota tjukup untuk dikerdjakan.

Pasukan-pasukan musuh barulah pada djam 14.45 masuk kota. Gerakan mereka terus madju dan berhasil menduduki kota seluruhnja.

Suara tembakan pada hari itu masih terdengar dimana-mana, jang berarti perlawanan terus didjalankan. Pada waktu itu djuga Kabinet mengadakan sidang darurat di Kepresidenan Jogjakarta jang memutuskan, bahwa Presiden dan Wakil Presiden serta para Menteri tetap tinggal dikota, Pemerintahan sementara dipertjajakan kepada Sjafrudin Prawiranegara di Sumatera, sedang Kesatuan-kesatuan Tentara jang dipimpin langsung oleh Panglima Besar Sudirman meninggalkan kota, akan terus mengadakan perlawanan setjara gerilja. Keadaan pasukan-pasukan kita sangatlah sulit, karena satu sama lain tak ada hubungan. Dengan sendirinja sukar bagi pimpinan untuk mengadakan pembagian tugas. Konsolidasi dapat tertjapai dalam tempo 5 hari. Umumnja kesatuan-kesatuan berada tidak djauh dari kota. Dengan susah pajah, maka dapat diadakan pembagian sektor-sektor, sehingga dapatlah diadakan pembagian tugas.

Belanda sudah mulai tidak aman. Suatu serangan setjara besar-besaran untuk mengembalikan kepertjajaan rakjat dipandang perlu. Maka setelah persiapan didjalankan dengan saksama pada tanggal 29 Desember 1948 pasukan-pasukan kita sudah bergerak madju kepangkal penjerangannja masing-masing mulai djam 16.00. Demikian maka pada djam 19.00 kita bergerak madju kesemua djurusan. Pertempuran terdjadi diseluruh kota dari djam 21.00 hingga 04.00 pagi. Belanda mempergunakan segala peralatannja. Serangan ini berhasil sesuai dengan rentjana dan rakjat mulai pertjaja.

Pada mulanja Belanda tak mengira, bahwa pada suatu saat T.N.I. akan muntjul. Mereka menganggap bahwa T.N.I. sudah hantjur.

Dalam kita mendjalankan perang gerilja itu, kita memakai taktik-taktik, hilang kalau diserang dan muntjul kalau menjerang; kita harus menghemat disegala bidang, karena kita harus berperang lama.

Tak dapat dilupakan ialah serangan jang kita lakukan pada tanggal 1 Maret 1949, dan jang terkenal dengan sebutan 6 djam di Jogjakarta. Serangan 1 Maret ini ternjata tidak hanja mendapat keuntungan materiil, tetapi djuga politik; karena dengan serangan jang hebat itu, propaganda Belanda hilang musnah seperti dihembus angin. Propaganda Belanda bahwa T.N.I. telah hantjur, Republik Indonesia sudah bubar dan sebagainja. Dan dapatlah memberi kepertjajaan lagi kepada semua orang jang menaruh simpati kepada kita. Pun mereka jang membantu Belanda mendjadi bimbang. Di P.B.B. wakil kita merasa mendapat backing jang kuat. Setelah serangan 1 Maret 1949, itu Belanda mengadakan gerakan besar-besaran di Wonosari, karena mereka mengira bahwa Wonosari merupakan basis dari T.N.I. Dus, harus dihantjurkan. Gerakan ini betul-betul didjalankan oleh Belanda setjara besar-besaran dengan 1 bataljon infanteri, 30 pesawat pengangkut, 10 jagers dan bombers. Tetapi sudah tentu tak berhasil sama sekali, karena gerilja berada dimana-mana didekat Markas Belanda didalam kota.

Bagi setiap tenaga gerilja jang turut serta ditengah perdjoangan bangsa pada waktu itu, saat-saat itu adalah merupakan "the best years of our life", betul-betul jang tak dapat dilupakan.

Pada tanggal 28 Djanuari 1949 Dewan Keamanan menerima resolusi jang diusulkan Amerika Serikat, Tiongkok, Norwegia dan Cuba, walaupun wakil Belanda dalam Dewan Keamanan

menentang, antara lain mengenai perintah penghentian permusuhan, pembebasan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dan mengembalikannja ke Ibukota Republik Indonesia Jogjakarta.

Sebagaimana diketahui pada hari penjerbuan Tentara Belanda ke Ibukota R.I. Jogjakarta pada tanggal 19 Desember 1948, Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri-menteri oleh tentara Belanda dibawa dan ditempatkan dipengasingan Brastagi dan Bangka/Sumatera.

Pada tanggal 22 Djuni 1949 sidang formil delegasi Republik Indonesia B.F.O. dan Belanda dibawah pengawasan Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa, dengan hasil tertjapainja persesuaian mengenai penarikan mundur tentara Belanda dari Jogjakarta dan penentuan sjarat-sjarat dan waktu diadakannja Konperensi Medja Bundar (K.M.B.). Selandjutnja pada tanggal 6 Djuni, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta serta para pembesar-pembesar lainnja tiba kembali di Jogjakarta.

Demikian achirnja Perang Kemerdekaan jang dapat djuga disebut "Physical Revolution" jang dimulai disekitar detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 dan formiinja berachir dengan persetudjuan Konperensi Medja Bunder (K.M.B.) pada tanggal 2 Nopember 1949.

Untuk kenang-kenangan jang tak dapat dilupakan selama Revolusi Physik sebagai pengambil peranan dan penggerak para Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dengan sendjata, antara lain:

a. Sutomo (Bung Tomo) pada tahun 1945 di Surabaja.
b. Major Djenderal Purnawirawan Dr. Mustotpo sebagai Komandan T.K.R. Djawa-Timur pada tahun 1945 di Djatim.
c. Almarhum Letnan Djenderal Urip Somohardjo sebagai Penjusun Tenttara tahun 1945.
d. Djenderal Hamengku Buwono sebagai Menteri Koordinator Keamanan, Perang Kemerdekaan ke-II.
e. Djenderal Dr A. H. Nasution (waktu itu berpangkat Kolonel) sebagai Perentjana Teknik Perang Gerilja pada Perang Kemerdekaan ke-II.

Dan jang terachir adalah Almarhum Panglima Besar Djenderal Sudirman jang diakui sebagai Bapak Tentara, suri tauladan sebagai pradjurit sedjati, seorang Panglima Tentara jang

dalam keadaan sakit tetap memimpin anak buahnja dari atas tandu, waktu Perang Kemerdekaan Indonesia ke-II.

Semua perbuatan serta suri tauladannja sebagai Pedjoang Kemerdekaan R.I. tetap mendjiwai para Veteran Pedjoang Kemerdekaan dimasa damai dan sebagai Pedjoang Revolusi pada waktu sekarang dan jang akan datang, dimana kita dewasa ini berada dialam Revolusi Indonesia periode pembangunan menurut adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno; adalah mereka jang telah kembali dimasjarakat dan mereka jang masih terikat dinas Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

6. Konperensi Medja Bundar (K.M.B.).

Telah mendjadi kenjataan meskipun tentara Belanda, menjerang dan menduduki Ibukota Negara Indonesia Jogjakarta mulai tanggal 19 Desember 1948, bahkan seluruh wilajah Republik Indonesia dapat mereka kuasai, namun dunia internasional, terutama organisasi dunia P.B.B. tidak dapat begitu sadja dikelabuinja.

Adanja offensif militer jang dibuktikan oleh kesatuan-kesatuan Pedjoang Kemerdekaan R.I. dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai tulang-punggungnja, dengan adanja serangan-serangannja pada tanggal 19 Desember 1948, teristimewa terhadap kota Jogjakarta pada tanggal 1 Maret 1949 jang terkenal dengan sebutan „6 djam di Jogja" itu membuka mata dunia, bahwasanja Republik Indonesia belum hantjur sama sekali, sebagaimana digembor-gemborkan oleh fihak Belanda.

Dengan titik tolak tanggal 22 Djuni 1949, terselenggaranja sidang formil delegasi Republik Indonesia, B.F.O. dan Belanda dibawah pengawasan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCI), dapat menelorkan persetudjuan K.M.B. pada tanggal 2 Nopember 1949; Persetudjuan K.M.B., merupakan hasil perdjoangan Bangsa Indonesia, jang membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jang membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, merupakan perdjoangan dibidang diplomasi jang didukung oleh perdjoangan bersendjata jang dapat dikatakan suatu hasil jang tidak sempurna. Bagi para Pemimpin Bangsa dan Negara Indonesia jang progresif-revolusioner, kemenangan tersebut merupakan hasil sementara, jang dapat kita tjapai.

Persetudjuan K.M.B. segera diikuti oleh penjerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia; di Djakarta penjerahan kekuasaan Belanda dari Lovink kepada Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX, sebagai Wakil Indonesia; di Jogjakarta penjerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (R.I.S.), bentuk pemerintahan jang dituntut oleh fihak Belanda, pada persetudjuan K.M.B. tanggal 2 Nopember 1949 tersebut, dimana Negara Republik Indonesia dan Negara-negara bagian (buatan Belanda) sematjam Negara Indonesia Timur (N.I.T.), Negara Kalimantan dan lain-lain; mendjadi Negara jang berbentuk Serikat (federasi). Selandjutnja lembaga-lembaga, alat-alat kekuasaan Belanda diserahkan kepada R.I.S. termasuk kesatuan-kesatuan Knil dan pegawai-pegawai Belanda dan kelengkapan R.I.S., antara lain Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (A.P.R.I.S.) jang terdiri dari T.N.I. pendjelmaan dari B.K.R./T.K.R./T.R.I. jang merupakan perdjoangan rakjat jang patriotik dengan semangat 17 Agustus 1945, dan Tentara Knil dari Kolonialis Belanda, jang diatur dengan Undang-undang Sementara R.I.S. pula. Dengan demikian semendjak tahun 1950, Bangsa Indonesia hidup dimasa pantjaroba; semendjak itu kehidupan Bangsa Indonesia tidak lagi berpidjak pada Undang-undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia mendjelang zaman baru, dimana liberalisme mulai tumbuh dengan suburnja. Benar utjapan Bung Karno, Pemimpin Besar Revolusi kita, Bangsa Indonesia, bahwa:

— Penjelewengan dalam revolusi kita itu dibibiti-dimodali oleh dualisme, setelah lahirnja konperensi Medja Bundar di Den Haag, Negeri Belanda.
— Djuga penjelewengan itu dibibiti oleh adanja „Dekrit 1 Nopember" atau dinamakan djuga „Manifesto Nopember 1945".

Dari dua matjam bibit-bibit tersebut telah berhasil menghidupkan rasa jang mendalam mengenai kedaerahan, kesukuan dan kegolongan. Masing-masing berdjoang dalam revolusi, bukan lagi untuk kepentingan negara dan bangsa kesatuan, tapi diselewengkan dengan menghidup-hidupkan „ke-akuan" dalam bentuk jang lebih besar.

Lebih sengit lagi setelah memuntjak dan bergeloranja gerakan daerah, jang ditjetuskan dengan pemetjah-belahan bangsa dan negara melalui apa jang dinamakan proklomasi P.R.R.I., Permesta, jang lebih dulu telah pula dimulai oleh gerakannja

Kartosuwirjo, Daud Bureuh dan Kahar Muzakar. Kedjadian ini telah menelan waktu tidak kurang dari 14 tahun, dapat dikatakan berachir pada tahun 1962, tetapi bekas-bekasnja masih tjukup dirasakan segala efeknja masih djelas terlihat.

Kita Bangsa Indonesia masih ingat usaha para Pemimpin Negara, jang berichtiar keras guna menjelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang tertjinta ini dengan adanja:

— Pemilihan umum.
— Musjawarah Nasional.
— Musjawarah Nasional Pembangunan.

Jang kesemuanja bertudjuan agar Negara kita djangan djatuh kedalam djurang. Namun segala daja-upaja ini gagal, ibarat bibit jang baik ditanam ditanah dan diiklim jang tidak tjotjok.
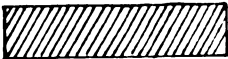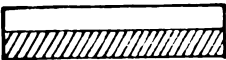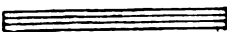
Kaum Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia, jang merupakan sebagian dari Bangsa Indonesia, tidak luput dari pengaruh perkembangan masjarakat pada waktu itu. Djuga Pemerintah telah memberikan uluran tangan dalam membina alih tugas mereka dimasa-damai, dimasa persiapan Pembangunan Negara Indonesia untuk masa depan, dengan mendirikan Dewan/Badan Rekonstruksi Nasional D.R.N. — B.R.N. dan chususnja untuk kaum Peladjar Pedjoang ialah Kantor Demobilisan Peladjar (K.U.D.P.) jang hasilnja sangat tidak memuaskan itu, jang berdjalan untuk waktu selama 6 tahun lamanja, sehingga atas usaha para bekas Komandan jang merasa berkewadjiban moril, guna mengembalikan mereka pada rel revolusi, dapat berhasil dengan lahirnja Undang-undang No. 75 tahun 1957, jang didahului adanja Kongres Pedjoang Bersensendjata ke I, ialah Undang-undang jang memberikan kedudukan hukum bagi Kaum Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia, jang dapat dinamakan „Anak Kandung Revolusi" dan sekaligus Alat Revolusi Indonesia itu.

I C H T I S A R : GERAKAN-GERAKAN PEDJUANG KEMERDEKAAN R.I. SELAMA „REVOLUSI PHISIK"

No.	Propinsi-propinsi	1945	1946	1947	1948	1949	1950
1.	SUMATERA UTARA						K M B.
2.	SUMATERA TENGAH						-,,-
3.	SUMATERA SELATAN						-,,-
4.	DJAKARTA RAYA						-,,-
5.	DJAWA BARAT						-,,-
6.	DJAWA TENGAH						-,,-
7.	DJAWA TIMUR						-,,-
8.	JOGJAKARTA						-,,-
9.	SUNDA KETJIL						-,,-
10	KALIMANTAN						-,,-
11.	SULAWESI						-,,-
	MALUKU/IRIAN BARAT						-,,-

KETERANGAN : Gerakan-gerakan Kesatuan

a. I. [hatched bar] = Gerakan berbentuk barisan

II. [half-hatched bar] = Gerakan berbentuk gerilja

III. [lined bar] = Gerakan berbentuk illegal

b. 1. PROPINSI SUMATERA-UTARA:

Sebab tekanan tentara Belanda tahun 1946 dan pertengahan tahun 1948, Kesatuan Perdjoangan Rakjat menghindari pertempuran-pertempuran besar dan mengadakan pertempuran-pertempuran ketjil untuk konsolidasi kekuatan.

2. PROPINSI SUMATERA-TENGAH:

Sebab blokade tentara Belanda, sehingga keadaan ekonomi sulit, Kesatuan Perdjoangan Rakjat memakai taktik bertempur dan menjusun kekuatan. Tahun 1947 Divisi Banteng (T.N.I.), Komando Sumatera berdiri (Kolonel Ismael Lengah).

3. PROPINSI SUMATERA-SELATAN:

Tahun 1945 dan tahun 1946, Kesatuan Perdjoangan Rakjat menjusun kekuatan dan pertempuran-pertempuran ketjil dan mulai Tahun 1947, tentara Belanda masuk Sumatera Selatan.

4. PROPINSI DJAKARTA-RAYA:

Pada tahun 1946, karena gentingnja situasi, Ibukota pindah dari Djakarta ke Jogjakarta, Kesatuan Perdjoangan Rakjat, bergerak setjara illegaal.

5. PROPINSI DJAWA-BARAT:

Karena perdjandjian „Renville" pada pertengahan tahun 1947 dan tahun 1948, Kesatuan Perdjoangan Rakjat mengosongkan daerah-daerah dibelakang apa jang dinamakan garis van Mook, pindah kedaerah de

fakto Republik Indonesia dan pada tahun 1948 mereka kembali ke Djawa-Barat.

6. PROPINSI DJAWA-TENGAH:

Selama 5 tahun, Kesatuan-kesatuan Perdjoangan Rakjat bertempur terus-menerus, dengan pengiriman kesatuan-kesatuan kesemua front.

7. PROPINSI DJAWA-TIMUR:

Selama 5 tahun, Kesatuan Perdjoangan Rakjat bertempur terus, dengan pengiriman kesatuan-kesatuan kesemua front.

8. JOGJAKARTA (D.I.J.) :

Selama 5 tahun, Kesatuan Perdjoangan Rakjat bertempur terus dengan pengiriman kesatuan-kesatuan kesemua front.

9. PROPINSI SUNDA KETJIL:

Tahun 1946 setelah Letnan Kolonel Ngurah Rai gugur dan Negara Indonesia Timur (menurut perdjandjian Linggardjati), Kesatuan Perdjoangan Rakjat bergerak setjara illegaal.

10. PROPINSI KALIMANTAN:

Mulai Proklamasi sampai Tahun 1949, kesatuan Perdjoangan Rakjat tidak mengadakan gerakan-gerakan besar-besaran, ketjuali Tahun 1949 s/d 1950 setelah A.L.R.I. Div. IV (T.N.I. Div. Lambung Mangkurat dibawah pimpinan panglima Letnan Kolonel Hasan Basry).

11. PROPINSI SULAWESI:

Tahun 1946 Perdjuangan Rakjat memuntjak, karena aksi teror tentara Belanda dipimpin Kapten Westerling. Setelah N.I.T. berdiri, aksi gerakan setjara illegaal.

12. PROPINSI MALUKU:

Selama 5 tahun Kesatuan Perdjoangan Rakjat bergerak setjara illegaal.

II. USAHA PEMULIHAN KE MASJARAKAT.

1. Pendjadjahan dan pengaruhnja.

Betapa kedjamnja penindasan terhadap budi dan daja jang dilakukan oleh suatu bangsa jang hendak menguasai kekajaan jang berlimpah-limpah dari sesuatu bangsa. Usaha apapun dilakukan, bila perlu dengan djalan pembunuhan, agar bangsa jang didjadjah tak mengenal kebudajaan jang ia miliki sendiri.

Bangsa Indonesia adalah satu bangsa jang paling banjak makan garam pendjadjahan. Segala tjara dari kolonialis Belanda dilakukan terhadap Bangsa Indonesia, agar bangsa kita ikut sadja melakukan apa jang mendjadi kehendak mereka. Kalimat jang simple menjatakan, bahwa Bangsa Indonesia diperbudak oleh Belanda. Begitu kedjamnja pendjadjah terhadap Bangsa Indonesia, sehingga kebudajaan jang berkembang merupakan satu kewadjaran dan mendjadi tradisi. Bahkan dalam beberapa hal apa jang diimpor dari barat, merupakan ketinggian achlak bagi Bangsa Indonesia jang hampir tak mengenal kepribadiannja.

Individualisme, liberalisme dan feodalisme adalah faham-faham jang berpengaruh terhadap seluruh aspek-aspek kehidupan Bangsa Indonesia. Aspek ekonomi, politik dan cultuur.

Masjarakat Indonesia dengan bentuk-bentuknja sebagai warisan kolonial Belanda jang terlupakan diwaktu-waktu berkobarnja semangat perdjoangan kemerdekaan disekitar 17 Agustus 1945, diingatkan kembali atas kesalahan-kesalahan Bangsa Indonesia sendiri dengan ditumbuhkannja multi partai sistim pada bulan Nopember 1945. Sistim liberal ini membawakan kembali fikiran dan perasaan orang untuk kepentingan golongan dan diri sendiri. Dan membenarkan anggapan, bahwa hidup dizaman pendjadjahan Belanda adalah kehidupan jang normaal.

Hal demikian bukan tidak berpengaruh terhadap para pedjoangnja. Bahkan tidak djarang mesti berfikir untuk dua front. Menghadapi Belanda dan menghadapi bangsanja sendiri.

Sistim liberal jang berkembang, memang memberikan kesempatan untuk berfikir demi golongan dan pribadi. Dan memberi kemungkinan untuk membiarkan tumbuhnja segala sistim peninggalan Belanda. Djadi kesadaran nasional dari masjarakat Bangsa Indonesia pada umumnja diwaktu itu, meng-

artikan kemerdekaan adalah kebebasan dari bangsa asing. Oleh sebab itu tak mengherankan, kalau setelah penjerahan kedaulatan hanja timbul fikiran untuk membangun dalam arti sempit.

Bagi para pedjoang jang progresif-revolusiner kemenangan jang ditjapai pada tanggal 27 Desember 1949, adalah satu taraf kemenangan politik, dimana Bangsa Indonesia harus masih tetap berdjoang terus untuk menghantjurkan sisa-sisa kolonialisme disegala bidang kehidupan masjarakat. Tetapi golongan ini hanja merupakan eksponen dari para Pedjoang Kemerdekaan para umumnja jang mengikuti arus masjarakat jang berkembang.

2. Rekonstruksi Nasional.

Sebagai negara muda jang baru sadja diakui kedaulatannja oleh kolonialis Belanda jang selama 350 tahun mendjadjahnja, Indonesia memberanikau dan mentjoba untuk menjempurnakan Angkatan Perangnja, serta mengalihkan tugas para Pedjoang Kemerdekaan jang tak mampu lagi, jang tjatjat badaniah maupun rochaniah, serta jang menghendaki keluar dari Angkatan Perang, kedalam proces produksi masjarakat. Sangat mudah untuk dimaklumi, bila dalam melakukan usaha jang disebut terachir ini mengalami kesulitan-kesulitan jang hampir-hampir sadja sukar untuk mendapatkan djalan keluar. Hal ini bukan sadja disebabkan karena kemudaan Negara ini, tetapi aspek-aspek lain didalam Periode Survival sesudah perdjuangan bersendjata itu dilalui, sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha itu. Sesuatu ide baik, biasanja kandas atau tak berhasil, kalau aspek-aspek ekonomi, politik dan kebudajaan jang ditimbulkan oleh konstelasi masjarakat diwaktu itu merupakan rintangan.

Masjarakat warisan kolonial sesudah pengakuan kedaulatan ditahun 1950 adalah masjarakat masih kapitalistis, feodalistis dan liberalistis. Disamping itu faktor pelaksanaan dari usaha pengalihan tugas jang tambal sulam, serta faktor subjektif dimana para pedjoang Kemerdekaan jang belum matang dalam doktrin revolusi sangat menentukan berhasil atau tidaknja usaha itu sendiri.

Uraian diatas bukan dimaksud untuk mentjari biang keladi, siapa jang salah diluar idee jang telah diletakkan sebagai landasan pelaksanaan, sedang ide itu sendiri bila ditindjau dari segi tudjuan revolusi masih sangat terbatas; tetapi dikehendaki agar dapat menindjau perkembangan usaha-usaha didalam

bidang pengalihan tugas ini setjara objektif. Objektif dilihat dari garis dan tudjuan Revolusi Indonesia.

Seperti diketahui haluan dan tudjuan Revolusi Indonesia itu baru tegas sesudah lahir dekrit P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada tanggal 5 Djuli 1959, dimana Rakjat dan Bangsa Indonesia berpidjak kembali kepada Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dimana selandjutnja ditegaskan garis besar haluan Negara, jang merupakan haluan dan tudjuan Revolusi Indonesia, jaitu Manifesto Politik R.I. (Manipol), Usdek. Dimana tiap-tiap ide dan usaha dalam sesuatu bidang harus diintegrasikan atau merupakan surordinasi dari haluan Negara.

Dinjatakan usaha-usaha dalam pengalihan tugas bagi para Pedjuang Kemerdekaan mempunjai ide baik, karena didalam kemauan ditindjau dari segi hukum jang ada diwaktu itu telah mempunjai aspek-aspek jang progresif. Tetapi diakui tidak keseluruhannja dan menjeluruh (integral), serta arahnja masih terbatas, ialah: mengembalikan mereka kemasjarakat.

Lagi pula landasan jang dipakai bersifat tambal-sulam (reformistis). Untuk itu sajogyanja ditindjau lebih dahulu dari ketentuan-ketentuan hukumnja jang tertera dalam:

(a) Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1949 tentang, penghargaan Pemerintah terhadap peladjar jang telah berbakti; jang termaktub dalam konsiderasi, jang berbunji :

Menimbang: perlu mengadakan peraturan tentang penghargaan Pemerintah terhadap para peladjar, karena telah menunaikan kewadjiban berbakti selama revolusi nasional guna menegakkan Negara;

Didalam penetapan pasal 1 ajat 1, berbunji: Pemerintah memberi penghargaan kepada para peladjar perdjoangan jang telah menunaikan kewadjiban berbakti guna menegakkan Negara sedjak tanggal 17 Agustus 1945.

Dan didalam ketentuan Peraturan ini telah diberikan klasivikasi penghargaan menurut nilai-nilai perdjoangan masing-masing.

Sesuai dengan dasar filosofie, jang menjatakan; „Satu bangsa jang besar, adalah bangsa jang sanggup menghargai djasa para pahlawannja".

Djadi ide untuk memberi penghargaan kepada para Pedjoang Kemerdekaan adalah suatu ide jang baik, mempunjai aspek filosof jang revolusioner. Jang pasti akan memberi pengaruh

kepada angkatan-angkatan selandjutnja atau generasi jang akan datang.

Hanja didalam materi ketentuan ini mengandung unsur-unsur jang kurang positif. Nilai hasrat pengorbanan jang setjara tulus dan ichlas diwaktu itu lebih tinggi dari perasaan wadjib. Lagi pula perasaan kewadjiban diwaktu itu adalah sukarela, bukan karena adanja ketentuan Negara jang mewadjibkan seperti konvensi-klasik jang berlaku di negara-negara lain dalam penjusun kekuatan angkatan perangnja.

(b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat, Nomor: 6 Tahun 1950; didalam konsiderasinja berbunji:

Menimbang: perlu mengadakan peraturan sementara jang mendjamin kehidupan anggota T.N.I. jang pada penjerahan kedaulatan tidak masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat;

Didalam penetapan Pasal 3 ajat 1, berbunji: Kepada anggota T.N.I. jang mendjadi tidak tjakap untuk dinas ketentaraan karena tjatjat badan atau ingatan, ... dan seterusnja ....

Didalam ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah, tersimpul pula satu hasrat Pemerintah untuk memberi penghargaan kepada para Pedjoang Kemerdekaan jang berasal dari Tentara Nasional Indonesia (T.N.I.). Tetapi ide atau hasrat baik itu dituangkan dalam bentuk-bentuk klasik-konvensionil jang biasa berlaku bagi tentara pada umumnja, jaitu balas djasa dengan bentuk bantuan djaminan hidup selama belum mempunjai pekerdjaan baru.

Disini tidak ada pengchususan jang memberi penghargaan jang bersifat penghormatan sebagian Pedjoang Kemerdekaan, jang didjiwai oleh rasa hormat terhadap ketulusan dan keichlasan berkorban setjara sukarela.

Posisi hukumnja sudah djelas berbeda — serta lebih lemah dari pada Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1949.

(c) Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 1950, tentang Biro Demobilisasi Nasional, termaktub dalam konsiderasinja berbunji; bahwa sangat perlu mengadakan persiapan-persiapan agar lantjar djalan-djalannja demobilisasi dan karena itu dianggap perlu untuk mendirikan suatu badan, jang diberi tugas untuk mempersiapkan kembalinja orang-orang jang didemobilisir kedalam masjarakat serta menempatkan mereka setepat-tepatnja;

Ketetapan pasal 4 ajat (1) dari Peraturan ini berbunji:

Tugas dari para Biro tersebut adalah memungkinkan kembalinja mereka, jang oleh Menteri Pertahanan ditundjuk untuk didemobilisir kedalam masjarakat dengan djalan peralihan teratur serta dipandang dari sudut sosial-ekonomis dapat dipertanggung-djawabkan.

Dengan Peraturan Pemerintah tersebut kiranja dimaksud oleh Pemerintah untuk mendirikan satu badan jang memikirkan untuk keseluruhannja, baik bagi Demobilisan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat jang berasal dari tentara Belanda/K.N.I.L. maupun bagi Pedjuang Kemerdekaan jang berasal dari T.N.I., termasuk Peladjar Pedjoang. Dan didalam ketentuan ini tersimpul pula, bahwa Peraturan-peraturan jang terdahulu jang bersangkut-paut dengan Demobilisasi adalah kurang sempurna, serta banjak akibat-akibat jang negatif, sehingga perlu adanja sebuah badan jang dapat mempeladjari/menjelidiki dan mengadakan kerdja-sama dengan lembaga-lembaga/instansi-instansi lain jang bersangkut-paut dengan masalah ini.

Hal ini dapat dilihat didalam instruksi mengenai tugas dan kerdja Biro Demobilisasi Nasional, sebagai follow-up dari Peraturan Pemerintah tersebut pasal 2, ajat 1, 2 dan 3 jang berbunji sebagai berikut:

Biro mempunjai tugas:

1. Memikirkan dan mentjarikan penjelesaian jang praktis tentang soal-soal mengenai kepentingan mereka jang didemobilisir, pula soal-soal jang bergandengan dengan kembalinja mereka kedalam masjarakat;
2. Menjelidiki dengan tjara bagaimana Pemerintah dapat sebaik-baiknja menolong mereka jang didemobilisir dan djika perlu memadjukan usul-usul;
3. Melantjarkan kerdja-sama jang baik antara badan-badan Pemerintah dan badan-badan partikelir (Palang Merah, Organisasi Buruh, Organisasi-organisasi madjikan dan sebagainja);

Baik Peraturan Pemerintah tersebut maupun instruksi pelaksanaannja, kelihatannja rasionil, tetapi disamping itu mengandung unsur-unsur kehendak adanja penghapusan keistimewaan terhadap para Pedjoang Kemerdekaan. Sepatah katapun dari ketentuan ini, tak mengandung unsur-unsur revolusioner, atau penghargaan/penghormatan terhadap para pedjoangnja atau-

pun pahlawannja. Rasionilnja peraturan ini ialah, membawakan satu prosedur jang hati-hati dan mendidik serta dihasratkan satu persiapan penjelesaian jang menjeluruh.

(d) Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 1951.

Didalam konsiderasinja berbunji sebagai berikut:

M e n i m b a n g :

a. bahwa pada waktu ini setelah kemerdekaan Indonesia tertjapai djumlah jang besar dari para pedjoang kemerdekaan nasional, jakni para bekas anggota Angkatan Perang, para bekas anggauta badan-badan pembantu Angkatan Perang dan bekas badan-badan perdjoangan bersendjata belum mempunjai lapangan pekerdjaan jang tertentu dimana mereka dengan teratur dapat menjumbangkan tenaganja untuk mengisi kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam usaha-usaha untuk memperkuat dan membangun Indonesia.

b. bahwa perlu dengan segera diadakan usaha-usaha oleh Pemerintah setjara luas untuk memberikan kesempatan kepada para pedjoang kemerdekaan nasional jang tersebut diatas untuk menjumbangkan tenaganja dalam usaha untuk memperkuat dan membangun Indonesia dan dalam pada itu djuga membuka djalan agar para pedjoang kemerdekaan nasional itu dikemudian hari dapat hidup dalam masjarakat dengan mata pentjaharian jang lajak.

c. bahwa tugas Biro Demobilisasi Nasional jang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1950 kurang luas untuk maksud tersebut sub a dan b diatas.

Pasal 2 ajat 1:

a. Membuat rentjana-rentjana usaha rekonstruksi nasional;
b. Mengatur dan mengawasi pekerdjaan Biro Rekonstruksi Nasional;

Pasal 2 ajat 2: Dewan Rekonstruksi Nasional bertanggung djawab kepada Dewan Menteri.

Pasal 4 ajat 1: „Rekonstruksi" Nasional jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan maksud Pemerintah untuk membuka djalan bagi mereka jang disebut dalam ajat (2) pasal ini untuk hidup dalam mata pentjaharian jang lajak.

Pasal 4 ajat 2: Maksud Pemerintah tersebut dalam ajat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dewan dan Biro Rekonstruksi Na-

sional dengan mentjiptakan pekerdjaan-pekerdjaan dalam lapangan pertahanan dan pembangunan jang dapat dilakukan oleh:

a. para anggota Angkatan Perang diluar susunan organik dan bekas anggota Angkatan Perang jang belum mendapat lapangan pekerdjaan didalam masjarakat;
b. para tenaga bekas anggota badan-badan perdjoangan bersendjata jang ada didalam pemeliharaan Pemerintah sebagai akibat penglaksanaan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1950;
c. para tenaga bekas anggota badan-badan perdjoangan bersendjata selain jan gdimaksud sub b diatas jang belum mendapat lapangan pekerdjaan dalam masjarakat.

Bila ajat 2 dari pasal 4 ini diperlengkapi dengan ketentuan-ketentuan dalam keputusan Menteri Pertahanan Nomor: 193/M.P./50 tentang Demobilisasi, jang tertera dalam pasal 1, arti Demobilisasi jang tersebutkan dibawah ini, mendjadi lengkaplah unsur-unsur pedjoang kemerdekaan.

Arti Demobilisasi (pasal 1 Keputusan Menteri Pertahanan No. 193/M.P./50):

1. Jang diartikan dengan demobilisasi ialah melepaskan tenaga jang dikerahkan diwaktu perang aksi militer ke I dan II dari ikatan Angkatan Perang.
2. Tenaga jang dimobilisir dibagi dalam golongan-golongan:
   a. anggota T.N.I. jang tidak masuk formasi;
   b. anggota Brigade XVII jang tidak melandjutkan ikatan dinas tentara;
   c. semua anggota mobilisasi peladjar;
   d. semua tenaga darurat jang dikerahkan pada waktu aksi militer ke-II

terdiri dari:

1. bekas anggauta tentara jang telah diberhentikan karena rasionalisasi tahun 1948 dan lain-lain sebab dan jang menggabungkan diri lagi;
2. anggota kelasjkaran;
3. pegawai sipil jang ada dalam ketentaraan;
4. tenaga rakjat.

Dengan Peraturan Pemerintah ini Pemerintah berkeinginan untuk memberikan penghargaan kepada seluruh Pedjoang Kemerdekaan setjara menjeluruh, dan sekaligus mentjabut Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1950, karena menganggap peraturan itu tidak lengkap. Dimana sama sekali melupakan unsur terpenting dari perdjuangan kemerdekaan, jang djustru harus mendapatkan perhatian jang chusus.

Pemerintah dengan ketetapan ini berkehendak menjempurnakan dan menstimulir Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: 193/MP/50, dan mengadakan pembagian pekerdjaan sebaik-baiknja antara Angkatan Perang dan Biro Rekonstruksi Nasional sebagai pelaksana dari sebuah Dewan jang bertanggung-djawab kepada Dewan Menteri.

Penarikan keatas dari Pengurusan Pedjoang Kemerdekaan ini, maka pada hakekatnja merupakan satu anggapan terhadap masalah tersebut sebagai masalah nasional.

Tetapi maksud untuk menaruh masalah itu sebagai masalah nasional dan adanja pengurusan setjara integraal, belum dapat diladeni oleh aparat jang mampu menguasai keadaan dan menggunakan keleluasaan bergerak guna mendjamin pelaksanaan tugas tersebut.

Seperti peraturan-peraturan jang terdahulu, maka peraturan ini masih mempunjai pandangan jang terbatas dan tidak konkrit menilai penghargaan jang tepat bagi para perdjoangnja. Hanja tertera dalam ketentuan ini pentjaharian jang lajak. Tetapi djelas lebih madju dan berbeda setjara prinsipiil dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1950.

Ini mudah dimengerti, timbulnja Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1951 ini, terdjadi segera sesudah beralihnja kekuasaan Republik Indonesia Serikat (R.I.S.) ke Republik Indonesia (R.I.).

(e) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952 tentang susunan dan tugas Dewan serta Biro Rekonstruksi Nasional, didalam konsiderasinja berbunji sebagai berikut:

Menimbang:

a. bahwa organisasi usaha Rekonstruksi Nasional berdasarkan atas Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1951 perlu disesuaikan dengan keadaan;
b. untuk itu perlu dibuat peraturan baru jang memakai dasar Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1951 jang kemudian

sudah ditambah dengan dibubuh tambahan dan perubahan seperlunja.

Dan didalam peraturan ini jang terpenting ialah perobahan materi, dimana pembiajaan dari pelaksanaannja dibebankan kepada Kabinet Perdana Menteri, jang sebelumnja berdasar Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1951 dibebankan kepada Kementerian jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan. Dengan ini rupa-rupanja diinginkan terpusatnja pengeluaran dan pertanggungan-djawab dalam pembiajaan.

Demikian terdjadi berkali-kali perubahan peraturan-peraturan. Ada jang disbabkan oleh hal-hal jang prinsipiil; ada jang disebabkan oleh alasan technis semata-mata.

Demikian pula terdjadi pada tahun 1954.

Dengan alasan perobahan perkembangan keadaan, pengurusan Pedjoang Kemerdekaan dipindahkan dari Dewan Menteri kepada Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1954, tentang Urusan Rekonstruksi Nasional.

Dan peraturan ini berlaku sampai lahirnja Undang-undang nomor 75 tahun 1957, tentang Veteran Pedjoang Kemerdekaan.

Melihat ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan jang berlaku bagi Pedjoang Kemerdekaan selama tudjuh tahun, dari tahun 1949 sampai tahun 1956, maka tergalilah keinginan-keinginan Pemerintah serta bagaimana keinginan-keinginan itu dilaksanakan.

a. bahwa Pemerintah berusaha dengan sungguh-sungguh agar pengurusan Pedjoang Kemerdekaan itu dapat berdjalan dengan lantjar. Tetapi usaha-usaha itu masih dilandasi oleh keinginan jang semata-mata untuk mengembalikan para Pedjoang Kemerdekaan kedalam produksi proses masjarakat. Berarti diwaktu itu, belum berkembang satu pengertian tentang betapa besar potensi mereka itu bagi Revolusi Indonesia;

b. bahwa berkali-kali terdjadi penggantian peraturan, disebabkan tidak berhasilnja usaha-usaha jang didjalankan, sehingga perlu adanja penindjauan kembali tentang pengaturannja maupun pelaksanaannja. Selain itu sering kali terdjadi, karena perpindahan kekuasaan (pergantian Kabinet) dari satu tangan ketangan jang lain;

c. bahwa faktor-faktor subjektif, dimana Pedjoang Kemerdekaan baru dalam taraf pengertian: „berdjoang untuk

membela Kemerdekaan dan mengenjahkan Belanda" sebagai ide-nja; dan mengalami perobahan-perobahan mental akibat perdjoangan bersendjata, tidak masuk sebagai bahan pertimbangan dan memberikan landasan usaha-usaha pengurusan;

d. bahwa tidak disadari oleh konseptor-konseptor, perobahan-perobahan peraturan dengan tidak sekaligus dapat menjelesaikan (doorslag geven), atau pengaturan tambal-sulam; akan merupakan tambahan penderitaan bagi Pedjoang Kemerdekaan sebagai subjek, sehingga menimbulkan masalah-masalah baru;

e. adanja berbagai-bagai badan pengurusan, untuk masing-masing penderita (objek), dengan tidak dilandasi oleh kesatuan jang menjeluruh merupakan faktor sendiri dalam membuat pengurusan lebih kompleks seperti:
   — K.U.D.P. diperuntukkan Pedjoang Kemerdekaan jang berasal dari peladjar.
   — Biro Rekonstruksi Nasional, diperuntukkan bagi Bekas Pedjoang jang berasal dari Kelaskaran. Tetapi sesuai dengan ketentuannja memungkinkan bagi Demobilisan, maupun jang dari Peladjar.
   — Badan Penampungan Bekas Anggota Tentara bagi Bekas-bekas T.N.I.

Masing-masing dengan Peraturan-peraturan tersendiri. Seolah-olah ada perbedaan fasilitas diantara sesama Pedjoang Kemerdekaan. Bisa terdjadi pula bukan Pedjoang Kemerdekaan mendapat fasilitas lebih dari pada Pedjoang Kemerdekaan.

Menindjau masalah ini dari segi hukumnja, maka ternjata ketentuan-ketentuan jang berlaku tidak mampu memberikan penjelesaian terhadap masalah Pedjoang Kemerdekaan. Djustru membuat masalahnja mendjadi berlarut-larut.

Kalau dalam menjelesaikan masalah ini tidak berhasil maka kesalahan tidak dapat dibebankan kepada Pedjoang Kemerdekaan, karena hukum jang berlaku membuat mereka selalu mendjadi objek. Djadi dapat ditarik kesimpulan bahwa:

„Dengan ide jang progresif, ide jang tudjuannja terbatas dan ide jang tambal sulam; jang totalnja mendjadi ide jang tidak menjeluruh (integraal), dengan djaminan hukum dan pelaksanaan jang tidak menjeluruh pula, merupakan satu kegagalan".

a) Biro Rekonstruksi Nasional (B.R.N.) diadakan karena adanja ide jang menjeluruh, tetapi landasan pelaksanaannja jang tidak tegas atau flexible, dalam usaha-usahanja menemui banjak kegagalan:

— dibidang transmigrasi dari beberapa objek diluar Djawa jang njata berhasil hanja satu objek, jaitu; Sumber Djaja (Sumatera Selatan). Setelah mendapat penjelidikan, ternjata pimpinan jang ulet sangat berpengaruh dalam pelaksanaan projek ini.

— dibidang bimbingan terhadap swasta jang kurang lebih berdjumlah 60 projek, hanja beberapa sadja jang sanggup mempertahankan hidupnja.

— dibidang pendidikan dan latihan kerdja, jang ditudjukan kepada kedjuruan praktis banjak membawa hasil. Namun demikian didalam penempatan banjak menemui kesulitan.

— usaha-usaha dibidang lain, termasuk pedjoang jang tjedera, hanja setjara tambal sulam dilakukan.

b) Kantor Urusan Demobilisan Peladjar (K.U.D.P.) verlengstuk dari Komando Penjelesaian Ex. Be. XVII (Kopex-Be. 17), satu badan chusus untuk mengurusi Peladjar Pedjoang, terutama mempunjai tugas untuk mengembalikan mereka kebangku sekolah, mempunjai landasan ide jang madju. Namun demikian dalam pelaksanaan tugasnja tidak menemui hasil jang dapat dianggap tjukup.
Dari kurang lebih 34.000 pendaftar, ternjata jang memenuhi sjarat sebagai Pedjoang Kemerdekaan hanja 17.000 orang. Dan dari djumlah itu jang ingin kembali kebangku sekolah kurang lebih 14.000 orang.

Sekolah Menengah	5.107 orang
Sekolah Menengah Atas	7.915 orang
M a h a s i s w a	952 orang
D j u m l a h :	13.974 orang

Dan dari djumlah tersebut jang dapat meneruskan peladjaran sampai ditahun 1950, 11.855 orang dan pada tahun 1957 jang lulus dari Perguruan Tinggi 48 orang; dan jang masih meneruskan peladjarannja di Perguruan Tinggi tinggallah 2.365 orang. Dengan ide jang telah madju, tetapi tiada dorongan moril maupun spirituil; achirnja hanja bagi mereka jang ulet dan tabah jang dapat meneruskan beladjar.

Tetapi diluar itu usaha-usaha ingroep-verband, kelompok-kelompok, organisasi banjak menolong keadaan sehingga bagi mereka jang tak dapat melandjutkan peladjarannja di Perguruan Tinggi memaksakan diri untuk beladjar pada akademi-akademi kedinasan. Misalnja: Akademi Polisi, Perburuhan, Lalu Lintas Bea & Tjukai, Padjak, Pelabuhan, dan lain-lain.

Bahkan ada jang berusaha untuk kembali ke Angkatan Perang.

Lebih dulu telah didjelaskan, bahwa dalam menindjau masalah ini sama sekali tak boleh terlepas dari aspek-aspek lain jang berkembang ditengah-tengah masjarakat diwaktu itu.

Masjarakat warisan Belanda, adalah masjarakat jang kapitalistis, feodalistis dan liberalistis. Masjarakat dengan bentuk-bentuknja jang demikian itu mendapat stimulasi dari sistim demokrasi jang berlaku diwaktu itu.

Djadi bila terdjadi kesulitan dan kegagalan dalam usaha-usaha ini, sama sekali tak dapat disalahkan seluruhnja kepada pelaksanaannja, karena masjarakat jang demikian merupakan tantangan jang tjukup berat.

Sesuai dengan kenjataannja, seluruh terpengaruh oleh pertumbuhan masjarakat jang ada. Adalah logis, bila fikiran para Pedjoang Kemredekaan terserat djuga kedalam alam liberalistis dan individualistis. Bahkan pengurusan masalah inipun tak ketinggalan dari alam itu.

3. Lahirnja Organisasi-organisasi Pedjoang Kemerdekaan.

Melihat gedjala demikian, para eksponen Pedjoang Kemerdekaan jang masih sadar atas kedudukannja sebagai pedjoang, mentjoba untuk memetjahkan suasana itu dengan membentuk organisasi, perkumpulan-perkumpulan, dimulai pada tahun 1951.

Ratusan organisasi Pedjoang Kemerdekaan tumbuh seperti tjendawan dimusim hudjan. Bermatjam-matjam nama dipakainja; ada jang menggunakan nama Bekas Pedjoang, Demobilisan, Peladjar Pedjoang, Bekas Tentara dan lain-lain lagi.

Pada mulanja memang mempunjai motif perdjoangan idiologi, tetapi makin lama tumbuh organisasi jang bermotif perdjoangan nasib. Dan tak dapat diingkari pula banjak organisasi-organisasi jang bertendens mentjari keuntungan materiil (sosial ekonomis) semata-mata.

Bermatjam-matjam motif dipakainja sebagai alasan untuk menumbuhkan organisasi:

a. motif persamaan tjita-tjita (idiologi);
b. motif historis, berasal dari satu kesatuan;
c. motif kedaerahan, berasal dari satu daerah;
d. motif kepentingan perorangan jang bersamaan;
e. motif perbaikan/penjelesaian masalahnja;
f. dan lain-lain motif lagi.

Hal ini merupakan pentjerminan (weerspiegeling) masjarakat diwaktu itu.

Beratnja tantangan jang diberikan oleh masjarakat diwaktu itu, sangat menjulitkan bagi pertahanan djiwa patriotik, mental perdjoangan atau mental revolusioner.

Hampir tiap langkah, apakah langkah itu buruk ataukah baik; dilakukan oleh seseorang ataukah perkumpulan; selalu mendapat sambutan rasa takut dan antipati.

Langkah-langkah untuk memberikan djasa-djasa ditjurigai, langkah-langkah untuk meminta bantuan disambut dengan rasa takut dan antipati. Apalagi untuk melamar sesuatu pekerdjaan, hampir pasti berhadapan dengan alasan-alasan untuk menolaknja.

Orang tak jakin lagi dengan pepatah: „berlian jang dimuntahkan dari mulut andjingpun tetap berudjud berlian".

Dapat dikatakan hanja satu kemungkinan untuk mendapatkan sambutan baik, bila Pedjoang Kemerdekaan itu dirasa dapat dieksploitir untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Untunglah bagi jang tabah, malang bagi mereka-mereka jang terlepas dari pegangannja.

Oleh sebab itu tak mengherankan bila ditahun sekitar 1954, telah terdengar ± 200 nama-nama organisasi Pedjoang Kemerdekaan. Meskipun ditahun-tahun sebelumnja telah diusahakan oleh beberapa organisasi untuk mengadakan persatuan disekitar tahun 1952, seperti:

a. pada bulan Desember 1951, telah berkumpul enam organisasi Pedjoang Kemerdekaan di Jofja, untuk menjatukan diri dalam satu organisasi, dan lahirlah Persatuan Bekas Pedjoang Bersendjata Seluruh Indonesia (Perbepbsi).
b. pada tahun 1952, telah berkumpul 21 organisasi Peladjar Pedjoang dari seluruh peloksok tanah air di Salatiga, dan lahirlah Badan Kontak Peladjar Pedjoang.

Dan pada tanggal 25 Djanuari 1955 berkumpullah kembali 31 organisasi Peladjar Pedjoang ini dalam bentuk Kongres ke I di Kaliurang, Jogjakarta, untuk memetjahkan masalah-masalah negara pada umumnja dan masalah mereka kepada chususnja. Dan lahirlah nama baru, Sekretariat Bersama Kongres Peladjar Pedjoang Seluruh Indonesia (S.B.K.P.P.S.I.).

Sesuai dengan pertumbuhan atau dinamika masjarakat, mempunjai tjiri jang chas, jaitu berbarengan dengan tumbuhnja puntjak atau klimaks banjak organisasi-organisasi Pedjoang Kemerdekaan jang hampir sukar untuk dibatasi, timbullah usaha-usaha untuk mempersatukan.

J.M. Menteri Negara Urusan Bekas Pedjoang Soetomo alias Bung Tomo (12 Agustus 1955 — 24 Maret 1956), Menteri jang pertama kali diadakan di Negara Republik Indonesia jang diserahi untuk mengurusi masalah Pedjoang Kemerdekaan; disamping mengerdjakan masalah-masalah rutine, dan mempeladjari masalah-masalah ini setjara menjeluruh, berusaha pula untuk mengatur seluruh Pedjoang Kemerdekaan. Tetapi usaha-usaha beliau belum mendapatkan hasil, tersusul adanja pergantian Kabinet.

Usaha ini dilandjutkan oleh J.M. Dahlan Ibrahim (24 Maret 1956 — 28 Djanuari 1957). Menteri Negara Urusan Bekas Pedjoang diubah mendjadi Menteri Negara Urusan Veteran, berdasar keputusan Presiden Republik Indonesia No 111 tahun 1956, tanggal 30 April 1956. Dan beliaupun belum berhasil dalam usaha ini.

Pada tanggal 28 Djanuari 1957, berdasar keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 tahun 1957, dan J.M. Wakil Perdana Menteri II ditundjuk sebagai Menteri Negara Urusan Veteran ad in'terim.

*
* *

4. Ichtisar Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Masalah Penjelesaian Veteran Pedjoang Kemerdekaan R.I. sebelum lahirnja Undang-undang No. 75 tahun 1957.

1. Penetapan Pemerintah No. 3/Tahun 1948 tanggal 14 Djuli 1948.
2. Peraturan Pemerintah No. 32/Tahun 1949 tanggal 24 Desember 1949.
3. Peraturan Pemerintah No. 6/Tahun 1950 tanggal 14 Maret 1950.
4. Keputusan Menteri Pertahanan No. 193/M.P./50 tanggal 9 Mei 1950.
5. Keputusan Pemerintah No. 43/Tahun 1950 tanggal 12 Djuli 1950.
6. Peraturan Pemerintah No. 12/Tahun 1951 tanggal 10 Pebruari 1951.
7. Peraturan Pemerintah No. 1/Tahun 1952 tanggal 5 Pebruari 1952.
8. Peraturan Pemerintah No. 6/Tahun 1954 tanggal 27 Djanuari 1954.
9. Peraturan Pemerintah No. 16/Tahun 1954 tanggal 27 Pebruari 1954.

PENETAPAN PEMERINTAH 1948 No. 3
PERATURAN TENTANG PENEMPATAN TENAGA DARI DAN TUNDJANGAN KEPADA BEKAS-TENTARA SETELAH DIRASIONALISIR.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa perlu menindjau kembali pemberian tundjangan kepada bekas anggauta T.N.I. terutama jang diberhentikan dari djabatannja berhubungan dengan rasionalisasi Angkatan Perang;

b. tjara menempatkan mereka tersebut diatas jang sebaik-baiknja dilain lapangan pekerdjaan;

Mengingat:

a. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;

b. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. A/259/1947 tertanggal 1/9/1947 tentang „Peraturan untuk sementara waktu tentang pemberian tundjangan kepada bekas anggota Tentara, Pegawai/Pekerda Sipil dalam Kementerian Pertahanan" berhubungan dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. A/338/1947 tertanggal 11/11/1947;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PENEMPATAN TENAGA DARI DAN TUNDJANGAN KEPADA BEKAS TENTARA SETELAH DIRASIONALISIR.

B A B I.

U m u m.

Pasal 1.

Untuk keperluan penjelesaian rasionalisasi Angkatan Perang, maka para anggota tentara jang diberhentikan dari djabatannja karena rasionalisasi itu dibagi atas:

a. mereka jang dikembalikan kedesa-desa (selandjutnja disebut golongan a);
b. mereka jang dipekerdjakan diperusahaan-perusahaan jang diselenggarakan oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda (selandjutnja disebut golongan b);
c. mereka jang dipekerdjakan diperusahaan-perusahaan lain jang diselenggarakan oleh Sub-Territoriaal Comando, perusahaan-persahaan mana tidak boleh mendjadi tanggungan Kementerian Pertahanan (selandjutnja disebut golongan c);
d. mereka jang tidak termasuk golongan a, b dan c (selandjutnja disebut golongan d).

Pasal 2.

Peraturan dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. A/259/1947 tertanggal 1 September 1947 berhubung dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. A/338/1947 tertanggal 11 Nopember 1947 tidak berlaku lagi buat ke-empat golongan tersebut dalam pasal 1.

Pasal 3.

(1) Kepada masing-masing dari golongan a dan b pada waktu diberhentikan diberikan tundjangan sekaligus dan untuk satu kali sadja sebesar 6 (enam) kali djumlah gadji-pokok sebulannja dengan pembatasan, sekurang-kurangnja Rp. 300,— (tiga ratus rupiah) dan sebanjak-banjaknja Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah).
(2) Terhadap mereka tersebut dalam ajat (1) pasal ini jang diberhentikan sebelum tanggal mulai berlakunja peraturan ini, diperlakukan untuk waktu antara hari pemberhentian dan dari hari tersebut diatas itu, peraturan-peraturan jang dimaksud dalam pasal 2 diatas.
(3) Djika menurut perhitungan berdasarkan ajat (2) dari pasal ini, belum djuga dipenuhi djumlah enam kali gadji-pokok sebulannja termaksud diatas, maka kepada jang berkepentingan diberikan kekurangannja jaitu sampai tertjapai djumlah itu.

Pasal 4.

Untuk mempekerdjakan mereka termasuk golongan b atau golongan c, maka Kementerian Pembangunan dan Pemuda atas

Sub-Territoriaal Comando mendapat dari Kementerian Pertahanan selama 6 (enam) bulan, sebulannja untuk tiap-tiap orang jang dipekerdjakan itu uang sedjumlah 1 (satu) kali gadji-pokoknja dengan pembatasan sekurang-kurangnja Rp. 50,— (lima puluh rupiah) dan sebanjak-banjaknja Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan djaminan makanan sesuai dengan djatah peradjurit atau uang seharga djatah tersebut.

B A B II.

P e n g e m b a l i a n k e D e s a.

Pasal 5.

Djumlah kekuatan dari golongan a ditetapkan untuk masing-masing dengan rata-rata 10 orang.

Pasal 6.

(1) Komandan Sub-Territorial, Kepala Daerah dan Kepala Kemakmuran Daerah ditiap-tiap Karesidenan merundingkan, segera setelah menerima peraturan ini, tjara menjelesaikan pengembalian bekas tentara kedesa, seperti jang dimaksud dalam peraturan ini.

(2) Dalam mendjalankan rentjana-rentjana tersebut dalam ajat (1) pasal ini, mereka mendapat bantuan dari pendjabat-pendjabat Pemerintah dan orang-orang partikelir diseluruh Karesidenan.

Pasal 7.

(1) Mereka tersebut dalam pasal 6 menetapkan djumlah bekas anggota-anggota Angkatan Perang jang akan dikembalikan kedesa-desa jang letaknja dalam Karesidenan jang bersangkutan.

(2) Djumlah tersebut dalam ajat (1) ini diambilkan dari mereka jang diberhentikan dari djabatannja karena rasionalisasi Angkatan Perang.

(3) Selandjutnja diambil sebagai pedoman pasal 5 diatas, dengan mengingat pula kepada keadaan daerah jang bersangkutan.

Pasal 8.

(1) Komandan Sub-Territorial menundjuk dari antara bekas anggota Angkatan Perang tersebut dalam pasal 7 ajat (1) untuk dikembalikan kedesa-desa.

(2) Dalam hal itu, diusahakan agar masing-masing bekas tentara jang bersangkutan dikembalikan atas dasar sukarela dan kedesa-desa aslinja.

(3) Apabila penetapan djumlah termaksud dalam pasal 7 ajat (1) diatas tidak mentjukupi djumlah „rantjangan" jaitu kurang lebih 10 (sepuluh) orang untuk 1 (satu) desa, maka Komandan Sub-Territorial mendjalankan kebidjaksanaan sehingga djumlah ini tertjapai.

Pasal 9.

Selain dari pada tundjangan jang diberikan menurut pasal 3 diatas masing-masing dari golongan a diberikan:

a. uang seperlunja atau kartjis pertjuma untuk kereta-api, satu sama lain untuk perdjalanannja dari tempat tersebut dipasal 10 dibawah ini sampai didesa-desa dimana ia ditempatkan;

b. barang-barang jang sekiranja dapat diberikan kepada desa dimana ia ditempatkan.

Pasal 10.

Bekas anggota-anggota tentara jang akan dikembalikan kedesa itu dikumpulkan dipusat Kabupaten atau dilain tempat. Kepada mereka diberikan surat keterangan menurut tjontoh jang terlampir, disertai pendjelasan-pendjelasan seperlunja dari pihak tentara dan Pamong Pradja.

Pasal 11.

(1) Bekas anggota-anggota tentara jang dikembalikan kedesa menurut peraturan ini mendjadi anggota masjarakat desa; ketjakapan jang telah diperoleh selama mereka didalam ketentaraan dapat dipergunakan oleh masjarakat tersebut untuk pendjagaan keamanan, pemberantasan mata-mata musuh, pertahanan rakjat, pendjagaan bahaja udara, penerangan, pemberantasan buta huruf dan lain sebagainja.

(2) Kepada mereka diberikan tuntutan oleh Bupati dan pendjabat-pendjabat Pamong Pradja lainnja, dibantu oleh Komandan Distrik Militer.

Pasal 12.

Oleh Panitia Pengembalian Tenaga jang diadakan ditiap-tiap Distrik Militer (Kabupaten) diselenggarakan daftar-daftar

jang memuat keterangan-keterangan mengenai diri, tempat tinggal, pemindahan dan lain dari masing-masing bekas tentara jang dikembalikan kedesa.

Pasal 13.

Selambat-lambatnja satu minggu setelah menerima peraturan ini dari Kepala Staf Territorial Djawa, maka mereka tersebut dalam ajat (1) pasal 6 dan 7 diatas melaporkan kepada pusat (bagi Komandan Sub-Territorial kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Territorial Djawa, bagi Kepala Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri dan bagi Kepala Kemakmuran Daerah kepada Kementerian Kemakmuran) rentjana-rentjana termaksud dalam pasal 6, dengan memberitahukan djumlah jang dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 14.

Selambat-lambatnja satu bulan setelah peraturan ini diterima itu, maka pelaksanaannja harus sudah selesai.

Selandjutnja kepada pusat seperti jang dimaksud dalam pasal 13 disampaikan laporan lengkap mengenai pengembalian bekas tentara termaksud dalam Bab II ini.

BAB III.

Penempatan Tenaga Bekas Tentara di Perusahaan-perusahaan dan lain jang diselenggarakan oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

Pasal 15.

Oleh Komandan Sub-Territorial ditundjuk dari antara bekas anggota-anggota Tentara di Karesidenan jang diberhentikan dari djabatannja karena rasionalisasi Angkatan Perang, untuk dipekerdjakan di Perusahaan-perusahaan dan lain jang diselenggarakan oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

Pasal 16.

(1) Jang ditundjuk menurut pasal 15 diatas harus melaporkan diri kepada Komandan Sub-Territorial dengan perantaraan bekas Komandan Resimennja.

(2) Komandan Sub-Territorial selandjutnja dalam waktu sesingkat-singkatnja memberi laporan kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda, Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Territorial Djawa dan menjerahkan mereka jang akan dipekerdjakan itu kepada Bagian-bagian

Kementerian Pembangunan dan Pemuda didaerahnja jang diserahi urusan ini.

Pasal 17.

Selambat-lambatnja satu bulan setelah peraturan ini diterima oleh Komandan Sub-Territorial dari Kepala Staf Territorial Djawa maka penjerahan bekas Tentara termaksud dalam pasal 16 diatas harus sudah selesai. Selandjutnja oleh Komandan Sub-Territorial disampaikan pelaporan jang lengkap mengenai penjerahan bekas Tentara kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda termaksud dalam bab III ini, kepada Kepala Staf Territorial Djawa dan Kepala Staf Angkatan Darat.

Pasal 18.

Kepada bekas anggota-anggota Tentara jang dipekerdjakan diperusahaan-perusahaan dan lain menurut bab III ini, diberikan surat keterangan menurut tjontoh jang terlampir disertai pendjelasan-pendjelasan seperlunja dari pihak Tentara dan Pamong Pradja.

B A B IV.

Penempatan Tenaga Bekas Tentara di Perusahaan-perusahaan dan lain jang diselenggarakan oleh Sub-Territorial Komando.

Pasal 19.

Oleh Komandan Sub-Territorial ditundjuk dari antar bekas anggota-anggota Tentara di Karesidenan jang diberhentikan dari djabatannja karena rasionalisasi Angkatan Perang untuk dipekerdjakan di Perusahaan-perusahaan dan lain jang diselenggarakan oleh Sub-Territorial Komando sendiri.

Pasal 20.

Jang ditundjuk menurut pasal 19 diatas harus segera melaporkan diri kepada Komandan Sub-Territorial jang selandjutnja dalam waktu sesingkat-singkatnja memberi laporannja kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Territorial Djawa.

Pasal 21.

Guna penjelenggaraan perusahaan-perusahaan dan lain termaksud bab IV ini, maka Sub-Territorial Komando mengusahakan bantuan seluas-luasnja baik dari djawatan-djawatan lain maupun dari pihak partikelir. Satu sama lain tidak boleh bertentangan dengan maksud rasionalisasi Angkatan Perang.

Pasal 22.

Selambat-lambatnja setelah peraturan ini diterima oleh Komandan Sub-Territorial dari Kepala Staf Territorial Djawa, maka penempatan tenaga bekas Tentara termaksud dalam bab IV ini harus sudah selesai.

Selandjutnja oleh Komandan tersebut disampaikan pelaporan jang lengkap mengenai penempatan tenaga tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Territorial Djawa.

Pasal 23.

Kepada bekas anggota-anggota Tentara jang dipekerdjakan diperusahaan-perusahaan dan lain menurut bab IV ini diberikan surat keterangan menurut tjontoh jang terlampir, disertai pendjelasan seperlunja dari pihak tentara dan Pamong Pradja.

BAB V.

Tentang Golongan D.

Pasal 24.

Kepada mereka jang tenaganja ditempatkan dilain lapangan pekerdjaan menurut bab V ini diberikan Surat Keterangan menurut tjontoh terlampir, disertai pendjelasan-pendjelasan seperlunja dari pihak Tentara dan Pamong Pradja.

BAB VI.

Tentang mulai berlakunja Peraturan ini.

Pasal 25.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1948.

Ditetapkan di Jogjakarta
Pada tanggal 14 Djuli 1948.
Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Diumumkan pada:
Tanggal 14 Djuli 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

PERATURAN PEMERINTAH No. 32 TAHUN 1949
TENTANG
PENGHARGAAN PEMERINTAH TERHADAP PELADJAR JANG TELAH BERBAKTI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengadakan peraturan tentang penghargaan Pemerintah terhadap para peladjar, karena telah menunaikan kewadjiban berbakti selama Revolusi Nasional guna menegakkan Negara;

Mengingat : Peraturan-Pemerintah No. 9, Tahun 1949;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

„Peraturan tentang penghargaan Pemerintah terhadap peladjar jang telah berbakti untuk Negara".

Pasal 1.

1. Pemerintah memberikan penghargaan kepada para peladjar perdjoangan, jang telah menunaikan kewadjiban berbakti guna menegakkan Negara sedjak tanggal 17 Agustus 1945.

2. Menteri Pertahanan menetapkan pula saat untuk permulaan dan saat berachirnja masa berbakti buat tiap peladjar jang bersangkutan.

Pasal 2.

Penghargaan dibagi-atas :

1. Penghargaan umum.
2. Penghargaan chusus.
3. Penghargaan istimewa.

Pasal 3.

Penghargaan umum berupa :

1. Surat tanda-bakti.

2. Ketentuan, bahwa waktu selama mendjalankan kewadjiban berbakti dianggap sebagai masa kerdja, jang diperhitungkan untuk menetapkan gadji, pangkat dan pensiun.

Pasal 4.

Penghargaan chusus berupa :

1. Kelas-kelas peralihan.
2. Waktu udjian tersendiri.
3. Pembebasan uang sekolah dan alat-alat.
4. Uang saku.
5. Perawatan tjuma-tjuma terhadap jang menderita penjakit djasmani dan rochani karena berdjoang.

Pasal 5.

Penghargaan istimewa berupa :

Surat-surat bakti istimewa disertai beurs dan/atau lainnja.

Pasal 6.

1. Penghargaan umum diberikan kepada setiap peladjar jang telah mendjalankan kewadjiban berbakti.
2. Disamping penghargaan umum dapat diberikan penghargaan chusus.
3. Penghargaan chusus jang dimaksud dalam pasal 4 No. 1, 2, 3 atau/dan 4, hanja diberikan djika dan selama diperlukan oleh jang berkepentingan menurut pendapat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan atau pembesar jang ditundjuk olehnja.
4. Dengan mengingat ketentuan dalam ajat 2, maka penghargaan chusus jang dimaksud dalam pasal 4 No. 3 atau/dan No. 4, dapat diberikan selama peladjar jang bersangkutan bersekolah.
5. Penghargaan jang dimaksud dalam pasal 4 No. 5 diberikan sampai jang berkepentingan tidak memerlukan lagi menurut pendapat Menteri Kesehatan atau Pembesar jang ditundjuk olehnja.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat 1, 2, 3, 4 dan 5 maka penghargaan istimewa diberikan kepada peladjar jang dalam pada berbakti membuktikan:

   a. keberanian,
   b. kedjudjuran,
   c. keichlasan,
   d. kesetiaan dan
   e. kebidjaksanaan.

7. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan bersama-sama dengan Menteri Pertahanan menentukan siapa jang dapat diberi beurs, berupa djumlah beurs itu serta guna peladjaran apa dan berapa lamanja.

Pasal 7.

Jang menentukan siapa jang memenuhi sjarat-sjarat guna menerima penghargaan istimewa ialah Presiden Indonesia sesudah mempertimbangkan pendapat Menteri Pertahanan.

Pasal 8.

Jang berhak memberi surat tanda bakti ialah Menteri Pertahanan. Jang memberikan tanda bakti istimewa ialah Presiden Republik Indonesia.

Pasal 9.

Presiden Republik Indonesia/Menteri Pertahanan dapat menjerahkan haknja untuk menerima surat tanda bakti istimewa/surat tanda bakti kepada Pembesar jang ditundjuk olehnja.

Pasal 10.

Segala biaja untuk melaksanakan peraturan ini dibebankan kepada anggaran belandja Kementerian Pertahanan, ketjuali biaja jang mengenai pengadjaran jang dibebankan kepada anggaran belandja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Pasal 11.

1. Penghargaan jang dimaksud dalam pasal 2, ketjuali pemberian masa kerdja dapat ditjabut sebagian atau seluruhnja untuk mereka jang dengan keputusan hakim jang tak dapat diubah lagi karena sesuatu kedjahatan didjatuhi hukuman pendjara paling sedikit satu tahun lamanja.
2. Djika ada alasan jang sah, maka penghargaan chusus jang dimaksud dalam pasal 4 No. 1, 2, 3, dapat dihentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan penghargaan chusus jang dimaksud dalam pasal 4 No. 4 dapat dihentikan oleh Menteri Pertahanan atas usul Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan penghargaan chusus jang dimaksud pasal 4 No. 5 dapat dihentikan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 12.

1. Guna pelaksanaan peraturan ini Menteri Pertahanan, dan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dibantu oleh sebuah Panitia jang anggotanja diangkat dan dihentikan oleh Menteri tersebut diatas.
Panitia itu berhak memadjukan usul-usul, pendapat-pendapatnja, dan sebagainja kepada Kementerian-kementerian tersebut dalam ajat 1 dan dapat pula diserahi merentjanakan peraturan-peraturan dan menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan guna pelaksanaan peraturan ini menurut petundjuk-petundjuk Menteri-menteri jang dimaksud diatas.

Pasal 13.

Peraturan ini dinamakan „Peraturan Penghargaan peladjar berbakti" dan mulai berlaku pada hari diumumkan.

Pasal 14.

Sebuah Negara Republik Indonesia Serikat berdiri hak dan kewadjiban jang dalam Peraturan ini diserahkan kepada Menteri dan Kementerian Pertahanan pindah kepada instansi jang akan ditundjuk oleh Presiden Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jogjakarta,
pada tanggal 24 Desember 1949.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Menteri Pertahanan,
HAMENGKU BUWONO IX.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran
dan Kebudajaan,
S. MANGUNSARKORO.

Menteri Keuangan,
LUKMAN HAKIM.

Menteri Perburuhan dan Sosial,
K U S N A N.

Diumumkan,
pada tanggal 24 Desember 1949.
Sekretaris Negera,
A. G. PRINGGODIGDO.

***

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH No. 32 TAHUN 1940

tentang

PENGHARGAAN PEMERINTAH TERHADAP PELADJAR JANG TELAH BERBAKTI.

PENDJELASAN UMUM

Sedangkan untuk mendapat tenaga kader guna membantu Pemerintah dalam pada perdjoangan, sekarang ini tjukup mengadakan peraturan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1949 tentang kewadjiban berbakti jang terbatas pada pemuda peladjar jang pada tahun 1947—1948 atau 1949 mendjadi murid pada sekolah-sekolah jang dimaksud dalam peraturan tadi, maka guna memberi penghargaan kepada para patriot jang telah berbakti dalam pada perdjuangan selama Revolusi Nasional jang sekarang masih terus berlaku, harus diadakan peraturan jang lebih luas, jang meliputi semua patriot jang berdjasa dalam pada perdjuangan Nasional sedjak tanggal 17 Agustus 1945.

Peraturan Pemerintah ini hanja mengenai pemuda peladjar, karena guna golongan ini perlu sekali selekas mungkin diadakan peraturan, karena tiba saatnja mereka meneruskan peladjarannja jang dulu oleh mereka dihentikan untuk ikut serta dalam pada mempertahankan negara dan bangsa.

Peraturan tentang penghargaan pemuda jang bukan pemuda peladjar dan penghargaan semua patriot umumnja, hendaknja diadakan dalam peraturan tersendiri, karena urusan mengenai golongan itu masuk lingkungan Kementerian lain dari pada Kementerian-kementerian jang disebut dalam peraturan ini.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1: Jang dimaksud dengan peladjar dalam pasal 1, ajat 1 ialah mereka mendjadi murid (mahasiswa), baik pada sekolah Pemerintah, mapun pada sekolah partikelir pada tahun 1945, 1946, 1947, 1948 atau 1949.

Penetapan jang dimaksud dalam ajat 2 bergandengan dengan pasal 3 No. 2.

Pasal 2: Lihatlah pendjelasan pasal 3, 4, 5 dan 6.

Pasal 3: Masa mendjalankan berbakti harus ditetapkan buat tiap-tiap peladjar sendiri-sendiri.

Masa berbakti mungkin terputus-putus, sebab antara 2 masa berbakti atau lebih, mungkin ada masa seorang peladjar tidak mendjalankan tugas.

Pasal 4: Jang dimaksud dengan kelas-kelas peralihan dalam No. 1 ialah kelas-kelas istimewa sebagai bagian dari sekolah biasa, dikelas mana para peladjar disiapkan untuk lekas dapat mengikuti peladjaran dalam kelas biasa.

Jang dimaksud dengan udjian tersendiri dalam No. 2 ialah udjian naik kelas atau udjian penghabisan jang dilangsungkan pada waktu jang tidak sama dengan waktu udjian biasa, sesuai dengan masa persiapan jang diperlukan guna para peladjar perdjuangan.

Pasal 5: Kepada para peladjar jang tidak memerlukan beurs maka penghargaan istimewa dapat diganti dengan lain-lain jang bermanfaat baginja umpamanja buku-buku dan sebagainja.

Pasal 6: ajat 3. Tundjangan jang dimaksud dalam No. 3 dan 4 dari pasal 4 dapat diberikan kepada semua peladjar, djika dan selama peladjar-peladjar itu menurut pendapat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan memerlukan tundjangan tersebut.

Tundjangan jang dimaksud dalam pasal 4 No. 4 diberikan menurut keperluan. Peladjar-peladjar jang orang tuanja mampu tidak diberi tundjangan tersebut dalam pasal 4 No. 3 dan 4. Djika orang tuanja tidak mampu tundjangan-tundjangan akan dapat diberikan selama peladjar-peladjar jang bersangkutan bersekolah, ketjuali dalam hal-hal jang dimaksud dalam pasal 11.

Ajat 6. Untuk mendapat penghargaan istimewa, maka sjarat-sjarat dalam pasal 6 ajat 6 harus dipenuhi semua.

Peladjar jang telah mendapat penghargaan chusus tersebut dalam pasal 4 No. 3 dan 4 dapat diberi beurs untuk membajar uang pemondokan, buku-buku dan sebagainja.

Pasal 7, 8 dan 9: Tjukup djelas.

Pasal 10: Pembagian biaja antara Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan Kementerian Pertahanan adalah sesuai dengan pasal 8, Peraturan Pemerintah No. 9/1949.

Pasal 11, 12 dan 13: Tjukup djelas.

Pasal 14: Sebenarnja peraturan sebagai termuat dalam rantjangan ini lebih tepat ditetapkan oleh R.I.S., sebab penghargaan jang dimaksud mengenai semua pemuda peladjar jang berdjuang diseluruh Indonesia. Republik Indonesia hendaknja djuga dalam hal ini mendjadi pelopor.

Pasal 14: Memungkinkan melandjutkan pemberian sokongan kepada pemuda peladjar jang bersangkutan sesudah R.I.S.

∴

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 6 TAHUN 1960.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang: perlu mengadakan peraturan sementara jang mendjamin kehidupan anggauta T.N.I. jang pada penjerahan kedaulatan tidak masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat;

Mengingat:

a. pasal 68 dan 139 dari rentjana Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

b. Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 pasal 7.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tundjangan kepada Anggota T.N.I. jang pada waktu penjerahan Kedaulatan tidak masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.

Pasal 1.

Anggauta T.N.I. jang pada waktu penjerahan kedaulatan tidak masuk A.P.R.I.S. karena:

a. kelebihan dalam susunan (overtollig).

b. permintaan sendiri dan diperkenankan.

c. tidak tjakap untuk dinas ketentaraan, disebabkan oleh tjatjat badan atau ingatan (ongeschikt wegens lichaams- of zielgebrek) mendapat tundjangan.

Pasal 2.

(1) Anggauta T.N.I. jang dimaksud dalam pasal 1 sub a, b dan c diatas mendapat tundjangan jang diatur sebagai berikut:

a. tundjangan diberikan selama masa $^{2}/_{5}$ dari pada lamanja tahun dinas dalam ketenteraan dan dinas sipil, dengan ketetapan, diberikan sekurang-kurangnja selama 1 tahun dan sebanjaknja 5 tahun.

b. tundjangan untuk tiap-tiap bulan ialah:
selama 6 bulan jang pertama 80%;
selama 12 bulan jang berikutnja 60%;
dan selama bulan-bulan sesudah itu 40% dari gadji pokok jang terachir.

(2) Terhadap mereka jang tersebut dalam pasal 1 sub a dan b, harus mempunjai dinas sekurang-kurangnja 1 tahun dalam ketenteraan.

Pasal 3.

(1) Kepada anggauta T.N.I. jang mendjadi tidak tjakap untuk dinas ketenteraan karena tjatjat badan atau ingatan, jang didapat didalam dan oleh karena dinas dan berada dalam keadaan mengchawatirkan, selain dari pada tundjangan seperti tersebut dalam pasal 2 diatas, diberikan tambahan tundjangan sebagai berikut:

a. Rp. 25,— sebulan untuk kehilangan salah satu dari anggota badannja atau sebelah matanja;
b. Rp. 50,— sebulan untuk kehilangan 2 atau lebih anggota badannja atau kedua belah matanja;
c. Rp. 25,— atau Rp. 50,— jang berada dalam keadaan mengchawatirkan sebab badan atau ingatannja (in hulpbehoevende lichaams- of geestestoestand) menurut keadaannja dimana dapat dipandang sama dengan tersebut dalam a atau b diatas.

(2) Bila kehilangan sebelah atau kedua belah mata, kehilangan satu atau lebih dari anggota badan, ataupun dalam keadaan mengchawatirkan (in hulpbehoevende lichaams- of geestestoestand) berbarengan atau bersamaan adanja, maka tambahan tundjangan dihitung satu demi satu dari kehilangannja, dengan ketetapan bahwa djumlah dari semua tambahan tidak boleh melebihi seratus rupiah.

Pasal 4.

Jang diartikan dengan „anggota badan" seperti tersebut dalam pasal 3 ialah: kedua belah tangan dan kedua belah kaki, dengan tidak membedakan bagian bahwa atau bagian atas dari kaki atau tangan itu.

Pasal 5.

Tidak tjakap untuk dinas ketenteraan karena tjatjat badan atau ingatan, ditetapkan oleh madjelis pemeriksaan badan ketentaraan (Militaire keuringsraad).

Pasal 6.

(1) Jang dimaksudkan tahun dinas dalam pasal 2 ialah masa kerdja dalam djaman Hindia-Blanda, Djepang dan Republik Indonesia dalam dinas ketentaraan dan/atau sipil.

(2) Masa kerdja tersebut dalam ajat (1) harus berturut-turut dan bila terputus, waktu terputusnja tidak boleh lebih dari 1 tahun.

Pasal 7.

(1) Bila mereka sebelum habis haknja atas tundjangan sudah mendapat pekerdjaan dengan penghasilan, maka tundjangan dikurangi dengan djumlah jang dihitung menurut persentasi dari pendapatan dari pekerdjaan, jang sama dengan persentasi dasar jang dipakai untuk menghitung pembajaran tundjangan.

(2) Tundjangan-tudjangan tersebut dalam pasal 3 a, b dan c tidak dikenakan pengurangan seperti tersebut dalam ajat (1) diatas.

Pasal 8.

Anggota T.N.I. jang mendapat tundjangan dapat diwadjibkan menerima pekerdjaan jang patut selama mereka belum mentjapai usia 55 tahun.

Barang siapa menolak pekerdjaan jang patut, maka pendapatannja dari Pemerintah akan dikurangi dengan persentasi jang sama dengan jang termaktub dalam pasal 7 dihitung dari pendapatan jang ditolak itu.

Pasal 9.

Terhadap pegawai sipil dalam Angkatan Perang jang harus diberhentikan karena kelebihan susunan (overtollig) atau karena hal lain, diberikan tundjangan menurut peraturan untuk pegawai Negeri.

Pasal 10.

Dalam hal-hal jang tidak termasuk dalam peraturan ini Menteri Pertahanan berhak untuk mengambil keputusan.

Pasal 11.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 14 Maret 1950
Presiden Republik Indonesia Serikat,

SUKARNO.

Menteri Pertahanan,

HAMENGKU BUWONO IX.

Menteri Keuangan,

SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 15 Maret 1950.
Menteri Kehakiman,

SUPOMO.

(Lembaran Negara No. 18 Tahun 1950.)

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
No. 193/M.P./50
tentang
DEMOBILISASI.

MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang:

1. Telah berachirnja masa jang memerlukan pengerahan tenaga sebanjak mungkin.
2. Telah tiba sa'atnja untuk mulai mengerdjakan konsolidasi.
3. Perlu mengadakan penetapan jang mengatur pengurangan djumlah anggota Angkatan Perang berhubung dengan konsolidasi tersebut.

Mengingat:

1. Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950.
2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1950.

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Arti demobilisasi.

1. Jang diartikan dengan demobilisasi ialah melepaskan tenaga jang dikerahkan diwaktu perang aksi militer ke-I dan II dari ikatan Angkatan Perang.

2. Tenaga jang didemobilisir dibagi dalam golongan-golongan:

a. anggauta T.N.I. jang tidak masuk formasi;
b. anggauta Brigade XVII jang tidak melandjutkan ikatan dinas tentara;
c. semua anggota mobilisasi peladjar;
d. semua tenaga darurat jang dikerahkan pada waktu aksi militer ke-II

terdiri dari:

1. bekas anggota tentara jang telah diberhentikan karena rasionalisasi tahun 1948 dan lain-lain sebab dan jang menggabungkan diri lagi;

2. anggota kelasjkaran;
3. pegawai sipil jang ada dalam ketentaraan;
4. tenaga rakjat;

Pasal 2.

Pelaksanaan.

1. Masing-masing Kepala Staf Angkatan (Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara), mengusulkan kepada kementerian Pertahanan pokok-pokok dari tugas masing-masing angkatan sesuai dengan dasar pertahanan dan keamanan kedalam, dan berdasarkan atas tugas tersebut, masing-masing Kepala Staf Angkatan mengusulkan susunan dan kekuatannja dengan menjebutkan djumlah anggauta jang termasuk dalam formasi dan jang luar formasi.

2. Untuk menjelenggarakan demobilisasi dari tenaga jang luar formasi oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan ditetapkan rentjana dan atjara pelaksanaan (procedure) demobilisasi.

Pasal 3.

Djaminan Sosial.

1. Tiap-tiap anggota Angkatan Perang jang didemobilisir mendapat perawatan dan djaminan sosial sebagai jang tersebut dalam ajat 2 dan 3 pasal ini.

2. Golongan tersebut dalam pasal 1 ajat 2 sub a dan b, jang didemobiliseer mendapat tundjangan sebagaimana termaktub dalam peraturan pemerintah No. 6 tahun 1950.

3. Golongan tersebut dalam pasal 1 ajat 2 sub c dan d, jang didemobiliseer mendapat tundjangan berupa pesangon tiga kali pokok gadji dan bahan pakaian.

Pasal 4.

Pengembalian kemasjarakat.

1. Penempatan bekas anggauta Angkatan Perang, setelah mereka didemobilisir dan dilepaskan dari ikatan Angkatan Perang kedalam masjarakat, didjalankan oleh atau dibawah pengawasan Biro Demobilisasi Nasional, jang akan didirikan.

2. Dengan tidak mengurangi tugas kewadjiban Biro Demobilisasi Nasional, maka Panitya-panitya, jajasan dan lain-lain badan maupun badan Pemerintahan atau partikelir, jang telah mendjalankan penetapan tersebut dalam ajat 1 dan pasal ini,

dapat meneruskan pekerdjaannja, hingga dikerdjakannja atau dikoordinir oleh Biro tersebut.

Pasal 5.

Peraturan ini berlaku mulai hari dikeluarkan.

Dikeluarkan di Djakarta,
pada tanggal 9 Mei 1950.
Menteri Pertahanan

HAMENGKU BUWONO IX.

Letnan Djenderal.

Turunan:

1. Perdana Menteri R.I.S.
2. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan R.I.S.
3. Menteri Keuangan R.I.S.
4. Dewan Menteri.
5. Direktur Kabinet Presiden.
6. Fd. K.S.A.P.
7. K.S.A.D.
8. K.S.U. M.B.A.D.,
9. K.S.A.L.,
10. K.S.A.U.,
11. Kep. Djaw. Perbendaharaan.
12. Arsif.

***

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

No. 43, 1950.

PENGHARGAAN PEMERINTAH TERHADAP PELADJAR.

Peraturan-Pemerintah No. 14 Tahun 1950 (Peraturan-Pemerintah No. 32 Tahun 1949), tentang penghargaan Pemerintah terhadap peladjar jang berbakti (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 26, Tahun 1950).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan tentang penempatan kembali dalam masjarakat para peladjar jang selama Revolusi Nasional mendjalankan kewadjibannja militer;

bahwa Peratuan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1949 No. 32 jang memuat penghargaan terhadap para peladjar tersebut, membuat djuga aturan-aturan tentang penempatan kembali dalam masjarakat para peladjar itu;

Mengingat: keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat No. 193/MP/50 tentang demobilisasi;

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1949, tentang penghargaan Pemerintah terhadap peladjar jang telah berbakti.

Pasal 1.

Para Peladjar dalam Angkatan Perang jang didemobilisir berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan No. 193/MP/50 dikembalikan kemasjarakat menurut ketentuan-ketentuan dalam Peratuaran Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1949 jang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

Menteri Pertahanan dan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan diwadjibkan mendjalankan apa jang tersebut dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Agar supaja setiap orang mengetahuinja memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Djuli 1950.
Presiden Republik Indonesia Serikat,

SUKARNO.

Menteri Pertahanan,

HAMENGKU BUWONO IX.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran
dan Kebudajaan,

ABU HANIFAH.

Diumumkan
Pada tanggal 15 Djuli 1950.
Menteri Kehakiman,

SUPOMO.

***

PERATURAN PEMERINTAH No. 12 TAHUN 1951
tentang
TUGAS DEWAN DAN BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pada waktu ini setelah Kemerdekaan Indonesia tertjapai, djumlah jang besar dari para Pedjoang Kemerdekaan Nasional, jakni para bekas anggauta Angkatan Perang, para bekas anggota badan-badan Angkatan Perang dan para bekas anggota badan-badan perdjuangan bersendjata belum mempunjai lapangan pekerdjaan jang tertentu dimana mereka dengan teratur dapat menjumbangkan tenaganja untuk mengisi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam usaha-usaha untuk memperkuat dan membangun Indonesia;
b. bahwa perlu dengan segera diadakan usaha-usaha oleh Pemerintah setjara luas untuk memberikan kesempatan kepada para Pedjoang Kemerdekaan Nasional jang tersebut diatas untuk menjumbangkan tenaganja dalam usaha untuk memperkuat dan membangun Indonesia, dan dalam pada itu djuga membuka djalan agar para Pedjoang Kemerdekaan Nasional itu dikemudian hari dapat hidup dalam masjarakat dengan mata-pentjaharian jang lajak;
c. bahwa tugas Biro Demobilisasi Nasional jang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1950, kurang luas untuk maksud tersebut sub a dan b diatas;

Mengingat:

1. Keputusan Dewan Menteri Republik Indonesia dalam sidangnja jang ke-34 pada tanggal 25 Djanuari 1951;
2. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1950.

M e m u t u s k a n :

Menetapan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TUGAS DEWAN DAN BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL.

Pasal 1.

(1) Terhitung sedjak saat mulai berlakunja Peraturan Pemerintah ini dibentuk:

a. Dewan Rekonstruksi Nasional jang terdiri dari Wakil Perdana Menteri sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri Sosial sebagai Wakil Ketua merangkap anggota dan Menteri-menteri Pertahanan, Perdagangan dan Perindustrian, Pertanian, Pekerdjaan Umum dan Dalam Negeri sebagai anggota;
b. Biro Rekonstruksi Nasional jang terdiri dari seorang Direktur sebagai Pemimpin dan sebuah Staf, didalam mana duduk seorang wakil dari Kementerian-kementerian jang oleh Dewan Rekonstruksi Nasional dianggap ada hubungan kewadjiban dalam usaha Rekonstruksi Nasional.

(2) Atas usul Biro Rekonstruksi Nasional, maka oleh Dewan Rekonstruksi Nasional dapat didirikan Tjabang Biro Rekonstruksi Nasional ditiap-tiap Propinsi dan didaerah lain jang dianggap perlu. Tjabang Biro Rekonstruksi Nasional ini mendjalankan kewadjibannja atas nama dan dibawah pimpinan serta pengawasan Biro Rekonstruksi Nasional.

(3) Tjabang Biro Rekonstruksi Nasional disuatu daerah dapat dihapuskan oleh Dewan Rekonstruksi Nasional atas usul Biro Rekonstruksi Nasional.

Pasal 2.

(1) Tugas Dewan Rekonstruksi Nasional adalah:
a. membuat rentjana-rentjana usaha Rekonstruksi Nasional;
b. mengatur dan mengawasi pekerdjaan Biro Rekonstruksi Nasional;

(2) Dewan Rekonstruksi Nasional bertanggung-djawab kepada Dewan Menteri·

Pasal 3.

(1) Tugas Biro Rekonstruksi Nasional adalah:
a. melaksanakan rentjana-rentjana dan putusan-putusan Dewan Rekonstruksi Nasional;
b. memadjukan usul-usul kepada Dewan Rekonstruksi Nasional dalam lapangan Rekonstruksi Nasional.

(2) Biro Rekonstruksi Nasional bertanggung-djawab kepada Dewan Rekonstruksi Nasional.

Pasal 4.

(1) „Rekonstruksi" Nasional jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan maksud Peme-

rintah untuk membuka djalan bagi mereka jang tersebut dalam ajat (2) pasal ini untuk hidup dalam masjarakat dengan mata pentjaharian jang lajak;

(2) Maksud Pemerintah tersebut dalam ajat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional dengan mentjiptakan pekerdjaan dalam lapangan pertahanan dan pembangunan jang dapat dilakukan oleh:

a. para Anggota Angkatan Perang diluar susunan organik dan bekas anggota Angkatan Perang jang belum mendapat pekerdjaan didalam masjarakat;
b. para tenaga bekas anggauta badan-badan perdjoangan bersendjata jang ada didalam pemeliharaan Pemerintah sebagai akibat pelaksanaan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1950;
c. para tenaga bekas anggauta badan-badan perdjoangan bersendjata selain jang termaksud sub b diatas jang belum mendapat lapangan pekerdjaan dalam masjarakat.

Pasal 5.

(1) Selainnja usaha Rekonstruksi Nasional, maka semua urusan jang mengenai mereka jang termaksud dalam pasal 4 ajat (2) sub a dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau oleh salah seorang Kepala Staf Angkatan Perang jang ditundjuk olehnja.

(2) Semua urusan jang mengenai tenaga-tenaga bekas anggauta badan perdjuangan bersendjata jang termaksud dalam pasal 4 ajat (2) sub b dan i dilakukan oleh Dewan Rekonstruksi Nasional atau atas namanja oleh Biro Rekonstruksi Nasional.

Pasal 6.

Untuk membiajai usaha Rekonstruksi Nasional ini diadakan perbedaan antara:

a. Biaja chusus untuk personil dan materiil Dewan serta Biro Rekonstruksi Nasional; biaja ini dalam Anggaran Belandja Negara diberatkan kepada Perdana Menteri;
b. Biaja untuk mendjalankan rentjana-rentjana Rekonstruksi Nasional; biaja ini didalam Anggaran Belandja Negara diberatkan kepada Kementerian jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan atas usul Dewan Rekonstruksi Nasional.

Pasal 7.

Dengan mulai berlakunja Peraturan Pemerintah ini ditjabut kembali Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1950.

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1950.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 10 Pebruari 1951.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Perdana Menteri,

MOHAMMAD NATSIR.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal 12 Pebruari 1951.

WONGSONEGORO.

***

PERATURAN PEMERINTAH No. 1 TAHUN 1952
tentang
SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN SERTA BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa organisasi Usaha Rekonstruksi jang didjalankan oleh Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional bersandarkan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1951 perlu disesuaikan dengan keadaan;
b. untuk itu perlu dibuat peraturan baru jang memakai dasar Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1951 jang kemudian sudah ditambah dengan dibubuh tambahan dan perubahan seperlunja;

Mengingat: Peraturan-peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 No. 44), No. 12 tahun 1951 dan No. 20 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 No. 22 dan No. 32);

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-56 pada tanggal 17 Desember 1951;

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan tentang susunan dan tugas Dewan serta Biro Rekonstruksi Nasional.

Pasal 1.

(1) Terhitung sedjak mulai berlakunja Peraturan Pemerintah ini dibentuk:

a. Dewan Rekonstruksi Nasional jang terdiri dari (Wakil) Perdana Menteri sebagai Ketua merangkap anggauta, Menteri Sosial sebagai Wakil Ketua merangkap anggauta dan Menteri-menteri Pertahanan, Perekonomian, Pertanian, Pekerdjaan Umum, Dalam Negeri dan Keuangan sebagai anggauta.
b. Biro Rekonstruksi Nasional jang terdiri dari seorang Direktur sebagai Pemimpin dan sebuah Staf, didalam mana duduk seorang Wakil dari Kementerian-kementerian jang oleh Dewan Rekonstruksi Nasional dianggap ada hubungan kewadjiban dalam usaha Rekonstruksi Nasional.

(2) Oleh Dewan Rekonstruksi Nasional dapat didirikan Tjabang dan Anak Tjabang Biro Rekonstruksi Nasional ditiap-tiap Propinsi dan didaerah-daerah lain jang dianggap perlu.

(3) Tjabang dan Anak Tjabang Biro Rekonstruksi Nasional disuatu daerah dapat dihapuskan oleh Dewan Rekonstruksi Nasional.

Pasal 2.

(1) Ditiap-tiap Propinsi dan didaerah-daerah lain dimana ada Tjabang atau Anak Tjabang Biro Rekonstruksi Nasional, pula didaerah-daerah jang tidak ada Tjabang atau Anak Tjabang Biro Rekonstruksi Nasional dapat dibentuk suatu Badan Penjelenggara Urusan Rekonstruksi jang dipimpin oleh Kepala Daerah selaku Ketua merangkap anggota.

(2) Susunan serta peraturan bekerdja Badan Penjelenggara Urusan Rekonstruksi tersebut dalam ajat 1 pasal ini ditetapkan oleh Dewan Rekonstruksi Nasional.

Pasal 3.

(1) Tugas Dewan Rekonstruksi Nasional adalah:

a. membuat rentjana-rentjana usaha Rekonstruksi Nasional;
b. mengatur dan mengawasi pekerdjaan Biro Rekonstruksi Nasional.

(2) Dewan Rekonstruksi Nasional bertanggung-djawab kepada Dewan Menteri.

Pasal 4.

(1) Tugas Biro Rekonstruksi Nasional adalah:

a. melaksanakan rentjana-rentjana putusan Dewan Rekonstruksi Nasional;
b. memadjukan usul-usul kepada Dewan Rekonstruksi Nasional dalam lapangan Rekonstruksi Nasional.

(2) Biro Rekonstruksi Nasional bertanggung-djawab kepada Dewan Rekonstruksi Nasional.

Pasal 5.

Tugas Badan Penjelenggara Urusan Rekonstruksi adalah:

a. memadjukan usul-usul kepada Direktur Biro Rekonstruksi Nasional dalam lapangan Rekonstruksi Nasional;
b. mengatur dan mengawasi pekerdjaan Tjabang atau Anak Tjabang Biro Rekonstruksi Nasional didaerahnja masing-

masing, dengan tidak mengurangi kewadjiban Biro Rekonstruksi tersebut dalam pasal 1;

c. menjelenggarakan semua keputusan dan rentjana-rentjana Dewan Rekonstruksi Nasional jang disampaikan kepada Badan Penjelenggara Urusan Rekonstruksi oleh Biro Rekonstruksi Nasional.

Pasal 6.

(1) Rekonstruksi Nasional jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan maksud Pemerintah untuk membuka djalan bagi mereka, jang tersebut dalam ajat 2 pasal ini, untuk hidup dalam masjarakat dengan mata pentjaharian jang lajak.

(2) Maksud Pemerintah tersebut dalam ajat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional, dibantu oleh Badan Penjelenggara Urusan Rekonstruksi jang bersangkutan dengan mentjiptakan pekerdjaan-pekerdjaan dalam lapangan pertahanan dan pembangunan jang dapat dilakukan oleh:

a. para anggauta Angkatan Perang diluar susunan organik dan bekas Anggauta Angkatan Perang jang belum mendapatkan lapangan pekerdjaan didalam masjarakat;

b. para tenaga bekas anggota badan-badan perdjoangan bersendjata jang didalam pemeliharaan Pemerintah, sebagai akibat pelaksanaan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1950;

c. para tenaga bekas anggota badan-badan perdjoangan bersendjata selain jang termaksud sub b diatas, jang belum mendapat lapangan pekerdjaan dalam masjarakat.

Pasal 7.

(1) Dewan Rekonstruksi Nasional dapat menjerahkan berbagai Urusan Rekonstruksi terhadap mereka jang termaksud dalam pasal 6 ajat 2 sub a, kepada Menteri Pertahanan atau kepada seorang Kepala Staf Angkatan jang ditundjuk olehnja.

(2) Semua Urusan jang mengenai tenaga-tenaga bekas anggauta badan perdjoangan bersendjata, jang termaksud dalam pasal 6 ajat 2 sub b dan c, dilakukan oleh Dewan Rekonstruksi Nasional atau atas namanja oleh Biro Rekonstruksi Nasional, dengan dibantu oleh Badan Penjelenggara Urusan Rekonstruksi jang bersangkutan.

Pasal 8.

(1) Untuk biaja usaha Rekonstruksi Nasional ini diadakan perbedaan antara:

a. biaja chusus untuk personil dan materieel Dewan serta Biro Rekonstruksi Nasional;
b. biaja untuk mendjalankan rentjana-rentjana rekonstruksi nasional.

(2) Biaja tersebut dalam ajat (1) sub a dan b pasal ini, diberatkan kepada Anggaran Belandja Kabinet Perdana Menteri.

(3) Anggaran Belandja tersebut dalam ajat (1) sub b diatas dibuat oleh Dewan Rekonstruksi Nasional.

Pasal 9.

Dengan berlakunja Peraturan Pemerintah ini ditjabut kembali Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 No. 22) dan No. 20 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 No. 32).

Pasal 10.

Peraturan Pemerintah ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 5 Djanuari 1952.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Wakil Perdana Menteri,

SUWIRJO.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal 10 Djanuari 1952
Menteri Kehakiman,

MUHAMMAD NASRUN.

***

PERATURAN PEMERINTAH No. 6 TAHUN 1954
tentang
PENAMPUNGAN BEKAS ANGGAUTA ANGKATAN PERANG DAN PEMULIHAN MEREKA KEDALAM MASJARAKAT.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa „Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui Ikatan Dinas" (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 44), sedjak bulan September 1953 sudah mulai berlaku;
2. bahwa pemisahan dari Anggota-anggota Angkatan Perang jang akan diperhentikan dari dinas ketentaraan sudah mulai didjalankan oleh masing-masing Angkatan;
3. bahwa dengan mendesaknja keadaan-keadaan tersebut 1 dan 2 dirasakan perlu segera mengadakan suatu Badan Pemerintah jang mengurus segala usaha pembangunan bekas Anggauta-anggauta Angkatan Perang tersebut diatas dan pemulihan mereka itu kedalam masjarakat;

Mengingat:

1. Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakukan terhadap Anggauta Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui Ikatan Dinas (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 44);
2. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952, tentang Susunan dan Tugas Dewan serta Biro Rekonstruksi Nasional (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 3).

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-29 pada tanggal 5 Djanuari 1954;

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: Peraturan Tentang Penampungan Bekas Anggauta Angkatan Perang Dan Pemulihan Mereka Kedalam Masjarakat.

Pasal 1.

(1) Untuk memungkinkan usaha penampungan Anggota-anggota Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ketentaraan dan pemulihan mereka kedalam masjarakat, diadakan suatu Badan Pemerintah, bernama Biro Penampungan bekas anggauta Tentara.

(2) Biro Penampungan tersebut ajat 1 bertugas:

a. Menampung bekas anggauta-anggauta Tentara jang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui Ikatan Dinas (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 44).

b. Menampung anggota-anggota Tentara Nasional Indonesia jang pada waktu pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ternjata tidak masuk formasi tentara.

c. Memulihkan mereka jang tersebut dalam huruf a dan b ajat 2 pasal ini kedalam masjarakat.

Pasal 2.

(1) Pembentukan dan penjelenggaraan Biro Penampungan tersebut diserahkan kepada Menteri Pertahanan atau kepada seorang pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Pertahanan.

(2) Menteri Pertahanan memperbantukan sedjumlah anggauta Angkatan Perang jang diberi tugas didalam Biro Penampungan tersebut.

Pasal 3.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dan tjara-tjara penampungan dan pemulihan bekas anggota Tentara termaksud diatas diatur dengan Penetapan Menteri Pertahanan.

Pasal 4.

Pengeluaran-pengeluaran untuk Biro Penampungan tersebut dibebankan atas Anggaran Belandja Negara.

Pasal 5.

Dengan berlakunja Peraturan Pemerintah ini ditjabut kembala segala peraturan jang mengatur penampungan bekas anggauta Tentara tersebut dalam pasal 1 ajat (2).

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Djanuari 1954.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Menteri Pertahanan,

Mr. IWA KUSUMASUMANTRI.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal 29 Djanuari 1954.
Menteri Kehakiman,

DJODI GONDOKUSUMO.

PENDJELASAN

mengenai

PERATURAN PEMERINTAH No. 6 TAHUN 1954

tentang

PENAMPUNGAN BEKAS ANGGOTA ANGKATAN PERANG DAN PEMULIHAN MEREKA KEDALAM MASJARAKAT.

A. PENDJELASAN UMUM.

1. Menurut pelaporan-pelaporan di Kementerian Pertahanan sudah didjalankan pemisahan dari anggota-anggota Tentara dengan perkiraan djumlah 40.000 orang dari Angkatan Darat, 1.000 orang dari Angkatan Laut dan 1.000 orang dari Angkatan Udara jang diperhentikan dari dinas ketentaraan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1953 tentang perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang jang diperhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui Ikatan Dinas.
2. Usaha untuk penampungan, menjediakan kesempatan bekerdja serta pemulihan kemasjarakat dari bekas anggauta-anggauta Tentara, adalah pekerdjaan jang mengenai lapangan politis, sosial dan ekonomis jang pelaksanaannja terletak diluar kewadjiban Angkatan Perang, dan diserahkan kepada suatu Badan Pemerintah jang diadakan chusus untuk keperluan penampungan dengan tanggung-djawab jang penuh.
3. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1953 pasal 4 ajat (2).

B. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

(1) Tjukup djelas.

(2) a. Tjukup djelas.

b. Sebagian dari golongan bekas anggauta Tentara ini dimasukkan dalam organisasi Corps Tjadangan Nasional. Penjelesaian Corps Tjadangan Nasional diatur oleh Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara, Penampungan sebagian dari golongan ini jang tidak masuk Corps

Tjadangan Nasional dan pemulihan mereka kedalam masjarakat diatur oleh Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara.

c. Tjukup djelas.

Pasal 2.

Tjukup djelas.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

Dengan berlakunja Peraturan Pemerintah ini ditjabut kembali ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952 pasal 7 ajat 1.

Pasal 6.

Tjukup djelas.

PERATURAN PEMERINTAH No. 16 TAHUN 1954
tentang
URUSAN REKONSTRUKSI NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Pemerintah berhasrat akan mempertjepat penjelesaian masalah bekas Pedjoang bersendjata dengan mengarahkan penjelesaian itu kepada pembangunan dan kesedjahteraan Negara pada umumnja;

b. bahwa organisasi usaha rekonstruksi jang didjalankan oleh Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional berdasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 No. 3) telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan para bekas pedjoang serta perkembangan kesadaran masjarakat;

c. bahwa untuk menjesuaikan organisasi usaha rekonstruksi dengan perkembangan keadaan itu, perlu dirubah Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952 tersebut, sehingga titik berat rekonstruksi itu beralih kepada daerah;

d. bahwa dengan perubahan sedemikian ini peranan Badan Penjelenggara Urusan Rekonstruksi Nasional jang dipimpin oleh Kepala Daerah dalam menjelenggarakan urusan rekonstruksi akan lebih sesuai dengan keadaannja, sehingga dapat diharapkan perhatian jang memuaskan dari Kepala Daerah dan Dinas-dinas tehnis didaerah terhadap usaha-usaha rekonstruksi itu;

e. bahwa selandjutnja dengan tjara demikian ini penjelenggaraan rekonstruksi lambat-laut tidak akan merupakan usaha penampungan belaka sehingga perkembangannja dapat disesuaikan dengan usaha pembangunan Pemerintah pada umumnja;

Mengingat: Peraturan-peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 No. 44), No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 No. 22), No. 20 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 No. 32) dan No. 1 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1952 No. 3);

Mengingat pula: Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No. 44) dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 14);

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapat-rapatnja jang ke-7 pada tanggal 14 September 1953, ke-20 pada tanggal 13 Nopember 1953, ke-22 pada tanggal 24 Nopember 1953 dan ke-34 pada tanggal 9 Pebruari 1954;

M e m u t u s k a n:

Dengan mentjabut Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952 tentang susunan dan tugas Dewan serta Biro Rekonstruksi Nasional (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 3);

Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Urusan Rekonstruksi Nasional.

Pasal 1.

(1) Urusan Rekonstruksi Nasional diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Di Kementerian Dalam Negeri diadakan Biro Rekonstruksi Nasional jang terdiri dari seorang Direktur sebagai Pemimpin dan sebuah Staf, didalam mana duduk seorang wakil dari Kementerian-kementerian jang oleh Menteri Dalam Negeri dianggap ada hubungan kewadjiban dalam usaha Rekonstruksi Nasional.

(3) Oleh Menteri Dalam Negeri djika dianggap perlu, ditiap-tiap Propinsi dan didaerah-daerah lain dapat didirikan Tjabang dan Anak Tjabang Biro Rekonstruksi Nasional jang mendjadi bagian dari Kantor Kepala Daerah.

(4) Tjabang dan Anak Tjabang Biro Rekonstruksi Nasional disuatu daerah dapat dihapuskan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2.

(1) Ditiap-tiap Propinsi dan didaerah-daerah lain dimana ada Tjabang atau Anak Tjabang Biro Rekonstruksi Nasional, pula didaerah-daerah jang tidak ada Tjabang atau Anak Tjabang Biro Rekonstruksi Nasional, dapat dibentuk suatu Badan Penjelenggara Urusan Rekonstruksi jang dipimpin oleh Kepala Daerah selaku Ketua merangkap anggota.

(2) Susunan serta peraturan bekerdja Badan Penjelenggara Urusan Rekonstruksi Nasional tersebut dalam ajat 1 pasal ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3.

Tugas Biro Rekonstruksi Nasional adalah membantu Menteri Dalam Negeri dalam melaksanakan urusan rekonstruksi.

Pasal 4.

Tugas Badan Penjelenggara Urusan Rekonstruksi adalah:
a. memadjukan usul-usul kepada Menteri Dalam Negeri dalam lapangan Rekonstruksi Nasional;
b. mengatur dan mengawasi usaha-usaha rekonstruksi jang dikerdjakan didaerahnja;
c. menjelenggarakan usaha-usaha rekonstruksi.

Pasal 5.

(1) Rekonstruksi Nasional jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan maksud Pemerintah untuk membuka djalan bagi para tenaga bekas pedjoang bersendjata jang belum mendapat pekerdjaan dalam masjarakat, untuk hidup dengan mata pentjaharian jang lajak.

(2) Maksud Pemerintah tersebut dalam ajat 1 pasal ini ditudjukan kepada Program Pemerintah mengenai pembangunan dan kesedjahteraan Negara pada umumnja, jang lambat laun harus dapat menghilangkan sifat penampungan dari pada usaha Rekonstruksi Nasional ini, dengan menitik-beratkan pada usaha transmigrasi dan pendidikan-pendidikan kedjuruan jang sesuai dengan kemampuan para bekas pedjoang, guna mempermudah mendapat mata pentjaharian jang lajak.

Pasal 6.

(1) Jang dimaksud dengan tenaga bekas pedjuang bersendjata adalah bekas anggauta badan-badan perdjuangan jang turut serta memperdjuangkan Kemerdekaan Nasional dengan mempergunakan sendjata diwaktu perang aksi militer kedua.

(2) Sjarat-sjarat untuk membuktikan apa jang dimaksud dengan tenaga bekas pedjuang bersendjata dapat diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7.

Untuk membiajai usaha Rekonstruksi Nasional ini diadakan pembedaan antara:

a. Biaja jang chusus untuk personil dan materiil Biro Rekonstruksi Nasional; biaja ini dalam anggaran belandja Negara diberatkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

b. Biaja untuk mendjalankan rentjana-rentjana Rekonstruksi Nasional; biaja ini dalam Anggaran Belandja Negara diberatkan kepada Kementerian-kementerian jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Direktur Biro Rekonstruksi Nasional serta Staf interdepartemental tersebut pasal 1 ajat 1 b.

Pasal 8.

Persiapan-persiapan serta pengoperan pembiajaan rentjana-rentjana Rekonstruksi kepada Anggaran Belandja Kementerian-kementerian jang bersangkutan, begitu pula pengoperan pegawai-pegawai teknis kepada Kementerian-kementerian jang bersangkutan diatur dan dilaksanakan berangsur-angsur dan sedemikian rupa sehingga usaha Rekonstruksi Nasional dapat berdjalan terus.

Pasal 9.

Aturan Peralihan.

(1) Terhitung mulai berlakunja Peraturan Pemerintah ini:

a. Dewan Rekonstruksi Nasional jang dibentuk menurut pasal 1 ajat 1a, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 No. 3) ditiadakan dan tugas dan kekuasaannja beralih kepada Menteri Dalam Negeri.

b. Biro Rekonstruksi Nasional jang dibentuk menurut pasal 1 ajat 1b, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 No. 3) mendjadi Biro dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga Direktur Biro Rekonstruksi Nasional serta Staf interdepartemental jang menurut pasal tersebut memberi bantuan kepadanja, mendjadi pembantu dari pada Menteri Dalam Negeri.

(2) Tjabang dan Anak Tjabang Biro Rekonstruksi Nasional djika dianggap perlu dapat dihapuskan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Tjabang dan Anak Tjabang Biro Rekonstruksi Nasional jang tidak dihapuskan mendjadi bagian dari Kantor Kepala Daerah.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Pebruari 1954.
Wakil Presiden Republik
Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Wakil Perdana Menteri II,

ZAINUL ARIFIN.

Menteri Dalam Negeri,

HAZAIRIN.

Diundangkan
pada tanggal 13 Maret 1954.
Menteri Kehakiman,

DJODI GONDOKUSUMO.

Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1954.

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH No. 16 TAHUN 1954
tentang
URUSAN REKONSTRUKSI NASIONAL.

Telah lama terasa bahwa organisasi Usaha Rekonstruksi jang didjalankan oleh Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional itu tidak dapat bekerdja sebagai jang diharapkan. Dewan Rekonstruksi Nasional jang terdiri dari 8 Menteri terbukti sangat „log" dan tidak dapat bekerdja semestinja, oleh karena itu B.R.N. dihapuskan dan kekuasaannja beralih kepada seorang Menteri sehingga B.R.N. mendjadi Biro biasa jang tidak lagi bernaung dibawah suatu Dewan, akan tetapi dibawah suatu Dewan, akan tetapi dibawah suatu Kementerian.

Dengan hilangnja sifat keistimewaan dari B.R.N. itu jang sekarang hanja merupakan suatu Biro (Djawatan) biasa jang mendjalankan penjelenggaraan (uitvoering), maka sukar untuk melangsungkan B.R.N. itu tetap dibawah Perdana Menteri (Wk. P.M.), jang pada hakekatnja tidak memegang sesuatu Kementerian. Dalam waktu jang lampau pun telah terbukti bahwa Wk. P.M. tidak dapat mengadakan pengawasan jang tepat terhadap B.R.N., karena Kabinet P.M. itu tidak dilengkapi dengan perlengkapan untuk memegang suatu Djawatan jang mempunjai penjelenggaraan.

Karena B.R.N. mempunjai sifat penampungan (sociale instelling), maka pada hakekatnja B.R.N. dapat bernaung dibawah Kementerian Sosial. Akan tetapi berhubung dengan jang menjelenggarakan Usaha Rekonstruksi didaerah-daerah itu adalah Badan Penjelenggara Urusan Rekonstruksi jang diketuai oleh Kepala Daerah, maka sebaiknja B.R.N. dinaungkan dibawah Kementerian Dalam Negeri. Perubahan ini adalah sesuai dengan sifat Usaha-usaha Rekonstruksi pada umumnja dan sifat B.R.N. pada chususnja, ialah bahwa adanja B.R.N. itu hanja untuk waktu jang terbatas (van aflopende aard). Karena itu sifat keistimewaan dari B.R.N. harus lambat laun dapat dihilangkan dan titik berat dari pada Usaha Rekonstruksi ini dapat dialihkan kepada Daerah sehingga peranan Badan Penjelenggara Urusan Rekonstruksi akan lebih nampak karenanja dan

usaha-usahanja akan dapat lebih disesuaikan dengan keadaan jang sebenarnja didaerah.

Sifat rekonstruksi harus mulai dirubah pula sehingga sifat penampungan (sociale instelling) harus dapat dihilangkan. Terbukti bahwa banjak usaha Rekonstruksi (misalnja proefbedrijven) jang memakai biaja berdjuta-djuta tidak memuaskan hasilnja, bahkan sebaliknja, sebab perlakuan-perlakuan jang serba istimewa oleh Pemerintah terhadap mereka itu lambat laun terbukti tidak „opvoedend", sehingga kemudian mereka dalam persaingan hidup dalam masjarakat sehari-hari tidak dapat mempertahankan diri, karena itu sifat penampungan (sociale instelling) dan keistimewaan-keistimewaan dalam usaha rekonstruksi ini harus lebih tjepat dihilangkan dan sifat rekonstruksi harus lebih tjepat ditudjukan kepada soal pemetjahan pengangguran dan pengurangan kepadatan penduduk pada umumnja, dengan menitik beratkan kepada usaha transmigrasi dan pendidikan-pendidikan kedjuruan jang sesuai dengan kemampuan para bekas pedjoang guna mempermudah mendapat mata pentjaharian hidup.

Oleh karena itu soal rekonstruksi ini tidak dapat dipisahkan dari pada program pembangunan dan kesedjahteraan negara pada umumnja, jang penjelenggaraannja harus sesuai dengan keadaan didaerah-daerah.

Perkembangan B.R.N. pada waktu belakangan ini terasa kurang sehat dan makin lama merupakan perkembangan (doublures), dari hampir semua usaha lain-lain Kementerian. Misalnja B.R.N. mempunjai usaha-usaha Perindustrian, Pertanian, Kehewanan, Perikanan, Pendidikan dan sebagainja, bahkan mempunjai Pamong Pradja dan Kepolisian sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah jang baru ini diambil pedoman, bahwa usaha-usaha jang tehnis dipimpin oleh Djawatan-djawatan dari Kementerian-kementerian jang bersangkutan seperti halnja dalam jang ditentukan dahulu oleh Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1951. Pengoperan tugas-tugas jang tehnis ini tidak perlu didjalankan sekaligus, akan tetapi sedjalan dengan perubahan djiwa (mentale omschakeling) para ex pedjoang dan setelah dibitjarakan dengan staf interdepartemental dapat dikerdjakan berangsur-angsur dan sedemikian rupa sehingga usaha rekonstruksi dapat berdjalan terus.

Dengan dikeluarkannja para anggota Angkatan Perang diluar susunan organik dan bekas anggota Angkatan Perang (ps.

6 (2) a. P.P. No. 1 tahun 1952) dari urusan rekonstruksi ini (Keputusan B.R.N. No. 1 tahun 1953 dan Kabinet pada tanggal 24 Nopember 1953) dan selesainja urusan rekonstruksi terhadap para bekas pedjoang bersendjata jang memenuhi panggilan pemerintah tanggal 14 Nopember 1950 (ps. 6 (2) b P.P. No. 1 tahun 1952) maka tinggallah urusan rekonstruksi terhadap bekas anggota-anggota badan-badan perdjuangan lain-lain (ps. 6 (2) c) jang masih harus diselesaikan sehingga sifat B.R.N. jang „van aflopende aard" itu sudah mulai kelihatan.

Soalnja sekarang lebih djelas lagi dengan keluarnja P.P. No. 6 tahun 1954 sebagai pelaksanaan baru Undang-undang No. 14 tahun 1953 jang dalam pasal 1 ajat 2 b. menjatakan bahwa penampungan anggota-anggota Tentara Nasional Indonesia jang pada waktu pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ternjata tidak masuk formasi tentara, akan dilakukan oleh „Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara". Lagi pula pertjampuran penampungan bekas gerombolan-gerombolan sebagai tindakan pemulihan keamanan oleh Pemerintah tidak akan terdjadi lagi, karena untuk keperluan itu disediakan biaja dan organisasi sendiri oleh Pemerintah.

Untuk sekarang memberi ketentuan siapa jang dimaksud dengan bekas pedjoang bersendjata itu perlu ditindjau lagi perkembangan dari Badan-badan perdjuangan bersendjata sedjak 17 Agustus 1945 (Proklamasi Kemerdekaan) hingga 27 Desember 1949 (penjerahan kedaulatan).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 maka dimana-mana berdirilah Badan Keamanan Rakjat (B.K.R.) didalam mana tergabung pemuda-pemuda jang sudah mempunjai didikan militer (bekas Haiho, bekas Peta, bekas KNIL dan sebagainja), disamping B.K.R. timbul pula lasjkar-lasjkar, barisan-barisan organisasi rakjat jang tudjuannja sama dengan B.K.R. itu.

Dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Oktober 1945 B.K.R. mendjelma mendjadi T.K.R., Tentara Keamanan Rakjat, jang kemudian pada tanggal 7 Djanuari 1946 mendjadi Tentara Keselamatan Rakjat dan pada tanggal 24 Djanuari 1946 mendjelma mendjadi T.R.I. Tentara Republik Indonesia.

Dalam pada itu pada tanggal 23 Pebruari 1946 dibentuk Panitia Besar Penjelenggaraan Organisasi Tentara jang diberi tugas memperbaiki susunan Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan dan menentukan kedudukan lasjkar-lasjkar dan

barisan-barisan bersendjata. Pada tanggal 24 Mei 1946 dibentuklah „Biro Perdjoangan" dalam Kementerian Pertahanan jang akan melebur badan-badan itu dalam tentara.

Kemudian pada tanggal 5 Mei 1947 keluarlah Penetapan Presiden jang mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan lasjkar-lasjkar bersendjata mendjadi Tentara Nasional Indonesia T.N.I.

Djelaslah bahwa setelah itu tidak ada lagi badan-badan serta organisasi-organisasi rakjat bersendjata. Semua ini telah dimasukkan dalam organisasi tentara.

Setelah aksi militer jang pertama T.N.I. mengadakan konsolidasi setjara reorganisasi dan rasionalisasi jang dipertjepat oleh timbulnja peristiwa Madiun.

Dengan timbulnja aksi militer ke-dua maka muntjullah lagi Badan-badan Perdjoangan Bersendjata jang dulunja sudah tidak ada.

Berdasarkan uraian diatas maka djelaslah, bahwa jang dimaksud dengan Bekas Pedjoang Bersendjata dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Bekas Anggota Badan-badan Perdjoangan Bersendjata jang turut serta memperdjoangkan Kemerdekaan Nasional dengan mempergunakan sendjata diwaktu perang Aksi Militer ke-dua.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

B.R.N. tetap terdiri dari seorang Direktur sebagai pemimpin dan sebuah Staf jang terdiri dari Wakil-wakil Kementerian-kementerian jang dianggap ada hubungan kewadjiban dalam usaha rekonstruksi nasional. Bedanja dengan jang dulu ialah B.R.N. sekarang bernaung dibawah Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2.

Tjukup djelas.

Pasal 3.

Menteri Dalam Negeri-lah jang sekarang bertanggung-djawab atas urusan rekonstruksi nasional.

Pasal 4.

Dengan sendirinja usul-usul kepada Menteri Dalam Negeri itu di Kementerian melalui B.R.N. karena sekarang B.R.N. adalah Biro dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 5.

Ajat (1) Tjukup djelas; tidak berbeda dengan definisi jang lama.

Ajat (2) Tjukup djelas dalam pendjelasan umum.

Pasal 6.

Ajat (1). Telah didjelaskan dalam pendjelasan umum.

Ajat (2). Menteri Dalam Negeri dapat membuat Peraturan bahwa mereka jang ditampung oleh B.R.N. itu harus dapat membuktikan, bahwa mereka dalam aksi militer ke-dua turut serta berdjuang dengan mempergunakan sendjata, misalnja dengan surat-surat keterangan dari bekas pemimpinnja, K.O.D.M., Pamong Pradja dan sjarat-sjarat lainnja, dan djika perlu dapat pula mengadakan registrasi para ex pedjoang.

Pasal 7.

Perkembangan B.R.N. jang merupakan perkembangan (doublures) dari hampir semua usaha pemerintahan dirasakan kurang sehat. Pun djuga karena negara kita masih kekurangan tenaga-tenaga teknis, sehingga pembagian tenaga-tenaga ahli itu dianggap kurang efisien. Lagi pula sekarang telah mulai terasa kesulitan-kesulitan kedudukan pegawai-pegawai spesifik (ahli) jang berada di B.R.N. Oleh karena itu sekarang diambil sebagai pedoman bahwa usaha-usaha jang tehnis itu dipimpin oleh Djawatan-djawatan dari Kementerian-kementerian jang bersangkutan.

Pasal 8.

Pedoman tersebut dalam pasal 7 itu tentunja tidak dapat dilaksanakan begitu sadja. Karena itu dalam pasal ini ditentukan bahwa pelaksanaannja dapat didjalankan berangsur-angsur sehingga pekerdjaan rekonstruksi tidak terganggu. Dalam melaksanakan pedoman ini tidak dapat ditinggalkan permufakatan dengan Kementerian-kementerian jang bersangkutan dan dalam soal ini anggota-anggota staf interdepartemental dari B.R.N. akan mempunjai peranan jang aktif.

Pasal 9.

Pasal ini merupakan pasal peralihan.

III. LAHIRNJA UNDANG-UNDANG No. 75 TAHUN 1957.

1. Faktor-faktor jang meliputi masalah veteran.

Sudah djelaslah kiranja, bahwa masalah Pedjoang Kemerdekaan bukanlah masalah mereka sendiri. Ia berdjoang dengan keichlasan berkorban dan dengan tiada pamrih untuk kepentingan Kemerdekaan Bangsanja. Bila ia mempunjai masalah adalah harus mendjadi masalah nasional, masalah seluruh masjarakat Indonesia.

Tetapi sebaliknja, masalah nasional seluruhnja, bagi Pedjoang Kemerdekaan seharusnja mendjadi masalahnja. Karena pada hakekatnja Pedjoang Kemerdekaan adalah djuga Pedjoang Revolusi Indonesia. Dan Revolusi Indonesia ini adalah kewadjiban seluruh Bangsa Indonesia. Dimana kini revolusi itu belum selesai.

Sudah dapat dipastikan akan timbul satu dilema, bila pada waktu Periode Survival antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1956 semua problema diserahkan semata-mata kepada kedua faktor tersebut, karena masjarakatnja:

(a) Masjarakat jang mempunjai problema-problemanja sendiri.

(b) Masjarakat jang kapitalistis, feodalistis dan liberalistis jang belum mengenal landasan dan tudjuan revolusi.

(c) Masjarakat jang tak mau menghargai djasa-djasa para pahlawannja, dan tak ingin mengetahui adanja problem pahlawannja, dan tak ingin mengetahui adanja problema-problema pedjuangnja. Bahkan antipati dengan adanja problema-problema itu (belum pedjoang minded).

Pedjuang Kemerdekaannja:

(a) Tidak atau belum mengenal landasan dan tudjuan revolusi jang sebenarnja. Ia hanja mengenal kemerdekaan berarti bebas dari kekuasaan asing, dalam pengertian politik. (Belum mempunjai doktrine Revolusi Indonesia jang mendalam).

(b) Timbul anggapan bahwa perdjuangan telah selesai. Sudah waktunja mendapat penghargaan dan penghormatan jang

lajak dari fihak masjarakat. Tetapi harap-harap tjemas, ketjewa dengan sambutan masjarakat jang berlawanan sikapnja.

(c) Sosial-ekonomis sangat buruk bila dibandingkan dengan masjarakat jang dihadapinja.

Dengan fakta-fakta jang ada ini, dan ditimbulkan oleh adanja kontradiksi-kontradiksi itu, maka kewadjiban instansi tertinggi dari Negara Republik Indonesia, jaitu Pemerintah-lah jang harus memetjahkan dilema itu. Pemerintah jang tidak hanja masalah Pedjuang Kemerdekaan sadja jang harus dipetjahkan, tetapi banjak masalah-masalah lain jang perlu diselesaikan.

Untuk tidak mengelabui kenjataan, sajogyanja faktor jang meliputi pemerintahan diwaktu itu diutarakan pula sebagai berikut:

a. Pemerintahan tjampuran antara manusia jang non dan cooperation, jang sukar untuk dapat menghargai djasa-djasa pahlawannja.
b. Pemerıntahan jang belum dilandasi program-program revolusioner, berdasarkan garis-garis Revolusi Indonesia jang sebenarnja.
c. Pemerintahan jang labil, jang mudah terpengaruh oleh gontjangan-gontjangan masjarakat jang baik datangnja dari luar, maupun dari dalam sendiri. Karena kekuasaannja berdasarkan sistim demokrasi jang berlaku, jaitu demokrasi liberal.
d. Pemerintahan jang tak terikat sepenuhnja dari kemudinja, jang mendjiwai ide-ide Revolusi Indonesia, jaitu Bung Karno, jang kini telah diangkat oleh Rakjat Indonesia mendjadi Pemimpin Besar Revolusi Indonesia.

Dengan demikian sangat mudah dimaklumi, kalau masalah Pedjuang Kemerdekaan jang lebih populer disebut Veteran ini, tidak mendapat hantering setjara serieus. Meskipun ada ideeidee jang baik dan madju, tetapi dengan adanja sifat dan tjara jang tidak menjeluruh; seperti dari satu peraturan kelain peraturan; dari satu kekuasaan kelain kekuasaan, bahkan mendjadikan masalah itu berlarut-larut adanja.

2. Timbulnja ide penjelesaian jang menjeluruh.

Pada achir tahun 1956, masalah Veteran telah mendjadi bertumpuk-tumpuk; adanja dan bertumpuk-tumpuknja masalah telah teruraikan dalam pasal terdahulu.

Orang telah ramai membitjarakan tentang pengangguran Pedjoang Kemerdekaan, tentang banjaknja organisasi. Pedjoang Kemerdekaan sendiri telah ramai pula membitjarakan masalah-masalah dibidang komersiil, membarengi adanja berbagai-bagai krisis. Sebutan Veteran telah mulai mendengung-dengung, meskipun pengertian umum tentang sebutan itu masih simpang-siur; bersama dengan berbisiknja suara dari disana-sini jang penjalah-gunaan sebutan dan penggunaan oleh mereka jang tidak berhak.

Kiranja keadaan telah matang untuk setjara serieus mengusahakan adanja penjelesaian masalah Veteran setjara menjeluruh dan menjatukan seluruh potensi revolusi itu dalam satu organisasi. Dan usaha-usaha ini mendapat sambutan dari seluruh masjarakat, Veteran sendiri, Pemerintah dan terutama fihak Angkatan Perang. Karena dirasa betapa hebat gangguan jang akan terdjadi, gangguan terhadap usaha-usaha pembangunan, dan gangguan terhadap djalannja revolusi. Djustru Veteran-lah salah satu potensi penting untuk melandjutkan revolusi.

Walaupun alasan-alasan masing-masing fihak berlainan sesuai dengan kepentingan masing-masing, tetapi faktor objektif akan menentukan perlu atau tidaknja persatuan.

Terlepas dari hal-hal jang bersifat petualangan, atau penjalah-gunaan, selama Veteran itu mau mendasarkan kepada kedudukannja sebagai Pedjoang Kemerdekaan, pada hakekatnja hanja mempunjai satu kepentingan jang terdiri dari dua elemen, jang berdjalinan satu dengan jang lain:

a. melandjutkan revolusi bangsanja;
b. menjelesaikan masalahnja sendiri.

Hal jang kedua ini sesungguhnja tidak perlu, bila jang mengurusnja tjukup menjadari betapa besar potensi ini.

Masjarakat menjambut usaha-usaha adanja penjatuan dan penjelesaian masalah Veteran setjara menjeluruh, agar segera terhindar dari gangguan jang bertubi-tubi datangnja. Belum lagi karena simpatinja atau telah Veteran minded.

Dari fihak Pemerintah serta Angkatan Perang sangat menghendaki adanja penjatuan Veteran, beralasan:

a. pengumpulan dan pengaturan potensi revolusi;
b. memudahkan pengurusan dan penjelesaian masalahnja;
c. mengurangi gangguan keamanan dan ganguan dibidang lain dalam pembangunan, temasuk pentjegahan pengguna-

an potensi revolusi ini oleh fihak-fihak atau golongan-golongan tertentu;

d. penjempurnaan Angkatan Perang harus distimulir oleh baiknja pengurusan masalah Veteran.

Oleh sebab itu Kepala Staf Angkatan Darat Djenderal A.H. Nasution mengambil inisiatif untuk:

a. Mengadakan Kongres Veteran R.I. dan menugaskan Let. Kol. R. Pringadi untuk membentuk Panitia Kongres jang terdiri dari angota-anggota Angkatan Perang dan tokoh-tokoh representatief dari para Veteran.

Wakil-wakil Veteran:

Angkatan Perang/Angkatan Darat:

Let.Kol. R. Pringadi
Major Suhardjo
Major Pamurahardjo
Kapten Said Pratalikusuma

Ikatan Tjatjat Veteran Indonesia:

Sdr. Hasan Basri
Sdr. Bachnan
Sdr. Suharto

Peladjar Pedjoang Seluruh Indonesia:

Sdr. Sujatmo Siswohardjojo
Sdr. S. Margono
Sdr. Santoso

Perbepsi:

Sdr. Supardi
Sdr. Hadiwasisto
Sdr. Muslaman
Sdr. Geno Susanto

Pedjoang Islam:

Sdr. Saleh Iskandar

Ikabepi:

Sdr. D.S. Tarigan.

b. Dalam persiapan pembuatan tudjuh Undang-Undang dalam rangka Undang-Undang Pokok Pertahanan, memerintahkan kepada Let. Kol. Kartakusumah jang dibantu oleh Mr.

Basarudin Nasution untuk menjiapkan djuga Rantjangan Undang-Undang Veteran.

Tudjuh Rantjangan Undang-Undang dimaksud ialah:

a. Undang-undang Wadjib Militer (Wamil) atau milisi rakjat.
b. Undang-undang Wadjib Latih (Wala).
c. Undang-undang Sukarela (Sula).
d. Undang-undang P.3.R.
e. Undang-undang Tjidera.
f. Undang-undang Kepahlawanan.
g. Undang-undang Veteran.

Setelah diadakan konsultasi dengan beberapa fihak, tokoh-tokoh Veteran, tokoh-tokoh Angkatan dan para Pedjabat satu Masjarakat jang ada sangkut-pautnja dengan masalah Veteran, maka konsepsi Rantjangan Undang-Undang Veteran tersebut diserahkan kepada Panitia Kongres Veteran dan J.M. Menteri Chaerul Saleh kemudian setelah beliau mendjabat Menteri Urusan Veteran R.I.

Kongres Veteran jang pertama berlangsung pada tanggal 22 sampai dengan 30 Desember 1956, dihadliri oleh tidak kurang dari 3000 orang wakil-wakil Veteran jang datang dari seluruh-pendjuru tanah air, dan Kongres mengambil keputusan sebagai berikut:

PERNJATAAN.

Kongres Nasional Pedjoang Kemerdekaan (VETERAN) Seluruh Indonesia jang diadakan di Djakarta pada tanggal 25 Desember 1956 s/d 2 Djanuari 1957 setelah:

Mendengar:

a. Prasaran Panitia Kongres Veteran mengenai bentuk Organisasi Veteran di Indonesia dalam Sidang Pleno tanggal 27 Desember 1956.
b. Pernjataan para Utusan Kongres dalam Pemandangan Babak Pertama di Sidang Pleno tanggal 29 dan 30 Desember 1956.
c. Laporan Komisi Perumus Organisasi jang disampaikan pada Sidang Pleno tanggal 1 Djanuari 1957.

Menimbang: Perlu adanja suatu Badan jang akan memimpin dan mengatur kerdja sama diantara Organisasi massa Veteran dan mewakili kaum Veteran dalam hubungan dengan Pemerintah dan Organisasi-organisasi Veteran Internasional.

1. Terhitung mulai tanggal 2 Djanuari 1957 menjatakan berdirinja Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia.
2. Menetapkan Anggaran Dasar Legiun Veteran sebagaimana terlampir.

Medan Kongres tanggal 2 Djanuari 1957.
Presidium.
Ketua,
LET.KOL. R. PIRNGADIE.

Wk. Ketua I,
SHOLEH ISKANDAR.

Wk. Ketua II,
CHAIRUL SALEH.

P.J.M. Presiden, jang selalu mengkuti pertumbuhan keadaan para Pedjoang Kemerdekaan pada tanggal 2 April mengambil keputusan sebagai berikut:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 103 TAHUN 1957
tentang
„LEGIUN VETERAN".

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang: Bahwa perlu diadakan suatu Badan jang mengatur kerdja sama diantara Organisasi-organisasi kaum Veteran didalam Negeri dan hubungan antara kaum Veteran dengan Instansi-instansi Pemerintah dan Organisasi-organisasi Veteran Internasional;

Membatja: surat Badan Pekerdja Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia tertanggal 29 Djanuari 1957 No. 19/Sek/1957;

Mengingat: pasal 20 dan 31 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja tanggal 31 Djanuari 1957;

M e m u t u s k a n :

M e n e t a p k a n :

I. Terhitung mulai 1 Djanuari 1957 mengesjahkan pembentukan Legiun Veteran Republik Indonesia dan mengakuinja sebagai satu-satunja badan jang mewakili kaum Veteran dalam hubungannja dengan Instansi-instansi Pemerintah dan Organisasi-organisasi Veteran Internasional.
II. Mengesahkan Anggaran Dasar Legiun Veteran Republik Indonesia tertanggal Djakarta 2 Djanuari 1957 sebagaimana dilampirkan surat keputusan ini.
III. Mengesjahkan Pandji Legiun Veteran Republik Indonesia jang bentuknja sebagaimana dimuat dalam gambar jang dilampirkan pada surat keputusan ini.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal 2 April 1957;
Presiden Republik Indonesia.
SUKARNO.
Perdana Menteri,
ALI SASTROAMIDJOJO.

Sesuai dengan aslinja,
Sekretaris Presiden.
Mr. SANTOSO.

Perlu didjelaskan disini, tentang hubungan Veteran Indonesia sebelum adanja Legiun Veteran R.I. dengan dunia Internassional. Ikatan Tjatjad Veteran Indonesia pada bulan Oktober 1954 telah ikut menghadiri Kongres World Veterans Federation (W.V.F.) di Wiena, dan diwaktu itu djuga Indonesia diterima sebagai anggota W.V.F. jang dengan aklamasi.

Dalam Kongres tersebut Sdr. Hasan Basri, ketua I.T.V.I. telah ditetapkan sebagai counsil member W.V.F. jang mewakili Indonesia.

Pada Kongres W.V.F. jang ke-V. di Berlin Barat pada bulan Oktober 1957, Legiun Veteran Republik Indonesia, sesuai dengan keputusan Kongresnja ikut menghadiri Kongres tersebut.

Berdasarkan keputusan Presiden nomer 103 tahun 1957, Ikatan Tjatjad Veteran Indonesia menarik diri dari keanggotaan W.V.F. dan kedudukannja diganti oleh Legiun Veteran R.I., jang diterima sebagai anggota setjara aklamasi oleh kongres tersebut.

Sebagai wakil Indonesia ditetapkan Ketua Legiun Veteran Let. Kol. R. Pirngadi.

Dan tak lama kemudian, jaitu pada tanggal 29 April 1957 P. J. M. Presiden memutuskan untuk mengangkat Chairul Saleh, Wk. Ketua Legiun Veteran R.I. sebagai Menteri Negara Urusan Veteran, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 1957, tanggal 16 Mei 1957.

Segera sesudah pengangkatan ini, J. M. Menteri Chairul Saleh dengan bahan-bahan jang terkumpul, menjiapkan Rentjana Undang-Undang Veteran, untuk dapat segera pula diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat (D.P.R.).

Sementara itu diluaran masih ramai adanja keinginan dan tuntutan, sesuai dengan kehendak Kongres Veteran jang baru lalu, jaitu:

a. Segera diadakan Kementerian penuh bagi pengurusan masalah Veteran.
b. Diadakan Undang-undang Veteran jang dapat mendjamin penjelesaian masalah Veteran setjara menjeluruh, dan sebagai pengakuan pula bahwa masalah Veteran adalah masalah nasional dimana seluruh masjarakat wadjib serta menjelesaikannja.

Pada tanggal 23 Djuli 1957, diputuskan oleh P. J. M. Presiden R.I. adanja Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomr 162 Tahun 1957.

Hal ini memang berpengaruh terhadap tjepatnja pengesjahan Undang-Undang Veteran oleh Dewan Perwakilan Rakjat (D.P.R.) (disetudjui atau disjahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat dalam pleno terbuka ke-82, pada hari Senen tanggal 9 September 1957, dan diundangkan pada tanggal 13 Desember 1957, Lembaran-Negara Nomer 162 Tahun 1957).

Dengan ini terbukalah lembaran baru bagi seluruh Veteran Pedjuang Kemerdekaan dan pengurusannja. Karena dengan diundangkannja Undang-undang Nomor 75 Tahun 1957 ini, berarti dimulainja pengurusan setjara menjeluruh. Menjeluruh dalam pengertian, adanja satu landasan hukum jang berlaku bagi seluruh masjarakat Indonesia, untuk menghormati dan menghargai djasa-djasa semua Veteran Pedjoang Kemerdekaan dengan berbagai segi-seginja, serta mengarahkan mereka kepada satu tudjuan, jaitu penggunaannja bagi Revolusi Indonesia. Dan dengan berlakunja Undang-undang ini, berarti pula dimulainja hanja satu instansi Pemerintah untuk pengurusan semua golongan Veteran.

a. jang telah gugur.
b. jang telah bekerdja.
c. jang masih beladjar.
d. jang menganggur.
e. jang tjatjat (tjedrra) akibat perdjoangan.
f. jang berusaha/ingin berusaha setjara sendiri, atau bersama diantara mereka (oto-activitas).
g. jang masih menganggur dan ingin kembali kepekerdjaan semula.
h. jang tak mampu, karena perikehidupannja.
i. jang ditinggalkan oleh si-gugur; jaitu djanda dan jatim-piatu.

Selain memberikan landasan kepada semua golongan menurut masalahnja, Undang-undang No. 75 tahun 1957, memberikan landasan pula untuk mengadakan registrasi (pendaftaran, penjaringan dan pengakuan), serta memberikan sangsi-sangsi terhadap penggunaan predikat Veteran bagi jang tidak berhak dan penjalah-gunaan bagi jang berhak. Hal ini mendjadi salah satu pokok jang urgen, karena sebelumnja tak pernah ada satu registrasi jang sempurna, sehingga memungkinkan penjalah-gunaan-penjalah-gunaan.

Dan Undang-undang ini memberikan landasan pula untuk memberi pengakuan kepada mereka jang berdjoang untuk

mempertahankan kemerdekaan, dalam peperangan antara Republik Indonesia dengan negara lain.

Semua hal jang bersangkut-paut dengan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia termasuk kewadjibannja, diberikan landasan hukumnja oleh Undang-undang ini. Tidak seperti waktu-waktu sebelumnja, dimana untuk tiap-tiap penjelesaian masalah itu diadakan peraturan sendiri-sendiri jang tak terpusat kepada satu ide-dasar, dan pelaksanaan pengurusannja dilakukan oleh berbagai-bagai instansi.

a. Satu Undang-undang.
b. Untuk seluruh masalah Veteran.
c. Satu instansi pengurusan.
d. Satu organisasi perdjoangan bagi massa Veteran,

adalah satu kemadjuan (progresif) bagi sedjarah keveteranan di Indonesia. Apakah dengan ini sudah dapat dinjatakan sebagai penjelesaian masalah Veteran setjara revolusioner ?

Revolusioner dalam arti landasan hukum dan aparat pelaksanaannja, telah di-subordinasikan atau merupakan bagian dari arah tudjuan revolusi.

Menurut ide-ide jang diutarakan sebagai kesan-kesan oleh para kreator dan konseptor, maupun dari eksponen dari eksponen Pedjoang Kemerdekaan, usaha-usaha penjelesaian masalah ini setjara, integraal, djustru agar kelandjutan revolusi itu tidak terhambat karenanja, bahkan memberikan dorongan kepada penjelesaian revolusi Tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang tertera dalam Undang-undang Nomor 75 Tahun 1957, kesan-kesan tersebut tidak termuat sama sekali.

Namun hal in dapat dimengerti, bahasa masjarakat seluruhnja termasuk Pedjoang Kemerdekaannja, diwaktu itu sedang mulai kembali berbitjara banjak tentang revolusi dan keinginan adanja masjarakat adil dan makmur. Tidak seperti sekarang ini, setelah P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi memberikan garis landasan Revolusi Indonesia. Dari azasi-nja, dasarnja, haluannja sampai kepada tudjuan Revolusi Indonesia.

Bila ditindjau dari segi perundang-undangan dan pelaksanaan penjelesaian masalahnja sendiri adalah revolusioner.

Tetapi revolusioner atau tidaknja menurut kenjataan, akan banjak tergantung kepada kebidjaksanaan pelaksanaannja dalam membawakan ide revolusioner melalui ketentuan-ketentuan jang klasik-konvensionil jang berlaku untuk Veteran serta

masjarakat, didalam keadaan seperti antara tahun 1957 sampai tahun 1959.

3. **Aktivitas setelah adanja Undang-undang.**

Sedjak adanja Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia sampai dengan dirobahnja mendjadi Departemen Urusan Veteran Republik Indonesia, berarti sedjak adanja Undang-undang Nomor 75 Tahun 1957 sampai dengan adanja regrouping kabinet dari Kabinet Karya mendjadi Kabinet Kerdja berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 153 Tahun 1959, tanggal 10 Djuli 1959, jaitu lima hari setelah Dekrit Presiden, Kembali ke Undang-undang Dasar 1945, berarti pula selama J.M. Menteri Chairul Saleh mendjabat Menteri Urusan Veteran Republik Indonesia; banjak hal-hal jang dilakukan oleh Kementerian Urusan Veteran sebagai follow-up dari Undang-undang, merintis penjusunan aparat dan memberikan landasan hukum pelaksanaannja.

Dalam keadaan terpaksa, dimana sedang diletakkan landasan-landasan pelaksanaan, telah dihadapkan satu kenjataan adanja masalah-masalah jang tak dapat ditangguhkan penjelesaiannja. Oleh sebab itu kebidjaksanaan Kementerian Urusan Veteran R. I. diletakkan atas tiga pokok:

a. memberikan pelajaran terhadap masalah-masalah jang sangat urgen, setjara tambal sulam dengan tidak bertentangan dengan materi/maksud Undang-undang.
b. memberikan landasan hukum, guna pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan Undang-undang.
c. merintis aparat pelaksanaan, termasuk kerdja-sama dengan organisasi masa Veteran dan instansi-instansi lain jang ada sangkut-pautnja dengan penjelesaian masalah Veteran.

Perlu diutarakan disini bagaimanapun baiknja rentjana-usaha itu, semua tak dapat dilepaskan dari situasi masjarakat diwaktu tertentu, dimana rentjana dan usaha-usaha itu akan diselenggarakan, terutama support jang harus datang dari fihak massa Veteran sendiri.

Hal-hal jang dapat diselenggarakan:

a) Dibentuk Dewan Pelaksana Kementerian Urusan Veteran, jang anggotanja terdiri dari para Pimpinan Kementerian, anggota-anggota Pimpinan Legiun Veteran Pusat dan tokoh-tokoh Veteran anggota D.P.R.; jang berkewadjiban

memberikan saran-saran pelaksanaan Undang-undang kepada Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia. Dewan ini dipimpin sendiri oleh J.M. Menteri Urusan Veteran.

b) Penjusunan Aparatur/Kementerian dari Pusat sampai di Daerah-daerah :

— P u s a t : Kementerian Urusan Veteran R.I. Pimpinan dengan bagian-bagiannja.

— D a t i I : Koordinator Urusan Veteran R.I. Pimpinan beserta urusan2-nja. (KOMUVRI).

— D a t i II : Kantor Urusan Veteran R.I. beserta Stafnja (KUVRI).

Tetapi belum seluruh Dati II dapat diselesaikan.
Dalam penjusnnan aparat ini selalu diadakan kerdja-sama dan diminta bantuan dari Kementerian Pertahanan (Keputusan Bersama Menteri Urusan Veteran/Menteri Pertahanan Nomor 42/Kpts/th.1957).
Kiranja perlu ditjatat disini, bahwa kelemahan-kelemahan dapat terdjadi dalam pelaksanaan tugas ini, bila para petugasnja adalah bukan Veteran Pedjoang Kemerdekaan jang tidak mendjiwai dan mengerti tentang masalah dan pengurusannja.

c) Pengoperan pengurusan Veteran dari B.R.N. dan K.U.D.P. serta Kementerian Pertahanan (dibidang Keuangan) sebagai pelaksaanaan pasal 3 dari Undang-undang No. 75 Tahun 1957.(C.T.N. belum disinggung-singgung, karena seolah-olah masih dalam ikatan Angkatan Perang, dan tidak seluruhnja terdiiri dari Veteran).

d) Mengatur dan melaksanakan Undang-undang No. 75 Tahun 1957, dalam bidang pendaftaran, berdasar pasal 1, pasal 4 ajat 1, dan pasal 5, dengan P.P. No. 38 Tahun 1958, tentang Pendaftaran, Penjaringan dan Pengakuan Veteran R.I., dan P.P. No. 15 Tahun 1959, jo P.P. No. 38 Tahun 1958, tentang Perobahan dan Penambahan.
Pelaksanaan dalam hal ini baru sampai taraf pendaftaran didaerah-daerah dan sedikit penjaringan. Kesulitan technis banjak dialami, dikarenakan sukarnja transport bagi daerah-daerah pedalaman. Dan bagi para Veteran sangat sukar untuk mendapatkan persaksian, karena telah terpisah djauh dari kesatuan-kesatuan maupun Komandan-komandan mereka.

e) Mengatur dan melaksanakan Pendidikan/latihan kerdja, berdasar Undang-undang No. 75 Tahun 1957 pasal 8, dengan P.P. No. 5 Tahun 1958, tentang Pendidikan Kedjuruan dan atau Latihan Kerdja.

Dalam melaksanakan tugas dibidang ini selalu didasarkan kepada kemungkinan kebutuhan tenaga kerdja, baik dipusat maupun didaerah, tetapi tidak dapat didasarkan permintaan setjara konkrit dari masjarakat; karena pada umumnja masjarakat masih tak atjuh terhadap penggunaan tenaga Veteran. Alasan jang mungkin berlaku, hanjalah bila Veteran itu achli, tjakap, tangkas serta bertingkah lagi baik bagi penerima.

Oleh sebab itu dalam pelaksanaan pendidikan dititik beratkan kepada satu sistim jang diberatkan kepada praktyk dan mengenal kehidupan rakjat disamping teori-teori jang diperlukan. Hal ini akan banjak mempengaruhi mental. Dijakini pula oleh Kementerian Urusan Veteran, bahwa mentale omschakeling dan membentuk djiwa revolusioner tak dapat diadakan peng-chususan, umpamanja semata-mata diadakan indoktrinasi, didalam situasi masjarakat diwaktu itu.

Sulit pula didalam situasi dimana berlaku systeem pendidikan lama, untuk mendapatkan pengakuan idjazahnja. Djadi titik berat policy pendidikan diarahkan kepada perbuatan kader pembangunan, dengan tak menggantungkan kepada pengakuan civil-effect.

Hampir diseluruh daerah2 Dati I, diadakan:

— K.P.A.P.P. : Kursus Pengetahuan Administrasi Perusahaan dan Perdagangan.

— K.K.I. : Kursus Kader Industri.

— P.P.L.P.P. : Pusat Pendidikan dan Latihan Pionir Pembangunan. Ditudjukan kepada pembuatan Kader Pimpinan Transmigrasi dan Pembangunan Masjarakat Desa.

— A.P.N. : Akademi Pembangunan Nasional, untuk tingkat tertinggi.

— Pengiriman Peladjar Veteran ke Luar Negeri.

Psikologis dapat memenuhi keinginan Veteran, jaitu dalam waktu jang tidak terlalu lama dapat memenuhi kebutuhan hidupnja serta berbakti kepada Negara.

f) Mengatur dan melaksankan penjaluran Veteran berdasar Undang-undang No. 75 Tahun 1957, pasal 9, dengan P.P. No. 19 Tahun 1958, dan mengatur procedure antara masjarat dan Kementerian serta Koordinator-koordinator. Tetapi tidak/lantjarnja penjaluran masih akan banjak tergantung kepada sikap masjarakatnja.
Dalam hal ini tak terlupakan kerdja-sama dengan Kementerian Perburuhan R.I. dan Kantor Urusan Pegawai.

g) Membuka lapangan pekerdjaan baru, jang berlandaskan kepada dua kepentingan:
— penampungan bagi Veteran.
— pembangunan Negara.
Untuk ini banjak diusahakan bantuan dan hubungan dengan Negara asing, baik dalam rangka pampasan-perang maupun kredit.
Hal-hal jang dimulai pelaksanaannja:
— Pabrik kertas 2 tempat.
— Galangan kapal 4 tempat.
— Pembuatan Coaster dan tuchboat.
— Pabrik kapur.
— Industri bata.
— Perusahaan Pelajaran.
— Dan lain-lain.

h) Mengadakan kerdja-sama jang meluas, dengan berbagai instansi dan Kementerian dalam memperlantjar pelaksanaan tugas2 bimbingan terhadap para Veteran.

4. Situasi Legium Veteran.

Sementara berlangsung kesibukan-kesibukan dalam tugas jang sangat urgen dari Kementerian Urusan Veteran, organisasi-organisasi massa Veteran jang masih merasa mempunjai hak hidup dan Legiun Veteran jang merupakan badan federatif belum dapat menjesuaikan dengan kemauan Pemerintah. Meskipun ide Keputusan Presiden 103 tahun 1957, menghendaki kesatuan usaha dan gerak dalam rangka pemupukan djiwa persatuan, sesuai dengan tuntutan Kongres Veteran sendiri, namun belum mampu menghadapi arus masjarakat liberalistis jang kian memuntjak. Masjarakat Veteran tersebut pula dalam kantjah persaingan jang tidak sehat, dibidang komersil dan terutama dibidang politik-idologis. Sehingga Pimpinan Legium Veteran merasa perlu untuk mengadakan Konperensi Pleno

Pusat di Djawa-Timur. Tetapi usaha ini gagai, karena konperensi itu sendiri tak dapat menghindari pengaruh jang dibawa dari luar masalahnja.

Hal ini memaksa Penguasa Perang Pusat mengambil langkah-langkah serieus dengan mengeluarkan keputusan tentang larangan adanja kegiatan-kegiatan dari organisasi-organisasi Veteran, Peperpu No. 033/1958 tertanggal 3 Nopember 1958. Dan segera disusul dengan Maklumat Menteri Urusan Veteran R.I. Nomor 97/M.K./KUV/58, tertanggal 27 Oktober 1958, sebagai andjuran kepada seluruh massa dan organisasi-organisasi Veteran untuk berfusi.

Dengan rasa tanggung-djawab jang sebesar-besarnja, Badan Pekerdja Legiun Veteran R.I. mengadakan sidangnja di Djakarta, guna memenuhi andjuran Pemerintah tersebut, dan memutuskan untuk membentuk Panitia ad hock untuk menjusun Anggaran Dasar baru jang sesuai dengan keinginan Pemerintah.

Dan pada tanggal 2 Djanuari 1959 keluarlah Pernjataan Badan Pekerdja Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, sebagai berikut:

PERNJATAAN

BADAN PEKERDJA PUSAT LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Kami kaum Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia menginsjafi, bahwa Perdjoangan untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia, jang bertjita-tjitakan Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan, Kemanusiaan, Keadilan, Kemakmuran dan Kebahagiaan, berdjalan terus menudju kesempurnaannja, sesuai dengan djiwa Proklamasi 17 Agustus '45.

Untuk mengisi dan membangun Kemerdekaan jang telah kita miliki itu, perlu adanja kesatuan tjita, gerak dan langkah dalam rangka menghimpun kembali tenaga massa potensi kaum Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam suatu Organisasi jang tersusun rapih sebagai alat perdjuangannja.

Insjaf dan sadar akan funksi dan peranan jang harus dibawakan oleh kaum Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dewasa ini, serta tanggung-djawabnja terhadap masjarakat dan Negara, untuk bersama-sama potensi Nasional lainnja mewudjudkan Masjarakat jang adil makmur bahagia, maka bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-II Legiun Ve-

teran Republik Indonesia setelah memperhatikan arti dan isi U.U. 75/57 keputusan Presiden No. 103/57, keputusan bersama Menteri Urusan Veteran dan K.S.A.D., peraturan Penguasa Perang Pusat No. 033/58 beserta Pedoman Peleburan Organisasi pelaksanaannja, Keputusan Sidang Pleno ke-II di Puntjak dan laporan Panitia Ad Hock penjempurnaan Anggaran Dasar berketetapan atas nama kaum Veteran Seluruh Indonesia untuk menjatakan Keputusan-keputusan Badan Pekerdja Pusat sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 2 Djanuari 1959 menetapkan Legium Veteran Republik Indonesia mendjadi Organisasi kesatuan keluar dan kedalam jang merupakan satu-satunja Organisasi dan alat Perdjoangannja kaum Veteran Seluruh Indonesia.
2. Menetapkan sebagai Pedoman Kerdja Anggaran Dasar Legium Veteran Republik Indonesia jang mendjadi lampiran dari pernjataan ini.
3. Mengusulkan pada Pemerintah untuk mengakui dan mengesjahkan Anggaran Dasar Legium Veteran Republik Indonesia tersebut dalam ajat 2 (dua).

Semoga Tuhan Jang Maha Esa senantiasa melindungi persatuan dan perdjoangan kaum Veteran dan mentjapai tjitatjitanja.

Djakarta, 2 Djanuari 1959.

ATAS NAMA

KAUM VETERAN PEDJOANG KEMERDEKAAN

SELURUH INDONESIA.

BADAN PEKERDJA PUSAT
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama	Djabatan	Tanda-tangan
1.	Kol. R. Pirngadi	Ketua Umum	ttd.
2.	Chairul Saleh	Ketua I	ttd.
3.	Sholeh Iskandar	Ketua II	ttd.
4.	Moh. Munasir	Sek. Djen.	ttd.
5.	Let. Kol. R. Soehardjo	Wk. Sek. Djen.	ttd.
6.	Majoor Isa Idris	Ketua Dep. W.B.U.	ttd.
7.	S. Mustaman	Ketua Dep. Pend./Pen.	ttd.
8.	R. Mustofa	Ketua Dep. Sosek.	ttd.
9.	Basuki Ramelan	Ketua Dep. Pel. Keu./Perb.	ttd.
10.	S. Margono	Ketua Dep. Pel. Vet.	ttd.
11.	U.E. Rangkuti	Ketua Dep. Keb/01.	ttd.
12.	A. Bachman	Ketua Dep. Tjavet.	ttd.
13.	Moh. Munauwar	Ketua Biro Urs. Pemb/	ttd.
		Tah/Pen.	ttd.
14.	F. Suhardjo Rebo	Ketua Biro Urs. Um./Org.	ttd.
15.	Kamagi	Ketua Biro Urs. L.N.	ttd.

Dengan ini terhindarlah mala-petaka jang mungkin timbul dikalangan Veteran Republik Indonesia. Dan dengan ini pula diharapkan agar Legiun Veteran sebagai satu-satunja organisasi massa Veteran, kedalam dapat memberikan bimbingan serta pimpinan kepada seluruh massa Veteran di Indonesia, keluar sebagai Pedjoang Kemerdekaan jang konsekwen dapat selalu mendjadi pelopor melandjutkan Revolusi Bangsa Indonesia dan teladan seluruh rakjat jang sedang berdjoang untuk keadilan dan kemakmuran.

Tjatatan: Pada waktu terdjadi pemberontakan P.R.R.I., diumumkan Dekrit Perdana Menteri Nomor 158/P.M./1958 tanggal 2 Mei 1958 dan keputusan Menteri Urusan Veteran R.I. Nomor 110/Kpts/Tahun 1958 tanggal 2 Mei 1958.

5. **Sesudah lahirnja Dekrit Presiden 5 Djuli 1959.**

Lima hari sesudah lahirnja Dekrit Presiden, untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, pada tanggal 10 Djuli 1959, Presiden Republik Indonesia mengadakan re-grouping Kabinet, dari Kabinet „Karya" ke Kabinet „Kerdja".

Dengan adanja re-grouping ini, maka J.M. Menteri Chairul Saleh diangkat mendjadi Menteri Pembangunan, dan Kolonel Sambas Atmadinata Sekertaris Djenderal Kementerian Urusan

Veteran diangkat mendjadi Menteri Muda Urusan Veteran, jang tak lama kemudian kata-kata muda dihapuskan, selandjutnja hanja disebut Menteri Urusan Veteran. Nama Kementerian dinjatakan dirobah mendjadi Departemen, karenanja Kementerian Urusan Veteran mendjadi Departemen Urusan Veteran, berkedudukan dibawah Menteri Inti Pertahanan/Keamanan.

Sedjak ini Departemen Urusan Veteran R.I. dengan singkatan (D.U.V.R.I.) tidak mengadakan perobahan politik/kebidjaksanaan, sesuai dengan pernjataan Kol. Sambas Atmadinata dalam konferensi persnja setelah diadakan serah-terima djabatan, sebagai berikut:

> „Dengan perobahan Pemerintahan sekarang ini tidak akan ada perobahan dalam penjelesaian masalah Veteran dari apa jang telah didjalankan oleh Pemerintah jang lalu. Tetapi dalam Legiun akan terdapat perobahan, antara lain Ketua Umumnja akan diberi tugas sebagai seorang Komandan".

Namun demikian teknis diadakan perobahan-perobahan didalam banjak hal:

a. Organisasi pimpinan D.U.V.R.I. diadakan perobahan-perobahan; bagian-bagian didjadikan biro-biro, dan bagian pendidikan dan penjaluran, dipetjah mendjadi dua bagian dan masing-masing mendjadi biro, guna memberikan efisiensi kerdja, karena bidang-bidang ini dianggap bidang-pokok bagi penjelesaian masalah Veteran.
   Nama untuk Pusat : D.U.V.R.I.

   D a t i I berstatus perwakilan : Perwk. D.U.V.R.I.
   D a t i II tetap menggunakan : K.U.V.R.I.

b. Dibidang Pendaftaran, Penjaringan dan Pengakuan Veteran berdasar P.P. No. 38 Tahun 1958, diadakan penggiatan penjaringan dan pengakuan, dengan diadakan perobahan systeem penjelenggaraan.
   Bila dilihat dari pelaksanaan sebelumnja, setjara rutine hanja dapat dilakukan penjaringan terhadap 200 orang pendaftar tiap hari, karena dalam hal ini diperlukan ketelitian. Maka dengan demikian guna mengadakan penjaringan dan follow up-nja ialah pengakuan terhadap ± 900.000 pendaftar akan memerlukan tempo kurang lebih 15 tahun.
   Pengakuan terhadap seseorang Veteran adalah titik tolak untuk melaksanakan pemberian hak-hak lainnja. Oleh sebab

itu tak mungkin dapat menunggu sampai 15 tahun kemudian, karenanja diadakan pembaharuan sistim, dengan program dua tahun dan dilaksanakan oleh banjak team-team penjaringan.

c. Dibidang Pendidikan Kedjuruan dan Latihan Kerdja jang sebelumnja memang telah banjak dilakukan, diadakan perobahan policy dalam penjelenggaraan, dengan berpangkal kepada:

   — permintaan akan tenaga kerdja.
   — penghematan biaja.

   Untuk itu diadakan kerdja-sama dengan kursus-kursus dinas Departemen lain, dan diadakan sistim penitipan kepada Pendidikan lain jang telah ada.

   Tetapi disamping itu, didaerah-daerah pemberi tenaga transmigrasi diadakan sentral-sentral kursus dan indoktrinasi kepada para tjalon transmigranten. Misalnja di Dati-Dati II Djawa-Tengah dan Djawa-Timur.

d. Dibidang penempatan dan penjaluran dititik-beratkan kepada Transmigrasi dan pembukaan projek-projek pertjobaan.

   Untuk ini telah dilaksanakan transmigrasi 1500 kepala keluarga Veteran ke Kalimantan Tengah (Mantaran) dan Rampung (Baradatu). Serta memberikan support kepada transmigrasi lokal Veteran. Dalam pelaksanaan tugas ini selalu diadakan kerdja-sama dengan Departemen Transkopemada.

e. Projek-projek ex. P.P.N. diserahkan dengan swasta Veteran untuk dibeli setjara kredit atau kontan, dimaksud agar para pelaksana-nja lebih bertanggung-djawab terhadap rentabiliteit usaha-usaha itu. Dan Projek-projek besar jang dikrier oleh Kementerian Veteran diserahkan kepada Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan; pabrik-pabrik kertas dan galangan-galangan kapal.

f. Untuk kegiatan Veteran didaerah diadakan pemeloporan/penjuluhan dalam persuteraan, diadakan badan pemupukan dipusat maupun didaerah dengan Koperasi Industri Sutera Rakjat Indonesia (Koperasi I.S.R.I.).

g. Mengatur dan melaksanakan santunan terhadap para Veteran Pedjoang Kemerdekaan jang berhubung penghidupannja membutuhkan bantuan, berdasar Undang-undang No. 75 Tahun 1957, pasal 7 ajat 3, dengan P.P. Nomor 45 Tahun 1960, tanggal 29 Nopember 1960. Dan santunan terhadap

djanda dan anak jatim/jatim-piatu dari Veteran Pedjoang Kemerdekaan R.I., berdasar Undang-undang No. 75 Tahun 1957, pasal 7 ajat 4, dengan P.P. No. 46 Tahun 1960, tanggal 29 Nopember 1960.

h. Menjerahkan tugas bimbingan terhadap pengusaha-pengusaha Veteran diserahkan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia, dengan follow-up pembentukan Organisasi-organisasi Pengusaha Sedjenis.

    — G a b i v e d.
    — O.P.S. Tenun Veteran.
    — O.P.S. „Es" Veteran.
    — O.P.S. Angkutan Veteran.
    — Bank Veteran.
    — Dan lain-lain.

i. Kegiatan lainnja jang ditudjukan untuk membina Organisasi Veteran, Legiun Veteran R.I. ialah menggiatkan hubungan World Veterans Federation (W.V.F.).
Dan baru dalam rentjana adanja Kongres ke-II Veteran Seluruh Indonesia, berdasar Keputusan Presiden No. 468 Tahun 1961.

Kiranja pelaksanaan tugas berdasar Undang-undang No. 75 Tahun 1957 belum seluruhnja dapat diselenggarakan, ketjuali hal-hal jang diutarakan diatas, datanglah tugas baru bagi D.U.V.R.I. untuk menjalurkan bekas Anggota Angkatan Bersendjata, berdasar Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 299 Tahun 1962, tanggal 18 September 1962. Dan ditetapkan pula perobahan nama Departemen Urusan Veteran Republik Indonesia (D.U.V.R.I.) mendjadi Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi (D.U.V.E.D.).

Selandjutnja diadakan perobahan Pimpinan D.U.V.E.D., guna disesuaikan dengan kebutuhan tugas baru.

Dengan adanja tugas baru untuk menjalurkan Anggota Angkatan Bersendjata ke masjarakat, disamping pengurusan Veteran Pedjuang Kemerdekaan R.I., maka setjara otomatis D.U.V.E.D. berkewadjiban mengorganisasi dan meng-administrasi-kan Tjadangan Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963.

Berarti satu pengurusan terhadap dua element jang mempunjai juridiksi masing-masing; jang harus diarahkan kepada satu tudjuan, jaitu menjelesaikan Revolusi Indonesia, dengan melewati dua lapangan operatif.

Dua elemen : a. bekas Anggota Angkatan Bersendjata.
b. Veteran Pedjoang Kemerdekaan.

Dua lapangan operatif : a. Pembangunan Nasional Semesta.
b. Wadjib Tjadang dalam rangka Pertahanan Nasional.

Kiranja bukan satu kesulitan, tetapi perentjanaan jang teliti untuk tidak melawan arus revolusi, bahkan merupakan dorongan terhadap ketjepatan arus revolusi, jang multi kompleks ini perlu sekedar tempo untuk persiapan.

Selagi D.U.V.E.D. mengadakan persiapan-persiapan disamping mendjalankan tugas rutine, maka tersusul oleh kewadjiban nasional jang sangat urgen, dimana Presiden/Pemimpin Besar Revolusi mengambil keputusan untuk menjempurnakan/mengadakan reshuffle Kabinet Kerdja, pada tanggal 2 September 1964, dengan nama baru Kabinet „Dwikora".

Untuk D.U.V.E.D. diadakan pergantian djabatan, J.M. Menteri Sambas Atmadinata diberi tugas lain, dan untuk pengganti beliau ditundjuk Major Djenderal M. Sarbini.

I C H T I S A R.

Tentang Peraturan-peraturan Pemerintah sekitar Undang-undang No. 75 Tahun 1957 dan Perkembangan-perkembangan Kementerian Urusan Veteran dan Legiun Veteran Republik Indonesia pada Tahun 1957 sampai dengan Tahun 1964.

I. 1. Keputusan Presiden R.I. No. 162 Tahun 1957.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1957.

II. 3. Undang-undang No.: 75 Tahun 1957.

III. 4. Keputusan Perdana Menteri R.I. No.: 158/P.M./1958.
5. Keputusan Menteri Urusan Veteran R.I. No.: 110/Kpts/1958.
6. Peraturan Pemerintah No.: 38 Tahun 1958.
7. Maklumat Menteri Urusan Veteran R.I. No. 97/M.K./KUV/1958.
8. Peraturan Penguasa Perang Pusat No.: Prt/Peperpu 033/1958.
9. Pernjataan Badan Pekerdja Pusat Legiun Veteran R.I. tgl. 2-1-1959.
10. Peraturan Pemerintah No.: 15 Tahun 1959.
11. Peraturan Pemerintah No.: 5 Tahun 1960.
12. Peraturan Pemerintah No.: 19 Tahun 1960.
13. Peraturan Pemerintah No.: 45 Tahun 1960.
14. Peraturan Pemerintah No.: 46 Tahun 1960.
15. Keputusan Presiden R.I. No.: 468 Tahun 1961.
16. Keputusan Presiden R.I. No.: 299 Tahun 1962.
17. Peraturan Pemerintah No.: 51 Tahun 1963.

IV. R e k a p i t u l a s i :

a) Pendaftaran, Penjaringan dan Pengakuan terhadap Tjalon Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.
b) Statistik kegiatan bidang Pendidikan dan Penjaluran „Tjalon" Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.
c) Statistik Tjatjat Veteran Seluruh Indonesia.
Semendjak berdirinja Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia Tahun 1957 sampai dengan Tahun 1964.
d) Tjalon Demobilisasi Angkatan Bersendjata (A.D., A.L., A.U., Angkatan Kepolisian) dari Tahun 1962 s/d Tahun 1966.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 1962 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : surat Menteri Urusan Veteran tanggal 5 Mai 1957 No. —;

Menimbang : perlu menetapkan pembentukan, lapangan pekerdjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Urusan Veteran;

Mengingat :
1. pasal 50 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 26) tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian-Kementerian Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 April 1957 No. 108 tahun 1957 juncto tanggal 16 Mei 1957 No. 115 tahun 1957;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 28 Djuni 1957;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

P e r t a m a : Membentuk Kementerian baru jang bernama : KEMENTERIAN URUSAN VETERAN, jang lengkap dan sederadjat dengan Kementerian-Kementerian lain dan dipimpin oleh Menteri Urusan Veteran;

K e d u a : Mengadakan peraturan tentang lapangan pekerdjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Urusan Veteran sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG LAPANGAN PEKERDJAAN, SUSUNAN DAN PIMPINAN KEMENTERIAN URUSAN VETERAN.

B A B I.

Lapangan pekerdjaan Kementerian.

Pasal 1.

Lapangan pekerdjaan Kementerian Urusan Veteran ialah:

a. mempersiapkan pembentukan perundang-undangan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam:

   1. pasal-pasal 23 ajat (2), 28 ajat (1), 36, 37 ajat (1), 89 dan 124 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
   2. pasal-pasal 26, 31, 32 dan 36 Undang-undang No. 29 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84) tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia;

b. melaksanakan dan mengawasi perundang-undangan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia serta memberi pimpinan dan petundjuk-petundjuk tentang pelaksanaan itu pada chususnja;

c. melaksanakan pendaftaran untuk pengakuan sebagai Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia;

d. melaksanakan segala usaha untuk menjempurnakan kedudukan sosial, ekonomi dan pendidikan bagi para Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia;

e. melaksanakan pekerdjaan dan usaha-usaha jang kini berdasarkan peraturan-peraturan jang ada masuk dalam lapapangan pekerdjaan berbagai Kementerian tetapi jang lajak dan seharusnja dimasukkan dalam lapangan pekerdjaan Kementerian Urusan Veteran setelah pekerdjaan dan usaha-usaha tersebut dengan diubahnja peraturan-peraturan itu diserahkan oleh Kementerian-Kementerian jang berkepentingan kepada Kementerian Urusan Veteran.

B A B I.

Susunan Kementerian.

Pasal 2.

I. Pusat Kementerian Urusan Veteran terdiri dari:

A. Bagian Tata-Usaha jang meliputi:

   1. Urusan Sekretariat.
   2. Urusan Umum.
   3. Urusan Pegawai.
   4. Urusan Keuangan.
   5. Urusan Rumah Tangga.

B. Bagian lain-lain jang oleh Menteri Urusan Veteran dipandang perlu untuk melaksanakan pekerdjaan termaksud dalam pasal 1.

II. Didaerah-daerah propinsi/Kabupaten dapat dibentuk Kantor Koordinator dan Kantor Urusan Veteran jang susunan kedudukannja ditetapkan lebih landjut dalam suatu Keputusan Menteri.

B A B III.

Pimpinan Kementerian.

Pasal 3.

1. Berdasarkan Politik Pemerintah Menteri menentukan politik Kementerian dan bertanggung djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.
2. Pada umumnja segala hal mengenai Kementerian diputuskan oleh Menteri atau Sekretaris Djenderal atas kuasa dan persetudjuan Menteri.
3. Djika Menteri berhalangan ia diwakili oleh Sekretaris Djenderal atau oleh seorang Sekretaris Kementerian.

B A B IV.

Kementerian lain-lain.

Pasal 4.

Dalam hal-hal jang penting dan mendadak Menteri diberi kuasa untuk mengadakan perubahan dalam Keputusan Presiden ini untuk menjesuaikan Kementeriannja sesuai dengan perkembangannja, hal mana kemudian disahkan oleh Presiden.

Pasal 5.

Pelaksanaan penjerahan riil dari urusan-urusan termaksud dalam pasal 1 sub d dan e dilakukan dengan keputusan bersama dari Menteri-menteri jang bersangkutan.

Pasal 6.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan berlaku surut sampai pada tanggal 9 April 1957.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Djuli 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUKARNO.

Menteri Urusan Veteran,
ttd.
CHAIRUL SALEH.

PERATURAN PEMERINTAH No. 28 TAHUN 1957
tentang
PENJERAHAN URUSAN REKONSTRUKSI NASIONAL KEPADA MENTERI URUSAN VETERAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa telah dibentuk Kementerian Urusan Veteran dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Djuli 1957 No. 162 Tahun 1957;

b. bahwa tugas kewadjiban dan semua pertanggungan-djawab mengenai penjelenggaraan usaha rekonstruksi nasional mengingat isi dan sifatnja baik tehnis maupun administratif sebaiknja dialihkan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Urusan Veteran seperti dimaksudkan diatas;

Mengingat :

a. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 29);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 24 Djuli 1957;

M e m u t u s k a n :

I. Mentjabut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 29) tentang Urusan Rekonstruksi Nasional.

II. Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJERAHAN REKONSTRUKSI NASIONAL KEPADA MENTERI URUSAN VETERAN.

Pasal 1.

Urusan Rekonstruksi Nasional dan segala hal jang timbul, akibat pentjabutan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 29) dimaksud sub I, mendjadi tugas Menteri Urusan Veteran.

Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan selandjutnja jang diperlukan untuk menjelenggarakan Peraturan Pemerintah ini dengan sebaik-baiknja, ditetapkan atau diurus dan diselesaikan oleh Menteri Urusan Veteran sendiri atau bersama dengan Menteri lain jang bersangkutan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 6 Agustus 1957
Presiden Republik Indonesia

SUKARNO.

Perdana Menteri

DJUANDA.

Menteri urusan Veteran,

CHAIRUL SALEH.

Menteri Dalam Negeri

SANUSI HARDJADINATA.

Lembaran-Negara No. 71 tahun 1957.

Diundangkan :
Pada tanggal 10 Agustus 1957
Menteri Kehakiman,
t.t.d.

G.A. MAENGKOM.

UNDANG-UNDANG No. 75 TAHUN 1957
tentang
VETERAN PEDJOANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA *)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa Pemerintah berkewadjiban memberikan penghargaan kepada mereka jang telah menjumbangkan tenaganja dalam ikatan angkatan bersendjata dalam perdjoangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada a diatas perlu diselenggarakan pendaftaran jang tertib dikalangan mereka, untuk mendapat sebutan „Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia".

Mengingat:

a. Pasal-pasal 23 ajat 2, 28 ajat 1, 36, 37 ajat 1, 89 dan 124 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. Pasal-pasal 26, 31, 32 dan 36 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Undang-undang Tentang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

B A B I.

Ketentuan-ketentuan umum.

Jang dimaksud dengan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Undang-undang ini ialah:

a. Warga-negara Republik Indonesia jang dalam masa mulai 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut berdjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia didalam kesatuan bersendjata resmi atau kelasjkaran jang diakui oleh Pemerintah pada masa perdjoangan itu.

b. Warga-negara Republik Indonesia jang menurut salah satu tjara jang tersebut pada sub a diatas ikut berdjuang dalam suatu peperangan antara Negara Republik Indonesia dan negara lain, jang timbul dimasa jang akan datang.

---

*) Disetudjui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-82 pada hari Senin tanggal 9 September 1957 P. 92/1957.

Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam pasal 1 tidak berlaku, apabila seseorang:

a. membantu musuh;
b. kehilangan haknja untuk mendjadi anggota Angkatan Perang menurut keputusan Pengadilan;
c. mendapat hukuman pendjara lebih dari satu tahun lamanja, ketjuali bila ada ketentuan lain dari Menteri jang diserahi urusan veteran.

B A B II.

Tentang Badan-badan Resmi jang Mengurus Veteran dan Pendaftaran serta Pengesjahan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 3.

Badan-badan resmi jang hingga keluarnja Undang-undang ini semata-mata mengurus persoalan veteran disatukan dibawah Kementerian jang mengatur urusan veteran.

Pasal 4.

(1) Pendaftaran dan pengakuan seseorang sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Kepada pedjuang kemerdekaan jang telah gugur dimasa antara 17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949 sebagai akibat mempertahankan Negara Republik Indonesia diberikan rehabilitasi posthuum sebagai Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

B A B III.

Tentang Hak Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 5.

Barangsiapa jang memenuhi ketentuan dalam pasal 1 dan didaftar menurut ketentuan dalam pasal 4 ajat 1 berhak memakai sebutan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 6.

Seorang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia boleh memakai pakaian seragam dengan tanda pangkat terachir

dalam upatjara-upatjara nasional dan hari nasional dan kemiliteran, menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

(1) Djika seseorang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia itu pegawai Negeri atau mendjadi pegawai Negeri, maka masa selama ia turut berdjoang mengangkat sendjata dihitung dua kali lipat sebagai masa dinas penuh untuk perhitungan pensiun.

(2) Seorang pegawai jang berdjoang dimasa jang disebut dalam pasal 1 sub a harus diterima kembali dalam djawatannja semula dengan mengingat peraturan-peratuan kepegawaian jang berlaku.

(3) Seorang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang berhubung dengan peri-kehidupannja ternjata membutuhkan bantuan harus diberi bantuan menurut Peraturan Pemerintah, jang mengatur tjara pemberian serta bentuk bantuan itu bagi para Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia itu.

(4) Djanda-djanda dan anak-anak jatim-piatu dari Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang gugur dimasa perdjuangan seperti dimaksud dalam pasal 1 diberi tundjangan menurut Peraturan Pemerintah, jang mengatur hal ini.

(5) Seorang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia serta keluarganja, jang ternjata harus mendapat bantuan menurut ajat 3 pasal ini, diberi pertolongan dokter menurut peraturan tentang pertolongan dokter jang berlaku bagi pegawai jang dipensiun.

Pasal 8.

Kepada seorang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang belum mempunjai lapangan pekerdjaan, dapat diberikan latihan kedjuruan atas tanggungan Pemerintah, menurut tjara dan waktu jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

(1) Seorang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia didahulukan dalam memperoleh djabatan dalam dinas Pemerintah, apabila ia memenuhi sjarat-sjarat ketjakapan jang dibutuhkan untuk djabatan itu.

(2) Ketentuan dalam ajat 1 pasal ini berlaku djuga bagi perusahaan Pemerintah dan partikelir, menurut ketentuan-ketentuan jang akan diatur selandjutnja dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pada waktu mulai berlakunja Undang-undang ini, maka perusahaan-perusahaan tersebut dalam ajat 2 pasal ini, diharuskan menerima Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pegawai, sekurang-kurangnja 25% dari lowongan jang ada.

Pasal 10.

Kepada Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang berusaha setjara sendirian maupun setjara bersama-sama, diberikan bantuan dan bimbingan jang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B A B IV.

Tentang Kewadjiban Veteran Pedjoang Kemerdekan Republik Indonesia.

Pasal 11.

Seorang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia berkewadjiban mendjundjung tinggi nama baik dan kehormatan kaum Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 12.

Seorang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia berkewadjiban memegang rahasia militer dan mendjundjung tinggi kehormatan Negara.

B A B V.

Tentang Peraturan-peraturan Pidana.

Pasal 13.

Barang siapa dengan sengadja memberi keterangan jang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang ketentuan-ketentuan menurut pasal 1, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah.

Pasal 14.

Barang siapa menamakan dirinja Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, sedang ia tidak berhak atas nama/sebutan itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah.

Pasal 15.

Pengusaha-pengusaha jang melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 9 ajat 3, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah.

Pasal 16.

Seorang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 11 dan 12, ditjabut haknja dan sebutannja sebagai Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, disamping ia dihukum menurut peraturan-peraturan hukum pidana sipil jang berlaku.

Pasal 17.

Perbuatan pidana jang tertjantum dalam pasal-pasal 13, 14 dan 15 adalah kedjahatan.

B A B VI.

Ketentuan Peralihan dan Penutup

Pasal 18.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat 2 pasal ini, maka dengan berlakunja Undang-undang ini peraturan-peraturan jang mengenai persoalan veteran jang telah ada dinjatakan tidak berlaku lagi.

(2) Seorang veteran jang menerima perlakuan menurut peraturan-peraturan jang berlaku, sebelum mulai berlakunja Undang-undang ini, tetap menerima perlakuan sesuai dengan peraturan itu sampai mengenai hal-hal itu ada ketentuan-ketentuan lain jang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, dengan pengertian bahwa ia tidak akan dirugikan.

Pasal 19.

Undang-undang ini disebut „Undang-undang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 13 Desember 1957.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Menteri Urusan Veteran,

CHAIRUL SALEH.

Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

Diundangkan
pada tanggal 17 Desember 1957.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL UNDANG-UNDANG No. 75 TAHUN 1957 tentang VETERAN PEDJOANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

1. Pasal 1 ajat (1) sub a.

   A. Jang dimaksud dengan „Warganegara Republik Indonesia" ialah warganegara baik laki-laki maupun perempuan menurut peraturan-peraturan jang sekarang berlaku dan jang akan dibuat.

   B. Jang dimaksud dengan „Dalam masa mulai 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949" ialah, walaupun seseorang berhak diberi sebutan „Veteran" oleh karena ia berdjoang dengan mengangkat sendjata dalam masa tersebut, akan tetapi lamanja berdjoang itu membuat ia termasuk golongan-golongan. Umpama: seorang jang berdjoang mulai 17 Agustus 1949 terus-menerus hingga 27 Desember 1949 akan diberi nilai lain dari orang jang berdjoang mulai 17 Agustus 1945 hingga berachirnja agresi Belanda ke-I, ataupun lain dari orang-orang jang berdjoang mulai Desember 1948 hingga 27 Desember 1949.

   C. Penggolongan-penggolongan ini diperlukan untuk menentukan seorang jang dimuat dalam Bab III.

   D. Jang dimaksud „Kelasjkaran" ialah kesatuan bersendjata diluar formasi Angkatan Perang Republik Indonesia atau Djawatan Kepolisian Negara, jang diakui sebagai kesatuan jang berdjoang untuk Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Pemerintah Pusat atau setempat pada masa perdjoangan itu.

   E. Bila tidak ada Pemerintahan setempat pada perdjoangan itu, atau ada keragu-raguan, maka Menteri jang diserahi Urusan Veteran akan memutuskan soal ini. Demikianpun mengenai Veteran-veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia didaerah-daerah: Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat.

2. Pasal 1 ajat (1) sub b, tjukup djelas.
3. Pasal 2 sub a, tjukup djelas.
4. Pasal 2 sub b dan c.

   Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan berlaku mengenai tindak-tindak pidana untuk masa setelah Undang-undang ini diundangkan, sebab dengan adanja dan berlakunja Undang-undang ini para Pedjuang Kemerdekaan itu harus sadar akan nilai hak-haknja jang ditetapkan dalam Undang-undang ini, jang disertai dengan kewadjiban-kewadjiban tugas.

5. Pasal 3.

   Jang dimaksud dengan „Badan resmi semata-mata mengurus persoalan Veteran" ialah umpamanja B.R.N., B.P.B.A.T., djadi bukan badan-badan jang djuga mengurus umum disamping mengurus Veteran, sebagai K.P.T., Djawatan Transmigrasi atau lainnja „Disatukan" berarti „dihapuskan", dan tugas kewadjiban badan-badan resmi ini dialihkan dan didjalankan selandjutnja oleh Kementerian Urusan Veteran bersama dengan anggaran belandja jang diperuntunkkan selama ini untuk badan-badan resmi itu.

6. Pasal 4 ajat (1) tjukup djelas.
7. Pasal 4 ajat (2) tjukup djelas.

   Ketetapan ini adalah dalam arti seluas-luasnja, dengan pengertian, bahwa tidak boleh dilakukan ukuran-ukuran subjektif atau maksud-maksud untuk menolak sesuatu golongan masuk dalam rangka berlakunja Undang-undang ini Ketentuan-ketentuan ini sesuai dengan rasa keadilan jaitu bahwa djasa seorang Pedjoang Kemerdekaan tidak hilang karena akibat-akibat pergolakan-pergolakan politik jang telah berlaku dalam kelangsungan Revolusi Kemerdekaan kita, lagi pula kepentingan ketetapan ini amatlah dirasakan oleh ahli keluarga jang mereka tinggalkan.

8. Pasal 5 tjukup djelas.
9. Pasal 6 tjukup djelas.
10. Pasal 7 ajat (1) tjukup djelas.

   Jang dimaksud dengan masa selama ia turut berdjoang mengangkat sendjata-sendjata ialah, bahwa seseorang pedjoang dalam ia berdjoang itu harus mendjadi anggota dari satu kesatuan bersendjata.

   Masa dinas Pedjoang Kemerdekaan ini haruslah dihitung dua kali lipat bagi perhitungan pensiunnja, sebab djika

tidak, sungguh tidak ada perbedaan penghargaan terhadap seseorang Pedjoang Kemerdekaan dan musuh-musuh kemerdekaan jaitu pegawai Belanda dan bekas tentara Belanda jang mendapat perlakuan akibat hasil-hasil K.M.B. seakan-akan tidak pernah mereka memusuhi perdjuangan Kemerdekaan kita.

11. Pasal 7 ajat (2) tjukup djelas.
12. Pasal 7 ajat (3) tjukup djelas.
13. Pasal 7 ajat (4) tjukup djelas.
14. Pasal 7 ajat (5) dengan keluarga dimaksudkan isteri dan anak jang sah.
15. Pasal 8 tjukup djelas.
16. Pasal 9 ajat (1) tjukup djelas.
17. Pasal 9 ajat (2).

    Jang dimaksud dengan Perusahaan Pemerintah adalah Perusahaan-perusahaan Pemerintah jang sedjak berlakunja Undang-undang ini dibangun berdasarkan politik dan rentjana Pembangunan Negara, umpamanja Rentjana Pembangunan 5 Tahun Pemerintah.

    Jang dimaksud dengan Perusahaan Partikelir adalah Perusahaan-perusahaan Partikelir jang sedjak berlakunja Undang-undang ini dibangun dengan kredit Negara semata-mata atau sebagai akibat pelaksanaan Undang-undang Negara seperti Undang-undang Penanaman Modal Asing, Undang-undang Pertambangan Minjak dan sebagainja.

18. Pasal 10.

    Jang dimaksud dengan „setjara bersama-sama" ialah segala usaha — jang dikerdjakan oleh lebih dari satu orang, baik berbentuk koperasi, maupun bentuk usaha lain, sebagai Kongsi, Firma, C.V., N.V. dan lain-lain dengan ketentuan, bahwa anggauta-anggauta dari perusahaan atau persekutuan usaha itu Veteran seluruhnja serta modal kepunjaan mereka seluruhnja.

19. Pasal 11.

    Jang dimaksud dengan „nama baik dan kehormatan kaum Veteran" akan ditetapkan lebih landjut bersama-sama dengan Legiun Veteran Republik Indonesia tentang kode kehormatan Veteran.

20. Pasal 12.

Jang dimaksud „Rahasia Militer" ialah sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT).

Jang dimaksud dengan „kehormatan negara" ialah menaati Undang-undang Negara Republik Indonesia dan sikap kesatria sebagai pembela Negara Proklamasi Kemerdekaan 17Agustus 1945.

21. Pasal 13 tjukup djelas.
22. Pasal 14 tjukup djelas.
23. Pasal 15.

Ketentuan ini ialah untuk mentjegah politik siasat tolong kawan kaum separtai atau sekeluarga jang dapat didjalankan oleh pengusaha-pengusaha tersebut, dan sudah pada tempatnja mereka diantjam dengan hukuman jang sama beratnja jang diatur oleh Undang-undang ini, sebab dengan politik siasat demikian besar sekali akibatnja bahwa pembangunan nasional akan gagal karenanja jang njata pula merupakan suatu kedjahatan nasional.

24. Pasal 16 tjukup djelas.
25. Pasal 17 tjukup djelas.
26. Pasal 18.

Dalam pasal ini dimaksudkan bahwa peraturan-peraturan jang terdahulu tidak berlaku lagi, akan tetapi akibat dari peraturan-peraturan itu umpama kontrak-kontrak antara Mahasiswa-mahasiswa Ikatan Dinas dengan Pemerintah jang didasarkan atas peraturan-peraturan tersebut tetap berlaku, sebelum ada peraturan-peraturan lainnja jang mengatur hal ini.

27. Pasal 19 tjukup djelas.

***

KEPUTUSAN PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA No. 158/P.M./1958

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diambil sikap jang tegas terhadap para Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang ternjata turut serta, memihak atau membantu pemberontakan apa jang dinamakan „Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" (P.R.R.I.).

Membatja: surat Menteri Urusan Veteran tgl. 14-4-1958 No. 5271/I/R/Sek/MUV/58.

Mengingat :

a. Undang-undang No. 75 tahun 1957 tentang Veteran Pedjoang Kemerdekaan R.I. Bab IV 11 dan 12;

b. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaja;

c. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 32;

Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 15 April 1958;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

P e r t a m a : Seorang (tjalon Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia) jang dinamakan „Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" (P.R.R.I.) dinjatakan kehilangan hak-haknja atas sebutan sebagai Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan didalam Undang-undang No. 75 tahun 1957 pasal 16.

K e d u a : Menginstruksikan kepada Menteri Urusan Veteran dengan semua alat-alatnja, untuk segera melaksanakan keputusan ini.

K e t i g a : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan Perdana Menteri ini dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Mei 1958.
Perdana Menteri Republik
Indonesia,
ttd.
(DJUANDA).

No.: 110 Kpts/tahun 1958.

KEPUTUSAN MENTERI URUSAN VETERAN
REPUBLIK INDONESIA.

MENTERI URUSAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diambil tindakan jang tegas terhadap para Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang ternjata turut serta memihak dan atau membantu pemberontak jang menamakan dirinja „Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" (P.R.R.I.).

Mengingat:

a. Surat Keputusan Perdana Menteri No. 158/P.M./1958 tanggal 2 Mei 1958.
b. Undang-undang No. 75 tahun 1957 tentang Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia Bab IV pasal 11 dan 12.
c. Undang-undang No. 74 tahun 1957 tentang keadaan bahaja.

Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama: Para (tjalon) Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang ternjata turut serta membantu dan atau memihak apa jang dinamakan „Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" (P.P.R.I.) dinjatakan kehilangan hak-haknja sebagai Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang No. 75 tahun 1957.

Kedua:

a. Kepada semua Koordinator Urusan Veteran dan semua Alat-alat dalam lingkungan Kementerian Urusan Veteran diinstruksikan, supaja mengadakan registrasi intern terhadap mereka jang tersebut dalam ajat Pertama, bersama-sama dengan Instansi-instansi jang bersangkutan.
b. Pelajanan-pelajanan terhadap mereka jang tersebut dalam ajat Pertama ditiadakan.

K e t i g a : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Mei 1958.
Menteri Urusan Veteran
Republik Indonesia,
ttd.

(CHAIRUL SALEH).

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Penguasa Perang Pusat.
2. Penguasa-penguasa Perang Daerah.
3. Kepala-kepala Daerah Otonom/Administratif.
4. Semua Kementerian/Djawatan.
5. Para Koordinator Urusan Veteran/Kepala Kantor Urusan Veteran.

***

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 1929. PENDJELASAN PADA:

PERATURAN PEMERINTAH No. 38 TAHUN 1958

t e n t a n g

PENDAFTARAN, PENJARINGAN DAN PENGAKUAN VETERAN PEDJOANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan pendaftaran penjaringan dan pengakuan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia guna melaksanakan maksud Undang-undang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengingat:

a. Undang-undang No. 75 Tahun 1957, (L.N. tahun 1957 No. 162) tentang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, pasal 4 ajat (1).
b. Keputusan Presiden No. 162 Tahun 1957;
c. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 1957;

Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 23 Mei 1958.

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran, Penjaringan dan Pengakuan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

BAB I

Pendaftaran.

Pasal 1.

Pendaftaran Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan atas dasar sukarela.

Pasal 2.

(1) Pendaftaran para tjalon Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Urusan Veteran didaerah Swatantra Tingkat II.

(2) Pimpinan pendaftaran dipegang oleh Kepala Kantor Urusan Veteran dan dibantu oleh:

a. seorang perwira Distrik Militer atau seorang perwira jang sederadjat dengan itu;
b. dua orang tokoh Veteran setempat atas usul Legiun Veteran Tjabang;
c. seorang bekas komandan kesatuan setempat atas usul Kepala Kantor Urusan Veteran;

(3) Didaerah-daerah Swatantra Tingkat II dimana Kantor Urusan Veteran belum terbentuk, pendaftaran dilakukan oleh Perwira Distrik Militer atau seorang perwira jang sederadjat dengan itu, dan dibantu oleh:

a. dua orang tokoh Veteran setempat atas usul Legiun Veteran Tjabang;
b. dua orang bekas komandan kesatuan setempat atas usul Perwira Distrik Militer.

Pasal 3.

Tugas dan kewadjiban Urusan Pendaftaran seperti tersebut dalam pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. melakukan pendaftaran diwilajahnja terhadap semua warga negara Republik Indonesia jang dalam mulai 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 telah ikut berdjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia didalam kesatuan bersendjata resmi atau kelasjkaran jang diakui oleh Pemerintah pada masa perdjuangan itu;

b. memberikan formulir-formulir kepada jang bersangkutan untuk diisi sebagaimana mestinja;

c. meneliti kelengkapan keterangan-keterangan pengisian formulir-formulir dan surat-surat bukti sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4;

d. meneruskan keterangan-keterangan tersebut ajat b pasal ini kepada Panitia Penjaringan didaerah Swantantra TingkatI termaksud dalam BAB II pasal 6 Peraturan ini.

Pasal 4.

(1) Sjarat-sjarat pendaftaran untuk mendapatkan pengakuan sebagai Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. bukti-bukti bahwa jang bersangkutan pernah ikut berdjoang dalam kesatuan bersendjata resmi atau kelasjkaran jang diakui oleh Pemerintah Pusat atau setempat pada masa perdjoangan mulai 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949,

b. surat pengakuan/keterangan/persaksian dari bekas Komandannja/Wakil Komandan atau dua orang pedjabat atasannja dalam kesatuan bersendjata, didalam mana jang bersangkutan pernah tergabung.

(2) Bagi mereka jang masih dalam dinas aktif berlaku pula sjarat-sjarat pendaftaran seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini.

BAB II.

Penjaringan.

Pasal 5.

Penjaringan diselenggarakan oleh Panitya Penjaringan Urusan Veteran jang didirikan di Pusat dan didaerah-daerah Swatantra Tingkat I.

Pasal 6.

(1) Panitia Penjaringan Urusan Veteran Daerah Swantantra Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Urusan Veteran dan terdiri dari:

a. Koordinator Urusan Veteran sebagai Ketua merangkap Anggota;
b. seorang perwira jang ditundjuk oleh Panglima T.T./Komandan Militer Tertinggi setempat sebagai Anggota;
c. tiga orang tokoh Veteran setempat jang ditundjuk oleh Legiun Veteran Daerah, sebagai Anggota;
d. seorang bekas komandan kesatuan setempat atas usul Koordinator Urusan Veteran sebagai Anggota;
e. seorang Anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi sebagai Anggota;

(2) Panitia Penjaringan Urusan Veteran Pusat diangkat dan diberhentikan djabatannja oleh Presiden dan terdiri dari:

a. Sekretaris Djenderal Kementerian Urusan Veteran sebagai Ketua merangkap Anggota;
b. Kepala Bagian Screening Kementerian Urusan Veteran sebagai Penulis merangkap Anggota;
c. tiga orang wakil dari Kementerian Pertahanan sebagai Anggota.
d. tiga orang wakil dari Legiun Veteran Pusat sebagai Anggota.

Pasal 7.

(1) Tugas dan kewadjiban Panitia Penjeringan Urusan Veteran Daerah Swantara Tingkat I :

a. melakukan Penjaringan terhadap tjalon Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang bertempat tinggal didalam lingkungan wilajahnja berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan jang diadjukan oleh Urusan Pendaftaran didaerah bawahannja;
b. memberikan pengakuan sementara kepada mereka jang telah dianggap benar surat-surat keterangan/bukti-buktinja;
c. memberikan keputusan penolakan terhadap mereka jang tidak memenuhi sjarat-sjarat;
d. menjusun berita-atjara jang diparaf bersama oleh para Anggota Panitia dalam mengambil segala keputusan dan

meneruskannja kepada Panitia Penjaringan Urusan Veteran Pusat;

e. minta keterangan-keterangan dari fihak-fihak jang bersangkutan.

(2) Tugas dan kewadjiban Panitia Penjaringan Urusan Veteran Pusat :

a. meneliti pengakuan-pengakuan sementara jang telah dilakukan oleh Panitia Penjaringan Urusan Veteran Daerah Swatantra Tingkat I;
b. mengadjukan kepada Menteri Urusan Veteran usul-usul tentang pengesahan mengenai pengakuan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dengan disertai pertimbangan-pertimbangan.

(3) Keputusan-keputusan Panitia Penjaringan Urusan Veteran didasarkan sedapat mungkin atas suatu kebulatan pendapat. Didalam hal-hal jang memaksa keputusan dapat diambil dengan tjara pemungutan suara.

B A B III.

Penggolongan.

Pasal 8.

(1) Para Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia dibagi dalam golongan-golongan atas masa perdjuangan masing-masing sebagai berikut:

a. Golongan A : mereka jang berdjoang sekurang-kurangnja 4 tahun lamanja atau lebih;
b. Golongan B : mereka jang berdjoang sekurang-kurangnja 3 tahun lamanja;
c. Golongan C : mereka jang berdjoang sekurang-kurangnja 2 tahun lamanja;
d. Golongan D : mereka jang berdjoang sekurang-kurangnja 1 tahun lamanja;
e. Golongan E : mereka jang berdjoang kurang dari 1 tahun lamanja.

(2) Penggolongan tersebut dalam ajat (1) pasal ini dipakai untuk menentukan besar ketjilnja bantuan dan prioritas dalam mendapatkan bantuan, sebagai jang dimaksud dalam Undang-undang No. 75 tahun 1957.

B A B IV.

Pengakuan dan Pengesahan.

Pasal 9.

(1) Para tjalon Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang menurut keputusan Panitia Penjaringan Urusan Veteran Pusat memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Menteri Urusan Veteran berdasarkan Undang-undang No. 75 tahun 1957, mendapat pengakuan dan pengesjahan sebagai Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indneeia dari Menteri Urusan Veteran.

(2) Para Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republiok Indonesia jang mendapat pengakuan dan pengesjahan sebagai Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia mendapat:

a. Surat Keputusan tersebut dalam ajat (1) pasal ini;
b. Surat Keterangan Veteran, dan
c. Lentjana Veteran.

B A B V.

Dewan Bandingan.

Pasal 10.

(1) Para tjalon Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang berhubung disesuatu hal ditolak oleh Panitia Penjaringan Urusan Veteran dapat mengadjukan bandingan kepada Dewan Bandingan.

(2) Keputusan Dewan Bandingan ialah keputusan terachir mengenai persoalan pengakuan dan pengesjahan atas diri seorang tjalon Veteran.

Pasal 11.

(1) Dewan Bandingan dibentuk dan dibubarkan dengan keputusan Presiden.

(2) Dewan Bandingan mempunjai Anggota-anggota sebagai berikut:

a. Menteri Urusan Veteran merangkap Ketua;
b. Kepala Bagian Pengawasan Kementerian Urusan Veteran merangkap Sekretaris;
c. tiga orang wakil dari Legiun Veteran Pusat;
d. tiga orang perwira jang ditundjuk oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 12.

(1) Para tjalon Veteran jang ditolak dapat mengadjukan permohonan bandingan kepada Dewan Bandingan dengan disertai surat-surat keterangan dan bukti-bukti lengkap dan sjah.

(2) Bila Dewan Bandingan menganggap perlu memeriksa kebenaran surat-surat dan bukti-bukti dengan persaksian dari orang-orang jang bersangkutan, maka hanja ongkos-ongkos pengangkutan jang ditanggung oleh Pemerintah c.q. Kementerian Urusan Veteran.

B A B VI.

Biaja

Pasal 13.

(1) Pendaftaran dilakukan dengan tidak memungut biaja.

(2) Biaja pendaftaran Urusan Veteran dibebankan kepada anggaran belandja Kementerian Urusan Veteran.

B A B VII.

Peraturan Peralihan.

Pasal 14.

Pendaftaran para tjalon Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang telah dilaksanakan oleh badan-badan Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949, Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1954, dan atau jang telah dilaksanakan oleh para Panglima Tentara dan Territorium sebagai pendaftaran pendahuluan menurut Undang-undang No. 75 tahun 1957, dianggap sebagai pendaftaran resmi, jang selandjutnja diserahkan kepada Panitia Penjaringan untuk diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 15.

(1) Pendaftaran penjaringan dan pengakuan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang berdjoang:

a. didaerah-daerah dimana Pemerintah Republik Indonesia de facto belum ada pada masa 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, dan

b. didaerah Irian Barat akan diatur tersendiri oleh Menteri Urusan Veteran.

(2) Hal-hal lain jang belum termasuk dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur oleh Menteri Urusan Veteran.

B A B VIII.

Penutup.

Pasal 16.

(1) Pendaftaran dilakukan dalam djangka waktu enam bulan, dimulai sedjak diumumkannja permulaan pendaftaran oleh Menteri Urusan Veteran.

(2) Kepada mereka jang tidak mendaftarkan diri dalam waktu seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini tidak diberi kesempatan lagi untuk itu.

Pasal 17.

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari diundangkan. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 17 Djuni 1958.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Menteri Urusan Veteran R.I.

CHAIRUL SALEH.

Menteri Pertahanan,

DJUANDA.

Menteri Dalam Negeri,

SANUSI HARDJADINATA.

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 4 Djuli 1958.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

MAKLUMAT

MENTERI URUSAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
No. 97/MK/KUV/58

Mengingat hasrat Pemerintah untuk segera dapat menjelesaikan masaalah Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia seperti jang diharapkan bersama, Pemerintah sadar bahwa penjelesaian masaalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah sendiri, tetapi harus dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan masjarakat serta massa Veteran sendiri.

Mengingat pula sedjak Keputusan P.J.M. Presiden Republik Indonesia No. 103 Tahun 1957 tentang pembentukan Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai hasil Kongres Nasional Bekas Pedjoang Bersendjata Seluruh Indonesia pada achir tahun 1956 hingga awal tahun 1957, maka pada massa Veteran dan Pemerintah terkandung suatu harapan jang besar, bahwa organisasi-organisasi Veteran jang bermatjam ragam tjorak dan bentuk maupun sifatnja, sekarang terhimpun dalam satu susunan organisasi Veteran sadja jang membela hak-hak serta kewadjiban dan mendjaga kehormatan kaum Veteran.

Tetapi meskipun usia Legiun Veteran Republik Indonesia sudah hampir dua tahun, njatanja belum dapat merupakan suatu organisasi jang kita tjita-tjitakan serta harapkan, sesuai dengan Keputusan P.J.M. Presiden Republik Indonesia No. 103/ Tahun 1957 tadi.

Pemerintah memandang perlu agar supaja Legiun Veteran Republik Indonesia dapat merupakan suatu pentjerminan persatuan serta kesatuan massa Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dari segenap golongan serta aliran.

Maka dengan ini diharapkan agar supaja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja semua organisasi Veteran dapat menjampingkan semua kepentingan perorangan, golongan maupun aliran, untuk segera berfusi dalam satu organisasi Veteran jang kuat-kokoh, ialah Legiun Veteran Republik Indonesia.

Djadikanlah tanggal 28 Oktober 1958 ini, bertepatan pada hari ulang tahun ke-30 „Hari Sumpah Pemuda", dimana tiga puluh tahun jang lampau semua pemuda-pemuda jang mendjadi perintis serta pionir kemerdekaan Nusa dan Bangsa Indonesia melakukan ikrar bersama, ialah satu Bangsa, satu Tanah Air dan satu Bahasa, ialah Bangsa, Tanah-Air serta Bahasa Indonesia, sudah sewadjarnja bila massa Veteran bertekad:

„Kita kaum Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, hanja mengenal dan mempunjai satu organisasi Veteran, ialah Legiun Veteran Revolusi Republik Indonesia!"

Maka untuk mempertjepat ide fusi dan menjempurnakan djalan keanggotaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/Tahun 1958 serta keputusan-keputusan Sidang Pleno Badan Pekerdja Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia di Puntjak beberapa waktu jang lalu, dimana Badan Pekerdja jang baru ditugaskan untuk merobah menjempurnakan Anggaran Dasar Legiun Veteran untuk disesuaikan dengan keadaan dewasa ini, maka Pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan kebidjaksanaan untuk merealisasi isi dan maksud dari Keputusan P.J.M. Presiden Republik Indonesia No. 103/Tahun 1957, dengan tjara serta bentuk jang sesuai dengan berlakunja Undang-undang Keadaan Bahaja.

Dengan demikian terlaksanalah idam-idaman kita bersama jang termaktub dalam Keputusan P.b.M. Presiden Republik Indonesia No. 103/Th. 1957 tadi.

Djakarta, 27 Oktober 1958.
Menteri Urusan Veteran Republik Indonesia

CHAIRUL SALEH.

*

PERTURAN PENGUASA PERANG PUSAT
No. Prt/Peperpu/033/1958
tentang

Larangan adanja kegiatan-kegiatan dari organisasi Veteran Bekas Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, ketjuali Legiun Veteran Republik Indonesia serta larangan pemakaian nama, istilah jang menjerupai dewan jang resmi digunakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia dan/atau Kemerdekaan Urusan Veteran serta instansi-instansi-nja.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT SELAKU PENGUASA PERANG PUSAT UNTUK DAERAH ANGKATAN DARAT,

Menimbang: bahwa fungsi Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah potensiil merupakan kekuatan nasional jang njata dan sangat diperlukan untuk menjelesaikan revolusi nasional;

bahwa untuk lebih merupakan kekuatan jang kokoh, perlu diadakan penjempurnaan organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia;

bahwa untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum dan untuk mentjegah penjalah-gunaan nama, istilah-istilah jang dipergunakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia dan/atau Kementerian Urusan Veteran serta instansi-instansinja untuk maksud-maksud tertentu, perlu adanja kegiatan-kegiatan dari organisasi-organisasi Veteran-bekas Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, ketjuali Legiun Veteran Republik Indonesia dan/atau Kementerian Urusan Veteran serta instansi-instansinja, serta larangan pemakaian nama, istilah-istilah jang menjerupai dengan jang resmi digunakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia dan/atau Kementerian Urusan Veteran serta instansi-instansinja;

Mengingat:

(1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 berhubung dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957 (L.N. 1957/170; T.L.N. 1957/1941) tentang pernjataan keadaan perang atas seluruh Wilajah Republik Indonesia;

(2) Undang-undang No. 74 tahun 1957 (L.N. 1957/160; T.L.N. 1957/1485) tentang Keadaan Bahaja, pasal 26 berhubungan dengan pasal 31 dan pasal 7 ajat (2);

(3) Undang-undang No. 75 tahun 1957 (L.N. 1957/162) tentang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia;

(4) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 tanggal 2 April 1957 tentang Legiun Veteran Republik Indonesia;

(5) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 tentang Penjaringan dan Pengakuan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Peraturan tentang „Larangan adanja kegiatan-kegiatan dari Organisasi Veteran-Bekas Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, ketjuali Legiun Veteran Republik Indonesia serta larangan pemakaian nama, istilah jang menjerupai dengan resmi digunakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia dan/atau Kementerian Urusan Veteran serta Instansi-instansinja", sebagai berikut:

Pasal 1.

(1) Jang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan dari organisasi Veteran-bekas Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat ini, adalah setiap perbuatan jang aktif dalam bentuk njata setjara lahir jang dilakukan didepan umum atau diketahui umum, baik oleh perorangan, maupun setjara kerdja-sama dari sedjumlah orang jang mempunjai persamaan faham, azas tudjuan kepentingan golongan dalam hubungan organisasi massa jang langsung atau tidak langsung menjangkut nama Veteran-bekas Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

(2) Kegiatan seperti jang tersebut dalam ajat (1) pasal ini, jang dilakukan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia dan/atau oleh Kementerian Urusan Veteran serta instansi-instansinja, dengan sendirinja tidak termasuk dalam pengertian kegiatan-kegiatan jang dimaksudkan oleh Peraturan Penguasa Perang Pusat ini.

Pasal 2.

(1) Dilarang adanja kegiatan-kegiatan dari organisasi-organisasi Veteran-bekas Pedjoang Kemerdekaan R.I.

(2) Dilarang menggunakan nama serta istilah-istilah jang menjerupai dengan nama istilah-istilah jang resmi digunakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia dan/atau Kementerian Urusan Veteran serta instansi-instansinja.

Pasal 3.

Semua organisasi-organisasi jang sebelum keluarnja peraturan Penguasa Perang Pusat ini menamakan dirinja organisasi Veteran-bekas Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia atau nama lain jang senafas dengan itu, untuk sementara waktu dibekukan.

Pasal 4.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan seperti jang tersebut dalam pasal 2 ajat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tingginja sepuluh ribu rupiah.

(2) Bagi orang jang menghasut, biang-keladi atau mengindjak untuk melakukan pelanggaran seperti jang tersebut dalam pasal 2 ajat (1), hukuman jang tersebut dalam ajat (1) pasal ini dapat ditambah dengan sepertiganja.

(3) Barang siapa jang melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 2 ajat (2) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tingginja sepuluh ribu rupiah.

(4) Tindak pidana jang tersebut dalam ajat (1), ajat (2) dan ajat (3) pasal ini, adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 5.

Peraturan Penguasa Perang Pusat ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman peraturan Penguasa Perang Pusat ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Surat-surat kabar Harian serta pengumuman dalam siaran Pemerintah Radio Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 3 Nopember 1958.
Kepala Staf Angkatan Darat
Selaku
Penguasa Perang Pusat,
A.H. NASUTION

Letnan Djenderal T.N.I.

*

PENDJELASAN

PERATURAN PENGUASA PERANG PUSAT
No. Pert/Peperpu/033/1958 tanggal 3-11-1958
tentang

„Larangan adanja kegiatan-kegiatan dari Organisasi Veteran bekas Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, ketjuali Legiun Veteran Republik Indonesia serta larangan pemakaian nama, istilah jang menjerupai dengan jang resmi digunakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia dan/atau Kementerian Urusan Veteran serta Instansi-instansinja".

U M U M.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa dengan adanja kesatuan jang bulat dari para Veteran Pedjoang Kemerdekaan akan merupakan suatu potensi nasional jang kokoh dan sangat diperlukan untuk menjelesaikan revolusi nasional, meskipun pada azasnja hak sebutan Veteran adalah hak perorangan jang bersangkutan.

Untuk mendjaga kebulatan tenaga nasional ini, maka telah dibentuk organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia, dimana tergabung seluruh Veteran Kemerdekaan Republik Indonesia tanpa memperhatikan aliran faham masing-masing.

Guna untuk mentjegah tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan jang dapat merugikan nama Veteran, serta untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum maka adalah wadjar, bila hanja organisasi Legiun Veteran sadja jang diakui dan berhak bertindak keluar dan kedalam atas nama Veteran, dan tidak dapat dibenarkan lain-lain organisasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan atas nama Veteran-bekas Pedjonang Kemerdekaan.

Demikian pula tidak dapat dibenarkan untuk menggunakan nama istilah-istilah jang menjerupai dengan jang resmi digunakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia dan/atau Kementerian Urusan Veteran serta instansi-instansinja.

Organisasi-organisasi jang dirumuskan dalam pasal 1 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini adalah organisasi-organisasi massa dan tidak termasuk didalamnja organisasi Veteran jang bergerak dalam lapangan badan usaha, seperti Jajasan-jajasan dan sebagainja jang diidzinkan oleh Menteri Urusan Veteran.

Dengan dikeluarkannja Peraturan ini akan dapat ditjegah tindakan-tindakan perorangan atau golongan jang dapat merugikan nama Veteran dan jang mungkin akan mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pendjelasan pasal demi pasal tidak diperlukan.

*

P E R N J A T A A N

BADAN PEKERDJA PUSAT
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Kami kaum Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia menginsjafi bahwa perdjoangan untuk mempertahankan

Negara Republik Indonesia, jang bertjita-tjitakan Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan, Kemanusiaan, Keadilan, Kemakmuran dan Kebahagiaan, berdjalan terus menudju kesempurnaannja, sesuai dengan djiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Untuk mengisi dan membangun Kemerdekaan jang telah kita miliki itu, perlu adanja kesatuan tjita, gerak dan langkah dalam rangka menghimpun kembali tenaga massa potensi kaum Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam suatu Organisasi jang tersusun rapih sebagai alat perdjoangannja.

Insjaf dan sadar akan fungsi dan peranan jang harus dibawakan oleh kaum Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dewasa ini, serta tanggung-djawabnja terhadap masjarakat dan Negara, untuk bersama-sama potensi Nasional lainnja mewudjudkan masjarakat jan g adil makmur bahagia, maka bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke II Legiun Veteran Republik Indonesia setelah memperhatikan arti dan isi Undang-undang 75/57, Keputusan Presiden No. 103/57, Keputusan bersama Menteri Urusan Veteran dan K.S.A.D., peraturan Penguasa Perang Pusat No. 033/58 beserta Pedoman Peleburan Organisasi pelaksanaannja, Keputusan Sidang Pleno ke II di Puntjak dan laporan Panitya Ad Hock penjempurnaan Anggaran Dasar berketetapan atas nama kaum Veteran Seluruh Indonesia untuk menjatakan Keputusan-keputusan Badan Pekerdja Pusat sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 2 Djanuari 1959 menetapkan Legiun Veteran Republik Indonesia mendjadi Organisasi kesatuan keluar dan kedalam jang merupakan satu-satunja Organisasi dan alat Perdjoangannja kaum Veteran Seluruh Indonesia.

2. Menetapkan sebagai Pedoman Kerdja Anggaran Dasar Legiun Veteran Republik Indonesia jang mendjadi lampiran dari pernjataan ini.

3. Mengusulkan pada Pemerintah untuk mengakui dan mengesjahkan Anggaran Dasar Legiun Veteran Republik Indonesia tersebut dalam ajat 2 (dua).

Semoga Tuhan Jang Maha Esa senantiasa melindungi persatuan dan perdjoangan kaum Veteran dan mentjapai tjita-tjitanja.

Djakarta, 2 Djanuari 1959.

Atas nama

Kaum Veteran Pedjuang Kemerdekaan seluruh Indonesia.

*
**

BADAN PEKERDJA PUSAT
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama	Djabatan	Tanda-tangan
1.	Kol. R. Pirngadi	Ketua Umum	ttd.
2.	Chairul Saleh	Ketua I	ttd.
3.	Sholeh Iskandar	Ketua II	ttd.
4.	Moh. Moenasir	Sek. Djen.	ttd.
5.	Let. Kol. R. Soeharjo	Wk. Sek. Djen.	ttd.
6.	Majoor Isa Idris	Ketua Dep. W.B.U.	ttd.
7.	S. Mustaman	Ketua Dep. Pend./Pen.	ttd.
8.	R. Mustofa	Ketua Dep. Sosek.	ttd.
9.	Basuki Ramelan	Ketua Dep. Keu./Perb.	ttd.
10.	S. Margono	Ketua Dep. Pel. Vet.	ttd.
11.	U.E. Rangkuti	Ketua Dep. Keb./01.	ttd.
12.	A. Bachnan	Ketua Dep. Tjavet.	ttd.
13.	Moh. Munauwar	Ketua Biro Urs. Pemb. Tah./Pen.	ttd.
14.	F. Soehardjo Rebo	Ketua Biro Urs. Um/Org.	ttd.
15.	G.A. Kamagi	Ketua Biro Urs. L.N.	ttd.

PERATURAN PEMERINTAH No. 15 TAHUN 1959
tentang
PEROBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 38 TAHUN 1958 TENTANG PENDAFTARAN, PENJARINGAN DAN PENGAKUAN VETERAN PEDJOANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa untuk menjempurnakan kerdja-sama antara Kementerian Urusan Veteran dan Kementerian-kementerian/Djawatan-djawatan lain dianggap perlu Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 diubah dan ditambah;

Mengingat:

1. Undang-undang No. 75 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 1962) tentang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 65) tentang pendaftaran, penjaringan dan pengakuan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 162 tahun 1957 tentang lapangan pekerdjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Urusan Veteran;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 103 tahun 1957 tentang Pengesahan pembentukan Legiun Veteran Republik Indonesia.

Membatja: Surat Keputusan Menteri Urusan Veteran No. 130/Kpts/Tahun 1958 pasal 17, 18 dan 19 tentang pendaftaran bagi tjalon-tjalon Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonisia jang masih dalam dinas aktif dalam Angkatan Bersendjata dan bagi tjalon-tjalon Veteran jang ada diluar negeri dan jang sedang dalam tahanan/pendjara.

Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 13 Maret 1959.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perbahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 tentang Pendaftaran, Penjaringan dan Pengakuan Veteran Kemerdekaan Republik Indonisia.

Pasal 1.

Pasal 2 (lama) dipetjah mendjadi pasal-pasal 2 dan 3 (baru) pasal 2 (baru) berbunji: „Pendaftaran para tjalon Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonisia dilaksanakan oleh Kantor Urusan Veteran didaerah Swatantra Tingkat II.

Pasal 3 (baru) berbunji:

Pasal 2.

(1) Pimpinan pendaftaran dipegang oleh Kepala Kantor Urusan Veteran dan dibantu oleh:

a. seorang perwira Distrik Militer atau seorang perwira jang sederadjat dengan ini;
b. dua orang tokoh Veteran setempat atau usul Legiun Veteran Tjabang;
c. seorang bekas Komandan kesatuan setempat atas usul Kepala Kantor Urusan Veteran.

(2) Didaerah-daerah Swatantra Tingkat II dimana Kantor Urusan Veteran belum terbentuk, pendaftaran dilakukan oleh perwira Distrik Militer atau seorang perwira jang sederadjat dengan itu, dan dibantu oleh:

(a) dua orang tokoh Veteran setempat atas usul Legiun Veteran Tjabang;

(b) dua orang bekas komandan kesatuan setempat atas usul perwira Distrik Militer.

Pasal 3.

Pasal (2) (baru) ditambah dengan satu ajat jang berbunji sebagai berikut:

(2) Pendaftaran para tjalon Veteran Pedjoang Kemerdekaan Indonesia jang:

a. masih dalam dinas aktif dalam lingkungan Kementerian Pertahanan, dilakukan oleh Angkatan masing-masing;

b. masih dalam dinas aktif dalam Kepolisian dilakukan oleh Djawatan Kepolisian Negara;

c. sedang berada diluar Negeri, dilakukan oleh Perwakilan/ Kedutaan setempat;

d. sedang berada dalam tahanan/pendjara berhubung dengan sesuatu pelanggaran hukum dilakukan oleh instansi Koordinator Urusan Veteran/Kantor Urusan Veteran/Perwira Distrik Militer setempat jang dibantu sepenuhnja oleh Direktur Rumah Pendjara jang bersangkutan.

Pasal 4.

Pasal 3 sampai dengan pasal 17 (lama) diubah mendjadi pasal-pasal 4 sampai dengan 18 (baru).

Pasal 5.

Pada pasal 4 (baru) ditambah dengan satu ajat jang berbunji sebagai berikut:

(2) Tugas dan kewadjiban masing-masing Angkatan, Djawatan Kepolisian Negara, Perwakilan/Kedutaan Republik diluar negeri adalah sebagai tersebut dalam ajat (1) sub a, b dan c dengan ketentuan, bahwa keterangan-keterangan tertjantum dalam formulir-formulir seperti tersebut dalam ajat (1) sub b diteruskan kepada Panitia Penjaringan Urusan Veteran Pusat.

Pasal 6.

Pasal 9 (baru) ajat (1) sub c diubah sehingga berbunji: „Golongan E: mereka jang berdjoang sekurang-kurangnja 6 (enam) bulan lamanja.

Pasal 7.

Pada pasal 17 (baru) ajat (1) kata-kata:

„Pendaftaran dilakukan dalam djangka waktu enam bulan, dimulai ... dan seterusnja, diubah sehingga berbunji sebagai berikut:

„Pendaftaran dilakukan dalam djangka waktu sembilan bulan, dimulai ... dan seterusnja".

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunjai daja surat sampai tanggal 15 April 1959.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 17 April 1959.
Presiden Republik Indonesia.
SUKARNO.

Menteri Urusan Veteran,
CHAIRUL SALEH.

Menteri Pertahanan,
DJUANDA.

Menteri Luar Negeri,
SUBANDRIO.

Menteri Dalam Negeri,
SANUSI HARDJAWINATA.

Diundangkan pada tanggal 25-4-1959;
Menteri Kehakiman,
G.A. MAENGKOM.

Lembaran Negara No. 27 1959.

PERATURAN PEMERINTAH No. 5 TAHUN 1960
tentang
PENDIDIKAN KEDJURUAN DAN/ATAU LATIHAN KERDJA BAGI PARA VETERAN PEDJOANG REPUBLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan suatu Peraturan tentang pendidikan Kedjuruan dan/atau latihan — kerdja bagi para Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar, pasal 5 ajat 2;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 162 tahun 1957, tentang lapangan pekerdjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Urusan Veteran;
3. Undang-undang No. 75 tahun 1957, pasal 8 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 162);

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 12 Djanuari 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pendidikan kedjuruan dan/ atau latihan kerdja bagi para Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 1.

1. Kepada seorang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang belum mempunjai lapangan pekerdjaan karena tidak mempunjai sesuatu ketjakapan/kepandaian dapat diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan kedjuruan dan/atau latihan — kerdja dalam lembaga-lembaga Pendidikan Kedjuruan/Tempat-tempat Latihan — Kerdja jang diadakan didalam Negeri, maupun diluar Negeri.

2. Kesempatan mengikuti pendidikan/latihan seperti dimaksud dalam ajat 1 pasal ini dapat diberikan setelah melalui penelitian jang diadakan oleh Departemen Urusan Veteran atau instansi-instansi lain jang ditundjuk untuk itu oleh Menteri (Muda) Urusan Veteran.

Pasal 2.

1. Pendidikan Kedjuruan seperti dimaksud dalam pasal 1 diberikan untuk se-lama-lamanja 3 (tiga) tahun;

2. Latihan — kerdja seperti dimaksud dalam pasal 1 diberikan untuk selama-lamanja 1½ (satu setengah) tahun.

Pasal 3.

1. Biaja guna keperluan selama mengikuti pendidikan kedjuruan dan/atau latihan — kerdja, jaitu: ongkos beladjar, uang, pemondokan, uang saku serta ongkos pulang pergi dari tempat tinggal ke Lembaga Pendidikan dan/atau Tempat latihan mendjadi tanggungan Pemerintah.
2. Ketentuan termaktub dalam ajat 1 pasal ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri (Muda) Urusan Veteran.

Pasal 4.

Instansi-instansi Pemerintah dan/atau Partikulir jang mengadakan Pendidikan-kedjuruan dan/atau latihan — kerdja diwadjibkan mendahulukan kesempatan bagi para Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dengan sjarat-sjarat jang diperlukan.

Pasal 5.

Kesempatan pemberian pendidikan dan/atau latihan seperti dimaksud dalam Peraturan ini dapat diberikan untuk satu kali, dan hanja dapat diberikan untuk dua kali atau lebih berdasarkan Keputusan Menteri (Muda) Urusan Veteran dalam hal Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang bersangkutan dianggap mempunjai bakat istimewa.

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan ini diatur oleh Menteri (Muda) Urusan Veteran Republik Indonesia.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Djanuari 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan pada tanggal 27 Djanuari 1960;
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

***

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 5 ATHUN 1960
tentang
PENDIDIKAN KEDJURUAN DAN/ATAU LATIHAN KERDJA BAGI PARA VETERAN PEDJOANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1, ajat 1.

Bahwa berdasarkan bunji Undang-undang No. 75 tahun 1957 pasal 8 kepada Veteran Pedjoang Kemerdekaan jang belum mempunjai lapangan pekerdjaan dikarenakan tidak mempunjai sesuatu ketjakapan/kepandaian dipandang perlu untuk diberikan sekedar pengetahuan, ketjakapan dan ketangkasan kerdja, sebagai bekal untuk masuk dalam produksi proses masjarakat, agar mereka dapat memperbaiki sosial ekonominja dan dapat menjumbangkan tenaganja guna pembangunan Negara.

Pasal 1 ajat 2.

Kata-kata penelitian dalam pasal ini dimaksud, bukanlah penjaringan seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958, akan tetapi guna memeriksa apakah benar-benar Veteran itu belum bekerdja dikarenakan tidak mempunjai sesuatu ketjakapan atau kepandaian, apakah seseorang Veteran perlu mendapatkan prioritas dalam pendidikan atau latihan, dan kedjuruan apa jang lebih tepat, buat seorang Veteran bersangkutan; umpamanja: dengan mengadakan Vocotionaltest atau udjian.

Pasal 2.

Djangka waktu pendidikan — kedjuruan diberikan selama-lamanja 3 tahun dan latihan-kerdja selama-lamanja 1 tahun, ini termasuk usaha-usaha untuk mengadakan perobahan mental.

Pasal 3.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 4.

Pemberian prioritas oleh instansi-instansi dimaksud dalam pasal ini adalah lebih praktis, karena sekaligus dapat menampung setelah dididik atau dilatih.

Pasal 5.

Kesempatan hanja diberikan sekali, guna mendjaga penjelesaian jang berlarut-larut, jang tidak akan mempunjai sifat mendidik (opvoedend).

•

PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1960
tentang
PENEMPATAN PARA VETERAN PEDJOANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM LAPANGAN PEKERDJAAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. Bahwa para Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia masih banjak jang belum mempunjai pekerdjaan;
2. Bahwa harus segera ada peraturan tentang penerimaan Veteran Pedjoang Kemerdkaan Republik Indonesia didalam sesuatu lapangan pekerdjaan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ajat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 162 tahun 1957 tentang lapangan pekerdjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Urusan Veteran;
3. Pasal 9 Undang-undang No. 75 tahun 1957, (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 162);
4. Undang-undang No. 29 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar:

Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 20 Djanuari 1960.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Penempatan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Lapangan Pekerdjaan.

Pasal 1.

Sesuatu Instansi Pemerintah jang memerlukan tenaga kerdja dan atau tambahan tenaga kerdja, baik jang langsung akan dipekerdjakan sebagai pegawai, ataupun jang akan mendapat pendidikan terlebih dahulu pada suatu Kursus, diwadjibkan mendahulukan penerimaan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan tidak mengurangi sjarat-sjarat jang diperlukan.

Pasal 2.

Sesuatu Instansi Pemerintah jang mengadakan pendidikan penjempurnaan pengetahuan kedjuruan untuk membuka kesempatan pertumbuhan cariere kepegawaian, diwadjibkan mendahulukan pemberian kesempatan itu kepada para pegawainja jang telah diakui sebagai Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tidak mengurangi sjarat-sjarat jang diperlukan.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal 1 dan 2 peraturan ini berlaku djuga bagi Perusahaan-perusahaan Pemerintah dan Partikelir jang mendapat fasilitas Pemerintah.

Pasal 4.

Guna pelaksanaan ketentuan-ketentuan pada pasal 1, 2 dan 3 peraturan ini Instansi-instansi Pemerintah dan Partikulir jang bersangkutan diwadjibkan berhubungan dengan Departemen Urusan Veteran.

Pasal 5.

1. Ketentuan-ketentuan termaktub pasal 1, 2 dan 3 peraturan ini hanja berlaku bagi para Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang telah melalui penjaringan oleh Departemen Urusan Veteran Republik Indonesia.
2. Ketentuan-ketentuan jang termaktub pasal 1, 2 dan 3 peraturan ini tidak berlaku bagi Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang:
   a. pernah dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut;
   b. melanggar dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan penjelenggaraan dari peraturan ini.

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan lebih landjut untuk menjelenggarakan peraturan ini, akan diatur bersama oleh Menteri Urusan Veteran dan Menteri Perburuhan.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 13 April 1960.
Pedjabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal 13 April 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

SANTOSO.

***

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1960

tentang

PENEMPATAN PARA VETERAN PEDJOANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM LAPANGAN PEKERDJAAN.

PENDJELASAN UMUM.

Setelah pemulihan kedaulatan wilajah Republik Indonesia dan kita mengindjak pada taraf pembangunan Negara maka dalam kehidupan sehari-hari terdapat suatu hal jang tak dapat dielakkan ialah adanja masaalah bekas pedjoang kemerdekaan jang disebut sebagai masalah Veteran dan meminta penjelesaian.

Timbulnja masaalah itu antara lain disebutkan karena para pedjoang kemerdekaan itu setelah selesai mendjalankan tugas bersendjata tidak lagi mendapatkan pegangan dan tempat jang sewadjarnja didalam kehidupan masjarakat. Hingga kedudukan bekas pedjoang kemerdekaan mendjadi tidak djelas, paling sedikit seratus lima puluh ribu pedjoang kemerdekaan tidak mempunjai lapangan pekerdjaan atau menganggur tak kentara.

Timbullah perasaan-perasaan sebagai elemen jang onproductief serta mengganggu pembangunan Negara.

Dengan demikian maka masaalah Veteran pedjoang kemerdekaan akan dapat selesai apabila mereka telah dapat disalurkan pada tempat jang sewadjarnja kembali sesuai dengan djiwa serta kemampuannja. Penjaluran tenaga Veteran ini sekaligus akan mentjakup kebutuhan:

a. pemulihan penggunaan tenaga sebagai man-powerbuilding dalam rangka pembangunan Negara;
b. penjelenggaraan sosial-ekonomis bagi para Veteran Pedjoang Kemerdekaan.

Jang mendjadi salah satu tugas penjaluran Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah soal penempatan para Veteran didalam lapangan pekerdjaan.

Dan sesuai dengan hal jang tersebut dalam pasal 9, Undang-undang No. 75 tahun 1957 maka sangat diperlukan adanja ketentuan pelaksanaan jang mengatur tentang tugas penempatan para Veteran Pedjoang Kemerdekaan kedalam lapangan pekerdjaan.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Bahwa berdasar bunji pasal 9 Undang-undang No. 75 tahun 1957 kepada para Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang menganggur atau belum mempunjai lapangan pekerdjaan jang tetap dipandang perlu untuk didahulukan daripada pelamar lain bukan Veteran diberikan tempat pekerdjaan, agar mereka segera dapat mendjadi tenaga jang productief bagi pembangunan Negara serta sekaligus menerima perbaikan sosial ekonominja.

Tentang sjarat-sjarat jang diperlukan jang disebut dalam pasal ini adalah dimaksud dengan sjarat-sjarat kepegawaian jang berlaku umum bagi masing-masing tenaga guna lowongan jang bersangkutan.

Pasal 2.

Sesuai dengan maksud dan tudjuan mutlak dari Undang-undang No. 75 tahun 1957 sendiri ialah memberikan tempat lajak dan wadjar bagi para Veteran Pedjuang Kemerdekaan, maka dipandang perlu guna diikut sertakannja para Veteran

dalam tiap kesempatan kemadjuan baik jang berupa pendidikan penjempurnaan maupun pendidikan chusus guna pertumbuhan carriere kepegawaian.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

Penundjukan kepada instansi Pemerintah serta Partikulir jang mempunjai lowongan atau memberikan kesempatan kemadjuan untuk berhubungan dengan Departemen Urusan Veteran adalah bermaksud agar ada ketertiban dalam penjaluran tenaga Veteran pada lapangan pekerdjaan serta guna menghindari adanja kemungkinan tekanan-tekanan langsung oleh para Veteran jang bersangkutan terhadap instansi jang memerlukan tenaga dan terhadap pihak-pihak lain diluar Departemen Urusan Veteran.

Adapun ketertiban tersebut diatas antara lain bertudjuan:

a. adanja djaminan tentang ke-Veteranan;
b. pengaturan serta seleksi seperlunja apabila kesempatan maupun lowongan tenaga kerdja jang ada adalah tidak seimbang dengan permintaan untuk disalurkan jang dihadapinja;
c. adanja penempatan jang tepat menurut djiwa, bakat serta kemampuan Veteran jang bersangkutan.

Pasal 5, ajat 1.

Tindakan penjaringan oleh Departemen Urusan Veteran jang disebut dalam pasal ini adalah bermaksud antara lain:

a. penjaringan guna jang disebut dalam pendjelasan pasal 4 sub b;
b. guna mengadakan penelitian seperlunja apakah seseorang Veteran menganggur atau belum mempunjai lapangan kerdja jang tetap benar-benar karena belum mendapatkan lapangan pekerdjaan (jang tetap), atau pernah mendapatkan kesempatan lapangan pekerdjaan karena hal-hal diluar kemampuannja tidak dapat menggunakan kesempatan itu, ataukah seorang Veteran itu dengan sengadja mengabaikan kesempatan jang pernah diberikan jang sewadjarnja dapat digunakan.

Adapun tentang penjaringan guna ketentuan ke-Veteran diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958.

Ajat 2.

Bagi Veteran jang pernah mendapatkan kesempatan menurut ketentuan peraturan ini, demikian pula terhadap Veteran jang dengan sengadja melanggar serta tidak mentaati ketentuan jang ditetapkan guna pelaksanaan peraturan ini tidak akan lagi diberikan pelajanan guna kesempatan baru. Hal ini dipandang perlu oleh karena kesempatan mendapatkan lapangan pekerdjaan menurut peraturan ini hanja diberikan untuk satu kali. Dalam hal-hal chusus dapat diberikan kesempatan dua kali atau lebih berdasarkan keputusan Menteri Urusan Veteran antara lain dalam hal Veteran jang bersangkutan memiliki bakat-bakat istimewa.

Pasal 6.

Hal-hal jang diperlukan guna pelaksanaan Peraturan Pemetah ini akan diatur oleh Menteri Urusan Veteran. Dan untuk keperluan ini guna hal-hal tertentu Menteri Urusan Veteran akan berhubungan dengan Menteri-menteri lain jang bersangkutan.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Tambahan Lembaran-Negara No. 1974.

*
**

PERATURAN PEMERINTAH No. 45 TAHUN 1960
tentang
PEMBERIAN TUNDJANGAN KEPADA VETERAN PEDJOANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA JANG BERHUBUNG PERIKEHIDUPANNJA MEMBUTUHKAN BANTUAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sebagai penghargaan terhadap djasa-djasa seluruh Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, perlu diadakan peraturan tentang pemberian tundjangan kepada Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 7 ajat (3) Undang-undang No. 75 tahun 1957 tentang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 162);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 162 tahun 1957 tentang pembentukan Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1950 tentang Peraturan sementara tentang pemberian tundjangan kepada anggota T.N.I. jang pada waktu penjerahan kedaulatan tidak masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 65) jo Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1960 tentang pendaftaran penjaringan dan pengakuan Veteran Pedjang Kemerdekaan Republik Indonesia;
5. Pasal 5 ajat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 6 September 1960.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang pemberian tundjangan kepada Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang berhubung dengan perikehidupannja membutuhkan bantuan.

B A B I.

Matjam tundjangan.

Pasal 1.

Kepada Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang berhubung dengan perikehidupannja ternjata membutuhkan bantuan diberikan tundjangan menurut ketentuan-ketentuan jang diatur dalam pasal 2 Peraturan ini.

Pasal 2.

(1) Tundjangan jang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan ini diberikan kepada Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang masih membutuhkan bantuan perikehidupannja dan diberikan untuk waktu sedikit-dikitnja 6 bulan dan selama-lamanja 4 tahun.

(2) Tundjangan jang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan ini diberikan kepada Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang mendjadi tidak tjakap bekerdja karena tjatjat physik atau mental jang didapat didalam dan/atau oleh karena akibat perdjoangan selama ia masih membutuhkan bantuan karena perikehidupannja.

Pasal 3.

(1) Tundjangan jang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan ini adalah sebesar Rp. 180,— (seratus delapan puluh rupiah) sebulan untuk jang berkeluarga;

(2) Untuk jang tidak berkeluarga 75% dari tundjangan dalam ajat 1 diatas.

Pasal 4.

(1) Kepada mereka jang menerima tundjangan menurut pasal 2 ajat 2 selain menerima tundjangan seperti dimaksud dalam ajat (1) atau ajat (2) pasal 3 dapat diberikan tambahan tundjangan tjatjat sebagai berikut:

a. 40% dari Rp. 200,— apabila kehilangan lengan kanan dari sendi bahu kebawah;
b. 35% dari Rp. 200,— apabila kehilangan lengan kiri dari sendi bahu kebawah;
c. 35% dari Rp. 200,— apabila kehilangan lengan kanan dari atau dari atas siku kebawah;
d. 30% dari Rp. 200,— apabila kehilangan lengan kiri dari atau dari atas siku kebawah;
e. 30% dari Rp. 200,— apabila kehilangan tangan kanan dari atau dari atas pergelangan kebawah;
f. 28% dari Rp. 200,— apabila kehilangan tangan kiri dari atau dari atas pergelangan kebawah;
g. 70% dari Rp. 200,— apabila kehilangan kedua belah kaki dari pangkal paha kebawah;
h. 35% dari Rp. 200,— apabila kehilangan sebelah kaki dari pangkal paha kebawah;
i. 50% dari Rp. 200,— apabila kehilangan kedua belah kaki dari mata kaki kebawah;
j. 25% dari Rp. 200,— apabila kehilangan sebelah kaki dari mata kaki kebawah;
k. 70% dari Rp. 200,— apabila kehilangan penglihatan pada kedua belah mata;

l. 30% dari Rp. 200,— apabila kehilangan penglihatan pada sebelah mata;
m. 40% dari Rp. 200,— apabila kehilangan pendengaran pada kedua belah telinga;
n. 10% dari Rp. 200,— apabila kehilangan pendengaran pada sebelah telinga;
o. 10% sampai 70% dari Rp. 200,— menurut tingkat keadaan jang atas pertimbangan Madjelis Pengudji Kesehatan Badan untuk pegawai Negeri Sipil, dapat dipersamakan dengan apa jang tersebut dalam huruf a sampai n, untuk kehilangan kekuasaan atas sebagian atau seluruh anggota badan atau ingatan jang tidak termasuk dalam a sampai n tersebut.

(2) Tundjangan-tundjangan jang dimaksud didalam ajat (1) pasal ini dihitung tersendiri untuk tiap-tiap djenis dengan ketentuan djumlah tundjangan tjatjat tersebut paling tinggi Rp. 200,— (dua ratus rupiah) sebulan.

Pasal 5.

(1) Bilamana seorang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang telah berhak atau menerima tundjangan jang dimaksud dalam pasal 3 peraturan ini meninggal duia, maka tundjangan diberikan kepada anak dan isteri atau didalam hal ia tidak mempunjai anak dan isteri diberikan kepada orang tuanja.

(2) Tundjangan jang dimaksud didalam ajat (1) pasal ini diberikan sekaligus dengan ketentuan paling sedikit Rp. 1000,—

B A B II.

Penghentian dan penghapusan tundjangan.

Pasal 6.

(1) Tundjangan dihentikan apabila jang berkepentingan tidak dapat membuktikan lagi sjarat-sjarat untuk pemberian tundjangan seperti jang dimaksud dalam peraturan ini.

(2) Tundjangan dihapuskan djika:

a. jang berkepentingan ternjata kehilangan haknja sebagai Veteran;
b. Pemerintah menganggap tidak perlu lagi memberikan bantuan;

c. jang berkepentingan meninggal dunia dan selandjutnja berlaku pasal 5 peraturan ini.

B A B III.

Ketentuan lain-lain.

Pasal 7.

(1) Permohonan untuk mendapatkan tundjangan harus diadjukan kepada Menteri Urusan Veteran.

(2) Hak atas tundjangan tidak dapat dipindjamkan atau digadaikan.

Pasal 8.

(1) Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang telah menerima tundjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan-peraturan jang lain, dapat menerima tundjangan berdasarkan peraturan ini dengan memperhitungkan tundjangan jang telah diterimanja.

(2) Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Urusan Veteran.

(3) Segala biaja untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada anggaran belandja Departemen Urusan Veteran.

(4) Hal-hal jang tidak termasuk dalam peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Urusan Veteran.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapan didalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 29 Nopember 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1960.
Sekretaris Negara,

SANTOSO.

Lembaran-Negara No. 143 Tahun 1960.

PENDJELASAN

atas

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1960.

tentang

Pemberian Tundjangan Kepada Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia Jang Berhubung Perikehidupannja Membutuhkan Bantuan.

UMUM.

Peraturan Pemerintah ini merupakan suatu peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 75 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 162) tentang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tundjangan jang dimaksud dalam peraturan ini hanja diberikan kepada para Veteran jang benar-benar membutuhkan bantuan karena perikehidupannja dan hanja diberikan selama ia membutuhkan bantuan itu.

Demikian pula Pemerintah tidak bermaksud untuk membiarkan mereka itu hidup dari tundjangan belaka, akan tetapi Pemerintah bermaksud pula memberikan dorongan padanja agar supaja mereka berichtiar dan berdaja upaja untuk mentjari penghidupan/nafkah sendiri jang lajak.

Didasarkan atas maksud Pemerintah untuk memberi keinsafan dan dorongan kepada mereka untuk pula ikut serta dalam pembangunan Negara, maka dalam pemberian tundjangan ini diadakan batas waktu jang tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1960 tentang pendaftaran penjaringan dan pengakuan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Batas waktu jang tertentu ini tidak diadakan bagi mereka jang sama sekali tidak ada kemungkinan untuk dapat bekerdja atau mentjari nafkah sendiri karena tjatjat physik atau tjatjat mental.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Tiap-tiap Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang mengadjukan permohonan pemberian tundjangan harus dapat mengadjukan bukti-bukti bahwa ia benar-benar membu-

tuhkan bantuan karena keadaan seperti dimaksud dalam pasal 2. Pembuktian-pembuktian itu harus diketahui/disjahkan oleh pedjabat-pedjabat resmi ialah: Pamong Pradja, B.O.D.M., dan sebagainja. Penentuan dapat atau tidaknja diberikan tundjangan kepada sipemohon dilakukan oleh Menteri Urusan Veteran.

Pasal 2.

Pada tiap-tiap pengambilan uang tundjangan harus ditundjukkan pembuktian baru jang membuktikan bahwa sipenerima tundjangan masih membutuhkan bantuan.

Kalau pembuktian itu tidak ditundjukkan maka tundjangannja tidak dibajarkan. Penentuan djangka waktu pemberian tundjangan adalah didasarkan atas maksud untuk memberikan bantuan kepada jang bersangkutan selama-lamanja dalam djangka waktu jang sama dengan masa perdjoangannja dengan tjatatan sedikit-dikitnja 6 bulan dan selama-lamanja 4 tahun.

Jang dimaksud dengan didalam dan atau oleh karena perdjoangan ialah mendapat luka-luka parah dari pertempuran atau sakit akibat matjam-matjam penderitaan dalam pertempuran antara 17 Agustus 1945 sampai 1 Djanuari 1950 hingga mengakibatkan mendjadi tjatjat physik atau mental.

Pasal 3.

Dalam penentuan besarnja tundjangan Rp. 180,— diambil dasar minimum upah bagi seorang buruh ketjil jang berkeluarga.

Pasal 4.

Tundjangan tjatjat ini tidak diberikan setjara tersendiri akan tetapi bersama-sama dengan tundjangan pokok.

Sistim penentuan djenis tundjangan tjatjat ini sesuai dengan sistim jang dianut oleh Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1954.

Pasal 5.

1. Maksud pasal 5 ini adalah bukan bermaksud memberikan tundjangan djanda dan/atau anak jatim/piatu, akan tetapi sekedar memberikan bantuan agar supaja mereka tidak akan terlantar karena ditinggalkan suaminja dan dirasakan pula bahwa mereka ini selama masih berkabung belum dapat mentjari nafkah sendiri.

2. Djumlah sedikit-dikitnja Rp. 1.000,— ditentukan atas dasar kebutuhan perawatan pertama bagi memelihara djenazah dan sebagainja.

Pasal 6.

Tjukup djelas.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

1. Dalam hal seorang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia telah/pernah menerima tundjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1950 atau Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949 atau pernah mendjadi C.T.N. atau menerima tundjangan berdasarkan peraturan-peraturan lainnja, kepadanja hanja diberikan tundjangan sebesar selisih antara djumlah tundjangan menurut Peraturan Pemerintah ini dan djumlah tundjangan menurut Peraturan-peraturan tersebut diatas.
2. ajat 3 dan ajat 4 Tjukup djelas.

Pasal 9.

Tjukup djelas.

Tambahan Lembaran-Negara No. 2095.

***

PERATURAN PEMERINTAH No. 46 TAHUN 1960

tentang

PEMBERIAN TUNDJANGAN KEPADA DJANDA DAN ANAK JATIM/JATIM-PIATU DARI VETERAN PEDJOANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sebagai penghargaan terhadap djasa-djasa seluruh Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang telah gugur atau meninggal dunia dalam atau karena menunaikan kewadjibannja terhadap Bangsa dan Negara, perlu diadakan peraturan tentang pemberian bantuan kepada djanda

dan anak jatim/jatim-piatu dari Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 7 ajat (4) Undang-undang No. 75 tahun 1957 tentang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 162);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 162 tahun 1957 tentang pembentukan Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 65) jo Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1960 tentang pendaftaran, penjaringan dan pengakuan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia;
4. Pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 17) tentang peraturan sementara tentang pemberian sokongan kepada djanda dan anak jatim/piatu dari anggota Tentara R.I.S. bekas T.N.I. jang telah diubah/ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 18) jang diatur lagi dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1958);
6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 tentang pemberian pensiun kepada djanda-djanda dan onderstand kepada anak-anak jatim/piatu dari para anggota Angkatan Darat jang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 89);
7. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 72) tentang kenaikan pensiun dan onderstand jang diberikan kepada djanda para bekas anggota Tentara Angkatan Perang K.N.I.L. dulu dan sebagainja dan kepada djanda dan/atau anaknja, jang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 8) dan diubah/ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1959);

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 6 September 1960.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang pemberian tundjangan kepada djanda dan anak jatim/jatim-piatu dari Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

B A B I.

Djanda dan anak jatim/jatim-piatu dari Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 1.

1. Jang dimaksud dengan djanda dalam Peraturan Pemerintah ini ialah isteri jang sjah dari Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia menurut Undang-undang No. 75 Tahun 1957, jang gugur atau meninggal dunia didalam atau karena melakukan tugas Perdjoangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

2. Jang dimaksud anak jatim dalam Peraturan Pemerintah ini, ialah anak jang sjah dari Veteran Pedjoank Kemerdekaan Republik Indonesia jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dan jang ibunja meninggal dunia.

3. Jang dimaksud dengan anak jatim-piatu dalam Peraturan Pemerintah ini ialah anak jang sjah dari Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dan jang ibunja meninggal dunia.

B A B II.

Jang menerima tundjangan.

Pasal 2.

Jang berhak menerima tundjangan ialah:

1. Djanda termaksud pada pasal 1 ajat (1) peraturan ini.
2. Anak jatim termaksud pada pasal 1 ajat (2) peraturan ini jang:
   a. belum menikah;
   b. belum berumur 21 tahun, ketjuali kalau masih sekolah di Sekolah Menengah Atas dalam hal mana ditetapkan 25 tahun;
   c. tidak pernah dihukum karena kedjahatan;
   d. belum bekerdja di Pemerintah dengan penghasilan jang lebih besar dari tundjangan jang harus diterimanja.
3. Anak jatim-piatu dalam pasal 1 ajat (3) jang:
   a. belum menikah;
   b. belum berumur 21 tahun, ketjuali kalau masih sekolah disekolah Menengah Atas dalam hal mana umur ditetapkan 25 tahun;

a. belum pernah menikah;
b. belum berumur 21 tahun, ketjuali kalau masih sekolah disekolah Menengah Atas dalam hal mana umur ditetapkan 25 tahun.
c. tidak pernah dihukum karena kedjahatan;
d. belum bekerdja di Pemerintah dengan penghasilan jang lebih besar dari tundjangan jang harus diterimanja.

B A B III.

Matjam Tundjangan.

Pasal 3.

1. a. tundjangan kepada djanda ditetapkan Rp. 65,— (enam puluh lima rupiah) sebulan;
   b. tundjangan kepada anak jatim ditetapkan tiap-tiap bulan:

1 anak	Rp. 14,—
2 anak	„ 23,—
3 anak	„ 28,—
4 anak	„ 31,—
5 anak atau lebih	„ 35,—

   c. tundjangan kepada anak jatim-piatu ditetapkan tiap-tiap bulan:

1 anak	Rp. 23,—
2 anak	„ 40,—
3 anak	„ 56,—
4 anak	„ 65,—
5 anak atau lebih	„ 68,—

2. Kepada mereka jang tersebut dalam ajat 1 huruf-huruf a, b dan c pasal ini diberikan tundjangan kemahalan umum dan tundjangan kemahalan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku bagi djanda.

Pasal 4.

Dalam hal tersebut dalam pasal 3 ajat (1) huruf c, tundjangan dapat diterimakan kepada jang merawatnja.

Pasal 5.

Djanda dan anak jatim/jatim-piatu jang mendapat pensiun/tundjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah jang lain, dapat

menerima pensiun/tundjangan jang lebih menguntungkan baginja.

B A B IV.

Penghentian dan Penghapusan Tundjangan.

Pasal 6.

1. tundjangan kepada djanda dihentikan djika: ia kawin lagi;
2. tundjangan kepada djanda dihapuskan djika:
   a. ia dihukum karena suatu kedjahatan lebih dari satu tahun;
   b. ia meninggal dunia.

Pasal 7.

Tundjangan kepada anak jatim/jatim-piatu dihapuskan djika:

a. ia telah/pernah kawin;
b. ia telah mentjapai usia 21 tahun dan tidak bersekolah;
c. ia dihukum karena suatu kedjahatan lebih dari satu tahun;
d. ia mendapat pekerdjaan dalam lingkungan Pemerintah dengan penghasilan jang tetap dan besarnja lebih dari tundjangan jang diperolehnja;
e. sebagai peladjar ia telah mentjapai umur 25 tahun;
f. ia meninggal dunia.

Pasal 8.

Hak tundjangan kepada djanda dan anak jatim/jatim-piatu gugur, bila tundjangan dalam lima tahun berturut-turut tidak diambil.

Pasal 9.

Tundjangan dihentikan pada bulan jang berikutnja sesudah jang berkepentingan kehilangan haknja atas tundjangan itu.

Pasal 10.

Tundjangan kepada djanda jang dimaksud dalam ajat (1) pasal 6 dapat diberikan kembali mulai bulan berikutnja sesudah perkawinan terputus.

Pasal 11.

1. Permohonan untuk mendapatkan tundjangan harus diadjukan kepada Menteri Urusan Veteran.
2. Hak tundjangan tidak dapat dipindahkan, dipindjamkan, atau digadaikan.

Pasal 12.

1. Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Urusan Veteran.
2. Segala biaja untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada anggaran belandja Negara.
3. Tundjangan ini diterima di Kantor Kas Negara.

Pasal 13.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1960.
Pedjabat Sekertaris Negara,

SANTOSO.

Lembaran-Negara No. 144 tahun 1960

***

PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 46 TAHUN 1960
tentang
PEMBERIAN TUNDJANGAN KEPADA DJANDA DAN ANAK JATIM/JATIM-PIATU DARI VETERAN PEDJOANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

UMUM:

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan jang mengatur tentang pemberian pensiun atau sokongan kepada para djanda dan anak jatim/jatim-piatu dari pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang.

Pemberian sokongan ini merupakan suatu pemberian djaminan sosial kepada ahli waris dari pegawai jang dimaksud diatas jang ditinggalkan mereka karena meninggal dunia sebagai penghargaan atas djasa-djasanja terhadap Negara.

Para Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia telah pula menjumbangkan djasa baktinja terhadap Republik Indonesia, bahkan mereka ini mempunjai andil jang sangat besar sekali dalam Perdjoangan Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga sudah sewadjarnja bila Pemerintah memikirkan pula nasib dari para ahli-warisnja dari Veteran-veteran jang telah gugur/meninggal dunia dalam menunaikan djasa baktinja terhadap Nusa dan Bangsa. Sebagian besar dari Veteran tergabung dalam Angkatan Perang, tetapi masih banjak pula Veteran jang tidak pernah menggabungkan diri dalam Angkatan Perang atau tidak pernah mendjadi pegawai Negeri.

Untuk djanda-djanda dan anak jatim/jatim-piatu dari Veteran jang tergabung dalam Angkatan Perang atau jang pernah mendjadi pegawai Negeri berlaku peraturan-peraturan jang berlaku bagi Angkatan Perang dan pegawai Pemerintah, akan tetapi peraturan ini tidak berlaku untuk djanda-djanda dan anak-anak jatim/jatim-piatu dari Veteran jang tidak pernah tergabung dalam Angkatan Perang atau tidak pernah mendjadi pegawai Negeri.

Pasal 7 ajat (4) Undang-undang No. 75 tahun 1957 tentang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia menetapkan bahwa Pemerintah bermaksud untuk memberikan sokongan kepada djanda dan anak jatim/jatim-piatu dari Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia pada umumnja jang telah gugur/atau meninggal dunia dalam menunaikan djasa baktinja selama Perdjoangan Kemerdekaan Republik Indonesia antara 17 Agustus 1945 sampai 1 Djanuari 1950.

Dengan alasan tersebut diatas maka perlu dikeluarkan peraturan tersendiri jang mengatur pemberian tundjangan kepada djanda dan anak jatim/jatim-piatu dari Veteran pada umumnja.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan isteri jang sjah ialah isteri jang dapat menundjukkan surat kawin atau keterangan-keterangan lain dari Pengadilan Agama jang menundjukkan bahwa ia benar-benar isteri dari Veteran jang dimaksud dalam pasal ini dan

belum ditjerai ketika suaminja ini gugur atau meninggal dunia karena melakukan tugas Perdjoangan Kemerdekaan Republik Indonesia antara 17 Agustus 1945 sampai 1 Djanuari 1950.

Pasal 2 ajat 1.

Dalam hal seorang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia mempunjai isteri lebih dari seorang, maka berlaku ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 25) tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim/jatim-piatu pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2 ajat 3.

Tjukup djelas.

Pasal 3.

Penentuan besar tundjangan djanda diambil atas dasar perbandingan untuk golongan djanda dari seorang Sersan jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1950. Demikian pula tundjangan kepada anak jatim/jatim-piatu.

Pasal 4.

Jang merawat itu dapat keluarganja sendiri, orang lain atau sesuatu organisasi sosial.

Demikian pula pasal ini tidak menutup kemungkinan bagi sianak untuk menerima sendiri tundjangan dalam hal ia sebelum hapus haknja untuk menerima tundjangan, hidup sendiri dan tidak ada jang merawatnja.

Pasal 5.

Kepada djanda dan anak jatim/jatim-piatu dari Veteran jang telah mendjadi anggota Angkatan Perang atau pegawai Negeri selain Peraturan ini berlaku pula peraturan-peraturan jang mengatur pensiun/sokongan djanda dan anak jatim/jatim-piatu dari pegawai Pemerintah.

Bagi mereka hanja digunakan satu matjam peraturan, ialah peratuan jang menguntungkan dan/atau memberikan penghasilan jang terbesar.

Pasal 6 ajat 1.

Kalau djanda jang dimaksud dalam Peraturan ini setelah berhak menerima tundjangan pembajaran, bersuami lagi maka tundjangan tidak diberikan/tidak dibajarkan.

Ajat 2.

a dan b jang dimaksud dengan dihapuskan dalam pasal ini ialah hak untuk menerima tundjangan mendjadi hilang.

Dengan dihukum karena sesuatu kedjahatan dimaksudkan suatu kedjahatan jang terdjadi sesudah berlaku Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7.

a. dengan telah/pernah kawin disini dimaksudkan pula telah kawin walaupun telah terputus sebelum Peraturan ini berlaku.
b. s/d f. tjukup djelas.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Tjukup djelas.

Pasal 10.

Dalam hal djanda jang dimaksud dalam pasal 6 ajat (1) ini tidak bersuami lagi karena pertjeraian atau karena suaminja meninggal dunia maka tundjangan dibajar kembali mulai bulan berikutnja setelah perkawinan itu terputus dan dibajarkan menurut ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Urusan Veteran.

Pasal 13.

Tjukup djelas.

Tambahan Lembaran-Negara No. 2096.

***

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 468 TAHUN 1961
tentang
PENJERAHAN URUSAN LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI KEAMANAN NASIONAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa persoalan mengenai Legiun Veteran Republik Indonesia erat hubungannja dengan masaalah keamanan dan pertahanan Negara;
2. bahwa pengurusan dan pengawasan terhadap Legiun Veteran Republik Indonesia perlu diletakkan dibidang tugas Menteri Keamanan Nasional;
3. bahwa Legiun Veteran Republik Indonesia sedang dalam pendewasaan;

Menimbang pula:

bahwa dipandang perlu untuk sementara menjerahkan Urusan Legiun Veteran Republik Indonesia kepada Menteri Keamanan Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 17 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 tahun 1957, No. 49 tahun 1960 dan No. 21 tahun 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertatma: Menundjuk untuk sementara Menteri Keamanan Nasional, jang dibantu oleh Menteri Urusan Veteran :

1. menjelenggarakan Kongres Legiun Veteran Republik Indonesia;
2. mengatur dan menjelenggarakan bimbingan dan pendewasaan Legiun Veteran Republik Indonesia.

Kedua: Segala ketentuan jang mengenai Legiun Veteran Republik Indonesia dan jang bertentangan dengan keputusan ini, untuk sementara ditangguhkan pelaksanaannja.

Ketiga: Kepututsan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 16 Desember 1960.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 23 Agustus 1961.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Disalin sesuai dengan aselinja oleh
Kaur Tata Usaha Seksi Sekretariat
Staf Penguasa Perang Tertinggi,

Soewardjo

Lettu Inf. Nrp. 128390.

***

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 299 TAHUN 1962
tentang
Penjaluran Anggauta Angkatan Bersendjata ke Masjarakat

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat dari staf Keamanan Nasional tanggal 14 Djuni 1962 No. Rah/A.S./1108/62 dan surat dari Menteri Urusan Veteran tanggal 12 Djuli 1962 No. 208/M.U.V./1962;

Menimbang:

1. bahwa untuk mempertinggi hasil guna dalam usaha penjaluran kemasjarakatan para anggota Angkatan Bersendjata jang diberhentikan dari dinas karena telah masa dipensiun atau karena hal-hal lain, perlu menjerahkan urusan tersebut kepada satu Departemen;
2. bahwa Departemen Urusan Veteran disamping tugasnja sekarang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Pasal-pasal 4 ajat 1, dan 10 Undang-undang Dasar;
2. Ketentuan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 dalam perintjian buku kesatu djilid ke II bab 30 mengenai Keamanan dan Pertahanan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962, tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama: Disamping tugas pengurusan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 75 Tahun 1957, menjerahkan urusan penjaluran ke masjarakat para anggota Angkatan Bersendjata kepada Departemen Urusan Veteran.

Kedua: Dalam melaksanakan tugas penjaluran tersebut Menteri Urusan Veteran bekerdja sama dengan Menteri-Menteri Kepala Staf Angkatan.

Ketiga: Perobahan nama Departemen Urusan Veteran Remendjadi Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi.

Keempat: Pelaksanaan Surat Keputusan ini lebih landjut akan diatur oleh Wakil Menteri Pertama Urusan Keamanan Pertahanan.

Kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 18 September 1962.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Sesuai dengan jang aseli
Wakil Sekretaris Ngara

SANTOSO

Brig. Djen. T.N.I.

***

PERATURAN PEMERINTAH No. 51 TAHUN 1963
tentang
TJADANGAN NASIONAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Angkatan Perang adalah termasuk golongan karya Angkatan Bersendjata, jang berkewadjiban ikut serta dalam pembangunan nasional semesta berentjana untuk penjempurnaan/penjelesaian Revolusi Nasional;

b. bahwa oleh karena itu Anggota Angkatan Perang jang tidak aktif lagi dan masuk Tjadangan Nasional masih tetap mempunjai kewadjiban untuk ikut serta dalam pembangunan nasional semesta berentjana tersebut diatas;
c. bahwa untuk penjempurnaan Pertahanan Negara serta pembinaan Karya perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan, kewadjiban dan hak daripada Tjadangan Nasional;

Mengingat:
1. pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal 17 Undang-undang No. 19 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 60);
3. pasal 21 ajat (2) Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 130);
4. pasal 1 ajat (3) Undang-undang No. 2 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 4);
5. pasal 52 ajat (1), ajat (2), ajat (3) dan ajat (4) Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 117);
6. Undang-undang No. 40 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 125);

Mendengar : Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
Peraturan Pemerintah tentang tjadangan Nasional.

B A B I
UMUM

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam Peraturan ini dengan:

a. Menteri/Panglima Angkatan jalah : Panglima Angkatan Darat, Laut dan Udara;
b. Pangkat jalah : Pangkat Militer;
c. Tjadangan jalah : Militer Sukarela dan/atau Militer Wadjib jang ada didalam dinas inaktif dan telah diangkat sebagai Tjadangan.

d. Inaktif jalah : a. Militer Sukarela jang telah diberhentikan dengan hormat dari dinas Tentara dan
b. Militer Wadjib jang ada diluar dinas setelah mengachiri masa dinas wadjib Militernja;

e. Militer Sukarela jalah : Warga Negara jang masuk Angkatan Perang berdasarkan Undang-undang Militer Sukarela;

f. Militer Wadjib jalah : Pewadjib Militer jang terpilih dan dimasukkan dalam Angkatan Perang untuk melakukan dinas Wadjib Militer;

g. Angkatan Perang jalah : Angkatan Perang Republik Indonesia jang terdiri dari Angkatan Darat, Laut dan Udara.

B A B II.

KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2.

(1) Semua Militer Sukarela dan Militer Wadjib jang dalam keadaan inaktif dan berumur maksimum 50 tahun masuk dalam dinas Tjadangan Nasional, dengan perintjian seperti tertjantum dalam pasal 52 Undang-undang No. 66 tahun 1958.

(2) Pembinaan Dinas Tjadangan Nasional dilakukan oleh masing-masing Menteri/Panglima Angkatan.

(3) Organisasi dan administrasi Dinas Tjadangan Nasional diatur lebih landjut oleh Menteri jang diserahi urusan Pertahanan/Keamanan.

B A B III.

HAK-HAK

Pasal 3.

(1) Pada upatjara-upatjara Nasional menurut ketentuan jang berlaku bagi masing-masing Angkatan, maka Anggota Dinas Tjadangan Nasional diperbolehkan berpakaian Seragam dengan mengenakan tanda-tanda pangkat/djasa jang dimiliki terachir.

(2) Pada upatjara termaksud pada ajat (1) pasal ini mereka memperoleh perlakuan berdasarkan Undang-undang Militer Sukarela dan Undang-undang Wadjib Militer, jang tetap berlaku bagi dinas Tjadanpan Nasional.

B A B IV.

KEWADJIBAN DAN TUGAS

Pasal 4.

(1) Anggota Dinas Tjadangan Nasional berkewadjiban memegang teguh Rahasia Militer dan mendjundjung tinggi Kehormatan Negara.

(2) Anggota Dinas Tjadangan Nasional harus ikut serta menjumbangkan karyanja dalam bidang masing-masing untuk menjelesaikan Revolusi Nasional.

(3) Anggota Dinas Tjadangan Nasional dianggap ada didalam dinas Tentara:

a. pada waktu memenuhi undangan pendjabat militer jang wadjib untuk menghadiri suatu upatjara militer;
b. pada waktu menghadiri upatjara Hari-hari Kemerdekaan, Hari Angkatan Perang dan Hari Pahlawan atau undangan dari instansi Militer setempat;
c. pada waktu mengadakan perdjalanan dinas untuk memenuhi kewadjiban tersebut dalam huruf-huruf a dan b diatas pulang-pergi;
d. pada waktu melaksanakan tugas atau pekerdjaan selain tersebut pada huruf-huruf a, b dan c diatas jang menurut ketentuan pendjabat militer jang berwadjib diharuskan berpakaian seragam.

Pasal 5.

Bagi Anggota Dinas Tjadangan Nasional jang dianggap ada didalam dinas Tentara seperti jang dimaksudkan dalam pasal 4 ajat (3) peraturan ini berlaku Hukum Disiplin dan Hukum Pidana Tentara dan ia masuk kekuasaan Pengadilan Tentara.

B A B V.

PENUTUP

Pasal 6.

Segala sesuatu jang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh Menteri jang diserahi urusan Pertahanan/Keamanan.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannja. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 30 Nopember 1963.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 30 Nopember 1963.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

***

PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 51 TAHUN 1963
tentang
TJADANGAN NASIONAL

UMUM.

1. Ketentuan-ketentuan jang merumuskan tentang kedudukan Tjadangan sebagai jang termuat dalam Undang-undang No. 19 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 60), Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) dan Undang-undang No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 4) belum tjukup untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan/penentuan mengenai Tjadangan.

2. Adalah suatu kenjataan bahwa bekas Militer Sukarela/ Militer Wadjib merupakan tenaga Militer jang terdidik dan terlatih serta mempunjai pengalaman-pengalaman tentang tugas kemiliteran, sehingga jang masih memenuhi sjarat-sjarat kedjasmanian dan kerohanian sewaktu-waktu dapat ditugaskan kembali dalam Angkatan Perang atau didjadikan kader dalam pelaksanaan wadjib bela umum. Dengan demikian, maka djelaslah bahwa bekas Militer Sukarela/Militer Wadjib tetap merupakan eksponen dalam pembelaan Negara.

3. Selain hal-hal tersebut diatas dengan dikeluarkannja Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959 jang membawa akibat berobahnja Struktur Pemerintahan dan djuga perobahan kedudukan T.N.I. sebagai alat revolusi jang diikut sertakan setjara aktif dalam segenap kehidupan politik kenegaraan jang mengakibatkan adanja pengkaryaan T.N.I. dalam badan-badan/lembaga-lembaga legislatif pada Pemerintahan dan Negara Republik Indonesia, maka tanggung-djawab T.N.I. sebagai alat revolusi mendjadi bertambah luas, dengan demikian batas-batas tanggung-djawab antara T.N.I. jang masih aktif dengan T.N.I. jang sudah tidak aktif (bekas Militer) mendjadi hilang.

4. Dengan adanja kenjataan diatas dan untuk tetap memelihara hubungan batin antara Militer Sukarela/Militer Wadjib dan bekas Militer Sukarela/Militer Wadjib maka ketentuan-ketentuan jang bersangkutan dengan hak dan kewadjibannja perlu diatur kembali.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1: Tjukup djelas.

Pasal 2: Tjukup djelas.

Pasal 3: ajat (1) dimaksudkan untuk menjesuaikan dengan Instruksi Menteri Muda Pertahanan No. III/Ea/016/1959 tentang Penertiban pemakaian pakaian dinas seragam Angkatan Perang bagi anggota/bekas Tentara/Angkatan Perang.

Ajat (2): Tjukup djelas.

Ajat (3): djaminan sosial jang telah diatur berdasarkan Undang-undang Militer Sukarela/Wadjib Militer antara lain Undang-undang No. 2 tahun 1959 (Pensiun/onderstand Militer), Peraturan Pemerintah No. 176 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 201) (Penghasilan Militer Wadjib) dan lain-lain.

Pasal 4.

Ajat (1): Tjukup djelas.

Ajat (2): sebagai konsekwensi dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959.

Ajat (3): Anggota dinas T.N.I. termaksud dalam ajat tersebut dianggap dalam dinas Tentara, oleh karena mereka diharuskan mengenakan pakaian seragam, dengan mendapatkan perlakuan protokol, jang sama seperti Militer Sukarela dalam

dinas Tentara dan dikenakan hukum Disiplin dan Pidana Tentara. Mereka berada pula didalam kekuasaan peradilan Tentara.

Huruf a.: tjukup djelas.

Huruf b: tjukup djelas.

Huruf c: Tjukup djelas.

Huruf d: jang dimaksudkan dengan „selain tersebut pada huruf a, b dan c diatas" antara lain:

— ditundjuk untuk duduk dalam panitia sebagai militer atau
— diminta untuk mengikuti/menghadiri latihan-latihan militer dan lain-lain.

Pasal 5: Tjukup djelas.

Pasal 6: Tjukup djelas.

Tambahan Lembaran-Negara No. 2600.

*
**

Hasil Pendaftaran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia mulai Tahun 1959 s/d tanggal 30 Maret 1965.

Nomor Urut	Ko Muved/ Agkatan	Djumlah Tjavet	Disjah-kan	Ditolak	Ditang-guhkan
1	2	3	4	5	6
1.	Djakarta Raya	23.000	18.126	399	4.475
2.	Djawa Barat	112.062	58.651	21.215	32.196
3.	Djawa Tengah	133.847	40.060	1.909	96.989
4.	Jogjakarta	15.000	4.128	—	10.872
5.	Djawa Timur	87.695	69.173	20.622	—
6.	Atjeh	32.000	4.199	—	27.801
7.	Sumut	58.050	26.100	12.100	19.860
8.	Sumbar	15.500	10.000	1.500	4.000
9.	Riauw	5.000	2.059	—	2.941
10.	Sumsel	25.000	15.448	2.896	7.456
11.	Djambi	10.000	3.360	—	6.640
12.	Kalbar	3.693	2.181	1.435	77
13.	Kalteng	7.759	7.400	155	204
14.	Kalsel	31.938	21.000	7.099	3.839
15.	Kaltim	5.000	2.839	19	2.142
16.	Nusa Tenggara	36.031	31.783	3.399	849
17.	Sulsel	41.000	17.566	17.400	6.034
18.	Sulsel Tengah	6.000	—	—	—
19.	Sulut Tengah	2.795	—	—	—
20.	Maluku	8.000	—	—	—
21.	Irian Barat	16.000	—	—	—
22.	Angkatan Darat	200.000	—	—	—
23.	Angkatan Laut	10.000	—	—	—
24.	Angkatan Udara	18.000	—	—	—
25.	Angkatan Kepolisian	20.000	—	—	—
26.	Kem. Luar Negeri	130	—	—	—
27.	Dispensasi	2.000	—	—	—
	Djumlah:	927.500	336.565	89.248	222.602

⁷/1959 S/D

Admini-strasi	Teknik
900	1086
66	58
1690	2297
37	481
5	11
1	—
8	24
4	4
1059	1198
159	244
233	448
26	39
—	1
4188	5491

ƆLAN"

KPTS/MUV

Admini-strasi	Teknik
101	63
9	1
462	280
1	—
4	4
348	309
35	47
7	19
6	4
3215	4764

Statistik Kegiatan Pendidikan Tahun: 1957 s/d 1964

Komuved	Siswa					Keterangan
	A.	B.	C.	D.	Djumlah	
1. Atjeh	—	—	100	—	100	
2. Sumatera Utara	64	25	75	—	164	
3. Sumatera Barat	—	55	87	—	142	
4. Riau	—	—	170	—	170	
5. Djambi	—	—	83	—	83	
6. Sumatera Selatan	—	47	356	—	403	
7. Djakarta	219	24	683	—	928	
8. Djawa Barat	177	—	200	—	377	
9. Djawa Tengah	80	—	327	—	407	
10. Jogjakarta	877	—	661	—	1.548	
11. Djawa Timur	113	96	417	—	626	
12. Nusa Tenggara	—	—	148	—	148	
13. Kalimantan Barat	—	—	40	—	40	
14. Kalimantan Tengah	—	—	187	—	187	
15. Kalimantan Selatan	40	10	180	—	230	
16. Kalimantan Timur	—	—	—	—	—	
17. Sulawesi Tenggara	—	—	73	—	73	
18. Sulawesi Selatan/ Tenggara	—	—	—	—	—	
19. Maluku	—	—	—	—	—	
20. Irian Barat	—	—	—	—	—	
Djumlah:	959	257	3.783	—	5.676	

A.: Sjarat idjazah S.L.A.
B.: „ „ S.L.P.
C.: „ „ S.D.
D.: „ „ Dapat batja/tulis.

No. Urut	Tahun 1950					Tahun 1951					Tahun 1952				
	Perintjian					Perintjian					Perintjian				
	Sardjana	SM/BA dll.	Tak lulus	Kembali uang	Jang masih beladjar	Sardjana	SM/BA dll.	Tak lulus	Kembali uang	Jang masih beladjar	Sardjana	SM/BA dll.	Tak lulus	Kembali uang	Jang masih beladjar
I.	—	—	—	—	11.855	—	—	5.090	—	6.765	—	10	545	—	4.535
II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Djumlah:	—	—	—	—	11.853	—	—	5.090	—	6.765	—	10	545	—	4.535

Djumlah seluruhnja: Sardjana = 50 orang

Keadaan 1950 s/d 1957 Sardjana Muda = 107 „

Tak lulus = 7.685 „

Kembali uang = 8 „

No. Urut	Tahun 1953					Tahun 1954					Tahun 1955				
	Perintjian					Perintjian					Perintjian				
	Sardjana	SM/BA dll.	Tak lulus	Kembali uang	Jang masih beladjar	Sardjana	SM/BA dll.	Tak lulus	Kembali uang	Jang masih beladjar	Sardjana	SM/BA dll.	Tak lulus	Kembali uang	Jang masih beladjar
I.	5	15	525	—	3.990	8	17	475	1	3.465	10	20	400	2	3.065
II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			
III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Djumlah:	5	15	525		3.990	8	17	475	1	3.465	10	20	400	2	3.065

No. Urut	Tahun 1956					Tahun 1957				
	P e r i n t j i a n					P e r i n t j i a n				
	Sardjana	SM/BA dll.	Tak lulus	Kembali uang	Jang masih beladjar	Sardjana	SM/BA dll.	Tak lulus	Kembali uang	Jang masih beladjar
I.	12	22	250	3	2.715	15	23	300	2	2.365
II.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Djumlah:	12	22	250	3	2.715	15	23	300	2	2.365

No. Urut	Tahun 1958					Tahun 1959					Tahun 1960				
	Perintjian					Perintjian					Perintjian				
	Sardjana	SM/BA dll.	Tak lulus	Kembali uang	Jang masih beladjar	Sardjana	SM/BA dll.	Tak lulus	Kembali uang	Jang masih beladjar	Sardjana	SM/BA dll.	Tak lulus	Kembali uang	Jang masih beladjar
I.	17	25	275	—	1.391	20	29	260	—	974	25	33	225	2	665
II.	—	—	—	—	530	—	—	—	—	622	—	—	—	—	656
III.	—	—	—	—	114	—	—	—	—	203	—	—	—	—	279
IV.	—	—	—	—	49	—	—	—	—	6	1	—	5	—	58
Djumlah:	17	25	275	—	1.584	20	29	260	—	1.810	26	33	230	2	1.658

Djumlah seluruhnja keadaan 1958 s/d 1963.

Sardjana	=	149	orang
Sardjana Muda/BA/Dll.	=	302	„
Tak lulus/ditjabut	=	1.166	„
Kembali uang	=	2	„
Jang masih beladjar	=	10.542	„

No. Urut	Tahun 1961					Tahun 1962					Tahun 1963				
	Perintjian					Perintjian					Perintjian				
	Sardjana	SM/BA dll.	Tak lulus	Kembali uang	Jang masih beladjar	Sardjana	SM/BA dll.	Tak lulus	Kembali uang	Jang masih beladjar	Sardjana	SM/BA dll.	Tak lulus	Kembali uang	Jang masih beladjar
I.	31	38	205	—	483	35	60	151	1	446	8	5	28	1	398
II.	—	—	—	—	775	—	—	—	—	1.212	—	—	—	—	1.278
III.	—	78	2	—	279	—	—	—	—	313	—	—	—	—	313
IV.	9	2	4	—	85	2	23	—	—	21	1	9	11	1	4
Djumlah:	40	118	211	—	1.622	37	83	151	1	1.983	9	14	39	1	1.887

PENDJELASAN/DJENIS PENDIDIKAN :

I. Kelandjutan I.D.P.P. 32/49.
II. Kedjuruan Dalam Negeri.
III. Bantuan antar Negara.
IV. Pampasan Perang.

KETERANGAN LAIN-LAIN :

1. Untuk tahun 1963 sampai dengan bulan Djuli.
2. Termasuk kegiatan dalam Negeri/Luar Negeri.
3. Tidak terhitung Serdjana-serdjana jang telah lulus, berhubung dengan penempatannja (belum bekerdja) sebanjak 73 orang.

D

No.	Djurusan
I.	Geologi Pertambangan
II.	Pertanian
III.	Teknologi Perusahaan
	Djumlah
I.	Geologi Pertambangan
II.	Pertanian
III.	Teknologi Perusahaan
IV.	Tata Perusahaan
	Djumlah
I.	Geologi Pertambangan
II.	Pertanian
III.	Teknologi Perusahaan
IV.	Tata Perusahaan
	Djumlah
I.	Geologi Pertambangan
II.	Pertanian
III.	Teknologi Perusahaan
IV.	Tata Perusahaan
	Djumlah

STATISTIK

VETERAN TJATJAT SELURUH INDONESIA

No.	Keadaan	Angka
1.	Djumlah Veteran tjatjat seluruh Indonesia, belum termasuk Irian Barat	± 7.200
2.	Permohonan Pensiun Veteran Tjatjat berdasarkan U.U. 2 tahun 1959	5.800
	Jang telah diselesaikan pensiunannja	4.318
3.	Veteran Tjatjat ex. Kelasjkaran	1.400
4.	Pendidikan S.R.	5.680
5.	„ S.L.P.	270
6.	„ S.L.A.	94
7.	„ Vak/Kursus	64
8.	„ Tingkat Akademi/Universitas	16
9.	Bekerdja	640
10.	Pengusaha	37
11.	Rehabilitasi Centrum	147
12.	Prothese R.C. Sala/R.S.P.A.D.	95
13.	Lembaga Negara/D.P.R.D.-G.R.	3
14.	P.P. 38 tahun 1958 (Ex. Angg. ITVI)	3.200

Pendjelasan :

Bahan-bahan tersebut diambil dari:

1. Bag. Tjatvet. MB. LVRI.
2. DITADJ. — MBAD. Bandung.
3. Lembaga Kesedjahteraan Penderitaan Tjatjat.

Untuk menjusun Statistik Tjatvet setjara objektif diperlukan research kedaerah-daerah, dengan adanja her-registrasi jang sistimatik dan terperintji sesuai dengan definisi jang diperlukan.

V. PENUTUP

1. Alih-tugas.

Kelihatannja sangat simple, bila alih-tugas ditindjau dari logika teori mathematis; seperti memindahkan sebuah mesin dari satu kelain tempat jang tak mempunjai perbedaan tjuatja.

Tetapi alih-tugas bagi Pedjoang Kemerdekaan dan Pradjurit, dari perdjoangan bersendjata keperdjoangan non-militer atau perdjoangan pembangunan adalah masaalah jang menjangkut bidang-bidang kemanusiaan dan kemasjarakatan.

Sedjarah membuktikan, bahwa berhasilnja teori mathematis untuk perhitungan masaalah demikian adalah merupakan surprice.

Dan pengalaman mengadjarkan kepada Bangsa Indonesia selama dua puluh tahun, sedjak Proklamasi Kemerdekaan ditahun 1945; betapa berbelit-belitnja usaha penjusunan kekuatan bersendjata Republik Indonesia dan pemulihan bagi mereka jang tidak memenuhi persjaratan lagi atau mereka jang dengan kehendak sendiri ingin kembali kemasjarakat; tidak ubahnja dengan pasang-surutnja Revolusi Indonesia.

Ini bukan berarti, bahwa pengalihan tugas Pedjoang Kemerdekaan R.I. dan Pradjurit dari perdjoangan bersendjata keperdjoangan pembangunan jang mempunjai aspek lebih luas adalah sulit.

Tetapi satu ide untuk memberikan bimbingan kearah mental perdjoangan jang tinggi didalam suasana perombakan masjarakat tidak dapat dikatakan mudah.

Integrasid engan garis-garis revolusi memang memerlukan satu rentjana jang teliti, serta kebidjaksanaan jang tepat, untuk tidak mempunjai resultat sebaliknja.

Oleh sebab itu, Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi sebelum memulai dengan rentjananja mengadakan konsultasi lebih dulu dengan para tokoh Veteran dalam bentuk Konperensi Gabungan D.U.V.E.D./Legiun Veteran Republik Indonesia Seluruh Indonesia, antara tanggal 20 sampai dengan 23 Maret 1965, di Tjibogo - Bogor; guna membitjarakan:

a. Kebidjaksanaan baru jang akan diambil oleh D.U.V.E.D.;
b. Persembahan Gelar Kehormatan, Sesepuh Agung Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia kepada Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Bung Karno.

c. Pembangunan Gedung Veteran dengan kekuatan sendiri setjara gotong-rojong.

Agar jang bersangkutan dapat serta mengadakan penelitian terhadap kebidjaksanaan tersebut.

Ternjata mendapat dukungan sepenuhnja dari konperensi. Bahkan mendapat restu dari P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Berarti langkah jang berhasil, karena dilaksanakan dengan kebidjaksanaan jang tepat.

Alih-tugas adalah formulasi baru, jang hakekatnja dorongan terhadap mental perdjoangan bagi para Veteran dan Pradjurit jang njaris hantjur oleh tantangan-tantangan Revolusi.

Dan formulasi ini adalah pengintegrasian formulasi pengembalian ke masjarakat, jang berlaku sebelum adanja garis-garis jang tegas dari Revolusi Indonesia.

Berbahagialah Bangsa Indonesia, jang mempunjai Pimpinan jang sanggup memberi tantangan terhadap penjimpangan-penjimpangan, dan memberikan garis-garis jang tegas serta bidjaksana dalam memberikan bimbingan untuk menudju tjita-tjita Revolusi Indonesia.

2. **Ichtisar.**

a. Amanat P.J.M. Presiden kepada Konperensi „Tjibogo".

b. Kebidjaksanaan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi tahun 1965.

c. Laporan Hasil Konperensi Kerdja D.U.V.E.D./Legiun Veteran Republik Indonesia tanggal 20 s/d 23 Maret 1965.

d. Bagan Alih-tugas Perdjoangan Bagi Peradjurit Angkatan Bersendjata.

e. Instruksi M.U.V.E.D. No. 19/Instr/MUVED/65, tanggal 15 Djanuari 1965.

f. Pernjataan Bersama D.U.V.E.D. dan Legiun Veteran Republik Indonesia, Djakarta 21 Maret 1965.

g. Pernjataan kejakinan oleh Major Djenderal M. Sarbini atas nama Konperensi Kerdja Gabungan D.U.V.E.D. dan Legiun Veteran Republik Indonesia, Tjibogo 27 Maret 1965.

h. Doa restu Presiden Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi Sesepuh Agung Veteran R.I. Bung Karno pada Perletakan Batu Pertama Gedung Veteran, Djakarta 6 Djuni 1965.

***

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Konperensi Kerdja
Veteran P.K.R.I.
di Tjilogo.

Dalam bahasa Revolusi Indonesia, sebenarnja tidak ada „veteran".
Apa jang dinamakan „veteran", harus tetap berdjoang, tetap mengabdi kepada Revolusi, sebab Revolusi belum selesai.

Dus: berdjoanglah terus, bekerdjalah terus, untuk Revolusi.
Saja restui Konperensimu. Buatlah Konperensimu satu sumbangan kepada usaha Revolusi!

Djakarta 23 Maret 1963
Soekarno.

KEBIDJAKSANAAN UMUM MENTERI URUSAN VETERAN DAN DEMOBILISASI TENTANG ALIH-TUGAS PERDJOANGAN.

I. TUGAS.

Tugas jang dibebankan kepada Departemen kita ialah: Demobilisasi dan Keveteranan. Kedua-duanja merupakan satu masaalah.

Sebab, keveteranan lahir dari demobilisasi. Demobilisasi terdjadi karena sistim pertahanan rakjat semesta jang memerlukan pengerahan dan pemulihan daripada tenaga dan alat.

II. AZAS PEMETJAHAN.

Dalam penjelenggaraannja perlu ditentukan azas dan/atau dasar apakah jang harus dipergunakan untuk memetjahkan masaalah jang satu itu. Untuk penentuannja perlu dipeladjari demobilisasi pada masa lampau dan perkembangan Masjarakat Indonesia, terutama untuk menemukan faktor-faktor objektif jang mempengaruhi pemetjahan masaalah tersebut.

Didalam arti klassik-konvensionil dan universil, pengertian demobilisasi adalah: proses pengembalian kesatuan/djawatan/staf Angkatan Bersendjata dari organisasi-perang kepada organisasi-damai. Didalam batasan ini pula, maka pengertian sehari-hari „demobilisasi" adalah mengembalikan para warga-negara jang semula dikerahkan (dimobilisasikan) kedalam tugas-pertahanan, jaitu para pradjurit, dan bukan organisasi Angkatan Bersendjata an sich, mendjadi lagi warga-negara non-militer.

Didalam batasan ini, maka demobilisasi mempunjai aspek sosial.

Oleh karena itu, sedjak Perang Dunia II penjelenggaraan demobilisasi (demobilisatie-regelingen) meliputi dua lapangan:

(1) Tindakan-tindakan administratif dan praktis untuk mentjiptakan pada pradjurit kembali mendjadi warga-negara bukan militer.

(2) Usaha-usaha agar para bekas pradjurit memperoleh lagi tempat jang lajakd idalam masjarakat diluar Pertahanan. Termasuk usaha-usaha ini antara lain ialah: scholing, herscholing dan om-scholing untuk pekerdjaan sipil. Dan djuga bantuan keuangan, pemberian pakaian preman, uang pesangon, beroepsselectie, bantuan mentjari pekerdjaan, dan sebagainja.

Kedua usaha itu lazim disebut rehabilitasi (rehabilitation) atau pemulihan didalam arti umum. Didalam batasan chusus rehabilitasi adalah pemulihan para pradjurit-tjatjat (invalide).

Golongan pradjurit lainnja ialah para warga-nerara jang masuk dinas pertahanan atas dasar sukarela (Milsuk). Bila sudah habis masa dinasnja, atau sudah sampai pada batas norma usianja, maka mereka itu diperhentikan dengan hormat, jang lazim disebut „pensiun".

Setelah kedua golongan pradjurit itu berada didalam Masjarakat, maka dari Pimpinan Negara tidak ada lagi tjampurtangan langsung tentang bagaimana mereka itu bertugas atau bekerdja didalam masjarakat, apalagi bimbingan terhadap mereka sebagai Kekuatan Sosial. Hanja para bekas pradjurit itu bergabung didalam suatu organisasi massa untuk perdjuangan kesedjahteraan sosial-ekonomis mereka. Dan "Social-economic-al-welfare" itulah jang dikerdjakan oleh Pemerintah dikebanjakan Negara.

Di Indonesia, pada zaman pendjadjahan „demobilisasi" didalam arti universil itu telah terdjadi beberapa kali. Jaitu pada zaman Belanda: pembubaran KNIL dan sebagainja, oleh karena Belanda kalah perang terhadap Djepang. Pada masa Djepang: pembubaran PETA dan organisasi-organisasi militer sedjenis oleh sebab Djepang kalah perang.

Didalam Indonesia Merdeka pun kita sudah melakukan demobilisasi jang demikian itu. Jaitu mula-mula dengan Re-Ra (Reorganisasi dan Rasionalisasi) tahun 1948. Kemudian pada masa liberalisme sesudah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, sehingga penjelenggaraannja berlangsung tidak berentjana total, tidak teratur, sesuai dengan alam pada waktu itu jang penuh dengan penjakit-penjakit individualisme-liberalisme. Segala sesuatu diusahakan pemetjahannja setjara peraturan Pemerintah, sehingga timbul konservatisme-administratif dan konservatisme-birokratik. Pemetjahannja bersifat evolusioner, rutine, tambal-sulam, tidak konsepsionil dan tidak operasionil. Bahkan masaalahnja tidak pernah terpetjahkan, hanja dipindahkan atau berpindah-pindah tangan pengurusannja, dari Djawatan jang satu kepada Djawatan jang lain. Begitulah nasib oknum-oknum B.R.N., C.T.N. dan sebagainja.

Oleh karena pada masa-masa itu masaalah demobilisasi dan pensiunan hanja dipandang dan dipetjahkan dengan setjara klassik sadja, maka para bekas pedjoang bersendjata dari masa Revolusi Physik dan masa Gerilja antara tahun 1945-1949, jaitu

mereka jang bergelar „Veteran" menurut Undang-undang No. 75 tahun 1957 pun diperlakukan dengan hanja berdasarkan peraturan-peraturan klassik-konvensionil, jakni pengaturan administratif dan birokratik daripada „Social-economic welfare". Didalam rangka pengertian itu maka para pensiunan terdjun kembali ke masjarakat hanja dengan modal gadji-pensiunannja.

Faktor objektif jang menentukan segala-galanja ialah kenjataan, bahwa Rakjat dan Bangsa Indonesia sedjak tahun 1959 telah digerakkan oleh P.J.M. Presiden kembali diatas Rel Revolusi 17 Agustus 1945.

Sedjak tahun 1959 itu dengan Dekrit kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 telah terdjadi penentuan Haluan Negara, jakni Manipol/Usdek beserta pedoman-pedoman penegasannja sampai kepada TAVIP. Sedjak itu oleh P.J.M. Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi telah dimulai usaha-usaha: ordening, her-ordening, integrasi, her-integrasi, disiplinasi, her-disiplinasi dan atau retooling daripada rakjat dan masjarakat kedalam Satu Pimpinan Revolusi jang revolusioner dan kedalam Satu Ideologi dan Satu Konsepsi Nasional jang revolusioner pula, djelas, tegas dan terperintji.

Seluruh masjarakat dan rakjat kini sedang mengalami transformasi idiil-filosofik dan strukturil dari alam Individualisme-Liberalisme kealam Gotong-rojong Sosialisme dibawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi.

Didalam rangka rentjana dan program revolusioner jang maha-besar tentang pembangunan kembali Bangsa dan Kepribadiannja (Nation and Character-building), maka masaalah Demobilisasi, jaitu demobilisan jang kini sudah berada didalam masjarakat sebagai „Veteran" sedjak Re-Ra tahun 1948, para pensiunan dan para pradjurit jang akan meninggalkan Angkatan Bersendjata, baik sebagai demobilisan maupun sebagai purnawirawan, tidaklah dapat dipetjahkan setjara klassik-konvensionil sadja (sebagai „Social-Economical Welfare"), tetapi harus setjara radikal-revolusioner.

Artinja, dipetjahkan didalam kelandjutan Revolusi sebagai masaalah Revolusi, berdasarkan hukum dan dialektika Revolusi, menurut proses pergerakan, perobahan dan pertumbuhan.

III. TUDJUAN.

Berdasarkan azas-azas diatas, maka tugas-tugas Demobilisasi dan Keveteranan kita laksanakan dengan berarah kepada Ketiga Kerangka Tudjuan Revolusi kita.

Oleh karena itu harus dilakukan Ordening/Herordening/ Integrasi/Herintegrasi/disiplin/her-disiplinasi/retooling daripada aparatur dan pelaksanaan tugas kita, baik dilingkungan DUVED maupun dikalangan LEGVETRI, setjara integral dan totalkolektif kedalam dan didalam Satu Pimpinan Revolusi jang revolusioner kedalam dan didalam Satu idiologi dan Konsepsi Nasional jang revolusioner pula.

Ini berarti, bahwa mulai dari sekarang segala usaha kita untuk menunaikan tugas-tugas Demobilisasi dan Keveteranan harus berupa sumbangsih kita kepada Revolusi Agustus, sebagai sumbangan kaum Veteran dan para Pradjurit Angkatan Bersendjata jang akan kembali kemasjarakat kepada usaha pembangunan kembali Bangsa dan Kepribadiannja.

Dengan demikian, demobilisasi didalam kelandjutan Revolusi bukanlah „habis manis, sepah dibuang", akan tetapi hakekatnja ialah Alih-tugas Perdjuangan.

IV. GAGASAN-GAGASAN.

Gagasan-gagasan atau ide-ide pokok Alih-tugas perdjoangan itu ialah sebagai berikut:

A. Gagasan pertama.

Para pedjoang jang kini bergelar „Veteran" menurut Undang-undang No. 75 Tahun 1957, para Purnawirawan dan para Peradjurit jang akan meninggalkan Angkatan Bersendjata, baik sebagai Demobilisan maupun sebagai „pensiunan", dipulihkan kedalam masjarakat dibawah pimpinan Pemerintah dengan proses berentjana semesta, jakni proses pemulihan atau rehabilitasi, baik didalam arti mental-idiil maupun didalam arti meteriil dan teknis-managerial. Dengan proses rochaniah dan djasmaniah ini mereka itu kemudian disusun kembali agar mendjadi Insan Politik Baru, jakin Insan Revolusi, Insan Pantjasilais Manipolis/Usdekis dan Usdekis berdjiwa Nasakom. Proses ini berlangsung didalam tiga taraf:

Pertama: Persiapan dan pemasakan didalam Angkatan Bersendjata sendiri, jang sebagai „School of Culture" membina mereka itu sebagai Insan Revolusi.

Kedua : Indoktrinasi dan Edukasi, baik mental-idiil maupun teknis-managerial, baik bagi jang sehat (abled) atau tak-tjatjat maupun bagi jang tjatjat (disabled).

Ketiga : Mereka itu dikerahkan dan ditempatkan kembali didalam masjarakat (re-settlement) didalam segala

lapangan daripada „Nation and Character-building" kearah Ketiga Kerangka Tudjuan Revolusi.

B. **Gagasan kedua.**

Setelah mereka itu mendapat tempat lagi didalam masjarakat, maka sebagai Insan Revolusi mereka disusun, digalang dan dipergunakan sebagai Kekuatan Sosial Revolusi (Sosial Force) didalam satu organisasi perdjuangan dengan program-aksi jang berdasarkan Konsepsi Revolusi.

Kepada organisasi itu ditentukan tugas dan fungsi didalam kelandjutan Revolusi, bersama-sama dengan Sokoguru-sokoguru dan Kekuatan-kekuatan Sosial lainnja, sehingga mereka itu diikut-sertakan dengan Rakjat berkonfrontasi terhadap tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan Revolusi disegala lapangan politik, diplomasi, sosial, ekonomi, kesenian, kebudajaan dan militer didalam tiap-tiap tahapan Revolusi, kearah Ketiga Kerangka Tudjuan Revolusi.

C. **Gagasan ketiga.**

Agar kedua gagasan diatas selalu dapat dilaksanakan selaras dengan pergerakan, perubahan dan pertumbuhan masjarakat didalam dinamika, hukum dan dialektika Revolusi, maka perlu diadakan penelitian dan pengembangan jang luas dan melandjut, jang terdiri atas penelitian-pangkal, penelitian-praktek dan penelitian-pengembangan.

V. RENTJANA DASAR.

Ketiga gagasan itu disusun setjara terperintji, mula-mula didalam Konsepsi Dasar (KONSAR), lalu didalam Rentjana Dasar (RENSAR) jang sudah lama didiskusikan dan jang kini perasannja dikemukakan sebagai Kebidjaksanaan Umum MUVED.

Kepada Ketiga gagasan didalam KONSAR dan RENSAR itu ditambahkan gagasan keempat, jakni konsepsi kesedjahteraan sosial-ekonomis (Social Economical Welfare), bukan sadja didalam arti klassik, jakni kesedjahteraan perseorangan atau golongan, tetapi diintegrasikan kepada Kesedjahteraan Sosial seluruh rakjat sesuai dengan Piagam Kemerdekaan dan Ampera.

Dengan demikian Rensar itu adalah Konsepsi Mental, Konsepsi Idiil, Konsepsi Revolusioner Progressif tentang Alihtugas Perdjuangan dari Dinas Pertahanan kedalam pembangunan Bangsa dan Kepribadiannja.

Note: Selandjutnja dipersilahkan mempeladjari Konsar dan Rensar berserta pendjelasan-pendjelasannja.

VI. PENJUSUNAN ALAT PELAKSANA.

A. **Alat-alat Pelaksana Konsepsi sebelum tahun 1959.**

Hingga kini ada dua Alat Pelaksana/Penjelenggara tugas demobilisasi & keveteranan.

Jang pertama DUVRI, bersifat Departemental (Governmental), merupakan Alat Kenegaraan.

Jang kedua: LEGVETRI, bersifat Non-Governmental, merupakan Alat Perdjuangan, Organisasi Massa Veteran.

DUVRI adalah Aparatur Pemerintah buatan Tahun 1956, jang kemudian pada tahun 1962 diperluas tugasnja dengan urusan „Demobilisasi", sehingga mendjadi DUVED.

LEGVETRI adalah organisasi massa Veteran konsepsi tahun 1957.

Kedua alat tersebut djelas bahwa hakekatnja adalah alat-alat atau „social products" sebelum tahun 1959, sebelum tahun kita kembali diatas Rel Revolusi '45.

B. **Perlu Alat-alat Baru (Retooling).**

Oleh karena kita sudah kembali bergerak diatas Rel Revolusi, maka Alat-alat jang ada itu harus dirombak dan disusun lagi, sehingga berkeperibadian dan berkepimpinan serta sanggup dan mampu menjelenggarakan tugas Demobilisasi dan Keveteranan, jang didasarkan pada hukum dialektika Revolusi.

Ini berarti, bahwa DUVED dan LEGVETRI harus mengalami proses penugasan/integrasi/ordening/disiplinasi/retooling kedalam kelandjutann revolusi. Ini berarti pula bahwa kedua alat tersebut harus mengalami proses konsolidasi/stabilisasi intern, kolektif dan total, selaras dengan retooling/transformasiekonsolidasi masjarakat setjara kolektif dan total kedalam Tudjuan, Dasar dan Haluan Revolusi '45 (Manipol/Usdek).

Protes tersebut tidak djadi satu kali sadja (eenmalig), akan tetapi melandjut (kontinju). Sebab revolusi adalah suatu proses jang senantiasa menghendaki retooling dan penjesuaian didalam tiap-tiap adegan dan tahapannja.

Untuk perombakan dan penjusunan kembali alat-alat itu, perlu ditentukan dulu:

1. Tugas umum kedua alat.
2. Tugas chas masing-masing.

3. Sifat-sifat kwalitatif kedua alat
4. Dasar-dasar perobahan kwantitatif.

1. Tugas umum kedua alat.

DUVED dan LEGVETRI pada azasnja bertugas umum jang sama. Jakni menjelenggarakan konsepsi-konsepsi usaha demobilisasi dan keveteranan, jang didasarkan pada konsepsi Nasional Revolusi. Konsepsi usaha-usaha itu ditjantumkan didalam Kebidjaksanaan Umum ini berikut Konsar, dan Rensar-nja tentang alih-tugas perdjuangan peradjurit.

Didalam Konsepsi itu ditjantumkan Apa jang harus dikerdjakan dan Bagaimana mengerdjakannja setjara umum dan pokok, tidak setjara detail atau chusus. Dan kesemuanja itu diarahkan kepada tudjuan perdjuangan, jakni Ketiga Kerangka Tudjuan Revolusi.

Bedanja DUVED adalah Instansi Pemerintah (Governmental), sedangkan LEGEVETRI adalah merupakan Organisasi Massa (Non-Governmental).

2. Tugas chas masing-masing.

A. Tugas chas DUVED.

Dari Konsepsi itu djelas, bahwa DUVED sebagai Alat Departemental (Governmental) harus menjelenggarakan tugas-tugas Demobilisasi & Keveteranan, jang mendjadi **kewadjiban** (responsibility), wewenang (authority) dan tanggung-djawab (accountability) Pemerintah dan Pimpinan Revolusi.

Ruang-lingkup (scope) tugas DUVED itu ialah: perentjanaan, pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan dari pada:

(1). Proses Pemulihan atau Proses Rehabilitasi mental-idiil dann materill/teknis jang melingkupi:

a. Persiapan dan pemasakan didalam Angkatan eBrsendjata bersama-sama dengan Angkatan Bersendjata.
b. Pengerahan tenaga dan penempatan tenaga.
c. Pengerahan tenaga dan penempatan tenaga.

2. Djaminan sosial-ekonomis kepada unsur manusia untuk pemeliharaan keperluan-keperluan materiil dan spirituil, jang berupa:

a. Usaha-usaha oleh para Veteran sendiri baik setjara perseorangan maupun setjara kollektif.
b. Santunan administratif kepada para Veteran, Djanda, Jatim/Piatu, Veteran Tjatjad (Disable).

(3.) Penртian dan pengembangan.

(4). Integrasi Rentjana-rentjana Usaha diatas kedalam Pembangunan Nasional Semesta Berentjana chususnja, dan kedalam „Nation and Charecter Buliding" umumnja.

(5) Atas dasar Manipol/Usdek dan sebagai Alat Pembantu Pimpinan Revolusi membimbing penjusunan/pengorganisasian, penggalangan dan penggalangan dan penggunaan (inzet) para Veteran sebagai kekuatan masjarakat (Sosial Force) dalam rangka Revolusi.

(b) Tugas chas LEGVETRI.

LEGVETRI chusus bertugas pembinaan dan penggunaan para Veteran sebagai kekuatan masjarakat didalam segala lapangan perdjuangan revolusioner Rakjat dan Bangsa.

Ruang lingkup tugas itu ialah: perentjanaan, pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan daripada:

(1) Penggalangan: penjusunan Insan-insan Veteran kedalam satu organisasi kekuatan sosial daripada Revolusi, termasuk penjusunan sebagai Tjadangan Pertahanan Nasional menurut rentjana-rentjana dan instruksi-instruksi Pimpinan Perttahanan dan Angkatan Bersendjata.

(2) Penggunaan: „Inzet atau aanwending" perseorangan atau kollektif dilapangan politik, diplomasi, sosial, ekonomi, kesenian, kebudajaan dan pertahanan didalam tiap-tiap adegan dan tahapan Revolusi. Penggunaan didalam pertahanan ditentukan oleh Pimpinan Pertahanan dan Angkatan Bersendjata. Kesemuanja itu diarahkan kepada Ketiga Kerangka Tudjuan Revolusi dan atas dasar Manipol Usdek dan pandangan hidup Pantja Sila.

3. Sifat-sifat Kwalitatif.

Berdasarkan tugas umum dan tugas-tugasnja jang chas, maka kedua alat disusun mendjadi organisasi-wadah jang bersendikan Pantja Sila, Manipol Usdek, jang berkaidah berdiri diatas segala golongan dan aliran serta berdjiwa Nasakom.

Dari kedua alat tersebut harus menjinar dan dapat dirasakan kepentingan (leadership) jang revolusioner, baik moril maupun materiil, tidak individualistis-liberal dan tidak konservatif, apalagi reaksioner.

Pada kedua alat harus ditumbuhkan "Power of Ideas", sehingga kedua alat itu memiliki daja tjipta (creatief-vermogen) dan daja susun (organisatie-vermogen), jang mampu melahirkan

pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide-ide dan konsepsi-konsepsi baru, jang selaras dengan perkembangan masjarakat dan gerak madju Revolusi.

Maksudnja, agar kepemimpinan daripada kedua alat itu tidak berfikir dan bekerdja setjara mekanis, automatis, reformistis atau bertualang, tetapi dinamik-dialektik.

Dengan penjusunan setjara konsepsionil dan strukturil kedua alat tersebut harus mendjadi organisasi jang militant, artinja bersamangat-djoang berdaja-djoang.

Tjatatan: Terutama DUVED sebagai alat Negara jang mempunjai kekuasaan-kekuasaan Menteri (Ministeriele bevoegdheden), harus mampu berfikir dan bekerdja setjara operasionil-revolusioner, dan setelah itu baru setjar aadminstratif birokratis jang konstruktitf.

4. Dasar-dasar perobahan kwantitatif.

Sifat-sifat kwantitatif kedua alat itu akan tampak sebagai karakter, kemampuan dan kesanggupan melaksanakan tugas dan usaha-usaha. Untuk ini perlu beberapa azas:

Pertama Kedua alat harus dianggap sebagai satu sendjata perdjuangan milik kita bersama. Bukan terpisah-pisah, bertjerai-tjerai ataupun bertentangan dan bersengketa. Boleh dibedakan, tetapi tak boleh dipisahkan. Jang berbeda itu hanjalah sifat chas daripada tugas dan lapangan pelaksanaan tugas (het terrein).

Kedua: Oleh karena azas pertama, maka perlu integrasi DUVED dengan LEGVETRI, integrasi DUVED/LEGVETRI dengan Pertahanan/Angkatan Bersendjata sebagai induk jang melahirkan Veteran dan sebagai lapangan tugas semula. Kemudian integrasi kedua alat tersebut dengan masjarakat.

Integrasi itu bukan didalam arti physik, tetapi konsepsionil dan strukturil.

Integrasi konsepsionil pula tingkatan perdjoangan Nasional berarti integrasi tugas dan usaha kedua alat, baik mental-idiil maupun materiil kedalam satu Pimpinan Revolusi, kedalam satu Idiologi dan kedalam satu Konsepsi Nasional, jang revolusioner, jang telah digariskan oleh Pemimpin Besar Revolusi.

Integrasi konsepsionil pada tingkatan kita ialah integrasi DUVED dan LEGVETRI kedalam satu konsepsi jang bersendi pada Konsepsi Revolusi. Konsepsi integrasi bagi DUVED dan LEGVETRI itu adalah Kebidjaksanaan Umum ini, jang diuraikan lebih landjut didalam Konsar Rensar.

Integrasi strukturil kedua alat sudah dimulai pada tingkatan „Leadership". Jakni MUVED jang memimpin DUVED merangkap mendjadi Ketua Umum dan Komandan (KU/DAN) LEGVETRI. Tetapi jang lebih penting dan lebih azasi ialah integrasi strukturil kepada Pimpinan Revolusi.

Jakni ketentuan, bahwa MUVED sebagai KU/DAN LEGVETRI adalah pembantu Presiden dan pembantu Pemimpin Besar Revolusi jang memegang pimpinan tertinggi atas Legiun Veteran Republik Indonesia, dan jang djadi Sesepuh Agung Veteran.

Integrasi kedua alat setjara strukturil lebih landjut ditentukan berdasarkan Tugas Umum dan Tugas-tugas Chas kedua alat, seperti jang dimuat dalam Kebidjaksanaan Umum ini dan didalam Konsar/Rensar. Jakni didalam proses pembagian atau allokasi lebih landjut daripada kewadjiban, wewenang dan tanggung-djawab diantara DUVED dan LEGVETRI, termasuk delegasi ketiga unsur tersebut, koordinasi dan saling hubungan.

Djelaslah, bahwa integrasi itu bukanlah integrasi physik dengan saling menempatkan perutusan atau perwakilan kedua alat itu, atau dengan mengadakan pembagian redjeki. Integrasi kepada Pertahanan dan Angkatan Bersendjata berarti penugasan kepada para Veteran dan Pradjurit-Alih-tugas, jakni kepada segala kegiatan untuk Pertahanan/Keamanan, jakni sebagai Wadjib-Tjadangan dan sebagai Angkatan Wakil Militie lichtingen, jang mempunjai „mobilisatie-bestemmingen". Bagi DUVED ini berarti bahwa DUVED harus mampu menjusun dan melaksanakan salah-satu masaalah Strategi Pertahanan, jaitu Strategi Demobilisasi, jang disendikan pada hukum dan dialektika Revolusi. Bagi LEGVETRI ini berarti bahwa organisasi ini harus mampu menggalang dan mempergunakan para Pradjurit Alihtugas dan Veteran dengan satu strategi sosiologis, jang ditjantumkan didalam Program Aksi-nja, dan didalam Anggaran Dasar-nja.

Ketiga: Didalam kedua alat itu terdapat alat Perlengkapan physik dan tenaga hidup, jakni manusia dengan „human-skills"-nja, dan jang penting lagi bahwa manusia itu masih terdiri atas darah dan daging. DUVED dan LEGVETRI melajani objek jang sama, jakni para Pradjurit-Alihtugas dan Veteran.

Untuk mentjiptakan sifat-sifat kwalitatif kedua alat itu, maka perlu ada usaha-usaha untuk meninggikan moril manusia-manusia itu.

Bila moril terpelihara, maka terdjamin pula semangat dan kegembiraan bekerdja.

Usaha-usaha rehabilitasi moril manusia itu ialah:

(1) Usaha, agar setiap manusia tahu dan jakin untuk apa kita berdjoang dan ber-Revolusi, tahu dan jakin akan kebenaran tudjuan-tudjuan jang dikedjar, azas-tudjuan, azas-azas perdjoangan dan haluannja.

(2) Usaha untuk menaikkan taraf kehidupan dan penghidupannja, dalam bentuk keperluan-keperluan hidup jang pokok dan minimal, jaitu:

a. Keperluan-keperluan materiil sandang, pangan dan panggon.

b. Keperluan-keperluan spititutil; antara lain: Pendidikan Latihan bagi kaum Pekerdja dan Pegawai, Kesehatan dan sebagainja.

Tjatatan: Mengenai rehabilitasi moril ini lihat lebih landjut konsepsi kesedjahteraan sosial-ekonomis didalam Konsar-Rensar, jang dapat didjadikan dasar perentjanaan usaha-usaha tentang „Personeelzorg" atau „Personel-Management", seperti: kegewaian, jang membeberkan perspektif via Scholing, Herscholing dan Om-scholing. Kesehatan dan sebagainja bagi manusia-manusia didalam DUVED dan LEGVETRI, dan buat manusia-manusia jang dilajani oleh kedua alat tersebut.

VII. PENUTUP.

Apabila dikadji dan difahamkan sungguh-sungguh, lepas dari pada kepentingan-kepentingan politik perseorangan atau golongan, maka isi daripada Kebidjaksanaan Umum ini berikut Konsar dan Rensar-nja, sebenarnja ialah bahwa dengan gagasan-gagasan didalam ketiga Dokumen itu, DUVED dan LEGVETRI ingin melaksanakan rehabilitasi mental-idiil dan materiil didalam amal perbuatan dan karya para Veteran, rehabilitasi atau pemulihan nama, kehormatan dan martabat Veteran, untuk membuktikan:

1. Bahwa Vetran mmmbina dirinja sebagai Insan Politik Baru, jakni Insan Revolusi Agustus 1945. Bukan Insan Politik Lama seperti pada zaman pendjadjahan Belanda dan Djepang, dan pada masa Liberal. Tetapi insan Manipol jang melaksanakan politik perdjuangan revolusioner. Bukan

Insan Politik Kuno jang hanja mendjalankan kepentingan/ politik kepentingan pribadi dan golongannja, tetapi Insan Politik Baru jang ber-„ambeg parama arta", jang tahu bilamana politik kepentingan pribadi dan golongan harus dikalahkan terhadap politik Negara dan politik perdjoangan revolusioner, jang telah digariskan oleh Pemimpin Besar Revolusi. Insan Politik Baru jang didalam tugas sosial dan ekonominja, tahu mendjelang masjarakat Sosialis, Masjarakat Adil dan Makmur, bukan Masjarakat Kapitalis jang ingin monopoli.

2. Bahwa Veteran berbahasa satu, berhalangan satu, berlaras satu didalam Revolusi umumnja dan didalam sektor keveteranan chususnja.
3. Bahwa Veteran ingin merehabilitasikan atau memulihkan kesetiaan dan disiplin. Bukan kesetiaan mati berdasarkan „Bapakisme" atau Caudillo-isme" dan bukan disiplin mati atau "Cadavre". Namun loyalitas dan disiplin dinamik kepada Konsepsi Nasional Revolusi Agustus 1945, dan kepada konsepsi tugas perdjoangan kaum Veteran.
4. Bahwa Veteran didalam DUVED dan LEGVETRI ingin memperlihatkan kepada masjarakat dan Angkatan Bersendjata mengenai karakter kesanggupan dan kemampuannja untuk disamping mengurus Veteran-Veteran Pedjuang Angkatan 45-59, jang kini sudah ada didalam masjarakat, djuga untuk menjelenggarakan demobilisasi Peradjurit Angkatan Bersendjata jang sekarang dan jang akan datang sebagai ahlitugas perdjoangan peradjurit, sehingga Angkatan Ber sendjata tidak usah mengurus sendiri alihtugas itu, namun mempetjajakannja kepada DUVED dan LEGVETRI.
5. Bahwa Veteran dengan konsepsi-konsepsi dan rentjana-rentjana usahanja sebagai Insan Politik Baru, ingin mempersembahan sumbangsih-nja kepada:
   a. Pribadinja sendiri dan kaum Veteran seluruhnja. Salah satu tjara realisasi daripada keinginan ini ialah Pembangunan Gedung Veteran di Djakarta berdasarkan dana dan tenaga Veteran sendiri, perentjanaan pendirian Pusat Rehabilitasi (Rehabilitation Centre) oleh Angkatan Bersendjata, Departemen Kesehatan dan DUVED, sebagai lambang dan monumen sumbangsih dan karya Veteran.
   b. Kehariban rakjat dan Revolusi Indonesia dengan mengintegrasiikan fikiran, ide, gagasan, konsepsi dan kerja

serta usaha Veteran kedalam "Nation-and Character-building". Realisasi untuk ini diperdjoangkan oleh Badan Perentjanaan dan Penelitian DUVED (BAPERDEP), jang akan membawa konsepsi dan rentjana-rentjana jang dipersiapkan oleh DUVED dan LEGVETRI kedalam Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.
Dan achirnja, apabila dipeladjari Amanat Tertulis P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi kepada Konperensi Veteran di Tjibogo jang diantaranja berbunji: bahwa Veteran adalah tetap berdjoang dan bahwa konperensi Veteran tersebut hendaknja merupakan sumbangan kepada revolusi, maka tiada lain konsepsi-konsepsi dan rentjana-rentjana jang dituangkan ini adalah djustru perwudjudan atau realisasi daripada Amanat tersebut.
Semoga kita mendapatkan taufiq dan hidajat dari Tuhan Jang Maha Esa kearah tudjuan kebidjaksanaan ini.

Djakarta, 19 Maret 1965.

Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi.

M. SARBINI.

Maj. Djen. T.N.I.

BAGAN ALIH TUGAS PERDJUANGAN
BAGI PRADJURIT A.B.
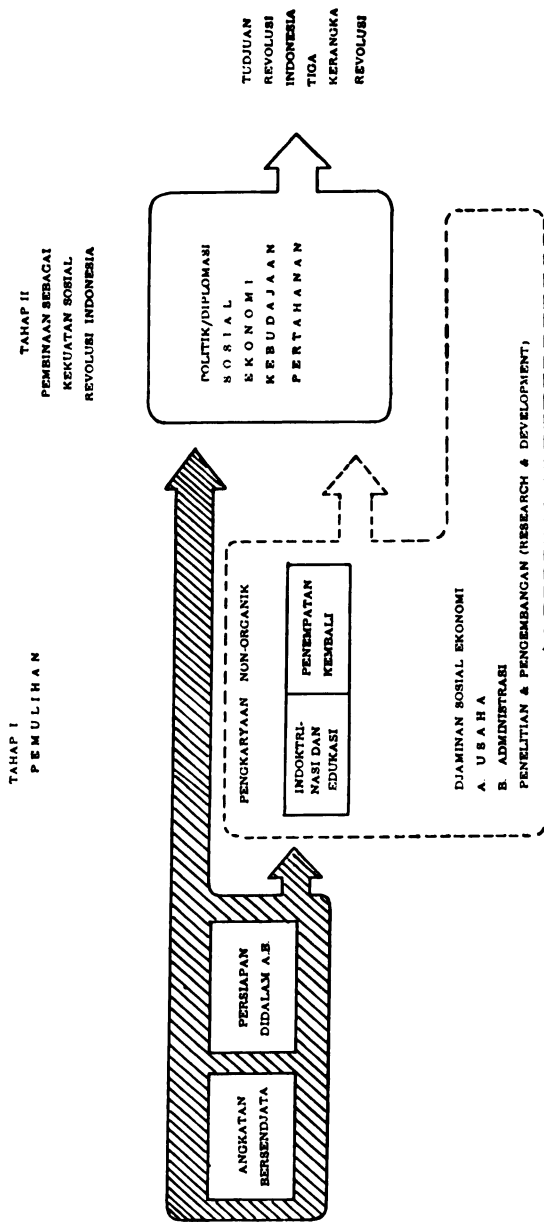
LAPORAN HASIL KONPERENSI KERDJA GABUNGAN DEPARTEMEN URUSAN VETERAN DAN DEMOBILISASI DENGAN LEGIUM VETERAN REPUBLIK INDONISIA DI TJIBOGO 23 s/d 27 MARET 1965.

Paduka Jang Mulia Presiden/Pemimpin Besar Revolusi,

Bung Karno jang tertjinta,

Perkenankanlah kami melaporkan, bahwa:

Konperensi Kerdja Gabungan Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi dengan Legiun Veteran Republik Indonesia, jang berlangsung dari tanggal 23 s/d 27 Maret 1965 di Tjibogo, jang dihadiri lengkap oleh:

a. Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi beserta Staf Pimpinan DUVED.
b. Pimpinan Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia.
c. Kepala-kepala Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi se-Indonesia.
d. Komandan-komandan/Pimpinan Markas Daerah Legiun Veteran se-Indonesia jang mentjerminkan permusjawaratan paripurna keluarga besar massa Veteran Republik Indonesia.

Setelah mendalami Amanat Paduka Jang Mulia Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata R.I./Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno pada tanggal 23 Maret 1964, serta prasaran-prasaran dari:

1. J.M. Wakil Perdana Menteri I — Dr. Soebandrio.
2. J.M. Wakil Perdana Menteri II — Dr. J. Leimena.
3. J.M. Wakil Perdana Menteri III — Dr. Chaerul Saleh.
4. J.M. Menko/Wakil Ketua I M.P.R.S./Ali Sastroamidjojo S.H.
5. J.M. Menko/Wakil Ketua II M.P.R.S./Dr. Kjai Hadji Idham Chalid.
6. J.M. Menko/Wakil Ketua III M.P.R.S./D.N. Aidit, jang diwakili oleh J.M. Menteri/Wakil Ketua III D.P.R.-G.R. — M.H. Lukman.

7. J.M. Menko Hankam/Kasab — Djendral Dr. A.H. Nasution.
8. J.M. Menteri/Pangad — Letnan Djendral A. Yani.
9. J.M. Menteri/Pangal — Laksamana Madya Laut R.E. Martadinata.
10. J.M. Menteri/Pangau — Laksamana Madya Udara Omar Dani.
11. J.M. Menteri/Pangak — Inspektur Djendral Polisi Soetjipto Danukusumo dan berkat do'a restu Paduka Jang Mulia Presiden, maka konperensi telah berachir dengan sukses, jang telah menghasilkan Keputusan-keputusan Pokok sebagai berikut:

I. SIKAP DAN PROGRAM PERDJOANGAN.

A. Mendukung sepenuhnja Kebidjaksanaan Umum MUVED/ Komandan/Ketua Umum Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia, dan mendjadikannja landasan perdjoangan massa Veteran dan Demobilisan untuk seterusnja dalam mentjapai effeciency jang sebesar-besarnja bagi Revolusi.

B. Masaalah Nasional jang menjangkut segi-segi politis, ekonomis, sosial/Pertahanan/dan kebudajaan, antara lain:

a. Dalam rangka mengatasi kebutuhan sandang-pangan Rakjat, Veteran bertekad bulat untuk mengambil inisiatif dan memelopori usaha peningkatan produksi sandang-pangan dengan djalan membuka hutan-belantara dan tanah-tanah nganggur untuk ditanami bahan pangan dan kapas.

b. Dengan semua Potensi jang ada para Veteran bertekad bulat untuk turut mendjalankan usaha-usaha melipat-gandakan volume ekspor seperti ditargetkan oleh Pemerintah dengan djalan pendobrakan segala rintangan dan prosedur serta birokrasi jang menghambat.

c. Membentuk Pasukan Bantuan Tempur dan Brigade-brigade Pembangunan (Serba Guna) dalam rangka pelaksanaan Dwikora.

d. Dukungan terhadap Keputusan Paduka Jang Mulia Presiden untuk membubarkan apa jang dinamakan B.P.S. dan antek-anteknja, serta pembekuan sementara seluruh kegiatan-kegiatan Partai Murba.

e. Mengadjak seluruh Masjarakat untuk mengamankan dan mengamalkan sepenuhnja Deklarasi Bogor.

f. Dukungan terhadap ambil-alih semua perusahaan-perusahaan minjak, perkebunan serta lain-lain perusahaan dibidang perdagangan dan kebudajaan milik imperialis Amerika Serikat dan Inggeris beserta kawan-kawannja.

C. Masaalah Internasional, antara lain:

a. Tidak merelakan Paduka Jang Mulia Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno untuk berunding lagi dengan antek Nekolim Tengku Abdulrachman, selama fihak sana berkepala batu, jang menundjukkan sikap angkuh dan sombong.

b. Mengambil prakarsa untuk menjelenggarakan Konperensi Veteran Nefos jang berporoskan Veteran-veteran dari Negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin.

c. Mengutuk adanja pangkalan-pangkalan militer asing di Asia — Afrika.

d. Tutuk mensukseskan peringatan Dasawarsa Konperensi Asia — Afrika I.

e. Turut mengkonsolidir hatsil-hatsil K.I.A.A.-I untuk menggalang kekuatan Nefos.

II. Program Kerdja Operasi Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi Tahun 1965, antara lain ikut didalam pelaksanaan Transmigrasi Gaja Baru.

III. Program Kerdja Legiun Veteran Republik Indonesia, antara lain mempersiapkan penjelenggaraan Kongres Nasianal Veteran ke-II dalam bulan Agustus 1966 di Makasar.

IV. Disamping itu, Konperensi Kerdja Gabungan setjara bulat mempersembahkan kehadapan Paduka Jang Mulia, satu Ikrar Kebulatan Tekad Veteran Republik Indonesia sebagaimana terlampir.

V. Konperensi atas nama seluruh massa Veteran setjara aklamasi mempersembahkan kehadapan Paduka Jang Mulia satu gelar kehormatan : SESEPUH AGUNG VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Piagam tersebut pada kesempatan ini djuga akan kami sampaikan.

VI. Atas amanat seluruh massa Veteran didaerah istimewa Jogjakarta, kami mendapat kehormatan untuk mempersembahkan kehadapan Paduka Jang Mulia, satu hatsil karya seni keradjinan tangan berupa perak murni jang dihatsilkan oleh seorang Veteran Pedjoang Kemerdekaan Sigit Suwandi dalam bentuk lambang Pandji-pandji Carya Dharma, jang oleh Paduka Jang Mulia telah dianugerahkan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia pada tanggal 2 Djanuari 1957, dihalaman Istana Merdeka Djakarta. Kiranja Paduka Jang Mulia berkenan menerimanja.

VII. Selandjutnja berkas dari semua hatsil Konperensi Gabungan ini akan disampaikan menjusul setelah selesai disusun.

Achirnja, untuk lebih mempertebal semangat djoang, serta kejakinan kami dalam memenangkan Revolusi Indonesia mengganjang projek neo-kolonialisme British Malaysia chususnja, kami mohon perkenan Paduka Jang Mulia untuk memberikan wedjangan kepada para peserta konperensi, jang sekembalinja didaerah-daerah akan menjebar-luaskan serta mengamalkan kepada seluruh massa Veteran Republik Indonesia.

Siap menerima amanat.

Tjibogo, 27 Maret 1965.
A.n Konperensi Gabungan Duved & L.V.R.I.,

M. SARBINI.
Maj. Djen. T.N.I.

IKRAR „KEBULATAN TEKAD" VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Kami, segenap perserta „Konperensi Kerdja Gabungan" Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi, bersama Legiun Veteran Republik Indonesia, jang diadakan di Tjibogo, tanggal 23 s/d 27 Maret 1965, atas nama segenap Veteran Republik Indonesia, sebagai Insan Politik Baru, diseluruh pelosok Tanah Air, setelah menjadari sedalam-dalamnja, akan situasi Nasional dan Internasional pada dewasa ini, serta jakin, akan kewadjiban, menjelesaikan Revolusi 17 Agustus 1945 berdasarkan Pantjasila, berhaluan Manipol/Usdek beserta segala pedoman-pedoman pelaksanaannja, dengan chidmat meng-ikrarkan kebulatan tekad Veteran Republik Indonesia sebagai berikut:

(1) Melaksanakan Amanat Paduka Jang Mulia Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, pada pembukaan Konperensi Kerdja Gabungan, Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi, bersama Legiun Veteran Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 1965 di Tjibogo.

(2) Bersedia mengamankan dan mengamalkan setjara konsekwen setiap adjaran Bung Karno, sebagai Doktrin Revolusi Indonesia, guna memenangkan Revolusi 17 Agustus 1945.

(3) Siap melaksanakan Komando dan Berdjoang setjara konsekwen dibawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Tjibogo, 26 Maret 1965.

A/n. Konperensi Gabungan Duved & Legvetri,

M. SARBINI

Maj. Djen. T.N.I.

PIAGAM

KONPERENSI KERDJA GABUNGAN ANTARA DEPARTEMEN URUSAN VETERAN DAN DEMOBILISASI bersama dengan LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA jang berlangsung pada tanggal 23 s/d 27 Maret 1965 di Tjibogo, lengkap dihadliri oleh:

a. Muved beserta Staf Pimpinan Duved

b. Pimpinan Markas Besar Legvetri

c. Kepala-kepala Komuved se-Indonesia.
d. Komandan-komandan/Pimpinan Markas Daerah Legvetri se-Indonesia,

jang mentjerminkan Permusjawaratan Paripurna Keluarga Besar Massa Veteran Republik Indonesia,

menjatakan:

Bahwa semua Karya dan Adjaran Bung Karno Pemimpin Besar Revolusi/Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Tertinggi Legiun Veteran Republik Indonesia, baik jang berupa Wedjangan/Amanat maupun Koreksi, chususnja jang ditudjukan terhadap Veteran Republik Indonesia adalah merupakan „Leit Star" bagi kehidupan dan perdjoangan para Veteran.

memutuskan:

Mempersembahkan kehadapan Paduka Jang Mulia Presiden Sukarno, Pemimpin Besar Revolusi/Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/ Pemimpin Tertinggi Legiun Veteran Republik Indonesia

gelar kehormatan:

„SESEPUH AGUNG VETERAN REPUBLIK INDONESIA".

Piagam ini dipersembahkan sebagai pernjataan hormat dan kesetiaan dari seluruh warga dan massa Veteran Republik Indonesia.

Tjibogo, 27 Maret 1965.
A.n. Koperensi dan Seluruh Warga Veteran.
Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi.
Komandan/Ketua Umum
Legiun Veteran Republik Indonesia,

M. SARBINI.

Maj. Djen. T.N.I.

*

INSTRUKSI
No. 19/Instr/MUVED/1965

MENTERI URUSAN VETERAN DAN DEMOBILISASI

Menimbang:

1. Bahwa Gedung DUVED jang sekarang ada tidak dapat menampung sebagaimana wadjarnja bagi Lembaga-lembaga DUVED sesuai dengan tugasnja.

2. Bahwa dalam waktu singkat Pemerintah belum dapat menjediakan biaja untuk pembangunan Gedung DUVED jang dapat mentjukupi kebutuhannja.
3. Perlu segera merealisasikan ide dan rentjana pembangunan Gedung Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi bertingkat tudjuh di Pusat Ibukota Djakarta Raya jang tjukup representatif dan dapat menampung semua Lembaga-lembaganja beserta Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia, sebagaimana persetudjuan dan restu jang telah diberikan oleh P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi A.B.R.I./ Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno kepada MUVED pada tanggal 8 Djanuari 1965 di Istana Bogor.
4. Bahwa pelaksanaan pembangunan projek tersebut akan dilakukan setjara bergotong rojong berdiri diatas kaki sendiri sebagai darma bakti Kaum Veteran Pedjoang Kemerdekaan dan para sympatisan.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden R.I. No. 162 Tahun 1957 jo Keputusan Presiden R.I. No. 299 Tahun 1962.
2. Undang-undang No. 75 Tahun 1957.

Mengingat pula:

Bahwa pada tanggal 14 Djanuari 1965 telah terbentuk Panitia Pembangunan Gedung DUVED jang diketuai sendiri oleh MUVED.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada: Semua Kepala KOMUVED diseluruh wilajah Tanah Air,

Supaja:

1. Memberikan pengertian seluas-luasnja kepada Masjarakat diwilajah tugas masing-masing, terutama kepada Para Veteran dan Purnawirawan atas ide tersebut diatas, sehingga timbul tanggapan dan kegiatan untuk membantu pelaksanaannja.
2. Menggerakkan dan menghimpun „Funds and Forces" didaerah tugas masing-masing untuk keperluan pendirian Gedung jang dimaksud.
3. Menundjuk Bank Indonesia dan atau Bank Koperasi Tani dan Nelajan jang ada didaerahnja sebagai Bank jang menerima sumbangan dari Masjarakat setempat dengan Kode Dompet Gedung DUVED.

4. Mentjatat dan melaporkan hasil-hasil dari pelaksanaan Instruksi ini setjara periodik pada tiap achir bulan kepada MUVED.
5. Menghubungi dan memohon bantuan Pantja Tunggal Setempat bagi suksesnja kegotong-rojongan ini.

Diindahkan dengan penuh rasa tanggung-djawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Djakarta,

pada tanggal 15 Djanuari 1965.
Menteri Urusan Veteran &
Demobilisasi,

M. SARBINI

Maj. Djen. T.N.I.

Tembusan untuk:

1. J.M. Presidium Kabinet Dwikora.
2. J.M. Menko Kompartimen Pembangunan.
3. Jth. Pantja Tunggal D.C.I. Djakarta Raya.
4. Jth. Pres. Dir. Bank Indonesia.
5. Jth. Pres. Dir. B.K.T.N.
6. A r s i f.

*

PERNJATAAN BERSAMA.

Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi bersama dengan Pimpinan Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia setelah bermusjawarah dan menelaah masaalah pengurusan Veteran dan Demobilisasi setjara menjeluruh dan mendalam

(1) Bahwa pada azasnja tugas-umum DUVED dan LEGVETRI adalah sama, jakni mengurusi dan membina para Veteran dan Demobilisan Angkatan Bersendjata berdasarkan Konsepsi Nasional Revolusi Indonesia.

Bedanja adalah:

a. DUVTD merupakan Instansi Pemerintah (Governmental) jang mengemban kewadjiban, wewenang dan tanggung-djawab Pemerintah dan Pimpinan Revolusi.

b. LEGVETRI merupakan Organisasi Massa Veteran (Non-Governmental) jang bertugas chususnja pembinaan dan penggunaan para Veteran sebagai Kekuatan Sosial didalam segala lapangan perdjoangan revolusioner Rakjat dan Bangsa Indonesia, dan bertanggung-djawab kepada Pemimpin Besar Revolusi.

(2) Bahwa antara DUVED dengan LEGVETRI harus mewudjudkan kerdja-sama jang harmonis dan merupakan „Partnership" Dwitunggal ditingkat Pusat maupun di Daerah-daerah.

(3) Bahwa iklim kerdja-sama dan hubungan „Partnership" itu akan selalu dipelihara dan dikembangkan dengan djalan musjawarah dan mufakat. Setiap persoalan jang menjangkut tugas dan tanggung-djawab bersama diselesaikan setjara konsultasi dan menghindari tjara-tjara konfrontasi.

(4) Bahwa kedua-duanja berusaha untuk meniadakan dualisme didalam pengurusan serta pembinaan Veteran dan Demobilisan. Mendjaga agar supaja didalam hal ini tetap menggunakan Satu Bahasa dan Satu Nada (Satu Konsepsi dan Satu Tindakan, jakni Bahasa Veteran dan Kode Kehormatan Veteran Pantja Marga.

(5) Bahwa fungsi dan peranan masing-masing akan senantiasa dituangkan serta ditjerminkan didalam:

a. Rentjana Kerdja dan Program Perdjoangan berdasarkan landasan masing-masing sesuai dengan Pasal (1) ajat a dan b.

b. Kegiatan dilapangan tugas masing-masing diperlukan adanja kerdja-sama jang harmonis setjara „partnership" Dwitunggal ditingkat Pusat serta di Daerah-daerah.

c. Susunan organisasi jang mentjerminkan aliran jang hidup didalam Masjarakat ialah Nasakom, termasuk Angkatan Bersendjata, dengan tidak mengurangi wewenang MUVED dan peraturan-peraturan kepegawaian.

d. Integrasi dengan Rakjat dan Masjarakat dalam perdjoangan Revolusi dan Pembangunan Bangsa dan Kepribadiannja (Nation and Character Building).

e. Dalam wadah Front Nasional, chususnja bagi LEGVETRI.

(6) Pernjataan Bersama ini mendjadi pedoman bagi DUVED dan LEGVETRI didalam melaksanakan tugas masing-masing bagi Pusat dan Daerah-daerah.

I. Menteri Urusan Veteran
dan Demobilisasi,

M. SARBINI.

Maj. Djen. T.N.I.

II. A.n. Pimpinan Markas Besar
Legiun Veteran Republik Indonesia
Ketua I,

H. Moch. Moenasir.

Ketua II,

Hardjantho S.

Ketua III,

P. Hadiwasisto.

Sekdjen,

Kol. Sitompul HT.

Wa Sekdjen I,

Sofyan Noor.

Wa Sekdjen II,

Lt. Kol. Machmud Abdullah.

PERNJATAAN KEJAKINAN.

Konperensi Kerdja Gabungan antara Departemen Urusan Veteran & Demobilisasi bersama dengan Legiun Veteran Republik Indonesia jang berlangsung pada tanggal 23 s/d 27 Maret 1965 di Taman Tjibogo-Bogor, lengkap dihadliri oleh:

a. Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi beserta Staf Pimpinan DUVED.

b. Pimpinan Markas Besar Legiun Veteran R.I.

c. Kepala-kepala Komisariat Urusan Veteran dan Demobilisasi se-Indonesia.

d. Komandan-komandan/Pimpinan Markas Daerah Legiun Veteran R.I. se-Indonesia.

e. Direktur Akademi Pembangunan Nasional beserta Staf dan Senat Mahasiswanja jang mentjerminkan Permusjawaratan Paripurna Keluarga Besar Massa Veteran Republik Indonesia.

Mendalami: Djiwa dan isi Amanat tertulis Paduka Jang Mulia Presiden Sukarno pada pembukaan Konperensi Kerdja Gabungan DUVED dan LEGVETRI di Tjibogo.

MEMUTUSKAN:

Menjatakan:

(1) Bahwa Amanat Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno tersebut diatas djiwa dan isinja memberi pengertian, kesadaran dan pegangan jang lebih positif kepada DUVED dan LEGVETRI sebagai aparatur Revolusi dan Massa Veteran pada umumnja sebagai Insan Politik Baru, untuk mengamankan dan menjelesaikan Revolusi Indonesia.

(2) Bahwa DUVED dan LEGVETRI sebagai aparatur Revolusi dan Massa Veteran pada umumnja sebagaimana Insan Politik Baru dengan penuh kejakinan akan menghidup-hidupkan terus djiwa dan isi daripada Amanat Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno dan adjaran-adjaran beliau sebagai Doktrin Revolusi Indonesia.

(3) Bahwa untuk amalan tersebut diatas bertekad bulat memperhebat „Upgrading" mental, teknis dengan diikuti Indoktrinasi terus-menerus.

a. Bahwa "upgrading" mental daripada djiwa dan isi Amanat Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno sebagai "LEITSTAR" kehidupan dan perdjoangan Veteran R.I. diikuti dengan pemberian pedoman-pedoman dan mengambil langkah-langkah positif untuk mengkongkritkan dalam peningkatan pengabdian diri kepada Revolusi Indonesia.

b. Bahwa pelaksanaan "upgrading" teknis daripada Amanat tersebut diwudjudkan dengan konsepsi-konsepsi baru jang sesuai dengan "rising demands"-nja Revolusi Indonesia.

(4) Bahwa dengan "upgrading" tersebut diatas (a dan b) mendjadikan seluruh tenaga Massa Veteran Indonesia Insan Politik Baru dan satu kekuatan sosial jang progresif revolusioner, sebagai pengamanan Revolusi dan Pedjoang Pembangunan.

(5) Bahwa DUVED dan LEGVETRI sebagai aparatur Revolusi dan Massa Veteran umumnja sebagai Insan Politik Baru, dengan penuh romantika, dinamika dan dialektika menentukan sikap positif untuk ber-"Vivere Veri Colo Samante" dalam mengganjang setiap tantangan dan menggalang Revolusi Indonesia, terutama dalam meningkatkan pelaksanaan Dwikora umumnja dan mengikis habis projek "Neokolonialisme" Malaysia.

(6) Bahwa didalam perdjoangan pelaksanaan Dwikora Veteran Republik Indonesia bertekad mempelopori perdjoangan Rakjat baik digaris depan maupun di Home Front dengan berdiri diatas kaki sendiri, terutama dalam bidang produksi.

(7) Sebagai konsekwensi daripada tekad seluruh Bangsa Indonesia keluar dari Bangunan Dunia jang lapuk (P.B.B. sekarang ini), Veteran R.I. turut aktif menggalang Persatuan Veteran Nefos dalam lingkungan besar Dunia Nefos sesuai dengan adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dalam membangun Dunia Baru.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa memberkati perdjoangan kita.

Tjibogo, 27 Maret 1965.
A.n. Konperensi Kerdja Gabungan
Duved & Legvetri,

M. SARBINI

Maj. Djen. T.N.I.

Diatasmu, Bangsa Indonesia hidup dan berdjoang, untuk melandjutkan Revolusi.

P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Tertinggi Legiun Veteran, Sesepuh Agung Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Almarhum Djenderal Sudirman Bapak Tentara Nasional Indonesia/Bapak Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia.

J.M. Wakil Perdana Menteri III Menteri Kompartimen Pembangunan Djenderal Dr. Chairul Saleh. Menteri Urusan Veteran Republik Indonesia: (29 April 1957 — 10 Djuli 1959).

J.M. Menteri Urusan Veteran dan Demobilisan
Major Djenderal M. Sarbini.
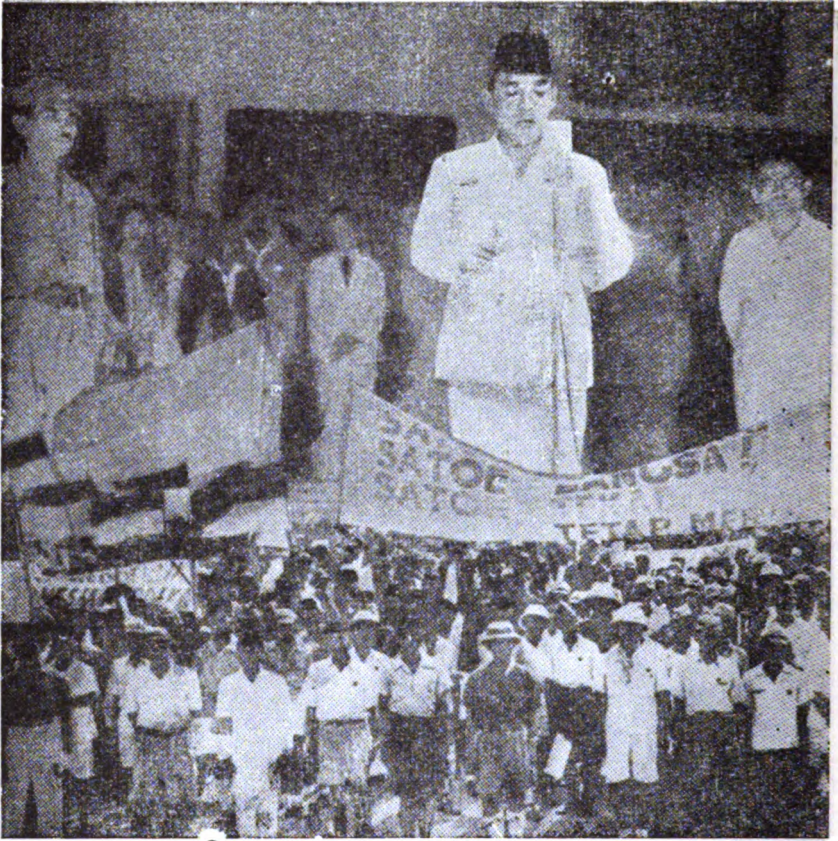
PROKLAMASI.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17 Agustus 1945.
Atas nama Bangsa Indonesia,

SUKARNO - HATTA.

Geloranja semangat perdjoangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kelaskaran merupakan bagian kekuatan nasional Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.
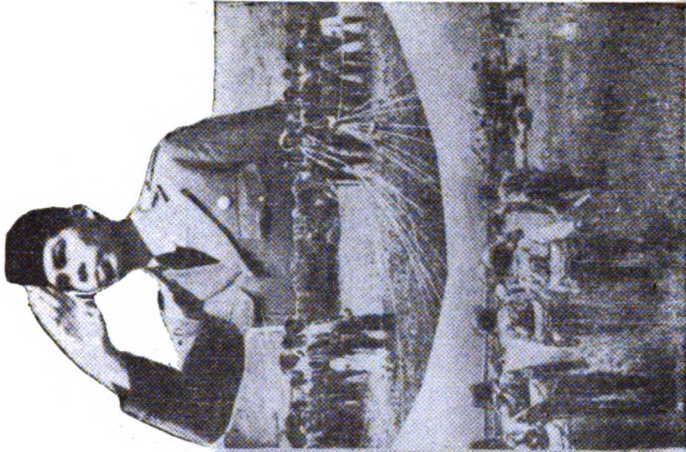
Sekitar penjusun Tentara Nasional Indonesia.

Perundingan di Linggardjati (sebuah tempat peristirahatan disebelah Selatan Tjirebon) dan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia sebelumnja.
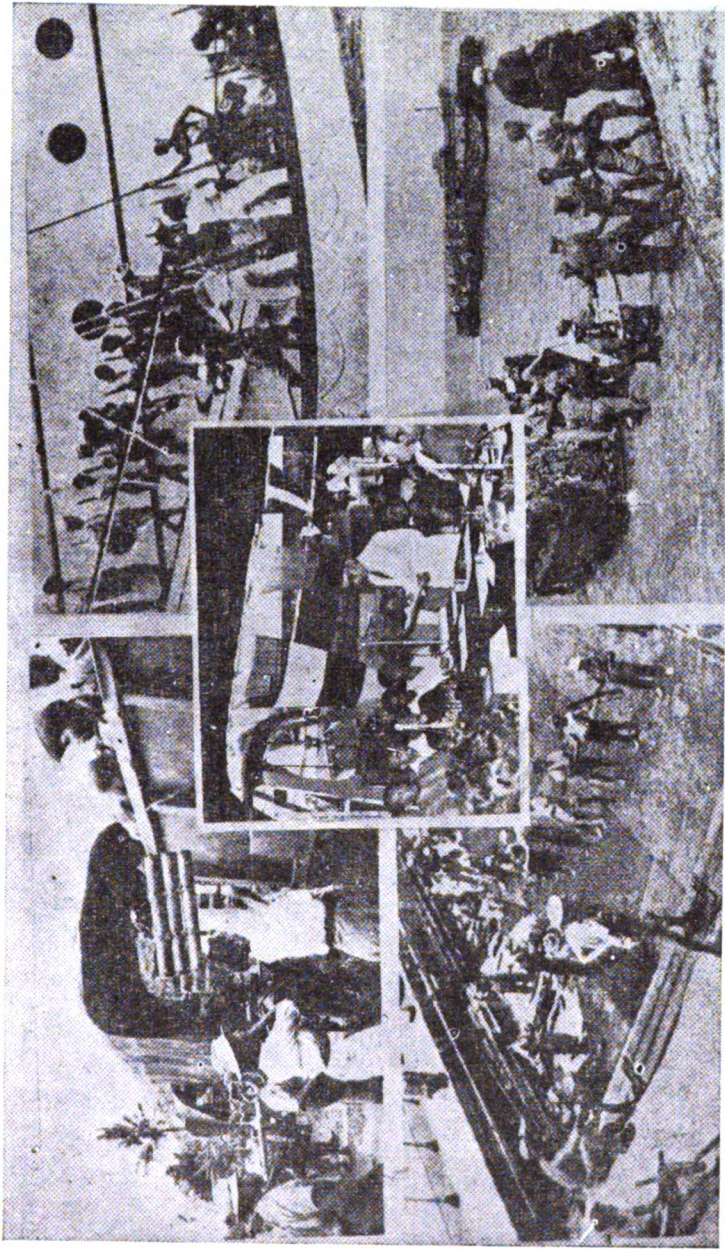
Perundingan disebuah kapal „RENVILLE" dan hidjrah.

Sekitar Perang Gerilja.

Sekitar Penjerahan Kedaulatan.

Menteri Negara Urusan Bekas Pedjoang Soetomo alias Bung Tomo. (12 Agustus 1955 — 24 Maret 1956

*Menteri Negara Urusan Veteran Dahlan **Ibrahim.** (24 Maret 1956 — 28 **Djanuari** 1957)*

Menteri Negara Urusan Veteran Ad. Interim K.H. Idham Chalid. (28 Djanuari 1957 — 29 April 1957)
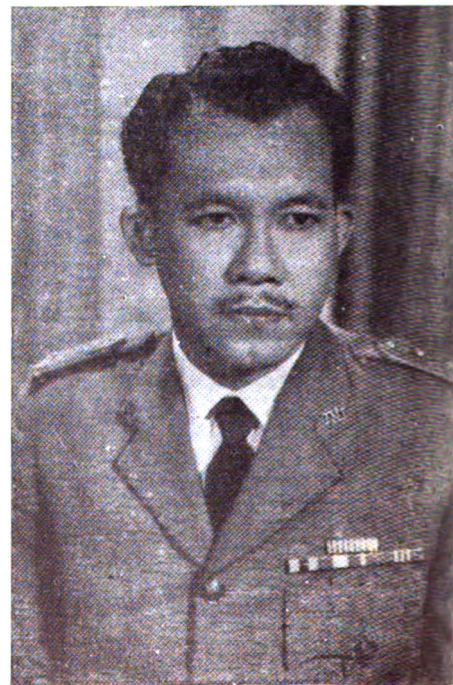
*Menteri Urusan Veteran **Republik** Indonesia Major Djen. **Sambas Atmadinata** (10 Djuli 1959 — 2 **September** 1964.)*

Sekitar Kongres ke-I Veteran Pedjoang Kemerdekaan Repubilk Indonesia dipimpin oleh Let. Kol. Rudy Pirngadi.

Gambar didalam:

1. *Djenderal Major A.H. Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat Pengambil Prakarsa Kongres.*
2. *Let. Kol. Kartakusumah, Penulis Undang-undang Veteran.*

Kongres ke: I. Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia
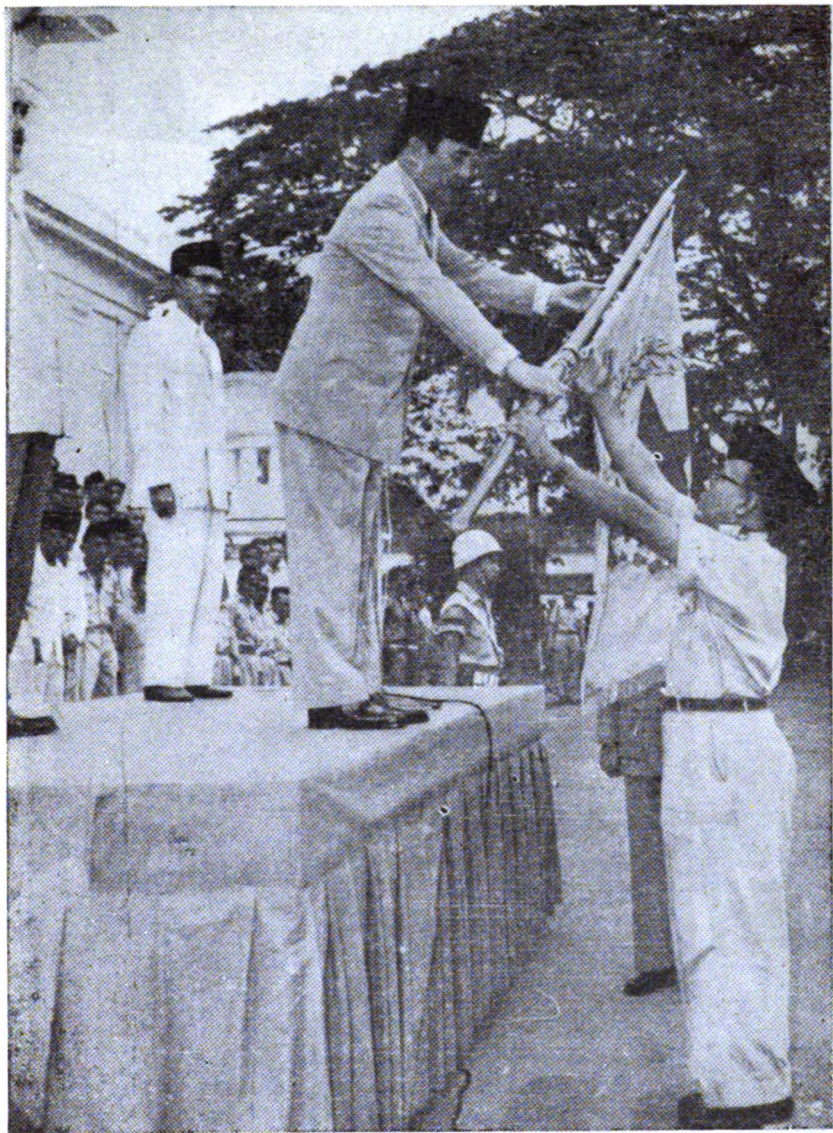
P.J.M. Presiden Sukarno menjerahkan Pandji-pandji Legiun Veteran Republik Indonesia kepada Let. Kol. Rudy Pirngadi (Ketua Umum).

Pelantikan para anggauta Panitia Penjaringan Pusat oleh: Pd. Presiden Sartono S.H.

Akademi Pembangunan Nasional (A.P.N.) Veteran di Jogjakarta.
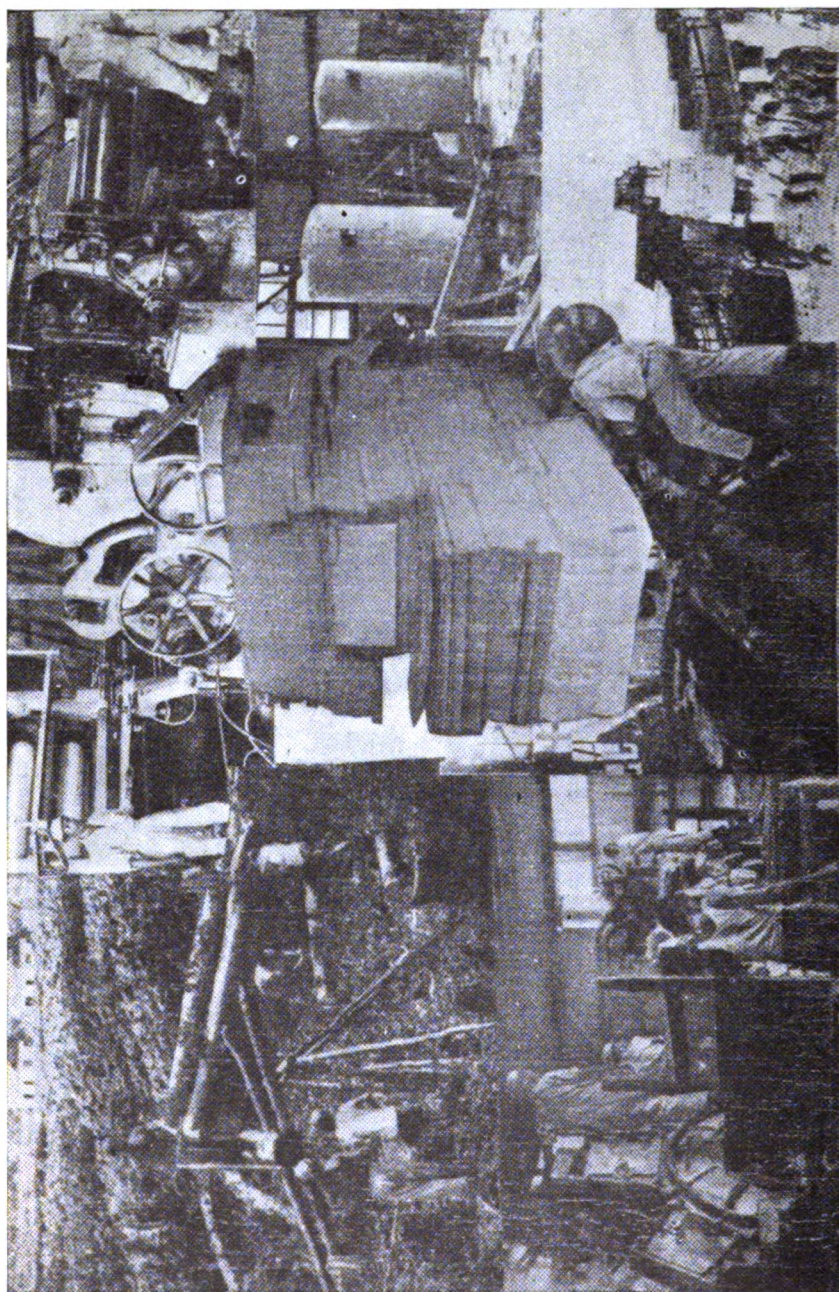
Aktivitas dan Projek Veteran.

Aktivitas dan Projek Veteran.

Konperensi Gabungan Duved Legiun Veteran Republik Indonesia di Tjibogo, Bogor.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bismillah, saja letakkan batu-pertama gedung veteran ini dengan saja sertai do'a dan restu saja, — semoga Tuhan jang Maha Esa memberkahi gedung jang dibangun setjara gotong-rojong oleh massa veteran P.K.R.I. ini sebagai monumennja. —

Djakarta 6 Djuni 1965
Presiden / Panglima Tertinggi,
Pemimpin Besar Revolusi, Sesepuh Agung Veteran R.I.,

Soekarno. —

P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Sesepuh Agung Veteran meletakkan batu pertama Gedung Veteran.

KOMPARTIMEN
PERINDUSTRIAN RAKJAT

PENGANTAR.

„LAGU HEROIK INDUSTRI RAKJAT" ini adalah sumbangsih Korps Pembangunan Industri Rakjat untuk Buku Peringatan 20 Tahun Indonesia Merdeka.

Karangan-karangan jang terdapat didalamnja memuat peristiwa-peristiwa dibidang organisasi, pembangunan-pembangunan dibidang industri rakjat serta keradjinan ditahuntahun jang lampau, jang telah dikerdjakan oleh Departemen Perindustrian Rakjat dan Badan-badan/Instansi-instansi jang mengurus perindustrian rakjat pada waktu-waktu sebelumnja.

Disamping itu djuga usaha-usaha untuk berdiri diatas kaki sendiri jang telah dan sedang dilakukan dibidang perindustrian rakjat.

Selandjutnja dikemukakan bahwa semendjak tanggal 23 Djuni 1965 ini, Departemen Perindustrian Rakjat, oleh P.J.M. Presiden telah dibentuk mendjadi Kompartimen Perindustrian Rakjat, jang meliputi 3 Departemen, jaitu:

1. Departemen Perindustrian Pertekstilan.

2. Departemen Perindustrian Ringan.

3. Departemen Perindustrian Keradjinan.

Disamping adanja 3 Departemen tersebut, maka oleh P.J.M. Presiden telah ditundjuk pula Menteri Negara diperbantukan Menteri Koordinator Perindustrian Rakjat jang chusus mengurus soal-soal „BERDIKARI" dibidang perindustrian rakjat.

Didalam waktu jang masih singkat ini (2 bulan) belum dapat diuraikan perobahan-perobahan dalam struktur dan organisasi bidang perindustrian rakjat.

Berhubung dengan itu, maka kami harap agar uraian-uraian jang dikemukakan dibagian ini, dapatlah kiranja merupakan ungkapan jang mewakili bidang pembangunan industri-industri dalam lingkungan Kompartemen Perindustrian Rakjat.

I. PEMANDANGAN UMUM.

Perkembangan perindustrian rakjat selama 20 tahun kemerdekaan, melalui pasang surutnja revolusi sungguh sangat menggembirakan.

Perlu didjelaskan, bahwa berbeda dengan sektor-sektor ekonomi lainnja seperti perdagangan dan perindustrian dasar serta pertambangan, maka perdjoangan dan perkembangan serta kemadjuan perindustrian rakjat termasuk djuga keradjinan rakjat adalah sangat erat terdjalinnja dengan kehidupan serta kegiatan rakjat kita sehari-hari.

Demikian eratnja terdjalin dengan kehidupan rakjat sehari-hari, sehingga perkembangan itu umumnja tidak terasa (taken for granted), ataupun tidak begitu menarik perhatian orang. Padahal kalau kita renungkan agak mendalam sedjenak, maka kita akan menemui bahwa praktis hampir semua kebutuhan sehari-hari dari seorang manusia jang merupakan hasil pabrik (manufactured consumersgood), dan banjak pula barang-barang modal pala waktu ini. dapat dihasilkan oleh rakjat dalam negeri.

Barang-barang kebutuhan rakjat jang sekarang ini sudah dapat dibuat oleh perindustrian rakjat dalam negeri sesungguhlah banjak ragamnja. Perindustrian rakjat setjara diam-diam telah lama mulai melaksanakan dan merealisasikan dalil „berdari diatas kaki sendiri"

Perindustrian rakjat, termasuk keradjinan rakjat jang meluas didaerah-daerah luar kota, sering oleh ahli-ahli luar negeri lupa dimasukkan sebagai faktor dalam perhitungan-perhitungan mereka mengenai pendapatan nasional (national income) Indonesia. Oleh ahli-ahli luar negeri itu biasanja pendapatan nasional Indonesia per capita diperhitungkan sebesar $ 60-70, padahal kalau mereka tidak lupa turut memperhitungkan seperlunja hasil perindustrian rakjat dan keradjinan rakjat, baik jang visible-visible maupun jang non visible (non komersiil) maka perhitungan pendapatan nasional per capita di Indonesia itu sudah djelas akan mendjadi dua atau tiga kali lipat.

Dan hal ini pulalah antara lain jang sebenarnja menjebabkan ahli-ahli luar negeri mengatakan, bahwa „Indonesia is going to collapse" adalah salah terka; jaitu karena mereka lupa memperhitungkan dengan tepat potensi ekonomi sosial riil jang hebat, jang terpendam disektor perindustrian rakjat termasuk keradjinan rakjat. „Indonesia will never collapse", oleh karena adanja perindustrian dan keradjinan rakjat jang merupakan buffer sumber penghasilan rakjat jang terbesar diluar sektor agraris. [1])

Kalau tadi diterangkan, bahwa dalam tahun mahkota 1965 ini sudah sangat banjak barang-barang kebutuhan sehari-hari jang dapat dihasilkan oleh industri dan keradjinan rakjat dalam negeri, maka perlu ditegaskan disini bahwa banjak pula barang-barang jang kita sanggup hasilkan dengan bahan-bahan dalam negeri, baik sebagai subtitute maupun sebagai bahan non-subtitute. Ja, bahkan banjak sekali industri-industri rakjat jang menghasilkan barang-barang dengan mempergunakan mesin-mesin buatan dalam negeri pula, buatan industri rakjat sendiri. Apakah jang dewasa ini sudah dapat dihasilkan oleh industri dan keradjinan rakjat dalam negeri? Terlalu banjak untuk disebut satu persatu djenisnja. Akan tetapi sebagai tjontoh dapatlah kami kemukakan djenis-djenis berikut: segala matjam sandang rakjat, dari sepatu dan kaus untuk kaki, berbagai matjam bahan pakaian untuk sekudjur badan, sampai tutup kepala; semua djenis perabot rumah tangga dan perabot dapur, termasuk alat-alat listrik seperti setrikaan dan lemari es (walaupun jang tersebut terachir ini belum dalam skala produksi masaal) dan berbagai matjam oven minjak; alat-alat listrik lainnja termasuk radio transistor dan alat-alat penghasil listrik seperti generator-generator ketjil, bateríj dan accu; alat-alat pengangkutan terutama speda dan betjak bermotor; seribu satu matjam barang-barang plastik jang banjak dilihat

---

1) Bidang perindustrian rakjat meliputi ± 800 djenis industri dan keradjinan. Dari sudut kesempatan kerdja (employment) ia memberi nafkah kepada ± 2.700.000 orang, setjara fulltimer, ataupun setjara parttimer dalam hal keradjinan sambilan. Kalau kita taksir bahwa separoh dari padanja adalah kepala keluarga, dan kalau kita taksir bahwa masing-masing kepala keluarga itu mempunjai tanggungan 5 orang anggota keluarga, maka djumlah penduduk jang mendapat penghasilan dari penindustrian rakjat ditaksir meliputi ± 8.000.000 orang. Dan djika ditaksir bahwa 90% atau 90.000.000 penduduk Indonesia hidup dari usaha-usaha pertanian itu, maka djelaslah bahwa penduduk jang penghasilannja bukan dari usaha-usaha pertanian itu, sebagian memperoleh nafkahnja dari perindustrian rakjat. Djelaslah betapa pentingnja bidang perindustrian rakjat dipandang dari sudut sosial demografis.

ditoko-ditoko dan tampaknja seperti barang-barang plastik buatan luar negeri; seribu satu matjam barang-barang logam, keramik dan gelas; seribu satu matjam barang-barang dari karet; bermatjam-matjam barang konpeksi jang tidak kalah mutunja dengan konpeksi buatan luar negeri; bermatjam-matjam hasil keradjinan dari logam mulia, kulit, kain, kaju, bambu, anjam-anjaman, gading, tanduk jang semuanja terkenal diseluruh dunia.

Dan masih banjak lagi djenisnja hasil perindustrian dan keradjinan rakjat ini untuk disebut satu persatu.

Kemadjuan perindustrian ini, kalau diikuti perkembangannja selama 20 tahun kemerdekaan, dari zaman perdjoangan Revolusi Physik sampai ke tahun mahkota 1965, sungguh akan menggembirakan hati setiap jang progresif revolusioner, walaupun dalam beberapa sektor perlu diakuinja adanja kemadjuan-kemadjuan jang kurang, sebagai akibat dari dialektikanja revolusi. Namun setjara keseluruhan, keradjinan-keradjinan jang tertjapai dibidang perindustrian rakjat selama 20 tahun terachir ini adalah sangat revolusioner. Baik kemadjuan setjara physik, materiil, teknis innovatif (daja menemukan substitute-substitute dan tjara-tjara baru), maupun terlebih-lebih kemadjuan dalam segi mental para pengusaha/industriawan. Dan kalau kemadjuan ini sudah demikian besarnja djika dibandingkan dengan zaman Revolusi Physik 1945-1949, maka djika dibanding dengan keadaan pada waktu pendjadjahan Belanda (tahun-tahun tiga puluhan sekalipun), kemadjuan jang telah kita tjapai itu mendjadilah monumental. Maka untuk mendapatkan proporsi jang sebenarnja, perlulah kita uraikan setjara singkat keadaan perindustrian pada zaman pendjadjahan itu.

Perindustrian Rakjat dizaman Pendjadjahan.

Pada zaman pendjadjahan Belanda jang meliputi masa ± 350 tahun itu, keadaan perindustrian rakjat termasuk keradjinan rakjat adalah sangat menjedihkan; bahkan dalam banjak hal dapat dikatakan memalukan apabila diingat bahwa bangsa Indonesia sebelum datangnja pendjadjahan itu sudah mempunjai tradisi berindustri atau berkeradjinan jang luhur. Keradjinan rakjat dizaman Sriwidjaja dan Madjapahit sudah tinggi kedudukannja itu, bahkan hampir mendjadi mati sama sekali dizaman pendjadjahan Belanda, terketjuali untuk beberapa djenis keradjinan chusus dibeberapa daerah seperti Kotagede, Djepara dan Bali, dimana penduduk jang berkeradjinan itu demikian kuat mentalnja sehingga keradjinan disana — wa-

laupun mengalami kemunduran — dapat djuga mempertahankan diri terhadap tekanan-tekanan sosial ekonomis daripada imperalisme. Dipandang dari sudut sosiologis tidaklah mengherankan, bahwa salah satu djenis keradjinan jang dapat mempertahankan diri dengan gemilang selama pendjadjahan itu adalah djustru keradjinan kulit, chususnja keradjinan pembuatan wajang kulit.

Sebabnja ialah karena seni wajang kulit itu, merupakan salah satu tanggul kebudajaan jang seolah-olah memberi tempat berpegang kepada rakjat Indonesia untuk tidak hanjut terbenam sama sekali didalam arusnja imperialisme. Dalam pada itu setjara kebetulan atau barangkali tidak setjara kebetulan, seni wajang itu memberi sinar-sinar harapan kepada rakjat Indonesia mengenai akan datangnja zaman baik, akan datangnja ratu adil, akan datangnja seorang pemimpin besar rakjat Indonesia. Oleh karena seni wajang itu selalu membawakan kisah-kisah perdjoangan antara kekuatan-kekuatan baik melawan kekuatan-kekuatan buruk, antara kekuatan-kekuatan nefos melawan kekuatan oldefos, dimana kekuatan-kekuatan jang baik kekuatan-kekuatan nefos itu pada achirnja selalu mentjapai kemenangan gemilang. Inilah sebabnja seni wajang itu dapat mempertahankan diri, dan walaupun pusatnja bersifat kekratonan namun ia mendjadi seni rakjat. Dan inilah pula sebabnja maka keradjinan pembuatan wajang kulitpun dapat mempertahankan diri terhadap penindasan sosial ekonomis daripada Imperialisme Belanda.

Demikianlah, dengan beberapa uraian seperti disebut diatas, keradjinan rakjat mengalami suatu masa jang menjedihkan diwaktu pendjadjahan Belanda. Disektor perindustrian rakjat pada umumnja keadaannjapun menjedihkan hati bangsa Indonesia. Alat utama kaum Imperialis Belanda untuk mengekang perkembangan perindustrian rakjat di Indonesia, ialah apa jang disebut Bedrijfsreglementerings Ordonantie. Undang-undang ini jang diatas kertas kelihatannja tidak mengandung bahaja apa-apa bagi penduduk Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannja oleh Pemerintah Belanda diinterpretasi demikian rupa sehingga ia mengekang dan mentjekik tumbuhnja suatu industri rakjat di Indonesia. Bagaimana akibat dari politik busuk Pemerintah Pendjadjahan Belanda, dapatlah dilihat pada angka perbandingan djumlahnja perusahaan-perusahaan industri ditahun 1940 dan 1960.

Djumlah Perusahaan Industri Rakjat
tahun 1940 dan 1960.

Tahun	Djawa/Madura	Pulau² lainnja	Djumlah Indonesia
1940 1)	4.787	2.642	7.429
1960 2)	47.346	21.385	68.731

Dalam menilai angka-angka perbandingan diatas ini perlulah ditjatat, bahwa disatu pihak angka-angka tahun 1940 itu tidak hanja mentjakup perusahaan industri rakjat, melainkan djuga mentjakup perusahaan-perusahaan industri lainnja. Dan dilain pihak, angka-angka tahun 1960 hanjalah meliputi perusahaan-perusahaan industri rakjat, akan tetapi belum lengkap seluruhnja, karena processing dari pada pendaftarannja belum selesai. Djelaslah bahwa dalam tempo 20 tahun sedjak tahun terachir pendjadjahan Belanda, djumlah perusahaan perindustrian rakjat telah bertambah lebih dari 1000%. Djangan pula dilupakan, bahwa pada tahun 1940 itu sebagian terbesar adalah milik orang-orang asing, sedangkan dalam tahun 1960 sebagian terbesar terdiri dari modal nasional.

Ada satu perbedaan jang prinsipiil, antara lain sifat serta tugas perindustrian dimasa pendjadjahan Belanda dan sifat serta tugas perindustrian umumnja dan perindustrian rakjat chususnja setelah 20 tahun Indonesia Merdeka ini, perbedaan prinsipiil mana adalah akibat dari pada tjara pelaksanaan Bedrijfsreglementerings Ordonnantie. (Walaupun sebelum diundangkan B.R.O. itu pertama-tama pada tahun 1924, policy mengekang perindustrian Bangsa Indonesia itu pun sudah ditetapkan, sehingga B.R.O. itu hanjalah merupakan legislasi sadja dari keadaan penindasan jang sudah lama berdjalan, legislasi jang berselubung sutra).

Adanja perindustrian di Indonesia oleh Imperialisme Belanda dianggap sebagai suatu "noodzakelijk kwaad". Pada prinsipnja Belanda tidak menghendaki adanja industri di Indonesia, oleh karena Indonesia didalam konstelasi Imperium Belanda djustru dimaksud sebagai pasaran bagi industri Belanda; sebaliknja industri Belanda itu sendiri dan negara-negara imperialis lainnja membutuhkan bahan baku dari Indonesia.

1) Sumber: Centraal Bureau Statistiek, Statistical Pocketbook 1940.
2) Sumber : Biro Statistik Dokumentasi, Deperindra.

Maka di Indonesia bangunlah kegiatan-kegiatan industri jang melajani perkebunan-perkebunan, untuk memberi service-service ringan kepada perkebunan-perkebunan itu. Djadi industri-industri jang pertama-tama diperbolehkan oleh pihak imperialis ialah bukan industri-industri jang menambah kesedjahteraan rakjat, bukan industri-industri untuk industrialisasi melainkan industri-industri untuk mempertinggi produksi serta mutu dari bahan-bahan mentah jang dihasilkan Indonesia untuk kepentingan-kepentingan industri imperialis di Eropa dan Amerika. Sebagai tjontoh: kebun-kebun tebu, karet dan teh dengan annex pabrik gula, kilang karet dan pengeringan teh. Untuk service dan reparasi diperlukan dan didirikanlah bengkel-bengkel konstruksi jang lengkap dan modern dicentra-centra perkebunan. Bengkel-bengkel besar itu dimiliki oleh modal-modal perkebunan Belanda, walaupun mereka sbenarnja sanggup untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan rakjat namun hal ini tidak pernah dilaksanakan. Bengkel jang serupa itu, bahkan bengkel-bengkel jang djauh lebih sederhana, sekarang setelah 20 tahun kita merdeka, banjak menghasilkan berbagai matjam alat-alat mesin, misalnja alat tenun mesin, mesin tjetak dan sebagainja. Bahkan mereka sekarang dapat membangun pabrik-pabrik lengkap seperti pabrik karton dan kertas merang, pabrik tegel dan semen rakjat, pabrik-pabrik paku dan lain-lain.

Achirnja, untuk menggambarkan bagaimana remehnja pendjadjahan Belanda menganggap industri rakjat itu sebagai sumber kemakmuran rakjat, dapatlah dikemukakan bahwa urusan perindustrian dizaman pendjadjahan hanjalah diurus oleh suatu bagian dalam Departemen Perdagangan, pernah pula ia dimasukkan dalam salah satu bagian dari Departemen Pertanian, bahkan suatu waktu ia hanja dipegang oleh suatu bagian dari Departemen Pendidikan & Agama (Departemen van Onderwijs & Eredienst).

Dapatlah dibajangkan bagaimana gemuruhnja semangat anggota-anggota revolusioner Korps Pembangun Industri Rakjat, untuk membangun serta mempertahankan suatu industri nasional demi mengisi kemerdekaan jang telah ditjanangkan pada djam 10.00 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi para pedjoang Korps Pembangunan Industri Rakjat itu, masih akan harus mengalami, bahwa perdjoangan mereka tidaklah mudah. Karena sedjarah telah menentukan bahwa mereka, disamping membangun industri nasional, masih harus berdjoang

dalam Revolusi Physik menghadapi Imperialisme Belanda jang ingin mentjokolkan kukunja kembali dipersada Indonesia; kemudian menjusul pula perdjoangan terhadap musuh-musuh revolusi jang bersembunji didalam tubuh bangsa sendiri; disusul pula perdjoangan terhadap anasir-anasir liberal, koruptor-koruptor, petualang-petualang ekonomi dan vested interests didalam bidang perdagangan impor. Bahwa perdjoangan Korps Pembangunan Industri Rakjat ini adalah berat, dapat dibuktikan dengan fakta masih adanja usaha-usaha sampai tahun jang lalu, untuk mengimpor barang-barang djadi seperti tekstil sandang padahal tekstil sandang dapat dihasilkan oleh industri rakjat dalam negeri. Akan tetapi insja Allah sinar kemenangan telah mulai memantjar menembus awan, dan dengan melangkahnja kita kealam Pantjawarsa Manipol dan Pantjarwarsa Deperindra, maka berkumandanglah komando Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pembangun Industri Rakjat Agung kepada Bangsa Indonesia untuk berdiri diatas kaki sendiri, dan untuk menjetop impor segala matjam barang jang dapat dihasilkan dalam negeri.

II. MEMPERTINGGI MENTAL DAN KETERAMPILAN KARYAWAN INDUSTRI RAKJAT.

A. UMUM.

Departemen Perindustrian Rakjat senantiasa berpegang teguh kepada petuah P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pembangun Industri Rakjat Agung jang menggariskan bahwa „uit eindelijk beslist de mens", bahwa mental petugas adalah menentukan.

Maka menjadari akan pentingnja pembangunan mental dilingkungan masjarakat pembangun industri rakjat, mendjadi keharusan bagi setiap petugas Departemen Perindustrian Rakjat untuk ikut aktif merombak susunan dan tata pelaksanaan dibidang industri, jang masih dihinggapi oleh unsur-unsur destruktif, unsur-unsur jang tidak searah dengan garis Revolusi kita, unsur-unsur jang kontra-revolusioner. Mental „nun inggih" dan „sendika dalem" harus kita kikis habis, karena mental demikian ini adalah jang telah beratus-ratus tahun ditjekokkan kepada Bangsa Indonesia, sehingga patahlah segala daja kreasi rakjat, hilanglah segala kepertjajaan akan kekuatan kita sendiri. Sebaliknja hal ini tidak pula berarti, bahwa kita dapat membenarkan unsur-unsur insubordinasi dan unsur-unsur jang melanggar disiplin.

Dengan sekilas pandang dapatlah kita mengetahui, bagaimana tragisnja perkembangan industri pada djaman pendjadjahan diwaktu jang lampau. Setelah Pemerintah Republik Indonesia membuka pintu selebar-lebarnja bagi pertumbuhan industri kita dan hasil ini dapat kiranja kita lihat pada pertumbuhan industri ditiap-tiap daerah tingkat I, tingkat II, bahkan lebih djauh dapat kita saksikan adanja industri ditiap ketjamatan dan desa, jang pada waktu pendjadjahan dulu tidak kita dapati sama kali. Disini terlihat pesatnja kemadjuan perkembangan setelah jang pada waktu pendjadjahan dulu tidak kita dapati sama semasa pendjadjahan berachir. Melihat kemadjuan-kemadjuan demikian, maka tugas kita pada waktu sekarang adalah pemeliharaan industri-industri tersebut, baik pemeliharaan dalam pabrik itu sendiri maupun pemeliharaan dalam mutu produksinja, sampai-sampai pemeliharaan dalam pimpinan dan petugas-petugas pabrik itu sendiri.

Pemeliharaan personalia merupakan suatu tugas pokok pula, terutama dalam pembangunan dan pemeliharaan mental petugas industriawan-industriawan jang pada hakekatnja kepada mere-

ka itulah tergantung hasil-hasil industri kita. Penggemblengan djiwa revolusi harus terus-menerus dikerdjakan. Untuk ini kita telah diberi garis-garis pelaksanaannja.

Di Departemen Perindustrian Rakjat dikerdjakan pula setjara terus-menerus penempaan djiwa dan semangat revolusi, semangat berkorban untuk kepentingan Masjarakat dan Bangsa Indonesia.

Dalam rangka usaha kesadaran pegawai negeri dalam kedudukannja sebagai eksponen Revolusi, maka setiap hari Senin diutjapkan setjara bersama-sama Pantja Setia Pegawai Negeri. Sebagai pegawai negeri kita tjamkan dan kita amalkan arti dan makna Pantja Setia.

Pada setiap hari Senin kita utjapkan Pantja Setia bersama-sama untuk lebih mendalami dan lebih djauh kita mengamalkannja. Kalau kita mau lebih djauh lagi menelaah arti Pantja Setia tersebut, maka pegawai negeri akan merupakan suatu kekuatan jang bulat dan kuat dalam melaksanakan tugas-tugas revolusi kita, sehingga kita akan lebih tjepat dalam menjusun masjarakat Sosialisme Indonesia.

Selain pada hari Senin, Pantja Setia diutjapkan pula pada setiap hari upatjara bendera pada hari-hari besar dan pada setiap tanggal 17 disamping amanat Pedjabat-pedjabat Tinggi Deperindra, pada hakekatnja merupakan usaha penggemblengan, pemeliharaan djiwa djoang dalam Korps Pembangun Industri Rakjat.

Disamping pelaksanaan-pelaksanaan tersebut diatas sebagai usaha-usaha dalam pembangunan dan pemeliharaan mental telah pula diadakan suatu tjeramah/indoktrinasi dari Badan Pembina Djiwa Revolusi. Peserta dalam tjeramah tersebut adalah para Kepala-kepala Bagian keatas dengan maksud, agar pedjabat-pedjabat tersebut meneruskan dan mengamalkan hasil-hasil indoktrinasi kepada para pegawai-pegawai bawahan, sehingga dengan kesadaran jang tinggi daripada pegawai-pegawai, maka akan lebih tjepatlah Korps Pembangun Industri Rakjat mendjadi suatu Korps Manipolis sedjati, jang bersih dari oknum-oknum jang hanja mendjadi pengurus dirinja sendiri. Segala sesuatu jang kita peroleh dalam tjeramah-tjeramah tersebut akan tidak ada arti sama sekali kalau hanja akan disimpan diotak masing-masing dengan tidak melakukan pengamalannja. Mereka jang mempunjai tjukup pengertian/pengetahuan tentang Revolusi kita, tetapi dalam tindak kehi-

dupan dan penghidupannja bertentangan dengan arti dan makna Revolusi, maka achirnja dapat dan mudah mendjadi eksponen jang kontra-revolusioner.

Eksponen-eksponen jang demikian pada hakekatnja merupakan bahaja besar bagi pelaksanaan penjelesaian revolusi dibanding dari pada orang-orang jang belum mengetahui tentang garis-garis dalam pelaksanaan revolusi.

Usaha-usaha pembangunan dan pemeliharaan mental dengan segala tjara diusahakan sekuat tenaga ditubuh Departemen Perindustrian Rakjat, sebagai suatu alat revolusi jang harus digunakan sebaik mungkin untuk mentjapai target revolusi dibidang Perindustrian Rakjat. Dengan tidak djemu-djemunja Pemimpin Departemen Perindustrian Rakjat bersama-sama dengan golongan progresip revolusioner melantjarkan pembangunan mental Korps Pembangun Industri Rakjat sebagai suatu landasan mutlak bagi pembangunan industri rakjat.

Pembentukan HANSIP dan Bataljon Sukarelawan dilingkungan Departemen Perindustrian Rakjat merupakan pula suatu segi pembinaan mental revolusi, disamping tugas-tugas pokok sebagai pradjurit bangsa jang harus bertanggung-djawab tentang keselamatan negara dan Bangsa Indonesia.

Bagaimana tingginja kesadaran para pegawai Deperindra dapat kiranja kita saksikan dalam ketekunan mereka dalam tugas masing-masing dengan melepaskan diri dari segala tuntutan hidup jang berlebih-lebihan. Menjadari sedalam-dalamnja bahwa Bangsa Indonesia masih berdjoang untuk menjelesaikan revolusi dimana dalam segala bentuk perdjoangan harus ada pengorbanan, maka segala penderitaan diterimanja sebagai penempaan semangat mereka dalam berdjoang jang semakin lama semakin mendjadi kuat, sehingga penderitaan tersebut tidak merupakan penderitaan lagi, karena telah terbakar habis oleh semangat berdjoang mereka. Disinilah pengabdian seorang pradjurit sedjati, jang meletakkan kepentingan umum djauh diatas kepentingan pribadi, djauh diatas kepentingan golongan dan aliran.

Dengan uraian diatas djelaslah sudah, bahwa hanja dengan manusia-manusia jang bermental revolusi, alat revolusi, Deperindra dapat menjelesaikan tugasnja dalam pengabdiannja terhadap tjita-tjita revolusi, dapat menjumbangkan dharma bhaktinja setjara sempurna keharibaan Ibu Pertiwi.

Dengan mental revolusi, dengan djiwa revolusi kita dapat dan sanggup membangun industri rakjat jang tidak tergantung

dari luar-negeri, industri rakjat jang memproduksi dengan kekajaan alam Indonesia sendiri dan dalam tingkat demikian kita telah madju dalam pelaksanaan sembojan kita „Berdiri diatas kaki sendiri".

Dengan industriawan jang berdjiwa progresip revolusioner kita bangun industri rakjat sebagai salah satu sjarat mutlak daripada terdjelmanja masjarakat Sosialis Indonesia.

B. PENDIDIKAN.

Peranan pendidikan dalam bidang perindustrian chususnja adalah sangat penting; bahkan dapat dikatakan tanpa pendidikan industrialisasi tak dapat dilaksanakan. Disamping mesin-mesin, alat-alat serta bahan baku dan modal, maka pengetahuan tehnik industri memegang tampuk jang menentukan dalam usaha memperkembangkan industri.

Maksud dan tudjuan pendidikan didalam perindustrian rakjat, adalah untuk mengisi kekurangan akan tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan kedjuruan tertentu mulai daripada pengetahuan teknik jang sesederhana-sederhananja sampai pada penjelidikan-penjelidikan dibidang industri umumnja. Sistim pendidikan jang digunakan adalah sistim pendidikan terpimpin jang bermanfaat, praktis dan meliputi lapangan seluas-luasnja dengan memberikan kesempatan untuk kerdja njata dalam industri. Disamping itu, pendidikan dilakukan pula dengan pemberian bea siswa, ikatan dinas bagi pedjabat-pedjabat jang dipandang mempunjai harapan besar untuk menempuh peladjaran penuh berbagai sekolah tinggi.

Deperindra djuga melaksanakan pengiriman pedjabat-pedjabat, termasuk tenaga-tenaga dari kalangan swasta jang berketjimpung dalam bidang industri untuk menggunakan fasilitas training didalam maupun diluar negeri. Sudah tentu pemberian fasilitas-fasilitas tertentu tersebut, pertama-tama didasarkan atas kebutuhan kita akan tenaga terdidik serta atas bakat dan nilai dari pada tenaga-tenaga jang akan dididik tersebut. Disamping semua ini perindustrian djuga telah banjak pula memberi bantuan kepada industriawan-industriawan dari negara-negara Nefos pada bidang pendidikan ini.

Pada achir-achir ini bahkan Deperindra misalnja sudah melatih tenaga-tenaga dari Pakistan dalam bidang pertembakauan, chususnja dalam bidang pembuatan tjerutu. Permintaan dari luar negeri untuk melatih tenaga-tenaga mereka pada instansi-instansi perindustrian rakjat makin hari makin bertambah, antara lain mengenai keradjinan keramik.

Ini memberikan pula pada kita suatu gambaran, bahwa bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Perindustrian Rakjat sudah memasuki kerdja-sama internasional setjara two-way traffic.

Demikian pula banjak tenaga-tenaga perindustrian rakjat, baik dari kalangan Pemerintah maupun dari kalangan Swasta jang diutus keluar negeri guna turut dalam berbagai konperensi, seminar serta penjelidikan-penjelidikan ilmiah industri. Memang industrialisasi tidak lepas dari pada pendidikan; masjarakat kitapun akan merasakan segala kemanfaatan dari pada pendidikan industri ini langsung maupun tidak langsung. Dengan madju pesatnja pendidikan ini, maka akan tjepat pulalah meluasnja industri-mindedness dikalangan rakjat. Pendidikan adalah sjarat mutlak pula bagi perkembangan perindustrian rakjat kita guna dapat tertjapainja Amanat Penderitaan Rakjat. Industry mindedness ini harus dimulai dari tingkat bawah. Berhubung dengan ini pulalah maka oleh Departemen Perindustrian Rakjat diadakan kerdja-sama jang erat dengan Departemen Pendidikan Dasar disatu pihak dan dengan gerakan Pramuka dilain fihak.

Periode 1945 - 1950.

Selandjutnja marilah kita menoleh sedjenak pada riwajat perkembangan „pendidikan" pada Deperindra sedjak mulai pada periode Perdjoangan Physik.

Sesudah kemerdekaan kita tjapai, kita menghadapi segala matjam kekurangan serta kesulitan. Ini adalah soal jang lazim, bahwa sesudah perang dunia ke II dimana-mana terdapat puing-puing akibat berketjamuknja perang. Ditambah lagi dengan pengorbanan-pengorbanan jang setjara dialektis wadjib kita berikan dalam Revolusi Physik.

Dalam mengalami kesulitan-kesulitan tersebut diatas serta guna meningkatkan perbaikan ekonomi, maka telah terasa benar akan keharusan adanja industrialisasi, bahkan semasa perdjoanganpun, rakjat kita telah mulai memperkembangkan perindustrian dengan mengaktivir keradjinan-keradjinan mereka didesa-desa, menenun bahan-bahan pakaian untuk Tentara Keamanan Rakjat dan kemudian untuk Tentara Rakjat Indonesia dan pasukan-pasukan perdjoangan, serta kebutuhan-kebutuhan masjarakat jang terutama ditudjukan pada Perdjoangan Physik. Usaha industrialisasi ini mulai memuntjak serentak setelah Rakjat Indonesia sadar akan kedudukannja sebagai

bangsa. Industrialisasi jang pesat sudah mendjadi suatu keharusan, agar dapat kita memberi pekerdjaan kepada penduduk, jang makin lama makin meningkat untuk dapat mempertinggi taraf penghidupan seluruh rakjat.

Akan tetapi industrialisasi inipun menghendaki terisinja tenaga-tenaga jang terdidik dan terlatih. Usaha-usaha industrialisasi ini tidak mungkin dapat memberikan hasil-hasil jang memuaskan apabila tidak didasarkan atas pekerdjaan penjelidikan jang seksama. Ini bukan sadja berlaku bagi perusahaan besar dan sedang sadja, tetapi terutama bagi perindustrian ketjil dan tangan (cottage industry). Lebih-lebih ini berlaku pada perusahaan-perusahaan ketjil di Indonesia, dimana usaha-usaha industri masih terbelakang akibat tekanan politik pendjadjahan jang lalu. Dinegara-negara industri jang madju perindustrian ketjil dan tangan menmepati suatu kedudukan jang vital. Bukan sadja karena djumlah perusahaan jang demikian melebihi jang lain, namun djuga karena djumlah hasil (industrial output) serta pengerahan tenaga kerdja djauh dari pada dapat diremehkan. Pada saat itu produktivitas jang rendah dari perindustrian ketjil tersebut adalah mendjadi suatu pokok penting dari kelemahannja. Rendahnja produktivitas ini terutama adalah hasil dari penggunaan teknik jang kuno, alat-alat jang kuno serta tidak efisien, skill jang sangat kurang, organisasi jang belum teratur baik dan sebagainja.

Soal-soal jang dihadapi oleh perindustrian ketjil sama dengan jang dihadapi perusahaan-perusahaan besar. Pekerdjaan-pekerdjaan seperti screening, klasifikasi dan menggunakan seefektif-efektifnja keterangan-keterangan jang selalu datang dan pula menjesuaikan dengan keadaan di Indonesia mendjadi demikian banjaknja sehingga satu-satunja djalan untuk mengatasi soal-soal ini jalah hanja dengan "scientific approach".

Maka dari itu dimulailah dengan mengadakan penjelidikan-penjelidikan tertentu dengan disusul pula pendirian sekolah-sekolah chusus. Kursus Dinas Djuru-Analis — lama pendidikan 3 tahun — didirikan pada awal perdjoangan Revolusi Physik.

Sekolah Analis Kimia Persiapan — lama pendidikan 4 tahun — didirikan pada tahun 1947. Sekolah Teknologi Menengah Atas — lama pendidikan 3 tahun — didirikan tahun 1947. Disamping sekolah-sekolah ini telah dimulai pula diadakan pendidikan-pendidikan dasar pengetahuan praktek industri umumnja. Dengan berkembangnja pendidikan ini, maka reha-

bilitasi industri-industri dapat berdjalan setapak demi setapak.

Dalam tahun-tahun selandjutnja makin banjaklah djenis-djenis pendidikan jang diperlukan, menurut bidang industri masing-masing.

Periode 1950 - 1955.

Dengan pendjelasan jang sekedar tersebut, dapat terlihat, bahwa peranan pendidikan sungguh penting sekali dalam pelaksanaan industrialisasi chususnja. Dibawah ini kami tjantumkan berturut-turut djenis-djenis pendidikan jang dilaksanakan mulai tahun-tahun Perdjoangan Physik sampai dengan saat ini.

Djenis-djenis pendidikan jang diselenggarakan sedjak semula dibagi dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut:

1. Latihan: adalah pendidikan jang mengutamakan kerdja praktek untuk mendapatkan tenaga terlatih dalam berbagai matjam kedjuruan dan tingkat keahlian menurut keperluan, jang diselenggarakan dalam waktu kurang dari satu tahun.
2. Kursus: adalah pendidikan setjara periodik untuk meninggikan tingkat pengetahuan, jang diselenggarakan antara 6 bulan hingga 3 tahun.
3. Sekolah Menengah: adalah pendidikan menengah teori, lisan dan praktek, jang diselenggarakan terus-menerus.
4. Akademi: adalah pendidikan tinggi lengkap, jang kuliahnja diselenggarakan setjara lisan untuk keperluan keahlian jang bersifat pengawasan dan penjelenggaraan setjara ilmiah.
5. Sekolah Tinggi: adalah pendidikan tinggi jang kuliahnja diselenggarakan setjara lisan, untuk keperluan keahlian kreatif penelitian dan pembinaan setjara ilmiah.
   Sekolah tinggi dibagi mendjadi:
   a. Sekolah tinggi biasa: jang diselenggarakan dengan rentjana sekurang-kurangnja 5 (lima) tahun sesudah S.M.A. atau sederadjat.
   b. Sekolah tinggi landjutan: (Graduate School), jang diselenggarakan sekurang-kurangnja 2 (dua) tahun setelah Akademi, dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan setaraf dengan kesardjanaan lengkap.

Lamanja pendidikan.

Lamanja pendidikan pada semua akademi ditetapkan antara 3 tahun dan 3½ tahun. Dalam akademi 3½ tahun, maka jang setengah tahun dipakai untuk kerdja njata. Untuk mendapatkan bahan-bahan persamaan jang tjukup luas, para mahasiswa,

semua akademi diharuskan mengadakan se-kurang-kurangnja satu kali kuliah kerdja keobjek industri jang sedjalan dengan pendidikannja.

Lamanja pendidikan pada sekolah-sekolah tingkat menengah atas ditetapkan 3 sampai 4 tahun. Untuk mendapatkan bahan persamaan jang tjukup luas bagi para siswa, mereka diharuskan sekurang-kurangnja satu kali mengadakan praktek keunit-unit dari Balai-balai Penelitian, jang sekarang tergabung dalam P.N.P.R. Nupiksa Yasa.

Lamanja kursus biasanja 6 bulan sampai 3 tahun.

Lamanja latihan maksimum 1 tahun.

Tingkat pendidikan.

Latihan-latihan atau kursus dapat diberikan untuk segala matjam kedjuruan dan keahlian dari berbagai tingkat sebagai berikut:

Tingkat I adalah untuk latihan-latihan dan kursus-kursus jang nilai peladjarannja diatas tingkat sekolah dasar.

Tingkat II adalah untuk latihan-latihan dan kursus-kursus jang nilai peladjarannja diatas tingkat Sekolah Landjutan pertama.

Tingkat III adalah untuk latihan-latihan dan kursus-kursus jang nilai peladjarannja diatas tingkat sekolah landjutan Atas.

Tingkat V adalah untuk latihan-latihan dan kursus-kursus jang nilai peladjarannja diatas akademi.

Dalam Periode Survival ini telah didirikan latihan-latihan dan kursus-kursus sebagai berikut :

1. Kursus Dinas Perakit Analisa (didirikan tahun 1951 lamanja kursus 1 tahun).
2. Kursus Penjamakan Kulit (didirikan tahun 1951, lamanja kursus 1 bulan).
3. Kursus Industri Tekstil (didirikan tahun 1953, lamanja kursus 1 tahun).
4. Latihan Industri Batik I (kursus membuat tjap, didirikan tahun 1953, lamanja kursus 3 bulan).
5. Latihan Industri Batik II (kursus mengetjap dan membatik tulis, didirikan tahun 1953, lamanja kursus 3 bulan).
6. Kursus Keradjinan Sepatu (didirikan tahun 1953, lamanja kursus 1 tahun).
7. Kursus Industri Bahan-bahan Bangunan (didirikan tahun 1955, lamanja kursus 6 bulan).

8. Kursus Industri Keramik I & II (didirikan tahun 1955, lamanja kursus 1 tahun).
9. Latihan Industri Keramik Umum (didirikan tahun 1955, lamanja kursus 3 bulan).
10. Latihan Industri Keramik Barang-barang Kesenian (didirikan tahun 1955, lamanja kursus 3 bulan).
11. Kursus Kilat Industri Keramik (didirikan tahun 1955).
12. Akademi Kulit (didirikan tahun 1954, lamanja kursus 3 tahun).
13. Akami Tekstil (didirikan tahun 1954, lamanja kursus 3½ tahun).

Periode 1955 - 1960.

Dalam periode ini pendirian kursus-kursus serta sekolah-sekolah pun ditambah lagi, mengingat bahwa makin hari makin dirasakan kebutuhan akan keahlian, terutama pada tingkat tenaga-tenaga teknik industri rendah dan menengah. Dalam periode inipun perentjanaan pembangunan industri sudah dimulai bersamaan dengan didirikannja, pada tahun 1959, Departmen Perindustrian Rakjat. Pada achir periode ini nampak njata, bahwa penjempurnaan organisasi dalam bidang pendidikan ini dipusatkan, dan mulailah difikirkan penambahan pendirian akademi-akademi. Sudah dirasakan pula kebutuhan akan bidang pimpinan perusahaan, pengetahuan-pengetahuan jang lebih tinggi serta mengaktivir penjelidikan-penjelidikan serta memperluas perkembangan pendidikan dengan menjediakan alat-alat serta pengadjar-pengadjar jang lebih efisien.

Dapat kami sebutkan disini, bahwa telah didirikan:

1. Kursus Industri Kimia (minjak tumbuh-tumbuhan) dalam tahun 1957; lama pendidikan 8 bulan.
2. Kursus Industri Mekanik (ahli diesel) dalam tahun 1956; lamanja pendidikan 1 tahun.
3. Kursus Dinas Pengatur Analis dalam tahun 1958; lama pendidikan 2 tahun.
4. Kursus Industri Bahan-bahan (laboran kimia) dalam tahun 1958; lama pendidikan 3 tahun.
5. Kursus Industri Bahan-bahan (laboran kimia) dalam tahun 1960; lama pendidikan 1 tahun.
6. Kursus Industri Bahan-bahan (laboran physika mekanika) dalam tahun 1956; lama pendidikan 1 tahun.
7. Akademi Kimia Analis dalam tahun 1959; lama pendidikan 3½ tahun.

8. **Akademi Pemimpin Perusahaan dalam tahun 1958; lama** pendidikan 3½ tahun.

Djelaslah tergambar diatas bagaimana perkembangan pendidikan chususnja pada periode ini.

Kebutuhan akan pengetahuan teknik pada masa itu dapat dengan njata kita saksikan, antara lain dengan mulai berkembangnja industri kimia dimana memang negara kita ini dimasa itu perlu sekali mendapatkan tenaga-tenaga jang langsung dapat mengerdjakan teknik industri kimia, karena dimasa-masa jang lampau kita hampir tidak ada kesempatan untuk memperkembangkan pengetahuan tersebut, terutama dimasa-masa pendjadjahan dan pada periode Perdjoangan Physik diwaktu mana bahan-bahan dan alat-alat serba kurang. Walaupun demikian dengan semangat serta tjita-tjita besar, maka kita laksanakan pendidikan tenaga-tenaga kearah penjempurnaan teknik industri jang lajak. Ditambah pula, sumbangan serta kerdja sama dengan badan-badan pendidikan lainnja didjalin dengan baik. Hasrat daripada masjarakat industri maupun dari umum mulai menarik perhatian. Disamping semuanja ini penjempurnaan daftar peladjaran (curicullum) serta sistim peladjaran disesuaikan pula dengan policy perindustrian umumnja. Perhatian dari kalangan industri swasta membantu pula berkembangnja bidang-bidang pendidikan ini. Sekaligus pula sudah mulai kembali tenaga-tenaga muda jang telah berhasil menuntut peladjarannja diluar negeri maupun jang telah lulus dari perguruan-perguruan tinggi didalam negeri. Tenaga-tenaga muda ini turut membantu dengan mendjadi pengadjar-pengadjar jang masih penuh dengan semangat jang bergelora, dimana pada periode ini sedang hangat-hangatnja kita menjusun suatu konsep baru bagi pelaksanaan revolusi dengan pendidikan terpimpin. Bidang pendidikan inipun mendapatkan penjempurnaan mental maupun physik, disesuaikan dengan djalannja revolusi pembangunan.

Periode 1960 - 1965.

Dalam periode ini kita memasuki windu pertama rentjana pembangunan semesta dimana segala sesuatunja harus disesuaikan dengan rentjana tersebut, dan diutamakan dibidang sandang dan pangan. Hal ini akan njata pula tergambar, karena dalam periode ini pendidikan-pendidikan ditudjukan akan pelaksanaan pembangunan semesta berentjana ini.

Dalam tahun-tahun ini pula banjaklah pendjabat-pendjabat Deperindra jang kembali dari luar negeri setelah memperdalam pengetahuannja mengikuti latihan terutama dibidang tekstil dan pangan.

Dengan banjaknja pembangunan projek-projek baru oleh swasta maupun adanja Perusahaan-perusahaan Negara, maka tekanan pendidikan ditingkatkan pada bidang-bidang management. Djuga bidang-bidang penjelidikan ditingkatkan pula untuk menemukan bahan-bahan baru, pengganti bahan-bahan jang selama ini diimpor. Perentjanaan terutama pada upgrading para pendjabat didasarkan pada spesialisasi terutama bidang kepemimpinan. Djuga pada periode ini berkembang pula pendidikan-pendidikan pada perusahaan-perusahaan swasta jang mendirikan sekolah-sekolah sendiri. Memang pendidikan meluas dan berdjalan terus ditambah pula, bahwa kita djustru memasuki tahun TAVIP dimana sudah ditekankan bahwa kita harus dapat berdiri diatas kaki sendiri dalam segala bidang. Disamping segala pendidikan rutine ini Deperindra pun mengadakan dan memberikan bantuan pula kepada gerakan Pramuka dengan mengadakan Karya-wisata memberi kesempatan „kerdja untuk beladjar dan tjinta industri" kepada Pramuka, tunas-tunas muda pada perusahaan-perusahaan industri diseluruh Indonesia, dimana achirnja akan tersebarlah industrial mindedness pada lapisan rakjat semuanja. Bimbingan terhadap para Pramuka diharapkan akan berhasil dengan baik dalam waktu jang tidak begitu lama. Djuga didaerah-daerah minus diadakan sambil lalu pendidikan penggunaan alat-alat produksi jang sederhana agar daerah-daerah tersebut dapat pula berdiri diatas kaki sendiri dalam meringankan sebagian dari penderitaan mereka, karena industri adalah pula suatu sumber enersi dan koreksi physik maupun mental.

Pada periode ini didirikanlah:

1. Kursus Industri Kimia (Teknologi Makanan) tahun 1961; lamanja pendidikan 6 bulan.
2. Kursus Industri Kimia (Peratjian) tahun 1961; lamanja pendidikan 6 bulan.
3. Kursus Industri Mekanik Operator Diesel tahun 1961; lamanja 3 bulan.
4. Kursus Industri Batik (Teknologi Batik) tahun 1961; lamanja 1 tahun.
5. Kursus Asisten Akuntan (Perusahaan) tahun 1961; lamanja 3 tahun.

6. Kursus Industri Kimia (Laboran) tahun 1961; lamanja 1 tahun.

Demikian antara lain selintas pandang sedjarah dari pada bidang pendidikan jang diselenggarakan oleh dan untuk perindustrian rakjat chususnja. Pada achir periode ini perentjanaan pendidikan terus menerus diadakan dan diteliti. Dalam perkembangan pendidikan ini kebutuhan-kebutuhan daerah selalu mendapatkan perhatian jang baik pula, dan berdjalan lantjar. Pada waktu-waktu jang akan datang ini diharapkan pula agar kalangan perusahaan swasta lebih giat lagi mendirikan pusat-pusat pendidikan dengan kemampuan serta kerdja sama jang baik dengan Deperindra. Hal ini sangat penting, karena achirnja pendidikan industri ini akan memberikan kemanfaatan jang bulat kepada perusahaan-perusahaan itu sendiri disamping turut pula mengemban Amanat Penderitaan Rakjat.

Pendidikan dilingkungan perindustrian rakjat berdjalan terus mengikuti irama derapnja revolusi pembangunan kita.

C. KEDJADIAN-KEDJADIAN PENTING LAINNJA.

Diantara tenaga-tenaga Deperindra jang telah dikirim untuk training keluar negeri banjak jang mendapat hasil-hasil baik. Diantaranja terdapat tiga tenaga jang benar-benar memperlihatkan kesanggupannja setjara menondjol dibidang teknis. Jaitu seorang pria telah menjelesaikan peladjarannja dengan sangat memuaskan hingga mentjapai gelar Ph.D. dengan penghargaan istimewa. Bidang peladjaran jang ditempuh adalah food technology. Jang kedua adalah seorang wanita, djuga telah mentjapai hasil peladjarannja jang sangat memuaskan djuga dengan mendapat gelar Ph.D. dengan penghargaan istimewa. Adapun saudari ini adalah wanita pertama dari Indonesia jang mendapatkan gelar tersebut. Bidang peladjarannja adalah petro-chemish. Jang ketiga seorang pria pula dengan penghargaan jang sama pula. Ketiga orang ini mendjadi pendorong dan kebanggaan jang kuat bagi karyawan lainnja, untuk mentjapai hasil jang memuaskan.

Pada tahun 1963 Menteri Perindustrian Rakjat mengambil kebidjaksanaan jang lebih tegas lagi dibidang pendidikan dan pembangunan tenaga ini, dengan menetapkan dibentuknja satu Biro jang dinamakan Biro Perentjanaan Tenaga, agar supaja segala kegiatan perentjanaan pembangunan tenaga dapat dipusatkan, sehingga hasil jang lebih besar dapat ditjapai.

Tidak dilupakan pula, bahwa tenaga-tenaga ini adalah mendjadi suatu kekuatan jang bulat dan besar dalam menghadapi pengganjangan musuh-musuh revolusi termasuk penghantjuran negara boneka Malaysia.

Tugas dari Biro Perentjanaan Tenaga tersebut antara lain adalah:

a. Merentjanakan pembinaan terhadap tenaga manusia jang diperlukan oleh Deperindra chususnja dan masjarakat perindustrian rakjat umumnja dalam usaha meninggikan kemampuan kerdja.
b. Menetapkan garis-garis pelaksanaan perentjanaan mengenai pendidikan, latihan, penempatan tenaga dan pemeliharaan effeciency kerdja.

Deperindra telah melaksanakan pula tour of duty maupun tour of area dalam lingkungannja di Pusat maupun di Daerah. Peremadjaan pimpinan didaerah-daerah sudah dilaksanakan, antara lain dalam pimpinan Kantor-kantor Inspeksi Perindustrian Rakjat di Djakarta, Bandung, Surabaja, Pontianak, Makasar, Ambon, Palembang, Padang, Djambi, Medan, Atjeh dan lain-lain. Dari tenaga-tenaga muda ini diharapkan tertjapainja hasil kerdja jang semaksimum-maksimumnja.

Sebagai penutup daripada uraian singkat ini dapat ditambahkan, bahwa perentjanaan pembangunan tenaga lebih-lebih lagi ditingkatkan dan disempurnakan, sehingga dalam waktu jang sesingkat-singkatnja dapat ditjapai hasil jang memuaskan.

D. BANTUAN TENAGA-TENAGA PERINDUSTRIAN RAKJAT KEPADA NEGARA LAIN.

Perlu diketahui bahwa tenaga-tenaga perindustrian rakjat Indonesia telah dapat pula memberikan bantuannja kepada dunia internasional. Sebelum Indonesia menarik diri dari P.B.B. dikantor Pusat Ecafe, di Bangkok telah ditempatkan seorang tenaga Perindustrian Rakjat Indonesia dalam kedudukan pimpinan. Pun dalam seminar-seminar internasional telah banjak pula tenaga-tenaga perindustrian rakjat turut serta menjumbangkan tenaga serta pikiran, membawa suara Revolusi Indonesia ke forum internasional. Industriawan dari Pakistan telah mendapat training di Indonesia dalam soal-soal perindustrian rokok, terutama dalam teknik pembuatan tjerutu, dibawah bimbingan Departemen Perindustrian Rakjat.

Dan pada tahun mahkota 1965 ini, beberapa ahli Departemen Perindustrian Rakjat telah dikirim kebeberapa negara-negara

Afrika, untuk memberi penjuluhan tentang pembuatan dan penggunaan bata genteng, serta hasil-hasil keramik.

RENTJANA PERKEMBANGAN PENDIDIKAN 8 TAHUN.

No.	Nama Akademi/ Sekolah/Kursus	1961	1968
	TINGKAT AKADEMI		
1.	Akademi Pemimpin Perusahaan		
2.	Akademi Tekstil	24 orang	500 orang
3.	Akademi Kulit	39 „	600 „
4.	Akademi Kimia Analisis	10 „	80 „
		—	70 „
		73 orang	1.250 orang
	TINGKAT MENENGAH ATAS :		
5.	Sekolah Teknologi Menengah Atas	77 orang	650 orang
6.	Sekolah Analisa	36 „	160 „
7.	Kursus Minjak Tumbuh-tumbuhan	5 „	50 „
8.	Lain-lain Kursus B.P. Industri	8 „	100 „
9.	Lain-lain Kursus B.P. Bahan-bahan	—	100 „
		126 orang	1.060 orang
	TINGKAT MENENGAH PERTAMA :		
10.	Kursus Mekanik Diesel	19 orang	80 orang
11.	„ Laboran	—	400 „
12.	„ Pengatur Analis	6 „	80 „
13.	„ Tekstil	39 „	600 „
14.	„ Praktek Tekstil	—	400 „
15.	„ Bahan-bahan Bangunan	8 „	160 „
16.	„ Laboran B.P. Bahan-bahan	16 „	80 „
17.	„ Keramik I	12 „	160 „
18.	„ Keramik II	5 „	80 „
19.	„ Penjamakan Kulit	15 „	50 „
20.	„ Keradjinan Sepatu	10 „	80 „
		130 orang	2.170 orang
	TINGKAT RENDAH :		
21.	Kursus Keramik III, IV, V	19 orang	200 orang
22.	„ Batik I, II, III.	100 „	200 „
		119 orang	400 orang

III. TINDJAUAN SINGKAT PERKEMBANGAN ORGANISASI DAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN.

A. ORGANISASI.

Seperti telah didjelaskan diatas, dalam masa pendjadjahan lapangan industri kurang mendapat perhatian dari pihak Pemerintah Kolonial. Buktinja antara tahun 1905-1933 perindustrian hanja diurus oleh suatu organisasi ketjil jang merupakan bagian dari Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian, Keradjinan dan Perdagangan).

Pada waktu itu politik Pemerintah ialah agar supaja industri jang ada di Indonesia, djangan sampai mengganggu kehidupan industri di Negara Pendjadjah. Industri-industri besar tidak diusahakan ketjuali industri jang menghasilkan bahan ekspor (misalnja: karet, teh dan sebagainja).

Jang diurus pada waktu itu hanja industri-industri ketjil (nijverheid). Dapat dikatakan pada waktu itu, bahwa industri hanja ditudjukan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada Pemerintah Hindia Belanda, jang dipandang dari sudut Pemerintah Kolonial kurang efisien apabila diimpor dari negeri Belanda.

Pada tahun 1934-1942 ada sedikit kemadjuan dalam status organisasi. Soal industri pengurusannja dimasukkan dalam bagian dari Departement van Economische Zaken (Departemen Urusan-urusan Ekonomi).

Dan pada tahun 1942-1945, jaitu pada waktu Djepang menduduki Indonesia, soal industri ditiap-tiap Karesidenan diurus oleh Seksi dari Bagian Perekonomian Karesidenan, jang pada waktu itu dinamakan Kogyo Sodan Syoo.

Pada djaman Djepang, tiap-tiap Karesidenan mempunjai perindustrian jang otonoom, dalam arti bahwa semua matjam industri ada dalam satu daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah itu dapat mentjukupi diri sendiri (self-supporting).

Industri pada waktu itu ditudjukan sekedar untuk memenuhi keperluan perang.

Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, maka pada bulan September 1945 dibentuk Kementerian Kemakmuran. Industri mulai benar-benar diperhatikan, meskipun keadaan perhatian itu belum besar. Buktinja organisasi jang mengurusnja diberi sta-

tus jang lebih tinggi dari pada seksi atau bagian sadja. Pada waktu itu industri mendjadi urusan Djawatan Perindustrian. Pada bulan Oktober 1946 dibentuk Kantor Inspeksi Perindustrian dan Keradjinan dibeberapa propinsi, jang defacto masuk kekuasaan Republik Indonesia.

Pada waktu itu, kita masih dalam periode Revolusi Physik, dan semua industri diwilajah dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan rakjat, dan disamping itu djuga untuk keperluan perdjoangan.

Sesudah kembali lagi mendjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Kementerian Kemakmuran didjadikan 2 Kementerian,. ialah:

a. Kementerian Pertanian,
b. Kementerian Perdagangan & Perindustrian.

Pada waktu itu industri diurus oleh Djawatan Perindustrian jang bernaung dibawah Kementerian Perdagangan & Perindustrian. Kementerian ini kemudian dirobah namanja mendjadi Kementerian Perekonomian.

Sedjak tahun 1952 soal industri ada dalam pengurusan Kementerian Perekonomian cq. Djawatan Perindustrian. Pada waktu itu Djawatan Perindustrian baru mempunjai bagian, antara lain:

1. Bagian Perkembangan.
2. Bagian Penjuluhan.
3. Bagian Umum.

Dalam periode antara 1950—1955 ini jang kita kenal dengan Periode Survival usaha Pemerintah mula-mula ditudjukan untuk merehabilitir semua industri jang ada, jang selama Perang Dunia II dan Revolusi Physik telah mengalami kerusakan atau ditutup. Ini terdjadi dengan industri-industri jang biasanja berada dikota-kota besar. Usaha ini berdjalan lantjar, karena industri-industri itu kebanjakan tertjatat, dan berdasarkan „historis recht" mereka bisa segera dapat djatah, hingga mudah hidup kembali. Tetapi disamping itu Djawatan Perindustrian ingin memperkembangkan industri didaerah-daerah pula, terutama didaerah-daerah bekas R.I. Dengan dibentuknja Dana Industri Ketjil, maka diadakan bantuan terhadap pembeajaan industri-industri ketjil didaerah.

Di Djawatan Perindustrian diadakan bagian Penjelenggara Perindustrian, jang bertugas untuk memperbaiki industri ketjil dengan mendirikan induk-induk. Induk-induk ini mempunjai fungsi serba guna (multipurpose), jaitu disamping mem-

beri bimbingan dan pendidikan pada pengusaha-pengusaha ketjil (dalam unit), djuga mengusahakan bahan baku, pemasaran, bantuan pembiajaan dan sebagainja.

Dalam periode „challenge and response" (1955-1960) organisasi perindustrian djuga mengalami perobahan-perobahan jang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan jang makin meningkat dan banjak ragam. Organisasi lebih diperintji, antara lain diadakan bagian jang chusus memperhatikan perkembangan produksi, bagian jang chusus mengusahakan penjelidikan & pendidikan, bagian jang chusus mengurus pembinaan industri ketjil Hal ini dapat ditjerminkan dalam surat-surat keputusan jang merobah organisasi Kementerian Perekonomian dan jang diikuti dengan usaha-usaha jang njata.

Dengan dikeluarkannja surat keputusan Menteri Perekonomian tanggal 6 Pebruari 1956 No. 1417/M, diadakan perobahan susunan/tugas Kementerian Perekonomian. Dengan adanja perobahan ini maka urusan industri pada umumnja, ketjuali industri pertambangan mendjadi tanggung djawab Direktorat Perindustrian. Direktorat Perindustrian ini meliputi :

1. Djawatan Perindustrian.
2. Djawatan Balai-balai Penjelidikan dan Pendidikan.
3. Badan hukum jang ditugaskan untuk urusan Penjelenggaraan Induk, pada waktu itu, disebut „Jajasan Administrasi dan Organisasi" atau disingkat JADO.

Urusan Industri dibagi dalam beberapa segi :

1. Segi teknis (menjediakan bahan baku, penjaluran, penjuluhan dan sebagainja) berada ditangan Djawatan Perindustrian.
2. Segi pendidikan dan penjelidikan setjara ilmiah (research, testing, normalisasi, scientific information dan sebagainja) berada ditangan Djawatan Balai-balai Penjelidikan dan Pendidikan. Pada achir tahun 1959 Djawatan Balai-balai Penjelidikan dan Pendidikan dirobah namanja mendjadi Institut Teknologi dan Pendidikan.

Dengan dikeluarkannja U.U. No. 19 Prp. 1960 maka berobah

Dengan dikeluarkannja U.U. No. 19 Prp. 1960 maka berobah pulalah status Institut Teknologi dan Pendidikan mendjadi Perusahaan Negara, dan bernaung dibawah B.P.U. P.N.P.R., dengan Peraturan Pemerintah No. 180 tahun 1961. Perusahaan Negara ini termasuk perusahaan Negara bidang djasa, dan diberi nama Perusahaan Negara Urusan Peneli-

tian, Pembinaan dan Pendidikan, dibentuk atas dasar P.P. No. 192 tahun 1961. Sewaktu Perusahaan-perusahaan Negara Perindustrian Rakjat diberi kode Yasa dengan disertai nama djenis jang mendjadi lapangan pekerdjaannja (Skp. B.P.U. P.N.P.R. tanggal 8 Djuli 1961, No. 142/Sek. B.P.U./ 61), maka P.N. Urusan Penelitian, Pembinaan dan Pendidikan ini diberi nama P.N.P.R. „Nupiksa Yasa".

3. Segi bimbingan chusus pada industri ketjil, dengan membangun mengawasi dan mendjalankan induk-induk, guna memperkuat usaha-usaha rakjat.

Segi ini ada ditangan JADO.

Pada tahun 1956 JADO ini mendjelma mendjadi „Lembaga Penjelenggara Perusahaan-perusahaan Industri" disingkat LEPPIN. LEPPIN ini adalah Jajasan jang dibentuk oleh Kementerian Perekonomian dari penggabungan Bagian Penjelenggara dari Djawatan Perindustrian dan JADO (Akte Notaris R.M. Soewandi tahun 1956, No. 79).

Perobahan susunan Kabinet mengakibatkan perobahan pula dalam susunan dan tugas LEPPIN. Pada tahun 1959 diadakan perobahan anggaran dasar lagi jaitu dengan Akte Notaris Liem Toeng Kie tahun 1959 No. 12.

Dengan dibentuknja Kabinet Kerdja, maka LEPPIN dinaungkan dibawah Departemen Perindustrian Rakjat. Tugas ditambah, dengan dimasukkannja Kantor Mekanisasi jang semula berdiri sendiri dibawah Kementerian Perindustrian, kedalam LEPPIN.

Dengan dikeluarkannja U.U. 19 Prp. 1960 jang menegaskan dan menjederhanakan Urusan Lembaga-lembaga dan Jajasan-jajasan Negara, maka LEPPIN pun tidak ketinggalan dan mendjelma mendjadi Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakjat, jang mendjadi inti pelaksana pembangunan projek-projek Deperindra, terutama dalam segi sandang. Paling achir LEPPIN terkenal dengan nama P.N.P.R. Karya Yasa (dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 194 tahun 1961). Disamping itu LEPPIN diserahi pula untuk melaksanakan projek pampasan Djepang dan kredit Luar Negeri, antara lain dari Inggeris, Djepang dan R.R.T. Didaerah-daerah LEPPIN mempunjai tjabang-tjabang jang berstatus pos depan, perwakilan dan penjelenggara projek.

Bersamaan dengan perkembangan ekonomi disertai tumbuhnja setjara pesat bermatjam-matjam perusahaan dialam kemerdekaan ini, maka urusan industri mendjadi sangat luas dan

organisasi perusahaan sedjenis jang sudah ada perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.

Hal ini mudah dapat diselesaikan setjara musjawarah antara organisasi-organisasi jang bersangkutan dengan kehidupan industri.

Dapat ditambahkan, bahwa dalam rangka struktur ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin ini, selain perlu diadakannja synchronisasi dari segenap potensi nasional, chususnja dibidang ekonomi dan pembangunan, maka dianggap perlu pula mengadakan ketentuan-ketentuan jang bertudjuan membimbing dan menggerakkan dana, daja dan tenaga progresif dalam segala kegiatan perekonomian dan pembangunan, baik jang terdapat dalam sektor Pemerintah Daerah, maupun jang terdapat dalam sektor swasta.

Pun menurut ketetapan M.P.R.S. II/MPRS/1960 isi otonomi harus riil dan luas, oleh karena mana Kepala Daerah Swatantra perlu diberikan sumber-sumber penghasilan jang dapat membiajai segala pengeluaran, serta diberi kesempatan untuk mendjalankan kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menambah penghasilan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah menganggap perlu segera diusahakan antaranja penjerahan Perusahaan Negara tertentu kepada Daerah Swatantra.

Untuk ini maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964, jang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai pembangunan perusahaan dan projek negara dalam rangka menggerakkan dana, daja dan tenaga masjarakat.

Diantaranja ketentuan jang penting ialah, bahwa perusahaan jang diserahkan kepada Daerah mendjadi Perusahaan Daerah menurut Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan Daerah mendjamin kelangsungan produksi dari perusahaan jang diserahkan itu. Ketjuali itu daerah tidak dibenarkan untuk menjerahkan perusahaan jang telah diterima itu kepada swasta. Selandjutnja penjerahan perusahaan atau projek kepada daerah, tidak boleh merupakan tambahan pengeluaran keuangan Negara cq Pemerintah baik setjara langsung maupun tidak.

Kemudian djika ternjata, bahwa maksud dan tudjuan Pemerintah dengan penjerahan itu tidak tertjapai, maka Pemerintah berhak menarik kembali perusahaan/projek itu.

Dibidang Deperindra penjerahan perusahaan-perusahaan negara kepada Pemerintah Daerah itu sudah dilaksanakan, sehingga dengan demikian sudah direalisirlah sumbangan Deperindra untuk mengisi otonomi Daerah setjara riil.

B. SEKITAR BEDRIJFSREGLEMENTERINGS ORDONNANTIE 1934 DAN PENGARUHNJA TERHADAP KEHIDUPAN INDUSTRI.

Soal perkembangan industri sangat erat hubungannja dengan soal perizinan pendirian perusahaan.

Pada waktu berdirinja Republik Indonesia pada tahun 1945, segi perizinan perusahaan masih dikuasai oleh Undang-undang Penjaluran Perusahaan tahun 1934, suatu warisan perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda, jang masih dipergunakan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar R.I.

Sebenarnja Undang-undang Penjaluran Perusahaan tahun 1934 adalah terdjemahan dari Bedrijfs Reglementerings Ordonnantie 1934, dimana naskah aslinja dimuat dalam Staatsblad No. 86 tahun 1938. B.R.O. 1934 ini dibuat oleh Pemerintah Belanda, jang tudjuannja hanja untuk mempertahankan kepentingan bangsa Belanda.

Sebagai kita ketahui, pada sekitar tahun 1933-1934, dunia ditimpa oleh suatu "depressi" terkenal sebagai zaman malaise.

Pada waktu itu Pemerintah dari berbagai Negara mengadakan berbagai-bagai usaha untuk mempertahankan kehidupan ekonominja. Dan usaha seperti itu antara lain diadakan oleh Pemerintah Belanda pada waktu itu untuk menghadapi dunia perusahaan di Indonesia.

Dengan dikeluarkannja B.R.O. 1934 itu, maka terhadap perusahaan-perusahaan/tjabang-tjabang usaha jang dikenakan B.R.O. tersebut. Pemerintah setiap waktu dapat mengawasi djalannja perusahaan, dan dengan mudah pula dapat memberikan sjarat-sjarat jang dianggap perlu bagi perusahaan, sesuai dengan politik Pemerintah pada waktu itu.

Mula-mula jang dikuasai oleh B.R.O. hanja 9 tjabang usaha jang ditetapkan dengan peraturan pelaksanaan jaitu:

1. pabrik es Bedrijfsreglementeringsverordening Ijsfabrieken 1935 (Stbld. 1935 No. 568 jo. 139 No. 154, 1940 No. 239, 1949 No. 309 dan 1950 No. 73).

kompleks. Maka tidak mengherankan bahwa pada waktu pembentukan Kabinet Kerdja (tahun 1959) Pemerintah menganggap perlu adanja Kementerian-kementerian sendiri jang mengurus chusus sektor produksi dan chusus sektor distribusi dari dunia perindustrian.

Untuk itu diadakan Kementerian Perindustrian jang mengurus sektor produksi dari seluruh industri, dan Kementreian Perdagangan jang mengurus sektor distribusi termasuk perdagangan didalamnja. Kepada Menteri Perindustrian diserahkan penjelenggaraan urusan-urusan mengenai :

1. Perindustrian termasuk perindustrian ketjil dan keradjinan tangan.
2. Perkreditan dan perbekalan perindustrian.
3. Geologi.
4. Pertambangan.
5. Perusahaan-perusahaan tambang negara dan perusahaan tambang tjampuran.

Dengan makin meningkatnja kehidupan industri, maka Pemerintah menganggap perlu menambah djumlah organisasi jang diberi tanggung djawab terhadap pengurusan industri.

Maka pada waktu pembentukan Kabinet Kerdja pada tahun 1959 (surat keputusan Presiden tanggal 10 Djuli 1959, No. 153 dan tanggal 13 Djuli 1959, No. 154) dan sesuai dengan program Pemerintah jang dititik beratkan pada memenuhi sandang pangan bagi rakjat, diadakanlah 2 Departemen jaitu Departemen Perindustrian Rakjat dan Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan: Kedua-duanja berada dibawah naungan Kompartemen Pembangunan.

Selandjutnja disini hanja akan diuraikan urusan industri jang masuk wewenang Departemen Perindustrian Rakjat.

Urusan jang masuk Deperindra ialah semua industri manufaktur konsumptif dan semua perindustrian ringan, menengah dan keradjinan tangan rakjat, serta industri-industri lain jang tidak masuk tugas wewenang Deperdatam (pasal 2 Skp. Menteri Perindra tanggal 1 Oktober 1960, No. 209/M.BM/25/ '60, diralat dengan surat Menteri Perindra A.i. tanggal 15 Oktober 1960, No. 225/M.BM/'60).

Deperindra mempunjai tugas industrialisasi chusus dalam bidang perindustrian rakjat baik dalam segi-segi administratif maupun teknik/ekonomi, meliputi urusan penjelidikan, perentjanaan, pembangunan, pemeliharaan, penjuluhan, perkembangan, pemasaran, penjaluran dan pengawasan, jang kesemuanja itu disertai dengan pekerdjaan-pekerdjaan statistik, pendidikan, pendirian projek-projek induk dan pertjontohan, dan dengan langkah-langkah perizinan, mekanisasi, perbekalan dan perkreditan.

Dalam menunaikan tugas tersebut diatas diadakan pembagian antara tugas/wewenang pusat pada Departemen dan tugas/wewenang Dinas-dinas Daerah jang hanja chusus mengenai pelaksanaan.

Tugas dan wewenang Pusat sendiri dalam pelaksanaannja dibagi-bagi diantara badan-badan dan menurut susunan Departemen.

Kebidjaksanaan umum ditentukan setjara sentral, sedang dalam pelaksanaan tugas/wewenang diadakan pembagian setjara dekonsentrasi dan pemisahan setjara desentralisasi menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku.

Adapun susunan Departemen pada waktu itu adalah seperti berikut (Lihat lampiran Skp. Menteri Perindra tanggal 1 Oktober 1960, No. 209/M.BM/25/1960).

Sesuai dengan Manipol jang menentukan perlunja rituling dari segenap alat-alat produksi dan alat-alat distribusi, maka semuanja harus direorganisir dan diadakan herordening dibidang ekonomi (termasuk industri) untuk ditudjukan kearah pelaksanaan tata masjarakat Sosialis Indonesia, jaitu masjarakat jang adil dan makmur berlandaskan Pantja Sila.

Semua alat-alat vital dalam bidang produksi dan distribusi harus dikuasai dan sekurang-kurangnja harus diawasi oleh Pemerintah, sedangkan segala modal dan tenaga swasta jang progresif dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960.

Dan untuk mentjapai maksud tersebut diatas maka segala kegiatan ekonomi baik jang dilakukan oleh Swasta, Negara maupun daerah harus disinkronisasikan dengan baik dan bidjaksana, sehingga dapat mempersingkat waktu jang dibutuhkan untuk mentjapai program Pemerintah djangka pendek, jaitu sandang-pangan untuk rakjat.

Dalam periode Manipol (1960-1965) ini terlaksanalah pembentukan G.P.S./O.P.S., dan pengaturan Perusahaan Negara jang diadakan berdasarkan U.U. No. 19 Prp. 1960, jang merupakan pentjerminan dalam perubahan struktur/organisasi jang mengurus sektor produksi. Dalam hal ini organisasi Departemen Perindustrian Rakjat, seperti tertjantum pada surat keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tanggal 28 Agustus 1961, No. 1223, mengalami perobahan pula.

Badan-badan chusus diluar pusat Departemen jang berdiri sendiri melaksanakan kebidjaksanaan serta tugas Departemen, ditambah dengan :

1. Badan jang chusus mengatur/mengkoordinir perusahaan-perusahaan Negara, jaitu Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Perindustrian Rakjat disingkat B.P.U. P.N.-P.R., B.P.U. P.N.P.R. diadakan berdasarkan P.P. No. 180 tahun 1960.

   B.P.U. P.N.P.R. mempunjai tugas mendjalankan pimpinan umum (general management/administration) dalam mengurus perusahaan-perusahaan Negara, dilingkungan perindustrian rakjat.

2. Badan jang chusus mengatur/mengkoordinir G.P.S./O.P.S. jaitu Badan Pimpinan Pusat G.P.S./O.P.S.
   Badan ini mula-mula bernama Team Koordinasi G.P.S./O.P.S. (lihat surat keputusan Menteri Perindra tanggal 12 April 1961, No. 894).

3. Badan jang bertugas untuk menetapkan penjebaran pengetahuan tentang penggunaan standar-standar jang akan ditentukan tjara-tjara untuk penghematan dan penjederhanaan pekerdjaan. Badan ini dinamakan Biro Standar Nasional dan dimaksudkan untuk mengeratkan hubungan organisatoris antara Balai-balai Penjelidikan jang berada dibawah naungan Perusahaan Negara Perindustrian Rakjat „Nupiksa Yasa". Schema organisasi lihat lampiran III.

Dibentuknja struktur G.P.S./O.P.S. dimaksudkan untuk meningkatkan produksi setjara gotong-rojong dan efisien.

Sebelum dikeluarkannja U.U. No. 19 Prp. 1960, memang sudah ada organisasi-organisasi/gabungan-gabungan perusahaan, baik jang didasarkan pada pendjenisan menurut bentuk hukum, djenis bahan jang diperlukan, djenis produksi jang dihasilkan maupun lain-lain pendjenisan teknis. Organisasi-orga-

nisasi/gabungan-gabungan ini dibentuk dalam alam liberal, jaitu sebelum berlakunja ekonomi terpimpin dan Sosialisme Indonesia. Dari sumber-sumber jang dapat diketemukan pada tahun 1955 sudah ada organisasi Madjelis Industri Indonesia disingkat dengan M.I.I. Badan ini merupakan konfederasi dari organisasi-organisasi perusahaan sedjenis, dan/atau sedaerah Swatantra Tingkat I dan diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman pada tanggal 1 April 1960, No. 7A.5/42/5.

M.I.I. sebagai konfederasi dibentuk oleh Musjawarah Industri Nasional (Minas) pada tanggal 5 Nopember 1959. Sebelum itu M.I.I. sekedar menjalurkan badan-badan/organisasi-organisasi jang bergerak dalam kegiatan industri.

Akan tetapi organisasi-organisasi/gabungan-gabungan ini ternjata tidak efisien dan terpetjah belah mendjadi bermatjam-matjam golongan. Sekalipun diadakan usaha-usaha untuk menjatukan organisasi-organisasi/gabungan-gabungan itu dengan mengadakan madjelis, federasi dan sebagainja namun usaha ini tidak menghasilkan suatu kesatuan jang diharapkan. Hal ini disebabkan karena :

1. Pada waktu itu organisasi hidup dalam alam liberal.
2. Organisasi didjadikan sasaran bagi kepentingan perseorangan/golongan.
3. Belum adanja perundang-undangan jang setjara tegas mengatur pengorganisasian.

Dengan adanja U.U. No. 19 Prp. 1960, maka Pemerintah mengambil langkah-langkah jang tegas dengan adanja ketentuan tentang pengaturan keseragaman administrasi Perusahaan Negara dan pembentukan G.P.S./O.P.S. ditegaskan dalam Undang-undang itu bahwa titik berat dari semua kegiatan Perusahaan-perusahaan Negara harus ditudjukan kearah pembangunan ekonomi nasional dan sebagian besar dari laba jang diperoleh perusahaan itu disediakan bagi Dana Pembangunan Semesta.

Jang dimaksud dengan Perusahaan Negara, ialah semua Perusahaan dalam bentuk apapun, jang modal keseluruhannja merupakan kekajaan Negara Republik Indonesia, ketjuali djika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pada waktu itu (sebelum U.U. No. 19 Prp. 1960) ada beberapa matjam bentuk perusahaan negara dalam lingkungan perindustrian:

1. Perusahaan Negara berdasarkan Indische Bedrijvenwet (Stbl. 1927 No. 419) seperti Pabrik Garam & Soda Negara (P.G.S.N.).
2. Perusahaan Negara berdasarkan Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 No. 448) seperti perusahaan-perusahaan Leppin.
3. Perusahaan ex Bank Industri Negara.
4. Perusahaan-perusahaan jang modalnja terdjadi karena nasionalisasi berdasarkan Undang-undang No. 85 tahun 1958 (L.N. 1958 No. 162).

Dengan adanja Surat Keputusan Menteri Pertama R.I. No. 584/M.P./1960, tanggal 28 Desember 1960, maka semua perusahaan negara dimasukkan kedalam suatu bentuk organisasi dalam mana digariskan hubungan jang tegas antara Pemerintah dengan Perusahaan itu, maka semua perusahaan negara ditempatkan dibawah Departemen jang lingkungan pekerdjaannja meliputi usaha utama dari perusahaan itu. Dilingkungan Departemen Perindustrian Rakjat Perusahaan Negara dibagi dalam 3 bidang:

1. Bidang produksi, seperti perusahaan industri tekstil dan lain sebagainja.
2. Bidang pembangunan antara lain perusahaan-perusahaan ex LEPPIN.
3. Bidang djasa, seperti Perusahaan Negara Urusan Penelitian, Pembinaan dan Pendidikan.

Ditingkat Departemen dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara (B.P.U. P.N.P.R.). B.P.U. P.N.P.R. ini mendjalankan pimpinan umum, mengadakan kerdja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Negara serta mengawasi pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan itu. B.P.U. bertindak atas nama Menteri Perindustrian Rakjat.

Mengenai Gabungan Perusahaan Sedjenis diatur oleh pasal 28, 29, 30 U.U. No. 19 Prp. 1960. Adapun tudjuan G.P.S. adalah mempersatukan semua alat tenaga jang progresif untuk melaksanakan produksi. Tugasnja ialah:

1. Melantjarkan dan memperkembangkan Perusahaan-perusahaan Negara, Daerah Swatantra, dan swasta dalam rangka Ekonomi Terpimpin.

2. Mengembangkan daja guna serta produksivitas dari kegiatan Perusahaan Negara, Swatantra dan swasta.

G.P.S. beranggotakan:

1. Perusahaan-perusahaan Negara jang pada hakekatnja sudah tergabung dalam O.P.S. chusus.
2. Organisasi-organisasi perusahaan sedjenis (Swasta).
3. Induk-induk Koperasi Produksi jang sudah bertingkat Nasional dalam lapangan usaha sedjenis.

G.P.S. tidak berbadan hukum, sedang jang berbadan hukum adalah O.P.S.-nja G.P.S. dipimpin oleh Dewan Pengurus, jang terdiri sedikitnja dari 5 orang anggota jang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian Rakjat. Dalam mendjalankan tugasnja Dewan Pengurus ini semula diawasi oleh sebuah Dewan Pengawas jang terdiri dari pedjabat-pedjabat Pemerintah dan jang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian Rakjat.

Struktur Dewan Pengawas ini dihapuskan dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tanggal 29 Nopember 1963, No. 175/SK/K/63.

Ditingkat Departemen dibentuk Team Koordinasi G.P.S./O.P.S., jang tugas dan fungsinja ialah mengkoordinir dan meneliti seluruh kegiatan baik dari Dewan Pengawas maupun dari Dewan Pengurus G.P.S. termasuk O.P.S. jang tergabung dalam masing-masing G.P.S. (Surat Keputusan Menteri Perindra tanggal 27 Pebruari 1961, No. 751). Kemudian Nama Team diganti lagi dengan Badan Pimpinan Pusat (B.P.P.) G.P.S./O.P.S.

Demi pelaksanaan penjempurnaan organisasi dan administrasi aparatur Negara untuk mentjapai susunan tempur jang sebaik-baiknja dalam mempertjepat industrialisasi dibidang perindustrian rakjat, maka pada tahun 1962 diadakan reorganisasi lagi pada Departemen Perindustrian Rakjat.

Reorganisasi diadakan dengan surat keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tanggal 26 Desember 1962, No. 220/SK/XII/62, jang diadakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 dan No. 5 tahun 1962.

Adapun susunan Departemen mendjadi seperti berikut:

1. Pimpinan Departemen.
2. Badan-badan Staf dari pada pimpinan.
3. Kabinet Menteri.

4. Perwakilan Departemen Perindustrian Rakjat Daerah tingkat I.
5. Badan-badan Pelaksana.

ad 1 dan 2 Pimpinan Departemen dan badan-badan staf dari pada pimpinan merupakan organisasi-organisasi perentjanaan dan pengawasan dari pada Menteri Perindustrian Rakjat.

ad 3 Kabinet Menteri merupakan organ pelaksana pekerdjaan-pekerdjaan jang bersifat pribadi Menteri.

ad 4 Perwakilan Deperindra didaerah tingkat I merupakan organ pengawas dan koordinasi didaerah tingkat I terhadap pelaksanaan usaha Deperindra didaerah tingkat I.

ad 5 Badan-badan Pelaksana merupakan organ pelaksasana dari pada rentjana-rentjana jang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian Rakjat.

Dalam melaksanakan pekerdjaannja, Menteri Perindustrian Rakjat dibantu oleh pedjabat-pedjabat pimpinan Departemen, jaitu:

1. Untuk pembinaan administratif oleh 2 orang Kuasa Menteri, ialah:
   a. Kuasa Menteri Perindustrian Rakjat Urusan Perentjanaan.
   b. Kuasa Menteri Perindustrian Urusan Pengawasan.

   Dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tanggal 9 Djanuari 1963, No. 006/SK/I/63 istilah Kuasa Menteri diganti dengan Pembantu Menteri.

   Kemudian Pembantu Menteri Urusan Pengawasan diganti dengan Pembantu Menteri Urusan Pelaksanaan dan Pengawasan.
2. Untuk pembinaan pelaksanaan oleh tiga orang Kepala Direktorat ialah:
   a. Kepala Direktorat Industrialisasi.
   b. Kepala Direktorat Perindustrian Rakjat.
   c. Kepala Direktorat Umum.

Perbedaan jang prinsipiil dalam organisasi jang baru dibandingkan dengan jang lama ialah, bahwa pada organisasi jang baru ini diadakan penjusunan organisasi setjara horizontal (dipisahkan antara perentjanaan, pelaksanaan/pengawasan), sedang pada organisasi jang lama, perentjanaan, pelaksanaan dan

pengawasan ada pada badan-badan pelaksanaan sendiri (lihat lampiran Sk. Menteri Perindra tanggal 26 Desember 1962, No. 220/SK/XII/62).

Berhubung dengan belum adanja P.P. jang mengatur pelaksanaan P.P. 243 sebagai peraturan G.P.S., sedangkan peraturan pelaksanaan itu sangat diperlukan, mengingat keadaan/situasi perusahaan industri swasta pada waktu itu sebagai landasan formil dalam pengaturan lebih landjut P.P. 243, maka J.M. Menteri Perindra mengambil suatu kebidjaksanaan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tanggal 4 Djuni 1963, No. 102/SK/VII/1963. Sambil menunggu pelaksanaan P.P. 243 dari jang berwenang, maka Surat Keputusan Menteri Perindra termaksud diatas dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pembentukan G.P.S./O.P.S. dibidang Perindustrian Rakjat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindra tanggal 4 Djuni 1963, No. 102/SK/VII/1963, maka perusahaan negara diberi kedudukan "leading and commanding position" dalam rangka pengintegrasian antara perusahaan negara dan swasta. Kedudukan ini tidak dimaksud bersifat instruktif terhadap perusahaan-perusahaan swasta, tapi semata-mata bersifat politis dalam pengamanan dan djaminan terlaksananja garis-garis kebidjaksanaan politik pemerintah dibidang ekonomi.

Sebagai gambaran dari pengorganisasian G.P.S./O.P.S. sesuai S.K. Menteri Perindra No. 102, dapat diuraikan seperti berikut:

1. Ditingkat Departemen sesuai dengan Surat Keputusan tersebut diatas dan Surat Keputusan Menteri Perindra No. 135/SK/IX/1963, telah tersusun B.P.P. G.P.S./O.P.S. lengkap dengan Pengurus Pleno dan Harian serta Staf Sekretariat.
2. Telah selesai dibentuk 11 G.P.S. dan 56 O.P.S.

Sesuai dengan P.P. No. 23 tahun 1962 dan surat J.M. Menteri Perindra No. 017/M/1/63, tanggal 17 Djanuari 1963, maka wewenang pengangkatan pengurus O.P.S.-O.P.S. Daerah berada ditangan Gubernur jang dalam hal ini bertindak atas nama Menteri Perindustrian Rakjat. Dengan dibentuknja Badan Musjawarah Nasional sebagai satu-satunja forum perusahaan swasta, dengan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1964 dan disusul dengan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1965 tentang pokok-pokok peraturan Organisasi Perusahaan Sedjenis, maka

organisasi perusahaan sedjenis jang sudah ada perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.

Hal ini mudah dapat diselesaikan setjara musjawarah antara organisasi-organisasi jang bersangkutan dengan kehidupan industri.

Dapat ditambahkan, bahwa dalam rangka struktur ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin ini, selain perlu diadakannja synchronisasi dari segenap potensi nasional, chususnja dibidang ekonomi dan pembangunan, maka dianggap perlu pula mengadakan ketentuan-ketentuan jang bertudjuan membimbing dan menggerakkan dana, daja dan tenaga progresif dalam segala kegiatan perekonomian dan pembangunan, baik jang terdapat dalam sektor Pemerintah Daerah, maupun jang terdapat dalam sektor swasta.

Pun menurut ketetapan M.P.R.S. II/MPRS/1960 isi otonomi harus riil dan luas, oleh karena mana Kepala Daerah Swatantra perlu diberikan sumber-sumber penghasilan jang dapat membiajai segala pengeluaran, serta diberi kesempatan untuk mendjalankan kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menambah penghasilan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah menganggap perlu segera diusahakan antaranja penjerahan Perusahaan Negara tertentu kepada Daerah Swatantra.

Untuk ini maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964, jang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai pembangunan perusahaan dan projek negara dalam rangka menggerakkan dana, daja dan tenaga masjarakat.

Diantaranja ketentuan jang penting ialah, bahwa perusahaan jang diserahkan kepada Daerah mendjadi Perusahaan Daerah menurut Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan Daerah mendjamin kelangsungan produksi dari perusahaan jang diserahkan itu. Ketjuali itu daerah tidak dibenarkan untuk menjerahkan perusahaan jang telah diterima itu kepada swasta. Selandjutnja penjerahan perusahaan atau projek kepada daerah, tidak boleh merupakan tambahan pengeluaran keuangan Negara cq Pemerintah baik setjara langsung maupun tidak.

Kemudian djika ternjata, bahwa maksud dan tudjuan Pemerintah dengan penjerahan itu tidak tertjapai, maka Pemerintah berhak menarik kembali perusahaan/projek itu.

Dibidang Deperindra penjerahan perusahaan-perusahaan negara kepada Pemerintah Daerah itu sudah dilaksanakan, sehingga dengan demikian sudah direalisirlah sumbangan Deperindra untuk mengisi otonomi Daerah setjara riil.

B. SEKITAR BEDRIJFSREGLEMENTERINGS ORDONNANTIE 1934 DAN PENGARUHNJA TERHADAP KEHIDUPAN INDUSTRI.

Soal perkembangan industri sangat erat hubungannja dengan soal perizinan pendirian perusahaan.

Pada waktu berdirinja Republik Indonesia pada tahun 1945, segi perizinan perusahaan masih dikuasai oleh Undang-undang Penjaluran Perusahaan tahun 1934, suatu warisan perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda, jang masih dipergunakan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar R.I.

Sebenarnja Undang-undang Penjaluran Perusahaan tahun 1934 adalah terdjemahan dari Bedrijfs Reglementerings Ordonnantie 1934, dimana naskah aslinja dimuat dalam Staatsblad No. 86 tahun 1938. B.R.O. 1934 ini dibuat oleh Pemerintah Belanda, jang tudjuannja hanja untuk mempertahankan kepentingan bangsa Belanda.

Sebagai kita ketahui, pada sekitar tahun 1933-1934, dunia ditimpa oleh suatu "depressi" terkenal sebagai zaman malaise.

Pada waktu itu Pemerintah dari berbagai Negara mengadakan berbagai-bagai usaha untuk mempertahankan kehidupan ekonominja. Dan usaha seperti itu antara lain diadakan oleh Pemerintah Belanda pada waktu itu untuk menghadapi dunia perusahaan di Indonesia.

Dengan dikeluarkannja B.R.O. 1934 itu, maka terhadap perusahaan-perusahaan/tjabang-tjabang usaha jang dikenakan B.R.O. tersebut. Pemerintah setiap waktu dapat mengawasi djalannja perusahaan, dan dengan mudah pula dapat memberikan sjarat-sjarat jang dianggap perlu bagi perusahaan, sesuai dengan politik Pemerintah pada waktu itu.

Mula-mula jang dikuasai oleh B.R.O. hanja 9 tjabang usaha jang ditetapkan dengan peraturan pelaksanaan jaitu:

1. pabrik es Bedrijfsreglementeringsverordening Ijsfabrieken 1935 (Stbld. 1935 No. 568 jo. 139 No. 154, 1940 No. 239, 1949 No. 309 dan 1950 No. 73).

hukum jang bukan berwarganegara Indonesia diperlakukan djuga ketentuan-ketentuan B.R.O. 1934.

Sengadja tidak dipergunakan istilah „perusahaan asing", karena istilah ini hanja meliputi perusahaan-perusahaan jang didjalankan dengan modal asing jang didatangkan dari luarnegeri, dan perusahaan-perusahaan jang tidak didirikan menurut ketentuan-ketentuan hukum Indonesia.

Sedangkan jang dimaksud oleh surat keputusan bersama ini termasuk djuga perusahaan-perusahaan jang didjalankan dengan "domestic capital", dalam mana orang asing turut serta.

Wewenang Menteri Perindustrian dalam pelaksanaan penjaluran, meliputi perusahaan-perusahaan tersebut, sedjauh perusahaan-perusahaan itu masuk tjabang-tjabang usaha jang mengolah/merubah/memperbaiki barang-barang baik organis maupun anorganis supaja barang-barang itu mendjadi lebih berguna untuk pemakaian.

Perusahaan-perusahaan jang diatur oleh B.R.O. adalah perusahaan jang bukan kepunjaan Negara. Sebagai penegasan tentang ini, maka dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 3 Desember 1957, No. 4298/M jang menetapkan, bahwa perusahaan jang dibebaskan dari ketentuan-ketentuan B.R.O. 1934 serta peraturan-peraturan pelaksanaannja hanjalah perusahaan-perusahaan negara jang ditundjuk dan ditetapkan berdasarkan Indische Bedrijvenwet (Stbl. 1927, No. 419) Kesimpulannja ialah:

1. Perusahaan jang tidak ditundjuk dengan/oleh Undang-undang chusus, ialah bukan perusahaan — negara.
2. Djika sesuatu perusahaan — negara mendirikan perusahaan bagian (nevenbedrijven), maka haruslah ditetapkan oleh Menteri jang bersangkutan apakah perusahaan bagian itu memang jang dimaksud dengan perluasan/pembaharuan dan sebagainja dari perusahaan negara itu.

Wewenang Menteri untuk menetapkan perusahaan-perusahaan mana jang dikuasai oleh B.R.O. terdapat dalam pasal 1 ajat 2 P.P. No. 1 — 1957, dimana ditegaskan pula bahwa jang dimaksud dengan Menteri jang bersangkutan ialah Menteri dimana tjabang usaha jang berkenaan ada dibawah lingkungan wewenangnja, bersama-sama dengan Menteri Perekonomian.

Dengan terbentuknja Kabinet Karya pada tanggal 9 April 1957 (Surat Keputusan Presiden tanggal 9 April 1957, No. 108)

maka Kementerian Perekonomian dipetjah mendjadi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Dengan begitu maka pelaksanaan penjaluran perusahaan tersebut dalam pasal 1 ajat 2 P.P. No. 1 tahun 1957 mengalami perobahan pula. Untuk tjabang-tjabang usaha jang berada dalam lapangan Perindustrian, wewenang pelaksanaan penjaluran-annja ada ditangan Menteri Perindustrian dengan mendengar Dewan Pembatasan Perusahaan (P.P. No. 53 tahun 1957, tanggal 12 Nopember 1957).

Sedjalan dengan perkembangan otonomi daerah, berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 (L.N. No. 6 tahun 1957), serta mengingat pula P.P. No. 12 dan No. 13 tahun 1954 (L.N. No. 24 dan 25 tahun 1954) tentang pelaksanaan penjerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perindustrian kepada propinsi-propinsi/kepada Kotapradja Djakarta-Raya, maka dengan surat keputusan Menteri Perindustrian tanggal 4 Pebruari 1958, No. 876/M, penjelenggaraan „B.R.O. 1934" serta peraturan-peraturan pelaksanaannja diserahkan kepada Kepala Daerah Swatantra Tingkat I dan jang sederadjat, sepandjang penjelenggaraan itu meliputi perusahaan-perusahaan jang ditundjuk dengan surat keputusan Menteri Perindustrian tanggal 21 Mei 1957 berdasarkan P.P. No. 1 tahun 1957, jaitu:

1. perusahaan pembatikan — No. 230/M.
2. „ konpeksi — 231/M.
3. „ minjak kelapa — 233/M.
4. „ minuman ketjuali jang mengandung alkohol — 234/M.
5. „ kembang gula — 235/M.
6. „ biskuit — 236/M.
7. „ pembaharuan/perbaikan ban mobil — 238/M.
8. „ pembakaran kapur — 239/M.
9. „ penggergadjian kaju — 240/M.
10. „ genteng bata dan barang sedjenis No. 241/M.
11. „ klise No. 242/M.

Penjerahan wewenang penjaluran kepada Daerah Tingkat I dan jang sederadjat, membawa pula akibat-akibat bahwa retribusi jang harus dibajar oleh perusahaan jang bersangkutan dipungut oleh Kepala Daerah jang mengeluarkan izin, dan disetor dalam kas Daerah jang bersangkutan.

Lain dari pada itu terhadap penolakan maupun pentjabutan izin, perusahaan jang bersangkutan dapat minta banding langsung kepada Menteri Perindustrian dalam djangka waktu 3 bulan terhitung dari tanggal surat pemberian tahu tentang penolakan/ pentjabutan izin itu.

Kemudian pada tanggal 21 September 1961, Menteri Perindustrian Rakjat mengeluarkan surat keputusan No. 1300, jang menetapkan bahwa semua djenis perusahaan/tjabang usaha ketjuali perusahaan tersebut dalam surat keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tanggal 3 September 1957, $\frac{\text{No. 2077/M/Perind}}{\text{2430/M/Perdag}}$ jang berada dalam lingkungan Departemen Perindustrian Rakjat, dikenakan ketentuan-ketentuan B.R.O. Dengan adanja surat keputusan ini, maka pelaksanaan B.R.O. mendjadi luas sekali, sehingga pelaksanaan teknisnja agak kurang lantjar.

Sesuai dengan djiwa P.P. No. 23 tahun 1962 tentang penjerahan sebagian tugas dan wewenang serta perusahaan-perusahaan tertentu Departemen Perindustrian Rakjat kepada Daerah, serta demi kelantjaran pelaksanaan B.R.O. untuk kepentingan pertumbuhan industri, maka sebagai langkah pertama oleh Menteri Perindustrian Rakjat dikeluarkan surat keputusan tanggal 12 Pebruari 1964, No. 48/SK/II/64, tentang penjerahan wewenang penjaluran dibidang pertenunan.

Selandjutnja menjusul surat keputusan Menteri tanggal 28 Djuli 1964, No. 207/SK/VII/64 tentang pentjabutan Surat Keputusan Menteri Muda Perindustrian Rakjat tanggal 4-1-1960, No. 20/25/M.M. dan surat keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tanggal 21-10-1961, No. 1300, serta penetapan pelaksanaan penjaluran tjara baru, dimana sebagian besar pelaksanaan penjaluran diserahkan kepada Daerah.

Dekrit Presiden tertanggal 5 Djuli 1959, untuk kembali ke U.U.D. 1945, jang disusul dengan pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 sebagai pendjelasan dan pertanggungan-djawab terhadap dekrit tersebut, membawa perobahan jang fundamentil dalam sendi ketata-negaraan di Indonesia, jaitu dari azas liberalisme mendjadi demokrasi terpimpin.

Kemudian dengan dibentuknja Kabinet Kerdja pada tanggal 13 Djuli 1959, maka timbul pula perobahan dalam wewenang pelaksanaan penjaluran perusahaan. Dalam Kabinet Kerdja kita

djumpai Menteri-menteri Inti dan Menteri-menteri Muda. Kementerian Perindustrian dibagi lagi dalam Departemen Perindustrian Rakjat dan Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan dibawah naungan Kompartemen Pembangunan. Wewenang pelaksanaan penjaluran perusahaan jang ada ditangan Menteri Muda Perindustrian Rakjat, hanja meliputi perusahaan jang ada dalam lingkungan kekuasaannja berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Muda Perindustrian Dasar/Pertambangan dan Menteri Muda Perindustrian Rakjat No. $\frac{\text{2354a/M/Perdatam}}{\text{2550/M/Perindra}}$ tentang pembagian tugas/wewenang Deperindra/Deperdatam.

Dengan Keputusan Presiden No. 21 tahun 1960, tertanggal 18 Pebruari 1960, maka istilah Menteri Muda dirobah mendjadi Menteri, sehingga Menteri Muda Perindustrian Rakjat dirobah djuga mendjadi Menteri Perindustrian Rakjat.

Hal ini perlu diperhatikan dalam meneliti perkembangan peraturan-peraturan.

Selandjutnja kami hanja menguraikan perkembangan B.R.O. jang menjangkut kehidupan industri rakjat.

Untuk memberi perangsang pada perkembangan dan pertumbuhan dibidang perindustrian rakjat, maka Menteri Perindustrian Rakjat mengeluarkan surat Keputusan Menteri Perindra tanggal 28 Djuli 1964, No. 207/SK/VII/64, jang menetapkan sebagai berikut:

1. mentjabut semua surat-surat keputusan jang telah dikeluarkan atas nama Menteri Perindustrian atau Menteri Perindustrian Rakjat jang mengatur ketetapan tentang penjaluran perusahaan-perusahaan industri jang termasuk wewenang Menteri Perindustrian Rakjat beserta peraturan-peraturan pelaksanaannja, ketjuali Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tanggal 3 September No. $\frac{\text{2077/M/Perind.}}{\text{2430/M/Perdag.}}$
2. mentjabut surat keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tanggal 23 Desember 1963, No. 189/Sk/XII/63, dan Surat Keputusan Menteri Perindra tanggal 12 Pebruari 1964, No. 48/SK/II/64.
3. menetapkan ketentuan penjaluran seperti berikut:
   a. Perusahaan-perusahaan industri jang telah didirikan se-

belum surat keputusan ini, diwadjibkan mendaftarkan diri selambat-lambatnja pada tanggal 1 Djanuari 1965 pada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dimana perusahaan itu berada.

b. perusahaan-perusahaan industri jang akan didirikan sesudah dikeluarkannja surat keputusan ini, diwadjibkan mendaftarkan diri pada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II, dimana perusahaan itu berada, dalam waktu 3 bulan sesudah saat perusahaan dalam keadaan siap lengkap.

c. Instansi-instansi jang menerima pendaftaran pada a dan b, harus memberikan izin selambat-lambatnja 1 bulan setelah saat penerimaan pendaftaran.

d. Diketjualikan dari pendaftaran dan masih diharuskan memiliki surat izin lebih dulu berdasarkan B.R.O. 1934, ialah:
   1. perusahaan-perusahaan tersebut dalam surat keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tanggal 3 September 1957, No. $\frac{\text{2077/M/Perind.}}{\text{2430/M/Perdag.}}$
   2. perusahaan batik tjap.
   3. „ spiritus alkohol.
   4. „ minuman jang mengandung alkohol.
   5. „ mimis senapan angin.
   6. „ kembang api, petasan dan barang-barang lainnja jang mengandung bahan peledak.
   7. „ pertjetakan.
   8. „ sigaret.
   9. „ pengetjoran besi.
   10. „ pertekstilan.
   11. pabrik es.

e. dari perusahaan-perusahaan tersebut pada sub d, jang pelaksanaan penjalurannja masih dipegang oleh Pusat ialah:
   1. perusahaan-perusahaan tersebut dalam surat keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tanggal 3 September 1957, No. $\frac{\text{2077/M/Perind.}}{\text{2430/M/Perdag.}}$

2. perusahaan pertjetakan (asing).
3. „ sigaret (asing).
4. „ pengetjoran besi (asing).
5. „ pertekstilan (asing).
6. pabrik es.

Sisanja, pelaksanaan penjalurannja diserahkan pada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, menurut pedoman dan tata-tjara jang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat.

Kemudian surat keputusan Menteri Perindra No. 207/SK/VII/64, disusul dengan surat keputusan Menteri Perindra No. 210/SK/VIII/64 diubah dengan surat keputusan Menteri Perindra No. 210a/SK/IX/64, jang mengatur tata-tjara pelaksanaan pendaftaran dan permohonan izin.

Akibat dari tjara penjaluran gaja baru jang meringankan para tjalon pengusaha ini, ialah timbulnja perusahaan-perusahaan jang didirikan. Hal ini sangat menggembirakan, karena ini berarti kemadjuan dalam kehidupan industri.

Pun pada waktu ini sedang disiapkan Rentjana Undang-undang Pendirian Perusahaan, jang berdjiwa Nasional dapat mengatur terlaksananja Politik Negara dibidang ekonomi antara lain:

a. mendjamin kepastian hukum dan menertibkan kelangsungannja perusahaan demi kehidupan industri untuk kepentingan rakjat Indonesia.

b. mentjerminkan fungsi sosial dari perusahaan dan azas kekeluargaan.

c. memberi perangsang dalam pertumbuhan usaha-usaha Nasional.

Perentjana undang-undang ini sudah dalam taraf mendekati penjelesaian. Mudah-mudahan dalam waktu jang tidak lama lagi Undang-undang Pendirian Perusahaan dapat dikeluarkan, demi kepentingan perkembangan dunia industri di Indonesia.

C. BEBERAPA PERATURAN LAINNJA JANG ADA HUBUNGANNJA DENGAN PERINDUSTRIAN.

Disamping peraturan penjaluran jang biasa disebut B.R.O. itu, maka untuk mendirikan perusahaan harus dipenuhi sjarat-sjarat lain, antara lain jaitu:

— Undang-undang Gangguan Umum (Hinderordonnantie); Undang-undang ini dimuat dalam Staatsblad 1926 No. 226, mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1926. Undang-undang diadakan guna mentjegah adanja bahaja, kerusakan-kerusakan atau gangguan jang mungkin akan timbul disekitar tempat dimana perusahaan itu didirikan.

— Peraturan izin bangunan dari Djawatan Pekerdjaan Umum (bouwvergunning).

Setelah perusahaan berdiri maka perlu diperhatikan pula:

1. Peraturan-peraturan perburuhan antara lain:
   — perdjandjian kerdja.
   — undang-undang kerdja.
   — undang-undang pengawasan perburuhan.
   — undang-undang ketjelakaan.
   — undang-undang tentang penjelesaian perburuhan.
   — undang-undang tentang penempatan tenaga asing.

2. Undang-undang barang, peraturan-peraturan lalu-lintas devisa bagi perusahaan-perusahaan jang mengerdjakan ekspor. Lain dari pada itu masih ada peraturan jang merupakan perangsang atau bantuan bagi hidupnja industri antaranja:
   — pembebasan untuk sebagian atau seluruhnja, atau pengembalian dari bea keluar atas hasil-hasil tertentu dari keradjinan/perindustrian dalam negeri, djika kepentingan perekonomian menghendakinja, untuk paling lama setahun permohonan pembebasan harus disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Perindustrian.
   — pembebasan/pengembalian bea masuk, untuk mesin-mesin atau pesawat-pesawat guna perlengkapan perusahaan-perusahaan industri baru, atau bagian-bagian dari perusahaan-perusahaan jang telah ada dengan maksud membuat hasil-hasil jang baru beserta untuk bahan-bahan dasar jang digunakan dalam perusahaan-perusahaan atau bagian-bagian dari perusahaan-perusaan itu untuk djangka waktu jang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk paling tinggi 2 tahun lamanja, sepandjang menurut pendapat Menteri Keuangan pemberian pembebasan atau pengembalian itu adalah untuk kepentingan ekonomi Indonesia (L.N. 1952 No. 44).
   — Indische Tariefwet, dan peraturan-peraturan pelaksanaannja sebagian besar dikeluarkan oleh Direktorat Bea

dan Tjukai, mengadakan kemungkinan djuga untuk membebaskan atau mengurangi bea masuk dari bahan-bahan jang dipergunakan untuk industri antara lain chemicalian dan lain sebagainja.

— Potensi kepada produksi dalam negeri untuk impor barang-barang jang sudah tjukup dihasilkan tidak disediadakan devisa lagi (Lampiran II A.P.P., No. 31 tahun 1960).

— Pembebasan tjukai sebagian terhadap hasil tembakau (Peraturan Menteri Keuangan tanggal 1 Djuni 1961, No. BUPP 1.5.47).

— peraturan-peraturan bantuan kredit.

— „ „ mekanisasi.

Demikianlah sekedar peraturan-peraturan lain jang menjangkut perindustrian. Dalam hal ini Departemen-departemen lain jang berwenang akan memberikan sumbangannja masing-masing dalam menguraikan peraturan-peraturan tersebut setjara terperintji.

IV. BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI.

A. PERANAN INDUSTRI DI INDONESIA SEBELUM PROKLAMASI KEMERDEKAAN.

1. **Masa sebelum pendjadjahan Belanda:**

Sebelum bangsa Belanda mengindjakkan kakinja dibumi Indonesia, maka tidak ada satupun barang-barang kebutuhan rakjat didatangkan dari lain negara. Semua keperluan barang-barang hasil buatannja sendiri hasil tetesan keringatnja sendiri. Ala-alat pertanian ditjukupi oleh pandai-pandai besi jang telah ada, sandang ditjukupi dengan menanam kapas dan serat-serat lainnja untuk kemudian dipintal dan ditenun sendiri dengan alat tenun buatan sendiri.

Persuteraanpun sudah dikenal waktu itu. Bukti-bukti hidup masih dapat disaksikan dimesium-mesium baik di Indonesia maupun diluar negeri. Dimesium Tokio misalnja terdapat satu helai kain sutera buatan Indonesia jang sudah berabad-abad umurnja. Penghidupan utama dari masjarakat ialah bertjotjok tanam dan berdagang hasil bumi. Pengetahuan dibidang teknik belum madju. Namun pada waktu kedjajaan keradjaan-keradjaan di Indonesia benar-benar bangsa kita berdiri diatas kaki sendiri. Negara Indonesia terkenal sebagai negara jang subur makmur, murah sandang, murah pangan, gemah-ripah loh djinawi, subur kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku.

2. **Masa pendjadjahan Belanda:**

Berkat kesulitan-kesulitan akan penghidupan maka bangsa-bangsa Belanda berhasil mentjapai pengetahuan jang tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa di Asia umumnja. Sajang tingkat pengetahuan jang tinggi itu memberikan nafsu untuk mendjadjah bangsa lain. Demikian kedjadian dibumi Indonesia, dengan pertama-tama hanja dengan dalih berdagang dengan membawa barang-barang buatan Eropa jang belum dikenal oleh bangsa kita, mulailah mereka masuk ke Indonesia. Ternjata usahanja dengan susah pajah berhasil djuga. Dengan tjara-tjara tukar-menukar dengan hasil bumi Indonesia, barang-barang impor mulai tersebar diseluruh Indonesia. Berkat kelitjikan dan keahlian berdagang jang dimiliki oleh bangsa Eropa pada waktu itu maka Rakjat Indonesia dapat terpengaruh oleh

barang-barang impor dan achirnja usaha-usaha keradjinan rakjat terdesak oleh mengalirnja barang-barang dari negara Eropa. Setelah bangsa Belanda benar-benar mendjadjah Bangsa Indonesia, tidak hanja dalam bidang perekonomian akan tetapi djuga dibidang pemerintahan, maka pemerintah djadjahan Belanda menggariskan politik dimana struktur ekonomi agraris tetap dipertahankan.

Pendjadjah tetap mengharapkan supaja Bangsa Indonesia selalu menggantungkan diri dari barang-barang hasil luar negeri. Indonesia jang berpenduduk tidak sedikit pada waktu itu, merupakan pasaran jang tjukup besar bagi orang-orang Belanda. Lebih djauh dari itu kelitjikan imperialis Belanda, bahan-bahan baku dari Indonesia jang diolah dinegerinja guna menambah employment masjarakat Belanda didjual kembali ke Indonesia dimana rakjat hanja diberi kesempatan untuk hidup dengan sebenggol sehari. Mereka berusaha tetap mengeruk keuntungan dari hasil produksi bahan mentah kita, dan mengeruk keuntungan dari hasil perdagangannja. Akibat dari ini industri dalam negeri tidak berkembang. Sandang diimpor atau kalaupun ada industri tenun, benangnja mereka impor, sehingga kapas dan serat-serat lainnja sebelumnja sudah bisa diusahakan sendiri, waktu pendjadjahan tak perlu dipikirkan lagi. Indonesia mendjadi pasaran barang djadi dan lumbung bahan baku.

Walaupun negeri Belanda sendiri tidak ada kesanggupan untuk memperkembangkan industrinja disebabkan terlalu miskin akan natural resources, namun dengan koloninja jang kaja raja akan bahan mentah negeri Belanda dapat memberikan landasan jang kuat untuk perkembangan industri. Mengingat aspek-aspek lain dimana perkembangan industri Belanda tidak lagi memungkinkan dan akibat surplus kapital, maka mulailah penanaman modal Belanda di Indonesia jang chusus untuk mendirikan industri-industri produk tertentu, umpamanja upgrading mutu karet dan hasil perkebunan lainnja, industri barang-barang konsumsi, pabrik-pabrik gula, industri perbengkelan untuk maintenance perkebunan dan sebagainja.

Hal ini disebabkan pula karena pasaran jang makin luas dari hasil produksi industri tersebut dinegara-negara Asia lainnja. Dengan bertindak demikian, tudjuan pendjadjah adalah tetap untuk mendapatkan keuntungan jang lebih besar. Djelaslah njawa imperialis Belanda di Indonesia ialah karena Indo-

nesia merupakan gudang bahan baku dan merupakan daerah eksploitasi untuk kapital mereka jang berlebihan. Djelas pula usaha-usaha bangsa kita sendiri tidak diberi kesempatan, sedangkan usaha menanamkan surplus kapital mereka/luar negeri/asing, makin meluas. Menurut perkiraan seorang sardjana Barat sendiri, pada waktu penjerahan kedaulatan (achir 1949) hanja 19% dari modal swasta dibidang bukan pertanian berada ditangan orang Indonesia, selebihnja ditangan bangsa asing :± 50% dari impor barang-barang konsumsi diselenggarakan oleh 4 perusahaan Belanda dan 60% dari kegiatan ekspor ditangan perusahaan asing. Bank Central Javasche Bank dimiliki Belanda, sedangkan sebagian besar Bank-bank swasta dikuasai oleh perusahaan asing (perkapalan, perminjakan, perkebunan dan lain-lain). Kepentingan industri hanja tjukup diurus oleh suatu bagian dari Departemen van Economische Zaken; sehingga tidak memungkinkan untuk mendapat iklim jang baik bagi perkembangan industri, chususnja industri nasional. Demikianlah sistim pendjadjahan Belanda jang sangat merugikan bagi perkembangan perindustrian nasional.

3. **Zaman pendudukan Djepang:**

Pengalaman kita dalam zaman pendjadjahan Djepang, lebih menjedihkan. Seribu satu kesulitan dialami oleh bangsa Indonesia. Tetapi berkat kesulitan-kesulitan jang dialami timbul banjak inisiatif, sehingga aktu itu kita benar-benar berdiri diatas kaki sendiri. Barang-barang impor tidak ada. Bahan mentah jang di-eksploitir tidak terbatas pada barang-barang ekspor jang kuat sadja seperti karet, gula, kopi, teh dan lain-lain, tapi djuga jang lemah seperti bidji djarak, iles-iles, hasil tambang-tambang ketjil. Namun kegiatan-kegiatan tersebut tidak lain ditudjukan untuk kepentingan pertahanan Djepang sendiri. Dengan tekanan ekonomi jang demikian berat itulah memberikan dorongan kepada kita untuk berdiri diatas kaki sendiri, mentjukupi kebutuhan dari hasil djerih-pajah dan tjutjuran keringat sendiri. Inisiatif rakjat timbul kembali, menggali kembali kepandaian-kepandaian jang dimiliki sebelum zaman pendjadjahan Belanda; mulai dari produksi sandang, produksi alat-alat pertanian, produksi barang-barang konsumsi, kertas, karet dan lain sebagainja sampai pada usaha-usaha mendapatkan substitute untuk bahan pangan.

Dengan demikian walaupun bangsa kita menderita hebat, namun keuletan dalam tjara memenuhi kebutuhan sendiri mem-

berikan kemampuan untuk bertahan jang luar biasa. Achirnja pada zaman pendudukan Djepang, bangsa kita bisa mentjukupi segala kebutuhan sendiri. Hal ini merupakan landasan jang kuat untuk perkembangan industri selandjutnja. Keadaan dan semangat bertahan ini diteruskan pada waktu revolusi (1945-1950) dimana negara kita belum ada kesempatan untuk mengatur lalu-lintas perdagangan dengan negara-negara sahabat.

B. PERKEMBANGAN PERINDUSTRIAN RAKJAT SETELAH INDONESIA MERDEKA.

1. Setjara umum faktor-faktor jang mempengaruhi dan usaha-usaha perkembangan industri rakjat.

Sebagai akibat dari pendjadjahan Belanda sebagaimana kita uraikan diatas maka perkembangan dibidang industri sangatlah lambat. Indonesia pada waktu Proklamasi Kemerdekaan dapat digolongkan dalam negara-negara jang masih underdeveloped, sebagian besar industri-industri ketjil dan keradjinan rakjat mempunjai pasaran jang sangat sempit dan terbatas pada daerah sekelilingnja.

Untuk memperkembangkan industri, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah jang sesuai dengan tudjuan revolusi kita, langkah-langkah jang seirama dengan tingkat dan derap langkahnja perdjoangan kita, langkah-langkah jang dapat memenuhi Amanat Penderitaan Rakjat. Revolusi Bangsa Indonesia jang multi-kompleks ini memberikan berbagai aspek dalam pertumbuhan industri, namun tetap disadari bahwa peranan (penanaman) dari industri-industri rakjat dalam rangka ekonomi nasional adalah sangat penting, bahkan dapat dikatakan merupakan alas terhadap kemadjuan-kemadjuan disegala bidang ekonomi antaranja:

— bidang moneter,
— tingkat hidup dari masjarakat,
— memberi lapangan kerdja.

Pada masa perdjoangan physik Bangsa Indonesia menaruhkan segala djiwa-raganja untuk memenangkan revolusi, maka tidak terlepas dari perdjuangan jang lebih hebat ialah tetap bertahan terhadap segala kekurangan. Demi ketahanan revolusi segala daja dan tenaga dikerahkan untuk dapat berdiri diatas kaki sendiri. Walaupun aparat-aparat Pemerintah belum berdjalan sebagaimana mestinja, namun berkat kesadaran masjarakat jang ber-revolusi pada umumnja mereka berusaha sendiri-sendiri tanpa mengharapkan bantuan.

Dimana-mana timbul usaha-usaha rakjat. Kementerian Kemakmuran jang berkedudukan di Jogjakarta dengan Djawatan Perindustriannja memberikan perhatian sepenuhnja kepada usaha-usaha industri jang menggunakan bahan-bahan baku dari dalam negeri, penggalian kembali kepandaian kita sebelum zaman pendjadjahan timbul dimana-mana.

Dalam mentjukupi kebutuhan sandang, walaupun ada kesulitan dalam persoalan bahan baku, namun dengan tekun usaha-usaha rakjat dengan bahan apa jang dapat diperoleh dalam negeri, kapas dengan tjara pemintalan jang sederhana, kemudian ditenun dengan alat-alat tenun jang telah dikenal sedjak nenek mojang kita. Warisan kepandaian ini membuat kita tetap bertahan dengan semangat berdiri diatas kaki sendiri, demikian pula halnja dengan pembuatan alat-alat pertanian, pembuatan barang-barang dari karet, kulit, kaju, pembuatan kertas sederhana dan sebagainja. Balai-balai penjelidikan mulai berdiri di Jogjakarta untuk penjelidikan mutu bahan baku, hasil produksi dan lain-lain jang diangap perlu dalam perkembangan industri. Pada periode Revolusi Physik 1945-1950 kegiatan dalam bidang industri dan usaha-usaha menghasilkan barang-barang substitute madju dengan pesat.

Lapangan industri jang pada umumnja untuk sebagian besar terdiri dari industri-industri ketjil memberi kemungkinan besar akan berkembang dengan baik, apalagi dengan dikaruniannja bangsa kita bahan-bahan mentah jang berlimpah-limpah dimana-mana memberi dorongan kearah tertjapainja maksud maksud diatas.

Achirnja berkat keuletan rakjat, berkat usaha jang tidak ada putus-putusnja, berkat tekad untuk berdiri diatas kaki sendiri, achirnja bangsa kita dapat memenangkan revolusinja.

Setelah penjerahan kedaulatan tahun 1949 maka pemerintah pusat dipindahkan ke Djakarta. Kementerian Kemakmuran didjelmakan mendjadi Kementerian Perekonomian. Djawatan Perindustrian jang termasuk dalam wewenangnja dibagi dalam 3 bagian dan Djawatan-djawatan inspeksi.

1. Bagian Pembatasan,
2. Bagian Perbekalan,
3. Bagian Penjuluhan,
4. Djawatan Inspeksi didaerah-daerah.

Susunan ini dibentuk dengan maksud agar djawatan perindustrian rakjat dapat memberikan pelajanan jang sebaik-baiknja

guna perkembangan industri nasional. Namun bukanlah dinamakan suatu perdjuangan bilamana semuanja djalan dengan lantjar. Kesulitan jang satu disusul dengan kesulitan jang lain. Suatu peristiwa jang sangat memberi tekanan terhadap perkembangan industri ialah dengan timbulnja perang Korea pada tahun 1950. Negara mempunjai surplus devisa jang tjukup besar.

Namun dengan bersimaharadjalelanja pentolan-pentolan liberal jang dipelopori oleh gembongnja Sumitro, modal devisa berharga ini tidaklah diinvestir dalam projek-projek ekonomi maupun projek-projek nation building, akan tetapi djustru memberikan dorongan kepada pengusaha untuk mengalihkan perhatian ke sektor perdagangan impor. Barang-barang konsumsi banjak diimpor dari luar negeri, jang memukul produksi dalam negeri. Walaupun menghadapi vested interests pada masa itu, namun Korps Pembangun Industri Rakjat berusaha sekuat tenaga untuk mengadakan bimbingan dalam lapangan industri jang lebih sempurna dari tahun-tahun sebelumnja. Dilihat dari sudut djumlah industri ketjil diseluruh Indonesa, hasil produksi dari pelbagai djenis industri ketjil ini jang dapat memenuhi segala kebutuhan sehari-hari tidak dapat diabaikan. Pengaturan untuk pemeliharaan dari perkembangan industri mendjadi tugas dari Djawatan Perindustrian.

Bantuan-bantuan diberikan kepada sektor industri berupa:

— bantuan dalam organisasi,
— bantuan dalam pembiajaan,
— bantuan dalam penjediaan bahan-bahan baku, bahan penolong dan spare-parts,
— bantuan dalam lapangan pendidikan,
— bantuan dalam bentuk mekanisasi industri supaja mutu dan bentuk dapat dipertinggi atau diperbaiki.

Untuk mewudjudkan usaha-usaha tersebut diatas maka langkah pertama jang diambil oleh Pemerintah setelah selesainja Revolusi Physik ialah bentuk induk-induk perusahaan. Induk-induk perusahaan ini ditempatkan didaerah-daerah dimana pada umumnja masjarakat sekelilingnja sudah ada aktivitas dalam bidang industri sedjenis. Dengan didirikannja induk-induk ini, maka diharapkan membantu masjarakat industri dalam hal:

— pemilihan dan pengumpulan bahan baku,
— upgrading daripada hasil produksi, baik dalam tjara-tjara kerdja pendahuluan, maupun penjelesaiannja (finishing),

— mendidik tenaga-tenaga kerdja untuk bekerdja lebih produktif,
— memberikan bantuan kredit bahan baku,
— membantu dalam mentjarikan pasaran.

Pertama-tama direntjanakan untuk mendirikan induk pertjontohan sebanjak 8 matjam industri (1951-1953) jaitu:

1. Tekstil,
2. Kulit,
3. Keramik,
4. Pengerdjaan kaju,
5. Barang-barang besi,
6. Kemenjan,
7. Pajung,
8. Barang-barang karet,

dengan disediakan biaja sebesar Rp. 16.966.000,— untuk 2 tahun (tahun 1951 dan 1952).

Dari rentjana tersebut jang direalisasikan adalah induk-induk pertjontohan:

1.	Kulit	3 buah
2.	Pengerdjaan kaju	2 buah
3.	Keramik	3 buah
4.	Besi	7 buah
5.	Tekstil	2 buah
6.	Pajung	1 buah

Untuk masa tahun 1951-1953 induk-induk ini pada umumnja memberikan bantuan jang besar sekali pada perkembangan industri setempat sesuai dengan apa jang ditjita-tjitakan.

Persoalan permodalan bagi industri-industri ketjil jang pada umumnja mengalami kesulitan mendapat perhatian pula dari Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah menjediakan kredit-kredit ketjil jang dilaksanakan oleh pelbagai badan pemerintah atau semi pemerintah, antara lain: Jajasan Djaminan Kredit, B.K.T.N., Fonds Industri Ketjil.

Dalam bidang-bidang tertentu Pemerintah mengambil djalan lain, jakni dengan memberi kredit mekanisasi. Jang dimaksud ialah memberi bantuan kredit berupa mesin-mesin atau alat-alat untuk meninggikan mutu dari hasil produksi industri ketjil. Kebidjaksanaan ini diambil karena telah diketahui, bahwa para pengusaha dalam industri-industri ketjil biasanja meng-

gunakan peralatan jang sudah tua, jang tidak akan menghasilkan suatu produksi jang bermutu tinggi.

Walau dalam mentjari djalan lain guna memperkuat industri, maka oleh Djawatan Perindustrian pada tahun 1952 diusahakan djatah industri tersendiri.

Dengan pendjatahan chusus berupa bahan baku, bahan penolong, sparparts dan mesin-mesin, ditimbulkan iklim jang baik untuk perkembangan industri. Kesulitan-kesulitan jang dialami masjarakat industri terutama dengan tidak adanja keseimbangan antara impor bahan baku dan barang-barang djadi (konsumsi) achirnja dapat diatasi. Mulai saat itu industri nasional swasta mulai nampak madju dengan pesat dalam periode Challenge & Response (1956-1959).

Impor mesin-mesin produksi seperti mesin-mesin paku, unit-unit mesin pembuat alat-alat listrik dan kawat listrik, unit mesin pembuat alat-alat sepeda, unit mesin untuk workshop, unit mesin untuk grafika, unit mesin untuk minjak kelapa, unit mesin tekstil, dan lain-lain, banjak dilaksanakan pada tahun 1953-1957.

Djatah jang berupa bahan baku memberikan effek jang besar sekali baik dilihat dari sudut pertumbuhan industri, penambahan employment maupun dari sudut penghematan devisa. Keuntungan-keuntungan jang diperoleh perusahaan-perusahaan industri memberikan keleluasaan untuk investasi-investasi baru berupa replacement mesin-mesin atau perluasan perusahaan.

Pengalaman-pengalaman dinegara-negara lain membuktikan bahwa kemakmuran masjarakat tidak dapat ditjapai dengan hanja bertani sadja atau bertjotjok tanam sadja, atau dengan perkataan lain hanja menitik beratkan perkembangan ekonominja kepada sifat suatu negara jang agraris sadja. Tanpa kemadjuan dalam bidang industri masjarakat jang adil dan makmur tidak akan lekas tertjapai. Negara kita jang kaja raja dengan hasil bumi, masih kaja akan tanah kosong, terlalu kaja akan sumber-sumber alam mempunjai harapan jang besar sekali untuk perkembangan dalam kedua faktor ini. Perkembangan dibidang pertanian dan agraria, dan dibidang perindustrian.

Oleh karena itu pada tahun 1955 pemerintah menganggap perlu untuk memetjahkan Kementerian Perekonomian mendjadi 3 Kementerian jakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian, dengan tudjuan agar

masing-masing bidang dapat dikembangkan lebih leluasa. C.K.I. (Central Kantor Impor) dibubarkan dan sebagai gantinja didirikan Biro Devisen Perdagangan sebagai bagian dari Kementerian Perdagangan.

Akibat dari pemetjahan ini maka djatah-djatah industri tidak lagi melalui Djawatan Perindustrian, tetapi langsung diurus oleh B.D.P. Namun persediaan devisa jang masih lumajan sampai tahun 1957 memberikan iklim jang baik bagi sektor perindustrian.

Produksi tekstil mentjapai rekor pada tahun 1955-1957. Perkembangan industri-industri swasta sangat madju pada waktu jang sama. Demikianlah achirnja setelah tahun 1957 produksi agak mundur. Berbagai kesulitan timbul dalam pelaksanaan peng-imporan bahan baku.

Kembali disini Djawatan Perindustrian memegang peranan penting dalam perdjoangannja untuk mendapatkan djatah alokasi devisen tersendiri jang achirnja baru berhasil pada tahun 1958. Akibat dari kekurangan devisa maka pada umumnja produksi agak menurun sampai tahun 1959. Mengingat makin meluasnja peranan industri dalam perkembangan ekonomi negeri kita, maka Presiden/Pemimpin Besar Revolusi menganggap perlu untuk membentuk dua buah Departemen jang mengurus bidang industri, jakni Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan serta Departemen Perindustrian Rakjat.

ANGKA-ANGKA IMPOR ANTARA TAHUN 1952-1962
(DALAM DJUTAAN DOLLAR US).

Tahun	Djumlah	Barang-barang Konsumsi	Bahan Baku	Barang Modal
1952	949	468	307	174
1953	765	327	287	151
1954	629	236	267	125
1955	630	187	330	113
1956	860	357	335	167
1957	803	256	381	166
1958	544	176	251	117
1959	482	145	234	103
1960	574	213	235	126
1961	794	255	345	194
1962	644	180	241	223

Perindustrian rakjat mempunjai kedudukan penting dalam pembangunan sosialisme ditanah-air kita dan oleh karena itu sesudah kita kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dan ditetapkannja MANIPOL sebagai landasan Negara, maka pembentukan Departemen Perindustrian Rakjat ini merupakan manifestasi jang besar sekali bagi tertjapainja tjita-tjita revolusi kita. Sebagai selalu diutjapkan oleh P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi bahwa bangsa Indonesia dikurniai oleh Allah s.w.t. dengan sumber alam jang bangsa lain tidak mempunjainja.

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa didunia ini jang paling kaja raja. Tjuma kita harus bekerdja, harus beladjar, harus menggunakan kita punja aktivitas berdasarkan shelfhelp untuk menggali segala kekajaan alam itu, mengolah segala kekajaan itu, sehingga benar-benar kita mendjadi suatu bangsa jang tata tentrem, kerta rahardja gemah ripah loh djinawi, subur kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku. Dan agar supaja kita benar-benar mendjadi suatu bangsa jang kuat. Peranan perindustrian rakjat adalah amat penting sekali. Setelah Perindustrian Rakjat mendapat ruang gerak jang lebih leluasa, maka sedjak tahun 1960—1962 angka-angka produksi menundjukkan kenaikan jang pesat. Keinginan untuk berindustri dari masjarakat makin meluas. Permohonan pendirian industri hampir-hampir tak terlajani oleh Bagian Penjaluran Perusahaan.

Pada achir tahun 1964 tertjatat ± 80.000 perusahaan jang terdiri dari 800 djenis termasuk assembling dan keradjinan rakjat. Pertumbuhan industri chususnja dalam sektor sandang, industri plastik, industri logam, madju dengan pesat. Sektor industri plastik tertjatat sangat menondjol, antara lain disebabkan karena plastik merupakan subtitute jang sangat murah untuk bahan-bahan lain, seperti kulit, kaju, logam dan sebagainja.

Disamping harganja jang murah, mudah dikerdjakan dan mudah disesuaikan dengan keinginan masjarakat, baik dalam aneka ragam bentuk maupun warnanja. Inisiatif pembuatan mesin-mesin plastik dalam negeri timbul, guna memenuhi kebutuhan masjarakat jang makin meningkat. Bidang keradjinan rakjat jang sudah lama terlupakan itu mendapat perhatian husus dari Menteri Perindustrian Rakjat Major Djendral Azis Saleh, sehingga dalam sektor ini nampak kemadjuannja, baik produksi untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk mulai diekspor. Peranan industri dan keradjinan rakjat dalam New

York World's Fair 1964 tidak sedikit. Sukses-sukses jang ditjapai adalah djustru karena hasil keradjinan rakjat jang memberikan daja menarik dalam paviljun Indonesia disana. Penggalian kembali keterampilan nenek mojang kita semakin nampak dengan njata. Dalam usaha untuk swasembada sandang, keradjinan rakjat tidak mau ketinggalan. Industri ulat sutera jang telah lama dilupakan, mulai tumbuh lagi sebagai tjendawan dimana-mana. Untuk mengintensifkan usaha-usaha keradjinan rakjat disamping peningkatan penjuluhan perindustrian dipelosok-pelosok didirikan Jajasan Kebudajaan & Keradjinan Rakjat (Jakindra) sebagai sponsor/penggerak keradjinan rakjat.

Kerdjasama antar Departemen dalam rangka berdiri diatas kaki sendiri diperluas; jang dititik-beratkan pada production approach. Hasil-hasil jang positif diharapkan dalam waktu jang dekat.

2. **Perkembangan Industri Tekstil di Indonesia.**

a. **Pemintalan.**

Perkembangan industri pemintalan di Indonesia dapat dinilai tidak setjepat seperti industri-industri sandang lainnja. Sektor industri pemintalan tidak dapat dilaksanakan setjara luas oleh badan-badan swasta seperti halnja industri pertenunan, industri peradjutan dan lain-lain.

Hal demikian disebabkan, karena antara lain :

— Industri pemintalan memerlukan modal jang besar.
— Mesin-mesin hampir seluruhnja belum bisa dibikin didalam negeri dan harus diimpor.
— Keterampilan dan keahlian sangat chusus dan lain-lain.

Keadaan pertumbuhan/perkembangan jang sangat lambat disektor pemintalan ini mengakibatkan makin pintjangnja keseimbangan antara sektor pertenunan dan sektor pemintalan jang sebagaimana kita ketahui bahwa hasil produksi pemintalan ini digunakan untuk mensupply industri-industri pertenunan. Dengan demikian untuk mendjaga kelangsungan hidup industri-industri pertenunan dinegara kita ini terpaksa sebagian besar bahan baku jang berupa benang tenun masih menggantungkan pada impor dari luar negeri.

Dibawah ini dapat dilihat bagaimana perkembangan industri-industri pemintalan dinegara kita selama ini.

Dalam daftar dibawah ini, kolom 5, dapat dilihat bahwa sampai saat ini industri pemintalan dinegara kita ini baru mentjapai kapasitas 241.076 mata pintal jang sudah menghasilkan,

dan apabila dapat bekerdja penuh 3 regu kerdja, maka dalam 1 tahun dapat menghasilkan ± 24.000 ton benang tenun.

Industri pertenunan kita mampu untuk menenun sebanjak ± 140.000 ton. Djadi produksi pemintalan kita baru mampu mensupply ± 17% kebutuhan benang tenun untuk industri pertenunan kita.

Diharapkan dalam tahun ini dan tahun depan dapat diselesaikan 9 unit industri pemintalan jang mempunjai kapasitas 235.000 mata pintal; ini berarti suatu tambahan ± 15% dari seluruh kebutuhan benang tenun.

Djadi apabila 9 projek pemintalan tersebut telah selesai semua, seluruh kapasitas akan mentjapai 476.076 mata pintal, jang berarti baru dapat menghasilkan 31% dari seluruh kebutuhan benang tenun.

Sebagian besar industri-industri pemintalan baik jang telah berdjalan maupun jang sedang dalam taraf pembangunan adalah keppnjaan Pemerintah.

b. **Pertenunan.**

Balai Penjelidikan Tekstil didirikan pada tahun 1930 dan pada sekitar tahun 1935 tertjiptalah A.T.B.M. jang pertama kali di Indonesia, Perkembangan industri pertenunan tidaklah setjepat menurut kebutuhan masjarakat Indonesia sehingga sebagian besar dari kebutuhan sandang masih tetap diimpor.

Menurut tjatatan dari Biro Pusat Statistik maka pada tahun 1952 ternjata djumlah perusahaan 367, djumlah A.T.B.M. 25.417 dan djumlah A.T.M. 9.738 buah.

Berkat bimbingan dan bantuan dari Pemerintah maka setelah Indonesia merdeka setiap tahun djumlah industri makin bertambah, sehingga sampai achir tahun 1964 telah tertjatat tidak kurang dari 3000 perusahaan dengan djumlah alat-alat menurut taksiran P.A.T. 25.000 A.T.M. dan tidak kurang dari 200.000 A.T.B.M.

Mengingat selalu kurang tersedianja bahan baku sandang jang sebagian besar masih harus diimpor maka produksi maksimal tidak pernah tertjapai.

Rata-rata produksi hanja 60% dari kapasitas potensiilnja. Dalam rentjana Pembangunan Semesta Berentjana Tahapan Pertama telah ditetapkan bahwa dalam tahun 1968 Indonesia harus dapat memenuhi distribusi sandang 15 m/cap.

PERKEMBANGAN PABRIK PEMINTALAN.

(1960-1961-1962-1963-1964).

Nama Pabrik	Jg telah ada pada tahun 1960	Pembangunan Pemintalan jang sudah selesai			Rentjana dalam tahun berikutnja	Letak Perusahaan	Kredit dari	Keterangan
		1961	1962	1963				
Tjilatjap	30.000	—	—	30.000		Tjilatjap	Nichimen	P.N. — P.R.
Djantara	31.528	—	—	—		Semarang	—	„
Siantar	6.000	—	—	—		Siantar	—	Rami/Swasta.
Texin	37.072	—	—	—		Tegal	—	P.N. — P.R.
Wisma Usaha........	8.600	2.000	—	—		Bandung	Djatah Devisen	Swasta.
Nebritex	16.876	—	—	6 000		Pasuruan	„	Bekas Perusahaan Inggris.
T.D Pardede........	1 000	15.200	14.800	—		Medan	„	Swasta.
G.K.B.I.	—	—	34.800	—		Jogiakarta	„	Koperasi.
Ba. P.T.	—	—	8.000	—		Bandung	„	P.N. — P.R.
Tjibadung	—	—	—	—	30.000	Bandung	Platss Brcs	.. }
Setjang	—	—	—	—	30.000	Magelang	„	.. }
Grati	—	—	—	—	30.000	Grati	„	Belum siap pembangunannja
Djakarta	—	—	—	—	30.000	Simpruk	Pampasan	sampai achir tahun 1964.
Tohpati	—	—	—	—	15.000	Bali	„	
Lawang	—	—	—	—	15.000	Lawang	„	}
Padang	—	—	—	—	25 000	Padang	R.R.T.	}
Bandjaran	—	—	—	—	30.000	Bandung	„	} x). Belum ada kepastian.
Djakarta	—	—	—	—	30.000	Djakarta	Maectes	}
—	—	—	—	—	30.000	—	Yugoslavia	}
—	—	—	—	—	46.000	—	Nichimen	}
—	—	—	—	—	30.000	Palembang	R.D.D.	}
Djumlah	131.076	17.200	56.800	36.000	341.000			
Djumlah kumulatif ..		148.276	205.076	241.076	582.076			

Menurut survey A.T.M. dari ahli-ahli Biro Pusat Statistik tahun 1962 dengan bahan pertama-tama rata-rata jang diberikan oleh Kantor Penjaluran Perusahaan jakni sebanjak 503 perusahaan dipulau Djawa dan Madura jang mempunjai A.T.M. sebanjak 16.926 buah. Dan 16 buah perusahaan diluar Djawa dengan A.T.M. sebanjak 671 buah dapat dinjatakan bahwa dari hasil survey mengenai djumlah mesin-mesin tidak berbeda djauh dengan lisensi jang dikeluarkan. Setjara estimate djumlah mesin-mesin menurut survey sebanjak 17.677 buah. Menurut kenjataan, hampir semua A.T.M. adalah semi automatic dan sebanjak 51% dari djumlah seluruhnja dipakai sedjak sebelum Perang Dunia ke-II. Djumlah A.T.M. rata-rata perperusahaan adalah 38 buah. Dari rata-rata 38 A.T.M. ini setiap harinja rata-rata dipakai 32 A.T.M. Regu jang bekerdja perhari rata-rata adalah sebanjak 124 regu. Rata-rata hari kerdja setahun adalah 280 hari. Hasil produksi rata-rata per-A.T.M. per-regu hanja 16.40 meter. Faktor-faktor utama jang menjebabkan tidak terpakainja semua A.T.M. adalah kurangnja benang tenun (80% dari djumlah perusahaan membutuhkan benang tenun lebih banjak), sukarnja terdapat spare-parts (lebih dari 55% perusahaan membutuhkan spare-parts), pekerdja terlatih (lebih dari 36% membutuhkan tenaga terlatih) dan kurangnja tenaga listrik (29% membutuhkan tenaga listrik jang lebih besar).

Karena itu keseluruhan produksi jang tertjapai adalah ± 110 djuta meter per-tahun sadja.

Djika kesulitan-kesulitan jang tersebut diatas dapat diatasi maka penggunaan A.T.M. dapat dilakukan lebih luas lagi. Menurut laporan-laporan jang diterima bila hal ini dapat diatasi, maka dapat terdjadi pemakaian A.T.M. sebanjak 11,8 djuta regu A.T.M. Ini berarti bahwa akan terdjadi pemakaian kesemua A.T.M. jang ada jaitu rata-rata 38 A.T.M. per-perusahaan dengan hasil kerdja sebanjak 290 hari setahun dengan 2 — á 3 regu tiap-hari.

Intensitas kerdja seperti diatas ini dapat menghasilkan produksi seluruhnja sebanjak 194 djuta meter kain tiap tahun.

Menurut Panitia Ahli Tekstil maka ditaksir tertjatat 25.000 A.T.M., dan equivalent dengan ini akan dapat dihasilkan 25.000 × 194 djuta meter = 275 djuta meter.

Sesuai dengan lisensi jang telah dikeluarkan oleh Kantor Penjaluran Perusahaan maka telah tertjatat tidak kurang dari

400.000 A.T.M. tersebar diseluruh Indonesia. Menurut taksiran Panitia Ahli Tekstil djumlah jang benar-benar ada ialah 200.000 buah. Kapasitas produksi setiap A.T.M. 10 m/hari. Hari kerdja efektif 1 tahun = 150 hari.

Djadi produksi jang dapat dihasilkan 200.000 × 10 × 150 m/tahun = 300 djuta m/tahun. Djumlah produksi jang dapat ditjapai maksimal sekarang dari sektor pertenunan = (275 + 300) djuta m/tahun = 575 djuta m/tahun. Dan oleh karena penambahan mesin-mesin ini merupakan mesin baru maka akan bekerdja lebih efektif, maka penaksiran lebih tepat kalau kapasitas diambil 300 djuta m tiap tahun. Menurut Panitia Ahli Tekstil perbandingan antara kapasitas produksi mesin-mesin radjut, A.T.M. dan A.T.B.M. adalah 2 : 4 : 5. Maka dengan demikian produksi maksimal jang dapat ditjapai dengan peralatan jang ada sekarang adalah 11/4 x 300 djuta meter = 825 djuta meter tiap tahun.

Dengan penambahan mesin-mesin spare-parts dan bahan baku jang setjukupnja antara tahun 1966 — 1967 maka ditaksir pada tahun 1968 kebutuhan 15 m/cap dapat dipenuhi.

Produksi pertenunan jang telah dapat dihasilkan sampai saat ini ialah dril, blatju, sarung, lurik, matting, pike, mori, tusor, kain pijama, kain kemedja, kèper, kain kasur, kain putih, poplin, strimin, selimut, selendang, taplak medja, serbet, setagen, sapu tangan dan lain-lain.

PLAFONDERING REKAPITULASI.

	Menurut Lisensi ada		Penetapan plafond baru		Pertambahan		Berkurang	
	A.T. B.M.	A.T.M. 1×lb. dan 2×lb.	A.T. B.M.	A.T.M. 1×lb. dan 2×lb.	A.T. B.M.	A.T.M. 1×lb. dan 2×lb.	A.T. B.M.	A.T.M. 1×lb. dan 2×lb.
Djakarta Raya	902	1.384	1.000	1.500	58	116	—	—
Djawa Barat	274.302	10.597	155.450	11.353	329	756	119.182	—
Djawa Tengah	75.349	2.676	70.295	5.293	12.756	2.617	17.810	—
Jogjakarta	15.258	94	16.094	1.050	836	956	—	—
Djawa Timur	37.572	2.766	58.900	6.200	21.328	3.434	—	—
Atjeh	120	—	4.000	400	3.880	400	—	—
Sum. Utara	4.127	594	19.735	1.700	15.608	1.106	—	—
Sum. Barat	2.534	174	15.000	1.400	12.668	1.226	202	—
Sum. Selatan	192	51	9.000	1.050	8.808	999	—	—
Kal. Barat	40	5	4.500	400	4.460	395	—	—
Kal. Tengah	—	—	1.500	150	1.500	150	—	—
Kal. Selatan	48	—	3.000	250	2.952	250	—	—
Kal. Timur	58	—	3.500	300	3.442	300	—	—
Sul. Ut./Tengah	—	—	5.000	550	5.000	550	—	—
Sul. Sel./Tengg.	6.083	36	26.500	1.650	20.417	1.614	—	—
Bali	521	77	5.000	450	4.479	373	—	—
Nusteng. Barat	347	—	4.000	300	3.653	300	—	—
Nusteng. Timur	25	—	6.000	600	5.975	600	—	—
Maluku	25	—	2.000	200	2.000	200	—	—
Irian Barat	—	—	1.000	350	1.000	350	—	—
INDONESIA:	417.454	18.454	411.474	35.146	131.189	16.692	137.194	—

Keterangan

Dasar² Penetapan Plafondering:

1. 15m/capita.
2. Penj. pabrik² tekstil.
3. Djumlah (kerapatan) penduduk.
4. Hasrat penduduk.
5. Keadaan daerah (minus/surplus).
6. Kemungkinan transmigrasi.
7. Skill (historisch) penduduk.

Tjatatan:

Chusus A.T.B.M. jang telah dapat lisensi/legalisasi untuk Daerah Djabar peralatannja 50% (lihat sebagian hasil „Operasi Budi" di Djabar awal Nop. 1962, menurut lisensi/legalisasi = 34.170 A.T.B.M. menurut kenjataan = 13.678 A.T B.M. atau = 30% dari lisensi/legalisasi).

Rekapitulasi Perusahaan Finishing Tekstil jang telah mendapat lisensi.

No.	Daerah	Djumlah perusahaan	Kapasitas 1 tahun	Keterangan
1.	D.C.I. Djaja	4	745.000 kg	
2.	Ambon		8.220.000 „	
3.	Djateng	37	1.860.000 „	
4.	D.I. Jogjakarta	10	420.000 „	
5.	Djatim	1	720.000 „	
6.	D.I. Atjeh	2	—	
7.	Sumatera Utara	—	180.000 „	
8.	Sumatera Barat	2	—	
9.	Djambi	—	—	
10.	Sumatera Selatan	—	—	
11.	Riau	—	360.000 „	
12.	Lampung			
13.	Bali	1		
14.	Nusa Tenggara Barat			
15.	Nusa Tenggara Timur			
16.	Kalimantan Barat			
17.	Kalimantan Tengah			
18.	Kalimantan Selatan			
19.	Kalimantan Timur			
20.	Sulawesi Selatan Tenggara			
21.	Sulawesi Selatan			
22.	Sulawesi Tenggara			
23.	Maluku			
24.	Irian Barat			
		Indonesia	12.505.000 kg	

c. **Industri Peradjutan:**

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan sektor industri peradjutan ini menundjukkan perkembangan jang pesat sekali, seperti halnja industri pertenunan. Sampai saat ini telah tertjatat 262 perusahaan dengan kapasitas lisensi 8.041 buah mesin dan bermatjam-matjam type. Penjebaran perusahaan-perusahaan peradjutan ini sangat tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnja seperti terlihat dibawah ini.

Daerah	Perusahaan		Mesin	
Djakarta Raya	111	perusahaan	3.315	buah mesin
Djawa Barat	72	„	2.677	„
Djawa Tengah	29	„	529	„
Djawa Timur	42	„	1.322	„
Sumatera Utara	5	„	162	„
Lain-lain daerah	3	„	38	„
	262	perusahaan	8.041	buah mesin

Apabila tidak ada kesulitan-kesulitan mengenai bahan-bahan baku/spare-parts dan efficiency dapat tertjapai penuh, maka sudah dapat diharapkan bahwa produksi industri peradjutan

ini sudah mentjukupi kebutuhan dalam negeri, hasil-hasil lainnja seperti halnja handoek, kaos-kaki dan lain-lain masih dapat memadai akan kebutuhan kita.

Oleh karena itu perluasan/pembangunan industri peradjutan baru, terketjuali industri peradjutan jang menghasilkan kelambu/tule, pada saat ini belum merupakan suatu urgensi jang penting jalah penjediaan benang dan spare harus diutamakan.

Mengingat Negara kita ini merupakan negara tropis jang pada umumnja daerah-daerahnja banjak sekali njamuk, dan ditindjau dari sudut usaha pemberantasan penjakit malaria jang setiap tahunnja meminta korban demikian besar, maka — apabila pembangunan dalam bidang industri peradjutan ini dianggap sangat urgen —, pembangunan tersebut harus ditudjukan kepada usaha memperluas industri peradjutan jang menghasilkan tule/kelambu.

Perkembangan industri peradjutan dari tahun ketahun selama ini adalah sebagai berikut:

	1949	1953	1960	1963
Djumlah perusahaan	9	17	175	300
Djumlah mesin		297	5.940	9.123
Produksi:				
Singlet dalam losin	73.598	304.798	5.654.700	—
Kaos kaki dalam pasang	—	74.353	814.700.000	—
Kelambu meter	—	—	330.000	—
Tali sepatu	—	—	22.000.000	—
Kaos lampu	—	595.831	12.000.000	—
Berstsek	36.784	182.148	—	—
Tjelana dalam	—	1.290	—	—

Menurut taksiran Bagian Pertumbuhan Direktorat Perindustrian Rakjat djumlah mesin-mesin peradjutan jang efektif untuk sandang (badju kaos) ada = 2.222 buah setiap mesin produksinja rata-rata 36.000 meter/tahun. Djadi produksi seluruhnja jang dapat ditjapai ± 85 djuta meter.

Dengan demikian kapasitas produksi seluruhnja dari pertenunan dan peradjutan jang dapat ditjapai 575 djuta dan 85 djuta meter = 6.60 djuta meter setiap tahun. Impor bahan baku tekstil selama 10 tahun terachir ini adalah sebagai berikut:

tahun 1955: 99.712 US $, tahun 1956: 93.697 US $, tahun 1957: 94.662 US $, tahun 1958: 70.588 US $, tahun 1959: 59.641 US $, tahun 1960: 100.200 US $, tahun 1961: 109.508 US $,

tahun 1962: 27.819 US $, tahun 1963: 59.744 US $, tahun 1964: 40.375 US $, rata-rata 75 djuta US $.

Dari djumlah devisa ini dapat ditjapai 310 djuta meter. Dengan menjediakan devisa sebesar 160 djuta US$ untuk bahan baku, maka industri-industri pertenunan dan peradjutan dalam negeri dapat bekerdja penuh.

d. **Finishing.**

Kalau kita melihat perkembangannja perusahaan-perusahaan finishing dari tahun ketahun, hingga saat ini, dapat diketahui bahwa djumlah belum sesuai atau belum dapat mengimbangi pesatnja perkembangan industri-industri tenun jang menghasilkan bahan-bahan sandang jang perlu difinish.

Menurut taksiran dari target produksi dalam negeri menurut Buperteks pada waktu ini kapasitas finishing baru merupakan ± 50 — 60% dari jang semestinja difinish.

Dibawah ini adalah keadaan perusahaan finishing pada tahun 1962:

Djumlah perusahaan — 18 buah dengan unit lengkap dan tidak lengkap.

Kapasitas potensiil — 328.500.000 m/3 regu/ 1 tahun.

Produksi jang bisa ditjapai — 2/3 × 70% × 328.500.000 m ± = 5 djuta m/2 regu/1 tahun.

Jang sedang dibangun pada tahun 1962:

Djumlah perusahaan — 15 buah dengan unit lengkap.

Kapasitas potensiil — 135 djuta m/3regu/1 tahun.

e. **Printing.**

Ditaksir 20 % dari seluruh kebutuhan sandang adalah merupakan tekstil berwarna/kain kembang jang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan printing.

Djumlah perusahaan tahun 1962 tertjatat sebanjak 45 buah (roller printing, flock printing dan screen printing tangan).

Kapasitas potensiil: 29.800.000 m/tahun. Produksi jang bisa ditjapai 17 djuta m/tahun. Jang sedang dibangun pada tahun 1962 ada 6 perusahaan screen printing semi automatic dan roller printing dengan kapasitas potensiil 18 djuta meter/tahun.

Pada tahun 1960 djumlah perusahaan printing baru ada 20 buah dengan kapasitas 16 djuta meter/1 regu/1 tahun.

Dengan keadaan demikian dalam djangka waktu 2 tahun disektor perusahaan printing ini mengalami kemadjuan jang tjukup pesat.

3. Industri pengawetan makanan.

Sebelum Perang Dunia ke II hampir semua makanan dalam kaleng didatangkan dari luar negeri, ketjuali mentega, minjak goreng jang telah diproduksi didalam negeri oleh Unilever, dan makanan lainnja jang tidak berarti, diprodusir oleh 3 perusahaan pengawetan makanan ialah Nutritional Food Company; Bodronojo di Bandung dan Kalam di Semarang. Industri pengawetan makanan jang pertama-tama didirikan pada tahun 1887 ialah Nutritional Food Company jang sekarang mendjadi Jaco Mantrust.

Setelah kemerdekaan djumlah industrinja meningkat dengan tjepat. Pada saat ini tertjatat 40 buah perusahaan industri pengawetan makanan diantaranja 16 perusahaan adalah perusahaan susu kental. Produksi kapasitas dari susu kental sebesar ± 134 djuta kaleng (condensed milk) setahun dan produksi kapasitas industri pengawetan makanan lainnja jang berupa corned beef, daging lain-lainnja, ikan, buah-buahan sajur-sajuran, selai, jam, juice, sambel-sambelan, nasi goreng tidak kurang dari 20 ton setahun. Produksi maksimal jang pernah tertjapai ialah 5,5 ton jang berarti baru 27% sadja jalah pada tahun 1961.

Dalam rangka perdjuangan kita merebut kembali Irian Barat dan pengganjangan Projek Nekolim Malaysia, industri pengawetan makanan ini memegang peranan jang penting pula. Dropping makanan didaerah-daerah perbatasan sebagai konsumsi untuk para sukarelawan perlu pengalengan jang chusus dan kuat sesuai persjaratan jang ditetapkan oleh C.I.A.D. Kerdja sama antara perusahaan-perusahaan pengawetan makanan dengan Angkatan Bersendjata berdjalan lantjar dan memuaskan. Kegiatan-kegiatan dibidang ekspor achir-achir ini mulai meningkat, disebabkan banjaknja permintaan akan tropical food jang tidak terdapat dinegeri lainnja. Chususnja nanas Indonesia jang mempunjai rasa jang chas Indonesia tidak kalah dengan nanas Hawai, telah mulai menarik penggemar-penggemarnja diluar negeri.

Dalam rangka kerdja-sama antara P.T. Mantrust dan peminatnja di Negeri Djepang akan diusahakan suatu tjara pengeksporan jang chusus, dimana P.T. Mantrust hanja meng-

ekspor isi dan pengalengannja sadja sedang tinplate gold lacguerad jang telah ditjap akan dikirimkan oleh pihak Djepang ke Indonesia. Persetudjuan prinsip telah ada dari Dep. P.3. sehingga tinggal pelaksanaannja masih perlu penjelesaian beberapa persoalan.

Djuga mengenai udang dalam kaleng, daging dalam kaleng telah pula menarik penggemar-penggemarnja terutama di Negara-negara Arab, jang penduduknja menghendaki pemotongan hewan setjara Islam.

Dengan beberapa penjempurnaan dalam tjara-tjara pengalengan dan pemberian etiket jang lebih menarik, kita jakin bahwa tidak lama lagi Indonesia akan mendjadi negara pengekspor buah-buahan dalam kaleng jang tjukup besar di Asia Tenggara ini.

Guna menstimulir industri-industri lokal maka pengimporan barang-barang dalam kaleng perlu pembatasan jang tadjam.

4. Susu bubuk.

Dalam rangka nation & character building maka pemeliharaan rochani dan djasmani rakjat Indonesia sangatlah memegang peranan. Pemeliharaan djasmani tidak tjukup dengan olahraga jang teratur akan tetapi jang pokok ialah penggunaan bahan-bahan makanan jang teratur pula. Seorang ibu jang tjukup sehat akan melahirkan baji jang sehat pula, dengan pemeliharaan jang baik sang baji akan mendjadi manusia jang sehat. Dalam pemeliharaan baji, susu bubuk jang mengandung gizi-gizi jang tjukup perlu sekali untuk pertumbuhan badan. Selama ini susu bubuk untuk baji itu masih didatangkan dari luar negeri.

Setelah Indonesia menjatakan diri keluar dari P.B.B., maka sebagai konsekwensinja Indonesia tidak lagi menerima bantuan dari P.B.B. djuga mengenai susu bubuknja. Usaha-usaha sebagai penggantinja telah dimulai jang disponsori oleh Deperindra dan P.N. Perhewani. Pelaksanaan pilot project dilakukan oleh P.N.P.R. Nupiksa Yasa. Alat-alat telah tersedia walaupun belum sempurna. Pada tanggal 17 Pebruari 1965 telah diadakan pertjobaan pertama dan berhasil dengan baik jang berupa susu bubuk (full milk).

Sedjak tanggal 17 Maret 1965 telah dimulai produksi setjara continu dengan kapasitas 50 liter sehari dengan hasil 4-5 kilogram susu bubuk. Disamping itu pabrik Saridele di Jogjakarta dari Dep. Kesehatan sedang mengusahakan untuk merombak produksinja kepembuatan susu bubuk untuk baji dengan kapasitas 25.000 liter sehari. Mengingat supply susu murni jang belum mentjukupi maka dalam pertjobaan pertama-tama baru menghasilkan 50 kg. susu bubuk.

Dengan berhasilnja usaha-usaha ini diharapkan dalam waktu jang tidak lama lagi susu bubuk baji dapat terpenuhi dari produksi dalam negeri.

5. Perkembangan Industri Bahan-bahan Bangunan.

Produksi bahan bangunan di Indonesia belum banjak menundjukkan kemadjuan djika dibandingkan dengan negara lain. Namun demikian djika ditindjau dari perkembangan industri dalam negeri sudah lebih madju pula.

Adapun industri penghasil bahan bangunan itu antara lain:

— Industri Bata Genteng,
— Industri Pembakaran Kapur,
— Industri Penggergadjian Kaju,
— Industri Tegel,
— Industri Eternit,
— Industri Paku dan Skrup,
— Industri Tjat,
— Industri Engsel.

a. Industri Bata Genteng.

Di Indonesia industri ini sudah tumbuh sedjak dahulukala sebelum kemerdekaan. Hanja proses pengolahannja sadja jang makin lama meningkat kearah machinal.

Karena penggunaan dari hasil industri ini bersifat lokal atau tidak memungkinkannja transpor jang djauh mengingat berat dan risiko petjahnja dalam perdjalanan, maka tumbuhnja industri ini terdapat hampir disetiap daerah Indonesia, terutama dipulau Djawa. Untuk luar Djawa, karena banjaknja bahan kaju jang dapat dipakai sebagai dinding dan atap rumah, maka lebih sedikit pulalah adanja industri itu.

Disamping industri-industri jang telah menggunakan perlengkapan modern (mesin) banjak diantaranja rakjat jang telah membuat sendiri dengan tangan, kadang-kadang merupakan pekerdjaan sambilan, disampingnja bertjotjok-tanam.

Kebutuhan akan hasil industri ini jang sesuai pula dengan djalannja pembangunan, memberi iklim jang baik untuk menambah produksi baik dengan tjara penambahan/pendirian-pendirian baru maupun mekanisasi dan perluasan-perluasan daripada industri jang telah ada.

Mesin-mesin tjetak dan alat-alatnja sebagian besar sudah dapat dibikin didalam negeri. Tetapi untuk pabrik-pabrik jang menghendaki proses pengolahan jang lebih continu dari mulai pengambilan bahan sampai selesai pembakarannja, masih diperlukan mesin-mesin impor, terutama mesin-mesin strengpers dan mesin-mesin penggeraknja. Perkembangan setjara terperintji tidak dapat dikemukakan disini, karena usaha-usaha rakjat jang timbul dimana-mana tidak dapat dikontrol; jang djelas bahwa tidak ada bata genteng di-impor, selama ini, sehingga pertumbuhan industri bata genteng mengikuti meningkatnja pembangunan.

b. Industri Pembakaran Kapur.

Industri inipun telah lama bertumbuh seperti halnja industri bata genteng. Hanja sadja karena bahan bakunja jang tidak dapat ditemui disembarang tempat maka letak industri ini tergantung pada batu kapur jang tersedia jang banjak terdapat dipulau Djawa.

Karena proses pengolahan dari produk industri ini lebih sederhana lagi daripada pengolahan untuk bata dan genteng, maka banjak pulalah usaha-usaha ketjil-ketjilan jang dapat diolah dan belum termasuk dalam tjatatan Departemen Perindustrian Rakjat. Sehingga dapatlah dimengerti bahwa industri ini kenjataannja lebih madju daripada apa jang tertjatat. Karena jang terdaftar tersebut sebagian besar adalah industri-industri jang sudah madju.

Sesuai dengan meningkatnja kebutuhan akan hasil dari industri ini, Departemen Perindustrian Rakjat berusaha membantunja dengan djalan memberikan bantuan mekanisasi terhadap perusahaan jang telah ada dan menjediakan spare-part jang diperlukan. Djuga perlu dikemukakan bahwa pembangunan sektor industri ini, sebagaimana halnja dengan industri bata

genteng, tidaklah dapat dikontrol setjara kaku dan teliti, akan tetapi sudah djelas bahwa pasang surutnja industri ini akan mengikuti perkembangan pembangunan.

c. **Penggergadjian Kaju.**

Seperti halnja industri-industri lainnja industri ini terdapat diseluruh daerah kepulauan Indonesia, terutama dimana terdapat banjak kaju atau hutan jang menghasilkan kaju bangunan.

Produk dari industri ini sebagian besar untuk keperluan pembangunan didalam negeri. Ekspor kaju pada umumnja masih berupa glondongan jang biasanja telah melalui proses pengawetan.

Karena kebutuhan kaju dimasa pembangunan ini, maka didaerah-daerah banjak pula terdapat pengusaha-pengusaha ketjil jang aktif melakukan penggergadjian kaju hanja dengan tenaga manusia dengan gergadji plaat jang ditarik dua orang bergantian pada kedua udjungnja.

Sumbangan dari pengusaha-pengusaha ketjil ini sangat berarti pula dalam pembangunan. Di Djawa karena kekurangan akan bahan kaju untuk pembangunan, pengusaha-pengusaha ketjil itu banjak mengerdjakan kaju-kaju pohon kelapa jang didjadikan balok-balok, kaso, dan lain-lain jang dapat dipakai sebagai pengganti kaju djati atau kaju lainnja jang lebih kuat.

Berkenaan dengan bahan jang terbatas, maka pengusaha-pengusaha ketjil inipun tidak menaruh perhatian untuk memekanisasikan usahanja. Hal inipun bagi Pemerintah djuga demikian. Tetapi dimana banjak kaju jang masih berlimpah-limpah, diluar Djawa umumnja, Pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas untuk tumbuhnja industri ini jang machinal. Hal ini mengingat akan kebutuhan hasil produk industri jang makin meningkat.

Menurut daftar, jang umumnja terdiri dari industri-industri jang machinal, dari tahun 1960 sampai tahun 1964 menundjukkan kemadjuan jang pesat. Sekalipun, hasil itu belum mentjapai tingkat full-capacity dan memenuhi seperti apa jang kita perlukan. Oleh karena itu tumbuhnja industri ini masih sangat diharapkan.

d. **Tegel.**

Pertumbuhan industri ini sesuai dengan kebutuhan pembangunan didaerah-daerah. Di Djakarta sebagai pusatnja pembangunan jang terbesar, maka terdapat industri tegel jang ter-

banjak. Pada tahun 1962 sudah mentjapai djumlah 612 industri. Tetapi karena bekerdjanja industri ini sebagian besar tergantung daripada semen jang masih belum mentjukupinja maka pada umumnja industri-industri itu hanja bekerdja 25%.

Mesin-mesin dan peralatan untuk industri ini pada umumnja sudah dapat dibuat didalam negeri. Terketjuali djika memerlukan adanja industri jang besar tenaga penggeraknja masih harus diimpor.

Untuk mentjukupi kebutuhan tegel, dipentingkan terpenuhinja bahan baku semen, djuga perbaikan mutu daripadanja.

e. **Eternit.**

Seperti halnja industri tegel, industri ini bertumbuh sesuai dengan daerah pembangunan. Djakarta mempunjai djumlah industri jang terbanjak dan telah terdapat pula industri jang jang besar. Perusahaan Negara Krija Yasa di Djakarta memiliki unit pabrik jang termodern.

Perkembangan industri ini tidaklah setjepat industri tegel. Pada tahun 1962 telah terdapat 101 industri eternit.

Bahan baku jang dipergunakan pada umumnja semen dan asbes. Achir-achir ini karena kekurangan serat asbes maka digunakan merang sebagai pengganti. Hanja P.N.P.R. Krija Yasa jang masih mempertahankan kwalitasnja dengan menggunakan bahan serat-serat asbes.

Produk dari industri ini djuga tergantung dari tersedianja bahan baku semen. Oleh karena itu untuk mempertinggi produksi dan atau untuk memenuhi kebutuhan diusahakan dipenuhinja bahan semen tersebut. Namun demikian pendirian baru masih djuga diharapkan.

Dengan berhasilnja usaha intensifikasi dan ekstensifikasi semen rakjat, maka baik industri tegel maupun eternit dsb. akan tidak banjak menemui kesulitan.

f. **Industri Paku:**

Berdasarkan keputusan potensiil, maka produksi paku pada waktu ini dianggap tjukup dapat mensupply kebutuhan pembangunan, asal bahan bakunja tjukup tersedia.

Mesin-mesinnja telah dapat dibuat didalam negeri, ketjuali mesin-mesin penggerak. Industri paku mulai dibangun pada tahun 1955 oleh 2 perusahaan, jaitu P.T. Tulus Redjo di Bogor dengan kekuatan 6 buah mesin. dan P.T. Madjid Asnun di Su-

rabaja dengan kekuatan 15 buah mesin. Perkembangan sektor industri ini sangat sesuai dengan meningkatnja kebutuhan untuk pembangunan.

Pada achir tahun 1964 tertjatat 35 buah perusahaan dengan kekuatan 490 buah mesin. Kapasitas potensiil ditaksir 80.000 ton tiap tahun. Menurut penjelidikan Regional Housing Centre pada tahun 1959 diperkirakan keperluan paku ada sebesar 35.000 ton setiap tahun. Dengan adanja pembangunan-pembangunan nasional pada waktu sekarang, maka ditaksir keperluan paku akan mentjapai 50.000 ton setahun.
akan mentjapai 50.000 ton setahun.

Maka djelaslah bilamana bahan baku ditjukupi, maka kebutuhan paku sudah dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Dari djumlah 490 buah mesin, 40% adalah mesin-mesin hasil produksi dalam negeri, pada umumnja buatan pabrik-pabrik mesin di Djawa.

g. **Industri Tjat.**

Industri tjat di Indonesia sampai tahun 1964 tertjatat 36 buah perusahaan, diantaranja 4 buah perusahaan milik Negara. Perusahaan Tjat Negara tersebut umumnja besar-besar jang diambil alih dari Belanda.

Pada tahun 1954 tertjatat sebanjak 21 buah perusahaan, maka selama 10 tahun ini ada penambahan 15 perusahaan, 6 perusahaan didirikan antara tahun 1954-1960 dan 9 perusahaan didirikan antara tahun 1961-1964. Produksi tjat jang dapat ditjapai tiap tahun sebanjak 21.580 ton. Mengingat kekurangan akan bahan baku, maka rata-rata produksi hanja mentjapai 60% dari kapasitas potensiilnja. Bermatjam-matjam tjat sudah dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri ketjuali tjat kapal anti fouling dan anti coresive masih diimpor dari luar negeri, jang setahunnja diperkirakan 1.500 ton.

Achir-achir ini ada kegiatan-kegiatan dari industri tjat swasta „P.T. Sidolin" untuk membuat didalam negeri djenis tjat-tjat kapal tersebut. Diharapkan dalam waktu tidak lama lagi tidak perlu mengimpor tjat kapal lagi.

HASIL PRODUKSI INDUSTRI TJAT INDONESIA

No.	Djenis hasil produksi	Produksi kapasitas			
		Potensiil 36 perus.	Risel '58 22 perus.	Risel '59 29 perus.	Risel '61 36 perus.
		(ton)	(ton)	(ton)	(ton)
1.	Tjat nitrocellulose (duco)		276,9		
2.	Tjat minjak (tjat biasa)		5.536,7		
3.	Tjat syntetis		321,1		
4.	Tjat kapal		199,1		
5.	Tjat chloorrubber		3,7		
7.	Tjat rubber merk		379,7		
9.	Tjat air/calcarium		82,2		
6.	Tjat keperluan industri		6,3		
8.	Tjat houtconcervering	21.580	642,6	11.573	12.099
10.	Pernis		235.4		
11.	Pengentjer		151,2		
12.	Minjak Tjat		24,7		
14.	Lak besi		356,1		
13.	Plamur/dempul		6,5		
15.	Kabel culmassa		1,2		
16.	Oker kuning	—	36,3	—	—
17.	Calcium Carbonat		7,5		
	Djumlah:	21.580	8.267,2	11.573	12.099

h. Industri Engsel.

Selama 10 tahun terachir ini industri engsel bertumbuh dengan baik. Bahan baku berupa besi-besi plaat, besi batangan, kuningan dan lain-lain masih diimpor. Oleh karena itu kehidupan industri ini hampir 100% tergantung dari bahan baku impor. Berhubung dengan itu walaupun dalam bidang pengusahaan menundjukkan kemadjuan maka hal itu produktivitas tidaklah dipertinggi, karena perusahaan-perusahaan ini sangat tergantung kepada sedikit banjaknja devisa. Permintaan engsel-engsel ini setiap tahun bertambah sesuai dengan bertambahnja pembangunan-pembangunan. Lebih dari 50% engsel-engsel ini masih diimpor dari luar negeri. Guna pertumbuhan industri lokal, maka impor engsel-engsel ini perlu dibatasi. Perkembangan industri engsel dari tahun ketahun dapat kami gambarkan sebagai berikut:

Tahun	Djumlah perusahaan	Produksi kapasitas 1 tahun
1955	6	480 ton
1956	6	480 ton
1957	6	480 ton
1958	6	480 ton
1959	7	480 ton
1960	7	980 ton
1961	9	1.480 ton
1962	10	1.510 ton
1963	12	2.100 ton
1964	12	2.110 ton

6. Perkembangan industri perkulitan.

a. Industri Penjamakan Kulit.

Industri penjamakan kulit dapat digambarkan sebagai berikut:

Akibat Perang Pasifik, pendudukan Djepang dan Perang Kemerdekaan, diantara perusahaan-perusahaan penjamakan kulit jang sudah ada sebelum Perang Dunia ke-II, ada jang mengalami kehantjuran, diantaranja satu pabrik jang menghasilkan kulit-kulit kambing di Tjirebon dan sebuah pabrik besar milik Belanda di Pasuruan, jang semula mempunjai 2 bagian (ialah bagian sol dan bagian Javabox). Satu bagian rusak sama sekali jaitu bagian Javabox. Pabrik „Jacatra", demikian nama pabrik di Pasuruan tersebut, kemudian hanja memprodusir kulit sol sadja sampai sekarang ini. Sedjak tahun 1950 industri penjamakan kulit mulai berkembang, banjak perusahaan-perusahaan mulai menambah mesin-mesin produksinja dan mengganti mesin-mesin jang sudah usang.

Jang penting ditjatat ialah pendirian projek-projek induk penjamakan kulit oleh Pemerintah ditiga tempat centra perkulitan, jaitu di Magelang, Magetan dan Pamekasan. Selain sebagai unit pabrik jang menghasilkan bermatjam-matjam kulit samak, induk-induk tersebut mempunjai tugas membimbing perusahaan-perusahaan penjamakan kulit ketjil disekitar dae-

rahnja itu dan bila perlu menfinishing hasil produksi perusahaan-perusahaan ketjil itu. Pabrik tersebut mulai didirikan pada tahun 1951 dan selesai achir tahun 1953, untuk kemudian mulai start dengan produksinja.

Selain daripada itu ada sebuah pabrik lagi, jaitu di Jogjakarta jang chusus memprodusir kulit reptil dan kulit kambing domba. Keempat pabrik itu selandjutnja berada dibawah penguasaan Leppin dan setelah pembentukan P.N.P.R. mendjadi unit-unit dari P.N.P.R.. Tjarma Yasa, bersama-sama dengan 2 pabrik milik Belanda jang telah diambil-alih oleh Pemerintah, jaitu pabrik „Wonotjolo" di Surabaja dan pabrik „Jacatra" di Pasuruan.

Perusahaan-perusahaan swasta mulai berlomba-lomba memperkembangkan pabriknja. Sebuah perusahaan milik H. Sarmili di Pasar Rebo jang semula bekerdja hanja dengan tangan sadja, mulai tahun 1952 telah memekanisir perusahaannja dengan mendatangkan mesin-mesin penjamakan kulit dan dalam tahun 1954 sudah dapat menghasilkan kulit Javabox disamping produksi pokok kulit sol dan kulit lapis.

Dalam tahun 1953 pabrik kulit sol „Kasim" di Malang djuga memperkembangkan pabriknja dengan tambahan mesin-mesin baru dan mendirikan laboratorium sendiri untuk memeriksa mutu hasil produksi dan bahan-bahan jang dipakai. Dengan adanja laboratorium itu pabrik Kasim dapat menghasilkan kulit sol jang bermutu tinggi jang sangat dibutuhkan untuk pembuatan sepatu Angkatan Bersendjata jang memang membutuhkan sjarat-sjarat jang chusus.

Pabrik "Setia Tjiliwung" milik H. Rais di Djatinegara jang sebelum tahun 1950 hanja merupakan perusahaan ketjil, karena giat membangun dengan mendatangkan mesin-mesin baru, sedjak tahun 1954 pabrik ini sudah mempunjai mesin-mesin komplit dan dapat menghasilkan bermatjam-matjam kulit, hasil mana sebagian besar diperuntukkan untuk pabrik sepatunja sendiri, sebab disamping pabrik penjamakan kulit, Setia Tjiliwung mempunjai pabrik sepatu pula.

Di Medan sedjak tahun 1955 dibangun pabrik penjamakan kulit „Sinar Baru" (milik warga negara asli) jang tergolong besar dengan mendatangkan mesin-mesin komplit seharga ± Rp. 500.000,— C & F (koers pada waktu itu 1 US $ = Rp. 11,—). Tetapi sangat disajangkan bahwa karena kesulitan modal pabrik tersebut sampai sekarang belum bekerdja penuh dan baru memberikan hasil jang sedikit sekali.

Pembangunan lain jang perlu diutarakan ialah pendirian pabrik „Sri Kulit" (milik warganegara Indonesia) jang tergolong besar pula di Paalmerah (Djakarta). Dengan mesin-mesin komplit jang didatangkan, pabrik ini dibangun sedjak tahun 1955 setjara modern, dengan lay-out jang sangat baik. Pemiliknja mendapatkan pendidikan Sekolah Kulit dinegeri Belanda (Waalwijk), sehingga dapat diharapkan perusahaannja akan madju dibawah asuhannja. Tetapi sangat disajangkan pula bahwa sampai sekarang pabrik ini belum dapat bekerdja penuh karena kesulitan modal (hanja ± 50% dari kapasitas).

Demikianlah sedjak tahun 1950 industri penjamakan kulit dapat berkembang dengan memuaskan, terbukti perusahaan-perusahaan jang telah ada banjak jang mengganti mesin-mesinnja jang usang dan mengkomplitir mesin-mesinnja; banjak pabrik-pabrik mendjadi besar dan disamping itu banjak pula pabrik-pabrik baru mulai dibangun.

Dalam tahun 1956 sadja importir „Alimy" salah satu importir tertua dalam bidang impor mesin-mesin perkulitan (penjamakan kulit, sepatu dan barang-barang dari kulit dan bahan-bahan baku/penolong perkulitan) telah mengimpor mesin-mesin penjamakan kulit sebesar Rp. 607.199,— C & F (koers pada waktu itu 1 US $ = Rp. 11,—).

Sedjak tahun 1962 berhubung dengan Pemerintah mengalami kesulitan dalam bidang devisa, maka tidak ada lagi pemasukan mesin-mesin baik untuk penggantian, kompletasi, penambahan maupun pembangunan pabrik baru.

Produksi.

Sampai tahun 1964 djumlah perusahaan jang tertjatat di B.P. 3. sebanjak 113 buah perusahaan, terdiri dari perusahaan besar, sedang dan ketjil. Mengenai angka-angka produksi mengingat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak teratur dan tidak sama memberi laporan, sehingga tidak dapat diberi gambarannja jang njata.

Dari sumber B.P.3 dapat diberikan angka-angka produksi dari beberapa pokok hasil produksi perusahaan-perusahaan besar dan sedang jang melapor dari tahun 1954 s/d 1960 sebagai berikut:

Tahun	Djumlah perus. jang lapor	Produksi				
		Kulit sol sapi	Kulit sol kerbau	Kulit lapis	Kulit Javabox	Kulit tas kopor
1954	93	2.590.000 kg	1.325.000 kg	3.526.000 sqft	7.717.000	1.262.000
1955	92	1.770.000 „	638.000 „	2.293.000 „	11.318.999	1.554.000
1956	105	2.077.000 „	630.000 „	2.155.000 „	9.437.000	1.090.000
1957	102	2.146.000 „	810.000 „	1.480.000 „	11.522.000	1.218.000
1958	101	1.878.000 „	625.000 „	944.000 „	11.009.000	1.360.000
1959	105	1.685.000 „	493.000 „	901.000 „	8.681.000	1.433.000
1960	107	1.598.000 „	389.000 „	981.000 „	12.518.000	984.000
Rata²		1.964.400 „	701.400 „	1.754.300 „	10.314.600	1.271.500

Angka-angka produksi dari tahun 1961 s/d 1964 belum tersedia di B.P 3 tetapi dalam tahun 1961 produksi tidak akan djauh berbeda dengan tahun 1960. Untuk 1962 s/d 1964 mengingat keadaan devisa negara jang mengalami kemunduran produksi dalam industri penjamakan kulit akan berkurang pula.

Adapun produksi kapasitas potensiil adalah sebagai berikut:

Kulit sol sapi	=	2.800.000 kg
Kulit sol kerbau	=	2.000.000 kg.
Kulit Javabox	=	14.000.000 sq ft.
Kulit lapis	=	10.000.000 sq.ft.
Kulit tas kopor	=	4.400.000 sq.ft.
Kulit Glace	=	6.000.000 sq.ft.
Kulit split sol	=	3.000.000 kg.
Kulit split tjet	=	3.500.000 sq ft.

Lain-lain :

Kulit sol jang berkwalitas tinggi jang sebelum tahun 1952 masih diimpor untuk pembikinan sepatu Angkatan Bersendjata, sesudah tahun 1953 dapat dihasilkan didalam negeri, sehingga tidak perlu lagi diimpor. Begitu pula semua djenis kulit sudah dapat dihasilkan didalam negeri sehingga dapat dikatakan kita sudah dapat self-supporting dalam bidang ini: ketjuali kulit boxcalf jang memang kulit mentahnja di Indonesia tidak ada karena penjembelihan sapi muda dilarang. Dalam tahun-tahun 1955-1958 boxcalf masih diimpor. Boxcalf inipun sebetulnja tidak begitu penting, karena sepatu dengan mempergunakan Javabox sudah tjukup tinggi mutunja. Mengenai ekspor kulit mentah dapat diterangkan bahwa Indonesia sedjak sebelum perang adalah negara peng-ekspor kulit mentah, karena mempunjai surplus kulit mentah. Hanja kulit sapi pada tahun-tahun terachir sudah dapat dikonsumir hampir seluruhnja didalam negeri dan Departemen Perindustrian Rakjat telah menjarankan kepada Direktorat Ekspor untuk menjetop ekspor kulit sapi mentah.

Dibawah ini kami ambilkan angka-angka ekspor dari beberapat djenis kulit mentah (sumber B.P.3.) sebagai berikut:

Tahun	Kulit sapi	Kulit kerbau	Kulit kambing	Kulit biawak	Kulit ular	Kulit buaja
1955	11.769 lb	36.906 lb	864.316 lb	—	—	—
	44.567 kg	487.844 kg	318.326 kg	5.971 kg	17.182 kg	65.160 kg
1956	7.869 lb	41.780 lb	3.428.501 lb	—	—	—
	32.085 kg	486.692 kg	2.353.671 kg	7.506 kg	14.883 kg	82.820 kg
1957	—	29.728 lb	1.374.520 lb	—	—	—
	—	337.554 kg	553.134 kg	9.684 kg	27.152 kg	113.606 kg
1958	4.180 lb	17.450 lb	1.293.660 lb	—	—	—
	19.935 kg	217.686 kg	548.735 kg	8.322 kg	8.092 kg	63.211 kg
1959	2.520 lb	80.050 lb	1.415.220 lb	—	—	—
	9.102 kg	385.152 kg	1.600.861 kg	11.238 kg	5.495 kg	33.504 kg
1960	569 lb	27.350 lb	1.630.486 lb	—	—	
	7.762 kg	353.808 kg	695.627 kg	15.978 kg	13.084 kg	61.841 kg
1961	646 lb	20.850 lb	2.018.540 lb	—	—	—
	6.582 kg	279.512 kg	906.602 kg	19.261 kg	21.001 kg	109.650 kg

Mengenai bahan baku pokok, di Indonesia terdapat bahan penjamak nabati, jaitu babakan (kulit kaju) acacia, mangrove (bakau-bakauan), pinang, trengguli, segawo dan lain-lainnja. Dari bahan-bahan ini jang terpenting ialah babakan acacia jang mempunjai mutu tinggi.

Babakan bahan-bahan jang terdapat sangat banjak diseluruh kepulauan Indonesia, sajangnja mutunja agak rendah mengingat kulit jang disamak dengan babakan ini tidak keras dan tidak berisi, disamping warnanja jang agak kemerahan, warna mana tidak begitu disukai. Maka kulit jang disamak dengan babakan bakau-bakauan tergolong mutu jang rendahan. Untuk menghemat babakan acacia, babakan bakau-bakauan ini dapat pula dipakai sebagai tjampuran dengan perbandingan jang tertentu.

Babakan pinang, trengguli dan segawo mutunja tjukup dan umumnja dipakai sebagai tjampuran. Ketiga djenis ini tidak begitu banjak terdapat disini.

Jang perlu diusahakan ialah pendirian pabrik ekstraktanin. Program ini sangat penting mengingat:

a. Dengan meng-ekstrak babakan bahan penjamak tersebut kita dapat mempergunakan badar tanin seluruhnja dan mengurangi pemborosan.

b. Dengan tjara meng-ekstrak, kwalitas dari tanin dapat dipertinggi (misalnja untuk mangrove) dan beberapa matjam ekstrak dapat dibuat menurut kebutuhan jang chusus.

c. Pemakaian ekstrak dalam pabrik-pabrik penjamak kulit dapat lebih sempurna oleh karena sudah dapat diperhitungkan lebih dahulu dengan pasti djika akan membuat tjampuran.

d. Bekerdja dengan ekstrak tanin lebih mudah dan menghemat tenaga-kerdja dan waktu serta tidak ada kotoran-kotoran sisa babakan.

Disekitar daerah Malang terdapat tjukup tanaman acacia dari kehutanan dan memungkinkan didirikannja sebuah pabrik tanin. Rentjana untuk pendirian pabrik ini dibuat oleh B.I.N. pada tahun 1952, jang kemudian dilandjutkan oleh Leppin, sajang sampai sekarang belum dapat terlaksana karena mengalami pelbagai kesulitan.

Bahan penjamak mineral, jaitu garam-garam chrom untuk penjamakan kulit Javabox, kulit glace, dan lain-lain kulit ular, belum dapat diprodusir didalam negeri karena belum ada industri dasar (kimia). Begitu pula bahan-bahan penolong umumnja masih harus diimpor.

Salah satu bahan penolong sudah dapat diprodusir didalam negeri, ialah zwavelnatrium, meskipun hasil produksinja belum banjak dan kwalitasnja belum sempurna. Mobiltan O jang dihasilkan oleh Stanvac ialah sulfaned mineral oil jang dapat dipergunakan didalam industri penjamakan kulit.

Meskipun hasil kulit-kulit samak jang memakai Mobiltan O ini kurang baik bila dibandingkan kulit samak jang mempergunakan sulfonated cod oil atau watsfool oil, namun diandjurkan pemakaian lebih banjak dari Mobiltan O ini sebagai „surogaat". Balai Penelitian Kulit di Jogjakarta perlu menggiatkan penelitian dan penemuan bahan-bahan baku dan penolong jang dibutuhkan oleh industri penjamakan kulit, pula sebanjak mungkin menemukan „surogaat" agar dapat mengurangi impor bahan baku dan penolong untuk industri penjamakan kulit.

Program Industri Penjamakan Kulit menurut Keputusan M.P.R.S. adalah sebagai berikut: Belum perlu pendirian pabrik baru. Jang perlu adalah perluasan dan modernisasi pabrik jang sudah ada. Dimulai tahun 1961 selesai tahun 1963.

b. **Industri Sepatu Kulit:**

Industri sepatu kulit mulai dapat merehabilitir dan memperkembangkan dirinja sedjak penjerahan kedaulatan, seperti halnja dengan industri-industri lain.

Mekanisasi perusahaan-perusahaan mulai berdjalan, banjak perusahaan mengganti mesin-mesinnja jang sudah usang, ada jang menambah mesin-mesinnja dan banjak perusahaan jang bekerdja dengan tangan mulai memakai/mempergunakan mesin-mesin baru. Jang sangat menggembirakan ialah bahwa tidak kurang dari 20 perusahaan nasional jang semula hanja bekerdja dengan tangan mulai berkembang mendjadi perusahaan-perusahaan jang semi-machinal dengan mendatangkan pelbagai mesin-mesin sepatu. Perkembangan dari perusahaan-perusahaan ini dapat berlangsung berkat kebutuhan sepatu untuk Angkatan Bersendjata dan instansi pemerintahan dapat disalurkan pembikinannja kepada perusahaan-perusahaan ini. Memang sebelum tahun 1953, mengingat sol sapi dan Javabox jang memprodusir didalam negeri belum begitu tinggi mutunja untuk keperluan sepatu Angkatan Bersendjata, masih perlu diimpor sepatu tersebut. Akan tetapi sesudah perkembangan industri penjamakan kulit jang mutu hasil produksinja terus meningkat sehingga memenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan, sepatu untuk Angkatan Bersendjata dapat diprodusir didalam negeri. Order pembuatan diprioritaskan kepada perusahaan nasional.

Salah satu perusahaan nasional jang sangat menondjol perkembangannja ialah perusahaan "Setia Tjiliwung" di Djatinegara, jang pada tahun 1949 hanja merupakan perusahaan ketjil dengan 16 orang buruh dan bekerdja dengan tangan, dalam tahun 1954 mendjadi pabrik besar dengan mesin-mesin sepatu jang komplit, dengan mempekerdjakan buruh sebanjak 216 orang.

Pabrik "Setia Tjiliwung" ini djuga telah membangun pabrik penjamakan kulitnja sendiri, agar kebutuhan kulit sol dan Javabox dapat dipenuhi sendiri.

Kedua projek ini sedjak tahun 1953 mulai dengan produksi jang berupa matjam-matjam sepatu, tas, kopor dan lain-lain barang kulit.

Induk Perusahaan Pengerdjaan Kulit dan PNPR Tjarma Yasa di Magetan kini djuga ikut mengerdjakan order sepatu

Polisi. Betapa madjunja perkembangan industri sepatu ini dapat diterangkan bahwa dalam tahun 1950 baru tertjatat 12 perusahaan jang bekerdja setjara machinal (full atau semi-machinal, kemudian pada tahun 1953 tertjatat 50 perusahaan, pada tahun 1956 mendjadi 55 perusahaan, pada tahun 1957 tertjatat sebanjak 60 perusahaan jang bekerdja setjara masinal.

Jang bekerdja dengan full machinal dengan memakai sistim lopende band hanja perusahaan „Bata" sadja, sedangkan lainnja semi-machinal. Mengenai pendirian pabrik baru oleh Pemerintah dapat diterangkan bahwa bersamaan dengan pembangunan 4 projek induk pabrik penjamakan kulit di Magelang, Magetan, Pamekasan dan Jogjakarta, didirikan pula 2 projek pabrik sepatu dan barang-barang kulit lainnja di Magetan dan Pamekasan dengan mesin-mesin jang komplit.

Produksi:

Menurut tjatatan jang ada di B.P.3 sampai 1964 terdaftar sebanjak 356 perusahaan, jang sebagian besar merupakan perusahaan-perusahaan ketjil. Mengenai hasil produksinja dapat diberikan angka-angka produksi tahun 1954 s/d 1960 dari perusahaan-perusahaan besar dan sedang jang memberi laporan (sumber B.P.3), sedangkan laporan produksi dari perusahaan-perusahaan ketjil tidak termasuk didalamnja.

Tahun	Produksi		
	Matjam-matjam sepatu	Sandal/selop	Djumlah
1954	1.967.000 pasang	1.254.000 pasang	3.221.000 pasang
1955	1.955.000 „	944.000 „	2.899.000 „
1956	1.886.000 „	1.023.000 „	2.909.000 „
1957	2.230.000 „	951.000 „	3.181.000 „
1958	2.070.000 „	1.181.000 „	3.2151.000 „
1959	2.400.000 „	1.405.000 „	3.805.000 „
1960	2.229.000 „	1.740.000 „	3.969.000 „
Rata-rata	2.105.300 „	1.214.000 „	3.319.300 „

Kebutuhan sepatu untuk Angkatan Bersendjata jang sedjak tahun 1953 sudah dapat diprodusir didalam negeri setiap tahunnja bertambah. Sekarang tiap tahunnja rata-rata kebutuhan untuk Angkatan Bersendjata dan Instansi Pemerintah lainnja ialah sebagai berikut :

Nama Instansi :	Sepatu lapangan (pasang)	Sepatu rendah (pasang)
Angkatn Darat	500.000	100.000
Angkatan Kepolisian	170.000	30.000
Angkatan Laut	40.000	20.000
Angkatan Udara	30.000	15.000
Departemen Dalam Negeri	22.000	—
Djawatan Pos, Telegrap & Telpon	8.000	8.000
Djawatan Pelajaran	—	15.000
Djawatan Bea dan Tjukai	—	10.000
Djawatan Penerbangan Sipil	—	2.000
Djawatan Imigrasi	—	2.000
D j u m l a h	820.000	202.000

Lain-lain :

Bahan-bahan baku/penolong (fornituren) jang dibutuhkan industri sepatu kulit pada umumnja sebagian besar masih harus diimpor semua jaitu terdiri dari :

Paku open
Paku hak
Machine tachs
Paku djamur
Paku kuningan
Mata ajam
Benang djahit muka (stick-garen)
Benang aflap/doornaai
Amplas lena, dan lain-lain.

Jang sudah dapat dihasilkan didalam negeri ialah sebagian dari mata ajam dan tali sepatu. Sudah selajaknja djika kita mulai berusaha mendirikan industri-industri jang menghasilkan kebutuhan fornituren tersebut agar lambat-laun dapat berdiri diatas kaki sendiri (self-supporting). Mengenai matjam-matjam paku sepatu tersebut pada umumnja para pengusaha, terutama jang memiliki pabrik paku, kurang antusias untuk mendirikan pabrik paku open, karena bila dibandingkan dengan pabrik paku biasa, keuntungannja kurang memuaskan.

Pembikinan amplas lena untuk menghaluskan hak dan sol sepatu, telah ditjoba dibikin oleh sebuah pabrik amplas di Bandung. Hasil produksinja belum memuaskan dan lekas

rusak, sehingga penggunaannja lebih boros (kurang efisien) dibandingkan dengan pemakaian amplas lena ex impor. Sedang diusahakan terus perbaikan mutunja agar lambat laun dapat menjamai atau paling sedikit mendekati kwalitas amplas lonan dari luar negeri.

Mengenai benang aflap/doornaai oleh suatu perusahaan swasta dalam tahun 1961 telah ditjoba memproduksinja. Meskipun mutunja belum begitu sempurna dan hasil produksinja belum begitu banjak, namun ini sudah berarti mengurangi pemasukan benang aflap/doornaai dan oleh perusahan sepatu ketjil dapat dikonsumir.

7. **Industri Logam di Indonesia.**

Industri Logam terbagi bermatjam-matjam djenis perusahaan antara lain: Perusahaan-perusahaan Assembling sepeda, Email, Kompor, Perabot rumah-tangga, Kawat, Karoseri, Konstruksi, Kaleng, Barang-barang Aluminium, Logam, Pengetjoran, Perbengkelan, Koper besi, Alat-alat pertanian, Mainan anak-anak dan lain-lainnja.

Djenis-djenis Industri Logam tersebut diatas sesudah Perang Dunia ke-II banjak sekali kemadjuannja, dibandingkan dengan waktu sebelumnja.

Setjara singkat dapat diberikan sesuatu tjontoh antara lain seperti:

a. **Assembling Sepeda.**

Onderdil-onderdil untuk keperluan assembling sepeda pada tahun 1950 pada umumnja diimpor keseluruhannja. Baru sesampainja di Indonesia onderdil-onderdil itu dipasang satu sama lain sehingga merupakan suatu kerangka sepeda, itulah jang disebut assembling sepeda.

Tetapi dari tahun ketahun kemadjuan dari industri ini njata sekali kelihatan. Pada tahun 1953 industriawan kita bertambah madju pemikirannja sehingga pengusaha-pengusaha tersebut memikirkan bagaimana sebagian dari onderdil-onderdil itu dapat dibuat di Indonesia dimana pengaruhnja menguntungkan (menghemat) devisa Negara, seperti pembuatan ketting-kas di Djakarta dan bel (lontjeng) di Surabaja. Mengingat kebutuhan sepeda tersebut di Indonesia ini sangat banjak sekali, chususnja untuk transpor rakjat, maka pemikiran untuk lebih madju lagi kearah pembikinan alat-alat jang lainnja dengan sendirinja timbul. Ini dapat dibuktikan pada tahun belakang ini semua

industri assembling sepeda dapat diberikan idjin bekerdja seandainja perusahaan tersebut dapat atau sanggup membikin sedikit-sedikitnja satu bagian dari sepeda. Djadi pada pokoknja pada masa sekarang djenis alat-alat jang telah dapat dibuat di Indonesia antara lain:

Ketting kas
Bel
Frame
Pentil
Fork
Pedal
Spatbord.

Mengenai tubes untuk frame sedang disiapkan pembuatan mesin-mesinnja. Pada umumnja mesin-mesin jang dipakai untuk pembuatan alat-alat sepeda ini buatan dalam negeri.

Industri alat-alat sepeda jang sudah dapat dibanggakan, karena pembuatannja setjara machinal ialah Firma I.N.L., P.T. Bina Logam di Djakarta dan P.T. Aneka Warna di Solo.

Kemudian disini dapat digambarkan kebutuhan-kebutuhan sepeda di Indonesia. Penduduk Indonesia diperkirakan sebanjak 103 djuta orang.

Seandainja tiap-tiap lima keluarga memiliki sebuah sepeda dan satu keluarga terdiri dari 5 djiwa maka penduduk Indonesia kira-kira ada 20 djuta keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sepeda jang diperlukan 4 djuta. Untuk satu sepeda ditaksir penghapusan dalam djangka waktu 5 tahun. Djadi kebutuhan setiap tahun = 4/5 djuta atau 800.000 sepeda. Kebutuhan devisa untuk 1 (satu) sepeda Rp. 800,— C & F. Sampai tahun 1965 perusahaan assembling sepeda tertjatat pada Departemen Perindustrian Rakjat sebanjak 42 perusahaan diantaranja 22 perusahaan baru.

Untuk masa-masa jang akan datang Departemen Perindustrian Rakjat menitik beratkan perhatiannja keusaha-usaha pembuatan onderdil didalam negeri, sehingga achirnja dengan demikian assembling sepeda di Indonesia tidak perlu lagi mengimpor onderdil-onderdil sepeda dari luar negeri, akan tetapi tjukup disupply dari industri lokal.

b. **Industri Email:**

Pada masa sebelum Perang Dunia ke-II, belum ada satupun industri barang-barang email di Indonesia. Barang-barang dari

email 100% diimpor dari luar negeri, akan tetapi setelah Indonesia merdeka, maka mulai tampak perkembangan sektor industri ini. Kemadjuan dari industri ini lain sekali sifatnja dari industri sepeda. Djika industri sepeda dapat kita lihat kemadjuannja, tahap demi tahap, jaitu bagaimana setjara berangsur-angsur onderdil-onderdilnja dapat dibuat sebagian besar di Indonesia, kalau industri email selain dari kwalitasnja bertambah bagus, djuga teknik pembikinannja berangsur-angsur baik.

Pada tahun 1954 ahli-ahli pembikinan dari barang-barang email ini kita datangkan dari luar negeri (mendapatkan visum), tetapi dari Djawatan Perindustrian pada waktu itu memberikan sjarat agar ahli-ahli jang didatangkan tersebut diharuskan mendidik pekerdja-pekerdja Indonesia asli kearah teknik pembikinan barang-barang email tersebut.

Seandainja bangsa kita telah mampu, maka ahli-ahli luar negeri itu dikembalikan kenegeri asalnja. Politik ini sangat menguntungkan sekali bagi negara kita. Jang djelas manfaat politik tersebut adalah menghemat pengeluaran devisa negara. Djadi dengan demikian djelas bahwa semua barang-barang jang dibuat dari bahan-bahan email pada waktu sekarang adalah dikerdjakan oleh ahli-ahli bangsa kita sendiri. Sampai saat ini djumlah perusahaan tersebut jang tertjatat pada Departemen Perindustrian Rakjat ada sebanjak 6 perusahaan. Perusahaan email jang terbesar dari ke 6 perusahaan itu djika dilihat dari kapasitas produksi dan tenaga kerdjanja adalah "Java Email". Namun demikian masih tetap menggunakan tjara lama, jakni digunakannja tenaga manusia untuk membalut email (Forkes). Jang termodern adalah perusahaan „Indonesia Email" jang untuk pembakarannja memakai mesin automatis.

Disini diberikan gambaran setjara singkat kebutuhan dari bahan-bahannja beserta produksi kapasitas dan matjam barangnja jang diprodusir.

Untuk menaksir kebutuhan barang-barang dari email ini kita mengambil dasar djumlah keluarga. Untuk keluarga jang menengah keatas rata-rata memerlukan barang-barang sebagai berikut:

Nama barang:	Berat barang:	Djumlah:
Pantji email 1 set	3750 gram	1 set
Rantang email	1000 gram	1 set

Tempat nasi	700 gram	1 buah
Waskom	500 gram	1 buah
Kan	350 gram	1 buah
Baki bulat	440 gram	1 buah
Tjeret	700 gram	1 buah
Wadjan	1000 gram	1 buah
Pispot	1000 gram	1 buah
Piring bulat	150 gram	2 buah

Djadi djumlah barang-barang tersebut keseluruhannja = 8990 gram. Penghapusan barang email rata-rata 2 tahun. Jang tergolong klas menengah keatas ditaksir 20% dari djumlah seluruh keluarga.

Djadi kebutuhan barang-barang ini setiap tahunnja 20% × 20 djuta × ½ × 8990 gram = 17.800 ton. Selandjutnja ditaksir 75% dari keluarga menggunakan barang-barang email tersebut dibawah ini:

Nama barang:	Berat barang:	Djumlah:
Piring	125 gram	5 buah
Tjangkir	200 gram	5 buah
Kobokan	100 gram	5 buah

Djumlah berat barang tersebut 2125 gram. Djadi kebutuhan barang-barang ini setiap tahunnja 75% x 20 djuta x ½ x 2125 gram = 15,938 ton. Selandjutnja kebutuhan barang-barang email keseluruhannja setahun diperkirakan sebanjak 17.980 + 15.380 ton = 33.360 ton.

Kebutuhan percapita setahun = 0,34 kg barang-barang email. Kebutuhan devisa untuk 1 kg. barang-barang email = Rp. 8,25 C & F. Menurut perlengkapan mesin jang ada, maka kapasitas produksi setiap tahunnja untuk 6 perusahaan 30.000 — 40.000 ton. Dengan demikian bilamana bahan bakunja mentjukupi, terutama jang berupa besi-besi plaat, bahan-bahan kimia, maka kebutuhan Indonesia sudah dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri. Demikianlah sekilas pandang mengenai perusahaan barang email di Indonesia.

c. **Industri barang-barang aluminium.**

Industri barang-barang aluminium di Indonesia, pada umumnja merupakan industri jang menghasilkan barang-barang perswerk. Pengetjoran aluminium ketjil-ketjilan biasanja mendjadi usaha tambahan dari afval jang tak terpakai. Barang-barang

perswerk jang terdiri dari alat-alat rumah tangga, pantji-pantji, wadjan, rantang dan lain sebagainja merupakan produksi utama dari pada industri-industri barang-barang aluminium tersebut.

Pada zaman pendjadjahan Belanda hampir semua barang-barang dari aluminium diimpor. Industri barang aluminium jang pertama-tama ialah „P.T. Mecaf" di Bandung didirikan pada tahun 1946. Peralatan jang dipakai bekas peninggalan Djepang. Selama 2 tahun, jakni antara tahun 1946-1948, perusahaan tersebut masih dalam taraf konsolidasi mesin-mesin. Produksi jang pertama dimulai pada tahun 1948 dengan mengutamakan produksi alat-alat rumah tangga.

Sesudah P.T. Mecaf menjusul beberapa industri lainnja. Sehingga achirnja pada tahun 1955 telah tertjatat beberapa perusahaan besar jakni: P.T. Pollex berkedudukan di Bandung, P.T. Canada, P.T. Subur, P.T. Ledu berkedudukan di Djakarta sesudah itu disusul P.T. Hin Chiang dan P.T. Ven Hong di Surabaja — sampai achir tahun 1964 telah tertjatat 39 perusahaan besar ketjil.

Pada umumnja perusahaan aluminium jang besar-besar diperlengkapi dengan perbengkelan sendiri, terutama untuk pembuatan matrys-matrys. Sampai saat ini P.T. Mecaf mempunjai kapasitas jang terbesar, baik djumlah maupun ragamnja. Hampir 60% dari mesin-mesin jang dipakai adalah buatannja sendiri, namun demikian hasil produksinja tidak kalah dengan hasil produksi dari mesin-mesin ex luar negeri.

Produksi barang-barang aluminium mentjapai puntjaknja pada tahun 1955. Pada waktu itu hampir semua perusahaan aluminium bekerdja dengan kapasitas penuh. Kebutuhan akan bahan baku aluminium 20.000 ton setahunnja. Produksi lainnja jang achir-achir ini dalam rangka mensukseskan Dwikora sangat penting ialah alat-alat untuk upgrading karet; bak-bak pembeku; rubber cups.

Djuga peralatan untuk seluruh angkatan bersendjata seperti rantang tentara; lundstray; veldfles; tjangkir dan lain-lain sudah dapat ditjukupi dengan produksi dalam negeri. Sajangnja bahan-bahannja jang berupa aluminium-sheet sampai sekarang masih diimpor.

Dalam masa pembangunan dewasa ini, dimana banjak dibangun gedung-gedung bertingkat jang memerlukan konstruksi ringan, bahan aluminium dapat digunakan misalnja sebagai Sun-Creakers. Pesanan-pesanan telah banjak mengalir untuk

pembuatan Sun-Creakers ini. Hal ini membawa suatu kemadjuan dalam bidang teknik produksi maupun dalam scope pemakaian bahan aluminium. Diharapkan dengan berhasilnja projek aluminium di Sumatra Utara, akan menambah kemadjuan industri aluminium di Indonesia.

d. **Industri alat-alat pertanian.**

Sudah sedjak nenek mojang kita, kemudian pada zaman pendjadjahan Belanda, alat-alat pertanian sebagian besar dibuat di Indonesia oleh pandai-pandai besi kita. Setelah Indonesia merdeka kemadjuan-kemadjuan ditudjukan untuk meninggikan mutu daripada hasil produksi lokal.

Induk-induk perusahaan logam jang didirikan pada tahun 1950 mempunjai tudjuan untuk memberikan tjontoh kepada masjarakat tentang tjara-tjara pembuatan alat-alat pertanian jang lebih baik, dengan kwalitas jang lebih baik pula. Induk-induk perusahaan logam jang sekarang telah ditetapkan sebagai unit-unit Perusahaan Negara dalam prakteknja sekarang tidak lagi sebagai induk pentjontohan akan tetapi merupakan usaha industri jang harus, jang bersifat komersiil dengan demikian sudah berobah dengan maksud-maksud semula. Unit-unit industri logam ini jang tergabung dalam P.N.P.R. Wijasa Yasa adalah sebagai berikut:

1. I.P. Logam Sokaradja.
2. I.P. Logam Besi Tjor Batur.
3. I.P. Pandai Besi Bareng.
4. I.P. Besi Lombok.
5. I.P. Logam Pasuruan.

Dalam rangka berdiri diatas kaki sendiri alat-alat pertanian sangat diperlukan sekali.

Dalam tahun 1950 sampai tahun 1964 banjak tertjatat kemadjuan-kemadjuannja. Perusahaan pandai Besi Tjisaat- Bogor tidak hanja membuat alat-alat pertanian, akan tetapi djuga alat-alat sendjata tadjam untuk kepentingan Angkatan Bersendjata. Produksi jang terpenting dalam rangka swasembada sandang pangan ialah patjul.

Kebutuhan patjul berbagai djenis dan kwalitas seluruhnja ditaksir 3 djuta buah setiap tahunnja.

Kebutuhan ini sudah dapat dipenuhi oleh industri-industri dan pandai-pandai besi jang ada sekarang. Diantara sekian

banjak industri-industri patjul, „Purdjani" di Jogjakarta merupakan satu-satunja industri jang mempunjai peralatan jang terbaik.

Sajang belum daat bekerdja sebagaimana diharapkan. Berbitjara mengenai kwalitas patjol kita, sebenarnja tidak kalah dengan patjul-patjul impor asal bahan-bahan baku jang berupa steel-sheet dengan sjarat-sjarat jang terbaik dapat dipenuhi.

Kemadjuan jang menjolok dalam pembuatan alat pertanian ini ialah dengan didirikannja perusahaan assembling Traktor Padi pada tahun 1962. Dengan menggunakan tenaga mesin 4 — 5 PK, maka traktor pada jang ketjil-ketjil ini dapat dipakai sebagai pengganti tenaga manusia dan tenaga kerbau.

Traktor padi dapat melajani segala bidang pertanian antaranja persawahan, perladangan dan pengangkutan. Dengan penggunaan traktor padi ini pengerdjaan tanah dapat dipertjepat.

Sajang harganja masih djauh diluar kemampuan daja-beli petani-petani kita, sehingga usaha untuk memadjukan pertanian dengan menggunakan traktor padi terhambat karenanja.

Menurut rentjana dalam waktu tidak lama lagi „P.T. Pabrik Diesel dan Traktor" akan dapat membuat onderdil dan peralatannja didalam negeri sendiri.

Usaha-usaha ini perlu mendapatkan bantuan dari Departemen-departemen jang bersangkutan.

c. **Industri pengetjoran logam.**

Industri pengetjoran logam sudah ada sedjak zaman pendjadjahan Belanda, jang menggunakan tungku cupoala dengan kapasitas ketjil dari ½ ton — 1 ton sehari. Produksi jang dihasilkan pada waktu itu sebahagian besar alat-alat rumah tangga, diantaranja wadjan, setrika, anglo besi, lumpang, periuk nasi, dan lain sebagainja.

Barang-barang ini pada waktu itu sangat laku disebabkan karena belum banjaknja digunakan barang-barang aluminium dan barang-barang email. Setelah Perang Dunia ke-II selesai, industri pengetjoran logam hidup lebih subur karena bahannja jang berupa besi-besi tua bekas-bekas peninggalan peperangan mudah didapat, karena besi-besi tua itu tersebar dimana-mana.

Tjorak ragam hasil produksi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemadjuan dibidang teknik. Pada waktu itu sudah banjak

jang dikerdjakan, antara lain pengetjoran-pengetjoran, blok-blok mesin, rumah-rumah pompa, kepala dan standaard mesin djahit, kerangka-kerangka mesin, per, mesin bubut, mesin gergadji listrik, mesin paku, pembuatan roda-roda gigi, roda gilas dan lain sebagainja.

Kesulitan-kesulitan jang dialami ialah :

1) Kekurangan bahan baku jang berupa pig iron, cokes & sirap.
2) Mutu jang kurang baik disebabkan kekurangan tenaga jang berpengalaman dalam pemakaian model, penjampuran pasir, pemeriksaan pasir dan lain-lain, sehingga hasil pengetjoran kurang baik, banjak porens banjak afwerking dan kurang halus.
3) Akibat dari kekurangan tenaga skill & tenaga expert dalam bidang pengetjoran dan teknik produksi, maka disamping mutu kurang baik, djuga banjak waktu terbuang dan banjak kesalahan-kesalahan serta banjak jang tak terpakai (afgekeurd), dengan demikian efisiensi sangat rendah jaitu antara 10 — 20% sadja.

Bilamana persjaratan 1, 2, 3, terpenuhi, maka produksi dapat dipertinggi sampai 500% dengan tidak perlu memekanisir peralatannja.

Pada umumnja perusahaan pengetjoran jang besar-besar termasuk wewenang Deperdatam dan merupakan bagian dari machine workshop.

Djumlah industri pengetjoran jang terdaftar pada B.P.3 tahun 1963 ada 22 perusahaan dan umumnja menghasilkan alat-alat rumah tangga.

Jang masih sangat diperlukan ialah pengetjoran jang chusus disebut die-casting. Dengan tjara ini mutu barang jang dihasilkan dapat dipertinggi dan sedikit dapat djuga untuk membuat silinder blok, silinder kop untuk penggerak dan hasil-hasil pengetjoran lainnja jang tjukup memenuhi sjarat-sjarat Internasional.

KEBUTUHAN BAHAN UNTUK INDUSTRI LOGAM TIAP TAHUN DALAM LINGKUNGAN KOMPERINDRA

No. Urut	Nama barang	Ukuran	Djumlah
1.	Plaat staal	1/32" s/d 1/4"	20.000 ton
2.	Plaatijzer		20.000 ton
3.	Plaat staafijzer		10.000 ton
4.	Assenstaal	Ø ½" s/d 2"	1.000 ton
		2" s/d 6"	100 ton
5.	Rondijzer	Ø ¼" s/d ½"	10.000 ton
6.	Verenstaal	0,9 mm	25 ton
7.	Verenstaal band	Ø 2 — 8 mm	25 ton
8.	Spijkerdraad	BWG 31	500 ton
		BWG 24 s/d 32	80.000 ton
		Ø ½" s/d 1½"	250 ton
9.	Ijzerdraad	Ø ½" s/d 1¼"	5.000 ton
10.	Paper clips draad	Ø 2 mm s/d 5 mm	500 ton
11.	Stalen draad	1/16" — 1/32"	5.000 ton
12.	Gegalv. gaasdraad	BEG 4 — 6	50 ton
13.	Niet gegolfd zinkplaat	„ 6 — 17	10.000 ton
14.	Stalen pijpen	„ 18 — 21	10.000 ton
15.	Naadloos unionbuis	„ 12 — 14	10.000 ton
16.	Pigron		25.000 ton
17.	Gietcokes		100.000 ton
18.	Hock en kanaalijzer		50.000 ton
19.	Matrijsenstaal		500 ton
20.	Toolsteel		100 ton
21.	Messingplatén	0,3 s/d ± 2,0 mm	5.000 ton
22.	Messingdraad	0,9 mm	20 ton
23.	Messingzeefdraad	100/cm2, 200/cm2	3.000 ton
24.	Messing ingot		1.000 ton
25.	Lood ingot		100 ton
26.	Zink ingot		100 ton
27.	Grafiet		50 ton
28.	Aluminium plaat	0,3 s/d 4 mm	20.000 ton
29.	Aluminium draad	s/d 4 Ø mm	100 ton
30.	Las electroden		20.000 ton
31.	Bicycle & parts	rupa-rupa barang untuk 100.000 bidji	
			408.920 ton

1 Oktober 1964.

Keterangan :

Tiap-tiap ton alat-alat dari besi harga 100 sampai 130 US $.

8. **Perkembangan industri lain-lain.**

a. **Industri Keramak/Porselein :**

Industri keramik setjara sederhana sudah dikenal sedjak nenek-mojang kita. Hampir semua alat-alat dapur kita selama itu terbuat dari pada tanah. Sampai saat ini didesa-desa ada jang tidak mengenal barang-barang mewah seperti pantji-

pantji aluminium, email dan lain sebagainja, dan penggunaan alat-alat dapur dari tanah masih tetap dipertahankan. Ada beberapa djenis jang diberi glazuur sehingga menambah daja tarik dari masjarakat.

Keachlian-keachlian jang sederhana inilah semakin meningkat dengan meningkatnja pengetahuan teknik dan ilmiah. Industri-industri keramik jang tergabung dalam P.N.P.R. Keramika Yasa ada sebanjak 5 perusahaan, jakni Pabrik Keramik Malang, Pabrik Keramik Majong, Pabrik Bata dan Semen Tahan Api „Loba", Pabrik Keramik Purwokerto, Pabrik Keramik & Pemurnian bahan Tulungagung. Barang-barang keramik jang dihasilkan sudah tjukup bermutu, namun masih diharapkan perbaikan-perbaikan sehingga dapat menjaingi barang-barang impor.

Disamping industri keramik milik Negara ini masih ada beberapa perusahaan jang termasuk industri besar, jakni Keramika Indonesia Baru, Majolika, dan Tjipaganti. Hasil-hasil jang bermutu dan bertjorak seni banjak dihasilkan achir-achir ini.

Dengan kerdja-sama jang erat dengan Bagian Seni Rupa Institut Teknologi Bandung, maka designing dapat mentjapai taraf-taraf internasional. Dalam pameran-pameran nasional maupun internasional hasil karya dibidang keramik ini sudah sering dipertontonkan, dan mendapat hasil-hasil jang memuaskan. Dalam rangka berdiri diatas kaki sendiri maka sektor industri ini diharapkan berkembang dengan luas. 90% dari bahan bakunja terdapat di Indonesia. Produksi barang-barang keperluan teknik seperti bata tahan api, isolator-isolator tegangan rendah sudah dibuat oleh industri-industri keramik Indonesia.

Maka bilamana batu tahan api dan isolator-isolator sematjam itu diberikan kesempatan berkembang lebih luas, maka tidak perlu diimpor lagi. Isolator-isolator tegangan tinggi dan batu tahan api kwalitas tinggi sedang diadakan penelitian lebih landjut untuk kemungkinan diprodusir didalam negeri.

Guna mentjukupi kebutuhan alat-alat rumah-tangga, piring, tjangkir dan lain-lain sebenarnja sudah tjukup dari dalam negeri, maka bilamana impor barang-barang sematjam itu distop, maka tidak akan memberi pengaruh terhadap masjarakat luar, bahkan memberikan proteksi terhadap industri-industri lokal. Perkembangan perusahaan keramik dari tahun ketahun dapat ditjatat sebagai berikut :

Tahun	Djumlah perusahaan	Produksi Kapasitas /Tahun
1955	— 25	1.300 ton
1956	— 30	1.360 ton
1957	— 80	5.160 ton
1958	— 70	5.736 ton
1959	— 25	5.820 ton
1960	— 86	6.092 ton
1961	— 89	6.144 ton
1962	— 89	6.240 ton
1963	— 90	6.300 ton
1964	— 91	7.363 ton

b. **Industri Grafika.**

Dalam industri grafika termasuk industri-industri pertjetakan, pengolahan kertas, pabrik kertas/karton, pabrik tinta tjetak, perusahaan bahan huruf, perusahaan karton, stensil, sheet/pita mesin dan lain-lain dan klise. Dalam alam kemerdekaan sektor industri ini memegang peranan jang sangat penting. Sesuai dengan pesatnja pendidikan, industri dan lain-lain, maka industri grafika sebagai salah satu sektor industri jang harus memberikan pelajanan dan harus dikembangkan sesuai dengan meningkatnja kebutuhan.

Untuk mentjukupi barang-barang produksi jang sangat diperlukan guna pelajanan tersebut, maka alat-alat produksi harus disempurnakan. Demikian djuga bahan-bahan baku/penolong, spare-parts dan mesin-mesin harus tjukup tersedia. Angka-angka kebutuhan jang telah direntjanakan menurut sumber ketetapan M.P.R.S. dan lain-lain, antara lain :

(1)	Barang tjetak pemakaian kertas ditaksir	145.150	ton/tahun
(2)	Barang tjetak kaleng pemakaian tjetak	4.100	ton/tahun
(3)	Kertas karton pemakaian kertas	18.000	ton/tahun
(4)	Tinta tjetak stensil (tinta)	1.400	ton/tahun
(5)	Stensil sheet	465.000	ton/tahun
(6)	Pita mesin tik/hitung	800.000	gl./tahun
(7)	Kertas karton	10.447.950	dos/tahun
(8)	Stat mental	677	ton/tahun
(9)	Buku tulis keperluan sekolah	160.000.000	buah/tahun

Pemeliharaan Deperindra terhadap sektor industri grafika ini chususnja mengenai kebutuhan-kebutuhan bahan-bahan baku dan spare-parts belumlah memuaskan, terutama untuk

produksi-produksi tahun 1955 sampai tahun 1964. Namun disadari bahwa kekurangan-kekurangan ini merupakan akibat dari semakin meningkatnja perdjoangan kita untuk merebut kembali Irian Barat dan mengganjang projek Nekolim Malaysia, sehingga urgensi program Pemerinah dititikberatkan kepada mensukseskan Trikora dan Dwikora. Bagaimanapun kesulitan jang dialami, terutama oleh perusahaan-perusahaan klise, pertjetakan kaleng, dan lain-lain, namun hasrat masjarakat untuk membangun tetap ada. Perkembangan dalam sektor ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnja djumlah perusahaan.

PERKEMBANGAN PERTJETAKAN
(CHUSUS JANG BERLISENSI)
DARI TAHUN 1955 S/D 1964.

Tahun	Djumlah Pertjetakan	Djumlah daja tjetak	
1955	785	2.845.921 m2/djam	
1956	806	2.948.992 m2/djam	
1957	843	3.273.405 m2/djam	
1958	864	3.273.665 m2/djam	
1959	877	3.507.169 m2/djam	
1960	832	2.797.062 m2/djam	Perusahaan
1961	848	2.595.409 m2/djam	dibagi-bagi
1962	900	2.498.982 m2/djam	Deperindra
1963	932	2.504.365 m2/djam	dan Deper-
1964	991	2.553.530 m2/djam	datam.

PERKEMBANGAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
GRAFIKA LAINNJA.

Djenis Perusahaan	Djumlah Perusahaan					
	1959	1960	1961	1962	1963	1964
Pengolahan kertas	73	94	117	183	183	—
Pabrik kertas/karton	36	36	47	52	75	—
Pabrik tinta tjetak	6	5	5	5	5	—
Perusahaan bahan huruf	1	1	1	1	1	—
Perusahaan karton stensil sheet/pita mesin dan lain-lain	2	2	2	2	2	—
Perusahaan klise	—	—	—	75	75	—

c. **Korek-api:**

Perkembangan korek api di Indonesia merupakan tjabang industri jang tergolong baru. Sebelum Perang Dunia ke II, sela-

ma pendudukan Djepang dan dalam tahun-tahun pergolakan Revolusi sesudah Proklamasi Kemerdekaan, belum ada pabrik korek-api. Segala kebutuhan akan korek-api masih diimpor dari negara-negara penghasil korek-api jang kenamaan seperti Swedia, Tsechoslovakia, Djepang dan lain-lain.

Pabrik korek-api jang pertama ialah „Djawa Match Factory", jang didirikan sedjak tahun 1949 di Djakarta dan mulai bekerdja pada tahun 1950. Sesudah pendirian pabrik jang pertama ini hasrat daripada industriawan timbul untuk mendirikan pula pabrik-pabrik korek-api, mengingat bahwa bahan pokok kaju jang memenuhi sjarat-sjarat untuk pembikinan korek-api di Indonesia terdapat tjukup banjak. Pabrik jang kedua menjusul, didirikan pada tahun 1952 di Surabaja dan pada tahun itu djuga sudah mulai dengan produksinja. Maka berturut-turut menjusul pendirian pabrik-pabrik korek-api lainnja, jaitu pada tahun 1953 didirikan di Djakarta dan mulai menghasilkan pada achir 1954. Pabrik jang keempat didirikan di Medan pada tahun 1954 dan telah mulai memprodusir pada pertengahan tahun 1955. Ditahun 1954 didirikan pula sebuah pabrik di Pasuruan dan mulai menghasilkan dalam triwulan terachir tahun 1955. Kemudian menjusul pendirian pabrik jang keenam di Medan pada pertengahan tahun 1955 dan mulai menghasilkan produksinja jang pertama pada pertengahan tahun 1956. Pabrik jang ketudjuh djuga didirikan di Medan dalam tahun 1958 dan achir tahun itu djuga sudah dapat start dengan produksinja. Pabrik korek-api B.D.B., jaitu pabrik korek-api jang keenam di Medan tidak puas dengan sebuah pabriknja sadja dan mendirikan sebuah pabrik lagi sebagai tjabangnja di Semarang dalam tahun 1958 dan achir tahun 1959 sudah dapat menghasilkan. Begitulah tjepatnja perkembangan industri korek-api halmana sangat menggembirakan kita agar kita lambat-laun dapat self-supporting dalam kebutuhan korek-api.

Kedelapan pabrik korek-api semuanja diusahakan oleh industriawan swasta. Melihat bahwa pabrik korek-api ini umumnja terletak di Djawa dan Sumatera, maka seorang pengusaha tidak mau ketinggalan untuk mendirikan sebuah pabrik korek-api di Sulawesi. Demikianlah maka dalam tahun 1961 dimulailah pendirian sebuah pabrik di Makasar, dan sedjak achir tahun 1962 pabrik tersebut telah dapat mulai dengan produksinja.

Daftar pabrik korek-api jang sudah didirikan itu ialah sebagai berikut :

P	Nama	Alamat
1.	Java Match Factory	Gang Mangga Dua, Djakarta.
2.	East Java Match Factory	Djalan Simomuljo No. 115 — 117 Surabaja.
3.	Indonesian Match Factory	Djalan Kemandoran 30, Paalmerah Djakarta.
4.	Sumatera Match Factory	Pulau Berajan km. 6 Medan. Djapanan, Pasuruhan.
5.	Djamico	Djalan Bedebe 43, Medan.
6.	B.D.B. Medan	
7.	P.T. Pabrik Korek-api „Deli"	Km. 6, Djalan Siantar, Medan.
8.	B.D.B. Semarang	Djalan Siliwangi P.o. Box 159 Semarang.
9.	P.T. Pabrik Korek Api „Sulawesi"	Djalan Nusantara 328 Makasar.

Hasrat untuk memperkembangkan industri korek-api terus meningkat, ternjata dengan adanja 2 permohonan dalam tahun 1964 untuk mendapat idzin mendirikan pabrik korek-api di Medan dan di Bandung. Dalam permohonan-permohonan tersebut disampaikan kebutuhan devisa untuk mesin-mesin, akan tetapi mengingat terbatasnja devisa Negara dalam tahun-tahun terachir, hingga devisa hanja untuk keperluan bahan baku/penolong dan spare-parts jang sangat urgen, sehingga tidak disediakan devisa untuk mesin-mesin, maka terpaksa permohonan-permohonan tersebut untuk sementara tidak dikabulkan.

Produksi :

Dengan adanja hasil produksi korek-api didalam negeri, maka sedikit demi sedikit impor korek-api dapat dikurangi. Mengenai produksi korek-api selama perkembangannja, dibawah ini kami sadjika angka-angka*) sebagai berikut:

Tahun	Djumlah Perusahaan	Produksi	Keterangan
1954	3	77.479.000 kotak	
1955	5	99.069.000 kotak	
1956	6	189.987.000 kotak	
1957	6	318.404.000 kotak	
1958	6	430.190.000 kotak	
1959	6	425.605.000 kotak	
1960	7	468.797.000 kotak	
1961	7	220.592.000 kotak	(kwartal I + kwartal II = setengah tahun).

*) Sumber B.P.S.

Adapun kapasitas potensiil dari 9 pabrik korek-api jang sudah didirikan itu menurut kapasitas mesin-mesin seluruhnja berdjumlah 808,2 djuta kotak.

Ternjata bahwa pabrik-pabrik ini belum bekerdja penuh (kira-kira 55 — 60%) mengingat bahwa skill dan efisiensi belum tjukup dalam beberapa tahun ini dan djuga disebabkan karena kekurangan bahan baku jang selain kaju sebagai bahan bakunja, djuga chemicalien dan kertas pembungkus masih harus diimpor semua. Dapat diharapkan bahwa produksinja dapat ditingkatkan asal dapat diperoleh tjukup devisa untuk keperluan bahan-bahan baku dan penolongnja.

Dengan demikian, jaitu dengan adanja tjukup minat dari para industriawan untuk mendirikan pabrik-pabrik korek-api baru, maka industri korek-api didalam negeri mempunjai masa depan jang menggembirakan sehingga lambat-laun impor korek-api dapat dikurangi dan achirnja distop sama sekali untuk dapat betul-betul berdiri diatas kaki sendiri (self-supporting) dalam bidang ini.

d. **Industri barang-barang plastik.**

Barang-barang plastik banjak dipakai oleh masjarakat Indonesia setelah Perang Dunia ke-II. Sedjak tahun 1953 banjak didirikan perusahaan industri plastik ini jang menghasilkan alat-alat rumah-tangga, sikat-gigi/sisir, kantjing, mainan anak-anak dan barang-barang klontong lainnja, kesemuanja ini bersifat barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari.

Sedjak tahun 1959 maka usaha-usaha ini semakin meluas dengan pembuatan kantong-kantong plastik, plastic-sheet, imitasileer, sebagai substitutie kulit jang murah. Produksi jang lain djuga mulai dibuat dalam negeri. Dalam zaman modern seperti thermos, veld fles, jerican, ember dan lain-lain djuga mulai dibuat dalam negeri. Dalam zaman modern ini banjak sekali barang-barang dibuat dari plastik, sampai kepembuatan alat-alat tehnik, bahan-bahan bangunan dan lain-lain. Pada tahun 1963 telah berdiri satu perusahaan pipa plastik jang pertama-tama di Indonesia, jakni „P.T. Prakarsa". Pipa plastik jang telah berhasil untuk digunakan sebagai pipa-pipa saluran air dan instalasi listrik. Dengan berhasilnja pembuatan pipa plastik ini memberikan banjak keuntungan sebab sebenarnja pipa plastik jang ringan dan tidak berkarat memberikan lapangan penggunaan jang lebih luas.

Oleh karena itu barang ini mempunjai pasaran jang sangat baik.

Pada taraf permulaan industri-industri plastik ini tidak banjak menghadapi kesulitan bahan-bahan baku, karena bahan-bakunja dapat dibeli didalam negeri melalui P.T. Shell, B P.M. dan Stanvac jang mengimpor bahan-bahan tersebut dengan devisanja sendiri. Tetapi achir-achir ini setelah ketiga maskapai itu (P.T. Shell) tidak lagi memberikan distribusi bahan baku plastik, maka banjak industri plastik menghadapi kemunduran. Satu-satunja djalan untuk memperoleh bahan plastik polythylen, polysterin, polypropylen dan P.V.C. Connpond ialah dengan melalui impor dengan S.P.P. atau mengharapkan djatah devisa dari Departemen Perindustrian Rakjat.

Dari industri plastik ini dapat disebutkan beberapa industri jang tjukup besar dan memberikan efek jang tjukup luas terhadap perkembangan ekonomi dinegara kita.

Daftar industri plastik.

No.	Nama perusahaan	Alamat	Berdiri	Hasil produksi, utama
1.	W. Hakking Industries	Dj. Bandengan Utara 43, Djakarta.	24-2-1954	Sikat gigi, barang-barang plastik/slang/
2.	P.T. Wdex Plastic Ltd.	Dj. Bandengan Utara 91 (dlm), Djakarta.	17-4-1963	Barang-barang plastik.
3.	N.V. Mulana Tooth Brush & Plastic Goods Fact.	Dj. Kalibaru Barat 35 Semarang.	30-9-1954	Sikat gigi.
4.	Kamo Plastic &	Dj. Bunguran 51 Surabaja.	27-10-1942	Sikat gigi, barang-barang plastik.
5.	P.T. Dinas Unggul Leather Ware Factory.	Dj. Paalmerah Utara 69-71 Djakarta.	1-1-1961	Plastik sheet, imitasi leer.
6.	Nan Yang Rubber Industri Co. Ltd.	Dj. Angke Gg. Siangtea 25 Djakarta.	17-6-1954	Plastik sheet. imitasi leer.
7.	The Victor Factory	Dj. Tiang Bendera 54 Djakarta	7-12-1963	Plastik sheet.
8.	C.V. Gemilang	Dj. Kebajoran lama 15A	15-5-1962	Plastik sheet.

No.	Nama perusahaan	Alamat	Berdiri	Hasil produksi utama
9.	Tjhauw Loen Rubber Factory	Dj. Ketapang 31 Djakarta.	12-3-1959	Plastik sheet.
10.	P.T. Plastikaraya	Dj. Pendjaringan 39 Djakarta.	24-4-1963	Plastik sheet.
11.	P.T. Prakarsa Plastics.	Dj. Djati Petamburan II Djakarta	25-11-1963	Plastik sheet.
12.	Lian Hoo	Dj Siliwangi 60 Semarang.	1955	Barang-barang plastik untuk radio.

Dari daftar diatas terbukti bahwa industri ini pada umumnja didirikan sesudah tahun 1953, dan kemadjuan pesat dialami sesudah tahun 1959.

Guna memenuhi konsumsi dalam negeri, maka usaha-usaha pembuatan mesin plastik dalam negeri mulai timbul. Pada waktu ini sudah banjak mesin-mesin plastik dibuat didalam negeri, hanja alat-alat pengukur panas dan tekanan jang masih perlu diimpor.

e. **Industri Tapal Gigi.**

Sebelum Perang Dunia ke-II di Indonesia sudah terdapat sebuah pabrik tapal gigi, jaitu N.V. Colibri, jang memprodusir tapal-gigi dengan merk "Pepsodent". Perkembangan industri tapal-gigi selandjutnja baru dimulai pada tahun 1950 dengan didirikannja pabrik tapal-gigi jang kedua di Surabaja, jaitu pabrik "Prodent". Kemudian menjusul pabrik tapal-gigi jang ketiga, jaitu "Denta" jang mulai dibangun pada tahun 1954 di Djakarta dan mulai menghasilkan dalam tahun 1954 itu djuga. Sesudah itu hasrat untuk mendirikan pabrik tapal-gigi terus tumbuh dengan tjepatnja dan pendirian pabrik-pabrik tapal-gigi baru bermuntjulan dibeberapa tempat/kota besar. Sampai sekarang di B.P.3. telah tertjatat sebanjak 13 buah perusahaan tapal-gigi.

Untuk memperoleh gambaran jang njata mengenai perkembangan industri tapal-gigi ini, dibawah ini diberikan daftar dari perusahaan-perusahaan jang tertjatat sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	A l a m a t	T a h u n	
			didirikan	mulai me produsir
1.	N.V. Colibri (Pepsodent)	Dj. Ngagel 173—175 Surabaja.	1941	1941
2.	Prodent	Dj. Kalibaru 195—197 Surabaja.	1950	1950
3.	Denta	Tjawang II/295 Djakarta.	1954	1954
4.	Introdent	Bandengan Utara No. 85/41, Djakarta.	1954	1956
5.	Best O Dent	Dj. Raya 82b Krawang.	1956	1956
6.	Baletta Chemical Works (Omedent)	Dj. Pragolan Bunder 19 Surabaja.	1957	1957
7.	Illmi	Kagog/Sultan Agung No. 162 Semarang.	1958	1958
8.	Karya Utama (Paradent)	Dj. Ikan Tjutjut No. 2 Surabaja.	1959	1960
9.	Delident	Dj. Prof. Latumenten No. 37 Djakarta.	1959	1961
10.	Permanen	Dj. Bandengan Selatan No. 3 Djakarta.	1960	1961
11.	Superdent	Dj. Pintu Ketjil II/ Gudang D, Djakarta.	1961	1961
12.	Nusa Tenggara	Dj. Mangga Dua Dalam No. 7 Djakarta.	1961	1961
13.	Red & White	Dj. Kampung Krendang No. 11, Djembatan Lima Djakarta.	1961	1962

Dari perusahaan-perusahaan jang terdaftar itu 5 buah perusahaan merupakan perusahaan besar dan jang lainnja tergolong perusahaan sedang dan ketjil.

Dari perusahaan-perusahaan tapal-gigi itu jang mempunjai mesin untuk membikin tube ialah pabrik Prodent dan Denta, dengan bahan baku impor aluminium rondellen.

Produksi.

Dengan adanja perkembangan industri tapal-gigi ini maka kebutuhan tapal-gigi lambat laun dapat dipenuhi sendiri. Un-

tuk mengetahui perkembangan produksi tapal-gigi dibawah ini sadjikan angka-angka produksi dari perusahaan-perusahaan tapal-gigi jang besar-besar (sumber B.P.S.):

Tahun	Djumlah Perusahaan jang lapor	Hasil Produksi Tapal Gigi
1954	3	13.296.000 tube besar
1955	3	17.952.000 tube besar
1956	5	19.944.000 tube besar
1957	5	18.492.000 tube besar
1958	5	10.636.400 tube besar
		10.540.000 tube ketjil
1959	5	15.334.172 tube besar
		3.446.000 tube ketjil
1960	5	13.575856 tube besar
		2.826.000 tube ketjil

Dalam tahun 1963 hasil produksi dari Perusahaan-perusahaan jang memberikan laporan ada sebanjak 18.436.476 tube, 85% nja adalah tube besar.

Adapun kapasitas produksi potensiil dari ke-13 perusahaan tapal-gigi jang tertjatat itu berdasarkan mesin-mesin dan alat-alatnja semuanja berdjumlah 82.410.000 tube (besar dan ketjil).

Dengan perkembangan industri tapal-gigi ini maka kebutuhan tapal-gigi lambat laun sudah dapat dipenuhi dengan hasil produksi dalam negeri, apa lagi bila diingat bahwa perusahaan-perusahaan jang telah beridiri itu belum bekerdja penuh (baru = 20 — 25%). Bila dapat disediakan devisa jang tjukup untuk mendatangkan bahan baku/penolong maka kita sudah dapat self-supporting dalam bidang ini. Dari Departemen Perindustrian Rakjat sendiri pernah mengadjukan usul kepada J.M. Menko Keuangan dan J.M. Menteri Perdagangan untuk mengadakan penjetopan terhadap impor tapal-gigi.

g. **Industri Minjak Goreng/Margarine.**

Perkembangan:

Pada waktu sebelum Perang Dunia ke-II, kebutuhan akan minjak makan dipenuhi dari hasil jang diprodusir oleh rakjat setjara sederhana, ialah dengan djalan menguapkan santan kelapa (coconut-milk) sehingga diperoleh minjak makan.

Sesudah Indonesia merdeka dan taraf hidup kita semakin lama semakin tinggi, maka kebutuhan akan minjak makan tidak dapat ditjukupi oleh perusahaan-perusahaan rakjat jang bekerdja setjara sederhana, terutama untuk memenuhi kebutuhan rakjat dikota-kota besar. Minjak kelapa hasil pabrik-pabrik minjak kelapa jang bekerdja setjara nasional dengan proses pengepresan dari kopra, meskipun harganja lebih murah dari pada harga minjak makan buatan kampung, kwalitasnja rendah sebagai minjak makan dan mempengaruhi rasa daripada makanan jang dimasaknja (rasanja mendjadi kurang enak). Maka dimulailah pendirian pabrik-pabrik minjak goreng. Istilah minjak goreng ialah minjak makan jang diperoleh dari pemurnian minjak kelapa dengan maksud menghilangkan atau mengurangi sifat-sifat minjak kelapa jang tidak baik, diantaranja mudah „tengik", karena adanja asam-asam, tidak djernih, warna kurang menarik dan sebagainja.

Sebelum Perang Dunia ke-II sudah ada sebuah pabrik jang menghasilkan margarine dan minjak goreng, jaitu pabrik Unilever. Pada tahun 1955 sudah tertjatat 5 buah perusahaan minjak goreng dan perkembangan selandjutnja adalah menggembirakan. Sampai tahun 1962 sudah tertjatat 10 buah perusahaan minjak goreng. Mengingat dalam tahun-tahun terachir keadaan devisa negara sangat sempit sehingga tidak tersedia devisa untuk mesin-mesin, maka kebutuhan mesin-mesin untuk replacement, perluasan perusahaan dan pembangunan pabrik-pabrik minjak goreng baru tidak dapat terlaksana.

Sebagai tjontoh dalam tahun 1964 oleh sebuah pabrik minjak kelapa di Djakarta telah diadjukan permohonan untuk mendapatkan djatah devisa mesin-mesin untuk pembangunan sebuah pabrik minjak goreng dengan kapasitas 20 ton tiap hari atas dasar "deferred payment" dari pabrik mesin Frans Smulders dinegeri Belanda. Mengingat untuk Kompartemen Perindustrian Rakjat tidak tersedia alokasi devisa untuk mesin-mesin, maka permohonan tersebut untuk sementara tidak dapat dikabulkan. Oleh Kompartimen Perindustrian Rakjat telah diandjurkan kepada para industriawan jang mempunjai minat dalam bidang pembangunan minjak goreng untuk mentjari djalan lain ialah dengan djalan production sharing.

Produksi:

Mengenai angka produksi dibawah ini disadjikan angka-angka produksi dari perusahaan-perusahaan besar dan sedang jang memberikan laporan sebagai berikut (sumber B.P.S.).

Tahun	Djumlah perusahaan jang melapor.	Hasil produksi minjak goreng/ margarine
1954	3	19.717 ton
1955	3	20.540 ton
1956	4	22.875 ton
1957	4	23.333 ton
1958	5	16.161 ton
1959	7	22.761 ton
1960	7	32.833 ton

Dari angka-angka produksi ini rata-rata 10.000 ton terdiri dari margarine.

Untuk memberikan gambaran jang lebih njata mengenai perkembangan industri minjak goreng dan beberapa banjaknja produksi kapasitas potensiil dibawah ini diberikan daftar sebagai berikut:

Tahun	Djumlah perusahaan jang terdaftar.	Produksi kapasitas potensiil setahun
1955	5	44.400 ton
1956	6	45.900 ton
1957	6	45.900 ton
1958	7	54.800 ton
1959	9	56.600 ton
1960	10	61.400 ton
1961	10	61.400 ton
1962	10	61.400 ton

h. **Ban sepeda luar.**

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan, di Indonesia baru terdapat 5 buah pabrik ban sepeda dengan kapasitas produksi potensiil 1.190.000 buah per tahun.

Setelah Indonesia berhasil merebut kemerdekaan industri-industri ban sepeda menundjukkan kemadjuan jang tjukup pesat lebih-lebih pada achir-achir ini setelah mesin-mesin pres untuk pengolahan ban-ban sudah banjak jang dibikin didalam negeri.

Pada waktu ini tertjatat 15 perusahaan ban besar jang mempunjai produksi potensiil 5.000.000 buah ban luar disamping itu banjak perusahaan ketjil jang belum diketahui betul berapa djumlahnja, tetapi didaerah Malang sadja terdapat 24 perusahaan dengan djumlah pres ban luar sebanjak 153 buah jang rata-rata tiap pres dapat menghasilkan 25 buah ban luar tiap hari. Hal demikian dapat dinilai bahwa industri ban sepeda menundjukkan kemadjuan jang sangat pesat, tetapi pada umumnja perusahaan-perusahaan ini mengalami kesulitan-kesulitan tentang bahan baku jang berupa kanvas dan kompound. Kanvas ini adalah sangat mempengaruhi mutu daripada ban, sedangkan kompoundnja kebanjakan untuk perusahaan-perusahaan ketjil diperoleh dari pabrik-pabrik kompound jang pada umumnja perusahaan-perusahaan kompound ini djuga mengalami kesulitan-kesulitan untuk memperoleh bahan baku jang berupa carbon black.

Mengenai kawat/kill tidak begitu mendapatkan kesulitan-kesulitan untuk perusahaan-perusahaan ketjil mereka memperolehnja dari kawat bekas dari ban-ban mobil. Keadaan perusahaan-perusahaan ban tersebut diatas belum termasuk perusahaan Good Year dan Dunlop jang masuk wewenang Deperdatam jang kapasitasnja tjukup besar.

i. **Ban sepeda dalam.**

Demikian pula perusahaan-perusahaan ban-kopel dalam djuga memperoleh kemadjuan jang tjukup pesat, tetapi untuk ban dalam ini belum bisa dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan ketjil seperti halnja industri ban luar.

Hal ini disebabkan ketjuali alat-alatnja belum dapat dibikin didalam negeri djuga proses pembuatannja harus teliti. Untuk melihat perkembangannja lebih landjut mengenai perusahaan ban dalam ini dapat dikemukakan bahwa sebelum tahun 1945 terdapat 5 buah perusahaan jang mempunjai produksi potensiil 2.130.000 buah ban dalam. Sesudah tahun 1945 terdapat 20 buah perusahaan dan mempunjai produksi potensiil 6.000.000 buan ban dalam. Angka-angka tersebut belum termasuk perusahaan-perusahaan jang ada didalam wewenang Deperdatam seperti Good-Year dan Dunlop.

j. **Sabun.**

Perkembangan perusahaan sabun dinegara kita mengalami kemadjuan jang pesat sekali, sehingga sudah mentjukupi se-

luruh kebutuhan terutama untuk sabun tjutji. Hal ini disebabkan pembikinan sabun tidak sulit dan tjukup dengan alat-alat jang serba sederhana.

Jang menghambat produksinja jalah mengenai bahan baku jang berupa Coustic soda jang masih harus diimpor, sedang kan untuk bahan-bahan lainnja seperti minjak kelapa pada umumnja tidak mengalami kesulitan.

Perusahaan sabun ini terdapat tersebar diseluruh daerah-daerah kepulauan Indonesia. Untuk sabun mandi perkembangannja tidak seperti halnja dengan sabun tjutji, karena untuk sabun mandi proses pembikinannja sedikit lebih sulit dan harus memenuhi sjarat-sjarat terutama sjarat-sjarat untuk kesehatan sehingga tidak setiap orang bisa mengerdjakannja. Masih banjak terlihat bahwa sabun mandi ini diimpor dari negara-negara lain.

Untuk melihat lebih djelas perkembangannja perusahaan sabun ini bahwa sebelum Proklamasi tertjatat 80 buah perusahaan sabun dengan kapasitas potensiil 43.000 ton/tahun dan sesudah merdeka tertjatat 548 buah perusahaan dengan kapasitas potensiil ± 100.000 ton/tahun.

C. KEGIATAN-KEGIATAN JANG MEMBERI LANDASAN KUAT UNTUK BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI.

1. Industri Perbengkelan.

Dalam usaha-usaha kita untuk berdiri diatas kaki sendiri sesuai dengan tantangan zaman modern dewasa ini, maka tidaklah tjukup dengan penggunaan alat-alat sederhana, atau dengan menggunakan bahan-bahan jang tanpa mendapatkan penjelidikan ilmiah jang seksama. Hasil sandang harus memenuhi sekurang-kurangnja persjaratan jang minimal menurut standard internasional.

Substitusi untuk bahan pangan harus mengandung gizi-gizi jang bermutu tinggi. Dengan demikian alam fikiran jang terbawa oleh perkembangan zaman memberikan pedoman-pedoman lain bagi istilah berdiri diatas kaki sendiri. Berdiri diatas kaki sendiri pada zaman Revolusi Physik jang tjukup dengan alat-alat atau bahan-bahan pengganti jang sangat sederhana asal dapat dipakai, tidak populer lagi. Orang menghendaki djauh lebih dari itu. Pada perkembangan sekarang dimana kita telah menggunakan berbagai alat-alat dan mesin

produksi jang serba modern. Mesin-mesin berbagai tjorak ragamnja dari berbagai negara disamping alat-alat dan mesin kuno sebelum perang, memberikan aktivitas tertentu untuk pemeliharaannja.

Pada tahun-tahun terachir ini Negara kita kekurangan devisa sehingga untuk pemakaian devisa jang terbatas itu dengan sebaik-baiknja, maka prioritas peng-imporan barang dititik beratkan kepada pemenuhan bahan-baku sedangkan pengimporan spare-parts sangatlah terbatas. Dalam rangka berdiri diatas kaki sendiri penjediaan spare-parts dari dalam negeri memegang peranan sangat penting. Tanpa spare-parts jang tjukup industri-industri akan matjet, walaupun bahan-bakunja tersedia. Usaha-usaha pembuatan spare-parts telah dilakukan di Indonesia sedjak lama dan ditingkatkan aktivitas-nja sedjak tahun 1957. Kemadjuan dalam bidang perbengkelan ini tidak terbatas pada pembuatan spare-parts sadja, akan tetapi sampai kepada pembuatan mesin-mesin sendiri. Semendjak tahun 1957 banjak mesin-mesin jang sudah dapat dibuat didalam negeri. Dapat dipastikan bahwa mesin-mesin huller padi, remilling karet, pompa-pompa air, mesin-mesin pres genteng, tegel, mesin paku, mesin plastik, mesin bor listrik, mesin tenun dan lain sebagainja dapat dibuat didalam negeri asal bahan-baku mentjukupi, terutama pigiron, cokes, besi siku dan lain-lain.

Disinilah letak pentingnja workshop dan pengetjoran didalam rangka berdiri diatas kaki sendiri. Sesudah tertjantum dalam pola Pembangunan Semesta Berentjana Tahapan Pertama bahwa perbengkelan perlu mendapat perhatian mengenai pembangunannja, namun dalam pelaksanaannja perbengkelan belum mendapat perhatian jang sewadjarnja sebagian besar perbengkelan kita memiliki mesin-mesin jang sudah tua bahkan ada diantara mesin-mesinnja keluaran sebelum Perang Dunia ke-II, jang mana mesin-mesin jang demikian kurang mampu lagi mengikuti perkembangan industri-industri modern jang memerlukan spare-parts dengan presisi tinggi. Kegunaan perbengkelan memang tidak dapat dirasakan sekaligus oleh masjarakat, karena bukanlah merupakan usaha jang menghasilkan produksi barang djadi, barang-barang konsumsi, akan tetapi hanja merupakan suatu usaha jang memberikan servis kepada usaha-usaha jang lain, demikian pula halnja dengan sebagian besar dari industri-industri pengetjoran kita.

Kemampuan dan kesanggupan dari industri-industri perbengkelan kita tjukup, bahkan sudah kami uraikan diatas bahwa

sudah banjak produksi mesin-mesin dibuat dari dalam negeri, walaupun kwalitasnja dan produktivitasnja masih perlu dipertinggi.

Dengan mendidik lebih banjak tenaga ahli penjediaan bahan-baku jang tjukup, dan perlengkapan alat-alat dan mesin-mesin jang up to date hal itu akan membawa kemadjuan jang pesat bagi Negara kita. Bahkan kalau dilihat aktivitas jang telah ada sekarang maka Negara kita akan dapat bersaing dengan Negara Asia lainnja jang telah madju. Hal ini telah diakui sendiri oleh penindjau-penindjau dari Negara Djepang dan negara-negara asing lainnja. Dalam rangka kerdja sama dengan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1963 telah diundang ke Indonesia expert-expert dalam lapangan metal working shop untuk mengadakan survey di Indonesia.

Maksud dan tudjuan dari Pemerintah Indonesia ialah untuk memperoleh data-data dari machine park jang ada sekarang, dan sebagaimana tjara penggunaannja jang seefisien-efisiennja untuk menaikkan daja-guna dan kemampuan berproduksi. Dari hasil survey selama 1 tahun ini dapatah dipeladjari sampai dimana kemadjuan sektor industri perbengkelan kita selama ini, dan dalam segi-segi mana masih harus mendapatkan perhatian Pemerintah. Pada dasarnja laporan survey ini memberikan ungkapan jang sangat menarik dan mengandung harapan-harapan jang besar untuk hari depan disamping kita dapat mengetahui kelemahan-kelemahan kita, sehingga dapat diketahui bagaimana kesulitan-kesulitan harus diatasi.

2. Balai Penelitian.

Salah satu tugas dari Balai-balai Penelitian ialah mengadakan penjelidikan terhadap kegunaan bahan-bahan jang sekiranja dapat bermanfaat untuk sesuatu djenis industri, dan mengadakan penelitian terhadap mutu hasil-hasil industri pada umumnja dan kemungkinan memperbaikinja.

Dengan demikian djelaslah sudah bahwa dalam rangka usaha berdiri diatas kaki sendiri Balai-balai Penelitian ini memegang peranan jang penting.

Mengingat luasnja bidang Perindustrian Rakjat, maka didirikan berbagai-bagai balai oleh P.N.P.R. Nupiksa Yasa Unit-unit penelitian ada 7 buah jakni :

(1) Balai Penelitian Industri di Djakarta.
(2) Balai Penelitian Kimia di Bogor.

(3) Balai Penelitian Bahan-bahan di Bandung.
(4) Balai Penelitian Tekstil di Bandung.
(5) Balai Penelitian Keramik di Bandung.
(6) Balai Penelitian Batik di Jogjakarta.
(7) Balai Penelitian Kulit di Jogjakarta.

Achir-achir ini kegiatan dalam bidang penelitian atas instruksi J.M. Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat perlu ditingkatkan sesuai dengan tantangan terhadap tekad kita untuk berdiri diatas kaki sendiri. Walaupun hasilnja belum memuaskan, namun usaha-usaha jang njata dapat ditjatat.

DAFTAR PROJEK-PROJEK PENELITIAN JANG TELAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN OLEH P.N.P.R. NUPIKSA YASA.

No.	Nama Projek Penelitian	Dilaksanakan oleh	Keterangan
1.	Minjak dari bidji kapok.	Balai Penelitian Industri di Djakarta.	Tudjuan projek adalah mendapatkan minjak goreng sebagai pengganti minjak kelapa. Projek telah selesai dalam skala laboratorium dan sebagai kelandjutannja ada kemungkinan bidji kapok dapat diganti dengan bidji kapas.
2.	Rauwolfia Serplutina.	Balai Penelitian Industri di Djakarta.	Reserpin sebagai obat tekanan darah tinggi dapat diatasi dari akar-akar. Rauwolfia serpentina Projek dihentikan oleh karena kesulitan mendapatkan akar.
3.	Mn 02 untuk batre kering.	Bahan-bahan di Bandung. Balai Penelitian	Dalam rangka usaha mengenai impor Mn 02 untuk pembuatan batre kering, dilakukan penelitian terhadap bidji-bidji mangaan jang terdapat di Indonesia. Penelitian masih dilandjutkan.

4. Minjak djarak untuk DCO (Dehy drated castor oil).	Balai Penelitian Bahan-bahan di Bandung.	Penelitian dilakukan terhadap pengolahan minjak djarak mendjadi minjak tjat jang besar kemungkinan dapat menggantikan minjak Unna (linseed oil). Penelitian masih dilandjutkan.
5. Penelitian semen rakjat.	Balai Penelitian Bahan-bahan di Bandung.	Dilakukan penelitian dalam tjara jang sederhana mengenai pembuatan semen dengan hasil jang memenuhi sjarat-sjarat pemakaian, dimana bahan-bahan tersedia di Indonesia. Penelitian masih dilandjutkan.
6. Penelitian pembuatan Pozzotan linecement.	Balai Penelitian Bahan-bahan di Bandung.	Untuk mengurangi pemakaian semen bagi djenis-djenis konstruksi ringan, dilakukan penelitian terhadap pemakaian tjampuran pozzotan dan kapur sebagai bahan pengikat. Penelitian masih dilandjutkan.
7. Penelitian pembuatan refractoriestrik.	Balai Penelitian Keramik di Bandung.	Penelitian dilakukan mengingat kebutuhan akan refractories baik mengenai djumlah maupun mutunja. Bahan-baku jang bermutu tinggi untuk pembuatan refractories tersedia tjukup banjak di Indonesia. Penelitian dalam pelaksanaan.
8. Penelitian pembuatan isolator listrik.	Balai Penelitian Keramik di Bandung.	Isolator-isolator listrik untuk tegangan tinggi masih harus diimpor. Usaha-usaha jang dilakukan ialah meneliti bahan-bahan jang dapat digunakan, pembuatannja dan pengudjian hasilnja. Penelitian dalam pelaksanaan.
9. Pembuatan soga bubuk dari daun teh.	Balai Penelitian Batik di Jogjakarta.	Projek telah selesai dalam usaha laboratorium dengan mendapatkan zat-zat warna untuk batik. Hasil-hasil jang diperoleh selama ini masih perlu diadakan perbaikan-perbaikan.

10.	Bahan-bahan kimia dalam daun.	Balai Penelitian Kimia di Bogor.	Telah dikemukakan bahwa daun teh dapat dipergunakan sebagai obat pembatik. Dalam penelitian ini dilakukan penjelidikan terhadap susunan dan sifat-sifat kimia dari bahan-bahan kimia jang terdapat dalam daun teh, jang penting djuga untuk bahan-bahan industri.
11.	Penelitian djagung	Balai Penelitian Kimia di Bogor.	Diadakan penelitian mengenai pengolahan djagung mendjadi bahan lain disamping sebagai makanan, berhubung dengan bahan kandji jang ada dalam djagung. Penelitian dalam pelaksanaan.
12.	Penelitian sutera alam.	Balai Penelitian Tekstil di Bandung.	Tudjuan penelitian adalah menjelidiki kemungkinan pengolahan sutera alam Indonesia untuk didjadikan bahan sandang, bahan industri untuk keperluan kesehatan dan lain-lain. Penelitian dalam pelaksanaan.
13.	Penelitian tekstil synthetis.	Balai Penelitian Tekstil di Bandung.	Penelitian syntesa zat warna ini disusun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk industri batik. Setjara laboratorium telah dapat dibuat berbagai matjam zat warna synthetis, terutama golongan Naptol.
14.	Penelitian pembuatan Dry Yeast.	Balai Penelitian Kimia di Surabaja.	Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan yeast kering jang sampai sekarang masih diimpor. Penelitian dalam pelaksanaan.
15.	Penelitian strain aspergilles.	Balai Penelitian Kimia di Surabaja.	Dalam penelitian ini terutama akan diselidiki kemungkinan strain aspergilles untuk mengatasi asam nitrat; seperti diketahui asam nitrat adalah penting untuk industri-industri kimia, misalnja sebagai soluhrt essence dan sebagainja. Penelitian dalam pelaksanaan.

Disamping penelitian setjara ilmiah, maka usaha-usaha setjara ketjil-ketjilan telah dimulai.

a. **Minjak djarak.**

Pembuatan minjak djarak sudah dikerdjakan oleh P.N.P.R. Nabati Yasa, bahkan sudah ada usaha-usaha untuk ekspor guna menambah devisa Penanaman- penanaman pohon djarak mulai diintensifkan. Guna menambah kapasitas produksijna, sedang diusahakan mesin-mesin jang berkekuatan 30 ton/sehari dari kredit Belanda.

Semen Rakjat.

Untuk menutup kekurangan Portlad-cement dewasa ini jang akibatnja terasa sampai kepelosok-pelosok, maka semen rakjat sudah mendjadi program dari Departemen Perindustrian Rakjat untuk dikembangkan lebih luas. Projek-projek pentjontohan telah dimulai di Bandung dan di Banten. Bantuan terhadap usaha-usaha pembuatan perlengkapan industri semen rakjat mendapat perhatian dari Kompartimen Perindustrian Rakjat, jang sudah terkenal sebagai pelopor dalam usaha ini ialah P.T. Bandung di Bandung.

Untuk memberikan penjuluhan setjara intensif, maka oleh Kompartimen Perindustrian Rakjat telah dikeluarkan booklets, booklets mana telah mendapan sambutan baik dari kalangan masjarakat luas. Projek ketjil-ketjilan jang menelan biaja kurang dari 100 djuta rupiah masih dapat memberikan hasil jang menguntungkan. Oleh karena kapasitasnja jang ketjil maka perusahaan itu dapat dibangun dimana sadja dengan deposit bahan-baku jang tidak besar. Oleh karena itu semen rakjat ini dapat disebut djuga Portland-cement jang diprodusir setjara batch method.

Usaha ini telah mendapat restu dari P.J.M. Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi sendiri, bahkan telah diintruksikan untuk mensukseskan projek semen rakjat ini, dengan harapan kekurangan Portland-cement setiap tahunnja dapat diatasi.

Sebagai substitute cement maka telah diusahakan pula pembuatan Pozzolanlime cement. Pozzolanlime cement ini sudah sedja lama dikenal oleh Bangsa Indonesia ialah suatu tjampuran antara trust dan batu kapur. Dalam banjak konstruksi ringan, guna mengurangi pemakaian semen, Pozzolanlime cement ini telah dipergunakan.

Oleh karena sifat pengerasan jang sangat lama dan sifat pengerasan ini lebih baik djika konstruksi terendam air, maka tjampuran ini baik sekali untuk konstruksi-konstruksi jang terendam air. Menurut penjelidikan dari orang ahli, maka tjampuran 50 % Pozzolanlime cement dan 50 % Portland merupakan tjampuran jang tjukup baik untuk konstruksi beton jang ringan, dengan demikian dapat dihemat penggunaan Portland cement sebanjak 50 %.

Dalam pembuatan eternit, tegel dan hallow bricks tjampuran dengan Pozzolan lime cement ternjata sudah bisa digunakan. Bahan baku trust dan kapur terdapat dibanjak tempat di Indonesia. Dipulau Djawa terdapat beberapa tempat jang mempunjai deposit tjukup banjak untuk dieksploitir, antaranja didaerah-daerah Nagreg (Bandung), Tjitjurug (Sukabumi), Kedundang (Jogjakarta), Taju (Djepara), Muria (Pati) dan daerah gunung Kelud, Djawa-Timur.

Refractories.

Refractories merupakan suatu bahan untuk pembangunan tungku pembakar, peleleh logam, gelas maupun keramik. Untuk pembuatan tungku-tungku pembakar bata genteng, kapur dan tungku-tungku pembakar lainnja dengan persjaratan temperatur sampai 1 200 cc, maka batu tahan api sematjam itu sudah dibuat dan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Chususnja batu tahan api dengan persjaratan tinggi (blokblok selemanit) masih perlu diimpor.

Menurut statistik impor, maka setiap tahunnja diimpor rata-rata 750 ton.

Mengingat bahan bakunja banjak terdapat di Indonesia; maka diharapkan setelah berhasilnja penelitian jang saksama, pembuatan dalam negeri akan segera dapat dimulai, sehingga tidak perlu mengimpor batu tahan api lagi.

Isolator listrik.

Dalam rangka kerdja-sama antara P.L.N. dan Kompartimen Perindustrian Rakjat maka telah diadakan penelitian bersama mengenai hasil-hasil dan mutu produksi isolator dalam negeri.

Pada dasarnja semua isolator tegangan rendah telah dapat seluruhnja disupply dari produksi dalam negeri.

Industri-industri keramik kita terus-menerus berusaha untuk menghasilkan isolator bermutu tinggi.

Isolator tegangan tinggi diharapkan dalam waktu dekat tidak perlu diimpor lagi.

Bahan-bahan kimia.

Bahan-bahan kimia merupakan sebagian besar daripada kebutuhan untuk industri. Hampir semua sektor industri rakjat memerlukan bahan kimia. Oleh karena itu dengan berhasilnja substitute untuk bahan-bahan kimia ini dapat menghemat devisa jang tidak sedikit.

Usaha-usaha penelitian untuk bahan-bahan kimia jang lain terus diusahakan.

3. Menghasilkan Substitu Bahan Sandang.

Mentjukupi sandang/pangan merupakan salah satu dari program Pemerintah jang harus disukseskan.

Oleh karena itu tidak boleh tidak, perlu pemusatan perhatian Pemerintah terhadap sektor ini.

Chususnja dalam bidang sandang mendapat perhatian utama dari J.M. Menteri Perindustrian Rakjat.
dari J.M. Menteri Kordinator. Kompartimen Perindustrian Rakjat.

Untuk mentjukupi kebutuhan sandang rakjat sebanjak 6 m/capita, perlu disediakan tidak kurang dari 5,5 miljard rupiah devisa C & F jang terdiri dari bahan-bahan kimia, benang tenun, kapas tenun, kapas kasar, cambric/grey dan lain sebagainja.

Dalam rangka berdiri diatas kaki sendiri, maka pemenuhan sendiri akan bahan baku sandang mendapat perhatian chusus dari J.M. Menteri. Perdjalanan keliling dilakukan untuk aankoop kapas.

Andjuran J.M. Menteri Kordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat untuk berswasembada bahan sandang pangan memendapat sambutan baik dikalangan masjarakat luas. Untuk memenuhi kebutuhan masjarakat akan sandang sebanjak 15/capita, diperlukan kain sebanjak djumlah penduduk × 15 m per tahun.

Untuk tahun 1970 dengan djumlah penduduk lebih kurang 118 djuta (tahun 1964 : 103 djuta, pertambahan 2,3 % per tahun), diperlukan 118 djuta × 15 m = 1.770 djuta meter kain.

1 ha tanah diharapkan menghasilkan 150 kg kapas = 135 kg benang tenun. 1 kg benang tenun menghasilkan 7½ m kain. Djadi 1 ha tanah jang ditanami kapas akan menghasilkan 7½ × 135 m = 1012,5 m kain.

Supaja bisa mentjapai target 15 m/capita pada tahun 1970 dengan djumlah penduduk 118 djuta, jaitu perlu 1.770 djuta meter kain dibutuhkan areal penanaman kapas seluas:

$$\frac{1.770.000.000}{1012,5} = 1.748.148 \text{ ha.}$$

Walaupun sampai saat ini produksi kapas baru merupakan fractie jang ketjil sadja, jakni baru 0,06 % dari kebutuhan, tapi hal itu telah menundjukkan suatu usaha kearah tertjapainja swa-sembada bahan sandang.

Pada zaman pendjadjahan Belanda, penanaman kapas tidak mendapat perhatian.

Disamping kapas, J.M. Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat sangat menaruh perhatian pula kepada bahan sadang lainnja, terutama sutera alam. Sutera alam ini telah dikenal oleh nenek mojang kita sedjak 3500 tahun jang lalu, tetapi oleh Pemerintah djadjahan Belanda tidak pernah mendapat perhatian, sehingga lama kelamaan terlupakan sama sekali, untuk kemudia nbangun kembali pada zaman kita ini setelah begitu lama tidak dihiraukan.

Kegiatan pemeliharaan ulat sutera achir-achir ini makin nampak dengan njata. Penghasilan jang tidak sedikit dari usaha perulat-suteraan memberikan daja penarik jang sangat baik dikalangan masjarakat luas. Dimana-mana timbul usaha ini sebagai usaha sambilan.

Organisasinja disponsori oleh I.S.R.I., sedangkan penanaman murbei sebagai bahan makanan ulat sutera disponsori oleh Djawatan Kehutanan.

Oleh seorang achli perulat-suteraan didjelaskan bahwa bila 10% dari djumlah penduduk di Indonesia memelihara ulat sutera dengan menghasilkan 1 kg benang sutera per bulan, maka target 15 m/capita, kapan sadja bisa dipenuhi, karena 1 kg benang sutera dapat mendjadi 15 m kain.

Dengan perhitungan kebutuhan akan kain halus sebanjak 2 m/capita pada tahun 1970, maka kebutuhan kain sutera adalah sebanjak $^2/_{15}$ x 1.770 djuta meter = 236 djuta meter.

Untuk mentjapai djumlah tersebut diperlukan

$$\frac{236.000.000}{15} = 15.733.333 \text{ kg benang sutera.}$$

Untuk makanan ulat sutera diperlukan daun murbei.

Untuk tanaman murbei murni, 1 ha tanah bisa ditanami ± 4000 pohon, dengan produksi daun sebanjak 5 kg/pohon/tahun.

Djadi 1 ha akan menghasilkan daun murbei sebanjak 20.000 kg/tahun. Ulat sutera selama hidupnja perlu makan daun murbei sebanjak ± 12 gram.

Djadi 1 hari murbei tjukup memberi makan pada :

$$\frac{20.000.000}{12} = 1.666.666$$ ulat dan ini akan menghasilkan

$$\frac{1.666.666}{20.000} = 83.333$$ kg benang sutera.

(1 kg benang sutera dihasilkan oleh 20.000 buah cocon).

Djadi untuk keperluan 15.733.333 kg benang sutera, pada tahun 1970 perlu ada tanaman murbei murni (tidak ditjampur dengan tanaman lain seluas) :

$$\frac{15.733.333}{83.333} \text{ ha} = 188.800 \text{ ha.}$$

Dengan kerdjasama dengan bebagai instansi, umpamanja Pertanian, Kehutanan, Veteran, Koperasi dan Perindustrian, target tersebut bisa mudah ditjukupi; malahan dengan kerdja sama jang lebih intensif lagi target tersebut bisa dilampaui sehingga kitapun dapat mengekspor benang sutera alam jang berlebihan dinegara kita.

Permintaan akan sutera alam Indonesia telah banjak.

V. PERANAN KERADJINAN DAN KEBUDAJAAN INDUSTRI RAKJAT DALAM TURUT SERTA MENSUKSESKAN TIGA KERANGKA REVOLUSI INDONESIA.

A. UMUM.

Dalam zaman sekarang ini dan sebagai salah satu akibat dari pendjadjahan serta struktur ekonomi kolonial tidak sedikit dari orang Indonesia jang silau akan pabrik-pabrik besar dan mendewa-dewakan hasil pabrik dan barang apa sadja jang asal impor dari luar negeri, dan melupakan, bahkan menghina-dinakan hasil keradjinan dan kebudajaan industri rakjat.

Padahal sedjak purbakala Indonesia terkenal mempunjai seni budaja serta daja-tjipta jang tinggi, jang menghasilkan kasta-karya jang mempersona orang asing.

Sekalipun ada tekanan-tekanan dari pendjadjah, jang sering kedjam dan tidak berperi-kemanusiaan, akan tetapi seni budaja serta daja-tjipta Bangsa Indonesia, jang tidak dapat dipisahkan dari nafas dan gerak hidupnja, dapat mempertahankan diri penuh dengan keprihatinan dan ketekunan.

Bahkan dibeberapa daerah keradjinan dan kebudajaan industri rakjat mengalami perobahan-perobahan bentuk dan tjorak dengan tidak meninggalkan kepribadian aslinja, jang kesemuanja menundjukkan ketjakaan (skill) dan daja-tjipta setjara dinamis, dialektis dan romantis, disesuaikan dengan kebutuhan dan selera zaman.

Adanja bahan-bahan pokok untuk keradjinan dan kebudajaan industri rakjat jang berasal dari lain negeri disamping bahan-bahan pokok jang telah ada didalam negeri, dan datangnja kebudajaan bangsa-bangsa lain di Indonesia, mendorong emosi sipembuat dan mendinamisir setjara teknis tjurahan seni untuk memperindah bentuk menudju kesempurnaan sesuai dengan selera jang berobah-robah dari zaman kezaman.

Perkembangan dan kemadjuan teknologi pada abad ke-20 ini besar pula pengaruhnja terhadap keradjinan dan kebudajaan industri rakjat, tapi kepribadian chas Indonesia tidak ditinggalkan.

Pertumbuhan dibidang komersiil, terutama dalam alam ekonomi kolonial dan ekonomi liberal dengan adanja serta meradja-

lela sistim idjon salah satu manifestasi dari exploitation dc Lhomme par l'homme, ternjata merupakan antjaman jang membahajakan bagi kelangsungan hidup keradjinan dan kebudajaan industri rakjat.

Antjaman jang membahajakan itu lebih besar lagi dengan adanja anggapan jang meratjuni bangsa kita jang meninggi-ninggikan deradjat barang-barang asal impor dan merendahkan hasil keradjinan dan kebudajaan industri rakjat sendiri.

Untunglah bahwa anggapan jang meratjuni itu tidak dapat menghilangkan sama sekali kebutuhan Bangsa Indonesia akan hasil keradjinan dan kebudajaan industri rakjat dalam kehidupan dan penghidupan sehari-hari. Buktinja ditiap rumah tangga Bangsa Indonesia sebagian besar dari barang-barang jang merupakan alat rumah-tangga, hiasan dan lain sebagainja, adalah masih berupa hasil keradjinan dan kebudajaan industri rakjat, diantaranja bahkan ada beberapa matjam jang menurut rasa dan perasaan tidak mungkin diganti oleh barang-barang lain.

Setelah kemerdekaan oleh kita Bangsa Indonesia direbut kembali adalah bukan sadja wadjar, akan tetapi adalah merupakan keharusan untuk menempatkan keradjinan dan kebudajaan nasional pada tempat jang penting dan terhormat.

Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Pembangun Industri Rakjat Agung, pada peringatan Pantjawarsa Departemen Perindustrian Rakjat di Istana Negara pada tanggal 13 Djuli 1964 telah menegaskan pentingnja kedudukan perindustrian rakjat didalam pembangunan Sosialisme Indonesia, dimana rakjat dengan keradjinannja, keterampilan, daja-tjipta, own ability serta aktivitasnja, tidak tinggal diam, tapi turut serta menjusun tenaga melepaskan diri dari ketergantungan daripada fihak lain dan dengan pertjaja atas kekuatan sendiri (self reliance), tidak mengemis (no medicancy), benar-benar dapat merealisir prinsip berdiri diatas kaki sendiri (selfhelp). Sosialisme harus berdiri diatas „self-help". Intiphilosofis daripada sosialisme ialah „self-help".

Dari Amanat penegasan Paduka Jang Mulia Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pembangun Industri Rakjat Agung tersebut diatas djelaslah, bahwa untuk merealisir prinsip berdiri diatas kaki sendiri diantaranja merupakan keharusan untuk memupuk dan menggiatkan keradjinan dan kebudajaan industri rakjat.

Dengan menggiatkan dan memperkembangkan keradjinan dan kebudajaan industri rakjat, berarti pula memperkuat ketahanan revolusi untuk mengganjang feodalisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme dan meratakan djalan menudju Sosialisme Indonesia, mengemban Amanat Penderitaan Rakjat.

B. KERADJINAN DAN KEBUDAJAAN INDUSTRI RAKJAT.

1. Keradjinan dan Kebudajaan Industri Rakjat dihubungkan dengan Industrialisasi.

Kegiatan dibidang keradjinan dan kebudajaan industri rakjat sangat penting artinja untuk mempertjepat usaha kearah industrialisasi.

Ditempat atau didaerah dimana keradjinan dan kebudajaan industri sudah berkembang, maka industrialisasi akan lebih lantjar dan lebih terdjamin akan suksesnja. Pendirian pabrik-pabrik menengah dan dasar didaerah atau tempat dimana telah dipergiat keradjinan dan kebudajaan rakjatnja hanja merupakan peningkatan taraf teknis dan ekonomis ataupun merupakan bantuan bagi pertumbuhan keradjinan dan kebudajaan industri rakjat jang ada disekitarnja. Lagi pula banjak segi, umpamanja motif, design dan lain-lain jang dapat diwariskan oleh keradjinan dan kebudajaan industri rakjat.

2. Keradjinan dan Kebudajaan Industri Rakjat dihubungkan dengan Seni.

Seni, baik jang berupa seni halus (fine art) maupun seni terpakai atau seni karya (applied art) pada umumnja dan chususnja di Indonesia sangat erat hubungannja dengan keradjinan dan kebudajaan industri rakjat. Bahkan dapat dikatakan seni dan keradjinan sedjak purbakala merupakan dwi-tunggal jang tidak dapat dipisah-pisahkan, karena sama kepentingan, kedudukan dan keadaannja.

Bila kedua-duanja, baik seni maupun keradjinan ingin madju sebaik-baiknja, maka merupakan keharusan jang mutlak adanja kerdjasama, kesatuan djiwa, kesatuan nada dan kesatuan tindakan antara seni dan keradjinan.

Hal ini penting sekali guna mewudjudkan kreasi-kreasi baru untuk memenuhi "rising demand" dari masjarakat, baik di Indonesia sendiri maupun diluar negeri. Dalam hal ini perlu sekali adanja sinkronisasi dan integrasi dalam usaha kearah upgrading dan dinamisering para hasta-karyawan (usahawan keradjinan) dan para seniman.

3. Keradjinan dan Kebudajaan Industri Rakjat sebagai penghemat devisa (foreign exchange savings) dan penghasil devisa (foreign exchange earnings).

Selain dari merupakan perdjoangan untuk melepaskan diri dari ketergantungan dari pada lain negeri dan merupakan perwudjudan dari pada prinsip berdiri diatas kaki sendiri, maka dengan sendirinja kegiatan dibidang keradjinan dan kebudajaan industri rakjat memberikan kemungkinan untuk menghemat devisa dan menghasilkan devisa.

Kenjataan menundjukkan, bahwa pada waktu perang dan Revolusi Physik banjak barang-barang kebutuhan hidup dan tadinja biasa diimpor atau diprodusir oleh pabrik-pabrik dapat dibikin oleh hasta-karyawan keradjinan dan kebudajaan industri rakjat. Dalam usaha menudju swa-sembada, peranan keradjinan dan kebudajaan industri rakjat djelas merupakan pelopor, pendjebol dan pembangun.

Dari pameran-pameran serta giftshops jang diadakan, baik didalam maupun diluar negeri ternjata bahwa hasil keradjinan dan kebudajaan rakjat mendapat penghargaan serta pasaran jang sangat memuaskan. Di New York World's Fair umpamanja dalam mana turut serta berpuluh-puluh negara, barang-hasil keradjinan dan kebudajaan industri Rakjat Indonesia mendapat perhatian dan kundjungan jang paling besar serta menghasilkan devisa jang memuaskan. Atas kenjataan ini, maka Pemerintah sedang dan akan mengadakan kebidjaksanaan chusus untuk memberikan perangsang (incentive) dalam rangka memperbesar realisasi "export-drive" barang-barang keradjinan dan kebudajaan industri rakjat, sehingga akan lebih banjak lagi devisa jang dihasilkan.

4. Perkembangan keradjinan dan Kebudajaan Industrii Rakjat.

Djumlah banjaknja keradjinan dan kebudajaan industri rakjat tidak begitu mudah untuk dipastikan. Tidak berkelebihan kiranja djika dikatakan, bahwa ditiap rumah tangga ada usaha dibidang keradjinan tangan, atau sekurang-kurangnja djumlah keradjinan sama dengan 50% dari djumlah keluarga di Indonesia. Sebab, terutama keluarga dipedesaan, untuk kebutuhan sendiri dapat membikin barang keradjinan, baik berupa anjaman, gerabah, alat-alat dari kaju, logam, kulit dan lain-lain.

Djumlah keradjinan jang berupa perusahaan dengan menggunakan karyawan (buruh) dan dengan tudjuan komersiil tentunja lebih sedikit. Djuga djumlah keradjinan jang berupa seni masih terbatas, karena biasanja bersifat turun temurun atau berpusat dibeberapa daerah seperti Bali, Djepara, Sala, Jogja, Tjiamis, Tasikmalaja, Pekalongan, Silungkang, Palembang, Tapanuli, Atjeh, Samarinda, Makasar, Mandar, Kotagede, Kotogadang, Ambon dan lain-lain.

Dengan lebih mudahnja perhubungan antar-daerah dan dengan diadakannja pendidikan dibidang seni, maka djumlah orang jang mempunjai keterampilan dalam keradjinan dan kebudajaan industri rakjat bertambah.

Bukan djumlah hastakaryawan sadja bertambah, akan tetapi karena hubungan dan pendidikan itu, timbul dan hidup tjorak, bentuk dan variasi-variasi baru jang memberikan gaja dan dinamika kepada keradjinan dan kebudajaan industri rakjat untuk disesuaikan kepada selera serta kebutuhan masjarakat, baik didalam maupun diluar negeri.

Tambahnja bentuk dan tjorak baru bukan sadja karena hidupnja dinamika dari emosi sipembikin akan tetapi djuga dimungkinkan oleh tambahnja djenis bahan-bahan pokok kebutuhan keradjinan dan kebudajaan industri rakjat.

Seperti kita sama maklum banjak sekali matjamnja keradjinan bila dihubungkan dengan djenis bahan pokok jang digunakan, belum lagi disebut matjam keradjinan, bila dihubungkan dengan bermatjam ragamnja bentuk dan tjorak jang dibawakan oleh masing-masing daerah serta variasi-variasinja sebagai pertjampuran dari berbagai tjorak dan bentuk itu.

5. Keradjinan dan Kebudajaan Industri Rakjat turut serta dalam mensukseskan tiga kerangka revolusi.

Tidak sedikit dari orang-orang Indonesia, lebih-lebih jang silau kepada barang hasil pabrik-pabrik besar dan barang-barang impor, jang tidak dapat menginsjafi, bahkan tidak pertjaja, bahwa barang-barang keradjinan dan kebudajaan industri rakjat jang kelihatan sederhana itu, djuga mempunjai peranan dan turut aktif dalam mensukseskan Tiga Kerangka Revolusi.

Keradjinan dan kebudajaan industri rakjat bukan sadja penting artinja dilihat dari sudut sosial-ekonomis, teknis, teknolo-

gis, komersiil dan kuturil, akan tetapi djuga dilihat dari segi politis.

Barang-barang hasil keradjinan dan kebudajaan industri rakjat, baik setjara hiasan maupun jang digunakan dalam rumah tangga kita, merupakan hasta-karya dari suku-suku atau orang sebangsa dan setanah air, sehingga sipemilik merasa selalu dikelilingi dan ditemani oleh kawan sebangsa jang tersebar diseluruh kepulauan Indonesia. Lebih akrab lagi perasaan sipemilik itu, djika barang keradjinan itu merupakan kenang-kenangan atau suvenir dari teman atau daerah jang pernah dikundjunginja. Karena barang-barang keradjinan dan kebudajaan industri rakjat itu pada hakekatnja mempunjai fungsi jang sutji, jaitu turut mempererat dan memperkokoh persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa (ke-ika-an) serta kesadaran nasional, Satu Bangsa, Satu Bahasa dan Satu Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. (kerangka kesatu dari TIGA KERANGKA REVOLUSI).

Ja, bahkan barang-barang keradjinan dan kebudajaan industri rakjatlah, bukan barang hasil mesin modern, jang selalu dipakai tanda mata atau kenang-kenangan, atau dibeli oleh pariwisatawan (touris) dari luar negeri, sebagai olhe-oleh untuk dibawa pulang, jang selalu memberikan kenang-kenangan kembali kepada kundjungannja di Indonesia, mengenangkan kembali "the way of life" (tjara hidup) bangsa Indonesia, mengenangkan kembali kepribadian, keramah-tamahan djiwa persaudaraan serta kebsearan Bangsa Indonesia, dan mengenangkan kembali keindahan dan kekajaan alam Indonesia. Djuga bukan barang hasil mesin modern jang selalu dipamerkan diluar negeri, tapi djustru diantaranja barang keradjinan dan kebudajaan industri rakjatlah jang mengagumkan orang luar negeri dan menarik mereka untuk mengadakan hubungan dengan Indonesia.

Dengan demikian djelaslah, bahwa barang keradjinan dan kebudajaan industri rakjat jang kelihatan sederhana dan tidak bernjawa itu, mempunjai arti dan djiwa sebagai duta perdamaian antar bangsa didunia, turut membangun persahabatan antar bangsa, membangun dunia baru ("to build the world a new") (Kerangka ketiga dari TIGA KERANGKA REVOLUSI).

Dalam hubungan ini dan untuk turut serta mempertegak "The New Emerging Forces" (NEFO) serta membangun Dunia Baru (To Build The World A new), maka ada baiknja djika dapat diadakan "Art and Crafts Exhibition/Conference of The New Emerging Forces" (ACNEFO).

Seperti diterangkan diatas, djumlah orang Indonesia jang mengerdjakan keradjinan dan kebudajaan industri rakjat djauh berlipat ganda banjaknja dari djumlah orang bekerdja dipabrik-pabrik atau perusahaan. Sebagian besar merupakan keradjinan rumah tangga jang merupakan penghasilan pokok atau penghasilan tambahan dan memungkinkan kepada tiap orang Indonesia untuk aktif menurut kemampuannja masing-masing turut serta dalam pembikinan barang keradjinan dan kebudajaan industri rakjat, mewudjudkan prinsip berdiri diatas kaki snediri (selfhelp) jang merupakan tjiri chas dari Sosialisme Indonesia.

6. Kerangka kedua dari tiga kerangka revolusi.

Sebagai salah satu tjontoh dapat dikemukakan, bahwa didaerah-daerah tandus dimana penghasilan pertanian sangat kurang, seperti didaerah Gunung Kidul dan lain-lain, maka dengan digerakkan usaha dibidang keradjinan rumah tangga, seperti pertenunan dengan alat tenun bukan mesin, anjaman-anjaman dan lain-lain, terbukti, bahwa penduduk didaerah itu dapat berdiri diatas kaki sendiri meningkatkan taraf hidup sosial ekonomis, serta dapat memperkuat ketahanan revolusi. Bahkan hasil keradjinannja dapat pula dipamerkan diluar negeri, seperti anjaman bambu dari daerah Gunung Kidul dan lain daerah.

Pula lambang Negara kita, Bhineka Tunggal Ika, dapat setjara visuil diperlihatkan dengan hasil keradjinan dan kebudajaan industri rakjat. Matjam-matjam barang hasil keradjinan dan kebudajaan industri rakjat dari berbagai-bagai daerah di Indonesia (Bhineka) dapat diatur mendjadi suatu kesatuan jang harmonis (Ika), umpamanja satu kamar duduk dengan mubiler dari ukiran Djepara atau Sala, Jogja, Padjadjaran dan lain-lain dengan standar lampu ukuran Bali dan sebagainja, kap lampu kulit ukiran Jogjakarta, Sala dan lain-lain, taplak medja dari batik, sulaman atau tenunan adat dari berbagai-bagai daerah, hiasan dinding, patung-patung dan lain sebagainja.

Di New York World Fair dan dipameran-pameran lainnja diluar negeri, Indonesia selalu dapat mempertontonkan barang keradjinan jang Bhineka dalam bentuk, tjorak dan djenisnja, tapi jang Ika dalam sifat, nada dan djiwanja, djiwa Bangsa Indonesia penuh dengan daja tjipta, seni budaja dan kebesaran budi, jang kesemuanja itu dapat mmepersona dan mengagumkan para pengundjung pameran.

Djuga dalam pameran-pameran didalam negeri jang diantaranja diadakan dalam rangka turut memeriahkan dan mensukseskan konperensi-konperensi internasional, seperti Konperensi Afrika-Asia, Ecafe, Asian Games, Ganefo, KWAA, KIAA dan lain-lainnja, selalu mendjadi perhatian orang luar negeri, diantaranja barang hasil keradjinan dan kebudajaan industri rakjat, jang djuga didjadikan suvenir untuk para peserta dari luar negeri.

Adapun tjabang-tjabang seni keradjinan jang barang-barangnja dihasilkan di Indonesia antara lain:

keradjinan anjaman
keradjinan tenun
keradjinan batik
keradjinan ukiran kaju
keradjinan logam mulia (perak & emas)
keradjinan kulit
keradjinan keramik

jang kesemuanja mempunjai nilai seni jang tinggi.

7. **Keradjinan anjaman.**

Keradjinan menganjam tikar, kerandjang, tas, topi, kipas hiasan dinding dan sebagainja merupakan keradjinan rakjat jang umum terdapat didaerah-daerah di Indonesia, dikerdjakan baik oleh orang laki-laki jang mengerdjakan barang-barang anjaman jang besar-besar, maupun wanita-wanitanja jang mengerdjakan anjaman barang-barang jang ringan.

Bahkan jang dipakai untuk anjam-anjaman inipun bermatjam-matjam. Ada barang-barang anjaman dari bambu, dari rotan, pandan bahkan di Sulawesi Selatan orang menganjam barang-barang dengan bahan dari sesuatu daun anggrek.

Rumpun bambu tumbuh didaerah-daerah Djawa, Madura, Bali dan Lombok. Hutan-hutan rotan banjak terdapat di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera.

Pohon pandan terdapat didaerah-daerah rawa-rawa dipulau Djawa dan Sumatera.

8. Kradjinan tenun.

Keradjinan tenun tangan di Indonesia terbagi dalam 4 matjam:

1. tenunan katun
2. tenunan sutera
3. tenunan benang perak dan benang emas
4. tenunan ikat.

Seni keradjinan tenun tangan memperlihatkan suatu rasa jang mengandung daja-tjipta jang kreatif dan artisik dengan aneka-warnanja. Masing-masing daerah mempunjai pola-pola hiasan sendiri-sendiri.

Hasil keradjinan tenun tangan jang terkenal dengan keistimewaannja antara lain: tenunan Silungkang, Palembang dan Lampung di Sumatera kebanjakan hanja dengan ornament-ornamen, dari benang perak dan benange emas, mentjerminkan zaman kedjajaan Keradjaan Sriwidjaja. Sedangkan di Atjeh, di Sumatera Utara orang membeuat kain tenunan dengan warna merah tua dengan diselang-seling oleh benang emas dan perak. Keistimewaan tenun Bali ialah warnawarnanja jang tjerah dengan kebanjakan warna kuning. Tenunan Sumba terkenal sebagai hasil tenun jang terindah dari daerah-daerah Indonesia Timur.

Sulawesi Selatan dengan hasil tenunan suteranja terkenal dengan nama tenun Mandar dan tenun Bugis.

Sarung Samarinda dari Kalimantan Timur sudah termasjhur dimana-mana.

9. Keradjinan Batik.

Keradjinan batik terbatas hanja terdapat di Djawa. Konon chabarnja dahulu berasal dari Persia dan Mesir, kemudian mendapat perobahan-perobahan dan perbaikan-perbaikan dari orang-orang Djawa, dan segi seninja diperbaiki oleh orang-orang Hindu.

Keradjinan membatik dizaman keradjaan-keradjaan hanja merupakan keradjinan jang dilakukan oleh puteri-puteri keraton sebagai pengisi waktu dikala senggang. Dengan demikian diwaktu itu keahlian ini hanja dimiliki oleh puteri-puteri keraton.

Lama-kelamaan kemudian ada diantara puteri-puteri keraton kawin dengan orang kebanjakan (orang biasa) sehingga seni batikpun terbawa keluar keraton dan berkembang dengan pesat dikalangan rakjat banjak.

Seni batik mempunjai keistimewaan tersendiri bukan hanja karena motif-motifnja jang artistik, tapi djuga karena proses pembuatannja. Mula-mula bahan jang akan dibatik berupa „kain mori" (mousseline) diproses agar supaja „malam" (wax) tidak dapat merembes kedalam. Diatas mori ini digambarkan pola-pola batik tertentu. Masing-masing pola dengan tjorak tertentu mempunjai nama-nama tersendiri-sendiri. Kemudian sesuai dengan pola, gambar pokoknja digambar dengan „malam" dengan mempergunakan alat penggambar jang disebut tjanting dan berisi tjairan „malam". Tjanting ini ada bermatjam-matjam, dari jang halus jang dipakai untuk membuat titik atau garis jang halus sampai kepada jang paling kasar jang hanja dipakai untuk membuat bidang-bidang. Pertama-tama jang digambari dengan malam ialah pola pokok dikedua belah sisi kain. Setelah pola pokok selesai baru ditempat-tempat jang dikehendaki diisi dengan gambar-gambar ornamen-ornamen jang biasanja berupa gambar-gambar tumbuhan atau buah-buahan. Kemudian baru mengindjak kepada proses pemberian warna, dan dimulai dengan warna dasar jang biasanja biru (indigo), jaitu dengan djalan mentjelupkan kain jang sudah digambar kedalam zat warna. Setelah itu kai ditjutji dengan air panas dan „malam"-nja dikerok. Bagian-bagian jang semula tertutup „malam" akan tetap tidak terkena warna biru, djadi tetap putih. Kemudian pewarnaan jang kedua. Bagian-bagian jang putih jang diinginkan akan tetap putih, ditutup lagi dengan „malam". Demikian pula bagian-bagian jang diinginkan tetapi berwarna biru.

Demikianlah pemberian warna ini sampai beberapa kali, tergantung kepada beberapa matjam warna jang dikehendaki. Setelah selesai semua, maka dilakukan pengerdjaan untuk membuat agar warna-warna itu tidak luntur. Selesailah proses membatik. Pekerdjaan menggambar dengan „malam" dilakukan oleh wanita, sedangkan pekerdjaan memberi warna dilakukan oleh orang-orang pria.

Seluruh pekerdjaan batik untuk menghasilkan satu kain memakan waktu lbih daeri 40 hari. Itulah salah satu sebab mengapa kain batik tulis mahal harganja. Untuk memungkin-

kan agar rakjat jang kurang mampu dapat membeli kain batik, maka dipakailah „tjap" sebagai ganti tjanting untuk menggambar.

Tjap ini terbuat dari tembaga dan dengan gambaran pola-pola tertentu. Dengan ini bisa dilakukan massa-produksi, sehingga dapat menekan harga serendah-rendahnja. Akan tetapi „batik tulis" tetap mendjadi barang jang mahal, bahkan banjak ditjari karena tinggi nilai seninja, karena lebih halus dan lebih tjermat gambaran-gambarannja dari pada batik tjap. Daerah-daerah jang paling terkenal dengan hasil batiknja ialah Jogjakarta dan Surakarta (batik-batik warna) dan Pekalongan (bermatjam-matjam warna). Selain daerah-daerah itu daerah-daerah lain jang menghasilkan batik ialah. Tjirebon, Garut, Tasikmalaja (Djawa Barat).

10. Keradjinan ukiran kaju.

Di Indonesia kaju memegang peranan jang sangat penting dalam kehidupan, tidak hanja untuk membangun rumah dan perabotan rumah, tetapi djuga untuk seni keradjinan. Masing-masing daerah mempunjai karakteristik jang berlainan dalam hal pemakaian kaju untuk keradjinan ini, misalnja di Djawa Tengah dan Djawa Barat serta djuga Bali, orang membuat gamelan dengan dihiasi ukiran-ukiran kaju jang halus dan indah.

Di Djepara (Djawa Tengah pantai Utara) orang membuat barang-barang aneka ragam dengan ukiran kaju jang terkenal dimana-mana.

Priangan (Djawa Barat) djuga menghasilkan wajang-golek, jaitu wajang jang dibuat dari kaju diukir dan ditjat aneka warna dengan pakaian jang aneka warna pula, wajang ini dimainkan untuk pementasan tjerita-tjerita Ramayana dan Mahabrata.

Orang-orang Minangkabau (Sumtera Barat), Batak (Sumatera Utara) dan lebih-lebih Toradja (Sulawesi) mengukir bagian-bagian rumahnja dengan ornamen-ornamen ukiran jang chas. Bali sangat terkenal dengan patung-patung kaju jang halus dan artistik berupa patung-patung manusia, binatang, burung-burung, tjandi-tjandi, dan sebagainja jang tak terhitung djumlah matjam bentuknja.

11. Keradjinan Perak dan Emas serta logam lainnja.

Keradjinan dari logam termasuk perak dan emas dibawa oleh orang Hindu ke Indonesia kemudian segera tersebar didaerah-daerah Indonesia.

Beberapa matjam sendjata tadjam jang terbuat dari logam terdapat diberbagai daerah, dan masing-masing daerah mempunjai matjamnja sendiri-sendiri.

Atjeh terkenal dengan sendjata „rentjong".

Keris Modjopahit di Djawa merupakan bentuk keris jang tertua jang terdapat di Indonesia. Keris ini lebih merupakan hiasan pakaian daripada sebagai sendjata. Sendjata sematjam keris ini terdapat di Sumatera, Djawa, Bali, Sulawesi Selatan, dan beberapa pulau di Nusa Tenggara.

Pembuatan barang-barang dari perunggu sekarang sudah tidak dikemukakan lagi, sedjak agama Islam masuk di Djawa dan mendjadi sangat berpengaruh. Sedangkan di Bali keradjinan perunggu tidak pernah terhenti-henti, maka mereka sampai kinipun masih tetap mempunjai keahlian dalam hal keradjinan ini. Keradjinan perak dan emas merupakan suatu hal jang istimewa dalam kebudajaan Indonesia.

Pada masa ini sebagai pusat dari pada seni-keradjinan ini ialah Djawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi. Pada barang-barang perak dan emas buatan Djawa dan Bali tampak njata pengaruh kebudajaan Hindu dalam ornamen-ornamen hiasannja. Motif jang sama terlihat djuga ditjandi-tjandi Hindu di Djawa.

Di Sumatera dan Sulawesi lain halnja. Mereka mendapatkan inspirasinja dari alam sekitarnja, misalnja bunga, burung-burung dan binatang-binatang, kapal dan bahkan rumah-rumah. Keradjinan perak dari Sulawesi dikenal sebagai „keradjinan perak Kendari" jaitu nama suatu tempat dekat Makasar. Akan tetapi agak gandjil, bahwa pusat keradjinan perak Kendari adalah dikota Makasar, ibukota Sulawesi Selatan.

Perak Jogjakarta terkenal dengan nama „perak bakar Jogja". Suatu hal jang fantastis sekali bahwa berbagai matjam barang keperluan rumah tangga maupun hiasan dibuat dari perak ini. Barang-barang berupa baki, piring, thee-set, rook-stel, pisau, sendok garpu, tempat lilin, bahkan satu dinner-set komplit dibuat orang dengan hiasan ornamen-ornamen jang sangat indah.

Perbedaan tjorak antara keradjinan perak dari Sumatera dan Sulawesi dengan perak Jogja ialah bahwa dikedua tempat jang

disebut pertama barang-barang dibuat dari perak jang sudah didjadikan kawat-kawat halus sehalus benang. Sedangkan perak Jogja orang membuat barang dengan setjara dibentuk langsung dari bahan perak, dengan ditempa, kemudian ornamen-ornamen dibuat dengan tanah.

Dengan meningkatnja kebutuhan barang-barang perak dan emas, tukang-utkang perak/emaspun bertambah.

Bentuk-bentuk dan design baru kian lama kian bertambah, sebagai djawaban terhadap kebutuhan jang kian meningkat. Barang-barang dengan ornamen-ornamen perak dan emas tidak lagi hanja dipakai pada waktu-waktu chusus sadja. Wanita-wanita diabad sekarang lebih gemar memakai hiasan-hiasan ini.

Suatu tjabang keradjinan logam baru muntjul, jaitu keradjinan timah Bangka. Perabotan rumah tangga seperti piring, gelas dan sebagainja dibuat dari timah ini, dengan bentuk-bentuk jang modern serta artistik.

12. Keradjinan kulit.

Keradjinan kulit di Indonesia terutama terdapat di Djawa (Jogja-Solo) dan biasanja terdiri dari 2 matjam:

— keradjinan kulit tidak disamak, dan
— keradjinan kulit jang disamak.

Keradjinan kulit jang tidak disamak terutama untuk pembuatan wajang-kulit, kipas, kap lampu, bladwijzers dan sebagainja.

Mengenai wajang-kulit seperti djuga dengan wajang golek di Priangan (Djawa Barat) dimainkan untuk pementasan tjerita-tjerita Mahabrata dan Ramayana. Bedanja dengan wajang golek ialah bahwa wajang kulit adalah dua dimensi sedangkan wajang golek tiga dimensi. Pertundjukan wajang kulit jang ditonton adalah djustru bajangan dari pada wajang jang dimainkan oleh dalang dibelakang lajar jang disorot lampu jang terang.

Keradjinan kulit jang disamak menghasilkan barang-barang jang dipakai sehari-hari seperti tas, sandal dan sepatu, ikat pinggang dan barang-barang fancy.

Selain kulit sapi dan kulit kerbau djuga kulit reptiel berupa kulit buaja, dan kulit ular, bahkan kulit kodok dipakai sebagai bahan untuk membuat barang-barang jang sangat indah dan artistik.

13. Keramik.

Keradjinan keramik di Indonesia merupakan suatu tjabang keradjinan baru jang berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh terdapatnja bahan jang berlimpah di Indonesia untuk keperluan pembuatan keramik ini, terutama bahan bakunja jang berupa tanah liat/kaoline. Pusat-pusat keramik terdapat di Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur, djuga di Sumatera.

Dizaman lampau keradjinan ini menghasilkan gerabah merah, jang meskipun belum mengenal glazuur, akan tetapi memiliki design jang indah-indah serta artistik.

Dengan teknik-teknik modern diusahakan untuk mengkombinasikan antara jang klassik dan jang modern sehingga selera dimasa ini.

14. Keradjinan ukiran tulang gading dan tanduk.

Dalam hal keradjinan ukiran, disamping ukiran-ukiran pada kaju, bambu, logam dan kulit, djuga ukiran pada tulang, gading gadjah dan tanduk kerbau merupakan hasil-hasil kerdja jang mengasjikkan.

Ukiran tulang jang umumnja dikerdjakan orang dipulau Bali sangat fantastis keindahannja karena halusnja ukiran menundjukkan ketekunan dan ketjermatan jang luar biasa.

Dari tulang dengan fantasi dan daja kreasi jang tinggi orang mentjiptakan berbagai bentuk barang, seperti patung-patung garuda, tjandi, bahkan kipas dapat dibuat oleh mereka.

Ukiran gading terutama terdapat di Sumatera Selatan (Palembang) dimana sampai sekarang masih banjak terdapat gadjah dihutan-hutan. Pada prinsipnja djuga ukiran gading mempunjai nilai seni jang tinggi, lebih-lebih gading gadjah sangat mahal harganja.

Ukiran tanduk selain di Bali djuga terdapat di Djawa Barat (Sukabumi) dan Djawa Tengah (Jogja-Solo). Matjam-matjam barang seperti sisir, sendok, garpu, dan sebagainja dibuat orang dari bahan ini.

C. PENUTUP.

Dari pendjelasan diatas njata, bahwa soal keradjinan dan kebudajaan industri rakjat bukan sadja penting artinja dilihat dari segi sosial-ekonomis dan tkenis tapi djuga dilihat dari segi kulturil, tourisme dan politis.

Karenanja bukan sadja wadjar tapi memang seharusnja keradjinan dan kebudajaan industri rakjat diperkembangkan dan dipergiatkan setjara dinamis dan teratur.

Sehubungan dengan ini, maka selain telah dibentuk Gabungan-gabungan dan Organisasi-organisasi Perusahaan Sedjenis (G.P.S. dan O.P.S.), oleh J.M. Menteri Koordinator Koompartimen Prindusetrian Rakjat diadakan satu badan chusus untuk menghadapi persoalan dibidang keradjinan dan kebudajaan industri rakjat dengan dibentuknja Jajasan Keradjinan dan Kebudajaan Industri Rakjat (Jakindra) baik di Djakarta maupun didaerah-daerah.

Maksud dan tudjuan Jakindra ialah untuk mengerahkan potensi serta seni daja tjipta Nasional antara lain dengan memperkenalkan, memadjukan, menggiatkan dan memperkembangkan keradjinan dan kebudajaan industri rakjat serta untuk mempertjepat proses industrialisasi.

Dalam rangka turut memeriahkan dan mensukseskan Ganefo pada bulan Nopember 1963 oleh Jakindra telah dibangun gedung pameran tetap dikompleks Gelora Bung Karno, Senajan.

Atas perintah P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/ Pembangun Industri Rakjat Agung, gedung pameran tetap tersebut akan diganti dengan gedung pameran Jakindra jang lebih megah, mendjelang CONEFO (Conference of the New Emerging Forces). Djuga didaerah-daerah diadakan gedung-gedung pameran tetap dari Jakindra daerah. Disamping itu atas perintah P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pembangun Industri Rakjat Agung, Jakindra diserahi tugas untuk melaksanakan pameran tetap di Guesthouse Istana Negara mendjelang Dasawarsa Konperensi Afrika-Asia dan selandjutnja.

Jakindra di Djakarta maupun didaerah-daerah sedang dan telah mengusahakan untuk menghidupkan dan mempertinggi mutu keradjinan dan kebudajaan industri rakjat, dengan upgrading teknis, perbaikan bentuk, design dan sebagainja sehingga hasilnja sesuai dengan selera masjarakat, baik didalam maupun diluar negeri.

Dalam kemampuan jang ada, maka Jakindra telah, sedang dan akan mengusahakan bahan-bahan keperluan keradjinan dan kebudajaan industri rakjat, serta memperluas pasaran hasil produksinja, baik didalam maupun diluarnegeri.

Perlu pula dipikirkan dan diusahakan setjara serius supaja sebagian besar dari keuntungan djatuh ditangan para produsen (hastakaryawan) keradjinan dan kebudajaan industri rakjat, diantaranja dengan menghilangkan „exploitation de l'homme par l'homme", membenuk dan memperkuat organisasi koperasi dari para hastakaryawan dan mengadakan apa jang dapat dinamakan „Hand-reform" dari hastakaryawan.

*
* *

VI. PERUSAHAAN NEGARA PERINDUSTRIAN RAKJAT SAMPAI MASA DWI DASA WARSA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

A. UMUM.

Perusahaan Negara Perindustrian Rakjat disingkat mendjadi P.N.P.R. adalah merupakan Perusahaan Negara Industri jang berada didalam (dibawah) lingkungan Departemen Perindustrian Rakjat. Departemen Perindustrian Rakjat itu sendiri jang disingkat mendjadi Deperindra, adalah merupakan Departemen jang baru sewaktu Kabinet Kerdja, jang langsung dibawah P.J.M. Presiden, dan merupakan petjahan dari pada Kementerian Perindustrian selama masa Kabinet Karya dibawah pimpinan almarhum Perdana Menteri Ir. H. Djuanda.

Pada tahun 1960. dikeluarkan Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang perusahaan negara sebagai realisasi darie pada Manifesto-politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, jang mengandung keharusan diadakan reorganisasi dalam alat-alat produksi dan distribusi jang ditudjukan kearah pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar '45.

Maksud dari pada Undang-undang tersebut djuga sebagai rangka penjelenggaraan ekonomi terpimpin menudju pelaksanaan Sosialisme Indonesia, sehingga perlu diadakan sinkronisasi dari segala kegiatan ekonomi, baik jang dilakukan oleh perusahaan negara maupun oleh Daerah Suwatantra, koperasi dan swasta, guna mempersingkat waktu jang dibutuhkan untuk menaikkan tingkat hidup dari rakjat Indonesia.

Pelaksanaan dari pada Undang-undang No. 19 ini pada umumnja meliputi tiga golongan perusahaan:

1. Perusahaan-perusahan Ngarea sebagai hasil ambil-alih bekas perusahaan asing sebagai jang dimaksud P.P. No. 10 tahun 1958 dan P.P. No. 23 tahun 1958 ialah perusahaan-perusahaan jang dikuasai baik setjara vertikal maupun lokal oleh Badan Penjelenggara Perusahaan Industri dan Tambang (BAPPIT) dan perusahaan-perusahaan niaga jang dikuasai oleh Badan Urusan Dagang (B.U.D.), dalam mana kedua badan tersebut termasuk didalam lingkungan Badan Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan asing (BANAS).
2. Perusahaan-perusahaan jang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sendiri ialah perusahaan-perusahaan

jang didirikan oleh Bank Industri Negara (B.I.N.) dan perusahaan-perusahaan jang didirikan oleh Lembaga Penjelenggara Perusahaan dan Industri (LEPPIN).

3. Perusahaan-perusahaan swasta jang diatur oleh Peraturan Bendrijfs Reglementerings Ordonnatie tahun 1934 (B.R.O.) dan perusahaan-perusahaan jang diatur dengan Badan Hukum Koperasi (Undang-undang No. 79 tahun 1958, P.P. 60 tahun 1958).

Perusahaan-perusahaan, baik jang berasal dari BAPPIT, B.-U.D., B.I.N. maupun jang dari LEPPIN oleh Deperindra digabungkan mendjadi satu dan dinamakan Perusahaan Negara Perindustrian Rakjat disingkat P.N.P.R. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertama No. 584/MP/64, maka perusahaan-perusahaan jang diserahkan penguasaannja pada Deperindra itu mempunjai beberapa pusat dan tudjuan usahanja, meskipun sama-sama didalam bentuk industri. Pada umumnja dapat dibagi mendjadi 4 sifat jaitu :

1. Bersifat Commercieel-Zakelijk dan berdiri sendiri (Zelfstanding-Zakelijk-Comercieel Bedrijf).
2. Bersifat sebagai Zuster Bedrijf dari pada induk organisasi perdagangan dan tidak berdiri sendiri.
3. Bersifat sebagai pilot projek jang merupakan unsur pendorong bagi masjarakat industri swasta untuk menggali sumber alam Indonesia sebagai substitusi bahan-bahan impor.
4. Sebagai perusahaan induk untuk penjempurnaan hasil-hasil-hasil usaha keradjinan rakjat disekitarnja, agar diperoleh kwalitas produksi jang lebih sempurna.

Selandjutnja dalam lingkungan P.N.P.R. djuga termasuk perusahaan-perusahaan jang berasal dari lembaga Deperindra sendiri jang pada hakekatnja bersifat memberikan djasa-djasanja kepada masjarakat industri ialah dibidang :

a. bantuan mekanisasi.

b. penelitian, pendidikan dan penjempurnaan industri.

Sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindra No. 881 tahun 1960, maka segala sifa tdan tudjuan usaha dari perusahaan dari perusahaan-perusahaan jang tersebut diatas harus ditudjukan kearah sasaran ialah bahwa semua tjabang industri P.N.P.R.-P.N.P.R. itu harus dapat berdiri diatas kaki sen-

diri, terutama didalam bidang keuangan (Selfliquidating), bahkan ditentukan fungsi dari pada perusahaan itu sebagai berikut:

1. Sebagai alat pendobrak keterbelakangan ekonomi (produksi) nasional, agar dapat take-off dan menudju ke-self-supporting.
2. Sebagai pembiaja Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.
3. Sebagai inti dari perusahaan lain (swasta) jang sedjenis (produksinja) = commanding & leading.
4. Sebagai penampung hadjat hidup orang banjak dengan tidak mengurangi produktivitas dan efisien dalam berproduksi.

Karena fungsi dari pada P.N.P.R. jang ditentukan sebagai tersebut diatas terutama bahwa P.N.P.R. itu harus dapat self liqwiditing bahkan harus pula dapat menguntungkan untuk Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, maka susunan organisasi dari pada perusahaan-perusahaan baik jang bersifat vertikal, maupun jang bersifat lokal, lebih-lebih jang bersifat pilot dan induk, tidak dapat dipertahankan terus.

B. ORGANISASI.

Berhubung dengan itu maka Deperindra menjusun perusahaan-perusahaan ini dalam susunan jang membagi dalam produksi-produksi pokok dari perusahaan itu dengan djendjang hierarki kesatu pusat (produk-departementasi jang sentralistis) dengan tudjuan sebagai berikut:

1. Masing-masing perusahaan jang sedjenis produksinja dapat disusun target didalam keseluruhannja sehingga dapat diketahui target P.N.P.R. dalam satu djenis produk itu dalam mengambil peranan berapa prosen (%) dari target Negara guna kebutuhan rakjat seluruhnja.
2. Masing-masing kelompok perusahaan jang sedjenis produksinja berdasarkan tjiri dan naluri perusahaan masing-masing dapat diketahui kekurangan dan kelebihannja, kemudian dapat saling mengisi terutama dibidang keuangan.
3. Tiap-tiap perusahaan jang sedjenis produksinja dapat tersusun kebutuhan pokok baik bahan bakunja maupun bahan penolong sehingga memudahkan prosedurenja dan supply untuk tiap-tiap djenis produksi.

Atas dasar pokok-pokok pikiran jang demikian ini, maka dalam lingkungan Deperindra didirikanlah P.N.P.R. jang tersusun menurut Peraturan Pemerintah No. 180/1961 sampai dengan 194/1961 jang intinja sebagai berikut :

1. Ditingkat Departemen disusun satu Badan Pimpinan Umum P.N.P.R. jang tidak berbadan hukum dan bekerdja atas nama Menteri Perindra serta bersifat non-govemmental dan bertugas untuk mengadakan planning coordination, dan controll.
2. Tiap-tiap tjabang perusahaan jang sedjenis produksinja dibentuk suatu Direksi Perusahaan jang bertugas sebagai badan eksekutif dan berbadan hukum serta bersifat non-governmental dan melaksanakan bussinness management.
3. Direksi tersebut membawakan pabrik-pabrik jang produksinja sedjenis, dan disebut unit-unit produksi jang tidak berbadan hukum, non-governmental dan melaksanakan tugas product-operational-management.

Dilingkungan Deperindra kita mengenal satu B.P.U. dan 14 Direksi dengan 168 operational units jang terbagi sebagai berikut :

— B.P.U. — P.N.P.R.
— P.N.P.R. Djantra Yasa, untuk pabrik-pabrik pemintalan.
— P.N.P.R. Budjana Yasa, untuk pabrik-pabrik makanan, minuman dan rokok.
— P.N.P.R. Busana Yasa, untuk pabrik-pabrik pertenunan dan peradjutan.
— P.N.P.R. Tjarma Yasa, untuk pabrik-pabrik perkulitan.
— P.N.P.R. Keramika Yasa, untuk pabrik-pabrik keramik.
— P.N.P.R. Nabati Yasa, untuk pabrik-pabrik minjak nabati, alkohol dan arak.
— P.N.P.R. Parwita Yasa, untuk pabrik-pabrik es batu.
— P.N.P.R. Kimia Yasa, untuk pabrikpabrik tjat, tinta essence dan alat-alat tulis.
— P.N.P.R. Pertja Yasa, untuk pabrik-pabrik logam dan

3.11. P.N.P.R. Wisaya Yasa, untuk pabrik-pabrik logam dan listrik.

— P.N.P.R. Kriya Yasa, untuk pabrik-pabrik alat-alat bangunan.

— P.N.P.R. Leppin Karya Yasa, jang bertugas sebagai pembangunan projek-projek industri rakjat.

— P.N.P.R. Daya asa, jang bertugas melaksanakan bantuan mekanisasi industri rakjat.

— P.N.P.R. Nupiksa Yasa, jang bertugas untuk mengadakan penelitian (research), pendidikan (trainers), perkembangan (development) industri rakjat.

Organisasi Industri Rakjat Swasta-pun disesuaikan dengan pengorganisasian P.N.P.R., dimana menurut ketentuan Undang-undang 19 tahun 1960 itu P.N.P.R. memegang commanding dan leading atas perusahaan lain jang sedjenis, maka tiap-tiap perusahaan jang sedjenis digabungkan dalam Gabungan Perusahaan Sedjenis (GPS), jang dimaksudkan sebagai Industrie groep sedang perusahaan jang sedjenis prosesingnja tergabung dalam Organisasi Perusahaan Sedjenis (OPS) dimaksudkan sebagai vak groepen.

Didalam lingkungan Deperindra jang menurut statistik industri tertjatat ± 68.000 industri rakjat itu sekarang digabungkan dalam 14 buah GPS dan 49 buah OPS dan ditingkat Departemen diatur oleh Badan Pimpinan Pusat GPS (BPPGPS).

Susunan organisasi industri rakjat swasta adalah sebagai berikut :

— B.P.P.G.P.S. ditingkat Departemen.
— G.P.S. Pemintalan.
— G.P.S. Pertekstilan.
— G.P.S. Logam dan Mesin.
— G.P.S. Perkulitan.
— G.P.S. Rokok.
— G.P.S. Makanan dan minuman.
— G.P.S. Keramik.
— G.P.S. Kameka.
— G.P.S. Kimia.
— G.P.S. Film dan Hiburan.
— G.P.S. Perkaretan.
— G.P.S. Kertas dan Karton.
— G.P.S. Assembling.
— G.P.S. Grafika.

Sebagai perwudjudan dari P.N.P.R. untuk berkedudukan dalam comanding dan leading, maka B.P.P.G.P.S. dipimpin oleh Ketua B.P.U.-P.N.P.R., sedang tiap-tiap G.P.S. dipimpin oleh Presiden Direktur dari P.N.P.R.-P.N.P.R. dengan tudjuan me-

mimpin perentjanaan dan pelaksanaan bersama dalam mentjapai tiap-tiap target Nasional dibidang tiap produksi industri rakjat.

C. MASALAH PRODUKSI.

Untuk menelaah hasil produksi P.N.P.R., maka lebih dahulu harus diinsjafi bahwa industri rakjat adalah termasuk dalam golongan „industri pengolahan bahan mentah" (lihat ketetapan M.P.R.S. No. VI/M.P.R.S./1965 Bab I pasal 2 sub f). Tegasnja ialah „industri rakjat adalah suatu industri jang mengolah bahan mentah (baku, dasar) mendjadi barang kebutuhan rakjat (langsung)".

Djuga biasa diartikan dengan „manufacturing-industries". Mungkin agak berlebihan, bila disini disebut djuga bahwa makna industri dasar seharusnja diartikan sebagai suatu „industri jang memprodusir bahan mentah (baku, dasar).

Berpedoman diatas, maka oleh Deperindra Djawatan Inspeksi Pusat (DIPRA) pada tahun 1961 pernah disusun suatu daftar kebutuhan rakjat jang harus mendjadi target nasional dan Perindustrian Rakjat atas dasar kebutuhan riil dari Rakjat Indonesia jang bermartabat, adab dan hidup susila diabad Kemerdekaan sekarang dan jang bertjita menudju kehidupan Sosialisme Indonesia.

Dalam perintjian sementara sebagai berikut :
— 499 matjam produksi.
— 267 matjam barang kebutuhan.
— 49 matjam vak pembikinan.
— 14 golongan industri.

Djumlah tersebut diatas meliputi 100 djuta rakjat Negara, dengan perhitungan per capita, per keluarga, per desa, per Swatantra tingkat II, dengan afschrijving 1 tahun sampai 10 tahun mendjadi average-target tiap tahun.

Adapun kebutuhan itu didasarkan atas kebutuhan pokok rakjat ialah :

— Kebutuhan barang sandang.
„ barang pangan.
„ barang pendidikan rochani/djasmani.
„ hiburan dan kesehatan.
„ barang-barang angkutan dan sebagainja.
„ barang-barang perumahan dan isinja.

Dengan mengingat funksi industri rakjat serta ruang lingkup tugas jang dibebankan kepadanja oleh amanat (kebutuhan) rakjat maka P.N.P.R. dalam turut membidik target nasional itu, berpedoman dan tergantung pada :

— Djenis industri jang dimiliki.

— Produksi barang jang telah dapat dibikin.

— Tenaga potensiil, mesin, orang dan penggerak (listrik,

— Persediaan bahan baku, penolong jang akan diolah.

Guna keperluan ini maka oleh B.P.U.-P.N.P.R. (Biro Produks·) telah disusun „Buku Pedoman Produksi" sebagai terlampir dimaksudkan untuk memudahkan perentjanaan produksi dan pelaksanaannja, karena buku tersebut berisi daftar data-data dari segala perintjian tersebut diatas.

Sebagai tjontoh dalam buku tersebut umpama disebutkan dalam masalah produksi sandang :

— Potensiil kapasitas P.N.P.R. = 45.000.000 meter.

— Target Nasional = 1.000.000.000 meter.

— Tahun 1962 berhasil merealisir 31.000.000 meter.

— Tahun 1962 hanja dapat merentjanakan target 30.000.000

Djadi P.N.P.R. dalam tahun 1962 dapat menjelesaikan ± b0% dari targetnja sendiri jang berarti ± 65% dari target potensiil, dan baru merupakan 3,1‰ dari target nasional.

6. Hasil produksi dan target dari keseluruhan P.N.P.R., bersama ini dilampirkan ichtisar dari tahun 1962 dan tahun 1963.

D. MASALAH BAHAN BAKU.

Sebagai industri jang tugasnja mengolah bahan baku untuk mendjadi barang kebutuhan rakjat, maka unsur bahan baku mendjadi unsur utama, bila dibanding dengan unsur mesin apabila dengan tenaga manusia.

Dalam buku Pedoman tersebut, dapat dibatja dengan djelas bahwa kebutuhan bahan untuk produksi baik baku maupun penolong jang djumlahnja ratusan matjam itu masih perlu didatangkan dari segala sudut benua dunia, karena Indonesia belum mampu menggali dan memperolehnja didalam negeri sendiri sebagai substitut barang impor. Ketergantungan bahan baku dari luar negeri ini, maka masalah devisa mendjadi masalah jang menentukan hidup matinja industri

rakjat. Pengalaman selama berdirinja P.N.P.R. ini, belum pernah diperoleh devisa tjukup dan sebanding dengan kapasitas potensiil industri, sehingga terdjadi idle-capacity.

Akibat pembagian prioritas devisa terhadap produksi-produksi jang sangat menjolok dibutuhkan oleh rakjat, karena soal devisa kadang-kadang menundjukkan situasi jang mengchawatirkan, maka segala gerak P.N.P.R. ditudjukan kepada mempertahankan produksi guna mendjamin ketenangan tenaga manusia didalamnja.

Untuk memperoleh gambaran situasi devisa jang mendjamin perputaran roda P.N.P.R. maka dibawah ini adalah angka-angka djumlah kebutuhan untuk mentjapai kapasitas penuh perusahaan untuk satu tahun.

— Bahan baku/penolong C & F Rp. 1.529.585.000,—
— Spare parts/accesories „ 174.600.000,—
— Mesin-mesin „ 373.590.000,—

Rp. 2.077.775.000,—

Sedang devisa jang diperoleh dari pemerintah selama masa tahun 1962 hingga tahun 1964, chusus untuk bahan baku dan penolong dan persentase dengan kapasitas potensiil adalah sebagai berikut:

— tahun 1962 sebanjak = „ 394.991.560,— = 16,01%
— tahun 1963 sebanjak = C & F Rp. 245.000.000,— = 25,78%
— tahun 1964 deferred payment „ 48.000.000,— = 3,14%

Berhubung dengan situasi jang demikian, maka pada 6 Desember 1962 diadakan chusus konperensi produksi jang menuangkan dalam program jang disebut „Swasembada Yasa" jang berisi :

— intensifikasi ialah kerdja sama antar Yasa dalam bidang produksi djadi dan setengah djadi.
3.8. ekstensifikasi ialah berusaha mendirikan tjabang industri sendiri untuk kebutuhan bahan baku jang biasa diimpor.
— kerdja sama finansiring dan penjatuan impor.
— turut aktif dalam export drive.

3.11. membangunkan rasa „keluarga-besar" bahwa seluruh Yasa adalah merupakan satu „big happy-family".

E. PENUTUP.

Sesuai dengan maksud dari Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964, dan keputusan M.P.R.S. No. II/tahun 1960 ialah „pengisian otonomi Daerah jang riil dan luas" maka berdasarkan Peraturan Perdana Menteri No. 188/PM/tahun 1964 maka sebagian besar dari P.N.P.R.-P.N.P.R. tersebut diatas ditambah dengan 15 buah projek-projek, telah diserahkan pengurusannja oleh J.M. Menteri Perindra kepada Pemerintah Daerah.

Dengan dilakukannja timbang-terima materiil oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Otonomi Daerah, maka Daerah-daerah ini beralih pula dari lindungan U.U. No. 19 tahun 1960 mendjadi Daerah jang dilindungi oleh U.U. No. 5 tahun 1962.

Maka sisa penjerahan dari P.N.P.R. tersebut ialah:

— B.P.U. P.N.P.R.
— P.N.P.R. Karya Yasa.
— P.N.P.R. Nupiksa Yasa.
— P.N.P.R. Daya Yasa.

masih tetap bernaung dibawah Departemen Perindustrian Rakjat.

VII. OPERASI ALAT TENUN BUKAN MESIN (ATBM) GUNUNG KIDUL.

1. Umum.

Daerah Tingkat II Gunung Kidul adalah suatu daerah jang terletak disebelah tenggara Jogjakarta, seluas 1.408 kilometer persegi, jang berarti lebih kurang setengahnja dari luas Daerah Istimewa (Daerah Tingkat I) Jogjakarta.

Menurut pembagian administratif Daerah Tingkat II Gunung Kidul terdiri dari 13 Ketjamatan dengan 144 kelurahan. Djumlah penduduk Daerah Tingkat II Gunung Kidul adalah lebih kurang 600.000 djiwa (1964). Kepadatan penduduknja rata-rata per kilometer persegi 420 orang.

Sebagian besar dari tanah Daerah Gunung Kidul berupa tanah gamping jang kering, terutama didaerah sebelah selatan dan timur dengan bukit-bukit jang gundul tjuram tertutup dengan batu-batu. Tanah gamping tidak dapat menampung air, karena air hudjan segera masuk kedalam tanah hingga lebih kurang 100 meter dalamnja.

Besarnja tjurah hudjan setahun rata-rata 1.809 mm. Musim kering lama sekali jaitu biasanja dari bulan Djuni sampai Oktober.

Sungai-sungai jang ada ialah Sungai Ojo dan Sungai Brandjang. Sungai jang ketjil banjak terdapat dibagian tengah daerah (ledok Wonosari), akan tetapi tidak mengalirkan air sepandjang tahun, antara lain karena kurangnja tanaman penutup dilorong-lorong, sehingga air kemudian meresap kedalam tanah mendjadi sungai dibawah tanah. Sebagai akibat dari sangat kurangnja tanaman penutup dilereng-lereng, maka keseimbangan tata air sangat terganggu, sumber-sumber tidak mengeluarkan air lagi, terdjadi erosi permukaan dan bandjir. Musim kering jang agak pandjang menimbulkan masalah kekurangan air minum untuk penduduk dan ternak.

Makanan pokok penduduk Daerah Tingkat II Gunung Kidul adalah ubi kaju (singkong, gaplek). Bahan makanan lainnja diantaranja djuga beras, tjantel, djagung dan lain sebagainja. Produksi bahan pangan hanja tjukup untuk 72% s/d 84% dari penduduk.

Sebagian dari produksi pangan oleh rakjat terpaksa didjual kelain daerah untuk dapat membeli lain-lain kebutuhan hidup sehari-hari.

Berbagai usaha telah, sedang dan akan didjalankan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakjat daerah Gunung Kidul dalam rangka merealisir prinsip berdiri diatas kaki sendiri dan untuk mempertinggi ketahanan revolusi.

Dalam bidan gpertanian diusahakan intensifikasi, baik dengan diadakan perbaikan tata air, fertilisasi dan pemilihan bibit unggul serta lain sebagainja.

Sebagian dari penduduk karena kepadatan perlu ditransmigrasikan.

Tanah-tanah kehutanan dan tanah lainnja perlu segera dihidjaukan, untuk keperluan pengawetan tanah dan untuk meningkatkan serta mempertahankan tata air.

Potensi untuk perkembangan keradjinan dan perindustrian rakjat tjukup besar dan perlu lebih dipergiat, karena usaha dibidang ini lebih penting dan akan lebih mempertjepat perbaikan sosial ekonomi.

Untuk mendjamin berhasilnja usaha-usaha diatas diperlukan terselenggaranja konvergensi, kontrole dan kontinuitas.

Rentjana-rentjana telah disiapkan dan pelaksanaan djangka pendek dan djangka pandjang telah dimulai.

Dengan kerdja keras dan ketekunan serta semangat perdjoangan jang menjala-njala dari seluruh lapisan masjarakat, dalam tempo kurang dari setahun, terutama karena dapat lebih dipertjepatnja pelaksanaan dibidang perindustrian rakjat, maka daerah Gunung Kidul telah mulai berubah wadjahnja mendjadi daerah jang penuh harapan, madju terus pantang mundur, bahkan telah mulai dapat membantu daerah-daerah lain sekitarnja jang masih berada dalam keadaan ekonomis kritis.

Tiap warga-negara Indonesia jang benar-benar patriotis progresif revolusioner dalam kata dan perbuatan serta mempunjai rasa kemanusiaan sedalam-dalamnja, dimanapun ia berada, akan memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnja baik moril maupun materiil menudju kesempurnaan dalam pelaksanaan perbaikan sosial ekonomis didaerah seperti Gunung Kidul, sebagai suatu perwudjudan atau realisasi dari prinsip berdiri diatas kaki sendiri, seperti dikomandokan oleh P.J.M. Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, untuk memenangkan konfrontasi terhadap nekolim mengemban Amanat Penderitaan Rakjat menudju masjarakat adil dan makmur.

2. Dasar-dasar untuk mengadakan operasi projek alat tenun bukan mesin di daerah tingkat II Gunung Kidul.

Seperti dikemukakan diatas, karena Daerah Tingkat II Gunung Kidul sangat padat penduduknja sedangkan sebagian besar sangat tandus, maka telah, sedang dan akan didjalankan usaha disegala bidang, untuk dalam waktu dekat diperbaiki keadaan sosial ekonomisnja.

Untuk melaksanakan usaha tersebut, dengan Surat Keputusan Presidium Kabinet tertanggal 30 April 1964, No. A.n./D/41/1964, telah dibentuk „Team Projek Gunung Kidul".

Sebagai salah satu follow-up dari rentjana Team Projek Gunung Kidul tersebut, oleh Menteri Perindustrian Rakjat dengan Surat Keputusannja tertanggal 9 Mei 1964, No. 125/SK/V/1964, telah dibentuk suatu team chusus dengan nama „Team Operasi Alat Tenun Bukan Mesin Gunung Kidul" (Team Operasi A.T.B.M. Gunung Kidul), sedangkan dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tertanggal 9 Mei 1964, No. 126/SK/V/1964, di Daerah Istimewa Jogjakarta, Daerah Tingkat II Gunung Kidul dan di Daerah/Wilajah bawahannja dibentuk „Badan Pembimbing Operasi Projek A.T.B.M. Gunung Kidul" jang bertugas memberi bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap projek A.T.B.M. Gunung Kidul. Adapun pelaksanaan dari projek A.T.B.M. Gunung Kidul dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tertanggal 9 Mei 1964, No. 127/SK/V/1964, ditugaskan kepada Perusahaan Negara Perindustrian Rakjat (P.N.P.R.) Busana Yasa, jaitu suatu Perusahaan Negara jang berusaha dibidang pertemuan dan peradjutan (bahan sandang).

Pertimbangan-pertimbangan apakah jang menjebabkan dipilihnja projek Alat Tenun Bukan Mesin ?

Seperti namanja telah menjebutkan sendiri Alat Tenun Bukan Mesin adalah suatu alat tenun tangan, jang merupakan peningkatan teknis dari alat tenun tangan jang disebut gendong atau gedogan atau kentreung, jang dibuat dari kaju dengan teropong jang berdjalan masinal. Karena Alat Tenun Bukan Mesin (A.T.B.M.) ini merupakan alat tenun semi-masinal, maka kwalitas dan kwantitas produksinja lebih tinggi dari alat tenun tangan gedogan, gendong atau kentreung.

Dengan A.T.B.M. itu seharinja dalam 7 djam kerdja dapat menghasilkan tekstil sebanjak 5 sampai 10 meter, tergantung dari keterampilan penenun. Makanja dipilih keradjinan tenun

dengan A.T.B.M. adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini.

Pertama : A.T.B.M. dapat dibikin didalam negeri dengan mudah.A.T.B.M. diketemukan sedjak tahun 1922 oleh Balai Penelitian Tekstil di Bandung dan karenanja telah lama dikenal oleh Bangsa Indonesia pada umumnja dan masjarakat penenun pada chususnja.

Kedua : A.T.B.M. adalah suatu alat tenun jang didjalankan oleh tenaga tangan, djadi tidak memerlukan tenaga listrik, sehingga untuk daerah-daerah pedalaman, dimana belum ada tenaga listrik seperti di Gunung Kidul, sangat tjotjok sekali.

Ketiga : Untuk beladjar menenun dengan A.T.B.M. tidak begitu sukar, dengan lain perkataan menenun dengan A.T.B.M. tidak memerlukan „skill" jang berat. Dalam tempo lebih kurang dua minggu latihan seseorang telah dapat mendjalankan A.T.B.M. dengan lumajan.

Keempat : Pertenunan dengan A.T.B.M. tidak memerlukan modal jang besar seperti dengan alat tenun mesin (alat tenun listrik). Lebih-lebih kalau A.T.B.M. dapat dibikin sendiri modalnja akan sangat kurang sekali.

Kelima : dengan A.T.B.M. dapat ditenun hampir semua djenis tekstil seperti jang dihasilkan oleh alat tenun mesin, dengan mutu jang tjukup baik untuk sandang rakjat.

Keenam : Pertenunan tidak terpengaruh oleh keadaan tjuatja dan iklim. Industri lainnja terutama jang membutuhkan air, seperti halnja dengan pertanian, kehutanan dan lain-lain akan menghadapi kesukaran untuk didjalankan di Daerah Gunung Kidul, karena di Gunung Kidul, seperti diterangkan diatas, lebih-lebih pada musim kering sangat kekurangan air, bahkan untuk minumpun sangat sukar didapat.

Ketudjuh : Pertemuan dengan A.T.B.M. dapat didjadikan usaha samben disamping pertanian dan lain-lain usaha, dan dapat dikerdjakan oleh semua anggota keluarga.

Kedelapan : Pertenunan dengan A.T.B.M. dapat menghasilkan tambahan „income" jang tjukup lumajan, jaitu dari tiap meter tekstil tambahan penghasilan (income) pembikinan sebanjak rata-rata Rp. 25 sampai Rp. 30,— atau sama dengan harga gaplek lebih kurang sebanjak 1 kilogram (untuk tiap keluarga diperlukan seharinja lebih kurang 2½ kilogram gaplek, sedangkan hasil tenun seharinja dengan 7 djam kerdja

berkisar antara 5 sampai 10 meter). Karena menurut perhitungan akan terdapat kelebihan uang, maka didaerah Gunung Kidul sendiri akan mungkin diadakan pemupukan modal dengan djalan menjimpan sebagian dari penghasilan tambahan itu.

Kesembilan : Pertenunan dengan A.T.B.M. merupakan pertenunan rumah tangga (home industry) dan karenanja merupakan objek jang baik sekali untuk pembentukan koperasi.

Kesepuluh : Seperti halnja dengan keadaan dilain negeri didunia ini, maka industri pertekstilan biasanja merupakan industri pelopor menudju kearah industrialisasi.

Dengan pertenunan ini, chususnja di Daerah Gunung Kidul jang tandus itu, diharapkan akan membangkitkan „industry-mindedness", sehingga dalam waktu tidak lama lagi akan muntjul industri-industri lainnja.

Selain dari pertimbangan-pertimbangan tersebut memang ada hal-hal jang lain, tapi kiranja tjukup dengan apa jang dikemukakan diatas.

Dengan usaha jang sederhana, jaitu dengan pertenunan A.T.B.M., maka dalam waktu singkat dan setjara segera dapat memberikan tambahan penghasilan (income) sehingga :

Pertama : Rakjat lebih mampu untuk membeli barang keperluan sehari-hari. Dengan hasil produksi tenun sehari (7 djam bekerdja) sebanjak 5 meter á Rp. 25,— (sama dengan tambahan penghasilan sebesar Rp. 125,—. Untuk membeli gaplek atau bahan makanan lainnja per hari per keluarga lebih kurang Rp. 90,— (harga gaplek per kilogram Rp. 25,— dan per keluarga sehari diperlukan lebih kurang 2½ kilogram) maka masih didapat kelebihan Rp. 35,—.

Kedua : Rakjat dapat dan mampu mengadakan simpanan. Agar supaja rakjat tidak menghambur-hamburkan sisa tambahan penghasilan, maka dididik menjimpan, jaitu diatur dari tiap meter tekstil menjimpan di Bank Koperasi Tani dan Nelajan (B.K.T.N.) sebanjak Rp. 1.— Djadi djika menghasilkan 5 meter per hari dapat menjimpan per hari Rp. 5,— dari sisa Rp. 30,— tersebut, atau per bulan Rp. 125,— (25 hari).

Djika rentjana 50.000 A.T.B.M. telah tertjapai, maka simpanan seluruh Gunung Kidul dari pertenunan sadja berdjumlah 6.250.000 rupiah sebulannja atau Rp. 75.000.000 setahunnja.

Djika keterampilan menenun meningkat, djumlah simpanan ini akan meningkat pula. Selain dari penenun djuga perlu adanja karyawan mehani dan mengerek (mengelos, memalet) jang djumlahnja dua kali dari djumlah penenun. Karyawan mehani dan mengerek djuga diatur untuk menjimpan masing-masing rata-rata Rp. 5,— sehari maka djumlah simpanan akan mendjadi Rp. 18.750.000,— sebulannja atau Rp. 215.000.000,— setahunnja.

Ketiga : Rakjat tidak perlu mentjari kaju bakar untuk didjual agar dapat menambah penghasilan, jang biasanja mengakibatkan perusahaan hutan dan penghidjauan akan dapat lebih diamankan.

Keempat : Rakjat akan lebih mempunjai waktu untuk mengintensifir usaha-usaha dilain bidang, umpamanja pertanian, peternakan dan lain-lain.

Kelima : Rakjat akan lebih mampu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan jang biasanja timbul dimusim patjeklik.

Keenam : Rakjat akan lebih mampu untuk mengurangi pendjualan hasil panen bahan makannja, dan karenanja akan lebih mampu untuk mengadakan persediaan bahan makanan.

3. **Tudjuan pokok dari operasi projek A.T.B.M.**

Dari pendjelasan diatas, maka kiranja sudah djelas bahwa tudjuan pokok jang harus ditjapai dengan operasi projek A.T.-B.M. adalah untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi di Daerah Gunung Kidul setjepat mungkin, sehingga rakjat Gunung Kidul dalam waktu sesingkat-singkatnja lebih mampu untuk menanggulangi kesukaran-kesukaran dimusim patjeklik dan segala bahaja jang mengantjamnja.

Memang dengan diadakan pertenunan, rakjat Gunung Kidul akan dapat berdiri diatas kaki sendiri dibidang sandang. Bahkan Daerah Gunung Kidul akan mempunjai surplus sandang tiap tahunnja. Akan tetapi produksi sandang tidak merupakan tudjuan pokok dan merupakan soal sekunder.

Djika dilihat djumlah sebanjak 50.000 A.T.B.M. jang direntjanakan, maka sepintas lalu seperti merupakan projek besar. Akan tetapi pada hakekatnja bukan merupakan projek besar, hanja sederhana sadja, karena untuk tiap kepala keluarga atau kepala somah hanja satu A.T.B.M. Begitu pula tidak meliputi seluruh kepala keluarga atau kepala somah (K.K. atau K.S.),

hanja meliputi lebih kurang 42% dari djumlah K.K./K.S. di Daerah Gunung Kidul, jaitu jang berada didaerah sebelah selatan dan timur dari Gunung Kidul jang merupakan bagian-bagian jang paling tandus.

Disamping tudjuan diatas, diharapkan djuga, bahwa dengan diadakannja operasi pertenunan dengan A.T.B.M. akan mendorong rakjat Gunung Kidul kearah industrialisasi, jang penting sekali terutama untuk daerah jang penghasilan pertanian serta peternakannja sangat kurang. Seperti biasanja, pertenunan merupakan pelopor kearah industrialisasi.

4. Perentjanaan dan pelaksanaan.

Direntjanakan dalam bulan Mei 1964 dilatih selama 1 bulan dari sebanjak 60 orang dari Gunung Kidul.

Tiap orang jang telah lulus dari latihan menenun, sembari meningkatkan keterampilannja dirumahnja masing-masing, dalam tempo 2 bulan akan dapat melatih teman sekampungnja atau teman sedesanja masing-masing 2 orang, sehingga dalam bulan Djuli 1964 djumlah penenun akan berlipat 3 kali, jaitu mendjadi 180 orang, dan jang 180 orang penenun ini akan melatih lagi dalam tempo 2 bulan masing-masing 2 orang sehingga dalam bulan September 1964 akan mendjadi 540 orang, dan begitu selandjutnja dalam tempo 2 bulan akan bertambah banjak penenun 3 kali lipat. Dengan sistim multiplier demikian, maka direntjanakan pada bulan September 1965, sebelum musim patjeklik, akan tertjapai djumlah 50.000 orang penenun.

Memang rentjana ini kelihatannja sepintas lalu sangat ambisius dan menimbulkan pessimisme, terutama bagi orang jang belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri vitalitas serta ketekunan kerdja orang Gunung Kidul. Mereka jang belum pernah mengindjak Daerah Gunung Kidul mengira, bahwa karena Daerah Gunung Kidul adalah daerah tandus dan sering mengalami kurang tjukup bahan pangan, rakjatnja sebagian besar dikiranja physik sangat lemah. Tapi kenjataan tidak demikian halnja, karena djustru oleh penderitaan itu sebagian besar dari penduduk Gunung Kidul bahkan mendjadi sebagian besar lebih kuat. Lagi pula untuk sesuatu operasi diperlukan optimisme jang tjukup beralasan dan berdasarkan kenjataan (facts) jang telah ditelitinja "on the spot".

Jang direntjanakan tiap penenun dalam tempo 2 bulan dapat melatih 2 orang dalam kenjataannja dapat melatih lebih dari

2 orang, bahkan ada jang dapat melatih lebih dari 5 orang dalam tempo 2 bulan.

Ketjepatan melatih dengan "multiplier system" itu demikian tjepatnja, sehingga tidak dapat diikuti oleh persediaan A.T. B.M.-nja. Kesukaran ini timbul dikarenakan keadaan pembiajaan jang masih perlu diatasi.

Operasi Projek A.T.B.M. diresmikan pembukaannja oleh J.M. Menteri Perindustriaan Rakjat pada tanggal 20 Mei 1964 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

Sampai bulan Maret 1965 djumlah A.T.B.M. jang sudah djalan baru sebanjak lebih kurang 900 A.T.B.M., jang setelah dapat diatasinja kesukaran keuangan serta persediaan peralatan, ketinggalan menurut rentjana akan dapat diatasi disebabkan tjepatnja realisasi "multiplier system" seperti didjelaskan diatas.

Dalam bidang latihan menenun banjak sekali diberikan bantuan oleh Koperasi tenun tangan jang berada di Jogjakarta, jang menjediakan tempat latihan diperusahaan-perusahaan koperasi tenun tangan (A.T.B.M.). Djuga Jajasan Pendidikan Pertekstilan di Jogjakarta mempertjepat latihan para tjalon penenun Gunung Kidul.

Dibidang keuangan dan pembiajaan bantuan dari Bank Indonesia dan B.K.T.N. telah mulai dapat memetjahkan kesukaran finansiring.

Direntjanakan bila tiap penenun seharinja dapat menghasilkan tekstil 8 meter, maka dalam setahunnja (dihitung 300 hari kerdja) dengan 500.000 A.T.B.M. akan menghasilkan 120.000.000 meter tekstil. Dengan tambahan penghasilan Rp. 25,— atau berbentuk upah tenun Rp. 25,— per meternja, maka tambahan penghasilan bagi Daerah Gunung Kidul setahunnja akan berdjumlah lebih kurang 3 miljard rupiah. Disamping itu para karyawan mehani dan mengelos (mengerek) jang djumlahnja lebih kurang dua kali banjaknja, dengan kira-kira penghasilan sama dengan penenun, akan menambah djumlah tambahan penghasilan ± 5 miljard rupiah, sehingga dengan diadakannja operasi A.T.B.M. Daerah Gunung Kidul akan mendapatkan tambahan penghasilan sebanjak lebih kurang 8 miljard rupiah setahunnja. Perlu dikemukakan, bahwa tenunan di Gunung Kidul berukuran lebar sekurang-kurangnja 90 cm. Sungguh tambahan penghasilan jang tidak sedikit djumlahnja dan jang

tidak ketjil akibatnja nanti bagi usaha untuk meningkatkan taraf hidup masjarakat di Gunung Kidul.

Para penenun jang telah lulus dari latihan diberi A.T.B.M. untuk dibawa pulang kerumahnja setjara sewa-beli jang harus dibajar lunas dalam tempo 2 sampai 3 tahun.

Selain dari dilatih menenun, para penenun diberi peladjaran djuga dalam tjara memperbaiki alat dan peladjaran mengenai koperasi.

a. **Pengorganisasian.**

Pengorganisasian operasi A.T.B.M. Gunung Kidul merupakan perwudjudan dari prinsip „Social effort, Social Participation dan Social control" serta „Open Management".

Di Departemen Perindustrian Rakjat (di Pusat) dengan Surat Keputusan Menteri-menteri Perindustrian Rakjat tanggal 9 Mei 1964, No. 125/SK/V/1964, dibentuk suatu team chusus jaitu „Team Operasi Projek A.T.B.M. Gunung Kidul", disingkat T.O.P.A.G. dalam mana duduk wakil-wakil dari Departemen Transmigrasi dan Koperasi, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perindustrian Rakjat, P.B. Front Nasional dan lain unsur jang perlu T.O.P.A.G. bertugas untuk merentjanakan, mengikuti, membina dan mengawasi operasi projek A.T.B.M. setjara keseluruhan.

Di Daerah Istimewa Jogjakarta, Daerah Tingkat II Gunung Kidul dan didaerah-daerah bawahannja menurut keperluan, dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tanggal 9 Mei 1964, No. 126/SK/V/1964, dibentuk „Badan Pembimbing Operasi Projek A.T.B.M. Gunung Kidul" dengan tugas membimbing, membantu melantjarkan dan mengawasi operasi A.T.B.M. dalam wilajahnja masing-masing. Duduk dalam Badan-badan Pembimbing tersebut selain Pantja Tunggal, djuga instansi-instansi setempat dan Organisasi-organisasi Masjarakat Daerah jang ada hubungannja dengan operasi A.T.B.M.

Team dan Badan-badan tersebut diatas adalah jang mempunjai tugas dibidang perentjanaan, bimbingan dan pengawasan.

Adapun pelaksanaan (operation) dari projek A.T.B.M. itu dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tanggal 9 Mei 1964, No. 127/SK/V/1964, ditugaskan dan dipertanggung djawabkan kepada Perusahaan Negara Perindustrian Rakjat Busana Yasa. Berhubung dengan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964, dimana Busana Yasa dengan

unit-unit Pertenunan & Peradjutannja diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Daerah Tingkat I, maka dengan S.K. Menteri Perindustrian Rakjat tanggal 27 Maret 1965, No. 95/PML/SK/III/1965, tugas dan pertanggungan-djawab diserahkan kepada Perusahaan Negara Perindustrian Rakjat Daya Yasa sebagai pengganti Busana Yasa.

Selain dari organisasi diatas, maka diwilajah-wilajah jang telah tjukup djumlah penenunan setjara keradjinan rumah tangga (home industry), dibentuk koperasi-koperasi primer. Sampai bulan Maret 1965 telah terbentuk 7 koperasi primer A.T.B.M.

Untuk lebih memudahkan mengadakan observasi mengenai efek-efek dari operasi A.T.B.M. telah diadakan dua pilot project A.T.B.M. untuk mana dipilih dua dukuh jang biasanja paling menderita akibat patjeklik, jaitu dukuh Mulo jang letaknja tidak djauh (7 Km) dari ibu-kota Daerah Tingkat II Gunung Kidul (Wonosari) dan dukuh Tambak (desa Melikan) jang letaknja lebih kurang 30 KM dari Wonosari.

b. **Distribusi Bahan dan Penampungan Hasil Produksi.**

Dengan dibentuknja Team dan Badan-badan jang merupakan perwudjudan dari „social support" „social participation" dan „social control" serta dengan diadakannja „open management", maka setjara preventif dan represif organisatoris diusahakan untuk mentjegah segala hal jang tidak diinginkan.

Disamping itu setjara preventif-teknis diatur pembagian benang tenun tidak dalam pak atau kilo akan tetapi setelahnja dipersiapkan dalam „boom" (opgeboomd) dan dalam kelosan jang pandjangnja maupun beratnja diukur di-pusat-pusat persiapan (preparation centres).

Selain dari itu untuk penelitian setjara represif-teknis maka hasil produksi setelah mendjadi tekstil ditampung kembali oleh Busana Yasa c.q. Daya Yasa dengan diadakan penimbangan beratnja dan ukuran pandjangnja menurut konstruksi tekstil djadi. Dengan demikian dapat dilakukan „checked and re-checked" setjara physik, demi pengamanan bahan dan hasil produksi.

c. **Efek-efek jang sampai kini telah kelihatan.**

Efek-efek jang sampai kini telah diketahui diantaranja adalah:

— rakjat jang telah dapat menenun telah mampu untuk membeli bahan keperluan sehari-hari dengan tjukup, bahkan dapat mengadakan persediaan dan telah dapat membajar pembagian bahan makanan dengan kontan, sedangkan dulunja setjara kredit.

— rakjat jang telah dapat menenun telah menjimpan wang di B.K.T.N. via koperasi primer dari setiap meter tekstil Rp. 1,— Djumlah produksi sampai permulaan bulan Maret 1965 telah tertjapai lebih-kurang 75.000 meter. Djumlah simpanan adalah lebih-kurang Rp. 75.000,—.

— rakjat Gunung Kidul telah lebih „koperasi-minded".

— rakjat Gunung Kidul telah dapat membantu daerah lainnja jang keadaan ekonominja kritis dengan bahan untuk dibatik seperti daerah Kulonprogo (Jogjakarta) dimana terdapat banjak pembatik rumah-tangga.

— Daerah Gunung Kidul telah dapat menjediakan bahan pakaian untuk para tjalon transmigran, baik dari Gunung Kidul sendiri maupun dari daerah-daerah lain sekelilingnja.

— pada waktu hari raja Lebaran Daerah Gunung Kidul telah mulai dapat mentjukupi kebutuhannja akan sandang, tidak menanti kiriman dari lain tempat.

— rakjat jang telah dapat menenun lebih mempunjai waktu untuk lebih mengintensifkan usaha-usaha dibidang lainnja seperti pertanian, peternakan, keradjinan tangan, pemeliharaan djalan, dan sebagainja.

— didaerah-daerah jang telah banjak penenunnja, pemeliharaan terhadap anak-anak lebih baik dan keadaan kesehatan lebih memuaskan, begitu pula keadaan kebersihan lebih diperhatikan.

— didaerah-daerah jang telah banjak penenunnja pengamanan kehutanan dan penghidjauan lebih terdjamin.

— semangat untuk mewudjudkan prinsip berdiri diatas kaki sendiri sepenuhnja, chususnja dibidang sandang, sangat besar.

Buktinja untuk menanggulangi kesukaran akan bahan baku untuk sandang, rakjat Gunung Kidul telah mulai menanam kapas, dimulai dengan areal seluas lebih dari 500 ha dan penanaman murbei untuk pemeliharaan ulat sutera kepunjaan rakjat

seluas lebih dari 500 ha. Tiap orang jang telah dapat menenun telah mulai dengan menanam murbei sebanjak 100 pohon.

Disana sini telah diadakan pemeliharaan ulat sutera, bahkan telah mulai dengan menghasilkan kokon dan benang sutera (raw silk).

Dalam bidang penanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera dapat dikemukakan, bahwa Djawatan Kehutanan Jogjakarta telah memeloporinja. Ditanah kehutanan Gunung Kidul sampai kini telah ditanami murbei dengan areal seluas lebih-kurang 3000 ha.

Djumlah areal untuk ditanami kapas direntjanakan akan mendjadi seluas lebih dari 30.000 ha dengan tjara jang tidak mendesak tanaman bahan pangan. Djika per ha hanja menghasilkan 1 kwintal kapas bersih, maka nantinja Gunung Kidul akan menghasilkan 3.000.000 kg kapas seharga lebih dari Rp. 3 miljard.

Djumlah areal untuk ditanami murbei di Gunung Kidul baik dari Djawatan Kehutanan, maupun kepunjaan rakjat direntjanakan akan mendjadi seluas 10.000 ha, jang berarti akan menghasilkan benang sutera (raw silk) sebanjak lebih-kurang 200.000 kg jang harganja lebih-kurang 8 a 10 miljard rupiah setahunnja.

Dengan uraian diatas njatalah betapa besar kemungkinan-kemungkinan dan potensi serta vitalitas masjarakat, sekalipun daerahnja tandus.

Mudah-mudahan dengan keridloan Tuhan Jang Maha Esa Daerah Gunung Kidul jang tandus penuh dengan batu kapur, dalam waktu dekat akan mendjadi daerah jang subur, makmur.

*
* *

VIII. PENJULUHAN DALAM PERINDUSTRIAN RAKJAT.

1. Umum.

Dalam membina serta memperkembangkan perindustrian rakjat di Indonesia untuk mempertinggi taraf hidup rakjat pada umumnja, maka penjuluhan dan pembimbingan dalam bidang perindustrian memegang peranan penting.

Pada waktu-waktu sebelum Indonesia Merdeka, jaitu pada waktu pendjadjahan kolonial Belanda, penjuluhan dan pembimbingan dalam bidang industri ini sangat kurang sekali, sehingga perkembangan industri terbatas pada apa jang dinamakan „nijverheid" (perusahaan-perusahaan keradjinan rakjat) sadja, karena memang disengadja oleh pihak sipendjadjah, jaitu untuk mentjegah djangan sampai perkembangan industri di Indonesia mengakibatkan tidak lakunja barang-barang jang mereka datangkan dari Negeri Belanda.

Pada waktu itu apa jang disebut „nijverheid" perkembangannja lambat sekali dan tidak merata. Djuga tjara produksi, organisasi dan tjara pendjualan hasil produksinja tidak teratur, bahkan diantara nijverheid-nijverheid itu terdapat persaingan jang hebat.

Semasa pendudukan militerisme Djepang di Indonesia, penjuluhan dan pembimbingan dalam bidang industri ini mendapat perhatian dari Pemerintah Balatentara Djepang.

Kemerdekaan Indonesia mengharuskan kita dan chususnja Pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan „nijverheid" itu kearah industrialisasi modern dengan memberikan penjuluhan-penjuluhan, bimbingan-bimbingan, serta penerangan-penerangan kepada perusahaan-perusahaan keradjinan rakjat.

Maka dari itu sedjak Indonesia Merdeka, lebih-lebih setelah taraf perdjuangan physik kita selesai, penjuluhan dan pembimbingan dalam bidang perindustrian mendapatkan perhatian jang tjukup besar dari Pemerintah, dan pada waktu terbentuknja Kementerian Perekonomian dalam tahun 1952, penjuluhan (nijverheidsbevordering) dan pembimbingan telah dimasukkan dalam rentjana Kementerian tersebut, jang harus diselenggarakan oleh Djawatan Perindustrian Pusat.

Sedjak saat itu dan terutama setelah dibentuknja Departemen Perindustrian Rakjat pada pertengahan tahun 1959 oleh

Paduka Jang Mulia Presiden, penjuluhan dan pembimbingan kepada perusahaan-perusahaan keradjinan mulai dilakukan dengan intensif.

Hal ini ternjata dengan dibentuknja kantor tersendiri untuk penjuluhan industri dalam Departemen Perindustrian Rakjat, jang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Muda Perindustrian Rakjat tertanggal 29 Agustus 1959, No. 327/M/Perindra, (jang pada waktu Kementerian Perindustrian hanja merupakan salah satu bagian sadja dari Kantor Perkembangan dan Pemeliharaan produksi Perusahaan-perusahaan Industri (K.P.4) dari Direktorat Perindustrian Umum), jang bertugas:

1. Aktif menjampaikan kepada umum:
   a. Peraturan-peraturan dalam bidang Perindustrian Rakjat;
   b. Keterangan-keterangan tentang pendirian, penjelenggaraan projek-projek industri dalam lingkungan Perindustrian Rakjat, pemeliharaan serta perkembangannja;
   c. Hasil-hasil karya, organisasi-organisasi dari Departemen Perindustrian Rakjat;
2. Mengurus semua penerbitan mengenai lapangan usaha Departemen Perindustrian Rakjat.
3. Menjelenggarakan/ikut-serta dalam pameran-pameran bahan-bahan/hasil-hasil produksi industri rakjat.
4. Menjelenggarakan/ikut menjelenggarakan showrooms mengenai lapangan perindustrian rakjat.
5. Mendirikan/memelihara museum industri nasional.

Pada tahun 1963, waktu diadakan reorganisasi di Departemen Perindustrian Rakjat, tugas-tugas penjuluhan ini djauh lebih diintensifkan lagi dengan dititik beratkannja petugas-petugas itu kearah penjuluhan praktis jang langsung kepada kader-kader masjarakat, dengan djalan memperbanjak pameran-pameran keliling kedaerah-daerah jang mendemonstrasikan dan meragakan tjara-tjara pembuatan bermatjam-matjam barang serta mengadakan pemutaran film-film industri, dengan maksud:

1. Menghidupkan semangat industri rakjat dikalangan masjarakat.
2. Mengadjak rakjat supaja gandrung industri.
3. Memupuk keradjinan-keradjinan dan memupuk industri rakjat.

4. Memperluas lapangan pekerdjaan untuk masjarakat.
5. Memberi dorongan agar rakjat dapat konstruktif dan produktif.
6. Mengadjak rakjat mengisi waktu-waktu senggang mereka dengan pekerdjaan-pekerdjaan sampingan dengan tidak melupakan pekerdjaan mereka jang utama.

Disamping pendjurusan tugas kearah tugas-tugas penjuluhan praktis diatas, mulai tahun 1963, daerah-daerah jang dikundjungi dalam rangka mengadakan pameran keliling lebih diperluas lagi, chususnja kedaerah-daerah jang dulunja mendapat gangguan-gangguan keamanan.

Hingga saat ini penjuluhan dan pembimbingan dalam industri dilakukan terus, dan tidak membawa perkembangan perindusterian chususnja ketingkat jang djauh lebih tinggi.

2. **Pengertian Mengenai Penjuluhan.**

Penjuluhan dalam bidang industri adalah memberikan petundjuk/penerangan/bimbingan dan menjebarkan pengetahuan mengenai perindustrian kepada masjarakat pada umumnja dan kepada masjarakat perindustrian pada chususnja, dengan maksud untuk memperkembangkan perusahaan-perusaahan keradjinan rakjat didaerah-daerah diseluruh Indonesia kearah industrialisasi modern.

3. **Tjara-tjara Memberikan Penjuluhan/Pembimbingan.**

Penjuluhan-penjuluhan/pembimbingan-pembimbingan mengenai perindustrian dilakukan dengan berbagai tjara:

1. mengadakan penjuluhan-penjuluhan/penerangan-penerangan keluar langsung kepada perusahaan-perusahaan keradjinan dan perusahaan-perusahaan rumah tangga didaerah-daerah, baik setjara aktif maupun setjara passif;
   — penjuluhan keluar setjara aktif jalah memberikan penerangan-penerangan kepada perusahaan-perusahaan keradjinan tangan/perusahaan-perusahaan rumah tangga didaerah-daerah, diminta maupun tidak, perihal jang bersangkut-paut dengan industri pada umumnja, seperti pendjatahan, penjaluran perusahaan, pendaftaran perusahaan, pengkreditan, bantuan mekanisasi dan lain-lain.
   — penjuluhan keluar setjara passif didjalankan dengan memberikan penerangan-penerangan kepada perusahaan-perusahaan keradjinan/perusahaan-perusahaan rumah tangga jang memintanja.

2. mendirikan showrooms annex-centres di daerah-daerah;
3. mendirikan "workshop" ketjil didaerah-daerah jang djauh letaknja dari pusat, dimana dapat diberikan penjuluhan/bimbingan/demonstrasi kepada para peminat dilapangan industri.
4. mendirikan perusahaan-perusahaan induk dan perusahaan-perusahaan pelopor didaerah-daerah agar dapat mendjadi tjontoh bagi masjarakat perindustrian setempat;
5. mendirikan balai-balai penjelidikan jang bertugas menjelenggarakan research, pengudjian, penjuluhan dan pendidikan dalam bidangnja masing-masing.
6. menjelenggarakan Kursus-kursus/Latihan-latihan/Pendidikan-pendidikan dalam bidang perindustrian;
7. memberikan konsultasi dalam lapangan mekanisasi.
8. mengadakan pembuatan film-film mengenai perusahaan-perusahaan perindustrian/keradjinan rakjat, guna dipertundjukkan kepada masjarakat.
9. mengadakan pameran-pameran lokal, pameran-pameran keliling ke-daerah-daerah dengan menggunakan mobile-unit, pameran-pameran nasional dan turut-serta dalam pameran-pameran internasional.

4. Usaha-usaha Penjuluhan dan Pembimbingan jang telah dilaksanakan.

a. Sampai dengan tahun 1959.

— telah diadakan penjuluhan keluar dengan memberikan penegasan-penegasan/penerangan-penerangan dalam garis besarnja mengenai perindustrian jang diperlukan oleh para tamu/pengusaha.

— telah diperiksa penerbitan salinan Manifesto Politik, salinan Undang-undang Dasar 1945, buku Peraturan Deperindra No. 1, brosur-brosur, folders, dan sebagainja mengenai pembuatan bermatjam-matjam barang industri, dan kumpulan hasil research Balai-balai Penjelidikan jang bermanfaat untuk mempertinggi mutu sesuatu hasil industri dan lain-lain. Djuga telah diterbitkan Madjalah Warta Industri, madjalah bulanan berkala sebagai salah satu alat untuk penjuluhan guna perkembangan perindustrian.

— pada tahun 1958 telah dipersiapkan dan mulai dikerdjakan pembuatan 7 buah showrooms annex trade centres didaerah-daerah Bandjarmasin, Palembang, Makassar, Singa-

radja, Djambi, Kotaradja dan Padang, atas biaja Kantor Mekanisasi dan Pembiajaan Industri.

Pada tahun 1959 telah selesai showrooms annex trade centres di Padang dan Makassar.

— projek-projek induk dan pelopor jang telah/sedang diselenggarakan sampai achir tahun 1959 ada 49 buah, jang terpentjar diberbagai daerah di Indonesia (Lihat karangan tentang Induk Perusahaan).

— telah didirikan 7 buah Balai Penjelidikan dan 2 tjabang Balai, jang semuanja telah berdjalan baik, jaitu:
1) Balai Penjelidikan Industri di Djakarta;
2) Balai Penjelidikan Kimia di Bogor, dengan tjabang-
3) Balai Penjelidikan Bahan-bahan di Bandung;
4) Balai Penjelidikan Tekstil di Bandung;
5) Balai Penjelidikan Keramik di Bandung;
6) Balai Penjelidikan Kulit di Jogjakarta;
7) Balai Penjelidikan Batik di Jogjakarta.

— Telah didirikan 4 buah Akademi/Sekolah Tinggi, Sekolah-sekolah dan Kursus-kursus dalam bidang perindustrian jaitu:
1) Akademi Pemimpin Perusahaan di Djakarta;
2) Akademi Analisa di Bogor;
3) Sekolah Tekstil Tinggi di Bandung; x)
4) Sekolah Kulit Tinggi di Jogjakarta; x)

Kursus-kursus.

1) Kursus Peratjian di Djakarta;
2) Kursus Mekanik Diesel di Djakarta;
3) Kursus Minjak Tumbuhan-tumbuhan di Djakarta;
4) Kursus Dinas Pengatur Analis di Bogor;
5) Kursus Tekstil dan Kursus Praktek mengenai Tekstil di Bandung;
6) Kursus Bahan-bahan Bangunan di Bandung;
7) Kursus Laboran di Bandung;
8) Kursus Keramik di Bandung;
9) Kursus Penjamakan Kulit di Jogjakarta;
10) Kursus Batik di Jogjakarta.

Disamping itu oleh Kantor Penjuluhan Industri telah dise-

---

x). Sedjak tahun 1960 Sekolah Tekstil Tinggi dan Sekolah Kulit Tinggi dirubah namanja mendjadi Akademi Tekstil dan Akademi Kulit.

lenggarakan Kursus Kader Penjuluhan dari tanggal 21-10-1958 s/d bulan Djanuari 1959 (lebih kurang 3 bulan).

Pusat Latihan Pendidikan Teknis Perindustrian jang akan diselenggarakan pula oleh Kantor Penjuluhan Industri, karena besarnja biaja jang dibutuhkan, buat sementara terpaksa ditangguhkan.

— Oleh Kantor Penjuluhan Industri bersama-sama dengan Panitia Penilaian Film Industri telah diselesaikan pembuatan 6 buah film industri, terutama mengenai Industri Sandang Pangan, jaitu dalam lapangan kerdja; Sekolah Tekstil Tinggi Bandung, Pabrik Pemintalan B.I.N. Tjilatjap, Induk Finishing Tekstil (L.P.3.I), Tjeper, Pabrik Peradjutan (L.P.3.I.) Madiun, Balai Penjelidikan Batik Jogjakarta dan kapas dalam negeri di Asembagus.

— Turut serta menjelenggarakan pameran-pameran dalam Pekan Industri jang diselenggarakan oleh Madjelis Industri Indonesia (M.I.I.) dengan hasil jang sangat memuaskan, jaitu:

Pameran dilapangan Garden Hall, Tjikini, Djakarta (1958). Dalam pameran ini telah dipamerkan ber-matjam-matjam barang industri jang dihasilkan oleh Lembaga Penjelenggara Perusahaan-perusahaan Industri jang disertai dengan demonstrasi pembikinan bata/genteng, barang-barang keramik, pertundjukan maquetten, graphieken, dan lain-lain. Pameran dilapangan belakang Kantor Besar Polisi, Djakarta. (1959).

Jang telah dipamerkan dalam pameran ini adalah barang-barang tnuen hasil dari berbagai daerah, demonstrasi gedogan daerah-daerah, demonstrasi mesin pemintalan, pertenunan dan peradjutan jang modern Balai Penjelidikan Tekstil.

— Dalam rangka memberikan bimbingan kepada perusahaan-perusahaan keradjinan rakjat/perusahaan-perusahaan industri dalam lingkungan perindustrian rakjat, telah dibahas kemungkinan didirikannja beberapa projek-projek baru ditindjau dari segi teknis, jaitu antara lain:

1) Pabrik Elektromotor, ex. Kredit Jugoslavia;
2) Pabrik Kertas dari merang dan bagase;
3) Pabrik Soda di Madura;
4) Pabrik Superfosfat, ex. Kredit U.R.S.S.

Disamping itu telah dibuat analisa ekonomi/marketing 7 buah Perusahaan Negara dan 9 buah Perusahaan Swasta.

b. Tahun 1960 s/d 1964.

Dalam periode ini usaha-usaha untuk memadjukan perindustrian rakjat melalui media penjuluhan dan pembimbingan djauh lebih dipergiat lagi dibandingkan dengan tahun-tahun jang sudah. Hampir semua media penjuluhan dan pembimbingan dikerahkan untuk mensukseskan tugas diatas, baik mengenai pameran-pameran jang diadakan/diikuti/dibantu (pameran-pameran keliling, pameran-pameran lokal, pameran-pameran nasional dan pameran-pameran internasional), maupun mengenai penerbitan-penerbitan publikasi-publikasi, pembuatan dan pemutaran film-film industri, tjeramah-tjeramah/kursus-kursus/pendidikan-pendidikan dalam bidang industri, dan lain-lain.

Mulai pertengahan tahun 1963 kegiatan penjuluhan dipusatkan pada penjuluhan praktis, jaitu memperbanjak demonstrasi-demonstrasi/peragaan-peragaan tjara-tjara pembuatan berbagai-bagai matjam barang industri dan pemutaran film-film industri kepada masjarakat umumnja dan kepada masjarakat perindustrian chususnja didaerah-daerah jang dikundjungi dalam rangka pameran keliling, djuga didaerah-daerah jang dulunja kurang aman, karena gangguan keamanan.

1) Penerbitan-penerbitan/Publikasi-publikasi.

Banjak sekali buku-buku, madjalah-madjalah dan brosur-brosur jang diterbitkan guna perkembangan perindustrian rakjat pada umumnja, antara lain mengenai:

— Buku jang memuat peraturan-peraturan pendjatahan devisen.
— Buku Amanat Pembangunan Presiden didepan Depernas tanggal 28 Agustus 1959.
— Buku mengenai International Trade Fair.
— Madjalah Industri Rakjat.
— Brosur-brosur untuk ikut mensukseskan bermatjam-matjam pameran jang diadakan/diikuti, baik pameran-pameran dalam negeri maupun pameran-pameran luar negeri.

2) Penjuluhan Aktif.

Selama tahun 1960 s/d tahun 1964 penjuluhan keluar setjara aktif dilaksanakan melalui pameran keliling dengan mengguna-

kan mobile-mobile unit, lebih-lebih semendjak pertengahan tahun 1963. Pameran keliling jang diadakan selama masa tersebut ada 12 kali.

Daerah-daerah jang dikundjungi adalah daerah-daerah Banten, Tangerang, Bandung, Sukabumi, Tasikmalaja, Tegal, daerah-daerah pusat keradjinan di Djawa Tengah dan Djawa Timur, Lampung (Sumatera Selatan) dan Lombok (Nusa Tenggara Barat).

Dalam pameran-pameran keliling itu telah dilakukan kegiatan-kegiatan penjuluhan sebagai berikut:

— telah dipamerkan bermatjam-atjam barang ukiran dari kaju, barang-barang tenunan, barang-barang keramik, barang-barang keradjinan dari bambu, barang-barang keradjinan dari perak, barang-barang keradjinan timah, makanan-makanan dalam kaleng, makanan-makanan dalam botol, dan lain-lain.

— telah didemonstrasikan/diperagakan tentang tjara-tjara pembuatan tapioka, tjara-tjara pembuatan bermatjam-matjam barang industri.

— telah diputar film-film industri, antara lain film Tekstil Indonesia, film jang menggambarkan pembuatan barang-barang dari gelas di Perantjis dan film jang menggambarkan keradjinan rakjat di India.

— telah diberikan penerangan-penerangan, antara lain dengan menjebarkan madjalah-madjalah, brosur-brosur tentang perindustrian rakjat, terutama kepada masjarakat industri setempat.

3) Tjeramah-tjeramah/Kursus-kurusus/Pendidikan.

— Tjeramah tentang industri banjak diadakan, antara lain diberikan kepada para pengikut kursus Aplikasi Kewanitaan Seluruh Indonesia di Lembang tahun 1961, kepada pengikut kursus Aplikasi Pendidikan Masjarakat digedung G.K.B.I., Djakarta, tahun 1961, tentang bantuan wanita kepada industri dan keradjinan.

— Kursus Kader Penjuluhan Perindustrian tahun 1961.
  Kursus ini diikuti oleh pegawai-pegawai/petugas-petugas dari Dinas Perindustrian Daerah seluruh Indonesia jang beridjazah Sekolah Teknik, Sekolah Menengah Pertama atau jang sederadjat, jang berumur 20 tahun keatas, guna menambah pengetahuan dan ketjakapan mereka dalam bidang perindustrian rakjat.

Disamping Kursus Kader Penjuluhan jang diadakan dipusat. Dinas-dinas Perindustrian Rakjat didaerah djuga telah mengadakan Kursus Kader Penjuluhan dengan maksud mempertjepat terbentuknja Kader-kader Penjuluhan dalam bidang perindustrian rakjat, antara lain jang telah menjelenggarakannja ialah Dinas Perindustrian Rakjat Tingkat I Sumatera Barat di Padang dan Dinas Perindustrian Rakjat Tingkat I Sulawesi Selatan di Makasar.

— Pendidikan.

Disamping Akademi-akademi Pendidikan, Sekolah-sekolah jang sekarang sudah ada dilingkungan Departemen Perindustrian Rakjat, maka mulai tahun peladjaran 1964/1965 mulai diselenggarakan Perguruan Tinggi Ilmu Tekstil di Bandung, sebagai kelandjutan dari Akademi Tekstil di Bandung.

4) Penjuluhan Passif.

Penjuluhan setjara pasis dilaksanakan dengan tjara mendjawab setjara tertulis dan/atau lisan pertanjaan-pertanjaan dari para peminat dilapangan industri.

Selama tahun-tahun itu telah diberikan penerangan-penerangan setjara tertulis mengenai tjara pembuatan permen, kembang gula, sirup, dendeng manis dan asin, baik kepada perusahaan-perusahaan swasta maupun kepada petugas-petugas perindustrian rakjat didaerah-daerah.

5) Pameran Dalam Negeri.

Semendjak tahun 1960 sampai berachirnja tahun 1964 pameran-pameran dalam negeri jang diadakan/diikuti/diberi bantuan lebih kurang ada 17 kali. Pameran-pameran jang paling banjak diadakan ialah pada tahun 1961 dan 1963, jaitu untuk menjambut/memperingati peristiwa-peristiwa penting jang berlangsung ditanah air kita. Semendjak selesainja Gedung Pola Pembangunan Semesta Berentjana di Djl. Pegangsaan Timur, Djakarta, maka mulai diadakan pameran berbagai-bagai maket pembangunan tiap-tiap tanggal 17 Agustus, antara lain maket-maket pembangunan dalam bidang industri rakjat.

Untuk memadjukan perindustrian rakjat, maka pada bulan Djuli 1963 oleh J.M. Menteri Perindustrian Rakjat Major Djendral A. Saleh, telah dibentuk Jajasan Kebudajaan dan Keradjinan Rakjat (JAKINDRA) jang bertugas mengadakan pa

meran tetap barang-barang hasil keradjinan rakjat dari seluruh pelosok tanah air. Selain itu djuga bertugas mendemonstrasikan/memperagakan tentang tjara pembuatan berbagai-bagai barang keradjinan rakjat tersebut.

a. Pekan Raya Surabaja (27 Agustus 1960 s/d 12 September 1960).

Departemen Perindustrian Rakjat turut ambil bagian dalam Pekan Raya ini dengan mengikut-sertakan Balai-balai Penjelidikan Kulit Jogjakarta, Balai Penjelidikan Batik Jogjakarta, Balai Penjelidikan Tekstil Bandung, Balai Penjelidikan Keramik Bandung, serta beberapa perusahaan-perusahaan keradjinan rakjat.

Jang dipamerkan dalam Pekan Raya tersebut adalah:

— bermatjam-matjam hasil samakan kulit dan barang-barang dari kulit.
— bermatjam-matjam motif batik.
— bermatjam-matjam hasil penjelidikan dan pengpdjian mengenai tjat tekstil, kekuatan benang dan serat.
— beramtjam-matjam hasil keramik dan bahan-bahannja jang terdapat diberbagai daerah di Indonesia.
— barang-marang keradjinan pajung, anjaman-anjaman Tasikmalaja, keradjinan perak Jogjakarta, ukir-ukiran Bali, Djepara, Solo, dan lain-lain.

b. Pameran Industri di Kebajoran Baru (10 Oktober s/d 30 Oktober 1960).

Pameran ini diselenggarakan oleh Madjelis Industri Indonesia (M.I.I.). Deperindra ambil bagian dalam pameran ini dengan mengikut-sertakan 7 balai-balai penjelidikan, jaitu:

— Balai Penjelidikan Industri Djakarta.
— Balai Penjelidikan Kimia Bogor.
— Balai Penjelidikan Tekstil Bandung.
— Balai Penjelidikan Bahan-bahan Bandung.
— Balai Penjelidikan Keramik Bandung.
— Balai Penjelidikan Kulit Jogjakarta.
— Balai Penjelidikan Batik Jogjakarta.

Barang-barang jang dipamerkan terutama berupa hasil-hasil research dan pendapatan-pendapatan baru dari balai-balai penjelidikan tersebut, seperti pengawetan makanan, minuman-minuman, bahan-bahan pentjutji, pupuk, hasil-hasil industri

pertekstilan, hasil-hasil industri bahan-bahan bangunan, barang-barang keramik, berdjenis-djenis barang kulit, motif-motif baru keradjinan batik dan mesin diesel buatan Balai Penjelidikan Bahan-bahan Bandung.

c. Pameran untuk persiapan Indonesian Floating Fair (1960).

Dalam pameran ini Departemen Perindustrian Rakjat memamerkan hasil-hasil industri ketjil dan industri-industri keradjinan dari berbagai daerah Indonesia, seperti bermatjam-matjam kulit binatang, anjam-anjaman dari bambu, anjam-anjaman dari mendong, ukir-ukiran kelom geulis, topi pandan, perak bakar, dan lain-lain.

d. Pekan Industri Nasional di Tjirebon (Djuni 1961).

Departemen Perindustrian Rakjat hanja memberikan bantuan-bantuan.

e. Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia di Jogjakarta (6 Djuli 1961 s/d 24 Agustus 1961).

Departemen Perindustrian Rakjat mengikut-sertakan Balai-balai Penjelidikan Kulit Jogjakarta dan Balai Penjelidikan Batik Jogjakarta, Sekolah Teknologi Menengah Atas Jogjakarta dan Institut Teknologi dan Pendidikan Djakarta.

Jang dipamerkan dalam Pekan Raya ini ialah bermatjam-matjam barang-barang kulit, berbagai-bagai motif batik, dan lain-lain. Ketjuali itu djuga mengadakan demonstrasi-demonstrasi pembuatan anggur, kembang gula, gula batu, dan lain-lain.

f. Pameran menjongsong Dwi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Bank Pembangunan Indonesia Djakarta (16 Agustus 1961 s/d 31 Agustus 1961).

Jang dipamerkan adalah hasil-hasil industri rakjat jang tergabung dalam G.P.S.-G.P.S. Makanan, Minuman, Tekstil dan beberapa perusahaan-perusahaan negara serta perusahaan-perusahaan swasta lainnja.

g. Pameran seni keradjinan tangan untuk menjambut kedatangan Paduka Jang Mulia Presiden Polandia di Jogjakarta dan Tampak Siring (7 dan 8 Oktober 1961).

h. Pameran P.A.T.A. (Pacific Area Travel Association). Berlangsung dari tanggal 20 s/d 23 Maret 1963 di Gedung Wisma Warta Djakarta.

Pameran ini diadakan oleh Departemen Perindustrian Rakjat dengan maksud memperkenalkan hasil-hasil industri rakjat Indonesia kepada para wisatawan jang datang dari berbagai negara sebagai peserta P.A.T.A.

Pameran ini mendapat sambutan jang luar biasa dari para wisatawan tersebut.

i. Pameran K.W.A.A. (Konperensi Wartawan Asia Afrika). Berlangsung tanggal 22 s/d 30 April 1963 di Istana Gelora Bung Karno, Senajan, Djakarta.

Pameran ini diselenggarakan dengan maksud untuk memperkenalkan hasil-hasil kebudajaan dan industri rakjat kepada para wartawan jang mewakili berbagai-bagai matjam opini masjarakat Asia Afrika, jang kemudian akan mereka beritakan dinegara mereka masing-masing. Pameran ini berlangsung dengan sukses.

j. Pameran Keramik Seni di Djakarta (Djuni 1963).

Pameran ini diadakan oleh Departemen Perindustrian Rakjat mendjelang The Ninth Exhibition for Ceramic di Washington, dimana Indonesia diundang untuk turut serta, jaitu sebagai persiapan The Ninth Exhibition for Ceramic tersebut.

k. Pameran GANEFO (10 s/d 22 Nopember 1963).

Diadakan di Gedung Jajasan Kebudajaan dan Keradjinan Rakjat (JAKINDRA), Djl. Djendral Gatot Subroto, Senajan, Djakarta, untuk ikut-serta menjambut peristiwa dilangsungkannja Pesta Olah Raga GANEFO ke-I di Indonesia.

Maksudnja ialah untuk memperkenalkan kebudajaan dan keradjinan rakjat Indonesia kepada para olahragawan dari negara-negara Nefos.

e. Pameran Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana di Gedung Pola, Pegangsaan Timur, Djakarta.

Pameran ini memamerkan tiap-tiap tanggal 17 Agustus maket-maket dari pola pembangunan dibidang perindustrian rakjat.

Maket-maket pola pembangunan dibidang perindustrian rakjat jang dipamerkan, antara lain ialah:

— maket-maket pembangunan Projek Pengerdjaan Batu Alam (Marmer) lokasi Wadjak, Tjampur Darat, Tulungagung; maket Projek Betjak Bermotor, maket Projek Serat dan maket Projek Kertas dari P.N.P.R. Leppin Karya Yasa.

— Maket Projek Pemintalan Benang lokasi Medan, Djakarta, Tjilatjap (dengan perluasannja), maket Projek Peradjutan T.D. Pardede Medan dengan perluasannja dari Biro Industri Tekstil.

— maket-maket penelitian kulit dari Balai Penelitian Kulit, Jogjakarta, maket-maket penelitian batik dari Balai Penelitian Batik, Jogjakarta, maket-maket gedung dan maket projek diesel prototype dari Bali Penelitian Bahan-bahan Bandung.

— grafik-grafik dan statistik-statistik pemintalan, pertenunan, peradjutan, finishing beserta kemungkinan masih dapat tidaknja didirikan projek-projek baru dilapangan industri tekstil dari Balai Penelitian Tekstil Bandung.

m. Pameran Tetap oleh Jajasan Kebudajaan dan Keradjinan Rakjat (JAKINDRA) di Djl. Djendral Gatot Subroto, Senajan, Djakarta.

Pameran tetap ini dilangsungkan tiap-tiap hari sedjak didirikannja hingga sekarang, dan telah berhasil dengan sukses melaksanakan Pameran GANEFO, seperti kami utarakan diatas. Ketjuali itu JAKINDRA djuga telah sering mengadakan demonstrasi-demonstrasi/peragaan-peragaan tentang tjara pembuatan berbagai-bagai barang keradjinan, antara lain demonstrasi-demonstrasi tentang tjara pembuatan barang-barang anjaman, barang-barang tenunan dan lain-lainnja.

6) Pameran Luar Negeri.

Pameran-pameran luar negeri jang telah diikuti oleh Departemen Perindustrian Rakjat sedjak tahun 1960 s/d tahun 1964 ada lebih kurang 12 kali, termasuk Indonesian Floating Fair dengan kapal „Tampomas" jang diadakan oleh Dewan Turisme Indonesia, jang berlangsung dari tanggal 22 Desember 1960 s/d 5 Maret 1961 ke Honolulu, Tokio, Osaka, Hongkong, Manila, Singapura.

Pameran-pameran luar negeri jang diikuti oleh Deperindra tersebut ialah:

— Pameran di Seatle (1 Djuni 1960 s/d 10 Djuni 1960).

— Pameran di Chicago (20 Djuli 1960).

— Pameran di Singapura (17 Agustus 1960 s/d 24 Agustus 1960).

— Pameran di Mexico (8 Pebruari 1961).

Pada pameran ini Departemen Perindustrian Rakjat mengadakan batik show dan exposition dari barang-barang keradjinan rakjat, seperti barang-barang keradjinan perak dari Jogjakarta, barang-barang keradjinan tenun rakjat dari Madjalaja, Silungkang, Nusa Tenggara, Riau dan barang-barang ukiran dari Bali.

— Indonesian Floating Fair (22 Desember 1960 s/d 5 Maret 1961).

Deperindra turut-serta dengan Floating Fair ini dengan memamerkan hasil-hasil keradjinan rakjat, seperti anjam-anjaman dari bambu, anjam-anjaman dari mendong, ukir-ukiran kelom geulis, topi pandan, perak bakar, dan lain-lainnja.

— Pameran Industri dan Keradjinan Indonesia di Djeddah — Mekah — Madinah (1961).

Pameran diselenggarakan pada Musim Hudjan tahun itu, dengan maksud untuk memperkenalkan hasil-hasil kebudajaan dan industri keradjinan rakjat Indonesia kepada para djemaah hadji dari pelosok dunia. Jang dipamerkan barang-barang makanan dalam kaleng, buah-buahan dan sambel dalam kaleng, keradjinan perak, kulit, anjam-anjaman, dan lain-lain.

— The Ninth Exhibition for Ceramic, September 1963, di Washington.

— Sydney Trade Fair, July — August 1963, di Sydney.

— Berliner Austellingean, September 1963, di Berlin.

— The Third Pacific International Trade Fair, September 1963, di Lima (Peru).

— New York World's Fair, April 1964 s/d Oktober 1964, di New York, Amerika Serikat.

7) Perfilman.

Untuk mempergiat industri rakjat serta menanamkan industry-mindedness dikalangan luas masjarakat umum, selama periode tahun 1960 s/d 1964 Departemen Perindustrian Rakjat dengan bantuan Perusahaan Film Negara dan N.V. Kantjil Film telah membuat beberapa film industri, dan telah pula mengadakan pemutaran film-film industri tersebut pada pameran-pameran keliling jang diadakan dan pameran dalam negeri lainnja. Film-film industri jang telah diselesaikan selama tahun-tahun itu antara lain ialah:

— Film Tekstil Indonesia, dengan opname-opname di Bali, Surabaja, Asembagus, Kediri, Solo, Jogjakarta, Tjilatjap, Bandung dan Djakarta.

— Film Keradjinan Indonesia.
— Film Pengawetan Makanan dalam kaleng.
— Film tentang matjam-matjam perusahaan ketjil di Indonesia.
— Film Pameran K.W.A.A.
— Film Teraso.
— Film Alat-alat Pertanian.

8). Pembimbingan.

Jajasan Pembina Perusahaan Industri Rakjat (P.P.I.R.) sebagai badan jang bertugas menjelenggarakan pembimbingan terhadap perusahaan-perusahaan industri rakjat sedjak didirikannja pada awal tahun 1962 hingga saat ini telah menjelesaikan beberapa analisa projek-projek industri rakjat, antara lain ialah:

— Projek Per Mobil dan Truk.
— Projek Perusahaan Plastik.
— Projek Sabut Kelapa.
— Projek Assembling Sepeda.
— Projek Minjak Bidji Bunga Matahari.
— Projek Penggergadjian Kaju.
— Projek Minjak Djarak dan Minjak Sereh.
— Projek Tapioka.

Selain dari pada itu P.P.I.R. telah memberi bantuan-bantuan kepada perusahaan-perusahaan industri rakjat dan daerah dalam hal ekspor, permohonan kredit dan survey-survey, antara lain:

— ekspor barang-barang keradjinan, ekspor timah putih, dan lain-lain.

— survey-survey, antara lain survey mengenai batu-batuan (semiprecious stones) di Kalimantan, survey tentang kemungkinan didirikannja perusahaan-perusahaan industri rakjat didaerah Riau, survey lokasi Projek Pabrik Kertas Bank Indonesia, dan survey serta perhitungan-perhitungan rentabilitas Projek-projek Koperasi Gotong-Rojong (KOSGORO).

Djuga oleh P.P.I.R. telah dibuat kertas — karya tentang „Intensifikasi & Ekspor Barang-barang Keradjinan" untuk Jang Mulia Menteri Koordinator Pembangunan, guna menggiatkan ekspor barang-barang keradjinan.

5. **Rentjana-rentjana penjuluhan dan pembimbingan pada tahun mahkota 1965.**

Untuk mempergiat penjuluhan dan pembimbingan dalam tahun 1965 ini, telah direntjanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. **Penjuluhan Aktif/Pameran Keliling.**

Dalam Tahun Mahkota 1965 ini akan diadakan penjuluhan aktif/pameran keliling dengan menggunakan mobile unit kekepulauan Riau, Atjeh, Ambon, Irian Barat dan Kalimantan Selatan.

b. **Pameran Dalam Negeri.**

Departemen Perindustrian Rakjat mengikuti pameran-pameran dalam negeri disamping pameran-pameran tetap jang sudah ada seperti dibawah ini:

— Pekan Raya Pembangunan I di Padang (17 Maret 1965 s/d 31 Maret 1965).
— Pameran barang-barang kebudajaan dan keradjinan rakjat oleh JAKINDRA di Istana Negara untuk menjambut Dasa Warsa Konperensi Asia Afrika (April 1965).
— Pekan Raya Dwi Dasa Warsa Kemerdekaan Republik Indonesia di Jogjakarta (29 Djuni 1965 s/d 22 Agustus 1965).

c. **Pameran Luar Negeri.**

— Utrechtse Jaarbeurs di Nederland.
— Tokio International Fair. &
— Pameran-pameran di Asia Tenggara (Manila atau Bangkok).
— Pameran-pameran di Timur Dekat.
— Pameran-pameran di Latin Amerika (Meksiko atau Rio de Janeiro).
— Peznan International Fair XXXII (13 Djuni 1965 s/d 27 Djuni 1965).
— Industri Fair di Barcelona, Spain, (1 Djuni s/d 15 Djuni 1965).

d. **Perfilman.**

Dengan fihak Departemen Luar Negeri telah ditjapai kata sepakat untuk membuat film-film industri berwarna setjara joint production, antara lain :

1. Film tentang keradjinan batu-batuan.
2. Film Projek Marmer di Wadjak.
3. Film keradjinan anjam-anjaman bambu didesa Renginabung, Magetan, jang dikerdjakan oleh rakjat sebagai pekerdjaan sampingan.
4. Film tentang keradjinan perak bakar di Kota Gede, Jogjakarta.
5. Film tentang keradjinan seni membuat gamelan di Istana Mangkunegoro, Solo.

e. **Pembimbingan.**

Untuk keperluan pembimbingan perusahaan-perusahan industri rakjat, oleh Jajasan Pembina Perusahaan Industri Rakjat (P.P.I.R.) telah direntjanakan untuk mengadakan berdjenis-djenis survey dalam Tahun Mahkota 1965, jaitu:

1. survey projek-projek industri jang telah ada (existing industries).
2. survey daerah, jang akan dipergunakan sebagai dasar Perentjanaan Pembangunan Daerah.
3. survey pasaran didalam dan diluar negeri.
4. survey pendirian projek-projek baru.
5. survey lain-lainnja jang perlu untuk melengkapi keterangan-keterangan dari P.P.I.R. sendiri.

IX. PERUSAHAAN INDUK DAN PERUSAHAAN PELOPOR.

1. Latar belakang pendirian perusahaan induk.

Telah sedjak dahulu kala diantara rakjat Indonesia terdapat kelompok-kelompok pengusaha ketjil, terserak dibeberapa daerah, jang merupakan masjarakat tersendiri, jaitu masjarakat pengusaha. Masjarakat demikian itu timbul dan hidup langsung dari zaman-kezaman diatas landasan ketjakapannja sebagai pandai-pandai atau tukang-tukang jang dengan alat sederhana buatan sendiri mampu menghasilkan barang-barang atau alat keperluan kehidupan masjarakat setempat dari bahan mentah jang terdapat disekelilingnja.

Masjarakat pertukangan jang demikian itu dapat ditjakup dalam pengertian „keradjinan rakjat", jang dapat mentjukupi keperluan perumahan, pakaian, bertjotjok tanam, dan sebagainja, menurut ukuran zamannja masing-masing.

Kemadjuan zaman membawa kemadjuan pula terhadap keradjinan rakjat, tetapi pada umumnja kemadjuan itu lambat dan tidak merata. Dan djuga tjara produksi, organisasi, maupun perdagangannja tidak teratur.

Kemerdekaan Indonesia mewadjibkan kita membangun dan membina, termasuk pembangunan dan pembinaan keradjinan rakjat, dan dialam kemerdekaan ini Pemerintah berkewadjiban untuk memelihara ketjakapan-ketjakapan keradjinan rakjat itu, dan kemudian membimbingnja kearah industrialisasi modern.

Untuk merealisir maksud diatas, maka ditengah-tengah masjarakat keradjinan itu oleh Pemerintah didirikan suatu perusahaan jang disebut „Induk" (central production plant).

2. Tugas Perusahaan Induk.

Perusahaan induk bertugas :

— Mentjiptakan dan mengembangkan hubungan kerdja antara perusahaan induk dengan kalangan keradjinan-keradjinan untuk memperbaiki barang-barang jang mereka hasilkan, baik kwalitas maupun kwantitasnja.

— Memupuk, membina dan mengusahakan penambahan ketjakapan kaum pengusaha ketjil dilapangan teknis-mekanis dan teknis-administratif dalam bentuk perusahaan industri ketjil jang masinal;

— Membantu mengatur saluran-saluran pendjualan barang-barang hasil dan mendapatkan pasaran jang menguntungkan.

Dari tugas-tugas diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan induk tidak bertudjuan untuk mentjapai keuntungan (bedrijfseconomis.

rijfsecenomisch), tetapi hanja untuk tudjuan-tudjuan jang bersifat sosial economisch.

3. Perusahaan Pelopor (Pilot Plant).

Berbeda dengan perusahaan induk jang didirikan ditengah-tengah keradjinan rakjat, maka perusahaan pelopor ini didirikan ditempat dimana tidak/belum timbul suatu djenis perusahaan atau keradjinan, tetapi menurut penjelidikan/survey oleh Pemerintah dapat didirikan perusahaan industri ditempat itu.

Pendirian perusahaan pelopor ditempat itu dimaksudkan untuk membangkitkan inisiatif, niat serta kesanggupan rakjat setempat untuk mengikuti djedjak Pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan jang mengerdjakan bahan-bahan mentah jang terdapat disitu jang selama ini belum pernah diusahakan orang.

Djadi pendirian perusahaan pelopor mempunjai fungsi :

— Menundjukkan bahwa keradjinan dan usaha kearah industri ketjil dapat dilakukan didaerah tersebut;

— Merupakan tjontoh jang berfaedah dan dapat ditiru oleh masjarakat (merupakan inisiatif bagi pihak swasta);

— Merupakan sumber pemberi pekerdjaan kepada tenaga orang setempat;

— Merupakan tempat pendidikan kader-kader (teruna) dibidang industri ketjil.

Perusahaan pelopor ini bersifat bedrijfseconomis.

4. Perkembangan pembangunan Perusahaan-perusahaan Induk dan Perusahaan-perusahaan Pelopor.

Rentjana pendirian perusahaan-perusahaan induk dan perusahaan-perusahaan pelopor ini telah dimulai pada saat revolusi kita mengindjak taraf survival, dan telah termasuk dalam „Rentjana Tiga Tahun Perindustrian" (1950—1953), jang terkenal dengan nama „Urgency Industrialization Plan", dari Kementerian Perekonomian.

Rentjana dan pelaksanaan pendirian perusahaan-perusahaan itu dilakukan oleh Bagian Penjelenggara Djawatan Perindustrian Pusat dari Kementerian Perekonomian.

Menurut rentjana pertama, maka oleh Djawatan Perindustrian akan didirikan 16 buah perusahaan-perusahaan induk dan perusahaan-perusahaan pelopor, kemudian diadakan perobahan pada rentjana semula, sehingga pendirian perusahaan-perusahaan tersebut direntjanakan sebanjak 21 buah.

Untuk pendirian projek-projek induk dan pelopor ini oleh Pemerintah disediakan pembiajaan sebesar Rp. 27,— djuta.

Oleh Djawatan Perindustrian Kementerian Perekonomian, rentjana pendirian 21 buah perusahaan-perusahaan induk dan pelopor diatas dapat direalisir sebanjak 18 buah projek jaitu :

No.	Nama djenis perusahaan	Djumlah jang direntjanakan	jang dapat direalisir	Tempat perusahaan
1.	Pertenunan (Tekstil)	2	2	Madjalaja, Pekalongan.
2.	Kulit	3	3	Pamekasan Magetan, Magelang.
3.	Keramik	3	3	Plered, Malang, Majong.
4.	Kaju	2	2	Klender, Pasuruan.
5.	Besi	5		
6.	Kuningan	2	7 *)	Tjisaat, Tjiwedij, Bareng, Madiun, Tjeper.
7.	Pajung	3	1	Djuwiring.
8.	Karet	1	—	diambil over INIRO, Bogor.

*) Semendjak penjelenggaraan perusahaan-perusahaan ini dilakukan oleh LP3I dalam tahun 1956, Besi dan Kuningan dimasukkan kedalam kategori Logam.

2 buah perusahaan kuningan dilaksanakan LP3I.

Dengan pesatnja pembangunan projek-projek perusahaan induk dan pelopor itu, maka dirasa perlu penjelenggaraan projek-projek itu dikerdjakan oleh suatu badan tersendiri,

dan bukan lagi oleh hanja suatu Bagian Penjelenggara dari Djawatan Perindustrian sadja.

Maka untuk keperluan itu, oleh Pemerintah cq. Kementerian Perekonomian telah dibentuk suatu lembaga dengan nama „Lembaga Penjelenggara Perusahaan-perusahaan Industri" disingkat LP3I atau LEPPIN, pada tanggal 26 Maret 1956, jang merupakan pendjelmaan dari Bagian Penjelenggara Djawatan Perindustrian Pusat dan JADO (Jajasan Organisasi dan Administrasi).

Lembaga Penjelenggaraan Perusahaan-perusahaan Industri memulai usahanja dengan 30 projek dalam tahun 1956, jang sebagian merupakan projek-projek jang telah/sedang diselenggarakan pembangunannja oleh Bagian Penjelenggara Djawatan Perindustrian Pusat Kementerian Perekonomian.

Selama tahun 1957, penjelenggaraan projek-projek industri ini menundjukkan kemadjuan-kemadjuan.

— ketiga puluh buah projek Leppin dalam tahun 1956, 9 buah telah diselesaikan dan berdjalan, dan 7 buah diantaranja telah diresmikan pembukaannja oleh Menteri

  Perindustrian jaitu:

  Induk Perusahaan Keramik, Malang
  Induk Perusahaan Kaju, Pasuruan
  Induk Perusahaan Logam, Pasuruan
  Induk Perusahaan Kulit, Magetan
  Perusahaan Pelopor Peradjutan, Madiun
  Induk Perusahaan Kaju, Madiun
  Induk Perusahaan Besi, Madiun.

— Projek-projek jang mengalami penjempurnaan, termasuk penjempurnaan perlengkapannja dan sudah berdjalan ada 6 buah.

— Projek-projek jang sedang diselenggarakan dan diharapkan selesai dalam tahun 1958 ada 7 buah.

Djadi dalam tahun 1957 setjara berangsur-angsur maupun bersama-sama telah dan sedang dilaksanakan sedjumlah 22 projek.

Dalam tahun 1958, pembangunan projek-projek induk dan pelopor ditudjukan keluar Djawa, jaitu sebanjak 13 projek, jang diselenggarakan berdasarkan Instruksi Menteri Perin-

dustrian tanggal 1 Pebruari 1958, No. 834/N. Pada tahun 1958 berhubung dengan persoalan keamanan dan transpor, projek-projek itu baru dapat dimulai pembuatan rentjana lengkap, pembelian tanah, mesin-mesin, bagian-bagian pembuatan gedung pabriknja.

Projek-projek tersebut jalah :

— Penjamakan dan pembuatan sepatu/kulit	— di Atjeh dan Nusa Tenggara;
— Pertenunan	— di Sumatra Utara, Makasar;
— Bata/Genteng	— di Tapanuli, Padang; Bitung dan Gorontalo;
— Penggergadjian Kaju	— di Padang;
— Besi Logam	— di Sungai Puar;
— Pembakaran kapur	— di Gorontalo;
— Tapioka	— di Sumatera Selatan;
— Sabut Kelapa	— di Kalimantan Barat.

Projek-projek jang diresmikan pembukaannja dalam tahun 1958 ada 4 projek, jang terdiri dari 2 buah induk perusahaan dan 2 buah perusahaan pelopor (perusahaan pentjontohan), jaitu:

— Induk Finishing Tekstil, Tjeper;
Induk Pengetjoran Besi, Batur;
—Perusahaan Pelopor Penggergadjian Kaju, Makassar;
— Perusahaan Pelopor Hollow Bricks, Djakarta.

Tahun 1959:

Pada tahun ini telah diadakan penjelidikan-penjelidikan dan survey-survey untuk pembangunan 8 buah projek jaitu:

— Bata/Genteng	—	di Dumai Pakanbaru; Djambi, dan Serang, Banten;
— Penggergadjian Kaju	—	di Dumai, Pakanbaru;
— Kapur	—	di Baturadja, Sumatera Selatan;
— Bamboo Proccessing	—	di Tasikmalaja;
— Lim tulang dan Persleer	—	di Djakarta.

Projek-projek jang dapat diselesaikan pembangunannja dalam tahun ini ada 9 buah projek, terdiri dari 4 buah induk perusahaan dan 5 buah perusahaan pelopor, jaitu:
— Induk Perusahaan Kaju, Wirosari Purwodadi;
— Induk Perusahaan Kaju, Bandjarmasin;
— Induk Perusahaan Logam, Negara;
— Induk Perusahaan Besi, Mataram, Lombok;
— Perusahaan Pelopor Hollow Bricks, Kebajoran Lama, Djakarta;
— Perusahaan Pelopor Fancy, Jogjakarta;
— Perusahaan Pelopor Keramik, Tulungagung;
— Perusahaan Pelopor Pemurnian Kaolin, Tulungagung;
— Perusahaan Pelopor Tekstil (Balitex), Denpasar, Bali.

Sampai achir tahun 1959, projek-projek jang telah/sedang dalam penjelenggaraan ada 49 projek.

Tahun 1960:

Sampai achir tahun 1960, projek-projek jang sudah dapat diselesaikan pembangunannja dan dalam tingkat pertjobaan mendjadi 53 buah projek.

5. **Kesimpulan-kesimpulan :**

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembangunan projek-projek induk dan pelopor itu sedjak permulaannja dari tahun-ketahun selalu menundjukkan angka menaik.

Didirikannja perusahaan-perusahaan induk dan pelopor ini memberikan banjak kesempatan kerdja kepada masjarakat setempat, dan pemakaian tenaga kerdja ini dari tahun-ketahun selalu menundjukkan angka jang menaik pula, jang dapat dilihat dari angka-angka dibawah ini:

Tahun		:				
Tahun	1956	:	456	orang	buruh/karyawan	
Tahun	1957	:	833	„	„	„
Tahun	1958	:	1322	„	„	„
Tahun	1959	:	2107	„	„	„
Tahun	1960	:	2769	„	„	„

Selain dari pada itu, djuga industrial-mindedness dari penduduk setempat dimana didirikan projek-projek itu telah bertambah-tambah pula.

*
* *

X. PERKEMBANGAN BANTUAN MEKANISASI TERHADAP PERINDUSTRIAN RAKJAT.

1. Sedjarah Program Bantuan Mekanisasi.

Program bantuan mekanisasi untuk perusahaan-perusahaan industri/keradjinan rakjat telah mulai dipikirkan oleh Pemerintah sedjak tahun 1950.

Program ini telah dimasukkan kedalam „Urgency Industrialization Plan" 1951—1952 dari Kementerian Perekonomian, dan telah mulai dilaksanakan sedjak bulan Pebruari 1952, djadi hingga sekarang sudah berdjalan lebih kurang 13 tahun.

Bantuan mekanisasi kepada perusahaan-perusahaan industri/keradjinan rakjat oleh Pemerintah ini adalah sebagai usaha landjutan dari Pemerintah untuk membimbing dan memberi penjuluhan kepada perusahaan-perusahaan industri/keradjinan rakjat itu kearah industrialisasi modern.

2. Tudjuan Program Bantuan Mekanisasi.

Tudjuan program bantuan mekanisasi ini adalah untuk mempertjepat perkembangan perusahaan-perusahaan industri/keradjinan rakjat jang masih menghasilkan dengan tangan, dengan menolong mereka memperbesar produksi jang berkwalitas tinggi serta ongkos produksi jang relatif lebih rendah dengan bantuan mesin-mesin setjara kredit/sewa-beli.

3. Fungsi dan Peranan Program Bantuan Mekanisasi dalam memperlipat-gandakan produksi.

— menggantikan sebagian tenaga manusia dengan tenaga mesin (mechanization) ;

— menggantikan mesin-mesin jang konvensionil dengan mesin jang lebih madju dan lebih rasionil (rehabilitasi mesin-mesin kuno/replacement of machinery/equipments) ;

— membantu memperluas/menambah djumlah mesin-mesin pada perusahaan-perusahaan industri/keradjinan rakjat (expansion).

4. Matjamnja bantuan mekanisasi.

Matjamnja bantuan mekanisasi jang diberikan kepada perusahaan-perusahaan industri/keradjinan rakjat tergantung dari pada apa jang sangat dibutuhkan oleh perusahaan jang bersangkutan untuk mempertinggi produksi mereka.

Bantuan mekanisasi itu dapat :

— **berupa mesin-mesin untuk melengkapi mesin-mesin jang sudah ada atau untuk mengganti mesin-mesin jang sudah tua/kuno ;**

— **berupa mesin-mesin untuk menghasilkan barang-barang jang dulunja tidak diproduksikan, karena tidak adanja mesin tersebut ;**

— **berupa mesin diesel generating-sets untuk melengkapi supply listrik setempat ;**

— **berupa mesin-mesin tenaga penggerak dan mesin-mesin pembangkit listrik ditempat-tempat jang djauh dari aliran listrik ;**

— **berupa bahan-bahan baku dan spare-parts/accessories tertentu ;**

— **berupa pemberian konsultasi-konsultasi terutama dalam lapangan mekanisasi.**

5. **Organisasi penjelenggaraan.**

— **Tahun 1952 — 1959 phase „Djawatan/Kantor", jaitu berturut-turut :**

— Bagian Penjelenggara dan Bantuan Mekanisasi.

— Bagian Mekanisasi (disendirkian) dan

— Kantor Urusan Mekanisasi dan Pembiajaan Industri (disingkat KUMPI).

— Tahun 1959—1960 phase transisi, jaitu :
Biro Mekanisasi Leppin (L.P.3.I.), jaitu sebagai Biro jang tergabung dalam Leppin dan mempunjai anggaran tersendiri menurut I.C.W. (Ind. Comp. Wet).

— Tahun 1961 — sampai sekarang.
P.N.P.R. Daya-Yasa dengan landasan Undang-undang No. 19 Tahun 1960, dan Peraturan Pemerintah No. 193 tahun 1961, jang berdjalan dengan modal jang dipisahkan oleh Pemerintah.

6. **Asal mesin-mesin jang diberikan kepada Perusahaan-perusahaan Industri/Keradjinan Rakjat dalam rangka Program Bantuan Mekanisasi.**

Dari impor. (Sedjak penjelenggaraan program bantuan mekanisasi oleh P.N.P.R. Daya-Yasa, kebanjakan mesin-mesin jang diimpor berasal dari kontrak-kontrak kredit dengan Pemerintah Rumania, Polandia dan Republik Demokrasi Djerman).

Dari bantuan-bantuan luar negeri (antara lain dari International Cooperation Administration/I.C.A.).

Dari mesin-mesin buatan dalam negeri.

7. Perkembangan djumlah Perusahaan-perusahaan Industri/Keradjinan Rakjat jang telah mengenjam „Bantuan Mekanisasi" sedjak bulan Pebruari 1952 s/d tahun 1964.

Sedjak dilantjarkannja program bantuan mekanisasi dari bulan Pebruari 1952 s/d tahun 1964, ternjata telah ada 539 buah perusahaan jang telah mengenjam „bantuan mekanisasi". Perintjiannja adalah :

Tahun	1952 s/d 1957	145	buah
„	1958	34	„
„	1959	30	„
„	1960	43	„
„	1961	72	„
„	1962	43	„
„	1963 (diantaranja 18 buah perusahaan mendapatkan mesin-mesin ex impor dari Rumania).	71	„
„	1964	101	„
	Djumlah	539	buah

8. Pengaruh Program Bantuan Mekanisasi terhadap perkembangan industri mesin-mesin di Indonesia.

Djika diadakan retrospekta sedjak tahun 1952 mengenai djenis dan bentuk mesin-mesin jang diserahkan kepada perusahaan-perusahaan dapatlah dilihat tendens-tendens jang menarik. Kira-kira dalam masa lima tahun sedjak tahun 1952, boleh dikatakan bahwa semua mesin jang diselenggarakan itu adalah ex impor. Daja upaja swa-sembada mesin dalam negeri belum terlihat. Namun sedjak tahun 1958, mulailah pemberian mesin-mesin buatan dalam negeri, walaupun djumlahnja masih ketjil-ketjilan sadja. Hal ini tidak lain karena persoalan harga jang tidak dapat menjaingi mesin-mesin ex impor. Apalagi djika di-

ingat bahwa pada phase-phase permulaan tersebut devisa negara kita masih djauh lebih banjak djika dibandingkan dengan masa-masa belakangan.

Bersamaan dengan makin sulitnja mendapatkan devisa Pemerintah, maka gagasan untuk memberikan mesin-mesin buatan dalam negeri makin kuat.

Mesin-mesin buatan dalam negeri jang diberikan, mula-mula hanja mesin-mesin bata, genteng, ubin, minjak kelapa, tapioka.

Kemudian, terutama sedjak phase P.N.P.R. Daya-Yasa, maka mesin-mesin tersebut diperluas lagi dengan mesin-mesin tenun setjara lengkap.

Pada waktu achir-achir ini atas andjuran J.M. Menteri telah pula dibuat mesin-mesin mangel karet rakjat, jang tadinja selalu diimpor dari Singapura. Pun mesin pertjetakan sudah pula dimulai untuk diintroduksikan pada masjarakat industri rakjat.

Achirnja dengan didatangkannja mesin-mesin untuk perbengkelan umum seperti bubut frais, bor, dan sebagainja, dari Rumania, Polandia, Republik Demokrasi Djerman dalam rangka kontrak-kontrak kredit dengan negara-negara tersebut, bermatjam-matjam spare-parts jang sangat kita butuhkan sudah dapat kita hasilkan sendiri.

∴

BEBERAPA PEMANDANGAN DALAM INDUSTRI RAKJAT.
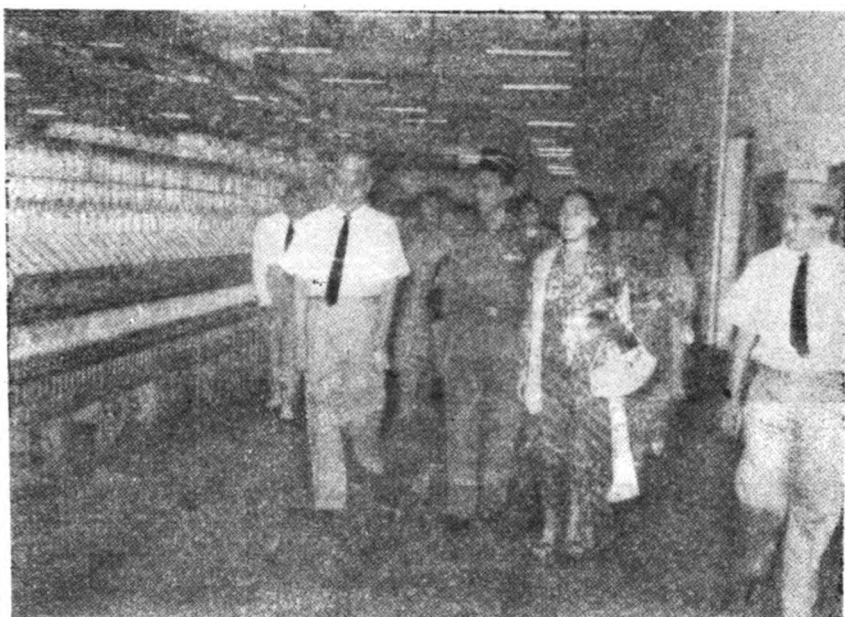
Pabrik Pemintalan P.T. Pardede.
Kundjungan J.M. Menteri Perindustrian Rakjat,
Maj. Djen. dr. Aziz Saleh.

Perusahaan Tenun P.T. E. Simandjuntak.
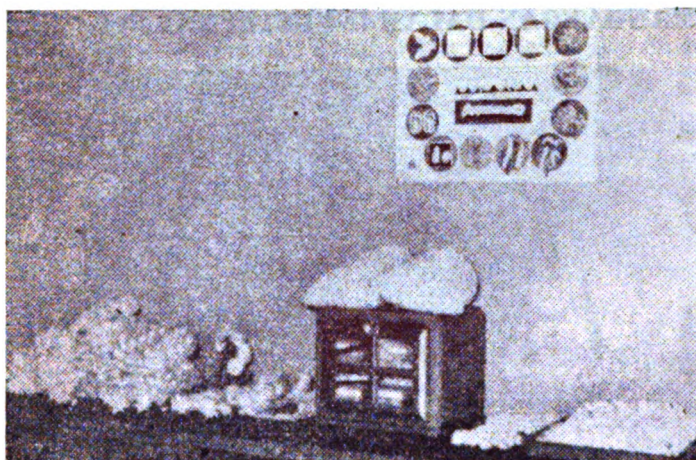
Benang dan kepompong Ulat Sutera.
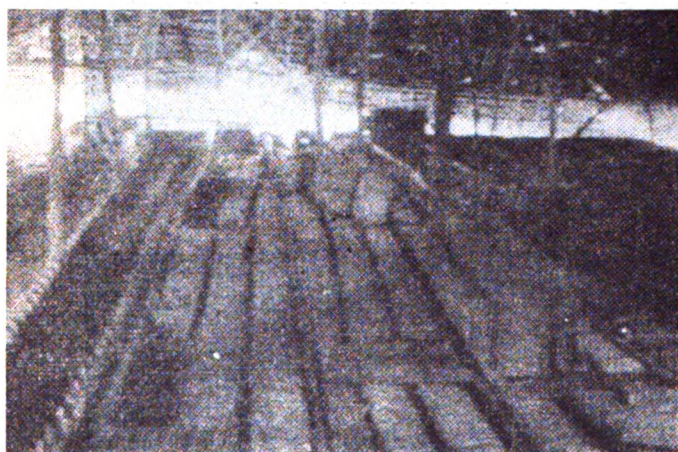
Perusahaan Genteng.

Pabrik Penjamakan Kulit.
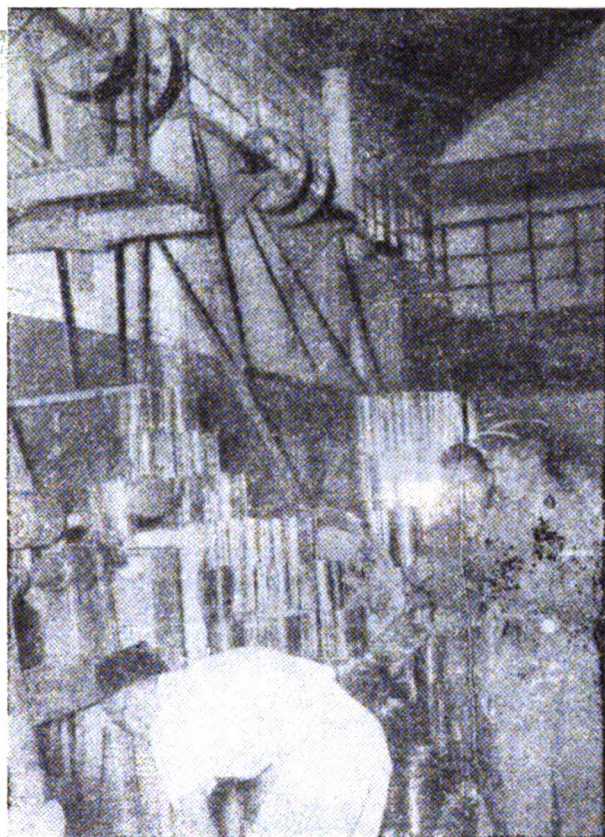
Pabrik Tjat Patna

Pabrik barang2 email.

Pabrik Paku P.T. Gerak Tjepat
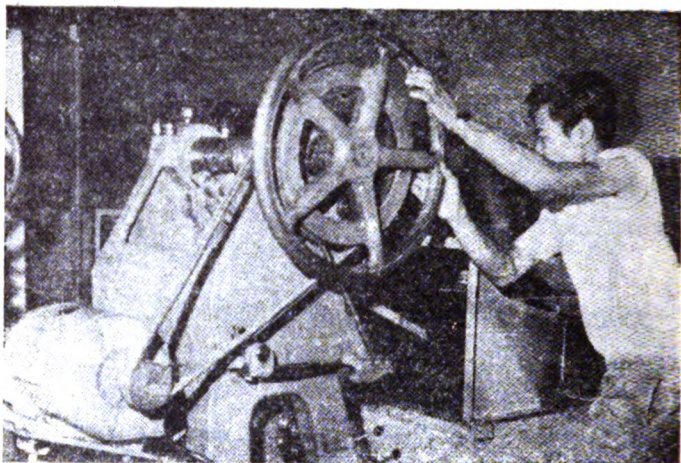
Pabrik Sepatu.
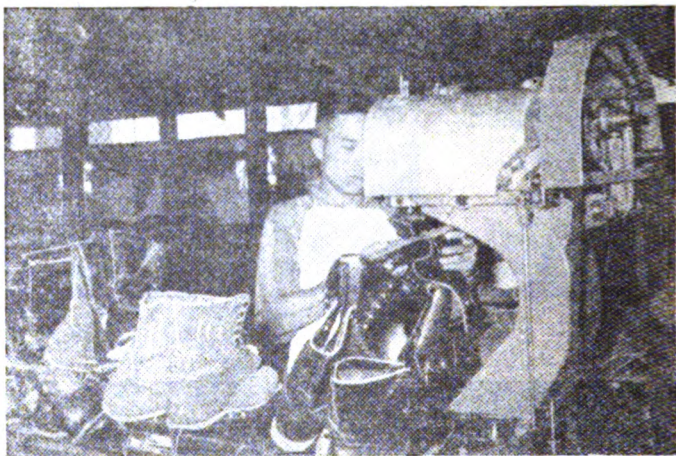
Pabrik Plastik jang menghasilkan sikat gigi.
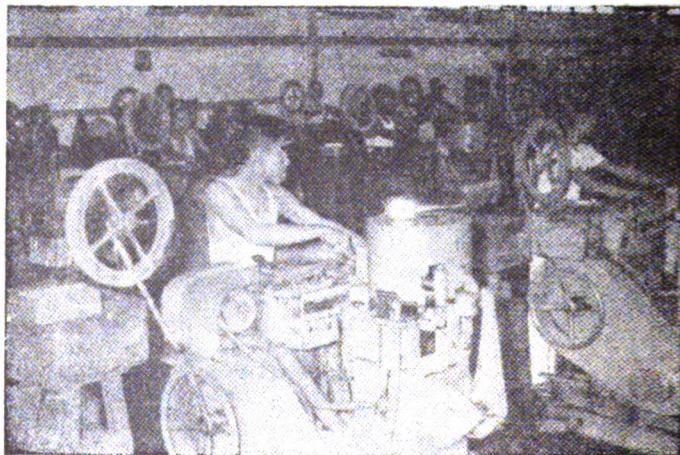
Pabrik Korek Api.

Keradjinan Tangan Anjaman.

Perusahaan Assembing Speda C.V. GANEgA

BEBERAPA HASIL PRODUKSI INDUSTRI RAKJAT KITA.
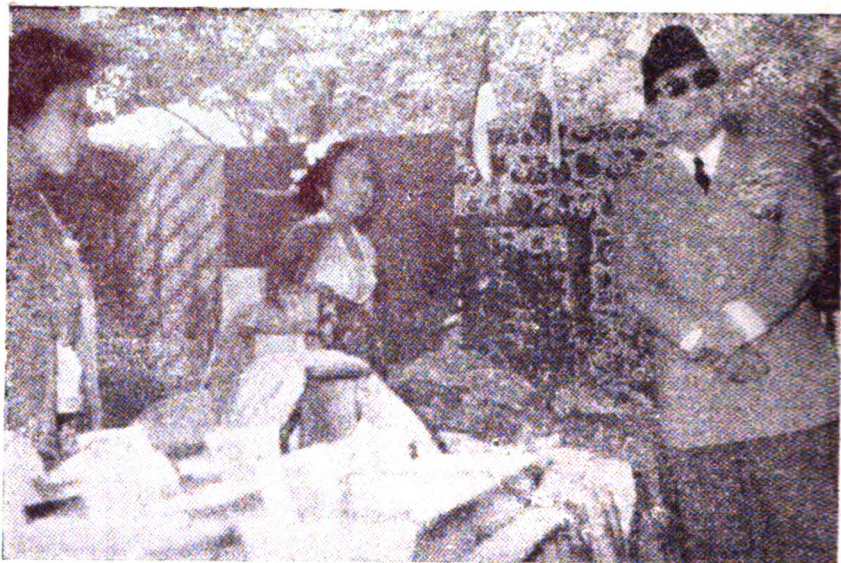
Kundjungan P.J.M. Presiden Dr. Ir. H. Sukarno kepameran Batik

Alat-alat Musik aseli.
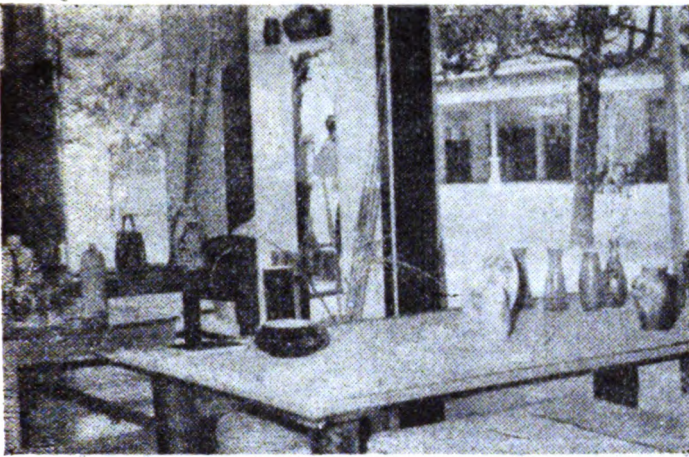
Barang2 dari Keramik.
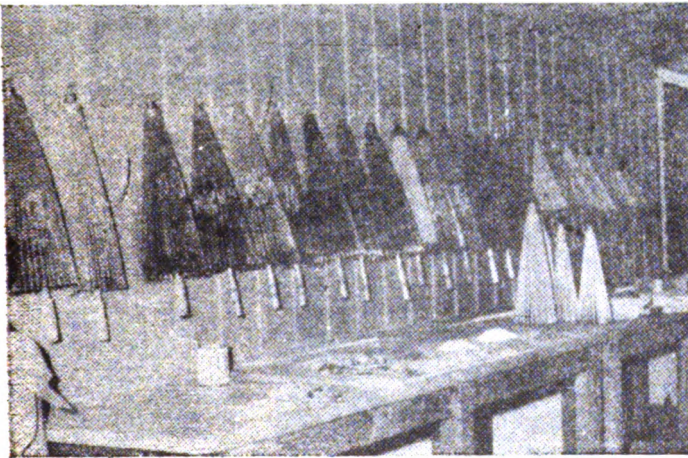
Pajung.
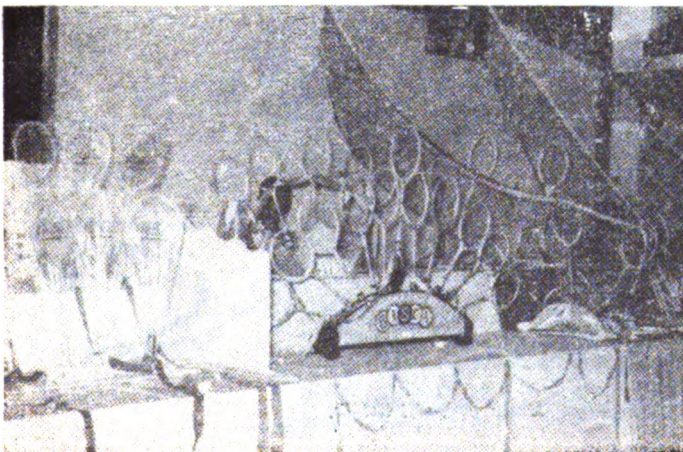
Alat-alat Sport.
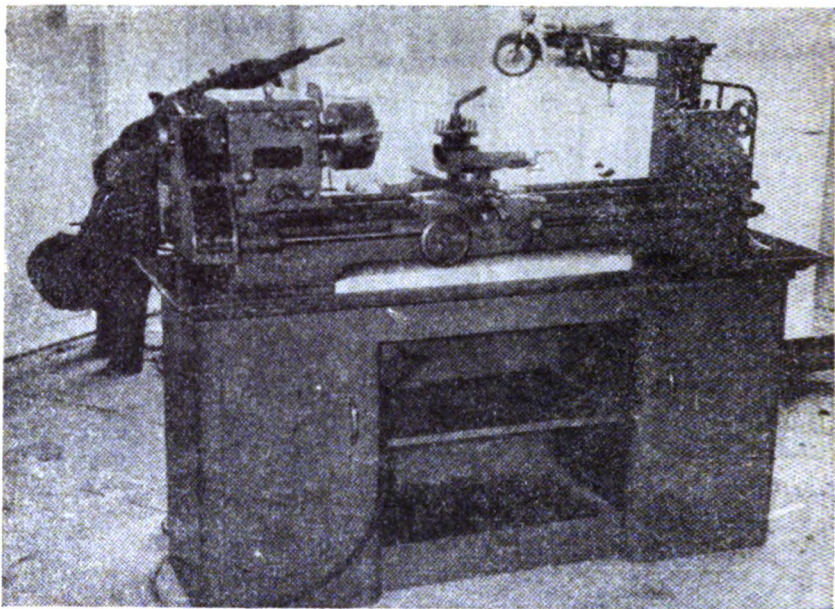
Mesin bubut buatan P.T. Tjahaja Surabaja
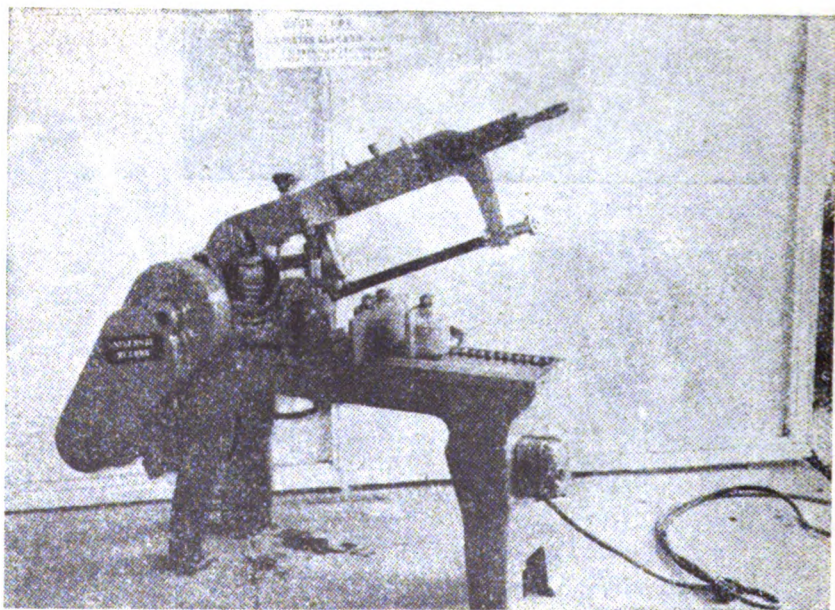
Mesin gergadji listrik.

J.M. Menteri Deperindra mengadakan penindjauan ke Pabrik Pemintalan.

J.M. Menteri Deperindra mengadakan penindjauan ke Pabrik Pemintalan.
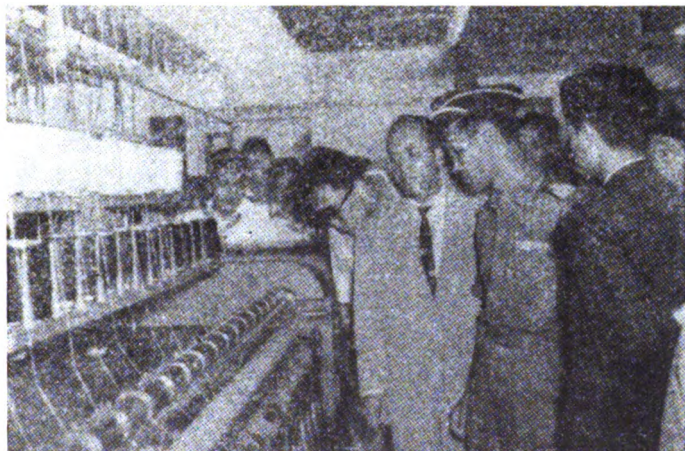
J.M. Menteri Deperindra mengadakan penindjauan ke Pabrik Pemintalan.
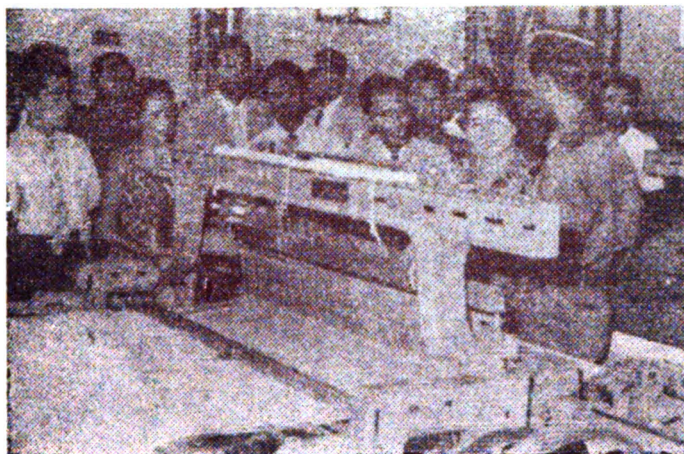
J.M. Menteri Deperindra mengadakan penindjauan ke Perusahaan Tenun.
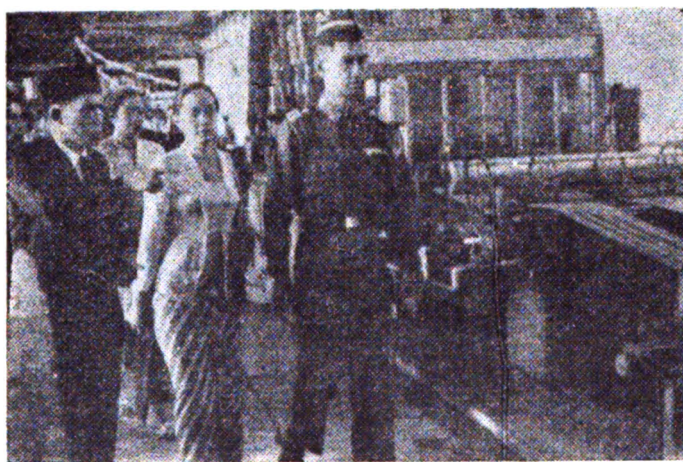
J.M. Menteri Deperindra mengadakan penindjauan ke Perusahaan P.T. E. Simandjuntak.
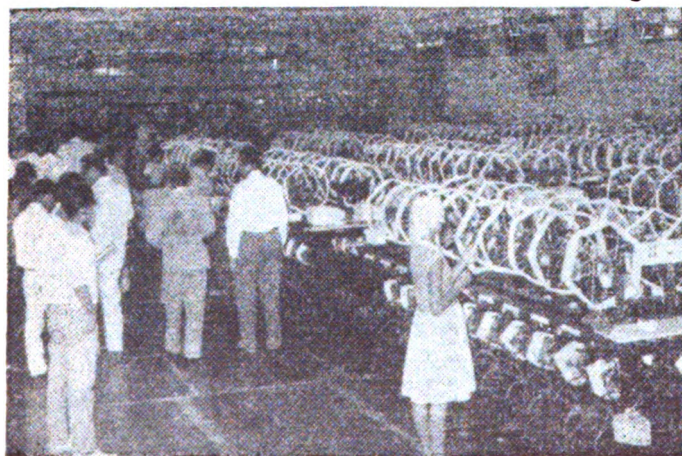
Suasana didalam Pabrik Tenun.
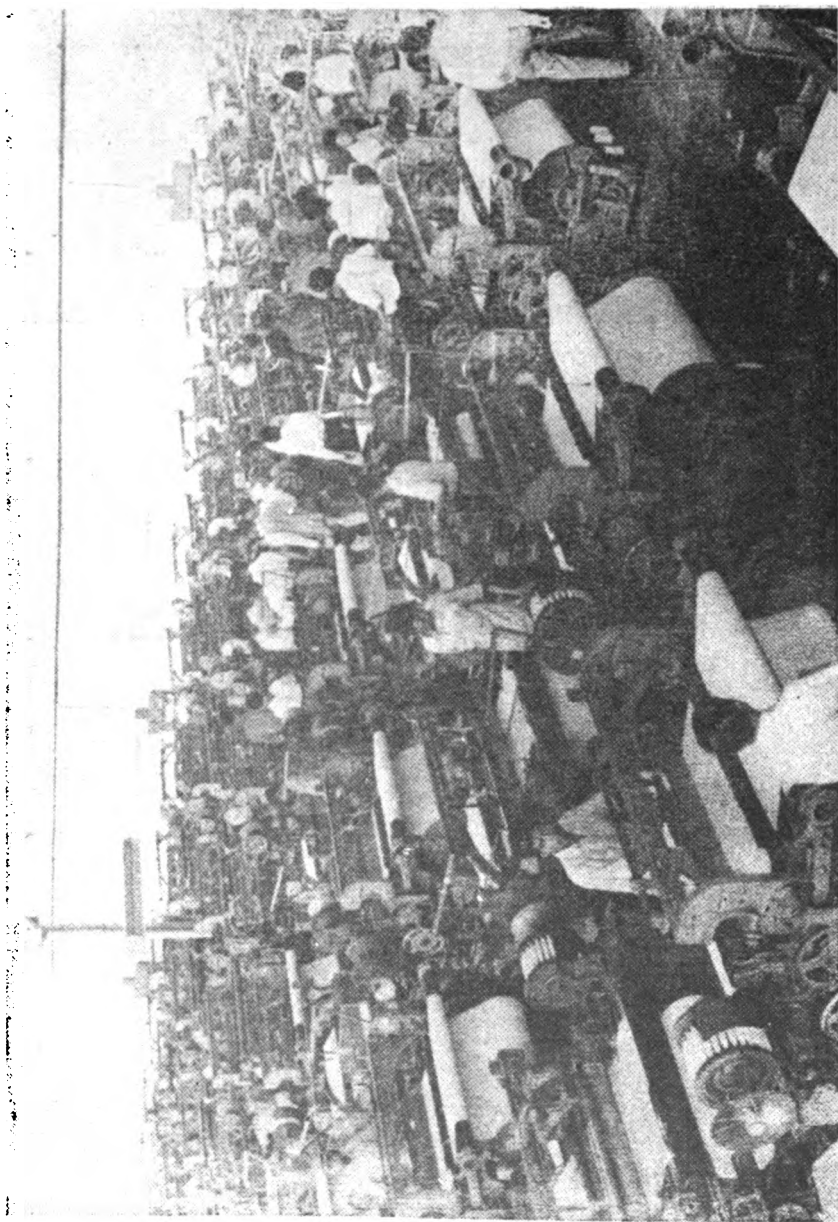
***Suasana didalam Pabrik** Tenun „Sjukur" Madjalaja.*

J.M. Menteri Deperindra mengadakan penindjauan ke Perusahaan Pembatikan.

Pabrik Paku P.T. Gerak Tjepat.
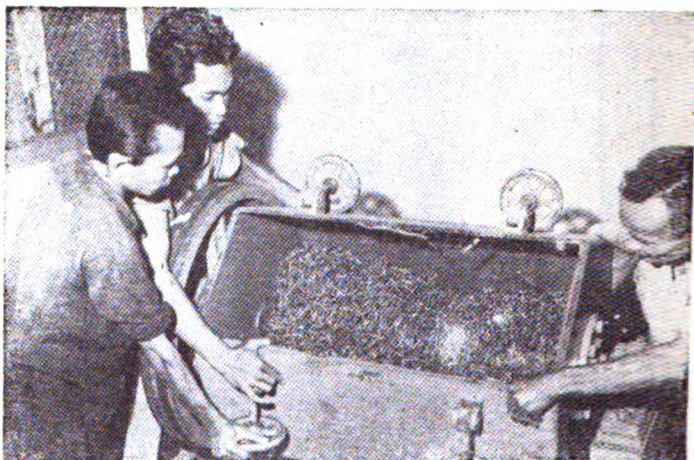
Tjat jang telah siap untuk dipakai.

J.M. Menteri Deperindra mengadakan penindjauan ke Perusahaan2 Keramik.
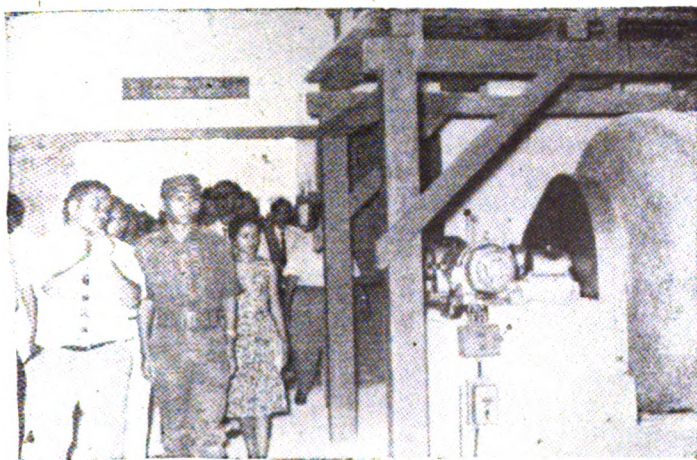
J.M. Menteri Deperindra mengadakan penindjauan ke Perusahaan2 Keramik.

J.M. Menteri Deperindra Mengadakan Penindjauan ke Perusahaan-2 Keramik.
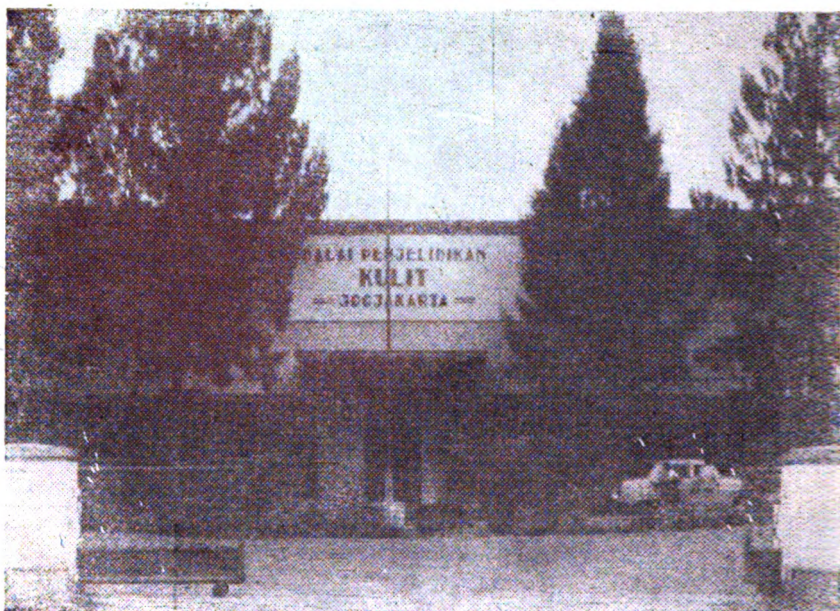
Pabrik Penjamakan Kulit.

J.M. Menteri Deperindra sedang mengadakan penindjauan ke Pabrik Penjamakan Kulit.

J.M. Menteri Deperindra sedang mengadakan penindjauan ke Pabrik Penjamakan Kulit.
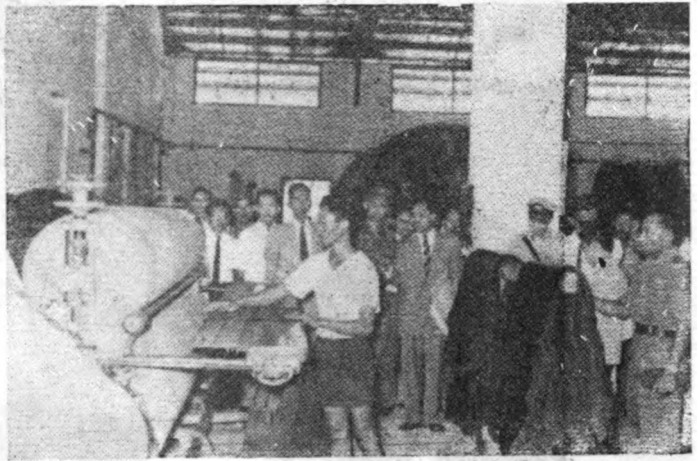
J.M. Menteri Deperindra sedang mengadakan penindjauan ke Pabrik Penjamakan Kulit.

Kulit sedang diolah di Pabrik Penjamakan Kulit.
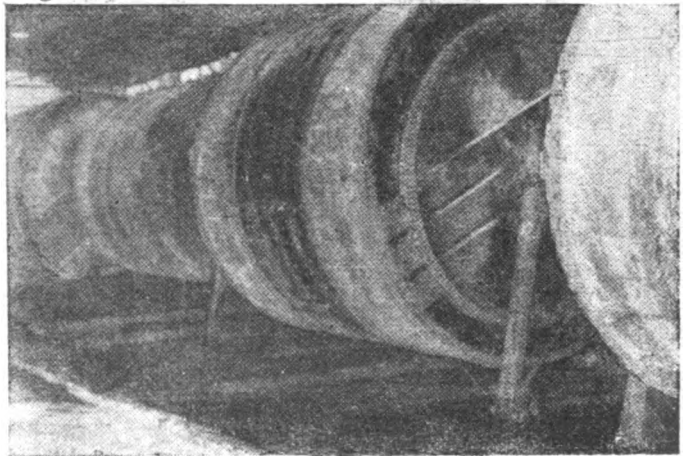
J.M. Menteri Deperindra mengadakan penindjauan ke Pabrik Sepatu.

Alat-alat olah-raga jang dibikin dari kulit.
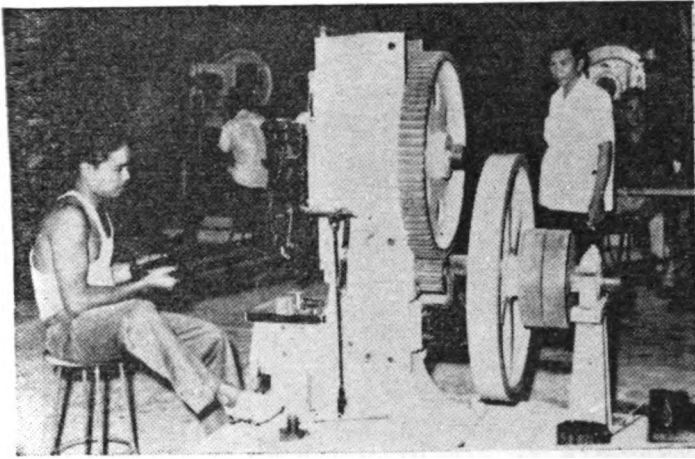
Perusahaan Assembling Sepeda N.V. Lho Nga Coy.
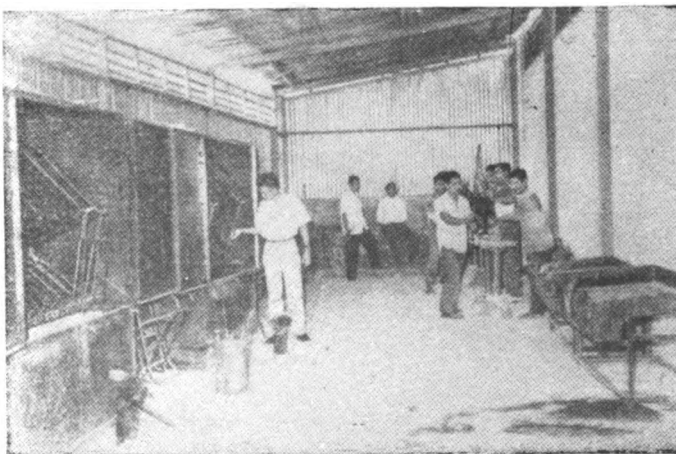
Perusahaan Assembling Sepeda N.V. Lho Nga Coy.

Perusahaan Assembling Sepeda N.V. Lho Nga Coy.

Perusahaan Assembling Sepeda N.V. Lho Nga Coy.
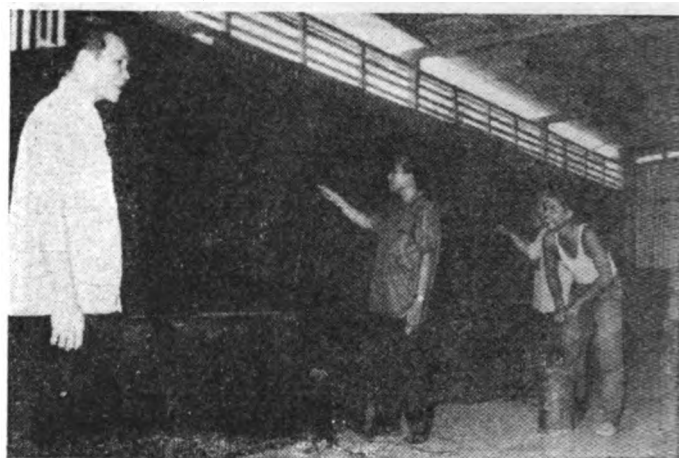
Perusahaan Assembling Sepeda N.V. Lho Nga Coy.
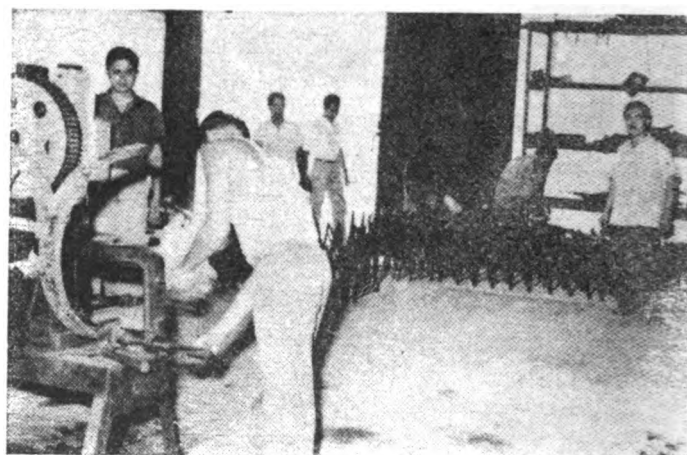
Perusahaan Assembling Sepeda Ganesha.
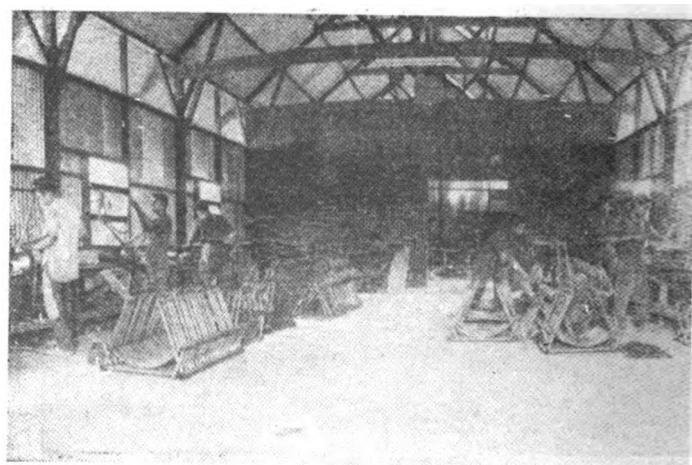
Pabrik barang barang email P.T. Indonesia Enamil Factory Ltd.
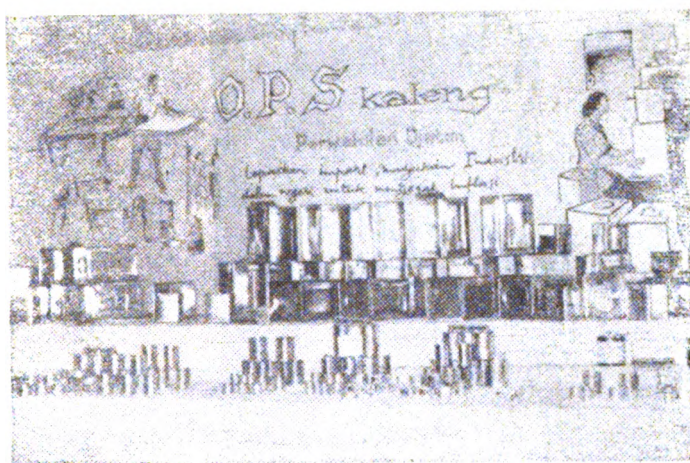
Hasil barang-barang kaleng dari Pabrik Kaleng.

Pabrik Penjulingan Alkohol.
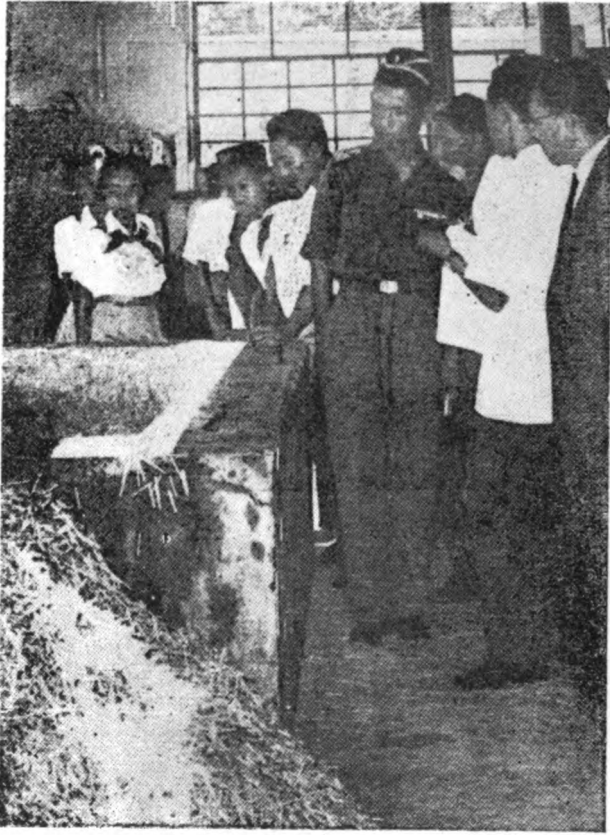
J.M. Menteri Deperindra sedang mengadakan penindjauan ke Pabrik Korek Api.

Pabrik Plastik jang menghasilkan sikat gigi.

Pipa2 dari Plastik.

J.M. Menteri Deperindra sedang menindjau ke Pabrik Plastik P.T. Prakarsa Plastik.

J.M. Menteri Deperindra mengadakan penindjauan ke Perusahaan Keradjinan Tangan „Pajung".
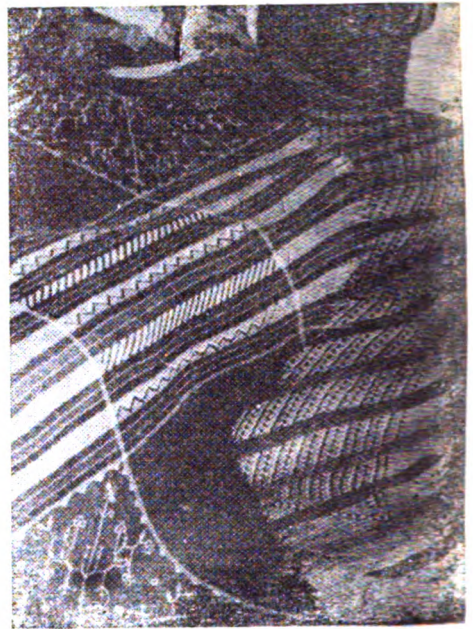
Para Ibu² sedang mengerdjakan pekerdjaan tangan.

Pohon pandan jang daunnja dipakai untuk keradjinan tangan.
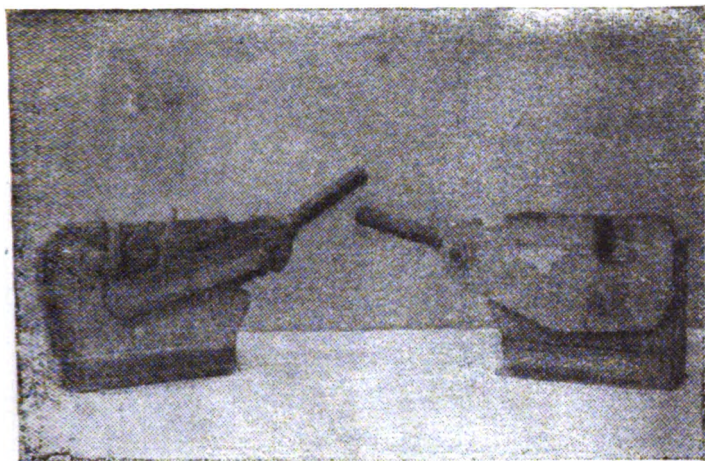
Alat pemotong besi
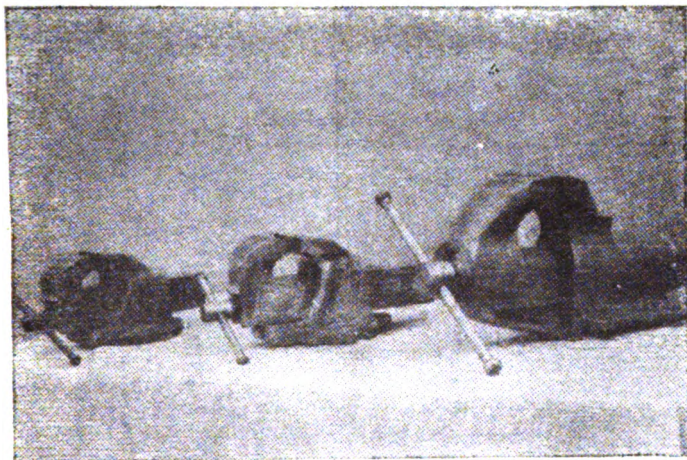
Bank schoef
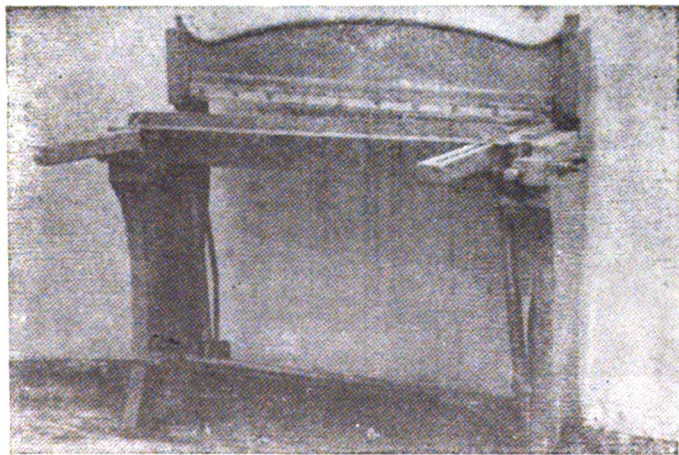
Hasil Produksi dalam negeri „Tjahaja Surabaja"
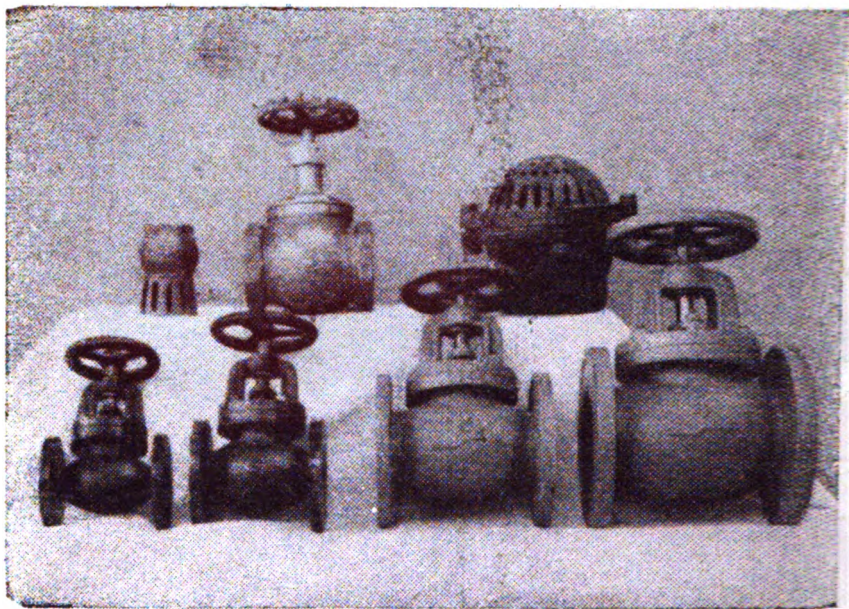
Hasil produksi dalam negeri „TJAHAJA SURABAJA".
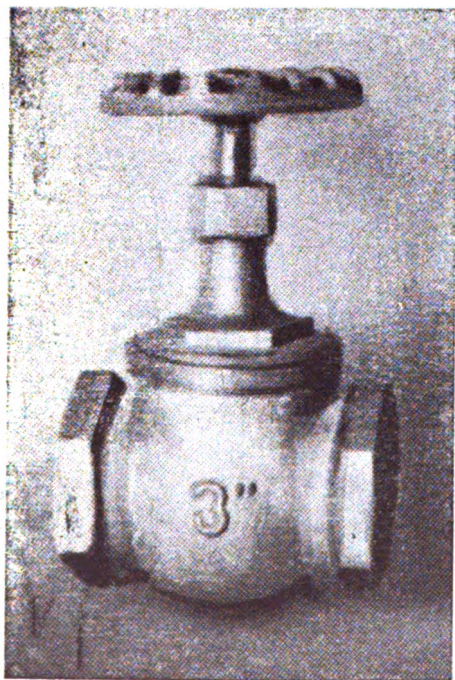
Ploegkraan.
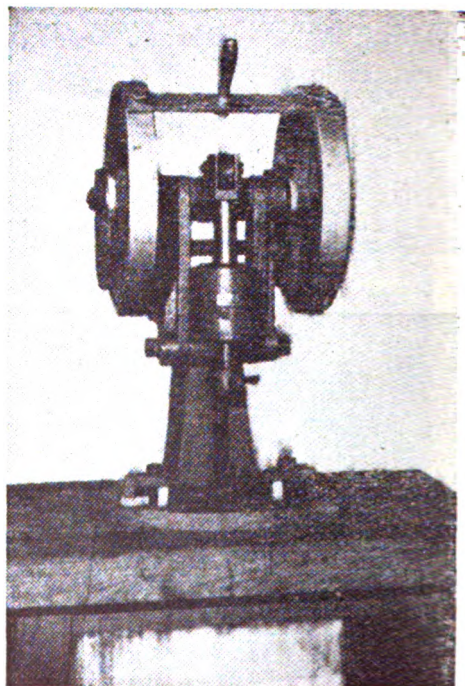
Pompa Centrifugal.
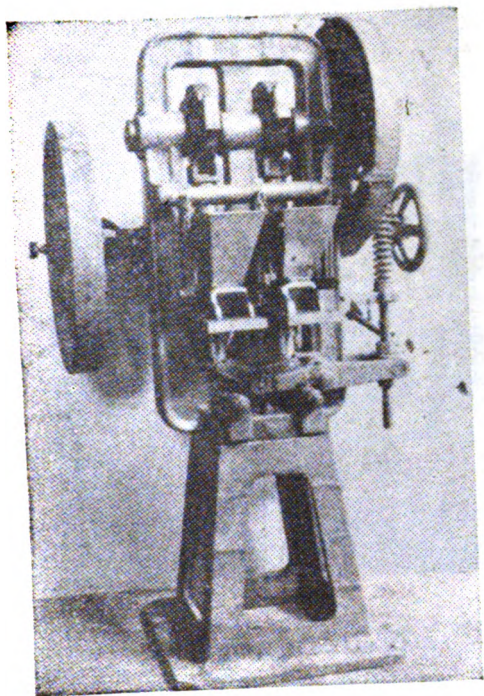
Mesin Tablet.
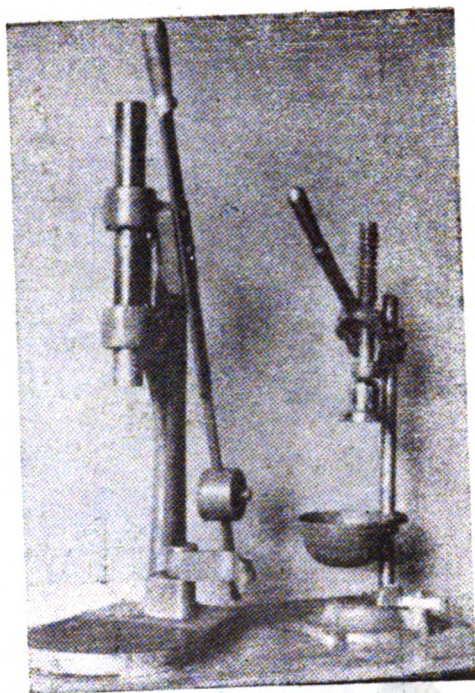
Mesin Tablet.
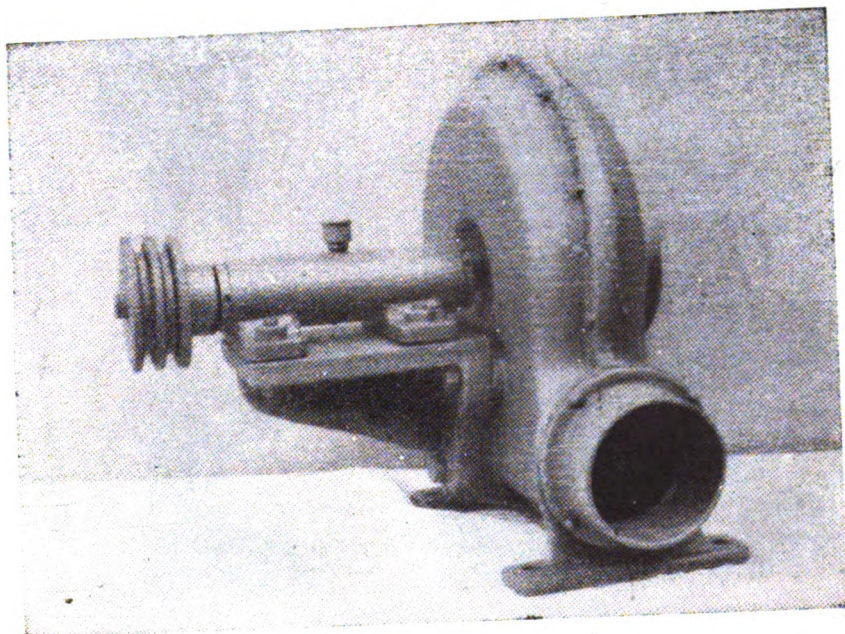
Pompa Centrifugal.
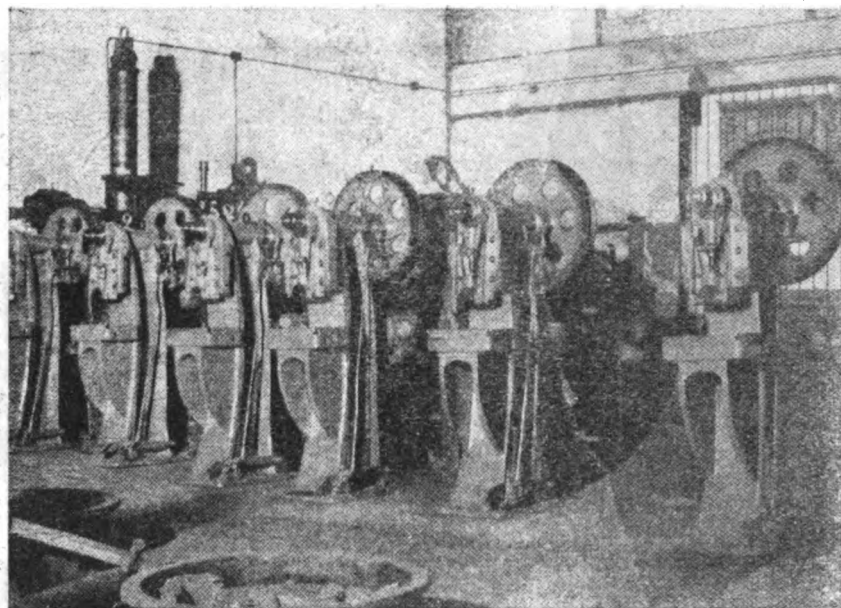
Mesin Pres Logam
hasil produksi dalam negeri „TJAHAJA SURABAJA".
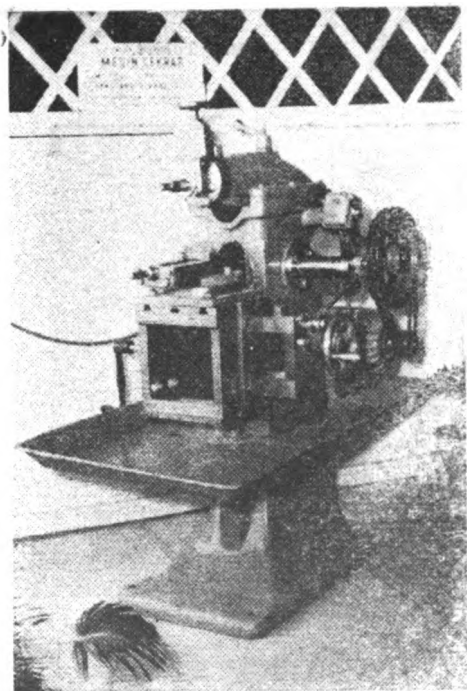
Mesin Sekrap sasil produksi dalam negeri „TJAHAJA SURABAJA".
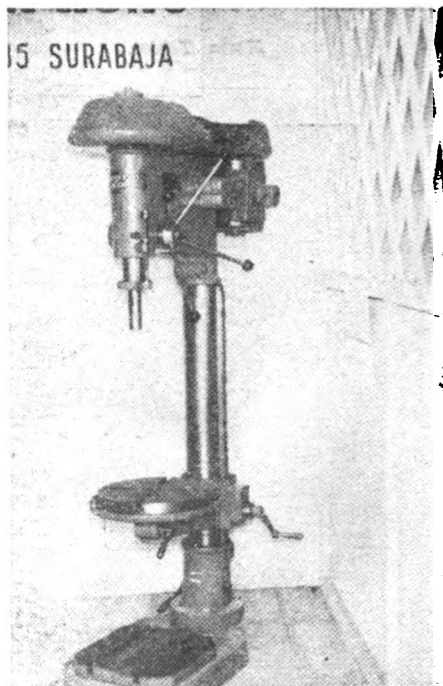
Mesin Bor Listrik hasil produksi dalam negeri „TJAHAJA SURABAJA".